PLN
Nusantara Power

DRIVING **ENERGY TRANSITION** TO DELIVERING **VALUE CREATION EXCELLENCES**

Mendorong Percepatan Transisi Energi untuk Memberikan Value Creation Terbaik

Annual Report
Laporan Tahunan
2022

DRIVING **ENERGY TRANSITION** TO DELIVERING **VALUE CREATION EXCELLENCES**

Mendorong Percepatan Transisi Energi untuk Memberikan *Value Creation* Terbaik

Perubahan iklim membawa tantangan baru sekaligus peluang baru bagi PLN Nusantara Power (PLN NP). PLN NP telah menegaskan komitmennya untuk melakukan transisi energi menuju bebas netral (Net Zero Emission-NZE) sebagaimana dituangkan dalam penyusunan roadmap transisi energi.

Pembentukan Subholding Generation Company (Gencol) merubah struktur dan tanggung jawab PLN NP menjadi lebih fokus dalam mendukung upaya transisi energi dan lebih jauh meningkatkan keunggulan operasional dan optimalisasi portofolio pengelolaan listrik yang andal dan terjangkau. Disamping itu menjadikan PLN NP menjadi lebih agile dalam mengambil keputusan dan streamlining proses bisnis bisnis berbasis pemisahan yang jelas antara peran strategis dan operasional. Melalui percepatan transisi energi, PLN NP optimis mampu memberikan value creation terbaik dan mencapai visi menjadikan perusahaan pembangkitan tenaga listrik terdepan dan terpercaya dalam bisnis energi berkelanjutan di Asia Tenggara berkapasitas 33,7 GW.

Climate change results in new challenges and also new opportunities for PLN Nusantara Power (PLN NP). PLN NP has confirmed its commitment to energy transition towards carbon neutral (Net Zero Emission-NZE) as explained in the formulation of the energy transition roadmap.

The formation of the Subholding Generation Company (Gencol) changed the structure and responsibilities of PLN NP to be more focused on supporting energy transition efforts and further enhancing operational excellence and optimizing the portfolio of reliable and affordable electricity supply. Furthermore, it also is to be PLN NP to be more agile in making decisions and streamlining business processes since the strategic and operational roles are clearly separated. Through accelerating the energy transition, PLN NP is optimistic to be able to provide the best value creation and achieve its vision of becoming a leading and trusted power generation company in the sustainable energy business in Southeast Asia with a capacity of 33,7 GW.

Kesinambungan Tema
Theme Continuity

2021

"Energi" dan "Energi" menjadi kata kunci yang akan membawa PJS mempertuat kolaborasi dengan segenap pemangku kepentingan dalam membuka peluang pengembangan energi hijau dan bersih. "Melalui ini PJS untuk Go to Market dengan memperluas peluang potensi bisnis "Storied EAVI" baik di dalam negeri maupun di luar negeri. "Energi" and Energy are keywords that will bring PJS to strengthen collaboration with all stakeholders in supporting green and clean energy development. It's time for PJS to Go to Market by expanding "Storied EAVI" business potential opportunities both domestically and abroad.

2020

Kami telah melakukan transformasi untuk menjaga agility dan semangat adaptasi yang berkesinambungan dengan mengoptimalkan core competency dan bisnis yang menjunjung tinggi prinsip tata kelola, kepatuhan dan pengelolaan risiko yang baik. Dengan melakukan segala sesuatu dengan baik, lebih baik dan lebih baik lagi untuk menjadi yang terbaik kelak akan dapat mewujudkan aspirasi kita untuk menjadi perusahaan energi terpercaya, terdepan, dan terbaik di Indonesia maupun regional.

We have undertaken transformation to maintain agility and spirit of sustainable adaptation by optimizing core competencies and innovation upholding the principles of good governance, compliance and risk management. By performing everything well, better and even better, to be the best in the future, it will be able to realize PJSBT's vision aspirations to become a trusted, leading, and best energy company in Indonesia and regionally.

2019

2018

Daftar Isi
Content

[illegible]	1
[illegible]	6
[illegible]	10
[illegible]	12

Pendahuluan
Introduction

[illegible]	20
[illegible]	22
[illegible]	24
[illegible]	40
[illegible]	44
[illegible]	50
[illegible]	54

Laporan Kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan
Report to Shareholders and Stakeholders

[illegible]	60
[illegible]	66
[illegible]	104
[illegible]	108

Profil Perusahaan
Company Profile

Identitas Perusahaan Corporate Identity	110
Riwayat Singkat Perusahaan Brief History	112
Bidang Usaha Business Line	118
Produk dan Layanan Products and Services	118
Sistem Pengelolaan Tenaga Listrik Scheme of Electricity Transmission	120
Visi, Misi dan Budaya Perusahaan Vision, Mission and Corporate Culture	121
Struktur Organisasi Organizational Structure	124
Perubahan Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Changes in the Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors	127
Profil Dewan Komisaris Profile of the Board of Commissioners	129
Profil Direksi Profile of the Board of Directors	146
Jumlah dan Komposisi SDM Number and Composition of HR	162
Pengembangan Kompetensi SDM HR Competency Development	166
Struktur dan Komposisi Pemegang Saham Structure and Composition of Shareholders	170
Struktur Grup PLN Nusantara Power Group Structure of PLN Nusantara Power	172
Profil dan Ikhtisar Kinerja Entitas Anak, Entitas Cucu, Asosiasi dan Ventura Bersama Profile and Performance Overview of Subsidiaries, Second-tier Subsidiaries, Associates and Joint Ventures	178
Wilayah Operasional Operational Areas	188
Alamat Kantor Pusat, Kantor Perwakilan dan Unit Usaha Address of Head Office, Representative Office and Business Unit	200
Lembaga dan Profesi Penunjang Supporting Institutions and Professions	203
Kronologi Pencatatan Saham Chronology of Share Listing	204
Kronologi Pencatatan Obligasi Chronology of Bonds Listing	204
Keanggotaan Asosiasi Association Membership	205
Informasi pada Situs Web Perusahaan Information on the Company's Website	206

Aspek Penting Pendukung Bisnis
Key Aspect of Business Support

Pengukuan Kontribusi Sumber Daya Manusia Strengthening Human Resources Contribution	210
Dukungan Teknologi Informasi Good Support of Information Technology	227
Sistem Manajemen Risiko Terintegrasi Integrated Risk Management System Sistem Manajemen Risiko Terintegrasi Integrated Risk Management System	238
Pengembangan Strategi Manajemen Risiko Development of Risk Management Strategy	240
Optimalisasi Potensi Melalui Pengembangan Usaha Optimizing Potential Through Business Development	240

Analisis dan Pembahasan Manajemen
Management Discussion and Analysis

Analisis Industri Industry Analysis	248
Analisis Operasi Per Segmen Usaha Operational Analysis per Business Segment	257
Profitabilitas Per Segmen Profitability by Segment	286
Analisis Posisi Keuangan Financial Performance Analysis	291
Investasi Modal Bagi Pengembangan Investment in Connectivity Infrastructure	301
Analisis Posisi Keuangan Financial Position Analysis	303
Analisis Arus Kas Cash Flows Analysis	333
Analisis Kemampuan Membayar Utang, Tingkat Kolektibilitas Piutang dan Hasil Keuangan Lainnya Analysis of Solvency, Receivables Collectibility Rate and Other Financial Ratios	335
Struktur Modal Capital Structure	334
Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal Material Commitments for Capital Goods Investment	338
Realisasi Investasi Barang Modal Realization of Capital Goods Investment	343
Perbandingan antara Target dan Realisasi Biaya Comparison between Target and Realization of Company Performance in 2022 and Projection for 2023	347
Kebijakan Dividen Dividend Policy	358
Komitmen Melalui Negara Commitment to the State	360
Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan Manajemen Employee and Management Stock Option Program	363
Informasi Tahun Pencatatan Umum Information on Public Offering Proceeds	362
Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi/Terkait Information on Material Transactions Containing Conflict of Interest and/or Transactions with Affiliated/Related Parties	363
Informasi Material Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi, dan Restrukturisasi Utang/Modal Material Information on Investment, Expansion, Divestment, Acquisition, and Debt/Capital Restructuring	371
Perubahan Kebijakan Akuntansi Changes in Accounting Policy	372
Perubahan Peraturan dan Dampaknya terhadap Perusahaan Regulatory Changes and the Impacts on the Company	376
Informasi dan Fakta Material Setelah Tanggal Laporan Akuntan Material Information and Facts after the Accountant's Report Date	382
Informasi Keuangan yang Mengandung Muatan Luar Biasa dan/atau Tanpa Pos Financial Information Containing Extraordinary and/or Rare Items	383
Key Performance Indicator dan Tingkat Kepatuhan Key Performance Indicator and Company Compliance Level	383
Informasi Perkembangan Usaha Business Continuity Information	384
Dampak Perubahan Harga terhadap Pendapatan dan Laba Perusahaan Impact of Price Changes on Company Revenue and Profit	384
Aspek Pemasaran dan Pangsa Pasar Marketing and Market Share Aspect	386
Prospek Usaha Business Prospect	394

Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Implementation of Governance	436
Struktur Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Structure	442

Hasil Untuk Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders 445

Dewan Komisaris
Board of Commissioners 451

Direksi
Board of Directors 470

Hubungan Afiliasi, Keputusan Bersama Mengenai Hubungan Para Dewan Komisaris, dan Direksi
Affiliation, Share Ownership, and Joint Decisions of the Board of Commissioners and the Board of Directors 488

Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi
Policy on the Composition Diversity of the Board of Commissioners and the Board of Directors 497

Nominasi dan Remunerasi Dewan dan Dewan Komisaris
Nomination and Remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners 498

Sekretaris Dewan Komisaris
The Board of Commissioners' Secretary 507

Komite Audit
Audit Committee 511

Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee 523

Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan
Risk Management and Compliance Committee 535

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary 547

Audit Internal
Internal Audit 554

Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System 569

Audit Eksternal
External Auditor 573

Manajemen Risiko
Risk Management 577

Sanksi dan Penyelesaian
Code of Conduct 595

Kepatuhan Anti Korupsi
Anti-Corruption Policy 608

Whistleblowing System
Whistleblowing System 625

Perkara Hukum dan Sanksi yang Dikenakan Kepada Perusahaan
Legal Cases and Sanctions Imposed on the Company 633

Pengadaan Barang dan Jasa
Procurement of Goods and Services 637

Informasi dan Data Perusahaan
Company Information and Data 652

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

Strategi Berkelanjutan
Sustainable by Strategy 640

Kinerja Berkelanjutan Aspek Keuangan
Sustainable by Performance of Economic Aspect 645

Kinerja Berkelanjutan Aspek Lingkungan
Sustainable by Performance of Environmental Aspect 658

Kinerja Sosial
Social Performance 671

Laporan Berkelanjutan
Sustainability Report 697

Laporan Keuangan Audited
Audited Financial Statement

Laporan Keuangan Audited Tahun 2022
Audited Financial Statement of 2022 709

Lampiran
Appendix

Referensi SGMK No. 14/SGMK.04/2022 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten
Reference to SEGMK No. 14/SEGMK.04/2022 regarding the Form and Content of the Issuer's Annual Report 838

Transformasi PJB Menjadi PLN Nusantara Power

Transformation of PJB into PLN Nusantara Power

PLN Nusantara Power

Tahun 2021, tepat di usia Perusahaan yang ke-27 tahun, Perusahaan siap meningkatkan kontribusi dalam industri pembangkitan tenaga listrik. Pada tanggal 23 September 2021, **PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB)** bertransformasi menjadi Subholding PT PLN (Persero) yaitu **PT PLN Nusantara Power (PLN NP)** sebagai Generation Company 1 (GenCo-1).

Kontribusi PLN NP menjadi elemen strategis dalam pengelolaan aset negara yang selama ini menjadi tiri dapat dioptimalkan PLN dalam melistrik nusantara. Dengan 3 (tiga) Subholding PLN lainnya (7) yang ini telah menjelma menjadi PLN NP akan saling bersinergi bersama, dalam memaksimalkan cadar pasar, bisa PLN ke depan PLN NP mengelola aset pembangkitan di seluruh Indonesia dengan total kapasitas sebesar **33.713 MW pada tahun 2025** dan **berkontribusi 32%** dari **kapasitas Terpasang pembangkit secara nasional sebesar 72.728 MW.**

Perubahan logo dan nama Perusahaan menjadi salah satu elemen aspek terpenting transformasi PLN NP menjadi Subholding PLN. Selain itu beberapa penyesuaian strategis dilakukan mempertimbangkan aturan dan kompleksitas Perusahaan saat ini seperti perubahan struktur organisasi termasuk perubahan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi.

2021 coincides the 27th year of the Company, we are ready to improve contribution to the power generation industry. On September 23, 2021, PT **Pembangkitan Jawa Bali (PJB)** transformed into a Subholding of PT PLN (Persero), namely **PT PLN Nusantara Power (PLN NP)** as Generation Company 1 (GenCo-1).

PLN NP's contribution is knowledge being strategic in managing state assets which have been the front line of PLN operations in providing electricity to the archipelago. Together with 3 (three) other PLN Subholdings (7) which is currently transformed into PLN NP will be interconnected, especially in maximizing PLN business supply-demand gaps, hence **PLN NP manages generation assets in all over Indonesia with a total capacity of 33,713 MW in 2025 and contributes 32%** of the national installed capacity of 72,728 MW.

Change in the Company's logo and name is one of the external manifests of the PLN NP transformation into a PLN Subholding. Moreover, PLN NP also adjusts various strategic considering the current size and complexity of the Company, such as changes in the organizational structure, including changes in the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Keunggulan PLN Nusantara Power

PLN Nusantara Power's Excellence

Implementasi *Digital Power Plant*

Implementation of Digital Power Plant

Penerapan GCG Terbaik di PLN Grup

The Best GCG Implementation in the PLN Group

Pioneer: Implementasi *Biomass Cofiring*

Pioneer: Implementation of Biomass Cofiring

Kinerja Perusahaan Asosiasi Unggul melalui Skema Co-Investment

Excellent Performance of The Associates Through the Co-Investment Scheme

PLN NP berhasil mengimplementasikan skema co-investment atau kerja sama investasi berupa pencatatan saham yang dikeluarkan oleh perusahaan asosiasi dari transaksi investasi tambahan yang dilakukan oleh induk perusahaan (Co-CI) Tahun 2022.

PLN NP has succeeded in implementing a co-investment scheme or investment cooperation with the associates as evidenced by the increased performance of the associates and being able to contribute a profit of Rp220.4 billion in 2022.

Peluncuran CSIRT Pertama di Sektor Energi dan Sumber Daya Alam

Launching of the Initial CSIRT in the Energy and Natural Resources Sector

PLN NP telah melaksanakan transformasi digital dan mengawali transformasi digital cybersecurity dengan SOAR melalui pembentukan Computer Security Incident Response Team (CSIRT).

PLN NP has strengthened cyber security and supported the digital transformation to collaboration with SOAR through the launch of the Computer Security Incident Response Team (CSIRT).

Pengembangan PLTS Terapung Terbesar di Asia Tenggara

Development of the Biggest Floating SPP in Southeast Asia

Floating PV Cirata dengan kapasitas 145 MW ini terintegrasi di Pumpahydro yang memproduksi listrik menggunakan energi bersih sebesar 245 GWh per tahun dan terhubung dengan sistem interkoneksi 150kV di Regional Jawa Madura Bali.

Floating PV Cirata with a capacity of 145 MW is located in 11 reservoirs which is projected to produce 245 GWh of clean energy per year and is connected to a 150kV electricity system in the Java Madura Bali Region.

PLN NP Melistriki Hingga Daerah Terpencil melalui Pembangkit EBT

PLN NP Distributes Electricity to the Remote Areas through NRE Power Plant

PLN NP bersama PLN UID Jawa Timur akan segera merealisasikan aliran listrik pada 4 pulau terpencil di provinsi Jawa Timur melalui pembangunan PLTS tersebut dari Pulau Gili Ketapang, Pulau Kangean, Pulau Gadungan Besar, Pulau Sepanjang Besar, Pulau Sadulun dan Pulau Saudai.

PLN NP together with PLN UID East Java will soon provide electricity to 4 remote islands in East Java province through the SPP power plant, including Gili Ketapang Island, Kangean Island, Sadulang Besar Island, Sepanjang Besar Island, Sadulun Island and Saudai Island.

Pendahuluan

Introduction

Komitmen dalam Mendukung Percepatan Transisi Energi Menuju PLN Nusantara Power Berkelanjutan

Commitment in Supporting the Acceleration of the Energy Transition Towards Sustainable PLN Nusantara Power

PLN NP memantapkan posisinya sebagai subholding pembangkit listrik terbesar di Asia Tenggara. Guna mewujudkan visinya untuk menjadi perusahaan terdepan dan terpercaya dalam bisnis energi berkelanjutan di Asia Tenggara, PLN NP gencar melakukan terobosan di bidang energi baru dan terbarukan (EBT), diantaranya mempelopori co-firing sebagai upaya untuk menghijaukan PLTU dan mengembangkan sejumlah pembangkit EBT. Inisiatif dalam menghadirkan green energy semakin mengaskan komitmen PLN NP untuk tidak hanya memproduksi listrik yang andal namun juga listrik yang berlandaskan asas lingkungan.

PLN NP strengthens its position as the largest power plant subholding in Southeast Asia. In the framework to realize its vision of becoming a leading and trusted company in the sustainable energy business in Southeast Asia, PLN NP is aggressively making breakthroughs in the field of new and renewable energy (NRE), including pioneering co-firing as the effort for green power plants and developing a number of NRE power plants. Initiatives in presenting green energy further strengthens PLN NP's commitment to not only producing reliable electricity but also electricity based on environmental principles.

Siap Memimpin Transformasi EBT di Indonesia melalui Pengembangan PLTS Terapung Cirata

Ready to Lead NRE Transformation in Indonesia through the Development of Cirata Floating SPP

PLN EBT terus melakukan berbagai upaya dalam mewujudkan transformasi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di Indonesia, mulai dari pengolahan biomassa sebagai co-firing hingga pengembangan pembangkit-pembangkit berenergi hijau yang terus dilakukannya. Salah satunya pengembangan PLTS Terapung Cirata yang berkapasitas 145 MW dan menjadi PLTS terapung pertama di Indonesia dan memiliki kapasitas terbesar di Asia Tenggara.

PLTS Terapung Cirata yang memanfaatkan area seluas kurang lebih 200 Hektar di Waduk Cirata ini akan memasok listrik untuk 50.000 rumah serta menyerap hingga kurang lebih 1.800 orang. PLTS Terapung ini termasuk ke dalam energi CO2 yang ramah lingkungan, sehingga kedepannya PLTS ini akan mengurangi hingga 214.000 ton emisi CO2. Dengan tambahan 9,7 % ini dapat mendorong kontribusi bauran EBT sebesar 23% di tahun 2025 sekaligus menjadi program strategis dalam Transformasi PLN lainnya di pilar **GREEN**.

PLN EBT continues to make various efforts to lead the New and Renewable Energy (NRE) transformation in Indonesia, starting from managing biomass as co-firing to developing the green energy power plants, including the development of Cirata Floating SPP with a capacity of 145 MW and is the first floating SPP in Indonesia and has the largest capacity in Southeast Asia.

Cirata Floating SPP, which occupies an area of approximately 200 hectares in the Cirata Reservoir, will supply electricity to 50,000 people houses and absorb up to 1800 workers. This Floating SPP is included in environmentally friendly CO2 energy, so that this SPP operation will reduce up to 214,000 tons of CO_2 emissions. The SPP numbers encourages the achievement of the NRE mix by 23% in 2025 as well as being a strategic program in PLN Transformation, especially in the **GREEN** pillar.

Menanam Kaliandra, Wujud Komitmen PLN Nusantara Power Sediakan Energi Hijau

Planting Calliandra, Manifestation of PLN Nusantara Power's Commitment to Providing Green Energy

PLN NP senantiasa mendukung upaya Pemerintah dalam menurunkan emisi gas rumah kaca dan mencapai Net Zero Emission di tahun 2060. Salah satu energi adalah waste yang menghasilkan CO2 dan yang paling mahal dan ini merupakan kesulitkhangan dalam mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC). Salah satu langkah konkret yang dilakukan PLN NP adalah melalui transisi energi untuk menuju zero ekspansi low carbon emission untuk energi dan co-firing menjadi salah satu solusi untuk mengatasi isu tersebut.

PLN NP wants to start implementing Kaliandra plantation 2,111,740 pohon dengan luas lahan 711,72 ha di tanaman 35,95 Ltuda dan sejak 2021, sehubungan PLN NP telah menanam tanaman jenis kaliandra di lahan seluas 16 ha. Pada Desember 2022, PLN NP mulai menanam tanaman pohon kaliandra sebanyak 167.000 pohon dari lahan seluas 72,78 ha yang akan digunakan sebagai penggantii bahan baku untuk co-firing Pembangkit Lemis Tenaga Uap (PLTU). Hingga 2023, PLN menargetkan program co-firing ini bisa dilakukan di 52 lokasi PLTU dengan total kapasitas 38.164 MW yang membutuhkan biomassa 10,3 juta ton/tahun.

PLN NP merupakan yang pertama di PLN Group dalam melakukan transformasi PLTU dengan memanfaatkan wast lahan di sekitar PLTA Cirata menjadi hutan tanaman energi sembagai bahan co-firing di PLTU dan menjadi pusat renewable energi di PLN Group. Diharapkan PLTA Cirata juga akan dikangun instalasi pengolahan biomassa dengan penggunaan nilai TKDN 40 persen yang dapat memproduksi serabut berbut kayu dengan prosess produksi sebesar 100.000 ton dan total luas lahan. Harapnya produksi tersebut dapat digunakan sebagai bahan baku co-firing oleh PLTU Indramayu.

PLN NP is committed to supporting the Government's efforts to reduce greenhouse gas emissions and achieve Net Zero Emissions in 2060 is actively pursuit the climate changes. Energy is a waste that produces CO2, and is the most expensive in terms of achieving a balance on the Nationally Determined Contributions (NDC) target. PLN NP applied this was at the economic ideas through the energy transition towards zero or low carbon emissions for energy, and co-firing is one of the solutions to address this issue.

PLN NP already prepared 2,111,740 calliandra trees with a land area of 711.72 ha in the Cirata Hydropower area and since 2021, in each PLN NP has planted calliandra plants in an area of 16 ha. In December 2022, PLN NP began harvesting 167,000 calliandra trees from an area of 72.78 ha which will be used as a partial substitute for raw materials for the co-firing of the CFPP Until 2023, PLN targets that the co-firing program can be carried out in 52 CFPP locations with a total capacity of 38,164 MW which requires 10.3 million tons of biomass/year.

PLN NP is the first to the PLN Group to support PLN transformation by turning the coal waste around the Cirata Hydropower Plant into energy plantations supporting co-firing materials at the CFPP and becoming a renewable energy center in the PLN Group. In the Cirata Hydropower area, a biomass processing installation will also be built among 100 ha or up 40 percent which can produce woodchi with a projected production of 100,000 tons of the total land area. Later woodchi production can be used as raw material for co-firing by Indramayu CFPP.

Hadirkan Energi Hijau untuk Indonesia Bersih Melalui Implementasi Co-firing

Presenting Green Energy for Clean Indonesia Through Optimized
of Co-firing Implementation

PLN IP terus mengupayakan co-firing pada PLTU dengan menggunakan biomassa bahkan berbagai jenis biomassa yang digunakan menggunakan amonia. Melalui implementasi co-firing pemerintahan EBT dapat dilaksanakan secara cepat tanpa perlu adanya pembangunan pembangkit baru, hingga saat ini terdapat tiga jenis konfigurasi co-firing yang telah digunakan, yaitu direct co-firing, indirect cofiring, dan parallel co-firing.

Direct co-firing pada konfigurasi ini biomassa sebagai bahan bakar sekunder) dimasukkan bersamaan dengan batubara (sebagai bahan bakar primer) ke dalam boiler yang sama. Direct co-firing lebih umum digunakan karena paling murah. Sementara untuk konfigurasi indirect co-firing biomassa pada proses gasifikasi (biomassa di mana gas hasil gasifikasi biomassa kemudian dicampurkan ke dalam pembakar dan dibakar bersama batubara. Sedangkan Parallel co-firing memisahkan suatu pembakar dan boiler terpisah untuk biomassa, di mana hasil pembakaran dari biomassa akan membangkitkan uap yang berbeda akan digunakan pada untuk power plant pembakaran batubara.

Sampai dengan tahun 2021, implementasi co-firing telah diimplementasikan di 31 pembangkit dan direncanakan di 20 pembangkit. Salah menggunakan substitusi bahan bakar dari biomassa. Hal juga biomassa mengembangkan co-firing menggunakan ammonia yang berbeda sama dengan IHI Corporation asal Jepang.

PLN NP telah merancang target produksi energi hijau dari co-firing 250,387 MWh atau setara dengan reduksi emisi karbon 213,900.00 MT. Perancapan co-firing pada PLTU merupakan upaya PLN NP dalam meningkatkan kontribusi target bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 23% pada 2025 serta merupakan suatu quick win untuk penyediaan penggunaan energi hijau, hanya biaya investasi tinggi serta pemanfaatan sumber energi lokal sekitar wilayah PLTU.

PLN NP continues to promote CCFP co-firing using biomass and even it is planned to use ammonia in the future. Through the co-firing, the NRE usage can be carried out quickly without the need for the construction of new power plants. As of now, there are three types of co-firing configurations that have been used, namely direct co-firing, indirect co-firing, and parallel co-firing.

Direct co-firing in this configuration, biomass (as a secondary fuel) is introduced together with coal (as a primary fuel) into the same boiler. Direct co-firing is more commonly used due to the lower price. Meanwhile, indirect co-firing configuration refers to the biomass gasification process, where the gas from the gasification of the biomass is then fed into the burner and burned with coal. Whereas Parallel co-firing involves a separate burner and boiler for biomass, where the combustion products of the biomass will generate steam which will then be used in the coal-burning power plant circuit.

Until 2021, the co-firing has been commercialized at 31 power plants and funded in 20 power plants. Apart from using substitute fuel from biomass, PLN NP also plans to develop co-firing using ammonia in collaboration with IHI Corporation from Japan.

PLN NP planned its green energy production target of co-firing 250,387 MWh or equivalent to reducing carbon emissions of 213,900.00 MT. Co-firing application at CFPP in PLN NP's effort to increase the contribution of the New Renewable Energy (NRE) mix target to 23 percent in 2025 and is a quick win for accelerating the use of green energy, without high investment costs and the utilization of local energy sources around the CCPP area.

Green Power Solution, Percepat Transisi Energi melalui Proyek Solar Panel

Green Power Solution, Accelerating Energy Transition through Solar Panel Projects

Melalui layanan *Green Power Solution*, PLN NP memiliki keunggulan di bidang operation dan maintenance. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) ini juga bertujuan untuk mewujudkan transisi energi di Indonesia melalui Proyek Solar Panel.

Through the Green Power Solution service, PLN NP has advantages in the operation and maintenance realm of Solar Power Plants (SPP). It also purposes to realize the energy transition in Indonesia through the Solar Panel Project.

Beberapa proyek PLTS siap PLN NP yang berhasil antara lain, yaitu PLN UP3 Makassar Selatan dengan perbaikan dan upgrade inverter PLTS Tanakeke dan Kadingpaong, PLN UP3 Makassar Utara dengan jasa Assessment PLTS Dalang Lampa & PLTS Sakuma, PLN UP3 Bacbay dengan jasa Perbaikan Optimalisasi PLTS Kapota, serta PLN UPK Sulutenggo dengan rehabilitasi solar gewalnya.

PLN NP has some of the successful Rooftop SPP projects, including PLN UP3 South Makassar with the repair and upgrade of the Tanakeke and Kadingpaong SPP inverters; PLN UP3 North Makassar with Dalang Lampa SPP & Sakuma Assessment services; SPP PLN UP3 Bacbay with Kapota SPV Optimization Repairment services; as well as PLN UPK Sulutenggo with the rehabilitation in its solar panels.

Komitmen PLN NP untuk menghadirkan listrik yang andal dan ramah lingkungan kuasa tetapi ditujukan bagi wilayah yang blok terpencil, aman. Beberapa PLN, namun juga menjangkau hingga wilayah kepulauan terpencil. PLN NP telah menandatangani kontrak dengan PLN untuk mengerjakan Engineering Procurement Construction (EPC) PLTS atap PLN tersebut. Ini seperti pulau tersebut adalah Pulau Gili Iyako, Kemarau, Sadjuang Besar, Jangangbua Utara, Sarbua, dan Saulai.

PLN NP is committed to delivering reliable and environmentally friendly electricity, not only purposed at areas that have been covered by the PLN electricity system, but also reaches out to remote island areas. PLN NP signed a contract with PLN to work on the Engineering Procurement Construction (EPC) of PLN's SPP. The six islands include Gili Iyako, Kemarau, Sadjuang Besar, Jangangbua Utara, Sarbua and Saulai.

Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan, PLN NP Membangun Rumah Tinggal Layak Huni dari FABA

Realizing Sustainable Development, PLN NP Builds Livable Residential Houses from FABA

PLN NP melalui Unit Bisnis Jasa Operation & Maintenance (UBJOM) Pantoni memanfaatkan Fly Ash Bottom Ash (FABA) sisa pembakaran batubara PLTU untuk mengembangkan proyek Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu). FABA merupakan produk sisa dari pembakaran batubara yang memiliki karakteristik material yang beracun dan berbahaya. PLN NP telah bagitu saja mengelakan sisa pembakaran batubara tersebut, tetapi justru berusaha memanfaatkannya menjadi barang yang berguna untuk masyarakat.

Program pemanfaatan FABA ini juga menjadi inovasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar PLTU sejalan dengan target pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) terkait penghapusan kemiskinan (no poverty), serta industri, inovasi dan infrastruktur.

Sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, PLN NP UBJOM Pantoni memanfaatkan limbah batubara menjadi campuran bahan bangunan untuk program CSR Perusahaan. Diantaranya pembangunan Rutilahu, serta peningkatan infrastruktur di sejumlah desa di sekitar PLTU. Salah satunya dengan pembangunan rumah tinggal layak huni (RTLH) di Pantoni, sejak 1Mei. Tahap pertama pembangunan telah dilakukan pada tahun 2021, dan bertambah menjadi 3 unit pada tahun 2022. RTLH ini diperuntukkan bagi masyarakat prasejahtera di kawasan sekitar UP Pantoni. Program ini adalah hasil sinergi bersama PLN NP dan Pemerintah Kabupaten Pantoni dalam usaha pengentasan kemiskinan.

Program CSR/LP Pantoni ini merupakan wujud kontribusi PLN NP dalam pembangunan berkelanjutan (SDGs), yakni pengentasan kemiskinan dan mengangkat kesejahteraan masyarakat.

PLN NP through the Pantoni Operations & Maintenance Services Business Unit (UBJOM) already leverage the Fly Ash Bottom Ash (FABA) from CFPP coal burning residue to develop a livable Residential House (Rutilahu) project. FABA is a by-product of coal combustion with the characteristics of "living and unexploding" material. PLN NP doesn't just ignore the remaining coal burning, but instead (consequently) uses it to become a useful item for the community.

This FABA utilization program is also an innovation to improve the welfare for community in the UPPP surrounding in line with the Sustainable Development Goals (SDGs) related to no poverty as well as industry, innovation and infrastructure.

As the corporate social responsibility, PLN NP Pantoni (UBJOM) leverage coal waste to become a mixture of building materials for the Company's CSR program, including the construction of Rutilahu, as well as improving infrastructure in a number of villages around the CFPP. One of them is the construction of livable houses (RTLH) in Pantoni, East Java. The first phase and has commenced in 2021, and will increase by 3 houses in 2022. This RTLH is intended for underprivileged communities in the area around Pantoni PLTU. The program is the result of a synergy with PLN NP and the Government of Pantoni Regency to address alleviation efforts.

CSR program by Pantoni SLU is manifestation of PLN NP's contribution to sustainable development (SDGs), namely poverty alleviation and raising people's living standards.

Ringkasan Kinerja Utama 2022
Key Performance Highlights

PLN NP berhasil mencatatkan Laba Rp 6,58 triliun. Laba ini merupakan prestasi PLN NP karena melampaui target sebesar 62% dari Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP) tahun 2022 sebesar Rp 4,05 triliun. PLN NP juga menjadi salah satu perusahaan unggulan di PLN Grup yang berhasil membukukan laba investasi dari perusahaan asosiasi melalui co-investment. Pertumbuhan kinerja keuangan PLN NP ini sejalan dengan pertumbuhan Aset Perusahaan yang mengalami kenaikan sebesar Rp 2,76 triliun sehingga kini total aset PLN NP mencapai Rp 174,92 triliun.

PLN NP managed to record a profit of Rp6.58 trillion. This profit is PLN NP achievement because it succeeded the target of 62% of the 2022 Annual Budget and Operational Plan (ABOP) of Rp4.05 trillion. PLN NP is also become one of the leading companies in the PLN Group that has successfully recorded investment returns from associated companies through co-investment. PLN NP's financial performance grew in line with the Company's asset growth which increased by Rp2.76 trillion so the current total assets of PLN NP has reached Rp174.92 trillion.

Rp174,92
Triliun Rupiah
Total Aset
Total Assets

7,7 GW
Kapasitas Pembangkit
Power Plant Capacity

17.064 GWh
Produksi Listrik
Electricity Production

16.379 GWh
Penjualan Energi Listrik
Electric Power Sales

Rp27,20
Triliun Rupiah
Pendapatan Usaha
Operating Revenues

Go Live Implementasi *Digital Power Plant*
Go Live Digital Power Plant Implementation

PLTU CFPP Pelabuhan Ratu
PLTGU CCPP Grati
PLTA HPP Cirata
PLTU CFPP Pulang Pisau
PLTU CFPP Jeranjang
PLTU CFPP Tidore
PLTU CFPP Kendari

Rp6,58
Triliun Rupiah
Laba Bersih
Net Profit

Program Sangat Gold Proper

5

4 Proper Hijau

12 Proper Biru

Jumlah Pegawai
Total Employees

3.034
Orang
Employees

70,4%

Skor Assessment GCG
GCG Assessment Score

95,54

Tingkat Kesehatan Perusahaan
Company Soundness Level

102,88

K3L Terbaik 2022
PT PLN (Persero)
The Best HSE 2022
PT PLN (Persero)

Sebaran Pembangkit
Power Plant Distribution

Sumatera – Kalimantan 349 Unit - 4.494 MW
Jawa Madura Bali 87 Unit - 12.788 MW
Sulawesi 177 Unit - 975 MW

Biaya Pengembangan SDM
HR Development Cost

Rp61,29
Miliar Rupiah

Jumlah Pelatihan
676 Jenis

Jumlah Peserta
10.080 Orang

8.838
Orang Tenaga Ahli
Certified Employees

Prestasi dan Penghargaan Tahun 2022
Achievements and Awards in 2022

Penghargaan Internasional
International Awards

28 Januari 2022
January 28, 2022

Meraih Gelar Juara "GOLD SEAL" dalam Ajang Internasional
Kisma meraih Gelar "GOLD SEAL" kategori sosial media versi pada 7 ajang penghargaan internasional yaitu ITEX (International Innovation & Technology Exhibition) di Malaysia dan ICIEF (Conference, International Invention & Design Expo) di Taiwan, yaitu:
- Pelabuhan Sukses Nusantara
- Pelabuhan Sukses Indonesia-IT
- Aplikasi Sukses Mobile

Gold Medal for "GOLD SEAL" in International Event
Kisma received a gold medal in the "GOLD SEAL" category in 7 international award events, namely ITEX (International Innovation & Technology Exhibition) in Malaysia and ICIEF (Conference, International Invention & Design Expo) in Taiwan, as:
- Pelabuhan Sukses Nusantara
- Pelabuhan Sukses Indonesia-IT
- Aplikasi Sukses Mobile

3 Februari 2022
February 3, 2022

- **Gold Winner** pada ajang "2nd International Creative Content Contest Indonesia" yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) dengan Konten "Kolaborasi Masyarakat Pengelola Pelabuhan untuk Sukses Nusantara".
- **Gold Winner** Pioneer Group untuk Kategori Best Use of Social Media in Content Center 2022.
- **Gold Winner** for the Gold Award Global Content Center Award Indonesia 2022 through an independent review and on-site of the implementation of ITT 2.0 by assessors at the Content Center, the Ministry of Communication and Information Technology (Kominfo).
- **Gold Winner** Content Center Award Global in the category of the Best Use of Social Media in Content Center 2022.

21 Juli 2022
July 21, 2022

Asia Responsible Enterprise Award (AREA) 2022

Penghargaan Asia Responsible Enterprise Award (AREA) diberikan kepada PLN sebagai Perusahaan Pengelola Aset Berkinerja Baik

Asia Responsible Enterprise Award (AREA) 2022

Asia Responsible Enterprise Award (AREA) is awarded to PLN as Company Managing Assets with Good Performance

24 November 2022
November 24, 2022

Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2022

Meraih predikat Gold di ajang Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2022

Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2022

Gold rating achieved at the Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2022

8 Desember 2022
December 8, 2022

Asian Risk Award (ARA) 2022

Merupakan 3 Penghargaan Individual yaitu Asian Risk Award (ARA) 2022 Category Commercial, Risk Management and Compliance (CRC) yang diselenggarakan oleh Enterprise Risk Management Academy (ERMA) dari Singapura

Asian Risk Award (ARA) 2022

3 (three) individual awards, namely the Asian Risk Award (ARA) 2022 in the Commercial, Risk Management and Compliance (CRC) category organized by the Enterprise Risk Management Academy (ERMA) from Singapore

Penghargaan Nasional
National Award

22 Januari 2022
January 22, 2022

Penghargaan Program K3 COVID-19
Penghargaan Program Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 di Tempat Kerja dan Lingkungan Kerja untuk
- UP Bantar (Bantaran)
- UBJOM Paiton (Paiton)
- UBJOM Pacitan (Pacitan)
- UBJOM Tanjung Awar-Awar (Tuban)

COVID-19 K3 Program Award
Occupational Safety and Health Program Award in the Workplace for the Prevention of COVID-19 for
- Bantar (UP Bantar)
- Paiton (UBJOM Paiton)
- Pacitan (UBJOM Pacitan)
- Tanjung Awar-Awar (UBJOM Tuban)

22 Januari 2022
January 22, 2022

Penghargaan Program K3 HIV AIDS (Silver)
Penghargaan Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS di Tempat Kerja dan Lingkungan Kerja untuk
UBJOM Paiton
HIV AIDS K3 Program Award (Silver)
Award for HIV AIDS Prevention and Response Program in the Workplace for the Prevention of HIV AIDS for Paiton (UBJOM)

12 Januari 2022
January 12, 2022

3 Penghargaan Program K3 – Zero Accident
Tiga penghargaan Kementerian dan Lembaga Nasional Program K3 Zero Accident

1. LSP Energi Sertifikasi 21.287.987 jam kerja tanpa kecelakaan kerja sejak 1 November 2014 – 31 Oktober 2021
2. UP Paiton sebanyak 19.711.203 jam kerja Penanganan Kecelakaan kerja sejak tanggal 31 November 2012 sd 31 Oktober 2021
3. UP Paiton sebanyak 14.772.854 jam kerja Penanganan Kecelakaan kerja sejak tanggal 31 Oktober 2014 sd 31 Oktober 2021
4. Unit Pembangkitan Jawa Bali sebanyak 10.406.361 jam kerja Penanganan Kecelakaan kerja sejak tanggal 1 November 2017 sd 31 Oktober 2021
5. UBJOM Tanjung Awar-awar sebanyak 6.123.0 jam kerja Penanganan Kecelakaan kerja sejak tanggal 1 Juni 2018 sd 31 Oktober 2021

3 OHS Program Awards – Zero Incident
Zero Incident Occupational Safety and Health (OHS) Award

1. Award for 21,287,987 working hours without work accident from November 1, 2014 – October 31, 2021
2. Paiton PLTU for 19,711,203 man-hours without work accident from November 30, 2012 to October 31, 2021
3. Paiton II PLTU for 14,772,854 man-hours without work accident from October 30, 2014 to October 31, 2021
4. Paiton OMUS / No. 10,406,361 man-hours without work accident from November 1, 2017 to October 31, 2021
5. Tanjung Awar-awar UBJOM for 6,123,017 man-hours without work accident from June 1, 2018 to October 31, 2021

3 Februari 2022
February 3, 2022

Zero Accident Award Pembangkit Jawa Bagian 2021
Penghargaan Zero Accident Award Pembangkit Jawa Bagian 2021 dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah untuk UBJOM Tanjung Awar-awar

Zero Accident Award for Central Java Province 2021
This Zero Accident Award for Central Java Province 2021 from the Head of the Central Java Provincial Manpower and Transmigration Office for Tanjung Awar-awar

3 Maret 2022

30 Maret 2022

20 April 2022

13 Mei 2022
May 13, 2022

Penghargaan PT (Pemberi)
Penghargaan Program Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 di Tempat Kerja
- (Platinum)
- (Platinum)
- (Platinum)
- (Platinum)
- (Gold)
- (Gold)

Penghargaan (Ministry of Manpower)
COVID-19 Prevention and Control Award Program in the Workplace
- (Platinum)
- (Platinum)
- (Platinum)
- (Gold)
- (Gold)

13 Mei 2022
May 13, 2022

Penghargaan Pengelola PT (Pemberi)
Penghargaan Program Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 di Tempat Kerja dan Vaksinasi Gotong Royong Tahap 1 untuk PT (Pemberi)

Penghargaan (Ministry of Manpower)
COVID-19 Prevention and Control Program Award in the Workplace from the Indonesian Minister of Manpower for Phase 1 PT

23 Mei 2022

May 23, 2022

Program Kemitraan UMK Dan Akademi Kemaritiman

Penghargaan kemitraan UMK dan Akademi Kemaritiman ini

- diberikan kepada sebanyak 26.746.261 jam kerja orang tanpa kecelakaan kerja (*zero accident*) sejak 1 Januari 2016 sd 31 Desember 2021
- diberikan kepada sebanyak 18.218.183 jam kerja orang tanpa kecelakaan kerja sejak 9 Oktober 2015 sd 31 Desember 2021
- diberikan kepada Total Emisi/Gas 3.119.946 jon ekiv orang tanpa kecelakaan kerja sejak 1 Januari 2015 sd 31 Desember 2021
- diberikan kepada sebanyak 1.117.883 jam kerja orang tanpa kecelakaan kerja sejak 1 Juli 2018 sd 31 Desember 2021
- diberikan kepada sebanyak 1.701.121 jam kerja orang tanpa kecelakaan kerja sejak 1 Januari 2018 sd 31 Oktober 2021

Zero Accident Program Akademi Kemaritiman

Zero Accident Awards from the Indonesian Member of Parliament

- Power Energy 26 sebanyak 26.746.261 man-hours without work accident from January 1, 2016 to December 31, 2021
- Indonesia Dredge sebanyak 18.218.183 man-hours without work accident since October 9, 2015 until December 31, 2021
- Total Emission Total Emission sebanyak 3.119.946 man-hours without injury from January 1, 2015 to December 31, 2021
- Tanjung Jati-B sebanyak 1.117.883 man-hours without injury from July 1, 2018 to December 31, 2021
- Jawa Power sebanyak 1.701.121 man-hours without work accident from January 1, 2018 to October 31, 2021

20 Mei 2022

May 20, 2022

ICSB Indonesia Presidential Award 2022

Penghargaan ICSB Indonesia Presidential Award 2022 dari Indonesia Council for Small Business yang diberikan oleh pengusaha, pemilik bisnis dan karyawan terhadap pengembangan usaha mikro, pengusaha kecil, kecil dan menengah yang telah mengalokasikan sebagian dari laba yang telah diperoleh untuk

ICSB Indonesia Presidential Award 2022

The ICSB Indonesia Presidential Award 2022 from the Indonesia Council for Small Business to the parliamentary representative for the contribution to business development owned by micro, small, and medium entrepreneurs, which has managed to allocate some of the profits

22 Juni 2022
June 22, 2022

23 Juni 2022
June 23, 2022

Penghargaan CSR & PDB Award 2022
Penghargaan kepada CSR & PDB (Pengembangan Desa Berkelanjutan) Award 2022 yang diselenggara oleh oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI:

- 20 Piagam kategori Continuous Program Non-Mines Mine-centered
- 20 Piagam kategori Gold untuk Program Lompong Mekaki
- 24 Piagam kategori Gold untuk Program Desa Energi Listrik
- 28 Piagam kategori Gold untuk Program Pemberdayaan UMKM
- 47 Piagam kategori Silver untuk Program Optimalisasi Rumah Pemberdayaan
- 28 Piagam kategori Silver untuk Program Integrated Farming System

CSR & GDP Award 2022
2022 CSR Governance Village Development Award 2022 organized by the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration of the Republic of Indonesia:

- Platinum (5) won Gold for Mines Harmony Pluralism Village Program
- Platinum (5) won Gold for the Mekaki Village Program
- Gold (5) won Gold for Lombok Electric Village Program
- Platinum (5) won Silver for PDB Tanjung Park Program
- (5) Win (5) won Silver for the Medal Silicon Stone Breeding Group Program
- (5) Piagam Award (5) won Winner for the Integrated Farming System Program

14 Juli 2022
July 14, 2022

28 Juli 2022
July 28, 2022

17 Agustus 2022
August 17, 2022

Penghargaan Kelembagaan Pembangunan dan Kebijakannya Wilayah Kerja

- a. Provinsi Lampung, 17 (Dua Puluh Tujuh) Kabupaten/Kota
- a. Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah
- a. Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah

Institutional Development and Policy Awards

- a. Province Lampung, 17 (Seventeen) Regency/City
- a. Province Aceh, North Sumatra, West Sumatra, Riau, Riau Islands, Jambi, South Sumatra, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, West Java, Central Java, Special Region of Yogyakarta, East Java, Bali, West Nusa Tenggara, East Nusa Tenggara, West Kalimantan, Central Kalimantan, South Kalimantan, East Kalimantan, North Kalimantan, North Sulawesi, Gorontalo, Central Sulawesi, West Sulawesi, South Sulawesi, Southeast Sulawesi, Maluku, North Maluku, Papua, West Papua, Southwest Papua, Central Papua, South Papua, Mountain Papua

6 September 2022
September 6, 2022

TOP GRC Awards 2022

Penghargaan TOP GRC Awards 2022 yang diraihnya, yaitu Highest Top Business

- a. Meraih TOP GRC 10x
- a. The Most Committed Leader 2022 - Sang Nyoman Wiratmaja

TOP GRC Awards 2022

TOP GRC Awards 2022 yang diraihnya, yaitu Highest Top Business Magazine

- a. Meraih TOP GRC 10x
- a. The Most Committed Leader 2022 - Sang Nyoman Wiratmaja

4 Oktober 2022
October 4, 2022

Subroto Award 2022
Penghargaan diberikan kepada subholds Holding 2022, yaitu:
- 5 penghargaan Kategori Pembangkitan Ketenagalistrikan (#3)
- 5 penghargaan Kategori Pemanfaatan Energi
- 10 penghargaan Sub Kategori Inovasi & Industri dan Bisnis

Subroto Award 2022
Awarded to the 2022 Subholds Holding (PLN) subholds:
- 5 awards in the Electricity Utility Category (#3)
- 5 awards in Energy Management Category
- 10 awards Special Innovation Sub Category (Industry and Building)

15 Oktober 2022
October 15, 2022

Indonesia Digital Innovation & Achievement
Award (DIA) 2022

Penghargaan kepada PLN Nusantara Power atas keberhasilan dalam ajang Indonesia Digital Innovation & Achievement Award (DIA) 2022 yang diselenggarakan oleh Majalah Business Update dan Business Intelligence Group (BIG) dengan kategori "Best Digital Innovation in Electricity Energy 2022"

Indonesia Digital Innovation & Achievement
Award (DIA) 2022

Awarded to PLN Nusantara Power for the Indonesia Digital Innovation & Achievement Award (DIA) 2022 organized by Business Update Magazine and Business Intelligence Group (BIG) with the category of "Best Digital Innovation in Electricity Energy 2022"

10 October 2022
October 10, 2022

Indonesia Safety Excellence Award (ISEA) 2022
Penghargaan diberikan oleh Indonesia Safety Excellence Award (ISEA) 2022 yang diselenggarakan oleh Tim Indonesia Magazine satu kategori

- 1 Unit – The Best Safety in Digital
- 1 Unit – The Best Safety Innovation Award
- The Best Health & Safety Leadership of The Year – Heru Pramuginto

Indonesia Safety Excellence Award (ISEA) 2022
Awarded in the Indonesia Safety Excellence Award (ISEA) 2022 organized by Tim Indonesia Magazine as in follows:

- 1 Unit – The Best Safety in Digital
- 1 Unit – The Best Safety Innovation Award
- The Best Health & Safety Leadership of The Year – Heru Pramuginto

10 October 2022
October 10, 2022

Learning, Innovation, Knowledge & Exhibition (LIKE) Fair 2022
Penghargaan diberikan atas Learning, Innovation, Knowledge & Exhibition (LIKE) Fair 2022, antara lain:

- Learn | Sidang Strategic Center Leader
- Learn | Sidang Pembangkitan
- Learn | Sidang EBT
- Learn | Sidang Transmisi
- Learn | Sidang Hybrid
- Learn | Sidang Technical Support
- Learn | Sidang Aplikasi
- Learn | Sidang Bisnis Manajemen

Learning, Innovation, Knowledge & Exhibition (LIKE) Fair 2022
Awards in the Learning, Innovation, Knowledge & Exhibition (LIKE) Fair 2022 event including:

- 1st Place in Strategic Total Service Leader
- 1st Place in the Generation Sector
- 1st place in EBT field
- 1st Place in Generation
- 1st Place in Application Total
- 1st Place in Technical Support
- 1st Place in Application
- 1st Place in Business Management

27 Oktober 2022
Oktober 27, 2022

27 Oktober 2022
Oktober 27, 2022

27 Oktober 2022
Oktober 27, 2022

27 Oktober 2022
October 27, 2022

27 Oktober 2022
October 27, 2022

20 November 2022
November 20, 2022

Indonesia Sustainable Development Award (ISDA)
A Langit Biru Award dari Lembaga Indonesia Sustainable Development Award (ISDA) 2022 yang diselenggarakan oleh Corporate Forum for CSR Development (CFCD), meliputi:

• 3 penghargaan kategori:
- The Top Corporate Leadership in SDGs
- The Most Committed Corporate on SDGs for SDGs on Social Development Pillar
- The Most Committed Corporate for SDGs on Environment Development Pillar

• 6 Penghargaan Gold program:
- UP Nusantara Power melalui Program Nusantara Sungai Jernih
- UBJOM Tulang Nami Hore melalui Program Integrated Farming System
- UBJOM Paiton Pintar melalui Program Sekolah Penerangan Paiton Pintar
- UP Cirata melalui Program Waterbike Melek Sekolah
- UBJOM Bantaeng melalui Program Kelompok Nelayan Lentera Ilmu
- UP Paiton melalui Program Pelayanan Jiwa Digital

• 2 Penghargaan Silver program:
- UP Nusantara Power melalui Program Pengelolaan Lingkungan Kampung Iklim Desa Pesanggrahan dalam Mengadakan Pelatihan Pembuatan Alat Pantau Parameter Kualitas Air Sederhana dan Pelatihan Pengolahan Sampah Organik dan Anorganik Bagi Ibu-Ibu Rumah Tangga di Desa Pesanggrahan
- UP Saguling melalui Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal Desa Cihanjuang Rahayu

Indonesia Sustainable Development Award (ISDA)
Di tanggal 9 Nov 2022 Indonesian Sustainable Development Award (ISDA) diselenggarakan oleh Corporate Forum for CSR Development (CFCD), meliputi:

• 3 Corporate awards:
- The Top Corporate Leadership in SDGs
- The Most Committed Corporate on SDGs for SDGs on Social Development Pillar
- The Most Committed Corporate for SDGs on Environment Development Pillar

• 6 Gold Award (program):
- Nusantara Power melalui Program Nusantara Sungai Jernih
- Tulang Nami Hore Officials through Integrated Farming System Program
- Paiton Pintar Officials through Paiton Pintar Observing School Program
- Cirata melalui Program Waterbike Melek Sekolah
- Bantaeng Officials through Lentera Ilmu Literacy Tourism Program
- Paiton melalui Program Pelayanan Jiwa Digital

• 2 Silver Award (program):
- Nusantara Power melalui Program Pengelolaan Lingkungan Kampung Iklim Desa Pesanggrahan dalam Mengadakan Pelatihan Pembuatan Alat Pantau Parameter Kualitas Air Sederhana dan Pelatihan Pengolahan Sampah Organik dan Anorganik Bagi Ibu-Ibu Rumah Tangga di Desa Pesanggrahan
- Saguling melalui Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal Desa Cihanjuang Rahayu

24 November 2022
November 24, 2022

Subroto Award (Penghargaan)
Penghargaan diberikan kepada [illegible] individu atau kelompok/tim yang [illegible] Subroto Award, yaitu [illegible] Penghargaan ini diberikan [illegible]

Subroto Award (A Penghargaan)
The CEO [illegible] Subroto Award kepada [illegible] Subroto Award [illegible] Penghargaan ini diberikan [illegible]

5 December 2022
December 5, 2022

23 December 2022
December 23, 2022

Sertifikasi Tahun 2022

Certification of 2022

No.	Ruang Lingkup Sertifikat Scope of Certification	Standard Acuan/Sistem Certified	Tanggal Penerbitan Date of Publication	Berlaku Hingga Valid Until	Pengawasan Sertifikat Certification Validity
1	**ISO 22301:2019 – Business Continuity Management System (BCMS)** Sertifikat ini adalah Multi-Site Certificate yaitu: • Kantor Pusat • 6 Unit Pembangkit Gandul, Muara Karang, Muara Tawar, Priok, Cilegon & Bantan *Ini sertifikat ini merupakan Multi-Site Certificate, meliputi: • Head Office • 6 Gandul, Muara Karang, Muara Tawar, Priok, Cilegon & Bantan	ISO	14 September 2019 September 14, 2019	25 September 2022 September 25, 2022	3 tahun 3 years
2	**ISO 9001:2015 – Quality Management System** Sertifikat ini adalah Multi-Site Certificate yaitu: • Kantor Pusat • 6 Unit Pembangkit Gandul, Muara Karang, Muara Tawar, Priok, Cilegon & Bantan • 5 UBJOM Jawa (Indramayu, Rembang, Priok & Priok dan Tanjung Awar-Awar) • Unit Pemeliharaan Repair & Overhaul (UPHT) • 4 UBJOM Luar Jawa (Kaltim Teluk, Tarakan, Arun dan Pulang Pisau) *Ini sertifikat ini merupakan Multi-Site Certificate, meliputi: • Head Office • 6 Gandul, Muara Karang, Muara Tawar, Priok, Cilegon & Bantan • 5 Jawa (PHBBU Indramayu, Rembang, Priok & Priok dan Tanjung Awar-Awar) • Pemeliharaan Repair Unit & Overhaul (UPHT) • 4 Outer Jawa (PHBBU Kaltim Teluk	ISO	6 November 2020 November 6, 2020	7 November 2023 November 7, 2023	3 tahun 3 years
3	**ISO 14001:2015 – Environmental Management System** Sertifikat ini adalah Multi-Site Certificate yaitu: • Kantor Pusat • 6 Unit Pembangkit Gandul, Muara Karang, Muara Tawar, Priok, Cilegon & Bantan • 5 UBJOM Jawa (Indramayu, Rembang, Priok & Priok dan Tanjung Awar-Awar) • 4 UBJOM Luar Jawa (Kaltim Teluk, Tarakan, Arun dan Pulang Pisau) *Ini sertifikat ini merupakan Multi-Site Certificate, meliputi: • Head Office • 6 Gandul, Muara Karang, Muara Tawar, Priok, Cilegon & Bantan • 5 Jawa (PHBBU Indramayu, Rembang, Priok & Priok dan Tanjung Awar-Awar) • 4 Outer Jawa (PHBBU Kaltim Teluk, Tarakan, Arun dan Pulang Pisau)	ISO	6 November 2020 November 6, 2020	7 November 2023 November 7, 2023	3 tahun 3 years
4	**ISO 45001:2018 – Occupational Health & Safety Management System** Sertifikat ini adalah multi-site (certificate yaitu: • Kantor Pusat • 6 Unit Pembangkit Gandul, Muara Karang, Muara Tawar, Priok, Cilegon & Bantan • Unit Pemeliharaan Repair & Overhaul (UPHT) • 5 UBJOM Jawa (Indramayu, Rembang, Priok & priok dan Tanjung Awar-Awar) • 4 UBJOM Luar Jawa (Kaltim Teluk, Tarakan, Arun, dan Pulang Pisau *Ini sertifikat ini merupakan Multi-Site Certificate, meliputi: • Head Office • 6 Gandul, Muara Karang, Muara Tawar, Priok, Cilegon & Bantan • Pemeliharaan Repair Unit (UPHT) & (PLN) • 5 Jawa (PHBBU Indramayu, Rembang, Priok & Priok dan Tanjung Awar-Awar) • 4 Outer Jawa (PHBBU Kaltim Teluk, Tarakan, Arun and Pulang Pisau)	ISO	21 Oktober 2020 October 21, 2020	22 Oktober 2023 October 22, 2023	3 tahun 3 years

No.	Ruang Lingkup Sertifikat Scope of Certification	Sertifikat Sebelumnya Certificate	Tanggal Penerbitan Date of Issue	Berlaku Hingga Valid until	Masa Berlaku Sertifikat Certificate Validity
5	**ISO 50001:2018 – Energy Management System** Sertifikat ini adalah masa satu sertifikat yaitu: • Kantor Pusat • 4 Unit Pembangkit Steaming (Gresik, Muara Karang, Muara Tawar, Pelabuhan, Cilacap & Belawan) • 2 UBJOM (Jawa Bhakaberau, Pembangkitan, Pelabuhan & sekitar dan Tanjung Awan Awan) This certificate is a Multi-Site Certificate covering: • Head Office • 6 Steaming Generating Units (Gresik, Muara Karang, Muara Tawar, Pelabuhan, Cilacap & Belawan) • 2 Jawa (UBJOM) (Bhakaberau, Pembangkitan, Pelabuhan & sekitar dan Tanjung Awan Awan)	-Nil-	8 November 2018 November 7, 2021	7 November 2024 November 7, 2027	3 tahun 3 years
6	**ISO 55001:2014 – Asset Management System** Sertifikat ini adalah masa satu Certificate yaitu: • Kantor Pusat • 6 Unit Pembangkit Steaming (Gresik, Muara Karang, Muara Tawar, Pelabuhan, Cilacap & Belawan) This certificate is a Multi-Site Certificate covering: • Head Office • 6 Steaming Generating Units (Gresik, Muara Karang, Muara Tawar, Pelabuhan, Cilacap & Belawan)	-Nil-	5 Maret 2021 Maret 4, 2021	4 Maret 2024 Maret 4, 2024	3 tahun 3 years
7	**SMK3 OK:2012 – Integrated Management System** Sertifikat ini adalah masa satu Certificate yaitu: • Kantor Pusat • 6 Unit Pembangkit Steaming (Gresik, Muara Karang, Muara Tawar, Pelabuhan, Cilacap & Belawan) • Unit Pemeliharaan Pusat & Overhaul (UHPO) • 2 UBJOM (Jawa Bhakaberau, Pembangkitan, Pelabuhan & sekitar dan Tanjung Awan Awan) • 2 UBJOM Luar Jawa (Kabar Tidak, Tanjung Awan dan Pelang Pinang) This certificate is a Multi-Site Certificate covering: • Head Office • 6 Steaming Generating Units (Gresik, Muara Karang, Muara Tawar, Pelabuhan, Cilacap & Belawan) • Maintenance Unit (HELEX & HELEAN) • Others operational management (Lain) • 2 Jawa (UBJOM) (Bhakaberau, Pembangkitan, Pelabuhan & sekitar dan Tanjung Awan Awan) • 4 Outer Jawa (UBJOM Kabar Tidak, Tanjung Awan, Awan, and Pelang Pinang)	-Nil-	8 November 2018 November 8, 2021	7 November 2024 November 7, 2024	3 tahun 3 years
8	**ISO 37001:2016 – Anti-Bribery Management System** • Kantor Pusat Head Office	-Nil-	6 Agustus 2019 August 6, 2021	5 Agustus 2022 August 6, 2022	3 tahun 3 years
9	**ISO 27001:2013 – Information Security Management** • Kantor Pusat Head Office	-Nil-	8 Januari 2021 January 7, 2021	7 Januari 2024 January 7, 2024	3 tahun 3 years
10	**ISO 27001:2013 – IT Service Management System** • Kantor Pusat Head Office	-Nil-	11 November 2019 November 11, 2021	11 November 2022 November 11, 2022	3 tahun 3 years
11	**ISO 21001:2018 – Educational Organizations Management System** • PIK Nusantara	-Nil-	5 Oktober 2021 Oktober 5, 2021	4 Oktober 2024 Oktober 4, 2024	3 tahun 3 years

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Important Financial Data Highlight

Posisi Keuangan (Rp juta)
Financial Position (Rp million)

Uraian Description	2018	2019	2020	2021	2022
Aset Lancar Current Assets	37.279.001	37.311.267	31.000.542	31.403.323	33.394.138
Aset Tidak Lancar Non-current Assets	137.113.033	135.911.938	143.874.478	139.733.653	141.538.811
Jumlah Aset Total Assets	**174.392.607**	**173.223.205**	**175.581.020**	**171.163.809**	**174.932.949**
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	6.805.408	4.775.999	8.954.870	5.817.827	6.445.749
Liabilitas Jangka Panjang Non-current Liabilities	3.584.730	5.035.171	5.355.230	5.977.150	6.125.088
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	**7.353.138**	**8.930.170**	**10.240.000**	**10.894.262**	**12.937.841**
Jumlah Ekuitas Total Equity	**167.008.607**	**163.773.095**	**165.214.951**	**161.169.303**	**161.995.088**
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	**174.392.607**	**172.223.265**	**175.004.020**	**171.163.809**	**174.932.949**
Investasi Lindi Daftar Pendek/Obligasi Berjangka Investment in Associates/Joint Ventures	7.445.756	7.600.570	8.744.159	12.350.669	18.114.359

*Audited

Jumlah Aset (Rp juta)
Total Assets (Rp million)

Liabilitas Jangka Pendek (Rp juta)
Current Liabilities
(Rp million)

Liabilitas Jangka Panjang (Rp juta)
Non-current Liabilities
(Rp million)

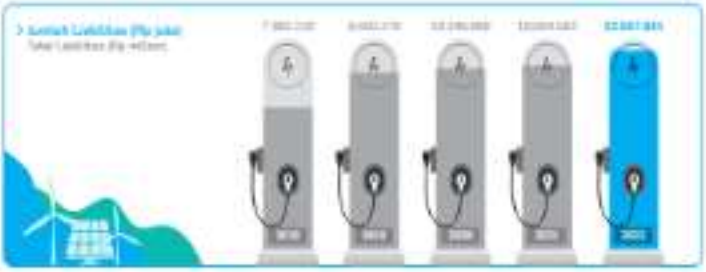

Laba Rugi Komprehensif (Per Unit)

Comprehensive Profit or Loss (Rp billion)

Uraian Description	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pendapatan Usaha Revenue	88.835.206	98.757.900	90.454.135	79.958.194	77.392.395
Beban Usaha Operating Expenses	84.707.193	93.681.317	85.478.435	74.914.378	73.692.476
Laba Operasi Operating Profit	4.255.867	5.423.236	4.285.834	4.267.567	4.088.714
Pendapatan Keuangan Finance Income	1.430.549	1.398.138	752.016	717.554	648.181
Beban Keuangan Finance Expenses	333.193	358.288	383.643	181.369	154.806
Bagian Laba Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Share of Profit of Associates and Joint Ventures	(14.216.181)	(16.263.860)	(11.698.551)	(10.183.143)	(12.975.187)
Laba Usaha Operating Profit	6.681.245	8.695.058	5.525.619	4.666.865	4.636.172
Pendapatan dan Beban Lain-lain Other Income and Expenses	1.174.638	916.286	1.216.463	1.765.969	1.170.630
Laba Sebelum Pajak Profit Before Tax	7.855.883	9.611.344	6.742.082	6.432.834	5.806.802
Beban Pajak Tax Expense	(1.713.772)	(2.093.931)	(1.536.789)	(1.371.892)	(1.323.937)
Laba Tahun Berjalan **Profit for the Year**	**5.817.432**	**6.661.321**	**7.703.812**	**5.833.188**	**4.982.546**
Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain Tahun Berjalan setelah Pajak Other Comprehensive Income (Expenses) for the Year after Tax	(11.688.214)	490.049	338.930	(2.321.356)	446.746
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan **Comprehensive Income for the Year**	**(35.170.783)**	**6.171.474**	**8.040.742**	**3.518.759**	**7.930.282**
Laba Tahun Berjalan Diatribusikan kepada: Profit for the Year Attributable to:					
Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent	5.804.913	6.648.331	7.683.780	5.813.555	4.948.477
Kepentingan Non-Pengendali Non-Controlling Interests	12.520	17.990	20.032	19.633	28.069
Penghasilan Komprehensif Diatribusikan kepada: Comprehensive Income Attributable to:					
Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent	(35.190.703)	6.159.353	7.995.003	3.494.125	6.985.139
Kepentingan Non-Pengendali Non-Controlling Interests	19.921	12.021	44.974	24.634	45.143
Laba Per Saham Dasar (Rupiah penuh) Basic Earnings per Share (Rp full amount)	604	1.136	1.209	971	1.097

> Pendapatan Usaha (Rp Juta)

> Beban Usaha (Rp Juta)

> Laba Usaha (Rp Juta)

Informasi Arus Kas (Rp unit)
Information on Cash Flows (Rp million)

Uraian Description	2018	2019	2020	2021	2022
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi Net Cash Provided by Operating Activities	8.788.823	9.188.788	9.177.136	8.301.358	9.957.856
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi Net Cash Used in Investing Activities	(4.153.803)	(3.523.516)	(6.301.370)	(154.396)	(1.080.732)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities	(3.630.552)	(4.405.894)	(851.017)	(167.589)	(85.304)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents	(1.195.569)	193.115	(1.976.647)	5.981.357	8.791.820
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year	3.879.828	2.684.259	2.836.050	3.511.113	7.593.866
Pengaruh Perubahan Kurs Mata Uang Asing Effect of Changes in Foreign Currency	3.023	(2.324)	(3.720)	(1.503)	(2.126)
Jumlah Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Total Cash and Cash Equivalents at the End of the Year	2.684.259	2.836.050	3.511.113	7.593.866	16.383.560

Rasio Keuangan (%)
Financial Ratios (%)

Uraian Description	2018	2019	2020	2021	2022
RASIO PROFITABILITAS/PROFITABILITY RATIO					
Return Atas Investasi (ROI)/Return on Investment (ROI)	3,99	3,80	3,39	3,08	3,76
Return Atas Ekuitas/Return on Equity (ROE)	0,91	9,05	1,62	3,61	5,49
Return Atas Investasi/Return on Investment (ROI)	3,70	7,60	7,98	0,19	3,48
Return Atas Penjualan/Return on Revenue (ROR)	11,58	22,76	10,21	10,71	10,24
Rasio Pertumbuhan Penjualan/Sales Growth Ratio (%)	11,77	(8,48)	(13,03)	(7,04)	(17,98)
RASIO LIKUIDITAS/LIQUIDITY RATIO					
Rasio Lancar/Current Ratio (%)	332,67	332,14	328,51	616,65	750,54
Rasio Kas/Cash Ratio (%)	31,71	36,27	79,88	203,23	181,96
Rasio Sangat Kas/Quick Ratio (%)	318,31	328,15	608,00	588,71	737,84
RASIO SOLVABILITAS/SOLVENCY RATIO					
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (%)/Debt to Equity Ratio (%)	4,52	3,77	4,20	3,02	7,74
Rasio Liabilitas terhadap Total Aset (%)/Debt to Assets Ratio (%)	4,23	3,46	3,84	2,86	7,16
RASIO AKTIVITAS/ACTIVITY RATIO					
Collection Period/Days Collection Period (days)	180	200	303	282	264
Perputaran Total Aset/Total Assets Turnover (%)	0,35	0,33	0,27	0,27	0,34

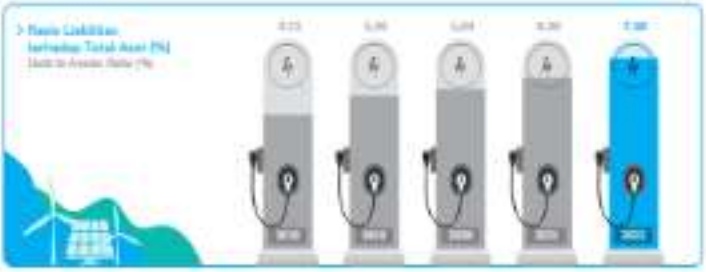

Ikhtisar Kinerja Operasional
Operational Performance Highlights

Uraian Description	2022	2023	2024	2025	2026
Produksi Energi Listrik (GWh) Electricity Production (GWh)	25.847	23.313	17.918	20.611	17.084
Penjualan Energi Listrik (GWh) Electricity Sales (GWh)	34.752	33.454	27.117	28.918	18.379
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	2,01	3,00	3,00	2,71	3,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

> Jumlah Daya Mampu Neto (MW)

> Jumlah Karyawan (orang)

> Nilai Assessment GCG (skor)

Ikhtisar Saham
Share Highlights

Sampai dengan akhir tahun 2021, PLN NP tidak melakukan pendaganggan saham sehingga tidak ada informasi harga saham tertinggi, harga saham terendah dan harga saham penutupan serta volume saham yang diperdagangkan.

Until the end of 2021, PLN NP did not conduct share trading, so there is no information on the highest share price, lowest share price, and closing share price as well as the volume of shares traded.

Saham Biasa(s) terdiri dari:
1. PT PLN (Persero) sebanyak 1 Saham Seri 1 dari 3.000.000.000 Saham Seri 2 (99,99%);
2. Dewan Pertahbat dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) sebanyak 1 Saham Seri 2 (0,01%)

Outstanding Shares consists of:
1. PT PLN (Persero) has 1 Series-1 Share and 3,000,000,000 Series-2 Shares (99.99%);
2. Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) 1 Series-2 Share (0.01%).

Ikhtisar Obligasi
Bond Highlights

Sampai dengan akhir tahun 2021, PLN NP tidak menerbitkan obligasi, sukuk dan obligasi konversi sehingga tidak ada informasi terkait dengan jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar, tingkat bunga/imbalan, tanggal jatuh tempo dan peringkat obligasi/sukuk.

Until the end of 2021, PLN NP did not issue bonds, sukuk and convertible bonds so there is no information related to the number of outstanding bonds/sukuk/convertible bonds, interest rates/yields, maturity dates and bond/sukuk ratings.

Peristiwa Penting Tahun 2022

Event Highlights 2022

ICON+

PLN
Holding &
Sub-Holding PLN

PLN
Nusantara Power

Testimoni
Testimony

Ir. M. Priharta Dwinugraha, M.S.E

Direktur Teknik Kementerian ESDM
Technical Director of the Ministry of Energy and Mineral Resources

"Saat saya PLN NP kami dengan saya menyatakan semangat dan komitmennya dalam menjaga zero accident di seluruh unit pembangkitnya. Berbagai upaya seperti the above dan inovasi lainnya dalam menghadapi permasalahan yang terkinya di era PLN NP menjadi kuat saya rasakan."

"I think PLN NP has clearly demonstrated its passion and commitment in maintaining zero accidents in all of its generating units. It is proven by various competitions such as the above and emergency response innovations as well as various achievements continuously achieved by PLN NP."

Khofifah Indar Parawansa

Gubernur Jawa Timur
Governor of East Java

"Saya ucapkan terima kasih kepada PLN Nusantara Power karena secara langsung membantu pertumbuhan perekonomian di Jatim. Khususnya di Jawa Timur yang juga ikut membantu roda pertumbuhan ekonomi Jagi Jawa Timur."

"I am most grateful to PLN Nusantara Power since it directly encourages economic growth in Indonesia, especially in East Java which will also drive the enhanced economic growth for East Java."

Darmawan Prasodjo

Direktur Utama PT PLN (Persero)
President Director of PT PLN (Persero)

"PLN NP telah mampu memberikan warna on investment dalam pengusaan sumber daya energi setempat energi. Dan ini jan yang mampu melangkah sinarai PLN NP. Ancara saat ini PLN NP sudah menjadi rekanan strategis perusahaan energi."

"PLN NP has been able to implement a on investment scheme in managing resources to turn them into energy. It has been able to boost PLN NP performance, where PLN NP has now become a giant of an energy company."

Ganjar Pranowo

Gubernur Jawa Tengah
Governor of Central Java

"Dalam pengembangan daerah di Jawa Tengah kami membutuhkan kontribusi dan dukungan dari perusahaan serta industri yang ada di sekitarnya. Berkaca dari dukungan dari PLN Nusantara Power kepada Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Timo yang memiliki unit pembangkit di Kabupaten Wonosobo ini, kami berharap untuk kedepannya hubungan dan kerja sama ini semakin erat di Pertama ini."

"In regional development in Central Java, we need contributions and support from companies and agencies that are in the vicinity. Assistance and support from PLN, especially PLN Nusantara Power, which has a generating unit in Wonosobo, hopes this synergy, ready for infrastructure and social needs, and economic division in the Pertama."

Dariah P. Hutajulu

Direktur Lembaga Ketenagalistrikan Kementerian ESDM
Director General of Electricity, Ministry of Energy and Mineral Resources

"Kami mengapresiasi PLN Nusantara Power dalam pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Cuaca dan penggunaan Co-firing pada PLTU merupakan program-program strategis yang salah diterapkan dan perlu ditingkatkan agi. Saat PLN Nusantara Power di Jawa yang kuat tadang. Selama 7 tahun bertanya kan PLN Nusantara Power Cochad telah berkontribusi kontribusi nasa dapat pengembangan industri listrik di Indonesia melalui berbagai inovasi dan Dimed dalam seminar. Semoga kedepan ini dapat mengevaluasi dan memberikan solusi antara PLN Nusantara Power dan investasi stakeholder sehingga memberikan manfaat nama bagi pemerintah dan agar kita di nana desain."

"We appreciate PLN Nusantara Power in managing the Hydro Power Plant (HPP), the efforts to build the Cloudy Solar Power Plant (SPP) and the use of Co-firing at PLTPPs are the implemented strategic steps that need to be further increased by PLN Nusantara Power in the future. For 7 consecutive years, PLN Nusantara Power Cochad has made a major contribution in the development of the electricity industry in Indonesia through various innovations and discussions in seminars. Hopefully this activity can increase and build relationships between PLN Nusantara Power and a number of stakeholders so as to provide good benefits for the development of electricity in the future."

Alue Dohong

Kepala Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Deputy Minister of Environment and Forestry

"Saya mendukung apabila kerjasama tersebut PT. PLN NP dan energi dengan KLHK untuk melestarikan dalam energi kesadaran. Kegunaan tidak semoga kita dapat mengimplementasikan konservasi Indonesia yang lebih lancar."

"I appreciate PT PLN NP for the synergy with the Ministry of Environment and Forestry to commit to preserving the environmental ecosystem so that we are able to implement waste-clean Indonesian tourism."

Laporan Kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan

Report to Shareholders and Stakeholders

Laporan Dewan Komisaris

Report from The Board of Commissioners

Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas kinerja Perusahaan yang dapat mencapai target dan memberikan dukungan agar PLN NP dapat terus memanfaatkan peluang atas prospek usaha untuk mendukung ketahanan energi.

The Board of Commissioners appreciates the Company performance in achieving targets and provides support so that PLN NP can continue to take advantage of opportunities for business prospects to support energy security.

Harapan Kepada Pemegang Saham dan Para Pemangku Kepentingan yang Kami Hormati.

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya kepada kita semua. Oleh pertolongan-Nya, PT PLN Nusantara Power (PLN NP) mampu melampaui target kinerja 2021 yang telah ditetapkannya, walaupun menghadapi banyak tantangan termasuk dampak dari pandemi Covid-19 yang merundung selama tahun 2021.

Atas kinerja perusahaan pada tahun 2021 di tengah dinamisnya perubahan struktur pada lanskap sehingga PLN NP mencatat anak-anak usaha sebagai Subholding PLN Nusantara Power (PLN NP), kami selaku Dewan Komisaris menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Jajaran Direksi. Selanjutnya, melalui laporan ini, kami menyampaikan hasil dari tugas pengawasan dan penilaian kinerja Direksi selama tahun 2022, serta pandangan atas prospek usaha yang dikaitkan oleh Direksi dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

Dear Shareholders and Stakeholders,

Praise and gratitude for the presence of God Almighty for all grace for all of us. By the permit, PT PLN Nusantara Power (PLN NP) was able to exceed the planned 2021 performance target, despite having many challenges including the impact of the Covid-19 pandemic which peaked during 2021.

For the Company performance in 2021 amid the dynamic changes in the governance structure so that PLN NP inserted child-child as PLN Nusantara Power (PLN NP) Subholding, we, as the Board of Commissioners, would like to express our high appreciation to the Board of Directors. Furthermore, through this report, we convey the results of the supervisory duties and performance assessment of the Board of Directors for 2022, as well as views on the business prospects organized by the Board of Directors and the implementation of good corporate governance (GCG).

Kondisi Makroekonomi 2022

2022 Macroeconomic Conditions

Selama tahun 2022, ekonomi global menghadapi tekanan yang sangat berat. Terjadinya konflik geopolitik di beberapa wilayah, terutama invasi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina yang sampai saat ini berlangsung dan belum menunjukkan tanda akan berakhir, memberikan tekanan bagi perekonomian global. Demikian pula dari hal tersebut adalah terjadinya harga komoditas, khususnya komoditas energi. Dengan dijatuhkannya sanksi kepada Rusia, maka pasokan energi ke negara-negara Eropa mengalami hambatan. Beberapa negara bahkan telah menyatakan bahwa mereka mengalami krisis energi. Lonjakan harga komoditas energi juga telah membuat tingkat inflasi di banyak negara melambung tinggi. Prospek ekonomi global menurun drastis dan diperkirakan mengalami ketidakpastian pada beberapa negara yang mungkin termasuk Rusia (versi IMF).

During 2022, the global economy was facing enormous pressure. Geopolitical conflicts in several regions, especially the ongoing invasion by Russia against Ukraine as of now and has not shown any signs of ending, has put pressure on the global economy. The war caused of this in a surge in commodity prices, especially energy commodities. Due to sanctions on Russia, the supply of energy to European countries is having obstacles. Some countries have even declared that they are in energy crisis. The surge in energy commodity prices has also made the inflation rate in many countries soar. Global economic outlook has declined drastically and is predicted to experience vulnerabilities in several countries which may get into recession in 2023.

Meski demikian, ekonomi Indonesia masih tumbuh cukup baik di 2022. Hal ini tak lepas dari pasar domestik yang menjadi tonse dari hasil alam Indonesia yang kini dapat untuk memenuhi kebutuhan beberapa komoditas ke negara-negara lain. Contohnya pada 2022 ekonomi Indonesia masih dapat tumbuh 5,31% dan neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus US$54,46 miliar. Meskipun tahun 2022, tingkat inflasi nasional meningkat menjadi 5,51%.

However, Indonesia's economy still grew quite well in 2022. It is inseparable from the huge domestic market and Indonesia's abundant natural products to supply the needs of several commodities to other countries. It is recorded in 2022 Indonesia's economy was still able to grow by 5.31% and Indonesia's trade balance recorded a surplus of US$54.46 billion. During 2022, the national inflation rate increased to 5.51%.

Dewan Komisaris berpandangan bahwa tahun 2022 merupakan tahun yang penuh tantangan, dimana PLN NP berhasil mencatat pertama yang positif. Dewan Komisaris menyadari bahwa tantangan yang dihadapi PLN NP di tahun 2022 sangat kompleks, karena itu Dewan Komisaris mengapresiasi upaya atau langkah-langkah yang diambil oleh Direksi dalam menyikapi dinamika yang terjadi selama tahun 2022. Langkah-langkah yang diambil Direksi telah berhasil membawa PLN NP melalui 2022 dengan capaian kinerja yang baik, hal ini juga sesuai dengan rencana jangka panjang PLN NP.

The Board of Commissioners considers that 2022 will be a year full of challenges in which PLN NP managed to record positive performance. The Board of Commissioners realizes that the challenges faced by PLN NP in 2022 are greatly complex, therefore the Board of Commissioners appreciates the steps taken by the Board of Directors in responding to the dynamics occurred during 2022. The steps taken by the Board of Directors were successful in bring PLN NP through 2022 with good performance achievements, but also according to PLN NP long term plans.

Penilaian Terhadap Kinerja Direksi dan Dasar Penilaiannya
Performance Assessment of the Board of Directors and the Basis for the Assessment

Kami menilai Direksi telah melaksanakan pengelolaan kegiatan secara baik sesuai dengan rencana bisnis yang telah ditetapkan. Pengelolaan dilakukan dengan penuh tanggung jawab memenuhi amanah dan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini merupakan pencapaian yang sangat baik sebagai langkah awal strategi selaras Dengan PLN NP. Kami berpendapat bahwa Direksi telah mampu menjalankan tugas pelaksanaan integrasi dalam pembentukan subholding. Ke depan, PLN NP diharapkan harus mampu menghadapi berbagai tantangan dan dapat melakukan transformasi berproses dengan pola baru. Kami berharap bahwa PLN NP dapat terus meningkat dan berinovasi agar semakin tangguh menjadi perusahaan berkelas dunia.

We assess that the Board of Directors has managed activities properly following the established business plan. They carry out management with full responsibility in fulfilling the mandate by the shareholders and other stakeholders. This is a very good achievement as the first step in the synergy of all PLN NP functions. We consider that the Board of Directors has been able to carry out duties of implementing integration in the formation of subholdings. Going forward, PLN NP is expected to continue to be able to face various challenges and be able to carry out a process transformation with new ideas. We hope that PLN NP performance will continue to improve and synergistic so that all functions are able to develop together to a sustainable manner.

Dewan Komisaris menilai sinergi Direksi dalam mengelola PLN NP selama tahun 2022 tercermin dari capaian tingkat kesehatan Perusahaan yang berada pada level "AAA" dengan nilai 100,00 dan termasuk dalam kategori "Sehat". Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris dilakukan melalui rapat Direksi secara berkala sesuai dengan PKBNP 2022, RPJ Perusahaan 2022 dan Rencana Manajemen 2022, serta selaras dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) termasuk isu, peraturan terkait di bidang ekonomi, lingkungan, sosial maupun perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui rapat/musyawarah penyampaian laporan kinerja Perusahaan oleh Direksi. Berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja operasional PLN NP, Dewan Komisaris menyampaikan agar Direksi dapat terus meningkatkan kesehatan bisnis secara holistik (ini dengan optimalisasi potensi yang mendukung meningkatnya sinergi usaha di lingkungan PLN NP grup) sehingga mendukung pertumbuhan kinerja berkelanjutan.

The Board of Commissioners considers that the synergy of the Board of Directors in managing PLN NP during 2022 is reflected in the achievement of the Company's health level which is at the "AAA" level with a score of 100.00 and is included in the "Healthy" category. Oversight functions by the Board of Commissioners is carried out through periodic meetings of Financial and operational performance in line with the 2022 RKAP, 2022 Company RPJ and 2022 Management Contract, and in line with the Company's Long Term Plan (LTP) including important issues related to the economic, environmental, social and amendments to the applicable laws and regulations through meetings and submission of Company performance reports by the Board of Directors. Based on the evaluation results of the operational performance of PLN NP, the Board of Commissioners conveys that the Board of Directors can continue to strengthen the holistic (in performance basis by optimizing potential that encourages the increased business synergy within the PLN NP group) so as to create sustainable performance growth.

Dari segi keuangan, Pendapatan Usaha PLN NP tahun 2022 sebesar Rp27,20 triliun, menurun / 8,0% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp29,53 triliun. Adapun Beban Usaha PLN NP tahun 2022 adalah sebesar Rp22,57 triliun menurun 10,59% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp25,23 triliun. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh berkurangnya pemakaian bahan bakar, pelumas dan pemakaian tenaga listrik sewa dengan pengadaan tenaga listrik PLN NP (Pembangkit Non – PLN) Sehingga dan optimasi PLTU Batubara pada Sistem Kelistrikan Jawa Bali.

Sementara itu, pendapatan Lain tahun buku 2022 mengalami Rugi sebesar Rp0,68 triliun atau meningkat 13,12% dibanding tahun buku sebelumnya yang sebesar Rp3,93 triliun. Sebesar Laba ini bukan berupa dari kas hasil dan kerja namun dari selisih dari Penilaian PLN NP yang berpengaruh terhadap pembiayaan Bisnis keuangan. Jadi hanya itu, PLN NP juga menjadi salah satu perusahaan unggulan di PLN Grup yang berhasil membukukan laba investasi dan pendanaan sendiri melalui investment. Pembiayaan yang dijalankan PLN holding juga berperan besar dalam mendorong kinerja NP menjadi sehat dan efisien. Perkembangan kinerja keuangan PLN NP sejalan dengan pertumbuhan aset perusahaan. Sehingga, Aset PLN NP mengalami kenaikan sebesar Rp1,1 (% triliun sehingga total aset/nya mencapai Rp. 171,03 triliun. Adapun jumlah Liabilitas PLN NP tahun 2021 adalah sebesar Rp133,57 triliun meningkat 14,15% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp30,88 triliun. Peningkatan tersebut/utamanya dipengaruhi oleh penambahan Liabilitas imbalan Kerja hasnya penyesuaian imbalan kerja jatuh tempo pajak akhir dan penambahan Liabilitas Pajak Tangguhan yang mengakibatkan perbedaan temporer. Sementara itu, jumlah Ekuitas PLN NP tahun 2021 adalah sebesar Rp181,36 triliun meningkat 12,74% dibandingkan 2021 adalah sebesar Rp161,17 triliun. Peningkatan ekuitas sebagian besar disebabkan oleh penyertaan baru di tahun 2021 dan adalah dari kenaik pencadangan/ Laporan Keuangan Dewan Komisaris menyampaikan ucapan kepada Direksi untuk fokus pemenuhan strategi dan kebijakan over budgeting program dengan menjaga struktur bahan usaha Perusahaan.

Realisasi Produksi Tenaga Listrik tahun 2021 adalah sebesar 13.084,31 MWh, mengalami penurunan 17,33% dibandingkan produksi tahun 2021 sebesar 10.816,81 GWh. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan produksi tenaga listrik pada Unit Gresik, Muara Tawar, Muara Karang dan Pulau Kapuas mulainya Pelayaan Tenaga Listrik tahun 2021 adalah sebesar 10.270,481 MWh mengalami penurunan dibanding tahun 2021 sebesar 10.816,81 GWh. Hal ini dipengaruhi oleh kembalian aset/ operasi pada PJTLU Muara Tawar dan Muara Karang sehingga dapat memberikan lebih banyak laba sistem pada periode belum puncak, konsultasi pembangkit PLN beroperasi dengan pola base/ dalam rencana kebutuhan dan juga pada sistem 500 kV, 70 (s) kebutuhan terdapat beberapa unit yang mengalami gangguan sehingga adalah energi tersebut disalurkan by UP Pakan. Dewan Komisaris senantiasa memberi contoh dan arahan kepada Direksi untuk memaksimalkan produksi dan penjualan listrik Mengutama untuk mempercepat target Net Zero Emission.

In term of financial perspective, PLN NP Operating Revenue in 2022 amounted to Rp27,20 trillion, decreased by / 8,0% compared to 2021 of Rp29,53 trillion. While NP Operating Expenses in 2022 amounted to Rp22,57 trillion, decreased by 10,59% compared to 2021 of Rp25,23 trillion. This decrease was mainly influenced by the reduced amount of fuel, lubricants and electricity purchases in line with the ratio of electricity from PLN NP (Non-Coal Power Plant) and optimization of Coal (PLTU) in the Java-Bali Electricity System.

Meanwhile, profit for the 2022 fiscal year reached Rp0,68 trillion, increased by 13,12% compared to the previous year of Rp3,93 trillion. This profit achievement is inseparable from the hard work and smart work of the entire PLN NP personnel which provide the improvement in the financial performance. Moreover, PLN NP is also among one of the leading companies in the PLN Group that has successfully recorded investment returns from associated companies through co-investment. PLN holding transformation also helps the major role in encouraging NP performance to become more agile and efficient. PLN NP financial performance growths in line with the Company's asset growth. PLN NP recorded the assets increased by Rp1,7% trillion so that current total assets reach Rp171,03 trillion. Meanwhile, the amount of PLN NP liabilities in 2021 is Rp133,57 trillion, increased by 14,15% compared to 2021 of Rp30,88 trillion. The increase was mainly influenced by the addition of employee benefits Liabilities due to adjustments of employee benefits due by the actuary and the addition of Deferred Tax Liability to adjust for temporary differences. Meanwhile, total Equity of PLN NP in 2021 is Rp181,36 trillion, increased by 12,74% compared to 2021 which was Rp161,17 trillion. The increase is mostly/ over largely due to the increase in profit in 2021 and foreign exchange differences due to the translation of the Financial Statements. The Board of Commissioners conveys gratitude to the Board of Directors to focus on implementing core business program strategies and policies by maintaining the operating expenses structure of the Company.

Realization of Electricity Production in 2021 is 13.084,31 MWh, decreased by 17,33% compared to 2021 production of 10.816,81 GWh. This decrease was mainly influenced by a decrease in electricity production at the Gresik, Muara Tawar, Muara Karang and Pulau Unit. The realization of electricity sales in 2021 is 10.270,481 MWh, a decrease compared to 2021 of 10.816,81 GWh. This is influenced by the additional allocation of gas to the Muara Tawar and Muara Karang CCPP so that it can help more when the system is in peak load periods, then the NPP operates in a net pattern above the annual plan and also in the 500 kV sub power plant system there are several units having interference, so that the energy distribution was diverted to Pulau (s). The Board of Commissioners always provides advice and directions to the Board of Directors to maximize electricity production and increase sales to accelerate the Net Zero Emission target.

Dewan Komisaris senantiasa memonitor Direksi untuk melaksanakan pengembangan usaha sesuai tahap mengadaptasikan aspek pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku maupun prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dewan Komisaris memotivasi Direksi untuk terus meningkatkan strategi peningkatan efisiensi operasional dengan menjaga tingkat biaya bahan bakar, menjaga security dan keandalan pembangkit, optimasi utilisasi pembangkit dan menjaga level EBITDA yang ditetapkan oleh Pemegang Saham. Selain itu, Direksi perlu terus meningkatkan pertumbuhan revenue non untuk mengoptimalkan pendanaan pengembangan usaha, meningkatkan strategi partnership dan pengelolaan produk serta kerjasama dukungan sumber daya manusia sejalan dengan peningkatan utilisasi pembangkit dan recovery PLN NP dalam rangka pendapatan pada segmen usaha (eksisting).

The Board of Commissioners constantly monitors the Board of Directors to carry out business development while still prioritizing aspects of risk management, compliance with applicable regulations and the principles of good corporate governance. The Board of Commissioners expects the Board of Directors to continue to sharpen the strategy for increasing operational efficiency by maintaining fuel cost levels, maintaining power plant security and reliability, optimizing power plant utilization and maintaining the EBITDA level set by Shareholders. However, the Board of Directors needs to keep increasing the revenue non growth to optimize funding for business development, improve strategic partnerships and product marketing as well as cooperation for human resource support in line with increasing the utilization of PLN NP power plants and recoveries in achieving revenue in the targeted (existing) business segment.

Tidak lupa Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada Direksi beserta jajaran manajemen di bawahnya atas berbagai prestasi yang diraih oleh PLN NP sepanjang tahun 2022, baik penghargaan dan prestasi baik internasional maupun nasional yang diperoleh diantaranya adalah Gold Winner dalam ajang pada 18th Annual Global Contact Center World Awards 2 penghargaan pada Asian Risk Awards (ARA) 2022 kategori Governance, Risk Management, and Compliance (GRC), meraih predikat Gold di ajang Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT), penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Zero Accident, penghargaan Subroto Award 2022, 14 penghargaan dalam ajang Indonesia Sustainable Development Award (ISDA), penghargaan dalam ajang Indonesia Safety Excellence Awards (ISEA) dan penghargaan 3 Bajak PROPER Emas, 4 PROPER Hijau serta 12 PROPER Biru.

The Board of Commissioners does not forget to appreciate the Board of Directors and the management under them for various achievements obtained by PLN NP throughout 2022, A number of international and national awards and achievements were obtained including the Gold Winner in the 18th Annual Global Contact Center World Awards, 2 awards at the 2022 Asian Risk Award (ARA) for the Governance, Risk Management, and Compliance (GRC) category, the Gold title at the Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) event, Zero Accident Occupational Safety and Health (OHS) award, Subroto Award 2022, 14 awards in the Indonesian Sustainable Development Award (ISDA) event, awards in the Indonesia Safety Excellence Awards (ISEA) event and 3 Bajak Gold PROPER awards, 4 Green PROPER and 12 Blue PROPER awards.

Tata Cara dan Frekuensi Pemberian Nasihat Kepada Direksi

Procedures and Frequency of Providing Advice to the Board of Directors

Dewan Komisaris menjalankan tugas dan tanggung jawabnya melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat atas kegiatan pengelolaan Perusahaan oleh Direksi. Dewan Komisaris telah memberikan arahan kepada Direksi dalam bidang aspek operasional maupun keuangan serta pengembangan usaha Perusahaan, termasuk pengembangan Anak Perusahaan maupun Perusahaan Afiliasi, ketahanan energi dan security of supply energi primer, kebijakan pemeliharaan unit pembangkit serta kaitan B2B, di seluruh unit pembangkit untuk mencegah zero accident dan kriteria PROPER. Fungsi pengawasan dan pemantauan Dewan Komisaris kepada Direksi dilakukan baik secara formal dalam rapat, maupun secara informal serta melalui kunjungan kerja ke unit Bisnis PLN NP bersama dengan Komite Dewan Komisaris.

The Board of Commissioners carries out the duties and responsibilities to supervise and provide advice on the Company management activities by the Board of Directors. The Board of Commissioners has provided direction to the Board of Directors in various operational and financial aspects as well as business development of the Company, including the development of Subsidiaries and Affiliates, the realization of the energy mix and security of supply of primary energy, the policy of maintenance of generating units as well as CMSE aspects in all generating units to maintain zero accident and PROPER level. The Board of Commissioners carries out supervisory and advisory functions to the Board of Directors both formally in meetings and informally as well as through work visits to the PLN NP business unit together with the Board of Commissioners Committees.

Dewan Komisaris secara rutin melakukan kunjungan ke Unit Pembangkit maupun Anak Perusahaan guna mendapat informasi secara langsung mengenai operasional UJBB/Anak Perusahaan tersebut. Sepanjang tahun 2021 Dewan Komisaris telah melakukan kunjungan sebanyak 21 (dua puluh satu) kali di tahun 2022 (satu) Ku. Dewan Komisaris telah mengadakan rapat internal sebanyak 10 (tiga belas) kali dan Rapat Pengawasan bersama dengan Direksi sebanyak 11 (dua belas) kali. Agenda rapat internal Dewan Komisaris meliputi tindak lanjut Rapat Dewan Komisaris, Laporan Manajemen dan Kinerja, progress proyek maupun penugasan. Adapun agenda rapat pengawasan meliputi pi Laporan Manajemen dan Kinerja, maupun tindak lanjut rapat sebelumnya. Materi yang akan dibahas dalam rapat pengawasan/komunikasi tersebut terlebih dahulu dibuat dalam Rapat Internal Dewan Komisaris maupun Rapat Komite berdasarkan laporan–laporan yang dibuat oleh Manajemen.

Disamping itu, Dewan Komisaris juga memberikan saran, rekomendasi dan masukan yang disampaikan dalam Rapat Dewan Komisaris yang dihadiri oleh Direksi maupun dalam Rapat Pengawasan Secara Berkala. Dewan Komisaris melakukan evaluasi atas pencapaian RKAP 2022 melalui telaah terhadap Laporan Kinerja Subholding dan Laporan Manajemen Triwulanan maupun pembahasan kinerja dalam Rapat Pengawasan bersama Direksi dan jajaran manajemen di beberapa entitas kunci lainnya.

The Board of Commissioners regularly visits Generating Units and Subsidiaries to obtain direct information regarding the operations of these Units/Subsidiaries. Throughout 2021, the Board of Commissioners held 21 (twenty one) work visits in 2022. Moreover, the Board of Commissioners held 13 (thirteen) internal meetings and 11 (eleven) both Supervisory Meetings with the Board of Directors . The agenda of the Board of Commissioners' internal meetings includes follow-up on the Board of Commissioners duties, Management and Performance Reports, project progress and assignments. The agenda for the supervisory meeting includes Management and Performance Reports, as well as follow-up on previous meetings. The material to be discussed in the supervisory/consulting meetings is first reviewed in the Board of Commissioners' Internal Meetings and Committee Meetings based on reports prepared by Management.

Furthermore, the Board of Commissioners also provides suggestions, recommendations and input to be submitted at the Board of Commissioners Meetings attended by the Board of Directors as well as at the Supervisory Meeting. The Board of Commissioners periodically evaluates the achievement of the 2021 RKAP through a review of the monthly Performance Reports and Quarterly Management Reports as well as discussions of performance in Supervisory Meetings with the Board of Directors and the management below their purview.

Pandangan atas Prospek Usaha yang Disusun Oleh Direksi
Views on Business Prospects Prepared by the Board of Directors

Dewan Komisaris memberikan tanggapan positif atas prospek usaha yang telah disusun oleh Direksi berdasarkan asumsi yang realistis. Tanggapan ini tentu sehubungan adanya memperhatikan kesempatan atas peluang usaha di masa depan. Pengembangan usaha di bidang pembangkitan akan menjadi hal tersebesar bagi keberangkatan yang mendukung pencapaian transisi energi di dalam negeri guna mencapai target Net Zero Emission pada 2060. Di samping itu, pembentukan subholding PLN NP sebagai strategi pengembangan yang dinilai cocok sangat dibutuhkan dapat meningkatkan efisiensi biaya, peningkatan efektivitas dan produktivitas serta serta pengembangan usaha.

Berdasarkan RUPTL 2021-2030, rencana penambahan kapasitas pembangkit untuk seluruh Indonesia adalah sebesar 40.6 GW atau rata-rata mencapai 4 GW per tahun. Penambahan kapasitas baru akan didominasi oleh EBT (51,6%) dengan porsi mana (22,8%) sebagai teknologi yang paling tepat untuk memenuhi target 23% EBT pada tahun 2025 sebagaimana yang tercantum dalam RUPTL. Fore berbukan sebesar 34% dalam kapasitas tambahan hanya terdiri atas on-going project. Guna mengakomodasi poi yang tersebut, Dewan Komisaris berpendapat bahwa PLN NP perlu lebih meningkatkan peran dan kontribusi dalam mencapai bauran energi nasional di tahun 2025.

The Board of Commissioners provides positive response to the proposed business prospects by the Board of Directors based on realistic assumptions. This obviously also considers after considering the opportunities for business opportunities in the future. Business development in the power generation sector will be fundamental to sustainability which will accelerate domestic energy transition to achieve the Net Zero Emission target in 2060. Moreover, the establishment of PLN NP subholding as the development strategy is expected to create cost efficiencies in the short term, increase work effectiveness and productivity as well as business development.

Based on the 2021-2030 RUPTL, plans to increase power plant capacity throughout Indonesia are 40.6 GW or an average of 4 GW per year. New capacity additions will be dominated by RES (51.6%) with hydro power (22.8%) as the most appropriate technology to meet the target of 23% RES in 2025 as stated in the RUPTL. The 34% portion of coal in additional capacity remains only on-going projects. In order to optimize these opportunities, the Board of Commissioners believes that PLN NP needs to continue to increase its role and contribution in achieving the national energy mix in 2025.

Kami berharap bahwa strategi yang telah ditetapkan Direksi tetap perlu ditindaklanjuti secara berkala dan selalu mengadaptasi risiko yang mungkin timbul dengan efektif, mengedepankan prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan. Kami memberikan dukungan agar PLN NP terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam kompetensi perusahaan yang berkelanjutan.

We hope that the strategy set by the Board of Directors will remain to be evaluated regularly and properly manage risks that may arise effectively, consider business processes with due regard to health, safety and the environment. We provide support so that PLN NP keeps refining and improving in the context to achieve sustainable growth.

Pandangan Atas Implementasi Tata Kelola Perusahaan

Views on the Implementation of Corporate Governance

Dewan Komisaris berpendapat bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja PLN NP dalam jangka panjang, kami senantiasa meningkatkan fungsi pengawasan terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance/GCG) sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemegang saham, regulator maupun standar best practice yang berlaku. Penerapan GCG di PLN NP tidak hanya untuk memenuhi peraturan dan Undang-undangan saja, namun harus mampu mewujudkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris mengadakan rapat gabungan bersama dengan Direksi minimal 1 (satu) kalam sebulan, untuk membahas kinerja bulanan, perkembangan bisnis dan portofolio, dan isu-isu operasional PLN NP. Selama tahun 2021, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sebanyak 13 (dua belas) kali rapat pengawasan ditambah 12 (dua belas) kali dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris sebesar 100%.

The Board of Commissioners believes that in the effort to improve PLN NP performance in the long term, we are constantly improving the oversight function of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) following the standards set by the shareholder, regulators and applicable best practice standards. GCG application at PLN NP is not only to comply with laws and regulations, but must be able to consistently realize the GCG principles. In carrying out the oversight function, the Board of Commissioners holds joint meeting with the Board of Directors at least once a month, to discuss monthly performance, business and portfolio developments, and PLN NP operational issues. During 2021, the Board of Commissioners held 13 (twelve) meetings with 12 (twelve) supervisory meetings with an attendance rate of each member of the Board of Commissioners reached 100%.

Dewan Komisaris terus berupaya memantau penerapan GCG yang menjadi komitmen bersama dengan Direksi. Pengawasan terhadap implementasi GCG dilakukan untuk memastikan seluruh prinsip-prinsip GCG telah diimplementasikan di setiap tingkatan dan proses organisasi Perusahaan. Upaya yang telah dilakukan diantaranya sosialisasi dan refreshment pemahaman terkait self structure GCG kepada seluruh karyawan, pemantauan progres tindak lanjut AOI Assessment GCG 2020, termasuk perbaikan Anggar Dewan Komisaris, revu CGC dan GCG Code, inclusi anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru dengan materi ESRP, GRC, Teknologi, Pengembangan Bisnis dan tak ketinggalan serta mudah-mudah update Gubuman Usaha Khusus, Pakta Integritas dan Hubungan Kepengurusan Direksi dan Dewan Komisaris.

The Board of Commissioners continues to strive to monitor GCG implementation as the joint commitment with the Board of Directors. Supervision of GCG implementation is carried out to ensure that all GCG principles have been implemented at every level and organization work of the Company. The Company makes efforts, including dissemination and refreshment of understanding regarding the self-structure of GCG for all employees, compilation of the 2020 AOI Assessment GCG follow-up program, including improvements to the Board of Commissioners Report, review of GCG and GCG Code, inclusion of new members of the Board of Directors and Board of Commissioners with ESRP materials, GRC, Technology, Business Development and so on as well as updating Special Hygiene, Discussions, Integrity Pact, and Management Relations of the Board of Directors and the Board of Commissioners.

Dan untuk mudah kapan mana implementasi GCG dilakukan, maka PLN NP telah melaksanakan assessment GCG yang dilaksanakan oleh SPMT tahun 2022 dengan mengacu kepada parameter yang disampaikan oleh Kementerian BUMN sesuai dengan Keputusan Sekretaris Menteri (SUHK) Nomor SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance). Hasil penilaian tersebut menunjukkan penyajian atas nilainya 93,69 dengan predikat kualitas penerapan GCG "Sangat Baik"

And to find how far the GCG has been implemented, PLN NP has carried out GCG assessment by SPMT held late with reference to the parameters developed by the Ministry of SOE based on the Decree of the Secretary to the Minister of SOE No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Indicator/Parameter for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance. The assessment results show a score of 93.69 with the classification of the quality of GCG implementation "Very Good".

Penguatan sistem pengendalian internal terhutang akan terus ditingkatkan dengan adanya kewenangan, otoritas, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja secara fair, pemberian tugas maupun kemudahan yang efektif dalam setiap tahapan proses bisnis maupun pengambilan keputusan pada setiap tingkat pekerjaan dan unit dalam struktur organisasi termasuk kewenangan terhadap aset perusahaan. Evaluasi sistem pengendalian internal dilakukan secara berkala melalui kegiatan audit baik oleh audit internal maupun audit eksternal, Komisaris Komite Audit, Dewan Komisaris melakukan kajian terhadap hasil evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian internal dengan memberikan rekomendasi, saran, dan masukan yang berkualitas dalam rangka meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal.

PLN NP will actively continue to improve the strengthening of internal control system with the existence of authority, authorization, verification, reconciliation, fair work performance assessment, delivery of tasks as well as effective communication in every stage of the business process and decision-making at every level of work and unit in the organizational structure including security of company assets. Internal control system is periodically evaluated through audit activities by both internal audit and external audit. Together with the Audit Committee, the Board of Commissioners evaluate it based on the evaluation results of the implementation of the internal control system by providing useful recommendations, suggestions and input in order to increase the effectiveness of the internal control system.

Implementasi manajemen risiko secara berkelanjutan dan dilakukan secara sistem terkait untuk mencapai pengelolaan risiko yang efektif dan dapat mendukung proses pengambilan keputusan secara tepat waktu. Penerapan manajemen risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pengambilan strategis maupun operasional perusahaan sebagai pencegahan dari pencapaian GCG. Dewan Komisaris merekomendasikan bahwa pengelolaan risiko utama Perusahaan terutama terkait rencana mitigasi yang dilakukan perlu terus ditingkatkan dan dipantau, agar tidak mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Perusahaan.

Implementation of risk management continues to be developed and reviewed periodically to achieve effective risk management and can support the decision-making process in a timely manner. The implementation of risk management is an integral part of the Company's strategic and operational planning processes, as a manifestation of GCG implementation. The Board of Commissioners considers that the management of the Company's main risks, especially related to the mitigation plans that are carried out, need to be continuously improved and supervised, so as not to affect the goals and targets achievement set by the Company.

Dewan Komisaris senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pengawasan terhadap jalannya Perusahaan, serta terlibat serta secara bertanggung dengan jajaran Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris merekomendasikan bahwa berbagai upaya penguatan implementasi GCG serta terus dilakukan bersama-sama dengan seluruh insan yang bekerja perusahaan di PLN NP maupun di lingkungan PLN NP secara grup.

The Board of Commissioners always strives to improve the quality of carrying out supervisory duties on the running of the Company, and carries in harmony with the Board of Directors as stipulated in the Company's Articles of Association as well as applicable laws and regulations. The Board of Commissioners recommends the need of sustainable various efforts to strengthen GCG implementation, including collaborating and synergizing with various agencies to obtain input on corporate governance in PLN NP so that all parties within PLN NP as a group.

Pandangan Atas Penerapan Kebijakan *Whistleblowing System*

Views on the Implementation of the Whistleblowing System Policy

Whistleblowing System (WBS) sangat diperlukan untuk memenuhkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang dicerminkan dengan memberikan kesempatan kepada seluruh insan PLN NP dan stakeholder lainnya untuk dapat menyampaikan laporan mengenai indikasi pelanggaran terhadap nilai-nilai etika yang berlaku, berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan disertai dengan itikad baik. Dewan Komisaris memahami bahwa penyelenggaraan pelaporan pelanggaran yang dilakukan oleh stakeholder adalah merupakan salah satu bentuk peningkatan pertindungan stakeholder dalam rangka menjaga hak-haknya dalam berhubungan dengan PLN NP. Oleh karenanya Dewan Komisaris sangat mendukung diimplementasikannya kebijakan WBS. Pelaporan yang disertai dan indikasinya di waji ditindaklanjuti perlakuan dan tindak lanjut, termasuk pengenaan hukuman yang tepat agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran dan juga bagi mereka yang berniat melakukan hal tersebut.

The Whistleblowing System (WBS) is urgently needed to strengthen the implementation of good corporate governance which is realized by providing opportunities for the whole PLN NP personnel and other stakeholders to be able to submit reports regarding indications of violations of applicable ethical values, based on the accountable evidence accompanied by good intentions. The Board of Commissioners understands that conducting reporting of violations committed by the stakeholders is the actualization of increasing the stakeholders protection in order to guarantee their rights in dealing with PLN NP. Therefore, the Board of Commissioners strongly supports the implementation of the WBS mechanism. Reports obtained from the mechanism must receive attention and follow-up, including the imposition of appropriate penalties so as to provide a deterrent effect for the perpetrators of violations and also for those who intend to do so.

Secara umum Dewan Komisaris telah memantau bahwa pengelolaan WBS di PLN NP telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dewan Komisaris menilai bahwa penerapan WBS adalah bagian dari sistem pengendalian internal PLN NP dalam mencegah praktik penyimpangan dan kecurangan seperti korupsi, suap, gratifikasi, pencurian serta praktik kecurangan dan pelanggaran hukum lainnya. Selama tahun 2022, terdapat 3 (tiga) laporan pengaduan pelanggaran yang masuk terhadap PLN NP melalui saluran WBS. Adapun kategori pelanggaran yang disampaikan terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa, dan perbuatan melanggar hukum.

In general, the Board of Commissioners has ensured that WBS management at PLN NP has been running as expected. The Board of Commissioners considers that WBS implementation is part of PLN NP internal control system in preventing irregular and fraudulent practices such as corruption, bribery, gratuities, theft and other fraudulent practices and violations of law. During 2022, there were 3 (three) incoming reports of complaints of violations against PLN NP through the WBS channel. The categories of violations submitted are related to the process of procuring goods and services, as well as unlawful acts.

Penilaian Kinerja Komite Dewan Komisaris

Performance Assessment of Committees Under the Board of Commissioners

Dalam melaksanakan tugas pengawasannya, Dewan Komisaris PLN NP dibantu oleh 3 Komite yaitu (1) Komite Audit, (2) Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan, serta (3) Komite Nominasi dan Remunerasi. Pembentukan tugas komite-komite di bawah Dewan Komisaris berpedoman pada Piagam Komite masing-masing komite yang telah disusun. Komite di bawah Dewan Komisaris juga secara berkala melakukan telaah Piagam Komite disesuaikan dengan kebutuhan terbaru. Pembentukan tugas Komite mengacu pada Program Kerja yang telah disusun melalui mekanisme rapat komite termasuk dengan mengundang Direktorat atau divisi/unit kerja terkait serta pemaparan evaluasi. Setelahnya baru secara mandatan visit masing-masing komite di luar forum rapat sebagai dasar pertimbangan saran atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap tiap-tiap yang terkait dengan tugas dan fungsi Komite yang bersangkutan.

In carrying out its supervisory function, the PLN NP Board of Commissioners is assisted by 3 Committees, namely (1) Audit Committee, (2) Risk Management and Compliance Committee, and (3) Nomination and Remuneration Committee. Duties implementation of the committees under the Board of Commissioners is guided by the prepared Committee Charter of each committee. Committees under the Board of Commissioners also periodically review the Committee Charter in line with the latest provisions. Duties implementation by the Committees refers to the prepared Work Program through the committee meeting mechanism including by inviting related Directorate or division/work units as well as in-depth review, evaluation and/or review by each committee outside the meeting forum as a basis for providing suggestions or recommendations to the Board of Commissioners on matters related to the functions and duties of the committees concerned.

Komite Audit
Audit Committee

Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas pengendalian internal yang dijalankan oleh audit internal maupun auditor eksternal serta memastikan kecukupan dan keandalan laporan keuangan serta informasi keuangan lainnya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Selama tahun 2022, Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 20 (dua puluh) kali melalui rencana kerjanya meliputi: (1) telaah laporan keuangan Perusahaan; (2) telaah program kerja audit tahunan; (3) evaluasi kinerja operasi dan investasi; (4) pembahasan Internal Control Over Financial Report (ICoFR); (5) kecukupan pemeriksaan oleh auditor internal maupun eksternal serta (6) tindak lanjut atas hasil Komite Audit dan Dewan Komisaris.

Komite Audit melakukan evaluasi atas Laporan Kegiatan Pengawasan Intern (LKPI) dan Laporan Hasil Audit (LHA) dari Satuan Pengawasan Intern (SPI) pada Unit-unit dan Subsidiari Kantor Pusat serta 3 (tiga) buah kotak atau thru-outers, serta memonitor tindak lanjut atas hasil audit tersebut. Seluruh temuan, saldo dan rekomendasi dari hasil pelaksanaan tugas telaahan dan analisa Komite Audit selama tahun 2022 telah dikomunikasikan dan didiskusikan dengan Manajemen, Satuan Pengawasan Internal (SPI) dan auditor eksternal, serta telah disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk pertelaah dan tindak lanjut oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Audit Committee is in charge of assisting the Board of Commissioners in ensuring the effectiveness of internal controls carried out by the internal audit and external auditors and ensuring the soundness and reliability of financial statements and other financial information according to the applicable accounting standards. During 2022, Audit Committee held 20 (twenty) meetings according to work plan, including discussing the following: (1) review on the Company's financial statements; (2) review on the annual audit work program; (3) evaluation on operational and investment performance; (4) discussion on the Internal Control Over Financial Report (ICoFR); (5) audit adequacy by internal and external auditors; and (6) follow-up on directions from the GMS and the Board of Commissioners.

Audit Committee evaluates the Internal Control Activity Report (LKPI) and Audit Results Report (LHA) from the Internal Audit Unit (SPI) in the units and Sub-Directorates at the Head Office every 3 (three) months or quarterly, and examines important findings or repeated findings along with follow-up monitoring of the audit results. The overall findings, notes and recommendations from the results of the implementation of activities, reviews and analysis of the Audit Committee during 2022 have been communicated and discussed with the Management, the Internal Oversight Unit (SPI) and external auditors, and have been reported to the Board of Commissioners for improvement and follow-up by the interested parties.

Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan
Risk Management and Compliance Committee

Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan bertanggungjawab untuk memberikan dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas kebijakan dan strategi PLN NP dalam pengelolaan risiko berdasarkan kerangka Enterprise Risk Management (ERM) maupun kepatuhan terhadap, antara lain, dan kepatuhan pada kegiatan investasi.

Selama tahun 2022, Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan telah melaksanakan rapat sebanyak 27 (dua puluh) kali meliputi rencana kerjanya diantaranya membahas terkait: (1) review implementasi ERM dalam Risk Profile 2021 dan Maturity Level ERM; (2) evaluasi manajemen portofolio dan investasi termasuk evaluasi INVESTASI Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi; (3) evaluasi pengembangan usaha; (4) IT Master Plan; (5) pembahasan hasil kajian pola operasi PLTA Cirata serta (6) pengembangan pembangkit EBT, dll.

The Risk Management and Compliance Committee is responsible for assessing and providing input to the Board of Commissioners on PLN NP policies and strategies in the risk management based on the Enterprise Risk Management (ERM) framework and compliance, including risk analysis and compliance in the investment activities.

During 2022, the Risk Management and Compliance Committee held 27 (twenty) meetings according to work plan, including discussing the following: (1) review on the ERM implementation in the 2021 Risk Profile and ERM Maturity Level; (2) evaluation of portfolio management and investment including evaluation of INVESTASI of Subsidiaries and Affiliations; (3) evaluation of business development; (4) IT Master Plan; (5) discussion of the review results of the Cirata hydropower operation pattern; and (6) development of EBT power plants, etc.

Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee

Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas membantu Dewan Komisaris untuk menjalankan tugas dan wewenangnya, memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atau usulan-usulan Direksi dalam hal program pengembangan organisasi, nominasi pejabat satu tingkat di bawah Direksi, remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi termasuk kesesuaiannya dengan kebijakan PT PLN (Persero) jika diperlukan. Selama tahun 2022, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan 38 (tiga puluh delapan) kali rapat dengan membahas diantaranya (1) pengembangan SDM dan mapping SDM kandidat, (2) Integrated Management System (IMS), (3) pemetaan assess talenta, (4) pengadaan EDA, DAD Direksi, (5) pembahasan talent mobility dan (6) pembahasan remunerasi Direksi dll.

The Nomination and Remuneration Committee is in charge of assisting the Board of Commissioners in evaluating, providing input and recommendations to the Board of Commissioners on the Board of Directors proposals in terms of organizational development programs, nominations for officials one level below the Board of Directors, remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors, including compliance with PT PLN (Persero) policies, if necessary. During 2022, the Nomination and Remuneration Committee held 38 (thirty-eight) meetings to discuss, among others (1) SDM development and SDM candidate mapping, (2) Integrated Management System (IMS), (3) talentas assess mapping, (4) processing of EDA, Direksi DAD (5) discussion of talent mobility, and (6) discussion of remuneration for Directors etc.

Komite Audit, Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan serta Komite Nominasi dan Remunerasi menyampaikan laporan kinerja secara triwulanan dan tahunan kepada Dewan Komisaris sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya, mengacu pada Piagam Komite sebagai pedoman kerjanya. Dewan Komisaris secara berkala melakukan penilaian terhadap kinerja setiap komite berdasarkan laporan komite dan indikator kinerja komite yang ditetapkan. Adapun aspek penilaian kinerja komite di tahun 2022 meliputi: (a) Kehadiran rutin agenda kegiatan Dewan Komisaris, (b) Kualitas pekerjaan, (c) Kontribusi pada kegiatan Dewan Komisaris (rapat komisaris), (d) Presentasi pada Rapat Internal Dewan Komisaris (RKI), (e) Pelaksanaan rapat (RKI, RKEI, RKH) dan (f) Penyajian Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.

The Audit Committee, Risk Management and Compliance Committee and the Nomination and Remuneration Committee submit quarterly and annual committee reports to the Board of Commissioners as their accountability in carrying duties referring to the Committee Charter as their work guidelines. The Board of Commissioners periodically evaluates the performance of each committee based on the committee reports and established committee performance indicators. The aspects of evaluating committee performance in 2022 include: (a) Timeliness of the Board of Commissioners' activity agenda; (b) Quality of work; (c) Contribution to the activities of the Board of Commissioners at the communication level; (d) Presentation at the Board of Commissioners' Internal Meeting (RKI); (e) Implementation of meetings (RKI, RKEI, RKH) and (f) Preparation of Board of Commissioners' Supervisory Reports.

Dewan Komisaris secara periodik (tahunan) melakukan penilaian atas efektivitas kinerja Komite kerjanya di bawah Dewan Komisaris. Antara penilaian komite didasarkan pada pencapaian indikator kinerja atau Key Performance Indicator yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris untuk masing-masing Komite, dengan metode penilaian sendiri (self assessment) sesuai Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/2012 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-10/MBU/07/2021 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

The Board of Commissioners periodically (annually) evaluates the performance effectiveness of the Committees under the Board of Commissioners. The Committee's assessment criteria are based on the achievement of performance indicators or Key Performance Indicators that have been determined by the Board of Commissioners for each Committee, using the self-assessment method, following the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-12/MBU/2012 as amended by Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-10/MBU/07/2021 concerning Supporting Organs for the Board of Commissioners/ Supervisory Board of State-Owned Enterprises.

Dewan Komisaris menilai bahwa selama tahun 2022, Komite-komite telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Dewan Komisaris menyampaikan apresiasinya atas kinerja dan pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan oleh seluruh komite. Dukungan dari komite menjadi dasar bagi Dewan Komisaris untuk dapat memberikan evaluasi secara formal kepada Direksi untuk bisa meningkatkan pengelolaan Perusahaan.

The Board of Commissioners considers that during 2022, the Committees had carried out their duties and responsibilities fairly effectively. The Board of Commissioners would like to express the appreciation for the performance and duties implementation demonstrated by all committees. Support from the committees is the basis for the Board of Commissioners to be able to provide formal input to the Board of Directors to continue to improve the Company management.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Changes in the Board of Commissioners Composition

Selama tahun 2022 terjadi perubahan susunan dan komposisi Dewan Komisaris PLN NP sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan Keputusan RUPS tertulis tanggal 23 September 2022, memberhentikan dengan hormat Sdr. Dadong Hidayat sebagai Komisaris Utama serta mengangkat sekaligus menetapkan Sdr. Evy Haryadi sebagai Komisaris Utama dan memberhentikan Sdr. Komang Ferrinka sebagai Komisaris serta mengangkat dan menetapkan Sdr. Komaidy sebagai Komisaris.

During 2022, there were 2 (two) changes to the structure and composition of the PLN NP Board of Commissioners based on the Circular (SK) Decision dated September 23, 2022, honorably dismissing Mr. Dadong Hidayat as the President Commissioner and appointed Mr. Evy Haryadi as President Commissioner, dismissed Mr. Komang Ferrinka as Commissioner and appointed Mr. Komaidy as Commissioner.

Atas nama PLN NP, Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih kepada Sdr. Dadong Hidayat dan Sdr. Komang Ferrinka atas kontribusi dan dedikasinya selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris PLN NP. Kami juga mengucapkan selamat mengabdi kepada Sdr. Evy Haryadi sebagai Komisaris Utama dan Sdr. Komaidy sebagai Komisaris PLN NP. Dengan demikian maka jumlah anggota Dewan Komisaris PLN NP pada 31 Desember 2022 adalah:

On behalf of PLN NP, the Board of Commissioners would like to thank Mr. Dadong Hidayat and Mr. Komang Ferrinka for their contributions and dedication during serving as members of the Board of Commissioners at PLN NP. We also welcome Mr. Evy Haryadi as President Commissioner and Mr. Komaidy as Commissioner of PLN NP. Thus, the number of members of the PLN NP Board of Commissioners on December 31, 2022 is as follows:

1. Komisaris Utama	Evy Haryadi
2. Komisaris	Komaidy
3. Komisaris	Jaman Parada Hutapea
4. Komisaris	Hendra Iswahyudi
5. Komisaris Independen	Dagus Purohito
6. Komisaris Independen	Erlin Krisna W

1. President Commissioner	Evy Haryadi
2. Commissioner	Komaidy
3. Commissioner	Jaman Parada Hutapea
4. Commissioner	Hendra Iswahyudi
5. Independent Commissioner	Dagus Purohito
6. Independent Commissioner	Erlin Krisna W

Setelah tahun buku 2022, pada awal penyusunan Laporan Tahunan ini dilaksanakan kembali perubahan komposisi Dewan Komisaris. Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkular) tanggal 30 Juni 2023 telah diberhentikan dengan hormat Sdr. Jaman Parada Hutapea dan mengangkat Sdr. Ida Nuryatin Finahari sebagai Komisaris, dengan demikian komposisi Dewan Komisaris saat ini adalah sebagai berikut:

After the 2022 fiscal year, at the time of the preparation of this Annual Report, there was a change in the composition of the Board of Commissioners. Based on the Shareholders Resolution outside the General Meeting of Shareholders (Circular) dated June 30, 2023, Mr. Jaman Parada Hutapea was dismissed and Ms. Ida Nuryatin Finahari was appointed as Commissioner. Therefore, current composition of the Board of Commissioners is as follows:

1. Komisaris Utama	Evy Haryadi
2. Komisaris	Komaidy
3. Komisaris	Ida Nuryatin Finahari
4. Komisaris	Hendra Iswahyudi
5. Komisaris Independen	Dagus Purohito
6. Komisaris Independen	Erlin Krisna W

1. President Commissioner	Evy Haryadi
2. Commissioner	Komaidy
3. Commissioner	Ida Nuryatin Finahari
4. Commissioner	Hendra Iswahyudi
5. Independent Commissioner	Dagus Purohito
6. Independent Commissioner	Erlin Krisna W

Dengan komposisi ini, Dewan Komisaris berkomitmen akan terus meningkatkan evaluasi internal bersama-sama dengan segenap jajaran manajemen PLN NP.

With this composition, the Board of Commissioners is committed to continuing to improve internal activity together with all levels of PLN NP management.

Apresiasi
Letter of Appreciation

Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Pemangku Kepentingan yaitu, Pemegang Saham, Pelanggan, Mitra Bisnis, seluruh Karyawan PLN NP dan Pemangku Kepentingan lainnya atas kepercayaan dan dukungan kepada PLN NP. Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi atas kerja keras dan dedikasi Jajaran Direksi sehingga PLN NP dapat meraih pencapaian yang luar biasa di tahun 2022.

The Board of Commissioners would like to express the deepest gratitude to all Stakeholders namely Shareholders, Customers, Business Partners, the entire PLN NP Employees and other Stakeholders for their trust and support to PLN NP. The Board of Commissioners expresses its appreciation for the hard work and dedication of the Board of Directors so that PLN NP was able to achieve extraordinary achievements in 2022.

Dewan Komisaris mengajak seluruh jajaran PLN NP agar tidak berpuas diri dengan capaian yang berhasil diraih di tahun 2022. Dewan Komisaris berharap agar seluruh jajaran terus berinovasi, meningkatkan kompetensi dan mengoptimalkan berbagai peluang yang ada serta mengatasi berbagai tantangan dalam meningkatkan nilai Perusahaan untuk mengoptimalkan peluang positif guna mencapai aspirasi menjadi Perusahaan yang terdepan dan terpercaya sebagai Perusahaan Energi yang Tumbuh Berkelanjutan.

The Board of Commissioners invites the entire levels of PLN NP not to be satisfied with the achievements in 2022. The Board of Commissioners expects that all levels will continue to strive, improve competence and optimize the various existing opportunities and overcome various challenges in increasing the company's values to optimize positive opportunities, in order to realize the aspirations of becoming a leading and trusted Company as a Sustainable Growing Energy Company.

Demikianlah laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris tahun 2022 ini disampaikan.

Thus this report on the supervisory duties of the Board of Commissioners for 2022 is submitted.

Surabaya, 30 Juni 2023
Surabaya, June 30, 2023

Atas Nama Dewan Komisaris
On Behalf of the Board of Commissioners

Edy Haryadi
Komisaris Utama
President Commissioner

1. Evy Haryadi
   Komisaris Utama
   President Commissioner
2. Kamaly
   Komisaris
   Commissioner
3. Ida Nuryatin Finahari
   Komisaris
   Commissioner
4. Evvy Kresna Wardana
   Komisaris
   Commissioner
5. Handia Iswahyudi
   Komisaris
   Commissioner
6. Rappo Purjatno
   Komisaris
   Commissioner

1
3
2
6

Laporan Direksi
Report from The Board of Directors

Ruly Firmansyah
Direktur Utama
President Director

PLN NP selaku subholding pembangkitan PT PLN (Persero) mencatatkan kenaikan laba perusahaan dari tahun sebelumnya dengan menorehkan Laba Perusahaan sebesar Rp 6,58 triliun. Laba ini merupakan prestasi PLN NP karena melampaui target sebesar 6,2% dari Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP) tahun 2022 sebesar Rp4,05 triliun. Capaian ini merupakan buah kerja keras dan kerja cerdas dari seluruh karyawan PLN NP yang berpengaruh terhadap peningkatan kinerja keuangan secara korporat yang laba bersihnya tumbuh 13% dari tahun buku 2021 dari sebesar Rp 5,82 T. Capaian laba ini tidak terlepas dari kerja keras dan kerja cerdas dari seluruh Insan PLN NP yang berpengaruh terhadap peningkatan kinerja keuangan. Tak hanya itu, PLN NP juga menjelma menjadi salah satu kontributor laba investasi terbesar di seluruh PLN Group.

As the PT PLN (Persero)'s generation subholding, PLN NP managed to record the increase in the Company's profit from the previous year by generating a company profit of Rp6.58 trillion. This profit is PLN NP's achievement since it exceeded the target of 6.2% of the 2022 Annual Budget and Operational Plan (ABOP) of Rp4.05 trillion. The hard work and smart work by the entire PLN NP employees results in this achievement which brings in positive and improving corporate financial performance, where the net profit goes by 13% from the 2021 fiscal year of Rp5.82 T. This profit achievement is inseparable from the hard work and smart work by the entire PLN NP personnel which affects the improving financial performance. Not only that, PLN NP has also become one of the biggest contributors to investment profit in the entire PLN Group.

Hormat kami,

Direksi PT PLN Nusantara Power

Yours faithfully,

Board of Directors of PT PLN Nusantara Power

Para Pemegang Saham dan Para Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, pada 2022 ini PLN NP mampu mencatatkan kinerja yang baik, meskipun masih di tengah kondisi perekonomian yang menantang. Pencapaian kinerja yang membanggakan ini tidak terlepas dari komitmen Perusahaan untuk menjalankan pengembangan usaha dengan mengoptimalkan operation excellence sehingga mampu mendorong produktivitas dan efisiensi untuk menangkap peluang bisnis di tengah berbagai tantangan yang ada.

Dengan ini kami sampaikan laporan pertanggungjawaban Direksi atas pengelolaan Perusahaan untuk tahun buku 2022 beserta laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dan memperoleh opini wajar dalam semua hal yang material. Tahun 2022 Direksi dan segenap Dewan Komisaris bersama seluruh karyawan PLN NP telah berhasil melewati tahun 2022 yang penuh tantangan dengan berbagai prestasi dan penghargaan serta pencapaian penting lainnya.

Dear Shareholders and Stakeholders,

Thanks to the presence of God Almighty, Due to all blessings and gifts, PLN NP was able to record good performance in 2022, despite it was amid the challenging economic conditions. Achievement of this proud performance is inseparable from the Company's commitment to carrying out business development by prioritizing operation excellence so as to be able to boost productivity and efficiency to seize business opportunities amid the various arising challenges.

We hereby present this Board of Directors' accountability report on the Company for the 2022 fiscal year along with the audited financial statements by the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners and obtained a fair opinion in all material respects. In 2022, the Board of Directors and all teams of management and all employees of PLN NP had successfully passed 2022 which was full of challenges with various achievements and awards and other important achievements.

Tinjauan Makroekonomi 2022

Macroeconomic Review 2022

Meredanya pandemi Covid-19 sempat memberikan harapan terhadap proses pemulihan ekonomi global. Namun konflik geopolitik yang terjadi di beberapa tanaman. Khususnya perang antara Rusia dan Ukraina memberikan dampak yang sangat besar terhadap perekonomian dunia. Sanksi yang dikenakan negara barat terhadap Rusia mulai menimbulkan masalah baru, yaitu terbatasnya pasokan minyak, gas, dan gandum karena Rusia dikenal sebagai salah satu produsen terbesar dari komoditas tersebut.

Dalam itu, perang Rusia dan Ukraina menyebabkan gangguan yang lebih besar terhadap rantai pasok global. Akibatnya, prospek pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 terganggu dan sangat bergantung kepada konflik yang terjadi. Dengan rantai pasok global ini mengarah kenaikan harga komoditas, termasuk minyak, gas, dan batubara. Hal ini juga menyebabkan inflasi tinggi di banyak negara. Di tengah tantangan ketidakpastian pada rantai pasok, banyak negara yang justru melakukan pembatasan ekspor. Khususnya untuk produk pangan. Pembatasan ekspor ini terjadi karena setiap negara ingin mengutamakan pemenuhan pasokan domestiknya di tengah kondisi rantai pasok yang tidak stabil. Akibatnya, pasokan bahan baku impor untuk industri terancam langka.

Didukung fundamental ekonomi nasional yang kuat, aktivitas ekonomi domestik tetap berjalan lebih kuntas global meski menghadapi permasalahan yang pelik syok. Sejumlah berbagai kebijakan dan strategi konstruktif yang diambil Pemerintah, salah satunya melalui Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), terbukti menjadi kunci keberhasilan dalam mendorong laju ekonomi nasional. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai sebesar 5,31 persen, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan hanya sebesar 3,7 0 persen.

Sebagai bentangan perekonomian global terbesar pada akhirnya memerlukan penguatan kerja sama internasional baik skala regional maupun multilateral. Kerja sama multilateral yang lebih kuat sangat penting untuk mengatasi pertumbuhan dan stunan berbasis sistem multilateral dan untuk meningkatkan perubahan iklim dengan mempercepat emisi dan meningkatkan investasi hijau. Di sisi lain kebijakan pemerintah juga dapat mengatasi faktor struktural utama yang menghambat pertumbuhan ekonomi, membantu membangun ketahanan ekonomi, dan meringankan tekanan harga. Dibutuhkan dorongan terpadu untuk investasi di sepanjang rantai pasokan dan teknologi energi hijau yang akan mendukung keamanan energi serta transformasi mempercepat berhasil transisi energi hijau.

The Covid-19 pandemic has getting easing and it gives hope for the global economic recovery process. However, the recurring geopolitical conflicts in several regions, in particular the outbreak of war between Russia and Ukraine, resulted a huge impact on the world economy. Sanctions imposed by western countries against Russia have even created new issues, namely the limited supply of oil, gas and wheat since Russia is listed as one of the largest producers of these commodities.

Moreover, the Russian and Ukrainian wars caused even greater disruptions to the global supply chains. As a result, the prospects for economic recovery after the Covid-19 pandemic have been disrupted and are highly dependent on those conflicts. The global supply chain disruption has driven up commodity prices including oil, gas and coal. This also causes high inflation in many countries. In the middle of various limitations in the supply chain, many countries are actually implementing export restrictions, especially for food products. This aspect undertaken ensure steps each country intends to prioritize fulfilling their domestic supply amid the unstable supply chain conditions. As a result, the supply of important raw materials for industry is threatened with scarcity.

Supported by strong national economic fundamentals, domestic economic activity continued to develop despite the global conditions are still in ups and downs conditions. The Government undertakes the combination of various constructive policies and strategies, including through the Covid-19 Handling and National Economic Recovery Program (PC-PEN), that has succeeded in being the key to success in driving the national economy pace. The is reflected in Indonesia's economic growth which reached 5.31 percent, higher than the achievements in 2021 which real growth of only 3.7 0 percent.

These various challenges to the global economy ultimately demand the strengthening of international cooperation on both regional and multilateral scale. Stronger multilateral cooperation is essential to sustain the growth of a rules-based multilateral system and to mitigate climate change by curbing emissions and increasing green investment. On the other hand, supply policy can also overcome the main structural factors that impede economic growth, help build economic resilience, and relieve price pressures. The Government needs the integrated encouragement along with the supply chain of green energy technology that will support energy security and help the acceleration progress on the green energy transition.

Analisis Atas Pencapaian Kinerja 2022

Analysis of 2022 Performance Achievements

Pada tanggal 23 September 2022, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah melunculkan Holding Subholding PT PLN (Persero). Langkah ini membawa PLN pada babak baru dalam transformasi yang membawa perusahaan lebih menjadi perusahaan energi yang berfokus teknologi, inovasi dan berorientasi pada masa depan mampu. Ini NEW HUV 4.0 LINE ASSIGNING ENERGY and BEYOND.

On September 23, 2022, the Ministry of State-Owned Enterprises (SOE) officially launched PT PLN (Persero) Holding Subholding. This step brings PLN to a new chapter in its transformation along with major changes to become a technology-based, innovative and future-oriented energy company towards. The NEW PLN 4.0 LINE ASSIGNING ENERGY and BEYOND.

PT PEC merupakan salah satu anak perusahaan PT PLN (Persero) yang berhasil bertransformasi menjadi subholding PLN sebagai Generation Company 1, yaitu PT PLN Nusantara Power (PLN NP). Dengan peran tersebut, maka aset-aset pembangkitan PLN yang berbasis teknologi di seluruh wilayah akan dikonsolidasikan, sehingga PLN NP akan mengelola unit pembangkit yang lebih banyak. Ini adalah sebuah tantangan sekaligus peluang besar bagi PLN NP. Pasca PLN NP pun menjadi semakin strategis dalam pengelolaan aset-aset yang sesama ini menjadi kita dapat operasional PLN dalam melakukan investasi. Sesuanya kaya subholding PLN lainnya, PLN NP akan saling berkoneksi berubahan dalam memberikanlah sentral pasok listrik PLN ke depan.

PT PEC is a subsidiary of PT PLN (Persero) which has transformed into a PLN subholding as Generation Company 1, namely PT PLN Nusantara Power (PLN NP). Subholding as PLN's generation assets which are owned across all regions will be consolidated, so that PLN NP will manage more generating units. This is a challenge as well as a big opportunity for PLN NP. The role of PLN NP has also become increasingly strategic in managing state assets as the part of PLN's operations front line in providing electricity to the entrepreneurs. Together with three other PLN subholdings, PLN NP will be interconnected especially in maximizing PLN's business supply chain going forward.

Strategi dan Kebijakan Perusahaan

Corporate Strategy and Policy

Meningkatnya persaingan dalam penyediaan tenaga listrik yang andal, ramah dan efisien serta pandemi Covid-19 yang memberikan dampak yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penjualan tenaga listrik merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh PLN NP. Di sisi lain pertumbuhan portofolio PLN NP ke depan harus dapat mengenai kebanhasilan & sustainabilitas terpenuh di masa mendatang maksa strategi tersendiri untuk mendukung nilai investasi & sustainability dari portofolio bisnis PLN NP. Dukungan tersebut dilakukan melalui implementasi efisiensi ini subsidiary.

The increasing competition in the supply of reliable, safe and efficient electricity as well as the Covid-19 pandemic which brought a notable impact on economic growth and sales growth of electricity, are challenges that must be faced by PLN NP. On the other hand, future development by PLNNP portfolio is required to be able to guarantee the corporate success and sustainability in the future through a corporate strategy to support value creation and sustainability of PLN NP business portfolio. The support is carried out through the implementation of streamlined subsidiaries.

Dalam merespons dan mengantisipasi tantangan dan isu strategis tersebut, Direksi telah menyusun program-program strategis sebagai arah dan kendali program kerja Perusahaan agar dapat mencapai target perusahaan dengan mengacu pada arah Grup Bisnis Perusahaan, grup RJPTI, 2021–2030, pertumbuhan bauran EBT 23% pada tahun 2021 dan mendukung komitmen pemerintah mampu hadiah netral di tahun 2060. Program kerja strategis PLN NP selaperasional tertuang dalam RKAP 2022 yang telah disetujui oleh Pemegang Saham, antara lain: (1) pemurnian market share & peningkatan kapasitas pembangkit, (2) pengembangan usaha dan peningkatan revenue (3) penyediaan listrik dengan 3 prinsip ketahanan (security, affordability, low emission).

In responding to and addressing these strategic challenges and issues, the Board of Directors has developed strategic programs as the direction and corridors of the Company's work program, in the framework to achieve targets of the Company with reference to the Company's business line map, given RJPTI, 2021–2030, fulfillment of the EBT mix by 2021 and support the government's commitment to becoming carbon neutral in 2060. PLN NP's strategic work program as stated in the 2022 WKAP already approved by the Shareholders, includes (1) reducing market share and increasing power plant capacity, (2) business development and revenue increase, (3) supply of electricity with 3 principles of resilience (security, affordability, low emission).

Strategi yang dilakukan dalam meraihkan pencapaian market share dan peningkatan kapasitas pembangkit yaitu meningkatkan penjualan tenaga listrik melalui pengembangan 4x80 Ton Masse Tower Blok 2 (320 MW), Muara Tawar Blok 3 (250 MW) & Blok 4 (250 MW) yang ditargetkan COD pada tahun 2023 dan unit awal pembangkit EMC (also dan PLTA di wilayah Jawa Timur dengan total kapasitas sebesar 5.088,0 MW. Melaksanakan pengembangan pembangkit EBT yang tercantum dalam green RUPTL 2021-2030 baik melalui skema kepemilikan sendiri (PMTL), exports where maupun minority shares dengan rencana sebesar 3.833,1 MW di tahun 2022-2026 dan semara 6,7 GW sampai dengan tahun 2030.

PLN NP applies strategies in dealing with declining market share and increasing power plant capacity in order to increase the electricity sales through the development of 4x80 Ton Masse Tower Blok 2 (320 MW), Muara Tawar Blok 3 (250 MW) & Blok 4 (250 MW) which are planned to be COD in 2023 and transfer of EMC, also and hydropower plant assets in the East Java region with a total capacity of 5,088.0 MW. The Company also carries out the EBT power plants development that are listed in the green RUPTL 2021-2030 either through self-ownership schemes (PMTL), exports where majority shares with an initiation of 3833.1 MW in 2022-2026 and the planned 6.7 GW up to 2030.

Adapun strategi pengembangan usaha dan peningkatan revenue diantaranya peningkatan pangsa pasar dalam bidang Jasa O&M pembangkit di semua regional dan skema jasa Engineering Procurement Construction (EPC) melalui anak perusahaan (PT Nusatara Operation), serta meningkatkan jasa Maintenance Repair Overhaul (MRO) di pasar nasional maupun internasional. Menyediakan Spare Part untuk lingkungan PLN Group maupun pembangkit IPP dan memiliki jasa layanan Digital Power Plant melalui Sistem Optimasi Kombinasi & Efisiensi Unit Pembangkit Terintegrasi (SOKEU).

The strategy for business development and increasing revenue includes increasing market share in the O&M services for power plants in all regions and the Engineering Procurement Construction (EPC) service business through its subsidiary (PT Nusatara Operation), as well as increasing Maintenance Repair Overhaul (MRO) services in the national as well as international market. It also includes providing Spare Parts for the PLN Group environment and IPP power plants, and also having Digital Power Plant services through the Integrated Scheduling Unit Reliability & Efficiency Optimization System (SOKEU).

PLN NP mendukung penyediaan tenaga listrik dengan 3 aspek ketahanan, yaitu, security, affordability dan low emission diantaranya melalui program: vsat switching, anti blank out dan unit fast response, modifikasi pendaftaran, optimasi (%) melalui PLTS substitusi (%, co-firing dan buildopa tanaman energi untuk mendukung program co-firing PLTU batubara.

PLN NP supports the supply of electricity with 3 principles of resilience, namely security, affordability and low emission including through programs: vsat switching, anti blank out and fast response units, modification of registration, optimization of (%) through IPP substitution of (%, co-firing and power plant cultivation energy to support the coal power plant co-firing program.

Proses yang Dilakukan Direksi untuk Memastikan Implementasi Strategi
Processes by the Board of Directors to Ensure the Strategy Implementation

Direksi berperan aktif dalam merumuskan strategi dan kebijakan PLN NP, yang meliputi target usaha, rencana eksperasi teknologi, sumber daya manusia, dan berbagai hal lainnya. Direksi melakukan pengawasan, monitoring serta mengevaluasi implementasi strategi. Perusahaan. Implementasi strategi dan kebijakan strategis memiliki peran penting dalam mengarahkan Perusahaan mencapai sasaran strategi yang ditetapkan.

The Board of Directors is actively involved in formulating PLN NP strategies and policies, which include business targets, expansion plans, technology, human resources, and various other matters. The Board of Directors supervises, monitors and oversees the implementation of the Company's strategy. Strategy implementation and strategic policies have an important role in directing the Company to achieve the established strategic goals.

Dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis, Direksi berperan penting dalam memastikan pelaksanaannya dijalankan dengan baik dalam seluruh lapisan organisasi. Beberapa tugas dan peranan utama Direksi dalam perumusan strategi di antaranya mengevaluasi situasi internal dan eksternal perusahaan untuk memahami lingkungan bisnis dan tantangan yang harus dihadapi, serta menentukan tujuan strategis yang menjadi dasar dalam perumusan strategi dan kebijakan Perusahaan.

In formulating strategies and strategic policies, the Board of Directors takes important role in ensuring that they are implemented properly at all organization levels. Some of the main duties and roles of the Board of Directors in formulating strategy include analyzing the Company's internal and external situations to understand the business environment and challenges that must be faced, as well as determining strategic objectives as the basis for formulating strategies and policies of the Company.

Peranan Direksi dalam Perumusan Strategi dan Kebijakan Strategis

The Role of the Board of Directors in Formulating Strategy and Strategic Policy

Dalam memastikan implementasi strategi dan kebijakan strategis Perusahaan berjalan dengan baik, Direksi melakukan pengawasan yang diperkuat sebagaimana yang tertuang dalam POJK dan ICFT untuk memastikan implementasi strategi dan kebijakan strategis berada dalam jalur yang tepat, melaksanakan strategi tersebut, diharapkan dapat memberikan kerangkanya kinerja perkembangan yang strategis guna mewujudkan pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan.

In ensuring the implementation of the Company's strategic strategies and policies is carried out properly, the Board of Directors makes the necessary supervision as stated in the POJK and ICFT to ensure that the implementation of the strategies and strategic policies is on the right track, the overall strategy is expected to encourage the creation of excellent power plant performance in order to ensure sustainable revenue growth.

Perbandingan Hasil Kinerja dengan Target 2022

Comparison of Performance Results with 2022 Targets

Penerapan strategi dan kebijakan strategis PLN NP yang adaptif telah mampu meningkatkan kinerja operasional dan keuangan PLN NP tetap positif, meskipun di tengah tantangan akibat pasca Covid-19. Sepanjang tahun 2022 PLN NP berupaya untuk mencapai/melampaui target yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP 2022). Sampai dengan 31 Desember 2022, secara umum kinerja yang dicapai PLN NP berhasil merupai target yang positif, dengan rincian sebagai berikut:

implementation of adaptive strategy and strategic policies within PLN NP has been able to maintain positive operational and financial performance of PLN NP, despite the challenges caused by the Covid-19. Throughout 2022, PLN NP strived to realize the established targets as stated in the Company's Annual Budget and Operational Plan (RKAP 2022). As of December 31, 2022, general performance recorded by PLN NP achieved a positive target, with the following details:

Tingkat Kinerja Perusahaan

Penilaian tingkat kinerja kesehatan PLN NP yang dilakukan berdasarkan kriteria Penilaian yang ditetapkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) RKAP Tahun 2022. Sampai dengan Desember 2022, menghasilkan tilai "AAA" kategori "Sehat" dengan monopoli skor 92,89 dari bobot 100, sementara tahun sebelumnya ada di posisi 95,125%. Capaian tersebut diperoleh dari 6 aspek yaitu (1) Nilai Ekonomi Sosial (97,97); (2) Inovasi Model Bisnis (92,84); (3) Kepemimpinan Teknologi (12,50); (4) Pengembangan Investasi (8,67); (5) Pengembangan Talenta (11,00); (6) Aspek Kepatuhan (2,00); Secara umum, realisasi indikator kinerja Manajemen tersebut inisiasi dalam kategori SANE, namun apabila dibandingkan dengan target KPI 2022, ada beberapa hal yang perlu peningkatan antara lain Pendapatan diluar PLN Group dan Mitradesa (UC PLTA Lhoka

Company Performance Level

Assessment of PLN NP health performance level was carried out based on the Assessment Criteria stipulated at the 2022 AGMS by General Meeting of Shareholders (GMS). As of December 2022, it achieved AAA1 score in the "Healthy" category by achieving a score of 92.89 out of 100, while the previous year it received 95.125%. The achievement was obtained from 6 aspects, namely (1) Social Economic Value (97.97); (2) Business Model Innovation (12.84); (3) Technology Leadership (12.50); (4) Investment Development (8.67); (5) Talent Development (11.00); (6) Compliance Aspect (2.00). In general, the realization of this management performance indicators is in the SEHAT category, but when compared to the 2022 KPI target, there are several things that need improvement, including: Revenue outside the PLN Group and Mitradesa (UC of Lhoka 2x11

Kinerja Keuangan

Realisasi Laba Bersih sampai dengan akhir tahun 2022 sebesar Rp0,08 triliun atau 162,24% dari target RKAP 2022 sebesar Rp0,05 triliun. Pencatatan Laba sebesar Rp0,08 triliun ini meningkat 1,5% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 1,62 triliun. Dalam satu tahun yang dilakukan PLN NP lebih dengan mengoptimalkan strategi Co-Investment atau kolaborasi investasi bersama mitra bisnis. PLN NP menjadi salah satu kontributor terbesar kinerja keuangan PLN secara holding. Transformasi yang dijalankan PLN holding juga berperan besar dalam mendorong kinerja NP menjadi semakin agile dan efisien.

Adapun realisasi Biaya Usaha sampai dengan akhir tahun 2022 sebesar Rp527,67 triliun atau 87,33% dari target RKAP 2022 sebesar Rp603,91 triliun. Sementara itu, Biaya Pokok Penjualan (BPP) PLN NP sampai dengan akhir tahun 2022 mencapai Rp1.877,03/kWh atau 89,19% dari target RKAT tahun 2022 sebesar Rp1.334,00/kWh. Harga Jual PLN NP sampai dengan akhir tahun 2022 mencapai Rp1.324,76/kWh atau 99,38% dari target RKAP tahun 2022 sebesar Rp1.333/kWh.

Pendapatan Usaha PLN NP tahun 2022 sebesar Rp27,20 triliun atau mencapai 92,24% dari target RKAP tahun 2022 sebesar Rp29,38 triliun, meruun 1,81% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp28,31 triliun. Penurunan tersebut didominasi oleh menurunnya penjualan tenaga listrik. Komposisi Pendapatan Usaha ini diperoleh dari:

- Penjualan Tenaga Listrik sebesar sebesar Rp25,88 triliun atau 92,74% dari target RKAP tahun 2022 dikarenakan penyapuan 49% jual yang lebih tinggi dari target EBUS.
- Jasa O&M sebesar Rp0,38 triliun atau 69,72% dari target RKAP tahun 2022, dikarenakan belum rampungnya beberapa kontrak WMC sesuai asumsi RKAP.
- Jasa EPC mencapai Rp0,20 triliun atau 10,83% dari target RKAP tahun 2022 dikarenakan penundaan beberapa penyapuan EPC lainnya karena prioritaskan investasi.
- Usaha lain sebesar Rp231,38 Miliar atau 77,13% dari target RKAP tahun 2022 dikarenakan PRKL OH Internasional, PV Rooftop belum teralisasikan.

Pengelolaan Pembangkit Eksisting

Kinerja pembangkit eksisting PLN NP di tahun 2022 sebagai tetap mempertahankan atau lebih tinggi dengan pencapaian rata-rata di atas 100% dari yang ditargetkan. Unit Eksisting PLN NP menunjukkan pencapaian yang baik berdasarkan RKAP 2022, antara lain:

Financial Performance

Realization of Net Profit until the end of 2022 amounted to Rp0,08 trillion or 162.24% of the 2022 RKAP target of Rp0,05 trillion. The Company recorded a profit of Rp0,08 trillion, increased by 1.5% compared to the previous year which amounted to Rp1,62 trillion. PLN NP took efforts to implement the Co-investment strategy or investment cooperation with the limited partners. PLN NP is one of the biggest contributors to PLN's financial performance as a holding base. PLN holding transformation also takes a major role in encouraging NP performance to become more agile and efficient.

The realization of Operating Expenses by the end of 2022 was Rp527,67 trillion or 87.33% of the 2022 RKAP target or Rp603,91 trillion. Meanwhile, PLN NP's Main Cost of Supply (BPP) as of the end of 2022 reached Rp1.877,03/kWh or 89.19% of the 2022 RKAP target of Rp1.334,00/kWh. The selling price of PLN NP by the end of 2022 reached Rp1.324,76/kWh or 99.38% of the 2022 RKAP target of Rp1.333/kWh.

PLN NP Operating Revenue in 2022 amounted to Rp27,20 trillion or reached 92.24% of the 2022 RKAP target of Rp29,38 trillion, a decrease of 1.81% compared to 2021 of Rp28,31 trillion. The decline was dominated by the decline in electricity sales. The composition of this operating income is obtained from the following:

- Electricity sales Rp25,88 trillion or 117.49% of the 2022 ABUK target due to the achievement of selling kWh which is higher than the ABUK target.
- O&M revenue Rp 0,38 trillion or 69.72% of the 2022 RKAP target due to several PMC contracts not being realized according to the ABUK assumptions.
- EPC revenue reached Rp0,20 trillion or 10.83% of the 2022 RKAP target due to delays in several other EPC works due to investment prioritization.
- Other businesses Rp231,38 billion or 77.13% of the 2022 RKAP target because PRKL OH International, PV Rooftop have not been executed.

Existing Power Plant Management

The existing power plants performance of PLN NP in 2022 is still proud to note the fact with an average achievement above 100% of the target. PLN NP's Existing Unit shows good achievements based on the 2022 ABUK including:

- Realisasi EAF yaitu 84,12% atau mencapai 103,38% dari target RKAP tahun 2022 sebesar 81,38%. Pencapaian ini didukung oleh penerapan manajemen aset terutama implementasi preventive maintenance, predictive maintenance, patrol check, first line maintenance, dan housekeeping yang konsisten di samping itu ketiadaan overhaul unit secara dengan kaidah 8QM (On time, on scope, on cost, on quality, on safety and on clean).
- Realisasi EUOR yaitu 0,45% atau mencapai 100,00% dari target RKAP tahun 2022 sebesar 0,45%. Pencapaian ini dipengaruhi oleh penerapan manajemen aset terutama implementasi preventive maintenance, predictive maintenance, patrol check, first line maintenance, housekeeping yang konsisten dan pelaksanaan overhaul yang efektif sehingga dapat meminimalisasi terjadinya breakdown atau gangguan selama interval overhaul.
- Realisasi SAIDI yaitu 0,11 kejadian atau mencapai 147,00% dari target RKAP tahun 2022 sebesar 0,80 kejadian. Nilai SAIDI semakin dibandingkan tahun 2021 sebesar 0,00 kali/unit, terutama dipengaruhi oleh penerapan manajemen aset terutama implementasi preventive maintenance, predictive maintenance, patrol check, first line maintenance, housekeeping yang konsisten dan pelaksanaan overhaul yang efektif sehingga dapat meminimalisasi terjadinya breakdown atau gangguan selama interval overhaul.
- Realisasi SOF yaitu 0,31% atau mencapai 100,64% dari target RKAP tahun 2022 sebesar 0,31%.
- Realisasi NPHR yaitu 2.410,18 kcal/kWh atau mencapai 101,35% dari target RKAP tahun 2022 sebesar 2.391 kcal/kWh. Nilai Tara Kalor Netto merosot dibandingkan tahun 2021 sebesar 2.388,00 kCal/kWh. Penurunan Asal tahi tersebut terutama disebabkan oleh pengoperasian PLTU Tipe yang lebih rendah dari tahun 2021.
- Realisasi NCF yaitu 27,23% atau mencapai 111,17% dari target RKAP tahun 2022 sebesar 25,50%. Net Capacity Factor (NCF) adalah rasio antara total produksi netto dengan daya mampu netto unit pembangkit riil dengan jam operasi tertentu. NCF PLN NP Existing lebih rendah dari tahun sebelumnya dikarenakan pengurangan penyaluran kWh pada Unit Listrik, Muara Tawar, Muara Karang, dan Tanjung.
- Daya Mampu Netto (DMN) sebesar 9.169 MW atau terdistribusi sebesar 13,07% terhadap Sistem Jawa-Bali.

- EAF realization marked 84.12% or reaching 103.38% of the 2022 RKAP target of 81.38%. This achievement was supported by the implementation of asset management, especially the implementation of preventive maintenance, predictive maintenance, patrol checks, first line maintenance, housekeeping that consistent in addition to the avoidance of overhaul units in line with the 8QM (On time, on scope, on cost, on quality, on safety and on clean).
- EUOR realization is 0.45% or reaching 100.00% of the 2022 RKAP target of 0.45%. This achievement was influenced by the implementation of asset management, especially the implementation of preventive maintenance, predictive maintenance, patrol checks, First Line Maintenance, consistent house keeping and effective overhaul implementation so as to minimize the occurrence of breakdowns during overhaul intervals.
- SAIDI realization namely 0.11 times/unit or reaching 147.00% of the 2022 RKAP target of 0.80 times/unit. SAIDI value decreased compared to 2021 by 0.00 times/unit, mainly influenced by the implementation of asset management, especially the consistent implementation of preventive maintenance, predictive maintenance, patrol checks, First Line Maintenance, House Keeping, and effective overhaul implementation so as to minimize breakdowns or interruptions during overhaul intervals.
- SOF realization namely 0.31 times/unit or reaching 100.64% of the 2022 RKAP target of 0.31 times/unit.
- NPHR realization is 2,410.18 kcal/kWh or 101.35% of the 2022 RKAP target of 2,391 kcal/kWh. Net Calorific Tara Value decreased compared to 2021 by 2,388.00 kCal/kWh. The decrease in heat rate was mainly due to the operation of the Low Power Plant which was lower than in 2021.
- NCF realization, namely 27.23% or reaching 111.17% of the 2022 RKAP target of 25.50%. Net Capacity Factor (NCF) is the ratio between the total net production and the net installed power of the generating unit multiplied by the hours for a certain period. NCF of the Existing PLN NP was lower than the previous year due to a decrease in sales of kWh at the Listrik, Muara Tawar, Muara Karang and Tanjung Units.
- PLN NP Net Capacity of 9,169 MW or contributes 13.07% to the Java-Bali System.

Dalam pengelolaan Energi K3, kecelakan nihil kecelakan kerja fatal dan kecelakan kerja yang mengakibatkan cacat tetap. Kecelakan nihil kecelakan kerja fatal dan kecelakan kerja yang mengakibatkan cacat tetap merupakan salah satu indikator dalam mengukur keberhasilan pengelolaan K3 di lingkungan PLN NP. Sepanjang tahun 2022, PLN NP berhasil mencapai nihil kecelakan kerja fatal dan kecelakan kerja yang mengakibatkan cacat tetap.

In terms of OHSE performance management, PLN NP achieved zero accidents which is an indicator in measuring the success of OHS management in PLN NP. Throughout 2022, PLN NP succeeded in achieving zero fatal accidents and zero accidents resulting in permanent disability.

Pengelolaan Pembangkit Jasa O&M PLTU FTP-1 AMC Jawa

Sampai dengan akhir tahun 2022, beberapa kinerja operasional pembangkit O&M PLTU FTP-1 AMC Jawa menunjukkan pencapaian yang baik berdasarkan RKAP 2022, antara lain:

- Realisasi EAF pada 3,19% atau 167,28% dari target RKAP tahun 2022 sebesar 3,49%.
- Realisasi SAIDI pada 2,10 kali/unit atau 140,00% dari target RKAP tahun 2022 sebesar 2,50 kali/unit.
- Realisasi NCF pada 73,87% atau mencapai 114,18% dari target RKAP tahun 2022 sebesar 67,51%.
- Realisasi FOF1 pada 6,43% atau mencapai 102,71% dari target RKAP tahun 2022 sebesar 6,67%.

Management of O&M Services Power Plants, Java AMC FTP-1 CFPP

As of the end of 2022, several operational performances of Java AMC FTP-1 CFPP (O&M) power plant demonstrates good achievements based on the 2022 RKAP, including:

- EAF realization is 3.19% or 167.28% of the 2022 RKAP target of 3.49%.
- SAIDI realization is 2.10 time/unit or 140.00% of the 2022 RKAP target of 2.50 time/unit.
- NCF realization, namely 73.87% or reaching 114.18% of the 2022 RKAP target of 67.51%.
- FOF1 realization, namely 6.43% or reaching 102.71% of the 2022 RKAP target of 6.67%.

Produksi Listrik

Produksi tenaga listrik unit eksisting PLN MP pada tahun 2022 adalah sebesar 17.284,31 GWh atau mencapai 111,70% dari target adalah RKAP 2022 sebesar 15.476,43 GWh, namun turun 17,19% dibandingkan produksi tahun 2021 sebesar 18.848,00 GWh. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan produksi tenaga listrik pada Unit Gorontalo, Nusa Tenggara, Maluku Barong dan Poboya. Dalam pelaksanaan untuk meng-GBT dan sebesar PLTU batubara yang diterbit dan dialokasi PLN MP guna meningkatkan realisasi co-firing PLTU batubara sehingga bauran energi menjadi lebih ramah lingkungan. Hal tersebut dibuktikan di tahun 2022 PLN MP berhasil melakukan komersialisasi co-firing di 10 (sepuluh) unit PLTU meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 8 (delapan) PLTU.

Electricity Production

Electricity production by the existing PLN MP unit in 2022 is 17,284.31 GWh or reaching 111.70% of the 2022 RKAP target of 15,476.43 GWh, but a decrease of 17.19% compared to 2021 production of 20,848.00 GWh. The decrease was mainly influenced by the decrease in electricity production at the Gorontalo, Nusa Tenggara, Maluku Barong and Poboya units. The Board of Directors is committed to 100% for all coal power plants owned and managed by PLN MP in order to increase the realization of co-firing of coal power plants so that the energy mix becomes more environmentally friendly. It is proven by PLN MP success commercializing co-firing in 2022 at 10 (ten) units (125%), increase from the previous year of 8 (eight) units.

Penjualan Listrik

Realisasi Penjualan Energi Listrik sampai dengan akhir tahun 2022 sebesar 16.170,80 GWh atau 111,11% dari target adalah RKAP 2022 sebesar 14.608,30 GWh, namun menurun dibandingkan tahun 2021 sebesar 19.845,44 GWh. Jika dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2021, maka mengalami penurunan sebesar 17,98%. Hal ini disebabkan karena adanya penerbitan penyesuaian batubara oleh PLN yang berdampak pada capacity factor PLTU Pelabuhan. Dalam hal pembangkit PLTGU dan PLTU gas provide faktor lain mendapatkan alokasi energi yang sangat tinggi karena Sistem Jawa Bali mengalami krisis batubara, sehingga beberapa unit dioperasikan menggunakan bahan bakar minyak dan untuk pembangkit batubara PLTU Pelabuhan pada tahun ini hanya dioperasikan CT sekitar 90% berdampak dari pemerataan penyaluran batubara oleh PLN.

Electricity Sales

By the end of 2022, realization of Electrical Energy Sales amounted to 16,170.80 GWh or 111.11% of the 2022 RKAP target of 14,608.30 GWh, but decreased compared to 2021 of 19,845.44 GWh. When compared to the realization in the same period in 2021, it decreased by 17.98% due to the stopping of coal absorption by PLN which impacted the capacity factor of Pelabuhan PLTU. Java Bali System was experiencing a coal crisis and several units were operated using oil fuel and for the Pelabuhan PLTU coal power plant, this year only around 90% CT was activated, due to even distribution of coal absorption by PLN.

Kendala yang Dihadapi dan Langkah Penyelesaiannya

Obstacles Faced and the Settlement Steps

Tantangan yang dihadapi PLN NP tahun 2022, diantaranya adalah meningkatnya harga energi primer yang belum dimitigasi dengan tarif dasar listrik, hadirnya pemain baru di bidang energi baru, dan juga teknologi, dan tren di industri kelistrikan global (EDE (Decentralization, Decentralization, Digitalization and Electrification). Digitalisasi menjadi kebutuhan untuk mendorong pengelolaan bisnis pembangkit listrik dapat dijalankan lebih efisien. Disamping itu, adanya peraturan tentang yang sudah tua menyebabkan tingginya dapat efisien, menyebabkan pangsa pasar engineering usaha penyedia tenaga listrik, imbalan lingkungan dan dampak pandemi Covid-19 yang masih terjadi menjadi kendala-kendala yang dihadapi PLN NP. Oleh karena PLN NP dituntut untuk beradaptasi meningkatkan keunggulan kompetitif dan kemampuan dalam menjalankan usahanya sebagai sub holding pembangkitan PLN.

Berbagai langkah dijalankan PLN NP dalam mengatasi kendala-kendala di atas antara lain pertama, mempertahankan dan meningkatkan skala ekonomi dengan berfokus pada optimalisasi kinerja pembangkit, peningkatan fungsi dan responsi pemanfaatan teknologi terbaik dan menyesuaikan posisi yang sedang dibentengkan yang akan mempengaruhi kontribusi pasokan listrik. BPP listrik, entry investasi kerja dan kesediaan pembangkit. Kedua, PLN NP melakukan investasi dan pengembangan usaha, bisnis pasa DAN, produk *beyond kWh* antara lain MBG, biomass, co-firing, rooftop solar PV dan DAN yang akan menjadi potensi pasar baru. Ketiga, PLN NP melakukan inovasi pengembangan bisnis, kerjasama/aliansi dengan entra some yang kompetitif, seperti water treatment, digital right house, efficiency dan management industri, virtual power plant dan ekosistemnya. Strategi tersebut akan berjalan siklus yang terus menjadi suatu proses pelaku pertumbuhan bisnis PLN NP secara berkelanjutan.

Dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan energi primer khususnya penting dalam menjaga kelangsungan operasional pembangkit, untuk tujuan PLN NP berupaya memastikan ketersediaan dan logistik batubara dan gas sebagai energi primer pembangkit dapat terus berjalan berkelanjutan. PLN NP bersama dengan pemangku kepentingan terkait melakukan komunikasi dan koordinasi untuk mengoptimalkan sistem logistik dan infrastruktur untuk memastikan kebutuhan batubara terpenuhi dan memastikan upaya-upaya antisipasi apabila hal tersebut tidak terjadi lagi. Dalam jangka panjang, PLN NP berkomitmen untuk menggantikan batubara dengan energi baru terbarukan, sehingga PLN NP siap dengan road map pengembangan pembangkit rendah dan renewable energy.

PLN NP faced challenges in 2022, including the increasing primary energy prices which have not been mitigated for the basic electricity tariff, the emergence of new players in the field of electrical energy, technological disruption, and trends in the global electricity industry (EDE (Decentralization, Decentralization, Digitalization and Electrification). Digitalization is a necessity to encourage the management of the power plant business to run more efficiently. Furthermore, the condition of old existing power plants allowing innovation to be efficient, the existing market share of the electricity users business segment, environmental regulations and the ongoing impact of the Covid-19 pandemic are other obstacles faced by PLN NP. Therefore, PLN NP is required to adapt to create competitive advantage and compete in running the role as PLN's generation sub-holding.

PLN NP took various steps in overcoming the above obstacles, including first, maintaining and improving the core businesses by focusing on optimizing the power plant performance, increasing fast response functions, utilizing the newest tools and completing projects under development that will affect the security of electricity supply, BPP electricity, as well as work safety and generation reliability. Second, PLN NP invests and develops business, DAN service business, products beyond kWh including MBG, biomass, co-firing, rooftop solar PV and DAN which will become new business potentials. Third, PLN NP initiates business development, collaboration with competent business partners, such as water treatment, digital light houses, industrial efficiency and management, virtual power plants and so on. These strategies will become a continuous cycle in order to achieve sustainable performance growth of PLN NP.

In this context to maintain the security of primary energy supply, the power plants operational continuity, maintenance takes the important roles, so that PLN NP tasks to ensure the preservation of supply of coal and gas as the primary energy for the power plants. PLN NP together with the relevant stakeholders communicates and coordinates to improve the logistics system and infrastructure to ensure the fulfillment of coal needs and seek permanent solutions so that the coal supply crisis does not occur. In the long term, PLN NP is committed to replacing coal with the renewable energy, so that PLN NP is in line with the road map for the development of green power plants and renewable energy.

Dalam hal keterbatasan pendanaan, PLN NP mengembangkan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai mitra strategis yang kompeten, baik dari dalam maupun luar negeri. PLN NP juga berupaya memaksimalkan potensi PLN menjadi pembangkit energi primer/energi alternatif atau pengelola aset pembangkit PLN ke PLN NP. Tantangan lain yang dihadapi tidak jauh adalah peningkatan kompetensi SDM secara berkesinambungan untuk menjadi yang terdepan dan terpercaya sebagai perusahaan dalam hidang energi, serta melakukan kerjasama strategis dengan berbagai penguruan tinggi dalam penyediaan tenaga kerja terampil dengan kualifikasi teknis tertentu.

In terms of limited funding, PLN NP develops synergy and collaboration with various competent strategic partners, both from domestic and abroad. PLN NP is also trying to utilize PLN's potentials to become an energy primer plant / namely through the acquisition or transfer of PLN generating assets into PLN NP. Another challenge faced is none other than continuous improvement of HR competence to become a leading and trusted company in the energy sector, as well as conducting strategic partnerships with various tertiary institutions in providing skilled manpower with technical expertise in the power plants.

Pengelolaan SDM Secara Berkelanjutan

Sustainable HR Management

PLN NP memandang sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu aset yang berharga dan penentu keberhasilan perusahaan dalam mencapai visi dan melaksanakan misinya. Sehubungan SDM tentuk yang profesional, berkompeten, berkredibel dan berintegritas akan membuat PLN NP memiliki dasar yang kuat untuk terus tumbuh dan berkembang mencapai tujuan Perusahaan. Pencapaian strategis SDM dapat membantu meningkatnya kinerja PLN NP secara berkelanjutan perlu difokuskan pada peningkatan kemampuan kepemimpinan, peningkatan kapabilitas organisasi, membangun strategi kompetensi dan produktivitas untuk mengelola tantangan yang terjadi hingga saat ini maupun di kemudian.

PLN NP considers human resources (HR) as one of the assethave and determinants of the Company's success in realizing vision and carrying out mission. The best human resources who are professional, competent, dedicated and with integrity will make PLN NP have a strong foundation to continue to grow and develop to achieve the company's goals. HR strategic roles in supporting performance achievement of PLN NP as a whole needs to be the asset on improving leadership capabilities, increasing organizational capabilities, building competency and productivity strategies to overcome gaps that exist to be continuously being refined.

PLN Academy, telah menyusun berbagai program pelatihan dan pengembangan karyawan yang tujuan untuk meningkatkan kualitas dan kapabilitas karyawan tentunya pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Jenis program pembelajaran meliputi Pelatihan Teknis dan Non Teknis, Sertifikasi Teknis dan Non Teknis, Workshop Teknis dan Teknis, Program Purna Tugas, Soft Leadership, Stakeholder (PJB Class) dan PGEO. Selama tahun 2022, realisasi program pembelajaran (LMS PLN NP telah melaksanakan pembelajaran sebanyak 67% telah mencapai 118.67% dari target RKAP dengan 10.680 peserta mencapai 86.24% dari target RKAP. Adapun realisasi anggaran pendidikan dan pelatihan karyawan adalah sebesar Rp67,29 miliar atau 101,13% dari total RKAP yang telah ditetapkan.

PLN Academy has developed various employees training and development programs with the aim of improving the quality and capabilities of employees so that ultimately it can increase the Company's productivity. Types of learning programs include Technical and Non-Technical Training, Technical and Non-Technical Certification, Technical and Technical Workshops, Full Service Programs, Soft Leadership, Stakeholders (PJB Class) and PGEO. During 2022, PLN NP realized HR learning program through 67% batches of training reaching 118.67% of the 10,031 target with 10,680 participants, achieving 86.24% of the 12,031 target. Meanwhile, the realization of the employee education and training budget amounted to Rp67,29 billion or 101.13% of the total predetermined RKAP.

Pengembangan skill dan kompetensi karyawan masih fokus dilingkatkan sejalan dengan pertumbuhan bisnis PLN NP, berikut dengan tantangan challenge, leadership dan entrepreneurial challenge. Dibalik optimis bahwa peningkatan pengetahuan dan keterampilan karyawan PLN NP akan dapat mendorong peningkatan produktivitas dan juga daya saing SDM di era kompetisi regional seperti saat ini.

The Company is still improving the skills and competencies development in line with PLN NP business growth, started to challenges, leadership and entrepreneurial challenges. The Dawn of Unicorn is optimistic that increasing the knowledge and skills of PLN NP employees will be able to boost productivity and also HR competitiveness in the current era of regional competition.

Guna memastikan bahwa seluruh karyawan berkontribusi secara maksimal terhadap kemajuan Perusahaan, PLN NP telah mengukur keterlibatan karyawan terhadap Perusahaan secara berkala melalui Employee Engagement Survey tahun 2022 dengan skor 69,88% meningkat dari skor tahun lalu sebesar 63,88. Sedangkan tingkat kepuasan kerja karyawan yang tercermin dalam Job Satisfaction Survey mencapai skor sebesar 81,08% dengan kategori Sangat Puas, meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 76,7% dengan kategori Sangat Puas.

In the context to ensure that all employees contribute optimally to the Company progress, PLN NP regularly measured employee engagement with the Company through the 2022 Employee Engagement Survey with a score of 69.88%, an increase from last year's score of 63.88. Meanwhile, the employee job satisfaction index as reflected in the Job Satisfaction Survey achieved a score of 81.08% in the Very Satisfied category, an increase compared to 2021 of 76.7% in the Very Satisfied category.

Sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko
Internal Control System and Risk Management

Kami menyadari sepenuhnya bahwa kinerja PLN NP terkait erat dengan pengelolaan risiko dan pengelolaan risiko tidak bisa lepas dari penerapan sistem pengendalian internal yang menjadi bagian dari tata kelola perusahaan. Kami senantiasa meningkatkan pengendalian internal di lingkungan PLN NP agar mampu meraplikasi pencerminkan usaha Perusahaan.

We are fully aware that PLN NP performance is closely related to the risk management which is inseparable from the implementation of internal control system as the part of corporate governance. We constantly evaluate internal controls within PLN NP so as to able to keep abreast of the Company's business developments.

Sistem pengendalian internal PLN NP mengacu pada prinsip-prinsip COSO (Committee of Sponsoring Organizations) Internal Control-Integrated Framework. Dimana di dalamnya mencakup proses pengendalian internal melalui penerapan kebijakan dan prosedur perusahaan secara konsisten, baik terkait dengan kegiatan usaha perusahaan, manajemen risiko, perencanaan strategis yang akurat, pembagian tugas dan pendelegasian wewenang yang jelas, serta kebijakan akuntansi yang memadai. Dedikasi Dewan Komisaris mengawasi kecukupan dan kesesuaian dalam pengukuran laporan keuangan, pengelolaan risiko dengan memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh Komite Audit. Agar sistem pengendalian internal berjalan efektif PLN NP telah memiliki fungsi Internal Audit sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengendalian internal secara berkelanjutan.

PLN NP's internal control system refers to the principles of COSO (Committee of Sponsoring Organizations) Internal Control-Integrated Framework. With PLN NP's Board of Directors implements the internal control system through the consistent application of the Company's policies and procedures, both related to the Company's business activities, risk management, accurate strategic planning, clear division of tasks and delegation of authority, as well as adequate accounting policies. While the Board of Commissioners oversees the adequacy and fairness in the preparation of financial statements, risk management with due observance of the principle of prudence executed by the Audit Committee. PLN NP already has an Internal Audit function as an integral part of the overall internal control in order to make the internal control system run effectively.

Dalam rangka itu PLN NP berkomitmen menginternalisasikan manajemen risiko secara efektif dalam pelaksanaan setiap program kerja atau proyek di tingkat korporasi maupun unit bisnis. Dengan wilayah operasi yang luas dan volume usaha yang besar meningkat, maka PLN NP menerapkan pola pengelolaan risiko secara terpadu untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan eksposur risiko di seluruh fungsi organisasi. Implementasi manajemen risiko sebagai salah satu pilar GCG, diukur dan memastikan dan monitor jenisnya yang sudah bahwa dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, PLN NP telah melakukan identifikasi risiko, mengelola dan melaksanakan upaya mitigasi risiko sesuai dengan ISO 31000:2018 (Risk Management Guidelines).

In line with that, PLN NP is committed to implementing effective risk management in the implementation of every work program or project at the corporate or business unit level. With a wide operating area and continuously increasing business volume, PLN NP applies an integrated risk management pattern to identify, measure, monitor and control risk exposure across the entire area of the organization. Risk management as one of the GCG pillars is carried out to ensure and provide reasonable guarantee that in achieving the set targets. PLN NP has identified risks, managed and carried out risk mitigation efforts in accordance with ISO 31000:2018 (Risk Management Guidelines).

Hasil assessment maturity level implementasi ERM dilakukan baik di tingkat Unit Pembangkit maupun di tingkat korporat merangkum hasil yang semakin baik. Untuk tahun 2022, hasil penilaian assessment maturity level risiko di seluruh unit di lingkungan PLN NP mencapai tingkat kematangan yang baik-baik, dimana Unit Assessment Maturity Level ERM PLN NP mendapatkan tahun PLN di Semester 2 tahun 2022 mendapatkan hasil dengan nilai sebesar 4,15. Selain itu, aplikasi manajemen risiko berbasis web pada ERM Dashboard menjadi alat untuk karyawan memonitor risiko yang dikelolanya sesuai dengan tingkat otoritas masing-masing, sehingga integrasi proses bisnis pengelolaan risiko dapat dipantau secara real time.

Di era disrupsi bisnis ketenagalistrikan ini, arah perubahan bisnis juga menjadi tantangan bagi PLN NP. Namun menghadapi perubahan tersebut PLN NP telah menyiapkan adaptasi manajemen risiko terintegrasi sejak tahun 2020. Guna mendukung penerapan manajemen risiko dalam mindset pengambilan bisnis PLN NP menetapkan Peraturan Direksi tentang Penerapan GRC dan Risk Appetite Statement (RAS). Kebijakan GRC memuat ketentuan-ketentuan dalam proses pengambilan keputusan. PLN NP memiliki konsep Three Lines Model yang sistem pengendalian yang dijalankan melalui pembagian peran dan tanggung jawab menjadi 3 (tiga) lini dalam organisasi dengan melibatkan pemilik proses yang menerapkan kebijakan manajemen risiko (lini pertama), unit risk & compliance yang memiliki dan memastikan proses penerapan risiko (second line), dan fungsi audit melakukan efektifitas sistem pengendalian yang dilakukan oleh first line dan second line (third line).

Agar berdampak dalam menerapkan manajemen risiko terintegrasi, PLN NP meraih penghargaan tinggi di tingkat global melalui ajang Asian Risk Award (ARA) 2022 kategori Governance, Risk Management and Compliance (GRC). PLN NP dinilai anggap dalam memberikan inovasi di bidang manajemen risiko melalui pendekatan baru dalam penerapan GRC, yakni strong leadership, penguatan implementasi GRC, serta pelaksanaan aplikasi manajemen risiko dan kepatuhan bernama I-CARE. Capaian ini membuktikan kehebatan dan kemampuan PLN NP dalam mengelaborasi isu bisnis yang berpotensi kepada manajemen risiko terintegrasi.

PLN NP obtained the better results for the maturity level assessment of ERM implementation that were carried out both at the Subholding Unit level and at the corporate level. For 2022, the results of the risk maturity level assessment for all units within PLN NP achieved a better maturity level, which PLN NP ERM Maturity Level Unit Assessment based on PLN's score in Semester 2 of 2022 obtained results with a validation score of 4.15. Furthermore, the web-based risk management application on the ERM Dashboard is a tool for each employee to monitor the risks they manage according to their respective authorization levels, so that the integration of risk management business processes can be monitored in real time.

In the era of disruption in the electricity business, the direction of business change is also a big challenge for PLN NP. However, PLN NP has implemented an integrated risk management policy to face these changes since 2020. To support the implementation of risk management in the business development initiatives, PLN NP stipulates a Board of Directors Regulation concerning the Application of GRC and Risk Appetite Statement (RAS). The GRC Policy contains provisions in the decision-making process. PLN NP has a Three Lines Model framework, namely a control system designed through the division of roles and responsibilities into 3 (three) lines within the organization by involving business owners who implement risk management policies (first line), risk and compliance units that review and monitor the implementation process risk (second line), and the audit function evaluates the effectiveness of control systems carried out by the first line and second line (third line).

For its commitment to implementing integrated risk management, PLN NP won awards on the global stage through the 2022 Asian Risk Award (ARA) for the Governance, Risk Management, and Compliance (GRC) category. PLN NP is considered to have excelled in creating innovation in the field of risk management through a new approach to implementing GRC, namely strong leadership, strengthening GRC implementation, and launching a risk management and compliance application called I-CARE. This achievement proves the PLN NP resilience and ability in carrying out business risks based on the integrated risk management.

Komitmen Menjaga Kualitas Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Commitment to Maintaining the Quality of Corporate Governance Implementation

PLN NP meyakini bahwa pencapaian kinerja yang baik dapat terus dipertahankan secara berkelanjutan dalam jangka panjang dan berbagai prospek bisnis yang hendak dicoba dapat terwujud, jika perusahaan dapat melaksanakan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dengan baik dan benar. Karena itu, bagi PLN NP implementasi GCG bukan hanya sekedar memenuhi ketentuan, namun sudah menjadikan suatu kebutuhan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Perusahaan kepada segenap pemangku kepentingan. Pengembangan GCG yang selaras dengan best practices secara berkesinambungan serta implementasi GCG secara konsisten tidak hanya dapat memberikan perlindungan yang memadai dan perlakuan yang adil kepada para seluruh pemegang saham, pengelola, dan pemangku kepentingan lainnya, namun lebih dari itu mendorong PLN NP untuk meningkatkan nilai bagi perusahaan (shareholder value) secara maksimal.

PLN NP believes that achieving good performance can be maintained in a sustainable manner in the long term and various business prospects to be attempted can be realized in the event the Company is able to consistently implement GCG principles properly and correctly. Therefore, for PLN NP, GCG implementation is not just a refusal of obligations, but it is a necessity to maintain transparency and accountability in the Company management to all stakeholders. Consistent GCG development with the best practices on an ongoing basis and consistent GCG implementation is not only able to provide adequate protection and fair treatment to all shareholders, managers and other stakeholders, but more than that encourage PLN NP to create value for the Company (the shareholders' value) to the maximum.

Dewan Komisaris, Direksi dan segenap karyawan PLN NP berkomitmen untuk mengimplementasikan standar yang tinggi dalam penerapan prinsip-prinsip GCG. Prinsip-prinsip tersebut menjadi referensi bagi pengambilan keputusan yang berlandaskan pada, menghindari konflik kepentingan, optimalisasi kinerja, dan peningkatan akuntabilitas. Dalam praktiknya, GCG diimplementasikan melalui struktur tata kelola yang didukung dengan organ-organ pendukung lainnya.

The Board of Commissioners, Directors and the entire PLN NP employees are committed to implementing high standards in implementing GCG principles. These principles serve as references for corporate decision making, avoiding conflicts of interest, optimizing performance, and increasing accountability in practice. GCG is implemented through a governance structure supplemented by other supporting organs.

PLN NP senantiasa mengedepankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kinerja usaha dan praktik-praktik tata kelola yang baik. PLN NP telah berupaya pada standar tata kelola yang tinggi dan meyakini bahwa pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik adalah faktor penting dalam upaya membangun dan memelihara kepercayaan dan kredibilitas PLN NP. Menjalankan prinsip GCG secara konsisten diyakini akan meningkatkan kinerja perusahaan karena secara berkesinambungan memungkinkan perusahaan untuk mengelola kasih tidak hanya untuk kepentingan dan kemanfaatan pemegang saham, tetapi juga untuk pemangku kepentingan lainnya seperti pelanggan, karyawan, pemasok, mitra bisnis, lingkungan dan masyarakat secara keseluruhan.

PLN NP always prioritizes the importance of maintaining a balance between business performance and good governance practices. PLN NP keeps adhering to high governance standards and believes that the implementation of good corporate governance is an important factor in efforts to build and maintain PLN NP trust and credibility. Implementing GCG principles consistently is believed to guarantee the creation of a sustainable work synergy because, therefore our company can and have implemented all of our business behavior imbued with corporate values, ethical standards and compliance with the applicable regulations.

Penerapan GCG PLN NP diaktualisasikan melalui rangkaian kegiatan yang dapat mendukung tata kelola perusahaan yang berkelanjutan, yaitu dituangkan dalam berbagai kegiatan diantaranya dengan melakukan sosialisasi dan refreshment pemahaman terkait self-assessment GCG kepada seluruh karyawan, penyelenggaraan program Indeks Sesuai ASI Assessment GCG 2020, terhadap pedoman Hukum Pemegang Saham, Pedoman GCG dan GCG Code, pelaksanaan evaluasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru dan melakukan update kebijakan Daftar Khusus, Pakta Integritas dan Hubungan Kepengurusan Direksi dan Dewan Komisaris serta melakukan penilaian pelaksanaan GCG.

PLN NP actualized the GCG implementation through a series of activities that can support sustainable corporate governance, which is manifested in various activities, including conducting socialization and refreshment of understanding related to the GCG self-assessment for all employees, implementing the Indeks Sesuai ASI Assessment GCG 2020, including reviewing Shareholder Assembly Guidelines, GCG and GCG Code, carry out evaluations of new members of the Board of Directors and Board of Commissioners and update documents on the Special List, Integrity Pact and Management Relations of the Board of Directors and Board of Commissioners as well as periodically assessing the implementation of GCG using

secara berkala dengan menggunakan standar alat uji berdasarkan Keputusan Sekretaris Menteri ESDM Nomor : 36-16/S/HRS/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN. Hasil assessment GCG untuk tahun buku 2022 menjadikan skor sebesar 90,14 dengan predikat Excellent/Sangat Baik" dan Terbaik di PLN Group. Secara berkelas dan berkelanjutan PLN NP berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil assessment yang menjadi area of improvement GCG demi kualitas implementasi GCG yang lebih baik di masa mendatang.

standard tool equipment based on the Decree by the Secretary of the Minister of SE.16 No. SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in SOEs. GCG assessment results for the 2022 fiscal year obtained a score of 90,14 with the "Very Good/ Implementation Quality Good/Predicate the highest score in the PLN Group. Creatively and continuously, PLN NP is committed to following up on any recommendations from the assessment results which become GCG areas of improvement for better quality GCG implementation in the future.

Terkait dengan implementasi kebijakan WBS, PLN NP telah menyelesaikan Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor 0018.K/DIR/2020 dan Nomor 007.B/KOM-WBS/2020, sebagai salah satu sarana bagi karyawan, pelanggan, mitra dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan apabila terdapat indikasi pelanggaran terkait dengan hal-hal, kebijakan Perusahaan maupun potensi terjadinya fraud. Komite WBS bertugas menerima laporan yang masuk dan melakukan review serta mengevaluasi kecukupan bukti pendukung atas laporan yang disampaikan untuk memastikan sebaliknya terkait dengan Perusahaan. Di tahun 2022, Komite WBS telah menerima 3 (tiga) pengaduan yang masuk, satu diantaranya telah selesai ditindaklanjuti dan dua masih dalam proses tindak lanjut. Adapun kategori pelanggaran yang disampaikan terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa dan perbuatan melanggar hukum.

Regarding the implementation of the WBS policy, PLN NP has regulated in the Joint Decree of the Board of Commissioners and the Board of Directors No. 0018.K/DIR/2020 and No. 007.B/KOM-WBS/2020, as the facility for the employees, customers, partners and other stakeholders to convey the indications of violations related to the code of conducts, Company policies or potential acts of fraud. The WBS Committee is in charge of receiving incoming reports and reviewing and evaluating the adequacy of supporting evidence for the submitted reports to ensure whether those are or not an indication of the Company's issues. In 2022, the WBS Committee received 3 (three) incoming complaints, one of which has been completed and two are still in the follow-up process. The categories of violations submitted are related to the process of procuring goods and services and unlawful acts.

Prospek Usaha Perusahaan
Company Business Prospects

Komposisi produksi listrik per jenis energi primer di Jawa, Madura, dan Bali diproyeksikan pada tahun 2030 akan menjadi 85,7% batubara, 1,7% gas (termasuk LNG), 4,6% tenaga air, 6,6% panas bumi, 0,7% BBM, dan 0,8% EBT lainnya. Porsi pembangkit EBT di Jawa, Madura, dan Bali akan meningkat dari 9,1% tahun 2021 menjadi 16,1% di tahun 2030. Dengan target pemerintah pembangunan energi terbarukan untuk mencapai bauran energi nasional mencapai 23% pada tahun 2025, PLN NP menargetkan untuk menjadi operator solar PV yang terbesar di Indonesia, menjadi leader pasar biomassa co-firing tinggi, 5% fuel mix, menjadi operator wind terbesar di Indonesia dan pemain terdepan pada di tenaga battery storage solution.

The composition of electricity production per type of primary energy in Java, Madura and Bali is projected in 2030 to be 85.7% coal, 1.7% gas (including LNG), 4.6% hydropower, 6.6% geothermal, 0.7% fuel, and 0.8% other NRE. The portion of NRE power plants in Java, Madura and Bali will increase from 9.1% in 2021 to 16.1% in 2030. With the government's target of developing renewable energy to reach the national energy mix towards 23% in 2025, PLN NP targets to be the largest solar PV operator in Indonesia, to be the leader in biomass co-firing of up to 5% fuel mix, to be the largest wind operator in Indonesia and a leading player in the field of battery storage solutions.

Pada tahun 2022 akhir PLN telah melakukan penandatanganan Legal Fact Sheet, berdasar PLN NP akan menjadi Generation Company terbesar di Asia Tenggara serta siap mengelola pembangkit pembangkit dengan total kapasitas 23,1 GW. Dengan perubahan ini, PLN NP akan mendapatkan dampak positif bagi upaya Indonesia untuk mengambil bagian pada rantai pasok global di tengah momentum transisi energi saat ini.

At the end of 2022, PLN signed a Legal Fact Sheet, in the future PLN NP will become the Largest Generation Company in Southeast Asia and is ready to manage power plants with a total capacity of 23.1 GW. With this change, PLN NP will present positive impact on Indonesia's efforts to take part in global supply chains amid the current energy transition momentum.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

PLN NP memandang penting bahwa keberlanjutan usaha, lingkungan, dan masyarakat menjadi satu kesatuan untuk menjadikan bisnis Perusahaan terus berlanjut. PLN NP secara konsisten melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial atau *corporate social responsibility* (CSR) sebagai wujud kepedulian sekaligus sarannya kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan dan posisi bisnis Perusahaan sehingga berdampak pada keberlangsungan bisnis PLN NP. Program CSR dikembangkan guna mendukung terwujudnya jangka panjang perusahaan dalam menjaga keberlangsungan bisnis serta berkontribusi dalam pencapaian sasaran pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang telah dicanangkan oleh Pemerintah. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan dijalankan PLN NP secara sistematis dan terarah mengacu pada Roadmap CSR 2018-2022 dengan pendekatan *Community Involvement & Development* (CID) berbasis SAI 26000 dan Pedoman Pelaksanaan tanggung jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) yang diatur dalam Kepatuhan Direksi No.005.K/DIR/2019. Sebagai *Roadmap* CSR 2018-2022 adalah PLN NP menjadi *Most Trusted and Preferred Company*, yang diterjemahkan lebih rinci ke dalam Strategi CSR PLN NP Tahun 2018-2024.

PLN NP considers that business continuity, the environment and society are important in becoming one unit for business continuity of the Company. PLN NP consistently carries out social responsibility activities or corporate social responsibility (CSR) as the concern as well as appreciation for the community who have given trust and support for business processes of the Company so as long impacts on PLN NP business continuity. PLN NP develops CSR programs to support the Company's long-term plans in maintaining business continuity, as well as contributing to the fulfillment of the Sustainable Development Goals (SDGs) that have been proclaimed by the Government. PLN NP carries out corporate social responsibility in a systematic and directed manner referring to the 2018-2022 CSR Roadmap with a Community Involvement & Development (CID) approach based on ISO 26000 and Guidelines for Implementation of Social and Environmental Responsibility (CSR) stipulated in the Board of Directors Decree No.005.K/DIR/2019. The target of the 2018-2022 CSR Roadmap is for PLN NP to become the Most Trusted and Preferred Company, which is further elaborated into PLN NP CSR Strategy in 2018-2024.

Tipologi pelaksanaan program CSR terdiri dari: *Empowerment, Capacity Building, Infrastruktur, Charity,* dan Kegiatan Luar Biasa (KLB). Program-program ini dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai Perusahaan (*corporate values*), serta mengacu kepada ketentuan Pemerintah, perwujudan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), dan kebutuhan masyarakat setempat. Program CSR di kelompokan di 17 Unit Kerja PLN Kusantara Power yang meliputi UP Muara Karang, UP Muara Tawar, UP Cilegon, UP Bantaeng, UP Pelabuhan Ratu, UP Lontar, Kantor Pusat, UBJOM Pamulang, UBJOM Indramayu, UBJOM Tanjung Awar-Awar, UBJOM Semarang, UBJOM Kalimantan Tengah, UBJOM Pulang Pisau, UBJOM Arun, UBJOM Tanjung Jati, UBJOM Hatten 3, dan Suppa.

Typology of CSR program implementation consists of Empowerment, Capacity Building, Infrastructure, Charity and Extraordinary Events. These programs are carried out according to the Company's values (*corporate values*), and refer to Government regulations, the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs), and the needs of local community. CSR program is implemented in 17 PLN Nusantara Power Work Units which include Muara Karang UP, Muara Tawar UP, Cilegon UP, Bantaeng UP, Pelabuhan Ratu UP, Lontar UP, Head Office, Pamulang UBJOM, Indramayu UBJOM, Tanjung Awar-Awar UBJOM, Semarang UBJOM, Central Kalimantan Teluk UBJOM, Pulang Pisau UBJOM, Arun UBJOM, Tanjung Jati UBJOM, Hatten 3 UBJOM, and Suppa UBJOM.

Realisasi dana CSR tahun 2022 sebesar Rp45,73 miliar yang terbagi menjadi 5 bidang, yaitu (1) pemberdayaan, (2) pengembangan kapasitas, (3) infrastruktur, (4) dana dan (5) kegiatan Luar Biasa. Realisasi dana CSR 2022 didominasi oleh bidang pemberdayaan sebesar 30,53% disusulkan dengan CSR bidang pengembangan kapasitas sebesar 29,85%, CSR bidang infrastruktur sebesar 17,14% kegiatan Luar Biasa akibat pandemi Covid-19 sebesar 0,38% dan CSR dimana sebesar 19,38%.

CSR funds realization in 2022 is Rp45.73 billion, divided into 5 areas, namely (1) empowerment, (2) capacity building, (3) infrastructure, (4) donations and (5) extraordinary events. CSR funds realization for 2022 is dominated by the empowerment sector by 30.53%, followed by CSR in capacity building by 29.85%, CSR in infrastructure by 17.14%, and extraordinary events due to the Covid-19 pandemic by 0.38% and CSR donations by 19.38%.

Selain itu, PLN NP berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan melalui pengelolaan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan operasional sebagai penyedia tenaga listrik. Adopsi Sistem Manajemen PLN NP mengatur bahwa penggunaan sumber daya energi dan carbon atau alam dalam kegiatan operasional dan pemeliharaan unit pembangkit dilakukan secara efisien dengan memenuhi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta ISO 14001 tentang Sistem Manajemen Lingkungan. Dalam pengelolaan limbah B3 PLN NP berhasil meraih 5 PROPER Emas, yaitu pada UP Pekan, UP Gresik, UBJOM Harimau, UBJOM Tambang, dan UBJOM Pekan, serta mempertahankan juga 4 PROPER Hijau serta 12 PROPER Biru.

Kombinasi dan konsistensi PLN NP dalam penerapan CSR telah diakui secara nasional maupun internasional, diantaranya dengan diperolehnya banyak penghargaan CSR, antara lain Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2022 meraih Platinum Gold, Top CSR Awards 2022 Kibar 4, Indonesia Sustainable Development Goal Award (ISDA), Indonesia Corporate Social Responsibility V 2022 (ICSRAWA), Top CSR of The Year 2022, Indonesia CSR & TJSL Award (ICA).

Asia, PLN NP contributes to the environmental preservation as manifestation of managing the impacts arising from operational activities as the electricity provider. PLN NP Management System Policy advocates that the use of energy and natural resources in the operational and maintenance activities of generating units is carried out efficiently by complying with Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and ISO 14001 concerning Environmental Management Systems. In managing environmental performance, PLN NP won 5 Gold PROPER by Pekan-Gil, Gresik-Gil, Harimau-UBJOM, Tambang-UBJOM, and Pekan-UBJOM, and also retained 4 Green PROPER and 12 Blue PROPER.

PLN NP commitment and consistency in implementing CSR has been recognized nationally and internationally, including by obtaining many CSR awards, including the Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2022 took the Gold Platinum, Top CSR Awards 2022 Kibar 4, Indonesia Sustainable Development Goal Award (ISDA), Indonesia Corporate Social Responsibility V 2022 (ICSRAWA), Top CSR of The Year 2022, Indonesia CSR & TJSL Award (ICA).

Perubahan Komposisi Direksi
Changes in Board of Directors Composition

Pada periode tahun buku pelaporan terdapat perubahan komposisi anggota Direksi. Berdasarkan keputusan RUPS Sirkuler tanggal 23 September 2022, mengangkat dan memberhentikan Sdr. Rudy Limansyah sebagai Direktur Utama menggantikan Sdr. Cong Hakua Hasibuan, Sdr. Muhammad Ihsan menggantikan Sdr. Ivan Purwana sebagai Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga dan Sdr. Dwi Hartono yang menggantikan Sdr. Ir. Fauzan Imam sebagai Direktur Keuangan.

During the reporting period, there was a change in the composition of the Board of Directors members. Based on the decision of the Circular GMS dated September 23, 2022, to appoint and determine Mr. Rudy Limansyah as the President Director replacing Mr. Cong Hakua Hasibuan, Mr. Muhammad Ihsan replaced Mr. Ivan Purwana as Director of Business and Commerce Development and Mr. Dwi Hartono replaced Mr. Ir. Fauzan Imam as Director of Finance.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Sdr. Cong Hakua Hasibuan, Sdr. Ivan Purwana dan Sdr. Ir. Fauzan Imam atas kontribusi dan dedikasi yang diberikan selama menjabat selaku Direktur di PLN NP. Direksi juga mengucapkan selamat bergabung dan berharap kepada anggota Direksi yang baru. Dengan demikian komposisi Direksi sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

We would like to thank Mr. Cong Hakua Hasibuan, Mr. Ivan Purwana, and Mr. Ir. Fauzan Imam for the contribution and dedication during serving as Director at PLN NP. The Board of Directors also congratulates the new members of the Board of Directors on joining and wishing. Thus the composition of the Board of Directors as of December 31, 2022 is as follows:

Rudy Limansyah	: Direktur Utama
Rachmanzah Indarto	: Direktur Operasi Pembangkit Batubara
M Yasir Yanuf A	: Direktur Operasi Pembangkit Gas
Muhamad Ihsan	: Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga
Dwi Hartono	: Direktur Keuangan
Karyawan Aji	: Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi

Rudy Limansyah	: President Director
Rachmanzah Indarto	: Director of Operation Coal Power Plant
M Yasir Yanuf A	: Director of Operation Gas Power Plant
Muhamad Ihsan	: Director of Business Development and Commerce
Dwi Hartono	: Director of Finance
Karyawan Aji	: Director of Human Capital Management and Administration

Hadirnya Direksi baru ini menjadi energi tambahan untuk mendukung peningkatan kinerja PLN NP, sehingga dapat memperluas portofolio bisnis Perusahaan di masa depan, menjawab tantangan seperti energi baru terbarukan.

The new Board of Directors is additional energy to encourage PLN NP performance improvements, so that it can expand the Company's business portfolio in the future, answering to challenges such as new and renewable energy.

Alasan Perubahan

Dalam rangka mendukung transformasi perusahaan melalui restrukturisasi Holding dan Subholding PLN telah melakukan perubahan nomenklatur, serta pemberhentian dan pengangkatan Direksi. Dimana pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi telah mendapatkan persetujuan Kementerian BUMN.

Reason for Change

In order to support the Company's transformation through holding and subholding restructuring, PLN has made changes to the nomenclature, as well as the dismissal and appointment of the Board of Directors. The dismissal and appointment of the Board of Directors members were approved by the Ministry of SOEs.

Apresiasi
Letter of Appreciation

Direksi menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa bormat kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris atas arahan yang diberikan dan kepercayaan yang telah begitu solidnya ini. Kami juga menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh karyawan, mitra bisnis dan segenap pemangku kepentingan lainnya atas dedikasinya, kontribusi dan dukungan yang telah diberikan. Pencapaian dan pemenuhan PLN NP di tahun 2022 ditoh berkat usaha dan kerjakeras kolaborasi yang mengagumkan, inovasi dan kreativitas di tengah tantangan dan perubahan proses bisnis, kepercayaan dan dukungan dari Pemegang Saham dan Dewan Komisaris, serta kerja sama yang baik dengan mitra usaha dan pelanggan. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini Direksi menyampaikan apresiasi yang besar atas setiap bentuk dukungan yang diberikan kepada Direksi untuk mempertahankan kekuatan kepemimpinan PLN NP. Optimalisasi pengelolaan aset untuk Direksi upayakan ke depannya agar PLN NP dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada seluruh pemangku kepentingan.

The Board of Directors would like to express gratitude and respect to the Shareholders and the Board of Commissioners for the directions provided and the cooperation so far. We also express our appreciation and gratitude to the entire employees, business partners and all other stakeholders for the trust, contribution and support provided. PLN NP achievement and growth in 2022 was achieved due to the efforts by all employees who were for innovation and creativity amid the challenges and changes in work processes, trust and support from the Shareholders and the Board of Commissioners, as well as good cooperation with the business partners and customers. Therefore, through this opportunity, the Board of Directors would like to express great appreciation for every support provided to the Board of Directors to maintain and even develop PLN NP. The Board of Directors will continue to optimize management in the future so that PLN NP can provide greater benefits to all stakeholders.

Kami yakin PLN NP dapat terus bergerak lebih lincah, cepat serta efektif untuk penguatan bisnis yang telah ada dalam mengelola dan menyediakan energi bagi kepentingan masyarakat hingga pelosok negeri, pengembangan bisnis yang lebih luas terutama di bidang energi baru dan terbarukan.

We believe that PLN NP is able to continue to move more agile, fast and effectively to strengthen existing businesses in managing and providing energy for the benefit of people throughout the country, broader business development, especially in the field of new and renewable energy.

Surabaya, 30 Juni 2023
Surabaya, June 30, 2023

Atas Nama Direksi
On Behalf of the Board of Directors

Rully Firmansyah
Direktur Utama
President Director

1 **Nufi Firmansyah**
Direktur Utama
Presiden Direktur

2 **Karyawan Aji**
Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi
Director of Human Capital Management and Administration

3 **Muhamad Reza**
Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga
Director of Business Development and Commerce

4 **Dian Hartono**
Direktur Keuangan
Director of Finance

5 **M. Yassy Nasdi A.**
Direktur Manajemen Pembangkit Eks
Director of Operation Ex-Power Plant

6 **Rachmanna Indarto**
Direktur Operasi Pembangkit Eksisting
Director of Operation Own Power PLNs

1
2
3
4
5

Surat Pernyataan Dewan Komisaris Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2022 PT PLN Nusantara Power

Statement from Board of Commissioner's on Accountability Over Annual Report 2022 PT PLN Nusantara Power

Laporan Tahunan 2022 PT PLN Nusantara Power menyajikan informasi mengenai kinerja Perusahaan, penerapan tata kelola perusahaan, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dan informasi lainnya yang relevan dan signifikan bagi para pemangku kepentingan.

PT PLN Nusantara Power Annual Report 2022 presents information on the Company's performance, implementation of corporate governance, implementation of corporate social responsibility, Financial Statements for the period ended on December 31, 2022, and other information relevant and significant for the stakeholders.

Kami, segenap Dewan Komisaris PT PLN Nusantara Power yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan 2022 PT PLN Nusantara Power.

We, the undersigned, the entire Board of Commissioners of PT PLN Nusantara Power, declare full accountability for the accuracy of the content of PT PLN Nusantara Power Annual Report 2022.

Surabaya, 30 Juni 2023
Surabaya, June 30, 2023

Evy Haryadi
Komisaris Utama
President Commissioner

Kanedy
Komisaris
Commissioner

Ida Nuryatin Finahari
Komisaris
Commissioner

Eren Kresna Wardana
Komisaris
Commissioner

Hendra Iswahyudi
Komisaris
Commissioner

Bagus Purutito
Komisaris
Commissioner

Surat Pernyataan Direksi
Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2022
PT PLN Nusantara Power

Statement from Board of Directors on Accountability Over Annual Report 2022 PT PLN Nusantara Power

Laporan Tahunan 2022 PT PLN Nusantara Power menyajikan informasi mengenai kinerja Perusahaan, penerapan tata kelola perusahaan, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan informasi lainnya yang relevan dan signifikan bagi para pemangku kepentingan.

PT PLN Nusantara Power Annual Report 2022 presents information on the Company's performance, implementation of corporate governance, implementation of corporate social responsibility, Financial Statements for the period ended on December 31, 2022, and other information relevant and significant to the stakeholders.

Kami, segenap Direksi PT PLN Nusantara Power yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan 2022 PT PLN Nusantara Power.

We, the undersigned, the entire Board of Directors of PT PLN Nusantara Power, declare full accountability for the accuracy of the content of PT PLN Nusantara Power Annual Report 2022.

Surabaya, 30 Juni 2023
Surabaya, June 30, 2023

Rully Firmansyah
Direktur Utama
President Director

Karseven Aji
Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi
Director of Human Capital Management and Administration

Muhamad Reza
Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga
Director of Business Development and Commerce

Dwi Hartono
Direktur Keuangan
Director of Finance

M. Yazid Rifqi A.
Direktur Operasi Pembangkit Uap
Director of Operation Gas Power Plant

Rachmanoe Indarto
Direktur Operasi Pembangkit Gasturbin
Director of Operation Cast Power Plant

Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Internal PT PLN Nusantara Power

Accountability Statement by The Board of Directors Over Risk Management and Internal Control System PT PLN Nusantara Power

Atas nama Direksi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Roby Firmansyah
   Jabatan : Direktur Utama
   Alamat Kantor : Jl. Kebonsong Baru No.11 Surabaya 60231
   Alamat Domisili : Dharmahusada Indah Timur IV blok H/33 Surabaya
2. Nama : Dwi Hartono
   Jabatan : Direktur Keuangan
   Alamat Kantor : Jl. Kebonsong Baru No.11 Surabaya 60231
   Alamat Domisili : Jl. Manyar Kertoadi Blok VI No. 10 Surabaya

On behalf of the Board of Directors, we the undersigned:

1. Name : Roby Firmansyah
   Position : President Director
   Office Address : Jl. Kebonsong Baru No.11 Surabaya 60231
   Address of Domicile : Dharmahusada Indah Timur IV blok H/33 Surabaya
2. Name : Dwi Hartono
   Position : Director of Finance
   Office Address : Jl. Kebonsong Baru No.11 Surabaya 60231
   Address of Domicile : Jl. Manyar Kertoadi Blok VI No. 10 Surabaya

Menyatakan bahwa:

Sehubungan dengan tanggung jawab terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian PT PLN Nusantara Power dan Entitas Anak Perusahaan untuk tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, yang ditandatangani pada tanggal 4 April 2022 dalam kaitannya dengan integritas laporan keuangan telah disusun dengan menerapkan sistem manajemen risiko dan pengendalian internal perusahaan secara efektif dan efisien dalam seluruh aspek yang material.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Declare that:

The statement of the Board of Directors regarding the responsibility for the Consolidated Financial Statements of PT PLN Nusantara Power and Subsidiaries as at December 31, 2021 and December 31, 2020, which are signed on April 4, 2022 is founded on sound system of risk management and internal control system are operating efficiently and effectively in all material aspect.

The declaration has been made truthfully.

Atas Nama Direksi
On behalf of the Board of Directors

Surabaya, 30 April 2022
Surabaya, June 30, 2022

Roby Firmansyah
Direktur Utama
President Director

Dwi Hartono
Direktur Keuangan
Director of Finance

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

PJB

Profil Perusahaan

Company Profile

Identitas Perusahaan
Company Identity

PLN
Nusantara Power

Transformasi PLN NP menjadi salah satu Sub-Holding PLN, memperkuat identitas dan posisi Perusahaan sebagai perusahaan pembangkit listrik terkemuka. Menantapkan optimisme mewujudkan sasaran Perusahaan menjadi perusahaan pembangkitan terbesar se-Asia Tenggara.

PLN NP brought off the transformation as the one of PLN's Sub-Holding that strengthens the Company's identity and position as a leading Power Plant Company. Establishing optimism in realizing the Company's target to become the largest power plant Company in Southeast Asia.

Nama Perusahaan

PT PLN Nusantara Power
Sejak 3 September 2020, PT Pembangkitan Jawa-Bali telah bertransformasi dengan nama baharu nama menjadi PT PLN Nusantara Power (PLN NP) yang menjadi perusahaan sub-holding dengan jenis usaha pembangkit tenaga listrik. Selama 12 (dua belas) PLN Grup. Dengan jenis tersebut maka nama nya pembangkitan PLN yang sudah ia terintegrasi di seluruh wilayah dan diversifikasikan, sehingga menghasilkan sinergi yang lebih banyak. PLN NP akan menjadi Generation Company terbesar di Asia Tenggara serta mengelola pembangkit pembangkit dengan total kapasitas 22.2 GW. Dengan pengalaman 20, PLN NP akan mendapatkan dampak positif bagi upaya Indonesia untuk mewujudkan bagian yang lebih besar global & target investasi power energi nya.

Company Name

PT PLN Nusantara Power
In September 3 1, 2021, PT [illegible] was [illegible] formally changed name to PT PLN Nusantara Power (PLN NP), a sub-holding Company with the line of business [illegible]. Energy [illegible] which the PLN group. With this role, PLN NP will become the largest Generation Company in Southeast Asia and will be ready to manage more power plant with PLN NP will become [illegible] energy transition momentum.

Tanggal Pendirian
1 Oktober 1995

Date of Establishment
October 1, 1995

Bidang Usaha
1. Pembangkitan tenaga listrik
2. Kontribusi kegiatan eksplorasi
3. Pemanfaatan sumber energi primer
4. Pemeliharaan dan jasa penunjang pembangkitan tenaga listrik
5. Pembangunan fasilitas kegiatan usaha pembangkit tenaga listrik dengan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan, termasuk investasi dan pengelolaan dalam hal Perusahaan Perseroan.

Business Line
1. Electric Power Plant
2. Electric Building Construction
3. Installation of electricity equipment
4. Maintenance and operation of electrical equipment
5. Building energy supporting business activities to optimize the utilization of resources owned by the Company, including [illegible] and corporate in the Subsidiaries.

Bentuk Badan Hukum
Perseroan Terbatas

Corporate Form
Limited Company

Status Perusahaan
Subholding PT PLN (Persero)

Company Status
Sub-holding of PT PLN (Persero)

Riwayat Singkat Perusahaan
Brief Company History

PLN NP telah memiliki sejarah panjang di industri pembangkit listrik melalui berbagai kontribusi pada upaya penyediaan tenaga listrik nasional. Dalam rangka memperkuat kontribusi, PLN NP serantaus melakukan transformasi menyesuaikan tantangan industri dan pasar.

PLN NP has a long history in the power plant industry through various contributions to national electricity supply efforts. In order to strengthen its contribution, PLN NP always brings off the transformation to conform the industry and market challenges.

Sekilas Pendirian Perusahaan
Company Establishment at A Glance

Pendirian Perusahaan berawal dari restrukturisasi yang dilakukan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), yang disingkat "PLN" pada tahun 1961, dengan melakukan pemisahan unit usaha fungsinya, yaitu Unit PLN Distribusi dan Unit PLN Pembangkitan serta Unit PLN Penyaluran. Pada tanggal 3 Oktober 1995, PLN melakukan restrukturisasi khusus bidang pembangkitan dengan membentuk 2 (dua) Anak Perusahaan, yaitu PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali 1 yang berkantor pusat di Jakarta bekerjasama PT PLN Indonesia Power, dan PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II bekerjasama PT PLN Nusantara Power yang berkantor pusat di Surabaya.

The establishment of the Company began with the restructuring of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), abbreviated as "PLN" in 1961, by separating units according to their functions, namely, the PLN Distribution Unit and the PLN Electric Power Generation Unit as well as the PLN Distribution Unit. On October 3, 1995, PLN restructured specifically in the field of electric power generation by establishing 2 (two) Subsidiaries, namely PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali 1 headquartered in Jakarta (was PT PLN Indonesia Power) and PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II (was PT PLN Nusantara Power) headquartered in Surabaya.

Perubahan Perusahaan telah ditetapkan melalui satu keputusan RUPS Nomor No. 30 tanggal 3 Oktober 1995, dari Pharmasinggih Adi Wardoyo S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-12495.HT.01.01.TH.95 tanggal 3 Oktober 1995 serta diumumkan dalam Berita Negara No. 8350 tanggal 10 November 1995, Tambahan No. 80.

The Company's establishment was legalized by the notary namely based on Notarial Deed No. 30 dated October 3, 1995, of Pharmasinggih Adi Wardoyo S.H., Notary in Jakarta. The deed of establishment was ratified by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in Decree No. C2-12495.HT.01.01.TH.95 dated October 3, 1995 and announced in the State Gazette No. 9350 dated November 10, 1995, Supplement No. 80.

Anggaran Dasar Perusahaan terakhir diubah berdasarkan Akta Notaris No. 73 tanggal 30 Desember 2021, dari Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta, untuk mengubah nama Perusahaan yang semula bernama PT Pembangkitan Jawa-Bali menjadi PT PLN Nusantara Power. Akta perubahan ini telah diterima dan disahkan di bantuhkan dan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-0000021.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 1 Januari 2022.

The Company's Articles of Association were lately amended based on Notarial Deed No. 73 dated December 30, 2021, from Muhammad Hanafi, S.H., Notary in Jakarta, to change the Company's name from PT Pembangkitan Jawa-Bali to PT PLN Nusantara Power. This amendment deed was received and recorded at the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with its Decree No. AHU-0000021.AH.01.02.TAHUN 2022 dated January 1, 2022.

Keterangan Perubahan Nama Perusahaan
Description of Change in Company Name

Sejak didirikan pada tanggal Oktober 2000, Perusahaan telah mengalami perubahan sebanyak 3 (tiga) kali.

Since its establishment in October 2000, the Company has changed its name 3 (three) times.

Jejak Langkah
Milestones

Awal Mula
Beginning

2005
- Kontrak dengan nama PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Asset Mula 1 yang awalnya awal 2 unit pembangkitan dengan total kapasitas 2.000 MW. Didirikan awal dari nama PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Asset Mula 1 sebuah dari 2 asset to power generation unit with a total capacity of 2.000 MW.
- Software Computerized Maintenance Management System (CMMS).
Based on Computerized Maintenance Management System (CMMS).

Stable Growth

2010
Penyakit ini mulai menyerang PT Pembangkitan Tenaga Listrik Asset Mula.
The name changed to PT Pembangkitan Tenaga Listrik Asset Mula.

2011
- Produksi ini mulai menyerang PT Pembangkitan Asset 1 - Mula.
The name changed to PT Pembangkitan Asset 1 - Mula.
- Revitalisasi and power on PT PJB Services dengan beberapa pada Oleh pembangkit. Didirikan a subsidiary, PT PJB Services, with the business field of power plant O&M.

2012
Penyakit ini mulai menyerang PT Pembangkitan Asset 1 - Mula.
The name changed to PT Pembangkitan Asset 1 - Mula.
- Revitalisasi and power on PT PJB Services dengan beberapa pada Oleh pembangkit. Didirikan a subsidiary, PT PJB Services, with the business field of power plant O&M.

2013
Penyakit ini mulai menyerang PT Pembangkitan Asset 1 - Mula.
The name changed to PT Pembangkitan Asset 1 - Mula.
- Revitalisasi and power on PT PJB Services dengan beberapa pada Oleh pembangkit. Didirikan a subsidiary, PT PJB Services, with the business field of power plant O&M.

2014
Penyakit ini mulai menyerang PT Pembangkitan Asset 1 - Mula.
The name changed to PT Pembangkitan Asset 1 - Mula.
- Revitalisasi and power on PT PJB Services dengan beberapa pada Oleh pembangkit. Didirikan a subsidiary, PT PJB Services, with the business field of power plant O&M.

2004-2008
Penyakit ini mulai menyerang PT Pembangkitan Asset 1 - Mula.
The name changed to PT Pembangkitan Asset 1 - Mula.
- Revitalisasi and power on PT PJB Services dengan beberapa pada Oleh pembangkit. Didirikan a subsidiary, PT PJB Services, with the business field of power plant O&M.

2009
Penyakit ini mulai menyerang PT Pembangkitan Asset 1 - Mula.
The name changed to PT Pembangkitan Asset 1 - Mula.
- Revitalisasi and power on PT PJB Services dengan beberapa pada Oleh pembangkit. Didirikan a subsidiary, PT PJB Services, with the business field of power plant O&M.

Operational Excellence

2012
Penyakit ini mulai menyerang PT Pembangkitan Asset 1 - Mula.
The name changed to PT Pembangkitan Asset 1 - Mula.
- Revitalisasi and power on PT PJB Services dengan beberapa pada Oleh pembangkit. Didirikan a subsidiary, PT PJB Services, with the business field of power plant O&M.

2013
Penyakit ini mulai menyerang PT Pembangkitan Asset 1 - Mula.
The name changed to PT Pembangkitan Asset 1 - Mula.
- Revitalisasi and power on PT PJB Services dengan beberapa pada Oleh pembangkit. Didirikan a subsidiary, PT PJB Services, with the business field of power plant O&M.

2014
Penyakit ini mulai menyerang PT Pembangkitan Asset 1 - Mula.
The name changed to PT Pembangkitan Asset 1 - Mula.
- Revitalisasi and power on PT PJB Services dengan beberapa pada Oleh pembangkit. Didirikan a subsidiary, PT PJB Services, with the business field of power plant O&M.

2015
Penyakit ini mulai menyerang PT Pembangkitan Asset 1 - Mula.
The name changed to PT Pembangkitan Asset 1 - Mula.
- Revitalisasi and power on PT PJB Services dengan beberapa pada Oleh pembangkit. Didirikan a subsidiary, PT PJB Services, with the business field of power plant O&M.

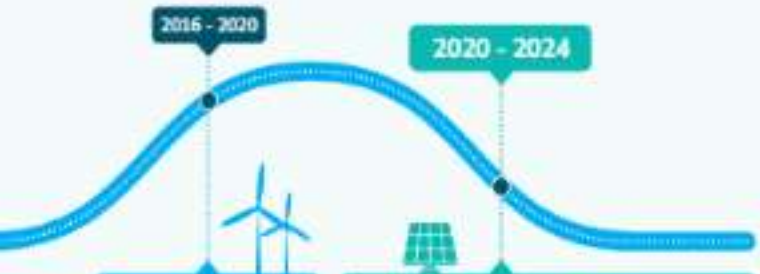

Corporate Transformation I

2016

2017

2018

2019

Corporate Transformation II

2020

2021

2022

Pembelian saham mayoritas subholding PT PLN (Persero)

Pembelian saham mayoritas PT PLN Nusantara Power:
COD PLTU Ariel Dx Muara Tuwar Blok 3 (250 MW)
Pembelian pembangkit PJBC (akuisisi) (2 x 17 MW) dan PLTG Belangkan (2 x 30 MW)

- Change in status to PT PLN (Persero) subholding
- Change in name to PT PLN Nusantara Power
- COD of Muara Tawar Block 3 Add On (239/250 MW)
- Acquisition of (acquisition) GI PT (2 x 17 MW) and Belangkan (2 PT (2 x 30 MW)

Bidang Usaha
Business Line

Lingkup kegiatan Perusahaan adalah untuk menyelenggarakan usaha ketenagalistrikan berdasarkan prinsip industri dan niaga yang sehat.

The scope of the Company's activities is to carry out electricity business based on sound industrial and commercial principles.

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar
Business Activities Based on Articles of Association

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah untuk menyelenggarakan usaha ketenagalistrikan berdasarkan prinsip industri dan niaga yang sehat yang meliputi aktivitas-aktivitas sebagai berikut:

1. Pembangkitan tenaga listrik;
2. Transmisi tenaga listrik;
3. Distribusi tenaga listrik;
4. Perdagangan tenaga listrik;
5. Pemanfaatan dan penjualan hasil sampingan dari kegiatan usaha tersebut di atas sepanjang tidak merugikan kepentingan umum.

According to with Chapter 3 of the Company's Articles of Association, the scope of the Company's activities is to carry out electricity business based on sound industrial and commercial principles, including the following activities:

1. Power Plants;
2. Electrical Building Construction;
3. Installation of electricity equipment;
4. Maintenance and/or operation of electrical equipment;
5. Trading and/or supporting business activities to optimize the utilization of resources owned by the Company, including delegating assignments to the Subsidiaries.

Kegiatan Usaha yang Dijalankan Saat Ini
Current Business Activities

Kegiatan usaha PLN NP yang dijalankan saat ini adalah:

1. Penyediaan tenaga listrik dengan keandalan yang baik melalui mekanisme Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) dengan PT PLN (Persero) sebagai offtaker tunggal.
2. Kegiatan usaha lainnya yang berkaitan dengan usaha Perusahaan dalam rangka memaksimalkan secara maksimal potensi yang dimiliki PLN NP guna meningkatkan revenue dan EBITDA (*earnings before interest, tax, depreciation and amortization*) sebagai upaya untuk menuju *Integrated Power Company*, baik dilakukan langsung oleh PLN NP maupun melalui Anak Perusahaan, Perusahaan Asosiasi maupun perusahaan Afiliasi yang meliputi ruang usaha berikut:
   a. Pembangkit tenaga listrik melalui kerjasama dalam *Independent Power Producer* (IPP);
   b. *Asset Operation and Maintenance* (O&M) pembangkit termasuk jasa penunjangnya;
   c. *Asset Maintenance*, Repair & Overhaul (MRO) pembangkit;
   d. *Asset Technical Supporting* (TS) *assessment* pembangkit;
   e. Penyedia material suku cadang pembangkit (distribusi).

PLN NP currently runs the following business activities:

1. Electricity provision with good reliability through Power Purchase Agreement (PPA) mechanism with PT PLN (Persero) as the single buyer;
2. Other business activities related to the Company's business activities in order to fully utilize PLN NP's potential to increase revenue from the asset light (beyond EBITDA) business line, these other activities is to achieve an Integrated Power Company, either directly carried out by PLN NP or through Subsidiaries, Associated Companies, and Affiliations, including the following business lines:
   a. Power Plant through ownership in Independent Power Producer (IPP);
   b. Operation and Maintenance (O&M) services for Power Plant, including the supporting services;
   c. Maintenance, Repair & Overhaul (MRO) Service of Power Plant;
   d. Technical Supporting (TS) assessment and overhaul services for Power Plant;
   e. Provision of Power Plant spare part (distribution).

f. Jasa Engineering, Procurement and Construction (EPC) pembangkit, transmisi dan gardu induk;
g. Jasa Enterprise Asset Management (EAM);
h. Pendanaan/investasi di bidang pembangkitan;
i. Jasa konsultasi ketenagalistrikan;
j. Jasa penyediaan tenaga kerja (LOTE untuk O&M pembangkit listrik; dan
k. Jasa sertifikasi kompetensi tenaga ketenagalistrikan.

f. Engineering, Procurement, and Construction (EPC) services for Power Plant, transmissions, and substations;
g. Enterprise Asset Management (EAM) services;
h. Funding/investment in Power Plant;
i. Electricity consulting services;
j. Human Capital (HC) provider for Operation & Maintenance (O&M) of power plants; and
k. Competency certification service for electricity personnel.

Uraian Segmen Usaha
Business Segment Description

Segmen usaha utama PLN SIP dibedakan berdasarkan pelanggannya, yang terbagi menjadi 2 (dua), yakni (1) segmen usaha pelanggan tenaga listrik dan (2) segmen usaha pelanggan lainnya. Pelanggan pada segmen usaha penjualan tenaga listrik terdiri dari pelanggan grid dan pelanggan embedded. Adapun pelanggan pada segmen usaha lainnya terdiri dari pelanggan jasa Operasi dan Pemeliharaan (O&M), jasa Engineering, Procurement and Construction (EPC), jasa Enterprise Asset Management (EAM), dan jasa lainnya pada perniagaan milik PT PLN (Persero) maupun pembangkit IPP.

PLN SIP divides main business segment based on customers into 2 (two), namely (1) electricity sales business segment and (2) other business segments. Customers in the electricity sales and purchase business segment consist of grid customers and embedded customers. Customers in other business segments consist of Operations and Maintenance (O&M) customers, Engineering, Procurement and Construction (EPC) services, Enterprise Asset Management (EAM) services, and Other Services at power plants of PT PLN (Persero) and IPP Power Plant.

Indikator kinerja pada segmen usaha penjualan tenaga listrik adalah kinerja pembangkit, produksi dan penjualan tenaga listrik. Sedangkan indikator kinerja pada segmen usaha bisnis lainnya berbeda-beda sesuai dengan jenis dan jasa masing-masing. Secara keseluruhan, Direksi menggunakan ukuran pendapatan yang dijadikan untuk menilai kinerja seluruh segmen operasi yang ada.

The performance indicators on the electricity business sales segment are on the performance of the performance, production and sales of the electricity power plant. Meanwhile the performance indicators for other business segments are different according to each service types. Overall, the Board of Directors uses the measure of revenue earned to assess performance of all existing operating segments.

Produk dan Jasa

Products and Services

Berbagai solusi bisnis yang diwadahkan oleh PLN NP dan seluruh entitas dalam Grup PLN NP secara bersama-sama mendukung peningkatan perluasan cakupan pasar Perusahaan dalam mendukung pencapaian visi misi Perusahaan.

Various business solutions provided by PLN NP and all entities in the PLN NP Group together support the improvement in the market coverage expansion of the Company in supporting the achievement of the Company's vision and mission.

Produk utama PLN NP adalah tawaran operasi Unit Pembangkit dan tenaga listrik yang dihasilkan oleh Unit Pembangkit melalui mekanisme sebuah transmisi langsung kepada pelanggan berdasarkan kontrak jual beli yang dinyatakan dengan kWh. Dasarnya.

Berdasarkan segmen usahanya, PLN NP memiliki segmen usaha utama sebagai penyedia tenaga listrik serta penyelenggara jasa operasi dan pemeliharaan (Operation and Maintenance/O&M) pembangkit dengan mengelola pembangkit milik sendiri maupun milik dari yang tersebar di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT dan Papua yang terdiri dari:

1. 8 (delapan) Unit Pembangkit Existing dan 1 (satu) Unit Pembangkit Steam (PLTU Cirata)
2. 5 (lima) Unit Jasa Operasi dan Pemeliharaan PJP-1 Jawa
3. 17 (tujuh belas) Unit Jasa Operasi dan Pemeliharaan Luar Jawa
4. 1 (satu) Unit Jasa Operasi dan Pemeliharaan Pembangkit PLN di luar PLN NP.
5. 2 (satu) Unit Energi Pembangkit
6. 1 (satu) Unit Pemeliharaan, Repair & Overhaul (MRO)
7. 1 (satu) Unit PJB Academy
8. 2 (dua) Unit Pelaksana Proyek
9. Kepemilikan saham pada 8 (delapan) Unit Pembangkit IPP dan
10. Kepemilikan saham pada Perusahaan Operasi dan Pemeliharaan untuk mengelola 1 (satu) unit pembangkit PLN.

Selain itu juga terdapat beberapa bisnis produksi lainnya yang dilaksanakan oleh PLN NP meliputi Entitas Anak, Profil, dan Kinerja Entitas yang tergabung dalam Grup PLN NP disajikan berikutnya pada bagian Profil dan Kinerja Entitas Anak, Cucu-Cicit, Asosiasi dan Ventura Bersama dalam Laporan Tahunan ini.

PLN NP's main product is the operation readiness of the Generating Unit and the electricity generated by the Generating Unit through the transmission line mechanism directly to the customers based on the sale and purchase contract stated in the kWh. Basically.

PLN NP has a main business segment as a provider of electricity as well as the provider of operation and maintenance (O&M) services for power plants by managing its own and other parties' power plants spread across Java, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT and Papua, consisting of:

1. 8 (eight) Existing Generating Units and 1 (one) Steam Generating Unit (Cirata PPU)
2. 5 (five) PJP-1 Java Operation and Maintenance Service Units
3. 17 (seventeen) Operation and Maintenance Service Units Outside Java
4. 1 (one) PLN Plant Operation and Maintenance Service Units at PLN NP Plant.
5. 2 (one) Power Plant Energy Unit
6. 1 (one) Maintenance, Repair & Overhaul (MRO) Unit
7. 1 (one) PJB Academy Unit
8. 2 (two) Project Implementation Units
9. Share ownership in 8 (eight) IPP Generating Units and
10. Share ownership in an Operation and Maintenance Company to manage 1 (one) PLN generating unit.

Moreover, there are also several other supporting businesses carried out by PLN NP and Subsidiaries. Profiles and performance of entities that are members of the PLN NP Group are presented next in the Profiles and Performance of Subsidiaries, Second to Third Tier Subsidiaries, Associates and Joint Venture section of this Annual Report.

Secara ringkas, klasifikasi produk dan jasa Perusahaan dijelaskan sebagai berikut:

In brief, the Company's products and services classifications are described as follows:

Pembangkit Tenaga Listrik
Power Plant

Usaha pembangkitan tenaga listrik dilakukan melalui pengelolaan Unit Pembangkitan (UP) Mini Sunan, Unit Pembangkitan mini serentak beroperasi di sebagian UP dengan total kapasitas terpasang sebesar 7.211 MW yang tersebar di pulau Jawa dan di luar Jawa serta 1 (satu) Pembangkit Hasil Hilirisasi Coke dengan kapasitas 1 MW yang berlokasi di Purwakarta, Jawa Barat. Selain pembangkit yang telah beroperasi, PLN juga memiliki Unit Pembangkit dalam tahap pengembangan yaitu Add On Muara Tawar Blok 3 dan 4 dengan kapasitas 500 MW.

PLN NP manages power plant business through the management of (Owned) Generation Unit. There are 6 (eight) generation units with a total installed capacity of 7,211 MW spread across the Java Island and outside Java and 1 (one) Coke Gas Utilization Plant with a capacity of 1 MW, located in Purwakarta, West Java. Apart from the operating power plants, PLN NP also has Outstanding Unit in the development stage, namely Muara Tawar Block 3 and 4 Add On with a capacity of 500 MW.

Tabel Unit Pembangkitan Milik Sendiri
Table of (Owned) Generation Units

No	Unit Pembangkitan Generation Unit	Kapasitas Terpasang (MW) Installed Capacity (MW)	Sumber Daya Fuel	Lokasi Location
Unit Pembangkit Outsiding Existing Generating Unit				
1	UP Sintelu Sintelu GU	3.319	Minyak dan gas Oil and gas	Sintelu, Jawa Timur Sintelu, East Java
2	PLTMG Sewaan PLTMG Sewaan	8	Gas	Sewaan, Jawa Timur Sewaan, East Java
3	UP Muara Tawas Muara Tawas GU	1.930	Minyak dan gas Oil and gas	Bekasi, Jawa Barat Bekasi, West Java
4	UP Cilacap Cilacap GU	1.000	Tenaga air Hydro	Purbalingga, Jawa Barat Purbalingga, West Java
5	UP Muara Karang Muara Karang GU	909	Minyak dan gas Oil and gas	Pluit, Jakarta

No.	Unit Pembangkit Generation Unit	Kapasitas Terpasang (MW) Installed Capacity (MW)	Bahan Bakar Fuel	Lokasi Location
2.	UP Paiton Paiton PLTU	800	Batubara Coal	Pulo Gesang
3.	UP Rembang Rembang PLTU	315	Tenaga uap Hydro	Wilayah Jawa Timur Wilayah Jawa Timur
4.	PLTD Gunung Gunung PLTD	30	Diesel	Sulawesi Selatan South Sulawesi
Unit Pembangkit Pusat Research Generation Unit				
5.	PLTS Cirata Cirata PLTS	1	Tenaga surya Solar	Purwakarta, Jawa Barat Purwakarta, West Java
Unit Dalam Tahap Pengembangan Unit under development				
10.	Add On Hours Tower Blok 3 dan 4 Hours Tower Add On Block 3 and 4	1561	Gas	Bekasi, Jawa Barat Bekasi, West Java

Unit Bisnis Jasa *Operation & Maintenance* Pembangkit (UBJOM)

Power Plant Operation & Maintenance Services Business Unit

Pelayanan pengoperasian pembangkitan (O&M) dilakukan dengan mekanisme penyediaan langsung ke pelanggan berdasarkan Kontrak Jasa O&M. Jasa O&M dilakukan langsung oleh PLN NP maupun melalui Entitas Anak (PT PJB Services) dan Ventura Bersama (PT Bontang PJB).

Total kapasitas pembangkit yang dikelola PLN NP melalui jasa O&M adalah 6.830,6 MW yang tersebar di 27 titik pusat listrik (lokasi). Selain itu, PLN NP juga mengelola jasa O&M pada unit pembangkit IPP berdaya mampu/kitaran sebesar 7516 MW, sebesar 400 MW yang tersebar di 2 titik lokasi.

Operation and maintenance (O&M) services are performed with a direct delivery mechanism to customers based on the O&M Service Contract. O&M services are performed directly by PLN NP or through its subsidiary (PT PJB Services) and Joint Venture (PT Bontang PJB).

Total generating capacity managed by PLN NP through O&M services amounted to 6,830.6 MW, spread across 27 (twenty seven) locations. Moreover, PLN NP also manages O&M Services on IPP generating units (Base in PLN NP share ownership) of 7516 MW, spread across 2 (two) locations.

Tabel Unit Bisnis Jasa O&M PLN NP

Table of PLN NP O&M Services Business Unit

No.	Unit Pembangkit Generation Unit	Kapasitas Terpasang (MW) Installed Capacity (MW)	Status Aset Asset	Lokasi Location	UBJOM BUSINESS...
Jasa O&M PTP—1 Jawa (3.013 MW) Jasa PTP—1 O&M Services (3.013 MW)					
1.	PLTU Pembangkit Pembangkit PLTU	3x300	Dikelola Own	Pembangkit, Jawa Tengah Pembangkit, Central Java	Jawa Java
2.	PLTU Indramayu Indramayu PLTU	3x330	Dikelola Own	Indramayu, Jawa Timur Indramayu, East Java	Jawa Java
3.	PLTU Paciter Paciter PLTU	3x300	Dikelola Own	Paciter, Jawa Timur Paciter, East Java	Jawa Java
4.	PLTU Pelabuhan B Pelabuhan B PLTU	1x300	Dikelola Own	Probolinggo, Jawa Timur Probolinggo, East Java	Jawa Java
5.	PLTU Tanjung Awar-awar Tanjung Awar-awar PLTU	3x350	Dikelola Own	Tuban, Jawa Timur Tuban, East Java	Jawa Java

No.	Unit Pembangkitan Generation Unit	Kapasitas Terpasang (MW) Installed Capacity (MW)	Bahan Bakar Fuel	Lokasi Location	Operasi Operation
Jasa O&M Tambangan PLN Nusantara Power (Eks PJB) (1.408,3 MW) O&M Services for PLN Power Plants ex PJB (Ex-(1.408,3 MW))					
6.	PGTU Muara Karang Blok 2 Muara Karang Block 2 (72 MW)	758	Gas	Pluit, Jakarta	Beroperasi Operation
7.	PGTU Muara Tawar Blok 5 Muara Tawar Block 5 (1.000)	200	Gas	Bekasi, Jawa Barat Bekasi, West Java	Beroperasi Operation
8.	PGTU Muara Karang Blok 3 Power (2.000)	500	Gas	Pluit, Jakarta	Beroperasi Operation
9.	PGA Arbaru Gading Arbaru Gading (1 MW)	1,00	Tenaga air Hydro	Malang, Jawa Timur Malang, East Java	Beroperasi Operation
10.	PGA Wonorejo Wonorejo (1 MW)	1,00	Tenaga air Hydro	Tulungagung, Jawa Timur Tulungagung, East Java	Beroperasi Operation
Jasa O&M Luar Jawa (814,2 MW) Outside Java O&M Services (814,2 MW)					
11.	PGTMD Arun Arun (90 MW)	194,17	Gas	Aceh	Luar Jawa Outside Java
12.	PGTU Teluk Sirih Teluk Sirih (2 MW)	10,13	Batubara Coal	Riau	Luar Jawa Outside Java
13.	PGTU Kaltim Teluk Kaltim Teluk (2 MW)	30,10	Batubara Coal	Kalimantan Timur East Kalimantan	Luar Jawa Outside Java
14.	PGTU Nusa Pinta Nusa Pinta (2 MW)	3,60	Batubara Coal	Kalimantan Tengah Central Kalimantan	Luar Jawa Outside Java
15.	PGTU Sentanza Sentanza (2 MW)	3,60	Batubara Coal	Nusa Tenggara Barat West Nusa Tenggara	Luar Jawa Outside Java

Jasa O&M yang dikelola PLN NP melalui Entitas Anak yaitu PT PJB Services dan tersebar di luar Jawa sebanyak 224 MW tersebar di 12 (dua belas) lokasi sebagai berikut:

O&M services managed by PLN NP through its subsidiary PT PJB Services, and located outside Java amounted to 224 MW, spread across 12 (twelve) locations as follows:

Tabel Unit Bisnis Jasa O&M PLN NP oleh Entitas Anak

Table of PLN NP O&M Services Business Units by Subsidiaries

No.	Unit Pembangkitan Generation Unit	Kapasitas Terpasang (MW) Installed Capacity (MW)	Sistem Sistem Type	Lokasi Location
1.	PGTU Anggana Anggana (2 MW)	3x3	Batubara Coal	Sulawesi Tengah Central Sulawesi
2.	PGTU Amurang Amurang (2 MW)	2x25	Batubara Coal	Sulawesi Utara North Sulawesi
3.	PGTU Anggrek Anggrek (2 MW)	2x25	Batubara Coal	Gorontalo
4.	PGTU Bengkulu Bengkulu (2 MW)	2x30	Batubara Coal	Bengkulu Bengkulu
5.	PGTU Bengkulu Baru Bengkulu Baru (Unit 1)	1x10,5	Batubara Coal	Bengkulu Bengkulu
6.	PGTU Bolok Bolok (2 MW)	2x10,5	Batubara Coal	Nusa Tenggara Timur East Nusa Tenggara
7.	PGTU Rendani Unit 1 & 2 Unit 1 & 2 Rendani (2 MW)	2x30	Batubara Coal	Sulawesi Tenggara Southeast Sulawesi
8.	PGTU Rendani Unit 3 Unit 3 Rendani (2 MW)	1x50	Batubara Coal	Sulawesi Tenggara Southeast Sulawesi

No.	Unit Pembangkit Generation Unit	Kapasitas Terpasang (MW) Installed Capacity (MW)	Bahan Bakar Fuel	Lokasi Location
9	PLTU Nagekeo Nagekeo (2 MW)	2x50	Batubara Coal	Kab. Nagekeo (Ende) (Ende, Nagekeo)
10	PLTU Ende (Unit 6) Ende Jungle (2 MW)	1x7	Batubara Coal	Nusa Tenggara Timur (Ende, Nusa Tenggara)
11	PLTU Tambolaka Tambolaka (2 MW)	2x7	Batubara Coal	Sumba (NTT, Riau)
12	PLTU Talaud Talaud (2 MW)	2x7	Batubara Coal	Maluku Utara (North Maluku)

Jasa Pembangunan Pembangkit Baru *(Engineering, Procurement and Construction/ EPC)*

New Power Plant Development Services (Engineering, Procurement and Construction/ EPC)

PLN NP menyediakan jasa pembangunan pembangkit baru (Engineering Procurement and Construction (EPC)) melalui Entitas Anak yaitu PT Nusantara Construction yang berusaha di 4 (empat) lokasi sebagai berikut:

PLN NP provides new power plant construction services (Engineering, Procurement and Construction (EPC)) through its subsidiary, PT Nusantara Construction, located in 4 (four) locations as follows:

Tabel Unit Pembangkit EPC PLN NP

Table of PLN NP EPC Generation Units

No.	Unit Pembangkit Generation Unit	Kapasitas Terpasang (MW) Installed Capacity (MW)	Bahan Bakar Fuel	Lokasi Location
1.	PLTU Timika (Existing) Timika (Existing) (2 MW)	4x7	Batubara Coal	Papua
2.	PLTU Ende Ende (2 MW)	1x100	Batubara Coal	Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat)
3.	PLTU Galela Galela (2 MW)	2x12	Batubara Coal	Maluku Utara (North Maluku)
4.	PLTU Kotabaru Galela (2 MW)	2x7	Batubara Coal	Nusa Tenggara Timur (Nusa Tenggara Timur)

Penyedia Material Cadang Pembangkit *(Stockist)*

Power Plant Spare Parts Provider (Stockist)

Sebagai salah satu stockist spare part di Indonesia bergerak untuk Entitas Anak yaitu PT PLN SC, untuk menjamin ketersediaan suku cadang pembangkitan, penyediaan services, dan dukungan retrofit kepada Pelanggan PLTU dan Pelanggan Non-PLTU di seluruh Indonesia yang berasal dari PT PLN (Persero), PLN Nusantara Power, PLN Indonesia Power, dan EPC serta termasuk memberikan dukungan kepada Energi Baru Terbarukan (EBT).

Stockist services business is currently managed directly by the Subsidiary, PT PLN SC, to ensure the supply of generation spare parts, provision of services, and retrofit support to CFPP Customers and Non-CFPP Customers throughout Indonesia from PT PLN (Persero), PLN Nusantara Power, PLN Indonesia Power, and EPCs and including providing support to New Renewable Energy (NRE).

Berikut adalah rincian 38 (tiga puluh empat) lokasi unaha pembangkit

The following are details of 38 (thirty-six) stockist service business locations

Pelanggan *Stockist* PLTU
CFPP Stockist Customer

Tabel Pelanggan *Stockist* PLTU
Table of CFPP Stockist Customers

No	Unit Pembangkitan Generation Unit	Kapasitas Terpasang (MW) Installed Capacity (MW)	Status Saham Plan	Lokasi Location
Regional Jawa (13.130 MW) Java Region (13.130 MW)				
1.	PLTU Suralaya 8 Suralaya #8 CFPP	1x625	Eskalasi Cost	Merak, Jawa Barat Merak, West Java
2.	PLTU Labuan Labuan CFPP	2x300	Eskalasi Cost	Pandeglang, Banten
3.	PLTU Pelabuhan Ratu Pelabuhan Ratu CFPP	3x350	Eskalasi Cost	Sukabumi, Jawa Barat Sukabumi, West Java
4.	PLTU Adipala Adipala CFPP	1x660	Eskalasi Cost	Cilacap, Jawa Tengah Cilacap, Central Java
5.	PLTU Lontar Lontar CFPP	3x315	Eskalasi Cost	Tangerang, Banten
6.	PLTU Indramayu Indramayu CFPP	3x330	Eskalasi Cost	Indramayu, Jawa Barat Indramayu, West Java
7.	PLTU Paiton Paiton CFPP	3x315	Eskalasi Cost	Paiton, Jawa Timur Paiton, East Java
8.	PLTU Paiton 9 Paiton 9 CFPP	1x660	Eskalasi Cost	Probolinggo, Jawa Timur Probolinggo, East Java
9.	PLTU Rembang Rembang CFPP	2x315	Eskalasi Cost	Rembang, Jawa Tengah Rembang, Central Java
10.	PLTU Tanjung Awar-awar Tanjung Awar-awar CFPP	1x350	Eskalasi Cost	Tuban, Jawa Timur Tuban, East Java
11.	PLTU Tanjung Jati B Tanjung Jati B CFPP	2x660	Eskalasi Cost	Jepara, Jawa Tengah Jepara, Central Java
12.	PLTU Tanjung Jati B Tanjung Jati B CFPP	2x660	Eskalasi Cost	Jepara, Jawa Tengah Jepara, Central Java
Regional Sumatera (720 MW) Sumatera Region (720 MW)				
13.	PLTU Pangkalan Susu Pangkalan Susu CFPP	3x200	Eskalasi Cost	Sumatera Utara North Sumatera
14.	PLTU Bangka Unit Ampat #3 Bangka Unit Ampat #3 CFPP	2x30	Eskalasi Cost	Bangka Belitung
15.	PLTU Tenayan Tenayan CFPP	3x110	Eskalasi Cost	Pekanbaru, Riau
Regional Kalimantan (450 MW) Regional Kalimantan (450 MW)				
16.	PLTU Kaltim Teluk Kaltim Teluk CFPP	3x110	Eskalasi Cost	Kalimantan Timur East Kalimantan
17.	PLTU Tarahan Prima Tarahan Prima CFPP	2x50	Eskalasi Cost	Kalimantan Tengah Central Kalimantan
18.	PLTU Kaltim Nana Kaltim Nana CFPP	2x77.5	Eskalasi Cost	Kalimantan Timur East Kalimantan
19.	PLTU Sengkang Sengkang CFPP	2x7	Eskalasi Cost	Kalimantan Barat West Kalimantan

No	Unit Pembangkitan	Kapasitas Terpasang (MW)	Bahan Bakar	Lokasi
Regional Sulawesi (170 MW) Sulawesi Region (170 MW)				
30	PLTU Amurang	2x25	Batubara	Sulawesi Utara
31	PLTU Bitung	2x50	Batubara	Bitung, Sulawesi Selatan
32	PLTU Kendari Unit 1 & 2	2x10	Batubara	Kendari, Sulawesi Tenggara
Regional Papua (22 MW) Papua Region (22 MW)				
33	Holtekamp	2x30	Batubara	Jayapura, Papua
Regional Nusa Tenggara (211 MW) Nusa Tenggara Region (211 MW)				
34	PLTU Jeranjang	3x25	Batubara	Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat
35	PLTU Ropa	2x7	Batubara	Nagekeo, Nusa Tenggara Timur
36	PLTU Bolok	2x16.5	Batubara	Kupang, Nusa Tenggara Timur
37	PLTU Sumbawa Barat	2x7	Batubara	Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat

Pelanggan Stockist Non-PLTU

Non-CFPP Stockist Customer

Tabel Pelanggan Stockist Non-PLTU

Table of Non-CFPP Stockist Customers

No	Unit Pemakaian
Regional Jawa Java Region	
28	Kantor Pusat Indonesia Power
29	Kantor Pusat PLN NP
30	PLN Nusantara
31	UBJ
32	Enjinering
33	Anak Shiftsubsidi

No	Unit Pemakaian
Regional Sulawesi Sulawesi Region	
34	UPK Kendari
Regional Nusa Tenggara Nusa Tenggara Region	
35	UPK Timor
36	UPK Tarahan

Investasi Pembangkitan
Generation Investment

Usaha Kepemilikan Saham di Perusahaan O&M
Shareholding Business in O&M Company

PLN NP memiliki perusahaan patungan, yaitu PT Kamojang IP1 yang melakukan jasa O&M pada unit pembangkit milik PT PLN (Persero) di Tanjung Jati B #3 dan #4 dengan kapasitas 2x660 MW.

PLN NP has a joint venture company, namely PT Kamojang IP1, which performs O&M services on generating units owned by PT PLN (Persero) in Tanjung Jati B #3 and #4 with a capacity of 2x660 MW.

Usaha Kepemilikan *Independent Power Producer* (IPP)
Independent Power Producer (IPP) Ownership Business

PLN NP mengembangkan pembangkit IPP melalui perusahaan patungan sebesar 5.583 MW, sebagai berikut:

PLN NP is developing an IPP power plant through a joint venture of 5,583 MW as follows:

Tabel Unit Pembangkitan IPP PLN NP
Table of PLN NP IPP Generation Units

No	Unit Pembangkitan *Generation Unit*	Kapasitas Terpasang (MW) *Installed Capacity (MW)*	Status Saat Ini *Fuel*	Lokasi *Location*
Pembangkit IPP Beroperasi (4.712 MW) *Pembangkit IPP Beroperasi (4.712 MW)*				
1.	PLTA Asahan *Asahan PLTA*	2x90	Terbarukan *Hydro*	Sumatera Utara *North Sumatera*
2.	PLTU Belitung#1 *Belitung#1 CFPP*	2x11.9	Batubara *Coal*	Sumatera Utara *North Sumatera*
3.	PLTU Jawa 7 Unit 1 dan 2 *Unit 1 and 2 Java 7 CFPP*	2x1.000	Batubara *Coal*	Serang, Banten
4.	PLTU Cilacap Unit #3 dan #4 *Unit #3 and #4 Cilacap CFPP*	2x300	Batubara *Coal*	Cilacap, Jawa Tengah *Cilacap, Central Java*
5.	PLTU Cilacap Unit #5 Ekspansi 1) *Unit #5 Cilacap Expansion 1) CFPP*	1x660	Batubara *Coal*	Cilacap, Jawa Tengah *Cilacap, Central Java*
6.	PLTU Cilacap Ekspansi 2 *Expansion 2 Cilacap CFPP*	1x1.000	Batubara *Coal*	Cilacap, Jawa Tengah *Cilacap, Central Java*
7.	PLTU Pelabuhan *Pelabuhan CFPP*	2x25	Batubara *Coal*	Pelabuhan, Sulawesi Selatan *Pelabuhan, South Sulawesi*
Dalam Tahap Pengembangan (855 MW) *Under Development (855 MW)*				
8.	PLTA Batang Toru *Batang Toru CFPP*	4x213.5	Terbarukan *Hydro*	Tapanuli Selatan *South Tapanuli*
9.	PLTU Tanjung Chita *Tanjung Chita CFPP*	135	Surya *Solar*	Pantekelola, Jawa Barat *Pantekelola, West Java*
10.	PLTU Sumsel 2 *Sumsel 2 CFPP*	2x150	Batubara *Coal*	Sumatera Selatan *South Sumatera*

Bisnis Pendukung Lainnya
Other Supporting Business

Usaha Jasa *Enterprise Asset Management* (EAM)
Enterprise Asset Management (EAM) Services Business

EAM merupakan segmen usaha bisnis PLN NP dengan kegiatan mengelola aset. Perusahaan agar memberikan kontribusi yang optimal melalui penyediaan data historis aset yang dimutakhirkan dengan kebutuhan proses bisnis pada suatu Unit Bisnis. Hal tersebut merupakan perceptasi nilai tambah dalam proses bisnis pembangkit berupa listrik dan jasa pendukung lainnya.

PLN NP EAM is a business segment with activities to manage the Company's assets in order to provide optimal contribution through the implementation of asset governance tailored to the needs of business processes in a Work Unit. It represents the creation of added value in the business process of power plants and other supporting services.

Pada tahun 2022, PLN NP telah melakukan implementasi EAM di sejumlah unit PLN, antara lain: UIP Sumatera, EAM UBJ Jabar, EAM Pusri-1 Aset, EAM UPK Semarang dan UPK Timor (Tahap 1), EAM UPK Singkawang (Tahap 3 dan 4).

In 2022, PLN NP implemented EAM in several PLN units, including: Sumatera EAM, UBJ Jabar EAM, Aset Pusri 1 EAM, UPK Timor and UPK Timor EAM (Phase 1), UPK Singkawang EAM (Phase 3 and 4).

Usaha Jasa *Maintenance, Repair, and Overhaul* (MRO)
Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) Services Business

Jasa MRO pembangkit merupakan pekerjaan pemeliharaan unit pembangkit secara berupa kebutuhan dalam rangka mengembalikan kondisi pembangkit sesuai performa terbaiknya.

Power plant MRO services are maintenance work on power plant units as needed in order to restore the condition of the power plant to the best performance.

Pada tahun 2022, PLN NP melakukan Major Inspection 500 MW ICF Chandpur di Bangladesh, PLN Bakbar Unit #2 PT SJPP dan Pengukuran Pit Final PLTU Rabas Agung Unit #2 dan Jasa Export Tuning GE9171EC Rabas Agung.

In 2022, PLN NP conducted Major Inspection on 500 MW ICF Chandpur in Bangladesh, PLN Bakbar Unit #2 PT SJPP, Pit Final Measurement Services Rabas Agung 2 PP Unit #2 and Export Tuning Services GE9171EC Rabas Agung CFPP.

Usaha Optimalisasi Aset
Asset Optimization Effort

Kegiatan usaha ini bertujuan untuk mengoptimalkan aset yang ada di area unit milik PLN NP agar memiliki nilai guna dan memberikan pemasukan terhadap pendapatan Non-Core PLN NP. Kegiatan usaha yang dilakukan antara lain adalah pemanfaatan aset, pemanfaatan lahan atau bangunan, fasilitas pendukung, serta area yang dimiliki Perusahaan.

This business activity purposes to optimize the existing assets in PLN NP's unit area so as to have use value and provide income to PLN NP's Non-Core income. Business activities carried out include asset utilization, land or building utilization, supporting facilities, and land owned by the Company.

Pada tahun 2022, kegiatan usaha optimalisasi aset yang dilakukan antara lain pemanfaatan Ay aset bekas aset (FABA), pendayagunaan aset properti, pengelolaan *guest house/mess/* objek wisata, dan pemakaian lahan di BPMT untuk pembangunan PLTS Terapung UIK MAMC.

In 2022, the asset optimization business activities carried out include the utilization of fly ash bottom ash (FABA), utilization of property assets, management of guest house/mess/tourist attractions, and the land use at BPMT for the construction of UIK MAMC Floating Solar Power Plant.

PIB Academy
PIB Academy

Penyelenggaraan layanan pembelajaran, pelatihan dan sertifikasi yang berstandar secara standar kompetensi ESDM Kompetensi ESDM hingga standar internasional. PIB Academy Campus berada di beberapa lokasi yaitu:

a. Kampus UP Gresik: Manajemen Aset
b. Kampus UP Pedan & UP Bromo: Manajemen Pembangkit Listrik & K3
c. Kampus UP Muara Karang: Asessment Life Assessment (RLA)
d. Kampus UP Cilegon: Pembangkit EBT & Pengembangan Usaha
e. Kampus Surabaya: Kepemimpinan & Budaya Perusahaan

Providing standardized training, training and certification services according to the competencies by the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) to international standards. PIB Academy Campus is located in several locations, namely:

a. Gresik GU Campus: Asset Management
b. Pedan GU & Bromin GU Campus: Power Plant Management & OHS
c. Muara Karang GU Campus: Remaining Life Assessment (RLA)
d. Cilegon GU Campus: Renewable Energy Generation & Business Development
e. Surabaya Campus: Leadership & Corporate Culture

Laboratorium Kalibrasi
Calibration Laboratory

Laboratorium terakreditasi oleh KAN untuk mengkalibrasi dan mengeluarkan kaya sertifikat peralatan pembangkit listrik.

KAN accredited laboratory to calibrate and issue certificates power plant equipment.

Skema Penyaluran Tenaga Listrik

Schema of Electricity Transmission

Posisi PLN NP dalam skema penyaluran listrik adalah pada tahap pembangkitan yaitu penyediaan tenaga listrik. Kontribusi Perusahaan pada penyediaan tenaga listrik nasional didukung oleh sinergi usaha Entitas Anak dan afiliasinya yang tergabung dalam PLN NP Grup.

PLN NP's portion in the electricity transmission scheme is at the electric power generation stage, namely the electricity provision. The Company's contribution in the provision of national electricity is supported by the business synergy of its Subsidiaries and affiliates incorporated in the PLN NP Group.

Posisi bisnis pembangkit tenaga listrik terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik. Dalam PLN NP dalam skema penyaluran listrik adalah pada tahap pembangkitan yaitu penyediaan tenaga listrik. Selanjutnya tenaga listrik disalurkan (transmisi) melalui Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sistem Jaringan Jawa dan didistribusikan kepada pelanggan industri maupun rumah tangga oleh PT PLN (Persero).

The business activities of electricity generation consist of 3 (three) stages namely electric power generation, transmission and distribution. In electricity, PLN NP's position in the electricity transmission scheme is at the electric power generation stage, namely the electricity provision. Furthermore, electricity is transmitted (transmission) through the Java-Bali system High Voltage Air Lines (SUTT) and distributed to industrial and household customers by PT PLN (Persero).

Sinergi Grup PLN NP Perkuat Kontribusi pada Penyediaan Tenaga Listrik Nasional

Synergy of PLN NP Group Strengthens Contribution to National Electricity Supply

Sinergi dan integrasi usaha Grup PLN NP merupakan salah satu upaya pencapaian aspirasi Visi untuk menjadi Terdepan dan Terpercaya dalam Bisnis Energi Berkelanjutan di Asia Tenggara. Lingkup sinergi usaha Grup PLN NP meliputi bidang rekayasa teknik (EPC), pengelolaan pembangkit yang milik sendiri, pembangkit yang dikelola maupun berupa investasi penyediaan jasa operasi dan pemeliharaan pembangkit, penyediaan penyaluran SDM untuk jasa operasi dan pemeliharaan sertifikasi kompetensi, SDM ketenagalistrikan, dan juga penyediaan suku cadang pembangkit.

The synergy and integration of the PLN NP Group's business is one of the efforts to achieve the Vision aspiration to become the Leading and Trusted in Sustainable Energy Business in Southeast Asia. PLN NP Group's business synergy covers engineering (EPC), owner management of self-owned power plants, managed power plants as well as investments, provision of power plant operation and maintenance services, funding provision of human resources for operation and maintenance services, human resource competency certification in electricity, and also provision of power plant spare parts.

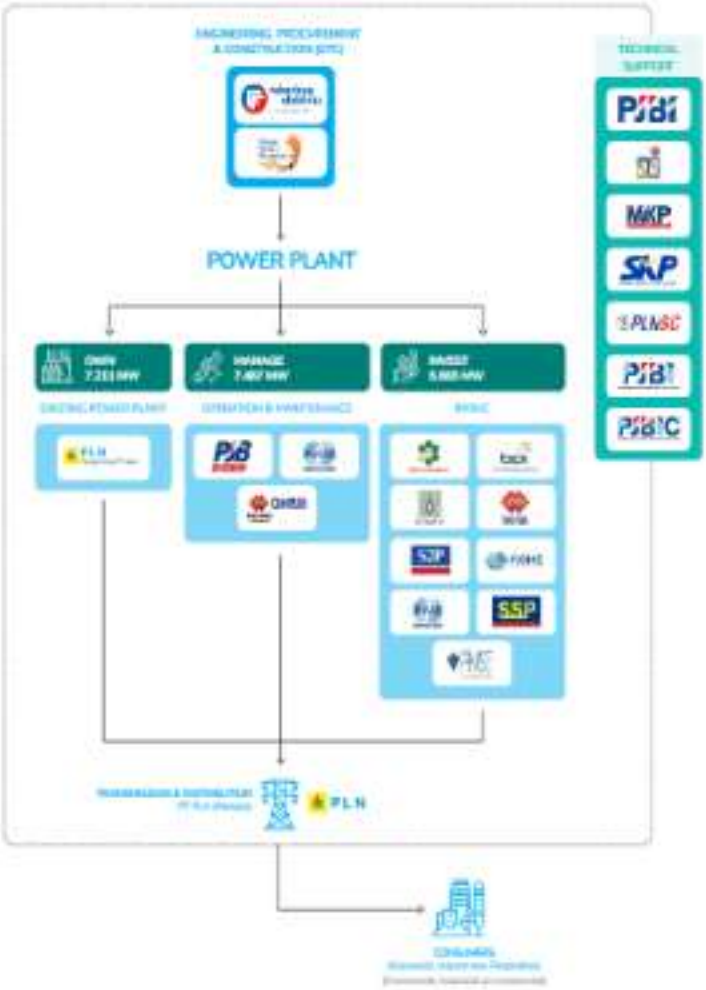
POWER PLANT
PJBI
MKP
SKP
PLNSC
PJBI
PJBIC
PLN

Visi, Misi dan Budaya Perusahaan
Vision, Mission and Corporate Culture

Internalisasi Budaya Perusahaan kepada seluruh karyawan PLN NP mampu memberikan dukungan pada proses pencapaian Visi dan Misi Perusahaan.

Corporate Culture Internalization in the entire PLN NP employees is able to provide support in the process of achieving the Company's Vision and Mission.

Dasar Pengesahan Visi dan Misi
Basis of Vision and Mission Ratification

Visi dan Misi Perusahaan ditinjau secara berkala dan telah dikaji untuk mengetahui kesesuaiannya dengan kondisi PLN NP saat ini dan dinamika industri listrik yang terjadi serta disetujui oleh Dewan dan Dewan Komisaris dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Periode Tahun 2020-2029 pada tanggal 30 Juli 2020 dan Keputusan Rapat Direksi di Luar Kapal No. 030/ DIR/2020.

The Company's vision and mission are periodically reviewed and had been studied to determine their suitability with the current conditions of PLN NP's and the dynamics of the electricity industry that are occurring as well as get the approval from the Board of Directors and the Board of Commissioners in the Company's Long Term Plans (RJPP) for the 2020-2029 period of July 30, 2020, and the Board of Directors Meetings Resolutions Outside of Meetings No. 030/DIR/2020.

Visi
Vision

Menjadi Perusahaan Terdepan dan Terpercaya dalam Bisnis Energi Berkelanjutan di Asia Tenggara

To be the trusted leader company in sustainable energy of South East Asia

Makna Visi

1. **Perusahaan Terdepan dan Terpercaya** bermakna bahwa PLN NP merupakan perusahaan yang menyediakan dan mengembangkan produknya secara aman, dan telah memenuhi atau bahkan melebihi standar operasional dan finansial terbaik di Asia Tenggara sehingga mendapatkan kepercayaan dari pelanggan untuk menjadi pilihan utama dalam melakukan bisnis.
2. **Bisnis Energi** bermakna bahwa PLN NP memiliki kompetensi di bidang pembangkitan baik dari energi terbarukan sesuai tren global mendukung dengan pengembangan usaha yang meliputi pengelolaan energi listrik, baik berbasis energi primer maupun energi terbarukan.
3. **Berkelanjutan** bermakna bahwa PLN NP berupaya dan berkomitmen secara terus menerus dengan mengedepankan faktor efektifitas meningkatkan dan mengembangkan bisnis baru serta berkarya untuk meningkatkan profit dan value Perusahaan bagi stakeholders.

Vision Definition

1. **Trusted Leader Company** can be defined that PLN NP is the proven company running and developing its business based on the sustainable corporate governance with the best operational and financial indicators in Southeast Asia, to increase the Company credibility to be the preferred choice for customer in running business.
2. **Energy Business** can be defined that PLN NP has competence in the field of power generation and renewable energy following the developing global trend with business development including selling electricity according to energy primary sources.
3. **Sustainable** can be defined that PLN NP always and develops continuously by running the existing businesses, building, and developing new businesses, as well as increasing to increase the Company's profit and values for the stakeholders.

Misi
Mission

- Menjalankan bisnis energi yang inovatif dan kolaboratif, tumbuh dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.
- Menjaga tingkat kinerja tertinggi untuk memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.
- Menarik minat dan mengembangkan talenta terbaik serta menjalankan organisasi yang agile dan adaptif.

- To conduct an innovative and collaborative, sustainably growing and environmentally-friendly energy business.
- To maintain the highest performance to provide added value for the stakeholders.
- To attract interest and develop the best talent, and to run an agile and adaptive organization.

Makna Misi

1. **Menjalankan bisnis energi yang inovatif dan kolaboratif, tumbuh dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan** artinya PLN NP berfokus pada bisnis energi yang tidak hanya pada pembangkitan tenaga listrik, melainkan pada light bisnis energi inovatif lainnya untuk mencapai diversifikasi usaha sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan secara berkelanjutan, PLN NP juga telah berpartisipasi lebih memberikan kepastian dengan pencatatan tata kelola energi pengaruh sosial, PP sesuai tujuan lain bisnis pemerintah yang baik dan berkeadilan pada kelestarianguage lingkungan.
2. **Menjaga tingkat kinerja tertinggi untuk memberikan nilai tambah bagi stakeholder** artinya dalam menjalankan bisnisnya, PLN NP berkomitmen untuk menjaga tingkat kinerja tertinggi baik dari sisi operasional maupun finansial sehingga memberikan pengembalian optimal dan memberikan value creation yang optimal.
3. **Menarik minat dan mengembangkan talenta terbaik serta menjalankan organisasi yang agile dan adaptif** artinya PLN NP berfokus dalam pengembangan kapabilitas dan kompetensikaryawan sesuai strategi pengembangan usaha dan siapa pengembangan bisnis, teknologi sebuah dengan sesuai perubahan yang yang harus dimiliki oleh PLN NP. Dimulainya mengembikan talenta terbaik sebagai PLN NP sesuai Perusahaan yang dibutuhkan organisasi yang lebih agile dan adaptif.

Mission Definition

1. To conduct an innovative and collaborative, sustainably growing and environmentally-friendly energy business means that PLN NP focuses on the energy business that is not limited to basic solar generation, but light small, but also innovative energies to achieve business diversification to maximally increase the Company's growth value. PLN NP also actively participates in collaborating with other companies through assignment schemes and PP following the good corporate governance principles and environmentally sustainable concept.
2. To maintain the highest performance to provide added value for the stakeholders means that PLN NP in running business is committed to maintaining the highest performance level while from operational or financial perspective to support the maximization of providing optimal value creation.
3. To attract interest and develop the best talent, and to run an agile and adaptive organization means that PLN NP focuses on developing capabilities and competencies of employees based on the Company's business development strategy from the aspects of business development up to the latest associated businesses that PLN NP is required to have. It is expected to generate the businesses as that PLN NP is going to become the innovative company and an organization continuing to be agile and adaptive.

Budaya Perusahaan
Corporate Culture

Sebagai Anak Perusahaan BUMN, PLN NP mengimplementasikan AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) sebagai core values di Perusahaan. Adapun core values AKHLAK di Perusahaan sejak tanggal 9 November 2020.

As an SOE subsidiary, PLN NP implements AKHLAK (Trustworthy, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, Collaborative) as the Company's core values. The Company adopts AKHLAK as the core values since November 9, 2020.

Core Values	Definisi Definition	Perilaku Perilaku Code of Conduct
A Amanah Trustworthy	Memegang teguh kepercayaan yang diberikan Upholding the trust given	- Melakukan yang dikatakan - Bertanggung jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan - Bertanggung jawab kepada nilai moral dan etika - Selaras antara perkataan dan perbuatan - Taking responsibility for the tasks, decisions, and actions taken - Upholding the moral and ethical values
K Kompeten Competent	Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas Continuing to learn and develop capabilities	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik - Membuat visi komputasional to respond to ever-changing challenges - Helping others in learning - Completing tasks with the highest quality
H Harmonis Harmonious	Saling peduli dan menghargai perbedaan Caring for each other and respecting differences	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka membuang orang lain - Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif - Respecting everyone regardless of background - Willing to help others - Building conducive work environment
L Loyal	Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa negara Dedicated and prioritizing the interests of the nation and state	- Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan Negara - Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar - Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan norma dan etika - Maintaining the good reputation of fellow employees, leaders, SOEs, and the State - Willing to sacrifice to achieve a greater goal - Adhering to a leader's decree as long as it is not against the law and ethics
A Adaptif Adaptive	Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan Keep innovating and being enthusiastic in driving or facing changes	- Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik - Terus melakukan inkubasi terhadap lingkungan perkembangan teknologi - Berinovasi produktif - Quickly adapting to be better - Continuously making improvements to keep up with technological developments - Acting productively
K Kolaboratif Collaborative	Membangun kerja sama yang sinergis Building synergistic cooperation	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggabungkan perbedaan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama - Providing opportunities for various parties to contribute - Open in working together to generate added value - Matching the use of various resources for common goals

Struktur Organisasi

Organization Structure

Struktur Organisasi yang berlaku di akhir tahun 2022 adalah Struktur Organisasi yang merupakan pada Peraturan Direksi No. [illegible] tanggal 21 September 2022. Adapun skema struktur organisasi [illegible] adalah sebagai berikut:

The applicable Organizational Structure at the end of 2022 is based on the Board of Directors Regulation No. [illegible] dated September 21, 2022. The scheme of [illegible] organizational structure is as follows:

Berikut juga adalah struktur organisasi Dewan Komisaris dan Komite PLN NP di akhir tahun 2022.

The following is the organizational structure of PLN NP's Board of Commissioners and Committees at the end of 2022.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Changes in the Composition of the Board of Commissioners

Sampai dengan komposisi Dewan Komisaris terakhir saat ini, terdapat 3 (tiga) perubahan komposisi Dewan Komisaris. Sebagai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 21 September 2022 yang dituangkan melalui Akta Notaris No. 10 tanggal 10 Oktober 2022, dari Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta, tentang pengangkatan Sdr. Evy Haryadi sebagai Komisaris Utama. Dan sesuai dengan keputusan RUPS tanggal 14 Desember 2022, yang dituangkan melalui Akta Notaris No. 1 tanggal 4 Januari 2023, dari Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta, tentang pengangkatan Sdr. Kinarto sebagai Komisaris. Serta sesuai dengan keputusan RUPS tanggal 30 Juni 2023, tentang pengangkatan Sdri. Ida Nuryatin Finahati sebagai Komisaris. Secara singkat, berikut ini disajikan kronologis komposisi Dewan Komisaris sepanjang tahun 2022.

Up to the current composition of the Board of Commissioners, there were 3 (three) changes in the composition of the Board of Commissioners. According to the resolution of the General Meeting of Shareholders (GMS) dated September 21, 2022, outlined by Notarial Deed No. 10 dated October 10, 2022, of Muhammad Hanafi, S.H., Notary in Jakarta, Mr. Evy Haryadi was appointed as President Commissioner. And according to the GMS resolution dated December 14, 2022, outlined by Notarial Deed No. 1 dated January 4, 2023, by Muhammad Hanafi, S.H., Notary in Jakarta, Mr. Kinarto was appointed as Commissioner. And according to the GMS resolution dated June 30, 2023, Ida Nuryatin Finahati was appointed as Commissioner. In brief, the following is a chronology of the composition of the Board of Commissioners throughout 2022.

Tabel Kronologis Perubahan Komposisi Dewan Komisaris Sepanjang Tahun 2022

Table of the Chronology of the Board of Commissioners Composition Changes Throughout 2022

Komposisi Dewan Komisaris Periode 1 Januari 2022 – 21 September 2022 Composition of the Board of Commissioners on January 1, 2022 – September 21, 2022		Komposisi Dewan Komisaris Periode 21 September 2022 – 14 Desember 2022 Composition of the Board of Commissioners on September 21, 2022 – December 14, 2022		Komposisi Dewan Komisaris Periode 14 Desember 2022 – 30 Juni 2023 Composition of the Board of Commissioners on December 14, 2022 – June 30, 2023		Komposisi Dewan Komisaris Periode 30 Juni 2023 – saat ini Composition of the Board of Commissioners on June 30, 2023 – Present	
Jabatan Position	Nama Name	Jabatan Position	Nama Name	Jabatan Position	Nama Name	Jabatan Position	Nama Name
Komisaris Utama President Commissioner	Dhanny Abdiyoh	Komisaris Utama President Commissioner	Evy Haryadi	Komisaris Utama President Commissioner	Evy Haryadi	Komisaris Utama President Commissioner	Evy Haryadi
Komisaris Commissioner	Wawang Purnama	Komisaris Commissioner	Wawang Purnama	Komisaris Commissioner	Wawang	Komisaris Commissioner	Wawang
Komisaris Commissioner	Jaenal P. Hadipaka	Komisaris Commissioner	Jaenal P. Hadipaka	Komisaris Commissioner	Jaenal P. Hadipaka	Komisaris Commissioner	Ida Nuryatin Finahati
Komisaris Commissioner	Hendri Hasibuan	Komisaris Commissioner	Hendri Hasibuan	Komisaris Commissioner	Hendri Hasibuan	Komisaris Commissioner	Hendri Hasibuan
Komisaris Commissioner	Dedi Kusnia Wiralaksa	Komisaris Commissioner	Dedi Kusnia Wiralaksa	Komisaris Commissioner	Dedi Kusnia Wiralaksa	Komisaris Commissioner	Dedi Kusnia Wiralaksa
Komisaris Commissioner	Bagus Pusadan	Komisaris Commissioner	Bagus Pusadan	Komisaris Commissioner	Bagus Pusadan	Komisaris Commissioner	Bagus Pusadan

Sedangkan, semua dengan komposisi Direksi tersebit saat ini, terdapat 1 (satu) kali perubahan komposisi Direksi. Sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 21 September 2021, yang ditetapkan melalui Akta Notaris No. 83 tanggal 14 Oktober 2021 dan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta, terdapat penggantian 3 (tiga) Direksi yaitu Sdr. Rully Firmansyah sebagai Direktur Utama, Sdr. Muhammad Fiqih sebagai Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga serta Sdr. Dwi Hartono sebagai Direktur Keuangan. Secara singkat, berikut ini disajikan kronologis komposisi Direksi sepanjang tahun 2022.

Meanwhile, up to the last current composition of the Board of Directors, there was 1 (one) change in the composition of the Board of Directors. According to the resolution of the General Meeting of Shareholders (GMS) dated September 21, 2021, which was ratified through Notarial Deed No. 83 dated October 14, 2021 by Muhammad Hanafi, S.H., Notary in Jakarta, 3 (three) Directors were appointment, namely Mr. Rully Firmansyah as President Director, Mr. Muhammad Fiqih as Director of Business Development and Commerce and Mr. Dwi Hartono as Director of Finance. In brief, the following is a chronology of the Board of Directors composition throughout 2022.

Tabel Kronologis Perubahan Komposisi Direksi Sepanjang Tahun 2022

Table of the Chronology of the Board of Directors Composition Changes Throughout 2022

Komposisi Direksi Periode 1 Januari 2022 - 21 September 2022 Composition of the Board of Directors on January 1, 2022 - September 21, 2022		Komposisi Direksi Periode 21 September 2022 - saat ini Composition of the Board of Directors on September 21, 2022 - Present	
Jabatan Position	Nama Name	Jabatan Position	Nama Name
Direktur Utama President Director	Darmawan Prasodjo	Direktur Utama President Director	Rully Firmansyah
Direktur Sumber Daya Manusia dan Administrasi Director of Human Resources and Administration	Evi Mulyati	Direktur Manajemen Aset Non Strategis dan Administrasi Director of Non-Strategic Asset Management and Administration	Edi Srihadi Soedjono
Direktur Pengembangan dan Niaga Director of Development and Commerce	Amir Rosyidin	Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga Director of Business Development and Commerce	Muhamad Deny
Direktur Keuangan Director of Finance	R. Edwin Nugraha Putra	Direktur Keuangan Director of Finance	Dwi Hartono
Direktur Operasi 1 Director of Operations 1	M. Wiharto	Direktur Operasi Pembangkitan Jawa Director of Java Power Generation	M. Wiharto
Direktur Operasi 2 Director of Operations 2	Nasrullah Hasibuan	Direktur Operasi Pembangkitan Sumatera Director of Sumatra Power Generation	Nasrullah Hasibuan

Profil Dewan Komisaris
Profile of the Board of Commissioners

Evy Haryadi

Komisaris Utama President Commissioner
(2022—sekarang (2022 – present))

Warga Negara Indonesia, berusia 53 tahun. Lahir di Jakarta, 13 Desember 1969. Berdomisili di Jakarta. Memiliki gelar Sarjana Elektro dari Institut Teknologi Bandung (1992) dan gelar Master of Electrical Engineering dari Waseda University (2000).

Indonesian citizen, 53 years old. Born in Jakarta, December 13, 1969. Domiciled in Jakarta. He holds a Bachelor of Electrical Engineering degree from Bandung Institute of Technology (1992) and a Master of Electrical Engineering degree from Waseda University (2000).

Dasar Hukum Pengangkatan sebagai Dewan Komisaris
Diangkat sebagai Komisaris Utama melalui Keputusan Pemegang Saham secara Sirkuler tanggal 21 September 2022.

Legal Basis for Appointment as the Board of Commissioners
Appointed as President Commissioner through Circular Shareholders Decree dated September 21, 2022.

Riwayat Jabatan
Sejak 8 PLN sejak tahun 1995, Evy memulai karirnya sebagai staf perencanaan pengembangan Sistem Induk pada PT PLN Wilayah XI. Selanjutnya pernah memegang beberapa posisi penting antara lain sebagai Manager Perencanaan dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali (2012 – 2015), General Manager Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan (2017 – 2018), General Manager Unit Induk Pusat Pengatur Beban Jawa, Madura dan Bali (2018 – 2021), Kepala Satuan Pusat Keunggulan PT PLN (Persero) (2021) dan Direktur Perencanaan Korporat PT PLN (Persero) (2021 – 2022).

Position History
For almost 8 PLN since 1995, started his career as a planning staff at the Main Office at PT PLN Region XI. He held several important positions, including General Manager of Java Bali Distribution and Load Control Center (2012 – 2015), General Manager of the Electricity Research and Development Center (2017 – 2018), General Manager of the Main Unit of the Java, Madura and Bali Load Control Center (2018 – 2021), Head of the PT PLN (Persero) Center of Excellence Unit (2021) and Director of Corporate Planning at PT PLN (Persero) (2021 – 2022).

Rangkap Jabatan
Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PT PLN (Persero) (2022 – sekarang).

Concurrent Position
Director of Transmission and System Planning of PT PLN (Persero) (2022 – present).

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Affiliation
Having no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members in the Board of Directors, nor with the Majority and Controlling Shareholders.

Ilsman Parada Hutajulu

Komisaris Commissioner
(2024 – saat ini (to it. present))

Warga Negara Indonesia, berusia 56 tahun. Lahir di Tapanuli, 18 Januari 1967. Berdomisili di Jakarta. Meraih gelar Sarjana Elektro dari Institut Sains dan Teknologi Nasional, Jakarta (1992) dan gelar Pascasarjana bidang Manajemen dari Sekolah Tinggi Manajemen Labora Jakarta (2004). Bekas memiliki sertifikasi CRGP (Certified in Risk Governance Professional).

Indonesian citizen, 56 years old, born in Tapanuli, January 18, 1967. Domiciled in Jakarta. He holds a Bachelor's degree in Electrical Engineering from the National Institute of Science and Technology, Jakarta (1992) and a Postgraduate degree in Management from Labora Management College Jakarta (2004). He has CRGP (Certified in Risk Governance Professional) certification.

Dasar Hukum Pengangkatan sebagai Dewan Komisaris

Diangkat sebagai PAW Komisaris pertama kali berdasar KLHPS secara Dewan tanggal 11 Maret 2020 dan diangkat kembali secara definitif sebagai Komisaris berdasar Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler tanggal 13 November 2020.

Riwayat Jabatan

Memulai karir di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sejak tahun 2000 dan melakukan berbagai posisi penting antara lain sebagai: Kasubdit Standardisasi Ketenagalistrikan (2013), Kasubdit Harga dan Subsidi Listrik (2015), Kasubdit Harga Tenaga Listrik (2018), Kepala Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Biding Ketenagalistrikan (2019 – saat ini), Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan (2020 – 2023).

Rangkap Jabatan

- Kepala Penyidik PPNS Biding Ketenagalistrikan merangkap Kasubdit Harga dan Subsidi Listrik (berdasarkan SEM) (2019 – saat ini).

- Direktur lembaga Ketenagalistrikan (2023 – saat ini).

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan anggota Direksi, namun memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Legal Basis for Appointment as the Board of Commissioners

Appointed as Acting Commissioner for the first time through a Circular (CRS) on March 11, 2020 and was reappointed definitively as Commissioner through Circular Shareholders Decree dated November 13, 2020.

Position History

Started his career in the Ministry of Energy and Mineral Resources since 2000 and held various important positions, including as Head of Sub-Directorate of Electricity Standardization (2013), Head of Sub-Directorate of Electricity Price and Subsidies (2015), Head of Sub-Directorate of Electricity Price (2018), Head of Civil Servant Investigator for Electricity (2019 – present), Director of Electricity Program Development (2020 – 2023).

Concurrent Position

- Chief Investigator of PPNS in the Electricity Sector as well as Head of Sub-Directorate of Electricity Price and Subsidies (Ministry of Energy and Mineral Resources) (2019 – present).
- Director General of Electricity (2023 – present).

Affiliation

Having no affiliation with other members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, but has an affiliation with the Majority and Controlling Shareholders.

Emir Kresna Wardana

Komisaris Independen Independent Commissioner
(2021 – sekarang (2021 – present))

Warga Negara Indonesia, berusia 42 tahun. Lahir di Malang, 27 November 1980. Berdomisili di Jakarta. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Informatika dari Sekolah Tinggi Informatika & Komputer Indonesia (2004) dan gelar Pascasarjana bidang Ilmu Komunikasi dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2010).

Indonesian citizen, 42 years old. Born in Malang, November 27, 1980. Domiciled in Jakarta. Obtained a Bachelor's degree in Informatics Engineering from Sekolah Tinggi Informatika & Komputer Indonesia (2004) and a Postgraduate degree in Communications Science from Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2010).

Dasar Hukum Pengangkatan sebagai Dewan Komisaris
Diangkat sebagai Komisaris melalui Keputusan Pemegang Saham secara Sirkuler tanggal 30 September 2021.

Riwayat Jabatan
Memulai karir di Sony BMG sebagai Talent, Arranger & Composer (2005 – 2008) dan Manager General Affair PT Sinergi Bara Prasetya Energy (2011 – 2012) kemudian membuat jabatan sentingnya ain sebagai Tenaga Ahli Wakil Ketua DPR RI (2012 – 2014), Tenaga Ahli Komisi I DPR RI (2014 – 2019), Staf Khusus Sekretaris Kabinet RI (2020-Sekarang), Komisaris PT Pelni (ero (2019 – 2021).

Penghargaan
Staf Khusus Sekretaris Kabinet Republik Indonesia (2019 – saat ini).

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Legal Basis for Appointment on the Board of Commissioners
Appointed as Commissioner through Circular Shareholders Decree dated December 30, 2021.

Position History
He started his career at Sony BMG as Talent, Arranger & Composer (2005 – 2008) and Deputy Affair Manager of PT Sinergi Bara Prasetya Energy (2011 – 2012) and held important positions including as an Expert to the Deputy Speaker at the House of Representatives (2012 – 2014), Expert for Commission I at the House of Representatives (2014 – 2019), Special Staff of the Cabinet Secretary of the Republic of Indonesia (2020-Present), Commissioner at PT Pelni (ero (2019 – 2021).

Concurrent Position
Special Staff of the Cabinet Secretary of the Republic of Indonesia (2019 – present).

Affiliation
Having no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, nor with the Majority and Controlling Shareholders.

Bagus Puruhito

Komisaris Independen Independent Commissioner
2021 – 2026 (5) – current

Warga Negara Indonesia, 60 tahun. Lahir di Purwokerto, 2 Oktober 1961. Berdomisili di Jakarta. Meraih gelar Sarjana di bidang Manajemen dari Sekolah Tinggi Manajemen IMNI Jakarta (2002) dan Pascasarjana di bidang Manajemen dari Sekolah Tinggi Manajemen IMNI Jakarta (2014).

Indonesian citizen, 60 years old. Born in Purwokerto, October 2, 1961. Domiciled in Jakarta. He holds a Bachelor's degree in Management from IMNI College of Management Jakarta (2002) and a Postgraduate degree in Management from IMNI College of Management Jakarta (2014).

Dasar Hukum Pengangkatan sebagai Dewan Komisaris
Diangkat sebagai Komisaris berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler tanggal 30 Desember 2021

Riwayat Jabatan
Mengawali karir di TNI Angkatan Udara RI sejak tahun 2001 di Lanud Halim Perdanakusuma dan memiliki pengalaman profesional selama lain sebagai Danlanud Halim Perdanakusuma (2020), Komandan Komando Pendidikan Angkatan Udara (2020), Pangkoops Komando Operasi Angkatan Udara I (2019), dan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara (2014), Wakil Sekretaris Lembaga (2013) dan Kepala Badan Nasional Penyarian dan Pertolongan (Basarnas) (2019 - 2021).

Dasar Hukum Pengangkatan
Legal Basis for Appointment as the Board of Commissioners
Appointed as Commissioner through Circular Shareholders Decision dated December 30, 2021

Riwayat Jabatan
Position History
He started his career in the Indonesian Air Force in 2001 at Halim [illegible] Air Base and has professional experiences, including as Commander Halim Perdanakusuma (2020), Commander of the Air Force Education Command (2020), Commander of Air Force Operations Command I (2019) and Deputy Chief of Staff of the Air Force TNI (2014), Deputy Secretary of Commander (2013) and Head of the National Search and Rescue Agency (Basarnas) (2019 - 2021).

Rangkap Jabatan
Tidak memiliki rangkap jabatan baik di PLNNP maupun di perusahaan lain

Concurrent Position
Having no concurrent positions in PLNNP or in other companies.

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Affiliation
Having no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, nor with the Majority and Controlling Shareholders.

Kenedy

Komisaris Independen/Independent Commissioner
(2020—sekarang/2020—present)

Warga Negara Indonesia, berusia 58 tahun. Lahir di Cirebon, 12 November 1964. Berdomisili di Jakarta. Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Tarumanagara (2003) dan gelar Master of Management dari Universitas Winaya Mukti (2004).

Indonesian citizen, 58 years old. Born in Cirebon, November 12, 1964. Domiciled in Jakarta. He holds a Bachelor of Law degree from Tarumanagara University (2003) and a Master of Management degree from Winaya Mukti University (2004).

Dasar Hukum Pengangkatan sebagai Dewan Komisaris

Diangkat sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen oleh Pemegang Saham secara Sirkuler tanggal 14 Desember 2020.

Legal Basis for Appointment as the Board of Commissioners

Appointed as Commissioner/Independent Commissioner by Circular Shareholders Decree dated December 14, 2020.

Riwayat Jabatan

Memulai karir di Kepolisian Republik Indonesia dengan pangkat terakhir Inspektur Polisi Dua (Ipda) (1989), berbagai jabatan di Kepolisian pernah ditduduknya di antaranya menduduki posisi sebagai Kasat Serse Polresta Pekanbaru (1994), Wakapolres Purbalingga (2001), Kasatwil Dalu Bandung (2002), Wakapolres Rokanbang (2007), Direktur Polair Polda Bali (2010), KA SPKP Sulawesi Barat (2013). KA SPKP Riau (2015), dan Direktur Intelpam Deputi Pengawasan dan Jaga Diri (2017). Selain itu, beliau juga pernah menduduki jabatan-jabatan lain negeri diantaranya, Counter Intelligence Police - Counter Terrorist Expertise dan Bilateral Cooperation Conference di Cuba, Argentina, Panama dan Ecuador.

Position History

He started his career in the Indonesian National Police with the last rank as Inspector Second Police (1989), Deputy of Investigation at the National Narcotics Agency. He held various positions in the Police, including positions as Head of Detective Unit at Pekanbaru City Police (1994), Deputy Chief at Purbalingga City Police (2001), Chief at Dalu Bandung City Police (2002), Deputy Chief at Rokanbang City Police (2007), Director of Criminal Investigation at Bali City Police (2010), Head of the West Sulawesi National Narcotics Agency (2013), Head of the Riau National Narcotics Agency (2015), and Director of Intelligence at the Deputy for Institution of the National Narcotics Agency (2017). Furthermore, he also received overseas assignments, including London Metropolitan Police - Counter Terrorist Expertise and Bilateral Cooperation Conference in Cuba, Argentina, Panama and Ecuador.

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan, kecuali di PLN NP maupun di perusahaan lain.

Concurrent Position

Having no concurrent positions, either in PLN NP or in other companies.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Affiliation

Having no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, nor with the Majority and Controlling Shareholders.

Hendra Iswahyudi

Komisaris Commissioner
(2021 – saat ini) (2021 – present)

Warga Negara Indonesia, berusia 54 tahun. Lahir di Banyuwangi, 30 November 1968. Berdomisili di Jakarta. Meraih gelar Sarjana Teknik Fisika dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (2002), Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia (2003) dan Doktor Ilmu Ekonomi dari Universitas Indonesia (2012), Bersertifikat sebagai CRGP (Certified in Risk Governance Professional).

Indonesian citizen, 54 years old. Born in Banyuwangi, November 30, 1968. Domiciled in Jakarta. He holds a Bachelor's degree in Engineering Physics from the Sepuluh Nopember Institute of Technology (2002), a Master's degree in Planning and Public Policy from the University of Indonesia (2003), and a Doctor of Economics from the University of Indonesia (2012). He has CRGP (Certified in Risk Governance Professional) certification.

Dasar Hukum Pengangkatan sebagai Dewan Komisaris

Diangkat sebagai Plt. Komisaris pertama kali melalui Rapat Umum Pemegang Saham secara Sirkuler tanggal 19 Desember 2017 dan diangkat kembali secara definitif sebagai Komisaris melalui Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler tanggal 13 November 2020.

Riwayat Jabatan

Memulai karir di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan sejak tahun 1998 dan pernah memduduki jabatan penting antara lain sebagai Kepala Bagian Keuangan dan Laporan (2011 - 2013), Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (2018 – 2019), Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan (2017 – 2019), dan Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Energi baru, Terbarukan dan konservasi Energi (2019 - saat ini).

Penghargaan

- Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Energi baru Terbarukan dan Konservasi Energi (2021 - saat ini).
- Kepala Biro/Sekretaris Direktorat Jenderal (2013 - saat ini).

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan anggota Direksi, namun memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Legal Basis for Appointment as the Board of Commissioners

Appointed as Acting Commissioner for the first time through a Circular General Meeting of Shareholders dated December 19, 2017 and was reappointed definitively as Commissioner through Circular Shareholders Decree dated November 13, 2020.

Position History

He started his career at the Directorate General of Electricity, Directorate of Electricity Business Development since 1998 and has important positions, including as Head of Part and Report Centre (2011 - 2013), Director of Planning and Infrastructure Development for New, Renewable Energy and Energy Conservation (2018 – 2019), Director of Electricity Business Development (2017 – 2019), and Director of Planning and Infrastructure Development for New, Renewable Energy and Energy Conservation (2019 - present).

Concurrent Position

- Director of Infrastructure Planning and Development for Renewable Energy and Energy Conservation (2019 – present).
- Chairman of Nominative and Remuneration Committee (2020 - present).

Affiliation

Having no affiliation with other members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, but has an affiliation with the Majority and Controlling Shareholders.

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkular tanggal 10 Juni 2022 terjadi pergantian seorang anggota Dewan Komisaris menggantikan jajaran sebelumnya dengan profil sebagai berikut:

Based on the Circular Shareholders Decree dated June 10, 2022, there was an appointment of a member of the Board of Commissioners replacing the previous officer with the following profile:

Ida Nuryatin Finahari

Komisaris Commissioner
(2022 – sekarang, 2022 – present)

Warga Negara Indonesia, berusia 55 tahun. Lahir di Kediri, 8 Januari 1968. Berdomisili di Jakarta. Meraih gelar Sarjana Teknik Kimia dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (1990) dan gelar Master of Engineering di bidang Applied Chemistry dari Tokyo University of Agriculture and Technology (1993).

Indonesian citizen, 55 years old. Born in Kediri, January 8, 1968. Domiciled in Jakarta. She holds a Bachelor of Chemical Engineering degree from Sepuluh Nopember Institute of Technology, Surabaya (1990) and a Master of Engineering degree in Applied Chemistry from Tokyo University of Agriculture and Technology (1993).

Dasar Hukum Penunjukan sebagai Dewan Komisaris
Diangkat sebagai Komisaris melalui Keputusan Pemegang Saham secara Sirkular tanggal 10 Juni 2022.

Riwayat Jabatan
Menjabat sebagai Ahli Kebijakan Energi dan Sumber Daya Mineral (2020) dan melaksanakan tugas joint secretary antara lain sebagai Asisten Sekretariat Penyusun Arsitek Energi Baru dan Energi Terbarukan (2020 – 2021), Direktur Konservasi Energi (2017 – 2018), Direktur Pelaksana (2018 – 2021), dan Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan (2021 – 2022).

Rangkap Jabatan
Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (2022 – saat ini)

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan anggota Direksi, namun memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Legal Basis for Appointment as the Board of Commissioners
Appointed as Commissioner through Circular Shareholders Decree dated June 10, 2022.

Position History
She worked her career at the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) and held various important positions, including as Head of Task Secretariat for Preparation of Various New Energy and Renewable Energy (2019 – 2021), Director of Energy Conservation (2017 – 2018), Director of Implementation (2018 – 2021), and Director of Electricity Business Development (2021 – 2022).

Concurrent Position
Secretary of the Directorate General of Electricity (2022 – present)

Affiliation
Having no affiliation with other members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, but has an affiliation with the Majority and Controlling Shareholders.

Profil Direksi
Profile of the Board of Directors

Rully Firmansyah

Direktur Utama Presiden Direktur
(2021—saat ini | 2021—Present)

Warga Negara Indonesia, berusia 58 tahun, Lahir di Jakarta, 13 Maret 1964. Berdomisili di Jakarta. Meraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari Universitas Indonesia (1990) dan Master of Business Management dari dari Institut Teknologi Bandung (2002).

Indonesian citizen, 58 years old, Born in Jakarta, March 13, 1964. Domiciled in Jakarta. He holds a Bachelor of Electrical Engineering from the University of Indonesia (1990) and a Master of Business Management from Bandung Institute of Technology (2002).

Dasar Hukum Pengangkatan sebagai Direksi
Diangkat sebagai Direktur Utama melalui RUPS secara Sirkuler tanggal 21 September 2021.

Legal Basis for Appointment as the Board of Directors
Appointed as President Director through Circular Shareholders Decree dated September 21, 2021.

Riwayat Jabatan
Bekerja di PLN sejak tahun 1995, dahulu memulai karir nya pada bidang pemeliharaan Unit PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa Bali 3. Sebelum menduduki jabatan Direktur Utama PT PLN Nusantara Power, beliau pernah memegang beberapa posisi penting antara lain General Manager Unit Pembangkitan Muara Tawar (2019 - 2021), Kepala Satuan Pengadaan PT PJB (2011), General Manager PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan (2012 - 2015), Executive Vice President Pengembangan Regional Kalimantan PT PLN (Persero) (2016 - 2019), dan terakhir menjabat sebagai Direktur Utama pada PT Bahana Adhigguna (2019 - 2021).

Riwayat Jabatan
Bekerja di PLN since 1995, started his career in the electricity maintenance field of PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa Bali 3. Prior to serving as President Director of PT PLN Nusantara Power, he held several important positions including General Manager of Muara Tawar Generator Unit (2019 - 2021), Head of Procurement Unit of PT PJB (2011), General Manager of PT PLN (Persero) South Sumatera Generation (2012 - 2015), Executive Vice President of Kalimantan Regional Development of PT PLN (Persero) (2016 - 2019), and most recently, served as President Director of PT Bahana Adhigguna (2019 - 2021).

Kepemilikan Saham
Tidak memiliki kepemilikan saham baik di PLNTSP maupun di perusahaan lain.

Concurrent Position
Having no concurrent positions either in PLNTSP or in other companies.

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Affiliation
Having no affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, nor with the Majority and Controlling Shareholders.

Karyawan Aji

Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi
Director of Human Capital Management and Administration
(2020—sekarang (2021—Present))

Warga Negara Indonesia, berusia 58 tahun, Lahir di Yogyakarta, 2 Mei 1967. Berkewilid di Surabaya. Meraih gelar Sarjana Teknik Nuklir dari Universitas Gadjah Mada (1992) dan Master di bidang Kebijakan dari Curtin University of Technology Perth (2000). Beliau memiliki sertifikasi *Certified Risk Governance Professional (CRGP)* dan Insinyur Profesional Utama.

Indonesian citizen, 58 years old, Born in Yogyakarta, May 2, 1967. Domiciled in Surabaya. He holds a Bachelor's degree in Nuclear Engineering from Gadjah Mada University (1992) and a Master's degree in Technical Engineering from Curtin University of Technology, Perth (2000). He holds Certified Risk Governance Professional (CRGP) and Madya Professional Engineer certifications.

Dasar Hukum Pengangkatan sebagai Direksi
Diangkat sebagai Direksi/Dirtur dan Administrasi melalui RUPS secara Sirkuler tanggal 12 November 2020 dan diangkat sebagai Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi melalui RUPS secara Sirkuler tanggal 15 September 2021.

Legal Basis for Appointment as the Board of Directors
Appointed as Director of Human Capital and Administration by RUPS Circular dated November 12, 2020 and appointed as Director of Human Capital Management and Administration through Circular Shareholders Decree dated September 15, 2021.

Riwayat Jabatan
Memulai karir di PT PLN (Persero) sejak tahun 1995 dan pernah menduduki jabatan strategis di antaranya Executive Vice President Talent Development PT PLN (Persero) (2018 – 2020), Kepala Divisi Pengembangan Teknik PT PLN (Persero) (2016), Kepala Divisi Pengembangan Organisasi PT PLN (Persero) (2017 – 2018), General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat (2018 – 2019), dan Manajer Engineering PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B.

Position History
He started his career at PT PLN (Persero) in 1995 and held strategic positions including Executive Vice President of Talent Development of PT PLN (Persero) (2018 – 2020), Head of Talent Development Division of PT PLN (Persero) (2016), Head of Organization Development Division of PT PLN (Persero) (2017 – 2018), General Manager of West Nusa Tenggara Region PT PLN (Persero) (2018 – 2019), and Engineering Manager of PT PLN (Persero), Tanjung Jati B Power Plant.

Rangkap Jabatan
Tidak memiliki rangkap jabatan lain di PLN NP maupun di perusahaan lain.

Concurrent Positions
Having no concurrent positions either in PLN NP or in other companies.

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Affiliation
Having no affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, nor with the Majority and Controlling Shareholders.

Muhamad Reza

Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga

Warga Negara Indonesia, berusia 48 tahun. Lahir di Bandung, 4 November 1974. Berdomisili di Jakarta. Memperoleh gelar Sarjana Electrical Engineering dari Institut Teknologi Bandung (1997), Magister of Electrical Engineering, dari Delft University of Technology di Netherlands (2000) dan Doctor of Philosophy Electrical Power Systems dari Delft University of Technology di Netherlands (2005). Saluu memiliki sertifikasi Certified Risk Governance Professional (CRGP).

Indonesian citizen, 48 years old, born in Bandung, November 4, 1974. Domiciled in Jakarta. He obtained his Bachelor of Electrical Engineering from Bandung Institute of Technology (1997), Master of Electrical Engineering from Delft University of Technology in the Netherlands (2000) and Doctor of Philosophy Electrical Power Systems from Delft University of Technology in the Netherlands (2005). He holds the Certified Risk Governance Professional (CRGP) certification.

Dasar Hukum Pengangkatan sebagai Direksi

Diangkat sebagai Direktur berdasar RUPS secara Sirkuler tanggal 15 September 2020

Riwayat Jabatan

Pernah menjabat sebagai Direktur Engineering & PT PLN Enjiniring pada (2021 - 2023), Technical Expert, Business Development & Business Line Manager Power System, Advisory & Advanced Analytics di PT Transelec Engineering Indonesia (2018 - 2021) dan sebagai Business Development Manager, Power System Specialist & Country Representative di Suzuna International (2010 - 2018).

Rangkap Jabatan

Tidak menduduki rangkap jabatan, baik di PLNSBF maupun di perusahaan lain.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Legal Basis for Appointment as the Board of Directors

Appointed as Director through Circular Shareholders Decree dated September 15, 2020

Position History

He served as Director of Engineering at PT PLN Enjiniring in (2021 - 2023), Technical Expert, Business Development & Business Line Manager Power System, Advisory & Advanced Analytics at PT Transelec Engineering Indonesia (2018 - 2021) and as Business Development Manager, Power System Specialist & Country Representative at Suzuna International (2010 - 2018).

Concurrent Position

Having no concurrent positions, either in PLNSBF or in other companies.

Affiliation

Having no affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, nor with the Majority and Controlling Shareholders.

Dwi Hartono

Direktur Keuangan *Director of Finance*
2022 – sekarang *2022 – present*

Warga Negara Indonesia, berusia 47 tahun. Lahir di Wonogiri, 13 November 1975. Berdomisili di Jakarta. Memperoleh gelar Sarjana Sarjana Muda dari Universitas Gadjah Mada (1998) dan Master di Bidang Kelistrikan di Delft University of Technology, Netherlands (2011). Belasa memiliki sertifikasi Qualified Risk Governance Professional (QRGP).

Indonesian citizen, 47 years old. Born in Wonogiri, November 13, 1975. Domiciled in Jakarta. Obtained a Bachelor's degree in Mechanical Engineering from Gadjah Mada University (1998) and a Master's degree in Electrical Engineering from Delft University of Technology, Netherlands (2011). He holds a Qualified Risk Governance Professional (QRGP) certification.

Dasar Hukum Pengangkatan sebagai Direksi

Ditetapkan sebagai Direktur melalui RUPS secara Sirkuler tanggal 22 September 2022.

Legal Basis for Appointment as the Board of Directors

Appointed as Director through Circular Shareholders Decree dated September 22, 2022.

Riwayat Jabatan

Memulai karir sebagai Teknisi Listrik Mesin di PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (2000). Selasa berhasil menjabat sebagai Unit Manajemen Keuangan Aset PT PLN (Persero) (2020 – 2022), Direktur Operasi PT PIK Investasi pada tahun (2017 – 2021) dan Deputi Manajer Perencanaan SPI PT PLN (Persero) (2015 – 2017).

Position History

He started his career as a Mini Engine Technician at PT PLN (Persero) South Kalimantan and Central Kalimantan Region (2000). He has served as Unit of Asset Financial Management of PT PLN (Persero) (2020 – 2022), Director of Operations at PT PIK Investasi (2017 – 2021) and Deputy Manager of SPI Planning at PT PLN (Persero) (2015 – 2017).

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan, baik di PLN NP maupun di perusahaan lain.

Concurrent Position

Having no concurrent positions, either in PLN NP or in other companies.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Affiliation

Having no affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, nor with the Majority and Controlling Shareholders.

M. Yossy Noval A.

Direktur Operasi Pembangkit Jasa

Director of Gas Power Plant Operations

2022 - sekarang (2022 - present)

Warga Negara Indonesia, berusia 54 tahun. Lahir di Jakarta, 18 November 1968. Berdomisili di Surabaya. Menyelesaikan gelar Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Indonesia (1993) dan Master Bidang Teknik Mesin dari Institut Teknologi Bandung (2002). Beliau memiliki sertifikasi Certified Risk Governance Professional (CRGP).

Indonesian citizen, 54 years old, Born in Jakarta, November 18, 1968. Domiciled in Surabaya. Obtained a Bachelor of Mechanical Engineering from the University of Indonesia (1993) and a Master of Mechanical Engineering from Bandung Institute of Technology (2002). He holds a Certified Risk Governance Professional (CRGP) certification.

Dasar Hukum Pengangkatan sebagai Direksi

Diangkat sebagai Direktur Operasi I berdasar RUPS secara tertulis tanggal 21 April 2022 dan ditetapkan sebagai Direktur Operasi Pembangkit Jasa berdasar RUPS secara tertulis tanggal 21 September 2022.

Riwayat Jabatan

Mengawali karir di PLN NP sejak tahun 2007 sebagai Ahli Muda di Khanza UP Muara Karang, Pernah memduduki posisi penting antara lain Eksekutif Utama PT PJB Services (2020), General Manager UP Muara Karang (2019 - 2021), Kepala Satuan Kendala & Transformasi Korporat (2017 - 2019), Kepala Satuan Kinerja Korporat & Pengembangan Sistem Manajemen (2016 - 2017), Kepala Satuan Manajemen Risiko & Kepatuhan (2014 - 2016), Manager Teknologi Informasi (2008 - 2009), dan Kepala Inspeksi Operasi (2009 - 2008).

Penghasilan Sebelum

Tidak memiliki rangkap jabatan, baik di PLN NP maupun di perusahaan lain.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan Pemegang Saham utama dan Pengendali.

Legal Basis for Appointment as the Board of Directors

Appointed as Director of Operations I through Circular Shareholders Decree dated April 21, 2022 and appointed as Director of Gas Power Plant Operations through Circular Shareholders Decree dated September 21, 2022.

Position History

Started his career at PLN NP since 2007 as a Junior Expert I Performance Proact Khanza Ex. He held important positions, including President Director of PT PJB Services (2020), General Manager of Muara Karang Ex (2019 - 2021), Head of Corporate Plan & Transformation unit (2017 - 2019), Head of Corporate Performance & Management System Development unit (2016 - 2017), Head of Risk Management & Compliance unit (2014 - 2016), Information Technology Manager (2008 - 2009), and Deputy Operations Manager (2009 - 2008).

Concurrent Position

Having no concurrent positions, either in PLN NP or in other companies.

Affiliation

Having no affiliation with other members of the Board of Director, members of the Board of Commissioners, nor with the Majority and Controlling Shareholders.

Radhmanoe Indarto

Warga Negara Indonesia, berusia 53 tahun. Lahir di Tenggarong, 11 November 1969. Berdomisili di Surabaya. Meraih gelar Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Brawijaya (1993) dan Master di Bidang Manajemen dari ITB Bandung (2003). Belasan memiliki sertifikasi Certified Risk Governance Professional (CRGP).

Indonesian citizen, 53 years old, domicile in Tenggarong, November 11, 1969. Graduated in Surabaya. He holds a Bachelor's degree in Mechanical Engineering from Brawijaya University (1993) and a Master's degree in Management from Bandung Institute of Technology (2003). He holds a Certified Risk Governance Professional (CRGP) certification.

Dasar Hukum Pengangkatan sebagai Direksi

Diangkat sebagai Direktur Operasi II melalui RUPS secara Sirkuler tanggal 13 November 2020 dan ditetapkan sebagai Direktur Operasi Pembangkitan Jawalinra melalui RUPS secara Sirkuler tanggal 21 September 2021.

Riwayat Jabatan

Memulai karir di PLN NP sejak tahun 1997 dan ditugaskan sebagai Ahli II Akuntansi Operasi PLTU/PLTGU, Kemudi, melakukan beberapa penting antara lain sebagai General Manager UP Suralaya (2019 - 2020), General Manager Unit Pembangkitan Lrenik (2015 - 2016), General Manager Unit Pembangkitan Paiton (2015 - 2015), General Manager PLTU Paiton (2011 - 2013), Manajer Perencanaan Sistem (2010 - 2011), dan Spesialis Pemeliharaan PLTU & PLTG (2002 - 2005).

Pengalaman Jabatan

Tidak memiliki pengalaman jabatan lain di PLN NP maupun di perusahaan lain.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Legal Basis for Appointment as the Board of Directors

Appointed as Director of Operations II through Circular Shareholders Decree dated November 13, 2020 and appointed as Director of Coal Plant Operations through Circular Shareholders Decree dated September 21, 2021.

Position History

He started his career at PLN NP in 1997 and was assigned as Ahli II Operations Reliability at PLTU/PLTGU. He held important positions, including General Manager of Saulo Suralaya Generating Unit (2019 - 2020), General Manager of Lrenik Generating Unit (2015 - 2016), General Manager of Paiton Generating Unit (2015 - 2015), General Manager of Paiton CFPP (2011 - 2013), Corporate Planning Manager (2010 - 2011), and Chief of CFPP Maintenance Specialist (2002 - 2005).

Concurrent Position

Having no concurrent positions, either in PLN NP or in other companies.

Affiliation

Having no affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, nor with the Majority and Controlling Shareholders.

Jumlah dan Komposisi SDM
Number and Composition of HR

Kecukupan kuantitas SDM menjadi salah satu faktor pendukung dari efektivitas proses kerja dan operasional Perusahaan serta dapat memberikan produktivitas yang maksimal.

Adequate HR quantity is one of the supporting factors of the effectiveness of the Company's work processes and operations. It also can provide maximum productivity.

Per 31 Desember 2021, jumlah karyawan PLN NP adalah sebanyak 3.034 karyawan, yaitu lebih rendah dibandingkan tahun 2021 sebanyak 3.071 karyawan. Hal ini disebabkan oleh adanya karyawan yang pensiun, meninggal dunia serta tidak adanya penerimaan rekrutmen oleh PLN (zero recruitment) pada saat itu.

As of December 31, 2021, the number of PLN NP's employees was 3,034, which was lower than in 2021 at 3,071 employees. This was mainly due to employees who retired, hangs dun passed away, and the absence of recruitment by PLN (zero recruitment) at that time.

Jumlah Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin
Number of Employees by Gender

Tabel Jumlah Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020-2022 (orang)
Table of Number of Employees by Gender in 2020-2022 (person)

Jenis Kelamin Gender	2020	2021	2022	Perubahan Changes in 2021-2022
Laki-laki/ Male	3.717	3.087	3.045	-37
Perempuan/ Female	346	984	339	-13
Jumlah/ Total	**3.123**	**3.071**	**3.034**	**-37**

Jumlah Karyawan Berdasarkan Jenjang Jabatan
Number of Employees by Position Level

Tabel Jumlah Karyawan Berdasarkan Jenjang Jabatan Tahun 2020-2022 (orang)
Table of Number of Employees by Position Level in 2020-2022 (person)

Jenjang Jabatan Position Level	2020	2021	2022	Perubahan Changes in 2021-2022
P1	10	17	22	5
P2	70	77	77	10
L1	75	80	108	30
L2	480	494	505	11
L3	1.297	1.402	1.384	-18
L4	930	501	378	-73

Jenjang Jabatan Position Level	2020	2021	2022	Pertumbuhan Changes in 2021-2022
Manajemen Atas	3	3	3	0
Manajemen Menengah	56	54	50	-4
Manajemen Dasar	140	138	141	3
Supervisi Atas	410	417	376	-41
Supervisi Dasar	83	83	87	4
Jumlah Total	**3.122**	**3.071**	**3.034**	**-37**

Jumlah Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Number of Employees by Education Level

Tabel Jumlah Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020-2022 (orang)
Table of Number of Employees by Education Level in 2020-2022 (persons)

Tingkat Pendidikan Education Level	2020	2021	2022	Pertumbuhan Changes in 2021-2022
Strata 3	1	1	1	0
Strata 2	225	265	261	-4
Strata 1	1.737	1.705	1.688	-8
Sarjana Muda	562	570	570	0
Diploma	29	28	27	-1
SMA	536	498	480	-18
SMP	1	-	-	-
Jumlah Total	**3.121**	**3.071**	**3.034**	**-37**

Jumlah Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian
Number of Employees by Employment Status

Tabel Jumlah Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2020-2022 (orang)
Table of Number of Employees by Employment Status in 2020-2022 (persons)

Status Kepegawaian Employment Status	2020	2021	2022	Pertumbuhan Changes in 2021-2022
Karyawan Tetap	3.121	3.071	3.034	-37
On the Job Training	-	-	-	-
Jumlah Total	**3.121**	**3.071**	**3.034**	**-37**

Jumlah Karyawan Berdasarkan Rentang Usia

Number of Employees by Age Range

Tabel Jumlah Karyawan Berdasarkan Rentang Usia Tahun 2020-2022 (orang)

Table of Number of Employees by Age Range in 2020-2022 (person)

Rentang Usia Age Range	2020	2021	2022	Perubahan/Changes in 2021-2022
<35 tahun/years old	306	138	93	-45
35 – 39 tahun/years old	1.033	881	706	-175
40 – 44 tahun/years old	575	771	932	161
45 – 49 tahun/years old	446	412	445	33
50 – 54 tahun/years old	127	272	326	54
55 – 59 tahun/years old	401	340	305	-35
60 – 64 tahun/years old	265	256	302	61
Jumlah Total	**3.123**	**3.071**	**3.034**	**-37**

Jumlah Karyawan Berdasarkan Wilayah Kerja

Number of Employees by Work Area

Tabel Jumlah Karyawan Berdasarkan Wilayah Kerja Tahun 2020-2022 (orang)

Table of Number of Employees by Work Area in 2020-2022 (person)

Wilayah Kerja Work Area	2020			2021			2022			Perubahan/Changes in 2021-2022
	L/M	P/F	Jumlah/Total	L/M	P/F	Jumlah/Total	L/M	P/F	Jumlah/Total	
Kantor Pusat/Head Office	335	168	503	437	168	575	423	176	597	22
UP Cilacap/Cilacap UP	368	72	440	362	72	434	356	72	428	-6
UP Muara Karang/Muara Karang UP	398	69	467	442	69	511	380	61	441	-6
UP Pelabuhan Ratu/Pelabuhan Ratu UP	242	59	301	233	58	291	242	58	300	-11
UP Lontar/Lontar UP	130	33	163	133	33	166	146	17	163	-3
UP Bantan/Bantan UP	147	6	153	147	6	153	138	8	146	-7
UP Muara Tawar/Muara Tawar UP	368	72	440	356	72	428	356	59	415	-13
Unit Pemeliharaan Wilayah Timur/Eastern Area Maintenance Service Unit	330	71	401	334	71	405	-	-	-	-405
Unit Pemeliharaan Wilayah Barat/Western Area Maintenance Service Unit	170	33	203	173	30	203	-	-	-	-197
Biaya Pengelola Waste Coal/Chain Reservoir Management Expense	36	7	43	-	-	-	-	-	-	-
Unit HSE/HSE Unit	-	-	-	-	-	-	443	41	484	484
UBDM Indramayu/Indramayu UBDM	33	-	33	35	-	35	39	-	39	4
UBDM Rembang/Rembang UBDM	33	2	35	34	1	35	-	-	-	-35

Wilayah Kerja Work Area	2020			2021			2022			Pertumbuhan (Tenaga Ahli 2021-2022)
	L M	P F	Jumlah Total	L M	P F	Jumlah Total	L M	P F	Jumlah Total	
UBDDM Bandung Bandung (DHDD)	33	2	35	33	2	34	33	2	35	1
UBDDM Medan Medan (DHDD)	34	1	35	34	1	35	34	1	35	-
UBDDM Tanjung Awar-Awar Tanjung Awar-Awar (DHDD)	35	1	36	34	1	35	34	1	35	-
UBDDM Luar Jawa (****) Luar Jawa (DHDD)(****)	32	11	43	15	9	24	-	-	-	-24
UBDDM Makhir Timur Makhir Timur (DHDD)	31	-	31	33	-	33	33	-	33	1
UBDDM Tanjung Tanjung (DHDD)	32	1	33	32	1	33	30	1	31	-2
UBDDM Duyung (Grey Duyung Grey (DHDD)	32	-	32	33	-	33	33	-	33	-2
UBDDM Bukit Asam (DHDD)	4	-	4	5	-	5	5	-	5	-
UIP2 Pengembangan (****) Electricity Development (UIP (****)	28	11	39	37	10	57	-	-	-	-37
UIP2 Pelaksana Proyek 1 (UPP-1) Project Implementation Unit 1 (UPP-1)	-	-	-	-	-	-	17	1	18	18
UIP2 Pelaksana Proyek 2 (UPP-2) Project Implementation Unit 2 (UPP-2)	-	-	-	-	-	-	33	-	33	33
PSE Academy	32	14	46	33	13	46	34	14	48	-
UBDDM Sambalia Sambalia (DHDD)	-	-	-	3	-	3	5	-	5	2
Tugas Kerja ke PLN Work Assignment to PLN	20	1	21	17	10	47	30	12	47	-
Tugas Kerja ke PEDI Work Assignment to PEDI	38	5	43	33	4	37	28	4	33	-4
Tugas Kerja ke AFI PA Lain Work Assignment to other AFIPA	334	33	330	334	34	333	30	10	330	-3
Jumlah Total	2.737	400	3.133	3.667	454	3.071	3.641	384	3.024	-37

Catatan:
- ABADI: Akuh Bimbingan Anak Idaman (ABADI)
- Ibuh Bimbingan Anak Idaman (IBADI) untuk pengelompokan UBP Bandung
- Ibuh Bimbingan Anak Idaman (IBADI) untuk pengelompokan UBP Luar Jawa
- UBDDM Luar Jawa: Unit Bimbingan Luar Jawa (IBADI)
- Unit Pengembangan Unit Bimbingan Luar Jawa (IBADI)

Note:
- ABADI: Unit Bimbingan Anak Idaman (IBADI)
- Unit Bimbingan Anak Idaman (IBADI) untuk pengelompokan UBP Bandung
- Unit Bimbingan Anak Idaman (IBADI) untuk pengelompokan UBP Luar Jawa
- Unit Bimbingan Luar Jawa: Unit Bimbingan Luar Jawa (IBADI)
- Unit Pengembangan Unit Bimbingan Luar Jawa (IBADI)

Pengembangan Kompetensi SDM

HR Competency Development

Kompetensi dan kelarnpilan SDM menjadi enabler utama dari pengelolaan SDM yang efektif dan efisien guna memperoleh produktivitas yang maksimal. PLN NP memberikan perhatian khusus pada pengembangan kompetensi karyawan sehingga mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman dan industri, serta memiliki daya saing yang unggul.

HR competencies and skills are the main enablers of effective and efficient HR management to obtain maximum productivity. PLN NP pays special attention to the development of employee competence so that they are able to adapt to the times and industry, and have superior competitiveness.

Pengembangan Kompetensi untuk Dewan Komisaris, Direksi, Komite, Sekretaris Perusahaan, Kepala SPI dan Kepala Satuan Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Competency Development for Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, Head of IAU and Head of Risk Management and Compliance Unit

PLN NP berkomitmen memfasilitasi setiap organ Perusahaan melalui program pengembangan sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas masing-masing. Adapun informasi mengenai pelatihan dan pelatihan bagi Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, Kepala SPI dan Kepala Satuan Manajemen Risiko dan Kepatuhan sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut:

PLN NP is committed to facilitating each organ of the Company to obtain development programs in accordance with the needs in carrying out their respective duties. Information on education and training for the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, Head of IAU and Head of Risk Management and Compliance Unit throughout 2022 is as follows:

Program Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris
All members of the Board of Commissioners serving in 2022

Nama Name	Jabatan dan Masa Jabatan Position and Term of Office	Pelatihan/Sertifikasi/Workshop/Seminar Training/Certification/Workshop/Seminar	Waktu Pelaksanaan Time of Implementation	Penyelenggara dan Lokasi Organizer and Location
Gatot Trihargo	Komisaris Utama 11 Januari 2022 - 21 September 2023 President Commissioner January 11, 2022 - September 21, 2023	ISO Integrity Level 19: Seminar Mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO Integrity Level 19: Seminar on Anti-Bribery Management Systems	13 Juli 2022 July 13, 2022	PINI Academy - Virtual
Kuntoro Mangkusubroto	Komisaris 11 Januari 2022 - 10 Desember 2022 Commissioner January 11, 2022 - December 10, 2022	Workshop ESG ESG Workshop	23 Agustus 2022 August 23, 2022	PLN Nusantara Power - Surabaya

Nama Name	Jabatan dan Masa Jabatan Position and Term of Office	Pelatihan/Seminar/ Workshop/Konferensi Training/Seminar/ Workshop/Konferensi	Waktu Pelaksanaan Time of Implementation	Penyelenggara dan Lokasi Organizer and Location
Anton P. Prabowo	Komisaris (1 Januari 2022 - 31 Desember 2022) Commissioner (January 1, 2022 - December 31, 2022)	Seminar FIB Connect (FIU) NF Jump Beyond Connection Seminar on FIB Connect (FIU) NF Jump Beyond Connection	3 – 5 Oktober 2022 October 3 – 5, 2022	FIU/NF – Jakarta Kopo Sunkaya
Harold Christopher	Komisaris (1 Januari 2022 - 31 Desember 2022) Commissioner (January 1, 2022 – December 31, 2022)	Seminar FIB Connect (FIU) NF Jump Beyond Connection Seminar on FIB Connect (FIU) NF Jump Beyond Connection	3 – 5 Oktober 2022 October 3 – 5, 2022	FIU/NF – Jakarta Kopo Sunkaya
Erwi Rivano Pandarie	Komisaris (1 Januari 2022 - 31 Desember 2022) Commissioner (January 1, 2022 – December 31, 2022)	Seminar FIB Connect (FIU) NF Jump Beyond Connection Seminar on FIB Connect (FIU) NF Jump Beyond Connection	3 – 5 Oktober 2022 October 3 – 5, 2022	FIU/NF – Jakarta Kopo Sunkaya
Bagus Purwono	Komisaris (1 Januari 2022 - 31 Desember 2022) Commissioner (January 1, 2022 – December 31, 2022)	Seminar FIB Connect (FIU) NF Jump Beyond Connection Seminar on FIB Connect (FIU) NF Jump Beyond Connection	3 – 5 Oktober 2022 October 3 – 5, 2022	FIU/NF – Jakarta Kopo Sunkaya

Program Pengembangan Kompetensi Direksi

Competency Development Program of the Board of Directors

Nama Name	Jabatan dan Masa Jabatan Position and Term of Office	Pelatihan/Seminar/ Workshop/Konferensi Training/Seminar/ Workshop/Konferensi	Waktu Pelaksanaan Time of Implementation	Penyelenggara dan Lokasi Organizer and Location
Suroso Isnandar	Direktur Utama (23 September 2021 - 31 Desember 2022) President Director (September 23, 2021 - December 31, 2022)	Assessment Utilization - Board Ready - High Performance Director	24-26 November 2022 November 24-26, 2022	Perspektif Training & Consulting – Online
M Yanus Yanuar A	Direktur Operasi Pembangkitan Jawa Director of Java Power Plant Operation	Webinar Series "Dukungan dan Komitmen PJB dalam Pengembangan Energi Baru Terbarukan" Webinar Series "PJB's Support and Commitment in the Development of New and Renewable Energy"	13 Januari 2022 January 13, 2022	LKS Cabang Jakarta
		Webinar Series "Kesiapan Kerja di Dalam Negeri dan Luar Negeri" Webinar Series "Job Readiness in Domestic and Overseas"	22 Februari 2022 February 22, 2022	Universitas Pembangunan Veteran Jakarta
		Webinar on Digitizing Asset Management for State-Owned Enterprises	10 Maret 2022 March 10, 2022	British Embassy Jakarta
		Webinar Ruang Energi - Pemanfaatan Hidrogen untuk Dekarbonisasi dan Keseimbangan Kelistrikan Energy Room Webinar	7 April 2022 April 7, 2022	Ruang Energi Energy Room

Nama Name	Jabatan dan Masa Jabatan Position and Term of Office	Pendidikan/Kursus/Workshop/Pelatihan Training/Specialist Attainment/Seminar	Waktu Pelaksanaan Time of Implementation	Penyelenggara dan Lokasi Organizer and Location
		Webinar Pengenalan SHK 2 dan Sosialisasi Penghargaan K3 Webinar on Introduction of Occupational High School 2 and Socialization of K3 Awards	13 Mei 2021 - Hari ini May 13, 2021 -	Kementerian Energi dan Sdm RI (Dpt Kelistrikan) Ministry of Energy and Human Resources RI (Electric General of Electricity)
		Investment Strategies and Portfolio Management	20 Oktober 2021 October 20, 2021	Reformia Training & Consulting - Online
		Seminar Nasional Internal Audit 2021 National Seminar on Internal Audit 2021	30 November 2021 November 30, 2021	Yayasan Pendidikan Internal Audit Internal Audit Education Foundation
		Kerjasama Pengembangan Energi Baru Terbarukan sebagai sumber tenaga energi Energy cooperation with Kerjasama Pengembangan Energi Baru Terbarukan sebagai sumber tenaga energi Cooperation towards new energy	22 Desember 2021 December 22, 2021	PT Bukit Pembangkit Innovative
Nachmanian Inberto	Direktur Utama Pendapatan Sekunder Director of Elvis Thorax Plant Operation	Investment Strategies and Portfolio Management	20 Oktober 2021 October 20, 2021	Reformia Training & Consulting - Online
Muhamad Alwa	Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga (21 September 2021 - 31 Desember 2023) Director of Business Development and Commerce (September 21, 2021 - December 31, 2023)	Business Development	31 Oktober 2021 October 31, 2021	Gunawan
		Narasumber Kuliah Tamu Topik: Etika Profesi dan Isu Kontemporer Bidang Teknik Kelautan ITS Guest Lecture Speaker, Topic: Professional Ethics and Contemporary Issues in Marine Engineering ITS	8 November 2021 November 8, 2021	ITS
		Pelatihan Pengembangan Profesional Social Media Social Media Professional Development Training	12 November 2021 November 12, 2021	PT PLN (Persero)
		Narasumber The 6th Islamic Conference on Learning & Development (ICLAD) Resource Person at The 6th Islamic Conference on Learning & Development	30 November 2021 November 30, 2021	ICLAD
		Executive Education - Board Ready - High Performance Boards	24-29 November 2021 November 24-30, 2021	Reformia Training & Consulting - Online
		Narasumber dalam Improving Lives Through Innovation and Sustainable Business Resource Person in Improving Lives Through Innovation and Sustainable Business	22 Desember 2021 December 22, 2021	Investidor
Dan Hanono	Direktur Keuangan (21 September 2021 - 31 Desember 2023) Director of Finance (September 21, 2021 - December 31, 2023)	Executive Education - Board Ready - High Performance Boards	24-29 November 2021 November 24-30, 2021	Reformia Training & Consulting - Online

Nama Name	Jabatan dan Masa Jabatan Position and Term of Office	Pelatihan/Seminar/Workshop/Pameran/Lokakarya Training/Seminar/Workshop/Exhibition	Waktu Pelaksanaan Time of Implementation	Penyelenggara dan Lokasi Organizer and Location
Eko Yulianto, S.E.	Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi Director of Human Capital Management and Administration	Nanocentrism / Cara Unik Leaders Dan Cegu Ta Build The Future Organization During Disruptive And Virtual Era : an experience of PLN Nanocentrism / Unique Ways Leaders Can Help To Build The Future Organization During Disruptive And Virtual Era : an experience of PLN	28 Februari 2022 February 28, 2022	Penyelenggara: Universitas Airlangga Airlangga University Postgraduate Program
		Effective Asset Management: Culture and Leadership (Case Study in PT PLN)	6 April 2022 April 6, 2022	ANTARA
		Nanocentrism : Kekuatan Hati untuk "ZEN-ciptakan" Welcome Period - PLN Headquarters for MBA 141	6 Juli 2022 July 6, 2022	Wahyu Suara Muslim Wahyu Suara Muslim
		Nanocentrism Kuliah Tamu dengan Topik Implementasi "Quick Management in PLN" Guest Lecture Speaker with Topic Implementation of "Quick Management in PLN"	23 September 2022 September 23, 2022	Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Faculty of Psychology Airlangga University
		Workshop Aspek Perizinan & Aspek Kontrak Tenaga Pemeliharaan Subholding PLN Workshop on Licensing & Contract Aspects Related to the Establishment of PLN Subholding	17 Oktober 2022 October 17, 2022	PT PLN (Persero)
		Speaker pada Agenda Energy Transition Sky Road to COP	1 November 2022 November 1, 2022	PT PLN (Persero)
		Pembekalan Pengembangan Profesional Guru Mata Dalf Learning Training on Professional Development for Subject Teachers Dalf Learning	24 November 2022 November 24, 2022	PLN Pendidikan (PPE) Jakarta PLN Pendidikan (PPE) Jakarta

Program Pengembangan Kompetensi Komite Audit

Competency Development Program of the Audit Committee

Nama Name	Jabatan dan Masa Jabatan Position and Term of Office	Pelatihan/Seminar/Workshop/Pameran/Lokakarya Training/Seminar/Workshop/Exhibition	Waktu Pelaksanaan Time of Implementation	Penyelenggara dan Lokasi Organizer and Location
Irfandi Rahman	Wakil Ketua (Januari – Desember 2022) Vice Chairman (January – December 2022)	Seminar PIB Connect (PLN 'IP' Jump Beyond Connection) Seminar on PIB Connect (PLN 'IP' Jump Beyond Connection)	4 – 5 Oktober 2022 October 4 – 5, 2022	PLN NP – Jakarta Kuta Sundaan
Ardan Sudar Sucma	Anggota (Januari – Desember 2022) Member (January – December 2022)	Seminar PIB Connect PLN 'IP' Jump (Beyond Connection) Seminar on PIB Connect (PLN 'IP' Jump Beyond Connection)	4 – 5 Oktober 2022 October 4 – 5, 2022	PLN NP – Jakarta Kuta Sundaan
Sigit Dasa Purnama	Sekretaris (Januari – Desember 2022) Secretary (January – December 2022)	Seminar PIB Connect (PLN 'IP' Jump Beyond Connection) Seminar on PIB Connect (PLN 'IP' Jump Beyond Connection)	4 – 5 Oktober 2022 October 4 – 5, 2022	PLN NP – Jakarta Kuta Sundaan

Program Pengembangan Kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi
Competency Development Program of the Nomination and Remuneration Committee

Nama Name	Jabatan dan Masa Jabatan Position and Term of Office	Pelatihan/Seminar/ Workshop/Konferensi Training/Seminar/ Workshop/Conference	Waktu Pelaksanaan Time of Implementation	Penyelenggara dan Lokasi Organizer and Location
Chaerudin Sanie	Sekretaris (Januari - Desember 2022) Secretary (January - December 2022)	Seminar PAS Connect (PLN NP Jump Beyond Connection) Seminar on PAS Connect (PLN NP Jump Beyond Connection)	4 - 6 Oktober 2022 October 4 - 6, 2022	PLN NP - secm Fajar Surabaya
Ir. Hendriyanto	Anggota (Januari - Desember 2022) Member (January - December 2022)	Seminar PAS Connect (PLN NP Jump Beyond Connection) Seminar on PAS Connect (PLN NP Jump Beyond Connection)	4 - 6 Oktober 2022 October 4 - 6, 2022	PLN NP - secm Fajar Surabaya

Program Pengembangan Kompetensi Komite Manajemen Risiko & Kepatuhan
Competency Development Program of the Risk Management & Compliance Committee

Nama Name	Jabatan dan Masa Jabatan Position and Term of Office	Pelatihan/Seminar/ Workshop/Konferensi Training/Seminar/ Workshop/Seminar	Waktu Pelaksanaan Time of Implementation	Penyelenggara dan Lokasi Organizer and Location
Hendrang Hendro	Sekretaris (Januari - Desember 2022) Secretary (January - December 2022)	Konferensi Nasional Manajemen Risiko Tahun 2022 National Conference on Risk Management 2022	Desember 2022 December 2022	LPSAM
Gigih Lik Aprio	Anggota (Januari - Desember 2022) Member (January - December 2022)	Seminar PAS Connect (PLN NP Jump Beyond Connection) Seminar on PAS Connect (PLN NP Jump Beyond Connection)	4 - 6 Oktober 2022 October 4 - 6, 2022	PLN NP - secm Fajar Surabaya

Program Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan
Competency Development Program of the Corporate Secretary

Nama Name	Pelatihan/Seminar/ Workshop/Konferensi Training/Seminar/ Workshop/Seminar	Waktu Pelaksanaan Time of Implementation	Penyelenggara dan Lokasi Organizer and Location
Eksekusi	Governance Risk Compliance	19 - 21 April 2022 April 19 - 21, 2022	PT Grapia Nusantara - Online
	ISO 37001 Management Anti Suap ISO 37001 Anti-Bribery Management	5 Juli 2022 July 5, 2022	BSI - Online
	Future Issues Legal Forum	1 - 5 Agustus 2022 August 1 - 5, 2022	FIA Academy - Makassar

Program Pengembangan Kompetensi Kepala Satuan Pengawasan Internal
Competency Development Program of the Head of Internal Audit Unit

Nama Name	Pelatihan/Seminar/ Workshop/Pemasukan Training/Seminar/ Workshop/Refresh	Waktu Pelaksanaan Time of Implementation	Penyelenggara dan Lokasi Organizer and Location
Siti Nasrokhatun H	Governance Risk Compliance	18 - 22 April 2022 April 18 - 22, 2022	PT Cakrya Resources - Online
	Pembekalan Hijra Persiapan Pensiun Debriefing on Retirement Preparation Period	25 - 27 April 2022 April 25 - 27, 2022	PIM Academy - Online
	ISO 37001 Manajemen Anti Suap ISO 37001 Anti-Bribery Management	4 Juli 2022 July 4, 2022	BSI - Online
	ISO 37301 Whistle Blowing System ISO 37301 Whistle Blowing System	12 - 20 September 2022 September 12 - 20, 2022	BSI - Online

Program Pengembangan Kompetensi Kepala Satuan Manajemen Risiko dan Kepatuhan
Competency Development Program of the Head of Risk Management and Compliance Unit

Nama Name	Pelatihan/Seminar/ Workshop/Pemasukan Training/Seminar/ Workshop/Refresh	Waktu Pelaksanaan Time of Implementation	Penyelenggara dan Lokasi Organizer and Location
Sukawati Tedi Haryanto	Governance Risk Compliance	18 - 22 April 2022 April 18 - 22, 2022	PT Cakrya Resources - Online
	Wawasan Kebangsaan Leadership Leadership Insight	13 - 17 Juni 2022 June 13 - 17, 2022	PIM Academy - Bandung
	ISO 37001 Manajemen Anti Suap ISO 37001 Anti-Bribery Management	4 Juli 2022 July 4, 2022	BSI - Online
	GMC Summit Webinar GMC Summit Webinar	25 - 26 Agustus 2022 August 25 - 26, 2022	GRMS Indonesia - Yogyakarta

Pengembangan Kompetensi untuk Karyawan
Competency Development for Employees

Kesetaraan dan Kesempatan yang Sama dalam Pendidikan dan Pelatihan
Equality and Equal Opportunity in Education and Training

PLN NP memberikan kesempatan yang sama bagi pengembangan kompetensi seluruh karyawan tanpa memandang gender, suku, agama dan ras (SARA), maupun level jabatan. Oleh karena itu, PLN NP menerapkan prinsip non diskriminasi yang ketat dan konsisten dalam pengelolaan SDM. PLN NP berkomitmen berkelanjutan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas setiap karyawan pada seluruh jenjang organisasi dalam mendukung kinerja Perusahaan saat ini dan di masa depan. Komitmen ini tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama antara PLN NP dengan Serikat Kerja serta kebijakan Human Experience Management System, terutama aspek pendidikan dan pelatihan karyawan. Untuk informasi lebih lengkap terkait pengelolaan Sumber Daya Manusia secara menyeluruh, dapat dilihat pada Bab Aspek Penting Pendukung Bisnis bagian Sumber Daya Manusia dalam Laporan Tahunan ini.

PLN NP provides equal opportunities for the competency development of all employees regardless of gender, ethnicity, religion and race or position level. Therefore, PLN NP applies strict and consistent non-discrimination principles in HR management. PLN NP remains committed to increasing the capacity and capability of every employee at all levels of the organization in supporting the Company's current and future performance. This commitment is stipulated in the Collective Labor Agreement between PLN NP and the Labor Union as well as the Human Experience Management System policy, especially the aspect of employee education and training. For more complete information regarding the overall management of Human Resources, please refer to the Important Aspects of Business Support chapter in the Human Resources section in this Annual Report.

PIB Academy
PIB Academy

PIB Academy memperoleh sertifikasi internasional dari Pearson UK sejak tahun 2017 dan tersertifikasi ISO 21001:2018. Sepanjang tahun 2022, PIB Academy telah memberikan pembelajaran terhadap 10.453 karyawan atau tercapai 101,78% dari target 10.270 karyawan.

PIB Academy obtained international certification from Pearson UK since 2017 and is ISO 21001:2018 certified. Throughout 2022, PIB Academy has provided learning to 10,402 employees or achieved 101.78% of the target of 10,270 employees.

PIB Academy dibentuk sebagai upaya dalam meningkatkan kompetensi karyawan di lingkungan Grup PLN NP. Sertifikasi Pearson UK menjadi pengakuan bahwa pelaksanaan pembelajaran oleh PIB Academy dilakukan dengan arah dan proses learning & knowledge management yang benar sehingga untuk menyiapkan personalia kepemimpinan bahwa kehadirannya menjadi kebutuhan dalam pelaksanaan transformasi PLN NP saat ini dan masa mendatang.

PIB Academy was established as an effort to improve the competence of employees within the PLN NP Group. The Pearson UK certification is an acknowledgment that the implementation of learning by PIB Academy is built with the right direction and process of learning & knowledge management as well as to convince stakeholders that its presence is a necessity in the development of PLN NP's current and future transformation.

PIB Academy juga telah tersertifikasi ISO 21001:2018 sehingga PIB Academy dapat memberikan layanan pembelajaran berstandar internasional bagi seluruh peserta layanan pembelajaran. Saat ini, PIB Academy memiliki 24 karyawan dengan sertifikat Corporate Learning Technologist (CLT) untuk mengelola learning processes dan content berstandar internasional.

PIB Academy has also been certified with ISO 21001:2018 so that PIB Academy can provide international learning services for all learning service recipients. Currently, PIB Academy has 24 employees with Corporate Learning Technologist (CLT) certificates to manage international standard learning process and content.

Pembelajaran di PIB Academy meliputi pembelajaran kompetensi teknis, pembelajaran profesional dan sertifikasi (Operation & Maintenance, Manajemen Aset, Pembangkitan dan Bisnis Pembangkitan, Teknologi), serta pembelajaran korporat strategis. Adapun pendekatan pembelajaran dilakukan dengan 2 (dua) metode:

1. Performance Based Learning (PBL)
   Pembelajaran dilakukan berdasarkan permasalahan yang terjadi di lapangan, faktor karyawan atau SDM yang mengakibatkan kinerja unit tidak tercapai.
2. Competence Based Learning (CBL)
   Pembelajaran dilakukan untuk menutup kesenjangan kompetensi berdasarkan assessment job competency terhadap kebutuhan perusahaan, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka

Learning at PIB Academy includes leadership learning, professional learning and certification (Operation & Maintenance, Business Process, Asset Management, and Integrated Thermal Power Generation Business), as well as corporate strategic learning. The learning approach is conducted with 2 (two) methods:

1. Performance Based Learning (PBL)
   Learning is based on issues occured by the employee or HR factors that result in unit performance not being achieved.
2. Competence Based Learning (CBL)
   Learning is carried out to close competency gaps based on job competency assessments against short and long term company needs.

[illegible] Academy memiliki program pembelajaran rutin yang merupakan hasil dari Learning Need Analysis setiap tahun dalam bentuk Kuander Akademik, dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi berdasarkan adanya gap kompetensi masing-masing karyawan, tuntutan audit, regulasi baru atau pun mendukung tujuan Perusahaan. Jenis pengembangan kompetensi karyawan yang diselenggarakan oleh PLN Academy terdiri dari pengembangan kompetensi mulai dari jenjang Pelaksana, Supervisor, Manajemen Dasar, sampai dengan Manajemen Atas.

PLN Academy has a training learning program which is the result of Learning Needs Analysis every year in the form of Academic Calendar, with the aim of improving employee competencies according to each employee's competency gap, audit findings, new regulations or supporting the Company's goals. The type of employee competency development organized by PLN Academy consists of competency development starting from the level of Executive, Supervisor, Basic Management to Upper Management.

Anggaran Pengembangan Kompetensi untuk Karyawan
Competency Development Budget for Employees

Realisasi anggaran untuk pengembangan kompetensi karyawan tahun 2022 adalah sebesar Rp42,29 miliar, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp40,01 miliar. Peningkatan ini terjadinya karena penyelenggaraan kegiatan pembelajaran (secara offline / tatap) untuk mendukung program HGH tersebut 2022.

The budget realization for employee competence development in 2022 was Rp42,29 billion, increased when compared to 2021 of Rp40,01 billion. This increase was mainly due to the implementation of learning activities (offline) to support the HGH program in 2022.

1 Grafik Realisasi Anggaran Pendidikan dan Pelatihan Karyawan Tahun 2020-2022 (Rp miliar)
Chart of Employee Education and Training Budget Realization in 2020-2022 (Rp billion)

Rencana dan Realisasi Pengembangan Kompetensi Karyawan 2022

Employee Competency Development Plan and Realization in 2022

Rencana program pengembangan karyawan tahun 2022 berdasarkan kebutuhan. Berikut ini disajikan realisasi pengembangan kompetensi karyawan sepanjang tahun 2022.

The planned employee development program in 2022 was fully achieved. The following presents the realization of employee competency development throughout 2022.

Tabel Rencana Pengembangan Kompetensi Karyawan Tahun 2022

Table of Employee Competency Development Plan for 2022

Jenis Pengembangan Kompetensi Type of Competency Development	Jumlah Diklat Number of Training		Jumlah Peserta Number of Participants	
	Target Target	Realisasi Realization	Target Target	Realisasi Realization
Program Pelatihan Teknis Engineering Training Program	344	261	4.743	3.000
Program Pelatihan Non Teknis Non-Engineering Training Program	178	109	3.700	3.000
Program Sertifikasi Teknis Engineering Certification Program	100	128	1.000	1.707
Program Sertifikasi Non Teknis Non-Engineering Certification Program	91	91	570	454
Workshop Teknis Engineering Workshop	-	23	-	442
Workshop Non Teknis Non-Engineering Workshop	-	19	-	127
Lainnya Others	-	7	-	172
Jumlah Total	**570**	**638**	**10.270**	**10.452**

Diklat Penjenjangan

Upgrading Training

Diklat Penjenjangan merupakan diklat yang bersifat mandatory untuk diikuti oleh seluruh karyawan sebagai persyaratan kenaikan level atau penyetaraan level kompetensi dengan tanggung jawab pekerjaan. Hal tersebut berlaku bagi seluruh Pejabat Pengusahaan yang telah menerapkan sistem penilaian Kerja dan kompetensi PT PLN (Persero) terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Executive Education (EE)/ Supervisory Education (SE), merupakan diklat/tugas karyawan yang diprasyaratkan memenuhi jabatan struktural dengan persyaratan kebutuhan kompetensi jabatan di atas level kompetensinya, terdiri dari Level EE-1 untuk Level Supervisi EE-2 untuk Level Manajemen Dasar EE-3 untuk Level Manajemen Menengah dan EE-4 untuk Level Manajemen Atas.
2. Strategic Specialist Education (SSE)/ Strategic Specialist Education (SPE), merupakan diklat bagi karyawan yang berada pada grade tertinggi pada suatu level kompetensi dan akan pindah level kompetensi di atasnya atau ditugaskan bagi karyawan yang akan menduduki jabatan fungsional dengan persyaratan kebutuhan kompetensi jabatan di atas level kompetensinya, terdiri dari Level SPE-1, SSE-III sampai dengan Level SSE-I.

Upgrading Training is a mandatory training to be attended by all employees as a requirement for leveling up or equivalency competency levels with job responsibilities. This applies to all subsidiaries that have ratified the salary and competency development system of PT PLN (Persero) consisting of 2 types, namely:

1. Executive Education (EE)/Supervisory Education (SE), is training for employees who are projected to occupy structural positions with the requirements of position competency needs above their competency level, consisting of EE-1 level for Supervisor Level, EE-2 for Basic Management Level, EE-3 for Middle Management Level and EE-4 for Upper Management Level.
2. Strategic Specialist Education (SSE)/Strategic Specialist Education (SPE), is training for employees who are at the highest grade at a competency level and will move to the competency level above, or intended for employees who will occupy functional positions with the requirements of the competency needs of positions above their competency level, consisting of Level SPE-1, SSE-III to Level SSE-I.

Berikut adalah rincian data pelatihan sepanjang tahun 2022:

The following is the statistics of upgrading training throughout 2022:

Tabel Data Pelatihan Tahun 2022

Table of Upgrading Training in 2022

Jenis Diklat Peningkatan Type of Upgrading Training	Jumlah Peserta Number of Participants	Dalam Proses In Process	Lulus Passed
[illegible]	-	-	-
[illegible]	33	33	33
[illegible]	24	4	20
[illegible]	81	33	48
[illegible]	0	-	0
[illegible]	1	-	1
[illegible]	55	8	47
[illegible]	7	0	7

Program Pendidikan Formal

Formal Education Program

PLN (Persero) juga memberikan kesempatan bagi seluruh Karyawan PLN Group yang memiliki kemampuan dan kompetensi untuk mengembangkan kemampuannya melalui pendidikan formal khususnya pada jenjang Magister maupun Doktoral melalui melalui Program pendidikan formal PLN dan Luar PLN, baik dalam Negeri melalui skema Program Belajar sambil Kerja (PBK) maupun Luar Negeri melalui skema Program Tugas Belajar (PTB).

PLN (Persero) also provides opportunities for all PLN Group employees who have the interest and desire to develop competencies through formal education, especially at the Master and Doctoral levels through PLN and Outside PLN formal Education Program methods, both Domestically through the Distance Learning Program (PBK) scheme and Abroad through the Learning Task Program (PTB) scheme.

Pada tahun 2022, terdapat 8 karyawan yang telah dinyatakan sebagai Peserta Program Pendidikan Formal PLN Group sebagai berikut:

In 2022, there were 8 employees who had been determined as Participants of the PLN Group Formal Education Program as follows:

Tabel Program Pendidikan Formal PLN Group Tahun 2022

Table of PLN Group's Formal Education Programs in 2022

No	Lembaga Pendidikan Educational Institutions	Jenjang Ranking	Jurusan Department	Jumlah Karyawan Number of Employees	Skema Schemes
1.	University of Auckland	S2 Master Degree	Master of Energy	1	Program Tugas Belajar (PTB) Learning Task Program (LTP)
2.	Monash University	S2 Master Degree	The Master of Business in Analytics	1	Program Tugas Belajar (PTB) Learning Task Program (LTP)
3.	University of Manchester	S2 Master Degree	Management MSC	1	Program Tugas Belajar (PTB) Learning Task Program (LTP)
4.	Universitas Indonesia University of Indonesia	S2 Master Degree	Economic & Finance	4	Program Tugas Belajar (PTB) Learning Task Program (LTP)
5.	Universitas Indonesia University of Indonesia	S2 Master Degree	Finance Law	1	Program Tugas Belajar (PTB) Learning Task Program (LTP)

Program Magang
Internship Program

Program Magang di PLN NP terbagi menjadi 2 (dua) macam bentuk pelaksanaan, yaitu (1) sebagai seleksi bagi peserta sebelumnya agar dapat mengembangkan diri sesuai kapak PLN NP dalam membentuk SDM unggul dan (2) dikelola oleh PLN NP sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.

Program magang yang dilaksanakan selama tahun 2022 adalah magang selama 2 minggu di Sembcorp Power, Singapura pada tanggal 4 – 17 Desember 2022. Program magang ini merupakan salah satu bentuk tindak lanjut dari benchmark yang dilaksanakan pada tahun 2022, dan diikuti oleh 6 peserta magang dari PLN NP yang bertujuan untuk mengasah pengembangan kompetensi terkait teknologi Floating PV yang sudah lebih dulu diimplementasikan di Singapura.

The Internship Program at PLN NP is divided into 2 (two) forms of implementation, namely (1) as a reward for scholarship participants in order to develop themselves according to PLN NP's goal of forming superior human resources and (2) initiated by PLN NP according to the needs of the Company.

The internship program carried out during 2022 was a 2-week internship at Sembcorp Power, Singapore on December 4-17, 2022. This internship program is a follow-up to the benchmark carried out in 2022, and was attended by 6 interns from PLN NP which aims to target competence development related to Floating PV technology that has been implemented in Singapore.

Program Benchmarking
Benchmarking Program

Program benchmarking dilaksanakan dengan melakukan kunjungan langsung ke perusahaan terkait agar mendapat experience secara langsung untuk bantuan dapat diimplementasikan proaktifnya di PLN NP.

Pada tahun 2022, kegiatan benchmarking on-site baru dapat terlaksana di Semester 2 melalui program PRI Global Pass Adventure (GPAT). Adapun program ini bertujuan untuk:
1. Memperluas wawasan dan perspektif secara global
2. Mendapatkan pengalaman dan networking sementara
3. Membuka cakrawala melalui kebudayaan lokal, teknologi dan isu bisnis terkini
4. Membentuk self-development menghadapi tantangan secara kritis dan cepat tanggap
5. Melatih sosial adaptation, kepemimpinan, teamwork kepercayaan diri dan jiwa komandoan

Terdapat 22 karyawan yang ditugaskan sebagai peserta untuk dapat menilai perusahaan terkait di 5 negara ASEAN yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina dan Vietnam.

The benchmarking program is carried out by conducting direct visits to related companies in order to gain direct experience and more maximum in its practices in ASEAN.

In 2022, on-site benchmarking activities can only be carried out in Semester 2 through the PRI Global Pass Adventure (GPAT) program. The program aims to:
1. Gain global insight and perspective
2. Gain wider experience and networking
3. Open horizons through local culture, technology and the latest business issues
4. Provide self-development in face challenges critically and responsively
5. Train social adaptation, leadership, teamwork, self-confidence and independence

There are 22 employees assigned as participants to find the best companies in 5 ASEAN countries namely Singapore, Malaysia, Thailand, Philippines and Vietnam.

Tabel Program Benchmarking PLN NP ke Perusahaan Lain Tahun 2022
Table of PLN NP Benchmarking Program to Other Companies in 2022

No.	Nama Perusahaan Company Name	Tema Theme	Jumlah Peserta dari PLN NP Number of Participants from PLN NP
1.	Sembcorp, Singapura	Site Visit Floating PV dan Renewables Energy Site Visit to Floating PV and Renewable Energy	4
2.	Sembcorp, Vietnam	Site Visit Floating PV dan Renewables Energy Site Visit to Floating PV and Renewable Energy	4
3.	Kedutaan Besar Indonesia di Filipina dan Vietnam Indonesian Embassies in the Philippines and Vietnam	Diskusi, Networking dan eksplorasi peluang kerjasama bagi PSI di Filipina Discussion, Networking and exploration of cooperation opportunities for PSI in the Philippines	4
4.	Kedutaan Besar Indonesia di Vietnam Indonesian Embassies in the Vietnam	Diskusi, Networking dan eksplorasi peluang kerjasama bagi PSI di Vietnam Discussion, Networking and exploration of cooperation opportunities for PSI in the Vietnam	4
5.	Honeywell, Malaysia	Inovasi dan Teknologi soal Industri global Innovation and Technology of global Industrialized	4
6.	KUEPUS VFC 5 Gameleiry, Malaysia	Kerjasama program pengembangan jaringan di komunitas pemerintah SDM di Asia Tenggara Cooperation of employee development programs in the electric company community in Southeast Asia	4
7.	Silver Energy, Thailand	Kerjasama Peluang Berjasama dengan Silver Energy dan Teknologi Pembangkit Listrik Exploring Cooperation Opportunities with Silver Energy and the latest Power Plant Technology	4

Selain itu, PLN NP juga menjadi tujuan benchmarking oleh Perusahaan lain. Adapun kunjungan dari Perusahaan lain sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut:

In addition, PLN NP also become a benchmarking destination by other companies. The visits from other companies throughout 2022 were as follows:

Tabel Program Benchmarking Perusahaan Lain ke PLN NP Tahun 2022
Table of Benchmarking Program of Other Companies to PLN NP in 2022

No.	Nama Perusahaan Company Name	Tema Theme	Jumlah Peserta Number of Participants
1.	PT Sucofindo Segera Prioritasi	Sistem Informasi Teknologi Information Technology System	8
2.	PT Indonesia Power (PT.), Kantor Pusat PT Indonesia Power (Kantor Pusat)	Penyajian Proyek Kreasi (2020) Pemenang Winning (2020) Gold Project Achievement	10
3.	Malaysia Power	Sistem Manajemen Terintegrasi Integrated Management System	5
4.	PT Sinarta Indonesia	Sistem Manajemen Terintegrasi Integrated Management System	11
5.	PLN UP TBT	Decision Support System	13
6.	PT Iron Rice	Manajemen Risiko Terintegrasi Integrated Risk Management	7

Program Sertifikasi
Certification Program

Sertifikasi merupakan pengakuan terhadap kompetensi seorang profesional yang telah memenuhi standar profesi pada bidangnya masing-masing. Sebagai perusahaan yang bergerak dalam industri pembangkitan serta pemeliharaan jasa operasi dan pemeliharaan ketenagalistrikan, melakukan sertifikasi kepada karyawannya guna menjaga standar kompetensi yang dimiliki dalam bekerja.

Certification is a recognition of the competence of a professional who has met professional standards in their respective fields. As a company engaged in the electric power generation industry and the provision of electricity operation and maintenance services, certifying its employees in order to maintain their competency standards at work.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan Unit maupun Korporat terkait isu kemitrayanan yang berkembang dewasa ini sebagaimana Undang-undang No. 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran yang menyebutkan bahwa bagi pekerja di bidang pemanfaatan energi memiliki sertifikasi, jika tidak maka dianggap sebagai tenaga/pekerja tidak bisa. PSI Academy menyelenggarakan bersama dengan LSKK untuk melakukan pendampingan dan sertifikasi kompetensi bagi karyawan PLN NP di bidang teknik agar dapat diakui sebagai anggota Himpunan Insinyur Indonesia (PII).

In order to meet the needs of the Unit and Corporate related to engineering issues that are currently developing as Law No. 11 of 2014 concerning Engineering which states that for workers in the field of power plants are required to have certification otherwise it is considered a non-profession activity. For this reason, PSI Academy collaborates with LSKK to provide assistance and engineering certification for PLN NP employees in the field of engineering so that they will be recognized as members of the Indonesian Engineers Association (PII).

Tabel Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Tahun 2020-2022
Table of Implementation of Competency Certification for Electricity Engineering Personnel in 2020-2022

Jenis Sertifikasi Type of Certification	Jumlah Karyawan yang Disertifikasi Number of Certified Employees		
	2020	2021	2022
Core Competence			
Sertifikat PHE Blok (L.C & D) / HO Certification (Class B, C, & D)	58	160	175
Sertifikat K3 (Listrik, Umum, Kimia, Keringgian, Ruang Terbatas) K3 Certification (Electrical, General, Chemical, Altitude, Confined Space)	116	133	79
Sertifikat Operasi Boiler / Boiler Operator Certification	-	-	-
Supporting Competence			
Sertifikat Proper Safety / Proper Safety Certification	-	-	34
Proper Safety Certification Management (PSA)	-	-	-
Sertifikat Manajemen Pelatihan – MPBP / Training Management Certification – MPBP	-	31	-
Sertifikat Training Air Trainer / Training for Trainer Certification	-	203	18
CHRM	-	-	-
Sertifikat Auditor SMK3 OHSAS / Auditor Certification	43	60	1

Selain itu, terdapat sertifikat Chartered Engineer/Insinyur Keinsinyuran (CEK) yang diwajibkan oleh pemerintah sebagai persyaratan yang berguna di bidang usaha ketenagalistrikan. Sebagai bentuk komitmen dan kepedulian tersebut, PSI Academy juga telah melakukan sertifikasi bagi seluruh karyawan di bidang teknik mengacu pada Peraturan Menteri ESDM No. 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan. Contoh karyawan yang memperoleh Sertifikasi dari LSK pada tahun 2022 adalah sebanyak 465 karyawan, yaitu sebanyak 130,88% dari target yang ditetapkan sebanyak 343 karyawan.

In addition, there is a Chartered Engineer (CEK) certification required by the government as a company engaged in the electricity business. As a form of commitment and compliance, PSI Academy has also certified all employees in the field of engineering referring to the Regulation of the Minister of ESDM No. 46 of 2017 concerning Standardization of Competence of Electricity Engineering Personnel. The number of employees who obtained Certification from LSKK in 2022 was 465 employees, which achieved 130.88% of the set target of 343 employees.

Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi
Evaluation of Competency Development Implementation

Program Evaluasi Pengembangan Kompetensi
Competency Development Evaluation Program

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan produktivitas karyawan, PLN NP senantiasa melakukan evaluasi kegiatan pengembangan kompetensi secara berkesinambungan guna memberikan tanggapan, masukan dan penyempurnaan, antara lain untuk aspek-aspek berikut:

1. Pengoptimalan pelaksanaan pembelajaran yang dapat dilakukan secara offline/ luring untuk beberapa pembelajaran yang membutuhkan pendalaman dan praktikum.
2. Memperbarui materi pembelajaran menyesuaikan dengan kondisi teknologi saat ini dan kujuan perusahaan.
3. Penyesuaian waktu pelaksanaan pembelajaran dengan program-program besar terkait dan penugasan khusus unit yang ada seperti overhaul dan lain sebagainya.

In order to improve employee effectiveness and productivity, PLN NP continuously evaluates competency development activities to obtain feedback, input and improvements, among others, related to the following aspects:

1. Optimizing the implementation of learning that can be conducted offline/ in-person that requires deepening and practicum.
2. Updating learning materials according to current technological conditions and company goals.
3. Adjustment of learning implementation time with major corporate programs and special assignments of participant units such as overhaul and etc.

Rencana Pengembangan Kompetensi Karyawan Tahun 2023
Employee Competency Development Plan for 2023

Pada tahun 2023, PLN NP merencanakan kegiatan pengembangan kompetensi karyawan sebagai berikut:

In 2023, PLN NP plans employee competency development activities as follows:

Tabel Rencana Pengembangan Kompetensi Karyawan Tahun 2023
Table of Employee Competency Development Plan for 2023

Jenis Pengembangan Kompetensi Type of Competency Development	Jumlah Diklat Number of Diklat(s)	Jumlah Peserta Number of Participants
Program Pelatihan Teknis Engineering Training Program	211	4.661
Program Pelatihan Non Teknis Non-Engineering Training Program	177	3.805
Program Sertifikasi Teknis Engineering Certification Program	335	2.749
Program Sertifikasi Non Teknis Non-Engineering Certification Program	30	872
Jumlah Total	**807**	**12.089**

Struktur dan Komposisi Pemegang Saham
Structure and Composition of the Shareholders

Informasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali
Information on Major and Controlling Shareholders

Pemegang saham PLN NP yaitu PT PLN (Persero) dengan kepemilikan saham sebesar 99,99% dan Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) dengan kepemilikan saham sebesar 0,01%. PT PLN (Persero) merupakan pemegang saham utama dan pengendali PLN NP. Direktur Utama PT PLN (Persero) merupakan representasi pemegang saham utama dan pengendali, dimana secara fakta hubungan dengan pemegang saham berada di bawah Sekretaris Perusahaan PT PLN (Persero) fungsi Hubungan Investor.

PLN NP shareholders are PT PLN (Persero) with 99.99% shareholding and Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) with 0.01% shareholding. PT PLN (Persero) is the major and controlling shareholder of PLN NP. The President Director of PT PLN (Persero) is the representative of the major and controlling shareholders, where technically the shareholding ratio shareholders is under the Corporate Secretary of PT PLN (Persero), the Investor Relations function.

Dengan demikian tidak terdapat informasi terkait dengan (a) Rincian 20 pemegang saham terbesar dan persentase kepemilikannya, (b) nama pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham maupun kelompok pemegang saham masyarakat yang kurang dari 5%.

Therefore, there is no information related to: (a) Details of the 20 largest shareholders and their percentage ownership, (b) names of shareholders who own 5% or more of the shares as well as public shareholders groups with less than 5%.

Komposisi Pemegang Saham
Composition of the Shareholders

Berdasarkan pasal 4 Anggaran Dasar, modal dasar Perusahaan ditetapkan sebesar Rp12.000.000.000.000,- dua belas triliun Rupiah) terbagi dalam 120.000.000.000 saham, terdiri atas 1 Saham Seri 1 dan 11.999.999.999 Saham Seri 2 masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp100 – Seratus Rupiah).

Based on article 4 of the Company's Articles of Association, the Company's authorized capital is set at Rp12,000,000,000,000 (twelve trillion Rupiah), divided into 120,000,000,000 shares, consisting of 1 Series 1 Share and 11,999,999,999 Series 2 Shares, each share has the nominal value of Rp100 (One hundred Rupiah).

Modal ditempatkan dan disetor dengan komposisi sebagai berikut:

1. PT PLN (Persero) sebanyak 1 Saham Seri 1 dan 6.999.999.999 Saham Seri 2 dengan nilai nominal sebesar Rp699.999.999.900,- dua triliun sembilan ratus sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah);
2. Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) sebanyak 1 Saham Seri 2 dengan nilai nominal sebesar Rp100,- (Seratus Rupiah).

The capital has been issued and paid up with the following composition:

1. PT PLN (Persero) as much as 1 Share of Series 1 and 6,999,999,999 Shares of Series 2 with a nominal value of Rp2,999,999,999,900,- (two trillion nine hundred nine billion nine hundred ninety-nine million nine hundred ninety-nine thousand five hundred Rupiah);
2. Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) of 1 Share of Series 2 with a nominal value of Rp100,- (One hundred Rupiah).

Kepemilikan Saham oleh Direksi dan Dewan Komisaris
Share Ownership by the Board of Directors and Board of Commissioners

Seluruh Direksi dan Dewan Komisaris PLN NP yang menjabat sepanjang tahun 2021 tidak memiliki saham baik secara langsung maupun tidak langsung di Perusahaan.

All Board of Directors and Board of Commissioners of PLN NP who served throughout 2021 had no shares either directly or indirectly in the Company.

Informasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali
Information on Major and Controlling Shareholders

Pemegang saham mayoritas PLN NP adalah PT PLN (Persero) dengan kepemilikan sebesar 99,99%, sehingga Pemegang Saham Utama dan Pengendali PLN NP adalah PT PLN (Persero). Pemegang Saham pengendali adalah pemilik saham mayoritas dan memiliki power untuk mengendalikan kebijakan yang akan diambil oleh manajemen Perusahaan.

PLN NP's majority shareholder is PT PLN (Persero) with 99.99% shareholding, and therefore making PT PLN (Persero) as the Majority and Controlling Shareholder of PLN NP. Controlling Shareholder holds the majority of shares and has the ability to control the policies to be adopted by the Company's management.

Pemegang Saham dengan Kepemilikan 5% atau Lebih
Shareholders with 5% or More Ownership

Pemegang saham PLN NP persentase kepemilikan saham 5% dan lebih adalah PT PLN (Persero) dengan persentase sebesar 99,99%.

Shareholder of PLN NP with share ownership percentage of 5% and more is PT PLN (Persero) with a percentage of 99.99%.

Pemegang Saham dengan Kepemilikan Kurang dari 5%
Shareholders with Less than 5% Ownership

[illegible] PLNNP [illegible] Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) dengan kepemilikan saham sebesar 0,01%.

Shareholders of PLN NP with shareholding percentage of less than 5% are Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) with shareholding of 0.01%.

Kepemilikan Saham oleh Masyarakat
Public Share Ownership

Sampai dengan akhir tahun 2022, PLN NP tidak mencatatkan sebagian di bursa saham, baik di Bursa Efek Indonesia (BEI) maupun di bursa saham lainnya. Sehingga tidak terdapat informasi pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan 5%, lebih dari 5% atau kurang dari 5%.

Until the end of 2022, PLN NP does not list its shares on the stock exchange, either on the Indonesia Stock Exchange (IDX) or on other stock exchanges. Therefore, there is no information on public shareholders with ownership of 5%, more than 5% or less than 5%.

Jumlah Pemegang Saham dan Persentase Kepemilikan, Berdasarkan Klasifikasi
Number of Shareholders and Shareholding Percentage, by Classification

Kepemilikan Saham PLN NP seluruhnya dimiliki oleh institusi lokal yaitu PT PLN (Persero) dan Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) yang seluruhnya berkedudukan di Indonesia.

PLN NP's shares are fully held by local institutions, i.e., PT PLN (Persero) and Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero), both of which are based in Indonesia.

Struktur Grup PLN Nusantara Power

Group Structure of PLN Nusantara Power

Dalam rangka memperluas dan meningkatkan kontribusi dalam industri ketenagalistrikan nasional, terutama pada industri pembangkitan tenaga listrik, Grup PLN NP senantiasa melakukan pengembangan beragam proyek pembangkit unggulan di Indonesia.

In order to expand and increase its contribution to the national electricity industry, especially in the electric power generation industry, PLN NP Group always develops various leading power plant projects in Indonesia.

Sampai dengan akhir tahun 2022, PLN NP memiliki 5 (lima) Entitas Anak, 4 (empat) Cucu Usaha Perusahaan, 8 (empat) Entitas Asosiasi dan memiliki 6 (enam) Entitas Patungan (Joint Venture Company/JVC) dengan kepemilikan saham oleh Anak Perusahaan.

As of the end of 2022, PLN NP had 5 (five) Subsidiaries, 4 (four) Second to Third-Tier Subsidiaries, 8 (four) Associated Entities and had 6 (six) Joint Venture Companies (JVC) with shares ownership by Subsidiaries.

Entitas Anak adalah suatu perusahaan yang dikendalikan oleh PLN NP memiliki kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasionalnya untuk memperoleh manfaat dari aktivitas entitas tersebut. Sedangkan untuk Entitas Cucu Usaha adalah perusahaan yang dikendalikan oleh PLN NP melalui Entitas Anak dengan kepemilikan terhadap Entitas Cucu Usaha adalah mayoritas.

Subsidiary Entity is a company controlled by PLN NP, has the power to regulate the financial and operational policies for obtain benefits from the entity's activities. Meanwhile, Second to Third-Tier Entities are companies controlled by PLN NP through Subsidiaries with majority ownership of the Second to Third-Tier Entities.

Entitas Asosiasi adalah suatu perusahaan dimana PLN NP dan entitas anak mempunyai pengaruh yang signifikan, dan bukan merupakan entitas anak ataupun bagian partisipasi dalam ventura bersama. Definisi "Pengaruh Signifikan" adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional investee, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.

Associated Entity is a company where PLN NP and its subsidiaries have significant influence, and is neither a subsidiary nor a participating part in a joint venture. The definition of "Significant Influence" in this power to participate in the financial and operating policy decisions of the investee, but not control or joint control over the policy.

Entitas Patungan (Joint Venture Company/JVC) merupakan perusahaan bersama dimana para pihak mempunyai bagian partisipasi dan dibuat oleh penetapan untuk berbagi pengendalian atas suatu aktivitas. Pada Entitas Patungan kebijakan keuangan dan operasional strategis terkait dengan aktivitasnya, dipermasalkan secara konsensus dari semua pihak yang berbagi pengendalian.

Joint Venture Company (JVC) is a joint enterprises in which the parties have a participating part and are requested to an agreement to share control over an activity. In a Joint Venture Entity, strategic financial and operational decisions relating to its activities are required by consensus of all parties who share control.

Adapun struktur PLN NP Group hingga Tahun 2022 dapat digambarkan pada gambar berikut:

The structure of PLN NP Group in 2022 can be illustrated in the following picture:

5
3
4
7

40,25%
49,00%
30,61%
49,00%
30,00%
25,00%
10,00%
SSP

Daftar Entitas Anak, Cucu-Cicit, Asosiasi dan Ventura Bersama
List of Subsidiaries, Second to Third-Tier Subsidiaries, Associates and Joint Ventures

Berikut disajikan daftar Entitas Anak, Cucu-Cicit, Asosiasi dan Ventura Bersama yang tergabung dalam Grup PLN NP sampai dengan tahun 2023.

The following is a list of Subsidiaries, Second to Third-Tier Subsidiaries, Associates and Joint Ventures that are members of the PLN NP Group until 2023.

Tabel Daftar Entitas Anak, Cucu-Cicit, Asosiasi dan Ventura Bersama
Table of List of Subsidiaries, Second to Third-Tier Subsidiaries, Associates and Joint Ventures

No	Nama Perusahaan Company Name	Tanggal Pendirian Date of Establishment	Status Operasi Operation Status	Penyertaan Per Tahun 31.12.NP 31.12.NP Group Ownership		Bidang Usaha Line of Business
				Penyertaan Modal Capital Investment	%	
Entitas Anak Subsidiary Entities						
1	PT Pembangkitan Jawa Bali Services (PJBS)	30 Maret 2006 March 30, 2006	Beroperasi Operating	Rp100,0 miliar Rp100.0 billion	99,00%	Jasa operasi dan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik dan pembangkitan/penyimpanan) perusahaan ketenagalistrikan Operation and maintenance services of power plants and commission (evacuation) of electricity customers
2	PT Arsadaya Daerah Jaya (AD)	10 Oktober 2022 October 10, 2022	Beroperasi Operating	Rp710,7 miliar Rp710.7 billion	99,00%	Engineering, pengadaan dan konstruksi, dan operasi dan pemeliharaan sistem ketenagalistrikan Engineering, procurement and construction, as well as operation and maintenance of the electricity system
3	PT Nusipil Innovative Indonesia (NII)	11 Oktober 2022 October 11, 2022	Beroperasi Operating	Rp982,0 miliar Rp982.0 billion	72,97%	Investasi pada pembangkit EBT Investment in EBT power plant
4	PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PJBI)	18 Desember 2015 December 18, 2015	Beroperasi Operating	Rp4,39 triliun Rp4.39 trillion	100,00%	Investasi pada pembangkit EBT ketenagalistrikan Investment in EBT electricity power plant
5	PT Prima Layanan Nusa Cadeking (PLNSC)	16 Juni 2017 June 16, 2017	Beroperasi Operating	Rp79,0 miliar Rp79.0 billion	51,00%	Pengadaan suku cadang Provision of spare parts for Power Plant
Entitas Cucu-Cicit Second to Third-Tier Subsidiary Entities						
1	PT Ultra Energi Prima (UEP)	22 September 2021 September 22, 2021	Beroperasi Operating	Rp2,5 miliar Rp2.5 billion	51,00%	Pengadaan EBT untuk PJBI Provision of EBT for PJBI
2	PT Prima Power Nusantara (PPN)	18 Juni 2018 June 18, 2018	Beroperasi Operating	Rp125 miliar Rp125 billion	100,00%	Engineering, pengadaan dan konstruksi, dan operasi dan pemeliharaan sistem ketenagalistrikan Engineering, procurement and construction, as well as operation and maintenance of the electricity system
3	PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PJBI) Investasi	7 Juli 2020 July 7, 2020	Beroperasi Operating	Rp213,0 miliar Rp213.0 billion	100,00%	Penyelesaian investasi di pengadaan listrik Investment placement in electricity procurement
4	PT Pembangkitan Jawa Bali Energi Investasi Cirata (PJBIC)	7 Juli 2020 July 7, 2020	Beroperasi Operating	Rp200,0 miliar Rp200.0 billion	100,00%	Pelaksanaan aksi korporasi penyertaan modal dan usaha Financing in the form of capital investment and ownership of business

No.	Nama Perusahaan Company Name	Tanggal Pendirian Date of Establishment	Status Operasi Operation Status	Kepemilikan Saham PLN (%) PLN Ownership		Bidang Usaha Line of Business
				Penyertaan Modal Capital Investment	%	
Entitas Asosiasi Associated Entities						
1.	PT Cikarang Listrindo (Listrindo)	22 Mei 2003 May 22, 2003	Beroperasi Operating	Rp537,5 miliar Rp537.5 billion	25,00%	Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU Cikarang Unit 1,2,3, Cikarang Unit 4) Steam power plant (PLTU Cikarang CFPP Unit 1,2,3, Unit 4 Expansion)
2.	PT Paiton Energy (Paiton)	21 Februari 2011 February 21, 2011	Beroperasi Operating	Rp214,8 triliun Rp214.8 trillion	30,00%	Pembangkit Tenaga Listrik Electric Power Generation
3.	PT Cirebon Energi Prasarana (CEPR)	8 Juni 2010 June 8, 2010	Tahap Pengembangan Development Stage	Rp2.307 miliar Rp2,307 billion	10,00%	Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU IPP Cirebon Unit 1, 2) (1.100 MW) Steam power plant (IPP Cirebon Unit 1, 2) (1,100 MW)
Entitas Ventura Bersama Joint Venture Entities						
1.	PT Cirebon Electric Power (CEP)	30 Oktober 1995 October 30, 1995	Beroperasi Operating	Rp1.865,5 miliar Rp1,865.5 billion	30,00%	Pembangkit listrik tenaga air (IPP PLTA Asahan 1) (180 MW) Hydro power plant (IPP Asahan 1) (180 MW)
2.	PT Bukit Pembangkit Innovative (BPI)	10 Agustus 2009 August 10, 2009	Beroperasi Operating	Rp327,1 miliar Rp327.1 billion	40,00%	Pembangkit listrik tenaga uap (IPP PLTU Banjarsari Unit 1-2) (2x110 MW) Steam power plant (IPP Banjarsari Unit 1-2) (2x110 MW)
3.	PT Synergy Pembangkitan Jawa Bali (SPJB)	30 September 2010 September 30, 2010	Beroperasi Operating	Rp112 miliar Rp112 billion	49,00%	Jasa operasi dan pemeliharaan PLTU Tanjung Jati B Unit 5-6 (2x660 MW) Operation and maintenance services of Tanjung Jati B Unit 5-6 (2x660 MW)
4.	PT Sarana Pembangkitan Jawa Bali (SPBS)	23 Januari 2018 January 23, 2018	Beroperasi Operating	Rp1,82 miliar Rp1.82 billion	30,00%	Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU Jawa 7) (2x1.000 MW) Steam power plant (Jawa 7) (2x1,000 MW)
5.	PT Cirebon Power Service (CPS)	23 September 2016 September 23, 2016	Beroperasi Operating	Rp1,89 miliar Rp1.89 billion	30,00%	Jasa operasi dan pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik (PLTU Jawa 7) (2x1.000 MW) Operation and maintenance services of Power Plant (2x1,000 MW)
6.	PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PJBI)	7 Juli 2020 July 7, 2020	Tahap Pengembangan Development Stage	Rp112,7 miliar Rp112.7 billion	51,00%	Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS Tanjung Cinta) (145 MW) Solar power plant (Cinta Floating) (145 MW)
7.	PT Nusantara Power (NP)	30 April 2020 April 30, 2020	Tahap Pengembangan Development Stage	[illegible] [illegible]	25,00%	Pembangkit listrik tenaga air (PLTA Batang Toru) (510 MW) Hydro power plant (Batang Toru) (510 MW)

Profil dan Kilas Kinerja Entitas Anak, Cucu-Cicit, Asosiasi dan Ventura Bersama

Profile and Performance Overview of Subsidiaries, Second to Third-Tier Subsidiaries, Associates and Joint Ventures

Seluruh entitas yang tergabung dalam Grup PLN NP turut andil mendukung Perusahaan meningkatkan kontribusi pada industri pembangkitan tenaga listrik.

All entities that are members of the PLN NP Group participate in supporting the Company to increase its contribution to the electric power generation industry.

Profil dan Kilas Kinerja Entitas Anak

Profile and Performance Overview of Subsidiaries

PT Pembangkitan Jawa Bali Services (PJBS)

PJBS merupakan entitas anak PLN NP yang bergerak di bidang pemeliharaan pra operasi dan pemeliharaan pembangkit listrik, pengelolaan persediaan suku cadang/material, dan pembangunan atau pemasangan peralatan tenaga listrik. PJBS didirikan pada tanggal 30 Maret 2001 dengan persentase kepemilikan saham oleh PLN NP sebesar 99,00%.

PJBS is a subsidiary entity of PLN NP which is engaged in the provision of operation and maintenance services of power plants, procurement of electricity equipment, and construction or installation of electrical energy equipment. PJBS was established on March 30, 2001, with the percentage of share ownership by PLN NP of 99.00%.

Alamat Kantor Pusat/Head Office Address	Alamat Kantor Perwakilan/Representative Office Address
Jl. Raya Juanda No. 17 Gresik 61263	Jl. Tebet Utara VI A/6, Tebet Timur, Jakarta Selatan 12810 info@pjbservices.com www.pjbservices.com

Dewan Komisaris/Board of Commissioners		Direksi/Board of Directors	
Komisaris Utama President Commissioner	Supangkat Iwan Santoso	Direktur Utama President Director	Teguh Widyantin
Komisaris Commissioner	Fatma Handayani	Direktur Perencanaan dan Pemasaran Director of Planning and Marketing	I Nyoman Aryadana
Komisaris/Commissioner	Kuryanti	Direktur Keuangan/Director of Finance	Rudy Pantarto
Komisaris/Commissioner	I Nyoman Ngurah Widyatmaja	Direktur Hukum/Director of Legal	Lian Gunawidjaja
		Direktur Operasi & Pemeliharaan Director of Operation & Maintenance	Purwanto Adi Agung
		Direktur Human Capital Director of Human Capital	Muhammad Ibrahim

Kinerja Keuangan Tahun 2020-2022 (Rp miliar)/Financial Performance in 2020-2022 (Rp billion)

Uraian/Description	2021	2022	2023
Jumlah Aset/Total Assets	2.388,27	2.304,53	2.702,58
Pendapatan Usaha/Revenue	2.712,74	2.883,00	3.178,88
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan/Net Profit (Loss) for the Year	130,68	133,66	187,38

PT Rekadaya Elektrika (RE)

RE merupakan anak/cucu anak PLN NP yang bergerak di bidang Engineering, Procurement and Construction (EPC) untuk ketenagalistrikan yang melaksanakan pembangunan pembangkitan, serta fasilitas transmisi dan distribusi. RE berdiri sejak 28 Oktober 1988 dengan nama PT Usaha Rekadaya Mandiri yang kini telah berganti nama menjadi PT Rekadaya Elektrika setelah PLN NP masuk sebagai pemegang saham pada 22 Desember 2002 dengan prosentase kepemilikan saham oleh PLN NP sebesar 99,00%.	RE is a subsidiary entity of PLN NP which is engaged in Engineering, Procurement and Construction (EPC) in the electricity sector which carries out the construction of electric power generation, as well as transmission and distribution facilities. RE was established on October 28, 1988 under the name PT Usaha Rekadaya Mandiri which later changed its name to PT Rekadaya Elektrika after PLN NP joined as a shareholder on December 22, 2002, with the percentage of share ownership by PLN NP of 99.00%.

Alamat Kantor Pusat
Head Office Address

Gedung 10 Office Park Building 10 Office Park
Jl. TB Simatupang No.18, RT.10/RW.5, Kebagusan, Kec. Pasar Minggu,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12520
(+62-21) 2787 8000
rekadaya@rekadaya.com
www.rekadaya.co.id

Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors	
Komisaris Utama President Commissioner	Afdhil Loetan Indudha	Direktur Utama President Director	Ikhlas HP Nasution
Komisaris Commissioner	Jadi Rahmono	Direktur Divisi 1 Director of Business 1	Indrayoga Subekti
Komisaris Commissioner	Ahmad Sudarno	Direktur Keuangan, SDM & Umum Director of Finance, HR & General Affairs	Dimy Ahmaji
Komisaris Commissioner	Achmad Fachruddin	Direktur Divisi 2 Director of Business 2	Nur Hidayat
		Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha Director of Marketing and Business Development	Hikmat Sugiarkhas Tampubolon

Kinerja Keuangan Tahun 2020-2022 (Dalam miliar)
Financial Performance in 2020-2022 (By billion)

Uraian Description	2020	2021	2022
Jumlah Aset/ Total Assets	1.883,39	1.683,99	1.511,51
Pendapatan Usaha/ Revenue	640,01	583,04	1.200,35
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan/ Net Profit (Loss) for the Year	3,09	3,15	0,96

PT Navigat Innovative Indonesia (NII)

NII merupakan entitas anak PLN NP yang bergerak di bidang pembangkit, konstruksi dan pertambangan. NII didirikan pada 21 Oktober 2021 dan PLN NP/PLN NPS murni menjadi pemegang saham NII sejak 13 Januari 2022. Kegiatan usaha NII saat ini berupa penyertaan saham sebesar 15,10% di PT Bukit Pembangkit Innovatif (BPI) sebagai pengembang 9/9 PLTU Sanpanan 2 (2 GW serta pengembangan beberapa proyek pembangkit di wilayah Sumatera. Penyertaan kepemilikan sebesar NII sisa PLN NP sebesar 72,97%.

NII is a subsidiary entity of PLN NP which is engaged in trading, construction and mining. NII was established on October 21, 2021 and PLN NP/PLN NPS has become a shareholder of NII since January 13, 2022. NII's current business activities are in the form of 15.10% share investment in PT Bukit Pembangkit Innovatif (BPI) as the developer of PLTU 2x110 MW Sanpanan 2 (2 GW and the development of several power plant projects in the Sumatra region. The percentage of NII share ownership by PLN NP is 72.97%.

Alamat Kantor Pusat Head Office Address	
Jl. Kembang Jaya No. 11, Surabaya 60121 (+62 31) 6283 380 s.d. 386 (+62 31) 6280 383	
Dewan Komisaris Board of Commissioners	**Direksi** Board of Directors
Komisaris Commissioner: Doni Susanto	Direktur Utama President Director: Lukuk S. Andayani
Komisaris Commissioner: M. Isnan Shalonis	Direktur Director: Dr. Andri

Ringkasan Kinerja Tahun 2020-2022 (Rp miliar)
Financial Performance in 2020-2022 (Rp billion)

Uraian Description	2020	2021	2022
Jumlah Aset / Total Assets	316,70	39.682	485,66
Pendapatan Usaha Revenue	17,01	17,09	51,07
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	16,66	17,06	51,07

PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PJBI)

PJBI merupakan entitas anak PLN NP yang berfokus pada investasi di bidang pembangkit tenaga listrik, transmisi pembangkit tenaga listrik, O&M pembangkit dan usaha penunjang pembangkit tenaga listrik, perniagaan dan penyalur batubaginstribusi, penyediaan energi primer dan transportasinya, serta pembangunan pembangkit pembangkit listrik. PJBI didirikan pada tanggal 18 Desember 2013 dengan persentase kepemilikan oleh PLN NP sebesar 100,00%.

PJBI is a subsidiary entity of PLN NP which focuses on investment in power plant, power plant facilities, O&M of power plant and power plant supporting business, transportation and equipment of electricity, supply of primary energy and its transportation, as well as trading of power plant equipment. PJBI was established on December 18, 2013 with the percentage of ownership by PLN NP of 100.00%.

Alamat Kantor Pusat Head Office Address	Alamat Kantor Perwakilan Representative Office Address
Gedung 18 Office Park, Jl. R2 Building, 18 Office Park, 18th Floor Jl. Taman Rasuna Blok A, Kel. Kuningan Timur Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta 12520 (+62 21) 783 93366 - info@pjbinvest.com www.pjbinvest.com	PT PLN Nusantara Power, Gedung B Building II Jl. Kembang Baru No. 13 Surabaya 60213, Indonesia (+62 31) 808 8188 (+62 31) 808 8183 kdw@pjbinvest.com

Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors	
Komisaris Utama President Commissioner	Heru Setiabudiawan	Direktur Utama President Director	Arso Yasasi
Komisaris Commissioner	Nadalan Simbolon	Direktur Operasi Director of Operation	Wirawan
Komisaris Commissioner	Suaria Widhyantoro	Direktur Keuangan Director of Finance	Yoni Sidiknga

Kinerja Keuangan Tahun 2020–2022 (Rp miliar)
Financial Performance in 2020–2022 (Rp billion)

Uraian Description	2020	2021	2022
Jumlah Aset Total Assets	9.196,39	9.405,41	9.662,65
Pendapatan Usaha Revenues	989,11	998,85	999,09
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	449,44	799,89	1.003,27

PT Prima Layanan Suku Cadang (PLNSC)

PLNSC

PLNSC merupakan entitas anak PLN NP yang bergerak di bidang penyediaan suku cadang pembangkit dari pabrikan, reverse engineering, standardisasi dan product catalogue database. PLN SC didirikan pada tanggal 30 Juni 2017 dengan penyertaan (operasional) saham oleh PLN NP sebesar 10.000.

PLNSC is a subsidiary entity of PLN NP which is engaged in the provision of spare parts for power plants from manufacturers, reverse engineering, standardization and product catalogue database. PLN SC was established on June 30, 2017 with the participation of shares owned (by) PLN NP of 10.000.

Alamat Kantor Pusat Head Office Address	Alamat Kantor Perwakilan Representative Office Address
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18 Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12930 cmren@plnsc.co.id www.plnsc.co.id	Perapihal Building, 2nd Floor Jl. Adhiyaksa Raya No. 10, Jakarta Selatan DKI Jakarta 12130 (+62 21) 8370 8750/52 (+62 21) 8370 8763

Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors	
Komisaris Commissioner	Sudra Haryono Wahyo Sudjati	Direktur Utama President Director	Yhormin Hasiosan
Komisaris Commissioner	Rujahul Hikhan	Direktur Bisnis dan Keuangan Director of Business and Finance	Hifdhul Huda
		Direktur Engineering & Layanan Director of Engineering & Service	Andy Adam

Kinerja Keuangan Tahun 2020-2022 (Dalam miliar)
Financial Performance in 2020-2022 (Rp billion)

Uraian Description	2022	2021	2020
Jumlah Aset *Total Assets*	200.44	203.77	210.44
Pendapatan *Usaha Revenues*	350.52	352.04	368.51
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan *Net Profit (Loss) for the Year*	51.83	51.82	70.89

Profil dan Kilas Kinerja Entitas Cucu-Cicit
Profile and Performance Overview of Second to Third-Tier Subsidiaries

PT Mitra Karya Prima (MKP)

MKP merupakan entitas anak dari PJBI, yang bergerak di bidang pengelolaan tenaga uap atau SUAP untuk O&M pembangkit listrik. MKP didirikan pada tanggal 13 September 2004 dengan persentase kepemilikan sebesar 99,00% atau sebesar 50.287.

MKP is a subsidiary entity of PJBI, which is engaged in the provision of labor or 'Hi-Ho' (SUAP) of power plants. MKP was established on September 13, 2004 with the percentage of PJBI share ownership of 99.00% or

Alamat Kantor Pusat
Head Office Address

Lands Business Center (LBC) Blok A, Ruko A-1 & A-2
Jl. Raya Lands No. 1, Cakung, Jawa Timur 61253
(+62 21) 4648181
(+62 21) 4648188
info@mitrakaryaprima.com
www.mitrakaryaprima.com

Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors	
Komisaris Utama President Commissioner	Hamzulkar	Direktur Utama President Director	Hendra Herlanter Hendi
Komisaris Commissioner	Rizki Ida Damayanti	Direktur SDM dan Keuangan Director of HR and Finance	Lisa Anita
Komisaris Commissioner	Eny Wahyuni Sulistri	Direktur Perencanaan & Operasi Director of Planning & Operation	Daniel Zuprianto

Kinerja Keuangan Tahun 2020-2022 (Rp miliar)
Financial Performance in 2020-2022 (Rp billion)

Uraian Description	2020	2021	2022
Jumlah Aset Total Assets	123.08	151.07	167.59
Pendapatan Usaha Revenues	295.15	303.04	336.02
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	23.51	21.47	21.85

PT Prima Power Nusantara (PPN)

PPN merupakan entitas anak dari PJI yang bergerak di bidang Engineering, Procurement and Construction (EPC) sudah beroperasi/aktivitas yang meliputi aktivitas pembangunan pembangkitan, serta kualitas transmisi dan distribusi. PPN didirikan pada 18 Juni 2018 (Tanda Tangan) 28 Juli 2021, PPN mengakuisisi PPN dengan persentase kepemilikan saham oleh PJI sebesar 100,00%.

PPN is a subsidiary entity of PJI which is engaged in Engineering, Procurement and Construction (EPC) in the currently under which carries out the construction of electric power generation, as well as transmission and distribution facilities. PPN was established on June 18, 2018 (Signing) July 28, 2021, PJI acquired PPN with the percentage of share ownership by PJI of 100.00%.

Alamat Kantor Pusat
Head Office Address

Jl. Ujung Kaya, Hawker Pinang,
Kelurahan Lama, Jakarta Selatan

Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors	
Komisaris Commissioner	Mohammad Sufyan	Direktur Utama President Director	Yanmar
		Direktur Director	Sahat Hengkyanmoden
		Direktur Director	Abdul Fadli

Kinerja Keuangan Tahun 2020–2022 (Tiga terakhir)
Financials (Tiga terakhir) in 2020-2022 (Last 3 years)

Uraian Description	2020	2021	2022
Jumlah Aset/Total Assets	277.67	340.39	386.11
Pendapatan Usaha/Revenue	289.51	334.21	342.32
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan/Net Profit (Loss) for the Year	4.58	10.05	4.89

PT Pembangkitan Jawa Bali Investindo (PJBI Investindo)

PJBI Investindo merupakan entitas anak dari PJBI yang bergerak di bidang pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dan usaha pengadaan listrik. PJBI Investindo didirikan pada tanggal 7 Juli 2015 dengan persentase kepemilikan saham oleh PJBI sebesar 100.00%.

PJBI Investindo is a subsidiary entity of PJBI which is engaged in financing in the form of capital investment and electricity procurement business. PJBI Investindo was established on July 7, 2015 with the percentage of share ownership by PJBI of 100.00%.

Alamat Kantor Pusat
Head Office Address

Gedung 18 Office Park, Jl. BSD Boulevard Barat Blok 18 Office Park, 19th Floor
Jl. Tol Simatupang No.18, RT.10/RW.3, Kelapa Dua
Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan
(+62) 21 1053 42353

Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors	
Komisaris Commissioner	Irene Diana Putri	Direktur Director	Rahmat Priadiyo

Kinerja Keuangan Tahun 2020–2021 (Rp miliar)
Financial Performance in 2020–2021 (Rp billion)

Uraian Description	2020	2021	2022
Jumlah Aset Total Assets	-	31.75	121.39
Pendapatan Usaha Revenues	-	(23.64)	31.20
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	-	(27.41)	33.20

PT Pembangkit Jawa Baskara Investasi Cirata (PJBIC)

PJBIC

PJBIC merupakan entitas anak dari PJBI yang bergerak di bidang pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dan usaha penyediaan listrik. PJBIC didirikan pada tanggal 7 Juli 2020 dengan persentase kepemilikan saham oleh PJBI sebesar 100,00%

PJBIC is a subsidiary entity of PJBI which is engaged in financing in the form of capital investment and electricity procurement business. PJBIC was established on July 7, 2020 with the percentage of share ownership by PJBI of 100.00%

Alamat Kantor Pusat
Head Office Address

Gedung 32 Office Park, Lt. 30 Gedung 32 Office Park, DP Town
JL. TB Simatupang No.1A, RT.2/RW.3, Kebagusan
Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan
(+62 21) 783 41333

Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors	
Komisaris Commissioner	Hikma Fitrianta	Direktur Director	Henry Hisa Siagian

Kinerja Keuangan Tahun 2020-2022 (Rp miliar)
Financial Performance in 2020-2022 (Rp billion)

Uraian Description	2020	2021	2022
Jumlah Aset Total Assets		10,91	1013,91
Pendapatan Usaha Revenues	-	3,55	68,57
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	-	(7,94)	65,85

Profil dan Kilas Kinerja Entitas Asosiasi
Profile and Performance Overview of Associated Entities

PT Sumber Segara Primadaya (S2P)

S2P merupakan entitas asosiasi PLN EPI dengan persentase kepemilikan saham sebesar 49,00%. S2P bergerak di bidang penyediaan tenaga listrik (IPP) dengan menggunakan pembangkit listrik tenaga uap Cilacap 2x315 MW yang beroperasi komersial pada 2 September 2008, Unit 3 dengan kapasitas 1.600 MW yang beroperasi komersial pada Juni 2018, dan Unit 4A dengan kapasitas 1.100 MW yang beroperasi komersial pada tanggal 9 November 2018.

S2P is an associate entity of PLN EPI with the percentage of share ownership of 49.00%. S2P is engaged in the provision of electricity (IPP) by operating the 2x315 MW Cilacap steam power plant which commercially operated on September 2, 2008, Unit 3 with a capacity of 1x600 MW which commercially operated in June 2018, and Unit 4A with a capacity of 1x1,000 MW which commercially operated on November 9, 2018.

Alamat Kantor Pusat Head Office Address	Alamat Kantor PLTU Cilacap Cilacap CFPP Office Address
Treasury Tower lt. 30 Treasury Tower, 30th Floor SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta, 12190 (+62 21) 2512 6000 (+62 21) 2512 6000 sekretariat@sumberdaya.co.id www.sumberdaya.co.id	Jl. Lingkar Timur Kawang Kandri, Kec. Kesugihan, Cilacap, Jawa Tengah

Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors	
Komisaris Commissioner	Edwin Nasir	Direktur Utama President Director	Agus Hudaidhyadi
Komisaris Commissioner	Mohamad Abdulyadi Jasin	Direktur Teknologi & Operasi Director of Technology & Operation	Iwan Ismail
Komisaris Commissioner	Agus Sugia Hartadi	Direktur Keuangan & Umum Director of Finance & General Affairs	Lilhatasyah Gultiaz
Komisaris Commissioner	Gunawan Yudi Hariyanto		
Komisaris Commissioner	Retnowidiarso Partodirdjo		

Kinerja Keuangan Tahun 2020–2022 (Rp miliar)
Financial Performance in 2020–2022 (Rp billion)

Uraian Description	2020	2021	2022
Jumlah Aset Total Assets	17.324,71	19.561,59	19.361,54
Pendapatan Usaha Revenues	13.738,63	13.113,08	13.167,95
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	1.882,39	1.913,34	924,39

PT Rekind Daya Mamuju (RDM)

RDM merupakan entitas asosiasi dari PJB dengan persentase kepemilikan saham sebesar 10,00%. RDM didirikan pada tanggal 23 Februari 2013 dengan bidang usaha sebagai pengelola PLTU Mamuju 3x25 MW yang telah COD sejak tanggal 30 September 2016.	RDM is an associated entity of PJB with the percentage of share ownership of 10.00%. RDM was established on February 23, 2013 with a business field as the manager of the 3x25 MW Mamuju CFPP which has been COD since September 30, 2016.

Alamat Kantor Pusat Head Office Address	Alamat Kantor PLTU/Kantap Mamuju CFPP Office Address
Gedung Kuota Lt. 4 Kuota Building 4th Floor Jl. HR. Haryono Kav 37, Jakarta Selatan Jakarta 12130 (+62 21) 8378 7760/8378 0383 (+62 21) 8301 578 info@pln.co.id www.pln.co.id	Dusun Telaba, Ds. Simanga-Bolang Kec. Tobadak, Kab. Mamuju Sulawesi Barat

Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors	
Komisaris Utama President Commissioner	Dady Sharidi	Direktur Utama President Director	Dani Hidayatullah
Komisaris Commissioner	Hari Samsi Trisaksi	Direktur Keuangan Director of Finance	Harry Yardimar
		Direktur Operasi Director of Operations	Abdulkadir Sani

Kinerja Keuangan Tahun 2020-2022 (USD)
Financial Performance in 2020-2022 (USD)

Uraian Description	2020	2021	2022
Jumlah Aset/ Total Assets	122.214.951	110.000.700	177.151.511
Pendapatan Usaha/Revenue	18.971.570	20.907.540	21.695.760
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan/Net Profit (Loss) for the Year	1.370.627	(1.205.077)	2.175.799

PT Sumbagselenergi Sakti Pewali (SS Pewali)

SSP merupakan entitas asosiasi PHE sebagai KSO PLTU MT Sumbagsel 1 2x150 MW yang diaktifkan pada tanggal 8 Juni 2018 dengan persentase kepemilikan sebesar PHE sebesar 10.00%. Dengan dengan akhir tahun 2022, SS Pewali masih dalam tahap pengembangan.

SSP is an associated entity of PHE as KSO of MT Sumbagsel 1 2x150 MW CFPP refurbished on June 8, 2018 with the percentage of PHE's share ownership of 10.00%. Until the end of 2022, SS Pewali is still in the development stage.

Alamat Kantor Pusat Head Office Address	Alamat Unit Unit Address
CPC Tualang Jl. Cabang Jaral No. 20-22 Jakarta Pusat	Kec. Sumbang Ka Kab. Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan

Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors	
Komisaris Utama President Commissioner	Zaun Kam	Direktur Utama President Director	Hakim Nasution
Komisaris Commissioner	Muhammad Abdullah Jaun	Direktur Director	Hilfakur Rahman
Komisaris Commissioner	Yasin Rizal	Direktur Director	Zhou Lin
Komisaris Commissioner	Arif Idaris	Direktur Director	Ivony Salim

Kinerja Keuangan Tahun 2020–2022 (Konsolidasi)
Financial Performance in 2020-2022 (By Million)

Uraian Description	2020	2021	2022
Jumlah Aset Total Assets	1.138,39	1.170,13	1.493,24
Pendapatan Usaha Revenues	-	-	-
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	1,53	(0,73)	33,87

Profil dan Kilas Kinerja Ventura Bersama
Profile and Performance Overview of Joint Ventures

PT Bajradaya Sentranusa (BDSN)

BAJRADAYA

BDSN merupakan perusahaan patungan yang bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik Independent Power Producer (IPP) menggunakan PLTA Kretam-1 2x80 MW. BDSN didirikan pada tanggal 30 Oktober 2015 dan PBI mulai beroperasi/penyegang sahan pada tanggal 30 November 2018 dengan persentase kepemilikan saham oleh PLN NP sebesar 30,01%.

BDSN is a joint venture entity of PLN NP which is engaged in the provision of Independent Power Producer (IPP) electricity, operating Kretam-1 2x80 MW HPP. BDSN was established on October 30, 2015, and PBI entered as a shareholder on November 30, 2018 with the percentage of share ownership by PLN NP of 30.01%.

Alamat Kantor Pusat
Head Office Address

Jl. Wijaya III No. 2 Kebayoran Baru, Jakarta 12330
(+62 21) 7202 317
bdsn.mn@bajradaya.com
www.bajradaya.com

Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors	
Komisaris Utama President Commissioner	Yanti Irawati	Direktur Utama President Director	Sumarto Thongsiore
Komisaris Commissioner	Klan Fonsky Kerrisfari	Direktur Keuangan Director of Finance	Kenan Satru
Komisaris Commissioner	Sarwono Kusumaatmaja	Direktur (General & Administration) Director (General & Administration)	Satichai Chaiyasan
Komisaris Commissioner	Mentrus Tanthasang		
Komisaris Commissioner	Prana Rashgantini		

Kinerja Keuangan Tahun 2020–2022 (USD)
Financial Performance in 2020–2022 (USD)

Uraian Description	2020	2021	2022
Jumlah Aset/ Total Assets	27.324.171	107.805.02	107.759.961
Pendapatan Usaha/ Revenue	11.700.02	46.475.40	47.08 1.246
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan/ Net Profit (Loss) for the Year	1.001.20	23.007.40	20.600.920

PT Bukit Pembangkit Innovative (BPI)

BPI merupakan entitas ventura bersama (*Joint Venture*) yang bergerak di bidang pembuatan fungsi bisnis BPI dengan menyepakatkan PLTA Batangtoru 3 x 210 MW di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. BPI didirikan pada tanggal 28 Agustus 2020 dengan persentase kepemilikan saham PLN NP sebesar 95,25%.	BPI is a joint venture entity of PLN NP which is engaged in the provision of BPI business by operating the 3 x 210 MW Batangtoru (TPP) in Lahat Regency, South Sumatra. BPI was established on August 28, 2020 with the percentage of PLN NP's share ownership of 95.25%.
Alamat Kantor Pusat Head Office Address	**Alamat Kantor PLTU Batangtoru** Batangtoru (TPP) Office Address
Graha Surveyor Indonesia Building, Lt. 17, Suite 1701 Jl. Jend. Sudut Sudirman No. 86., Jakarta 12550 (+62 21) 5212 805/ 6212 670 (+62 21) 5212 725 investor.r@bpi-ppi.com www.bpi-ppi.com	Jl. Lintas Timpah Sumatera Desa Gedi Pulau & Desa Gunung Kembang

Dewan Komisaris Board of Commissioners		**Direksi** Board of Directors	
Komisaris Utama *President Commissioner*	Sri Andini	Direktur Utama *President Director*	Wibisono
Komisaris *Commissioner*	Handy Triyanto	Direktur Keuangan & Umum *Director of Finance & General Affairs*	Wibisono
Komisaris *Commissioner*	Dodi Hardianto	Direktur Produksi dan Niaga *Director of Production and Commerce*	Ompang Rudo Hasiholan

Kinerja Keuangan Tahun 2020–2022 (Rp miliar)
Financial Performance in 2020–2022 (Rp billion)

Uraian *Description*	2020	2021	2022
Jumlah Aset *Total Assets*	643.516.826	582.726.86	852.160.841
Pendapatan Usaha *Revenues*	58.838.887	11.737.20	74.562.982
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan *Net Profit (Loss) for the Year*	(3.377.502)	(9.059.62)	31.192.436

PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali (KPJB)

KPJB merupakan entitas ventura bersama PLN NP yang bergerak di bidang jasa O&M, coal handling, jetty dan port management pada PLTU Tanjung Jati B Unit 3 & 4 yang berkapasitas 2x660 MW. KPJB didirikan pada tanggal 24 November 2010 dengan persentase kepemilikan saham 49,9 %.

KPJB is a joint venture entity of PLN NP which is engaged in O&M, coal handling, jetty and port management services at Tanjung Jati B Unit 3 & 4 2x660 with a capacity of 2x660 MW. KPJB was established on November 24, 2010 with the percentage of share ownership of 49.9 %.

Alamat Kantor Pusat
Head Office Address

PLTU Tanjung Jati B Jawa Tengah Unit 3 & 4 Tanjung Jati B Jawa Tengah Unit 3 & 4 CTPP
Ds. Tubanan, Kec. Kembang, Kab. Jepara, Jawa Tengah
(+62 291) 42 70 800
(+62 291) 42 0 881
www.kpjb.co.id

Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors	
Komisaris Utama President Commissioner	Dadi Apriyanto	Direktur Utama President Director	Kim Yun Kyu
Komisaris Commissioner	Adi Sukhasan	Direktur Director	Yabani Mamudin
Komisaris Commissioner	Park Kyung Woo	Direktur Director	Kunto Wibisono
Komisaris Commissioner	Kang Hee Gunt		

Kinerja Keuangan Tahun 2020-2022 (Rp miliar)
Financial Performance in 2020-2022 (Rp billion)

Uraian Description	2019	2021	2022
Jumlah Aset Total Assets	385,39	355,73	394,77
Pendapatan Usaha Revenues	229,64	230,55	213,17
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	54,73	54,74	44,89

PT Shenhua Guo Hua Pembangkitan Jawa Bali (SGPJB)

SGPJB merupakan entitas usaha bersama (PSB yang didirikan pada tanggal 11 Januari 2018) dengan kepemilikan saham dari PBSB sebesar 30,00%. Sisanya usaha SGPJB adalah perusahaan PLTU yaitu PT PLTU Jawa 7 2x1000 MW yang telah COD sejak tahun 2019.	SGPJB is a joint venture entity of PBSB established on January 11, 2018 with the ownership of share ownership by PBSB of 30.00%. SGPJB's business field is the manager of 2 PLT namely the PT of Jawa 7 2x1000 MW CCPP which has been COD since 2019.
Alamat Kantor Pusat Head Office Address	**Alamat Unit** Unit Address
A/A. Telkom Lt. 38 A/F, Tower 'EF' Fase Jl. Letjen S. Parman Kav. 28 Jakarta Barat	Kramatwatu Kab. Serang, Banten

Dewan Komisaris Board of Commissioners		**Direksi** Board of Directors	
Komisaris Utama President Commissioner	Gunhanudin	Direktur Utama President Director	Zhao Zhigang
Komisaris Commissioner	Jakfar Gading	Direktur Director	La Lhangkun
Komisaris Commissioner	Huang Bin	Direktur Director	Ko Bambam
Komisaris Commissioner	Wu Jiaxun	Direktur Director	Gai Tabui
Komisaris Commissioner	Sun Yiding	Direktur Director	Daddy Hafruzin
Komisaris Commissioner	Wei Ali	Direktur Director	Ida Ariyanto

Kinerja Keuangan Tahun 2020-2021-2022
Financial Performance in 2020-2021-2022

Uraian Description	2020	2021	2022
Jumlah Aset Total Assets	7.137.257.541	7.292.118.234	7.257.756.970
Pendapatan Usaha Revenues	587.751.208	663.308.199	695.405.840
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	150.440.316	154.217.017	160.887.584

PT Guo Hua Taidian Pembangkitan Jawa Bali (GTPJB)

GHPJB

GHPJB merupakan entitas asosiasi bersama PJBI sebagai pemilik 15% saham PT Cirebon Energi Prasarana (CEPR) yang mengoperasikan PLTU Jawa 1 (2x1000 MW) yang dimiliki oleh PT Cirebon Power Service (CPS) dengan kepemilikan saham masing-masing sebesar 85% dan 15%.	GHPJB is a joint venture entity of PJBI as CEPR owns the 2x1000 MW Java 1 Coal-fired Power Plant which is owned by PT Cirebon Power Service (CPS) with ownership of 85% and 15%, respectively.
Alamat Kantor Pusat Head Office Address	**Alamat Unit** Unit Address
Wisma Nugra Santana Lt. 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 7-8 Jakarta Pusat	Cilegon, Banten

Dewan Komisaris Board of Commissioners		**Direksi** Board of Directors	
Komisaris Utama President Commissioner	Puspadewi	Direktur Utama President Director	Zhao Zigang
Komisaris Commissioner	Ari Ari	Direktur Director	Lu Chengjun
Komisaris Commissioner	Lu Tao	Direktur Director	Lumpat Pangkuan Unat

Kinerja Keuangan Tahun 2020-2022 (USD)
Financial Performance in 2020-2022 (USD)

Uraian Description	2020	2021	2022
Jumlah Aset/Total Assets	3,272,553	3,169,202	3,411,611
Pendapatan Usaha/Revenues	17,730,543	20,563,825	14,151,927
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan/Net Profit (Loss) for the Year	68,946	82,988	87,288

PT Pembangkitan Jawa Bali Masdar Solar Energy (PMSE)

PMSE merupakan entitas ventura bersama PJBI sebagai IPP PLTS Cirata 145 MW yang diletrikan pada tanggal 7 Juli 2020 dengan persentase kepemilikan saham PJBI sebesar 51,00%. Dengan dengan akhir tahun 2022, PMSE masih dalam tahap pengembangan.

PMSE is a joint venture entity of PJBI as the IPP of Cirata 145 MW IPP established on July 7, 2020 with the ownership of PJBI's shares amounting of 51.00%. Until the end of 2022, PMSE is still in the development stage.

Alamat Kantor Pusat Head Office Address	Alamat Unit Unit Address
Gedung 10 Office Park, Lt. 10 Building 10 Office Park, 10th Floor, Jl. Tol Jakarta-Jagorawi No.18, RT.2/RW.1, Kebagusan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan (+62 21) 783 91353	Waduk Cirata Cirata Reservoir Kab. Bandung Barat Jawa Barat

Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors	
Komisaris Utama President Commissioner	Gilarsi(ds)	Direktur Utama President Director	Hugh Pasikuni
Komisaris Commissioner	Syifu Dhaparatno	Direktur Operasi Director of Operation	Dimas Ruhiyudho Indra Rupassari
Komisaris Commissioner	Dinja Yasin Pido	Direktur Keuangan dan Administrasi Director of Finance and Administration	Alfrit Pasukan Simamora
Komisaris Commissioner	Abdulla Mohamed Abdulla Jaurel		

Ringkasan Kinerja Tahun 2020 2021 2022
Financial Performance in 2020 2021 2022

Uraian Description	2020	2021	2022
Jumlah Aset Total Assets	2.240.014	41.313.191	52.884.513
Pendapatan Usaha Revenue	-	7.102.703	10.170.500
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	616	(1.385.943)	4.012.767

PT North Sumatera Hulu Energy (NSHE)

NSHE

NSHE merupakan ventura bersama PSB sebagai IPP PLN Dalang Tiru-1x110 MW yang ditetapkan pada tanggal 30 April 2020 dengan penentuan kepemilikan saham oleh PSB sebesar 25,00%, sampai dengan akhir tahun 2022, NSHE masih dalam tahap pengembangan.

NSHE is a joint venture of PSB as the IPP of the 1x110 MW Dalang Tiru PPTF which was established on April 30, 2020 with the percentage of share ownership by PSB of 25.00%. Until the end of 2022, NSHE was still in the development stage.

Alamat Kantor Pusat Head Office Address	Alamat Unit Unit Address
Jl. Gatot Subroto No. 7 Pulo, Kebayoran Baru Jakarta Selatan	Kab. Tapanuli Selatan Sumatera Utara

Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors	
Komisaris Utama President Commissioner	Zheng Kaifeng	Direktur Utama President Director	Du Yunpo
Komisaris Commissioner	Ong Tiam Seng	Direktur Keuangan Director of Finance	Zheng Shuai
Komisaris Commissioner	Ary Quyun	Direktur Urusan Luar Director of External Affairs	I Putu Yoga Wahyu Dipuka
Komisaris Commissioner	Wendy Wenie	Direktur Proyek Director of Project	Dwi Liuheng
Komisaris Commissioner	Weddi Ismadi Sulaiman	Direktur Teknik Director of Technical	Gauhar Hussi

Kinerja Keuangan Tahun 2020–2022 (USD)

Financial Performance in 2020–2022 (USD)

Uraian Description	2020	2021	2022
Jumlah Aset Total Assets	388.837.040	410.033.075	647.930.094
Pendapatan Usaha Revenues	33.030.164	36.452.977	233.076.992
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	17.702.557	15.167.212	21.986.778

Wilayah Operasional
Operational Area

Perkembangan usaha pembangkit listrik semakin kompetitif, sehingga PLN NP terus berupaya mengambil peran serta kontribusi yang semakin luas dalam mendukung ketahanan energi listrik nasional.

Development of power plant business is increasingly competitive, so that PLN NP continues to strive to take an increasingly broad role and contribution in supporting national electric energy resilience.

19.508 MW
Beroperasi
Operating

1.445 MW
Kontribusi
Under Construction

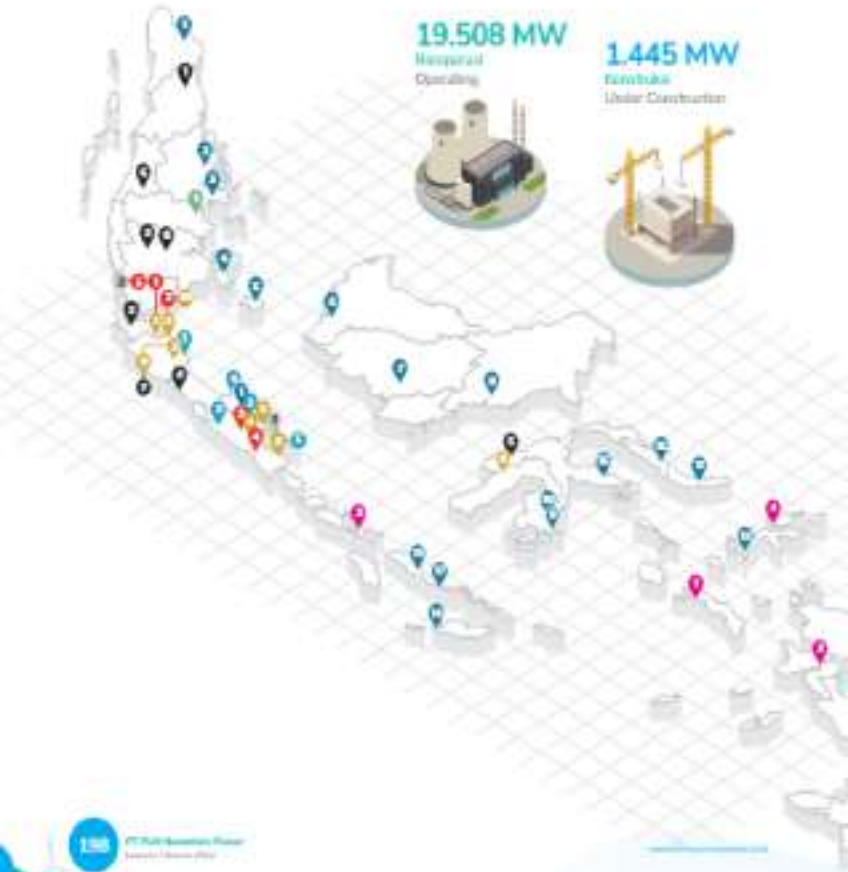

Alamat Kantor Pusat, Kantor Perwakilan dan Unit Usaha

Address of Head Office, Representative Office and Business Unit

Alamat Kantor Pusat dan Kantor Jakarta

Address of Head Office and Jakarta Office

Alamat Unit Usaha

Business Unit Address

Unit Pembangkitan (UP)
Generation Unit (GU)

Unit Pembangkitan Gresik Gresik Generation Unit Jl. Jalur Tiga, Gresik 61112 (+62 31) 3981000, 3984040 (+62 31) 3981028 ugpjt@plnnusantarapower.co.id	**Unit Pembangkitan Muara Karang** Muara Karang Generation Unit Jl. Pluit Raya Utara, Jakarta Utara 14450 (+62 21) 6620000, 6602784 (+62 21) 6608000 upmkr@plnnusantarapower.co.id	**Unit Pembangkitan Muara Tawar** Muara Tawar Generation Unit Jl. PLTGU Muara Tawar No. 1, Desa Segara Kec. Tarumo, Kab. Bekasi, Jawa Barat 17218 (+62 21) 88880000 (+62 21) 88880000 upmtwr@plnnusantarapower.co.id
Unit Pembangkitan Grati Grati Generation Unit Dk. Cedor Sari, Kec. Tegal Weru, Pasuruan, Jawa Timur 67153 (+62 343) 770810, 770818 (+62 343) 770839 upgrt@plnnusantarapower.co.id	**Unit Pembangkitan Bremas** Bremas Generation Unit Jl. Gresik Sidomoro No. 171, Kelurahan Sumurpanang, Kabupaten Gresik 61120 (+62 31) 3800145, 3800146 (+62 31) 3894422 upbrm@plnnusantarapower.co.id	**Unit Pembangkitan Paiton** Paiton Generation Unit Jl. Raya Surabaya - Banyuwangi KM 141, Kec. Paiton, Kab. Probolinggo 67291 (+62 -335) 771-8858 (+62 335) 77 8918 uppjtn@plnnusantarapower.co.id
PLTU Sugut Sugut IUPP Jl. Pramuka, Lingkungan Kabodoa, Kel. Tabumbulan, Kec. Sugut, Kab. Pantai, Sulawesi Selatan 95771 (+62 321) 23288 ulfahsabri11@gmail.com	**PLTMG Kaltim-5** Kaltim-5 IUPP Perkantoran Bersama, Sungai Pih, Tenggarong, Kalimantan Timur 75512 pltmgkaltim5@gmail.com	**PLTU Timika (Rencana/In Build)** Timika IUPP (Rencana/In Power Plant) Jln. Sultan Iskandar Muda, Kel. Timika Jaya, Kec. Mimika Baru, Kab. Mimika, Papua 99910 (+62 901) 770810, 770818 (+62 901) 770819

Unit Pemeliharaan Mesin Overhaul (UPMO)
Maintenance Engine Overhaul Unit (MEOU)

Jl. Raya Pluit Utara No. 31, Jakarta Utara 14450 (+62 21) 6620584, 6620585 (+62 21) 6613189

Unit Operation & Maintenance (UIKL)
Operation & Maintenance Unit (UIKL) Services

Unit Induk Jasa O&M (UIKL) Bandung Bandung O&M Services Business Unit (BHMBU) Jl. Raya Soreang-Ciwidey No. 102 Kec. Baleendah, Kab. Bandung 40375 (+62-22) 5941700, 5941800 (+62-22) 5941704	UIKL Kalimantan Kalimantan O&M Unit Jln. Jenderal Sudirman No.Kalsel Kota Kalimantan 70123 (+62-536) 3613200 (+62-536) 3613206	UIKL Pontianak Pontianak O&M Unit Jl. Raya Pontianak - Tanjungpura Km. 10, Dr. Sukarjo, Kec. Sukarmono, Kab. Pontianak (+62-561) 7547777 (+62-561) 7550888
UIKL Kalimantan Timur Kalimantan Timur O&M Unit Jl. Soekarno-Hatta Km. 14, Jl. Ir. Soekarno-Hatta Km. 14, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan 76131 (+62-542) 7771458 (+62-542) 7771459	UIKL Kalimantan Tengah Kota Jawa Kalimantan Tengah Jawa O&M Unit Jl. Tjilik Riwut Km. 5, Jl. Tjilik Riwut Km. 5, Dr. Sukarjo, Kec. Jawa, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112 (+62-536) 3212222 (+62-536) 3212223	UIKL Kalimantan Timur Kota Samarinda Blok 3 O&M Services of Block 3 Kota Samarinda (UJPP Blok 3 Kota Samarinda) Jl. Raya Pulau Balang Km. 9.5, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119 (+62-541) 7777777 (+62-541) 7777778 samarinda@kalimantantimur.pln.co.id
UIKL Kalimantan Timur Kota Bontang Blok 2 O&M Services of Block 2 Kota Bontang Jl. Raya Pulau Balang Km. 9.5, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119 (+62-541) 7777777 (+62-541) 7777778 samarinda@kalimantantimur.pln.co.id	UIKL Kalimantan Timur Kota Bontang Blok 3 O&M Services of Block 3 Kota Bontang Jl. Raya Pulau Balang Km. 9.5, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119 (+62-541) 7777777 (+62-541) 7777778 samarinda@kalimantantimur.pln.co.id	UIKL Kalimantan Timur Kota Bontang Blok 4 O&M Services of Block 4 Kota Bontang Jl. Raya Pulau Balang Km. 9.5, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119 (+62-541) 7777777 (+62-541) 7777778 samarinda@kalimantantimur.pln.co.id
UIKL Kalimantan Timur Kota Bontang Blok 5 O&M Services of Block 5 Kota Bontang Jl. Raya Pulau Balang Km. 9.5, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119 (+62-541) 7777777 (+62-541) 7777778 samarinda@kalimantantimur.pln.co.id	UIKL Kalimantan Timur Kota Bontang Blok 6 O&M Services of Block 6 Kota Bontang Jl. Raya Pulau Balang Km. 9.5, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119 (+62-541) 7777777 (+62-541) 7777778 samarinda@kalimantantimur.pln.co.id	UIKL Kalimantan Timur Kota Bontang Blok 7 O&M Services of Block 7 Kota Bontang Jl. Raya Pulau Balang Km. 9.5, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119 (+62-541) 7777777 (+62-541) 7777778 samarinda@kalimantantimur.pln.co.id
UIKL Kalimantan Timur Kota Bontang Blok 8 O&M Services of Block 8 Kota Bontang Jl. Raya Pulau Balang Km. 9.5, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119 (+62-541) 7777777 (+62-541) 7777778 samarinda@kalimantantimur.pln.co.id	UIKL Kalimantan Timur Kota Bontang Blok 9 O&M Services of Block 9 Kota Bontang Jl. Raya Pulau Balang Km. 9.5, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119 (+62-541) 7777777 (+62-541) 7777778 samarinda@kalimantantimur.pln.co.id	UIKL Kalimantan Timur Kota Bontang Blok 10 O&M Services of Block 10 Kota Bontang Jl. Raya Pulau Balang Km. 9.5, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119 (+62-541) 7777777 (+62-541) 7777778 samarinda@kalimantantimur.pln.co.id
UIKL Kalimantan Timur Kota Bontang Blok 11 O&M Services of Block 11 Kota Bontang Jl. Raya Pulau Balang Km. 9.5, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119 (+62-541) 7777777 (+62-541) 7777778 samarinda@kalimantantimur.pln.co.id	UIKL Kalimantan Timur Kota Bontang Blok 12 O&M Services of Block 12 Kota Bontang Jl. Raya Pulau Balang Km. 9.5, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119 (+62-541) 7777777 (+62-541) 7777778 samarinda@kalimantantimur.pln.co.id	UIKL Kalimantan Timur Kota Bontang Blok 13 O&M Services of Block 13 Kota Bontang Jl. Raya Pulau Balang Km. 9.5, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119 (+62-541) 7777777 (+62-541) 7777778 samarinda@kalimantantimur.pln.co.id
UIKL Kalimantan Timur Kota Bontang Blok 14 O&M Services of Block 14 Kota Bontang Jl. Raya Pulau Balang Km. 9.5, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119 (+62-541) 7777777 (+62-541) 7777778 samarinda@kalimantantimur.pln.co.id	UIKL Kalimantan Timur Kota Bontang Blok 15 O&M Services of Block 15 Kota Bontang Jl. Raya Pulau Balang Km. 9.5, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119 (+62-541) 7777777 (+62-541) 7777778 samarinda@kalimantantimur.pln.co.id	UIKL Kalimantan Timur Kota Bontang Blok 16 O&M Services of Block 16 Kota Bontang Jl. Raya Pulau Balang Km. 9.5, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119 (+62-541) 7777777 (+62-541) 7777778 samarinda@kalimantantimur.pln.co.id
UIKL Kalimantan Timur Kota Bontang Blok 17 O&M Services of Block 17 Kota Bontang Jl. Raya Pulau Balang Km. 9.5, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119 (+62-541) 7777777 (+62-541) 7777778 samarinda@kalimantantimur.pln.co.id	UIKL Kalimantan Timur Kota Bontang Blok 18 O&M Services of Block 18 Kota Bontang Jl. Raya Pulau Balang Km. 9.5, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119 (+62-541) 7777777 (+62-541) 7777778 samarinda@kalimantantimur.pln.co.id	UIKL Kalimantan Timur Kota Bontang Blok 19 O&M Services of Block 19 Kota Bontang Jl. Raya Pulau Balang Km. 9.5, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119 (+62-541) 7777777 (+62-541) 7777778 samarinda@kalimantantimur.pln.co.id
UIKL Kalimantan Timur Kota Bontang Blok 20 O&M Services of Block 20 Kota Bontang Jl. Raya Pulau Balang Km. 9.5, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119 (+62-541) 7777777 (+62-541) 7777778 samarinda@kalimantantimur.pln.co.id	UIKL Kalimantan Timur Kota Bontang Blok 21 O&M Services of Block 21 Kota Bontang Jl. Raya Pulau Balang Km. 9.5, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119 (+62-541) 7777777 (+62-541) 7777778 samarinda@kalimantantimur.pln.co.id	UIKL Kalimantan Timur Kota Bontang Blok 22 O&M Services of Block 22 Kota Bontang Jl. Raya Pulau Balang Km. 9.5, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119 (+62-541) 7777777 (+62-541) 7777778 samarinda@kalimantantimur.pln.co.id
UIKL Kalimantan Timur Kota Bontang Blok 23 O&M Services of Block 23 Kota Bontang Jl. Raya Pulau Balang Km. 9.5, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119 (+62-541) 7777777 (+62-541) 7777778 samarinda@kalimantantimur.pln.co.id	UIKL Kalimantan Timur Kota Bontang Blok 24 O&M Services of Block 24 Kota Bontang Jl. Raya Pulau Balang Km. 9.5, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119 (+62-541) 7777777 (+62-541) 7777778 samarinda@kalimantantimur.pln.co.id	UIKL Kalimantan Timur Kota Bontang Blok 25 O&M Services of Block 25 Kota Bontang Jl. Raya Pulau Balang Km. 9.5, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119 (+62-541) 7777777 (+62-541) 7777778 samarinda@kalimantantimur.pln.co.id

Kegiatan Uji Coba di Independent Power Producer (IPP)

Unit Pembangkit Independent Power Producer (IPP)

PLTA Jatiluhur Waduk IPP Kantor PT Jatiluhur Sentosa Jl. Sirnagalih Gang Tanggi Blok Air, Purwakarta, Jawa Barat Hub. Pak Samsul, Samsul@xxx	PLTU Banjarmas Banjarmas IPP Jl. Lahar Tengah Sumbing Dk. Sleh Pulau 8 Kampung Kandang, Kec. Mangu Timur Hub. Lahar Tumenkes Sidabar, lahar@xxx	PLTU Unit 7 Unit 7 IPP Kantor Pusat PLTU Unit 7 Jl. Raya Bandengan, Desa Tambo Kec. Kramatwatu Kasang, Banten 42161
PLTU Cikamp Cikamp IPP Jl. Lingkar Timur Kamng Kandis Kec. Kenagaran Cikamp (+62 268) 536883 (+62 261) 536882	PLTU Mamuju Mamuju IPP Belang-Belang, Celebes, Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat 91561	PLTU Sleming Timur Sleming Timur IPP Desa Sleming, Kabupaten Tapanuli Jambo Sumatera Utara
PLTA Tenggang Cantik Cantik Hydro IPP Desa Cantik Sari, Kec. Tegak Hasa, Pesisir Tenggerang 41162 (+62 354) 270410, 270418 (+62 354) 270409	PLTU PT Sumbagan 1 MT Sumbagan 1 IPP Jl. Timang Raya 21-23, Jakarta Barat 11510 (+62 21) 63868 668 (+62 21) 63865 613	

Kegiatan Uji Coba di Perusahaan O&M

Unit Pembangkit PBM Cangkas

Tanjung Jati D #3 dan #4
Tanjung Jati D #3 dan #4
Dk. Rawasin, Kec. Jatimang, Sidagang, Tabanan, Jatimang
Hub. Agung Jaya, Bengkel 56435
(+62 59) 7721 21
(+62 36) 4275801

Divisi Pengujian

Laboratorium Kendali

PBE Academy
Jl. Raya Jatimakmur No 285, Jatimelati, Kec. Pangglik Makmur
Kota Surabaya, Jawa Timur 85197
(+62 21) 8084 3456
(+62 31) 5855 0077

Lembaga Profesi Penunjang Perusahaan

Supporting Institutions and Professions

Pada tahun 2021, PLN telah menggunakan jasa lembaga dan profesi penunjang sebagai berikut:

In 2021, PLN used the services of the following supporting institutions and professions:

Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik

Public Accounting Firm and Public Accountant

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia) Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia)		
Akuntan Publik / Public Accountant	Yanuj, S.E., Ak., M.Ak., CPA (No. AP.0961)	Yanuj, S.E., Ak., M.Ak., CPA (No. AP.0961)
Alamat / Address	WTC 3 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta 12920 - Indonesia (+62 21) 5080 5961/ 5150 5959 (+62 21) 5080 5950/ 5080 5960 www.pwc.com/id	WTC 3 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta 12920 - Indonesia (+62 21) 5080 5961/ 5150 5959 (+62 21) 5080 5950/ 5080 5960 www.pwc.com/id
Lingkup Jasa Audit / Scope of Audit Services	Audit laporan keuangan Perusahaan tahun buku 2021	Audit of the Company's financial statements for the 2021 fiscal year
Biaya Audit / Audit Fees	Rp4.000.000.000	Rp4.000.000.000
Jasa Non-Audit / Non-Audit Services	-	-
Biaya Non-Audit / Non-Audit Fees	-	-

Notaris

Notary

Lenny Janis Ishak, S.H.
Jl. Kemiri No. 1 Kebayoran Baru Jakarta 12120 (+62 21) 7231 007 (+62 21) 7231 008

Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)

Public Appraisal Services Office (PASO)

KJPP Hanggoro, Hamid & Rekan (KJPP HHR)
Menara Kuningan 5th Floor, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-7 Kav 5, Jakarta 12940 (+62 21) 5001 0001/ 2008 1240 (+62 21) 5001 0031 hamidsfeb@hhr.co.id www.kjpphhr.co.id

Konsultan Bisnis

Business Consultant

PT Pricewaterhouse Coopers Indonesia Advisory	KPMG Siddharta Advisory
Plaza 89, Lt. 11 & Jakarta Stock Exchange Tower 1, Lantai 7 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 (+62 21) 5212 901	DBS Bank Tower Lantai 28 & 30 Jl. Jend. Sudirman Jakarta 12190, Indonesia (+62 21) 5795 7700
PT Ernst & Young Indonesia	EY Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building Tower 1, Lantai 12, Tower 2, Lantai 7 Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan Jakarta 12190 (+62 21) 5158 5000	Plaza 89 Lt. 11 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 Jakarta 12190 (+62 21) 5140 1540

Kantor Konsultan Hukum
Legal Consultant Firm

[illegible]	[illegible]
Hiew Building 3rd floor, Suite 307 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta 12930 (+62 21) 5203 037	Telepon Lembaran Tower, Tower 3 45th Floor, Jakarta (+62 21) 5083 9999

Kronologis Pencatatan Saham
Chronology of Share Listing

Sampai dengan tahun 2022, PLN NP belum pernah melakukan pencatatan saham di bursa, sehingga tidak terdapat informasi terkait jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dan awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek, pencatatan saham lainnya, penggelembungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal.

As of 2022, PLN NP has never listed its shares on the stock exchange, so there is no information related to the number of shares, nominal value, and offering price from the initial listing to the end of the fiscal year as well as the name of the stock exchange, stock split, stock merger, reverse stock, stock dividend, bonus shares, and changes in the nominal value of shares, the implementation of convertible securities, the implementation of capital addition and reduction.

Kronologis Pencatatan Efek Lainnya
Chronology of Other Securities Listing

Sampai dengan tahun 2022, PLN NP belum pernah melakukan pencatatan efek dan efek lainnya di bursa, sehingga tidak terdapat informasi terkait nama efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga untuk hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran dan peringkat efek.

As of 2022, PLN NP has never listed securities and other securities on the stock exchange, so there is no information related to the name of the securities, year of issuance, interest rate/yield, maturity date, offering value and securities rating.

Keanggotaan Asosiasi
Association Membership

Sampai dengan tahun 2023, PLN Tbk tergabung dalam beberapa keanggotaan asosiasi atau organisasi sebagai berikut:

As of 2023, PLN Tbk joins several associations or organizations memberships as follows:

Tabel Keanggotaan Asosiasi
Table of Association Memberships

Nama Asosiasi/ Organisasi Name of Association/ Organization	Deskripsi Organisasi Description	Posisi Perusahaan dalam Organisasi Company Position in the Organization	Lingkup Scope
The Heads of ASEAN Power Utilities (HAPUA)	Organisasi yang terdiri dari Perusahaan Pemasok/ Penyedia Energi Listrik di negara-negara ASEAN yang terdiri dari 11 Utilities Group. Organization consisting of Electricity Supply/Provider Companies in ASEAN countries consisting of 11 Utilities Groups	Anggota Member	Internasional International
Himpunan Energi Terbarukan Indonesia (HIET)	Organisasi yang terdiri dari Perusahaan Pemasok/ Penyedia Energi Listrik yang berfokus pada pengembangan energi baru terbarukan nasional. Organization consisting of Electricity Supply/Provider Companies focusing on the development of national renewable energy	Anggota Member	Nasional National
CIGRE Indonesia – National Committee	Organisasi non-profit yang berupaya bisa memberikan visi yang berhubungan dengan pengembangan, operasi dan manajemen sistem kelistrikan termasuk rancangan, konstruksi, dan pemeliharaan sistem dalam rangka pengelolaan sistem kelistrikan nyata. Non-profit organization that focuses on issues related to the development, operation and management of electricity systems including design, construction, and maintenance in order to manage the world's electricity system.	Anggota Member	Nasional – Internasional National – International
Asosiasi Perusahaan Penyedia Listrik Nasional (APPLIN) National Association of Electricity Supply Companies (APPLIN)	Asosiasi Penyedia Listrik Nasional yang menaungi perusahaan penyedia listrik di Indonesia. The National Electricity Providers Association, which oversees the electricity providers in Indonesia.	Pendiri dan Anggota Founder and Member	Nasional National
Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN Indonesia) Indonesian Chamber of Commerce and Industry (KADIN Indonesia)	Organisasi penguasaha Indonesia yang bergerak di bidang perekonomian, berupa sumber daya. Kadin yang dan menjadi dasar kerja dan strategis untuk kegiatan bisnis, pembangunan dan investasi. Indonesian business organization engaged in the economy. Kadin's guidelines, network of business partners, interactive and strategic for business, trade and investment activities.	Anggota Member	Nasional National

Informasi pada Situs Web Perusahaan

Information on the Company's Website

Sebagai salah satu bentuk implementasi prinsip transparansi, PLN NP menyediakan situs web resmi yang menyajikan informasi yang akurat dan terkini kepada Pemegang Saham, Publik dan Pemangku Kepentingan lainnya.

In the context to realize the implementation of the transparency principle, PLN NP provides an official website that presents accurate and up-to-date information to the Shareholders, the Public and other Stakeholders.

Situs web resmi PLN NP dapat diakses pada tautan **www.plnnusantarapower.co.id** baik untuk dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Situs web Perusahaan menyajikan berbagai informasi terkini, akurat dan terkelompok untuk sesuai dengan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi bagi publik.

PLN NP has official website that can be accessed at **www.plnnusantarapower.co.id** and is available in Bahasa Indonesia and English. The Company's website presents various up-to-date, accurate and systematic information in line with the principles of transparency and information disclosure for public.

Situs web PLN NP dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat luas, memuat informasi antara lain sebagai berikut :

1. **Informasi tentang Profil Perusahaan**, memuat informasi terkait dengan Tentang Kami, Struktur Organisasi, Lini Bisnis, PLN NP Group, Pergerakan PLN NP, Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Penghargaan, Budaya Kerja, Pelanggan serta LKB & CSR.
2. **Informasi tentang Tata Kelola Perusahaan**, menyajikan berbagai informasi terkait dengan Whistle Blowing System, Anti Pemuapan, PLN NP Board, Pedoman Kerja Direksi dan Dewan, Tata Kelola Perusahaan, ESPS, Penilaian Tata Kelola Perusahaan, Pedoman Pengadaan, dan Piagam Internal Audit.
3. **Informasi Pengadaan**, menu ini berisikan pilihan informasi terkait dengan info Pendaftaran (SIKD), E-Procurement dan Register Daftar Penyedia Perusahaan (DPP).
4. **Informasi terkait Investor**, menyajikan berbagai informasi terkait dengan Laporan Tahunan, Laporan Berkelanjutan, Publikasi Press Kuangan, Webinar Data Keuangan, Laporan Keuangan Tahunan, dan Dividen Perusahaan.
5. **Informasi tentang Media**, memuat informasi terkait dengan HACCP/KAIH/BPJ Info/PLN NP, Siaparan PLN NP dan Press Release.
6. **Informasi terkait Kontak**, menu ini berisikan pilihan informasi terkait dengan Alamat Kami dan Feedback Sponsorship.

PLN NP's website can be easily accessed by the general public and includes the following information:

1. **Information related to Company Profile**, containing information related to About Us, Organizational Structure, Line of Business, PLN NP Group, PLN NP Journey, Shareholders, Board of Commissioners, Board of Directors, Awards, Work Culture, Achievements and LKB & CSR.
2. **Information related to Corporate Governance**, presenting various information related to Whistle Blowing System, Anti-bribery, PLN NP Board, Board Manual, Corporate Governance, GRC, Corporate Governance Assessment, Procurement Guidelines, and Internal Audit Charter.
3. **Information on Procurement**, containing a selection of information related to CSMS Registration Info, E-Procurement and Company Provider Register (CPR).
4. **Information related to Investors**, presenting various information related to Annual Reports, Sustainability Reports, Financial Studies Publications, Financial Data Highlights, Annual Financial Statements and Company Dividends.
5. **Information on Media**, containing information related to HACCP/KAIH/BPJ Info/PLN NP Sail Nusantara/PLN NP and Press Releases.
6. **Information related to Contact**, containing information options related to Our Address and Sponsorship Feedback.

Aspek Penting Pendukung Bisnis

Key Aspect of Business Support

Penguatan Kontribusi Sumber Daya Manusia

Strengthening Human Resources Contribution

Salah satu pilar penting dalam upaya pencapaian tujuan Perusahaan adalah kontribusi maksimal dari Sumber Daya Manusia (SDM) Perusahaan. Perkembangan dunia industri yang dinamis diperlukan adaptasi yang cepat dan tepat. Dengan latar belakang ini, PLN NP secara berkelanjutan mengelola SDM secara fokus demi memperoleh SDM yang andal dan kompetitif untuk memaksimalkan kontribusinya kepada Perusahaan.

One of the important pillars in the effort to achieve the Company's goals is the maximum contribution of the Company's Human Resources (HR). The dynamic development of the industrial world requires fast and precise adaptation. With this background, PLN NP continuously manages human resources in a focused manner in order to obtain reliable and competitive human resources to maximize their contribution to the Company.

Fungsi Pengelola Sumber Daya Manusia

Human Resources Management Function

Di tahun 2022, fungsi pengelolaan SDM di lingkungan PLN NP diatur dalam Peraturan Direksi PT Pembangkitan Jawa-Bali No. 0030.P/DIR/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Pembangkitan Jawa-Bali. Pada masa transisi sebelum berakhirnya kebijakan Holding Subholding (HSH), pengelolaan SDM ditetapkan dalam Peraturan Direksi No. 0035.P/010/DIR/2022 Ayo Aktivitas oleh Direktorat SDM dengan Divisi Sekum Human Capital & Organization, Divisi Pengembangan Talenta, dan Divisi Performance Management & Sekum Informasi Human Capital serta Unit PLN Academy.

In 2022, the HR management function within PLN NP was regulated in the Regulation of the Board of Directors of PT Pembangkitan Jawa-Bali No. 0030.P/DIR/2021 concerning the Organization and Work Procedures of PT Pembangkitan Jawa-Bali. In the transition period prior to the enactment of the Holding Subholding policy, HR management is stipulated in the Regulation of the Board of Directors No. 0035.P/010/DIR/2022 and managed by the Directorate of HR with the Human Capital & Organizational Sustains Division, Talent Management Division, and Performance Management & Human Capital Information Systems Division as well as HR Academy Unit.

Cakupan Tata Kelola Sumber Daya Manusia

Scope of Human Resources Governance

Dengan adanya kebijakan HSH, pengelolaan SDM meliputi perencanaan dan pengendalian sistem manajemen, pelatihan dan pengembangan, serta administrasi SDM diatur dalam Peraturan Direksi No. 0068.P/010/DIR/2022 tentang Kebijakan Strategis Human Experience Management System (HXMS) yang berlaku per 1 Oktober 2022 yang termodifikasi menggantikan Peraturan Direksi No. 005.P/010/DIR/2020 tentang Human Capital Management System (HCMS).

With the HSH policy, HR management including management system planning and control, training and development as well as HR administration is regulated in the Regulation of the Board of Directors No. 0068.P/010/DIR/2022 concerning Strategic Policy on Human Experience Management System (HXMS) effective as of October 1, 2022, which then replaces the Regulation of the Board of Directors No. 005.P/010/DIR/2020 concerning Human Capital Management System (HCMS).

Sistem Pengembangan Organisasi dan Perencanaan Tenaga Kerja
Manpower Organizational Development and Planning System

Pengembangan organisasi adalah perubahan strategi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang yang sesuai dengan visi, misi dan nilai misi. Perencanaan tenaga kerja digunakan sebagai dasar pelaksanaan rekrutmen yang mengacu pada kebutuhan organisasi dan Strategi Perusahaan.

Organizational development is the evaluation of short-term, medium-term and long-term strategies in accordance with the vision, mission and values. Manpower planning is used as the basis for recruitment implementation that refers to organizational needs and Company Strategy.

Sistem Rekrutmen Karyawan
Employee Recruitment System

Rekrutmen dilakukan untuk mendapatkan karyawan yang memenuhi persyaratan kompetensi yang dibutuhkan untuk mengisi formasi tenaga kerja yang lowong atau akan lowong dalam rangka mencapai konfigurasi ketenagakerjaan Perusahaan untuk mendukung operasional, peningkatan kinerja dan pencapaian strategi perusahaan.

Recruitment is conducted to obtain employees who meet the competency requirements needed to fill vacant or to be vacant Manpower Formations in order to ensure the continuity of Employee availability to support operations, improve performance and achieve the Company's vision.

Sistem Pembinaan Kompetensi dan Karir
Competency and Career Development System

Pembinaan kompetensi dan hasil karyawan telah dilakukan secara sistematis dan terus menerus untuk dapat memacu peningkatan kinerja karyawan. Pembinaan kompetensi dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria talenta yang dipetakan dan merupakan hasil penilaian kinerja serta penilaian kompetensi yang dilakukan periodik semester. Bagi karyawan yang memiliki penilaian kinerja baik akan lebih cepat mendapatkan kenaikan grade. Dalam setiap tingkatan, misalnya dibutuhkan pemahaman yang berbeda-beda dan kompetensinya akan suatu Objek Pengangan untuk mempersiapkan kompetensi dalam menjalankan tugas yang lebih tinggi. Sedangkan kesempatan lain akan akan untuk memberikan kesempatan persiapkan lain bagi karyawan yang *star performer* untuk dapat mengikuti *fast track program*. Alur penempatan karyawan dilakukan dengan mempertimbangkan penghayatan kompetensi sesuai tanggung renata melakukan career path. Untuk meningkatkan daya saing perusahaan dalam rangka memupuk kepemilikan kompetensi diberikan jalur karir kepakarkompetensi. Hal ini juga untuk memfasilitasi karyawan karyawan yang memiliki kompetensi talenta yang baik namun memiliki kemampuan kepemimpinan kuadratnya. Kalau hal tersebut dibuat untuk meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan yang memiliki kompetensi gravitasi tertinggi.

Competency and Career Development of employees has been conducted systematically and continuously in order to increase the improvement of employee performance. Competency development is conducted by considering the talent criteria obtained and is the result of performance achievement and competency assessment determined periodically in the semester. Employees who have a good performance assessment will get a grade increase faster. In each level, systematic and comprehensive debriefing is provided in an upgrading form to prepare competence in carrying out higher tasks. Meanwhile, career opportunities are arranged by provide career acceleration opportunities for employees who are star performers to be able to carry out fast track programs. The flow of employee placement is prepared by considering the enrichment of competencies in stages through a career path mechanism. To increase the competitiveness of the Company in order to highlight the excellence of competence, an expertise career path is provided.

This is also to facilitate the ability of employees who have good technical competence but have limited leadership skills. Such of these are made to increase the motivation and performance of employees the majority of whom are millennials.

Sistem Pendidikan dan Pelatihan
Education and Training System

Pendidikan dan pelatihan karyawan dilakukan dengan prinsip berkesinambungan. Berdasarkan SK Direksi No. [illegible] tentang Sistem Pembelajaran, jenis program pembelajaran adalah:

a. Program pembelajaran sebelum karyawan baru,
b. Program pembelajaran profesi,
c. Program pembelajaran Kepemimpinan,
d. Program pembelajaran Fungsional,
e. Program pembelajaran Strategis Korporat,
f. Program pembelajaran Mata Pelajaran.

Employee education and training is conducted with the principle of sustainability. Based on the Decree of the Board of Directors No. [illegible] concerning the Learning System, the types of learning programs are:

a. New employee reasoning program,
b. Professional Learning program,
c. Promotional learning program,
d. Supporting learning programs,
e. Corporate Strategic learning program,
f. Subsidiary learning program.

Sistem Manajemen Kinerja
Performance Management System

Manajemen kinerja karyawan dilakukan untuk mengelaborasikan target kinerja Perusahaan dan Unit dengan target kinerja karyawan sekaligus memotivasi karyawan dalam meningkatkan kompetensi dan kontribusinya bagi Perusahaan dengan mengoptimalkan sumber daya untuk mencapai visi Perusahaan. Prinsip Manajemen Kinerja Karyawan adalah fokus, terukur, transparan dan objektif. Manajemen Kinerja Karyawan terdiri atas 3 siklus yaitu Perencanaan, Pemantauan dan Penilaian Kinerja yang dilakukan setiap 1 (satu) semester.

Employee performance management is conducted to align Company and Unit performance targets with employee performance targets while motivating employees to improve their competence and contribution to the Company by optimizing resources to achieve the Company's vision. The principles of Employee Performance Management are focused, measurable, transparent and objective. Employee Performance Management consists of 3 cycles namely Planning, Monitoring and Performance Assessment conducted every 1 (one) semester.

Sistem Penghargaan
Reward System

Sistem penghargaan yang diberikan berupa:

a. Penghargaan finansial: program pembelajaran dan sertifikasi kompetensi/profesi, program kesehatan/jiwa, bantuan hukum, pinjaman, dan kesempatan khusus untuk melakukan sesuatu yang membuat karyawan bangga perusahaan.
b. Penghargaan Ekstrinsik: kompensasi baik yang berupa finansial maupun tidak finansial yang terdiri dari: kompensasi jangka pendek, kompensasi jangka panjang dan tunjangan.

The reward system are in the form of:

a. Financial: Rewards: competency/professional training and certification programs, life balance programs, legal assistance, recognition, and special opportunities to conduct something that makes employees proud (privilege).
b. Extrinsic: financial, fixed and non-fixed compensation, which consists of: short-term compensation, long-term compensation and benefits.

Sistem Hubungan Industrial
Industrial Relations System

Prinsip yang dipegang dalam sistem hubungan industrial adalah profesional, harmonis, dan berkeadilan. Permasalahan yang timbul dalam hubungan industrial adalah permasalahan yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan hubungan kerja antara karyawan, manajemen, dan pemerintah.

The principles held in the industrial relations system are professional, harmonious, and transparent. The issues discussed in industrial relations are those that are directly and indirectly related to the working relationship between employees, management, and the government.

Kecukupan Jumlah Sumber Daya Manusia

Sufficient Number of Human Resources

Jumlah SDM pada tahun 2022 adalah sebanyak 3.093 karyawan. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2021 sebanyak 3.211 karyawan. Perusahaan secara berkala melakukan review terhadap kecukupan jumlah SDM melalui manpower planning.

The number of human resources in 2022 was 3,093 employees. This number was lower than in 2021 at 3,211 employees. The Company periodically reviews the adequacy of the number of human resources through manpower planning.

Komposisi karyawan berdasarkan tingkat pendidikan, jenjang jabatan, kelompok usia, dan jenis kelamin telah dijelaskan sebelumnya pada bagian Profil Perusahaan sub bab Profil SDM.

The composition of employees based on education level, position level, age group, and gender has been described previously in the Company Profile section of the HR Profile sub chapter.

Realisasi Rekrutmen Sumber Daya Manusia

Realization of Human Resources Recruitment

Salah satu upaya untuk mendukung kecukupan SDM, PLN NP melaksanakan rekrutmen dengan kebutuhan yang disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan. Upaya pemenuhan kecukupan SDM, PLN NP berasal dari internal dan eksternal.

One of the efforts to support the adequacy of human resources, PLN NP carries out recruitment with provisions adjusted to the needs of the Company. Efforts to fulfill the adequacy of PLN NP's human resources come from internal and external sources.

Resourcing Strategy

Build

Mengembangkan talenta yang ada di Perusahaan dengan cara merekrut talenta (*fresh graduate*) dan mengembangkan kompetensi mereka agar dapat memenuhi persyaratan.

Developing existing talents in the Company by recruiting new talents (fresh graduate) and developing their competencies to meet the requirements.

Buy

Merekrut karyawan yang sudah kompeten di bidang tertentu dari eksternal perusahaan (*expert hiring*).

Recruiting employees who are already competent in certain fields from external of the Company (*expert hiring*).

Borrow

Melaksanakan penempatan karyawan yang kompeten dari luar perusahaan, diantaranya dengan tugas kerja dari dan ke PLN atau ke anak perusahaan (DJK NP).

Temporarily bringing in competent employees from outside the Company, including with work assignments to and from PLN or to PLN NP subsidiaries.

Pada tahun 2022, terdapat 5 (lima) karyawan baru yang merupakan rekrutmen dari metode rekrutmen Fixed Term (PKWT).

In 2022, there were 5 new employees who were recruited from the Fixed Term Employment Agreement (PKWT) recruitment method.

Pendidikan dan Pembelajaran Sumber Daya Manusia
Human Resources Education and Learning

Selama tahun 2022 pelaksanaan Pendidikan dan Pembelajaran adalah sebanyak 615 pembelajaran dengan jumlah peserta yang diikutsertakan sebanyak 10.452 peserta. Setiap karyawan memiliki kesempatan yang sama dalam hal serta dalam pembelajaran dan pendidikan. Namun dalam pelaksanaannya tetap disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Perusahaan saat ini.

During 2022, the implementation of Education and Learning was 615 classes with a total of 10,452 participants. All employees have the same opportunity to participate in learning and education. However, the implementation is still adjusted to the total of position, the level of need and the current ability of the Company.

Pendidikan dan pelatihan (Diklat) secara lebih lengkap telah dicakup sebelumnya pada bagian Profil Perusahaan sub sub Pendidikan dan Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal.

More complete education and training of human resources has been described previously in the Company Profile section of the Education and Training of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit sub-chapter.

PIB Academy
PIB Academy

PIB Academy didirikan seiring dengan proses transformasi PIB Group berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 041 tanggal 1 Juli 2020. Terbentuknya PIB Academy dilatarbelakangi oleh perlunya untuk membangun dan memperkuat kembali kejayaan PIB dalam kepemimpinan satu kompetensi (Operation & Maintenance (O&M)) serta Management Asset Pembangkitan sebagai modal utama untuk memberikan pelayanan terbaik kepada stakeholder, sementara di sisi lain, untuk menjamin keberlanjutan dan pertumbuhannya pesat, maka PLN NP harus berkembang maju dalam kompetitif market, seiring dengan dinamika bisnis ketenagalistrikan di Indonesia yang dampaknya sebagai berbagai multiplier effect dari proyek 35 GW.

PIB Academy, established along with the transformation process of PIB Group based on the Decree of the Board of Directors No. 041 dated July 1, 2020. The establishment of PIB Academy is motivated by the need to build and re-strengthen PIB's glory in balance, namely the competence of Operation & Maintenance (O&M) as well as Market Power Generation Asset Management as the main capital to provide the best service to stakeholders, while on the other hand, to ensure sustainability and corporate growth, PLN NP must develop forward in the competitive market, along with the dynamics of the electricity business in Indonesia, mainly as a multiplier effect of the 35 GW project.

PIB Academy memperoleh International Certificate dari PEARSON Assured UK sebagai pengakuan bahwa penyelenggaraan di PIB Academy sudah konsisten bahas audit dan menjadi sebagai best practice. Hal ini berarti kualitas proses pembelajaran PIB Academy sudah memenuhi standar internasional PEARSON Assured UK.

PIB Academy received an International Certificate from PEARSON Assured UK as an acknowledgment that the learning here in PIB Academy are consistent standard and become a reference for best practice. This means that the quality of PIB Academy's learning process has met the international standards of PEARSON Assured UK.

Sistem Manajemen Kinerja Sumber Daya Manusia
Human Resources Performance Management System

Sistem Manajemen Kinerja Karyawan (SMKK) PLN NP menggunakan sistem online yang terbagi dalam beberapa periode untuk memastikan komunikasi, diskusi, dan bimbingan yang efektif dari atasan kepada para staf. Pelaksanaan SMKK mengacu pada prinsip fokus, berdaya, kompeten, dan objektif. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, SMKK dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan, yaitu tahapan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja karyawan.

PLN NP's Employee Performance Management System (EPMS) uses an online system divided into several periods to ensure effective communication, discussion and guidance from superiors to staff. EPMS implementation refers to the principles of focus, measurability, competency, and objectivity. Based on these principles, EPMS is divided into 3 (three) stages, namely the planning, monitoring and evaluation stages of employee performance.

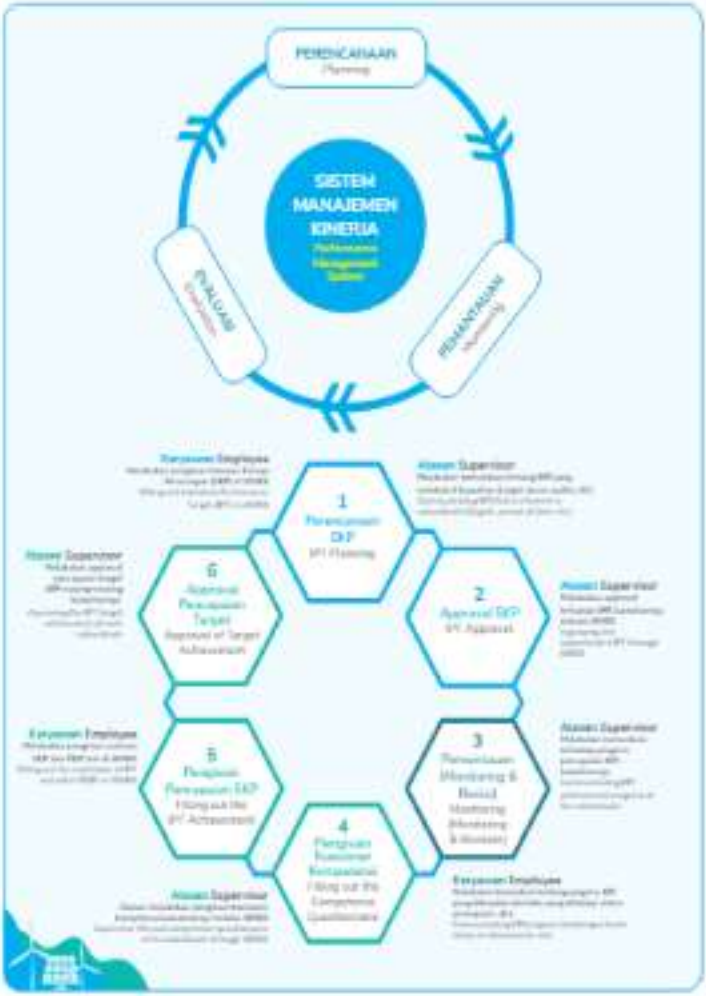
PERENCANAAN
SISTEM MANAJEMEN KINERJA
EVALUASI
PERWUJUDAN
1
2
3
4
5
6

1. **Perencanaan**
   Kesepakatan antara Atasan dan Bawahan terkait pekerjaan dan target yang harus diselesaikan.

2. **Pemantauan**
   Atasan memonitor progres pencapaian target bawahannya dan melakukan bagaikan *coaching/mentoring/counseling*.

3. **Evaluasi**
   Atasan melakukan pengukuran nilai capaian kinerja pencengan dan kompetensi individu karyawan.

PLN NP melaksanakan penilaian kinerja terhadap karyawan pada setiap semester yang dituangkan oleh *Onnit Performance Management & Sistem Informasi Human Capital*.

1. **Planning**
   Agreement between Superiors and Subordinates related to work and targets to be completed.

2. **Monitoring**
   Superiors monitor the progress of their subordinates' target achievement and conduct *coaching/mentoring/counseling* activities.

3. **Evaluation**
   Superiors measure the value of individual performance targets and individual competencies of employees.

PLN NP carries out performance assessments of employees every semester conducted by the Performance Management & Human Capital Information System Division.

Survei Karyawan
Employee Survey

Survei yang dilaksanakan oleh PLN NP adalah survei untuk mengetahui tingkat kepuasan dan keterikatan karyawan. Keterikatan karyawan diukur melalui Employee Engagement Survey dan kepuasan karyawan dilakukan melalui Job Satisfaction Survey.

The survey carried out by PLN NP is a survey to determine the level of employee engagement and satisfaction. Employee engagement is measured through Employee Engagement Survey and employee satisfaction is measured through Job Satisfaction Survey.

Indeks Keterikatan Kerja Karyawan
Employee Job Engagement Index

Hasil Employee Engagement Survey pada tahun 2022 adalah sebesar 84,96 (**SANGAT ENGAGE**). Hasil tersebut meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 83,66 (**SANGAT ENGAGE**).

The result of the Employee Engagement Survey in 2022 was 84.96 (**VERY ENGAGED**). The result increased compared to 2021 of 83.66 (**VERY ENGAGED**).

Hasil Employee Engagement Survey Tahun 2022
Employee Engagement Survey Results in 2022

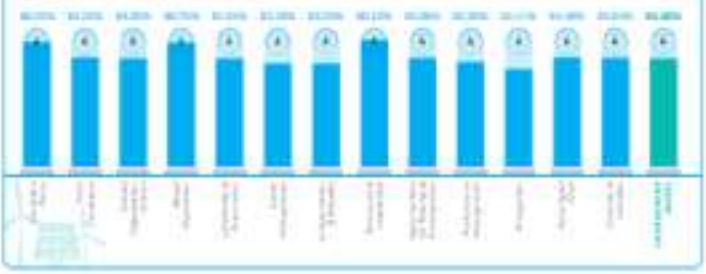

Indeks Kepuasan Kerja Karyawan
Employee Job Satisfaction Index

Hasil Job Satisfaction Survey pada tahun 2022 adalah sebesar 81,30 (**SANGAT PUAS**). Hasil tersebut meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 79,70 (**SANGAT PUAS**).

The Job Satisfaction Survey result in 2022 was 81.30 (**VERY SATISFIED**). The result increased compared to 2021 of 79.70 (**VERY SATISFIED**).

Pengembangan Karir dan *Talent Management*
Career Development and Talent Management

PLN NP menerapkan kebijakan jalur karir yang jelas melalui Manajemen Suksesi yang mengacu pada Peraturan Direksi No. 032.P/DIR/2020 tentang Manajemen Suksesi di Lingkungan PT Pembangkitan Jawa-Bali. Manajemen suksesi dapat diikuti oleh karyawan yang memiliki kompetensi dan potensi terbaik tanpa membedakan gender ataupun faktor-faktor lain seperti suku, agama, dan antar golongan.

PLN NP determines a clear career path policy through Succession Management which refers to the Regulation of the Board of Directors No. 032.P/DIR/2020 concerning Succession Management within PT Pembangkitan Jawa-Bali. Succession management can be participated by employees who have the best competencies and potential without distinguishing gender or other factors such as ethnicity, religion, and intergroup.

Manajemen Suksesi
Succession Management

Manajemen Suksesi merupakan serangkaian proses pemetaan, pengidentifikasian, pembinaan dan pengembangan karyawan dalam mengisi jabatan yang dibutuhkan Perusahaan terutama untuk jabatan Struktural dan Fungsional Ahli/Expertise di Perusahaan. Program ini dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya. Adapun rangkaian proses dalam Manajemen Suksesi sebagai berikut:

Succession Management is a series of processes for mapping, identifying, coaching and developing Employees in filling positions needed by the Company, especially for filling Structural and Functional Expert/Expertise Positions in the Company. This program is carried out routinely every year. The series of processes in Succession Management consist of:

1. Pemetaan karyawan;
2. Penetapan Karyawan yang masuk pada program Talent Pool;
3. Pemberitahuan pada program Talent Pool sebagai kandidat Suksesi Jabatan;
4. Persiapan calon kandidat Suksesi Jabatan;
5. Pemetaan dan penyesuaian pemangku Jabatan.

Dalam tahap pemetaan Karyawan dilakukan assessment talenta terhadap Karyawan yang telah memenuhi persyaratan secara administratif. Assessment talenta ini dilakukan untuk mengukur potensi dan kompetensi yang dimiliki para talenta, selanjutnya berdasarkan hasil assessment talenta tersebut, Perusahaan akan mengelompokkan para talenta tersebut ke dalam 9 Box HAV sebagaimana berikut:

1. Employee Mapping;
2. Determination of Employees who are included in the Talent Pool program;
3. Coaching on the Talent Pool program as a candidate for Position Succession;
4. Preparation of the sequence of candidates for Position Succession;
5. Determination and adjustment of Position holders.

In the Employee mapping steps, a talent assessment is conducted on employees who have met the administrative requirements. This talent assessment is designed to measure the potential and competence of the talents. Furthermore, based on the results of the talent assessments, the Company will group the talents into 9 HAV Boxes as follows:

Gambar HAV 9-Box Model

Picture of HAV 9-Box Model

Talenta yang telah diidentifikasi dalam HAV 9-Box Model selanjutnya dilakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan talent agar sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan Perusahaan sehingga dapat memberikan kontribusi maksimal saat membutuhkan jabatannya. Pelatihan talent menggunakan metode pengembangan yang berfokus pada 4 (empat) aspek kompetensi yaitu interpersonal skill, leadership skill, business skill dan intrapersonal skill. Program pelatihan talent yang terdapat di PLN NP adalah sebagai berikut:

1. Diklat Executive Education (EE) dan Supervisory Education-1 (SP-1)
2. Project Assignment yang terbagi menjadi:
   a. Program pengembangan dalam pekerjaan, seperti: (3) the Job Development Job Enrichment Job Enlargement, Special Assignment dan Rotasi Pekerjaan;
   b. Program pendidikan dan pelatihan, seperti Action-based Learning, Fellowship/ Collaborative Tugas Belajar, Cross Training, Studi Literatur;
   c. Program pendampingan seperti Coaching, Counseling dan Mentoring.

Talents who have been grouped in the HAV 9-Box Model are then coached to improve the ability of talents to be in accordance with the competencies needed by the Company, so that they can provide maximum contribution when occupying their positions. Talent coaching uses a development method that focuses on 4 (four) domains of competencies namely interpersonal skills, leadership skills, business skills, and intrapersonal skills. Talent coaching programs in PLN NP are as follows:

1. Executive Education (EE) and Supervisory Education-1 (SP-1) training.
2. Project Assignment which is divided into:
   a. On-the-job development programs, such as (3) the Job Development, Job Enrichment, Job Enlargement, Special Assignment and Job Rotation;
   b. Education and training programs, such as Action-based Learning, Training/Fellowship/Learning Assignments, Cross Training, Literature/Study;
   c. Mentoring programs such as Coaching, Counseling, and Mentoring.

Potensi yang diperoleh dari hasil assessment talenta yang telah dilakukan adalah:

1. Penilaian kompetensi yang diperoleh dari hasil penggalangan;
2. History talenta (riwayat jabatan, penjang jabatan, lintas talenta);
3. Nilai kinerja;
4. Usulan diklat pengembangan.

The potential obtained from the results of the talent assessment that has been conducted is:

1. Competency assessment obtained from the merging results;
2. Talent history (position history, position level, talent criteria);
3. Performance marks;
4. Proposed upgrading training.

Selain itu, PLN NP juga melakukan retensi talent yang bertujuan untuk memastikan talent yang terpilih tetap bekerja dalam Perusahaan dan berkontribusi sesuai dengan yang diharapkan melalui beberapa program alternatif karir dan pendidikan formal pada universitas terbaik dalam lokal maupun.

In addition, PLN NP also conducts talent retention which aims to ensure that selected talents continue to work in the Company and perform as expected through internal career accelerator programs and formal education at the best universities at the national level.

Sampai dengan tahun 2021, ketersediaan talent untuk jabatan Struktural tersedia dalam tabel di bawah ini:

Until 2021, the availability of talents for Structural positions is provided in the following table:

Tabel Pemenuhan Jabatan Struktural
Table of Structural Position Fulfillment

Deskripsi Description	Jumlah Talent Total Talent	Jumlah Formasi Total Formation
Manajemen Atas Top Level Management	18	3
Manajemen Tengah Middle Level Management	110	55
Manajemen Dasar Basic Management	550	122
Supervisi Atas Top Level Supervisor	837	300

Selain itu, sebagai bentuk integrasi PLN Group, PLN NP memberikan penugasan dan inovemma kel-pasaan melalui Sistem Kerja Kerja. Berikut jumlah karyawan tugas kerja masuk PLN NP dan tugas kerja keluar PLN NP pada Kelum 2021.

In addition, as a form of integration of the PLN Group, PLN NP assigns and accepts employees through the Work Assignment System. The following is the number of PLN NP incoming work assignments and outgoing work assignments employees in 2021.

Pembentukan *Expertise Talent*

Expertise Talent Establishment

Salah pengembangan karir melalui manajemen suksesi, PLN NP juga melaksanakan program pembentukan talent pipa asesmen (kepakaran) yang diatur dalam Peraturan Direksi No. 1800.P/DIR/2022 tentang Peraturan Perubahan atas Kami Lingkungan Kepakaran yang merupakan pendalaman dan pembaharuan dari Peraturan Direksi No. 0002.P/DIR/2020 tentang Sistem Expertise. Pembentukan talent pipa asesmen ini melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Identifikasi kebutuhan (supply), yaitu tahapan penentuan pola, jumlah dan nomenklatur kompetensi dan standar level kompetensi expertise;
2. Penetapan expertise, yaitu tahap dalam menentukan kadar expertise proses seleksi berdasar sampai dengan penetapan expert (tahapan seleksi dan a) kapasitas melalui penyelenggaraan proses yang melibatkan komite (b) kapasitas baik dari internal maupun eksternal;
3. Pengembangan dan pengembangan expertise yaitu talent expertise dilakukan dalam penugasan khusus serta mendapatkan program pengembangan expert sertifikasi kompetensi, pendidikan formal maupun menjadi narasumber di international conference;
4. Pelatihan expertise.

In addition to career development through succession management, PLN NP also carries out an expertise path talent formation program regulated in the Regulation of the Board of Directors No. 0002.P/DIR/2020 concerning Regulations for Executive of the Expertise Functional Career Path, which is an amendment and renewal of the Regulation of the Board of Directors No. 0002.P/DIR/2020 concerning the Expertise System. The establishment of this expertise path talent includes several stages, namely:

1. Identification of expertise needs, which is the stage of determining the type, number and nomenclature of competencies and standards of expertise competency levels;
2. Expertise mapping, which is the stage of determining the realm of expertise, the candidate selection process until the determination of the expert. The selection and expertise test stages (a) through a series of processes involving both internal and external Expertise Test Committees;
3. Expertise management and development, where talent expertise is involved in special assignments and receives development programs such as competency certification, formal education or becoming a resource person at international conferences;
4. Expertise coaching.

Pada tahun 2022, PLN NP memiliki 7 (tujuh) expert yang telah melewati serangkaian seleksi dan uji kecakapan dengan keterangan sebagai berikut:

In 2022, PLN NP had 7 experts who had passed a series of selection and expertise tests with the following information:

Tabel Jumlah Expert
Table of Number of Experts

Jenjang Kepakaran Expertise Level	Bidang Kepakaran Expertise Sector	Jumlah Total
Expert	Electrical	2
Expert	Instrument & Control System	3
Junior Expert	Mechanical – Turbine & Rotating Equipment	1
Junior Expert	Engineering Design	1
Junior Expert	Start up & Commissioning	1

Remunerasi Sumber Daya Manusia

Human Resources Remuneration

PLN NP senantiasa mengimplementasikan strategi remunerasi yang kompetitif di industri tenaga listrik guna menarik, memotivasi individu-individu terbaik yang dimiliki Perusahaan. PLN NP memiliki kebijakan remunerasi yang ditetapkan pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2021 – 2024 No. PT PLN (Persero) 0013.PKB/DIR/2021 No. SP PKB DIR/0018/DPP-SPPLN/2021.

PLN NP always implements a competitive remuneration strategy in the electricity industry in order to attract, motivate the best individuals owned by the Company. PLN NP has a remuneration policy based on the Collective Labor Agreement (CLA) for the period 2021 – 2024 No. PT PLN (Persero) 0013.PKB/DIR/2021 No. SP PKB DIR/0018/DPP-SPPLN/2021.

Dalam PKB, remunerasi/upah/kompensasi pekerja/buruh/karyawan terdiri atas Komponen Upah Kompensasi dan Sistem Remunerasi. Komponen Upah Kompensasi merupakan imbalan yang diberikan oleh Perusahaan kepada Karyawan dalam bentuk uang yang diberikan pada hari kerja waktu tertentu (bulanan, setengahbulan, tahunan, semiloan, dan lainnya). Sementara Sistem Remunerasi (P* adalah sistem remunerasi sebagai Kompensasi atas kompetensi individu, tanggung jawab dalam bekerja dan prestasi kerja yang diberikan kepada Karyawan dalam bentuk *Pay for Person*, *Pay for Position*, dan *Pay for Performance*. PLN NP menetapkan besaran remunerasi karyawan dengan mengacu pada Keputusan Direksi/Perusahaan.

In the CLA, the remuneration/wage of the employee/worker consists of the Wage Compensation and Remuneration System. Compensation is a reward given by the Company to employees in the form of money, given on a certain period of time (monthly, semi-annually, annually, biyearly, and others). While the (P* Remuneration System is a remuneration system as Compensation for individual competence, responsibility in the work, and work performance given to Employees in the form of *Pay for Person*, *Pay for Position*, and *Pay for Performance*. PLN NP determines the amount of employee remuneration by referring to the Decision of the Company's Board of Directors.

Sejalan dengan ketentuan PKWT, per 1 Oktober 2021 berlaku sistem remunerasi baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi No. 0083.P/DIR/2021 tentang Peraturan Perubahan Sistem Manajemen Penghargaan Karyawan PT Pembangkitan Jawa Bali. Direksi/Direktur Sumber Daya Manusia, terdapat 3 (tiga) jenis remunerasi yang diuraikan sebagai berikut:

In line with the PKWT policy, as of October 1, 2021 a new remuneration system is in effect as stipulated in the Regulation of the Board of Directors No. 0083.P/DIR/2021 concerning Regulations for Executive of the Employee Reward Management System of PT Pembangkitan Jawa-Bali. Based on the decision of the Board of Directors, there are 3 (three) types of remuneration which are described as follows:

Pay for Person (P1)

Tarif Grade/*Pay for Person* adalah komponen/imbalan yang diberikan Perusahaan kepada Karyawan dengan mempertimbangkan kompetensi, kinerja kerjanya, termasuk pertimbangan faktor tanggungjawab individu/unit, dan aset yang kewenangannya diberikan berdasarkan level kompetensi dan Grade Karyawan secara bertanggung jawab atau tertang risk pada masing-masing. Grade tersebut ditetapkan berdasarkan kompetensi (*Pay for Person*).

Grade Tariff (*Pay for Person*) is a fixed compensation given by the Company to Employees by considering competence, certain performance, including consideration of dependents of who/ husband, and children, the amount of which is determined based on the level of competence and Grade of Employees according to the position or range of values in each Grade by following the increase in consumption of PT PLN (Persero).

Pay for Position (P2)

Tunjangan Jabatan (*Pay for Position*) adalah komponen yang diberikan Perusahaan kepada karyawan dalam bentuk tunjangan tetap tetap dengan mempertimbangkan faktor tanggung jawab jabatan, lokasi penempatan, kebutuhan pekerjaan dengan memperhatikan kemampuan karyawan.

Position Allowance (*Pay for Position*) is compensation provided by the Company to employees in the form of non-permanent allowances by considering the factors of position responsibility, job location, job capability by considering employee effectiveness.

Pay for Performance (P3)

Pay for Performance adalah Kompensasi atas prestasi kerja Karyawan penghargaan dari Perusahaan berdasarkan hasil kinerja yang dicapai, baik kinerja individu, kinerja unit maupun kinerja korporat yang merupakan kontribusi nyata dari terukur. PLN NP menerapkan kebijakan sistem remunerasi dengan berpedoman pada konsep Merit System. Perusahaan juga selalu memastikan telah memiliki seluruh aturan yang berlaku yang terkait dengan sistem remunerasi. Terkait dengan remunerasi, PLN NP senantiasa berupaya agar tidak terjadi gap remunerasi berlaku timpang.

Pay for Performance is compensation for Employee work performance, an award from the Company based on the results of the performance achieved, both individual performance, unit performance and corporate performance which is a real and measurable contribution. PLN NP implements a remuneration system policy based on the Merit System concept. The Company also always ensures that it has complied with all applicable regulations related to the remuneration system. In relation to remuneration, PLN NP always strives to avoid excessive remuneration gaps.

Penerapan *Reward* and *Punishment*

Reward and Punishment Implementation

Untuk penghargaan yang diberikan kepada Karyawan dibedakan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu penghargaan ekstrinsik dan intrinsik. Penghargaan ekstrinsik diberikan dalam bentuk kompensasi dan manfaat karyawan. Untuk Kompensasi Karyawan terdiri dari:

1. Kompensasi tetap, berupa *Pay for Person* (P1) atau Tunjangan Grade.
2. Kompensasi tidak tetap yang terdiri atas:
   a. Kompensasi jangka Pendek terdiri dari *Pay for Position* (P2) atau Tunjangan Fiasi, *Pay for Performance* (P3), Insentif Kinerja/Bonus, Tunjangan Hari Raya, dan Tunjangan Cuti Tahunan.
   b. Kompensasi Jangka Panjang terdiri dari Tunjangan Cuti Besar, Penghargaan Kesetiaan Kerja, Pesangon, Kompensasi selama Masa Persiapan Pensiun, dan hal lain yang diberangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama.

Untuk manfaat karyawan terdiri atas:

1. Manfaat Umum yang terdiri atas jaminan sosial (Kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pensiunan dan kematian), hak cuti, pemotongan, fasilitas, pakaian dinas, bantuan akomodasi terkait mutasi, bantuan kematian/pemakaman, dan hal lain yang diberangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama.
2. Manfaat Khusus (Fringebenefit) yang terdiri atas bantuan/fasilitas kendaraan, bantuan/fasilitas perumahan, bantuan/fasilitas alat dan ruang kerja, tenaga pengamanan, keanggotaan profesi, kartu kredit korporat, dan keanggotaan klub tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Dan penghargaan intrinsik yang diberikan dalam bentuk non tunai yang bermakna bagi individu karyawan yang diberikan berupa:

1. Program Pembelajaran dan Sertifikasi Kompetensi/Profesi, yang merupakan kesempatan yang diberikan kepada karyawan yang telah memberi kontribusi nyata kepada Perusahaan dan memenuhi kriteria kelolia tertentu.

The form of rewards provided to employees can be divided into 3 (three) types, namely extrinsic and intrinsic rewards. Extrinsic rewards are provided in the form of compensation and employee benefits. Employee Compensation consists of:

1. Fixed compensation, in the form of Pay for Person (P1), or Grade Allowance.
2. Non-fixed compensation consisting of:
   a. Short-term Compensation consists of Pay for Position (P2) or Position Allowance, Pay for Performance (P3), Bonus, Religious Holiday Allowance, and Annual Leave Allowance.
   b. Long-term Compensation consisting of Grand Leave Allowance, Work Loyalty Award, Severance Pay Compensation during Retirement Preparation Period, and other matters agreed in the Collective Labor Agreement.

Employee benefits consist of:

1. General Benefits consisting of social security (health, work accident, old age, pension and life), leave entitlement, health care, official clothing, accommodation assistance related to mutation, death/funeral assistance, and other matters agreed in the Collective Labor Agreement.
2. Prerogative consisting of vehicle assistance/facilities, housing assistance/facilities, work and workspace assistance/facilities, security personnel, professional membership, corporate credit cards, and membership of certain clubs as required.

And intrinsic awards provided in the form of non-cash awards that are meaningful to individual employees provided in the form of:

1. Competency/Profession Learning and Certification Program, which is an opportunity provided for Employees who have made a real contribution to the Company and meet certain talent criteria.

2. Program Kesembangan Hidup, merupakan penghargaan kepada karyawan untuk menciptakan kesembangan antara kehidupan pekerjaan dan kehidupan di luar pekerjaan berupa kegiatan dalam bentuk peningkatan kesejahteraan spiritual, fisik dan mental untuk mendukung karyawan agar mendapat hasil kerja yang maksimal.
3. Bantuan hukum, berupa pemberian nasi bantuan hukum dari pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di Perusahaan.
4. Pengabdian (Dianugrahkan), merupakan program penghargaan terbaik yang diberikan kepada karyawan yang telah mengabdikan penghargaan Direksi.
5. Kesempatan untuk melakukan kegiatan yang memberi kesempatan kepada (pemutus) diberikan kepada karyawan yang telah memberikan prestasi dan kontribusi aktif dalam mendukung pencapaian kinerja Perusahaan dan atas izin Perusahaan.

2. Life Balance Program, is a reward for employees to create a balance between work life and life outside work in the form of activities in improving spiritual, physical and mental well-being to motivate employees to get excellent performance.
3. Legal assistance, in the form of delivery of legal claims from other parties related to the implementation of duties and responsibilities in the Company.
4. Recognition, is a award recognition program provided to employees who have received the Board of Directors' award.
5. Opportunity to conduct something that makes Employees proud (participate), provided to employees who have made active achievements and contributions in supporting the achievement of the Company's performance and to the Company's image.

Bentuk pemberian penghargaan kepada karyawan dalam bentuk:

1. Pelatihan Formal;
2. Sertifikasi;
3. Penghargaan Kesehatan Kerja (veritsan);
4. Bantuan Pinjaman Pendidikan Rumah Karyawan (BPPR);
5. Penghargaan Pensiun.

Separanjang tahun 2022 terdapat 289 karyawan yang mendapatkan reward berupa Penghargaan Kesehatan Kerja (veritsan) untuk 126 orang, Bantuan Dayanan Pendidikan Rumah Karyawan (BPPR) sebanyak 125 orang dan Penghargaan pensiun untuk 20 orang.

Kindergarten karyawan yang mendapatkan punishment sebanyak 4 (empat) orang karyawan berupa Surat Hukuman Disiplin. Sedang berupa Pemutusan Terhadap Perbantu.

Forms of rewarding employees include:

1. Formal Education;
2. Certification;
3. Work Loyalty Award (Veritsan);
4. Employee Home Ownership Loan Assistance (EHOA);
5. Retirement Award.

Throughout 2022, there were 289 employees who received awards in the form of Work Loyalty Awards (Veritsan) for 126 people, Employee Home Ownership Loan Assistance (EHOA) for 125 people and Retirement Awards for 20 people.

While employees who received punishment were 4 employees in the form of Indonesia Disciplinary Penalty Sanctions in the form of Final Written Warnings.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Occupational Health and Safety (OHS)

Aspek kesehatan dan keselamatan kerja bagi karyawan merupak tingkat yang menjadi visi di bidang usaha Perusahaan. PLN NP memandang bahwa kesehatan dan keselamatan kerja bagi karyawan merupakan aspek penting yang berpengaruh terhadap keberlangsungan aktivitas operasional Perusahaan. Tingkat kesehatan dan keselamatan karyawan memiliki dampak yang signifikan terhadap performa dan hasil kerja karyawan, serta berdampak terhadap hubungan karyawan dengan karyawan dan Unsur lebih lanjut mengenai K3 akan dijelaskan di Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah, namun menjadi bagian dari Laporan Tahunan ini.

The aspect of occupational health and safety for employees is a very vital part of the Company's business. PLN NP perceives that occupational health and safety for employees is an important aspect that affects the sustainability of the Company's operational activities. The level of occupational health and safety of employees has a significant impact on employee performance and work results, as well as impacting employee relations with other employees. Further description of OHS will be explained in the Sustainability Report which is presented separately, but a part of this Annual Report.

Hubungan Industrial
Industrial Relations

Hubungan industrial merupakan suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hubungan industrial berfungsi untuk menciptakan hubungan yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan berkedudukan di perusahaan antara manajemen dan karyawan yang diwakili oleh serikat pekerja. Serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. PKB adalah PLN MP dengan Serikat Pekerja yang berlaku di tahun 2022 adalah PKB 2021-2024 No. PP 388 2021.8/0102DIR/2022 No. SP PKB/DEKA/DPP-SPPLN/2021.

Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruhnya mempunyai hak:

1. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya;
2. Menjaga ketertiban dan kelangsungan produksi;
3. Menyalurkan aspirasi secara demokratis;
4. Mengembangkan keterampilan dan kemampuannya;
5. Ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.

Kegiatan Hubungan Industrial antara PLN MP dan Serikat Pekerja di tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian PKB PP 388 Tahun 2021-2024;
2. Kegiatan Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit yang dilaksanakan per bulan (Quarterly);
3. Kegiatan Penempuan Deklasi;
4. Musyawarah Kerja (Mukerj) SP PBI Tahun 2022;
5. Pembinaan Hubungan Industrial;
6. Dialog Cinta Bipang Serikat Pekerja (SPBI);
7. HUT SP Ke-23.

Industrial relations is a system of relationships formed between actors in the production process of goods and/or services consisting of the elements of employers, workers/laborers, and government based on the values of Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Industrial relations aim to realize harmonious, dynamic, conducive and fair relations in the Company between management and employees represented by trade unions. Trade unions are organizations established from, by, and for workers/laborers both in the Company and outside the Company, which are free, open, independent, democratic and responsible to fight for, defend and protect the rights and interests of workers/laborers as well as to improve the welfare of workers/laborers and their families. The CLA between PLN MP and the Labor Union that is valid in 2022 is CLA 2021-2024 No. PP 388 2021.8/0102DIR/2022 No. SP PKB/DEKA/DPP-SPPLN/2021.

In exercising out industrial relations, workers/laborers and their trade unions have the following functions:

1. Carrying out work in accordance with their obligations;
2. Maintaining order for the continuity of production;
3. Channeling aspirations in a democratic manner;
4. Developing their skills and capacities;
5. Participating in advancing the Company and fighting for the welfare of members and their families.

Industrial Relations activities between PLN MP and Trade Unions in 2022 were as follows:

1. Regulation of PT PBN CLA Year 2021-2024;
2. Bipartite Cooperation Institution (LKS) activities that are carried out periodically (Monthly);
3. Periodic Meeting Activities;
4. Union Conference (Mukerj) of SP PBI in 2022;
5. Industrial Relations Development;
6. Union Dialogue with Trade Unions (SPBI);
7. 23rd SP Anniversary.

Rencana Program Kerja Sumber Daya Manusia Tahun 2023

Human Resources Work Program Plan for 2023

Rencana Program Kerja SDM di tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Human Capital Information System untuk mendukung implementasi SAP Success Factor.
2. Pelayanan excellence untuk meningkatkan produktivitas perusahaan (dengan indikator terkait).
3. Penguatan pelayanan human capital terkait dengan kantor strategis, kantor dan operasional Excellence.
4. Penetapan Kebijakan Hybrid Working (WFA).
5. Peningkatan kompetensi melalui pelaksanaan program magang dan pembelajaran.
6. Pengembangan inovasi.

The HR Work Program plan for 2023 is as follows:

1. Strengthening the Human Capital Information System to support the implementation of SAP Success Factor.
2. Service excellence to increase company productivity (with certain indicators).
3. Strengthening human capital services related to the Jakarta strategic office and Excellence operations.
4. Determination of Hybrid Working Policy (WFA).
5. Competence improvement through the implementation of internship and learning programs.
6. Innovative development.

Dukungan Kuat Teknologi Informasi

Solid Support of Information Technology

Industri 4.0 menitikberatkan pada transformasi digital yang menjadi tren dan berkembang menuju otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi dan proses. Teknologi Informasi (TI) dan digitalisasi menciptakan proses bisnis yang efisien, efektif dan berdaya saing tinggi.

Industry 4.0 focuses on digital transformation that is trending and evolving towards automation and data exchange in technology and processes. Information Technology (IT) and digitalization create efficient, effective and highly competitive business process.

Fungsi Pengelola Teknologi Informasi

Function of Information Technology Management

Pada tahun 2022, pengelolaan TI dilakukan oleh Bidang Teknologi Informasi yang merupakan sub organisasi PLN NP suborganisasi tersebut dibentuk dalam Surat Keputusan Direksi No. 0001/PEDI/DIR/2022 tanggal 31 September 2022 tentang Perubahan Peraturan Susunan Organisasi dan Formasi Tenaga Kerja pada Direktorat Keuangan PT Pembangkitan Jawa-Bali. Bidang Teknologi Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Teknologi Informasi yang bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kinerja Korporat dan Pengendalian Sistem Manajemen. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala Bidang Teknologi Informasi dibantu oleh Manajer dan staf yang formasi jabatannya sesuai ketentuan dan ditetapkan oleh Keputusan Direksi. Bidang Infrastruktur Teknologi dan Digital membawahi 3 (tiga) sub bidang yaitu Perencanaan dan Kebijakan TI, Pengembangan TI dan Analisa Bisnis dan Operasi Layanan TI.

In 2022, IT management was conducted by the Information Technology Division which is a sub-organization of PLN NP as stated in the Board of Directors Decree No. 0001/PEDI/DIR/2022 dated September 31, 2022 concerning Regulations for Executive of Organizational Structure and Manpower Formation within Directorate of Finance of PT Pembangkitan Jawa-Bali. Information Technology Division is chaired by the Head of Information Technology Division who is responsible to the Head of the Corporate Performance and Management System Development Unit. In carrying out the main duties and functions, the Head of Information Technology Division is assisted by Managers and staff whose position formations are following the needs and are determined by the Board of Directors Decree. The Information Technology and Digital Division is in charge of 3 (three) sub divisions, namely IT Planning and Policy, IT Development and Business Analysis, and IT Service Operations.

Tata Kelola Teknologi Informasi

Information Technology Governance

Tata kelola TI PLN NP berlandaskan pada Rencana Strategi Teknologi Informasi (RSTI) yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. 0813.K/DIR/2017/2017 tentang Kebijakan dan Kebijakan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan best practice lainnya seperti: COBIT (Control Objective for Information Technologies). Secara garis besar pelaksanaan Tata Kelola TI PLN NP dapat dilihat pada gambar berikut:

PLN NP's IT governance is based on the Information Technology Strategic Plan (RSTI) regulated in the Board of Directors Decree No. 0813.K/DIR/2017/2017 concerning Guidelines and General Policies for Information Technology Governance and other best practices such as: COBIT (Control Objective for Information Technologies). Generally, PLN NP's IT Governance implementation is reflected in the following picture:

Arsitektur Teknologi Informasi

Information Technology Architecture

Arsitektur TI menggambarkan rancangan teknologi informasi, baik aplikasi maupun infrastruktur yang akan dibangun oleh PLN NP sebagai arah pengembangan aplikasi TI di lingkungan Perusahaan, sebagaimana secara gambar berikut.

IT Architecture illustrates the building of information technology, both applications and infrastructure that will be built by PLN NP as the direction of IT application development within the Company, as in the following picture.

Prinsip Arsitektur Teknologi Informasi
Principle of Information Technology Architecture

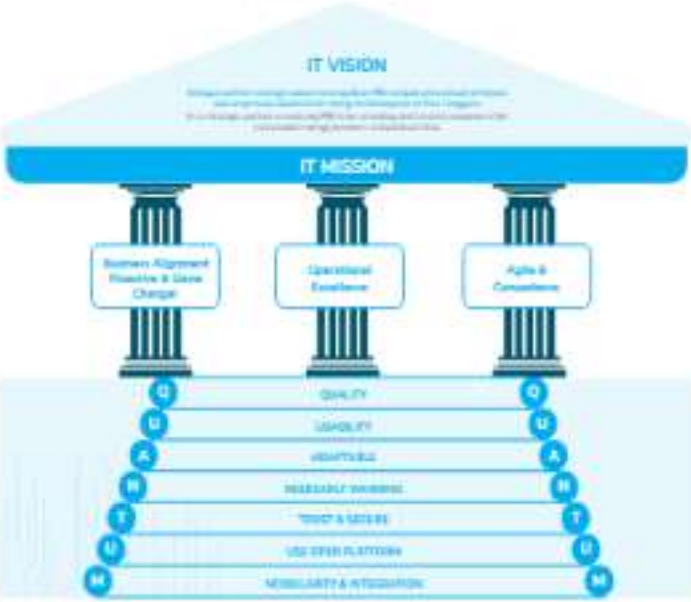

Roadmap Teknologi Informasi
Information Technology Roadmap

Roadmap TI PLN NP disusun sesuai dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) Periode Tahun 2019-2024 sebagaimana dalam gambar berikut:

PLN NP prepared IT Roadmap according to the Information Technology Strategic Plan (RSTI) for the 2019-2024 Period as presented in the following picture:

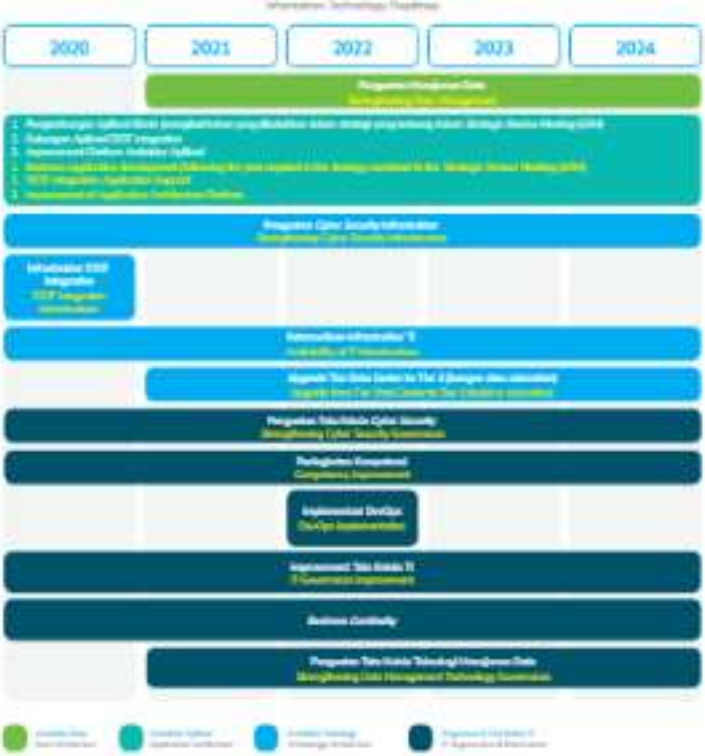

Penguatan Cyber Security

Strengthening Cyber Security

Dengan adanya tren peningkatan serangan siber di lingkungan PLN NP, Bidang Teknologi Informasi melakukan penguatan pengamanan siber baik dari segi People, Process dan Technology. Penguatan Cyber Security yang dilakukan antara lain:

1. Pengukuran Cyber Security Maturity (CSM)
2. Pengukuran Tingkat Kematangan Insiden (TKPI)
3. Pembentukan Cyber Security Incident Response Team (CSIRT)
4. Sosialisasi ISO 27001
5. IT Security Assessment/ Penetration Testing
6. Pemeliharaan/ Update Security Device
7. Peningkatan Kompetensi Cyber Security (Training/ Workshop/ FGD/ Forum/ Assessment)

With the increasing trend of cyber attacks within PLN NP, the Information Technology Division strengthens the cyber security in terms of People, Process and Technology. Cyber Security strengthening carries out:

1. Measurement of Cyber Security Maturity (CSM)
2. Measurement of Incident Handling Maturity Level (TKPI)
3. Establishment of Cyber Security Incident Response Team (CSIRT)
4. ISO 27001 Dissemination
5. IT Security Assessment/Penetration Testing
6. Security Device Maintenance/Update
7. Cyber Security Competence Improvement (Training/Workshop/ FGD/Forum/Assessment)

Risiko Utama dan *Disruption* Teknologi Informasi

Major Risks and Information Technology Disruption

Dalam operasional Teknologi Informasi tentunya terdapat risiko up siran muncul, untuk itu di tahun 2022 Bidang Teknologi Informasi PLN NP memetakan risiko internal beserta mitigasinya sebagai berikut:

In the Information Technology operation, there are certainly risks that will arise, therefore, PLN NP's Information Technology Division mapped the internal risks and their mitigations in 2022 as follows:

No.	Risiko Risk	Mitigasi Mitigation
1	Risiko arsitektur aplikasi tidak selaras dengan arsitektur bisnis. Risk the application architecture is not aligned with business architecture	Melakukan asesmen kebutuhan sumber daya TI untuk mendukung agenda sub-holding PLN IT resource needs assessment to support PLN's sub-holding agenda
	Review Inisiatif Proses Bisnis 2023 Reviewing/ Updating the 2023 Business Process	
	Meninjau ulang/memutakhirkan RJPT tahun 2023 Reviewing the 2023 RJPT roadmap progress	
2	Risiko serangan siber dari internal maupun eksternal perusahaan. Risk the cyber attacks from the Company's internal and external	Melakukan pemblokiran (*client side*) *software* terlarang untuk memindahkan penggunaan (*client laptop/ Sides note*) Updating to handle suspicious notification updates or terminate the use of unlabeled (unofficial) licenses
	Perselisihan/ audit untuk terkait penggunaan aplikasi pada device komputer Perusahaan Settlement of legal problems related to the use of applications on the Company's computer facilities	
	Dengan Cyber Security dengan Pembentukan CSIRT (Computer Security Incident Response Team). Strengthening Cyber Security with the establishment of CSIRT (Computer Security Incident Response Team)	
	Pemasukan mereka BCM terkait pada serangan siber Preparation of BCM scenarios related to potential cyber attacks	
	Melakukan asesmen "Tingkat Kematangan Insiden (TKPI) tahunan 2022 Incident Management Maturity Level (TKMT) assessment in 2022	
3	Risiko pelanggaran pemenuhan hak kekayaan intelektual. Risk the violation of intellectual property rights occurrence	Menginventarisir dan Menerbitkan Users software yang digunakan oleh karyawan secara umum Updating and listing software licenses used by employees in general
	Perselisihan/ audit untuk terkait penggunaan aplikasi pada device komputer Perusahaan Settlement of legal problems related to the use of applications on the Company's computer facilities	
	Inventarisasi dan update program aplikasi Inventory and update of latest programs	
	Update knowledge PDC terhadap desktop management Updating PDC knowledge of desktop management technology	

No	Proker Work	Hingga Progress
4	Governance layanan IT outsorsi lengkap (Kontr) Complete IT service contracts and budget (Kontr)	Peningkatan kapasitas ESS Jaluk Jual Batubara Increasing the capacity of ESS Jaluk Jual Batubara
		Workshop DCP DRP DCP/DRP Workshop
5	Pdata kerjasama data eksterna Pdata for corporate data use	Pengadaan server VASA dan Harnas Procurement of VASA and Harnas servers
		Pengembangan aplikasi baru DMS (Document Management System) baru ini mendukung tata kelola pengelolaan dokumen Development of a new DMS (Document Management System) application to support document management governance

Disaster Recovery Plan

Disaster Recovery Plan

Disaster Recovery Plan (DRP) adalah perencanaan yang fokus pada pemulihan sistem dan layanan teknologi informasi yang dipandang secara bisnisnya dalam rangka mendukung strategi Business Continuity Plan (BCP). PLN NP telah menerapkan Disaster Recovery Plan (DRP) serta melakukan pengujian secara berkala setiap tahun untuk memastikan sistem DRP berjalan dengan baik dan sistem mia dijalankan sesuai target Recovery Time Objective (RTO) maupun Recovery Point Objective (RPO) yang ditetapkan.

Disaster Recovery Plan (DRP) focuses on the recovery of information technology systems and services used completely in order to support Business Continuity Plan (BCP) strategy. PLN NP has implemented a Disaster Recovery Plan (DRP) and conducts periodic testing every year to ensure the DRP system is running well and the system can be restored according to the expected Recovery Time Objective (RTO) and Recovery Point Objective (RPO) targets.

Realisasi Program Kerja Teknologi Informasi Tahun 2022

Realization of Information Technology Work Program in 2022

PLN NP telah melaksanakan beberapa program kerja TI selama tahun 2022, diantaranya adalah:

1. Mengintegrasikan aplikasi Orpeo dan Maximo untuk memastikan akurasi entry dan menjaga integritas data pada kedua aplikasi.
2. Implementasi Digital SWH workflow management di seluruh pembangkit.
3. Monitoring dokumen pembayaran Alihkung dari excel kemas Database Transaksi Batubara dan BBM sehingga dengan proses terintegrasi.
4. Pengembangan Aplikasi Tx On Line modul(s): Fokus Hari Ini, Notifikasi, Input Progress Asking Kebutuhan, Review Report dan Modul Admin serta integrasi dengan DMSA Kabulmasan (DN)
5. Implementasi CSIRT (Computer Security Incident Response Team) meliputi Assessment & Awareness CSIRT serta Implementasi CSIRT.
6. Pembangunan Infrastruktur Maintenance.
7. Implementasi Enterprise Asset Management (EAM) Distribusi tahap 1/thn.
8. Roll out SWH Maximo di PLTU UPK Singkawang, Kalimantan Barat (UPKB Maximo (LTU), UPDK Gorontalo, Sulawesi UPK Asam-Asaman dan UK Bit).

PLN NP carried out several IT work programs during 2022, including:

1. Integrated Orpeo and Maximo applications to minimize double entry and maintained data integrity in both applications.
2. Implementation of Digital SWH workflow management in all power plants.
3. Monitored payment documents calculated from the Coal Database, Coal and Fuel Transactions with the payment process.
4. Tx On Line Application Development, including: today's Focus, Notifications, Progress Input, Ask Rating, Review Report and Admin Modules as well as integration with DMSA Kabulmasan (DN).
5. Implementation of CSIRT (Computer Security Incident Response Team) including CSIRT Assessment & Awareness as well as CSIRT Implementation.
6. Maintenance Infrastructure Development.
7. Implementation of Enterprise Asset Management (EAM) for Distribution Phase 1/year.
8. Roll out of EAM Maximo in UPKP of Singkawang (PLTU), West Kalimantan, Pontianak (UPDK (1 PLTU), Gorontalo (UPDK), Sulawesi Asam-Asaman (UPK), and MT (UK).

Audit Teknologi Informasi
Information Technology Audit

Dalam rangka pengembangan dan perbaikan TI, PLN NP secara berkesinambungan melaksanakan evaluasi implementasi tata kelola TI. Di tahun 2022 dilakukan audit TI sebagai berikut:

In order to develop and improve IT, PLN NP continuously evaluates the implementation of IT governance. In 2022, PLN NP carried out the following IT audits:

Tabel Audit TI Tahun 2022
Table of IT Audit in 2022

No	Subjek Audit Audit Title	Jumlah Temuan Total Findings	Jumlah (%) Rekomendasi Total (%) Recommendation	Status
1	ISO 38500:2 2018	6	6	Closed
2	ISO 27001:2013	8	8	Closed
3	ERP	0	0	Closed

Tindak lanjut dari temuan dan rekomendasi telah dilaksanakan sepenuhnya.

Follow-up on findings and recommendations has been fully carried out.

Assessment Eksternal Teknologi Informasi
Assessment of External Information Technology

Untuk meningkatkan kualitas layanan Teknologi Informasi, PLN NP juga melaksanakan assessment yang dilakukan oleh tim independen, yaitu:

To improve the quality of its Information Technology services, PLN NP also carried out assessments conducted by an independent team, namely:

- **IT Maturity Level Assessment COBIT 5** (Control Objective for Information Technologies 5)
  PLN NP melaksanakan kegiatan Assessment Maturity dengan mengacu pada standar internasional yang digunakan juga di lingkungan BUMN sebagai framework pengukuran maturity level pengelolaan tata kelola TI yaitu Standard Control Objectives for Information and related Technology (COBIT). PLN NP mendapatkan nilai rata-rata 3,70.

- **IT Maturity Level Assessment COBIT 5** (Control Objective for Information Technologies 5)
  PLN NP carried out IT Maturity Assessment activities by referring to international standards that are also used within SOEs as a framework for measuring the maturity level of IT governance management, namely the Control Objectives for Information and related Technology (COBIT) Standard. PLN NP received a final score of 3.70.

Penghargaan TI Tahun 2022
IT Awards in 2022

Pada Tahun 2022, PLN NP berhasil meraih penghargaan dalam ajang Winner dalam Stevie International Business Awards untuk kategori IT Awards.

In 2022, PLN NP won the Bronze Winner award in the Stevie International Business Awards for the IT Awards category.

Rencana Program Kerja Teknologi Informasi Tahun 2023

Work Program Plan for Information Technology in 2023

Rencana Program Kerja TI di tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Aplikasi Khan 2023
2. Pengembangan integrasi aplikasi AMS Kangaroo PLN dengan Office Automation PLN NP
3. Pengembangan integrasi SSO - Dijaxx
4. Lanjutan Infrastruktur Security untuk IODS
5. Digitalisasi Penagihan dan Pembayaran
6. Digital Power Plant (DPP) PLN 2023
7. Dashboard Monitoring Project

The Work Program Plan for IT in 2023 is as follows:

1. Development of Khan 2023 Application
2. Development of PLN Corporate AMS application integration with PLN NP Office Automation
3. Development of SSO - Dijaxx integration
4. Expansion of Security Infrastructure for IOAS unit
5. Digitalization of Billing and Payment
6. Digital Power Plant (DPP) PLN 2023
7. Dashboard Monitoring Project

PLN Nusantara Power *Integrated Management System* (PLN NP-IMS)

PLN Nusantara Power Integrated Management System (PLN NP-IMS)

Efektivitas dan efisiensi menjadi semangat utama pada pengelolaan Integrated Management System (IMS) Perusahaan. Melalui integrasi sistem, memberikan dorongan pada operasional Perusahaan menuju standar terbaik dan praktik terbaik yang relevan, yang pada akhirnya menghasilkan kinerja yang maksimal di Perusahaan.

Effectiveness and efficiency are the primary spirit to manage the Company's Integrated Management System (IMS). Through the system integration, PLN NP encourages the best relevant standards and practices for the Company's operations, which ultimately results in maximum performance of the Company.

Sertifikasi PNS 03.2012 PLN NP membuktikan bahwa penerapan PLN NP-IMS Enterprise Architecture di lingkungan Perusahaan memunculkan arah dalam memaksimalkan efektivitas dan efisiensi pada operasional Perusahaan. Secara keseluruhan, implementasi PLN NP-IMS menghasilkan efisiensi bagi Perusahaan melalui penghematan waktu, kerja, dan minimalisasi gangguan kegiatan bisnis.

PLN NP achieved PNS 03.2012 certification that proves that PLN NP-IMS Enterprise Architecture implementation within the Company holds the role in maximizing the effectiveness and efficiency the Company's operations. Overall, PLN NP-IMS brings efficiency to the Company through time and cost savings, and business disruption minimization.

PLN NP-IMS mengintegrasikan standar internasional Bidang Excellence Framework (EF), ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 37001:2016, ISO 55001:2014, ISO 20000-1:2018, ISO 27001:2013, ISO 22301:2012, ISO 17025:2017, ISO 50001:2018, ISO 31000:2018, ISO 9001:2015, ISO 26000:2010, ISO 37301:2021, ISO 21001:2018, ISO 10667-1:2020, ISO 10667-2:2020, SMK3, SMK, Sistem Manajemen lain yang terintegrasi dengan PLN NP-IMS.

PLN NP-IMS integrates international standard Bidang Excellence Framework (EF), ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 37001:2016, ISO 55001:2014, ISO 20000-1:2018, ISO 27001:2013, ISO 22301:2012, ISO 17025:2017, ISO 50001:2018, ISO 31000:2018, ISO 9001:2015, ISO 26000:2010, ISO 37301:2021, ISO 21001:2018, ISO 10667-1:2020, ISO 10667-2:2020, SMK3, SMK, other Management Systems integrated with PLN NP-IMS.

Pengelola PLN NP-IMS

PLN NP-IMS Management

PLN NP-IMS dikelola oleh Satuan Kinerja Korporat dan Pengembangan Sistem Manajemen Anaknya Bidang Pengembangan Sistem Manajemen, Hal ini berdasarkan Peraturan Direksi PT Pembangkitan Jawa-Bali No. DIR.PER/03/DIR/2021 tentang Perbaikan Susunan Organisasi dan Formasi Tenaga Kerja pada Direktorat Keuangan PT Pembangkitan Jawa-Bali, Pengelola PLN NP-IMS berada dibawah Satuan Kinerja Korporat & Pengembangan Sistem Manajemen dan membawahi 2 Bagi tetang yaitu Bidang Kinerja Korporat, Bidang Teknologi Informasi, dan Bidang Pengembangan Sistem Manajemen.

PLN NP-IMS is managed by Corporate Performance and Management System Development Unit specifically for Department of Management System Development. This is based on the Regulation of PT Pembangkitan Jawa-Bali's Board of Directors No. DIR.PER/03/DIR/2021 concerning the implementation of Organizational Structure and Work Force Formations at the Finance Directorate of PT Pembangkitan Jawa-Bali. PLN NP-IMS is managed by Corporate Performance and Management System Development Unit and supervises 2 (three) Departments, namely Corporate Performance Department, Information Technology Department, and Management System Development Department.

Tata Kelola dan Lingkup PLN NP-IMS

Governance and Scope of PLN NP-IMS

PLN NP-IMS merupakan penyempurnaan dan terbaiknya proses dalam integrasi termasuk interaksi diantara proses-proses yang diperlihatkan dalam bagan Proses Bisnis atau Tahapan Kerja menurut Gadinge Kundorese Framework. Penerapan PLN NP-IMS ini sesuai dengan Peraturan Direksi Nomor 0031P/013/DIR/2013 tentang Implementasi ISO 9001:2015 di PT Pembangkitan Jawa-Bali. Dalam proses penyusunan PLN NP-IMS, ISO 14001 merupakan pada konsep Plan Do Check Action (PDCA) ISO 9001:2015 sebagai kerangka Integrated Process.

PLN NP-IMS, is accomplishment of various systems integration processes, including interaction among the processes described in the chart of Business Processes Work Stations based on Gadinge Excellence Framework. PLN NP-IMS implementation is according to the Board of Directors Regulation No. 0031P/013/DIR/2013 concerning ISO 9001:2015 implementation at PT Pembangkitan Jawa-Bali. In the process of preparing PLN NP-IMS, ISO 14001 refers to Plan Do Check Action (PDCA) of ISO 9001:2015 concept as the Integrated Process framework.

Skema Proses Plan Do Check Action

Plan Do Check Action Scheme

Dalam skema di atas diketahui dan diidentifikasi melalui dengan langkah-langkah proses integrasi sebagai berikut:

a. Pemetaan bisnis proses dan interaksi prosesnya.
b. Identifikasi diagram korelasi dan keterkaitan dengan struktur organisasi dan masing-masing unit.
c. Alignment standard yang digunakan dengan menghilangkan duplikasi prosedur dan format, uji dan review proses-proses.

Based on the scheme above, it is generated and connected through eight steps of integration process as follows:

a. Business Processes and Interaction Mapping Process.
b. Identification of Correlation Diagrams and suitability with the main tasks and functions for the organization and each Unit.
c. Applied alignment standard through eliminating duplication of Procedures and Format, Test, and Review of the processes.

d. Mengembangkan kebijakan, objektif, target dan action plan sistem integrasi.
e. Menetapkan manual integrasi dan pengembangan generic prosedur yang berlaku dalam sistem integrasi.
f. Melaksanakan pelatihan pemahaman dan awareness terhadap penerapan PLN NP-IMS.
g. Melaksanakan pemantauan dan peningkatan berkelanjutan terhadap Sistem Integrasi.
h. Penjaminan conformance proses sistem integrasi terkait pemenuhan persyaratan standar-standar manajemen melalui suatu badan sertifikasi.

d. Policy Development, Objective, Target, and Action Plan Integrated System.
e. Establishment of Integrated Manual and Generic Procedure Development applied in integrated systems.
f. Implementation of knowledge and socialization training prior to PLN NP-IMS application.
g. Continuous monitoring and improvement towards Integrated System.
h. Conformance process guarantee for the Integrated System process related to the fulfillment of management standard requirements through Certification department.

Adapun sistem manajemen yang diadopsi Perusahaan dalam PLN NP-IMS meliputi beberapa sistem manajemen sebagai berikut:

The Company adopts management system in the PLN NP-IMS, including several management systems as follows:

Tabel Sistem Manajemen yang Diadopsi dalam PLN NP-IMS
Table of Management System Adopted in PLN NP-IMS

No	Sistem Manajemen Management System	Keterangan Penerapan Implementation Description
1	Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Quality Management System ISO 9001:2015	Seluruh persyaratan klausul diterapkan kecuali Klausul 7.3 Design and Development, dikarenakan kegiatan ini tidak dilakukan oleh PLN NP All requirement clauses are applied unless the 7.3 Clause on Design and Development since this activity is not implemented by PLN NP
2	Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015 Environmental Management System ISO 14001:2015	Seluruh persyaratan klausul diterapkan All requirement clauses are applied
3	Sistem Manajemen K3 ISO 45001:2018 OHS Management System ISO 45001:2018	Seluruh persyaratan klausul diterapkan All requirement clauses are applied
4	Sistem Manajemen Energi ISO 50001:2018 Energy Management System ISO 50001:2018	Seluruh persyaratan klausul diterapkan All requirement clauses are applied
5	Sistem Manajemen Aset ISO 55001:2014 Asset Management System ISO 55001:2014	Seluruh persyaratan klausul diterapkan All requirement clauses are applied
6	KAN Akreditasi Pengujian Lab ISO 17025:2017 KAN Laboratory and Calibration Management System ISO 17025:2017	Seluruh persyaratan klausul diterapkan All requirement clauses are applied
7	Sistem Manajemen ISO 20000-1:2018 ISO Management System 20000-1:2018	Seluruh persyaratan klausul diterapkan All requirement clauses are applied
8	Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO 27001:2013 Cyber Security Management System ISO 27001:2013	Seluruh persyaratan klausul diterapkan All requirement clauses are applied
9	Sistem Manajemen Keberlangsungan Usaha/Bisnis ISO 22301:2012 Business Continuity Management System ISO 22301:2012	Seluruh persyaratan klausul diterapkan All requirement clauses are applied
10	Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System ISO 37001:2016	Seluruh persyaratan klausul diterapkan All requirement clauses are applied
11	Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan ISO 21001:2018 Educational Organizations Management System ISO 21001:2018	Seluruh persyaratan klausul diterapkan All requirement clauses are applied
12	Sistem Manajemen Risiko ISO 31000:2018 Risk Management System ISO 31000:2018	Seluruh persyaratan klausul diterapkan sebagai guidance All requirement clauses are applied as guidance
13	Sistem Manajemen Kepatuhan ISO 19600:2014 Compliance Management System ISO 19600:2014	Seluruh persyaratan klausul diterapkan sebagai guidance All requirement clauses are applied as guidance
14	Sistem Manajemen Tanggung Jawab Sosial ISO 26000:2010 Corporate Social Responsibility Management System ISO 26000:2010	Seluruh persyaratan klausul diterapkan sebagai guidance All requirement clauses are applied as guidance

No.	Sistem Manajemen Management System	Keterangan Penerapan Implementation Description
17	Sistem Manajemen Assessment Service Delivery ISO 10007:2020 Assessment Service Delivery Management System ISO 10007:2020	- Seluruh pengadaan sesuai dengan pedoman standar - All procurement process are applied as guidance
18	Kriteria Baldrige Baldrige Criteria	- Seluruh kebutuhan terkait - All Criteria Requirements

Perusahaan memantau bahwa kebijakan program, sasaran dan proses-proses selalu mutakhir (up-to-date) sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam rangka pemenuhan masing-masing standar sistem manajemen yang diimplementasikan. Selain itu, perusahaan standar sistem manajemen diterapkan, diimplementasikan dan dipelihara sesuai standar terbaru.

The Company guarantees that the policies, programs, targets and processes are always up-to-date following the Company needs in order to fulfill each of the applied management system standards. Moreover, PLN NP also establishes, implements, and maintains the management system standard requirements according to the latest standards.

Realisasi Program Kerja PLN NP-IMS Tahun 2022

Realization of PLN NP-IMS' Work Program Plan for 2022

PLN NP telah melakukan beberapa program kerja dalam rangka menjaga kualitas PLN NP-IMS selama tahun 2022, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pencanangan Proses Bisnis Holding-Subholding untuk 6 Stream
2. Melakukan Surveillance Audit Sistem Manajemen Terintegrasi PT PLN Nusantara Power
3. Melakukan Update Dokumen Proses Bisnis BIS 2.0

PLN NP have carried out several work programs in order to maintain the quality of PLN NP-IMS throughout 2022, including:

1. Confirm the Holding-Sub Holding Business Process for 6 Streams
2. Surveillance Audit of Integrated Management System of PT PLN Nusantara Power
3. Updated the BIS 2.0 Business Process Proposal

Rencana Program Kerja PLN NP-IMS Tahun 2023

PLN NP-IMS' Work Program Plan for 2023

Rencana Program Kerja PLN NP-IMS di tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Memastikan Proses Bisnis Pasca Legal Entity Pembahasan Organisasi PLN Nusantara Power
2. Pendefinisian Sistem Manajemen Terintegrasi PT PLN Persero
3. Desertifikasi Sistem Manajemen Terintegrasi PT PLN Nusantara Power
4. Melakukan Sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan SMK2 dan Sistem Manajemen Gas Rumah Kaca ISO 14064:2018.

PLN NP-IMS Work Program Plan for 2023 is as follows:

1. Processing Post Legal Entity Business Processes for PLN Nusantara Power Organizational Changes
2. Defining Integrated Management System of PT PLN Persero
3. Re-certification of the Integrated Management System of PT PLN Nusantara Power
4. Conducting Certification of SMK2 Electricity Safety Management System and ISO 14064-2:2018 Greenhouse Gas Management System.

Pengembangan Strategi Manajemen Aset

Development of Asset Management Strategy

Manajemen aset Perusahaan mencakup proses pengembangan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengalihan aset secara efisien yang mengacu pada standard ISO 55001:2014. Melalui manajemen aset yang berkelanjutan, memungkinkan Perusahaan mendeteksi risiko yang mungkin timbul dan memberikan hasil pengembalian atas aset yang optimal.

The Company's asset management includes the process of developing, operating, maintaining, and transferring assets efficiently which refers to the ISO 55001:2014 standard. Through continuous asset management, the Company is able to detect risks that may arise and provide optimal return on assets.

Pengelola Manajemen Aset

Asset Management Executive

Unit kerja di Perusahaan yang bertanggung jawab mengelola manajemen aset adalah Satuan Kinerja Korporat dan Pengembangan Sistem Manajemen sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi PT Pembangkitan Jawa-Bali No. 0003/PD100 DIR/2021 tentang Organisasi dan Tatnas Tenaga Kerja pada Satuan Kinerja Korporat dan Pengembangan Sistem Manajemen PT Pembangkitan Jawa-Bali; pengelola Aset Manajemen adalah Satuan Kinerja Korporat dan Pengembangan Sistem Manajemen.

The work unit in the Company that is in charge of managing asset management refers to Corporate Performance and Management System Development Unit as stipulated in the Regulation of the Board of Directors of PT Pembangkitan Jawa-Bali No. 0003/PD100/DIR/2021 concerning Organization and Manpower Formation in the Corporate Performance and Management System Development Unit of PT Pembangkitan Jawa-Bali; the manager of asset management is the Corporate Performance and Management System Development Unit.

Pengelolaan Manajemen Aset berada di bawah wewenang Satuan Pengembangan Sistem Manajemen dan membawahi 3 (tiga) bidang yaitu Bidang Kinerja Korporat, Bidang Teknologi Informasi, dan Bidang Pengembangan Sistem Manajemen.

Asset Management is under the authority of the Management System Development Unit and is in charge of 3 (three) departments, namely the Corporate Performance Department, the Information Technology Department, and the Management System Development Department.

Kerangka Kerja Manajemen Aset

Asset Management Framework

Implementasi konsep manajemen aset di Perusahaan mengacu pada standard best practice ISO 55001:2014 yang disesuaikan dengan Aset yang dikelola oleh PLN NP, yaitu Aset pembangkit listrik. Pedoman implementasi manajemen aset pembangkitan di PLN NP tertuang pada Peraturan Direksi PT Pembangkitan Jawa Bali No. 0021/PD100/DIR/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Implementasi Manajemen Aset Pembangkitan PT PJB. Proses pengelolaan manajemen aset tersebut dituangkan dalam Framework Manajemen Aset Pembangkitan pada Peraturan Direksi tersebut dalam selengkapnya dituangkan melalui bagan berikut:

The implementation of the asset management concept in the Company refers to the ISO 55001:2014 best practice standard adjusted to the assets managed by PLN NP, namely power plant assets. Guidelines for the implementation of Electric Power Plant asset management in PLN NP are in the Regulation of the Board of Directors of PT Pembangkitan Jawa Bali No. 0021/PD100/DIR/2022 concerning Regulations for the Implementation of PT PJB's Electric Power Plant Asset Management. The asset management process is outlined in the Electric Power Plant Asset Management Framework in the above regulation, as shown in the following chart:

Contoh Kerja Manajemen Aset Pembangkitan
Electric Power Plant Asset Management Framework

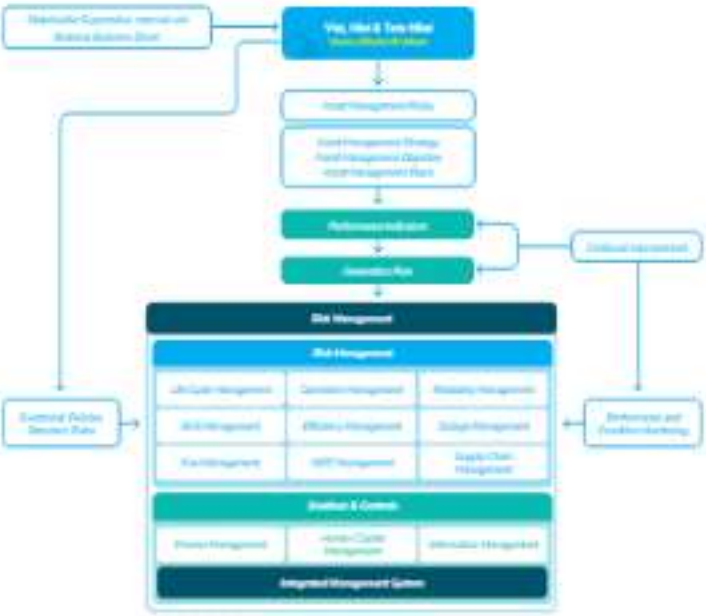

Strategi Manajemen Aset

Asset Management Strategy

Penerapan strategi manajemen aset bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen serta mempertahankan aset sebagai nantinya aset layanan yang berkelanjutan. Strategi manajemen aset membantu sistem-sistem. Perusahaan dalam membuat keputusan standard guna mencapai hasil yang diinginkan secara efektif dan efisien diantaranya:

1. Memanfaatkan maksimal dungan aset yang ada.
2. Memanfaatkan nilai uang lebih direalisasi investasi aset baru.
3. Pembuatan keputusan untuk memastikan, mempertahankan atau direalisasi aset dengan mempertahankan serta mendukung kebutuhan generasi sekarang dan masa depan.

Asset management strategy purposed to meet the customer needs as well as to provide and maintain assets as are to achieve excellent service results. The asset management strategy assists the Company's standards in making decisions on assets to achieve the desired results effectively and efficiently, including:

1. Utilization of the existing assets as optimal as possible.
2. Utilization of value for money when new asset investments are made.
3. Making decisions to make, retain or divest assets by taking into account and protecting the needs of current and future Electric Power Plants.

Area yang menjadi sasaran strategis implementasi Manajemen Aset di Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Plant Availability & Reliability
2. Peningkatan efisiensi thermal
3. Kapabilitas yang berkelanjutan
4. Sustainable Human & Knowledge Asset Performance
5. Risk Management dalam pengelolaan aset

Strategic targets for the implementation of Asset Management in the Company are the following areas:

1. Plant Availability & Reliability
2. Improved thermal efficiency
3. Sustainable leadership
4. Sustainable Human & Knowledge Asset Performance
5. Risk Management in asset management

Pengelolaan aset dilupakan untuk mencapai kinerja optimal pada area strategis di atas dengan menerapkan Strategi Manajemen Aset sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan ketersediaan dan keandalan pembangkit
2. Meningkatkan efisiensi pembangkit
3. Menyelaraskan Supply Chain Management dengan seluruh kebijakan pemilihan dan kinerja pembangkit berdasarkan prinsip life cycle asset
4. Meningkatkan komunikasi internal dan eksternal
5. Mengembangkan kapasitas organisasi dalam melakukan dan mengevaluasikan pencapaian kinerja
6. Mengoptimalkan Knowledge Management
7. Pengelolaan aset memperhatikan dengan mengedepankan faktor HSE (Health, Safety and Environment)

Asset management is intended to achieve excellent performance above strategic areas by implementing the following Asset Management Strategies:

1. Optimizing power plant readiness and reliability
2. Optimizing power plant efficiency
3. Aligning Supply Chain Management with all licensing activities and power plant performance based on life cycle cost principles
4. Optimizing internal and external communication
5. Developing organizational capacity in executing and evaluating performance achievements
6. Optimizing knowledge Management
7. Managing power plant assets by prioritizing the HSE (Health, Safety and Environment) factor

Proses Manajemen Aset
Asset Management Process

Proses Manajemen Aset Perusahaan dilupakan dalam gambar sebagai berikut:

The Company Asset Management process is as the following picture:

Diagram Proses Manajemen Aset
Diagram of Asset Management Process

Eksekusi Manajemen Aset

Asset Management Execution

Manajemen aset (Pengelolaan aset) mencakup proses life cycle dan kadar manajemen risiko yang didukung oleh berbagai sumber daya dan prosedur pengelolaan aset yang dilakukan oleh seluruh unit. Pengelolaan tersebut dijabarkan dengan melakukan cascading sebagaimana ditunjukkan dalam gambar sebagai berikut:

The Company's asset management implements life cycle principles and risk management principles supported by various resources and asset management procedures conducted by all units. The management is realized by cascading as shown in the following picture:

Cascading Manajemen Aset

Asset Management Cascading

Realisasi Program Kerja Manajemen Aset Tahun 2022

Realisation of Asset Management Work Program in 2022

Program kerja dalam rangka menjaga kualitas Manajemen Aset selama tahun 2022, diantaranya adalah:

1. Assistensi dan sosialisasi Peraturan Direksi No. 0014.P/DIR/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Implementasi Manajemen Aset Pembangkitan PLN NP.
2. Workshop, sosialisasi dan pendampingan proses sertifikasi terkait ISO 55001: 2014.

The work program in order to maintain the quality of Asset Management during 2022 is as follows:

1. Assistance and socialization of Regulation of the Board of Directors No. 0014.P/DIR/2022 concerning Regulations on the Implementation of PLN NP Electric Power Plant Asset Management.
2. Workshop, socialization and assistance in the certification process related to ISO 55001 : 2014.

3. Pengukuran implementasi manajemen aset pembangkitan dengan melakukan program pian walkdown, workshop, dan FGD.
4. Penyusunan Kriteria Standar Kompetensi yang diajukan untuk sertifikasi oleh Dirjen ketenagalistrikan terkait Personel Manajemen Aset Pembangkitan.
5. Update material pada kelas di ITE Academy terkait pembelajaran Asset Management dan Tata Kelola Pembangkitan.
6. Penyusunan Maturity Level pada dan Kriteria Maturity Level untuk tiga elemen Plan & Life Cycle Cost Management, Process Safety Management, Pengelolaan Energi (Primer).

3. Strengthened the implementation of Electric Power Plant asset management by conducting plan walkdown programs, workshops, and FGDs.
4. Preparation of Competency Standard Criteria submitted for certification by the Director General of Electricity related to Electric Power Plant Asset Management Personnel.
5. Updated learning materials in ITE Academy related to Asset Management and Electric Power Plant Governance Learning.
6. Preparation of Learning Materials and Maturity Level Criteria for three core elements (Life Cycle Cost Management, Process Safety Management, Primary Energy Management).

Rencana Program Kerja Manajemen Aset Tahun 2023

Asset Management Work Program Plan for 2023

Rencana Program Kerja Manajemen Aset di tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Asset Management dan Tata Kelola Pembangkitan
   a. Review Proses Utama dan pembuatan Business Process Owner (BPO)/Pemilik Proses pada panduan Manajemen Aset Pembangkitan PLN NP.
   b. Review Kurikulum & Silabus serta materi pembelajaran terkait Asset Management dan Tata Kelola Pembangkitan
   c. Webinar Series Asset Management
   d. Program Pemintu – Diskusi Grup Kuantitas (12 Unit UPK/ UKOM)
   e. Workshop/ FGD untuk masing-masing elemen Tata Kelola Pembangkitan
   f. Point Validation terkait Tata Kelola Pembangkitan pasca HGN
   g. Sosialisasi dan pembinaan terkait ISO 55001:2014 pasca HGN
2. Improvement Asset Management dan Tata Kelola Pembangkitan
   a. Penyusunan Kriteria Maturity Level untuk Elemen LCCM dan PSM
   b. Sertifikasi Kompetensi Personel Implementor Tata Kelola Pembangkitan
   c. Optimalisasi fitur aplikasi Enterprise Asset Management (EAM) dalam elemen Tata Kelola Pembangkitan PLN NP.
3. Project Owner untuk Proyek Implementasi Enterprise Asset Management
   a. Proyek Implementasi Asset Management Pilar Operasi dan ISO 55000 di PT Sari Dasa Energi (SDE)
   b. Implementasi EAM (Maximo) UNE di ULPLTA.

Asset Management Work Program Plan in 2023 is as follows:

1. Management of Asset Management and Electric Power Plant Governance
   a. Review of Business Processes and determination of Business Process Owner (BPO)/Process Supervisor in guidelines for PLN NP Electric Power Plant Asset Management.
   b. Review of Curriculum & Syllabus, as well as learning materials related to Asset Management and Electric Power Plant Governance.
   c. Webinar Series Asset Management.
   d. Presenting – Discussing Group Quantities program (12 UPK/UKOM units).
   e. Workshop/FGD for each Electric Power Plant Governance element.
   f. Point Validations related to Electric Power Plant Governance post-HGN.
   g. Socialization and guidance related to ISO 55001:2014 post-HGN.
2. Improvement of Asset Management and Electric Power Plant Governance
   a. Preparation of Maturity Level Criteria for LCCM and PSM Elements.
   b. Competency Certification of Electric Power Plant Governance Implementer Personnel.
   c. Optimization of Enterprise Asset Management (EAM) application features in the PLN NP Electric Power Plant Governance element.
3. Project Owner for Enterprise Asset Management Implementation Project.
   a. Project on the Implementation of Asset Management Pillar Operations and ISO 55000 at PT Sari Dasa Energy (SDE).
   b. Implementation of EAM (Maximo) UNE at ULPLTA.

Optimalisasi Potensi melalui Pengembangan Usaha

Optimizing Potential through Business Development

Industri pembangkitan tenaga listrik menjadi sangat dinamis menyesuaikan dengan tantutan perkembangan sumber daya, teknologi dan daya saing. PLN NP memaksimalkan potensi sumber daya internal melalui pengembangan dan inovasi, semata-mata untuk kepentingan keberlanjutan usaha Perusahaan.

Electric power plant industry turns into highly dynamic to adapt with the growth demands of resources, technology and competitiveness. PLN NP maximizes the internal resources potential through development and initiation, exclusively for the interest of sustainable business of the Company.

Pengelola Pengembangan Usaha

Business Development Management

Pengelola Pengembangan Usaha dilakukan oleh Direktorat Pengembangan Bisnis dan Niaga sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi PT Pembangkitan Jawa-Bali No. 026/PDIR-2012/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Pembangkitan Jawa-Bali. Pengelola pengembangan usaha berada di bawah Direktorat Pengembangan Bisnis dan Niaga, yang membawahi 4 Sidang yaitu Divisi Niaga, Divisi EBT dan Pengembangan Pembangkit, Divisi Konstruksi dan PPSO, dan Divisi Supply Chain Management.

The Directorate of Business Development and Commerce runs Business Development Management as stipulated in the Board of Directors Regulation of PT Pembangkitan Jawa-Bali No. No. 026/PDIR-2012/2022 concerning Organization and Work Procedure of PT Pembangkitan Jawa-Bali. The Business Development is under the Directorate of Business Development and Commerce, which supervises 4 fields namely, Commerce Division, NRE and Power Plant Development Division, Construction and PPSO Division, and Supply Chain Management Division.

Di dalam pelaksanaan pengembangan usaha, Sidang-Sidang tersebut didukung oleh Anak Perusahaan di bidang investasi (PT YTL), bidang konstruksi (PT IP), serta didukung oleh Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi lainnya.

In carrying out business development, these fields are supported by Subsidiaries in the investment field (PT YTL), Construction field (PT IP), and the support of other Subsidiaries and Affiliates.

Tata Kelola Pengembangan Usaha

Business Development Governance

Tujuan utama pengembangan usaha adalah memaksimalkan optimasi dari sumber daya internal untuk memberikan kontribusi yang maksimal dari segala peluang bisnis yang akan muncul. Selain itu, juga meningkatkan kinerja proyek yang telah berjalan sehingga mutlak dalam memberikan nilai dalam peningkatan kinerja perusahaan dan business sustainability.

The main focus of business development is to prepare the optimization of internal resources and provide maximum contribution to every upcoming business opportunities. Furthermore, it also improves the performance of ongoing projects so as to be able to necessarily contribute in enhancing business performance and business sustainability.

Pengembangan usaha PLN NP saat ini fokus pada beberapa pengembangan diantaranya:

1. Sedangkan beberapa proyek yang saat ini dalam tahap konstruksi yaitu PLTG Floating Cirata sebesar 145 MWAC, PLTA Batang Toru dengan kapasitas 510 MW dan PLTU Sumbagsel 1 dengan kapasitas 2x150 MW.

PLN NP's business development focuses on several developments, including:

1. Currently, there are several projects under construction, namely the Cirata Floating 2FP with a capacity of 145 MWAC, the Batang Toru HPP, with a capacity of 510 MW and Southern Sumatera COMP 1 with a capacity of 2x150 MW.

2. Terdapat beberapa proyek yang saat ini dalam tahap inisiasi dan development, yaitu Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Biru (PLTB) dengan kapasitas total sekitar 70 MW di Sanur Lalt, Kalimantan Selatan; Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Floating Karangkates 100 MW di Jawa Timur; PLTS Skalabrid/Hibrid sekitar 50 MWP yang tersebar di 38 lokasi hub di Jawa, Sumatera dan Kalimantan; PLTA Gulingged (Kudal) Tersebar 200 MW; PLTA Jawa-Bali (Kudal) Tersebar 50 MW dan PLTS Sosopang Sebesar 42 MWp.
3. Telah dilakukan inisiasi berupa kajian kelayakan proyek (Feasibility Study) untuk potensi pengembangan pembangkit, baik PLTS, PLTB dan PLTA/B dengan rencana tersebar berdasarkan RUPTL PT PLN (Persero) 2021-2030 serta persiapan kajian kelayakan dan pengembangan pendirian untuk proyek PLTA di DAS Mentaya.

2. There are several projects currently in the initiation and development stages, namely the Development of a Wind Power Plant (WPP) with a capacity of around 70 MW in Sanur Lalt, South Kalimantan; Development of a 100 MWC Floating Karangkates Solar Power Plant (SPP) in East Java; SPP development of around 50 MWP spread across 38 locations in Java, Sumatera and Kalimantan; spread across the Southern Sumatera (SPP (Cluster of 200 MWC spread across Java-Bali) MPP (guide) of 50 MW and Floating Sabah (SPP of 42 MWp).
3. The Company initiated a project feasibility study (Feasibility Study) for the potential in order to develop power plants, both SPP, MPP and MPP/MPP with the scattered locations based on Electricity Supply Business Plan (RUPTL) of PT PLN (Persero) for 2021-2030 as well as preparation of feasibility studies and licensing arrangements for hydropower projects in Kembahanan Watershed.

Dalam melaksanakan pengembangan usaha, PLN NP telah dilengkapi dengan perangkat kebijakan tata kelola pengembangan usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengembangan usaha anak-anak kelak. Selain itu, telah tersedia aplikasi PMO (Program Management Office) untuk membantu Project Manager dalam melakukan fungsi kontrol dan monitor proyek mulai dari tahap inisiasi hingga fase penyelesaian proyek tersebut.

In carrying out business development, PLN NP has been equipped with business development governance policy tools as the guideline in implementing business development by the relevant business. Moreover, the PMO (Program Management Office) application is available to assist the Project Manager in carrying project control and monitoring functions from the initiation stage to the project completion stage.

Realisasi Program Kerja Pengembangan Usaha Tahun 2022

Realization of Business Development Performance in 2022

Realisasi Program Kerja Pengembangan Usaha selama tahun 2022, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. PLN NP mendapatkan Penugasan dari Pemegang Saham untuk mengembangkan PLTS Diakreasikan pada 14 April 2022.
2. PLN NP mendapatkan Penugasan dari Pemegang Saham untuk mengembangkan PLTS Floating Karangkates pada 28 Desember 2022.
3. Penyampaian hasil proses lelang oleh PLN Suderi of Interest (oI) untuk pengembangan PLTB Tanah Laut pada 20 April 2022, dimana PLN NP sebagai mandatory partner pada proses tersebut.
4. PLN NP mendapatkan Penugasan Pengembangan Pekerjaan Hidro di DAS Hambatama, Papua pada 9 Maret 2022 dan telah dilakukan penyusunan kajian kelayakan dan penyusunan perizinan untuk PLTA Hambatama.
5. PLN NP mendapatkan Penugasan Penyusunan Kajian Opsi Pelambahan Kapasitas Daya Sistem Sebesar PLTS Diakreasikan pada 28 Desember 2022.
6. Telah dilakukan penyusunan kajian kelayakan proyek (feasibility study) untuk proyek-proyek potensial sesuai RUPTL PT PLN (Persero) meliputi PLTS, PLTB, PLTA/PLTM.

Realization of Business Development Performance throughout 2022 is as follows:

1. PLN NP received an Assignment from the Shareholders to develop SPP de-dieselization on April 14, 2022.
2. PLN NP received an Assignment from Shareholders to develop the Floating Karangkates SPP on December 28, 2022.
3. Submission of the results of the auction process by PLN Suderi of Interest (oI) for the Tanah Laut WPP development on April 20, 2022 where PLN NP was the mandatory partner for the process.
4. PLN NP received a Hydro Potential Development Assignment in the Hambatama Watershed, Papua on March 9, 2022 as well as prepared the feasibility study and carried out the licensing arrangements for the Hambatama Hydropower Plant.
5. PLN NP received the Assignment to Prepare a Study of Options for Additional Power Capacity of the System Sectored SPP System on December 28, 2022.
6. Feasibility study have been prepared for potential projects according to Electricity Supply Business Plan (RUPTL) of PT PLN (Persero), including SPP, MPP, HPP/MHPP.

Rencana Program Kerja Pengembangan Usaha Tahun 2023

Business Development Work Plan for 2023

Rencana Program Kerja Pengembangan Usaha di tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Proses pengembangan dan pemilihan partner untuk PLTS Floating Kabupaten dan PLTS IKN.
2. Proses pendokumentasian untuk proyek PLTS Darbedaran.
3. Proses due diligence sampai dengan eject keuntuk berdasarkan sebesar 2535 MP untuk proyek PLTS Teluk Laut.
4. Proses pengembangan untuk PLTA Sulbagsel (Kuta) Tersebar 200 MW.
5. Proses pengembangan untuk PLTA Jawa Bali (Kuta) Tersebar 30 MW.
6. Proses pengembangan untuk PLTS Singkung Dalam A2 MWp.
7. Akuisisi PLTGU Sengkang 235 MW.
8. Inisiasi proyek yang akan diupayakan kepada 3535 MP yaitu PLTS 1074, PLTA dan proyek lainnya secara dengan 3535 Perusahaan Strategis.
9. Inisiasi proyek-proyek di luar RUPTL seperti potensi pengembangan PLTA 1000 Hambaronna di Papua, additional demand potensi akuisisi pembangkit pengembangan captive power serta proyek lainnya.

Business Development Work Plan for 2023 is as follows:

1. The process of developing and selecting partners for Floating Kabupaten IKN and IKN IKN.
2. The land documenting process for the IKN IKN documentation project.
3. Due diligence process up to eject/for export based on PLN MP shares for the Teluk Laut IKN project.
4. Development process for Southern Sulawesi (KIP) (Lumbi Spread over) 200 MW.
5. The development process for the Java Bali Hydropower plant (quality spreadover) 30 MW.
6. Development process for the Singkung Dalam A2 MWp.
7. Acquisition of Sengkang (CCPP of 235 MW).
8. Initiating projects that will be assigned to PLN MP, namely IKN, MPP, MMEP, and other projects following the Strategic Assignment (Special Meeting of Shareholders).
9. Initiation of projects outside the RUPTL, such as the potential for the development of the Hambaronna (100) hydropower plant in Papua, additional demand potential acquisition of power plants, development of captive power, and other projects.

Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis

Analisis Industri
Industry Analysis

Tinjauan Perekonomian Dunia
World Economy Overview

Risiko pandemi global yang kembali meningkat pada 2022 membawa tantangan bagi upaya memulihkan pemulihan ekonomi nasional. Risiko global tersebut dipicu oleh perang antara Rusia dan Ukraina yang memicu meningkatnya fragmentasi politik dan ekonomi dunia. Secara umum perekonomian dunia pada 2022 menghadapi lima tantangan serius yang sangat perlu diwaspadai. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang melambat (slow growth). Kedua, inflasi yang sangat tinggi (high inflation) dipicu kenaikan harga energi dan pangan global. Ketiga, kebijakan suku bunga tinggi dalam waktu yang lama (higher for longer). Keempat, nilai AS yang sangat kuat (strong dollar) sehingga memberikan tekanan depresiasi nilai tukar banyak negara. Kelima pemotongan dana investor global dan mengalihkan ke aset lebih aman (safe haven) di tengah tantangan perekonomian global tersebut pada akhirnya mencuatkan pergeseran besar arena internasional baik skala regional maupun multilateral.

Global economic risks re-increased in 2022, resulted in challenges for efforts in accelerating national economic recovery. Global risks were triggered by the war between Russia and Ukraine, which reincreased the fragmentation of world politics and economics. In general, the world economy in 2022 faced five serious challenges that needed to be anticipated. First, declining economic growth (slow growth). Second, high inflation was triggered by the increase in global energy and food prices. Third, high interest rate policy for a long time (higher for longer). Fourth, greedy strong US dollar so as to put pressure on the depreciation of many countries' exchange rates. Fifth, the withdrawal of global investor funds and shifting to safer assets (safe haven) in the end, faced challenges of the global economy ultimately require strengthening international cooperation both regionally and multilaterally.

Kerja sama multilateral yang lebih kuat sangat penting untuk mengejar pertumbuhan dari situasi terburuk sistem multilateral dan untuk memfasilitasi perubahan iklim dengan membatasi emisi dan meningkatkan investasi hijau. Di sisi lain kebijakan pro-pasar juga dapat mengatasi faktor struktural utama yang menghambat pertumbuhan ekonomi, membantu membangun ketahanan ekonomi, dan meningkatkan kohesi sosial. Untuk mendukung kebijakan-kebijakan untuk investasi di sepanjang rantai pasokan dan teknologi energi hijau yang akan mendukung transisi energi serta membantu mempercepat kemajuan transisi energi hijau.

Stronger multilateral cooperation is essential to maximize the growth of the multilateral system derived rules and to mitigate climate change by limiting emissions and increasing green investments. On the other hand, building policies can also address key structural factors that constrain economic growth, assist in building economic resilience, and alleviate price pressures. An integrated encouragement for investment throughout the supply chain of green energy technologies is needed to support energy security and to assist in accelerating the progress of the green energy transition.

Sumber: World Economic Outlook International Monetary Fund (IMF) Januari 2022
Source: World Economic Outlook International Monetary Fund (IMF) January 2022

Grafik Pertumbuhan Ekonomi Dunia (%)
Chart of World Economic Growth (%)

Sumber: World Economic Outlook International Monetary Fund (IMF) Januari 2022
Source: World Economic Outlook International Monetary Fund (IMF) January 2022

Analisis Perekonomian Indonesia
Indonesian Economy Analysis

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Indonesian Economic Growth

Perekonomian Indonesia diperkirakan mampu melanjutkan pemulihan ekonomi di tengah tekanan inflasi global dan perlambatan ekonomi beberapa negara pada kwartal-nya tahun 2022. Indonesia harus mewaspadai risiko dan dampak yang ditimbulkan seperti kebijakan geopolitik yang masih meningkat, pengetatan kebijakan moneter global, dan kenaikan harga komoditas. Banyak negara telah merumuskan perlambatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan tekanan inflasi sehingga mengindikasikan bahwa semakin kuat dan dekat pada risiko stagflasi. Namun, kondisi tersebut tidak terlihat pada sektor perekonomian domestik. Fenomena windfall memungkinkan pemerintah untuk memanfaatkan stimulus fiskal dengan tetap fokus pada pada proses pemulihan.

The Indonesian economy is expected to be able to continue economic recovery amid the global inflationary pressure and the economic slowdown of several countries throughout 2023. Indonesia should be aware of the risks and impacts such as heightened geopolitical tensions, tightening global monetary policy, and rising commodity prices. Many countries indicated this slowdown in economic development and increase in inflationary pressure, thus indicating that they are getting stronger and closer to the risk of stagflation. However, these conditions are not seen in the domestic economy. The windfall phenomenon allows the government to expand fiscal stimulus while keeping the main focus on the recovery process.

Didukung fundamental ekonomi nasional yang kuat, stabilan ekonomi domestik tetap terjaga di tengah gejolak global masih mengalami pertumbuhan yang positif. Berbagai kebijakan dan strategi konkuren yang diambil Pemerintah, salah satunya melalui Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN-PEN), berhasil menjadi kunci keberhasilan dalam mendorong laju ekonomi nasional. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai sebesar 5,31 persen lebih tinggi dibanding capaian tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,70 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,67 persen, sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 16,28 persen.

Supported by strong national economic fundamentals, domestic economic activity keeps moving despite global instabilities and still experiencing ups and downs. Combination of various concurrent policies and strategies taken by the Government, including the Covid-19 Handling Program and National Economic Recovery (PEN-PEN), has succeeded in encouraging the pace of the national economy. This is reflected in Indonesia's economic growth which reached 5.31 percent, higher than the achievement in 2021 which increased by 3.70 percent. In terms of production, the highest growth occurred in the Transportation and Warehousing Business Field at 10.67 percent. Meanwhile, in terms of expenditure, the highest growth was achieved by the Component of Goods and Services Exports at 16.28 percent.

Ekonomi Indonesia triwulan IV-2022 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 0,98 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,46 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,12 persen. Selama tahun 2022 terdapat provinsi di Pulau Jawa merupakan struktur dan kinerja ekonomi Indonesia secara spasial dengan berkontribusi sebesar 56,88 persen dan kinerja ekonomi yang mencatat pertumbuhan 5,31 persen (y-to-y).

Indonesia's economy in the fourth quarter of 2022 against the previous quarter increased by 0.98 percent (q-to-q). In terms of production, Public Administration, Defense, and Compulsory Social Security Business Field experienced the highest increase of 10.46 percent. In terms of expenditure, the Government Consumption Expenditure (PK-P) Component experienced the highest increase of 10.12 percent. During 2022, the group of provinces in the Island spatially dominated the structure and performance of the Indonesian economy with a contribution of 56.88 percent and an economic performance that recorded an increase of 5.31 percent (y-to-y).

Sumber: Badan Pusat Statistik Perekonomian Nasional Indonesia No. 03/02/Th. XXVI, 5 Februari 2023
Source: Official Statistic of Indonesia's Economic Growth Statistics No. 03/02/Th. XXVI, February 5, 2023

Tingkat Inflasi Indonesia
Indonesia's Inflation Rate

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Inflasi Indeks Harga Konsumen pada Desember 2022 tercatat sebesar 0,66% (mtm) sehingga inflasi Indeks Harga Konsumen 2022 mencapai 5,51% (yoy), meningkat dibandingkan dengan inflasi Indeks Harga Konsumen 2021 sebesar 1,87% (yoy) dan lebih tinggi dari asesmen 3,6±1%, terutama dipengaruhi oleh dampak penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada September 2022. Sebagai pelonggaran kuasa menyebabkan inflasi pasca kenaikan harga BBM sempat terkendali tercermin pada disaggregasi inflasi dari faktornya inflasi yang lebih rendah dan stabil secara dan prakiraan awal. Perkembangan inflasi Indeks Harga Konsumen yang terkendali tidak terlepas dari pengaruh positif dari sinergi kebijakan yang makin erat antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Bank Indonesia, serta berbagai mitra strategis dalam menurunkan laju inflasi, termasuk mengoptimalkan dampak terjadinya penyesuaian harga BBM. Untuk pengendalian ke Bank Indonesia bersiap akan terus memperkuat bauran kebijakan guna memastikan laju terjangkitnya penurunan ekspektasi inflasi dan inflasi sehingga inflasi terkendali sesuai dengan sasaran 3,0±1%.

Based on data from the Central Bureau of Statistics (BPS), the Consumer Price Index inflation in December 2022 was recorded at 0.66% (mtm) so that the 2022 Consumer Price Index inflation was 5.51% (yoy), increased compared to the 2021 Consumer Price Index inflation of 1.87% (yoy) and higher than the target of 3.0±1%, mainly influenced by the impact of subsidized fuel (BBM) price adjustments in September 2022. Various monthly developments indicate that post-fuel price increase inflation in bank under control as inflation or inflation expectations and inflationary pressures that continue to decrease and are lower than initial forecasts. The development of controlled Consumer Price Index inflation is inseparable from the positive influence of the closer policy synergy between the Central and Regional Governments, Bank Indonesia and various strategic partners in reducing the inflation rate, including optimizing the continued impact of fuel price adjustments. In its implementation, Bank Indonesia will continue to strengthen policy responses in the future to ensure the continued decrease in inflation and inflation expectations so that core inflation is maintained within the range of 3.0±1%. Policy coordination will

Kondisi tersebut juga turut dipengaruhi oleh kebijakan moneter dalam rangka pencapaian sasaran inflasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Dalam hal ini, koordinasi dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) terus ditingkatkan melalui penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah.

also continue to be strengthened in the regard, coordination in the Central and Regional Inflation Control Teams (TPIP and TPID) will continue through strengthening the National Food Inflation Control Movement (GNPIP) program in various regions.

Sumber: Bank Indonesia, Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Indonesia Triwulan III-2022

Source: Bank Indonesia, Indonesia Economic and Financial Developments Quarter III-2022

Nilai Tukar Mata Uang

Currency Exchange Rates

Indeks nilai tukar dolar AS terhadap mata uang utama (DXY) atau indeks yang menunjukkan pergerakan dolar terhadap 6 mata uang negara utama lainnya yaitu EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF ditutup pada 106,28 pada 30 November 2022 atau mengalami penguatan sebesar 11,09% (ytd) selama tahun 2022. Sementara itu, dengan langkah-langkah stabilisasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia, nilai kurs Rupiah menguat dengan level akhir 2022 berdepresiasi 0,81% (ytd) dibandingkan dengan level akhir 2021. Depresiasi nilai kurs Rupiah tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan depresiasi mata uang sejumlah negara lain di kawasan, seperti Korea Selatan 16,30% (ytd) dan Filipina 11,18% (ytd). Sangat kuatnya dolar AS didorong oleh pengetatan kebijakan moneter yang agresif di AS dan penarikan modal dari berbagai negara ke AS, di tengah melonjaknya ekonomi dan tingginya inflasi di Eropa. Pada saat bersamaan, ketidakpastian pasar keuangan global berlanjut. Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah sesuai dengan kekuatannya mekanisme pasar dan nilai fundamentalnya untuk mendukung upaya pengendalian inflasi dan stabilitas makroekonomi.

US dollar exchange rate index against major currencies (DXY) or an index that shows the movement of the dollar against 6 other major country currencies namely EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF was recorded at 106.28 on December 30, 2022 or strengthened by 11.09% (ytd) during 2022. Meanwhile, with the stabilization measures by Bank Indonesia, Rupiah exchange rate as of December 30, 2022 depreciated by 0.81% (ytd) compared to the level at the end of 2021. This depreciation of the Rupiah exchange rate is relatively better than the depreciation of the currencies of a number of other countries in the region, such as South Korea of 16.30% (ytd) and Philippines of 11.18% (ytd). The strong US dollar was driven by aggressive monetary policy tightening in the US and capital withdrawal from various countries to the US, in the middle of economic weaknesses and high inflation in Europe. At the same time, high uncertainty in global financial markets continued. In the future, Bank Indonesia continues to strengthen the policy of stabilizing the Rupiah exchange rate in accordance with the operation of market mechanisms and its fundamental value to support efforts to control inflation and macroeconomic stability.

Sumber: Bank Indonesia, Tinjauan Kebijakan Moneter Triwulan III-2022
Source: Bank Indonesia, Monetary Policy Review of Quarter III-2022

Kondisi Industri Listrik Indonesia

Condition of Indonesian Electricity Industry

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, konsumsi listrik per kapita di Indonesia mencapai 1.173 Kilowatt hour (kWh) pada 2022. Jumlah itu meningkat 4,40% dari tahun sebelumnya yang sebesar 1.123 kWh. Meski meningkat angka tersebut belum mencapai target yang ditetapkan oleh Pemerintah. Tahun sebelumnya, listrik di RUPTL sebesar 1.672 kWh per kapita di mana hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat konsumsi listrik di Indonesia masih cukup tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

The Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) recorded that electricity consumption per capita in Indonesia reached 1,173 Kilowatt hours (kWh) in 2022. The number increased by 4.40% from the previous year of 1,123 kWh. Despite the increase, the number has not yet reached the target determined by the Government. The average electricity consumption in RUPTL is 1,672 kWh per capita which indicates that the level of electricity consumption in Indonesia is still quite behind if compared to neighboring countries.

Sebagai dari visi Bauran Energi di Indonesia dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun 2021 -2030 yang disusun Pemerintah dengan porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) yaitu 51,6% oleh besar dibandingkan penambahan pembangkit fosil sebesar 48,4%. Sejalan dengan RUPTL, arah kebijakan energi nasional yaitu transisi dari energi fosil ke energi yang lebih bersih, rendah emisi, dan ramah lingkungan. Sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk mencapai penurunan emisi gas rumah kaca pada Paris Agreement sebesar 29% dan 41% dengan bantuan internasional. Komitmen Indonesia untuk mengatasi perubahan iklim diimplementasikan melalui roadmap Net Zero Emission dengan penyediaan listrik dan energi yang rendah karbon sampai pada berbagai sumber energi fosil, batu bara, pada pembangkitan beserta dan sumber harga solar/ minyak.

Bauran energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional hingga tahun 2021 tercatat hanya 14,11% sedikit meningkat dari realisasi tahun 2021 (akhir 13,85%. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengungkapkan bauran energi primer di Indonesia masih didominasi oleh batu bara yaitu 67,21% di tahun 2022, sementara 15,90% gas, dan 2,7% dan BBM. Jika dikonversi secara menyeluruh sumbangsih EBT dalam bauran energi nasional harus meningkat secara tidak linear, signifikan. Salah satunya dalam pembangkit listrik berenergi EBT.

Berdasarkan kapasitas terpasang pembangkit listrik di Indonesia mencapai 80,2 gigawatt (GW) di 2022, masih didominasi oleh PLTU sebanyak 42,1 GW, lalu disusul oleh PLTG/GTBM) sebesar 21,8 GW, kemudian pembangkit listrik EBT sebesar 12,5 GW. Adapun sisa ini, pembangkit listrik EBT meliputi adalah PLTA sebanyak 6,6 GW, kemudian PLTP 1,9 GW, dan bioenergi sebesar 1 GW. Targetnya, kapasitas terpasang pembangkit listrik EBT mencapai 13,9 GW di tahun 2023.

In terms of the Energy Mix in Indonesia in the 2021–2030 Electricity Supply Business Plan (RUPTL) prepared by the Government with the portion of New and Renewable Energy (EBT) which is 51.6% greater than the addition of fossil power plants of 48.4%. In line with the RUPTL, the direction of national energy policy is to transition from fossil energy to cleaner, less emission, and environmentally friendly energy. As a form of Indonesia's commitment to achieving greenhouse gas emission reductions in the Paris Agreement by 29% and 41% with international assistance. Indonesia's commitment to overcoming climate change is implemented through the Net Zero Emission roadmap by providing low-carbon electricity and energy to the point of requiring coal, fossil energy, coal, in large electric power generators are having relatively cheap prices.

The new and renewable energy (NRE) mix in the national energy mix until 2021 was recorded at only 14.11%, slightly increased from the realization in 2021 of 13.85%. The Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM), revealed that the primary energy mix in Indonesia was still dominated by coal at 67.21% in 2022, while gas at 15.90%, and fuel at 2.7%. If calculated in detail, the contribution of NRE in the national energy mix continues to increase even though it is not too significant. One of them is in NRE-powered power plants.

Based on the installed capacity of power plants in Indonesia reaching 80.2 gigawatts (GW) in 2022, it is still dominated by CFPP of 42.1 GW, followed by GTPP/CCPP/GTPP of 21.8 GW, and then HRE power plants of 12.5 GW. Currently, the majority of NRE power plants are HPP of 6.6 GW, then GPP of 1.9 GW, and bioenergy of 1 GW. The target is for the installed capacity of NRE power plants to reach 13.9 GW in 2023.

https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/bauran-energi-baru-terbarukan-ebt-capai-1411-begini-cara-kejar-targetnya
https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/bauran-energi-baru-terbarukan-ebt-capai-1411-begini-cara-kejar-targetnya

Prospek Bauran Energi 2021-2030
Projected Energy Mix 2021-2030

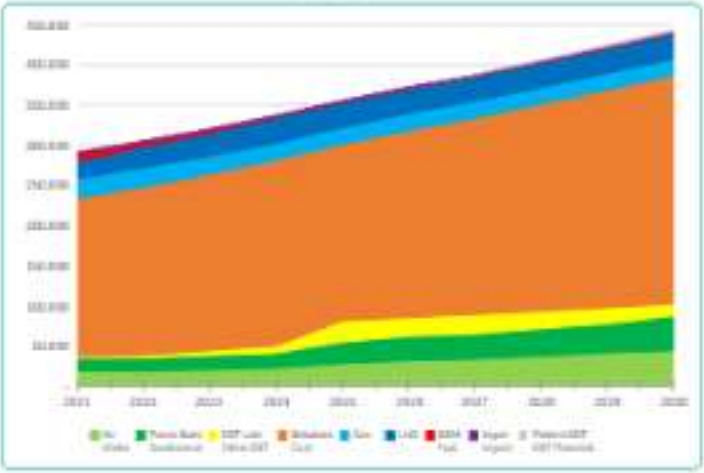

Dalam rangka mengurangi bauran energi dari batubara hingga menjadi 58,9% pada tahun 2030, maka dilaksanakan upaya sebagai berikut: implementasi co-firing biomassa pada PLTU PLN dengan porsi rata-rata 10% untuk PLTU di Jawa-Bali dan 20% untuk PLTU di luar Jawa-Bali, dengan Capacity Factor 70%, total kapasitas akuisisi 2.705 MW berkubikasi biomassa sekitar 11,8 juta ton/tahun. Serta untuk PLTU baru yang direncanakan beroperasi setelah tahun 2025, diizinkan agar dapat beroperasi dengan porsi co-firing minimal 35%.

In order to reduce the energy mix from coal to 58.9% by 2030, the following efforts are needed: implementation of biomass co-firing in PLTU PLN with an average proportion of 10% for PLTU in Java-Bali and 20% for PLTU outside Java-Bali, with a Capacity Factor of 70%, a total equivalent capacity of 2,705 MW biomass needs around 11.8 million tons/year). And for the new PLTU that is planned to operate after 2025, it is designed to be able to operate with a minimum co-firing portion of 35%.

Kontribusi PLN NP dalam Industri Pembangkit Listrik Indonesia

PLN NP's Contribution to Indonesia's Power Plant Industry

Pada tanggal 21 September 2022 Kementerian BUMN resmi meluncurkan Holding Subholding PT PLN (Persero). PT PLN merupakan salah satu anak perusahaan PT PLN (Persero) yang bertransformasi menjadi subholding PLN sebagai Generation Company 1, yaitu PT PLN Nusantara Power (PLN NP). Dengan adanya peran ini maka cakupan pembangkitan PLN yang sebelumnya tersebar di seluruh wilayah akan dikonsolidasikan sehingga PLN NP akan mengelola unit pembangkit yang lebih banyak.

On September 21, 2022, the Ministry of SOEs officially launched the Holding Subholding of PT PLN (Persero). PT PLN is one of the subsidiaries of PT PLN (Persero) which was transformed into a PLN subholding as Generation Company 1, namely PT PLN Nusantara Power (PLN NP). With this role, PLN's generation assets that were previously spread throughout the region will be consolidated, so that PLN NP will manage more generation units.

PLN NP akan menjadi Generation Company terbesar di Asia Tenggara serta siap mengelola pembangkit-pembangkit dengan total kapasitas 22,1 GW. Dengan pencapaian ini, PLN NP akan memegangkan peranan penting bagi upaya Indonesia untuk memperkuat bagian pada rantai pasok global di tengah momentum transisi energi saat ini.

PLN NP will become the Largest Generation Company in Southeast Asia and is ready to manage power plants with a total capacity of 22.1 GW. With this change, PLN NP will have a positive impact on Indonesia's effort to play part in the global supply chain in the middle of the current energy transition momentum.

Kontribusi PLN NP terhadap pencapaian bisnis nasional dan pembangkitan adalah dengan transformasi PLN di mana berdasarkan pada empat aspirasi yang menjadi arah perubahan PLN, yaitu Green, Lean, Innovative, dan Customer Focused. Bentuk kontribusi PLN NP terhadap pencapaian bisnis nasional dan pembangkitan adalah sebagai berikut:

PLN NP's contribution to national electricity provision and electric power generation is in line with PLN's transformation which is based on four aspirations that are the direction of PLN's change, namely Green, Lean, Innovative, and Customer Focused. The form of PLN NP's contribution to national electricity provision and electric power generation is as follows:

Power Plant Program

Melakukan percepatan tenaga listrik melalui pengembangan Add On Hours Sesar (Unit 2, 3 dan 4 sebesar 316 MW dan efek asset pembangkit MKJ Jawa dan PLTA di wilayah Jawa Timur. Melaksanakan pengembangan pembangkit EBT yang tercantum dalam power RUPTL 2021–2030 baik melalui skema kepemilikan sendiri (MBTL), majority shares maupun minority shares dengan rencana sebesar 3.031,1 MW di tahun 2021–2028 dan increase 8.710 MW pada tahun 2030

Selling electricity through the development of Add On Hours Sesar (Unit 2, 3 and 4 of 316 MW and considering the assets of MJK Java and PLTA in the East Java region. Carrying out the development of the RUPTL power plants target in the 2021–2030 power. (EBT). both through self-ownership schemes (MBTL), majority shares and minority shares with an increase of 3,031.1 MW in 2021–2028 from the plan of 8,710 MW until 2030.

Power Solutions Program

Peningkatan pangsa pasar dalam bidang Jasa O&M pembangkit di semua segmen dan bisnis jasa Engineering Procurement Construction (EPC) melalui PT Pelabuhan Indonesia serta meningkatkan jasa Maintenance Repair Overhaul (MRO) di pasar nasional maupun internasional. Menyediakan Spare Part untuk kebutuhan PLN Group maupun pembangkit IPP dan memiliki para layanan Digital Power Plant melalui Sistem Optimasi Manajemen & Efisiensi Unit Pembangkit Sumbagsel (SOMET).

Increasing market share in O&M services for power plants in all regions and Engineering Procurement Construction (EPC) services business through PT Pelabuhan Indonesia, as well as increasing Maintenance Repair Overhaul (MRO) services in national and international markets. Providing Spare Parts for PLN Group and IPP power plants, and having Digital Power Plant services through the Integrated Operation and Reliability & Efficiency Optimization System (IORES).

Beyond Power Program

Jasa Konsultasi Teknik & Engineering melalui Enterprise Asset Management (EAM) & Lingkungan PLN Group serta Jasa total solutions industri & utility melalui Pengelolaan EBT, antara lain Rooftop di industri dan SPKLU. Komersialisasi kompetensi melalui PDI Academy dan Pengembangan bisnis non-core melalui pemanfaatan aset existing.

Technical & Engineering Consultant Services through Enterprise Asset Management (EAM), offline PLN Group, as well as Total Solutions Industry & Utility Services through EPC Processes like PV Rooftop in industry and SPKLUs. Competence commercialization through PDI Academy and Non-core business development through idle asset utilization.

Komitmen PLN NP Dukung Dekarbonisasi

PLN NP's Commitment to Supporting the Decarbonization

PLN NP telah meraih 21 penghargaan dalam Subroto Award oleh Kementerian ESDM RI, hal ini merupakan wujud dari komitmen PLN NP yang tinggi dalam meraih target Net Zero Emission (NZE). NZE atau nol emisi berbasis analisis adalah kondisi jumlah emisi karbon yang dilepaskan ke atmosfer tidak melebihi jumlah emisi yang mampu diserap oleh bumi. Untuk mewujudkannya diperlukan sebuah inovasi dari sistem energi yang digunakan ke sistem energi lainnya guna mencapai kondisi seimbang antara aktivitas manusia dengan keseimbangan alam.

PLN NP has won 21 awards in the Subroto Award by the Ministry of ESDM of the Republic of Indonesia. This is an achievement of PLN NP's high commitment in achieving Net Zero Emission (NZE) target. NZE or zero carbon emission itself is a condition where the amount of carbon emissions released into the atmosphere does not exceed the amount of emissions that can be absorbed by the earth. Simultaneously, a transition from the existing system used to a clean energy system is needed to achieve a balanced condition between human activities and the balance of nature.

Sumber: https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip/pln-raih-penghargaan-subroto-award-2021
Source: https://www.esdm.go.id/en/media-center/archive/pln-raih-penghargaan-subroto-award-2021

Analisis Operasi Per Segmen Usaha

Operational Analysis per Business Segment

Segmen Usaha PLN NP
Business Segment of PLN NP

PLN Nusantara Power

Penjualan Tenaga Listrik	Jasa Operasi dan Pemeliharaan (O&M)	Jasa Engineering, Procurement and Construction (EPC)	Lainnya
Electricity Sales	Operation and Maintenance (O&M) Services	Engineering, Procurement and Construction (EPC) Services	Others

Segmen Usaha Penjualan Tenaga Listrik
Electricity Sales Business Segment

PT PLN NP memiliki 6 unit pembangkit eksisting yang tersebar dalam 6 (enam) area yang memproduksi dan menjual tenaga listrik. Penjualan Tenaga Listrik merupakan bisnis utama yang memiliki porsi PLN NP sebesar 78% pendapatan berasal dari penjualan tenaga listrik pembangkit eksisting. Segmen usaha penjualan tenaga listrik memiliki kegiatan pembangkitan tenaga listrik, serta dengan penyaluran listrik kepada pelanggan. Dalam segmen usaha ini, PLN NP memperhatikan beberapa indikator kinerja yaitu kinerja pembangkit, produksi, dan penjualan tenaga listrik.

PT PLN NP has 6 existing power plant units spread in 6 locations or areas that produce and sell electricity. Electricity Sales is the main business owned by PLN NP where 78% of revenue comes from the sale of electricity from existing power plants. The electricity sales business segment includes electric power generation activities, up to the distribution of electricity to customers. In this business segment, PLN NP takes into account several performance indicators, namely the performance of power plants, production, and sales of electricity.

Kinerja Pembangkit Eksisting
Existing Power Plant Performance

Indikator kinerja pembangkit meliputa faktor ketersediaan, faktor gangguan, efisiensi pembangkit, pemeliharaan pembangkit, dan kapasitas daya terpasang. Kinerja operasi PLN NP tahun 2022 dinilai memuaskan, terlihat dari beberapa indikator kinerja pembangkit yang meliputi efisiensi pembangkit, dan ketepatan pelaksanaan serta durasi pemeliharaan.

The indicators of power plant performance include availability factors, outage factors, power plant efficiency, power plant maintenance, and installed power capacity. PLN NP's operating performance in 2022 was considered satisfactory, as seen from several indicators of power plant performance including power plant efficiency, and the accuracy of maintenance implementation and duration.

Faktor Ketersediaan Pembangkit Eksisting
Availability Factor of Existing Power Plant

PLN NP mempelajarkan faktor penyebab nilai Seven pembangkit eksisting pada penjualan tenaga listrik yang lebih optimal dengan standar pertama excellence EAF yang mencapai world-class standard dan menguasai prinsip cost leadership agar dapat mendukung kinerja usaha perusahaan sehari. Faktor keberadaan mesin pembangkit diukur berdasarkan indikator Equivalent Availability Factor (EAF) dan Scheduled Outage Factor (SOF).

PLN NP emphasizes the focus to make the existing power plant business as a more optimal profitability value with the excellence EAF performance standard that reaches the world-class standard and carries the principle of cost leadership in order to support the business performance of shareholders. The availability factor of power plants is measured based on the Equivalent Availability Factor (EAF) and Scheduled Outage Factor (SOF) indicators.

EAF Pembangkit Eksisting

EAF of Existing Power Plant

Realisasi EAF sebesar 94,12%

merupakan bahwa Unjuk kerjanya pembangkit PLN NP eksisting sangat tinggi untuk menyajikan kebutuhan di Sistem Jawa Bali

The realization of EAF of 94.12%
Above that the realization level of the existing PLN NP power plant to supply electricity in the Java Bali System was very high.

EAF adalah indikator yang menunjukkan tingkat kesiapan suatu pembangkit untuk beroperasi menghasilkan energi listrik. EAF merupakan indikator utama Perusahaan dalam menyajikan pelayanan

EAF is the indicator that shows the readiness level of a power plant to operate and produce electricity. EAF is the Company's main indicator in realizing services to customers

kepada pelanggan. Nilai EAF komposit bertujuan untuk mengetahui faktor keandalan pembangkit secara terpisah untuk berkaitannya dengan Daya Mampu Netto (DMN) pada periode tertentu. Semakin tinggi nilai EAF menunjukan semua pembangkit yang operasional baik.

Nilai EAF pembangkit eksisting PLN NP pada tahun 2022 adalah 94,22% sedikit menurun dibandingkan tahun 2021 sebesar 95,67%. Penurunan tersebut disebabkan oleh SOF yang cukup tinggi pada PLN Cirebon Unit 1 dikarenakan pemeliharaan General Inspection sedangkan SOF UP Pelton Karkuh dikarenakan Gemuai Inspection dan Lanjutan Hilam Inspection.

The corporate EAF value has a function to know the availability factor of the power plant corporation to operate with Net Dependable Capacity (DMN) in a certain period. The higher the EAF value, the better the power plant performance.

The EAF value of PLN NP's existing power plants in 2022 was 94.22%, a slight decrease compared to 2021 of 95.67%. The decrease was caused by a fairly high SOF at Cirebon PLTP related to General Inspection maintenance, while the SOF of Pelton UP was related to the implementation of Gemuai Inspection and the launch of Hilam Inspection.

Tabel EAF Pembangkit Eksisting Berdasarkan Jenis Pembangkitan (%)

Table of EAF of Existing Power Plant by Generation Type (%)

EAF Jenis Pembangkitan EAF of Generation Types	2020	2021	2022	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease %
PLTA UPP	98,26	95,30	93,42	(1,78)
PLTU Sebalang Unit 1,2,3	94,89	99,22	91,98	(1,24)
PLTU Teluk Sebalang Teluk Unit 1,2,3	98,56	96,67	95,13	(1,46)
PLTP 2,3	98,39	95,71	97,68	2,37
PLTGU 1,2,3	93,66	99,24	94,83	(0,36)
EAF Pembangkit Eksisting EAF of Existing Power Plant	**98,22**	**95,67**	**94,22**	**(1,45)**

Tabel EAF Pembangkit Eksisting Berdasarkan Unit Pembangkitan (%)

Table of EAF of Existing Power Plant by Generation Units (%)

EAF Unit Pembangkitan EAF of Generation Units	2020	2021	2022	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease %
UP Bantas Bantas 1,2,3	98,89	97,87	97,75	0,88
UP Cilegi Cilegi 1,2,3	99,51	95,37	91,82	(0,08)
UP Gelas Gelas 1,2,3	98,23	97,77	96,52	(1,28)
UP Pelton Pelton 1,2,3	94,89	99,22	91,98	(1,70)
UP Muara Karang Muara Karang 1,2,3	93,67	97,83	93,87	(3,93)
UP Muara Tawar Muara Tawar 1,2,3	99,21	93,71	93,87	0,16
EAF Pembangkit Eksisting Power	**98,92**	**95,67**	**94,22**	**(1,45)**

SOF Pembangkit Existing

SOF of Existing Power Plant

Realisasi SOF sebesar 5,21%

Realization SOF at 5.21%

SOF adalah indikator untuk mengukur tingkat pembangkit tidak sibuk karena pemeliharaan terencana, yaitu Planned Outage Hour dan Maintenance Outage Hour yang sudah direncanakan sebelumnya. Semakin tinggi nilai SOF menunjukkan pemeliharaan terencana yang dilakukan pada mesin pembangkit lebih banyak (lost site duree). Semakin rendah nilai SOF, maka dapat semakin baik karena menunjukkan optimasi durasi pemeliharaan yang sudah direncanakan sebelumnya.

SOF is the indicator to measure the level of power plant out of the system due to planned maintenance, namely Planned Outage Hour and Maintenance Outage Hour that has been planned previously. The higher the SOF value, the more planned maintenance is implemented on the power plant (in terms of duration). The lower the SOF value, the better it is due to the optimization of the pre-planned maintenance duration.

Nilai SOF pembangkit existing PLN NP pada tahun 2021 adalah 5,21%, meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar 2,29%. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh PLTA Cirata terkait dilaksanakannya pemeliharaan General Inspection serta OP Pabrik terkait dilaksanakannya General Inspection dan Turbine Main Inspection.

The SOF value of PLN NP's existing power plants in 2021 was 5.21%, increased compared to 2020 of 2.29%. The increase was mainly due to Cirata HPP related to General Inspection maintenance and Pabrik CU related to the implementation of General Inspection and the launch of Main Inspection.

SOF Jenis Pembangkitan

Table of SOF of Existing Power Plant by Generation Types (%)

SOF Jenis Pembangkitan SOF of Generation Types	2020	2021	2022	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease %
PLTA (HP)	3,05	7,84	7,85	155,57
PLTG/Mesin/Gas (CCPP)	4,62	3,60	6,37	212,39

SOF Jenis Pembangkitan SOF of Generation Types	2020	2021	2022	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease %
PLTU Non-Batubara Non-Coal [illegible]	0.31	0.33	4.28	0.30
PLTG [illegible]	1.73	4.27	3.66	(61.76)
PLTGU [illegible]	5.71	1.65	4.55	271.30
SOF Pembangkit Existing SOF of Existing Power Plant	**3.72**	**3.27**	**5.31**	**(13.31)**

Faktor SOF Pembangkit Eksisting Berdasarkan Unit Pembangkitan (%)

Factor of SOF of Existing Power Plant by Generation Units (%)

SOF Unit Pembangkitan SOF of Generation Units	2020	2021	2022	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease %
UP Ebenezer Ebenezer [illegible]	0.00	2.29	2.27	0.44
UP Cirata Cirata [illegible]	0.00	2.13	7.98	(14.31
UP Cilacap Cilacap [illegible]	0.00	1.04	5.03	(31.25
UP Pelton Pelton [illegible]	4.97	9.00	8.97	(10.39
UP Muara Karang Muara Karang [illegible]	0.00	1.02	5.09	(87.22
UP Priok Tanah Priok Tanah [illegible]	6.34	1.02	5.25	10.51
SOF Pembangkit Existing SOF of Existing Power Plant	**3.72**	**3.27**	**5.31**	**(13.31)**

Faktor Gangguan Pembangkit Eksisting
Outage Factors of Existing Power Plant

Faktor gangguan mesin pembangkit diukur berdasarkan indikator Equivalent Forced Outage Rate (EFOR) dan Sudden Outage Frequency (SAIFI).

The outage factor of power plants is measured based on the Equivalent Forced Outage Rate (EFOR) and Sudden Outage Frequency (SAIFI) indicators.

EFOR Pembangkit Eksisting

EFOR of Existing Power Plant

Realisasi EFOR sebesar 0,45%
menunjukkan bahwa jumlah durasi jam gangguan pembangkit (% di MP eksisting rasnurca dari tahun sebelumnya.

The realization of EFOR of 0.45%
(Shows that the number of outage duration of PLN NP's existing power plants decreased from the previous year)

EFOR merupakan indikator untuk mengukur tingkat risiko pembangkit tidak siap atau ketidaksiapan unit untuk beroperasi karena gangguan. Semakin rendah nilai EFOR menunjukkan peningkatan gangguan semakin sepat.

EFOR is the indicator to measure the reliability level of power plants to operate during an outage or the inability of the unit to operate due to interference. The lower the EFOR value, the better the outage is handled.

Nilai EFOR pembangkit eksisting PLN NP pada tahun 2022 adalah 0,45% lebih baik dibandingkan tahun 2021 sebesar 0,70%. Pencapaian nilai EFOR tersebut tentunya dipengaruhi oleh penerapan manajemen aset terutama implementasi preventive maintenance, predictive maintenance, patrol check, First Line Maintenance, House Keeping yang berdampak oleh pelaksanaan overhaul yang efektif sehingga dapat meminimalisir kejadinya forsedomi atau gangguan sistem (Home; number).

The EFOR value of PLN NP's existing power plant in 2022 was 0.45%, increased compared to 2021 of 0.70%. The decrease in EFOR value was mainly due to the implementation of asset management, especially the consistent implementation of preventive maintenance, predictive maintenance, patrol checks, First Line Maintenance, House Keeping and effective overhaul implementation which is to minimize the occurrence of breakdowns or disruptions during the overhaul interval.

Tabel EFOR Pembangkit Eksisting Berdasarkan Jenis Pembangkitan (%)
Table of EFOR of Existing Power Plant by Generation Types (%)

EFOR Jenis Pembangkitan EFOR of Generation Types	2020	2021	2022	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease
				%
PLTA (HY)	2,37	0,66	0,46	(30,27)
PLTU Batubara (Coal) (CFP)	1,35	0,67	0,47	(48,81)
PLTU Non-Batubara (Non-Coal) (CFP)	0,43	0,82	0,42	(79,51)
PLTG (CCGT)	0,69	0,69	0,69	(68,67)
PLTGU (CCGT)	0,71	4,02	0,34	(65,84)
EFOR Pembangkit Gunning EFOR of Existing Power Plant	**0,63**	**1,70**	**0,45**	**(67,84)**

Tabel EFOR Pembangkit Existing Berdasarkan Unit Pembangkitan (%)
Table of EFOR of Existing Power Plant by Generation Units (%)

EFOR Unit Pembangkitan EFOR of Generation Units	2020	2021	2022	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease
				%
UP Ebonite Ebonite (EU)	0.55	0.56	0.55	(1.65.35)
UP Cinta Cinta (CU)	0.47	11.51	1.44	(87.49)
UP Cinch Cinch (CC)	0.20	1.40	0.12	(91.43)
UP Fabric Fabric (FC)	1.31	0.02	0.47	(43.01)
UP Hijau Energi Hijau Energy (EC)	0.07	0.00	0.00	0.00
UP Pisang Tanah Pisang Tanah (EC)	1.01	0.73	0.03	(93.03)
EFOR Pembangkit Existing EFOR of Existing Power Plant	**0.83**	**1.70**	**0.45**	**(87.04)**

SdOF Pembangkit Eksisting

SdOF of Existing Power Plant

Realisasi SdOF sebesar 0,51 kali/unit

menunjukkan bahwa jumlah gangguan mematikan pembangkit PLN IP eksisting lebih rendah dari tahun sebelumnya

The realization of SdOF of 0.51 times/unit
Shows that the number of sudden outages of PLN IP's existing power plants was lower compared to the previous year

SdOF merupakan indikator yang menunjukkan jumlah gangguan yang terjadi dalam periode tertentu, terutama frekuensi terjadinya gangguan yang berulang. Semakin rendah nilai SdOF maka semakin baik.

SdOF is the indicator that shows the number of outages that occurs within a certain period, especially the frequency of repeated outages. The lower the SdOF value, the better.

Nilai SoCF pembangkit eksisting PLN NP pada tahun 2022 adalah 0,11 setiap unit kwh dibandingkan tahun 2021 adalah 0,09/unit/kwh. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh pemenuhan manajemen aset terutama implementasi preventive maintenance, predictive maintenance, patrol check, Trial Line Maintenance, House Keeping yang bertujuan dan diharapkan overhaul yang efektif sehingga dapat meminimalisir kejadian breakdown atau gangguan selama interval overhaul.

The SoCF value of PLN NP's existing power plant in 2021 was 0.11 kwh/unit, increased compared to 2021 of 0.09 kwh/unit. This increase was mainly influenced by the implementation of asset management, especially the consistent implementation of preventive maintenance, predictive maintenance, patrol checks, Trial Line Maintenance, House Keeping and effective overhaul implementation as well as minimizing the occurrence of breakdowns or disturbances during the overhaul interval.

Tabel SoCF Pembangkit Eksisting Berdasarkan Jenis Pembangkitan (kalkulasi)

Table of SoCF of Existing Power Plant by Generation Types (calculation)

SoCF Jenis Pembangkitan SoCF of Generation Types	2020	2021	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Kalkulasi Calculation
PLTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLTU Batubara	1,50	2,00	1,00	(50,00)	(1,00)
PLTU Non-Batubara	0,13	0,10	0,09	70,79	0,00
PLTG	0,00	0,00	0,00	(33,33)	(0,00)
PLTGU	1,00	1,00	1,00	(20,00)	(0,00)
SoCF Pembangkit Eksisting SoCF of Existing Power Plant	**0,03**	**0,09**	**0,11**	**(40,00)**	**(0,00)**

Tabel SoCF Pembangkit Eksisting Berdasarkan Unit Pembangkitan (kalkulasi)

Table of SoCF of Existing Power Plant by Generation Units (Simulation)

SoCF Unit Pembangkitan SoCF of Generation Units	2020	2021	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Kalkulasi Calculation
UP Bantur	0,00	0,00	0,00	(00,00)	(0,00)
UP Ciwidey	0,50	1,00	1,00	(27,00)	(0,00)
UP Gresik	0,50	0,71	0,00	(40,00)	(0,00)
UP Pulau Pinang	1,00	1,00	1,00	(00,00)	(0,00)
UP Nusantara Power Kalimantan	1,00	2,00	3,00	(40,00)	(2,00)
UP Nusantara Power Sulawesi	1,00	1,00	0,00	(30,00)	(0,00)
SoCF Pembangkit Eksisting SoCF of Existing Power Plant	**0,03**	**0,09**	**0,11**	**(40,00)**	**(0,00)**

Faktor Efisiensi Pembangkit Eksisting

Efficiency Factors of Existing Power Plant

Realisasi Tara Kalor Netto sebesar 2.459,38 kcal/kWh

meningkatkan bahwa efisiensi pembangkit thermal PLN IPP eksisting lebih
hingga dibandingkan tahun sebelumnya

The Realization of Net Plant Heat Rate of 2,459.38 kcal/kWh
Shows thermal efficiency of PLN IPP's existing thermal power plant was higher compared to
the previous year

Efisiensi mesin pembangkit thermal diukur berdasarkan indikator Tara Kalor Netto (Net Plant Heat Rate/NPHR), indikasi Tara Kalor Netto berfungsi untuk mengukur efisiensi pemakaian bahan bakar yang dikonversikan ke dalam nilai kalor yang dibutuhkan untuk setiap kWh produksi neto yang dibangkitkan oleh unit pembangkit pada suatu periode. Semakin rendah nilai Tara Kalor Netto menunjukkan bahwa pembangkit tersebut semakin efisien.

The efficiency of thermal power plants is measured based on the Net Plant Heat Rate (NPHR) indicator. The Net Plant Heat Rate indicator aims to measure the efficiency of fuel consumption converted into the calorific value needed for each kWh of net production generated by the power plant unit in a period. The lower the Net Plant Heat Rate indicates that the power plant is more efficient.

Nilai Tara Kalor Netto pembangkit eksisting PLN IPP pada tahun 2021 adalah 2.459,38 kCal/kWh lebih baik dibandingkan tahun 2021 sebesar 2.488,68 kCal/kWh. Penurunan heat rate tersebut terutama disebabkan oleh penjadwalan PLTU Jawa yang lebih rendah dari tahun 2020.

The Net Plant Heat Rate value of PLN IPP's existing power plants in 2021 was 2,459.38 kCal/kWh, decreased compared to 2021 of 2,488.68 kCal/kWh. The decrease in heat rate was mainly due to the lower operation of the Java CFPP from 2021.

Tabel Tara Kalor Netto Pembangkit Eksisting Berdasarkan Jenis Pembangkitan (kCal/kWh)
Table of Net Plant Heat Rate of Existing Power Plant by Generation Types (kCal/kWh)

Tara Kalor Netto dari Jenis Pembangkitan Net Plant Heat Rate of Generation Types	2020	2021	2022	Perbandingan/Percentage (Increasing/Decrease)	
				%	kCal/kWh
PLTU Batubara/Coal CFPP	2.702,90	2.748,09	2.810,60	2,30	79,51
PLTU Non Batubara/Non-Coal CFPP	3.488,22	3.714,47	3.204,20	-13,74	-510,271

Tara Kalor Neto (Net Plant Heat Rate of Generation Type)	2020	2021	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	kCal/kWh
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Tara Kalor Neto Pembangkit Gabungan Net Plant Heat Rate of Existing Power Plant	**2.529,54**	**2.464,65**	**2.458,38**	**(1,01)**	**(25,16)**

Tabel Tara Kalor Neto Pembangkit Eksisting Berdasarkan Unit Pembangkitan (kCal/kWh)
Table of Net Plant Heat Rate of Existing Power Plant by Generation Units (kCal/kWh)

Tara Kalor Neto Unit Pembangkitan (Net Plant Heat Rate of Generation Units)	2020	2021	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	kCal/kWh
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Tara Kalor Neto Pembangkit Gabungan Net Plant Heat Rate of Existing Power Plant	**2.529,54**	**2.464,65**	**2.458,38**	**(1,01)**	**(25,16)**

Grafik Tara Kalor Neto Pembangkit Eksisting (kCal/kWh)
Chart of Net Plant Heat Rate of Existing Power Plant (kCal/kWh)

Faktor Pemeliharaan Pembangkit Eksisting
Overhaul Factors of Existing Power Plant

Realisasi Jumlah Overhaul sebanyak 39

Meningkatnya bahwa unit pembangkit PLN NP pada Tahun 2022 melakukan lebih banyak overhaul dibanding tahun sebelumnya

The realization of Total Overhaul was 39, meaning that PLN NP power plant units in 2022 conducted more overhauls compared to the previous year.

Tingkat ketepan pembangkit sangat dipengaruhi oleh pemeliharaan yang dilakukan. Oleh karena itu, ketepatan pelaksanaan dan durasi pemeliharaan menjadi faktor yang sangat penting bagi tingkat ketepan pembangkit.

Jumlah pemeliharaan pembangkit eksisting PLN NP pada tahun 2022 adalah sebanyak 39 overhaul meningkat sedikit dibandingkan tahun 2021 sebanyak 38 overhaul. Peningkatan tersebut tersebut disebabkan oleh banyaknya pemeliharaan di PLTGU Muara Tawar, PLTGU Cilegon, dan PLTGU Muara Tawar.

The maintenance level of power plants is significantly influenced by the maintenance implemented. Therefore, the accuracy of implementation and duration of maintenance becomes a significant factor for the readiness level of power plants.

The number of maintenance of PLN NP's working power plants in 2022 was 39 overhauls, slightly increased compared to 2021 of 38 overhauls. The increase was mainly due to the large number of maintenance at Muara Tawar CCPP, Cilegon CCPP, and Muara Tawar CCPP.

Tabel Overhaul Pembangkit Eksisting Berdasarkan Jenis Pembangkitan (jumlah overhaul)
Table of Overhaul of Existing Power Plant by Generation Types (total overhaul)

Overhaul Jenis Pembangkitan Overhaul of Generation Types	2020	2021	2022	Perubahan/Pertumbuhan Increase/Decrease	
				%	Jumlah Overhaul Total (Overhaul)
[illegible]	14	13	12	-7.14	-1
[illegible]	1	1	2	100.00	1
[illegible]	4	3	3	0.00	0
[illegible]	10	7	14	100.00	7
Overhaul Pembangkit Eksisting Overhaul of Existing Power Plant	**28**	**24**	**29**	**20.83**	**5**

Daya Terpasang Pembangkit Eksisting
Installed Capacity of Existing Power Plant

Kontribusi PLN NP di DTP Sistem Jawa-Bali adalah 15,73% (7.210 MW)

PLN NP's contribution to the Installed Capacity of the Java-Bali System was 15.73% (7,210 MW)

DTP merupakan daya yang terkini sesuai dengan setiap mesin pembangkit. Dari total DTP sistem Jawa-Bali 45.824 MW, saat ini PLN NP memiliki DTP sebesar 7.210 MW, yaitu mencapai 15,73% dari DTP Sistem Jawa-Bali.

DTP is the power total according to each power plant from the total Installed Capacity of the Java-Bali system of 45,824 MW. PLN NP currently has an Installed Capacity of 7,210 MW, which is 15.73% of the Installed Capacity of the Java-Bali system.

Tabel Daya Terpasang Pembangkit Eksisting
Table of Installed Capacity of Existing Power Plant

Unit Pembangkitan Generation Unit	Daya Terpasang Installed Capacity	
	MW	%
UP Bremi	275	3,81
UP Cirata	1.008	13,98
UP Dieng	2.259	31,32
UP Paiton	800	11,10
UP Pusat Listrik	800	11,10
UP Pusat Tekat	1.000	13,74
PLTD Sunda	50	0,69
UP Bawean	5	0,07
DTP Pembangkit Eksisting Installed Capacity of Existing Power Plant	**7.210**	**100,00**

Daya Mampu Neto
Net Dependable Capacity

Daya Mampu Neto PLN NP sebesar 6.586 MW atau berkontribusi sebesar 15,67% terhadap Sistem Jawa-Bali

Net Dependable Capacity of PLN NP was 6,586 MW or contributed 15.67% to the Java-Bali System

Kapasitas Daya Mampu Neto (DMN) adalah daya mampu pembangkit dalam satuan Mega Watt berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian yang dituangkan dalam Berkifikat Laik Operasi. Daya Mampu Neto Sistem Jawa Bali adalah sebesar 42.164 MW, sedangkan DMN PLN NP tersebut sebesar 6.586 MW, atau memberikan kontribusi di Sistem Jawa-Bali sebesar 15,67%.

Net Dependable Capacity (NDC) is the power plant's capacity in Mega Watt based on the results of examination and testing as outlined in the Commissioning Certificate. The Net Dependable Capacity of the Java-Bali System was 42,164 MW, while the NDC of PLN NP's existing was 6,586 MW, or contributed to the Java-Bali System by 15.67%.

Tabel DMN Pembangkit Eksisting
Table of NDC of Existing Power Plant

Unit Pembangkitan Generation Unit	DMN NDC	
	MW	%
UP Bantas	300	4.56
UP Cirata	984	14.93
UP Gresik	1,939	29.43
UP Pelton	740	11.23
UP Muara Karang	730	11.07
UP Muara Tawar	1,979	30.04
PLTD Sewa	22	0.34
UP Semarang	3	0.05
Total Pembangkit Eksisting	**6,586**	**100.00**

Net Capacity Factor

Net Capacity Factor (NCF) adalah rasio antara total produksi neto dengan daya mampu neto unit pembangkit dikali dengan jam periode tertentu. Semakin tinggi nilai NCF maka semakin baik tingkat utilitas unit pembangkit. Pada tahun 2022, NCF PLN NP Eksisting sebesar 27.21% dan lebih rendah dari tahun sebelumnya dikarenakan penurunan penyaluran MW pada Unit Gresik, Muara Tawar, Muara Karang, dan Pelton.

Net Capacity Factor (NCF) is the ratio between total net production and net dependable capacity of a power plant unit multiplied by the hours of a certain period. The higher the NCF value, the better the utility level of power plant unit. In 2022, the NCF of PLN NP's Existing was 27.21%, and lower compared to the previous year due to a decrease in MW's value at the Gresik, Muara Tawar, Muara Karang, and Pelton Units.

Tabel NCF Pembangkit Hijauting (%)

Unit Pembangkitan	2020	2021	2022	Peningkatan/Penurunan
				Increase/Decrease
				%
UP Bitung				
UP Cilacap				
UP Gresik				
UP Pelabuhan Ratu				
UP Muara Karang				
UP Muara Tawar				
PLTD Sektor				
UP Belawan				
NCF Pembangkit Jawa				

Pemakaian Bahan Bakar
Fuel Consumption

Pemakaian bahan bakar untuk pembangkit di tahun 2022 masih didominasi bahan bakar batubara sebanyak 1.775.728 ton, disusul gas alam sebanyak 84.765 ton, gas alam sebanyak 80.962 BBTU, MFO sebanyak 25.818 KL, dan HSD sebanyak 30.178 KL. Dengan pemakaian energi rinci sebagai berikut.

Fuel consumption for power plants in 2022 was still dominated by coal fuel of 1,775,728 tons, biomass of 84,765 tons, natural gas of 80,962 BBTU, MFO of 25,818 KL, and HSD of 30,178 KL, with the following energy mix:

Tabel Pemakaian Bahan Bakar

Jenis Bahan Bakar	Satuan	2020	2021	2022	Peningkatan/Penurunan	
					%	Nominal
Batubara	ton	2.046.180	2.240.520	1.775.728	(14,57)	(469.659)
Gas Alam Natural Gas	BBTU	89.812	100.000	80.962	(19,04)	(19.038)
HSD	KL	13.830	120.288	30.178	(80,10)	(110.179)
MFO	KL	8.818	96.613	25.818	(73,28)	(70.995)
Biomassa	ton	8.213	83.400	84.765	1,63	1.365

Produksi Tenaga Listrik
Electricity Production

Produksi Tenaga Listrik adalah sebesar 17.864,31 GWh menurun 17,33% dibandingkan dengan tahun 2021

Electricity Production was 17,864.31 GWh, decreased by 17.33% compared to 2021.

Produksi tenaga listrik unit pembangkit PLN IP pada tahun 2022 adalah sebesar 17.864,31 GWh menurun dibandingkan tahun 2021 sebesar 21.610,101 GWh. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh penurunan produksi tenaga listrik pada Unit Gresik Muara Tawar, Muara Karang, dan Pelton.

The electricity production of PLN IP's existing units in 2022 was 17,864.31 GWh, decreased compared to 2021 or 21,610,101 GWh. The decrease was influenced by a decrease in electricity production at the Gresik, Muara Tawar, Muara Karang, and Pelton Units.

Tabel Produksi Tenaga Listrik Pembangkit Eksisting Berdasarkan Jenis Pembangkitan (GWh)
Table of Electricity Production of Existing Power Plant by Generation Types (GWh)

Jenis Pembangkitan Generation Types	2020	2021	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/(Decrease)	
				%	GWh
PLTA IVPP	3.498,65	3.586,04	3.817,84	18,62	48,7,50
PLTU Batubara Unit 2,3,4	9.885,88	9.834,38	4.894,17	(14,25)	(815,79)
PLTU Batubara Ketapang 2,3,4	878	83,86	193,89	84,89	78,03
PLTU Gas Unit 1,2,3,4	24,59	227,82	8,56	(85,79)	(218,83)
PLTU Gas Gas 1,2,3,4	1.387,26	944,59	387,57	(58,55)	(856,83)
PLTG + MDU + GD 1,2,3,4	23,68	162,89	23,05	(85,89)	(140,79)
PLTD Gas Gas 1,2,3,4	881,88	895,17	355,14	(75,35)	(865,83)
PLTG/U + MDU + GD 1,2,3,4	17,68	122,88	17,07	(84,68)	(104,81)
PLTGU Gas Gas 1,2,3,4	7.302,53	6.764,56	3.992,45	(13,58)	(1.771,11)
PLTMG Gas Gas 1,2,3,4	21,25	20,88	22,48	3,67	0,68
PLTD 1,2,3	2,05	12,05	63,83	432,77	50,88
PLTS 1,2,3	–	–	–	–	–
Jumlah Produksi Tenaga Listrik Pembangkit Eksisting Total Electricity Production of Existing Power Plants	**17.823,83**	**20.642,83**	**17.864,31**	**(17,33)**	**(3.070,52)**

Tabel Produksi Tenaga Listrik Pembangkit Eksisting Berdasarkan Unit Pembangkitan (GWh)

Table of Electricity Production of Existing Power Plant by Generation Units (GWh)

Unit Pembangkitan Generation Unit	2022	2021	2023	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	GWh
UP Bakaru (Bakaru GU)	1.016,28	1.204,89	1.426,17	18,35	221,51
UP Grati (Grati GU)	1.627,79	1.380,36	1.648,36	19,43	268,00
UP Gresik (Gresik GU)	6.599,27	5.859,83	5.093,83	-8,98	-856,00
UP Pelabuhan Ratu (PLTU)	5.635,88	5.075,36	4.797,84	-15,56	-877,52
UP Muara Karang (Muara Karang GU)	3.084,87	3.083,40	3.878,58	19,28	1.215,08
UP Muara Tawar (Muara Tawar GU)	1.788,70	5.440,12	3.673,93	49,75	1.471,75
PLTMG Bawean (Bawean)	31,35	33,00	25,16	-5,87	-5,84
PLTD SLBWA (PLTD SLBWA)	1,85	12,15	53,84	113,85	53,84
Jumlah Produksi Tenaga Listrik Pembangkit Eksisting Total Electricity Production of Existing Power Plant	**17.815,81**	**20.640,82**	**17.864,21**	**17,15**	**-2.576,63**

Tabel Produksi Tenaga Listrik Pembangkit Eksisting Berdasarkan Jenis Bahan Bakar (GWh)

Table of Electricity Production of Existing Power Plant by Fuel Types (GWh)

Jenis Bahan Bakar Fuel Types	2022	2021	2023	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	GWh
Minyak Solar	3.488	3.660,24	3.877,84	5,933	187,60
Batubara (Coal)	9.898	9.809,80	9.809,13	-15,275	-854,78
Gas Alam/Natural Gas	13.278	11.999,23	9.888,84	-17,375	-2.568,37
Minyak (Oil)	78	750,85	103,69	-85,74	-677,08
Biomassa (Biomass)	10	10,00	165,69	9,004	39,00
Jumlah Produksi Tenaga Listrik Pembangkit Eksisting Total Electricity Production of Existing Power Plant	**17.815,81**	**20.640,82**	**17.864,21**	**17,15**	**-2.576,63**

Peningkatan/Penurunan Kapasitas Produksi
Increase/Decrease in Production Capacity

Produksi tenaga listrik unit stasiong PLN IP pada tahun 2022 adalah sebesar 17.008,31 GWh menurun 11,08% dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar 19.840,80 GWh. Lemah produksi tersebut melewati target yang telah ditetapkan yaitu 111,70% dari RKAP 2022.

The electricity production of PLN IP's working units in 2022 was 17,008.31 GWh, decreased by 11.08% compared to 2021 of 19,840.80 GWh. The total production reached the predetermined target at 111.70% of the 2022 RKAP.

Produksi tenaga listrik di tahun 2022 lebih rendah dari tahun 2021, hal ini disebabkan oleh penurunan produksi tenaga listrik pada Unit Gresik, Muara Tawar, Muara Karang, dan Pelton.

The electricity production in 2022 was lower compared to 2021, this was due to a decrease in electricity production at the Gresik, Muara Tawar, Muara Karang, and Pelton Units.

Tabel Pencapaian Realisasi Produksi Listrik
Table of the Achievement of Electricity Production Realization

Produksi Production	Realisasi 2021 (GWh) 2021 Realization (GWh)	Target RKAP 2022 (GWh) 2022 RKAP target (GWh)	Realisasi 2022 (GWh) 2022 Realization (GWh)	Pencapaian (%) Percentage (%)	
				Perbandingan 2021 2021 Growth	Pencapaian RKAP 2022 2022 RKAP Achievement
Tenaga Listrik (Unit IP)	19.840,80	15.225,33	17.008,31	(17,53)	111,70

Pemakaian Sendiri
Self Consumption

Pemakaian Sendiri menurun dari tahun lalu yaitu menjadi 684,83 GWh atau 4,02% terhadap produksi tenaga listrik.

Self Consumption decreased from last year to 684.83 GWh or 4.02% of electricity production.

Pemakaian sendiri merupakan tenaga listrik yang digunakan untuk aktivitas operasional unit pembangkit. Jumlah pemakaian sendiri pada tahun 2022 adalah sebesar 684,83 GWh atau 4,02%. Pemakaian sendiri tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2021 sebesar 792,49 GWh atau 3,99%.

The self-consumption is the electricity used for operational activities in power plant units. Total self-consumption in 2022 was 684.83 GWh or 4.02%. The self-consumption was lower compared to 2021 of 792.49 GWh or 3.99%.

Tabel Produksi Tenaga Listrik Pembangkit Stasiong Berdasarkan Jenis Bahan Bakar (GWh)
Table of Self Consumption by Generation Units (GWh)

Unit Pembangkit Generation Unit	2020		2021		2022		Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%
UP Bisnis	33,00	0,13	65,50	0,08	18,05	1,03	(0,97)	(17,17)
UP Cirata	36,70	0,17	20,02	0,14	24,76	2,11	4,71	14,97
UP Gresik	130,06	0,70	127,00	0,62	122,66	0,53	9,07	3,68

Unit Pembangkitan Generation Unit	2021		2022		2023		Peningkatan/Penurunan Increase/(Decrease)	
	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%
UP Pulau Pulau Gu	382.08	0.33	432.83	0.36	374.97	0.29	(60.86)	-14.06
UP Mandirancang Mandirancang Gu	599.52	0.52	534.16	0.45	73.85	0.02	(60.53)	-9.51
UP Nusa Tenggara Nusa Tenggara Gu	33.14	0.03	42.48	0.35	53.85	0.42	(0.73)	-7.37
PLTMG Bawean Bawean 0.5*P	1.37	0.01	1.37	0.01	0.77	0.01	(0.25)	-184.06
PLTD SUMBA SUMBA 2MW	0.01	0.00	0.16	0.00	1.19	1.08	0.83	0.00
Jumlah Pemakaian Sendiri Total Self Consumption	**880.73**	**3.03**	**752.49**	**3.84**	**504.83**	**4.02**	**(107.54)**	**(0.35)**

Penjualan Tenaga Listrik
Electricity Sales

Penjualan tenaga listrik unit eksisting PLN NP pada tahun 2022 adalah sebesar 16.879,06 GWh, meturun dibandingkan tahun 2021 sebesar 18.080,59 GWh. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena adanya penambahan pelanggan existing oleh PLN yang berdampak pada capacity factor PLTU Paiton, selain itu pembangkit PLTGU & PLTU gas pada tahun lalu mendapatkan alokasi energi yang cukup tinggi karena Sistem Jawa Bali mengalami krisis batubara.

The electricity sales of PLN NP's existing units in 2022 was 16,879.06 GWh, decreased compared to 2021 of 18,080.59 GWh. The decrease was mainly due to the addition of new customers by PLN which had an impact on the capacity factor of the Paiton CFPP. In addition, the gas CCPP & CCPP last year received a very high energy allocation due to the Java Bali System experienced a coal crisis.

Tabel Penjualan Tenaga Listrik Pembangkit Eksisting Berdasarkan Jenis Pembangkitan (GWh)
Table of Electricity Sales of Existing Power Plant by Generation Types (GWh)

Jenis Pembangkitan Generation Types	2020	2021	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	GWh
PLTA UPP	2,441.35	2,345.85	2,555.09	10.89	651.24
PLTU Batubara Coal UPP	14,512.80	15,179.63	14,236.23	(12.33)	(890.32)
PLTU Biomassa Biomass UPP	0.00	93.31	94.88	(0.03)	(0.87)
PLTU/MM Fuel UPP	53.58	110.11	0.38	(99.97)	(254.26)
PLTU Gas Gas UPP	1,355.75	981.14	760.51	(77.53)	(212.07)
PLTG MFO MFO UPP	72.19	108.74	13.94	(81.39)	(147.09)
PLTG Gas Gas UPP	64.07	481.03	582.32	174.07	373.16
PLTGU MFO MFO UPP	14.31	330.04	37.4	(99.55)	(288.29)
PLTGU Gas Gas UPP	7,830.77	6,965.72	6,386.13	(13.53)	(1,305.59)
PLTMG Gas Gas UPP	19.08	19.07	20.71	4.49	0.80
PLTD UPP	3.08	11.09	61.89	458.16	46.80
PLTS UPP	-	-	-	-	-
Jumlah Penjualan Tenaga Listrik Pembangkit Eksisting Total Electricity Sales of Existing Power Plant	**27,117.01**	**26,848.44**	**24,379.48**	**(27.48)**	**(3,403.59)**

Segmen Usaha Jasa *Operation and Maintenance* (O&M)

Operation and Maintenance (O&M) Services Business Segment

PLN NP menyediakan Jasa Operation and Maintenance (O&M) sebagai bentuk pengembangan Perusahaan dan memaksimalkan potensi yang dimiliki secara maksimal. Bidang usaha jasa O&M dilakukan oleh PLN NP secara langsung (wilayah Jawa dan Luar Jawa) maupun melalui anak perusahaan (PT ITBS Services) dan perusahaan patungan (PT Kompa ESS). Total pembangkit yang dikelola PLN NP melalui jasa O&M adalah sebesar 8.140,0 MW.

PLN NP provides Operation and Maintenance (O&M) Services as a form of Company development and strives to maximum potential. The O&M services business field is conducted by PLN NP directly (Java and outside Java) as well as through subsidiaries (PT PLN NP Services) and joint ventures (PT Kompa PLN NP). Total power plants managed by PLN NP through O&M services were 8,140.0 MW.

Jasa O&M Wilayah Jawa

O&M Services in Java

Unit Bisnis Jasa O&M (UBJOM) yang dikelola oleh PLN NP di wilayah Jawa sebesar 5.070,5 MW tersebar di 10 (sepuluh) unit pembangkit, namun yang dikelola langsung oleh PLN NP adalah 4 (empat) unit pembangkit.

The O&M Services Business Unit (UBJOM) managed by PLN NP in the Java region is 5,070.5 MW spread across 10 (ten) power plant units, however, the performance managed by PLN NP is 4 (eight) power plant units.

Kinerja UBJOM Wilayah Jawa Tahun 2022

Performance of Java Region O&M BU in 2022

NCF	EFOR	SdOF	Total Kalor Netto	SOF	OAF
64,31%	2,40%	3,74 kali	2.670,48	9,01%	88,34%

Tabel EAF Pembangkit UBJOM Wilayah Jawa (%)

Pembangkit Power Plant	2020	2021	2022	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease %
PLTU Indramayu 1,2,3 Indramayu 1,2,3 (1x)	89,82	90,00	89,85	(0,15)
PLTU Pembangkit 3,4 Pembangkit 3,4 (1x)	68,00	67,80	71,46	5,79
PLTU Paiton 9 Paiton 9 (1x)	85,30	85,30	80,07	5,33
PLTU Paiton 1,2 Paiton 1,2 (2x)	84,52	80,00	84,82	(0,13
PLTU Tanjung Awar-Awar 1,2 Tanjung Awar-Awar 1,2 (2x)	87,07	80,00	81,35	(8,69
PLTGU Muara Tawar Blok 5 Muara Tawar Block 5 (1x)	94,60	87,56	84,32	11,39
PLTGU Muara Karang Blok 2 Muara Karang Block 2 (1x)	80,61	80,00	80,84	0,69
PLTGU Muara Karang Blok 3 Peaker Muara Karang Block 3 Peaker (1x)	-	80,56	85,35	(5,35)
EAF Pembangkit UBJOM Wilayah Jawa EAF of UBJOM Power Plant in Java	**81,60**	**80,11**	**80,34**	**1,71**

Tabel SOF Pembangkit UBJOM Wilayah Jawa (%)

Pembangkit Power Plant	2020	2021	2022	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease %
PLTU Indramayu Indramayu (1x)	0,87	0,48	0,23	(7,61)
PLTU Pembangkit Pembangkit (1x)	0,81	19,97	11,42	(27,53)
PLTU Paiton 9 Paiton 9 (1x)	3,35	10,51	11,41	8,06
PLTU Paiton Paiton (2x)	3,35	0,75	2,68	(64,78)
PLTU Tanjung Awar-Awar Tanjung Awar-Awar (1x)	10,00	0,71	17,00	31,97
PLTGU Muara Karang Blok 2 Muara Karang Block 2 (1x)	1,27	0,19	1,39	-79,73%
PLTGU Muara Tawar Blok 5 Muara Tawar Block 5 (1x)	4,87	12,61	6,33	-38,13%
PLTGU Muara Karang Blok 3 Peaker Muara Karang Block 3 Peaker (1x)	-	0,00	4,27	-
SOF Pembangkit UBJOM Wilayah Jawa SOF of UBJOU Power Plant in Java	**4,83**	**10,30**	**8,01**	**(13,07)**

Tabel EFOR Pembangkit UBJOM Wilayah Jawa (%)

Pembangkit Power Plant	2020	2021	2022	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease %
PLTU Indramayu	3.00	4.33	4.56	1.67
PLTU Ramaya	4.00	4.67	8.22	52.73
PLTU Paiton 9	4.33	4.51	5.46	(80.00)
PLTU Paiton	4.33	8.19	1.88	(75.53)
PLTU Tanjung Awar-Awar	3.71	3.84	3.19	19.69
PLTGU Muara Karang Blok 2	3.00	3.83	3.83	0.00
PLTGU Muara Tawar Blok 5	8.42	1.11	3.84	(47.11)
PLTGU Muara Karang Blok 3	-	3.50	3.83	(47.30)
EFOR Pembangkit UBJOM Wilayah Jawa EAFOR of OMUBJ Power Plant in Java	**2.06**	**3.19**	**2.40**	**(11.13)**

Tabel SJOF Pembangkit UBJOM Wilayah Jawa (kali/unit)

Pembangkit Power Plant	2020	2021	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease %	kali/unit
PLTU Indramayu	3.33	0.67	1.00	66.75	0.33
PLTU Ramaya	4.00	1.00	5.00	200.00	3.00
PLTU Paiton 9	5.33	5.00	1.00	(80.07)	(3.00)
PLTU Paiton	1.00	2.00	1.00	(40.00)	(1.00)
PLTU Tanjung Awar-Awar	2.00	0.00	3.00	-	3.00
PLTGU Muara Karang Blok 3	0.00	6.00	0.00	(100.00)	(6.00)
PLTGU Muara Tawar Blok 5	3.00	2.00	5.00	175.00	3.00
PLTGU Muara Karang Blok 3	-	1.00	0.00	(50.00)	(0.00)
SJOF Pembangkit UBJOM Wilayah Jawa SJOF of OMUBJ Power Plant in Java	**3.00**	**1.00**	**1.71**	**71.00**	**0.71**

Tabel Tara Kalor Nate Pembangkit UBJOM Wilayah Jawa (kCal/kWh)

Pembangkit Power Plant	2020	2021	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	kCal/kWh
PLTU Indramayu	2,798.22	2,797.99	2,856.17	2.11	58.23
PLTU Rembang	2,744.39	2,803.67	3,008.14	9.28	252.47
PLTU Pelabuhan Ratu	3,681.31	3,854.00	3,674.85	(4.77)	(181.75)
PLTU Paiton	2,827.75	2,818.92	2,818.92	(0.00)	(0.00)
PLTU Tanjung Awar-Awar	2,784.84	2,823.66	2,968.21	2.30	63.39
PLTGU Muara Karang Blok 2	1,903.79	1,889.04	1,897.83	0.35	7.05
PLTGU Muara Tawar Blok 5	1,870.20	1,935.43	2,013.84	(0.00)	(0.00)
PLTGU Muara Karang Blok 3 Baru	-	1,800.00	3,005.75	111.20	111.20
Tara Kalor Nate Pembangkit UBJOM Wilayah Jawa Net Plant Heat Rate of UMJBJ Power Plant in Java	**2,181.33**	**2,243.00**	**2,375.19**	**1.08**	**27.00**

Tabel NCF Pembangkit UBJOM Wilayah Jawa (%)

Pembangkit Power Plant	2020	2021	2022	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease
				%
PLTU Indramayu	80.00	75.34	77.57	2.23
PLTU Rembang	88.61	83.60	66.42	(16.97)
PLTU Pelabuhan Ratu	77.50	73.35	73.44	0.43
PLTU Paiton	67.23	59.00	77.13	28.04
PLTU Tanjung Awar-Awar	73.00	75.42	71.37	(5.49)
PLTGU Muara Karang Blok 2	44.83	36.73	36.80	(0.23)
PLTGU Muara Tawar Blok 5	38.23	31.91	43.07	35.00
PLTGU Muara Karang Blok 3 Baru	-	80.40	62.50	30.00
UPDK Pembangkit UBJOM Wilayah Jawa NCF of UMJBJ Power Plant in Java	**71.57**	**59.83**	**64.21**	**7.33**

Jasa O&M Wilayah Luar Jawa

O&M Services Outside Java

Unit Share Jasa O&M (UBJOM) yang dikelola oleh PLN NP di wilayah Luar Jawa adalah 843,03MW (3 pembangkit masih dalam tahap konstruksi) tersebar di 4 (empat) lokasi dengan kinerja sebagai berikut:

The O&M Services Business Unit (UBJOM) managed by PLN NP in Outside Java is 843.03MW (3 power plant is still under construction) spread across 4 (four) locations with the following performance:

Kinerja UBJOM Wilayah Luar Jawa Tahun 2022

Performance of UBJOM Outside Java Region in 2022

NCF	EFOR	SAIDI	Tara Kalor Netto	SOF	EAF
61,80%	2,17%	1,80	9.389,77	8,79%	88,04%

Tabel EAF Pembangkit UBJOM Wilayah Luar Jawa (%)

Table of EAF of UBJOM's Power Plant Outside Java (%)

Pembangkit Power Plant	2020	2021	2022	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease %
PLTU Tarakan Tarakan 2*7	77,05	81,05	82,07	1,81
PLTU Kaltim Teluk Kaltim Teluk 2*7	80,80	88,88	91,18	2,69
PLTMG Bitung Bitung 2*2,80	90,79	88,88	83,90	(4,98)
PLTU Nagekeo Nagekeo 2*7	73,88	81,38	68,81	(12,5)
EAF Pembangkit UBJOM Wilayah Luar Jawa EAF of UBJOM's Power Plant Outside Java	**85,11**	**88,44**	**88,04**	**(0,36)**

Tabel SOF Pembangkit UBJOM Wilayah Luar Jawa (%)

Table of SOF of UBJOM's Power Plant Outside Java (%)

Pembangkit Power Plant	2020	2021	2022	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease %
PLTU Tarakan Tarakan 2*7	13,04	13,16	13,43	(3,56)
PLTU Kaltim Teluk Kaltim Teluk 2*7	8,24	8,74	7,33	(30,08)
PLTMG Bitung Bitung 2*2,80	4,87	2,74	0,88	(48,47)
PLTU Nagekeo Nagekeo 2*7	10,03	9,16	0,13	(98,8)
SOF Pembangkit UBJOM Wilayah Luar Jawa SOF of UBJOM's Power Plant Outside Java	**8,37**	**7,94**	**8,79**	**10,71**

Tabel EFOR Pembangkit UBJOM Wilayah Luar Jawa (%)

Pembangkit				Peningkatan/ Penurunan
				%
PLTU Tanjung Jati B Unit 3 & 4	7,80	5,84	6,69	14,56
PLTU Rembang	6,40	1,86	5,00	168,82
PLTMG Arun	0,21	0,61	1,03	68,85
PLTU Pulang Pisau	0,21	2,22	2,24	0,90
EFOR Pembangkit UBJOM Wilayah Luar Jawa	**4,22**	**2,70**	**3,17**	**17,38**

Tabel SdOF Pembangkit UBJOM Wilayah Luar Jawa (kali/unit)

Pembangkit				Peningkatan/Penurunan	
				%	kali/unit
PLTU Tanjung Jati B Unit 3 & 4	1,58	3,00	3,50	16,67	0,5
PLTU Rembang	1,00	1,50	1,00	(33,33)	(0,5)
PLTMG Arun	1,76	2,74	3,37	23,00	1,37
PLTU Pulang Pisau	4,00	1,00	2,00	100,00	1,0
SdOF Pembangkit UBJOM Wilayah Luar Jawa	**2,79**	**2,52**	**1,69**	**(33,51)**	**(0,83)**

Tabel Tara Kalor Neto Pembangkit UBJOM Wilayah Luar Jawa (kCal/kWh)

Pembangkit				Peningkatan/Penurunan	
				%	kCal/kWh
PLTU Tanjung Jati B Unit 3 & 4	4.178,48	4.038,00	4.111,33	21,30	873,33
PLTU Rembang	3.888,76	3.571,00	3.324,00	7,00	253,00
PLTMG Arun	2.332,00	2.393,34	2.459,33	13,33	1.965,33
PLTU Pulang Pisau	5.787,33	5.345,77	5.345,67	0,00	0,10
Tara Kalor Neto Pembangkit UBJOM Wilayah Luar Jawa	**2.161,41**	**2.500,24**	**2.268,77**	**(8,22)**	**(200,27)**

Faktor NCF Pembangkit UBJOM Wilayah Luar Jawa (%)

Pembangkit	2020	2021	2022	Peningkatan/ Penurunan
				%
PLTU Tarahan	77,07	53,97	52,60	(2,59)
PLTU Ombilin	80,63	80,56	68,60	(15,35)
PLTMG Bali	66,43	36,05	53,66	61,36
PLTU Pulang Pisau	85,82	53,06	49,32	(3,80)
NCF Pembangkit UBJOM Wilayah Luar Jawa NCF of Outside Java Power Plant	**82,20**	**52,04**	**51,00**	**(1,42)**

Jasa O&M melalui Anak Perusahaan

O&M Services through Subsidiaries

Unit Bisnis Jasa O&M (UBJOM) melalui Anak Perusahaan (PT PJB Services) sebanyak 7.713,3 MW yang tersebar di 33 lokasi.

Operation and Maintenance Business Unit (UBJOM) through its Subsidiaries (PT PJB Services) as much as 7.713,3 MW spread across 33 locations.

Kinerja Pembangkit UBJOM yang dikelola Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan

Performance of UBJOM Power Plants managed by Subsidiaries and Joint Ventures

Jenis Dalam Daftar Power Plant	SAF (%)		EFOR (%)		NPHR (kCal/kWh)	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
PLTU Anbaang	89,50	90,01	3,50	3,05	2.128,80	2.038,50
PLTU Arapaima	91,07	93,50	0,21	0,08	7.364,05	8.618,07
PLTU Bangka	72,77	74,58	18,00	14,39	2.884,35	2.395,16
PLTU Belitung	97,70	92,92	2,01	2,70	2.441,81	2.808,79
PLTU Bolok	89,88	85,75	1,75	0,21	2.241,88	2.254,07
PLTU Bontang	76,79	73,51	3,93	2,22	5.054,92	5.798,51
PLTU Bukit Asam	89,90	90,08	4,99	3,11	8.981,93	7.977,15
PLTU Ropa	80,00	88,90	5,22	3,82	3.108,39	3.038,69
PLTU Tanjung Jati B	82,70	90,77	4,63	0,72	9.988,84	8.833,94
PLTU Tidore	90,40	77,08	5,09	6,71	3.535,58	3.436,54
PLTU Tenggarong	87,60	90,05	2,38	0,40	3.088,35	3.601,28
PLTA Asahan	80,00	80,00	0,49	0,00	–	–
PLTU Banjarsari	74,44	81,58	13,42	0,00	2.793,38	3.110,64
PLTU Sapta Angsa	80,27	80,03	88,88	97,81	2.148,36	2.288,35
PLTMG Belawan	82,88	87,70	0,01	0,21	2.671,57	2.614,99

Segmen Usaha Jasa *Engineering, Procurement and Construction* (EPC)

Engineering, Procurement and Construction (EPC) Services Business Segment

PLN NP menyediakan jasa Engineering, Procurement and Construction (EPC) melalui salah satu Anak Perusahaannya yaitu PT Yelindo Kusuma (YK). Jasa EPC yang ditawarkan oleh PLN NP tersebut terdiri atas pembangunan pembangkit-pembangkit baru, khususnya di luar Pulau Jawa yang dikelola tenaga profesional dan berpengalaman dalam penggunaan teknologi pembangkitan serta pembangunan jaringan Transmisi dan Distribusi (T&D) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Terdapat 8 proyek EPC yang dikelola oleh PT Yelindo Kusuma (YK) dengan total kapasitas 595 MW.

PLN NP provides Engineering, Procurement and Construction (EPC) Services through one of its subsidiaries, PT Yelindo Kusuma (YK). The EPC services conducted by YK's fall consist of the construction of new power plants, especially in areas other than Java, supported by professionals and capabilities in mastering electric power generation technology, as well as the construction of Transmission and Distribution (T&D) networks spread throughout Indonesia. There are 8 EPC projects managed by PT Yelindo Kusuma (YK) with a total capacity of 595 MW.

Tabel Proyek EPC yang dikelola PLN NP melalui Anak Perusahaan

Table of EPC Projects managed by PLN NP through Subsidiaries

Pembangkit *Power Plant*	Kapasitas Terpasang *Installed Capacity*	Lokasi *Location*	Progress Pekerjaan (%) *Work Progress (%)*
PLTU Mbalawan/ Riau	2 x 3 MW	Mpalawan Riau	Selesai/ *Completed*
PLTU Kendari/ Sultra	2 x 10 MW	Sulawesi Tenggara/ *Southeast Sulawesi*	Selesai/ *Completed*
PLTU Ekemkuu/ Papua	2 x 25 MW	Ekemkuu	Selesai/ *Completed*
PLTU Tidore/ Malut	2 x 7 MW	Maluku Utara/ *North Maluku*	Selesai/ *Completed*
PLTU Timika/ Papua	4 x 7 MW	Papua	47,93
PLTU Bima/ NTB	2 x 10 MW	Nusa Tenggara Barat/ *West Nusa Tenggara*	39,85
PLTU Ende/ Flores	2 x 7 MW	Nusa Tenggara Timur/ *East Nusa Tenggara*	Selesai/ *Completed*
PLTU Sofifi/ Malut	2 x 3 MW	Maluku Utara/ *North Maluku*	73,48

Segmen Usaha Jasa Lainnya

Other Services Business Segment

Segmen Usaha Lainnya merupakan proyek yang berada dibawah Divisi Business Solution dengan fungsi utama untuk memastikan pengembangan strategi bisnis, melakukan evaluasi strategi strategi bisnis berikhtiar sebagai pendukung aktivitas pemasaran, serta mengelola bisnis penunjang bisa O&M, dan pemanfaatan aset untuk mendukung pengembangan bisnis Perusahaan. Adapun beberapa proyek strategis yang menjadi segmen jasa usaha lainnya di tahun 2021 terdiri dari Pemanfaatan Aset, Pemanfaatan Lahan/Bangunan, Pemanfaatan laboratorium, Marketing Strategis, serta Penunjang Jasa O&M.

The Other Business Segment is a project under the Business Solution Division with the main function of ensuring the development of business strategies, evaluating the execution of business strategies acting as a marketing activity, sales and managing the supporting business of O&M business, and asset utilization to support the Company's business development. Several strategic projects that become other business services segments in 2021 consisted of Asset Utilization, Land/Building Utilization, Laboratory Utilization, Strategic Marketing, and Supporting O&M Services.

Pemanfaatan Fly Ash Bottom Ash (FABA)
Utilization of Fly Ash Bottom Ash (FABA)

PLN NP telah melakukan kerjasama jual beli Bottom Ash (BA) ke PT Semen Indarung Abadi (PT INASUA) untuk supply BA sebesar 2.000 ton per bulan, kontrak ini berdurasi 1 tahun dan akan menyerap BA UP Teluk Sibi sebanyak 24.000 ton. Pada tanggal 29 September 2021 hingga 8 April 2022 telah dilakukan pengangkutan BA oleh PT INASUA sebanyak 7.037,59 ton. Pada tanggal 17 Juli 2022, Inasua telah menyelesaikan PO Kedua sebesar 3.000,000 ton ke UP Teluk Sibi dan UBJOM Padang.

PLN NP has conducted a Bottom Ash (BA) sale and purchase cooperation with PT Semen Indarung Abadi (PT INASUA) for BA supply of 2,000 tons per month. This contract has a duration of 1 year and will absorb 24,000 tons of BA from Teluk Sibi UP. On September 29, 2021 to April 8, 2022, 7,037.59 tons of BA were transported by PT INASUA. On July 17, 2022, Inasua has submitted a second PO of 3,000,000 tons to Teluk Sibi UP and Padang UBJOM.

PT PLN NP bekerja sama dengan PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (ITP) dalam pemanfaatan Fly Ash (FA) sebanyak 20% ton untuk proses produksi semen. Uji coba pertama pemanfaatan FA berhasil dilakukan pada bulan Juni dan Juli 2022. Kegiatan ini dilanjutkan dengan kesepakatan pemanfaatan FA antara PLN NP dan ITP pada tanggal 30 Juni 2022 sebanyak 2.000 ton dengan jangka waktu setahun.

PT PLN NP collaborated with PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (ITP) to utilizing 20% tons of Fly Ash (FA) for the cement production process. The first trial of FA utilization was successfully conducted in June and July 2022. This collaboration was continued with an FA utilization of 2,000 tons between PLN NP and ITP on June 30, 2022 with a period of one year.

Pemanfaatan Lahan dan Bangunan
Land and Building Utilization

Sewa Menyewa Gedung Ex-BPWC dan Wisma Penginapan oleh BUT Sinohydro Corporation Limited
Lease of Ex-BPWC Building and Lodging House by BUT Sinohydro Corporation Limited

Pada tanggal 01 Januari 2022 telah ditandatangani perjanjian sewa menyewa Pengelola Sewa Villa 1 & 2 Cinta antara PT PLN Nusantara Power dan BUT Sinohydro Corporation Limited. Durasi sewa villa selama 1 tahun terhitung hingga 31 Desember 2022.

On January 01, 2022, a Lease Agreement for Villa 1 & 2 Cinta was signed between PT PLN Nusantara Power and BUT Sinohydro Corporation Limited. The duration of the villa lease is for 1 year starting from December 31, 2022.

Pendayagunaan Aset Properti PT PLN (Persero)
Utilization of Property Assets of PT PLN (Persero)

Pendayagunaan aset properti yang sudah berkontrak meliputi Sewa lahan ATM di BUEL Tanjung Awar-Awar dan Sewa lahan ATM di PLTU Indrani. Total pendapatan yang telah diterima PT PLN NP sehubungan dengan ditandatanganinya kontrak Pendayagunaan Aset Properti PT PLN (Persero) dengan penanggung.

Utilization of property assets that have been contracted include ATM land Lease at Tanjung Awar-Awar CFPP and ATM land Lease at Indrani CFPP. Total revenue that has been received by PT PLN NP in connection with the signing contract of PT PLN (Persero) Property Asset Utilization contracts with customers.

Pengelolaan Guest House/Wisma/Objek Wisata
Guest House/Resort/Tourist Object Management

- Pengelolaan Kawista Guest House (GHKW) Bandung
- Pengelolaan Wisma UBJOM Tanjung Awar-Awar
- Pengelolaan Wisma UBJOM Indramayu
- Pengelolaan Objek Wisata Pantai Nyiamis, Tulungagung
- Pengelolaan Parkir Resort Hotel (PARKHO)

- Management of Kawista Guest House of Bandung (GHKW)
- Management of House of Tanjung Awar-Awar (UBJOM)
- Management of House of Indramayu (UBJOM)
- Management of Nyiamis Beach Tourism Object, Tulungagung
- Management of Parkir Resort Hotel (PARKHO)

Pemanfaatan Laboratorium
Laboratory Utilization

PLN NP telah membangun sebuah lab bisnis non core baru yaitu jasa kalibrasi yang berpotensi dan fokus di 2 jasa kalibrasi & repair dan telah memiliki sertifikasi KAN. Saat ini Laboratorium tersebut dibutuhkan untuk mendukung proses bisnis internal PT. PLN NP. Pemenuhan jangka panjang akan melibatkan eksternal ke pasar Elektrikal seperti PLN, Indonesia Power dan kemudian ruang lingkup Lab K3 yaitu Temperature dan Pressure.

ULAK sementara banyak memiliki customer untuk jasa repair maupun kalibrasi untuk PLN UPDK Malahayu, PT Indonesia Power Maintenance Service Unit dan IT Cogindo.

PLN NP has built a new non-core business idea, namely calibration services that are engaged and focused on 2 calibration & repair services and already have KAN certification. Currently, UP3D Laboratory is focused on supporting the internal business process of PT PLN NP. The long-term plan is to expand to external markets such as PLN, Indonesia Power and increase the scope of Lab K3, namely Temperature and Pressure.

ULAK temporarily has customers for repair and calibration services for PLN UPDK Malahayu, PT Indonesia Power Maintenance Service Unit and IT Cogindo.

Marketing Strategic
Strategi Marketing

- Hasil Inspeksi 110 PPA UJP Cilacap & Bengkulen
- Tuli Up SMP Banjarsari
- Pekerjaan PVD lebih 242 lamp
- PLA Dalam Unit #2 PT UJP

- Hasil Inspection of 110 PPA UJP Cilacap & Bengkulen
- Tuli Up of Banjarsari Junior High School
- PVD work for more than 242 lights
- PLA Dalam Unit #2 PT UJP

Penunjang Jasa O & M
Supporting O&M Services

EAH Gorontalo Minahasa, EAH Minahasa, dan EAH UPK Singkawang (Tahap 8 dan Tahap 8B)
EAH Gorontalo Minahasa, EAH Minahasa and EAH UPK Singkawang (Stage 8 and Stage 8B)

Pekerjaan EAH Gorontalo Minahasa telah dilaksanakan Go Live pada 22 Juli 2021, untuk selanjutnya akan dilakukan Pendampingan I & II. Sedangkan EAH Asam-Asam telah kontrak ke tahap 8 yaitu agenda Kick Loan Training sampai UAT & MH. Dan untuk EAH UPK Singkawang (Tahap 8 dan Tahap 8) telah dilaksanakan agenda Go Live pada tanggal 25 Agustus 2021 dilanjutkan Pendampingan I & II

The Gorontalo Minahasa EAH work has been carried out Go Live on July 22, 2021, for the next Assistance I & II will be carried out. Meanwhile, EAH Asam-Asam has progressed to stage 8) namely the UAT & MH Kick Loan Training onwards agenda. And for the Singkawang UPK EAH (Phase 8 and Stage 8) the Go Live agenda was carried out on August 25, 2021, followed by Assistance I & II.

Jasa Pengakuran PA Flow PLTU Kuban Agung Unit #1
PA Flow Measurement Services of Kuban Agung Unit #1 CFPP

Pekerjaan Jasa Pengukuran PA Flow PLTU Kuban Agung Unit #1 dengan periode aktivitas mulai 13-17 September 2021. Pekerjaan ini telah selesai dilaksanakan.

PA Flow Measurement Services of Kuban Agung Unit #1 CFPP with an execution period from September 13-17, 2021. The work has been completed.

Servis dan BOT PV Rooftop di 20 Gedung PLN UID Bali Group

PV Rooftop Lease and BOT in 20 PLN UID Bali Group Buildings

Per tanggal 31 Agustus 2022, telah terbit Berita Acara Serah Terima yang menandakan pekerjaan Instalasi & Konstruksi telah selesai dilaksanakan secara hasil waktu.

As of August 31, 2022, a Minutes of Handover has been issued indicating that the installation & construction work has been completed in a timely manner.

Jasa Pendampingan I-Care PLN GC

PLN GC I-Care Assistance Services

PLN NP berkontrak dengan PLN Gas dan Geothermal terkait pekerjaan Jasa Pengembangan Aplikasi I-Care PT PLN GG dengan durasi pekerjaan selama 3 tahun. Pada tanggal 30 September 2022 telah dilakukan Penyusunan dokumen Business Solution Design dan Network Sizing dan amunisi telah disiapkan di PLN GG. Demikianlah Bio Kay User Training agenda will be carried out.

PLN NP contracted with PLN Gas and Geothermal related to PT PLN GG's I-Care Application Development Services work with a duration of work of 3 years. On September 30, 2022, the Business Solution Design and Network Sizing documents were prepared at PLN GG. Henceforth, Bio Kay User Training agenda will be carried out.

Studi dan Uji Coba Amonia Co-Firing UP Gresik

Study and Trial of Ammonia Co-Firing at Gresik CU

PLN NP melakukan Perjanjian dengan IHI Corporation terkait Studi dan Uji Coba Amonia Co-Firing di PLTU Gresik dengan nomor perjanjian 1010500007F03-IHI0K2022 dengan tanggal penyelesaian pekerjaan paling lambat pada 31 Maret 2023. Hasil dari pekerjaan dilakukan oleh UP Gresik.

PLN NP made an Agreement with IHI Corporation related to the Study and Trial of Ammonia Co-Firing at Gresik CU'97 with agreement number 1010500007F03-IHI0K2022 with a deadline for work completion no later than March 31, 2023. The execution of the work is carried out by Gresik CU.

Profitabilitas Per Segmen
Profitability by Segment

Komponen Pendapatan Usaha
Component of Revenues

Segmen dengan kontribusi tertinggi terhadap pendapatan usaha berasal dari Penjualan Tenaga Listrik sebesar 79,71% atau Rp21,68 triliun.

The segment with the highest contribution to revenues came from Electricity Sales at 79.71% or Rp21.68 trillion.

Komponen pendapatan PLN NP sesuai dengan segmen usaha yang dimiliki yaitu penjualan tenaga listrik, jasa operasi dan pemeliharaan, konstruksi, dan pendapatan lainnya. Pada tahun 2022, kontribusi masing-masing segmen terhadap pendapatan usaha yaitu penjualan tenaga listrik sebesar 79,71%, jasa operasi dan pemeliharaan sebesar 15,07%, konstruksi sebesar 3,11%, dan pendapatan lainnya sebesar 2,11%.

The revenue component of PLN NP is in accordance with its business segments, namely electricity sales, operation and maintenance services, construction, and other revenues in 2022, the contribution of each segment to revenues, namely sales of electricity by 79.71%, operation and maintenance services by 15.07%, construction by 3.11%, and other revenues by 2.11%.

Tabel Komponen dan Komposisi Pendapatan Usaha
Table of Components and Composition of Revenues

Jenis Pendapatan Types of Revenue	2022		2021		2020	
	Rp Juta Rp million	%	Rp Juta Rp million	%	Rp Juta Rp million	%
Pendapatan Usaha Revenue						
Penjualan Tenaga Listrik Sales of Electricity	25.976.370	82,71	24.016.370	82,17	21.681.676	79,71
Pendapatan Usaha Lainnya Other Operating Revenue						
Jasa Operasi dan Pemeliharaan Operation and Maintenance Services	4.907.824	15,61	4.097.907	13,75	4.099.754	15,07
Konstruksi Construction	703.936	2,31	727.224	2,46	845.158	3,11
Lainnya Others	160.947	0,53	101.869	0,61	574.809	2,11
Jumlah Pendapatan Usaha Total Revenues	**30.434.178**	**100,00**	**29.038.134**	**100,00**	**27.201.200**	**100,00**

Pendapatan Usaha Per Segmen
Revenues by Segment

Pendapatan usaha PLN NP tahun 2022 adalah sebesar Rp27,20 triliun menurun 7,05% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp29,32 triliun. Penurunan pendapatan usaha PLN NP disebabkan oleh penurunan penjualan tenaga listrik yang disebabkan oleh penurunan pemakaian energi listrik dan pembangkit Run – PLTU batubara (mayoritas pembangkit PLN NP) oleh Pelanggan dan dari Pusat Pengatur Beban PLN sering mulai dioperasikannya PLTU pada Sistem Kelistrikan Jawa Bali dan mulai padatnya kembali pasokan batubara pada tahun 2022.

PLN NP's revenue in 2022 amounted to Rp27.20 trillion, decreased by 7.05% compared to 2021 at Rp29.32 trillion. The decrease in PLN NP's revenue was due to a decrease in electricity sales caused by a decrease in the distribution of electrical energy from Run-coal (CFP) the majority of PLN NP's power plants by PLN's Distribution and Load Dispatch Center in line with the start of the operation of CFPPs in the Java Bali Electricity System and the recovery of coal supply in 2022.

Total Pendapatan Usaha Per Segmen (Rp Juta)
Table of Revenues by Segment (Rp Million)

Segmen Usaha Business Segment	2020	2021	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik Electric Power Generation Business	23.170.470	24.241.378	22.802.470	(11,05)	(2.438.908)
PLTU	15.879.472	16.308.334	17.565.662	19,03	3.257.323
PLTG	4.934.387	4.973.307	4.230.439	(19,13)	(1.191.959)
PLTA	2.030.618	2.304.258	2.153.660	6,14	42.413
PLTD	40.834	39.644	2.907.709	5.334,74	2.053.101
Usaha Jasa O&M dan EPC O&M and EPC Services Business	5.880.368	6.179.739	6.600.230	6,81	420.788
Usaha Jasa EAN, IMAP, Blackstart EAN, IMAP, Blackstart Services Business	548.962	533.489	1.165.596	118,48	632.110
Usaha Jasa Lainnya Other Services Businesses	3.241	4.776	-	(100,00)	(4.776)
Jumlah Pendapatan Usaha sebelum Eliminasi Total Revenues before Eliminations	31.935.142	31.258.372	29.448.000	(5,79)	(1.810.772)
Eliminasi Eliminations	(1.700.988)	1.752.332	(1.516.801)	(100,08)	(3.269.133)
Jumlah Pendapatan Usaha Total Revenues	30.434.178	29.508.134	27.202.200	(7,82)	(2.305.934)

Laba Usaha Per Segmen
Operating Income by Segment

Laba usaha PLN TJP tahun 2022 adalah sebesar Rp620,81 triliun meningkat 11,33% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp728 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penyusutan operasi pembangkit Non - kebutuhan (berbahan bakar minyak) dan peningkatan operasi pembangkit berbahan dimana harga bahan bakar minyak lebih ringg dibandingkan dengan harga batubara.

PLN TJP's operating income in 2022 amounted to Rp620,81 billion, increased by 11.33% compared to 2021 of Rp728 billion. The increase was mainly due to a decrease in the operation of non-coal (oil-fired) power plants and an increase in the operation of coal power plants where the price of fuel was higher than the price of coal.

Tabel Laba Usaha Per Segmen (Rp juta)
Table of Operating Income by Segment (Rp million)

Segmen Usaha Business Segment	2020	2019	2021	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik Electric Power Generation Business	**8.918.942**	**4.018.720**	**4.241.847**	**5,55**	**22.127**
PLTGU [illegible]	4.118.781	1.747.629	1.739.014	(1,55)	(27.585)
PLTU [illegible]	3.369.744	1.722.696	1.370.331	(8,38)	(352.179)
PLTA [illegible]	1.369.114	438.606	383.587	2,64	14.781
PLTG [illegible]	31.605	20.790	137.384	512,77	108.694
Usaha Jasa EBITDA dan EPC O&M and EPC Services Business	**471.431**	**303.004**	**548.858**	**48,81**	**179.971**
Usaha Jasa EAM, MAM, Stockwell EAM, MAM, Stockwell Services Business	4.748	13.588	40.270	116,55	21.682
Jumlah Laba Usaha sebelum Eliminasi Total Operating Income before Elimination	**9.515.119**	**4.450.054**	**4.830.775**	**5,38**	**223.781**
Eliminasi [illegible]	—	—	—	—	—
Total Segmen Segment Result	9.515.119	4.450.054	4.830.775	9,38	223.781
Penghasilan (Beban) Lain-lain Other Revenues (Expenses)	1.714.430	1.705.049	3.575.819	51,21	930.761
Jumlah Laba Usaha Total Operating Income	**13.218.137**	**7.152.040**	**8.606.583**	**11,25**	**814.543**

Grafik Laba Usaha (Rp juta)
Chart of Operating Income
(Rp million)

Strategi dan Arah Pengembangan Segmen Usaha
Strategy and Direction of Business Segment Development

Dalam rangka keberlanjutan usaha, strategi dan arah pengembangan disusun untuk setiap segmen usaha sehingga operasional dapat sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

In the context of business sustainability, strategies and development directions are prepared for each business segment so their operations can be in accordance with predetermined targets.

Strategi dan Arah Pengembangan Segmen Usaha Penjualan Tenaga Listrik

Development Strategy and Direction of Electricity Sales Business Segment

PLN NP pada tahun 2022 mengoptimalkan kinerja penjualan tenaga listrik berdasarkan pada 3 prinsip antara lain security, affordability, dan low emission. Untuk mencapai 3 prinsip tersebut adapun program-program yang direncanakan antara lain:

1. Penguatan hal safe & 5 line of defense anti blackout
2. Penguatan keandalan coal handling facility
3. Penguatan plant assessment dan FLA (Remaining Life Asset), pengembangan improvement tata kelola O2 dan perbaikan proses bisnis untuk mendukung kecepatan eksekusi program keandalan pembangkit
4. Cost optimation (pemakaian bahan baku dengan nilai kalor yang lebih rendah) untuk mendukung penurunan GHG
5. Implementasi digitalisasi pembangkit
6. Optimasi pengelolaan O&M pembangkit
7. Pemenuhan regulasi lingkungan
8. Optimasi pemanfaatan FABA
9. Mendukung peningkatan bauran EBT (biomass) dengan co-firing

In 2022, PLN NP optimized the performance of electricity sales based on 3 principles, among others: security, affordability, and low emission. To achieve these 3 principles, the programs planned include:

1. Strengthening the safe & 5 lines of defense for anti blackout
2. Strengthening the reliability of coal handling facilities
3. Strengthening plant assessment and FLA (Remaining Life Asset), development of governance O2, implementation and business process improvement to support the speed of power plant reliability program execution)
4. Cost optimization (use of coal with lower calorific value to support the CO2 reduction)
5. Implementation of power plant digitalization
6. Optimization of power plant O&M management
7. Fulfillment of environmental regulations
8. Optimization of FABA utilization
9. Supporting the increase of NRE mix (biomass) by co-firing

Strategi dan Arah Pengembangan Segmen Usaha Jasa O&M

Strategy and Development Direction of O&M Services Business Segment

Peningkatan nilai bisnis jasa O&M dilakukan melalui peningkatan proses operasi dan pemeliharaan pada pembangkit PLN NP maupun pembangkit milik pihak lain. Penerapan manajemen aset pembangkitan akan menjadi kekuatan utama dalam pengelolaan aset yang berkinerja tinggi. Untuk pengembangan bisnis jasa O&M, strategi yang akan digunakan adalah pengembangan portfolio jasa O&M dengan melibatkan Anak Perusahaan PLN NP sebagai bagian dari segmentasi usaha jasa O&M dan meningkatkan competitiveness dan efisiensi biaya atas usaha jasa O&M. Pada tahun 2022 PLN NP melakukan efisiensi dan penurunan OPP melalui optimasi kegiatan O&M yang didukung SDM & organisasi serta prioritas investasi.

The O&M service business value creation is done through improved operation and maintenance processes at PLN NP power plants and power plants owned by other parties. The implementation of generation asset management will be a key strength in high-performance asset management. For the development of the O&M services business, this strategy that will be used is the development of the O&M services portfolio by involving PLN NP Subsidiaries as part of the O&M services business segmentation and increasing the competitiveness and cost efficiency of the O&M services business. In 2022, PLN NP conducted efficiency and reduced OPP through optimization of O&M activities supported by HR & organization as well as investment prioritization.

Strategi dan Arah Pengembangan Segmen Usaha EPC

Strategy and Development Direction of EPC Business Segment

Bisnis EPC yang dimiliki oleh PLN NP dikelola oleh anak perusahaan. Strategi yang akan dijalankan pada bisnis EPC adalah mengembangkan jasa EPC untuk berbagai tipe dan ukuran pembangkit, serta dalam pembangunan transmisi. Fokus pengembangan bisnis EPC bertumpu pada pengembangan kapabilitas untuk memberikan jasa yang berkualitas dengan harga yang kompetitif agar dapat bersaing dalam non-commercial (penugasan PLN) dan commercial market. Untuk proses internal perusahaan, bisnis EPC akan mengembangkan Integrated Management System yang sesuai dengan best practice.

The EPC business owned by PLN NP is managed by a subsidiary. The strategy that will be used in the EPC business is to develop EPC services for various types and sizes of power plants, as well as in transmission construction. The focus of EPC business development relies on developing capabilities to provide quality services with competitive prices in order to be able to compete in the non-commercial (PSO assignment) and commercial markets. For the Company's internal processes, the EPC business will develop an Integrated Management System in accordance with the best practices.

Strategi dan Arah Pengembangan Segmen Usaha Lainnya

Strategy and Development Direction of Other Business Segments

Dalam lini bisnis usaha lain ini, PLN NP memiliki beberapa usaha, seperti Business Solution dan penyewaan penyediaan suku cadang. Business Solution yakni lini bisnis jasa berbasis teknologi informasi yang menyediakan jasa pendukung O&M pembangkit. Di antaranya adalah jasa implementasi Manajemen Aset Pembangkitan, dimana PLN NP menawarkan implementasi manajemen aset pembangkit yang terintegrasi dengan software yang mendukung prosedur dan proses bisnis yang dikembangkan. Divisi penyewaan penyediaan suku cadang untuk pembangkit akan dikelola oleh anak perusahaan PLN NP yang akan men supply kebutuhan suku cadang PLTP – 1 pembangkit PLTP – 1 beli yang dikelola PLN NP / PT dan beberapa unit PLN.

In this other business line, PLN NP has several businesses, such as Business Solution and spare parts procurement services. Business Solution is an information technology-based service business line that provides O&M supporting services for power plants. Among these are Electric Power Generation Asset Management implementation services, where PLN NP offers the implementation of integrated power plant asset management with software that supports the procedures and business processes developed. The business of spare parts procurement services for geoenergy plants will be managed by a subsidiary of PLN NP which will supply spare part needs for PLTP – 1 power plants, both managed by PLN NP P and several PLN units.

Analisis Kinerja Keuangan
Financial Performance Analysis

Kinerja Keuangan PLN NP 2022
Financial Performance of PLN NP in 2022

Jumlah Liabilitas	Jumlah Aset	Jumlah Pendapatan Usaha	Jumlah Laba Tahun Berjalan	Jumlah Ekuitas
Rp12,57 triliun	Rp174,92 triliun	Rp27,20 triliun	Rp6,58 triliun	Rp162,36 triliun

Analisis Laba Rugi Komprehensif
Analysis on Comprehensive Profit or Loss

Jumlah Laba Tahun Berjalan PLN NP tahun 2022 adalah sebesar Rp6,58 triliun meningkat 13,12% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp5,82 triliun. Sedangkan, jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan PLN NP tahun 2022 adalah sebesar Rp7,03 triliun meningkat 99,79% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp3,52 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penghasilan komprehensif lain setelah pajak.

PLN NP's total Profit for the Year in 2022 was Rp6.58 trillion increased by 13.12% compared to 2021 of Rp5.82 trillion. Meanwhile, total Comprehensive Income for the Year of PLN NP in 2022 was Rp7.03 trillion, increased by 99.79% compared to 2021 of Rp3.52 trillion. The increase was mainly due to other comprehensive income after tax.

Tabel Laba Rugi Komprehensif (Rp juta)
Table of Comprehensive Profit or Loss (Rp millions)

Uraian	2020	2021	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Pendapatan Usaha	321.651.179	33.908.193	37.200.000	27,03	(1.305.893)
Beban Usaha	(31.886.553)	(29.161.110)	(32.971.407)	13,08	(3.810.716)
Laba Usaha	3.725.014	4.496.991	4.828.773	7,38	331.782
Pendapatan dan Laba dari Bank	1.714.485	1.705.048	1.195.000	11,21	960.952
Laba Sebelum Pajak	10.240.107	7.202.039	8.008.503	11,21	(0.4.543)
Beban Pajak	(2.500.295)	(1.371.852)	(1.429.857)	3,72	(61.185)
Laba Tahun Berjalan	**7.703.812**	**5.815.188**	**6.583.646**	**13,13**	**703.358**
Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain Setelah Pajak	330.836	(2.261.369)	446.748	(119,75)	2.708.120

Uraian Description	2020	2021	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income for the Year	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**
Laba Tahun Berjalan Diatribusikan kepada: Profit for the Year Attributable to:					
- Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
- Kepentingan Non-Pengendali Non-Controlling Interests	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada: Total Comprehensive Income for the Year Attributable to:					
- Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
- Kepentingan Non-Pengendali Non-Controlling Interests	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Laba Per Saham Dasar (Rupiah penuh) Basic Earnings per Share (Full Amount)	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**

Pendapatan Usaha
Revenues

Pendapatan Usaha menurun menjadi Rp27,20 triliun
Operating Revenues decreased to Rp27.20 trillion

Komponen atas pendapatan usaha PLN NP terdiri dari Penjualan Tenaga Listrik, Jasa O&M, Jasa EPC dan Usaha Lainnya. Kontribusi terbesar terhadap pendapatan usaha berasal dari penjualan tenaga listrik untuk sistem Jawa Bali.

The components of PLN NP's Operating revenues consist of Sales of Electricity, O&M Services, EPC Services and Other Businesses. The largest contribution to operating revenues comes from the sales of electricity for the Java-Bali system.

Pendapatan usaha PLN NP tahun 2022 sebesar Rp27,23 triliun menurun 7,81% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp29,53 triliun. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh menurunnya penjualan tenaga listrik PLN NP (Pembangkit Non – PLN) Sebuku dan Lipukrun PLTU Batubara pada Sistem Kelistrikan Java Bali.

PLN NP's revenue in 2022 was Rp27.23 trillion, decreased by 7.81% compared to 2021 of Rp29.53 trillion. The decline was dominated by the decrease in sales of PLN NP assembly Sebuku Coal (CFPP) and Coal (CFPP) Lipukrun in the Java-Bali Electricity System.

Tabel Pendapatan Usaha (Rp Juta)

Table of Revenues (Rp million)

Uraian Description	2020	2021	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Penjualan Tenaga Listrik Sales of Electricity	25.478.470	26.941.579	25.005.478	(11,05)	(1.936.001)
Pendapatan Usaha Lainnya Other Operating Revenues	4.951.700	4.902.752	5.018.734	11,13	553.982
Jumlah Pendapatan Usaha Total Revenues	**30.434.170**	**31.918.134**	**27.302.200**	**(7,81)**	**(1.385.614)**

Grafik Pendapatan Usaha (Rp Juta)

Chart of Revenues (Rp million)

Penjualan Tenaga Listrik

Sales of Electricity

PLN NP memiliki sejumlah *Power Purchase Agreement* dengan IPP, PLN (Persero). Dalam perjanjian tersebut, PLN membayar pasokan tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan formula pembayaran. Pembayaran tersebut mencakup komponen biaya kapasitas, energi, operasional, dan pemeliharaan yang bergantung pada tingkat pasokan energi serta variabel lain yang ditentukan dalam perjanjian.

PLN NP has a number of Power Purchase Agreements with IPP, PLN (Persero). Under these agreements, PLN pays for the supply of electricity provided by the Company at an amount determined based on a payment formula. The payment includes capacity, energy, operational, and maintenance cost components that depend on the level of energy supply as well as other variables determined in the agreement.

Jumlah Pendapatan Tenaga Listrik PLN NP tahun 2022 adalah sebesar Rp0,00 triliun menurun 0,00% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp0,00 triliun. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan penyaluran energi listrik dari pembangkit PLN – PLTU batubara (mayoritas pembangkit PLN NP) oleh Pengelolaan dan Pusat Pengatur Beban PLN seiring mulai dioperasionalisasinya PLTU pada Sistem Kelistrikan Jawa Bali dan mulai pulihnya normal pasokan batubara pada tahun 2022.

PLN NP's total Sales of Electricity in 2022 was Rp0,00 trillion, decreased by 0,00% compared to 2021 of Rp0,00 trillion. This decrease was caused by a decrease in the distribution of electrical energy from fuel-coal (CFPP (the majority of PLN NP power plants) by PLN Distribution and Load Dispatch Center in line with the start of the operation of CFPP in the Java Bali Electricity System and the recovery of coal supply in 2022.

Grafik Penjualan Tenaga Listrik (Rp Juta)
Chart of Sales of Electricity (Rupiah Million)

Pendapatan Usaha Lainnya
Other Operating Revenues

Jumlah Pendapatan Usaha Lainnya PLN NP tahun 2022 adalah sebesar Rp0,00 triliun meningkat 0,00% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp0,00 triliun. Peningkatan tersebut didukung dipengaruhi oleh kompensasinya pendapatan usaha lain-lain (LAIN, Discount, PAAP dan Lainnya).

PLN NP's total Other Operating Revenues in 2022 was Rp0,00 trillion, increased by 0,00% compared to 2021 of Rp0,00 trillion. The increase was mainly influenced by the addition of other operating revenues (LAIN, Discount, PAAP and Others).

Tabel Pendapatan Usaha Lainnya (Rp Juta)
Table of Other Operating Revenues (Rp million)

Uraian Description	2020	2021	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Jasa Operasi dan Pemeliharaan Operation and Maintenance Services	4.091.034	4.057.507	4.064.714	1,84	61.147
Konstruksi Construction	702.809	717.254	843.205	18,81	117.877
Lainnya Others	160.642	211.855	571.888	215,34	352.941
Jumlah Pendapatan Usaha Lainnya **Total Other Operating Revenues**	**4.957.705**	**4.863.758**	**5.519.759**	**11,33**	**552.988**

Beban Usaha
Operating Expenses

Beban Usaha menurun menjadi Rp22,57 triliun
Operating Expenses decreased to Rp22.57 trillion

Jumlah Beban Usaha PLN (Persero) tahun 2022 adalah sebesar Rp22,57 triliun mengalami penurunan sebesar 10,08% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp25,10 triliun. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan jumlah beban bahan bakar pembelian tenaga listrik, sewa dengan skema tenaga listrik PLN IPP (Pembangkit Skim – PLTU Batubara) dan optimasi PLTU Batubara pada Sistem Kelistrikan Jawa Bali.

PLN (Persero)'s total Operating Expenses in 2022 was Rp22.57 trillion, decreased by 10.08% compared to 2021 of Rp25.10 trillion. The decrease was mainly influenced by the reduction in the amount of fuel, electricity and purchased electricity expenses in line with the use of PLN IPP electricity (Steam Coal 10MW) and Coal 10MW optimization in the Java-Bali Electricity System.

Tabel Beban Usaha (Rp juta)
Table of Operating Expenses (Rp million)

Uraian Description	2022	2021	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Pembelian Tenaga Listrik	323.388	333.617	279.388	(17,18)	(55.999)
Bahan Bakar dan Pelumas	11.556.766	14.477.699	12.851.978	(10,13)	(1.625.720)
Pemeliharaan	4.192.330	4.134.541	4.202.473	1,65	152.932
Penyusutan	3.977.413	3.953.144	3.905.391	(1,21)	(47.857)
Kepegawaian	1.682.808	1.790.353	1.831.188	2,27	40.835
Lain-lain	80.579	834.563	1.146.787	34,04	284.224
Jumlah Beban Usaha	**21.813.282**	**25.101.143**	**22.571.427**	**(10,08)**	**(2.529.716)**

Beban Bahan Bakar dan Pelumas
Fuel and Lubricants

Jumlah Beban Bahan Bakar dan Pelumas PLN NP tahun 2022 adalah sebesar Rp11,01 triliun menurun 13,23% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp12,67 triliun. Penurunan biaya bahan bakar di tahun 2022 salah satunya disebabkan dengan berkurangnya beban biaya bahan bakar minyak sesuai signifikan sebagai akibat penurunan produksi tenaga listrik PLN NP (Pembangkit Non – PLTU Batubara) dan optimasi PLTU Batubara pada Sistem Kelistrikan Jawa Bali.

PLN NP's total Fuel and Lubricant's expense in 2022 were Rp11.01 trillion, decreased by 13.23% compared to 2021 of Rp12.67 trillion. The decrease in fuel costs in 2022 was partly due to a significant reduction in fuel costs as a result of a decrease in PLN NP's electricity sales (Non-Coal PLTU) and Coal PLTU optimization in the Java Bali Electricity System.

Tabel Beban Bahan Bakar dan Pelumas (Rp juta)
Table of Fuel and Lubricants (Rp million)

Uraian Description	2020	2021	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/(Decrease)	
				%	Nominal
Bahan Bakar Minyak Fuel	**281.374**	**1.352.172**	**310.339**	**(88,53)**	**(1.341.733)**
Solar (HSD) Solar (High Speed Diesel)	134.084	1.148.437	165.397	(85,60)	(1.043.039)
Residu (MFO) Residual (Marine Fuel Oil)	91.938	83.638	111.122	(75,14)	(83.032)
Bahan Bakar Non Minyak Non-Oil Fuels	**11.332.271**	**12.880.947**	**11.001.732**	**(11,33)**	**(1.480.215)**
Gas Alam (Harga Gas	8.240.695	10.319.726	8.829.391	(14,71)	(1.490.335)
Batubara Coal	1.779.071	1.409.439	1.533.939	(3,45)	(53.539)
Air Water	360.600	360.600	369.351	6,25	34.539
Biomassa Biomass	–	–	62.314	100,00	62.314
Pajak Air Permukaan Surface Water Tax	19.187	17.370	20.371	15,51	3.171
Bahan Kimia dan Bahan Lainnya Chemicals and Other Materials	30.239	39.923	53.860	8,93	3.971
Minyak Pelumas Lubricants	34.661	34.787	33.888	(3,23)	(1.119)
Jumlah Beban Bahan dan Pelumas Total Fuel and Lubricants	**11.938.780**	**14.073.800**	**11.001.870**	**(10,23)**	**(1.811.730)**

Beban Pemeliharaan
Maintenance Expenses

Jumlah Beban Pemeliharaan PLN NP tahun 2022 adalah sebesar Rp4,28 triliun meningkat 3,80% dibandingkan tahun 2021 adalah sebesar Rp4,12 triliun. Peningkatan ini disebabkan oleh penyusutan/penambahan aset pekerjaan OH & penambahan proyek-proyek investasi, serta realisasi kedatangan spareparts di TLKEC.

PLN NP's Total Maintenance Expenses in 2022 were Rp4.28 trillion, increased by 3.80% compared to 2021 of Rp4.12 trillion. This increase was due to the depreciation/addition of OH work areas & addition of investment projects, as well as overlooking the arrival of spare parts at TLKEC.

Tabel Beban Pemeliharaan (Rp Juta)
Table of Maintenance Expenses (Rp million)

Uraian	2020	2021	2022	Peningkatan/Penurunan	
				%	Nominal
Pemasukan Usaha ke Pemeliharaan	1.483.704	1.280.171	1.369.361	(1,29)	(17.911)
Jasa Keuangan	1.710.849	2.196.269	2.615.112	0,30	174.822
Jumlah Beban Pemeliharaan Total Maintenance Expenses	**4.180.398**	**4.126.161**	**4.283.473**	**3,80**	**332.832**

Beban Penyusutan
Depreciation Expenses

Jumlah Beban Penyusutan PLN NP tahun 2022 adalah sebesar Rp3,28 triliun menurun 3,10% dibandingkan tahun 2021 adalah sebesar Rp3,39 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh beberapa aset yang telah memiliki nilai buku 0 di tahun 2022.

PLN NP's total Depreciation Expenses in 2022 were Rp3.28 trillion, decreased by 3.10% compared to 2021 of Rp3.39 trillion. The decrease was mainly due to several assets that had 0 book value in 2022.

Beban Keorgawalan
Personnel Expenses

Jumlah Beban Keorgawalan PLN NP tahun 2022 adalah sebesar Rp1,81 triliun meningkat 3,17% dibandingkan tahun 2021 adalah sebesar Rp1,76 triliun. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah karyawan tunjangan, jumlah gaji dan tunjangan, biaya pendidikan dan pelatihan pegawai.

PLN NP's total Personnel Expenses in 2022 were Rp1.81 trillion, increased by 3.17% compared to 2021 of Rp1.76 trillion. The increase was mainly influenced by the increase in the number of medical allowances, total salaries and allowances, education and training costs for employees.

Tabel Beban Keorgawalan (Rp juta)
Table of Personnel Expenses (Rp million)

Uraian Description	2020	2021	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Gaji dan Tunjangan Salaries and Allowances	702.051	813.850	884.188	8,64	70.344
Imbalan Kerja Employee Benefit	374.958	353.735	371.266	(4,73)	(83.509)
Biaya dan Insentif Karyawan Employee Bonus and Incentives	390.330	410.038	415.214	(7,14)	(33.804)
Pendidikan dan Pelatihan Education and Training	43.475	66.275	77.300	43,37	33.100
Tunjangan Kesehatan Medical Allowances	78.570	80.307	129.439	42,34	26.072
Lain-lain Others	56.900	51.505	54.838	(22,75)	(7.077)
Jumlah Beban Keorgawalan Total Personnel Expenses	**1.646.284**	**1.755.453**	**1.811.388**	**3,17**	**30.926**

Grafik Beban Keorgawalan (Rp juta)
Chart of Personnel Expenses (Rp million)

Beban Usaha Lain-lain
Other Operating Expenses

Jumlah Beban Lain-lain PLN NP tahun 2022 adalah sebesar Rp1,15 triliun, meningkat 24,04% dibandingkan tahun 2021 sebesar sebesar Rp934,68 miliar. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah biaya asuransi atas kendaraan, aset tetap dan instalasi.

PLN NP's total Other Expenses in 2022 were Rp1.15 trillion, increased by 24.04% compared to 2021 of Rp934.68 billion. The increase was mainly influenced by the increase in the amount of insurance expenses for vehicles, fixed assets and installations.

Tabel Beban Lain-lain (Rp juta)
Table of Other Expenses (Rp million)

Uraian Description	2022	2021	2020	Peningkatan/(Penurunan) Increase/(Decrease)	
				%	Nominal
Beban Kemitraan Distribusi (Jasa)	850.108	586.756	772.007	22,79	155.746
Asuransi	71.379	54.663	51.024	13,78	(874)
Administrasi	70.895	68.172	106.303	13,78	17.170
Pesangon Dimuka	16.856	15.246	40.385	164,82	39.139
Kompensasi Pemakaian	10.318	10.007	10.007	10,08	1.890
Pos dan Telekomunikasi / Postage and Telecommunications	11.300	12.331	11.890	(8,33)	(881)
Jasa Profesional / Professional Fees	19.504	17.781	17.149	(8,69)	(1.723)
Pajak dan Retribusi Lainnya / Taxes and Other Retribution	37.955	38.130	21.955	11,88	3.900
Pajak Final / Final Tax	23.341	20.459	20.871	2,05	412
Sewa Bangunan dan Tanah / Building and Land Rental	13.264	14.171	13.557	(3,54)	(614)
Listrik, Air, dan Gas / Electricity, Water, and Gas	11.900	11.475	11.871	3,47	392
Lain-lain / Others	52.300	50.591	51.300	99,88	29.009
Jumlah Beban Lain-lain / Total Other Expenses	**863.879**	**914.561**	**1.148.787**	**24,04**	**273.335**

Laba Usaha
Operating Income

Jumlah Laba Usaha PLN NP tahun 2022 adalah sebesar Rp4,63 triliun meningkat 1,00% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp4,81 triliun. Peningkatan komponen laba usaha dipengaruhi oleh penurunan biaya pembangkit non-batubara (berbahan bakar minyak dan pembangkit biomassa) dan pembangkit batubara dimana harga bahan bakar masih lebih tinggi dibandingkan dengan harga batubara.

PLN NP's total Operating Income in 2022 was Rp4.63 trillion, increased by 1.00% compared to 2021 of Rp4.81 trillion. The increase was mainly due to a decrease in non-coal (oil fired) power plant operations and an increase in coal power plant operations where fuel oil prices were higher than coal prices.

Pos Keuangan dan Lain-lain
Financial Items and Others

Jumlah Pos Keuangan dan Lain-lain Bersih PLN NP tahun 2022 adalah sebesar Rp3,30 triliun meningkat 21,23% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp2,7triliun. Peningkatan tersebut terjadi dikarenakan di tahun 2022 terdapat penghasilan lain-lain bersih.

PLN NP's total Net Financial Items and Others in 2022 were Rp3.30 trillion, increased by 21.23% compared to 2021 of Rp2.72 trillion. The increase was mainly due to net other income in 2022.

Tabel Pos Keuangan dan Lain-lain Bersih (Rp Miliar)
Table of Net Financial Items and Others (Rp in Billion)

Uraian / Description	2020	2021	2022	Peningkatan/Penurunan / Increase/Decrease	
				%	Nominal
Pendapatan Keuangan / Financial Income	170.059	166.033	161.317	(2,2%)	(4.716)
Keuntungan (kerugian) nilai wajar yang wajar - bersih / Gain (Loss) on foreign exchange – net	(3.511)	3.834	(4.305)	(207,1%)	(8.139)
Bagian laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama / Share in net profit of associates and joint ventures	(.257.727)	(.302.311)	(.285.635)	(5,5%)	(14.308)
Pendapatan (beban) Lain-lain bersih / Net Other Income/(Expenses)	(355.758)	(271.769)	811.857	(225,1%)	611.946
Jumlah Pos Keuangan dan Lain-lain Bersih / Total Net Financial Items and Others	**1.714.482**	**2.755.343**	**3.375.833**	**22,51**	**920.781**

Grafik Pos Keuangan dan Lain-lain Bersih (Rp miliar)
Chart of Net Financial Items and Others (Rp miliard)

Beban Pajak
Tax Expense

Jumlah dalam Pajak PLN INI tahun 2022 adalah sebesar Rp1,67 triliun meningkat 1,73% dibandingkan tahun 2021 adalah sebesar Rp1,37 triliun. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan pajak penghasilan di tahun 2021.

PLN INI Limited Tax Expense in 2022 was Rp1.67trillion, increased by 1.73% compared to 2021 of Rp1.37 trillion. The increase was mainly influenced by the increase in income tax in 2021.

Tabel Beban Pajak (Rp juta)
Table of Tax Expense (Rp million)

Uraian Description	2022	2021	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Beban Pajak Kini Current Tax Expense	61.311	71.236	121.001	69,75	49.765
Beban Pajak Tangguhan Deferred Tax Expense	1.477.804	1.300.916	1.301.046	0,11	1.430
Jumlah Beban Pajak Total Tax Expense	**1.539.235**	**1.37 1.852**	**1.422.027**	**3,73**	**51.195**

Grafik Beban Pajak (Rp juta)
Chart of Tax Expense (Rp million)

Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan
Comprehensive Income for the Year

Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan tahun 2022 adalah sebesar Rp493 miliar meningkat 413,14% dibandingkan tahun 2021 sebesar (Rp1,30) triliun. Peningkatan penghasilan komprehensif lain terutama dipengaruhi oleh kenaikan laba yang telah direalisasikan pada tahun 2021 dan adanya peningkatan penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama.

Total Comprehensive Income for the Year in 2022 was Rp493 billion, increased by 413.14% compared to 2021 of (Rp1.30) trillion. The increase in other comprehensive income was mainly influenced by the realization of fixed assets which was carried out in 2021 and an increase in other comprehensive income from associates and joint ventures.

Laba Per Saham Dasar
Basic Earnings per Share

Perusahaan memiliki jumlah saham sebanyak 9.000 juta saham dimana hanya seluruhnya dimiliki oleh PT PLN (Persero). Perhitungan jumlah laba per saham dasar atau biasa disebut *Earning Per Share* atau Laba per saham merupakan perhitungan yang dilakukan untuk menormalkan perolehan yang diperoleh perusahaan sesuai dengan jumlah saham beredar yang dimiliki. Perusahaan tidak mempunyai efek berpotensi dilusi. Laham, sehingga laba per saham dasar sama dengan laba per saham dilusian.

Laba Per Saham PLN NP tahun 2022 adalah sebesar Rp1.097 meningkat 13,09% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp970. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah laba tahun berjalan di tahun 2022.

The Company has a total of 9,000 million shares which are owned entirely owned by PT PLN (Persero). The calculation of total basic earnings per share or commonly called Earning Per Share is a calculation conducted to find the revenue earned by the Company in accordance with the number of outstanding shares owned. The Company does not have the potential effect of dilute dilution, so that basic earnings per share is the same as diluted earnings per share.

PLN NP's Total Earnings Per Share in 2022 was Rp1,097, increased by 13.09% compared to 2021 of Rp970. The increase was mainly influenced by the increase in the amount of profit for the year in 2022.

Analisis Posisi Keuangan
Financial Position Analysis

Jumlah aset PLN NP pada tahun 2022 adalah sebesar Rp174,92 triliun, jumlah liabilitas sebesar Rp122,67 triliun, dan jumlah ekuitas sebesar Rp52,26 triliun.

PLN NP's total assets in 2022 were Rp174.92 trillion, total liabilities were Rp122.67 trillion, and total equity was Rp52.26 trillion.

Tabel Posisi Keuangan (Rp Juta)
Table of Financial Position (Rp million)

Uraian Description	2020	2021	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Aset Assets	170.961.930	171.163.836	174.922.939	1,83	3.759.103
Aset Lancar Current Assets	31.866.943	33.490.139	33.564.116	0,00	373.977
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	143.874.876	138.793.663	141.928.811	4,51	3.385.208
Liabilitas Liabilities	38.245.888	38.394.342	12.567.841	14,31	1.571.279
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	6.851.830	9.017.427	6.648.748	(17,71)	(929.607)
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	5.393.258	9.877.136	8.118.886	85,84	2.501.886
Ekuitas Equity	185.814.892	161.169.265	102.355.088	0,74	1.385.825

Aset
Assets

Jumlah Aset meningkat menjadi Rp174,92 triliun
Total assets increased to Rp174.92 trillion

Pada tahun 2022, komposisi aset terbesar perusahaan masih didominasi oleh aset tidak lancar. Jumlah Aset PLN NP tahun 2022 adalah sebesar Rp174,92 triliun meningkat sebesar 1,83% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp171,16 triliun. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh kontribusinya jumlah investasi pada Entitas Asosiasi/ventura Bersama dan jumlah Kas dan Setara Kas sebagai akibat dari proses Pengalihan (Collection Period) yang lebih baik.

In 2022, the Company's largest asset component is still dominated by non-current assets. PLN NP's total Assets in 2022 were Rp174.92 trillion, increased by 1.83% compared to 2021 of Rp171.16 trillion. The increase was mainly influenced by the increase in the amount of investments in Associates/Joint Ventures and the amount of Cash and Cash Equivalents as a result of a better Collection Period process.

Tabel Aset (Rp Juta)
Table of Assets (Rp million)

Uraian Description	2020	2021	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Aset Lancar Current Assets	31.866.943	33.490.139	33.564.116	0,00	373.977
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	143.874.876	138.793.663	141.928.811	4,51	3.385.208
Jumlah Aset Total Assets	170.961.930	171.163.836	174.922.939	1,83	3.759.103

Aset Lancar
Current Assets

Jumlah Aset Lancar tahun 2022 adalah sebesar Rp33,93 triliun meningkat 2,88% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp32,98 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah hak dan tagihan hak sebagai akibat dari proses Penagihan (Collection Period) yang lebih baik.

Total Current Assets in 2022 were Rp33.93 trillion, increased by 2.88% compared to 2021 of Rp32.98 trillion. The increase was mainly influenced by an increase in total Cash and Cash Equivalents as a result of a better Collection Period.

Tabel Aset Lancar (Rp juta)
Table of Current Assets (Rp million)

Uraian Description	2020	2021	2022	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	3.511.113	7.343.858	8.858.158	20,66	1.514.300
Deposito Berjangka Time Deposits	329.000	358.135	461.356	28,85	103.186
Pekerjaan dan deposito sebanglus dibatasi penggunaannya Restricted cash, bank and time deposits	-	358.179	361.320	0,88	95.141
Piutang Usaha Trade Receivables	20.200.000	21.804.370	20.000.000	(8,26)	(1.804.326)
Piutang Lain-lain Other Receivables	102.172	107.136	117.819	9,03	130.730
Piutang kepada pemberi kemanfaatan lainnya Receivables from joint ventures - current portion	-	114.095	47.700	(49,36)	(66.275)
Persediaan Inventories	1.545.239	1.803.898	1.884.262	10,29	438.023
Pajak Dibayar Dimuka Prepaid Taxes	732.107	755.177	751.402	(7,11)	(53.600)
Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka Prepaid Expenses and Advances	61.000	135.730	181.355	(14,04)	(23.600)
Jumlah Aset Lancar Total Current Assets	**31.886.543**	**32.960.228**	**32.384.118**	**2,88**	**923.881**

Kas dan Setara Kas
Cash and Cash Equivalents

Jumlah Kas dan Setara Kas tahun 2022 adalah sebesar Rp8,86 triliun meningkat 21,38% dibandingkan tahun 2021 adalah sebesar Rp7,14 triliun. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh proses Penagihan (Collection Period) yang lebih baik.

Total Cash and Cash Equivalents in 2022 were Rp8.86 trillion, increased by 21.38% compared to 2021 of Rp7.14 trillion. The increase was mainly influenced by a better Collection Period process.

Tabel Kas dan Setara Kas (Rp juta)
Table of Cash and Cash Equivalents (Rp millions)

Uraian Description	2022	2021	2020	Peningkatan/Penurunan Increase/(Decrease)	
				%	Nominal
Kas Cash on hand	2.872	2.804	2.478	2,43	68
Bank Cash in banks	5.464.302	4.390.516	4.179.353	24,47	1.073.786
Pihak Berelasi Related Parties	5.183.956	4.241.180	4.018.418	22,24	942.776
Pihak Ketiga Third Parties	280.346	149.336	160.935	87,79	131.010
Setara Kas - Deposito Berjangka Cash Equivalents - Time Deposits	134.177	642.649	562.327	(79,12)	(508.472)
Pihak Berelasi Related Parties	34.165	642.533	562.215	(94,68)	(608.368)
Pihak Ketiga Third Parties	100.012	116	112	86.103,45	99.896
Jumlah Kas dan Setara Kas Total Cash and Cash Equivalents	**5.601.351**	**5.035.969**	**4.744.158**	**11,21**	**565.382**

Deposito Berjangka
Time Deposits

Rekening Bank dan Deposito Berjangka Dibatasi Penggunaannya
Restricted Cash in Banks and Time Deposits

Piutang Usaha
Trade Receivables

Jumlah Piutang Usaha PLN NP pada tahun 2022 adalah sebesar Rp20.03 triliun menurun 6,40% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp21,41 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh proses Reregistrasi (Collection Period) yang lebih baik.

PLN NP's total Trade Receivables in 2022 were Rp20.03 trillion, decreased by 6.40% compared to 2021 of Rp21.41 trillion. The decrease was mainly due to a better Collection Period process.

Tabel Piutang Usaha (Rp juta)
Table of Trade Receivables (Rp million)

Uraian Description	2022	2021	2022	Peningkatan/(Penurunan) Increase/(Decrease)	
				%	Nominal
Pihak Berelasi Related Parties	25.769.835	31.938.177	30.475.371	(6,67)	(1.462.794)
Pihak Ketiga Third Parties	33.935	38.616	151.318	330,47	81.375
Cadangan kerugian kredit kedaluwarsa Allowance for expected credit losses	(5.539.977)	(5.539.977)	(6.538)	137,79	(12.851)
Jumlah Piutang Usaha Pihak Ketiga Neto Total Trade Receivables	**20.264.833**	**21.814.178**	**18.930.154**	**(6,40)**	**(1.484.174)**

Piutang Lain-lain
Other Receivables

Jumlah Piutang Lain-lain PLN NP pelaporan 2022 adalah sebesar Rp31.732 miliar meningkat 23,82% dibandingkan tahun 2021 sebesar sebesar Rp31,25 miliar. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh bertambahnya piutang bunga atas Pinjaman Pada Perusahaan Kepada PLN NP.

PLN NP's total Other Receivables in 2022 were Rp31.73 billion, increased by 23.82% compared to 2021 of Rp31.25 billion. The increase was mainly influenced by the increase in interest receivable on Subsidiary Loans to PLN NP.

Piutang kepada Ventura Bersama
Receivables from Joint Ventures

Jumlah Piutang kepada Ventura Bersama PNP tahun 2021 adalah sebesar Rp156,27 miliar meningkat 0,28% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp80,30 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan Piutang Dividen Perusahaan Asosiasi PJB pada tahun 2021.

PLN NP's total Receivables from Joint Ventures in 2021 were Rp156.27 billion, increased by 0.28% compared to 2020 of Rp80.30 billion. The increase was mainly due to the addition of Loan Receivables from PJB Associated Companies in 2021.

Persediaan
Inventories

Jumlah Persediaan tahun 2021 adalah sebesar Rp1,80 triliun meningkat 30,03% dibandingkan tahun 2021 adalah sebesar Rp1,48 triliun. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh penyiapan stok bahan bakar menjadi sebanyak 30 hari operasi untuk mengantisipasi lockdown.

Total Inventories in 2021 were Rp1.80 trillion, increased by 30.28% compared to 2021 of Rp1.48 trillion. The increase was influenced by the preparation of fuel stock of 30 days of operation to anticipate the events of lock.

Tabel Persediaan (Rp. juta)
Table of Inventories (Rp. million)

Uraian / Description	2020	2021	2022	Peningkatan/Penurunan / Increase/Decrease	
				%	Nominal
Bahan Baku, Bahan Bakar dan Pelumas / Raw materials, petroleum	1.330.000	1.230.500	1.507.000	34,54	353.000
Persediaan Dalam Perjalanan / Inventories in transit	423.430	347.540	397.200	14,40	70.330
Sub Jumlah / Sub Total	**1.303.351**	**1.403.870**	**1.904.200**	**35,01**	**423.000**
Penyisihan Penurunan Nilai / Provision for Impairment Losses	(17.342)	(10.330)	(20.520)	5,26	(1.390)
Jumlah Persediaan / Total Inventories	**1.546.230**	**1.403.848**	**1.884.262**	**35,01**	**448.414**

Pajak Dibayar Dimuka
Prepaid Taxes

Jumlah Pajak Dibayar Dimuka Lancar Perusahaan PLN (Persero) tahun 2022 adalah sebesar Rp151,44 miliar menurun 2,13% dibandingkan tahun 2021 adalah sebesar Rp154,73 miliar dan Pajak Dibayar Dimuka Jangka Panjang PLN NP tahun 2022 adalah sebesar Rp200,48 miliar menurun 7,83% dibandingkan tahun 2021 adalah sebesar Rp752,15 miliar. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh berkurangnya pembayaran dimuka atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Dibayar.

PLN NP's total Current Prepaid Tax in 2022 was Rp151.44 billion, decreased by 2.13% compared to 2021 of Rp154.73 billion, and PLN NP's Non-Current Prepaid Tax in 2022 was Rp200.48 billion, decreased by 7.83% compared to 2021 of Rp752.15 billion. This decrease was mainly influenced by the reduction in prepayment of Tax Assessment Letter for Underpayment.

Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka
Prepaid Expenses and Advances

Jumlah Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka tahun 2022 adalah sebesar Rp103,15 miliar menurun 14,28% dibandingkan tahun 2021 adalah sebesar Rp120,34 miliar. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh berkurangnya penambahan biomasa area baru di tahun 2022.

Total Prepaid Expenses and Advances in 2022 were Rp103.15 billion, decreased by 14.28% compared to 2021 of Rp120.34 billion. The decrease was mainly due to the reduction in new state-owned additions in 2022.

Aset Tidak Lancar
Non-Current Assets

Jumlah Aset Tidak Lancar PLN NP tahun 2022 adalah sebesar Rp143,53 triliun meningkat 5,25% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp136,70 triliun. Peningkatan tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh adanya penambahan investasi pada entitas asosiasi/ventura bersama PLN NP dan PIHI (UJP dan UJPD).

PLN NP's total Non-Current Assets in 2022 were Rp143.53 trillion, increased by 5.25% compared to 2021 of Rp136.70 trillion. The increase was largely influenced by the addition of investments in associates/joint ventures of PLN NP and PIHI (UJP and UJPD).

Tabel Aset Tidak Lancar (Rp juta)
Table of Non-Current Assets (Rp million)

Uraian Description	2020	2021	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Aset Tetap Property, Plant, and Equipment	130.023.845	134.151.260	132.911.380	(1,33)	(1.439.880)
Properti Investasi Investment Properties	1.010.750	1.480.990	1.977.263	7,00	103.999
Investasi Pada Entitas Asosiasi/Ventura Bersama Investment in associates/joint ventures	4.741.026	12.206.240	18.119.110	32,05	3.223.671
Rekening Bank dan Deposito Berjangka Dibatasi Penggunaannya Restricted Cash in Banks and Time Deposits	81.350	-	57.331	-	57.331
Aset Pajak Tangguhan - Bersih Deferred Tax Assets - Net	87.936	47.776	54.068	34,07	36.780

Uraian Description	2020	2021	2022	Peningkatan/(Penurunan) Increase/(Decrease)	
				%	Nominal
Piutang kepada Menteri Keuangan bagian tidak lancar Receivables from Land Verification – non-current portion	797.000	800.000	793.000	0,34	(3.000)
Piutang Lain-lain bagian tidak lancar Other Receivables – non-current portion	45.407	44.000	47.781	8,61	3.781
Pajak dibayar di muka bagian tidak lancar Prepaid Taxes – non-current portion	1.033.545	752.242	339.870	(54,82)	(562.775)
Aset Tidak Lancar Lain Other Non-Current Assets	373.472	309.830	350.840	11,65	38.157
Jumlah Aset Tidak Lancar/Total Non-Current Assets	**2.629.474.470**	**120.703.000**	**141.328.811**	**1,11**	**1.625.288**

Aset Tetap
Property, Plant, and Equipment

Jumlah Aset Tetap PLN NP tahun 2022 adalah sebesar Rp111,32 triliun menurun 1,30% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp119,23 triliun. Penurunan tersebut disebabkan oleh beberapa aset yang sudah mencapai akhir manfaatnya.

Net NPs total Property, Plant and Equipment in 2022 was Rp111.32 trillion, decreased by 1.30% compared to 2021 of Rp119.23 trillion. The decrease was due to certain assets that have reached their economic life.

Total Aset Tetap (Rp juta)
Table of Property, Plant, and Equipment (Rp million)

Uraian Description	2022	2021	2020	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Tanah dan Hak Atas Tanah Land and Land Rights	17.051.855	17.050.009	17.050.009	-	-
Bangunan, Mesin, Kendaraan, dan Prasarana Buildings, Machinery, and Infrastructure	7.747.304	7.388.196	7.611.052	(2,12)	(80.187)
Instalasi dan Mesin Pembangkit Installation and Power Plants	33.183.744	32.181.111	30.556.230	4,75	314.007
Peralatan Transmisi dan Distribusi Transmission and Distribution Equipment	4.753.297	4.287.671	4.176.197	(0,03)	(109.078)
Peralatan Pengolahan Data dan Telekomunikasi Telecommunications and Data Processing Equipment	7.454	9.902	4.645	(17,88)	(1.387)
Peralatan Umum General Equipment	393.837	386.076	384.492	(4,68)	(19.084)
Kendaraan Bermotor Motor Vehicles	53.321	42.750	30.938	(27,83)	(11.857)
Aset Tetap Dalam Pembangunan Assets in Development	6.884.373	5.277.149	2.816.938	(12,85)	(1.766.384)
Aset Tetap Digunakan dalam Operasi Assets Used in Operations	1.167.941	1.143.439	883.407	(21,86)	(291.903)
Penyisihan Penurunan Nilai Properti dan Peralatan Allowance for Impairment of Property and Equipment	(0,305)	(0,135)	(0,135)	-	-
Jumlah Aset Tetap Total Property, Plant, and Equipment	**126.823.845**	**124.153.169**	**122.521.388**	**(1,28)**	**(1.638.898)**

Grafik Aset Tetap (Rp juta)
Chart of Property, Plant, and Equipment (Rp million)

Properti Investasi
Investment Properties

Properti investasi merupakan tanah milik Perusahaan yang terletak di Paiton – Jawa Timur, Gilitelo – Jawa Barat, PLUIT – Jakarta Utara, Cipeundeuy – Bandung Barat dan Rembang – Surabaya Utara dengan hak legal berupa HGB Efek Guna Bangunan berangka waktu dari 12 sampai 45 tahun, jatuh tempo pada 2052, yang diberikan kepada PT HUV (Persero), PT Paiton Energy, PT Jawa Power, PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero), PT Anugerah Mega Energi, PT Pertamina Hulu Energi ONWJ, PT Nusantara Regas, PT Cinta Karya Luhur, BUT Sinohydro Corporation Limited dan PT Bajradaya Sentranusa.

Investment property is land owned by the Company located in Paiton – East Java, Gilitelo – West Java, Pluit – North Jakarta, Cipeundeuy – West Bandung, and Rembang – North Surabaya with legal rights in the form of HGB (Right to Build) with a period of 12 to 45 years, maturing in 2052, issued to PT HUV (Persero), PT Paiton Energy, PT Java Power, PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero), PT Anugerah Mega Energi, PT Pertamina Hulu Energi ONWJ, PT Nusantara Regas, PT Cinta Karya Luhur, BUT Sinohydro Corporation Limited, and PT Bajradaya Sentranusa.

Jumlah Properti investasi PLN NP tahun 2022 adalah sebesar Rp1,57 triliun meningkat 7,89% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp1,46 triliun. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh adanya perubahan pada nilai wajar. Grup juga mencatat perubahan nilai wajar yang disajikan sebagai bagian dari penghasilan/(beban) lain-lain bersih dalam laporan laba rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

PLN NP's total Investment Property in 2022 was Rp1.57 trillion, increased by 7.89% compared to 2021 of Rp1.46 trillion. The increase was mainly due to changes in fair value. The Group also recorded changes in fair value which are presented as part of other income/(expenses) - net in the consolidated statements of profit or loss for the years ended December 31, 2022 and 2021.

Investasi pada Entitas Asosiasi/Ventura Bersama
Investment in Associate/Joint Ventures

Jumlah investasi pada Entitas Asosiasi/Ventura Bersama PLN NP tahun 2022 adalah sebesar Rp16,11 triliun meningkat 30,26% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp12,30 triliun. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh pendirian dua asosiasi yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

PLN NP's total Investment in Associate/Joint Ventures in 2022 was Rp16.11 trillion, increased by 30.91% compared to 2021 of Rp12.30 trillion. The increase was mainly influenced by the better profit acquisition of associates from the previous year.

Aset Pajak Tangguhan - Bersih
Deferred Tax Assets - Net

Jumlah Aset Pajak Tangguhan - Bersih PLN NP tahun 2022 adalah sebesar Rp7,6 triliun meningkat 56,07% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp4,7 triliun. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh pasca beda temporer pajak di anak perusahaan yang menambah pasca Aset Pajak Tangguhan.

PLN NP's total Deferred Tax Assets - Net in 2022 were Rp7.6 trillion, increased by 56.07% compared to 2021 of Rp4.7 trillion. The increase was mainly influenced by the addition of temporary tax differences in subsidiaries which increased the position of Deferred Tax Assets.

Piutang kepada Ventura Bersama
Receivables from Joint Ventures

Jumlah Piutang kepada Ventura Bersama PLN NP tahun 2022 adalah sebesar Rp726,06 triliun meningkat 9,26% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp665 miliar. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh penambahan Pinjaman kepada Perusahaan Asosiasi PEB (SAFEB).

PLN NP's total Receivables from Joint Ventures in 2022 were Rp726.06 billion, increased by 9.26% compared to 2021 of Rp665 billion. The increase was mainly influenced by the addition of Loans to PEB Associates Companies (SAFEB).

Aset Tidak Lancar Lainnya
Other Non-Current Assets

Jumlah Aset Tidak Lancar Lainnya PLN MP tahun 2022 adalah sebesar Rp250,94 miliar meningkat 11,01% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp169,83 miliar. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh penerimaan sertifikat hak atas tanah yang memengaruhi penambahan jumlah biaya ditangguhkan.

PLN MP's total Other Non-Current Assets in 2022 were Rp250.94 billion, increased by 11.01% compared to 2021 of Rp169.83 billion. The increase was mainly influenced by the submission of land rights certificates which affected the increase in total deferred charges.

Liabilitas
Liabilities

Jumlah Liabilitas meningkat menjadi Rp12,57 triliun
Total Liabilities increased to Rp12.57 trillion

Jumlah Liabilitas PLN MP tahun 2022 adalah sebesar Rp12,57 triliun meningkat 7,01% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp10,93 triliun. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh penambahan Liabilitas Imbalan Kerja karena penyesuaian imbalan kerja akhir tempo oleh aktuaria dan penambahan Liabilitas Pajak Tangguhan yang menyesuaikan perbedaan tersebut.

PLN MP's total Liabilities in 2022 were Rp12.57 trillion, increased by 7.01% compared to 2021 of Rp10.93 trillion. The increase was mainly influenced by the addition of Employee Benefits Liabilities due to the adjustment of employee benefits due to actuaries and the addition of Deferred Tax Liabilities that adjust temporary differences.

Tabel Liabilitas (Rp juta)
Table of Liabilities (Rp million)

Uraian Description	2022	2021	2020	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	4.851.830	5.017.137	4.448.795	(3,30)	(165.307)
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	7.721.239	5.977.139	3.118.088	29,16	1.743.900
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	**12.573.069**	**10.994.276**	**7.566.883**	**14,37**	**1.578.793**

Grafik Liabilitas (Rp juta)
Chart of Liabilities (Rp million)

Liabilitas Jangka Pendek
Current Liabilities

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek PLN NP tahun 2022 sebesar sebesar Rp4,4t triliun menurun 11,23% dibandingkan tahun 2021 sebesar sebesar Rp5,01 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan Utang Usaha Dalam Dalam dan penurunan harga gas pada tahun 2022.

PLN NP's total Current Liabilities in 2022 was Rp4,4t trillion, decreased by 11,23% compared to 2021 at Rp5,01 trillion. The decrease was mainly due to a decrease in Fuel Trade Payables and a decrease in gas prices in 2022.

Tabel Liabilitas Jangka Pendek (Rp juta)
Table of Current Liabilities (Rp million)

Uraian Description	2020	2021	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Utang Usaha Pihak Ketiga	3.668.814	3.301.303	2.917.411	(11,63)	(383.892)
Utang Lain-lain Pihak Ketiga	385.536	507.898	795.898	56,68	288.000
Utang Pajak Lainnya Other Taxes Payable	174.236	198.134	221.888	11,77	23.845
Utang Pajak Penghasilan Badan Corporate Income Tax Payable	-	16.978	62.834	345,08	45.705
Biaya Masih Harus Dibayar Accrued Expenses	99.981	91.791	90.639	-0,16	(0,778)
Liabilitas Sewa Lease Liabilities	33.414	33.738	19.817	(41,75)	(13.921)
Provisi dan Penerapan Sahan – Jangka Pendek Loans from Shareholder – Short Term Portion	554.735	353.679	351.893	(0,50)	(1.501)
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek Short Term Employee Benefits Liabilities	920.040	707.330	703.396	0,01	33.396
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilities	**4.804.028**	**5.017.427**	**4.445.735**	**(11,23)**	**(559.693)**

Grafik Liabilitas Jangka Pendek (Rp Juta)
Chart of Current Liabilities (Rp million)

Utang Usaha
Trade Payables

Jumlah utang usaha PLN (Pero) tahun 2022 adalah sebesar Rp2,34 triliun menurun 20,11% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp3,28 triliun. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh penyusunan Utang Usaha Bahan Bakar dan penyusunan Energi gas pada tahun 2022.

PLN (Pero)'s total trade payables in 2022 was Rp2,34 billion, decreased by 20.11% compared to 2021 of Rp3,28 billion. The decrease was mainly influenced by a decrease in Fuel Trade Payables and a decrease in gas prices in 2022.

Tabel Utang Usaha (Rp juta)
Table of Trade Payables (Rp million)

Uraian Description	2022	2021	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Pihak berelasi: Related parties	1.190.898	1.561.580	472.698	(69,71)	(1.088.882)
Pihak ketiga: Third parties	1.883.150	1.718.779	1.864.807	8,44	145.251
Jumlah Utang Usaha: Total Trade Payables	**3.948.819**	**3.281.361**	**2.337.913**	**(28,31)**	**(943.448)**

Grafik Utang Usaha (Rp juta)
Chart of Trade Payables (Rp million)

Utang Lain-lain
Other Payables

Jumlah Utang Lain-lain (PLN NP) tahun 2022 adalah sebesar Rp791,03 miliar meningkat 33,16% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp537,09 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh saldo rekon/titipan pemakaian Proyek Tenaga Uap Cepat/Fast FT Rokatenda Kolimka.

PLN NP's other liabilities in 2022 were Rp791,03 billion, increased by 33.16% compared to 2021 amounting to Rp537,09 billion. The increase was mainly due to the reclassification/return of the recording of PT Pembangkitan Jawa-Bali's Tanjung Jati Steam Power Project.

Sahal Utang Lain-lain (Rp juta)

Table of Other Payables (Rp million)

Uraian Description	2020	2021	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Pihak ketiga / Third parties	601.288	551.683	695.799	13,73	83.835
Pihak berelasi / Related parties	34.250	26.357	159.954	146,38	93.697
Jumlah Utang Lain-lain Pihak Ketiga / Other Payables	**635.538**	**537.040**	**755.653**	**33,13**	**188.532**

Utang Pajak

Taxes Payables

Jumlah Utang Pajak PLN NP tahun 2022 adalah sebesar Rp120,34 miliar meningkat 11,77% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp89,12 miliar. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan WPC pada tahun 2022.

PLN NP's total Tax Payable in 2022 was Rp120.57 billion, increased by 11.77% compared to 2021 of Rp107.12 billion. The increase was mainly influenced by an increase in WPC revenue in 2022.

Sahal Utang Pajak (Rp juta)

Table of Taxes Payables (Rp million)

Uraian Description	2020	2021	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Pajak Lainnya / Other Income Taxes	69.970	75.498	107.788	42,80	32.290
PPN / Value Added Tax	103.197	32.313	13.041	(59,35)	(19.272)
Lain-lain / Others	1.390	810	809	(0,47)	(377)
Jumlah Utang Pajak / Total Taxes Payables	**173.571**	**108.124**	**121.638**	**11,77**	**12.641**

Biaya Masih Harus Dibayar

Accrued Expenses

Jumlah biaya masih harus dibayar PLN NP tahun 2022 adalah sebesar Rp68,02 miliar menurun 0,29% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp81,76 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh telah terealisasinya beberapa biaya kompensasi ditahun 2022 sehingga mengurangi jumlah akrual biaya kompensasi.

PLN NP's total accrued expenses in 2022 were Rp68.02 billion, decreased by 0.29% compared to 2021 of Rp81.76 billion. The decrease was mainly due to several personnel expenses have been realized in 2022, thus reducing the amount of accrued personnel expenses.

Pinjaman dari Pemegang Saham Jangka Pendek
Loans from Shareholder - Short Term Portion

Pinjaman dari Pemegang Saham Jangka Pendek tahun 2022 adalah sebesar Rp781,2T, nilai meningkat 14,30% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp683,8T, nilai meningkat tersebut terutama disebabkan oleh penambahan pinjaman kepada PT PLN (Persero) dan reklasifikasi ke nilai jangka pendek sesuai dengan jadwal pembayaran.

Loans from Shareholder - Short Term Portion in 2022 was Rp781.2T, increased by 14.30% compared to 2021 of Rp683.8T. The increase was mainly due to the addition of loans to PT PLN (Persero) and reclassification to short-term value in accordance with the payment schedule.

Liabilitas Sewa
Lease Liabilities

Jumlah Liabilitas Sewa tahun 2022 adalah sebesar Rp19,3T, nilai mengalami penurunan 42,13% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp33,7T, nilai. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh reklasifikasi ke nilai jangka pendek sesuai dengan jadwal masa kontrak sewa yang telah berakhir dibandingkan tahun 2021.

Total Lease Liabilities in 2022 was Rp19.3T, decreased by 42.13% compared to 2021 of Rp33.7T. The decrease was mainly due to reclassification to short-term value in accordance with the schedule of lease lease contract period compared to 2021.

Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek
Short Term Employee Benefits Liabilities

Jumlah Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek tahun 2022 adalah sebesar Rp781,4T, nilai meningkat 6,89% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp702,1T, nilai. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh penyesuaian nilai imbalan ke jatuh tempo oleh aktuaria.

Total Short-term Employee Benefits Liabilities in 2022 amounted to Rp781.4T, an increase of 6.89% compared to 2021 of Rp702.1T. The increase was mainly influenced by the adjustment of the maturity employee benefits value to the actuary.

Liabilitas Jangka Panjang
Non-Current Liabilities

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang PLN (Induk) tahun 2022 adalah sebesar Rp8,1T, nilai meningkat 35,84% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp5,9T, nilai. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh penambahan Liabilitas Imbalan Kerja karena penyesuaian imbalan kerja jatuh tempo oleh aktuaris dan penambahan Liabilitas Pajak Tangguhan yang menyesuaikan perbedaan temporer.

PLN's total Non-Current Liabilities in 2022 was Rp8.1T, increased by 35.84% compared to 2021 of Rp5.9T. The increase was mainly influenced by the addition of Employee Benefits Liabilities due to the adjustment to maturity employee benefits by actuaries and the addition of Deferred Tax Liabilities that adjust temporary differences.

Tabel Utang Pajak (Rp juta)
Table of Non-Current Liabilities (Rp million)

2020/ Description	2020	2021	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Liabilitas Pajak Tangguhan - Bersih / Deferred Tax Liabilities - Net	940.017	1.073.316	1.053.736	(1,8)	(19.580)
Pinjaman dari Pemegang Saham Jangka Panjang / Loans from Shareholder - Long Term	3.565.981	3.300.334	3.970.855	8,8	357.887
Liabilitas Sewa / Lease Liabilities	28.690	25.279	32.359	13,19	6.090
Liabilitas Imbalan Kerja / Employee Benefits Liabilities	3.937.726	3.505.339	3.457.871	(2,3)	(72.191)
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang / Total Non-Current Liabilities	**8.302.338**	**8.877.138**	**8.113.888**	**32,84**	**2.141.980**

Liabilitas Pajak Tangguhan - Bersih
Deferred Tax Liabilities - Net

Jumlah Liabilitas Pajak Tangguhan - Bersih tahun 2022 adalah sebesar Rp1,25 triliun meningkat 13,08% dibandingkan tahun 2021 adalah sebesar Rp1,07 triliun. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh penyesuaian liabilitas imbalan kerja pada kompo-nen aktuaria.

Total Deferred Tax Liabilities - Net in 2022 was Rp1.25 trillion, increased by 13.08% compared to 2021 at Rp1.07 trillion. The increase was mainly influenced by the adjustment in liability employee benefits by the actuary.

Pinjaman dari Pemegang Saham Jangka Panjang
Loans from Shareholder - Long Term

Jumlah Liabilitas kepada Pemegang Saham tahun 2022 adalah sebesar Rp3,98 triliun meningkat 8,83% dibandingkan tahun 2021 adalah sebesar Rp3,30 triliun. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh penambahan pinjaman PLN NP Kapuas PT PLN (Persero) pada tahun 2022.

Total Liabilities to Shareholders in 2022 was Rp3.98 trillion, increased by 8.83% compared to 2021 at Rp3.30 trillion. The increase was mainly influenced by the addition of PLN NP loans to PT PLN (Persero) in 2022.

Liabilitas Sewa
Lease Liabilities

Jumlah Liabilitas sewa tahun 2022 adalah sebesar Rp32,86 triliun meningkat 13,14% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp29,04 triliun. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh reklasifikasi ke sifat pangka pendek sesuai dengan jadwal masa kontrak sewa yang telah rendah dibandingkan tahun 2021 dan secara total jumlah liabilitas sewa menurun karena berkurangnya penambahan kontrak sewa baru di tahun 2022.

Total Lease Liabilities in 2022 was Rp32.86 billion, increased by 13.14% compared to 2021 of Rp29.04 billion. The increase was mainly due to the reclassification to short-term leases in accordance with the schedule of lease lease contract periods compared to 2021 and the total amount of lease liabilities decreased due to the reduction in new lease contract additions in 2022.

Liabilitas Imbalan Kerja
Employee Benefits Liabilities

Jumlah Liabilitas imbalan Kerja tahun 2022 adalah sebesar Rp53,98 triliun meningkat 28,00% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp7,70 triliun. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh penyesuaian nilai imbalan kerja jatuh tempo dari aktuaris.

Total Employee Benefits Liabilities in 2022 was Rp53.98 billion, increased by 28.00% compared to 2021 of Rp42.16 billion. The increase was mainly due to the adjustment for maturity employee benefits value by the actuary.

Ekuitas
Equity

Jumlah Ekuitas meningkat menjadi Rp182,35 triliun
Total Equity increased to Rp182.35 trillion

Jumlah Ekuitas PLN SBT tahun 2022 adalah sebesar Rp182,35 triliun meningkat 0,74% dibandingkan 2021 adalah sebesar Rp181,17 triliun. Peningkatan ekuitas sebagian besar disebabkan oleh peningkatan laba di tahun 2022 dan telah tuai lainnya penyesuaian Laporan Keuangan.

PLN SBT's total Equity in 2022 was Rp182.35 billion, increased by 0.74% compared to 2021 of Rp181.17 billion. The increase in equity was largely due to an increase in profit in 2022 and foreign exchange differences due to the consolidation of the Financial Statements.

Tabel Ekuitas (Rp juta)
Table of Equity (Rp million)

Uraian Description	2022	2021	2020	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Modal Saham - Nilai Nominal Rp[XX] (Satu Penuh) Per Saham Capital Stock - Par Value of Rp[XX] (Full Amount) per Share					
Modal Dasar - [X.XXX] unit Saham Authorized - [X,XXX] million Shares					
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - [X.XXX] unit Saham Subscribed and Fully Paid-up - [X,XXX] million Shares	[X.XXX.XXX]	[X.XXX.XXX]	[X.XXX.XXX]	-	-
Tambahan Modal Disetor /Additional Paid-in Capital	[X.XX.XXX]	[X.XX.XXX]	[X.XXX.XXX]	[XX,XX]	[(X.XXX)]

Uraian / Description	2024	2023	2022	Perubahan/Persentase / Increase/Decrease	
				%	Nominal
Selisih Transaksi dengan Kepentingan Non-Pengendali / Difference in Transaction with Non-Controlling Interest	(62.735)	(62.735)	(62.735)	-	-
Saldo Laba / Retained Earnings					
Ditentukan Penggunaannya / Appropriated	1.830.875	1.830.875	1.830.875	-	
Tidak Ditentukan Penggunaannya / Unappropriated	32.815.523	30.984.370	30.867.598	5,91	728.444
Penghasilan Komprehensif Lain / Other Comprehensive Income	125.845.480	125.579.573	124.816.234	0,21	438.682
Saldo yang Dapat Diatribusikan kepada / Equity Attributable to:					
Pemilik Entitas Induk / Owners of the Parent	165.502.703	165.836.308	124.816.234	17,56	39.859.698
Kepentingan Non-Pengendali / Non-Controlling Interests	331.780	333.135	774.370	14,64	70.001
Jumlah Ekuitas / Total Equity	**165.834.483**	**166.169.443**	**165.590.608**	**0,74**	**1.185.823**

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Subscribed and Fully Paid-up

Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Perusahaan diharuskan untuk membuat penyisihan cadangan wajib hingga sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Tidak ada batasan waktu untuk membentuk cadangan tersebut. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan belum membentuk cadangan umum sesuai dengan Undang-Undang tersebut.

Based on the Law on Limited Liability Companies, the Company is required to make a mandatory reserve provision of up to at least 20% of the total subscribed and fully paid-up capital. There is no time limit to establish such reserves. As of December 31, 2023 and 2022, the Company has not established a general reserve in accordance with the Law.

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh merupakan saham biasa yang memberikan hak untuk memberikan satu suara per saham dan berpartisipasi dalam dividen. Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh PLN MP tahun 2022 adalah sebesar Rp0,30 triliun sebesar jumlah yang sama seperti pada tahun 2021.

The Subscribed and Fully Paid-up Capital is common stock that provides the right to carry one vote per share and participate in dividends. PLN MP's total Subscribed and Fully Paid-up Capital in 2022 was Rp0.30 trillion, the same amount as in 2021.

Tambahan Modal Disetor
Additional Paid-in Capital

Tambahan modal disetor berasal dari nilai pengalihan aset tetap, termasuk biaya sehubungan PLTU Grenti Unit 1 dan 2 berdasarkan Surat Direktur Utama PLN No. 1311/DJJ/ DIR/07/2021 tanggal 19 Juli 2021, dan kekurangan penilaian aset tahun 1990 sampai dengan tahun 2000 yang diterima dari PLN, jumlah Tambahan Modal Disetor tahun 2022 adalah sebesar Rp2,80 triliun menurun 0,89% dibandingkan tahun 2021 adalah sebesar Rp2,82 triliun

Additional paid-in capital is derived from the transfer value of property, plant and equipment, including rehabilitation funds for Grenti Unit 1 and 2 in accordance with the Letter of PLN's President Director No. 1311/DJJ/DIR/07/2021 dated March 19, 2021, and maintenance estimates from 1990 to 2000 received from PLN. Total Additional Paid-in Capital in 2022 was Rp2.80 trillion, decreased by 0.89% compared to 2021 at Rp2.82 trillion.

Berdasarkan Akta Notaris No. 120 tanggal 28 Juli 2022, dari Hundung Lia, S.H., LL.., M.Kn., Notaris di Jakarta, PLN mengakuisisi penjualan saat hak sebesar dengan PT PLN Enjiniring ("PLNE") yang merupakan entitas sepengendali, untuk mengakuisisi 3,312,674,000 saham saham biasa atau sebesar dengan 100% kepemilikan atas PT Cirebon Power Ruwaimbang dengan mengalihkan 50,611,816 lembar saham biasa atau sebesar dengan 20,25% kepemilikan atas PJBI. Selisih sebesar Rp24,376 antara nilai pengalihan dan nilai buku bersih yang dimiliki disajikan dalam akun ekuitas sebagai tambahan modal disetor.

Based on Notarial Deed No. 120 dated July 28, 2022, from Hundung Lia, S.H., LL.., M.Kn., Notary in Jakarta, PLN held a share purchase agreement with PT PLN Enjiniring ("PLNE") which is an entity under common control, to acquire 3,312,674,000 common stocks or equivalent to 100% ownership of PTPP (Prime Power Ruwaimbang) by transferring 50,611,816 common stocks or equivalent to 20.25% ownership of PJBI. The difference of Rp24,376 between the transfer value and net book value received is recorded in equity account as additional paid-in capital.

Ekuitas yang Dapat Distribusikan kepada Pemilik Entitas Induk
Equity Attributable to Owners of the Parent

Jumlah Ekuitas yang Dapat Distribusikan kepada Pemilik Entitas Induk PLN MP tahun 2022 adalah sebesar Rp382,81 triliun meningkat 5,72% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp350,53 triliun meningkat. Peningkatan ini disebabkan karena peningkatan laba di tahun 2022 dan adalah kurs karena penjabaran Laporan Keuangan.

PLN MP's Total Equity Attributable to Owners of the Parent in 2022 was Rp382.81 trillion, increased by 5.72% compared to 2021 of Rp350.53 trillion. This increase was due to an increase in profit in 2022 and foreign exchange differences due to the elaboration of the Financial Statements.

Ekuitas yang Dapat Distribusikan kepada Kepentingan Non-Pengendali
Equity Attributable to Non-Controlling Interests

Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non-Pengendali PLN MP tahun 2022 adalah sebesar Rp218,39 ratus meningkat 14,63% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp193,18 miliar. Peningkatan ini dipengaruhi oleh peningkatan laba di tahun 2022 dan adalah kurs karena penjabaran Laporan Keuangan.

PLN MP's Non-Equity Attributable to Non-Controlling Interests in 2022 was Rp218.39 billion, increased by 14.63% compared to 2021 of Rp193.18 billion. This increase was influenced by an increase in profit in 2022 and foreign exchange differences due to the elaboration of the Financial Statements.

Analisis Arus Kas
Cash Flows Analysis

Jumlah Kas dan Setara Kas meningkat menjadi Rp8,96 triliun
Total Cash and Cash Equivalents increased to Rp8,96 trillion

Jumlah Kas dan Setara Kas PLN NP tahun 2022 adalah sebesar Rp8,96 triliun meningkat 21,98% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp7,34 triliun. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh dipengaruhi oleh proses Penagihan (Collection Period) yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

PLN NP's total Cash and Cash Equivalents in 2022 was Rp8,96 trillion, increased by 21,98% compared to 2021 at Rp7,34 trillion. The increase was mainly influenced by a better Collection Period than the previous year.

Tabel Arus Kas (Rp Juta)
Table of Cash Flows (Rp millions)

Uraian Description	2020	2021	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi Net Cash Provided by (Operating Activities	3.177.109	4.935.938	5.957.891	20,69	1.021.953
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi Net Cash Used in Investing Activities	(1.371.679)	(2.012.958)	(3.080.702)	402,67	(1.366.906)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities	(852.057)	(307.569)	(50.000)	(83,75)	257.711
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents	1.953.997	5.615.333	1.826.849	(67,47)	(2.304.497)
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year	1.030.050	3.011.113	7.343.958	143,16	4.331.895
Pengaruh Perubahan Nilai Kas Uang Asing Effect of Changes in Foreign Currency	(5.928)	11.000	97.201	745,56	89.701
Jumlah Kas dan Setara Kas Akhir Tahun **Cash and Cash Equivalents at the End of the Year**	**3.011.113**	**7.343.958**	**8.958.158**	**21,98**	**1.614.200**

Grafik Jumlah Kas dan Setara Kas (Rp Juta)
Chart of Total Cash and Cash Equivalents (Rp millions)

Arus Kas Aktivitas Operasi
Cash Flows of Operating Activities

[illegible] Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi PLN NP tahun 2022 adalah sebesar Rp2.28 triliun menurun 24,69% dibandingkan tahun 2021 adalah sebesar Rp3,02 triliun. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan jumlah bagian pemerintah tenaga listrik PLN NP (Pembangkit Non – PLTU Batubara) dan optimasi PLTU Batubara pada Sistem Kelistrikan area Dist.

PLN NP's total Net Cash provided by operating activities in 2022 was Rp2.28 trillion, decreased by 24.69% compared to 2021 of Rp3.02 trillion. The decrease was mainly influenced by a decrease in the number of PLN NP electricity sector Mini Plant (Non-Coal) (Non-PLTU Coal) and Coal-Fired optimization in the Dist Gas Electricity System.

Tabel Arus Kas Aktivitas Operasi (Rp juta)
Table of Cash Flows of Operating Activities (Rp million)

Uraian Description	2022	2021	2020	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Penerimaan Kas dari Pelanggan Cash Receipts from Customers	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pembayaran Kas kepada Pemasok, Karyawan, dan lainnya Cash Paid to Suppliers, Employees, and Others	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Penerimaan Bunga Interest Received	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pembayaran untuk kekurangan pajak kurang bayar Payment of tax underpayments (after tax underpayment)	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]
Penerimaan pengembalian atas surat ketetapan pajak kurang lebih Refund receipts of tax overpayments (after tax underpayment)	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Penerimaan restitusi pajak penghasilan badan Cash receipts for corporate income tax refunds	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Penerimaan restitusi Pajak Pertambahan Nilai Cash receipts for Value Added Taxes refunds	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pembayaran PPh Badan & PPh Final Payment of Corporate Income Tax & Final Income Tax	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Jumlah Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi Total Net Cash Provided by Operating Activities	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**

Arus Kas Aktivitas Investasi
Cash Flows of Investing Activities

Jumlah Kas Bersih digunakan untuk aktivitas investasi PLN NP tahun 2022 adalah sebesar Rp1,80 triliun meningkat 402,67% dibandingkan tahun 2021 adalah sebesar Rp334,25 miliar. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh penambahan [illegible] Hasil Tetap), Investasi pada Perusahaan Asosiasi dan pembentuk program pada Perusahaan Asosiasi

PLN NP's total Net Cash used in investing activities in 2022 was Rp1.80 trillion, increased by 402.67% compared to 2021 of Rp334.25 billion. The increase was mainly influenced by the additional acquisition of Property, Plant and Equipment, Investment in Associated Companies and provision of loans to Associated Companies.

Tabel Arus Kas Aktivitas Investasi (Per 31 Des)
Table of Cash Flows of Investing Activities (December)

Uraian / Description	2024	2023	2022	Peningkatan/Penurunan / Increase/Decrease	
				%	Nominal
Penerimaan Dividen dari Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Dividends Received from Associates and Joint Ventures	313.914	307.000	959.039	51,73	165.565
Penempatan Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Additions Investments in Associates and Joint Ventures	(11.770)	(57.500)	(267.500)	134,87	(359.000)
Penempatan Piutang kepada Ventura Bersama Placement of Loans to Joint Ventures	-	(3.672)	-	-	(3.672)
Penerimaan dari pinjaman kepada ventura bersama Receipt of reservation from joint ventures	-	-	63.720	-	63.720
Penarikan Deposito Berjangka Withdrawal of Time Deposits	-	554.370	30.000	(94,59)	(524.370)
Penempatan Deposito Berjangka Placement of Time Deposits	-	-	(231.189)	-	(231.189)
Penarikan Restriksi Kas dan Deposito Berjangka Ditahan Penggunaannya Withdrawal of Restricted Cash in Banks and Time Deposits	-	11.737	977	(91,67)	(10.760)
Penempatan Restriksi Kas dan Deposito Berjangka Ditahan Penggunaannya Placement of Restricted Cash in Banks and Time Deposits	-	(35.000)	(333.333)	852,38	(298.333)
Perolehan Aset Tetap Purchase of Property, Plant and Equipment	(1.561.388)	(1.007.561)	(1.454.089)	70,07	(894.433)
Perolehan Aset Tak Berwujud Purchase of Intangible Assets	-	-	(62.390)	-	(62.390)
Jumlah Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi **Total Net Cash Used in Investing Activities**	**(1.371.476)**	**(224.200)**	**(1.600.723)**	**402,47**	**(1.340.300)**

Arus Kas Aktivitas Pendanaan
Cash Flows of Financing Activities

Jumlah Kas Bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan PLN NP tahun 2022 adalah sebesar Rp600,83 miliar, menurun 84,02% dibandingkan tahun 2021 adalah sebesar Rp3.807,58 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya tambahan Pinjaman pada Pemegang Saham yang diberikan oleh PT PLN (Persero) kepada PT PLN NP di tahun 2021.

PLN NP's total Net Cash used in financing activities in 2022 was Rp600,83 billion, decreased by 84.02% compared to 2021 of Rp3.807,58 billion. The decrease was mainly due to additional Loans to Shareholders provided by PT PLN (Persero) to PT PLN NP in 2021.

Selisih Arus Kas Aktivitas Pendanaan (Rp *triliun*)
Table of Cash Flows of Financing Activities (Rp *trillion*)

Uraian *Description*	2022	2021	2022	Peningkatan/Penurunan *Increase/Decrease*	
				%	*Percent*
Penerimaan pinjaman pemegang saham *Proceeds of loan from shareholder*	1.903,850	127,187	205,040	56,88	228,673
Pembayaran pinjaman dari pemegang saham *Payments of loan from shareholder*	(197,190)	(204,135)	(918,938)	7,24	(14,356)
Pembayaran Perolehan Kepemilikan pada entitas anak dari Kepentingan Non Pengendali *Payments of Additional Ownership in subsidiaries from Non Controlling Interest*	-	-	(11,229)	-	(11,229)
Penerimaan dari divestasi entitas anak *Proceeds from divestment of subsidiaries*	-	-	3,700	-	3,700
Pembayaran sewa *Payments of lease liabilities*	(10,700)	(17,666)	(14,048)	25,94	3,618
Pembayaran Dividen oleh Entitas Anak Kepada Kepentingan Non Pengendali *Payments of Dividend by Subsidiaries to Non Controlling Interests*	(1,800)	(2,470)	(770)	(70,83)	1,700
Jumlah Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan *Total Net Cash Used in Financing Activities*	**811,917**	**(107,920)**	**(20,209)**	**(81,81)**	**107,211**

Analisis Kemampuan Membayar Utang, Tingkat Kolektibilitas Piutang dan Rasio Keuangan Lainnya

Analysis of Solvency, Receivables Collectibility and Other Financial Ratios

Kemampuan Membayar Utang

Solvency

Tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dalam menggunakan aset aktivitas dan aset likuiditas. Berikut adalah rincian tanggal jatuh tempo kontraktual untuk liabilitas keuangan dengan pembayaran yang telah disepakati:

The Company's ability level in fulfilling its obligations in measured using solvency ratios and liquidity ratios. The following is a detail of contractual maturity dates for financial liabilities with the agreed payments:

Tabel Rincian Jatuh Tempo Liabilitas (Rp Juta)

Uraian	Jatuh Tempo				
	Satu Tahun	Lebih dari 1 tahun sampai lebih dari 2 tahun	Lebih dari 2 tahun sampai lebih dari 3 tahun	Lebih dari 3 tahun	Jumlah
Utang usaha Pihak Ketiga	1.357.813	-	-	-	1.357.813
Liabilitas sewa	18.837	18.071	-	-	36.908
Utang Lain-lain Pihak Ketiga	795.048	-	-	-	795.048
Biaya yang masih harus dibayar	50.000	-	-	-	50.000
Pinjaman dari Pemegang Saham	417.736	375.237	775.100	1.493.121	3.461.739
Jumlah	**2.813.882**	**393.308**	**775.100**	**1.493.121**	**6.721.730**

Rasio Solvabilitas
Solvency Ratio

Rasio solvabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan membayar seluruh utangnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio solvabilitas dapat dihitung melalui beberapa rasio keuangan diantaranya adalah Debt to Assets Ratio (DAR) dan Debt to Equity Ratio (DER).

The solvency ratio is a ratio that measures the Company's ability to pay all its debts, both short and long term. The solvency ratio can be seen through several financial ratios, including Debt to Assets Ratio (DAR) and Debt to Equity Ratio (DER).

Tabel Rasio Solvabilitas (%)

Uraian	2019	2021	2021	Peningkatan/ Penurunan (Increase/ Decrease)
				%
DAR	5,84	6,39	7,18	12,36
DER	6,20	6,83	7,74	13,48

Debt to Assets Ratio (DAR)

Nilai DAR PLN NP tahun 2021 adalah 7,33% yaitu lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yaitu 6,20%. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan Liabilitas Imbalan Kerja karena penyesuaian imbalan kerja jatuh tempo oleh aktuaris dan penambahan Liabilitas Pajak Tangguhan yang menyesuaikan perbedaan temporer.

PLN NP's DAR value in 2021 was 7.33%, which was higher compared to 2020 at 6.20%. The increase was mainly due to the addition of Employee Benefits Liabilities due to the adjustment in maturity employee benefits by actuaries and the addition of Deferred Tax Liabilities that adjust temporary differences.

Debt to Equity Ratio (DER)

Nilai DER PLN NP tahun 2021 adalah 7,74% yaitu lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yaitu 6,20%. Peningkatan tersebut disebabkan oleh penambahan Liabilitas Imbalan Kerja karena penyesuaian imbalan kerja jatuh tempo oleh aktuaris dan penambahan Liabilitas Pajak Tangguhan yang menyesuaikan perbedaan temporer.

PLN NP's DER value in 2021 was 7.74%, which was higher compared to 2020 at 6.20%. The increase was caused by the addition of Employee Benefits Liabilities due to the adjustment in maturity employee benefits by actuaries and the addition of Deferred Tax Liabilities that adjust temporary differences.

Namun secara keseluruhan baik DAR dan DER masih sangat baik dan telah mengindikasikan adanya ratio coverasing dikarenakan perusahaan memiliki nilai ekuitas yang lebih tinggi dari nilai kewajibannya.

However, the overall DAR and DER values are still very intact and do not indicate insolvency risk due to the Company having a higher equity value than its liabilities value.

Rasio Likuiditas
Liquidity Ratio

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang akan jatuh tempo. Rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas diantaranya adalah cash ratio, quick ratio dan current ratio. Semakin tinggi nilai dari rasio-rasio tersebut, maka menginformasikan bahwa PLN NP mampu memenuhi kewajiban kewajibannya yang akan jatuh tempo.

The liquidity ratio is used to measure the Company's ability in fulfilling its short-term obligations that will be due. The ratios used to measure liquidity ratios include cash ratio, quick ratio and current ratio. The higher the value of these ratios, the more capable PLN NP is of fulfilling its obligations that will be due.

Tabel Rasio Likuiditas (%)
Table of Liquidity Ratio (%)

Uraian Description	2020	2021	2022	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease
				%
Cash Ratio	70,80	153,19	202,38	32,10
Quick Ratio	606,39	589,71	797,94	35,33
Current Ratio	674,51	644,89	758,84	17,67

Cash Ratio

Cash Ratio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban yang harus segera dipenuhi dengan alat kemas. Nilai *Cash Ratio* PLN NP tahun 2022 adalah 202,38%, yaitu lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 yaitu 153,19%. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan jumlah Kas dan Setara Kas sebagai akibat dari proses penagihan (Collection Period) yang lebih baik.

Cash Ratio is used to measure the Company's ability in paying obligations that must be fulfilled immediately with current assets. The Cash Ratio value of PLN NP in 2022 was 202.38%, which was higher compared to 2021 at 153.19%. The increase was mainly influenced by an increase in total Cash and Cash Equivalents as a result of a better Collection Period process.

Grafik *Cash Ratio* (%)
Chart of *Cash Ratio* (%)

Quick Ratio

Quick Ratio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang harus segera dipenuhi dengan Aset Lancar di luar persediaan, karena persediaan dianggap tidak mudah digunakan untuk memenuhi kewajiban yang akan segera jatuh tempo. Nilai Quick Ratio PLN NP tahun 2022 adalah 707,84% yaitu lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 yaitu 183,72%. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh tingginya jumlah persediaan stok bahan bakar minyak sebanyak 10 hari operasi untuk mengantisipasi kelangkaan batubara serta penurunan jumlah utang Usaha Bahan Bakar dan pemulihan harga gas pada tahun 2022.

Quick Ratio is used to measure the Company's ability in paying obligations that must be fulfilled immediately with Current Assets, outside of inventory, since inventory is considered not easy to be used to fulfill obligations that will be due soon. The Quick Ratio value of PLN NP in 2022 was 707.84%, which was higher compared to 2021 of 183.72%. The increase was influenced by the high amount of fuel stock inventory of 10 operating days to anticipate coal scarcity as well as a decrease in the amount of Fuel Trade Payables and a decrease in gas prices in 2022.

Grafik Quick Ratio (%)
Chart of Quick Ratio (%)

Current Ratio

Current Ratio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang akan segera jatuh tempo dengan Aset Lancar yang dimilikinya. Nilai Current Ratio PLN NP tahun 2022 adalah 750,64% yaitu meningkat dibandingkan tahun 2021 yaitu 649,95%. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh tingginya jumlah persediaan stok bahan bakar minyak sebanyak 10 hari operasi untuk mengantisipasi kelangkaan batubara serta penurunan jumlah utang usaha bahan bakar dan pemulihan harga gas pada tahun 2022.

Current Ratio is used to measure the Company's ability to fulfill obligations that will be due soon with its Current Assets. The Current Ratio value of PLN NP in 2022 was 750.64%, which increased compared to 2021 of 649.95%. The increase was influenced by the high amount of fuel stock inventory of 10 operating days to anticipate coal scarcity as well as a decrease in the amount of fuel trade payables and a decrease in gas prices in 2022.

Grafik Current Ratio (%)
Chart of Current Ratio (%)

Tingkat Kolektibilitas Piutang
Receivables Collectibility

Kemampuan perusahaan dalam mengumpulkan piutang dapat dilakukan dengan menghitung nilai Collection Period. Nilai Collection Period semakin kecil maka semakin baik, artinya kemampuan perusahaan dalam mengumpulkan piutang semakin cepat. Nilai Collection Period PLN NP tahun 2022 adalah 284 hari, jika lebih cepat dibandingkan tahun 2021 yaitu 350 hari. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan jumlah kas dari Setoran Modal dan posisi Piutang dari Collection Period piutang yang lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

The Company's ability to collecting receivables can be shown by calculating the Collection Period value. The smaller the Collection Period value, the better, meaning that the Company's ability in collecting receivables is getting faster. PLN NP's Collection Period value in 2022 was 284 days, which was faster compared to 2021 at 350 days. This is mainly influenced by an increase in the amount of Cash and Cash Equivalents as a result of a better Collection Period policy for receivables compared to the previous year.

Rasio Keuangan Lainnya
Other Financial Ratios

Selain rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang serta tingkat kolektibilitas piutang, berikut diuraikan rasio penting lainnya yang dimiliki PLN NP untuk mengukur kinerja keuangan.

Apart from ratios to determine the Company's ability to fulfilling short-term and long-term obligations as well as the receivables collectibility, the following are described other important ratios that are possessed of PLN NP to measure financial performance.

Rasio Profitabilitas
Profitability Ratio

Rasio Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Perusahaan dalam menghasilkan laba. Profitabilitas perusahaan dapat dilihat dari Return on Asset (ROA) dan Return on Equity (ROE).

Profitability ratio is a ratio used to measure the Company's ability in generating profits. The Company's profitability can be seen from Return on Asset (ROA) and Return on Equity (ROE).

Rasio Profitabilitas (%)
Ratio of Profitability Ratio (%)

Uraian Description	2020	2021	2022	Peningkatan/ Penurunan Increase/ (Decrease)
				%
ROA	4.36	5.39	5.70	11.26
ROE	4.85	9.81	9.88	13.87

Return on Asset (ROA)

ROA digunakan untuk mengukur pendapatan laba yang tersedia bagi pemilik perusahaan atas setiap nilai aset yang ada pada perusahaan. Nilai ROA PLN NP tahun 2022 adalah sebesar 5,70% lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 yaitu 5,39%. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan diluar operasi atas kepentingan investasi pada perusahaan asosiasi PLN NP utamanya pada PT IJP.

ROA is used to measure the acquisition of profits available for the owners of the Company on each asset value in the Company. The ROA value of PLN NP in 2022 was 5.70%, higher compared to 2021 of 5.39%. The increase was mainly influenced by an increase in revenue beyond operations on investment gains in PLN NP's associated companies, especially in PT IJP.

Return on Equity (ROE)

ROE digunakan untuk mengukur pendapatan laba yang tersedia bagi pemilik perusahaan atas modal yang diinvestasikan di dalam perusahaan. Nilai ROE PLN NP tahun 2022 adalah 4,88%, yaitu lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 yaitu 3,81%. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan diluar operasi atas kepentingan investasi pada perusahaan asosiasi PLN NP utamanya pada PT IJP.

ROE is used to measure the acquisition of profits available for the owners of the Company on the capital invested in the Company. The ROE value of PLN NP in 2022 was 4.88%, which was higher compared to 2021 of 3.81%. The increase was mainly influenced by an increase in revenue beyond operations on investment gains at PLN NP's associated companies, especially in PT IJP.

Rasio Aktivitas
Activity Ratio

Rasio aktivitas digunakan untuk memberikan gambaran aktivitas operasional yang dilakukan Perusahaan baik yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan, pembelian, dan kegiatan lainnya. *Inventory Turn Over* (ITO) dan Total Aset *Turn Over* (TATO) merupakan bagian rasio aktivitas.

Activity ratio is used to provide an overview of the operational activities conducted by the Company both related to sales, purchasing, and other activities. Inventory Turn Over (ITO) and Total Asset Turn Over (TATO) are part of the activity ratio.

Tabel Rasio Aktivitas (%)
Table of Activity Ratio (%)

Uraian Description	2020	2021	2022	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease
				%
ITO (kali) (*our*)	15	17	11	(34%)
TATO (kali) (*times*)	0,17	0,17	0,16	(5,88)

Inventory Turn Over (ITO)

ITO menunjukkan kemampuan dana yang tertanam dalam persediaan berputar dalam suatu periode tertentu, atau likuiditas dari persediaan dan tersedia untuk adanya *overstock*. Hasil perputaran persediaan mengukur efisiensi pengelolaan persediaan untuk menilai efisiensi operasional, yang mencerminkan seberapa baiknya manajemen mengontrol modal yang ada pada persediaan.

ITO shows the ability of funds embedded in inventory to rotate in a certain period, or the liquidity of inventory and the tendency for *overstock*. The inventory turnover ratio measures the efficiency of inventory management to assess operational efficiency, which shows how well management controls the capital in inventory.

Nilai TATO PLN NP tahun 2021 adalah 13 hari yaitu lebih cepat dibandingkan tahun 2020, yaitu 17 hari. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh perencanaan operasi dan pemeliharaan yang lebih tepat dan akurat selama tahun 2021 sehingga barang (stock) yang dapat langsung digunakan untuk kepentingan pembangkitan tanpa harus lama menunggu di gudang.

The TATO value of PLN NP in 2021 was 13 days, which was faster compared to 2020 of 17 days. The increase was mainly due to more precise and accurate operation and maintenance planning during 2021, so that purchased goods (stock) could be used immediately for electric power generation purposes without having to wait long in the warehouse.

Total Asset Turn Over (TATO)

TATO merupakan rasio yang menggambarkan perputaran aset dalam satu periode. Jadi semakin besar rasio ini semakin baik yang berarti bahwa aset dapat lebih cepat berputar dan menjadi laba dan menunjukkan semakin efisien penggunaan keseluruhan aset dalam menghasilkan penjualan.

TATO is a ratio that describes asset turnover measured from sales. Therefore, the greater this ratio, the better, which means that assets can turn faster and achieve profits, and show the more efficient use of overall assets in generating sales.

Nilai TATO PLN NP tahun 2021 adalah 0,26 kali lebih cepat dibandingkan nilai TATO di tahun 2020 yaitu 0,17 kali. Hal tersebut terjadi karena meningkatnya Pendapatan Usaha dari penjualan tenaga listrik PLN NP (Pembangkit Non – PLN, Sebuku) dan optimasi PLTU Batubara pada Sistem Kelistrikan Jawa Bali.

The TATO value of PLN NP in 2021 was 0.26 times faster than the TATO value in 2020 of 0.17 times. This occurred due to a decrease in Revenue from the sale of PLN NP electricity (Non-Coal (Off-Grid) and Coal (Off-Grid) administration in the Java Bali Electricity System.

Struktur Modal
Capital Structure

Struktur modal adalah perbandingan antara liabilitas dan ekuitas. Liabilitas terdiri dari jangka panjang dan jangka pendek, sedangkan ekuitas terdiri dari saham diterbitkan dan laba ditahan. PLN NP senantiasa mengelola struktur modal untuk mendukung keberlanjutan bisnis dan memaksimalkan imbalan bagi Pemegang Saham.

Capital structure is the comparison between liabilities and equity. Liabilities consist of long-term and short-term, while equity consists of issued shares and retained earnings. PLN NP continuously manages its capital structure to support business sustainability and maximize returns for Shareholders.

Struktur Modal tahun 2022 didominasi oleh Ekuitas yaitu sebesar Rp182,33 triliun atau 91,87%, sedangkan Liabilitas sebesar Rp13,17 triliun atau 7,08%.

The Capital Structure in 2022 was dominated by Equity of Rp182,33 trillion or 91.87%, while Liabilities was Rp13,17 trillion or 7.08%.

Tabel Struktur Modal (Rp juta)
Table of Capital Structure (Rp billion)

Uraian / Description	2020		2021		2022	
Liabilitas / Liabilities	10.140.000	5,84	10.068.000	6,06	13.007.000	7,10
Ekuitas / Equity	163.514.000	94,16	161.100.000	93,91	163.000.000	92,82
Aset / Assets	173.654.000	100,00	172.163.000	100,00	176.872.000	100,00

Grafik Struktur Modal (%)
Chart of Capital Structure (%)

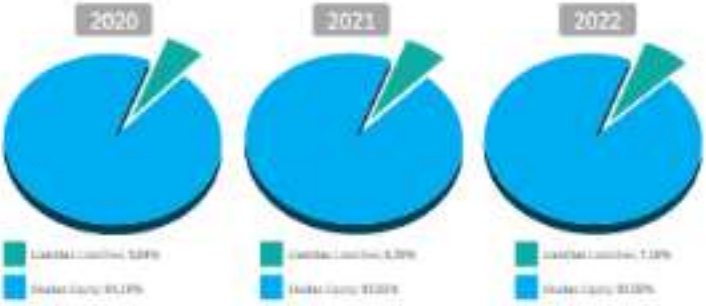

Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal
Management Policy on Capital Structure

Manajemen mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa perusahaan akan mampu untuk melanjutkan kelangsungan usaha dan untuk memaksimalkan pengembalian kepada para pemegang modal. Kebijakan struktur modal tidak hanya dipengaruhi oleh faktor

The management manages capital risk to ensure that the Company will be able to continue its business continuity and to ensure the fulfillment of capital adequacy ratio limits. Capital structure policy is not only determined by internal and external factors that affect

internal dan eksternal yang mempengaruhi risiko dan control, tetapi juga ditentukan oleh nilai, tujuan, preferensi, ari kebijakan manajemen sebagai input pada keputusan struktur modal yang memiliki implikasi pada kinerja keuangan suatu Perusahaan. Struktur modal yang baik ditujukan untuk mengelola risiko modal dan memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan kelangsungan usaha dan untuk memberikan pengembalian bagi pemegang modal.

risk and control, but also determined by the values, preferences, and desires of management as input to capital structure decisions which have implications on the financial performance of a Company. A good capital structure is intended to manage capital risk and ensure that they will be able to continue as a going concern and to ensure the fulfillment of capital adequacy ratio limits.

Manajemen Perusahaan secara berkala melakukan tinjauan struktur permodalan untuk memaksimalkan biaya modal sehingga dapat memaksimalkan nilai Perusahaan. Sebagai bagian dari tinjauan ini, Manajemen mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan. Oleh karena itu, kebijakan Perusahaan dalam rencana pendanaan akan selalu mempertimbangkan risiko keuangan yang mungkin timbul di masa depan. Struktur modal yang sehat dapat melindungi Perusahaan dari risiko finansial melalui kemampuan utang dan struktur kecondongannya. Struktur modal dapat menunjukkan proporsi utang dan ekuitas yang bisa menghasilkan modal rata-rata tertimbang terendah untuk Perusahaan.

The Company's management periodically reviews the capital structure to minimize the cost of capital so as to maximize the value of the Company. As part of this review, the Management considers the capital costs and related risks. Therefore, the Company's policy in working funding will always take into account the financial risks that may arise in the future. A sound capital structure can protect the Company from financial risks through a wise composition of liquidity and equity. The capital structure can show the proportion of debt and equity that can generate the lowest weighted average capital for the Company.

Dasar Pemilihan Kebijakan Struktur Modal
Basis for Capital Structure Policy Selection

Perusahaan mempertimbangkan kebijakan terkait struktur modal dengan mempertimbangkan:

1. Biaya permodalan dan risiko yang berhubungan
2. Memaksimalkan biaya modal untuk memaksimalkan nilai Perusahaan
3. Meminimalkan risiko di masa depan dengan mempertimbangkan risiko keuangan dalam pendanaan
4. Meningkatkan kebutuhan modal kerja untuk operasional dan investasi
5. Alternatif sumber pembiayaan dari perbankan dan non perbankan
6. Efisiensi biaya operasional Perusahaan
7. Pengelolaan aset untuk memberikan nilai tambah bagi Perusahaan

The Company determines policies related to capital structure by considering:

1. Capital costs and related risks
2. Maximizing the capital cost to maximize the Company value
3. Mitigating future risks by taking into account financial risks in funding
4. Improved working capital readiness for operations and investment
5. Alternative financing schemes from banks and non-banks
6. Company's operational cost efficiency
7. Asset management to create added value for the Company

Tingkat Likuiditas Perusahaan
Liquidity Ratio of the Company

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang akan jatuh tempo. Perusahaan melakukan monitoring terhadap secara berkelanjutan terhadap tingkat likuiditas Perusahaan, adapun rasio likuiditas Perusahaan di tahun 2021 yaitu rasio kas sebesar 203,38%, rasio cepat sebesar 757,83%, dan rasio lancar sebesar 763,63%.

PLN has set liquidity ratio to measure the Company's ability to fulfill/pay the maturing short-term obligations. The Company consistently monitors this liquidity ratio. The Company's liquidity ratio in 2021 was cash ratio of 203.38%, quick ratio of 757.83%, and current ratio of 763.63%.

Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal
Material Commitments for Capital Goods Investment

Perjanjian Pengadaan Bahan Bakar
Fuel Procurement Agreement

Nama Pihak dan Tujuan Pengadaan Bahan Bakar
Name of the Party and Purposes of Fuel Procurement

Pada tahun 2022, PLN NP memiliki ikatan material untuk pengadaan bahan bakar dengan beberapa pemasok diantaranya perjanjian pengadaan batubara, perjanjian pengadaan gas alam, dan perjanjian pengadaan bahan bakar minyak (BBM). Tujuan dari adanya perikatan ini agar Perusahaan memperoleh bahan bakar yang berkualitas tinggi dengan mengoptimalkan efisiensi biaya modal. Sehingga dapat memastikan dengan baik keandalan kegiatan pembangkitan tenaga listrik. Berikut adalah bentuk bentuk perikatan pengadaan bahan bakar tersebut:

In 2022, PLN NP had material commitments for fuel procurement with several suppliers including coal procurement agreements, natural gas procurement agreements, and fuel procurement agreements. The purpose of these commitments is for the Company to obtain high quality fuel without compromising capital cost efficiency, so that it can support even the reliability of electric power generation activities. The following are the forms of commitments for fuel procurement:

Perjanjian Pengadaan Batubara
Coal Procurement Agreement

Pemasok Supplier	Nomor Kontrak Contract Number	Satuan Unit	Jumlah Total	Periode Period
PT PLN Batubara	[illegible]	Metrik ton Metric ton	Sesuai kebutuhan As needed	Maret 2020 – Desember 2040 March 2020 – December 2040
PT Kaltim Prima Coal	[illegible]	Metrik ton Metric ton	11.310.000	Januari 2019 – Desember 2027 January 2019 – December 2027
PT Global Energi Lestari	[illegible]	Metrik ton Metric ton	183.000	Agustus 2021 – Februari 2022 August 2021 – February 2022
PT Bara Tabang	[illegible]	Metrik ton Metric ton	1.220.000	November 2021 -Desember 2023 November 2021 - September 2023
PT Bersih Bahana Energi [illegible]	[illegible]	Metrik ton Metric ton	500.000	Agustus 2022 – Juni 2023 August 2022 – June 2023
PT Anugrah Bumas Energy	SPK No. [illegible]	Metrik ton Metric ton	89.000	September 2022 – Juli 2023 September 2022 – July 2023
PT Borneo Inter Global	SPK No. [illegible]	Metrik ton Metric ton	570.000	Desember 2022 – Oktober 2023 December 2022 – October 2023

*Tanda baca yang ini tidak digunakan
*Use this punctuation

Pada tanggal 31 Desember 2021, Direktur Jenderal Minyak dan Gas bumi untuk dan atas nama Menteri ESDM menerbitkan surat No. B-1695/MB.05/DJM.B/2021 (Surat B-1695) yang antara lain mengatur bahwa sesuai ketentuan PMK 158, KEP, SUPK Operasi Produksi, SUPK Kerjasama Kontrak/Perjanjian Operasi dan perjanjian lain/pengerjaan dan Perjanjian Bersama, yaitu:

1. Dilarang melakukan penjualan batubara ke luar negeri sejak tanggal 1 sampai dengan 31 Januari 2022.
2. Wajib memasok seluruh produksi batubaranya untuk memenuhi kebutuhan listrik untuk kepentingan umum sesuai kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri (DMO) dari atau penugasan dari Pemerintah kepada perusahaan tersebut berdasarkan PLN dan Kabupaten/Kepala Produksi (KP).
3. Dalam hal sudah terdapat batubara di pelabuhan muat dan atau telah dimuat di kapal, harus segera dikirim ke Pembangkit Listrik tenaga uap (PLTU) milik Grup PLN dan KP yang pelaksanaannya agar segera dilaksanakan dengan PLN. Dalam Surat B-1605 juga terdapat informasi bahwa larangan ekspor batubara akan dievaluasi dan dicabut berdasarkan realisasi pasokan batubara untuk pembangkit listrik tenaga batubara PLN dan KP.

Pada tanggal 10 Januari 2022, KESDM menerbitkan Keputusan Menteri No. 13 K/HK.02/MEM.B/2022 yang mengatur tentang pedoman pengawasan secara administratif terhadap ekspor batubara, pengenaan denda dan pemberian dana kompensasi untuk memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri.

Selama tahun 2021, harga dasar batubara di kompat penyerahan stockpile unit terdekat antara Rp600.000 (nilai paling rendah dengan Rp1.000.000 (nilai paling) per ton, yang ditentukan berdasarkan kalori, kadar abu, sulfur, air, ash fusion temperature (AFT), Hardgrove Grindability Index (HGI) dan unsur batubara.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 37 tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara, seluruh harga dasar termasuk dalam alat ditinjau secara periodik setiap 1 (satu) bulanan untuk disesuaikan dengan nilai kurs Rupiah terhadap mata uang HGI, dan harga dasar tahun dasar tersebut HGI untuk industri.

Sehubungan dengan penyerahan jual beli batubara, pemasok diwajibkan untuk menyediakan jaminan pelaksanaan.

On December 31, 2021, the Director General of Mineral and Coal for and on behalf of the Minister of ESDM issued letter No.B-1695/MB.05/DJM.B/2021 (Letter B-1695), which, among others, stipulates that all holders of PKP2B, CoT, Production Operation SUPK, Contract Continuity/Operation Agreement SUPK, as well as Coal Transportation and Sales Licensy Holders, namely:

1. Prohibited from selling coal abroad since January 1 to 31, 2022.
2. Required to supply all of its coal production to fulfill electricity needs for the public interest in accordance with the Domestic Market Obligation (DMO) and/or assignments from the Government to the Company and/or contracts with PLN and Independent Power Producer (IPP).
3. In the event that there are vessels present at the loading port and/or have been loaded on the ship, it must be delivered immediately to the Steam Power Plant ("CFPP") owned by PLN Group and IPP, the implementation of which should be immediately agreed with PLN. There is also information in Letter B-1605 that the coal export ban will be evaluated and increased based on the realization of coal supply for coal-fired power plants of PLN and IPP.

On January 10, 2022, the Ministry of Energy and Mineral Resources issued a Ministerial Decree No. 13 K/HK.02/MEM.B/2022 which regulates the guidelines for imposing administrative sanctions, coal export bans, imposing fines and providing compensation funds to fulfill domestic coal needs.

During 2021, the base price of coal at the delivery point of the stockpile unit ranged from Rp600,000 (full amount) to Rp1,000,000 (full amount) per ton, adjusted for calorific value, ash content, sulfur, water, Ash Fusion Temperature (AFT), Hardgrove Grindability Index (HGI) and coal ash.

In accordance with the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 37 of 2017 concerning Procedures for Determining Sales Benchmark Prices for Metal Minerals and Coal, all of the above base contract prices will be reviewed periodically every 1 (one) month or to be adjusted to the Rupiah exchange rate against the HGI, and the base price of HGI "cut-off" for industry.

In connection with the coal trading agreement, suppliers are required to secure guarantees.

Perjanjian Pengadaan Gas Alam
Natural Gas Procurement Agreement

Sektor Sector	Pemasok Supplier	Nomor/Tanggal Kontrak Number/Date of Contract	Periode Period	Satuan Unit	Kontrak Total
Grati	PT Pertamina Hulu Energi (PHE)	Perjanjian Jual Beli Gas Gas Sale and Purchase Agreement	2018 - 2023	BCF	107.892
Grati	PGN SAKA (SPS)	Amandemen I/2018 tgl. 2021 Amendment I/2018 Dtd. 2021	2018 - 2023	BCF	330.28
Grati	Kangean Energy Indonesia	401.11.Jul/0800/2018/2018 beserta Amandemen-amandemennya 401.11.Jul/0800/2018/2018 along with its amendment to the agreement	2018 - 2023	BCF	372.00
Grati	PT Pertagas Jatim Utama	001/0082/2002 beserta Addendum dan Amandemennya 001/0082/2002 along with the Addendum and agreement	2018 - 2023	BCF TSTU	12.00 7.20
Muara Karang	PT Pertamina Hulu Energi (PHE)	[illegible]	2018 - 2023	BCF	0.470
Muara Karang	PT Perusahaan Gas Negara	[illegible]	2018 - 2023	BCF	7.227
Muara Tawar	PT Pertamina EP	[illegible]	2018 - 2023	BCF	29.344
Muara Karang & Muara Tawar	PT Nusantara Regas	[illegible]	2018 - 2023	BCF	191
Muara Karang & Muara Tawar	PT Tangguh PSC	[illegible]	2018 - 2023	BCF	153
Muara Karang & Muara Tawar	PT Pertamina (Persero)	[illegible]	2018 - 2023	BCF	sesuai ketentuan in-house

*Dalam proses penyelesaian
*In the advanced process

Harga realisasi pembelian gas alam pada titik penyerahan di tahun 2022 berkisar antara AS$6,57 sampai dengan AS$13,55 dan Rp94.106 (nilai penuh) sampai dengan Rp213.025 (nilai penuh) per Million British Thermal Unit (MMBTU)/Million Standard Cubic Feet (MSCF).

The realized purchase price of pipeline gas at the delivery point in 2022 ranged from US$6.57 to US$13.55 and Rp94,106 (full amount) to Rp213,025 (full amount) per Million British Thermal Units (MMBTU)/Million Standard Cubic Feet (MSCF).

Perjanjian Pengadaan Bahan Bakar Minyak
Fuel Procurement Agreement

Perusahaan melalui PLN dan Pertamina mengadakan Perjanjian Induk Jual Beli Bahan Bakar Minyak No.071/PRR/KOM/2021 tanggal 6 Oktober 2021. Perjanjian ini telah diadendum pada tanggal 10 Mei 2022 dimana PLN dan Pertamina menyepakati antara lain:

The Company, through PLN and Pertamina made a Master Agreement for Fuel Sale and Purchase No.071/PRR/KOM/2021 dated October 6, 2021. The agreement has been amended on May 10, 2022 where PLN and Pertamina agreed among others:

1. Penggunaan harga bahan bakar bulanan ditentukan oleh Pertamina untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 April 2017 dan harga bahan bakar 380,5% dari Mid ISI Platts Singapore (HSFO) ditambah 7% untuk periode 1 Mei 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.
2. Harga bahan bakar setelah tanggal 31 Desember 2017 akan ditentukan oleh kedua belah pihak sebagai acuan.
3. Jangka waktu pembayaran berikut pengenaan denda keterlambatan pembayaran sebesar tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia bulanan ditambah 1,3%.
4. Efektif mulai 1 Mei 2017, saldo uang yang belum dibayar atas pembelian bahan bakar sampai dengan 30 April 2017 dikenakan bunga sebesar tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia per tahun ditambah 1,3%, sampai dipertahankan dengan maksimum sebesar 75% paling lambat tanggal 31 Agustus 2017.
5. Utang kepada Pertamina termasuk sebagian yang akan diterbitkan maksimum sebesar Rp1,8 triliun.
6. Perjanjian ini berlaku untuk 1 tahun mulai tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.
7. Susunan telah sebagai berikut:

   Perjanjian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan terakhirkan maksimum VIII tertanggal 8 Februari 2022, berapakalan harga pembelian bahan minyak (HSD) dan MFO) mulai tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 antara Pertamina dan Perusahaan adalah sebagai berikut:

   a. Sehubung sejak 1 September 2021, seluruh tanggung jawab hak dan kewajiban Pertamina berdasarkan perjanjian jual beli ini beralih ke PT Pertamina Patra Niaga.
   b. Perubahan terhadap harga bahan bakar minyak yang berlaku sejak 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
   c. Pengurangan DMO pada tanggal 1 hingga akhir bulan HSFO, Jakarta Interbank Spot Dollar (JISDOR) dan Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) yang berlaku adalah rata-rata tengah HSFO, rata-rata JISDOR dan rata-rata JIBOR selama 1 bulan, yang terbit sejak tanggal 21 pada 2 bulan sebelumnya sampai dengan tanggal 19 pada 1 bulan sebelum bulan pengiriman (DM).

Pengalihan telah menyebab pembelian HSD dan MFO selama tahun 2021 berdasarkan harga tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, saldo utang usaha atas pembelian bahan bakar kepada Pertamina adalah masing-masing sebesar Rp14,40 miliar dan Rp833,45 miliar.

1. The sale of months fuel prices was determined by Pertamina for the period January 1 to April 30, 2017 and fuel prices of 380.5% from Mid ISI Platts Singapore (HSFO) plus 7% for the period May 1, 2017 to December 31, 2017.
2. Fuel prices after December 31, 2017 will be determinable both parties annually.
3. Payment period and penalty charges for late payment amounted to the interest rate of the monthly Certificate of Bank Indonesia plus 1.3%.
4. Effective starting May 1, 2017, the unpaid balance of payables for fuel purchases up to April 30, 2017 will be subject to interest at the interest rate per year of the Certificate of Bank Indonesia plus 1.3%, until withdrawn by issuing [53] bonds no later than August 31, 2017.
5. Payables to Pertamina, including bonds that will be issued, amount to a maximum of Rp1.8 trillion.
6. This agreement is valid for 1 years since January 1, 2017 until December 31, 2017.
7. Summate was appointed as the independent a proper.

   The agreement has been amended several times. Based on Addendum VIII dated February 8, 2022, the agreement on the sale and purchase price for fuel (HSD and MFO) from January 1, 2021 to December 31, 2021 between Pertamina and the Company is as follows:

   a. As of September 1, 2021, all responsibilities, rights and obligations of Pertamina based on the agreement are transferred to PT Pertamina Patra Niaga.
   b. Changes in fuel oil price formulation effective from January 1, 2021 to December 31, 2021.
   c. Fuel delivery on the 1st to the end of the month, the applicable HSFO, Jakarta Interbank Spot Dollar (JISDOR) and Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) are the middle average of HSFO, average JISDOR and average JIBOR for 1 month, published from the 21th of the previous 2 months up to the 19th of the 1 month before the month of fuel delivery.

The Company has recorded HSD and MFO purchases during 2021 based on those prices.

On December 31, 2022 and 2021, the balance of trade payables for fuel purchases to Pertamina were Rp14,40 and Rp833,45, respectively.

RKAP Biaya Bahan Bakar
ADOP on Fuel Cost

RKAP untuk biaya bahan bakar tahun 2022 sebesar Rp11.013.000 juta.

The ADOP for fuel costs in 2022 was Rp11,013,302 million.

Mata Uang yang Menjadi Denominasi Pengadaan Bahan Bakar
Denominated Currency for Fuel Procurement

Sampai dengan 31 Desember 2021, komitmen belanja material untuk pengadaan bahan bakar berdasarkan mata uang adalah Rupiah (Rp).

Until December 31, 2021, the details of material commitments for fuel procurement based on currency were Rupiah (Rp).

Langkah-Langkah Pertindungan Risiko Mata Uang atas Pengadaan Bahan Bakar
Currency Risk Protection Measures for Fuel Procurement

Perusahaan memiliki eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar yang timbul dari transaksi dengan pelanggan maupun pemasok yang didenominasi dalam mata uang asing, sehingga Perusahaan berkeapan terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Untuk mengelola risiko terkait fluktuasi pembelian pengadaan bahan bakar dengan para pemasok termasuk didalamnya risiko keuangan dan risiko pasar (risiko mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Manajemen menelaah dan menyetujui kebijakan untuk mengelola masing-masing risiko tersebut. Hedge, dengan menyediakan kebijakan manajemen risiko yang bertujuan untuk meminimalkan pengaruh dari ketidakpastian nilai keuangan terhadap kinerja keuangan Perusahaan.

The Company has exposure to exchange rate fluctuations arising from transactions with customers and suppliers that are denominated in foreign currencies, thus the Company is exposed to foreign exchange rate fluctuations. To avoid risks related to several fuel procurement commitments with suppliers including financial and market risks (foreign currency risk and interest rate risk), credit risk and liquidity risk. Management reviews and issues policies to manage each risk (risk mitigation). By implementing risk management policies that aim to minimize the effect of uncertain financial risks on the Company's financial performance.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 62 tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Dasar Batubara, Mineral Lignit dan Batubara, seluruh harga dasar kontrak diatas akan ditinjau secara periodik setiap 3 (tiga) bulanan untuk disesuaikan dengan nilai kalor (kcal/kg) terhadap mata uang IMS, dan harga dasar bahan bakar minyak HSD untuk industri. Sehubungan dengan perjanjian jual beli batubara, pemasok diwajibkan untuk menyediakan jaminan pelaksanaan.

In accordance with the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 62 of 2017 concerning Procedures for Determining Sales Benchmark Prices of Metal Minerals and Coal, all of the above basic contract prices will be reviewed periodically every 3 (three) months to be adjusted to the rupiah exchange rate against the US$, and the basic price of HSD fuel oil for industry. In connection with the coal sale and purchase agreement, the supplier is required to ensure guarantees.

Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL)
Power Purchase Agreement (PPA)

Perusahaan memiliki sejumlah PJBTL dengan PLN. Dalam perjanjian tersebut, PLN membayar pasokan tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan formula pembayaran. Pembayaran tersebut meliputi komponen biaya kapasitas, energi, operasional dan pemeliharaan yang tergantung pada tingkat pasokan energi serta variabel lain yang ditentukan dalam perjanjian.

The Company has a number of PPAs with PLN. Under these agreements, PLN pays for electricity supply provided by the Company at an amount determined based on a payment formula. The payment includes the components of capacity, energy, operational, and maintenance costs which depend on the level of energy supply, as well as other variables determined in the agreement.

Pada tanggal 30 Desember 2022, PLN dan Perusahaan telah menandatangani 19 amandemen dan pernyataan kembali (RSTT), yang terdiri dari 5 (lima) PBTL atas wilayah Jawa-Bali, 7 (tujuh) PBTL atas wilayah Sumatera, 4 atas (lima) PBTL atas wilayah Kalimantan, dan 4 (lima) PBTL atas wilayah Sulawesi. Amandemen dan pernyataan kembali (RSTT) tersebut akan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2023 dengan periode kontrak dari tahun 2023 sampai dengan 2032.

On December 30, 2022, PLN and the Company have signed 19 (19) amendments and restatements consisting of 5 (five) PPAs for Java-Bali region, 7 (7) PPAs for Sumatera region, 4 (4) PPAs for Kalimantan region, and 4 (4) PPAs for Sulawesi region. The amendments and restatements of the PPA will be effective on January 1, 2023 with contract period from 2023 to 2032.

Perjanjian Pengadaan dan Pemeliharaan
Procurement and Maintenance Agreement

Nama Pihak dan Tujuan Pengadaan dan Pemeliharaan
Name of the Party as well as Purposes of Procurement and Maintenance

Perusahaan memiliki beberapa Perjanjian Jasa Operasi dan Pemeliharaan sangat dengan 31 Mei 2025. Sebagai bentuk tanpa pemberitahuan outsourcing manajemen berkualitasan bahwa Perjanjian Jasa Operasi dan Pemeliharaan akan diperpanjang sejak 1 Januari 2026.

The Company has several Operation and Maintenance Service Agreements until May 31, 2025. As follows up to the establishment of the outsourcing, management purposes that the Operation and Maintenance Services Agreement will be terminated since January 1, 2026.

Selain itu, Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Jasa Operasi dan Pemeliharaan (PJO) Gambaka (2x50 MW) tenaga Supporting Award pada tanggal 29 November 2021. Masa penyelesaian kontrak sampai dengan 30 November 2032. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan berkualitasan, kontrak masih dalam proses penyelesaian.

In addition, the Company has signed the Operation and Maintenance Services Agreement for Gambaka (2x50 MW) at the Supporting Award stage on November 29, 2021. The contract completion period is up to November 30, 2032. Up to the completion date of the consolidated financial statements, the contract is still in the extension process.

RKAP Pemeliharaan
ABOP on Maintenance

- RKAP pemeliharaan tahun 2022 sebesar Rp828.399 juta
- RKAP pemeliharaan Jasa O&M tahun 2022 sebesar Rp1.871.140 juta

- ABOP on the routine maintenance in 2022 was Rp828.399 million
- ABOP on the O&M Service maintenance in 2022 was Rp1.871.140 million

Mata Uang yang Menjadi Denominasi Pengadaan dan Pemeliharaan
Denominated Currency for Procurement and Maintenance

Sampai dengan 31 Desember 2022, perincian kebutuhan material untuk pengadaan dan pemeliharaan berdasarkan mata uang adalah Rupiah (Rp).

Until December 31, 2022, the details of material commitments for procurement and maintenance based on currency were Rupiah (Rp).

Langkah-Langkah Perlindungan Risiko Mata Uang atas Pengadaan dan Pemeliharaan
Currency Risk Protection Measures for Procurement and Maintenance

Dalam hal pembelian pengadaan dan pemeliharaan, PLN NP tidak menggunakan mata uang asing sehingga tidak dilakukan langkah perlindungan nilai dari posisi mata uang asing terkait biaya manajemen eksposur mata uang asing dalam bidang yang dapat diterima atas selisih kondisi dan penurunan Rupiah terhadap mata uang asing yang relevan.

In terms of procurement and maintenance commitments, PLN NP does not use foreign currencies so that no risk protection measures of the related foreign currency positions are taken in the form of managing foreign currency exposures within acceptable fields of views, increase and decrease in Rupiah to the relevant foreign currencies.

Perolehan Barang Modal
Acquisition of Capital Expenditures

Pada tanggal 18 Desember 2017, Perusahaan telah menandatangani perjanjian induk dengan PLN, Konsorsium Dossin Heavy Industries and Construction Co. Ltd. dan PT Hutama Karya (Persero) sehubungan dengan Perjanjian Kontrak No. 012/LO/DIR/XII/2017 tanggal 29 Maret 2017 untuk proyek add on PLTU Muara Tawar Blok 1 2 dan 3. Perjanjian tersebut terakhir diubah satu Addendum 5 pada tanggal 1 September 2021 terkait biaya tambah untuk pekerjaan pemeliharaan. Sehubungan dengan perjanjian diatas Perusahaan menyiapkan fasilitas stand-by letter of credit.

On December 18, 2017, the Company has signed a master agreement with PLN, Consortium of Dossin Heavy Industries and Construction Co. Ltd. and PT Hutama Karya (Persero) in connection with Contract Agreement No. 012/LO/DIR/XII/2017 dated March 29, 2017 for the add on project of Muara Tawar Block 1, 2 and 3. COPY. The agreement was last amended namely Addendum 5 on September 1, 2021 related to additional work for piling work. In connection with the above agreement, the Company has a stand-by letter of credit facility.

RKAP Barang Modal
ASOP on Capital Expenditures

RKAP untuk Add On Muara Tawar Blok 1,2,3 tahun 2022 sebesar Rp1.511.000 juta.

The ASOP for Add On Muara Tawar Block 1,2,3 in 2022 was Rp1,511,000 million.

Mata Uang yang Menjadi Barang Modal
Denominated Currency for Capital Expenditure

Sampai dengan 31 Desember 2021, perincian kebutuhan material untuk barang berdasarkan mata uang adalah Japan Yen, Korea Won, Amerika Dollar, dan Euro. Hal ini berdasarkan adanya fasilitas stand-by letter of credit.

Until December 31, 2021, the details of material commitments for goods based on currency were Japan Yen, Korean Won, American Dollar, and European Euro. This was based on the stand-by letter of credit facility.

Langkah-Langkah Perlindungan Risiko Mata Uang atas Barang Modal

Currency Risk Protection Measures for Capital Expenditure

Dalam hal perikatan perjanjian atas barang modal, apabila Perusahaan memiliki eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar yang timbul dari transaksi dengan perjanjian invasion permanen yang ditentukan dalam mata uang asing. Fluktuasi tersebutkan perjanjian atas kondisi dari perjanjian atas ketentuan nilai tukar yang menggambarkan perjanjian manajemen terhadap perubahan yang material pada nilai tukar setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini. Analisis sensitivitas ini hanya mencakup saldo kas moneter setelah pajak dalam mata uang asing dan menyesuaikan translasi pada akhir tahun untuk 10% perubahan dalam nilai tukar mata uang asing.

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan menjadi mata uang fungsional menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal pelaporan, setiap aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dikonversikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing menggunakan kurs yang berlaku pada akhir tahun pelaporan diakui dalam laba rugi.

In terms of the commitments of capital expenditure agreements, if the Company has exposure to exchange rate fluctuations arising from transactions with customers and suppliers that are denominated in foreign currencies, the Company assesses the sensitivity and decreases in exchange rate sensitivity which reflects management's assessment of rational changes in exchange rates after considering current economic conditions. The sensitivity analysis includes only after-tax balances of monetary items in foreign currencies and adjusts translations at the end of the year for 10% changes in foreign exchange rates.

Transactions in foreign currencies are translated into the functional currency using the exchange rate prevailing at the date of the transaction. At the reporting date, cash monetary assets and liability denominated in a foreign currency is adjusted to reflect the exchange rate prevailing on that date. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of foreign currency transactions and from the translation of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies using the exchange rates prevailing at the end of the reporting period are recognized in profit or loss.

Realisasi Investasi Barang Modal

Realization of Capital Goods Investment

PLN NP melakukan investasi barang modal dalam bentuk aset tetap berupa tanah, bangunan umum, sarana dan prasarana, instalasi dan mesin pembangkit, perlengkapan transmisi dan distribusi, perlengkapan umum dan kendaraan bermotor. Selain itu juga terdapat investasi pada pengadaan pembangkitan dan pengembangan usaha pendampingan. Sumber utama kapasi investasi barang modal yang dilakukan Perusahaan adalah untuk mendukung kinerja operasional Perusahaan sehingga pembangkit semakin efisien dan andal serta memberikannya proses bisnis.

PLN NP invests in capital goods in the form of property, plant, and equipment, including land, buildings, measures and infrastructure, installations and power plants, transmission and distribution equipments, general equipment and motor vehicles. In addition, there are also investments in electric power generation strengthening and business development. In general, the purpose of investment in capital goods conducted by the Company is to support the Company's operational performance so that the power plant is more efficient and reliable as well as to facilitate business processes.

Investasi Barang Modal pada Aset Tetap

Capital Goods Investment in Property, Plant, and Equipment

Investasi barang modal PLN NP pada aset tetap di tahun 2022 adalah sebesar Rp3,72 triliun meningkat 48,94% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp2,15 triliun. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh tambahan aset baru yang signifikan seiring Project Project aset on PLTGU Muara Tawar Blok 2 tahun COD pada 31 Desember 2021.

PLN NP's capital goods investment in property, plant and equipment in 2022 was Rp3.72 trillion, increased by 48.94% compared to 2021 of Rp2.15 trillion. The increase was mainly influenced by the significant addition of new assets along with the add on Project of Muara Tawar Block 2 CCPP which has COD on December 31, 2021.

Tabel Jenis, Tujuan, dan Nilai Investasi Barang Modal Aset Tetap

Table of Type, Purpose, and Value of Capital Goods Investment in Property, Plant, and Equipment

Jenis Investasi Barang Modal Type of Capital Goods Investment	Tujuan Investasi Investment Purpose	Realisasi Negatif Investasi (Rp juta) Realization of Investment Activities (Expenditure)		Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease (%)
		2021	2022	
Tanah Land	Pembangunan pembangkit baru Building new power plant	-	-	-
Bangunan Umum, Rotasi, dan Prasarana Buildings, Revisions, and Infrastructure	Operasional Perusahaan Company Operational	20.849	320.018	787,75
Instalasi dan Mesin Pembangkit Installations and Power Plants	Efisiensi dan keandalan pembangkit Power plant efficiency and reliability	77.819	187.705	141,35
Peralatan Transmisi dan Distribusi Transmission and Distribution Equipment	Operasional Perusahaan Company Operational	38.291	3.808	(85,14)
Perlengkapan, Pengolahan Data, dan Telekomunikasi Telecommunications and Data Processing Equipment	Operasional Perusahaan Company Operational	-	45	-
Perlengkapan Umum General Equipment	Operasional Perusahaan Company Operational	183.310	84.350	(38,40)
Kendaraan Bermotor Motor Vehicles	Operasional Perusahaan Company Operational	11.677	8.714	(25,39)
Properti Sedang Usaha Main Stock Parts		-	11.313	-
Aset dalam Pembangunan Assets in Development	Operasional Perusahaan Company Operational	(82.507)	1.327.330	4.697
Aset Hak Guna (Right of Use Asset)		44.261	66.315	2,72
Aset Tidak Digunakan dalam Operasi Assets Not Used in Operations	Operasional Perusahaan Company Operational	10.637	-	-
Jumlah Realisasi Kegiatan Investasi Total Realization of Investment Activities		2.152.534	1.714.300	40,97

Dengan capaian realisasi investasi di tahun 2022, maka jumlah Aset Tetap tahun 2022 adalah sebesar Rp123,33 triliun menurun dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp129,15 triliun. Penurunan disebabkan karena beberapa aset yang sudah mencapai umur ekonominya.

With the achievement of investment realization in 2022, total Property, Plant and Equipment in 2022 was Rp123.33 trillion, decreased compared to 2021 of Rp129.15 trillion. The decrease was due to several assets that have reached their economic life.

Tanah, Aset Tetap (Per Jenis)
Table of Property, Plant and Equipment (By Article)

Uraian Description	1 Januari 2022 January 1, 2022	Penambahan Additions	Pengurangan Transactions	Reklasifikasi Reclassifications	31 Desember 2022 December 31, 2022
Biaya Perolehan Acquisition Cost					
Tanah dan Hak Atas Tanah Land and Land Rights	17.000.000	-	-	-	17.000.000
Bangunan Utama, Waduk dan Prasarana Buildings, Reservoirs, and Infrastructure	7.000.189	105.521	-	7.255	6.971.645
Instalasi dan Mesin Pembangkit Installations and Power Plants	87.961.243	187.725	-	3.000.370	91.150.338
Perlengkapan Transmisi dan Distribusi Transmissions and Distribution Equipment	4.201.671	3.866		3.019	4.202.390
Perlengkapan Perpustakan Data dan Telekomunikasi Telecommunications and Data Processing Equipment	3.000	69	-	-	3.057
Perlengkapan Umum Kantor Equipment	1.267.000	64.239	-	37.975	1.370.000
Kendaraan Bermotor Motor Vehicles	161.551	8.314	-	(31.465)	137.000
Hibah & Dalang Utama Main Types Plans	30.700	13.303	-	-	44.003
Sub Jumlah Sub Total	**118.671.770**	**443.947**	**-**	**3.004.940**	**121.220.403**
Aset Hak Guna Right-of-Use Assets	130.211	40.317	(35.844)	-	137.750
Aset dalam Pembangunan Assets in Development	5.377.145	1.227.193	(87.949)	(2.666.519)	3.849.868
Aset Tetap Digunakan dalam Operasi Assets Used in Operations	1.000.100	-	-	(30.367)	1.704.830
Jumlah Biaya Perolehan Total Acquisition Cost	**126.084.224**	**1.710.261**	**(123.109)**	**-**	**127.870.830**
Akumulasi Penyusutan Accumulated Depreciation					
Bangunan Utama, Waduk dan Prasarana Buildings, Reservoirs, and Infrastructure	-	(98.877)	-	-	(98.877)
Instalasi dan Mesin Pembangkit Installations and Power Plants	-	(3.035.140)	-	(113)	(3.035.038)
Perlengkapan Transmisi dan Distribusi Transmissions and Distribution Equipment	-	(33.193)	-	-	(33.193)
Perlengkapan Perpustakan Data dan Telekomunikasi Telecommunications and Data Processing Equipment	-	(111)	-	-	(111)
Perlengkapan Umum Kantor Equipment	(70.033)	(33.193)	-	(3.501)	(107.731)
Kendaraan Bermotor Motor Vehicles	(31.001)	(3.183)	-	(13.113)	(33.137)
Hibah & Dalang Utama Main Types Plans	-	(11)	-	-	(11)
Sub Jumlah Sub Total	**(101.031)**	**(3.100.007)**	**-**	**(16.814)**	**(3.233.934)**

Uraian Description	1 Januari 2021 January 1, 2021	Penambahan Addition	Pengurangan Deduction	Reklasifikasi Reclassification	31 Desember 2021 December 31, 2021
Aset Hak Guna (Catatan 41) Right-of-use Assets (Note 41)	79.839	43.335	(21.434)	–	80.740
Aset Tidak Digunakan dalam Operasi Assets Not Used in Operations	754.671	59.456	(66)	16.854	831.915
Jumlah Akumulasi Penyusutan Total Accumulated Depreciation	**1.813.832**	**1.336.788**	**(12.464)**	**–**	**3.137.156**
Penyisihan Penurunan Nilai Provision for Impairment	(10.179)	–	–	–	(10.179)
Nilai Buku Book Value	**124.161.368**	**(1.326.196)**	**(99.613)**	**–**	**122.935.560**

Investasi Barang Modal pada Pembangkitan, Pengembangan Usaha dan Penugasan

Capital Goods Investment in Electric Power Generation, Business Development, and Assignment

Selain investasi pada barang modal di aset tetap, PLN NP juga melakukan investasi barang modal dalam wilayah usaha dipengaruhi dalam rangka untuk penguatan kinerja usaha investasi aset tersebut pada tahun 2022 adalah sebesar Rp1,37 triliun meningkat 7,09% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp1,28 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penambahan kapitalisasi penguatan pembangkit dan penambahan modal disetor di anak perusahaan.

Apart from capital goods investment in property, plant and equipment PLN NP also invests in capital goods where the majority are programmed in order to strengthen the core business performance of the existing assets and financing business development purposes. The investment in 2022 was Rp1.37 trillion, increased by 7.09% compared to 2021 of Rp1.28 trillion. The increase was mainly due to an increase in capitalization of power plant strengthening and additional paid-up capital in subsidiaries.

Tabel Investasi Barang Modal pada Pembangkitan, Pengembangan Usaha dan Penugasan

Table of Capital Goods Investment in Electric Power Generation, Business Development, and Assignment

Jenis dan Tujuan Investasi Types and Objectives of Investment	2022	2021
Penguatan Pembangkitan Electric Power Generation Strengthening		
Kapitalisasi Capitalization	134.303	132.316
Penguatan Energi Pembangkit Power Plant Strengthening	194.700	90.470
Penggantian Peralatan Utama Pembangkit Main Power Plant Equipment Replacement	154.732	79.189
Sistem dan Sarana Informatika Information Systems and Facilities	37.301	31.216
Jumlah Penguatan Pembangkitan Total Electric Power Generation Strengthening	**521.584**	**326.435**
Pengembangan Usaha Pembangkitan Electric Power Generation Business Development		
Pengembangan Usaha Pembangkitan Electric Power Generation Business Development	759.359	844.552
Jumlah Pengembangan Usaha Pembangkitan Total Electric Power Generation Business Development	**759.359**	**844.552**
Jumlah Investasi Barang Modal pada Penguatan dan Pengembangan Usaha Pembangkitan Total Capital Goods Investment in Electric Power Generation Strengthening and Business Development	**1.280.943**	**1.171.988**

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Perusahaan Tahun 2022 dan Proyeksi Tahun 2023

Comparison between Target and Realization of Company Performance in 2022 and Projection for 2023

Target, Realisasi dan Proyeksi Kinerja Keuangan

Target, Realization, and Projection of Financial Performance

Sebelum dimulainya tahun anggaran baru PLN RP menetapkan target terkait kinerja yang akan dicapai untuk tahun mendatang dalam RKAP. Hal ini sebagai bentuk evaluasi Perusahaan dengan melakukan perbandingan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun 2 komponen ini untuk mengukur kinerja Perusahaan yang telah dicapai yaitu berdasarkan kinerja keuangan dan kinerja operasional. Kinerja keuangan dijabarkan dalam pencapaian PLN RP pada target pendapatan dan laba Perusahaan sebagaimana pada Laporan Laba Rugi Komprehensif sebagai berikut:

Prior to the commencement of the new fiscal year, PLN RP set targets related to the performance that will be achieved for the coming year in the RKAP. This is a form of evaluation of the Company by comparing the realization with the pre-determined target. There are 2 core components to measure the Company's performance that has been achieved, namely based on financial performance and operational performance. Financial performance is described in PLN RP's achievement in the Company's revenue and profit targets as in the Comprehensive Income Statement as follows:

Tabel Perbandingan Target dengan Realisasi Pendapatan dan Laba Tahun 2022 serta Proyeksi Tahun 2023 (Rp juta)

Table of Comparison between Target and Realization of Revenue and Profit in 2022 and Projection for 2023 (Rp million)

Uraian Description	Target RKAP 2022 2022 RKAP Target	Realisasi 2022 2022 Realization	Pencapaian (%) Achievement (%)	Proyeksi 2023 Projection for 2023
Pendapatan Usaha/Revenue	33.230.330	37.200.330	82,56	38.540.174
Beban Usaha/Operating Expenses	25.001.063	33.571.827	87,01	33.540.039
Laba Usaha/Operating Income	3.541.726	4.030.775	110,66	3.000.135
Pos Keuangan dan Lain-lain/Bench Financial Items and Others - Net	(102.550)	(375.353)	360,83	(301.500)
Laba Sebelum Pajak/Profit before Tax	5.139.103	8.008.583	101,03	10.363.705
Beban/Manfaat Pajak Tax @/Expenses/Benefits	(1.202.473)	(1.413.013)	111,79	(1.846.525)
Laba Tahun Berjalan/Profit for the Year	**4.057.203**	**6.023.540**	**101,14**	**8.417.200**

Target, Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Usaha

Target, Realization, and Projection of Revenues

Pendapatan usaha yang dimaksud adalah hasil dari penjualan energi listrik untuk sektor Jawa Bali, Jasa Operasi & Pemeliharaan (O&M), Jasa Konstruksi, dan Lainnya.

The intended revenues are the proceeds from the electricity sales for Java Bali system, Operation & Maintenance (O&M) Services, Construction Services, and Others.

Tabel Perbandingan Target dengan Realisasi Pendapatan Usaha Tahun 2022 serta Proyeksi Tahun 2023 (Rp juta)
Table of Comparison between Target and Realization of Revenue in 2022 and Projection for 2023 (Rp million)

Uraian Description	Target RKAP 2022 2022 RKAP Target	Realisasi 2022 2022 Realization	Pencapaian (%) Achievement (%)	Proyeksi 2023 Projection for 2023
Pendapatan Usaha Revenue	28.595.600	37.202.300	93,54	38.148.134
Penjualan Tenaga Listrik Electricity Sales	33.172.000	35.600.470	107,32	36.130.153
Jasa O&M O&M Services	1.000.021	1.000.714	99,72	1.116.535
Jasa Konstruksi Construction Services	1.207.211	595.101	75,05	1.121.944
Jasa Usaha Lainnya Other Business Services	605.231	559.000	92,71	560.967

Penjualan Tenaga Listrik
Electricity Sales

Realisasi pendapatan dari penjualan tenaga listrik tahun 2022 adalah sebesar Rp35,60 triliun dengan pencapaian 107,32% dari target RKAP 2022. Pencapaian ini didukung oleh adanya pembahanan volume yang lebih tinggi di tahun 2022. Selanjutnya, di tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp30,12 triliun berdasarkan asumsi kenaikan produksi listrik dan kontribusi unit pembangkit PLN ke PLN NP.

The realization of revenue from electricity sales in 2022 was Rp35.60 trillion with an achievement of 107.32% of the 2022 RKAP target. This achievement was supported by a higher volume loading allocation in 2022. Furthermore, it is projected at Rp36.13 trillion in 2023 based on the assumption of an increase in electricity production and the transfer of PLN's power plant assets to PLN Nusantara Power.

Jasa O&M
O&M Services

Realisasi pendapatan dari jasa O&M tahun 2022 adalah sebesar Rp1,09 triliun dengan pencapaian 99,72% dari target RKAP 2022. Pencapaian ini didukung oleh telah terlaksananya beberapa kontrak O&M sesuai asumsi RKAP di tahun 2022. Selanjutnya, di tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp1,12 triliun berdasarkan asumsi pembangkit pembangkit yang sebelumnya merupakan kontrak jasa O&M dengan pihak PLN NP, asetnya ditransfer menjadi aset PLN NP.

The realization of revenue from O&M services in 2022 was Rp1.09 trillion with an achievement of 99.72% of the 2022 RKAP target. This achievement was supported by the implementation of several O&M contracts according to RKAP assumptions in 2022. Furthermore, it is projected at Rp1.12 trillion in 2023 based on the assumption that the power plants that were previously O&M Services contracts are handed by PLN NP, the assets then belong to PLN NP.

Jasa Konstruksi
Construction Services

Realisasi pendapatan dari jasa konstruksi tahun tahun 2022 adalah sebesar Rp595 miliar dengan pencapaian 75,05% dari target RKAP 2022. Tidak tercapainya pendapatan jasa konstruksi di tahun 2022 disebabkan oleh penundaan/penyesuaian pembelakan proyek-proyek investasi baru sejalan dengan investasi & pemeliharaan di PLN Grup. Selanjutnya, di tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp1,12 triliun berdasarkan asumsi proyek-proyek yang akan dijalankan pada tahun 2023.

The realization of revenue from construction services in 2022 was Rp595 billion with an achievement of 75.05% of the 2022 RKAP target. The non-achievement of construction services revenue in 2022 was caused by disproportional cancellation of investment projects due to prioritization of investment & maintenance in PLN Group. Furthermore, it is projected at Rp1.12 trillion in 2023 based on the assumption of projects that will be released in 2023.

Jasa Lainnya
Other Services

Realisasi pendapatan dari jasa Lainnya tahun 2022 adalah sebesar Rp17,9 triliun dengan pencapaian 105,29% dari target (RKAP 2022). Pencapaian ini didukung oleh faktor kembalinya Kontrak HEM, Overhaul Interkoneksi, dan PV Rooftop sesuai asumsi (RKAP), serta realisasi subsidiasi investasi & EPC yang sesuai kontrak pelaksanaan investasi & pemeliharaan di PLN Group. Selanjutnya, di tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp200 miliar berdasarkan asumsi pemulihan proyek usaha lainnya yang dapat dikembangkan oleh PLNNP.

The realization of revenue from Other services in 2022 was Rp17,9 trillion with an achievement of 105.30% of the 2022 RKAP target. This achievement was supported by the consideration of HEM, International Overhaul, and PV Rooftop Contracts according to RKAP assumptions, as well as the realization of investment & EPC work due to prioritization of investment & maintenance in PLN Group. Furthermore, it is projected at Rp200 billion in 2023 based on the assumption of engaging other business projects that can be developed by PLN Nusantara Power.

Target, Realisasi dan Proyeksi Laba
Target, Realization, and Projection of Profit

Realisasi Laba Tahun Berjalan tahun 2022 adalah sebesar Rp8,08 triliun dengan pencapaian 182,24% dari target (RKAP 2022). Pencapaian ini didukung oleh adanya peningkatan pendapatan di luar operasi dari entitas asosiasi dan Ventura Bersama. Selanjutnya, di tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp8,02 triliun berdasarkan asumsi masuknya aset-aset PLN yang disiklus menjadi aset PLNNP.

The realization of Profit for the Year in 2022 was Rp8,08 trillion with an achievement of 182.24% of the 2022 RKAP target. This achievement was supported by an increase in revenue outside of operations from associates and Joint Ventures. Furthermore, it is projected at Rp8,02 trillion in 2023 based on the assumption of the entry of PLN assets transformed to PLN Nusantara Power assets.

Target, Realisasi dan Proyeksi Posisi Keuangan
Target, Realization, and Projection of Financial Position

Kinerja posisi keuangan ditunjukkan pada pencapaian pada target jumlah aset, liabilitas dan ekuitas sebagaimana pada Laporan Posisi Keuangan.

Financial position performance is shown in the target achievement of total assets, liabilities and equity as in the Statement of Financial Position.

Target, Realisasi dan Proyeksi Aset
Target, Realization, and Projection of Assets

Realisasi Jumlah Aset tahun 2022 adalah sebesar Rp179,03 triliun dengan pencapaian 105,29% dari target (RKAP 2022). Pencapaian ini didukung oleh terbentuknya jumlah investasi pada Entitas Asosiasi/Ventura Bersama dan jumlah Kas dan Setara Kas sebagai akibat dari proses Penagihan (Collection Period) yang lebih baik. Selanjutnya, di tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp189,82 triliun berdasarkan asumsi pemindahan aset-aset pembangkit PLN yang dialihkan ke PLNNP.

The realization of Total Assets in 2022 was Rp179,03 trillion with an achievement of 105.29% of the 2022 RKAP target. This achievement was supported by an increase in the number of investments in Associates/Joint Ventures and total Cash and Cash Equivalents as a result of a better Collection Period. Furthermore, it is projected at Rp189,82 trillion in 2023 based on the assumption of additional PLN power plant assets transformed to PLN Nusantara Power.

Tabel Perbandingan Target dengan Realisasi Jumlah Aset Tahun 2022 serta Proyeksi Tahun 2023 (Rp juta)
Table of Comparison between Target and Realization of Total Assets in 2022 and Projection for 2023 (Rp million)

Uraian Description	Target RKAP 2022 2022 RKAP Target	Realisasi 2022 2022 Realization	Pencapaian (%) Achievement (%)	Proyeksi 2023 Projection for 2023
Aset Lancar Current Assets	31.102.369	32.384.133	107,37	40.456.267
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	140.343.656	141.720.631	98,71	302.176.896
Jumlah Aset Total Assets	**171.446.024**	**174.104.763**	**101,57**	**342.633.163**

Aset Lancar
Current Assets

Realisasi jumlah Aset Lancar tahun 2022 adalah sebesar Rp32,38 triliun dengan pencapaian 107,37% dari target RKAP 2022. Pencapaian ini didukung oleh peningkatan jumlah Kas dan Setara Kas sebagai akibat dari proses Penagihan Collection Period yang lebih baik. Selanjutnya, di tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp40,46 triliun berdasarkan asumsi penambahan aktiva pada aset dari PLN ke PLN NP.

The realization of Total Current Assets in 2022 was Rp32,38 trillion with an achievement of 107,37% of the 2022 RKAP target. This achievement was supported by an increase in total Cash and Cash Equivalents as a result of a better Collection Period. Further more, it is projected at Rp40,46 trillion in 2023 based on the assumption of additions due to the transfer of assets from PLN to PLN Nusantara Power.

Aset Tidak Lancar
Non Current Assets

Realisasi jumlah Aset Tidak Lancar tahun 2022 adalah sebesar Rp141,63 triliun dengan pencapaian 98,71% dari target RKAP 2022. Pencapaian ini didukung oleh penundaan/pengurangan pembelian proyek-proyek investasi. Selanjutnya, di tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp302,18 triliun berdasarkan asumsi penambahan aktiva pada aset dari PLN ke PLN NP.

The realization of total Non-Current Assets in 2022 was Rp141,63 trillion with an achievement of 98,71% of the 2022 RKAP target. This achievement was supported by postponement/reduced acquisition of investment projects. Furthermore, it is projected at Rp302,18 trillion in 2023 based on the assumption of additions due to the transfer of assets from PLN to PLN Nusantara Power.

Target, Realisasi dan Proyeksi Liabilitas
Target, Realization, and Projection of Liabilities

Realisasi Jumlah Liabilitas tahun 2022 adalah sebesar Rp112,57 triliun dengan pencapaian 100,00% dari target RKAP 2022. Pencapaian ini didukung oleh penyesuaian imbalan kerja jatuh tempo oleh aktuaris dan Penambahan Liabilitas Pajak Tangguhan yang menyesuaikan Perbedaan Temporer. Selanjutnya, di tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp218,93 triliun berdasarkan asumsi penambahan aktiva pada aset dari PLN ke PLN NP.

The realization of Total Liabilities in 2022 was Rp112,57 trillion with an achievement of 100,00% of the 2022 RKAP target. This achievement was supported by the adjustment of maturity employee benefits by actuaries and the Addition of Deferred Tax Liabilities that adjusted Temporary Differences. Furthermore, it is projected at Rp218,93 trillion in 2023 based on the assumption of additions due to the transfer of assets from PLN to PLN Nusantara Power.

Tabel Perbandingan Target dengan Realisasi Jumlah Aset Tahun 2022 serta Proyeksi Tahun 2023 (Rp juta)

Table of Comparison between Target and Realization of Total Liabilities and Equity in 2022 and Projection for 2023 (Rp in Million)

Uraian Description	Target RKAP 2022 2022 RKAP Target	Realisasi 2022 2022 Realization	Pencapaian (%) Achievement (%)	Proyeksi 2023 Projection for 2023
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	3.710.230	4.440.745	119,67	3.252.614
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	9.229.484	8.118.966	87,95	10.071.907
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	**12.939.712**	**12.557.891**	**109,81**	**28.504.521**
Jumlah Ekuitas Total Equity	**101.881.031**	**111.355.088**	**109,29**	**321.037.052**

Liabilitas Jangka Pendek
Current Liabilities

Realisasi Jumlah Liabilitas Jangka Pendek tahun 2022 adalah sebesar Rp4,44 triliun dengan pencapaian 119,67% dari target RKAP 2022. Pencapaian ini didukung oleh adanya peningkatan yang material dari pos pemeliharaan. Selanjutnya, di tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp12,02 triliun berdasarkan asumsi penambahan aktiva pasokan aset dari PLN ke PLN NP.

The realization of Total Current Liabilities in 2022 was Rp4.44 trillion with an achievement of 119.67% of the 2022 RKAP target. This achievement was supported by an increase in material and maintenance service payables. Furthermore, it is projected at Rp12.02 trillion in 2023 based on the assumption of additions due to the transfer of assets from PLN to PLN Nusantara Power.

Liabilitas Jangka Panjang
Non-Current Liabilities

Realisasi Jumlah Liabilitas Jangka Panjang tahun 2022 adalah sebesar Rp8,12 triliun dengan pencapaian 87,95% dari target RKAP 2022. Pencapaian ini didukung oleh pencatatan/pengukuran pembelian proyek-proyek investasi yang berjalan sesuai dengan penurunan pengakuan 24% kepada pemegang saham. Selanjutnya di tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp10,07 triliun berdasarkan asumsi penambahan aktiva pasokan aset dari PLN ke PLN NP.

The realization of Total Non-Current Liabilities in 2022 was Rp8.12 trillion with an achievement of 87.95% of the 2022 RKAP target. This achievement was supported by the postponement/reduced recognition of ongoing investment projects in line with the postponement of 24% recognition to shareholders. Furthermore, it is projected at Rp10.071 trillion in 2023 based on the assumption of additions due to the transfer of assets from PLN to PLN Nusantara Power.

Target, Realisasi dan Proyeksi Ekuitas
Target, Realization, and Projection of Equity

Realisasi Jumlah Ekuitas tahun 2022 adalah sebesar Rp181,36 triliun dengan pencapaian 109,29% dari target RKAP 2022. Pencapaian ini didukung oleh Laba Periode Berjalan di atas RKAP yang utamanya didukung kontribusi pendapatan laba investasi di anak perusahaan dan perusahaan asosiasi sebesar Rp52 triliun di tahun 2022. Selanjutnya, di tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp321,04 triliun berdasarkan asumsi penambahan ekuitas pasokan aset dari PLN ke PLN NP.

The realization of Total Equity in 2022 was Rp181.36 trillion with an achievement of 109.29% of the 2022 RKAP target. This achievement was supported by Profit for the Period above the RKAP, which was mainly supported by the contribution of investment profit acquisition in subsidiaries and associated companies of Rp52 trillion in 2022. Furthermore, it is projected at Rp321.04 trillion in 2023 based on the assumption of additions due to the transfer of assets from PLN to PLN Nusantara Power.

Target, Realisasi dan Proyeksi Struktur Modal

Target, Realization, and Projection of Capital Structure

Realisasi Struktur Modal tahun 2022 adalah sebesar Rp1.710,0 triliun dengan pencapaian 100,00% dari target RKAP 2022. Pencapaian ini didukung oleh pencapaian realisasi laba operasi yang mendukung pencapaian ekuitas tahun 2022.

The realization of Capital Structure in 2022 was Rp1,710.0 trillion with an achievement of 100.00% of the 2022 RKAP target. This achievement was supported by the achievement of operating profit realization which supported the achievement of equity in 2022.

Tabel Perbandingan Target dengan Realisasi Struktur Modal Tahun 2022 serta Proyeksi Tahun 2023 (Rp juta)

Table of Comparison between Target and Realization of Capital Structure in 2022 and Projection for 2023 (Rp million)

Uraian Description	Target RKAP 2022 2022 RKAP Target		Realisasi 2022 2022 Realization		Pencapaian Achievement (%)	Proyeksi 2023 Projection for 2023	
	Nominal (Rp juta) Nominal (Rp million)	Komposisi Composition (%)	Nominal (Rp juta) Nominal (Rp million)	Komposisi Composition (%)		Nominal (Rp juta) Nominal (Rp million)	Komposisi Composition (%)
Liabilitas	13.584.733	7,20	13.097.830	7,10	96,42	28.558.931	8,20
Ekuitas	161.881.003	92,80	162.350.088	92,90	100,29	311.559.858	91,80
Aset **Assets**	**174.465.736**	**100,00**	**174.912.918**	**100,00**	**100,00**	**340.032.333**	**100,00**

Target, Realisasi dan Proyeksi Aspek Operasional

Target, Realization, and Projection of Operational Aspect

Aspek operasional meliputi pada pencapaian faktor kinerja pembangkit meliputi, produksi tenaga listrik dan pemakaian listrik.

Operational aspect includes the achievement of performance factors of existing power plants, electricity production and electricity consumption.

Target, Realisasi dan Proyeksi Faktor Kinerja Pembangkit

Target, Realization, and Projection of Power Plant Performance Factors

Indikator kinerja pembangkit meliputi faktor ketersediaan, faktor penggunaan dan efisiensi pembangkit.

Power Plant performance indicator includes the factors of availability, utilization and efficiency of the power plant.

Tabel Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Pembangkit Tahun 2022 serta Proyeksi Tahun 2023

Table of Comparison between Target and Realization of Power Plant Performance in 2022 and Projection for 2023

Uraian Description	Target RKAP 2022 2022 RKAP Target	Realisasi 2022 2022 Realization	Pencapaian (%) Achievement (%)	Proyeksi 2023 Projection for 2023
EAF Pembangkit Existing (%) EAF of Existing Power Plants (%)	86,68	84,63	101,39	91,07
EAF PLTU PT EAF of Coal-fired Power Plant PT	85,28	84,41	98,85	88,61
EFOR Pembangkit Existing (%) EFOR of Existing Power Plants (%)	3,45	3,45	100,04	3,36
EFOR PLTU PT (%) EFOR of Coal-fired Power Plant PT (%)	3,68	3,23	87,23	3,69
Total Rasio Nett Pembangkit Existing (GOut/MW) Net Plant Heat Rate of Existing Power Plants (GOut/MW)	2.488,54	2.458,91	98,28	2.787,28
Total Rasio Nett PLTU PT (GOut/MW) Net Plant Heat Rate of PT Coal-fired (GOut/MW)	2.775,23	2.858,66	97,15	2.766,28

Equivalent Availability Factor (EAF)

Realisasi EAF Pembangkit Existing tahun 2022 adalah sebesar 84,12% dengan pencapaian 100,06% dari target RKAP 2022. Pencapaian ini didukung oleh penerapan manajemen aset terutama implementasi preventive maintenance, predictive maintenance, patrol check, LLM, dan House Keeping yang berimbang di samping itu melakukan overhaul unit sesuai dengan kaidah KOH (On time, on scope, on cost, on quality, on safety dan on zero) Selanjutnya, di tahun 2023 Capaian EAF diproyeksikan sebesar 91,07% berdasarkan asumsi total unit standby dan hybrid sebanding sejumlah 102 unit dengan Planned Outage Hours 406 jam selama setahun.

The realization of EAF of Existing Power Plants in 2022 was 84.12% with an achievement of 100.06% of the 2022 RKAP target. This achievement was supported by the application of asset management, especially the consistent implementation of preventive maintenance, predictive maintenance, patrol checks, LLM, and House Keeping, in addition to the execution of unit overhauls in accordance with the KOH rules (On time, on scope, on cost, on quality, on safety, and on zero). Furthermore, the EAF Achievement in 2023 is projected at 91.07% in 2023 based on the assumption of total standby units and outstanding totaling of 102 units with Planned Outage Hours of 406 hours during a year.

Realisasi EAF PLTU FTP-1 tahun 2022 adalah sebesar 84,31% dengan pencapaian 99,06% dari target RKAP 2022. Pencapaian ini dipengaruhi oleh adanya gangguan generator di PLTU Rembang dan PLTU Tanjung Awar-Awar. Selanjutnya, di tahun 2023 Capaian EAF Diproyeksikan lebih baik dipengaruhi sebesar 90,81% berdasarkan asumsi pelaksanaan overhaul sesuai jadwal.

The realization of EAF of FTP-1 CFPP in 2022 was 84.31% with an achievement of 99.06% of the 2022 RKAP target. This achievement was influenced by generator disruptions at Rembang CFPP and Tanjung Awar-Awar CFPP. Furthermore, the EAF Achievement of Java Bali Coal in 2023 is projected at 90.81% based on the assumption that the overhaul implementation is on schedule.

Equivalent Forced Outage Rate (EFOR)

Realisasi EFOR Pembangkit Existing tahun 2022 adalah sebesar 4,69% dengan pencapaian 168,84% dari target RKAP 2022. Pencapaian ini dipengaruhi oleh penerapan manajemen aset terutama implementasi preventive maintenance, predictive maintenance, patrol check, Fast Line Maintenance, house keeping yang berimbas dari pelaksanaan overhaul yang efektif sehingga dapat meminimalisir terjadinya breakdown atau gangguan selama interval overhaul. Selanjutnya, di tahun 2023 capaian EFOR diproyeksikan sebesar 2,38% berdasarkan asumsi total unit standby dan hybrid sebanding sejumlah 102 unit dengan Forced Outage Hours 171 jam selama setahun

The realization of EFOR of Existing Power Plants in 2022 was 3.05% with an achievement of 109.69% of the 2022 RKAP target. The achievement was influenced by the implementation of asset management, especially the consistent implementation of preventive maintenance, predictive maintenance, patrol checks, Fast Line Maintenance, house keeping, and effective overhaul implementation so as to minimize the occurrence of breakdowns or disruptions during the overhaul interval. Furthermore, the EFOR achievement in 2023 is projected at 2.38% based on the assumption of total standby units and outstanding totaling of 102 units with Forced Outage Hours of 171 hours during a year.

Realisasi EFOR PLTU FTP-1 tahun 2022 adalah sebesar 0,07% dengan pencapaian 107,69% dari target RKAP 2022. Selanjutnya, di tahun 2023 capaian EFOR Diproyeksikan sebesar 2,85% dengan asumsi tidak terjadi gangguan dengan downtime tidak lebih dari 65,94 jam.

The realization of EFOR of FTP-1 CFPP in 2022 was 0.14% with an achievement of 107.69% of the 2022 RKAP target. Furthermore, the EFOR achievement of the Java Bali Coal CFPP in 2023 is projected at 2.85% with the assumption that no disruptions occur with a downtime of no more than 65.94 hours.

Tara Kalor Netto
Net Plant Heat Rate

Realisasi Tara Kalor (Net Plant Heat Rate (NPHR)) Rata-Pembangkit Existing tahun 2022 adalah sebesar 2.163,20 kCal/kWh dengan pencapaian 101,30% dari target RKAP 2022. Selanjutnya, di tahun 2023 diproyeksikan sebesar 2.167,28 kCal/kWh berdasarkan asumsi Pemakaian Sendiri dan Susut Trafo sebesar 5,80% dan NCF 10,08%.

The realization of Net Plant Heat Rate (NPHR) of Existing Power Plants in 2022 was 2.152,00 kCal/kWh with an achievement of 101.30% of the 2022 RKAP target. Furthermore, in a projected at 2.167,28 kCal/kWh in 2023 based on the assumption of Self-Consumption and Transformer Loss at 5.80% and NCF of 10.08%.

Realisasi Sea Gate Helo PLTU TTP-1 tahun 2022 adalah sebesar 2.804,08 kCal/kWh dengan pencapaian 97,25% dari target RKAP 2022, hal ini dipengaruhi adanya start & stop pada penggunaan Selanzotrus. di tahun 2023 diproyeksikan sebesar 2.788,28 kCal/kWh.

The realization of Heat Rate Sea Gate Helo at TTP-1 PLTU in 2022 was 2,804.08 kCal/kWh with an achievement of 97.25% of the 2022 RKAP target, this was influenced by the start & stop. Furthermore, it is projected at 2,788.28 kCal/kWh in 2023.

Target, Realisasi dan Proyeksi Produksi dan Penjualan

Target, Realization and Projection of Production and Sales

Tabel Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Produksi dan Penjualan Tahun 2022 serta Proyeksi Tahun 2023

Table of Comparison between Target and Realization of Production and Sales Performance in 2022 and Projection for 2023

Uraian Description	Target RKAP 2022 2022 RKAP Target	Realisasi 2022 2022 Realization	Pencapaian (%) Achievement (%)	Proyeksi 2023 Projection for 2023
Efisiensi Produksi Tenaga Listrik (SFOC Electricity Production)	10.370.410	17.000.333	111,74	18.619.333
Efisiensi Penjualan Tenaga Listrik (SFOC Electricity Sale)	10.000.300	16.370.483	111,51	39.467.600
Pemanasan pemanen & Susut Trafo Percentage of consumption & Transformer Loss	3,69%	4,05%	95,71	5,80%

Realisasi Produksi Tenaga Listrik tahun 2022 adalah sebesar 17.661.333 MWh dengan pencapaian 111,69% dari target RKAP 2022. Pencapaian ini dipengaruhi oleh adanya pembebanan sistem yang lebih tinggi dari RKAP. Selanjutnya, di tahun 2023 diproyeksikan sebesar 18.815.282 MWh, berdasarkan asumsi RKAP tahun 2022 dikarenakan kebutuhan sistem dengan berkembangnya Daya Mampu Netto pada Holding Subholding dengan total 162 unit yaitu 35.887 MW dan ECT 30,88%.

The realization of Electric Power Production in 2022 was 17,661,333 MWh with an achievement of 111.69% of the 2022 RKAP target. This achievement was influenced by a higher system loading allocation than the RKAP. Furthermore, it is projected at 18,815,282 MWh in 2023, based on the assumption of the 2022 RKAP due to the system needs with the increase of Net Dependable Capacity after Holding/Subholding with a total of 162 units of 35,887 MW and ECT at 30.88%.

Realisasi Penjualan Tenaga Listrik tahun 2022 adalah sebesar 16.370.483 MWh dengan pencapaian 111,51% dari target RKAP 2022. Pencapaian ini dipengaruhi oleh tambahan aliran gas pada PLTGU Muara Tawar dan Muara Karang sehingga dapat membantu lebih banyak saat sistem pada puncak beban puncak, termasuk pembangkit PJBA beroperasi dengan pola baseh. Adapun rencana tahunan dan juga pada sistem 500 kV PLTU Kabupaten tersdapat beberapa unit yang mengalami gangguan sehingga adalah orang kewalah diaMeen ke UP Paiton. Selanjutnya, di tahun 2023 diproyeksikan sebesar 39.467.600 MWh, berdasarkan asumsi RKAP tahun 2023 karena adanya program holding subholding dimana PLN NP mendapatkan pengalihan aset pembangkitkan dari PLN ke PLN NP sehingga menambah jumlah Daya Mampu Netto pembangkitan.

The realization of Electricity Sales in 2022 was 16,370,483 MWh with an achievement of 111.51% of the 2022 RKAP target. This achievement was influenced by additional gas allocation at Muara Tawar and Muara Karang CCPPs so that it could help more when the system was in peak load period, thus the PPP operated with a base pattern above the annual plan and also in the 500 kV and CFPP system, there were several units that experienced disturbance so that the energy allocation was diverted to Paiton 9&. Furthermore, it is projected at 39,467,600 MWh in 2023, based on the assumption of the 2023 RKAP due to the subholding holding program where PLN NP obtained the transfer of electric power generation assets from PLN to PLN NP so as to increase the amount of Net Dependable Capacity of electric power generation.

Realisasi Pemakaian Sendiri dan Susut Trafo tahun 2022 adalah sebesar 4,02% dengan pencapaian 95,72% dari target RKAP 2022. Pencapaian ini dipengaruhi oleh optimasi pola operasi unit-unit pusaka dan optimasi Pemakaian Sendiri unit saat Reserve Shutdown. Selanjutnya, di tahun 2023 diproyeksikan sebesar 3,92%. Berdasarkan asumsi total NCF Unit PLTU Sebesar 56,89% dengan PSDF Unit PLTU Batubara 0,89% sedangkan NCF Unit Non PLTU Batubara 20,11% dengan PSDF Unit Non PLTU Batubara 2,16%.

The realization of Self-Consumption and Transformer Loss in 2022 was 4.02% with an achievement of 95.72% of the 2022 RKAP target. The achievement was influenced by the operating pattern optimization of pasbar units and the optimization of Self-Consumption units during Reserve Shutdown. Furthermore, it is projected at 3.92% in 2023, based on the assumption of total NCF of PLN (CFPP) Unit at 56.89% with PSDF of Coal (CFPP) Unit at 0.89%, while NCF of Non-Coal (CFPP Unit) at 20.11% with PSDF of Non-Coal (CFPP) Unit at 2.16%.

Target, Realisasi dan Proyeksi Produksi dan Pengelolaan Energi *Mix*

Target, Realization and Projection of Energy Mix Production and Management

Tabel Perbandingan Target dengan Realisasi Energi Mix Tahun 2022 serta Proyeksi Tahun 2023

Table of Comparison between Target and Realization of Energy Mix in 2022 and Projection for 2023

Uraian Description	Target RKAP 2022 2022 RKAP Target	Realisasi 2022 2022 Realization	Pencapaian (%) Achievement (%)	Proyeksi 2023 Projection for 2023
Data 1	2.250,89	2.187,84	136,80	3.075,70
Data 2	5.307,00	4.884,18	115,74	10.955,61
Data 3	8.443,83	8.880,04	181,58	10.013,60
Data 4	162,19	183,85	89,84	230,03
Data 5	40,41	183,84	354,78	408,47

Realisasi produksi pembangkit hidro mencapai 2.077,83 GWh atau 136,80% dari target RKAP tahun 2022 sebesar 2.250,89 GWh . Pencapaian ini dipengaruhi oleh kebutuhan sistem, penyerapan Inuem Dasar sehingga PLTA beroperasi lebih banyak dan optimasi Hidrologi pada PLTA Bendasi. Selanjutnya di tahun 2023 diproyeksikan sebesar 3.075,70 GWh, berdasarkan asumsi tambahkapasitas daya mampu pembangkit hidro pada Holding Subholding.

The realization of hydro power plant production reached 3,077.83 GWh or 136.80% of the 2022 RKAP target of 2,250.89 GWh. The achievement was influenced by system needs, the weight of the unit against so that HPP operated more, and hydrological optimization at the Bendasi HPP. Furthermore, it is projected at 3,075.70 GWh in 2023, based on the assumption of increasing the dependable capacity of hydro power plant after Subholding Holding.

Realisasi produksi pembangkit batubara mencapai 4.884,18 GWh atau 115,74% dari target RKAP tahun 2022 sebesar 5.887,00 GWh. Pencapaian ini dipengaruhi oleh kebutuhan sistem, implementasi unit switching dan re-firing. Selanjutnya di tahun 2023 diproyeksikan sebesar 10.955,61 GWh, berdasarkan asumsi tambahkapasitas daya mampu PLTU Batubara menjadi 5.855 MW pada Holding Subholding.

The realization of coal power plant production reached 4,884.18 GWh or 115.74% of the 2022 RKAP target of 5,887.00 GWh. The achievement was influenced by system needs, implementation of unit switching and re-firing. Furthermore, it is projected at 10,955.61 GWh in 2023, based on the assumption of increasing the dependable capacity of Coal (CFPP) to 5,855 MW after Subholding Holding.

Realisasi produksi pembangkit gas merupakan 3.085,84 GWh atau 101,10% dari target RKAP tahun 2021 sebesar 3.051,03 GWh. Pencapaian ini dipengaruhi oleh kebutuhan sistem, maka berdasarkannya PLTGU Blok 1 Muara Karang dan pola operasi yang efisien. Selanjutnya, di tahun 2022 diproyeksikan sebesar 2.513,31 GWh. Jumlahnya asumsi berdasarkannya kapasitas daya mampu Pembangkit Eks-merupakan 6.000 MW pada Holding Subholding.

The realization of gas power plant production reached 3,085.84 GWh or 101.10% of the 2021 RKAP target of 3,051.03 GWh. This achievement was influenced by system needs, the commencement of operation of Muara Karang Block 1 CCPP and efficient operating patterns. Furthermore, it is projected at 2,513.31 GWh in 2022, based on the assumption of increasing the dependable capacity of Gas Power Plant to 6,000 MW after Subholding Holding.

Realisasi pembangkit berbahan bakar minyak memproduksi 333,91 GWh dari target RKAP tahun 2021 sebesar 140,19 GWh. Pencapaian ini dipengaruhi oleh kebutuhan sistem dan pembangkit berbahan bakar minyak yang lebih efisien. Selanjutnya, di tahun 2022 diproyeksikan sebesar 238,80 GWh, berdasarkan asumsi bertambahnya kapasitas daya mampu Pembangkit berbahan bakar minyak menjadi 1.243 MW pada Holding Subholding.

The realization of oil-fired power plants produced 333.91 GWh of the 2021 RKAP target of 140.19 GWh. The achievement was influenced by system needs and more efficient oil-fired power plants. Furthermore, it is projected at 238.80 GWh in 2022, based on the assumption of increasing the dependable capacity of oil-fired Power Plant to 1,243 MW after Subholding Holding.

Realisasi produksi pembangkit biomassa mencapai 103,08 GWh atau 214,70% dari target RKAP tahun 2021 sebesar 48,03 GWh. Pencapaian ini dipengaruhi oleh optimalisasi implementasi co-firing pada unit pada Holding Subholding. Selanjutnya, di tahun 2022 diproyeksikan sebesar 108,67 GWh, berdasarkan asumsi bertambahnya implementasi co-firing unit pada Holding Subholding.

The realization of biomass power plant production reached 103.08 GWh or 214.70% of the 2021 RKAP target of 48.03 GWh. This achievement was influenced by the optimal implementation of co-firing in the power plant. Furthermore, it is projected at 108.67 GWh in 2022, based on the assumption of increasing the implementation of co-firing units after Subholding Holding.

Target, Realisasi dan Proyeksi Aspek Pemasaran

Target, Realization and Projection of Marketing Aspect

Terkait aspek pemasaran dapat dilihat dari pencapaian atas target penjualan tenaga listrik dan volume pangsa pasar.

The marketing aspect can be seen from the achievement of electricity sales target and market share coverage.

Tabel Perbandingan Target dengan Realisasi Aspek Pemasaran Tahun 2021 serta Proyeksi Tahun 2022

Table of Comparison between Target and Realization of Marketing Aspect in 2021 and Projection for 2022

Uraian Description	Target RKAP 2021 2021 RKAP Target	Realisasi 2021 2021 Realization	Pencapaian (%) Achievement (%)	Proyeksi 2022 Projection for 2022
Pangsa Pasar (%) Market Share (%)	7,47	7,73	103,50	17,34

Realisasi Pangsa Pasar tahun 2021 adalah sebesar 7,73% dengan pencapaian 103,50% dari target RKAP (Revisi) Tahunan) 2021. Pencapaian ini dipengaruhi oleh PLN Grantee yang mengalami periode jeda kasar lebih besar dari target tahunan, dan juga terdapat pemenuhan pasokan gas dari alokasi gas tahunan pada PLTGU Muara Tawar dan Muara Karang. Selanjutnya, di tahun 2022 diproyeksikan sebesar 17,34% berdasarkan asumsi adanya pembangkit baru yang COD dan juga rencana pembangkit.

The realization of Market Share in 2021 was 7.73% with an achievement of 103.50% of the 2021 RKAP (Annual Operating Plan) target. The achievement was influenced by the Grantee PLN which entered the unit pattern period longer than the annual target, and there was also an additional gas supply from the annual gas allocation at Muara Tawar and Muara Karang CCPPs. Furthermore, it is projected at 17.34% in 2022 based on the assumption of a new COD power plant and also power plant allocation.

Target, Realisasi dan Proyeksi Pengembangan SDM

Targets, Realization, and Projection of HR Development

Terkait dengan pengembangan SDM indikator yang digunakan adalah biaya pelatihan.

Regarding HR development, the indicator used is training costs.

Tabel Perbandingan Target dengan Realisasi Pengembangan SDM Tahun 2022 serta Proyeksi Tahun 2023
Table of Comparison between Target and Realization of HR Development in 2022 and Projection for 2023

Uraian Description	Target RKT 2022 2022 RKAP Target	Realisasi 2022 2022 Realization	Pencapaian (%) Achievement (%)	Proyeksi 2023 Projection for 2023
Biaya Pendidikan & Pelatihan (Rp triliun) Education & Training Costs (Rp trillion)	10.13	11.26	105.33	11.0

Biaya Pelatihan

Training Costs

Realisasi Biaya Pelatihan tahun 2022 adalah sebesar Rp11,26 triliun dengan pencapaian 105,33% dari target RKAP 2022. Pencapaian ini dipengaruhi oleh mulai diimplementasikannya kembali pelaksanaan pembelajaran dengan metode offline maupun kombinasi (online & offline) pada beberapa pembelajaran yang memerlukan praktik langsung dan sertifikasi sehingga ini juga meningkatkan biaya pelatihan dan perjalanan dinas. Selanjutnya di tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp11,0 triliun berdasarkan asumsi bertambahnya jumlah karyawan yang cukup signifikan dari penggabungan Holding Subholding.

The realization of Training Costs in 2022 was Rp11.26 trillion with an achievement of 105.33% of the 2022 RKAP target. This achievement was influenced by the re-implementation of learning with offline and blended (online & offline) methods in several learnings that require direct practice and certification thus increasing the costs of training and official travel. Furthermore, it is projected at Rp11.0 trillion in 2023 based on the assumption of a significant increase in the number of employees from the merger of the Subholding Holding.

Proyeksi Kebijakan Dividen

Dividend Policy Projection

Terkait proyeksi kebijakan dividen dipastikan mengacu pada Keputusan RUPS Ketentuan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Related to the projection of dividend policy, it is decided to refer to the GMS Resolutions based on the prevailing laws and regulations.

Kebijakan Dividen
Dividend Policy

Kebijakan Pembagian Dividen
Dividend Distribution Policy

Kebijakan Dividen PLN NP akan berdasarkan Anggaran Dasar PT PLN Nusantara Power Pasal 26 tentang Penggunaan Laba yaitu sebagai berikut:

1. Pembagian dividen diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
2. Dividen hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif;
3. Dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu;
4. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh Pemegang Saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut, yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan dengan syarat pengambilannya telah secara sah dan dengan membayar biaya administrasi yang ditetapkan Direksi;
5. Dividen yang telah disisihkan dalam cadangan khusus dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan;
6. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir apabila diminta oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh bagian dari saham yang telah dikeluarkan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip laba dan kemampuan keuangan Perseroan;
7. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

8. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan mendderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan;
9. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen interim.

PLN NP's Dividend Policy is regulated based on the Articles of Association of PT PLN Nusantara Power Article 26 on the Use of Profit, as follows:

1. Dividend distribution is decided by the General Meeting of Shareholders;
2. Dividends may only be distributed if the Company has a positive retained earnings;
3. Dividends that are not taken within 5 (five) years after being provided to be paid, are deposited in a reserve fund specifically designated for that purpose;
4. Dividends in the special reserve fund can be claimed by the entitled Shareholders by submitting proof of their rights to the dividends which can be received by the Board of Directors of the Company, on the condition that the withdraw is valid in a timely sum and by paying administrative costs determined by the Board of Directors;
5. Dividends that have been included in the special reserve and not taken within a period of 10 (ten) years will become the rights of the Company;
6. The Company may distribute interim dividends prior to the end of the Company's financial year if requested by Shareholders representing at least 1/10 (one-tenth) of the issued shares, by taking into account the projected profit and financial capabilities of the Company;
7. The distribution of interim dividends shall be determined based on the decision of the Board of Directors after obtaining the approval of the Board of Commissioners.

8. In the event that after the end of the financial year the Company suffers a loss, the interim dividends that have been distributed must be returned by the Shareholders to the Company;
9. The Board of Directors and Board of Commissioners are jointly and severally responsible for the Company's losses, in the event that the Shareholders are unable to return the interim dividends.

Pembagian Dividen
Dividend Distribution

Pembagian Dividen Tahun 2022
Dividend Distribution in 2022

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 20 Juni 2022, pemegang saham memberi kuasa kepada pemegang saham mayoritas untuk menetapkan laba bersih, cadangan umum dan tujuan serta dividen atas laba Perusahaan tahun 2021. Berdasarkan surat PLN tanggal 8 September 2022, pembagian dividen untuk tahun buku 2021 diputuskan sebesar Rp1,01 triliun atau Rp966,- (nilai penuh) per lembar saham.

Berdasarkan surat nomor 281115000 tanggal 26 Oktober 2022 perihal Tindak Lanjut Penelaahan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2021, disampaikan bahwa Laba Bersih Tahun Buku 2021 yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk adalah sebesar Rp5,01 triliun ditetapkan 100% dibagi sebagai dividen dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dividen untuk PT PLN (persero) telah dilakukan offset Dividen dengan Piutang Setoran Modal sebesar Rp1,01 triliun.
2. Dividen untuk pemegang saham minoritas sebesar Rp966,- dibayarkan secara tunai.

Based on the Minutes of the General Meeting of Shareholders dated June 20, 2022, the shareholders granted authority to the majority shareholder to determine the retained earnings, appropriation of general reserves and dividends of the Company's profit for 2021. Based on PLN's letter dated September 8, 2022, the dividend distribution for the 2021 financial year was determined at Rp1.01 trillion or Rp966 (full amount) per share.

Based on letter number 281115000 dated October 26, 2022 regarding Follow-up on the Determination of the Use of the Company's Net Profit for the 2021 Financial Year, it is submitted that the Net Profit for the 2021 Financial Year distributed to the owners of the parent entity was Rp5.01 trillion, 100% of which was determined to be distributed as dividends with the following provisions:

1. Dividends for PT PLN (Persero) have been offset with Electricity Penetration of Rp1.01 trillion.
2. Dividends for minority shareholders was Rp966, - paid in cash.

Pembagian Dividen Tahun 2021
Dividend Distribution in 2021

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 28 Juni 2021, pemegang saham memberi kuasa kepada pemegang saham mayoritas untuk menetapkan laba bersih, cadangan umum dan tujuan serta dividen atas laba Perusahaan tahun 2020. Berdasarkan surat PLN tanggal 30 Desember 2021, pembagian dividen untuk tahun buku 2020 diputuskan sebesar Rp7,98 triliun atau Rp1.277,- (nilai penuh) per lembar saham.

Pada tahun 2021 PLN SBF memberikan dividen berdasarkan surat nomor 230004000 tanggal 4 Januari 2022 perihal Tindak Lanjut Penelaahan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan untuk Tahun Buku 2020. Disampaikan bahwa Laba Bersih Tahun Buku 2020 yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk adalah sebesar Rp7,98 triliun ditetapkan 100% sebagai dividen dengan ketentuan pembagian sebagai berikut:

1. Dividen untuk PLN ditakukan melalui offset Dividen dengan Piutang Setoran Modal sebesar Rp7,98 triliun.
2. Dividen untuk pemegang saham minoritas sebesar Rp1.277,- dibayarkan secara tunai.

Based on the Minutes of the General Meeting of Shareholders dated June 28, 2021, the Shareholders granted authority to the majority shareholders to determine retained earnings, appropriation of general reserves and dividends for the Company's profit in 2020. Based on letter from PLN dated December 30, 2021, dividends distribution for the 2020 fiscal year was determined at Rp7.98 trillion or Rp1,277,- (full amount) per share.

In 2021 PLN SBF distributed dividend based on Letter Number 230004000 dated January 4, 2022 concerning Follow-up of Determining the Use of the Company's Net Income for the 2020 Fiscal Year. It was announced that the 2020 Fiscal Year Net Income distributed to owners of the parent entity was Rp7.98 trillion, determined 100% as dividends with the following distribution provisions:

1. Dividend for PLN was executed through offset Dividend with Electricity Penetration of Rp7.98 trillion.
2. Dividend for the minority shareholders was Rp1,277,- paid in cash.

Tabel Pembagian Dividen
Table of Dividend Distribution

Uraian Description	2020	2021	2022
Laba Bersih Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk (Rp miliar) Net Income Attributable to Owners of the Parent (Rp billion)	8.849	7.901	9.859
Dividen yang Dibagikan (Rp miliar) Distributed Dividend (Rp billion)	6.645	7.901	9.859
Dividen per Lembar (Rp) Dividend per Share (Rp)	1.100	1.277	960
Dividend Pay Out Ratio (%)	100	100	100
Tanggal Pengumuman Dividen Date of Dividend Announcement	13 Oktober 2020 October 13, 2020	16 Desember 2021 December 16, 2021	8 September 2022 September 8, 2022
Tanggal Pembayaran Dividen Date of Dividend Payment	5 November 2020 November 5, 2020	3 Januari 2022 January 3, 2022	13 Oktober 2022 October 13, 2022

Kontribusi kepada Negara
Contribution to the State

Pajak bukan hanya sebagai sumber penerimaan dalam APBN semata melainkan perannya penting dalam upaya menjaga pertumbuhan dan pemulihan ekonomi. PLN NP sebagai Perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN yaitu PT PLN (Persero) ikut berperan sebagai agent of value creator dan agent of development yang dilaksanakan melalui pembayaran kontribusi keuangan ke Negara. Oleh karena itu, kehadiran PLN NP kepada Negara tercakup dalam kepatuhan pemenuhan kewajiban Perusahaan sebagai Wajib Pajak melalui pembayaran pajak serta dividen. Contoh sebesar pajak tahun 2022 sebesar Rp5,23 Triliun, meningkat 9,18% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp4,32 Triliun. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh nilai jumlah pembelian material dan penggunaan jasa dari pihak ketiga.

Taxes are not only the revenue source in the State Budget, but also take important role in the efforts to maintain the economy and economic recovery. PLN NP as a Company who is shares are mostly owned by PLN (Persero) acts as an agent of value creator and agent of development that is responsible for its duty to contribute profits to the State. Therefore, PLN NP's commitment to the State is realized in compliance with the fulfillment of the Company's obligations as a Taxpayer through tax and dividend payments. The amount of tax payment in 2022 was Rp5,23 Trillion, increased by 9.18% compared to 2021 of Rp4,32 Trillion. The increase was mainly influenced by the amount of material purchases and the use of services from third parties.

Sebagai Pemotong Pajak, Perusahaan secara aktif berperan serta dalam melaksanakan pemotongan, penyetoran dan pelaporan atas pajak-pajak seperti PPh Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi dan sewa bangunan; PPh Pasal 23 atas penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi dan PPh Pasal 23 atas penghasilan yang diterima wajib pajak badan.

As a Tax Withholder, the Company actively participates in withholding, depositing and reporting on taxes such as Income Tax Article 4 paragraph 2 on construction services and building leases; Income Tax Article 23 on income received by individual taxpayers and Income Tax Article 23 on income received by corporate taxpayers.

Tabel Setoran Pajak (Rp Miliar)

Table of Tax Payment (Rp Billion)

Uraian	2020	2021	2022	Peningkatan/Penurunan	
				%	Nominal
PPh Pasal 21 Income Tax Article 21	32,21	177,73	148,59	(16,43)	(34,27)
PPh Pasal 23 Income Tax Article 23	93,63	98,29	90,87	(4,60)	(2,80)
PPh Pasal 4 ayat 2 Income Tax Article 4 paragraph 2	30,16	21,98	12,90	(41,29)	(9,82)
PPh Pasal 25 Income Tax Article 25	0,10	0,58	0,00030263	(99,95)	(0,58000)
PPh Pasal 29 Income Tax Article 29	93,63	23,08	79,62	71,43	13,95
PPh Pasal 26 Income Tax Article 26	2,582	8,063	3,932	(71,43)	(4,05)
PBB Land and Building Tax	8,51	32,66	25,05	30,30	3,04
PPN Pajak Masukan Input VAT	404,11	795,13	325,41	18,83	130,31
Jumlah Setoran Pajak Total Tax Payment	**859,55**	**1.110,00**	**1.220,20**	**0,18**	**101,20**

Grafik Setoran Pajak (Rp miliar)

Chart of Tax Payment (Rp billion)

Pajak yang dibayarkan oleh atau lain sampai dengan akhir tahun 2022 sebesar Rp140,31 miliar menurun 38,77% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp193,74 miliar yang terdiri dari:

Taxes collected by other parties until the end of 2022 were Rp140.31 billion, decreased by 38.77% compared to 2021 of Rp193.74 billion, consisting of:

Tabel Penerimaan Pajak yang Dipungut oleh Pihak Lain (Rp miliar)
Table of Tax Revenues Collected by Other Parties (Rp billion)

Uraian / Description	2020	2021	2022	Peningkatan/Penurunan / Increase/Decrease	
				%	Nominal
PPh Pasal 23 / Income Tax Article 23	198.31	203.34	126.03	(37.99)	(75.30)
PPh Pasal 21 / Income Tax Article 21	34.18	48.03	37.14	(4.26)	(1.52)
Jumlah Pungutan Pajak Tidak Tunai / Total Collected	**282.83**	**245.74**	**145.55**	**(33.77)**	**(94.48)**

Selain pembayaran pajak kepada Negara, adapun kontribusi lain PLN N.P. terhadap Negara secara tidak langsung melalui penyaluran PMN sebu PLN N.P. telah menyumbang dividen kepada PT PLN (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada tahun 2022. Pembahasan mengenai pembagian dividen telah dijelaskan di sub-bab sebelumnya pada bagian Kebijakan Dividen.

In addition to tax payments to the State, another indirect contribution of PLN N.P. to the State is through an increase in the State Budget namely PLN N.P has contributed dividends to PT PLN (Persero), which is a State-Owned Enterprise (SOE) in 2022. The discussion regarding dividend distribution has been explained in the previous sub-chapter, namely the Dividend Policy section.

Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan Manajemen

Employee and Management Stock Option Program

Sampai dengan 31 Desember 2022, PLN N.P. tidak memiliki program kepemilikan saham oleh karyawan atau Employee Stock Option Program (ESOP) dan kepemilikan saham oleh manajemen atau Management Stock Option Program (MSOP), sehingga tidak ada informasi terkait jumlah saham [illegible] dan sebagainya, jangka waktu, persyaratan kelayakan (apakah manajemen yang berhak serta karyawannya.

As of December 31, 2022, PLN N.P. had no Employee Stock Option Program (ESOP) and Management Stock Option Program (MSOP). Therefore, there is no information related to the number of [illegible] shares and its conditions, time period, requirements for eligible employees and/or management as well as the exercise price.

Realisasi Dana Penawaran Umum

Realization of Public Offering Proceeds

Sampai dengan 31 Desember 2022, status PLN N.P. tidak merupakan [illegible] Company dan belum melakukan penawaran umum, sehingga tidak ada informasi mengenai total perolehan dana, rencana penggunaan dana, realisasi penggunaan dana, sisa dana, masa tenggat penyelesaian (if any) atau perubahan penggunaan dana.

As of December 31, 2022, PLN N.P. status was not a Listed Company and had not conducted a public offering, so there is no information regarding the total funds obtained, the planned use of funds, details of the use of funds, the balance of funds, in the date of the GMS approval of the changes in the use of funds.

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi/Berelasi

Information on Material Transactions Containing Conflict of Interest and/or Transactions with Affiliated/Related Parties

Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan

Material Transaction Containing Conflict of Interest

Sampai dengan 31 Desember 2021, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

As of December 31, 2021, there were no transactions containing conflicts of interest.

Transaksi dengan Pihak Afiliasi/Berelasi

Transactions with Affiliated/Related Parties

Pihak-Pihak Berelasi

Related Parties

Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sesuai yang didefinisikan oleh PSAK No. 7, Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi sebagai berikut:

a. Orang atau anggota keluarga terdekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   ii. Memiliki pengaruh signifikan atas pelapor atau entitas pelapor; atau
   iii. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain).
   ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
   iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
   iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.

The Group conducts transactions with related parties as defined by PSAK No. 7, Related Party Disclosures, as follows:

a. A person or their close family member is related to the reporting entity if that person:
   i. Has control or joint control over the reporting entity;
   ii. Has significant influence over the reporter or the reporting entity; or
   iii. Is a key management personnel of the reporting entity or a parent of the reporting entity.

b. An entity is related to the reporting entity if it fulfills any of the following matters:
   i. The entity and the reporting entity are members of the same group (meaning that the parent, subsidiary and fellow subsidiary are related to each other).
   ii. One entity is an associate or joint venture of another entity (or an associate or joint venture that is a member of a group of which the other entity is a member).
   iii. Both entities are joint ventures of the same third party.
   iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.

c. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas pemberi juga berelasi dengan entitas pelapor.

e. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).

m. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

c. The entity is a post-employment benefit plan for employee benefits of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is the entity that sponsors the plan, the sponsoring entity is also related to the reporting entity.

e. Entities controlled or jointly controlled by a person identified in (a).

m. The person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or the entity's key management personnel (or a parent of the entity).

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh Pemerintah. Pemerintah mengacu kepada instansi Pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

Government-related entities are entities that are controlled, jointly controlled, or influenced by the Government. Government refers to Government agencies and similar agencies whether local, national or international.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan yang merupakan pemegang saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai kuasa pemegang saham.

Government-related entities over the entities controlled or significantly influenced by the Ministry of Finance, which is the entity's shareholder, or entities controlled by the Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of State-Owned Enterprises (SOEs) as the shareholder's proxy.

Sifat Hubungan Pihak Berelasi

Nature of Related Party Relationship

Dalam kegiatan usahanya, PLN NP melakukan transaksi tertentu dengan pihak hubungan berelasi. Berikut adalah penjelasan mengenai sifat hubungan tersebut yang dimiliki oleh PLN NP:

a. Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia yang merupakan pemegang saham Perusahaan dan PLN(P).

b. Perusahaan mempunyai hubungan berelasi dengan GUPM karena yang dimiliki bersama oleh Kementerian Keuangan.

c. Grup mempunyai pengaruh signifikan atas investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama.

d. Dewan Komisaris dan Direksi merupakan personil manajemen kunci Grup.

In its business activities, PLN NP conducts certain transactions with related parties. The following is an explanation regarding the nature of the related relationships owned by PLN NP:

a. The Government in this case is the Minister of Finance of the Republic of Indonesia who is a shareholder of the Company and PLN (P), respectively.

b. The Company has a related relationship with other SOEs jointly owned by the Ministry of Finance.

c. The Group has significant influence over investments in associates or joint ventures.

d. The Board of Commissioners and Board of Directors are the key management personnel of the Group.

Berikut ini adalah daftar pihak berelasi yang memiliki transaksi dengan Perusahaan:

The following is a list of related parties that have transactions with the Company:

No.	Entitas Entity name	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Sifat Transaksi Nature of Transaction
1	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan rekening bank dan deposito berjangka Placement of bank in banks and time deposits
2	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan rekening bank dan deposito berjangka Placement of bank in banks and time deposits
3	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan rekening bank dan deposito berjangka Placement of bank in banks and time deposits
4	PT Bank Syariah Indonesia (BSI)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan rekening bank Placement of bank in banks
5	PT Pertamina (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian bahan bakar dan minyak pelumas Purchase of fuels and lubricants
6	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian bahan bakar gas Purchase of gas fuel
7	PT Waskita Karya	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian bahan bakar gas Purchase of gas fuel
8	PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pekerjaan elektrik, konstruksi pengawasan (sebelum) Engineering services, survey and site measurement
9	PT Nusantara Infrastructure	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Asuransi Industri dan Harta Kemasangan, dan pekerjaan konstruksi Insurance services for installation and power plants and transmissions equipment
10	Perum Jasa Tirta	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian air Purchase of water
11	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Entitas Induk Pengendali Controlling parent entity	Transaksi penjualan tenaga listrik Sales of electricity
12	Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero)	Pemegang saham minoritas Minority shareholder	Pengalihan modal Paid in capital
13	PT Indonesia Power	Entitas sepengendali Entity under common control	Transaksi penjualan barang dan jasa Sales of goods and services
14	PT PLN Batam	Entitas sepengendali Entity under common control	Transaksi penjualan barang dan jasa Sales of goods and services
15	PT PLN Batubara	Entitas sepengendali Entity under common control	Transaksi pembelian bahan bakar Purchase of fuels
16	PT Haleyora Power	Entitas sepengendali Entity under common control	Transaksi penjualan barang dan jasa Purchase of goods and services

No.	Entitas Description	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Sifat Transaksi Nature of Transaction
17	PT Indonesia Comnets Plus	Entitas sepengendali Entity under common control	Transaksi pembelian barang dan jasa Purchase of goods and services
18	PT PLN E-Commerce	Entitas sepengendali Entity under common control	Transaksi pembelian barang dan jasa Purchase of goods and services
19	PT PLN Batam	Entitas sepengendali Entity under common control	Transaksi pembelian barang dan jasa Purchase of goods and services
20	PT Energy Management Indonesia (Persero)	Entitas sepengendali Entity under common control	Transaksi pembelian barang dan jasa Purchase of goods and services
21	PT Haridau Cipta Tenaga Nusantara	Entitas sepengendali Entity under common control	Transaksi pembelian barang dan jasa Purchase of goods and services
22	PT Pelayaran Bahtera Adiguna	Entitas sepengendali Entity under common control	Jasa pengangkutan batubara Coal transport services
23	PT Asuransi Bintang Lloyd Nasional	Pihak berelasi lainnya Other related parties	Asuransi bangunan dan perlengkapan kantor Insurance for buildings and general equipment
24	PT Sumber Segara Primadaya	Entitas asosiasi Associate	Jasa operasi dan pemeliharaan Operation and maintenance services
25	PT Rekind Daya Mamuju	Entitas asosiasi Associate	Transaksi jasa proyek Project services
26	PT Sarana Daya Mandiri Nusantara	Ventura bersama Joint venture	Jasa operasi dan pemeliharaan Operation and maintenance services
27	PT Dian Pertiwi Agung Energi	Ventura bersama Joint venture	Jasa operasi dan pemeliharaan Operation and maintenance services
28	PT Energi Listrik Nusantara (dahulu PT Energi Listrik Batam)	Ventura bersama Joint venture	Pinjaman kepada ventura bersama Loans to joint ventures
29	PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi Solar Energi	Ventura bersama Joint venture	Pinjaman kepada ventura bersama Loans to joint ventures
30	PT Nusa Konstruksi Enjiniring	Ventura bersama Joint venture	Pinjaman jangka pendek Short term loans
31	PT Energi Pembangkitan Jawa Bali	Ventura bersama Joint venture	Jasa operasi dan pemeliharaan Operation and maintenance services
32	PT Geo Dipa Energi (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Jasa pemeliharaan dan operasional Operation and maintenance services
33	PT Pupuk Indonesia Energi	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Jasa pemeliharaan dan operasional Operation and maintenance services
34	PT Industri Kereta (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi jasa konstruksi Construction services
35	Dana pensiun PLN PLN pension fund	Pihak berelasi lainnya Other related parties	Pengelolaan dana pensiun Pension fund manager
36	Personil manajemen kunci Key management personnel	Komisaris, Direksi dan Kepala Divisi Commissioners, Directors and Division Heads	Gaji/imbalan kompensasi Salaries and allowances

Kewajaran Transaksi
Transaction Fairness

Seluruh transaksi dengan pihak berelasi telah sesuai dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati kedua belah pihak, sehingga Perseroan menganggap bahwa semua transaksi telah dalam batas wajar sesuai dengan PSAK Nomor 7 tentang Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi. Hal ini mengindikasikan bahwa Perusahaan telah melakukan transaksi dengan pihak yang berelasi secara wajar. Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan yang relevan.

All transactions with related parties have been in accordance with the policies and terms agreed by both parties as the Company considers that all transactions are still within reasonable limits in accordance with PSAK Number 7 concerning Related Party Disclosures. This indicates that the Company has fairly conducted transactions with related parties. All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant Notes.

Alasan Dilakukannya Transaksi
Reason for Transaction

Transaksi afiliasi dilakukan berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan profesional dengan tujuan menguntungkan kedua belah pihak (different related party transaction). Transaksi pihak berelasi menjadi afiliasi jika menguntungkan pemegang saham pengendali, manajer pemegang saham non pengendali.

Affiliated transactions are conducted based on the principles of mutual need and professionalism with the aim of benefiting both parties (efficient related party transactions). Related party transactions are affiliated if they benefit both controlling shareholders and non-controlling shareholders.

Nilai Transaksi dengan Pihak Berelasi
Transaction Value with Related Party

Berikut adalah nilai dan transaksi dengan pihak berelasi tahun 2021 dan 2020 persentase yang disajikan di tabel berikut merupakan (persentase terhadap/jumlah aset/liabilitas/pendapatan/ lainnya yang bersangkutan)

The following are balances and transactions with related parties in 2021 and 2020 the percentages described in the following table are percentages for the total assets/liabilities/income/ expenses)

Tabel Nilai Transaksi dengan Pihak Berelasi (Rp juta)
Table of transaction value with Related Parties (Rp million)

Jenis Transaksi Type of Transaction	Pihak Yang Bertransaksi Transacting Party	2021		2020	
		Rp juta Rp million	%	Rp juta Rp million	%
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	BNI	2.560.716	34,38	4.860.548	3,04
	Bank Mandiri	2.505.477	33,64	1.790.959	4,94
	BRI	2.088.621	28,17	1.143.835	0,68
	BSI	1	0,00	19.883	0,01
	Sub Jumlah Sub Total	**7.354.421**	**98,20**	**8.805.625**	**5,80**
Aset Tidak Lancar Lain-lain Other Non-Current Assets	BRI	-	-	-	-
	Sub Jumlah Sub Total	-	-	-	-

Jenis Transaksi Type of Transaction	Pihak Yang Bertransaksi Transacting Party	2021		2022	
		Rp Juta Rp million	%	Rp Juta Rp million	%
Deposito Berjangka Time Deposits	BRI	160.000	69,63	207.421	0,27
	BNI	30.000	13,04	31.402	0,03
	Bank Mandiri	197	0,09	372.910	0,50
	Sub Jumlah Sub Total	**190.183**	**100,00**	**400.288**	**0,20**
Rekening Bank dan Deposito Berjangka dibatasi penggunaannya Restricted Cash in Bank and Time Deposits	BRI	160.792	77,65	161.314	0,19
	BNI	977	0,35	1.137	0,00
	Bank Mandiri	-	-	111.301	0,04
	Sub Jumlah Sub Total	**181.369**	**79,22**	**284.713**	**0,27**
Piutang Usaha Trade Receivables	PLN	11.780.189	68,29	20.324.938	11,03
	BPI	80.000	0,46	37.171	0,01
	JP	28.884	0,13	28.032	0,05
	JEPA	23.751	0,11	23.660	0,01
	Lain-lain (Rincian)	9.736	0,05	9.371	0,00
	Sub Jumlah Sub Total	**11.908.127**	**69,03**	**20.475.373**	**11,70**
Piutang kepada pihak berelasi Receivables from joint venture	PT Sarulla Operasi PR	300.403	116,54	153.434	0,47
	PHSE	9.611	1,39	10.608	0,01
	Sub Jumlah Sub Total	**310.307**	**117,93**	**223.052**	**0,47**
Utang Usaha Trade Payables	PT Perkasa (Persero)	223.253	35,56	31.405	0,10
	PLSEE	207.253	9,44	20.362	0,26
	Pihak lain Title	187.151	3,13	207.302	1,00
	PT Nusantara Power	155.741	4,76	-	-
	Hanwha Korya	71.961	2,16	207.100	1,00
	PLN	6.883	0,21	10.191	0,06
	Sub Jumlah Sub Total	**1.541.380**	**47,37**	**473.000**	**0,76**
Utang Lain-lain Other Payables	PLN	10.003	2,84	200.000	1.27.000
	PT Indonesia Comnet Plus	14.573	2,25	3.123	0,01
	PT Indonesia Power	3.300	0,00	3.313	0,01
	PT Indonesia Power	1.961	0,01	333	0,01

Jenis Transaksi Type of Transaction	Pihak Yang Bertransaksi Transacting Party	2022		2023	
		Rp juta Rp million	%	Rp juta Rp million	%
	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]
	Sub jumlah Sub Total	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Sub jumlah Sub Total	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Sub jumlah Sub Total	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Sub jumlah Sub Total	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Sub jumlah Sub Total	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Sub jumlah Sub Total	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**

[illegible]

a. Pinjaman kepada Pemegang Saham

Pada tanggal 20 Maret 2020, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman dengan PLN sebesar AS$1.000.000.000 dengan tingkat bunga tahunan LIBOR+1,85% masa bulan dengan margin 0,85%. Pinjaman ini digunakan untuk mendanai proyek add-on PLTGU Muara Tawar Blok 1 - 3 dan 5. Jangka waktu pinjaman efektif sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan akan berakhir pada tanggal 9 Mei 2032.

Saldo pinjaman ini pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar masing-masing Rp1.067 triliun (setara dengan AS$171.164.543) dan Rp1.47 triliun (setara dengan AS$100.831.002), dengan porsi jangka pendek masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp190.01 miliar dan Rp133.08 miliar.

b. Kompensasi Manajemen Kunci

Jumlah kompensasi Dewan Komisaris Perusahaan untuk tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp13.07 miliar dan Rp10.14 miliar. Jumlah kompensasi Direksi Perusahaan untuk tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp9.801 miliar dan Rp9.05 miliar. Selain kompensasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan memberikan imbalan kerja jangka pendek.

a. Loan to the Shareholders

On March 20, 2020, the Company signed a loan agreement with PLN amounted to US$1.000.000.000 with an annual interest rate of six-month LIBOR+1,85% with a margin of 0,85%. The loan is used to fund the add-on project of Muara Tawar Block 1, 2 and 3 GTPP. The term of this agreement is effective since the signing of this agreement and will expire on May 9, 2032.

The balance of these loans as of December 31, 2022 and 2021 was Rp1.067 trillion (equivalent to US$171.164.543) and Rp1.47 trillion (equivalent to US$100.831.002), respectively, with the short-term portion as of December 31, 2022 and 2021 of Rp190.01 million and Rp133.08 billion, respectively.

b. Compensation for the Key Management

Total compensation of the Company's Board of Commissioners for 2022 and 2021 was Rp13.07 billion and Rp10.14 billion, respectively. Total compensation of the Company's Board of Directors for 2022 and 2021 was Rp9.801 billion and Rp9.05 billion, respectively. All compensation to the Company's Board of Commissioners and Board of Directors are short-term employee benefits.

Kebijakan Perusahaan terkait Mekanisme Review atas Transaksi

Company Policy Related to Review Mechanism of Transaction

Mekanisme review atas transaksi dengan pihak berelasi melalui proses audit baik yang dilakukan oleh auditor internal maupun auditor eksternal. Sebagai upaya untuk memastikan tingkat kewajaran transaksi dan kesesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, laporan transaksi afiliasi di atas telah diaudit oleh Auditor.

Dewan Komisaris dan Komite Audit berperan dalam memberikan arahan dan masukan kepada Direksi agar transaksi dengan pihak berelasi dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip kewajaran yang sejar (arms-length principle). Direksi memastikan seluruh transaksi dengan pihak berelasi di sepanjang tahun 2022, telah melalui prosedur yang memadai dan telah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum dan memenuhi prinsip transaksi yang sejar (arm's-length principle). Informasi lebih rinci terkait transaksi pihak berelasi telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan yang terlampir dalam Laporan Tahunan ini.

The review mechanism of transactions with related parties is through an audit process conducted by both internal and external auditors. As an effort to ensure the level of fairness of transactions and conformity with prevailing standards generally applied in Indonesia, the report of affiliated transactions above have been audited by the Auditor.

The Board of Commissioners and the Audit Committee provides directions and inputs to the Board of Directors to ensure that the transactions with related parties are performed according to the arm's length principle. The Board of Directors makes sure that all transactions with related parties throughout 2022 have used proper procedures and been performed according to generally applied business practices while meeting the arm's length principle. Detailed information on transactions with related parties is available in the Company's Consolidated Financial Statements are attached to this Annual Report.

Informasi Material Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi, dan Restrukturisasi Utang/Modal

Material Information on Investment, Expansion, Divestment, Acquisition, and Debt/Capital Restructuring

Investasi

Investment

Pada tahun 2021, PLN NP melakukan tiga bentuk investasi yaitu investasi pada kinerja unit dan pengembangan usaha, investasi pada entitas asosiasi/entitas bersama, dan investasi penyertaan saham pada entitas anak. Jenis mata uang yang digunakan adalah dalam mata uang Rupiah. Sumber dana investasi merupakan [redacted] dalam Internal pencadanan/tunggakan RKAP tahun 2021.

In 2021, PLN NP invested in 3 sectors, including investment in unit performance and business development, investment in associates/joint ventures, and share investment in subsidiaries. The type of currency used is in Rupiah. The source of investment funds is the allocation of the Company's Internal Fund/RKAP Budget in 2021.

Investasi pada Penguatan Pembangkitan dan Pengembangan Usaha

Investment in Strengthening Electric Power Generator and Business Development

Investasi penguatan pembangkit pada tahun 2021 adalah sebesar Rp20,24 miliar atau lebih tinggi 1,26% dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar Rp21,30 miliar. Jika dibandingkan dengan RKAP 2021, persentasenya sebesar 83,84%. Investasi untuk program pengembangan usaha pada tahun 2021 adalah sebesar Rp844,03 miliar atau lebih tinggi 11,28% jika dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar Rp758,53 miliar. Jika dibandingkan dengan RKAP 2021, persentasenya sebesar 92,35%. Keterlambatan ini disebabkan terutama karena mundurnya COD Unit 1 Muara Tawar yang menyebabkan mundurnya disburse dari target RKAP, mundurnya penyelesaian eksekusi program FBT dengan skema kemitraan dan non kemitraan yang belum mendapatkan persetujuan dari pemegang saham serta terdapat beberapa rekomendasi scoring untuk kriteria investasi pengusaha pembangkit.

Investment in power plant strengthening in 2021 was Rp20,24 billion or 1.26% higher if compared to the realization in 2020 of Rp21,30 billion. If compared to the 2021 RKAP, the achievement was 83.84%. Investment for business development programs in 2021 was Rp844.03 billion or 11.28% higher if compared to the realization in 2020 of Rp758.53 billion. If compared to the 2021 RKAP, the achievement was 92.35%. This non-achievement was mainly due to the delay in the COD of Muara Tawar Unit 1 which caused a delay in disbursement from the RKAP target, late absorption of the FBT program with partnership and non-partnership schemes that have not yet received assignments from shareholders and there are several delays in scoring for the investment criteria for power plant strengthening.

Investasi pada Entitas Asosiasi/Ventura Bersama

Investment in Associates/Joint Ventures

PLN NP melakukan investasi pada enam perusahaan ventura bersama dan satu entitas asosiasi.

PLN NP invested in six joint ventures and one associated entity.

Tabel Investasi pada Entitas Asosiasi/Ventura Bersama

Table of Investment in Associates/Joint Ventures

Perusahaan Company	Domisili Domicile	Jenis Usaha Type of Business	Tahun Operasi Komersial Operation Year	% Kepemilikan % Investment	
				2021	2020
Entitas Asosiasi Associate Entities					
PT Sumber Segara Primadaya (SSP)	Cilacap	Pembangkit Listrik tenaga uap Steam power plant	2006	49,00	49,00

Perusahaan Company	Domisili Domicile	Jenis Usaha Type of Business	Tahun Operasi Komersial Commercial Operation Year	% Penyertaan % Investment	
				[illegible]	[illegible]
PT Electrical Energy Holding (EEH)	Jakarta	Pembangkit listrik tenaga uap Steam power plant	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PT Sumitomo Energy Solar Nusa2	Jakarta	Pembangkit listrik tenaga uap Steam power plant	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Ventura Bersama Joint Ventures					
PT Eksploitasi Sentramas (JOSS)	Aceh	Pembangkit Listrik tenaga air Hydro power plant	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PT Bukit Pembangkit Innovative (BPI)	Palembang	Pembangkit listrik tenaga uap Steam power plant	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PT Bumitan Pembangkitan Jawa Bali (BJB)	Jakarta	Operasi dan Pemeliharaan Operation and maintenance	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PT Shamrua Sumber Pembangkitan Jawa (SJ)	Jakarta	Pembangkit listrik tenaga uap Steam power plant	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PT Sumber Tulehu Pembangkitan Jawa (SJ)	Jakarta	Operasi dan Pemeliharaan Operation and maintenance	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi Gas Energy (PJBI)	Jakarta	Pembangkit listrik tenaga surya Solar power plant	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PT Nusa Sarana Listrik Energy	Jakarta	Pembangkit Listrik Power Plant	[illegible]	[illegible]	[illegible]

*) dalam tahap penyelesaian
*) dalam tahap penyelesaian

Investasi Penyertaan Saham pada Entitas Anak
Share Investment in Subsidiaries

Perusahaan memiliki saham entitas anak baik langsung maupun tidak langsung sebagai berikut.

The Company owns shares of subsidiaries either directly or indirectly as follows.

Tabel Investasi Penyertaan Saham pada Entitas Anak
Table of Share Investment in Subsidiaries

Perusahaan Company	Domisili Domicile	Jenis Usaha Type of Business	% Penyertaan % Investment	
			[illegible]	[illegible]
PT Pembangkitan Jawa-Bali Services (PBS)	Surabaya	Jasa Operasi dan Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik dan Pembangunan (Pemeliharaan) Peralatan Kelengkapannya Operation and maintenance services of Power Plants and Construction (installation) of Electricity Equipment	[illegible]	[illegible]
PT Sinta Karya Prima (SKP) *	Sumatera	Jasa Services	[illegible]	[illegible]
PT Sertifikasi Kompetensi Pembangkit Tenaga Listrik (SKP) *	Jakarta	Sertifikasi kompetensi tenaga listrik, konsultasi di bidang ketenagalistrikan Certification of electricity competence, consulting in the electricity sector	-	-

Perusahaan Company	Domisili Domicile	Jenis Usaha Line of Business	% Penyertaan % Investment	
			2021	2022
PT Haleyora Listrik Nusantara (HLN) dan entitas anak PT Haleyora Listrik Nusantara (HLN) and entities	Jakarta	Engineering, Procurement and Construction, Operation and Maintenance of the Electricity Sector Rekayasa, Pengadaan dan Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan Sektor Ketenagalistrikan	99,99	99,99
PT Haleyora Listrik Consult (HLC) *	Jakarta	Supervision and consulting Supervisi dan konsultasi	99,99	-
PT Haleyora Innovative Indonesia (HII)	Tangerang	Trade, construction, mining, and agriculture Perdagangan, konstruksi, pertambangan dan pertanian	72,97	72,97
PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PJBI Investasi)	Jakarta	Investment Management Manajemen Investasi	100,00	100,00
PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi Gas (PJBI Investasi Gas) *	Jakarta	Investment management in gas-fired power plants Manajemen investasi di pembangkit listrik tenaga gas	100,00	100,00
PT Pembangkitan Jawa Bali Energi Investasi (PJBEI) *	Jakarta	Investment in the form of equity investment Investasi dalam bentuk penyertaan modal	100,00	100,00
PT Prima Layanan Nasional Enjiniring (PLN NE)	Jakarta	Trade in goods and services, engineering, supply chain, and consulting in the electricity sector Perdagangan barang dan jasa, enjiniring, rantai pasokan, dan konsultasi di sektor ketenagalistrikan	51,00	51,00

* Investasi tidak langsung
* Indirect investment

Ekspansi
Expansion

Pada tahun 2022, PLN NP tidak melakukan aktivitas ekspansi, sehingga tidak terdapat informasi terkait tujuan dan nilai transaksi.

In 2022, PLN NP had no expansion activities, so there is no information regarding the purpose and value of the transaction.

Divestasi
Divestment

Pada tahun 2022, PLN NP tidak melakukan aktivitas divestasi, sehingga tidak terdapat informasi terkait tujuan dan nilai transaksi.

In 2022, PLN NP had no divestment activities, so there is no information regarding the purpose and value of the transaction.

Akuisisi
Acquisition

Pada tahun 2022, PLN NP tidak melakukan aktivitas akuisisi perusahaan, sehingga tidak terdapat informasi terkait tujuan dan nilai transaksi.

In 2022, PLN NP had no company acquisition activities, so there is no information regarding the purpose and value of the transaction.

Restrukturisasi Utang/Modal
Debt/Capital Restructuring

Pada tahun 2022, PLN NP tidak melakukan restrukturisasi baik utang maupun modal. Sehingga tidak terdapat informasi terkait hal tersebut.

In 2022, PLN NP had no restructuring of either debt or capital. Therefore, there is no information related to this matter.

Perubahan Kebijakan Akuntansi
Changes in Accounting Policy

Alasan Perubahan Kebijakan Akuntansi
Reason of Changes in Accounting Policy

Kebijakan akuntansi perusahaan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area dimana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan.

Perusahaan melakukan review berkesinambungan kebijakan akuntansi terhadap perkembangan dunia Standar Akuntansi Keuangan yang selaras dengan perusahaan. Berikut adalah penerapan standar akuntansi keuangan baru dan revisi (PSAK) dan interpretasi standar akuntansi keuangan (ISAK) yang berlaku efektif tahun 2021 dan standar yang telah dikeluarkan tetapi belum dinerapkan.

The Company's accounting policies are prepared in accordance with the Financial Accounting Standards in Indonesia. The preparation of the financial statements in accordance with the Financial Accounting Standards in Indonesia requires the use of estimates and assumptions. It also requires management to make considerations in the process of applying the Company's accounting policies. Areas that are complex or require a higher degree of consideration or areas where assumptions and estimates could have a significant impact on the financial statements.

The Company conducts continuous review of accounting policies on the development of revised Financial Accounting Standards that are relevant to the Company. The following is the application of new and revised financial accounting standards (PSAK) and interpretations of financial accounting standards (ISAK) that are effective in 2021 and standards that have been issued but not yet applied

Uraian Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Dampaknya
Description on the Changes in Accounting Policy and the Impact

Standar Akuntansi Berlaku Efektif Tahun 2022
Accounting Standards Effective in 2022

Penerapan dan amandemen dan penyesuaian tahunan terhadap standar akuntansi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2022 antara lain:

- Amandemen PSAK No. 22, Kombinasi Bisnis - Referensi ke Kerangka Konseptual (Adaptasi Lengkap)
- Amandemen PSAK No. 57, Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi - Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 69, Agrikultur
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 71, Instrumen Keuangan
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 73, Sewa

Sehubungan dengan amandemen PSAK No. 71, No. 72, No. 68, No. 50, dan No. 73, Grup saat ini memiliki piutang kepada ventura bersama (Catatan 10) dan pinjaman dari pemegang saham (Catatan 31) yang mengacu pada Dolar Amerika Serikat London Interbank Offered Rate ("LIBOR") dan berlaku hingga lebih dari tahun 2021. Pada tanggal 31 Desember 2022, suku bunga acuan alternatif belum ditentukan.

The implementation of the annual amendments and adjustments to the accounting standards, which are effective from January 1, 2022 include:

- Amendment to SFAS No. 22 Business Combinations - References to the Conceptual Framework for Financial Reporting
- Amendment to SFAS No. 57, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets - Onerous Contracts - Cost of Fulfilling the Contract
- Annual improvements to SFAS No. 69, Agriculture
- Annual improvements to SFAS No. 71, Financial Instruments
- Annual improvement to SFAS No. 73, Leases

In connection with the amendment of SFAS No. 71, No. 72, No. 68, No. 61, and No. 73, the Group currently has receivables from joint ventures (Note 10) and loans from shareholders (Note 31), which refer to the United States Dollar London Interbank Offered Rate ("LIBOR") and are valid until more than 2021. On December 31, 2022, the alternative benchmark interest rate has not yet been determined.

Dampak atas Penerapan Standar Akuntansi Berlaku Efektif Tahun 2022
Impact of the Accounting Standard Implementation Effective in 2022

Penerapan dan amandemen dan penyesuaian lainnya terhadap standar akuntansi yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2022 tidak mengakibatkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Grup dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang disajikan di laporan keuangan konsolidasian pada tahun berjalan.

The implementation of the annual amendments and adjustments to accounting standards effective from January 1, 2022 did not result in any significant changes in the Group's accounting policies and did not have a material impact on the amounts reported in the consolidated financial statements in the current year.

Standar dan Interpretasi telah Diterbitkan tetapi Belum Diterapkan
Issued Standards and Interpretations but Not Yet Implemented

Standar baru, amandemen dan revisi yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2022 adalah sebagai berikut:

- PSAK No. 74: Kontrak Asuransi
- Amandemen PSAK No. 1: Penyajian Laporan Keuangan – Klasifikasi Kewajiban Lancar atau Tidak Lancar
- Amandemen PSAK No. 1: Penyajian Laporan Keuangan – Pengungkapan Kebijakan Akuntansi
- Amandemen PSAK No. 16: Aset Tetap – Hasil sebelum Penggunaan yang Dimaksudkan
- Amandemen PSAK No. 22: Kombinasi Bisnis – Referensi ke Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan
- Amandemen PSAK No. 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan – Definisi Estimasi Akuntansi
- Amandemen PSAK No. 46: Pajak Penghasilan – Pajak Tangguhan Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal
- Amandemen PSAK No. 73: Sewa – Liabilitas Sewa Pada Transaksi Jual dan Sewa-balik
- Amandemen PSAK No. 74: Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK No. 74 dan PSAK No. 71 – Informasi Komparatif
- Revisi PSAK No. 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah
- Revisi PSAK No. 102: Akuntansi Ijarah
- Revisi PSAK No. 109: Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah

Standar baru, amandemen dan revisi di atas berlaku efektif mulai 1 Januari 2023, kecuali untuk Amandemen PSAK No. 1 "Penyajian Laporan Keuangan – Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan", Amandemen PSAK No. 73, Revisi PSAK No. 101 dan Revisi PSAK No. 109 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2024, dan PSAK No. 74 dan Amandemen PSAK No. 74 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2025, tidak diterapkan dini diantaranya.

New standards, amendments and revisions that have been issued but are not yet effective for the financial year beginning January 1, 2022 are as follows:

- SFAS No. 74: Insurance Contracts
- Amendment to SFAS No. 1: Presentation of Financial Statements – Classification of Current or Non-Current Liabilities
- Amendment to SFAS No. 1: Presentation of Financial Statements – Disclosure of Accounting Policies
- Amendment to SFAS No. 16: Property, Plant and Equipment – Proceeds before Intended Use
- Amendment to SFAS No. 22: Business Combinations – Reference to the Conceptual Framework for Financial Reporting
- Amendment to SFAS No. 25: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors – Definition of Accounting Estimates
- Amendment to SFAS No. 46: Income Taxes – Deferred Taxes related to Assets and Liabilities Arising from a Single Transaction
- Amendment to PSAK No. 73: Leases – Lease Liability in a Sale and Leaseback
- Amendment to SFAS No. 74: Insurance Contracts on the Initial Application of PSAK No. 74 and PSAK No. 71 – Comparative Information
- Revision of SFAS No. 101: Presentation of Islamic Financial Statements
- Revision of SFAS No. 102: Ijarah Accounting
- Revision of SFAS No. 109: Zakat, Infaq and Sadaqah Accounting

The above new standards, amendments and revisions are effective from January 1, 2023, except for Amendment to SFAS No. 1 "Presentation of Financial Statements – Non-Current Liabilities with Covenants", Amendment to SFAS No. 73, Revision of SFAS No. 101 and Revision of SFAS No. 109 which are effective from January 1, 2024, and SFAS No. 74 and Amendment to SFAS No. 74 which are effective from January 1, 2025, but early adoption is permitted.

Potensi Dampak atas Standar dan Interpretasi yang telah Diterbitkan tetapi Belum Diterapkan

Potential Impact of Standards and Interpretations Issued but Not Yet Implemented

Pada tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan dan entitas anak sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru, amandemen dan revisi pada laporan keuangan konsolidasian Grup.

At the date of completion of this consolidated financial statements, the Company and its subsidiaries are currently studying the impact that may arise from the implementation of new standards, amendments and revisions on the Group's consolidated financial statements.

Perubahan Peraturan dan Dampaknya terhadap Perusahaan

Regulatory Changes and the Impacts on the Company

Berikut beberapa perubahan peraturan perundang-undangan dan produknya baru yang berlaku efektif pada tahun 2021 serta dampaknya terhadap kinerja PLN NP.

The following are several changes in laws and regulations as well as new regulations effective in 2021 and their impact on PLN NP's performance.

Tabel Perubahan Peraturan Perundang-undangan dan Dampaknya terhadap Perusahaan

Table of Changes in Laws and Regulations and Their Impact on the Company

No.	Peraturan Regulation	Keterangan Perubahan Change Description	Dampaknya terhadap PLN NP secara Kualitatif atau Kuantitatif Qualitative or Quantitative Impact on PLN NP
1.	Kepputusan Menteri ESDM No. 13 K/MB.01/MEM/2021 tentang Pedoman Pengawasan Usaha Pertambangan Batubara yang Terintegrasi dengan Pengusahaan Pembangkit Tenaga Listrik Decree of the Minister of ESDM No. 13 K/MB.01/MEM/2021 concerning Guidelines for the Supervision of Integrated Coal Mining Business with Power Generation Business	Pelonggaran IUP dan IUPK (Pertambangan), CIP (Izin Usaha Pertambangan), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (Operasi Produksi) Relaxation of IUP (Mining Business Permit), IUPK (Special Mining Business Permit), CIP (Mining Business Permit), and Special Mining Business Permit (Production Operation) 1. Pelonggaran dalam hal batubara untuk kepentingan sendiri dan batubara untuk kepentingan umum Relaxation in the case of coal for own use and coal for public interest 2. Pengaturan dan/atau penghapusan kewajiban untuk membayar kompensasi data Regulation and/or elimination of the obligation to pay data compensation 3. Pengaturan dan/atau penghapusan kewajiban untuk membayar iuran tetap dan iuran produksi Regulation and/or elimination of the obligation to pay fixed fees and production fees 4. Penyesuaian IUP, IUPK, dan CIP menjadi PPKH Adjustment of IUP, IUPK, and CIP to PPKH	1. Pembayaran piutang kepada PLN NP menjadi prioritas bagi Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pertambangan Batubara karena sesuai dengan ketentuan yang berlaku Payment of receivables to PLN NP becomes a priority for Coal Mining Business Permit Holders in accordance with the applicable regulations 2. Dengan dikeluarkannya peraturan ini, akan meningkatkan permintaan kebutuhan batubara PLN NP sebagaimana diatur dalam kontrak With the issuance of this regulation, it will increase the demand for PLN NP's coal needs as stipulated in the contract 3. Fulfillment of PLN NP coal supply is currently for Coal Mining Business Actors due to the obligation to fulfill DMO and sanctions if not fulfilled 4. Dengan dikeluarkannya peraturan ini, maka kewajiban PLN NP untuk pemenuhan pasokan batubara saat ini menjadi tanggung jawab pemegang IUP, IUPK, dan CIP With the issuance of this regulation, the obligation of PLN NP to fulfill coal supply is currently the responsibility of the holders of IUP, IUPK, and CIP

No.	Peraturan Regulation	Keterangan Peraturan Description		Dampaknya Terhadap PLN EP secara Kualitatif dan/ atau Kuantitatif Qualitative and/or Quantitative Impact on PLN EP
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Government Regulation No. 26 of 2021 concerning Types and Tariffs for Types of Non-Tax Revenue (PNBP) Applicable to the Ministry of Energy and Mineral Resources	1. Terdapat perubahan pembayaran PNBP dari pelaksana pada sub-bidang pelayanan perizinan, administrasi usahan, dan standar pada bidang pengusahaan. 2. Terhadap kelebihan pembayaran penerimaan pengusahaan pada tahun-tahun sebelumnya dapat diperhitungkan untuk pembayaran penerimaan pengusahaan pada tahun berjalan. 3. Terhadap dana sebesar kelanjutkan yang dikelola telah dengan peraturan perundang-undangan tentang dan dikembalikan pada tahun PNBP. 4. Tarif PNBP untuk penyelenggaraan pada tahun dan per dalam bidang energi dan sumber dari mana output dikenakan sebesar Rp0,00 atau lebih, untuk penyerahan dan pemindahan pelayanan sertifikasi atau dalam bentuk dan tidak dikenakan biaya	1. There is an obligation to pay User Fee Revenue (PNBP) for services in the electricity sub-division under its fulfill the corporate flow of licensing, certification, administration, and accreditation in the electricity sector. 2. For non-compliance with the obligation to provide electricity products and services in a consulting economic business, other energy, imposed in accordance with relevant laws and regulations and ministerial. 3. There is a fee of economic subsidies which is determined by subsidiaries with relevant laws and regulations and included in PNBP. 4. PNBP tariffs for collection of mineral resources, and services in the field of energy and mineral resources can be determined at one or Rp0.00 or less. The amount, requirements and procedures for the application of tariffs within the organization of the Ministry of ESDM and must be approved by the Minister of Finance.	1. Terdapat perubahan pembayaran PNBP bagi PLN EP dalam ranah pemungutan elektronik, administrasi, dan standar pada bidang pengusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2021. 2. Terdapat potensi dimiliki bagi PLN EP dapat hal tersebut efektif ketidakpastian terhadap perolehan untuk pengalokasian produk dan potensi dalam negeri serta untuk dalam suatu kebijakan/aktivitas serta dapat sub-sektor kebijakan/aktivitas tertentu. 3. There is PNBP payment obligation for PLN EP in the context of fulfillment of license administration, certification administration, and accreditation in the electricity sector to implement in Government Regulation No. 26 of 2021. 4. There is a potential for PLN EP to decrease or experience non-compliance with the obligation to penalties domestic products and potential value originating in electricity business, as well as other economic value added from.
7.	Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik Presidential Regulation No. 112 of 2022 concerning Acceleration of Renewable Energy Development for Electricity Supply	1. Ketentuan mutlak dikecualikan (wajib) PPA, Pengembang Pembangkit (untuk kelancaran pengembangan EBT untuk penyediaan tenaga listrik. 2. Pengembangan PLTU baru dikenakan (untuk sebagaimana dalam dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai berikut: a. Terdapat di dengan sebagai yang dikenakan untuk investigasi atau (melihat sumber) atau dalam lain yang mengalirkan tingkat dari untuk strategi investasi yang memberikan kemudahkan terhadap pengadaan operasi atau dan lisa, sebagaimana dimaksud dalam ayat (3); b. Pembangkitan untuk mengalirkan sendiri per untuk atau investasi 10% dalam waktu, (3 tahun sejak PLN) yang berorientasi pada kompetisi dan dikenakan dengan rata-rata emisi (TCF) Indonesia untuk tahun 2031, modal pengembangan teknologi untuk offset (emisi) atau energi terbarukan, dan c. Berlaku transparansi yang sumber tahun 2050.	1. The government provides support as PPA, Power Plant Developers in the license of developing (EBT) for electricity supply. 2. Development of new (CFPP is prohibited except in circumstances as mentioned in Article 3 paragraph (1) as follows: a. Integrated with industries that can built its own, the added value of (may) increase, or PLN (or part of) value or energy projects that make it more competitive or just combine or other external economic (paragraph); b. Committed to reducing greenhouse gas emissions by at least 35% within 10 years from the commercial (COD) date, operating it consistent to the energy transition (CFPP emission by 2031 through technology development, policy, offset, and/or renewable energy mix, and c. Stop operating no later than 2050.	1. PT PLN (Persero) dan memberlakukan pembelian energi listrik dari Pembangkit Listrik Energi Terbarukan di PLN EP. 2. Pengembangan EBT(lebih 40% di EP dapat dikatakan tapi(yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Pasal 3 ayat (3). 3. PT PLN (Persero) will prohibit the purchase of electricity from Renewable Energy Power Plants in PLN EP. 4. The development of new CFPP in PLN EP are considered in may no in fulfill emissions stipulated in Article 3 paragraph (3).

No.	Peraturan Regulation	Perbandingan Pembahasan Changes Description		Dampaknya Terhadap PLN NP secara Kualitatif dan atau Kuantitatif Qualitative and/or Quantitative Impact on PLN NP
		1. IPTL (Pemilik dan pengelola pembangkit Pengguna dan PLN) yang berdiri atas PT PLN (Persero) (Holding Induk) dan PPL (Anggota dari Bisnis Unit Tenaga Listrik) PLT yang dikembangkan oleh PPL dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1).	1. PT PLN (Persero) will terminate the termination of the operation of UPP owned by PT PLN (Persero) and a PSK Contract (Power Purchase Agreement or PPA) between the PPL, which still belong to a subsidiary provided for in Article 2 paragraph (1).	
		2. PT PLN (Persero) dan mempertimbangkan pembelian tenaga listrik dari Pembangkit Listrik Energi Terbarukan.	2. PT PLN (Persero) will consider the purchase of electricity from Renewable Energy Power Plant.	
		3. Pembelian tenaga listrik dari Pembangkit Listrik Energi Terbarukan harus mengacu pada RUPTL.	3. Purchasing electricity from Renewable Energy Power Plant must refer to the Electricity Supply Business Plan (RUPTL).	
		4. Pemerintah memberikan kebijakan berbasis pasar untuk yang mendukung pengembangan Pembangkit Listrik Energi Terbarukan dalam bentuk feed-in-tariff.	4. The government provides a market-based policy to support the development of Renewable Energy Power Plants in the form of feed-in-tariff.	
4.	Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2021 Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 26 of 2021	1. Pengguna UPTLU dan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum yang memiliki Wilayah Usaha tersebut berdasarkan Permen ini berupa Izin di dalam wilayah usahanya. Dalam menerbitkan Izin, Pemegang UPTLU yang memiliki Wilayah Usaha dapat berkoordinasi pemberian Izin oleh Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Izin Usaha lain. 2. Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik untuk membayarkan pemanfaatan dan Harga Sewa Kabel Serat Optik ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. 3. Tarif Tenaga Listrik untuk konsumen Pemegang UPTLU yang memiliki Wilayah Usaha ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan DPR.	1. The UPTLU Holder (Electricity Business Licence for Public Interest) which has business rights in the area of electricity in its business area, in fulfilling its power, the UPTLU Holder from now on the Business Area only, can also distribute under Under the Electricity Network from other Business Owners. 2. The Selling Price of Electricity and Rent Fee of Electricity Network must obtain approval from the Minister of Economy in accordance with the authority, after going through the consultation stage. 3. Electricity Tariff for consumers of UPTLU Holder which has business rights is determined by Minister after obtaining approval from the Indonesian Parliament.	1. Pemanfaatan sebagai pemegang UPTLU pemberian Izin untuk kepentingan umum yang memiliki Wilayah Usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga listrik dalam wilayah usahanya. 2. Dalam hal PLN NP menjual tenaga listrik kepada Pemegang UPTLU yang memiliki Wilayah Usaha, PLN NP wajib melanjutkan penyaluran yang telah dilakukan dalam Peraturan Menteri ESDM No. 13 Tahun 2021 3. The Company as the UPTLU holder of power plant may sell the electric power to the UPTLU - Main Distribution Network Area in order to fulfill the role of electric power in its business line. 4. In the event that PLN NP sells electricity to a UPTLU holder that has business area, PLN NP must complete the requirements that must be determined in the Regulation of the Minister of ESDM No. 13 of 2021

No.	Peraturan Regulation	Keterangan Peraturan Description		Dampaknya Terhadap PLN (SP secara Parsial/SP dan/atau Konsolidasi) Quantitative Impact on PLN (SP)
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, Pembubaran Badan Usaha Milik Negara Government Regulation No. 23 of 2021 concerning Amendments to Government Regulation Number 45 of 2005 concerning Establishment, Management, Supervision, Dissolution of State Owned Enterprises	1. Pemberhentian keanggotaan selain atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (PP 45/2005 juncto PP 23/2021), ketentuan bisa pemberhentian Direksi dan Komisaris/Dewan Pengawas harus melalui keputusan RUPS. 2. Adanya dan tata cara pengangkatan Direksi dengan suara dan mekanisme yang transparan, profesional dan independen, serta memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, dan prinsip-prinsip dalam anggaran Direksi. 3. Tentang ketentuan mengenai rangkap anggota Direksi meliputi persyaratan perhitungan dan pembatasan rangkap jabatan anggota Direksi dan rangkap jabatan anggota Direksi merangkap jabatan pada unit-unit kegiatan dalam struktur kepada unit kegiatan dalam. 4. Dalam satu rapat pemberhentian anggota Direksi dilakukan apabila jabatan dan tata cara pemberhentian anggota Direksi yang melanggar atau dalam atau keputusan yang mengakibatkan Direksi dan atau keputusan negara, tetapi yang dilakukan tidak sesuai dengan yang berlaku dalam anggaran dasar. 5. Ketentuan baru yang pemberhentian anggota Direksi dapat dilakukan apabila anggota Direksi melakukan tindakan yang melanggar atau dan atau keputusan rapat Direksi dapat dilaporkan kepada pemegang saham yang diwakili oleh RUPS/Menteri dan kepada pihak lain RUPS/Pemegang saham dapat RUPS untuk Menteri dan kepada pihak lain. 6. Ketentuan pada pasal 27 ayat (1) anggota Dewan Komisaris/anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas tidak dapat dapat hanya pemberhentian atau mengan- sumber lebih individual yang sangat. Bentuk judgement Dan. 7. Direksi dapat memberi persetujuan (pelimpahan) hal-hal tertentu kepada direksi lainnya, dalam rangka melaksanakan tugas/wewenang Direksi. dalam atau melanggar atau Anggaran Dasar, Pengadilan, pemberhentian Hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan putusan atau berwenang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.	1. The addition of several provisions from Government Regulation No. 45 Year 2005, namely provisions regarding the options for submitting the Board of Directors and Commissioners/Supervisory Board of SOEs, new provisions for dismissal of the Board of Directors and Commissioners/Supervisory Board to add to consideration of GMS' employees. 2. Criteria and procedures for the appointment of the Board of Directors with a fair and transparent and be regulated by the Minister. The law and bank issued in accord the requirements to consider the integrity, good behavior, and honest behavior of prospective members of the Board of Directors. 3. There are additional provisions prohibiting members of the Board of Directors from becoming political party administrators and/or legislative candidates members and prohibiting members of the Board of Directors from becoming candidates for head/deputy head of the region (vice) head/deputy head of the region. 4. One (1) meeting for the dismissal of a member of the Board of Directors is a because the fact, the member of the Board of Directors dismissed a violation or when that was GSM under Articles/Bonus. The law a question does not include some council but to business this. 5. New provisions for the dismissal of members of the Board of Directors can be considered if members of the Board of Directors conduct actions that violate other useful purposes, or the Board of Directors can by dismissed based on other relevant decision appropriately the GMS/Minister by the member participation of GSEs Shareholders of the Board of Directors by the GMS or by Minister of the ministries of the Board of Directors by an Minister's to Power. 6. Provisions in article 27 paragraph (1a) members of the Board of Directors of Commissioners/Supervisory Board cannot be held liable for some of their have conducted the principles of the Business Judgement Rule. 7. The Board of Directors may issue preferences (preferential) for a Directors employees under the Board of Directors, in order to meet the needs and/or improve the performance of GSEs. regulations, dismissal, rights and obligations are determined based on a collective labor agreement in accordance with the provisions of the laws and regulations in the labor sector.	1. The Law paragraphs/provisions/articles/points/verses Dimiliki dan Dewan Komisaris yang Diatur dalam Peraturan Pemerintah ini tidak berdampak secara terlalu langsung terhadap PLN HP, meskipun hal ini pengangkatan/pemberhentian Direksi/Dewan Komisaris di PLN HP dilakukan oleh RUPS tidak Pemegang Saham harus dimiliki dalam Direksi dan/atau Komisaris yang dipilih/ diangkat oleh RUPS/Pemegang Saham, sehingga hubungan PLN HP pada mengikuti. 2. Merujuk pada Pasal 27 ayat (2), Menteri dapat mengajukan gugatan kepengadilan terhadap anggota Direksi yang dapat merugikan keuangan, dan BUMN dan merugikan perekonomian negara pada Pasal. 3. The implementation of the appointment/dismissal of the Board of Directors and Board of Commissioners regulations will Government Regulation No. 54 Year 2017 in SOEs directly to PLN HP, considering it is currently the appointment/dismissal of the Board of Directors/Board of Commissioners in PLN HP is conducted by PLN in the Shareholder Circular, the Articles of Association of PLN HP regulates the procedures for the appointment/dismissal of the Board of Directors and Board of Commissioners which will refer to or reference to the Shareholder, this PLN HP potentially need to amend the Articles of Association and Bylaws. 4. Referring to Article 27 paragraph (2), the Minister may file a lawsuit to the court against members of the Board of Directors who cause the loss to the state and/or negligence cases occur in Perum.

No.	Peraturan Regulation	Keterangan Perubahan Changes Description	Dampaknya Terhadap PLN NP secara Kualitatif dan atau Kuantitatif Qualitative and/or Quantitative Impact on PLN NP
4.	Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyambut Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pertengahan Tahun 2022 *Presidential Instruction No. 2 of 2022 concerning the Acceleration of Increasing the Use of Domestic Products and Products of Micro, Small and Cooperative Enterprises in the Context of Successful National Movement to Proudly Made in Indonesia in the Middle of the Year 2022*	1. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah diinstruksikan untuk mendahulukan dan/atau mengutamakan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah. 2. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah diinstruksikan untuk memerintahkan, mengalokasikan dan memberdayakan paling sedikit 40% dari anggaran belanja barang jasa untuk produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi. Penggunaan tersebut pada tahun 2022 sampai 3% Penggunaan produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN> 25% dan nilai Dalam Negeri Perusahaan minimal 40% 3. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah diinstruksikan untuk mengalihkan paling pengadaan semua produk produk pengadaan sebelumnya pada tahun 2021 meningkatkan jumlah produk dalam negeri pada katalog Elektronik (katalog sektoral) katalog Lokal. 4. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah diinstruksikan untuk memprioritaskan produk dalam negeri dan produk UMKK pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, termasuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam hal mengalokasikan paling sedikit 40% dari anggaran belanja barang/jasa untuk produk dalam negeri dan produk UMKK. 5. Menyediakan BLANK sebagai pembuka barang/jasa sebelum impor	1. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah are instructed to prioritize and/or give preference in procurement of goods/services from domestic products and products of Micro, Small and Cooperative Enterprises in the implementation of procurement of goods/services by the Government. 2. Ministries/Institutions/Regional Governments are instructed to order, allocate and empower at least 40% of the budget value of goods/services expenditure for domestic products and products of Micro, Small and Cooperative Enterprises. Realization of the use in 2022 is up to 3%. The use of domestic products that have a TKDN value of 25% and a Company Domestic Height value of at least 40% 3. Ministries/Institutions/Regional Governments are instructed to shift previous procurement processes to electronic procurement in 2021, increasing the number of domestic products in the Electronic Catalog (sectoral Catalog) and Catalog. 4. Ministries/Institutions/Regional Governments are instructed to include prioritization requirements for the use of domestic products and products of Micro, Small and Cooperative Enterprises in procurement of goods/services by the Government, including Micro, Small and Cooperative Enterprises in the case of allocating at least 40% of the value of goods/services from the budget for goods/services and products of UMKK in the value of goods/services. 5. Requiring BLANK to allocate domestic goods and environmental responsibility (CSR) for capacity building of Micro, Small and Cooperative Enterprises 6. Requiring BLANK to produce all import substitution goods/services	1. Peraturan ini berisi hal-hal terkait pengadaan barang dan jasa pengadaan barang dan jasa pemerintah wajib memprioritaskan atau TKDN serta penyedia-penyedia dan kebutuhanpengadaan produk dalam negeri, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi 2. Peraturan wajibkan Pada Peraturan BLANK wajib memprioritaskan belakan BTKDN (Berharga) yang mempunyai nilainol PLN NP Manusia terkait pengadaanbarang jasa produk dan kebijakan pemerintah (GDP) untuk peningkatan kapasitas Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi serta penyiapan BLANK sebagai produsen mengalihkan rekanan impor 1. The Company in terms of being a provider of goods/services in the procurement of government goods/services must take into account the TKDN value and other requirements as well as the use of domestic products, Micro Enterprises, Small Enterprises and Cooperatives 2. The Company as a Subsidiary of BLANK must take into account the position of BTKDN (Berharga) which affect PLN NP, especially related to the allocation of resources and social and environmental responsibility (CSR) to increase the capacity of Micro, Small and Cooperative Enterprises and the preparation of BLANK as producers of import substitution goods/services

No.	Peraturan Regulation	Keterangan Peraturan Description	Dampaknya Terhadap PLN NP secara Kualitatif dan/ atau Kuantitatif Qualitative and/or Quantitative Impact on PLN NP
7	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Sub Undang-undang Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation Sub Ordinance	1. Ketentuan mengenai pelaksanaan perjanjian yang dapat dilaksanakan oleh dua atau lebih pihak (pihak Pertama dan Pihak kedua) (pasal 1 Peraturan Pemerintah (PP)). 2. Hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja/buruh yang dipekerjakannya dilaksanakan pada perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis, baik perjanjian kerja waktu tertentu maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu. 3. Perusahaan alih daya harus berbentuk badan hukum dan wajib memenuhi Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. 4. Perusahaan alih daya harus memperhatikan ketentuan upah minimal yang berlaku.	1. Pemerintah mengatur ihwal ruang lingkup, dan substansi perjanjian yang dapat dilaksanakan oleh dua atau lebih pihak (pihak Pertama dan Pihak kedua) (pasal 1 Peraturan Pemerintah (PP)). 2. The working relationship between outsourcing companies and the employees/workers they employ is based on a work agreement made in writing, either a specific time work agreement or an indefinite time work agreement. 3. Outsourcing companies must be legal entities and must comply with Business Licensing issued by the Central Government. 4. Outsourcing companies must take into account the provisions of the minimum wage that have applied.	1. PLN NP dapat berperan aktif terhadap ruang lingkup PP tersebut sehingga sebagai pihak pertama atau kedua dalam perjanjian. 2. Dapat memberikan pelayanan dengan Perusahaan Alih Daya. PLN NP wajib memperhatikan ketentuan Peraturan Alih Daya wajib berbentuk badan hukum dan wajib memenuhi Perizinan Berusaha. 3. PLN NP perlu memperhatikan ketentuan upah minimum yang berlaku di mana Perusahaan alih daya berada berdasarkan upah kerja wajib berbeda-beda dan berpacu pada kondisi dan lokasi yang ditetapkan di PLN NP. 4. PLN NP harus memperhatikan ketentuan upah minimum yang berlaku di mana Perusahaan alih daya berada berdasarkan upah kerja wajib berbeda-beda dan berpacu pada kondisi dan lokasi yang ditetapkan di PLN NP.
8	Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2022 Regulation of the Minister of ESDM No. 11 of 2022	Untuk melaksanakan pemungut pungutan dalam: 1. Direksi dan/atau Dewan Direksi (ESDM) wajib menyusun rencana pemungutan pungutan, meliputi: struktur organisasi, harga, dan cara pungutan, serta melaporkan rencana tersebut dan realisasinya dan laporan pelaksanaan yang bersangkutan. Pelaporan dan/atau pelaporan tersebut harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan sejak tanggal 1 September 2022 dan setiap ESDM yang tidak memenuhi kewajiban ini harus membayar sanksi dan bagaimana. 2. Direksi wajib menyusun laporan pungutan satu bulan sejak tanggal yang telah ditentukan dan Direksi wajib dan Anggaran Pendapatan (RKAP). Direksi ESDM berhenggung jawab dan pelaporan dan pemutusan dapat	To carry out the management implementation: 1. The Board of Directors and/or Board of Commissioners/Supervisory Board of ESDM (the Directors) shall prepare levy plan, including: organizational structure, prices, and levy collection, and report the plan and its realization, and the relevant levy collection. The preparation and/or submission must be completed within one month September 1, 2022, and any ESDM that fails to fulfill this obligation must pay the sanctions for the levy. 2. The Board of Directors of ESDM is to submit the report within one month from the date set by the Directors and the Budget and Expenditure Plan (APBN). ESDM's Board of Directors is responsible for the preparation and submission of the [illegible] management report.	ESDM dapat mempersiapkan prinsip-prinsip pemungutan pungutan pada ESDM dengan melakukan [illegible] Peraturan Menteri ESDM ini melalui pengadaan PLN. Anda Perusahaan dan dapat melakukan pemungutan sesuai ketentuan dan sebagaimana ESDM. PLN NP dapat mempersiapkan prinsip-prinsip pemungutan pungutan pada ESDM dengan melakukan [illegible] Peraturan Menteri ESDM ini melalui pengadaan PLN. Anda Perusahaan dan dapat melakukan pemungutan sesuai ketentuan dan sebagaimana ESDM.

No.	Peraturan Regulation	Keterangan Perubahan Changes Description	Dampaknya Terhadap PLN NP secara Kualitatif dan atau Kuantitatif Qualitative and/or Quantitative Impact on PLN NP
		Laporan Manajemen Risiko tersebut berisi: dst. 1. Laporan pelaksanaan manajemen risiko 2. Laporan audit intern; dan 3. Laporan tata kelola terintegrasi.	The Risk Management Report consists of: 1. Risk management implementation report 2. Internal audit report; and 3. Integrated governance report
		Laporan-laporan tersebut disampaikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Emiten sebagai berikut: dst.	The reports are included as an integral part of the GJKI's quarterly and annual reports as a separate chapter
		Bagi Unit Penyelenggara Jasa Penilaian Publik (KJPP) yang telah melakukan penilaian atas Aset Tetap dan Properti Investasi Perseroan yang berkonsultasi dengan perusahaan rekan konsolidasi dan telah/akan Anda Pilih/Ubah.	Valuations was made by Valuation Report (KJPP) which is performed at the Consolidated Financial Statements with adjustments according to the circumstances and needs of the Company.
		Dewan Komisaris Dewan Komisaris yang telah/ akan/akan telah/akan yang akan/akan Perseroan Harian (c) Apakah/akan telah/akan sesuai/sesuai dengan Harian koordinator tahunan/ pemberitahuan peraturan perundang-undangan	The Board of Directors and/or Board of Commissioners who do not sign the Annual Report (c) and (c) confirmed at the Consolidated Financial Statements with adjustments according to the circumstances and needs of the Company.

Informasi dan Fakta Material setelah Tanggal Laporan Akuntan

Material Information and Facts after the Accountant's Report Date

Setelah Laporan Keuangan Konsolidasian tahun buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan untuk informasi terkait kejadian material setelah periode pelaporan yaitu pada tanggal 28 Maret 2022, Perusahaan menandatangani Perjanjian Pembelukan Jual Beli dengan PT Energi Sengkang (Energi) untuk pembelian PLTU Sengkang (111 MW). Dan sehingga tersebut tidak berdampak yang signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian grup.

Dengan pembelian aset PLTU Sengkang ini maka secara resmi PLTU Sengkang menjadi bagian dari Perusahaan sehingga pembangkit dapat dimanfaatkan dan dioptimalisasikan kembali untuk meningkatkan dan menjaga keandalan pasokan energi listrik di Sistem Sulawesi. Dengan beroperasinya kembali PLTU Sengkang, dihargakan pemanfaatan gas yang ada di Blok Sengkang dan sekitarnya dapat dioptimalisasikan kembali serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui pembukaan lapangan kerja serta kegiatan CSR dari Perusahaan kedepannya.

After the issuance of the Consolidated Financial Statements for the 2021 financial year that has been audited by the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners, there is information related to material events after the reporting period, namely on March 28, 2022, the Company signed a Preliminary Sale and Purchase Agreement with PT Energi Sengkang ("Energi") for the purchase of Sengkang CFPP (111 MW). From this event, there is no significant impact on the group's consolidated financial statements.

With the purchase of Sengkang CFPP's assets, the Sengkang CFPP officially becomes part of the Company so that the power plant can be utilized and optimized again to improve and maintain the reliability of electricity supply in the Sulawesi System. With the re-operation of Sengkang CFPP, it is expected that the utilization of existing gas in the Sengkang Block and its surroundings can be re-optimized and can improve the welfare of the surrounding community through job openings and CSR activities from the Company in the future.

Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian Luar Biasa dan Jarang Terjadi

Financial Information Containing Extraordinary and Rare Events

Setelah Laporan Keuangan Konsolidasian tahun buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan telah memuat informasi tidak terduga/peristiwa yang mengandung kejadian Luar Biasa dan jarang terjadi di tahun 2022.

After the publication of the Consolidated Financial Statements for the 2022 financial year, which have been audited by the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners, the information stated that there were no events containing extraordinary and rare events in 2022.

Key Performance Indicator dan Tingkat Kesehatan Perusahaan

Key Performance Indicator and Soundness Level of the Company

Key Performance Indicator (KPI)

Sistem manajemen kinerja yang baik merupakan hal bagi Perusahaan untuk memaksimalkan pencapaian nilai dan misinya dengan mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki. KPI dipakai sebagai sistem yang memiliki ukuran dengan mengkuantifikasikan kinerja dari keseluruhan bagian organisasi, serta memiliki indikator untuk mengevaluasi kinerja organisasi dalam upaya mencapai target Perusahaan.

A good performance management system is the core for the Company to maximize the achievement of values and visions by optimizing the resources it has. The Company believes that KPI is a system that is able to contain measures by representing the performance of all parts of the organization, and contains indicators to evaluate organizational performance in order to achieve the Company's targets.

Pengelolaan KPI yang meliputi penyusunan sharlab, indikator, target kinerja Perusahaan dan pengalokasiannya sampai dengan satuan unit kerja terkecil di lingkungan Perusahaan serta sejauh pelaporan dilakukan oleh Satuan Manajemen Mutu & Kinerja yang berada di bawah Satuan Manajemen Risiko dan Kinerja.

KPI management which covers the preparation of shareholder indicators, Company performance targets and the elaboration up to the smallest work unit within the Company and all emphasis is managed by the Quality & Performance Management Unit under the Risk and Performance Management Unit.

Hasil Umum Pemegang Saham (HAP (RUPS) 2023 dimana salah satu agenda pembahasnya adalah Persetujuan dan Pengesahan Key Performance Indicator (KPI)/Sentral Manajemen Tahun 2022 oleh Pemegang Saham Perusahaan, Dewan Komisaris dan Direksi ditandatangani pada tanggal 23 Januari 2023. Adapun Realisasi KPI Kontrak Manajemen antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Perusahaan tahun 2023 adalah sebesar 102,88 sebagaimana tabel berikut:

General Meeting of Shareholders of the 2023 PLN NP AGSP was held and held on January 20, 2023, with one of the agendas was related to the Approval and Ratification of the Key Performance Indicator (KPI)/Management Contract for 2022 by the Company's Shareholders, Board of Commissioners and Board of Directors. KPI Realization of the Management Contract between the Board of Directors and Board of Commissioners with the Company's Shareholders in 2023 was 102.88 as follows:

Tahap Realisasi Kontrak Manajemen Tahun 2022 (Audited)

Status of Management Contract Realization in 2022 (Audited)

No.	Indikator Kinerja Kunci / Key Performance Indicator		Satuan / Unit	Bobot / Weight	Target	Realisasi / Realization	Pencapaian / Achievement (%)	Nilai / Value	Keterangan / Remarks
A	**Nilai Ekonomi Tambah** / Economic value added			45				0,58	
1	Equivalent Availability Factor (EAF) Pembangkit Lama (Old Power Plant) / Equivalent Availability Factor (EAF) of old Power Plant			10				10,00	
	a. EAF PLTU Batubara / EAF of CFPP		%		85,20	83,65	103,05%		
	b. EAF Non PLTU / EAF of OPPP		%		84,00	85,16	104,26%		
2	Biaya Pokok Penyediaan Pembangkit / Cost of Electricity Supply (COS) of Power Plant			10				10,00	
	a. BPP Operating / Cost of Operating		Rp/kWh		1.764,88	1.677,00	150,00%		
	b. BPP OMC (non BBM) / Cost of Operation and Maintenance (non BBM)		Rp/kWh		840,63	822,97	102,00%		
3	Equivalent Forced Outage Rate (EFOR) / Equivalent Forced Outage Rate (EFOR) of Jawa Bali			8				8,00	
	a. EFOR PLTU Batubara / EFOR of CFPP		%		3,44	3,73	113,00%		
	b. EFOR Pembangkit non PLTU / EFOR of OPPP		%		1,37	1,61	113,00%		
4	Specific Fuel Consumption (SFC)			12				12,00	
	a. Batubara / Coal		Rp/kWh		0,0317	0,0313	101,40%		
	b. Gas		MMBTU/kWh		0,0000	0,0000	104,00%		
5	EBITDA		Rp Miliar / Rp Billion	5	8.753,61	10.751,49	113,00%	5,00%	
B	**Inovasi Proses Bisnis** / Business Process Innovation			11				22,00	
1	Energi Listrik Hijau Pembelian Dari Sistem Jawa Bali (Energi Grid PLN) / Electricity Energy Green Purchase from Java Bali System (PLN Grid Energy)		Rp Miliar / Rp Billion	6	282,00	288,00	113,00%	6,00	
2	Maturity Level SPIP		Level	5	3,75	4,15	113,00%	5,00	
3	Pembayaran dibawah PLN Grup / Invoice payment PLN Group		Rp Miliar / Rp Billion	5	304,63	300,00	47,00%	250,00%	
4	Co-firing biomass		Ton/h	5	1.814,5	252,00	113,00%	5,00	
C	**Kepemimpinan Teknologi** / Technology Leadership			11				11,00	
1	Digital Power Plant		Individual Value	6	1,5	1,8	120,00%	9,00	
2	Program Making Digital Talent		%	5	3,00	6,00	113,00%	5,00	

No.	Indikator Kinerja Kunci Key Performance Indicator	Satuan Unit	Bobot Weight	Target	Realisasi Realization	Pencapaian (%) Achievement (%)	Nilai Value	Keterangan Description
D	**Pengembangan Investasi** Investment Development		10				9,67	
1	Realisasi IoC PLTS Cirata Realization of IoC Cirata CFP 145	Tahapan Stages	6	Beroperasi Komersial (cod) Commercial Operation (cod)	Beroperasi Komersial (cod) 8/8/2023 Commercial Operation (cod) 8/8/2023	87,5 (-)	5,25	
2	Progres Proyek Unit (Bauran) Completed Project Unit Level (Blended) Completed		4	5	4	112,00%	4,48	
E	**Pengembangan Teknis** Asset Development		10				11,00	
1	% Penyerapan dalam konstruksi tahun % Transfer in construction years	%	5	11	10,10	112,00%	5,50	
2	% Aktivasi (-/-) tahun dalam konstruksi tahun % Activation (-/-) years old in construction years	%	5	7,0	7,0	112,00%	5,50	
F	**Aspek Kepatuhan** Compliance Aspect						0,20	
1	Implementasi Keberlangsungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Environment, Safety, and Environmental Management		Min 1,00			100,00	0,20	
2	Integritas Pencatatan Laporan dan Akurasi data Kinerja Integrity Submission, Accuracy and Performance data Submitted		Min 1,40			100,00		
	Total		**100**				**117,83**	

Keterangan:
- Belum dilakukan proses pengukuran
- Tercapai (>100 s.d. 120)
- Hampir Tercapai (>80 s.d. 100) - (-10%)
- Perlu Perhatian (<80 - (-10))

Description:
- Measurement process not conducted yet
- Achieved (>100 - 120)
- Almost Reached (>80 (-10) - 100)
- Need Improvement (<80 (-10))

Tingkat Kesehatan Perusahaan

Soundness Level of the Company

Berdasarkan Hasilnya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT PLN Nusantara Power (Perseroan) tanggal 28 Januari 2022, tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2022 serta Rencana Manajemen Tahun 2023 tanggal 29 Januari 2023, Pemegang Saham Perusahaan, Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan menyepakati Kontrak Manajemen/Key Performance Indicators (KPI) tahun 2022.

Based on the Minutes of the General Meeting of Shareholders (GMS) of PT PLN Nusantara Power (the Company) dated January 28, 2022, regarding the Ratification of the Company's Annual Budget and Operational Plan (RKAP) for 2022, as well as the Management Contract for 2022 dated January 29, 2023, the Company's Shareholders, Board of Commissioners and Board of Directors agreed on the Management Contract/Key Performance Indicators (KPI) for 2022.

Perolehan tingkat kinerja kesehatan PLN NP dilakukan berdasarkan Kriteria Penilaian yang ditetapkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) RKAP tahun 2022, dimana pada tahun 2022 tingkat kesehatan PLN NP tersebut pada nilai **AAA** kategori **SEHAT** dengan nilai **102,88** dan bobot 100.

The assessment of PLN NP's soundness performance level is conducted based on the Assessment Criteria determined at the General Meeting of Shareholders (GMS) of the 2022 RKAP, where in 2022, PLN NP's Soundness Level was at the value of **AAA** in the **SOUND** category with a score of **102,88** out of a weight of 100.

Informasi Kelangsungan Usaha
Business Continuity Information

Hal-hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha
Matters with Potentially Significant Effect on Business Continuity

Pada tahun 2022 tidak terdapat hal yang menyebabkan kelangsungan usaha Perusahaan terhenti, berdasarkan atas penilaian faktor keuangan yang diturunkan dengan hasil opini wajar dalam semua hal yang material dalam Laporan Keuangan Audited Perusahaan Tahun 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis, & Rekan. Namun ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dan pemantauan sebagai risiko. Beberapa hal tersebut berasal dari faktor eksternal dan internal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha PLN NP.

Adapun beberapa faktor eksternal dan internal yang memiliki dampak terhadap Perusahaan di antaranya adalah:
1. Perubahan dinamika pasar
   a. Pertumbuhan permintaan listrik lebih rendah dibandingkan proyeksi, khususnya di wilayah Pulau Jawa
   b. Terbatasnya ruang untuk proyek pembangkit konvensional
   c. Meningkatnya kesadaran lingkungan dan komitmen investor yang juga berdampak pada proyek-proyek kelistrikan terutama di Pulau Jawa

In 2022 there were no matters that caused the Company's business continuity to stop, based on the assessment of financial factors as evidenced by the results of a fair opinion in all material respects in the Company's Audited Financial Statements for 2022 which has been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis, & Rekan. However, there are several things that need attention and risk mitigation monitoring. Some of these things come from external and internal factors that have the potential to significantly affect the continuity of PLN NP's business.

Some external and internal factors that have an impact on the Company include:
1. Changes in market dynamics
   a. Electricity demand growth is lower than expected, particularly in the Java-Bali region
   b. Limited space for conventional generation projects
   c. Increased environmental awareness and energy transition investments impacting new projects especially in Java Island

2. Rencana pelaksanaan proyek di masa depan
   Perundaan pembangunan di beberapa proyek yang sedang dan akan memberikan proyek yang ada di PLN NP
3. Penyerapan produksi PLN NP dibandingkan IPP baru
   Pembangkit PLN NP berdampak pada penurunan produksi akibat kontribusi lebih rendah yang berbadan IPP
4. Pemain baru di sektor pembangkit listrik, Misalnya Energi Terbarukan
5. Peluang proyek investasi pembangkit yang berpotensi besar sehubungan dengan pengalihan aset pembangkit dari PLN dan adanya demand di daerah tersebut
6. Pembentukan holding-subholding di sektor ketenagalistrikan
   a. Pembentukan subholding generation company (gencos) merupakan salah satu pemisahan yang jelas antara peran strategis dan operasional, transparansi kinerja dengan mekanisme bisnis langsung.
   b. Pembentukan subholding energi primer memungkinkan benefit of scale pengelolaan logistik dan tempat lahan dan sinkron kebutuhan yang lebih baik.
   c. Pembentukan subholding beyond kWh mengoptimalkan semua investasi beyond kWh dalam PLN Group untuk mengoptimalkan skala bisnis dan market share bisnis beyond kWh
   d. Pemendekan tingkat pengelolaan karyawan sehubungan dengan berkembangnya jumlah karyawan pada perkembangan subholding

2. Future project implementation risks
   Delays in the construction of several ongoing projects as well as cancellation of existing projects in PLN NP
3. Misappropriation of PLN NP's production due to new IPPs (PLN NP's generation is affected by a decrease in production due to lack of new commitments to IPPs)
4. New players in the power generation market, particularly Renewables Energy
5. Greater opportunities for power plant relocation projects in connection with the transfer of power plant assets from PLN and the demand in isolated areas
6. Establishment of subholdings in the electricity sector
   a. Formation of subholding generation company (gencos) makes it more agile, clear separation between strategic and operational roles, performance transparency with direct business mechanisms.
   b. Establishment of primary energy subholding enables benefits of scale (logistics and later savings) and better real allocation.
   c. Establishment of beyond kWh subholding consolidates all beyond kWh initiatives within PLN Group to develop business scale and market share of beyond kWh business.
   d. Increase in scope of employee management due to increase in number of employees post-subholding establishment

Assessment Manajemen untuk Mengelola Potensi yang Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha

Management *Assessment* to Manage Potentials that Significantly Affect Business Continuity

Berdasarkan analisis faktor internal, dapat disimpulkan bahwa PLN NP memiliki kekuatan internal yang sangat (*HIGHLY*) karena memiliki tenaga operasi yang mengacu pada skala, pengalaman dalam bisnis pembangkit secara end-to-end dan SDM yang muda, dinamis dan engagement tinggi, akan tetapi dalam hal pengembangan bisnis baru masih terbatasnya beberapa hal antara lain terbatasnya sumber daya investasi, kurangnya pengalaman dalam pengelolaan pelanggan dan belum banyak pengalaman dalam proyek EBT non-PLTA.

Berdasarkan analisis faktor eksternal saat ini, dapat disimpulkan bahwa PLN NP memiliki banyak kesempatan di pasar akibat berkembang dengan adanya transfer pemerintah untuk mencapai 100% rasio elektrifikasi pada tahun 2020, target energi mix dari sumber terbarukan energi sebesar 23% pada tahun 2025,

Based on the analysis of internal factors, it can be concluded that PLN NP has medium internal strengths (*HIGHLY*) because it has some core operating performance, experience in the end-to-end generation business and young, dynamic and highly engaged human resources, but in terms of new business development it is still constrained by several things, including limited investment resources, lack of experience in customer management and not much experience in new hydropower (HP) projects.

Based on the analysis of current external factors, it can be concluded that PLN NP has more opportunities in the market to grow with the government's initiative to achieve 100% electrification ratio by 2020, the target energy mix from renewable energy sources of 23% by 2025, the large potential for solar

besarnya potensi pengembangan PLTS di Indonesia, dan tuntutan atas peningkatan keandalan sistem kelistrikan Nasional. Walaupun akan terdapat penurunan yang tinggi serta risiko perubahan peraturan yang berlaku, industri ketenagalistrikan di Indonesia diperkirakan akan masih mengalami pertumbuhan yang pesat karena kesempatan untuk implementasi teknologi digital terutama di sektor pembangkitan, transmisi dan distribusi dan strategic untuk melakukan peningkatan efisiensi. Pada industry Petrochemical dapat diikuti secara paralel ("MEDIUM").

Dari kedua analisis tersebut, PLN NP memiliki potensi untuk bertumbuh pesat, sehingga perlu dipastikan PLN NP memiliki sumber daya yang cukup untuk melayang pertumbuhan tersebut, baik dari internal, maupun eksternal. Investasi dapat dilakukan untuk mendanai pertumbuhan organik di ini bisnis eksisting dan ini bisnis baru. Pertumbuhan organik dimungkinkan dengan memanfaatkan dan memenuhi kapasitas ini bisnis utama yang pembangkit tenaga listrik, melakukan penetrasi market baru untuk ini bisnis jasa O/M, jasa O&M, investasi dalam proyek IPP dan pengembangan bisnis baru atau resources dan capability yang similar PLN NP to ensure presence in industri utility lain.

power development in Indonesia, and the demand for increased reliability of the national electricity system. Although there will be high competition and risk in regulatory changes, the electricity industry in Indonesia is expected to continue to experience rapid growth due to opportunities for the implementation of digital technology, especially in the generation, transmission and distribution sectors, and the drive to improve efficiency. Therefore, industry Petrochemical can be noted positively ("MEDIUM").

From both analyses, PLN NP has the potential to grow rapidly, so it is necessary to ensure that PLN NP has sufficient resources to support this growth, both from internal and external sources. Investments can be made to support organic growth in existing business lines and new business lines. Organic growth is realized by strengthening and increasing the capacity of its main business line, namely power generation, penetrating new markets for O/C services, O&M services, investing in IPP projects and developing new businesses on the resources and capabilities owned by PLN NP including participation in the other utility industries.

Asumsi yang Digunakan dalam Melakukan *Assessment*

Assumptions Used in Conducting an Assessment

Dalam hal penilaian dan evaluasi nilai berdasarkan usaha melalui analisis posisi masing-masing lini PLN NP yang dinilai dari keunggulan kompetitif ("Competitive Advantage") dan daya tarik ("Attractiveness"). Berdasarkan analisis faktor internal, dapat disimpulkan bahwa PLN NP memiliki kekuatan internal menengah ("MEDIUM") karena memiliki kinerja operasi yang mencapai kelas dunia, pengalaman dalam bisnis pembangkit kelas end-to-end dan SDM yang muda, dinamis dan engagement tinggi akan tetapi dalam hal pengembangan bisnis baru masih terbatasnya beberapa hal antara lain terbatasnya sumber daya investasi, kurangnya pengalaman dalam pengelolaan pelanggan dan belum banyak pengalaman dalam proyek EBT misi PLTA.

Berdasarkan analisis posisi Competitive Strength, dapat disimpulkan bahwa bisnis pembangkit eksisting (existing) EPT dan O&M masih dapat dikembangkan dan memberikan nilai tambah yang besar kepada perusahaan karena memiliki margin laba kotor/gp, merupakan bisnis inti dengan kapabilitas best in class, kesediaan meningkatkan daya yang bisnis menjaga kesehatan strategis, dan permintaan pasar yang fokus berkembang stabil (%).

In terms of business continuity risk assessment and evaluation through analysis of the position of each PLN NP business assessed from competitive advantage ("Competitive Advantage") and attractiveness ("Attractiveness"). Based on the analysis of internal factors, it can be concluded that PLN NP has medium internal strengths ("MEDIUM") because it has world-class operating performance, experience in the end-to-end generation business and young, dynamic and highly engaged human resources, but in terms of new business development it is still constrained by several things, including limited investment resources, lack of experience in customer management and not much experience in new hydropower renewable projects.

Based on the Competitive Strength position analysis, it can be concluded that the existing power plant business investment (EPT) and O&M can still be developed and provide great added value to the company because it has the highest profit margin, is a core business with best in class capabilities, has the potential to increase business competitiveness through strategic initiatives, and market demand continues to grow at around (%).

Arahan atau Keputusan Manajemen atas hasil *Assessment*

Management Direction or Decision on Assessment results

Arahan PLN NP berada pada kuadran Grow & Build, strategi yang bisa dilakukan PLN NP adalah:

a. Melakukan Product dan Market development
b. Market Penetration
c. Melakukan Backward, Concentric Diversification dan Forward Integration

PLN NP's position is in the Grow & Build quadrant, the strategies that can be applied by PLN NP are:

a. Develop Product and Market development
b. Market Penetration
c. Conduct Backward, Concentric Diversification and Forward Integration

Penyesuaian yang Dilakukan

Adjustments Made

Berdasarkan pada proyeksi, penjualan tenaga listrik unit pembangkit milik PLN NP diperkirakan akan meningkat seiring dengan masuknya pembangkit-pembangkit PLN, terutama dengan kapasitas besar (1000 MW) yang menggunakan teknologi Ultra Super Critical (USC) yang lebih efisien. Kondisi tersebut mendorong PLN NP untuk terus berkembang dan bertransformasi agar dapat bertahan dan berkembang sebagai perusahaan penyedia tenaga listrik yang andal dan terpercaya melalui deklarasi komitmen dan tekad "Jump to the new S Curve". Wujud PLN NP untuk melompat menuju kurva baru melalui inisiatif pengembangan (re-)new kerja untuk meningkatkan pendapatan (beyond kWh) dengan tetap menjaga dan meningkatkan keunggulan PLN NP dalam penyediaan tenaga listrik. Salah satunya sejalan dengan komitmen mendukung transisi energi menuju EBT. PLN NP juga mentargetkan inisiasi peningkatan kWh pada pembangkit eksisting melalui co-firing.

Based on projections, sales of electricity from PLN NP's generating units are expected to double along with the entry of coal-fired power plants with large capacities (1000 MW), that use more efficient Ultra Super Critical (USC) technology. These conditions encourage PLN NP to continue to grow and innovate in order to survive and develop as a reliable and trusted electricity provider company through the declaration of the spirit and determination of "Jump to the new S Curve". PLN NP's determination to jump to the new curve through innovation is developing new business lines to increase Beyond kWh revenue while maintaining and improving PLN NP's excellence in providing electricity. In addition, in line with the commitment to support the energy transition towards EBT, PLN NP also encourages innovation in increasing kWh in existing plants through co-firing.

Pada tahun 2022, PNI Academy telah memasarkan produk (produk) listrik dan non listrik sesuai dengan kebutuhan pasar. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan (beyond kWh) telah dilaksanakan dengan memanfaatkan(yang) peluang proyek (project). Penyusunan proposal bisnis pelatihan secara rutin dilakukan dan disampaikan kepada calon pelanggan. Serta dilakukan proses monitoring proyek (Visi) Business Solution berdasarkan tahapan progres/kesiapan/kelayakan di tahun 2022.

In 2022, PNI Academy has marketed (various) and non-(various) training products in accordance with market needs. Efforts have been made to increase (beyond kWh) revenue by following up on identified project opportunities. Preparation of training business proposals is routinely carried out and submitted to prospective customers. As well as the (business) solution (drivers) project monitoring process based on the stages or readiness/eligibility completed in 2022.

Secara singkat langkah-diatas, dari 3 sisi perspektifpengembangan strategis (pada) yang sudah dilakukan, PLN NP menyusun 5 pilar strategi dari 3 key enablers yang dijabarkan dalam 15 Strategic Initiatives dan 3 enablers yang secara periodik pencapaiannya dimonitor dan dievaluasi. Dalam menjalankan 10 strategic initiatives perlu didukung 3 enablers seperti Organization, Capabilities and Culture, Stakeholder and Regulations, dan Financial Sustainability.

In shallow or the above steps, from the 3 (directions) of development of strategic (pivot that) have been set, PLN NP compiled 5 strategic pillars and 3 key enablers, which are described in 15 Strategic Initiatives and 3 enablers whose achievements are periodically monitored and evaluated. In carrying out the 10 strategic initiatives it needs the support of 3 enablers such as Organization, Capabilities and Culture, Stakeholders and Regulations, and Financial Sustainability.

Dampak Perubahan Harga terhadap Pendapatan dan Laba Perusahaan

Impact of Price Changes on Company Revenue and Profit

Dampak Perubahan Biaya Pokok Penyediaan (BPP)

Impact of Changes in Cost of Electricity Supply (BPP)

Biaya pokok penyediaan tenaga listrik merupakan biaya yang ditetapkan PLN (Persero) dalam hal ini adalah dari unit pembangkit serta dari pembelian energi primer sampai tenaga listrik dijual kepada PLN.

The cost of electricity supply is the cost provided by PLN (Persero) in this case is in terms of power plants, namely from the primary energy purchase until the electricity is sold to PLN.

Dampak perubahan BPP terhadap pendapatan operasi yaitu setiap perubahan Rp1 biaya pokok penyediaan tenaga listrik mempengaruhi pendapatan operasi di tahun 2022 berubah sebesar Rp30,13 miliar dan Rp13,73 miliar di tahun 2023.

The impact of BPP changes BPP on operating income is that every Rp1 change in the cost of electricity supply affects operating income in 2022 to change by Rp30,13 billion and Rp13,73 billion in 2023.

Dampak perubahan BPP terhadap laba operasi perusahaan yaitu setiap perubahan Rp1 biaya pokok penyediaan tenaga listrik mempengaruhi laba operasi di tahun 2022 berubah sebesar Rp5,75 miliar dan Rp3,00 miliar di tahun 2023.

The impact of changes in BPP on the Company's operating profit is that every Rp1 change in the cost of electricity supply affects operating profit in 2022 to change by Rp5.75 billion and Rp3.00 billion in 2023.

Dampak Perubahan Harga Jual Tenaga Listrik

Impact of Changes in Electricity Selling Price

Dampak perubahan harga jual tenaga listrik terhadap pendapatan operasi yaitu setiap perubahan Rp1 harga jual listrik mempengaruhi pendapatan operasi di tahun 2022 berubah sebesar Rp38,38 miliar dan Rp39,85 miliar untuk tahun 2023.

The impact of changes in electricity selling prices on operating income is that every Rp1 change in electricity selling prices affects operating income in 2022 to change by Rp38.38 billion and Rp39.85 billion for 2023.

Dampak perubahan harga jual tenaga listrik terhadap laba operasi yaitu setiap perubahan Rp1 harga jual listrik mengakibatkan laba operasi di tahun 2022 berubah sebesar Rp38,01 miliar dan Rp39,28 miliar untuk tahun 2023.

The impact of changes in electricity selling prices on operating profit is that every Rp1 change in electricity selling prices results in operating profit in 2023 to change by Rp38.01 billion and Rp39.28 billion for 2023.

Aspek Pemasaran dan Pangsa Pasar

Marketing and Market Share Aspect

Penjualan Listrik dan Inisiasi Pengembangan Bisnis

Electricity Sales and Business Development Initiatives

Pelanggan PLN NP dalam segmen usaha penyediaan listrik adalah PT PLN (Persero) UP2D (Unit Induk Pendistribusian dan Pengaturan Daerah), sedangkan segmen bisnis penyedia jasa O&M dan jasa lainnya adalah PT PLN (Persero) Regional maupun Independent Power Producer (IPP). Penjualan tenaga Listrik masih menjadi bisnis utama yang strategis oleh PLN NP dimana 70% pendapatan perusahaan berasal dari penjualan tenaga listrik pembangkit eksisting.

PLN NP's customers in the electricity supply business segment are PT PLN (Persero) UP2D (Main Unit of Load Distribution and Regulation), while the business segments of O&M services providers and other services are PT PLN (Persero) Regional and Independent Power Producer (IPP). Electricity Sales is still the main business owned by PLN NP where 70% of the Company's revenue comes from the sale of electricity from existing power plants.

Di tahun 2022 PLN NP telah melakukan beberapa upaya-upaya terkait pengembangan bisnis di luar negeri terkait jasa Operation & Maintenance, serta IMSS, dan bisnis non core (new runs) untuk mengurangi dampak pelui atas penjualan tenaga listrik. Sasaran kinerja Inc Inisiasi Penjualan Tenaga Listrik tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan & Keandalan: Nilai EAF 88,87% dan EFOR 1,08%;
2. Utilisasi Pembangkit: Nilai NCF 23,82%;
3. Biaya Pokok Produksi: 1.191 Rp/kWh dan Nilai RPHH 1.400 kcal/kWh;
4. Pengelolaan K3L & Accident, beserta pemenuhan proper untuk unit yang dikelola PLN NP.

In 2022, PLN NP has made efforts related to overseas business development related to Operation & Maintenance services, as well as IMSS, and non-core business (new runs), to reduce the impact of decreasing electricity sales. Sustainable targets for the Electricity Sales Initiation Line in 2022, are as follows:

1. Readiness & Reliability: EAF value of 88.87% and EFOR of 1.08%;
2. Power Plant Utilization: NCF value of 23.82%;
3. Cost of Production: 1,191 Rp/kWh and RPHH value of 1,400 kcal/kWh;
4. HSSE Management & Accident, beyond compliance proper for units managed by PLN NP.

Salah satu upaya yang dilakukan PLN NP untuk terus meningkatkan pangsa pasarnya serta menjaga kepuasan pelanggannya adalah dengan melakukan survei kepuasan Pelanggan.

One of the efforts made by PLN NP to continue increasing its market share and maintaining customer satisfaction is by conducting customer satisfaction surveys.

Analisis Segmen Pasar dan Kondisi Persaingan

Analysis of Market Segments and Competition Conditions

Seiring dengan perkembangan elektrifikasi di Indonesia, khususnya pada sistem Jawa-Bali, total penjualan tenaga listrik PLN NP mengalami penurunan dengan market share di tahun 2021 diperkirakan sebesar 9,3%. Penjualan yang listrik Sistem Jawa Bali sampai dengan akhir tahun 2021 adalah sebesar 188.832 GWh, mencapai 95,84% dari Rencana Operasi Tahunan (ROT), dan mengalami pertumbuhan sebesar 1,89% jika dibandingkan dengan penjualan di periode yang sama tahun 2021.

Along with the development of electricity in Indonesia, especially in the Java-Bali system, the trend of PLN NP's electricity sales has decreased with a market share in 2021 estimated at 9.3%. Sales of electrical energy for the Java-Bali System until the end of 2021 were 188,832 GWh, reached 95.84% of the Annual Operating Plan (ROT) and experienced an increase of 1.89% if compared to sales in the same period in 2021.

Meskipun mengalami pertumbuhan positif dalam penjualan energi listrik di tahun 2021, Perusahaan menghadapi persaingan dalam segmen penjualan tenaga listrik. Oleh karena itu, Perusahaan merancang strategi pengembangan usaha baru untuk pasar jasa operasi dan pemeliharaan serta bisnis non-core (new curve) untuk mengurangi dampak pertumbuhan tenaga listrik. Serta mengembangkan produk-produk PLN INT Academy, Aplikasi Operasi dan Pemeliharaan sehingga mampu mewujudkannya bisnis beyond kWh. Dengan tujuan memaksimalkan upaya peningkatan pendapatan beyond kWh, serta dalam rangka ekspansi bisnis dengan memanfaatkan sumber daya baru.

Despite experiencing positive growth in electricity sales in 2021, the Company faces competition in the electricity sales segment. Therefore, the Company developed a new market development strategy for the operation and maintenance services market and non-core business (new curve) to reduce the impact of decreasing electricity sales. As well as developing PLN INT Academy products based on Operation and Maintenance so as to be able to realize the beyond kWh business. With the aim of maximizing efforts to increase revenue beyond kWh, as well as in the context of business expansion by expanding new market shares.

Posisi Produk di Pasar
Product Position in the Market

Pasar utama Perusahaan terkait penjualan energi listrik masih berfokus di Sistem Jawa-Bali. Namun dalam waktu kurun 10 tahun terakhir kapasitas pembangkit milik PLN INT tidak tumbuh, ujung pembangkit yang hanya diserap kompetisi di sistem Jawa-Bali. Oleh karena itu, diperlukan langkah terobosan untuk meningkatkan kapasitas pembangkit yang disertai dengan pengembangan usaha dan peningkatan revenue.

The Company's main market related to the sale of electricity is still focused on the Java-Bali System. However, PLN INT's power plants capacity has not increased in the last 10 years, only power plants and competition in the Java-Bali system. Therefore, a breakthrough measure is needed to increase power plants capacity, which is accompanied by business development and increasing revenue.

Fokus pengembangan usaha dan grosir (GJTL) 2021-2030 pun mendukung kebijakan pemerintah terkait EBT. Dengan target pemerintah pembangunan energi terbarukan untuk mencapai bauran energi nasional minus 23% pada tahun 2025. PLN INT mempersiapkan untuk menjadi operator solar PV yang terbesar di Indonesia, menjadi leader dalam biomass co-firing hingga 5%. Dan kini menjadi spesialis wind terbesar di Indonesia dan pemain Indonesia di bidang battery storage solutions.

The business development agreement of the 2021-2030 grosir (GJTL), and supporting government policies related to EBT. With the government's target of renewable energy development to achieve a national energy mix minimum 23% in 2025. PLN INT targets to become the largest solar PV operator in Indonesia, a leader in biomass co-firing up to 5% last. And now, the largest wind operator in Indonesia and a leading player in the battery storage solution sector.

PLN INT menciptakan menjadi pengelola energi paling terpercaya bagi pelanggan C&I skala menengah di Indonesia (menargetkan efisiensi hingga 10%), partner bagi pelaku teknologi global untuk mengembangkan solusi energi inovatif bagi Indonesia, rooftop solar untuk pelanggan C&I dan residensial, dan mengembangkan pembangkit listrik virtual.

PLN INT targets to become the most trusted energy manager for medium-scale C&I customers in Indonesia (achieving up to 10% efficiency), a partner for global technology actors to develop innovative energy solutions for Indonesia, rooftop solar for C&I and residential customers, and develop virtual power plants.

Strategi dan Target Pencapaian Strategi Pasar
Strategy and Target of Market Strategy Achievement

Seiring dengan pengembangan usaha PLN INT yang memberikan pada value chain ketenagalistrikan selain pembangkitan, maka disesuikan perencanaan yang strategis terkait pemasaran. Adapun strategi yang ditetapkan perusahaan mencapaian pelaksanaan dan

Along with the development of PLN INT's business, which penetrates the electricity value chain in addition to electric power generation, strategic planning is needed related to marketing. The strategy was carried out by the Company is an elaboration of the vision

Usi dan Hibi serta IUPP yang telah diterapkan. Potensi market yang dimiliki PLN dari pasar internasional melalui pengembangan produk dengan dukungan kerjasama proses bisnis dan sumberdaya serta ide bisnis baru dalam rangka pendapatan (non-BPP).

and Mission as well as the IUPP that has been determined. Large market potential in PLN and international markets through product development with the support of business process readiness and resources as well as new business ideas in achieving revenue (non-BPP).

Pada tahun 2021, realisasi program strategi marketing untuk pertumbuhan pangsa pasar serta pengembangan usaha PLN NP antara lain:

a. Penyelesaian project penugasan;
b. Pengembangan pembangkit EBT dan non-EBT dalam RUPTL 2021-2030 melalui skema IPP Majority dan Minority Shares;
c. Pengembangan usaha lain (selain/non-kWh) melalui pengelolaan jasa O&M dan bisnis EPC (Gas & Oil, Green & Oil, Rekalam serta infrastruktur lainnya), pengembangan bisnis rooftop solar PV, power quality (EPLATE), pengadaan logistik dan part, optimasi aset serta komersialisasi kompetensi;
d. Implementasi quick win transformasi portofolio PLN Group.

In 2021, the realization of strategic marketing programs for market share expansion and business development of PLN NP included:

a. Completion of project assignments;
b. Development of EBT and non-EBT power plants in the 2021-2030 RUPTL through the IPP Majority and Minority Shares schemes;
c. Development of other businesses (beyond kWh) through management of O&M services and EPC business (Oil, Gas & Oil, Relocation as well as other infrastructure), development of rooftop solar PV business, power quality (EPLATE), asset management, logistics and parts provider, idle asset optimization and competency commercialization;
d. Implementation of PLN Group's quick win portfolio transformation.

Pangsa Pasar
Market Share

Pada tahun 2021 kegiatan penjualan listrik di sistem Jawa Bali yang disuplai oleh PLN NP (Existing dan UIP/JBI), Indonesia Power (Existing dan UIP), PLN dan IPP. Berikut adalah gambar diagram pangsa pasar industri kelistrikan sistem Jawa Bali.

In 2021, electricity supply activities in the Java Bali system were supplied by PLN NP (Existing and UIP/JBI), Indonesia Power (Existing and UIP), PLN and IPP. The following is a diagram of the electricity industry market share of the Java Bali system.

Tabel Pangsa Pasar Kelistrikan Sistem Jawa Bali
Table of Electricity Market Share of the Java Bali System

Produsen Producer	2020		2021		2022	
	GWh	%	GWh	%	GWh	%
PLN NP Existing PLN NP Existing	17.099	9,89	18.779	10,81	18.756	7,79
UBJOM UPJBJ	38.430	14,86	24.545	13,45	36.258	14,56
Indonesia Power Existing Indonesia Power Existing	33.117	17,64	37.430	18,84	35.751	17,13
UIP	32.141	17,27	33.726	16,57	34.353	13,95
PLN	17.533	9,33	18.033	8,85	18.388	8,85
IPP & Anak Swasta IPP & Private Electricity	61.344	32,63	67.966	34,39	68.766	32,71
Jumlah Sistem Jawa Bali Total Java Bali System	**187.718**	**100,00**	**187.139**	**100,00**	**208.654**	**100,00**

Prospek Usaha
Business Prospect

Prospek Perekonomian Dunia
World Economic Prospect

Berdasarkan proyeksi dari IMF, pertumbuhan ekonomi AS akan melambat signifikan dari 5,7 persen (yoy) di tahun 2021, menjadi hanya 3,8 persen di tahun 2022 dan 1,0 persen di tahun 2023. Sementara dalam proyeksi lebih terkini dari OECD di bulan Desember, pertumbuhan ekonomi AS di tahun 2022 diperkirkan sebesar 3,8 persen, lebih rendah pertumbuhan tahun 2021 mencapai 5,6 persen di tahun 2021. Pengetatan moneter yang sangat agresif menjadi faktor utama yang akan memberi dampak pada pelambatan ekonomi AS, selain dari permintaan domestik yang juga mengalami pelambatan.

Proyeksi IMF menyatakan pertumbuhan dunia akan melambat dapat dari 6,0 persen di tahun 2021 menjadi 3,2 persen dan 2,7 persen di 2022 dan 2023. Sejalannya tahun 2022, sebuah pertumbuhan global harus menghadapi risiko ini banyak seiring peningkatan tantangan bahasan seperti perang di Ukraina dan harus geopolitik global secara umum, bahasan inflasi tinggi yang kontraproduktif, pengetatan moneter yang agresif serta pertumbuhan ekonomi Tiongkok akibat kebijakan Zero Covid-19. Pelambatan di negara besar seperti AS, Eropa dan Tiongkok menjadi kontributor utama dalam pelambatan prospek pertumbuhan global. Di tengah pertumbuhan ekonomi global yang melambat, beberapa negara Asia diperkirakan masih akan menunjukkan prospek pertumbuhan yang kuat seperti India dan ASEAN-6.

Accordingly to IMF projections, US economic growth will significantly slow down from 5.7 percent (yoy) in 2021, to only 3.8 percent in 2022 and 1.0 percent in 2023. While in the most recent OECD projection in December, US economic growth in 2022 was projected at 3.8 percent. However, 2022 growth sharply slowed at around 5.6 percent. Highly aggressive monetary tightening is the main factor that will have an impact on the weakening of the US economy apart from the weakening external demand.

The IMF's projections show that world growth will slow sharply from 6.0 percent in 2021 to 3.2 percent and 2.7 percent in 2022 and 2023, respectively. Throughout 2022, the global growth outlook continues to undergo downward revisions in line with the increase in various pressures such as the war in Ukraine and global geopolitical tensions in general, prolonged high inflationary pressures, aggressive monetary tightening, and China's economic slowdown due to Zero Covid-19 policies. The slowdown in major countries such as the US, Europe and China is a major contributor in the weakening global growth outlook. In the middle of the weakening global economic growth, several Asian countries are expected to still show strong growth prospects such as India and ASEAN-6.

Tabel Outlook Pertumbuhan Ekonomi Global dan Beberapa Negara (%, yoy)
Table of Economic Growth Outlook for Global and Several Countries (%, yoy)

Negara / Country	2021	IMF		OECD	
		2022F	2023F	2022F	2023F
Global	6,0	3,2	2,7	3,1	2,2
Tiongkok	8,0	4,4	4,6	4,4	4,6
Eropa	5,3	3,1	1,6	3,1	1,6
Amerika Serikat	5,7	3,8	1,0	3,8	0,5
India	8,7	8,8	6,9	8,6	6,7
ASEAN-6	3,4	5,3	4,8	-	-

Sumber: Bulan Kebijakan Fiskal Internasional, Kerjasama Ekonomi, Keuangan, dan Fiskal Kepala di Tengah Turbulensi Ekonomi Global, Edisi IV Tahun 2022
Source: Fiscal Policy Agency of the Ministry of the Republic of Indonesia, Economic, Financial and Fiscal Policies Interesting Issues the Global Economic Turbulence, Edition IV of 2022

Prospek Perekonomian Indonesia

Indonesia's Economic Prospect

Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 diproyeksikan mampu kuat kali yaitu masih kuncia di sekitar 5,0 persen. Hal ini juga sesuai dengan proyeksi beberapa dari lembaga internasional. IMF dan Asian Development Bank memproyeksikan 5,0 persen, Bank Dunia 5,1 persen, dan Bloomberg Consensus 4,9 persen. Beberapa hal yang mendukung pertumbuhan Indonesia di sekitar 5,0 persen di tahun 2023, di antaranya perekonomian Indonesia tidak memiliki eksposur yang terlalu besar pada perekonomian global.

Economic growth in 2023 is projected to remain strong at around 5.0 percent. This is also in line with the latest projections from many international institutions. The IMF and Asian Development Bank project 5.0 percent, the World Bank 5.1 percent, and the Bloomberg Consensus 4.9 percent. Several matters that support Indonesia's growth at around 5.0 percent in 2023, including that the Indonesian economy does not have too much exposure to the global economy.

Pertumbuhan ekonomi pada 2022 diperkirakan tetap tinggi didorong oleh permintaan domestik serta kinerja ekspor yang tetap positif di tengah risiko lebih melemahnya permintaan perekonomian global. Dengan demikian dorongan yang kuatan besar khususnya konsumsi masyarakat. Selain itu, tingkat inflasi relatif terkendali, walaupun berisiko elektrabas pengendalian inflasi kedepan.

Economic growth in 2022 is predicted to remain high driven by domestic demand and export performance that remains positive amid the risk of a deeper global economic slowdown, with considerable domestic demand, especially public consumption. Moreover, the inflation rate is relatively controlled, especially related to the effectiveness of food inflation control.

Kinerja NPI (Neraca Pembayaran Indonesia) diperkirakan tetap terjaga dengan surplus transaksi berjalan kondisi dalam kisaran 0,4 – 1,2% dari PDB dan kinerja neraca transaksi modal dan finansial yang tetap baik terutama dalam bentuk PMA. Kinerja NPI pada 2023 diperkirakan tetap baik, ditopang oleh neraca transaksi modal dan finansial dan transaksi berjalan yang solid di tengah risiko berlanjutnya ketidakpastian pasar keuangan global.

The performance of Indonesia's Balance of Payments (BOP) is predicted to be maintained with a current account surplus in the range of 0.4 – 1.2% of GDP, and good performance of the capital and financial account balance, especially in the form of FDI. The performance of Indonesia's Balance of Payments in 2023 is predicted to remain good, supported by a solid balance of capital and financial transactions and current account, in the middle of the risk of the ongoing global financial market uncertainty.

Fundamental ekonomi yang kokoh sangat dibutuhkan dalam rangka menghadapi tantangan saat ini maupun di masa yang akan datang. Salah satu APBN 2023 disiapkan untuk merespons risiko ketidakpastian perekonomian global. Oleh karena itu, kebijakan fiskal tahun 2023 diarahkan untuk mendorong "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

Solid economic fundamentals are strongly needed in order to face current and future challenges. Moreover, the 2023 State Budget is prepared to respond to the risk of global economic uncertainty. Therefore, the 2023 fiscal policy is directed to encourage "Increased Productivity for Inclusive and Sustainable Economic Transformation".

Sumber: Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Pertimbangan Ekonomi, Keuangan, dan Fiskal Negara di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global, Edisi II Tahun 2022
Source: Fiscal Policy Agency of the Ministry of the Republic of Indonesia, Economic, Financial and Fiscal Review Addressing Uncertain Global Economic Turbulence, Edition II of 2022

Prospek Industri Kelistrikan Nasional
National Electricity Industry Prospect

Proyeksi Ketenagalistrikan
Electricity Projections

Pada tahun 2022 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 dan Rencana Konstruksi (RUPTL) Tahun 2019–2028 mengejar beberapa kinerja di subsektor ketenagalistrikan, diantaranya penambahan pembangkit baru sebesar 5.421,80 MW, jaringan transmisi dibangunkan 3.578,5 kms, gardu induk terpenuhi 3.000 MVA, jaringan distribusi dibangunkan 41.081 kms, gardu distribusi dengan target 3.208 MVA serta infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dengan target 3.030 unit. Target dan program kerja ketenagalistrikan tahun 2022 semua satu:

1. Jumlah pelanggan listrik yang dilayanikan 82.219 ribu pelanggan
2. Konsumsi listrik per kapita yang dilayanikan 1.200 kWh/kapita
3. Rasio elektrifikasi dengan target 103%
4. Pencurunan emisi CO_2 pembangkit dilayanikan 0,85 juta ton CO_2
5. Pengembangan *Smart Grid* dengan target di 5 lokasi
6. Susut jaringan dilayanikan di 7,40%
7. Bantuan Hewang Baru Listrik (BPBL) senilai Rp3.000 M

PT PLN (Persero) memperkirakan konsumsi listrik tahun 2023 akan meningkat menjadi 283,12 TWh atau naik 4,14 %. Hal ini didukung pemulihan ekonomi di tahun ini dan kepercayaan publik terhadap pertumbuhan di tahun 2023. Sedangkan isu krisis energi dan inisi yang sangat untuk kelistrikan dijadikan akan menjadi agenda bersama dunia di tahun 2023.

Following the 2020-2024 National Medium-Term Development Plan (RPJMN) and the Ministry of ESDM's 2019-2028 Strategic Plan, several performances are being targeted in the electricity subsector in 2022, including the addition of 5,421.80 MW of power plants, transmission networks with a target of 3,578.5 kms, substations with a target of 3,000 MVA, distribution networks with a target of 41,081 kms, distribution substations with a target of 3,208 MVA and Public Electric Vehicle Charging Station (SPKLU) infrastructure with a target of 3,030 units. Other targets and work programs for electricity in 2022, including:

1. The targeted number of electricity customers is at 82,219 thousand customers
2. The targeted electricity consumption per capita is at 1,200 kWh/capita
3. The targeted electrification ratio is at 103%
4. The targeted reduction of power plant CO_2 emissions is at 0.85 million tons of CO_2
5. The targeted Smart Grid development is at 5 locations
6. The targeted network leakage is at 7.40%
7. New Electricity Investment Assistance (BPBL) for IDR3,000 bn

PT PLN (Persero) estimates that electricity consumption in 2023 will increase to 283.12 TWh or increased by 4.14%. This is supported by economic recovery this year and public confidence in the economy in 2023. Meanwhile, the issue of energy transition and the mission to reduce carbon emissions are predicted to become the world's common agenda in 2023.

Proyeksi Penjualan Listrik
Electricity Sales Projection

PT PLN (Persero) memperkirakan konsumsi listrik tahun 2023 akan meningkat menjadi 283,12 TWh atau naik 4,14%. Hal ini didukung pemulihan ekonomi di tahun ini dan kepercayaan publik terhadap pertumbuhan di tahun depan. Dalam menghadapi tantangan ekonomi di tahun 2023 mendatang, PLN terus berkolaborasi dengan pemerintah dan stakeholder dan berkontribusi khususnya di sektor ketenagalistrikan.

PT PLN (Persero) estimates that electricity consumption in 2023 will increase to 283.12 TWh or an increase of 4.14%. This is supported by economic recovery this year and public confidence in the economy next year. In facing economic challenges in 2023, PLN continues to collaborate with the government and the stakeholders as well as contribute, especially in the electricity sector.

Tabel Proyeksi Pengadaan Tenaga Listrik Indonesia (GWh) dengan Skenario Optimis
Table of Indonesian Electricity Sales (GWh) Projection with Optimistic Scenario

Uraian Description	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Rumah Tangga Household	137.765	133.038	137.601	132.067	137.607	143.151	148.496	153.950	159.527	165.374
Bisnis Business	49.173	48.662	52.673	57.426	63.242	68.278	73.740	79.663	86.071	92.845
Publik Public	16.025	17.708	19.081	19.892	21.108	22.366	23.544	24.614	25.728	27.114
Industri Industry	75.945	72.516	87.713	84.832	101.130	117.927	117.388	132.980	134.726	150.937
Total	278.378	272.924	297.068	295.062	322.695	336.323	356.170	371.130	386.607	406.836
Pertumbuhan (%) Growth (%)	0,3	0,3	5,7	6,0	9,0	5,3	5,2	4,8	4,8	4,7
Pertumbuhan tenaga listrik per kapita (kWh per kapita)* Electricity consumption growth per capita (kWh per capita)*	948	960	1.046	1.089	1.166	1.197	1.247	1.286	1.340	1.396
Beban Puncak Sistem (Gigawatt (GW) System Peak Load (GW)	43.008	45.060	46.560	51.360	54.000	56.700	59.850	62.160	65.850	67.809

*kWh/kapita/tahun adalah perkiraan kasar berdasarkan data PLN.
†kWh/capita/year is an estimate based on PLN data.

Sumber: RUPTL PLN 2021-2030
Source: PLN Electricity Supply Business Plan (RUPTL PLN) 2021-2030

Proyeksi Kondisi Pembangkit
Projection of Power Plant Condition

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap energi fosil masih mendominasi bauran energi nasional hingga 67,4% sedangkan penambahan energi baru terbarukan (EBT) baru 11,8%. Hal tersebut secara mendasar sumbangsih EBT dalam bauran energi nasional terus meningkat walau tidak terlalu signifikan. Salah satunya dalam pembangkit listrik berbasiskan EBT.

The Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) revealed that fossil energy still dominates the national energy mix by 67.4% while the utilization of new and renewable energy (NRE) is only 11.8%. It calculated in detail, NRE contribution for the national energy mix continues to increase even though it is not too significant, including the NRE power plant.

Berdasarkan data RUPTL 2021-2030, terdapat supply baru sebesar 20 GW berasal dari gas, hidro dan batubara untuk mengamankan kebutuhan pasokan, selain, dan angin untuk meningkatkan bauran energi dari pembangkit Energi Baru dan Terbarukan di masa depan.

Based on the 2021-2030 RUPTL data, the additional 20 GW of new supply is sourced to gas, hydro and coal to ensure adequate supply, water, and wind to increase the energy mix of New and Renewable Energy power plants in the future.

Penambahan kapasitas baru didominasi oleh EBT (61,8%) dengan porsi hidro (21,6%) sebagai teknologi yang paling tepat untuk memenuhi target 23% EBT pada tahun 2025 sebagaimana yang tercantum dalam KEN. Hanya beberapa wilayah yang kelebihan kapasitas setelah hasil studi atas on-going project Jawa dan Sumatera tetap menjadi daerah dengan permintaan yang tinggi dengan tingkat pertumbuhan 8% dan 6,8% secara berurutan.

New capacity additions are dominated by NRE (61.8%) with a portion of hydro (21.6%) as the most appropriate technology to meet the 23% NRE target in 2025 as stated in the (KEN). The portion of over all 34% in additional capacity remains only in on-going projects. Java and Sumatera remain demand-intensive regions with the growth rates of 8% and 6.8% respectively.

Proyeksi Pengembangan Pembangkit EBT

Projection of NRE Power Plant Development

Di tahun 2021, Pemerintah telah menetapkan lelangan untuk enam (6) Daerah yang dapat mendorong industri pengolahan dan pemurnian komoditas tersebut dalam negeri. Hal ini menyangkut pabrik berkemampuan industri yang membutuhkan listrik tegangan tinggi juga semester besar. Dalam hal ini PT PLN (Persero) tidak hanya melihat potensi pembentukan listrik tegangan tinggi berbasis program Hilirisasi tambang sebagai peluang untuk meningkatkan permintaan, melainkan juga mempertimbangkan sumber energi baru terbarukan (EBT) dalam sistem kelistrikan nasional. Dimana dalam RUPTL 2021-2030, PLN telah menghasilkan tersedia 51 GW PLTU baru dan berkontribusi membangun 20 GW pembangkit EBT baru (61 persen dari total tambahan kapasitas). Tersedia tersebut sejalan dengan target PLN untuk dapat menekuksi emisi sebesar setidaknya 1,8 miliar ton dalam 25 tahun mendatang.

In 2021, the government has determined a ban on the export of bauxite ore, which is also to encourage a domestic processing and refining industry for the commodity. It affects the potential for more industries that require high voltage electricity. In this case, PT PLN (Persero) not only sees the potential for additional high-voltage electricity due to the downstream mining program as an opportunity to increase demand, but also to increase the mix of new and renewable energy (NRE) in the national electricity system. In the 2021–2030 (RUPTL), PLN has removed plants for 51 GW of new (CFP) and is committed to building 20 GW of new NRE power plants (61 percent of the total additional capacity). The plan is in line with PLN's target to be able to reduce carbon dioxide emissions by 1.8 billion tons in the upcoming 25 years.

Tersedia ini tentunya akan ada penambahan kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) sebesar 3.4 GW serta kombi daya (air seperti baru, biomassa, biogas, sampah dan pembangkit EBT lainnya) dengan total penambahan kapasitas pengembangan lima mencapai 13 GW. Pembangkit EBT di Indonesia untuk saat ingin dan tidak akan mengalami dengan mencapai energi sumber (RES) dalam 10 tahun ke depan.

PLN NP plans to add the installed capacity of geothermal power plants (GPP) of 3.4 GW as well as other resources such as wind, biomass, biogas, waste and balanced NRE power plants with a total additional development capacity of up to 13 GW in the future. The development of NRE in Indonesia for solar, wind and hydro will become relevant to renewable energy sources (RES) in the next 10 years.

Tabel Rencana Pengembangan Pembangkit HET (MW)
Table of HEE Power Plant Development Plan (MW)

Pembangkit/ Power Plant	Satuan / Unit	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Jumlah / Total
PLTP [illegible]	MW	106	186	100	110	975	700	110	900	100	800	3,950
PLTA [illegible]	MW	660	53	110	87	1,070	127	950	1,611	1,779	1,970	9,213
PLTH [illegible]	MW	100	100	277	300	100	10	-	0	12	0	1,136
PLT Surya Surya Power Plant	MWp	50	197	1,200	624	1,021	127	100	105	171	171	4,666
PLT Bayu Wind Power Plant	MW	-	3	10	117	150	75	-	-	-	-	367
PLT Biomassa/ Sampah/ Biomass Waste Power Plant	MW	12	41	98	191	111	10	-	10	-	-	500
PLT HBT Baru HBT New Power Plant	MW	-	-	-	-	-	200	200	221	200	220	1,030
PLT HBT Pasker HBT Pasker Power Plant	MW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	200
Jumlah/ Total	MW	752	846	2,588	1,670	3,044	970	891	2,458	2,464	3,370	20,312

Sumber: RUPTL PLN 2021-2030
Source: PLN RUPTL 2021-2030

Pada sistem Jawa-Bali, kandidat pembangkit yang dipertimbangkan untuk secara pengembangan adalah PLTU tekuhara ultra supercritical (USC) besar 1.000 MW dan 800 MW, PLTGU LNG/gas alam 800 MW, PLTU/GU LNG/CNG jumlah besar jumlah 400-500 MW dan PLTA Pumped Storage 250 MW. Selain itu terdapat beberapa PLTT besar 50 MW dan 110 MW, serta PLTA, PLTN juga pressurized water reactor (PWR) sebe 1.000 MW juga disertakan sebagai kandidat dalam model optimasi perencanaan pembangkitan.

In the Java-Bali system, the candidate power plants considered for the development plan are 1,000 MW and 800 MW ultra supercritical (USC) and CFPP, 800 MW LNG/natural gas FGPP, 400–500 MW peak load-bearing LNG/CNG S/PPP/CCPP and 250 MW Pumped Storage HPP. In addition, there are several 50 MW and 110 MW class GPP as well as HPP, 1,000 MW class pressurized water reactor (PWR) type NPP are also included as candidates in the electric power generator planning optimization model.

Prospek Usaha PLN NP

Business Prospect of PLN NP

Komposisi produksi listrik per jenis energi primer di Jawa, Madura, dan Bali diproyeksikan pada tahun 2030 akan menjadi 66,7% batubara, 17,1% gas (termasuk LNG), 3,6% hidro/air, 0,6% panas bumi, 0,2% BBM, dan 4,8% EBT lainnya. Pada pembangkit EBT di Jawa, Madura, dan Bali akan meningkat dari 8,3% tahun 2021 menjadi 16,1% di tahun 2030.

Composition of electricity production per type of primary energy in Java, Madura, and Bali in 2030 is projected to be 66.7% coal, 17.1% gas (including LNG), 3.6% hydro/water, 0.6% geothermal, 0.2% fuel, and 4.8% other NRE. The portion of NRE power plants in Java, Madura, and Bali will increase from 8.3% in 2021 to 16.1% in 2030.

Gambar Komposisi Bauran Energi Listrik Berdasarkan Jenis Bahan Bakar Jawa, Madura, dan Bali (GWh)

Picture of Electricity Energy Mix Composition by Fuel Type in Java, Madura, and Bali (GWh)

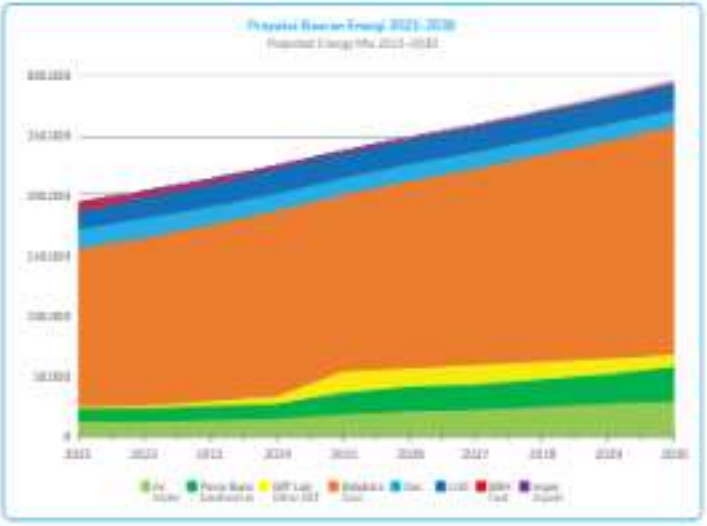

Sumber: RUPTL PLN 2021-2030

Source: PLN RUPTL 2021-2030

Dengan target pemerintah pembangunan energi terbarukan untuk mencapai bauran energi nasional nantiu 23% pada tahun 2025, PLN NP merangkakan untuk menjadi operator solar PV yang terbesar di Indonesia, menjadi leader dalam biomass co-firing hingga 5% hari ini, menjadi operator wind terbesar di Indonesia dan pemain terkemuka di bidang battery storage solution.

Pada tahun 2022 akhir PLN telah melakukan penandatanganan Legal Final Sales, sehingga PLN NP akan menjadi Generation Company terbesar di Asia Tenggara serta siap mengelola pembangkit pembangkit dengan total kapasitas 23,3 GW. Dengan pencapaian ini, PLN NP akan mendapatkan dampak positif bagi upaya Indonesia untuk mengambil bagian pada rantai pasok global di tengah momentum transisi energi saat ini.

Penjualan tenaga Listrik masih menjadi bisnis utama yang disetor oleh PLN NP dimana 79% pendapatan perusahaan berasal dari penjualan tenaga listrik pembangkit eksisting. Seiring dengan perkembangan ketergantungan di Indonesia, di tahun 2023, komitmen PLN NP akan mendukung sistem ketenggelistrikan Jawa Madura Bali akan berkembah seiring dengan rencana COD Add On Unit 1 dan Unit 4 PLTGU Muara Tawar dengan kapasitas masing-masing 216 MW. Adapun rencana pembentukan holding subholding PLN dengan implikasi pengalihan aset PLN yang dikelola PLN NP di sistem Jawa Madura Bali.

PLN NP mendukung penyediaan tenaga listrik dengan 3 prinsip keterjaman, yaitu security, affordability dan low emission di antaranya melalui program coal switching, anti blank out dan anti fast response, modernisasi pembangkit, optimasi Pemakaian Sendiri (PS) melalui PLTS outerbust 5%, co-firing dan hydrotype turbin/ energi untuk mendukung program co-firing PLTU sebutanya.

With the government's target of renewable energy development to achieve a national energy mix towards 23% in 2025, PLN NP aims to become the largest solar PV operator in Indonesia, a leader in biomass co-firing up to 5% hari ini, the largest wind operator in Indonesia and a leading player in the battery storage solution sector.

By the end of 2022, PLN signed a Legal Final Sales, in the future, PLN NP will become the largest Generation Company in Southeast Asia and is ready to manage power plants with a total capacity of 23,3 GW. With this change, PLN NP will have a positive impact on Indonesia's efforts to take part in the global supply chain amid the current energy transition momentum.

Electricity Sales is still the main business earned by PLN NP where 79% of the Company's revenue comes from the sale of electricity from existing power plants. Along with the development of electricity in Indonesia in 2023, PLN NP's contribution in supporting the Java Madura Bali electricity system will increase along with the plan to COD Add On the Muara Tawar block 1 and block 4 CCPP with a capacity of 216 MW each and the plan to establish a PLN holding sub holding with the implications of transferring PLN's assets managed by PLN NP in the Java Madura Bali system.

PLN NP supports the provision of electricity with 3 principles of reliability, energy security, affordability and low emission, including through programs coal switching, anti-blank out and fast response units, well-managed maintenance, optimization of Self-Consumption (PS) through PS outperformer (PS) co-firing and utilization of energy plants to support the coal (CFP) co-firing program.

Tabel Rencana COD Pembangkitan 2023-2025
Table of COD Plan for Electric Power Generation in 2023-2025

Proyek Project	Kapasitas Capacity	Keterangan Description	Progress
Add on Muara Tawar Blok 1 Add on Muara Tawar Block 1	216 MW	Penuggaan Lodgment	Konstruksi Construction
Add on Muara Tawar Blok 4 Add on Muara Tawar Block 4	216 MW	Penuggaan Lodgment	Konstruksi Construction
Cross Sowing PLTU	115 MW	Penuggaan Lodgment	Konstruksi Construction
Total COD 2023	**548 MW**		

Proyek Project	Kapasitas Capacity	Keterangan Description	Program
PLTU Sumbagsel 3 Southern Sumatera 3 CFPP	2x100 MW	Penugasan Assignment	Konstruksi Construction
PLTA Upper Toru Asahan 3 PLTA MW	510 MW	Penugasan Assignment	Eksekusi Construction
PLTS IKN 50 MW	50 MW	Penugasan Assignment	Pengembangan Development
PLTS Kawasan Industri Solar PV	130 MW	Penugasan Assignment	Pengembangan Development
PLTB Tanah Laut Tanah Laut WW	50 MW	Penugasan Assignment	EBT
PLTS Dedicated Industri Solar PV	30 MW	Penugasan Assignment	Lelang Auction
Total COD s.d 2030	**1.000 MW**		

Strategi Perusahaan Kedepan

Future Company Strategy

PLN NP memiliki pana strategis dalam mendukung visi PLN & industri ketenagalistrikan Nasional yaitu:

1. **Securing Business Sustainability**

   Dukungan & line of defense sistem lewa Jawa dengan cara pengadaan sistem proteksi di semua pembangkit dan fasilitas eksisting di Muara Tawar, Muara Karang, dan Cilacap. Serta optimasi CCGT Cilacap dan Muara Tawar sebagai peak saving.

2. **Optimizing Cost Efficiency**

   Efisiensi pemeliharaan rutin pembangkit dan implementasi digitalisasi pembangkit.

3. **Leading Industrial Capabilities**

   Pengelolaan kinerja excellence melalui pembangkit non batubara dan pembangkit batubara. Implementasi Three Line of Defense: 4.0/5.0 & ISO 31000 sebagai Governance Risk Compliance.

4. **Increasing Profit Contribution**
5. **Developing New Edge (Renewable Energy)**

   Mengelola project baru berdasarkan RUPTL 2021-2030 dengan total kapasitas 1.011,2 MW dengan target COD 2022-2028, termasuk di dalamnya PLTS dedicated sebesar 81,2 MW. Pemanfaatan biomass untuk co-firing PLTU batubara & mixed implementasi di pembangkit existing serta biaya dan unit pembangkit yang dikelola PLN NP sd IBK MW 10% dari 4.000 MW)

PLN NP has strategic roles in supporting total PLN in the National electricity industry namely:

1. **Securing Business Sustainability**

   A line of defense support for the Java Bali system by strengthening the protection system in all power plants and blackstart facilities in Muara Tawar, Muara Karang, and Cilacap. As well as optimizing CCGC Cilacap and Muara Tawar as peak saving.

2. **Optimizing Cost Efficiency**

   Self-conservation efficiency of power plants and implementation of power plant digitalization.

3. **Leading Industrial Capabilities**

   Management of excellence performance through non-coal and coal power plants. Implementation of Three Lines of Defense: 4.0/5.0 & ISO 31000 as Governance Risk Compliance.

4. **Increasing Profit Contribution**
5. **Developing New Edge (Renewable Energy)**

   Initiating new projects based on the 2021-2030 CGBP with a total capacity of 1,011.2 MW with a COD target of 2022-2028, including 81.2 MW of dedicated SPP. Utilization of biomass for co-firing coal CFPP & initiation of implementation in conjunction existing power plants and generating units managed by PLN NP up to 2030 MW (10% of 4000 MW).

49.972Hz

Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

Penerapan Tata Kelola Berkelanjutan

Implementation of Sustainable Governance

Terdepan dan terpercaya dalam bisnis energi berkelanjutan menjadi cagukan yang mendorong Perusahaan untuk menjalankan bisnis energi yang inovatif dan kolaboratif, tumbuh berkelanjutan serta berwawasan lingkungan dalam mendukung industri ketenagalistrikan nasional. Perusahaan menarik minat dan mengembangkan talenta terbaik; menjalankan organisasi yang agile dan adaptif serta menjaga tingkat kinerja tertinggi untuk memberikan nilai tambah bagi stakeholders dengan berpegang pada kaidah Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).

Leading and trusted in the sustainable energy business is the idea that encourages the Company to carry out an innovative and collaborative energy business, grow sustainably and environmentally sound in supporting the national electricity industry. The Company attracts and develops the best talent, carries out an agile and adaptive organization and maintains the highest level of performance to provide added value to stakeholders by adhering to the rules of Good Corporate Governance.

Fenomena *Black Swan* (ketidakpastian) menciptakan ketidakpastian yang semakin meningkat. Ketidakpastian ekonomi pasca pandemi COVID-19 dan krisis kedua saat ini juga menjadikan perubahan membutuhkan tantangan bagi semua pelaku bisnis dan industri. Perusahaan memerlukan dampak yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pengadaan tenaga listrik yang dipengaruhkan akan harus terjadi, seiring dengan pengembangan pembangkit tenaga listrik dengan teknologi *Ultra Super Critical* (USC) yang lebih efisien dan berkapasitas besar. Kondisi tersebut mendorong Perusahaan untuk harus berbenah dan bermanuver agar dapat bertahan dan berkembang sebagai perusahaan penyedia tenaga listrik yang andal dan kompetitif melalui ekspansi cerdas dan lebih lanjut ke *Ultra Super Critical* (USC). Di sisi lain, pertumbuhan portofolio PLN ke depan harus dapat menjamin keberlanjutan dan sustainabilitas korporasi di masa mendatang melalui strategi korporat untuk mendukung nilai creation & sustainability dari portofolio bisnis PLN. Perusahaan mendukung value creation & sustainability portofolio bisnis PLN Group melalui implementasi ekosistem subsidiary.

Competition in the electricity business shows an increasing trend. Economic uncertainty after the COVID-19 pandemic and current business trends are also changing, providing challenges for all business and industry players. The Company feels a considerable impact on economic growth and electricity sales growth which is projected to continue, along with the operation of power plants with Ultra Super Critical (USC) technology that are more efficient and have large capacities. These conditions encourage the Company to continue to work and innovate in order to survive and develop as a reliable and trusted electricity provider company through the dedication of the spirit and determination of Loop to the new S Curve. On the other hand, the future development of PLN's portfolio must be able to ensure the success and sustainability of the corporation in the future through a corporate strategy to support the value creation & sustainability of PLN's business portfolio. The Company supports the value creation & sustainability of PLN Group's business portfolio through the implementation of ecosystem subsidiary.

Perusahaan terus melakukan perbaikan agar dapat berperan dan berkembang sebagai perusahaan penyedia tenaga listrik yang andal dan terpercaya dengan terus melakukan inovasi pengembangan bisnis baru dalam meningkatkan penjualan listrik/kWh dengan tetap menjaga dan meningkatkan keunggulan Perusahaan dalam penyediaan tenaga listrik. Proses pengadaan awal pandangan nabi 1931 yang dimulai di tahun 2022 juga menjadi salah satu tantangan sekaligus peluang bagi Perusahaan untuk dapat terus berkontribusi secara maksimal dalam penyediaan tenaga listrik. Selanjutnya Perusahaan berupaya mengatasi tantangan tersebut dan memanfaatkan setiap peluang dengan bekerjasama pada prinsip tata kelola Perusahaan yang baik agar arah pengembangan korporasi Perusahaan yang telah memasuki tahap Transformasi Korporasi 2 menjadi lebih andal, lebih unggul dan berkelanjutan tetap terjaga pada jalurnya.

The Company continues to make improvements in order to survive and develop as a reliable and trusted electricity provider company, including through innovation in developing new business lines in increasing revenue beyond kWh while maintaining and improving the Company's excellence in providing electricity. The process of transferring 1931's power plant assets introduced in 2022 is also one of the challenges as well as opportunities for the Company to be able to continue to contribute optimally in the provision of National electricity. The Company strives to address these challenges and take advantage of every aspect with by adhering to the principles of Good Corporate Governance so that the direction of the Company's corporate development which has entered the Corporate Transformation 2 stage becomes more strong and sustainable remains on track.

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Principles of Good Corporate Governance (GCG)

Transparansi
Transparency

Prinsip Transparansi merupakan keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengungkapkan informasi material yang relevan bagi Perusahaan. Transparansi dipandukan kata diungkapkan oleh Perusahaan dengan tetap memperhatikan pengungkapan informasi kerahasiaan dan non-kerahasiaan kepada stakeholder serta dalam pengungkapannya tidak bertentangan pada informasi yang bersifat wajib dengan tetap memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan praktik terbaik (GCG).

The principle of transparency is openness in carrying out the decision-making process and disclosing material information relevant to the Company. Transparency is pursued and received by the Company by always striving to provide the disclosure of financial and non-financial information to stakeholders as well as in its disclosure is not limited to information that is mandatory by not violating applicable laws and regulations as well as in accordance with GCG best practices.

Akuntabilitas
Accountability

Prinsip akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ Perusahaan sehingga pengelolaan Perusahaan dilaksanakan secara efektif. Pelaksanaan akuntabilitas dengan memastikan setiap individu berada dalam Organ Perusahaan telah memahami hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya.

The principle of accountability in the clarity of functions, implementation and accountability of the Company Organs so that the management of the Company is carried out effectively. The implementation of accountability by encouraging all individuals under Company Organs to understand rights and obligations, duties and responsibilities and authorities.

Pertanggung-jawaban
Responsibility

Prinsip pertanggungjawaban merupakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dan nilai-nilai yang sehat dalam pengelolaan Perusahaan. Pertanggungjawaban dicapai/lihat oleh Perusahaan dengan selalu berusaha sesuai orang Perusahaan yang baik (*Good Corporate Citizen*).

The principle of responsibility is compliance with applicable laws and regulations and the principle of corporate governance and sound business ethics in the management of the Company. Responsibility is realized by the Company by always striving to be a Good Corporate Citizen.

Kemandirian
Independency

Prinsip kemandirian merupakan pengelolaan Perusahaan secara profesional tanpa terdapat benturan kepentingan dan pengaruh/intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat termasuk tidak adanya kepentingan politik dan kepentingan pribadi dalam pengelolaan Perusahaan. Kemandirian merupakan suatu keharusan agar Organ Perusahaan dapat bertugas dengan baik serta mampu mempuat keputusan yang terbaik bagi Perusahaan dan stakeholder dengan selalu mengkomunikasikan dan dibicarakan bagian dan bergabung proses serta keseimbangan masing-masing Organ Perusahaan.

The principle of independence is the independent management of the Company without conflict of interest and influence/pressure from any party that is not in accordance with the applicable laws and regulations and the principles of sound corporate governance including the absence of political interests and personal interests in the management of the Company. Independence is a must so that the Company's Organs can serve such and be able to make the best decisions for the Company and is carried out by always respecting their rights and obligations, duties and responsibilities and authorities of each Company's Organs.

Kewajaran
Fairness

Prinsip kewajaran merupakan keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak Stakeholder sesuai perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan memberikan layanan untuk Pemegang Saham dan Stakeholder memadukan perlakuan yang wajar dan objektif, menggunakan hak-hakmya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

The principle of fairness is justice and equality in fulfilling the rights of Stakeholders in accordance with agreements and applicable laws and regulations. The Company ensures that both Shareholder and Stakeholder services for investment and participation their rights in accordance with applicable laws and regulations.

Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) diharapkan dapat menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan dan meningkatkan kepatuhan terhadap hukum, meskipun perkembangan risiko perusahaan yang selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan kepercayaan para investor dan pemangku kepentingan. Sehingga Perusahaan mampu mendorong efektivitas implementasi program strategis Perusahaan.

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles is expected to reduce costs, strengthen risk management systems and compliance with the laws, encourage growth in corporate value in line with the principles of sustainable development and increase investor and stakeholder confidence. Thus, the Company is able to encourage the effectiveness of the implementation of the Company's strategic programs.

Landasan Hukum dan Standar Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Legal Basis and Standard of Good Corporate Governance Implementation

Dasar hukum dan standar penerapan tata kelola perusahaan yang baik sangat penting sebagai acuan untuk mengimplementasikan dan memenuhi kaidah-kaidah dalam mematuhi aturan dan menjalankan operasional perusahaan guna melindungi kepentingan dan memenuhi harapan para pemegang saham dan para pemangku kepentingan serta terciptanya penciptaan nilai kelompok yang berkelanjutan. Landasan tata kelola perusahaan yang baik di lingkungan Perusahaan berlandaskan pada peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI No.19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
2. Undang-Undang RI No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

The legal basis and standards for the implementation of good corporate governance are very important as a reference for implementing and fulfilling the rules in organizing organs and running company operations in order to protect the interests and fulfill the expectations of shareholders and other stakeholders as well as the achievement of sustainable corporate value creation. The implementation of good corporate governance within the Company is based on the following regulations:

1. Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises.
2. Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

3. Keputusan Menteri Negara BUMN nomor KEP-117/MBU/2011 tanggal 31 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara, serta perubahannya melalui Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/2012 tanggal 06 Juli 2012;
4. Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara.

Perusahaan juga mengadopsi standar penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagai acuan dasar disesuaikan dengan komponen/langkah kebutuhan, lingkungan tempat beroperasi, ukuran dan kompleksitas bisnis, serta arah risiko dan tantangan yang dihadapi Perusahaan. Standar penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang menjadi acuan Perusahaan antara lain:

1. Prinsip-prinsi Corporate Governance oleh Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. Pedoman Umum Governance Korporasi Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG);
3. ASEAN Corporate Governance Scorecard;
4. Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

3. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises number PER-09/MBU/2012 dated August 31, 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, as well as its amendment through Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-09/MBU/2012 dated July 06, 2012;
4. Decree of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises No. SK-16/S.MBU/2012 dated July 6, 2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.

The Company also adopts standards for the implementation of good corporate governance as a reference of best practices by considering the needs, the environment in which it operates and the complexity of the business, as well as the risks of risks and challenges faced by the Company. The standards of good corporate governance implementation that become the Company's reference, among others:

1. Principles of Corporate Governance by the Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) and the Financial Services Authority (OJK);
2. General Guidelines for Indonesian Corporate Governance by the National Committee on Governance Policy (KNKG);
3. ASEAN Corporate Governance Scorecard;
4. Guidelines for the Corporate Governance of Public Companies in the Regulation of the Financial Services Authority (POJK).

Sasaran Strategis dan Upaya Membangun Tata Kelola Berkelanjutan

Strategic Targets and Efforts to Build Sustainable Governance

Penerapan tata kelola berkelanjutan diharapkan mampu mendorong efektivitas program strategis Perusahaan dalam menjawab dan mengantisipasi tantangan dan isu strategis di tahun 2021. Perusahaan telah menyusun program-program strategis sebagai arah dan kendali program kerja Perusahaan agar dapat mencapai target Perusahaan dengan mengacu pada pilar ke-tiga Rencana Perusahaan, Green RUPTL 2021-2030, Perseroan Bauran EBT 23% pada tahun 2025 dan mendukung komitmen Pemerintah hemat, dalam rangka di tahun 2060, berdasarkan isu strategis yang menjadi sasaran strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan Market Share dan Kapasitas Pembangkit;
2. Pengembangan Usaha dan Peningkatan Revenue;
3. Perwujudan Usaha dengan 3 Prinsip Keseimbangan (Security, Affordability, Low Emission).

The implementation of sustainable governance is expected to be able to support the effectiveness of the Company's strategic programs in answering and optimizing challenges and strategic issues in 2021. The Company has developed strategic programs as the direction and corridor of the Company's work program in order to achieve the Company's targets by referring to the Company's business line map, the 2021-2030 Green Electricity Supply Business Plan (RUPTL), fulfilling the 23% EBT Mix in 2025 and supporting the Government's commitment towards carbon neutral in 2060, based on strategic issues that become strategic targets as follows:

1. Increased Market Share and Power Plant Capacity;
2. Business Development and Increased Revenue;
3. Provision of Business with 3 Principles of Balance (Security, Affordability, Low Emission).

Implementasi GCG merupakan proses berkesinambungan dan dinamis yang harus berkembang seiring dengan munculnya gagasan-gagasan dan best practices yang sebaiknya diterapkan korporasi untuk dapat memenuhi substansi kebijakan yang berlandaskan asas-asas prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Sehingga praktik GCG dapat mendorong terciptanya nilai yang berkelanjutan. Penerapan praktik GCG tersebut bukan hanya dalam bentuk penyusunan seperangkat aturan internal dan organ pendukung, tetapi secara substansi dapat mendorong kesadaran sehat antar dalam Perusahaan dan para pemangku kepentingan (*Leness Verbatim* sepemangan terbaik Perusahaan dalam jangka panjang. Perubahan mendorong proses tata kelola yang sudah dengan nilai-nilai yang ada di Perusahaan dalam rangka memastikan pencapaian sehat proses Bisnis dijalankan pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

GCG implementation is a continuous and dynamic process that continues to develop along with the emergence of ideas and best practices that should be implemented by corporations to embrace the rule of substance contained in the principles of good corporate governance. Thus, GCG practices can encourage the creation of sustainable value. The implementation of GCG practices is not only in the form of the preparation of a set of internal rules and supporting organs, however, in substance, can encourage the concern of every element in the Company and other stakeholders for the best interests of the Company in the long term. The Company has developed a governance process that is in line with the nature of the Company in order to ensure that the implementation of such business process is based on the principles of good corporate governance.

Keterangan:

1. Develop GCG

   Pengembangan struktur dalam penerapan GCG, yang meliputi pedoman implementasi, pedoman kebijakan dan panduan perilaku. Hasil output proses ini adalah CG Code dan Roadmap GCG, sebagai pedoman implementasi GCG di Perusahaan. Kedua output ini akan menjadi referensi dalam penyusunan pedoman kebijakan lainnya atau soft structure GCG. Pedoman tersebut dievaluasi secara berkala disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan Perusahaan.

2. Cascade to all Parties

   Kegiatan mengkomunikasikan dan mensosialisasikan soft structure yang telah ditetapkan kepada seluruh Insan Perusahaan. Hasil dari proses ini adalah ditetapkannya Board Manual (Tatakelola Hubungan Direksi dan Dewan Komisaris), PKB hasil kesepakatan Manajemen dengan Serikat Pekerja dan Code of Conduct sebagai pedoman perilaku seluruh Insan Perusahaan. Pedoman tersebut dievaluasi secara berkala disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan Perusahaan, selain itu, seluruh karyawan juga menandatangani komitmen atas kepatuhan terhadap pedoman perilaku setiap tahunnya.

3. Plan the Implementation

   Proses merencanakan untuk mencapai tujuan. Hasil dari proses ini adalah ditetapkannya Charter (Komite Audit Charter & Internal Audit Charter), Pedoman Pelaksanaan Audit, Guest Keynote Dinas, dan penandatanganan Pakta Integritas oleh Direksi.

4. Execution

   Tahapan proses dimana kegiatan bisnis yang dilaksanakan Perusahaan mempertahankan prinsip-prinsip GCG.

5. Monitor & Learn

   Kegiatan pengukuran pelaksanaan GCG dan tata nilai Perusahaan. Hasil dari proses ini adalah hasil assessment GCG, baik yang dilakukan oleh badan independen (pada tahun genap), atau secara self assessment (pada tahun ganjil), serta Budaya Perusahaan dan Workforce Engagement Survey.

6. Use & Adapt

   Pengembangan berkelanjutan dari hasil assessment GCG. Perlu dilakukan continuous improvement dari penerapan GCG yang telah dilakukan dengan memperbaiki Area of Improvement yang ditemukan saat pelaksanaan assessment.

Perusahaan berupaya melakukan proses tata kelola perusahaan secara berkelanjutan dan melakukan perbaikan secara berkesinambungan sehingga mampu mendapatkan predikat sebagai Good Corporate Citizen serta mampu memperkenalkan dan menyediakan upaya pencapaian tujuan perusahaan yang berintegrasi dengan aspek keberlanjutan. Perusahaan juga harus meningkatkan penerapan GCG dengan membangun kesadaran dan kepatuhan setiap individu di lingkungan Perusahaan untuk menjalankan praktik GCG yang mendukung keberlangsungan bisnis Perusahaan dalam jangka panjang dan kepentingan stakeholders.

Description:

1. Develop GCG

   Development on structure in GCG implementation, which includes implementation guidelines, policy guidelines and behavioral guidelines. The output of this process is the CG Code and GCG Roadmap as guidelines for GCG implementation in the Company. These two outputs will become references in the preparation of other policy guidelines or GCG soft structures. The guidelines are evaluated periodically in accordance with the development of the Company's needs.

2. Cascade to all Parties

   The activity of communicating and socializing the soft structure that has been determined to all Company Personnel. The result of this process is the determination of the Board Manual (Management of Relationship between the Board of Directors and Board of Commissioners), PKB as a result of Management's agreement with the Labor Union, and Code of Conduct as a guideline for the behavior of all Company personnel. These guidelines are evaluated periodically in accordance with the development of the Company's needs. In addition, all employees also sign a commitment to comply with the rules of conduct every year.

3. Plan the Implementation

   The process of coordinating resources to achieve objectives. The result of this process is the determination of the Charter (Audit Committee Charter & Internal Audit Charter), Guidelines for Audit Implementation, Decree of the Board of Directors, and the signing of the Integrity Pact by the Board of Directors.

4. Execution

   The stage of process where the Business activities carried out by the Company take into account the principles of GCG.

5. Monitor & Learn

   Activities to measure the implementation of GCG and corporate values. The results of this process are the GCG assessment results, either conducted by an independent agency (in even years), or by self-assessment (in odd years), as well as the Corporate Culture and Workforce Engagement Survey.

6. Use & Adapt

   Continuous development of GCG assessment results. It is necessary to carry out continuous improvement of the implementation of GCG that has been carried out by improving the Areas of Improvement found during the assessment.

The Company strives to carry out the corporate governance process sustainably and make continuous improvements so as to be able to hold the title of Good Corporate Citizen as well as being able to align and realize efforts to achieve corporate goals that are integrated with sustainability aspects. The Company also continues to improve the implementation of GCG by building awareness and concern of every individual within the Company to carry out GCG practices that promote the Company's business continuity in the long term and the interests of stakeholders.

Program kegiatan yang telah dilakukan Perusahaan pada tahun 2022 dalam rangka mendorong pencapaian sasaran strategis GCG Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian Hasil Rekomendasi *Area of Improvement* dan *Assessment* GCG Tahun 2021.
2. Pembahasan Program Tindak Lanjut *Area of Improvement* (AOI) Assessment GCG Tahun 2021 serta/*cum* Hasil Perusahaan (LK) pada Aspek Pemegang Saham.
3. Penyusunan Program Tindak Lanjut AOI Assessment GCG Tahun 2021.
4. Penyelesaian Program Tindak Lanjut AOI Assessment GCG Tahun 2021, termasuk pada Aspek Pemegang Saham dan telah disampaikan kepada EVP PKB PLN.
5. Review GCG, Code Etik, Code of Conduct serta penyusunan dan review kebijakan yang diperlukan.
6. Pelaksanaan Induksi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang/baru dengan materi EBPP, GMC, Teknologi, Pengembangan Bisnis dan materi lainnya.
7. Review dan penyesuaian Peraturan Direksi Pedoman GCG Tahun 2022.
8. Review dan penyesuaian Peraturan Direksi tentang Sistem Kewenangan Pengambilan Keputusan.
9. Pelaksanaan update Dokumen Daftar Khusus Pada Integritas Hubungan Keluarga dan Kepemilikan Saham Direksi Komisaris dan Hubungan Kepemilikan dan Kepemilikan Saham Direksi Dewan Komisaris.
10. Penyusun pelaksanaan assessment GCG periode implementasi tahun 2023.
11. Sosialisasi dan refreshment pemahaman terkait anti-struktur GCG kepada seluruh karyawan.
12. Komitmen integritas atas Sistem Manajemen Anti Penyuapan oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

The activity programs that have been conducted by the Company in 2022 in order to encourage the achievement of the Company's GCG strategic targets are as follows:

1. Submission of Recommendation Results (Areas of Improvement) on the 2021 GCG Assessment.
2. Discussion of the Follow-up Program for the Area of Improvement (AOI) of the 2021 GCG Assessment for all PLN Subsidiaries on the Shareholder Aspect.
3. Preparation of the Follow-up Program for the AOI of the 2021 GCG Assessment.
4. Completion of the 2021 GCG AOI Assessment Follow-Up Program, including the Shareholder Aspect and has been submitted to SEVP K PLN.
5. Review of GCG, Code and Code of Conduct as well as preparation and review of necessary policies.
6. Induction of new Members of the Board of Directors and Board of Commissioners with EBPP, GMC, Technology, Business Development and other materials.
7. Review and refinement of the Regulation of the Board of Directors on the 2022 GCG Implementation.
8. Review and refinement of the Regulation of the Board of Directors on the Limitation of Decision-Making Authority.
9. Updating the Special Register Documents (Integrity Pact, Family and Financial Relationships of the Board of Directors of Board of Commissioners as well as Management Relationship and Share Ownership of the Board of Directors and Board of Commissioners).
10. Preparation for GCG assessment implementation period in 2023.
11. Socialization and refreshment of understanding related to GCG anti-structure to all employees.
12. Integrity Commitment on the Anti-Bribery Management System by the Board of Directors and Board of Commissioners.

Penanggung Jawab Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Person in Charge of Good Corporate Governance Implementation

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada dasarnya menjadi tanggung jawab seluruh elemen yang ada di lingkungan Perusahaan termasuk Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) baik Pada rangkuan umum, Dewan Komisaris dan Direksi sebagai organ utama dalam tata kelola Perusahaan maupun karyawan serta stakeholder lainnya. Untuk dapat memastikan kualitas penerapannya, Direksi melalui Keputusan Direksi di Luar Kapat bertanggung Perusahaan Penanggung Jawab dalam Penerapan dan Pemantauan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) tanggal 2 Juli 2021 telah menetapkan Kepala Biro/ Direktur SDM dan Administrasi

The implementation of good corporate governance is basically the responsibility of all elements within the Company, including Shareholders through the General Meeting of Shareholders (GMS), both physical and virtual, the Board of Commissioners and Board of Directors as the main organs in the corporate governance as well as employees and other stakeholders. To ensure the quality of its implementation, the Board of Directors through the Board of Directors' Decision outside the Meeting on Appointment of Person in Charge of Implementation and Monitoring of Good Corporate Governance dated July 2, 2021 has specifically determined the Director of Human Resources and Administration as the person in

sebagai penanggung jawab dalam pemrosesan dan pemantauan GCG. Secara teknis, Direktur SDM dan Administrasi dibantu oleh Sekretaris Perusahaan sesuai dengan Peraturan Direksi No. 0036.P/010/DIR/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Pembangkitan Jawa-Bali dalam memastikan pemrosesan dan pemantauan GCG di lingkungan PJB.

Tanggung jawab Direktur SDM dan Administrasi terkait pemrosesan dan pemantauan GCG antara lain:

1. Menyusun rencana kerja yang diperlukan untuk memastikan perusahaan memenuhi Pedoman Pemrosesan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) di Perusahaan dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam rangka melaksanakan proses-proses Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
2. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Perusahaan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku;
3. Memantau dan menjaga kepatuhan Perusahaan terhadap setiap perjanjian dan kontrak yang dibuat oleh Perusahaan dengan pihak ketiga;
4. Menyampaikan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang dilaksanakan kepada RUPS dan Dewan Komisaris minimal setiap dalam setahun.

Sekretaris Perusahaan menyusun laporan pelaksanaan GCG untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Komisaris dan RUPS melalui Laporan Hasil Assessment GCG, Laporan Manajemen dan Laporan Tahunan Perusahaan.

(range of the implementation and monitoring of GCG). Technically, the Director of Human Resources and Administration is assisted by the Corporate Secretary in accordance with the Regulation of the Board of Directors No. 0036.P/010/DIR/2022 concerning Organization and Work Procedures of PT Pembangkitan Jawa-Bali in ensuring the implementation and monitoring of GCG within PJB.

Responsibilities of the Director of HR and Administration related to the implementation and monitoring of GCG include:

1. Developing work plans necessary to ensure that the Company complies with the Guidelines for the Implementation of Good Corporate Governance in the Company and other laws and regulations in order to implement the principles of Good Corporate Governance;
2. Monitoring and maintaining that the Company's business activities do not deviate from applicable provisions;
3. Monitoring and maintaining the Company's compliance with all agreements and commitments made by the Company with third parties;
4. Reporting the implementation of Good Corporate Governance submitted to the GMS and the Board of Commissioners at least once a year.

The Corporate Secretary prepares GCG implementation reports to be submitted to the Board of Commissioners and GMS through the GCG Assessment Report, Management Report and the Company's Annual Report.

Penilaian Implementasi GCG
Assessment of GCG Implementation

Penilaian implementasi GCG dilakukan dalam rangka mengukur kualitas pemrosesan standar tata kelola perusahaan yang baik di lingkungan Perusahaan. Penilaian implementasi GCG tahun 2022 dilakukan oleh Pihak Independen dalam hal ini yaitu Perusahaan Daerah Pengembangan Keuangan dan Pembangunan (DPKP) Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Direktur Utama Nomor: (A/B/0000) tanggal 31 Januari 2023 perihal Pemberitahuan sebagai Asesor Independen - Dalam Rangka Assessment GCG Periode 2022 PT Pembangkitan Jawa-Bali dan Surat Kepala Perwakilan DPKP Provinsi Jawa Timur Nomor PE.35.0205.0.230 /PW13/K1/2023 tanggal 15 Februari 2023 perihal Assesmen GCG pada PT Pembangkitan Jawa-Bali (PT PJB) Periode Tahun 2022 berdasarkan panduan SCG untuk periode implementasi tahun 2021 dilakukan secara mandiri (self assessment) yang

Assessment of GCG implementation is conducted in order to measure the quality of implementation of good corporate governance standards within the Company. The assessment of GCG implementation in 2022 was conducted by an Independent Party, in this case namely the Representation of the East Java Province Financial and Development Supervisory Agency (DPKP) based on Letter of the President Director Number: (A/B/0000) dated February 6, 2023 regarding Application as an Independent Assessor - In the Context of GCG Assessment for the 2022 Period of PT Pembangkitan Jawa-Bali and Letter of the Head of DPKP Representative of East Java Province Number PE.35.0205.0.230 /PW13/K1/2023 dated February 15, 2023 regarding GCG Assessment at PT Pembangkitan Jawa-Bali (PT PJB) for the 2022 Period. While the GCG assessment for the 2021 implementation

Berita acara validasinya telah ditandatangani pada tanggal 14 Januari 2022, Kriteria yang digunakan dalam penilaian tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 16/KMK.06/2022 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN.

Hasil penilaian GCG oleh BPKP untuk periode implementasi tahun 2021 memperoleh klasifikasi "Sangat Baik" dengan capaian skor 94,54. Capaian tersebut menurun dari tahun 2020 (self assessment) dengan skor 99,67 dan meningkat dari capaian tahun 2020 yang dilakukan assessment oleh BPKP dengan skor 90,00. Perbandingan per aspek penguji tahun 2021 adalah sebagai berikut:

periode ini dilakukan independently (self assessment) where validation minutes have been signed on January 14, 2022. The criteria used in the assessment refer to the Decision of the Minister of Finance of RI No. 16/KMK.06/2022 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in BUMN.

The results of the GCG assessment by BPKP for the 2021 implementation period obtained a "Very Good" classification with a score of 94.54. The achievement decreased from 2020 (self-assessment) with a score of 99.67 and increased from the 2020 achievement which was assessed by BPKP with a score of 90.00. Achievements per testing aspect in 2021 are as follows:

Skor Assessment GCG PLN NP Periode 2021

PLN NP GCG Assessment Score for 2021 Period

No.	Aspek Penguji Assessment Aspects	Bobot Weight	Capaian Tahun 2021 Achievements in 2021		Keterangan Description
			Skor Score	% Capaian Achievement	
1	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Secara Berkelanjutan Commitment to the Sustainable Implementation of Good Corporate Governance	7	6,71	95,14	Sangat Baik Very Good
2	Hubungan Selaras dan Efektif Pemilik Modal Shareholders and Effective Capital Owners	8	7,83	97,91	Sangat Baik Very Good
3	Dewan Komisaris Board of Commissioners	31	31,03	97,01	Sangat Baik Very Good
4	Direksi Board of Directors	35	33,83	96,66	Sangat Baik Very Good
5	Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency	8	7,93	99,04	Sangat Baik Very Good
6	Aspek Lainnya Other Aspects	6	5,00	9,09	Sangat Baik Very Good
Skor Keseluruhan Total Score		100		95,54	
Kualifikasi Kualitas Penerapan GCG GCG Quality Qualification				**Sangat Baik** Very Good	

Penilaian penerapan GCG Perusahaan telah dilakukan sejak tahun 2009. Capaian assessment GCG yang diperoleh PLN NP selalu dalam kualifikasi "Sangat Baik" (nilai di atas 90) dalam 5 (lima) tahun terakhir, sebagaimana disajikan dalam grafik berikut:

assessment of the Company's GCG implementation has been conducted since 2009. The GCG assessment achievement obtained by PLN NP has always been in the "Very Good" qualification (score above 90) in the last 5 (five) years, as shown in the following chart:

Skor Penilaian GCG Tahun 2018 - 2022

GCG Assessment Score in 2018 - 2022

Penilaian penerapan GCG tahun 2022 mengharuskan beberapa *Area of Improvement* (AoI) berupa rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan kualitas penerapan GCG di tahun selanjutnya. Rekomendasi penilaian penerapan GCG tahun 2022 adalah sebagai berikut.

The assessment of GCG implementation in 2022 resulted in several Areas of Improvement (AoI) in the form of recommendations to be followed up in order to improve the quality of GCG implementation in the following year. Recommendations for the assessment of GCG implementation in 2022 are as follows:

Rekomendasi Hasil Assessment GCG Perusahaan Periode 2022

Recommendations on the Company's GCG Assessment Results for the 2022 Period

Aspek *Aspect*	Rekomendasi *Recommendation*	
Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Secara Berkelanjutan *Commitment to the Implementation of Good Corporate Governance*	1. Pedoman tata kelola belum disebarluaskan secara menyeluruh (masih ada beberapa SOE) 2. Pemutakhiran Pedoman Perilaku untuk tahun berikut (AoI) 3. Melaksanakan Aoi Assessment GCG tahun 2022 sebagai sebagai dan sebagai sesuai dengan peraturan.	1. Governance guidelines have not been updated due to following the standard entity (SOE). 2. The update of the Code of Conduct for 2023 is AoI item. 3. GCG AoI Assessment implementation in 2022 are quite completed and quality still in the settlement process
Penugasan Khusus dari RUPS/Pemilik Modal *Shareholders and GMS/ Capital Owners*	1. Pelantikan Dewan belum dilakukan dengan dasar hukum Peraturan. 2. Tidak ada keterangan Penugasan Khusus/RUPS dan garis untuk pandor Direksi yang dapat dirangkai, sehingga belum bisa dipertanggungjawabkan 3. Penetapan penggantian/pemberhentian Dewan Komisaris belum dilakukan sesuai peraturan hanya dilakukan dengan Surat Direksi saja 4. Anggota Komisaris independen tidak dilakukan sesuai ketentuan dalam hal penggantian sebanyak 25% dari jumlah seluruh Komisaris 5. Belum ada dasar penyusunan dengan mempertimbangkan untuk evaluasi pada sebagai Komisaris yang dapat dipergunakan sebagai Komisaris 6. Pengganti RUPS dalam Penugasan Khusus dengan 28 November 2022, sebagaimana pengaturan dari Penugasan Khusus tanggal 8 November 2022 sebagai pengaturan dari Direksi dan pengaturan dari Direksi.	1. The inauguration of the Board of Directors has not been supported by the decree of inauguration. 2. There is no Shareholder's/GMS decision regarding the duties of Board of Directors positions that can be held concurrently, if there is no portion of relevant. 3. The appointment/resignation of the Board of Commissioners has not been supported by the Minutes of Inauguration, only supported by the Minutes of Handover of Position. 4. Members of the Independent Commissioners are not explicitly stated in the appointment decree in 25% of the total number of Commissioners. 5. There is no regulation that explicitly regulates the minimum number of Commissioners' positions that can be held by a member of the Commissioners. 6. Submission of the GMS in the Shareholders' Circular dated 31, 2022, while the notification by the shareholders on November 8, 2022, that succeeded 2022 and then this reference to the Board of Directors.

Aspek Aspects	Rekomendasi Recommendations
	7. Sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) Direksi harus berasal dari Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia. 8. Tata cara pencalonan dan pengangkatan anggota Direksi Perseroan diatur dalam Anggaran Dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. 9. Pengangkatan anggota Direksi Perseroan harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Menteri. 10. Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. 11. Pengangkatan anggota Direksi Perseroan harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.	7. Corporate citizenship requirements for at least 30% (thirty percent) of the Board of Directors members. 8. The procedure for the nomination and appointment of the Company's Board of Directors members shall be stipulated in the Articles of Association in accordance with the capital market regulations and other applicable laws and regulations. 9. The appointment of the Company's Board of Directors members must obtain prior approval from the Minister. 10. The Board of Directors members shall be appointed for a specific term of office and may be reappointed for one more term of office. 11. The appointment of the Company's Board of Directors members must comply with the capital market regulations and other applicable laws and regulations.
Dewan Komisaris Board of Commissioners	1. Dewan Komisaris telah melaksanakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Dewan Komisaris, tetapi pelaksanaannya belum sesuai dengan yang direncanakan. 2. Berdasarkan RKAP Dewan Komisaris seperti Direksi, untuk 2019 tidak ada rencana pengiriman dan 2020 belum dapat dinilai. 3. Dewan Komisaris belum menyampaikan rencana pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa pada Rich Dewan terhadap tahun 2021. 4. Dewan Komisaris belum memiliki kebijakan pengawasan keuangan, pemeriksaan terhadap pelanggan dan kondisi-kondisi yang dapat dengan pihak terkait. 5. Dewan Komisaris melakukan telah terhadap kondisi atas direksi. Direksi melaksanakan pembinaan dan saran kepada Direksi melalui rapat pengawasan Direksi maupun terhadap usulan penanganan untuk PT ISE telah terjadi. Perseroan dan Perseroan, dengan PT ISE belum dilaporkan dalam pembahasan dan pembinaan. 6. Dewan melaksanakan telah dilaksanakan telah dilaksanakan dalam rangka dan Direksi dilakukan telah cukup. 7. Dewan Komisaris melalui surat tanggal 2021 tanggal 10 Mei 2021 telah mengusulkan calon KAP yang telah memenuhi syarat kepada PT ISE. Namun demikian pelaksanaan tersebut tetap belum memperhatikan beberapa kelemahan KAP tersebut (seperti di atas). 8. Dewan Komisaris belum melakukan telah terhadap laporan ESG yang disampaikan dalam laporan tahunan. 9. Dewan Komisaris belum memiliki kebijakan mengenai pelaporan dan penilaian hal-hal tersebut. Dewan Komisaris. 10. RUPS Dewan Komisaris telah telah. Rapat Dewan Komisaris belum memuat: a. Rekomendasi evaluasi Rapat yang telah telah dilaksanakan. b. Rekomendasi terkait alur waktu Direksi dan action/keputusan RUPS terkait dengan waktu Direksi. 11. Belum terdapatnya dokumen terkait rapat dan evaluasi Dewan Komisaris yang telah ditunjuk.	1. The Board of Commissioners has implemented a training program in order to improve the competence of members of the Board of Commissioners. However, the implementation has not been optimized. 2. Submission of the Board of Commissioners' Work Program and Budget (WKB) to the Board of Directors is not included in part of the ABDP has not been fully. 3. The Board of Commissioners has not yet included a plan to supervise the procurement of goods and services in the 2021 WKB of the Board of Commissioners. 4. The Board of Commissioners does not yet have a policy for monitoring the Company's compliance with agreements and commitments made with third parties. 5. The Board of Commissioners reviewed the remuneration of others of the Board of Directors through the discussion process of the Board of Commissioners internal meeting and the Board of Directors supervisory meeting, however the proposed payment of PT ISE's representatives is in adequate, not fulfilled. Companies has not yet been reviewed and followed. 6. The granting of performance recommendations after the receipt of complete documents and official written instructions from the Board of Directors did not been conducted in a timely manner. 7. The Board of Commissioners through letter number 2021 dated May 10, 2021 has proposed the name of KAP that will audit the financial statements of PT ISE, along with the reasons for the nomination, but has not included the reasons of the nominee for the KAP (as mentioned). 8. The Board of Commissioners has not reviewed the ESG report presented in the annual report. 9. The Board of Commissioners does not yet have a policy on overseeing and assessing the performance of the Board of Commissioners. 10. The RUPS minutes in the case of the Board of Commissioners' meeting does not yet contain: a. Recommendation of follow-up evaluation on the results of the previous meeting. b. Recommendations of the proposals of the Board of Directors and the directive/decision of the GMS related to the proposals of the Board of Directors. 11. The minutes of the meeting do not fully make the return for the dismissal of the Board of Commissioners.

Aspek Aspect	Indonesia Bahasa Indonesia
Direksi Board of Directors	1. ESP pengadaan barang dan jasa lebar sepasukan dilaksanakan secara UMKM karena sudah dipenuhi sebanyak lebih sudah 2. Dalam menyelenggarakan rapatnya RUP kepada Dewan Komisaris sesuai Surat 01400/0211 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penyampaian Usulan RUPS Tahun 2022, sehingga rapatnya tersebut dilaksanakan sebelum tanggal 15 September 2021 3. Nilai total HPS tersebut, dan identitas perusahaan maupun lelang yang dilakukan, mohon sebagai bentuk HPS tertutup 4. Terdapat tenaga audit internal, jika pengadaan barang dan jasa sebanyak 12 dan 36 unit yang dipakai 5. Pakaian tenang pakaian dan kebutuhan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 6. Pemohon rapat sebanyak-banyak Perangang dalam rapat yang lebih disajikan, harus: a. pemberitahuan rapat kerja pemohon (gunakan the relevant) rapat 2 (dua) lebar rapat dan dicatat; b. Notifikasi rapat 1 lebar hadir rapat rapat hadirnya 7. Tiap SPK atau kasus waktu dalam lebih lebih komite.	1. The ESP for the procurement of goods and services not sub-tasks fully implemented effectively due to audit findings. 2. The Board of Directors submit the AGSP note to the Board Commissioners in accordance with Letter 01400/0211 dated January 31, 2021 concerning Submission of the 2022 AGSP Proposal, the AGM should have been submitted before September 15, 2021. 3. The total value of HPS varies, it can be confidential depending on the type of procurement activities and the name of the HPS as known 4. There are internal audit tasks in the procurement of goods and services of 12 and 36 units available. 5. Guidelines on Administrative Assistance and salary facilities for the Board of Directors and Commissioners of Subsidiaries/Affiliated Companies are set in accordance. 6. The Company is also known the presence of shareholders through the attachment of agenda "regular sessions" a. the agenda in the relevant of the Company could be held in any case for relevant members; b. the agenda was the last 3 years was held and; 7. The KPI level for the last 1 year was not later considered.
Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency	1. Terkait publikasi pada sumber PT PLN non-kategori, sedangkan pengungkapan transaksi Perusahaan. Terdapat dokumen seperti Board Manual yang dianggap kurang sesuai pengadaan saat internal Audit Charter (2017), tidak dilakukan update, meskipun (2) 2014 – tidak dilakukan update. 2. Terkait informasi dalam website telah di update secara periodenya dengan Terdapat beberapa informasi yang tidak dilakukan update seperti pada Laporan Pengelolaan LHKPN hanya sampai tahun 2020, Struktur Anak Perusahaan yang diunggah masih versi 2017, Annual dan beberapa masih belum dengan tahun 2020. 3. Dalam Annual Report 2021 terlihat dengan beragam pada masih perusahaan terutama mengenai kebijakan perusahaan terhadap pelanggan konsumen. Tidak terdapat informasi terkait kasus yang telah dilakukan, hanya ada ringkasan tanpa ada analisis.	1. Related to the publication of PT PLN subsidiary of acknowledgement for the implementation of corporate governance. There are documents such as Board Manual approved are considered dated, internal Audit Charter (2017) – no update), (2) 2014 – no update. 2. Related information on the website has been updated according to development. There are several information that is not updated, such as the Asset Administration Wealth Report (LHKPN) Submission Report only until 2020, the summary of the 2017 structure only, and 2020 the uploaded annual audit report is still 2017. Annual and beberapa highlights are still up to 2020. 3. In the 2021 Annual Report appears in general social responsibility, especially regarding the Company's commitment to consumer protection. There is no information regarding the cases that have resolved, there is only a brief summary explanation.
Aspek lainnya Other Aspects	-	-

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Penilaian GCG

Follow-up on Recommendations of GCG Assessment Results

[illegible]

[illegible]

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Assessment GCG PLN NP Periode 2021

[illegible]

No.	Rekomendasi Recommendation	Tindak Lanjut Follow-up
[illegible]		
1	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]

No.	Rekomendasi Recommendation	Tindak Lanjut Follow Up
7	Menetapkan Sistem Pengendalian Audit Internal yang Memadai oleh DJPK. Determining the Guidance for the Department of Internal Auditor Adequately by the DJPK.	Penyempurnaan surat keterangan penugasan auditor internal. Submission of the notice to auditor appointment improvement letter.
8	Memintakan usulan tertulis penetapan/revisi SOP dari Divisi Hukum & Kepatuhan dan mendistribusikannya setelah ditetapkan oleh DJPK. Requesting the proposal of SOP ratification/revision from the Board of Governance or the Division and distributing it after it is determined by the DJPK.	Informasi kepada seluruh SP terkait ratifikasi/revisi SOP. Information to all SPs regarding the ratification of SOP's amendment.
9	Mendiskusikan pedoman penyusunan laporan tahunan (annual report) dan laporan keberlanjutan (Sustainability Report). Determining the guidelines for the preparation of the annual report and the report on the Supervisory duties of the Board of Commissioners.	Penyusunan pedoman dalam subsidiary governance. Preparation of guidelines in subsidiary governance.
10	Menetapkan pedoman tentang dividen. Determining guidelines on dividends.	Penyusunan pedoman dalam subsidiary governance. Preparation of guidelines in subsidiary governance.
ASPEK: A. STRUKTUR DAN MEKANISME PENGURUSAN ASPECT: A. BOARD OF COMMISSIONERS/SUPERVISORY BOARD		
1	Dalam menyusulkan WP yang akan ditunjuk/diusulkan sebagai Direktur/Direktur Utama harus sesuai dengan usulan komite/pertimbangan dari WP tersebut. In proposing a WP that will qualify as Director/President Director/Chief Executive Officer, it is required to be in accordance with the recommendation of the BOC.	Pembahasan usulan berdasarkan kesesuaian/kelayakan dari WP. Discussing proposals for the amount of incompetence or suitability of proposing the WP.
ASPEK: A. DIREKSI ASPECT: A. BOARD OF DIRECTORS		
1	Menjadi catatan pengalaman pada level jabatan tertentu dalam Matriks Kapasitas Presentasi secara detail dan terkualifikasi. Filling in work positions at certain position levels in the Company's organizational structure is needed.	Direksi telah menyetujui kompetensi yang sesuai untuk jabatan direksi sebagaimana pemenuhan dengan persyaratan Surat Keputusan Direksi. Pengisian jabatan telah melakukan pemantauan pada aplikasi talent management. Pada aplikasi tersebut dapat terlihat jabatan yang sudah terisi dan masih terdapat jabatan yang belum terisi. Untuk jabatan yang belum terisi, akan dilakukan proses pengisian jabatan melalui mekanisme talent pool. Implementasi pengisian jabatan direksi telah dijalankan sebaik mungkin sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Direksi tentang Pedoman Pengisian Jabatan Direksi pada Anak Perusahaan PLN Group (Lampiran Keputusan Direksi PLN Nomor 0189). The Board of Directors has assigned competencies to each level of position in the Company's organization by issuing a Decree of the Board of Directors. The filling of positions is carried out through the talent management application. The application shows positions that are still vacant and the number of candidates who are conducted through the application. The implementation of filling vacant positions has been carried out in accordance with the provisions in the Decree of the Board of Directors regarding Guidelines for Filling Positions in PLN Group Companies (Attachment to PLN Board of Directors Decree Number 0189).
2	Melakukan dan pengikutsertakan kenaikan/turun tidak/tetap WP berdasarkan hasil penilaian. Carrying out the assessment of qualifications with a final value of 270 or more.	Berdasarkan Keputusan Direksi dan sesuai pedoman pengisian PT NSB, WP1 tidak boleh diberhentikan. Based on the decision of the Board of Directors and in accordance with PT NSB's assessment guidelines, WP1 is not allowed to be terminated.

No.	Rekomendasi Recommendation	Tindak Lanjut Follow Up
3	Tidak terlibat pengaturan arus pendanaan (controlling shareholder): a. Membuat pedoman tentang penilaian kewajaran (fairness opinion) dan kelayakan (feasibility study) untuk pengambilan keputusan aksi korporasi yang melibatkan Dewan Komisaris dan Direksi. b. Membuat pedoman tentang pelaporan benturan kepentingan dan hubungan afiliasi yang melibatkan Dewan Komisaris dan Direksi. Related to subsidiary's function: c. Preparing guidelines on performance assessment of the Board of Directors (individual/collegial) and Commissioners (individual/collegial) of subsidiaries/affiliated companies as mandated by the GMS. d. Preparing guidelines on the rules/remuneration, allowances and facilities of the Board of Directors and Commissioners of subsidiaries/affiliated companies as mandated by the GMS.	a. Proses penyusunan pedoman penilaian kinerja Direksi (individual/kolegial) dan Komisaris (kolegial). Untuk Perusahaan/Perusahaan Afiliasi. b. Proses penyusunan pedoman pelaporan benturan kepentingan dan hubungan afiliasi yang melibatkan Dewan Komisaris dan Direksi. Untuk Perusahaan/Perusahaan Afiliasi. c. The process of preparing guidelines for the performance assessment of the Board of Directors (individual/collegial) and Commissioners (collegial) of Subsidiaries/Affiliated Companies. d. The process of preparing guidelines for the rules/remuneration, allowances and facilities of the Board of Directors and Commissioners of Subsidiaries/Affiliated Companies.
4	Mengusulkan untuk memindahkan hubungan perusahaan terkait dengan pihak-pihak yang tidak independen dengan menggunakan mekanisme RUPS yang adil. Proposing to move the shareholders' transactions through the attainment of agreed targets by using the available mechanism	Shareholder transaction with persons other than Controlling Group (Controlling Shareholder) will be carried out by using the available mechanism in the GMS. Shareholder transactions have been conducted in the Reference to Contracts of the Board of Directors/Board of Commissioners through a recording mechanism. Pending the achievement of the settlement method.

Penerapan atas Pedoman Governansi Perusahaan

Implementation of the Corporate Governance Guidelines

Perusahaan mengadopsi standar penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebuah peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 21/POJK.04/2021 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang diterbitkan oleh lembaga dalam Surat Edaran (Sorban Jasa Keuangan (SEOJK) No.32/SEOJK.04/2021 tanggal 17 November 2021 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka sebagai acuan best practices dalam rangka mendorong kualitas penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Selain itu, Perusahaan juga mengacu pada Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi tahun 2021. Prinsip dan rekomendasi pedoman Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia yang telah diterapkan Perusahaan adalah sebagai berikut :

The Company adopts good corporate governance implementation standards one of which is the Regulation of the Financial Services Authority (POJK) Number 21/POJK.04/2021 concerning the Implementation of Guidelines for Public Company Governance which is further elaborated in the Circular Letter of the Financial Services Authority (SEOJK) No.32/SEOJK.04/2021 dated November 17, 2021 concerning Guidelines for Public Company Governance as a reference for best practices in order to encourage the quality of good corporate governance implementation. In addition, the Company also refers to the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance issued by the National Committee on Governance Policy in 2021. The principles and recommendations based on the General Guidelines of Indonesian Corporate Governance that have been implemented by the Company are as follows:

Penerapan Prinsip dan Rekomendasi Pedoman Governansi Perusahaan
Implementation of Principles and Recommendations of Guidelines for Corporate Governance

Prinsip 1: Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Principle 1: Roles and Responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners	
Rekomendasi Recommendations	Penerapan Fulfillment
1.1. Peran dan Tanggung Jawab Direksi Roles and Responsibilities of the Board of Directors	
1.1.1 Untuk mencapai perusahaan yang berkelanjutan, Dewan mengadopsi peran kepemimpinan untuk memberikan arah strategis jangka panjang, serta memastikan tersedianya sumber daya yang memadai untuk mencapai tujuan tersebut. a. Seberapa lama dan bagaimana Dewan menyusun strategi jangka panjang b. Apakah Dewan memiliki pemahaman yang jelas tentang peluang dan risiko jangka panjang perusahaan c. Bagaimana Dewan memastikan bahwa strategi jangka panjang perusahaan sejalan dengan nilai-nilai perusahaan dan budaya perusahaan d. Bagaimana Dewan memastikan bahwa strategi jangka panjang perusahaan mempertimbangkan faktor-faktor ESG yang material To achieve sustainable value creation, the Board of Directors takes on the leadership role and continues to perform the following governance functions: a. How long and how the Board of Directors develops long-term strategies b. Whether the Board of Directors has a clear understanding of the Company's long-term opportunities and risks c. Whether the Board of Directors ensures that the Company's long-term strategies are in line with the Company's values and corporate culture d. Whether the Board of Directors ensures that the Company's long-term strategies take into account material ESG factors	Dokumen telah tersedia. Klik untuk melihat. Document is available. Click to view.
1.1.2 Direksi harus bertanggung jawab atas, dan dapat menilai, strategi dan rencana bisnis perusahaan dan juga memberikan keputusan pada waktu yang tepat ketika diperlukan, dengan memperhatikan dinamika dan tantangan usaha. The Board of Directors is responsible for and can assess the Company's strategy and business plans and can provide decisions in a timely manner when required, taking into account the dynamics and challenges of the business.	Dokumen telah tersedia. Klik untuk melihat. Document is available. Click to view.
1.1.3 Direksi memastikan bahwa kinerja perusahaan dievaluasi secara berkala dan secara independen untuk memastikan bahwa perusahaan mencapai tujuan strategisnya dan mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan. The Board of Directors ensures that the Company's performance is evaluated periodically and independently to ensure that the Company achieves its strategic objectives and takes into account the interests of stakeholders.	Dokumen telah tersedia. Klik untuk melihat. Document is available. Click to view.
1.1.4 Direksi memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, serta standar sukarela yang telah diadopsi oleh perusahaan. The Board of Directors ensures that the Company complies with applicable laws and regulations, as well as voluntary standards that have been adopted by the Company.	Dokumen telah tersedia. Klik untuk melihat. Document is available. Click to view.
1.1.5 Direksi memastikan bahwa perusahaan memiliki sistem pengendalian internal yang efektif untuk mengelola risiko dan mencegah kecurangan. The Board of Directors ensures that the Company has an effective internal control system in place to manage risks and prevent fraud.	Dokumen telah tersedia. Klik untuk melihat. Document is available. Click to view.
1.1.6 Direksi memastikan bahwa perusahaan memiliki sistem pengelolaan risiko yang efektif untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang dihadapi perusahaan. The Board of Directors ensures that the Company has an effective risk management system in place to identify, assess, and manage the risks faced by the Company.	Dokumen telah tersedia. Klik untuk melihat. Document is available. Click to view.
1.1.7 Direksi memastikan bahwa perusahaan memiliki sistem pengendalian internal yang efektif untuk mengelola risiko dan mencegah kecurangan. The Board of Directors ensures that the Company has an effective internal control system in place to manage risks and prevent fraud.	Dokumen telah tersedia. Klik untuk melihat. Document is available. Click to view.
1.1.8 Direksi memastikan bahwa perusahaan memiliki sistem pengelolaan risiko yang efektif untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang dihadapi perusahaan. The Board of Directors ensures that the Company has an effective risk management system in place to identify, assess, and manage the risks faced by the Company.	Dokumen telah tersedia. Klik untuk melihat. Document is available. Click to view.

	Rekomendasi Recommendations	Pemahaman Fulfillment
1.1.7.	Bagi komisaris yang merangkap kegiatan usaha tambahan yang bersifat, Direksi perlu memastikan keseimbangan dan independensi pengambilan keputusan yang memadai agar Dewan Pengawas bersifat mudah dan cepat operasi dengan efektif. For independent directors, the business activities have no conflict. Boards, particularly, the Board of Directors need to ensure adequate authority and due diligence of supply to ensure that the Board Supervisory Board can make valid effectively.	Dewan telah memastikan integritas dan kinerja anggota Direksi dan Komisaris dan pengungkapan yang lengkap untuk dan laporan keuangan perusahaan. The Board of Directors has ensured the integrity of the corporation's accounting and financial reporting systems and the timely and accurate disclosure of all material information regarding the corporation.
1.1.8.	Pegang Direksi untuk pertama kalinya. Rapat mencatat antara dan pembagian peran Direksi secara individual dapat dinilai di Pegan Direksi dan dengan rapat kegiatan Direksi. The Board of Directors Charter is periodically reviewed. The Charter includes, among others, the duties of chief of individual Directors can be regulated in the Board of Directors Charter or by a decree of the Board of Directors.	Direksi telah menyusun rencana suksesi. The Board of Directors has prepared a succession plan.
1.1.9.	Direksi harapan melakukan telah pengadaan dan anggota Direksi untuk telah oleh rapat dan keputusan dan telah melakukan tertahan. The Board of Directors has a policy related to the resignation or removal of the Board of Directors if involved in financial crimes and other corruption.	PT PLN NP memiliki dokumen Rencana Strategi Teknologi Informasi (RSTI) yang menjadi acuan/pedoman pengembangan aset teknologi informasi Perusahaan dan digunakan sebagai acuan oleh Direksi, tetapi tidak memiliki evaluasi atas dokumen tersebut. Pengembangan RSTI perusahaan sesuai dengan materi atau aktivitas sesuai dengan kebutuhan dan prioritas bisnis korporat, mendorong peluang dan kinerja bisnis, mengelola ancaman risiko, serta mendukung kajian dan strategi korporat. PT PLN NP has an Information Technology Strategic Plan (RSTI) document that becomes the standard guidance for the development of the Company's information technology assets and is used as an asset-related reference, across the stakeholder system architecture (IT implementation) developments the Company is in consistency with the model plan, which is in line with corporate business needs using better technology business opportunities and performance, strengthen risk management, as well as support corporate goals and strategies.
1.2.	Penilaian Kinerja - Dewan dan Anggotanya Performance Assessment - Board of Directors and its members	
1.2.1.	Dewan komisaris melakukan evaluasi kerja terhadap secara berkala dan independen untuk memastikan efektivitas Direksi dan setiap individu dalam. The Board of Commissioners conducts an annual formal evaluation objectively and independently to determine the effectiveness of the Board of Directors and each individual director.	Dewan komisaris melakukan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Penilaian Direksi Individu. Dalam rating Dewan dan Direksi. The Board of Commissioners drafts the Board of Commissioners Annual Supervisory Report and the Board of Directors Individual Performance Assessment Report quarterly and annually.
1.2.2.	Dewan komisaris dengan pertimbangan komite nominasi dan Remunerasi, bertanggung jawab evaluasi kinerja dan melaporkan hasil evaluasi kinerja dan anggota Direksi secara. The Board of Commissioners, with consideration from the Nomination and Remuneration Committee, is responsible for determining the performance evaluation criteria and assessing the performance of the President Director and other members of the Board of Directors.	Dewan komisaris melakukan Laporan Pengawasan Dewan komisaris dan Laporan Penilaian atas kinerja individu Direksi setiap Triwulan dan Tahunan. The Board of Commissioners drafts the Board of Commissioners Monitoring Report and Assessment Reports for the individual Performance of the Board of Directors' Quarterly and Annually.
1.3.	Peran dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Roles and Responsibilities of the Board of Commissioners	
1.3.1.	Dewan komisaris secara strategis kegiatan yang telah sesuai telah dan dan strategi kegiatan, dan dan strategi kegiatan yang ditentukan oleh Direksi. Dewan komisaris memberikan masukan kepada Direksi dan memastikan juga pengungkapan strategi kegiatan yang dan strategi kegiatan, dan dan strategi kegiatan yang ditentukan oleh Direksi. Dewan komisaris melakukan, oleh, dan melakukan pertimbangan kepada Dewan dan pengelolaan implementasi. Direksi dan Dewan komisaris tertentu dalam kegiatan yang mengharuskan yang kegiatan, dalam dalam anggaran dalam kegiatan. The Board of Commissioners evaluates the corporate strategy at least annually and approves the corporate plan and strategy formulated by the Board of Directors. The Board of Commissioners and Directors' actions not approved Commissioners plan or work in the long-term and short-term financial plans of the corporation. The Board of Commissioners advises and monitors the Board of Directors on the management and implementation. The Board of Directors or the Board of Commissioners is involved in decisions that may be inconsistent with corporate regulations, the corporation's policies, or executives.	1. Dewan komisaris melakukan Laporan Pengawasan Dewan komisaris dan Laporan Penilaian atas Kinerja individu Direksi setiap Triwulan. 2. Dewan komisaris menyelenggarakan Rapat Pengawasan Dewan komisaris dan Direksi Direksi setiap kegiatan. 3. Dewan komisaris melakukan pengajuan terkait dan cerangan GMSF yang dilakukan oleh Dewan sehat dimintakan persetujuannya secara RUPS. 1. The Board of Commissioners drafts the Board of Commissioners Monitoring Report and its Assessment Report on the Individual Performance of the Board of Directors quarterly. 2. The Board of Commissioners holds monthly Board of Commissioners and Board of Directors Supervisory Meeting. 3. The Board of Commissioners provides a written response to the RKAP draft submitted by the Board of Directors for approval at the GMS.

2.2.3	Jenis keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan pihak yang diberi wewenang oleh RUPS. The type of decisions that require the approval of the Board of Commissioners as mandated by the annual report.	Mendapatkan Dewan Komisaris dikonsultasi terlebih dahulu sebelum Rapat yang berkaitan dengan Dewan Komisaris. The Board of Commissioners' opinions will refer the Annual Report to the Board of Commissioners' duties.
2.2.4	Dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris mengusulkan kepada dan untuk disetujui oleh RUPS pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam mengusulkan hal di atas, Dewan Komisaris mempertimbangkan keberagaman, antara lain pendidikan dan pengalaman kerja yang luas di bidang energi, serta kemampuan yang cukup untuk menjalankan tugas, fungsi, dan peran pengawasan dan pemberian nasihat Direksi. Dewan Komisaris wajib memiliki dan mempertahankan integritas, kompetensi, dan pengalaman yang memadai untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. In addition to the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee, the Board of Commissioners proposes to, and to be approved by the GMS on the appointment and/or dismissal of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners, in proposing the matters above, the Board of Commissioners pays attention to diversity, including education, work experience, and provides equal opportunities without distinguishing ethnicity, religion, race, nationality and gender. The Board of Commissioners is required to hold, maintain, and develop sufficient competence, knowledge and experience in the Board of Commissioners to oversee and provide advice to the Board of Directors and management.	Dewan Komisaris memberikan evaluasi dan memberikan tanggapan atas usulan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. The Board of Commissioners evaluates and provides responses to the suggestions from members of the Board of Directors and Board of Commissioners.
2.2.5	Dewan Komisaris, atau Komite yang ditugaskan oleh Dewan Komisaris, memastikan kebijakan, sistem dan prosedur suksesi telah diterapkan dengan baik. Sistem dan prosedur suksesi mencakup proses perencanaan suksesi, kebijakan suksesi, proses pengembangan dan pemberian kesempatan yang sama, serta proses pengelolaan talenta. Dalam hal ini, Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Direksi telah menyusun kebijakan dan rencana suksesi yang komprehensif, termasuk kebijakan untuk mengelola pemberhentian dan penggantian anggota Direksi yang tidak terduga. The Board of Commissioners, or a committee assigned by the Board of Commissioners, ensures that the succession policy, system and procedure have been properly implemented. The succession system and procedure includes succession planning process, succession policy, equal opportunity and talent management process. In this regard, the Board of Commissioners is responsible for ensuring that the Board of Directors has prepared a comprehensive succession policy, including policies for managing the dismissal and replacement of members of the Board of Directors in unexpected circumstances. In addition, the Board of Commissioners reviews the report on the implementation of the development and succession plan submitted by the Directorate Function.	1. Kebijakan Suksesi Dalam rangka kegiatan dan penunjuk tugas melalui mekanisme di lingkup energi/pihak lembaga PLN Sustainable Energy, mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2012 tentang Pedoman dan Panduan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2012 Tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara. 1. Policy Succession Dalam kegiatan/usaha melalui pelaksanaan PT PLN (Persero) atau afiliasi. 2. The Board of Directors Succession Policy is put into implementing the succession section of the highest and highest level of PLN Sustainable Energy, refers to the Minister of SOE Regulation No. PER-01/MBU/2012 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of SOE No. PER-03/MBU/2012 concerning Guidelines for the Appointment of Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the State-Owned Enterprise Companies. 2. The succession process for the Board of Directors is fully under the authority of PT PLN (Persero) or holding.
2.2.6	Dewan Komisaris, di mengajukan kepada RUPS, yang dapat dibantu oleh staf sekretariat dan bantuan yang independen, harga remunerasi, bonus kinerja, dan manfaat lain untuk setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang sesuai dengan pengembangan kegiatan yang berkelanjutan dan kepentingan jangka panjang Perusahaan dan pertanggung jawab itu, mereka berhak menilai sistem remunerasi. Dalam hal Dewan Komisaris. The Board of Commissioners is proposed to the GMS, which may be assisted by a secretariat staff and independent consulting, on the remuneration, bonus and other benefits for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners that is in line with the sustainable development of the corporation and the long-term interests of the corporation and its stakeholders, to periodically evaluate the remuneration system of the Board of Directors and Board of Commissioners.	1. Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap sistem remunerasi yang ditetapkan oleh dan/atau diusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. 1. The Board of Commissioners evaluates the remuneration system set by and/or proposed to the General Meeting of Shareholders. 2. The Board of Commissioners evaluates the remuneration proposal submitted by the Board of Directors by engaging the Nomination & Remuneration Committee. 3. The Board of Commissioners reviews and evaluates the remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners in the Board of Commissioners' internal meeting after receiving input from the Nomination & Remuneration Committee.
2.2.7	Dewan Komisaris memastikan efektivitas kebijakan pengendalian dan implementasi sistem manajemen risiko perusahaan. The Board of Commissioners oversees the effectiveness of corporate governance policies and their implementation as well as corporate risk management.	Dewan Komisaris membuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris yang telah mencakup efektivitas kebijakan yang dilakukan Perusahaan. The Board of Commissioners drafts Oversight Supervision Reports, one of which contains policy reviews by the Management.

2.17		1. Dewan Komisaris mendukung Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tinjauan dan Laporan Tahunan 2. Dewan Komisaris merekomendasikan Rapat Pengurusan Dewan Komisaris dan Direksi dengan topik yang luas untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas pengawasan 3. Dewan Komisaris melalui Komite Investasi dan Pengawas Risiko melakukan review dan evaluasi terhadap laporan manajemen atas efektivitas dan kualitas operasional 4. The Board of Commissioners drafts the Board of Commissioners Supervisory Report Summary, and signs Annual Report 5. The Board of Commissioners holds Supervisory Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors with one main agenda to review and evaluation of risk management 6. The Board of Commissioners through the Investment and Risk Management Committee reviews and evaluates the risk management report every quarter and at any time if necessary
2.18		The Board of Commissioners holds regular meetings with the Accounting Service as well as Audit and Risk Committee to ensure that all processes and systems the financial reporting is in line with the latest standards and are free from misleading
2.19		The Board of Commissioners drafts the Board of Commissioners Supervisory Report to public after the end of the current year
2.110		The Board of Commissioners carry out the monitoring and evaluation of the implementation of the Company's strategic plan, work plan, budget, and the Company's performance periodically
2.111		The Board of Commissioners has a policy related to the resignation of members of the Board of Commissioners if involved in financial, criminal, and moral wrongdoing
2.112		Independent Commissioners are expected to contribute to critical, objective, unbiased, and constructive discussions in the Board of Commissioners' meetings

Rekomendasi Recommendation	Penjelasan Explanation
1.2.13.	
1.4. Pembentukan Komite **Establishment of Committee**	
1.4.1.	
1.4.2.	
1.4.3.	
1.5. Penilaian Kinerja - Direksi Keseluruhan dan Anggotanya **Performance Assessment - Board of Commissioners' and Its Member**	
1.5.1.	

	Bahasa Indonesia Indonesian	English English
2.5.	**Benturan Kepentingan** **Conflict of Interest**	
2.5.1.	Anggota Direksi yang mempunyai benturan, dilarang ikut serta dalam rapat Direksi yang berkaitan dengan benturan kepentingan dimaksud. Benturan kepentingan dimaksud termasuk dan tidak terbatas pada benturan kepentingan yang mempengaruhi kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara objektif, termasuk benturan kepentingan yang timbul dari hubungan afiliasi dengan pemegang saham, anggota Direksi lainnya atau pihak ketiga. Members of the Board of Directors who have conflicts of interest are prohibited from participating in Board of Directors' meetings that discuss the conflicts of interest in question. The conflicts of interest in question include, but are not limited to, conflicts of interest that affect the ability of members of the Board of Directors to perform their duties and functions objectively, including conflicts of interest arising from affiliations with shareholders, other members of the Board of Directors, or third parties.	Pada Anggaran Dasar telah diatur bahwa anggota Direksi dilarang untuk melakukan hal-hal tertentu. The Articles of Association regulate that members of the Board of Directors are prohibited from breaking prescribed guidelines.
2.5.2.	Dewan Komisaris memastikan dan mengelola potensi benturan kepentingan mereka dengan Direksi dan Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham, termasuk pengungkapan dan keputusan dan pelaksanaannya dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris. Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tidak turut serta dalam pemberian dan pengambilan keputusan dan pelaksanaan tersebut kepentingan yang mengakibatkan Komisaris atau afiliasi tersebut yang bersangkutan. The Board of Commissioners monitors and manages potential conflicts of interest of management, members of the Board of Directors, Board of Commissioners and shareholders, including cases of corporate assets and abuse of related party transactions. Commissioners who have a conflict of interest do not participate in, monitoring and decision making or powered conflicts of interest including the Commissioners or an affiliate of the Commissioner concerned.	Dewan Komisaris memantau dan mengelola potensi konflik kepentingan mereka dengan Direksi/pemegang Dewan lainnya antara Direksi dan Dewan Komisaris. PT PJB Nomor 0010.0/2.0/08.2020 dan 001.K/DK/HKD/2020 tentang Pengelolaan Benturan Kepentingan di Lingkungan PT PJB. Peraturan tentang benturan kepentingan di Perusahaan juga dijelaskan dalam kode perilaku yang telah ada. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, dan diantara Komisaris yang bersangkutan, yang bersangkutan pemutus tidak memiliki berbenturan kepentingan dan akan memengaruhi keputusan kepentingan sehingga tidak diperbolehkan dengan yang Perusahaan. The Board of Commissioners monitors and manages potential conflicts of interest/conflict of interest between the Board of Directors and the Board of Commissioners of PT PJB No. 0010.0/2.0/08.2020 and No. 001.K/DK/HKD/2020 concerning Management of Conflicts of Interest within PT PJB. Conflicts of interest in the Company are also governed by a code of ethics. If there are conflicts of interest in the Company, including all, including Board of Directors and Board of Commissioners, which conflicts of interest/conflicts of interest are not to cause losses to the Company.
2.7.	**Pengalaman Anggaran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris** **Competency Improvement for Members of the Board of Directors and Board of Commissioners**	
2.7.1.	Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris berkualifikasi yang sesuai dengan jabatan mereka, berkeahlian dan memiliki integritas, serta telah memenuhi persyaratan dan standar yang relevan yang berlaku bagi mereka. The Board of Commissioners ensures that members of the Board of Directors and Board of Commissioners are fit and proper, competent, and have integrity, and have met the requirements and standards relevant to them.	Sebelum Pengisian memiliki kesesuaian pengalaman persyaratan dapat dilihat dalam kebijakan yang kita dimiliki, telah dilakukan oleh kita dan anggota Direksi Dewan Komisaris untuk kita ini sesuai dengan kebijakan. The Company has a policy in its recruitment to ensure the Company is hired / appointed Directors under Commissioners, including the duties and responsibilities of the Board of Directors and General Commissioners as well as matters that are not addressed.

Prinsip 2: Komposisi dan Pemasangan Direksi dan Dewan Komisaris
Principle 2: Composition and Appointment of Board of Directors and Board of Commissioners

Rekomendasi Recommendations	Penerapan Fulfillment
2.1 Komposisi Direksi Composition of the Board of Directors	
2.1.1 Dalam menentukan kandidat calon direksi, Dewan Komisaris melakukan kerja sama dan Rekomendasi Anti Korupsi mengandalkan rekomendasi dari Dewan Komisaris, mengingat jika pencegahan lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan penindakan. Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi dapat merekomendasikan nomor kompetensi untuk mencimakan kandidat yang memiliki rujuk. In determining director candidates, the Board of Commissioners through the Nomination and Remuneration Committee does not only rely on recommendations from the Board of Commissioners, management or corporate shareholders. The Board of Commissioners through the Nomination and Remuneration Committee has an independent manner to determine qualified candidates.	1. Kebijakan Sistem Direksi sebagai bagian dari pemenuhan fungsi nominasi di lingkungan perusahaan tertuang PLN Succession Power, mengacu pada Perdirum Nomor KEPUT-Nomor Nomor SUPP-Nomor-PDIR-Nomor/2023 tentang Pedoman dan Tentang Nomor Dalam Urutan Nilai Negara Nomor PER-Nomor/MBU/2012 Tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Dalam Lingkup Nilai Negara. 2. Proses rekrutmen dan kandidat calon Direksi melibatkan mengikuti assessment PT PLN (Persero) melalui Holding. 1. The Board of Directors Succession Policy in part of implementing the nomination function at the highest management level of PLN Succession Power, refers to the Minister of SOE Regulation No. PER-Nomor/MBU/2012 concerning Amendment to the Regulation of the Minister of SOE no. PER-Nomor/MBU/2012 concerning Guidelines for the Appointment of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners of the State-Owned Enterprises Subsidiaries). 2. The process, assessment and candidates for the Board of Directors is fully under the authority of PT PLN (Persero) in the Holding.
2.1.2 Dewan Komisaris memenuhi kriteria dalam menjabat anggota Direksi, misalnya yang telah pengalaman, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi tugas tugas jenis Direksi serta memperhatikan keseimbangan Direksi. The Board of Commissioners ensures that the criteria for selecting members of the Board of Directors include relevant knowledge, skills and qualifications to adequately fulfill the role of the Board of Directors and takes into account the fulfillment of the Board of Directors' diversity.	1. Kebijakan Sistem Direksi sebagai bagian dari pemenuhan fungsi nominasi di lingkungan perusahaan tertuang PLN Succession Power, mengacu pada Perdirum Nomor KEPUT-Nomor Nomor SUPP-Nomor-PDIR-Nomor/2023 tentang Pedoman dan Tentang Nomor Dalam Urutan Nilai Negara Nomor PER-Nomor/MBU/2012 Tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Dalam Lingkup Nilai Negara. 2. Proses rekrutmen dan kandidat calon Direksi melibatkan mengikuti assessment PT PLN (Persero) melalui Holding. 1. The Board of Directors Succession Policy in part of implementing the nomination function at the highest management level of PLN Succession Power, refers to the Minister of SOE Regulation No. PER-Nomor/MBU/2012 concerning Amendment to the Regulation of the Minister of SOE no. PER-Nomor/MBU/2012 concerning Guidelines for the Appointment of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners of the State-Owned Enterprises Subsidiaries). 2. The nomination process and screening for the criteria for selecting members of the Board of Directors include adequately knowledge, abilities and skills needed to properly fulfill the role of the Board of Directors and taking into account the fulfillment of the diversity of the Board of Directors is fully under the authority of PT PLN (Persero) in the Holding.
2.1.3 Kebijakan suksesi terkait pelaksanaan pada Dewan Komisaris dicantumkan dalam Laporan Tahunan. The responsibilities or diversity of the Board of Directors and Board of Commissioners is disclosed in the Annual Report.	Sesuai dengan Tahunan telah termaktub kebijakan sebagaimana tercantum Dewan Komisaris dan Direksi in the Annual Report, the diversity policy for the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors has been stated

Kode/Indikator Code/Indicator	Keterangan Explanation
2.1.1.	Dewan Komisaris memastikan bahwa kebijakan dan prosedur untuk melakukan nominasi kandidat anggota Direksi yang akan diajukan kepada pemegang saham dalam RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) telah dilaksanakan dengan baik. Dewan Komisaris menggunakan fungsi independen untuk memastikan kandidat yang ditominasikan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. The Board of Commissioners ensures that the policies and procedures for selection and nomination of Board members are clear and transparent so as to produce the selected Board candidates. The Board of Commissioners uses independent experts in determining qualified candidates.
2.1.2.	Dewan Komisaris/Komite yang menjalankannya harus memiliki mekanisme proses dan kriteria tertentu yang konsisten dengan visi/misi Direksi tertinggi yang telah ditetapkan Dewan Komisaris dan memastikan bahwa profil kandidat (nominasi) yang akan diajukan dalam rapat telah sesuai dengan kriteria tersebut. The Board of Commissioners/Committee running the nomination function determines the nomination procedures and criteria that are consistent with the Board of Commissioners' vision/mission, ensures that the Board of Commissioners' nominees' profiles meet the requirements set out in the skills matrix and nomination criteria.
2.1.3.	Komposisi Dewan Komisaris harus dijaga/ditentukan agar setiap anggota menggabungkan secara kolektif pengetahuan, keterampilan, dan latar belakang beragam yang diperlukan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. The composition of the Board of Commissioners should be such that each member is a group without the diversity in terms of skills, expertise, knowledge, experience, age, cultural background, and gender required, and jointly fulfill the duty of the Board of Commissioners.

	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan Explanation
2.1.7.	Untuk memastikan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya independen kepada Direksi dan untuk pihak-pihak yang terafiliasi perlu ketentuan kepemilikan Dewan Komisaris tersendiri oleh komisaris independen yang sudah ditentukan, dengan ini ini diatur yang dimiliki dan terafiliasi pihak-pihak lainnya dengan ketentuan Dewan Komisaris wajib independent, investor dan wajib memiliki kepemilikan. To be able the Board of Commissioners to oversee independent values and supervision by the Board of Directors and for roles unrelated to substantial control of interest, the Board of Commissioners consists of a sufficient number of independent Commissioners, with limited terms in office and disclosure of the form of shareholding of the Board of Commissioners as well as their independence from controlling parties/other.	Anggota Dewan komisaris yang telah memiliki dengan pemegang saham atau memenuhi kriteria Komisaris Independen, namun tidak memiliki dokumentasi sebagai komisaris independen berjumlah 2 (dua) orang komisaris atau 33 % dari 6 orang anggota Dewan Komisaris per 31 Desember 2021. Members of the Board of Commissioners who are not affiliated with shareholders and meet the criteria for Independent Commissioners, but are not sufficiently declared as Independent Commissioners, are 2 (two) Commissioners or 33% of the 6 (six) members of the Board of Commissioners as of December 31, 2021.
2.1.8.	Untuk memastikan bahwa Dewan dan Direksi fungsinya yang efektif dan guna meningkatkan kepentingan investor dan pemegang kepentingan. Calon-calon ini dan Komisaris independen bahwa kebijakan proses yang formal, transparan pengangkatan untuk pemegang dan mengangkat anggota Dewan dan Direksi Komisaris. To facilitate the effective functioning of the Board of Directors and Board of Commissioners and to enhance investor and stakeholder confidence, the Nomination and Remuneration Committee ensures that there is a formal, rigorous and transparent process for the appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners.	kebijakan rekrutmen dan nominasi anggota Dewan dan Direksi memiliki PLN Indonesia Dewan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/09/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/02/2015 tentang Tata cara Pengangkatan anggota Dewan dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, Tetapi dengan penyajian dan penyelenggaraan anggota Dewan dan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Peraturan PT PLN (Persero) sendiri tersebut. The Board of Directors' Succession Policy, as part of implementing the nomination function of the highest management level of PT PLN Indonesia Power, refers to the Minister of SOE Regulation No. PER-10/MBU/09/2021 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of SOE No. PER-03/MBU/02/2015 concerning Guidelines for the Appointment of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners of the State-Owned Enterprises Subsidiaries. Regarding the selection and nomination process for Commissioners, it is fully under the authority of PT PLN (Persero) as the holding.
2.2.	Komposisi Direksi Composition of the Board of Directors	
2.2.1.	Kebijakan anggota anggota Direksi berisi dan kualitas memadai yang memuaskan, guna pengembangan kegiatan yang berkompleks dan mendorong pencapaian kapasitas pada pada pelaku. Komposisi Direksi harus disusun dapat dengan kriteria harian komisaris dan Komunikasi, oleh Dewan komisaris untuk Apabilan oleh PLN. komisi assessment yang dipublikasikan kepada PLN Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan pasar yang anggota Direksi dan dapat dipublikasikan sebagaimana. The composition policy for members of the Board of Directors must be of a sufficient standard that is adapted to the complex business activities and encourages development and encourages the achievement of targeted goals. The composition for the Board of Directors must be prepared, possibly through the Nomination and Remuneration Committee, by the Board of Commissioners as the assembly (the GMS). The board of commissioners proposed by the GMS is determined by considering the role of each member of the Board of Directors and the provisions stipulated in each of corporate parliaments.	Jajaran Kepemimpinan Direksi mampu sesuai dan Direksi dan Dewan Komisaris, sebagaimana Dewan Komisaris dan mengundang ke Pemegang Saham. Pemegang Kepentingan Direksi dilakukan oleh Pemegang Saham Investor. (PT PLN (Persero)) yang dilakukan kewenangan sesuai (GMS (GMS) Laporan Tahunan). The Composition Process of the Board of Directors goes through a process from the Board of Directors to the Board of Commissioners, then the Board of Commissioners will propose to the shareholders' Representative of the Government for the Board of Directors is conducted by the majority shareholder (PT PLN (Persero)), which is addressed through the GMS (Annual Report (GMS).

2.2.2	Kebijakan remunerasi anggota Direksi ditentukan berdasarkan struktur remunerasi yang proporsional yang mempertimbangkan tanggung jawab, kompetensi, dan kinerja setiap anggota Direksi, serta kinerja Perseroan secara keseluruhan dan kelayakan dengan perusahaan sejenis. Struktur remunerasi Direksi terdiri dari Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas. Besaran remunerasi Direksi ditetapkan oleh Pemegang Saham melalui RUPS. Rincian remunerasi Direksi Perseroan selama tahun buku 2021 dapat dilihat pada Laporan Tahunan ini. The remuneration policy for members of the Board of Commissioners should be of a conservative structure that is tailored towards sustainable corporate development and encourages the achievement of long-term goals. The amount of remuneration proposed by the Board of Commissioners to the GMS is determined by considering the role of each member of the Board of Commissioners and the economic situation as well as corporate performance. In addition, it must also consider further position as President Commissioner and chairman of and committee membership as committees.	Kebijakan Remunerasi Direksi ditentukan oleh Pemegang Saham melalui RUPS. Besaran remunerasi Direksi ditentukan dengan mempertimbangkan tanggung jawab, kompetensi, dan kinerja setiap anggota Direksi, serta kinerja Perseroan secara keseluruhan dan kelayakan dengan perusahaan sejenis. Struktur remunerasi Direksi terdiri dari Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas. Besaran remunerasi Direksi ditetapkan oleh Pemegang Saham melalui RUPS. Rincian remunerasi Direksi Perseroan selama tahun buku 2021 dapat dilihat pada Laporan Tahunan ini. The remuneration policy for members of the Board of Commissioners is determined by the General Meeting of Shareholders through a process that the Board of Commissioners in the Board of Commissioners, then the Board of Commissioners will propose to the Shareholders. The determination of the remuneration for the Board of Commissioners is conducted by the Holding Shareholder (PT PLN (Persero)), which is carried out through the GMS (Annual Report 2021). The policy related to the arrangement of the Board of Commissioners' supporting organs is in force applicable for the shareholders, in this case of the secondary, domicile in a member of the Board of Commissioners.
2.2.3	Untuk memastikan bahwa proses remunerasi dilaksanakan berdasarkan prinsip kewajaran dan kompetensi, direksi dan komisaris dengan memperhatikan aturan yang berlaku, kinerja individu dan kondisi pasar. Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan saran kepada pemegang saham dan Dewan Komisaris. To ensure that remuneration practices are administered based on the principles of fairness and competence in accordance with applicable regulations, individual performance and market conditions. The Nomination and Remuneration Committee provides advice to the shareholders and the Board of Commissioners.	Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui beberapa hal, antara lain: 1. Perubahan dan penambahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan peraturan yang berlaku, termasuk untuk memenuhi ketentuan POJK; 2. Rencana penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan; 3. Penggunaan laba Perseroan untuk pembayaran dividen tunai dan untuk cadangan; 4. Perubahan susunan pengurus Perseroan. Pemegang Saham juga telah menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas. Remuneration for Directors & Dewan merupakan hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) No. PRTP-13/MBU/08/2021. The proposed remuneration of the President Director considers several factors, among others: 1. Comparison of remuneration between the Company and companies with the same type of business through a salary survey conducted by a Consultant; 2. Company performance in the previous year; 3. The budget set in the RKAP and the annual objectives that have been determined. Remuneration for the Board of Directors & Board of Commissioners follows the applicable position rules in accordance with the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-13/MBU/08/2021.

Pakta Integritas Integrity Pact	Pernyataan Statement
3.1. Dan Hubungan Kerja **Dewan & Hubungan Kerja**	
3.1.1 "Komponen dewan yang terdiri dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta seluruh pihak yang terkait dengan Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk, tetapi tidak terbatas pada Sekretaris Perusahaan dan Sekretaris Dewan Komisaris, dilarang untuk melakukan tindakan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam bentuk apapun. There are rules about conflicts between the Board of Directors and Board of Commissioners and between members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners. However, it is still important to maintain the confidentiality of information to avoid leakage of confidential information.	1. Hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris merupakan hubungan yang berdiri bersifat dan harus memperhatikan ditentukan oleh suatu mekanisme kerja kita berdasarkan yang berlaku di Perusahaan. 2. Komunikasi antara Direksi dengan Dewan Komisaris menggunakan ke dalam surat elektronik yang berlaku di Perusahaan yang ditujukan ke masing-masing pengguna ini maka di dan kepada alat surat tersebut. Dalam hal komunikasi disembut ini maka atau dapat dilakukan secara rapat atau melalui surat. Dalam hal administrasi Sekretaris Dewan Komisaris dapat melaksanakan pihak lain ke kepada Sekretaris Perusahaan (jika relevan). Dewan Komisaris melalui komisaris Internal dapat melakukan komunikasi ke kepada Direksi melalui Direksi atau Direksi harus pengaturan dan pendekatan melalui dengan Manajemen kepada Sekretaris Dewan Komisaris dan Sekretaris Perusahaan. 3. Direksi bertanggung jawab untuk antara Direksi dan Dewan Komisaris yang mengadakan Direksi (Rapat Pengawasan). 4. Dewan Komisaris berhak mengundang untuk Perusahaan rapat untuk tertentu dengan Direksi dan dihadiri oleh Direksi sehubungan pada dan pertanyaan informasi Perusahaan kepada Direksi termasuk rencana kerja untuk tertentu dengan Direksi. 1. The work relationship between the Board of Directors and Board of Commissioners is a formal relationship and must always be based on a standard and basis in accordance that applies in the Company. 2. Communication between the Board of Directors and Board of Commissioners uses electronic mail media applicable in the Company which contains an explanation of the purpose and objectives of the letter. In the event that the communication is conducted, it may be conducted by way of meetings or mail. In terms of administration, the Secretary of the Board of Commissioners may conduct formal communications to the Corporate Secretary (and vice versa). The Board of Commissioners may appoint the President Commissioner as the contact point. The Board of Directors through the President Director is invited to the supervisory and internal functions, based in the Secretary of the Board of Commissioners and the Corporate Secretary. 3. The Board of Commissioners holds a meeting & and once every 3 (three), which is also the Board of Directors' (Supervisory Meeting). 4. The Board of Commissioners is entitled to order Company information in a timely, complete, honourable and accurate manner, and the Board of Directors is responsible for the submission of Company information to the Board of Commissioners in a timely, complete, honourable and accurate manner.
3.1.2 Dewan dengan segala dan personel manajemennya, Direksi berkewajiban dengan Dewan Komisaris dalam melaksanakan misi dan dan strategi bersama dan rencana segala manifestasi pengelolaan/kepentingannya. In accordance with their respective duties and roles, the Board of Directors collaborates with the Board of Commissioners in formulating the corporate mission, vision and strategy and aligning its plans with stakeholders.	Direksi secara periodik melakukan evaluasi atas rencana program jangka yang telah disusun, antara lain telah tidak tidak relevan, di dua Direksi dan menyusun revisi/GPP yang akan disahkan dan disimpan sebagaimana kepada Dewan Komisaris sebelum disetujui kepada Pemegang Saham. The Board of Directors periodically reviews the long-term plan it arranged, prepared, which it is deemed irrelevant, the Board of Directors will prepare a revised GPP which will be discussed and requested for approval by the Board of Commissioners before being proposed to the Shareholders.

	Rekomendasi Recommendation	Pernyataan Statement
2.1.2.	Sekretaris Perusahaan memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris melalui mendukung implementasi prinsip-prinsip good corporate governance yang baik, termasuk keterbukaan yang efektif dan juga pengaruh sikap dan perilaku kepemimpinan terkait. The Corporate Secretary has an important role in supporting the effectiveness of work relationship between the Board of Directors and Board of Commissioners, including supporting the implementation of good corporate governance practices, including effective communication with shareholders and other stakeholders.	Sekretaris Perusahaan memiliki peran dalam mendukung efektivitas hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris melalui mendukung implementasi prinsip-prinsip good corporate governance yang baik, termasuk keterbukaan yang efektif dan juga pengaruh sikap dan perilaku kepemimpinan terkait. The Corporate Secretary has a role in supporting the effectiveness of work relationship or work in Board and the Board Commissioners between the Board of Directors and Board of Commissioners. The Corporate Secretary also effectively manages external communication with shareholders and external stakeholder management.
2.2.	Akses Informasi Dewan Komisaris Access to Information for the Board of Commissioners	
2.2.1.	Direksi berkewajiban untuk selalu menyediakan dokumen, informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris secara tepat waktu, lengkap, akurat dan dapat dipahami. Dewan Komisaris memiliki wewenang untuk meminta setiap Direksi untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. Untuk pelaksanaan dari tanggung jawab pengawasan, Dewan Komisaris memiliki wewenang untuk mengakses dokumen dan informasi perusahaan. The Board of Directors is responsible for ensuring that the Board of Commissioners has access to accurate, relevant and timely information. The Board of Commissioners shall possess the authority to request any information from each Director. The Board of Directors provides information to the Board of Commissioners regularly, sufficient timing, and in comprehensive manner on all issues relevant to the corporation. The Board of Commissioners may at any time request the Board of Directors to provide additional information.	Direksi berkewajiban untuk menyediakan informasi Perusahaan secara tepat waktu, lengkap, berakurat dan secara dan Dewan berhenggung pada dan penyampaian informasi Perusahaan kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu, lengkap, akurat dan dapat. The Board of Commissioners is entitled to obtain Company information in timely, complete and accurate way provide manner and the Board of Directors is responsible for the submission of Company information to the Board of Commissioners in a timely, complete, presentable and valuable manner.
2.3.	Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris atas Dampak Kondisi Kegemparan terhadap Kinerjanya Responsibility of the Board of Directors and Board of Commissioners for the Impact of Ensembly Situation on the Corporation	
2.3.1.	Direksi wajib bertanggung jawab atas dampak dari kondisi kegemparan terhadap kinerja perusahaan. Direksi dan Dewan Komisaris wajib bertanggung jawab atas kebijakan untuk mengatasi dampak dari kondisi kegemparan terhadap perusahaan dan upaya-upaya yang mungkin dilakukan untuk mengatasi dampak dari kondisi kegemparan. Impact of ensembly situation on the corporation. The Board of Directors and Board of Commissioners are liable for responsibilities in the context of the corporation's embedding situations and take immediate situation steps that may impact the corporation's management and operation.	1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab atas dampak dari kondisi kegemparan terhadap kinerja perusahaan. Direksi dan Dewan Komisaris wajib bertanggung jawab atas kebijakan untuk mengatasi dampak dari kondisi kegemparan dan mengambilkan kegiatan Perusahaan. Dan terdapat penting sehingga mereka mampu melaksanakan dapat secara profesional, efisien, efektif, dan berkualitas. 2. Direksi dan Dewan Komisaris mengetahui kejadian-kejadian yang telah terjadi. Jadi berpengaruh oleh kegiatannya ke kinerja, kebijakan-kebijakan pengambilan kegiatan dapat dilakukan secara efektif. 3. Direksi dan Dewan Komisaris mengambil tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan Perusahaan dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan Perusahaan. 4. Perusahaan memiliki risiko pemegang saham yaitu PT PLN (Persero) dengan kepemilikan saham sebesar 99,99% dan PN PLN dengan kepemilikan saham sebesar 0,01%. 5. The Board of Directors and Board of Commissioners understand their respective rights, obligations, authorities, and responsibilities in operating and controlling the Company's activities. This is dependent on their ability to carry out their duties professionally, efficiently, effectively, and with quality. 6. The Board of Directors and Board of Commissioners avoid domination by any party, not be influenced by certain interests, any bias that confines, circumvent and their any influence or pressure, so that decision making can be conducted objectively. 7. The Board of Directors and Board of Commissioners respect the duties and authority of the Board of Directors in managing the Company, and the authority of the Board of Commissioners in supervising and advising to the Company's management policies. 8. The Company form a limited liability company (Persero) PT PLN (Persero) with a share ownership of 99.99% and 0.01% is held in share ownership of PLN.

Prinsip 4: Perilaku Etis dan bertanggung jawab Principle 4: Ethical and responsible behavior	
Pedoman Perilaku Code of Conduct	Penjelasan Explanation
4.1. Perilaku Etis dan Perilaku Code of Ethics and Conduct	
4.1.1. Perusahaan ini dikembangkan dalam Pedoman Perilaku atau Etika (kode-kode yang harus secara jelas mengungkapkan harapan dasarnya terkait setiap orang pada Direksi dan Dewan Komisaris serta karyawan dalam: a. Standar-nilai untuk kepemimpinan berbasis kepercayaan; b. Standar-nilai dengan pijar-nilai dengan integritas tertinggi; tinggi; c. Standar independen atau (sesuai) pembuatan informasi yang lengkap, dengan kebijakan, dengan uji kontrol dan kebijakan; d. Memberikan panduan pelanggaran undangan yang berlaku bagi karyawan dan operasional; e. Menghindari tindakan yang melanggar panduan pelanggaran undangan atau tindakan yang tidak etis berdasarkan pada prinsip-prinsip; f. Tidak terlibat atau hanya hanya dalam kegiatan apapun yang akan membahayakan kepentingan dengan kepentingan terbaik karyawan atau yang atau kepentingan terbaik perusahaan, atau yang atau kepentingan terbaik karyawan; g. Tidak menggunakan asset atau properti atau informasi yang dimiliki karyawan, kepentingan, asset atau atau atau pelanggaran untuk kepentingan pribadi atau yang menyebabkan dengan hasil karyawan dan pelanggaran; h. Tidak atau memberikan pihak atau peluang yang akhirnya asli pribadinya untuk kepentingan pribadi; i. Menghindari pelaporan investasi atau investasi atau pihak lain pembayaran, gratifikasi atau kecurangan dan untuk dalam setiap atau untuk yang dan investasikan bantuan kepentingan investasikan kecurangan kepada pihak lain atau secara menimbulkan pandangan pandangan; j. Menghormati perbedaan pandapat dan berlaku sopan, seperti Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan; k. Memberikan pertanggapan yang lengkap, adil, benar, dapat waktu dan dapat digunakan dalam laporan dan dokumen yang dikirimkan kepada pihak dan komunikasi publik secara.	a. Setiap insan Perusahaan berkomitmen untuk berdiri dan berkembang bersama dengan Perusahaan, serta memastikan untuk pada kasus tertuju dalam pengambilan keputusan; b. Setiap insan Perusahaan berkomitmen untuk menjadikan tinggi, nilai, dan sesuai, serta kepentingan; c. Setiap insan Perusahaan berkomitmen untuk menghindari setiap tindakan yang memberikan bantuan kepentingan yang dapat mempengaruhi subjektifitas. Setiap insan Perusahaan berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan secara dengan kredibel informasi. Pengungkapan informasi kepada publik dan stakeholder internal harus dilakukan dengan mempertimbangkan kredibel informasi, kepentingan perusahaan dan kebutuhan pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku; d. Setiap insan Perusahaan berkomitmen untuk menghindari setiap aktivitas yang memberikan berbasis kepentingan yang dapat mempengaruhi subjektifitas. Setiap insan Perusahaan berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan secara dengan kredibel informasi. Pengungkapan informasi kepada publik dan stakeholder internal harus dilakukan dengan mempertimbangkan kredibel informasi, kepentingan perusahaan dan kebutuhan pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku; e. Setiap insan Perusahaan berkomitmen untuk menghindari setiap bentuk tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tindakan yang tidak etis; f. Setiap insan Perusahaan berkomitmen untuk menghindari setiap tindakan yang memberikan bantuan kepentingan yang dapat mempengaruhi subjektifitas; g. Setiap insan Perusahaan berkomitmen untuk menggunakan aset perusahaan untuk kepentingan perusahaan atau perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. Mengajak memahami dan menggunakan aset perusahaan sesuai dengan aturannya yang berlaku serta tidak menggunakan aset perusahaan untuk kegiatan yang melanggar hukum dan tidak; h. Setiap insan Perusahaan berkomitmen untuk menghindari setiap aktivitas yang memberikan berbasis kepentingan, untuk sebagai bentuk fasilitasi pihak-pihak untuk kepentingan pribadi; i. Perusahaan menghormati kebebasan berpendapat yang berkaitan antara Perusahaan dengan Mitra Usaha. Sebagai insan Perusahaan dituntut dapat untuk dalam pengambilan keputusan apabila insan Perusahaan tersebut memiliki benturan kepentingan dengan Mitra Usaha, maka berkewajiban untuk melaporkan benturan kepentingan tersebut kepada atasan langsung dan/atau unit pengawasan internal; j. Setiap insan Perusahaan wajib untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan, stakeholder perusahaan, rekan kerja dan pemangku kepentingan lainnya. Selain menjaga hubungan baik, setiap insan Perusahaan wajib untuk menghormati setiap insan Perusahaan, karenanya, sikap dan perilaku yang tidak pantas, seperti merendahkan martabat orang lain yang dan/atau tidak untuk insan Perusahaan; k. Setiap insan Perusahaan berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan secara dengan klasifikasi informasi. Penyampaian informasi kepada publik dan stakeholder internal harus dilakukan dengan mempertimbangkan klasifikasi informasi, kepentingan perusahaan dan kebutuhan pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.	

Kewajiban Responsibilities	Pernyataan Statement
The statement is set out in the Code of Conduct and Business Ethics which must comply against the corporation's supervision that such member of the Board of Directors and Board of Commissioners and employees will: a. Act for the benefit of the corporation; b. Act honestly, and with a high standard of integrity; c. Be independent and unbiased in complete information in good faith, with due diligence and prudence; d. Comply with laws and regulations applicable to the corporation and its operations; e. Avoiding actions that create loss and irregularities or conditions which lead to corporate scale of ability; f. Not engage or participate in any activity that will create a conflict of interest with the best interests of the corporation, or that will negatively impact the reputation of the corporation; g. Not taking advantage of property or information owned by the corporation, ownership of other assets or to customers for personal gain or that causes loss to the corporation and its customers; h. Not offering or/or position or opportunities generated by his/her position for personal interests; i. Avoid any act of requesting or receiving from third parties payments, gratuities or other benefits for themselves or for others that could conflict or compromise benefits to third parties in violation of laws and regulations; j. Respect differences of opinion and the rights of each member of the Board of Directors, Board of Commissioners, and employees; k. Create conducive, fair, smooth, orderly, and comfortable atmosphere in reports and thoroughly submitted by the corporation to regulators and/or other public communications.	a. Every employee of the Company is committed to growing and developing together with the Company, as well as implementing work relation guidelines in the management of the Company; b. Every Company Personnel is committed to upholding ethics, honesty and professionalism, and integrity; c. Each Company Personnel is committed to avoiding any action that could a conflict of interest that can affect independence. Each Company Personnel is obliged to maintain the confidentiality of the Company's information in accordance with the classification of information. Disclosure of information to the public and other stakeholders must be made by taking into account the classification of information, the interests of the Company, and the needs of interested parties in accordance with applicable regulations; d. Each Company Personnel is committed to avoiding any action that creates a conflict of interest that can affect independence. Each Company Personnel is obliged to maintain the confidentiality of the Company's information in accordance with the classification of information. Disclosure of information to the public and other stakeholders must be made by taking into account the classification of information, the interests of the Company, and the needs of interested parties in accordance with applicable regulations; e. Every Company personnel is committed to avoiding any form of action that violates laws and regulations or unethical actions; f. Each Company Personnel is committed to avoiding any action that creates a conflict of interest that can affect independence; g. Every Company personnel is committed to maintaining the Company's assets for the benefit of adding value to the Company in accordance with the authority and scope of work. Safeguarding, maintaining, and securing the Company's assets in accordance with applicable regulations and not using the Company's assets for activities that violate the law and ethics; h. Every Company Personnel is committed to avoiding any action that creates a conflict of interest, one of which is abusing the position for personal gain; i. The Company strives for a harmonious relationship between the Company and Business Partners. All Company personnel are prohibited from participating in decision making if the Company personnel has a conflict of interest with Business Partners, as well as receiving opportunities for gratuities in order to accepting bribes and gratuities; j. Every Company Personnel is obliged to maintain good relations with all Company stakeholders in accordance with the Company's values in order to maintain harmony among Company personnel. Company personnel are obliged to respect fellow Company personnel, no matter a working reason or differences in opinion, and create a conducive work environment for Company personnel; k. Every employee of the Company is obliged to maintain the confidentiality of the Company's information in accordance with the classification of information. Disclosure of information on the public and other stakeholders must be made by taking into account the classification of information, the interests of the Company and the needs of interested parties in accordance with applicable regulations.
3.1.2.	Dalam menjalin hubungan dengan para pemasok dan pelanggan yang dapat berdampak pada kinerja perusahaan, setiap orang, anti korupsi, dan kecurangan. Jenis kasus yang ditangani antara lain pemberian atau penerimaan suap, gratifikasi, dan pemerasan. Selain itu, juga mencakup kegiatan yang dapat merugikan perusahaan, seperti penyalahgunaan aset perusahaan, penggelapan, dan tindakan lain yang melanggar hukum atau kebijakan perusahaan. Direksi dan Dewan Komisaris memberikan pedoman dan pengawasan terhadap kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan kasus-kasus tersebut. Direksi juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua karyawan dan pihak yang terkait dengan perusahaan memahami dan mematuhi kebijakan tersebut. Selain itu, Direksi dan Dewan Komisaris juga harus memastikan bahwa perusahaan memiliki sistem yang efektif untuk mendeteksi dan menangani kasus-kasus tersebut, serta memberikan sanksi yang tegas kepada pelanggar.	Dalam menjalin hubungan dengan pemasok dan pelanggan yang dapat berdampak pada kinerja perusahaan, setiap orang, anti korupsi, dan kecurangan. Jenis kasus yang ditangani antara lain pemberian atau penerimaan suap, gratifikasi, dan pemerasan. Selain itu, juga mencakup kegiatan yang dapat merugikan perusahaan, seperti penyalahgunaan aset perusahaan, penggelapan, dan tindakan lain yang melanggar hukum atau kebijakan perusahaan. Direksi dan Dewan Komisaris memberikan pedoman dan pengawasan terhadap kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan kasus-kasus tersebut. Direksi juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua karyawan dan pihak yang terkait dengan perusahaan memahami dan mematuhi kebijakan tersebut. Selain itu, Direksi dan Dewan Komisaris juga harus memastikan bahwa perusahaan memiliki sistem yang efektif untuk mendeteksi dan menangani kasus-kasus tersebut, serta memberikan sanksi yang tegas kepada pelanggar.

Rekomendasi Recommendation	Penjelasan Explanation
4.2.	
4.2.1	Perusahaan telah menetapkan prosedur dalam implementasi dan tata pengelolaan dalam kerangka dan mencapai tujuan perusahaan dalam kerangka dan mencapai tujuan perusahaan. The Company has established guidelines for the implementation of corporate values in the attitude, action and behavior of the Company's personnel.
4.3.	
4.3.1	Perusahaan telah menetapkan Sistem Pelaporan Pelanggaran (whistleblowing system) yang efektif, termasuk kebijakan perlindungan bagi pelapor (whistleblower), serta telah mengkomunikasikannya kepada Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan. The Company has established an effective Whistleblowing System, including a policy for protection of whistleblowers, and has communicated it to the Board of Commissioners, Directors and all employees.

Rekomendasi Recommendation	Penjelasan Explanation
5.1.	
5.1.1	Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap penerapan dan pelaksanaan tugas pengendalian internal, dan pengelolaan risiko dan kepatuhan perusahaan, dan telah memberikan arahan kepada Direksi untuk perbaikan. The Board of Commissioners has supervised the implementation and execution of internal control, risk management and compliance functions, and has provided directions to the Directors for improvement.

Rekomendasi Recommendation	Penjelasan Explanation
6.1.	
6.1.1	Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap penerapan dan pelaksanaan tugas pengendalian internal, dan pengelolaan risiko dan kepatuhan perusahaan, dan telah memberikan arahan kepada Direksi untuk perbaikan. The Board of Commissioners has supervised the implementation and execution of internal control, risk management and compliance functions, and has provided directions to the Directors for improvement.

	Enamsatu Recommendation	Pemantau Fulfillment
5.2.	**Manajemen Risiko** **Risk Management**	
5.2.1.	Strategi dan indikator kegiatan usaha termasuk, dan tidak terbatas pada, strategi dan indikator yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan hidup, sosial dan tata kelola perusahaan (*Environmental, Social and Governance*/ESG) yang telah dikaji dan disetujui oleh Dewan Komisaris serta dalam pelaksanaannya telah dibahas dalam rapat Direksi bersama Dewan Komisaris. *Strategy and indicators of business activities, including but not limited to strategy and indicators relating to environmental, social and governance issues (Environmental, Social and Governance/ESG) that have been reviewed and approved by the Board of Commissioners and in its implementation have been discussed in the Board of Directors' meetings together with the Board of Commissioners.*	1. Perlu ada keterlibatan Direksi dan Dewan Komisaris dalam Penyusunan Strategi dan Indikator Kegiatan Usaha termasuk Keberagaman Gender Perempuan. *Involvement of the Board of Directors and the Board of Commissioners in the preparation of strategies and indicators of business activities, including Women Gender Diversity.* 2. Pengambilan keputusan strategis dilakukan pada rapat-rapat yang membahas ESG yang melibatkan Direksi dan Dewan Komisaris. *Strategic decision-making is carried out in meetings discussing ESG which involve the Board of Directors and the Board of Commissioners.* 3. Tim dan akuntabilitas dari Direksi telah dikaji dan disetujui oleh Dewan Komisaris serta dalam pelaksanaannya telah dibahas dalam rapat Direksi bersama Dewan Komisaris. *The team and accountabilities of the Board of Directors have been reviewed and approved by the Board of Commissioners and in its implementation have been discussed in the Board of Directors' meetings together with the Board of Commissioners.* 4. Strategi, aktivitas terkait, dan hasil yang telah dicapai sesuai dengan KPI yang telah ditetapkan dan telah dilaporkan dalam Laporan Tahunan. *Strategies, activities related, and achievements in accordance with the KPI that have been set and reported in the Annual Report.* 5. Strategi, aktivitas terkait, dan hasil yang telah dicapai sesuai dengan KPI yang telah ditetapkan dan telah dilaporkan dalam Laporan Tahunan. *Strategies, activities related, and achievements in accordance with the KPI that have been set and reported in the Annual Report.* 6. Strategi, aktivitas terkait, dan hasil yang telah dicapai sesuai dengan KPI yang telah ditetapkan dan telah dilaporkan dalam Laporan Tahunan. *Strategies, activities related, and achievements in accordance with the KPI that have been set and reported in the Annual Report.*
5.2.2.	Sudah memiliki Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang terpisah dengan mandat dan tanggung jawab yang jelas dan terdokumentasi dengan baik. *Has a separate Risk Management and Compliance with clear mandate and responsibilities and well documented.*	Sudah memiliki dan melaksanakan Risiko melakukan pengawasan manajemen risiko kepatuhan dengan melakukan rapat-rapat secara berkala dengan Risiko Kepatuhan. *Has implemented and monitored risk management by conducting regular meetings with the risk management unit.*
5.3.	**Integrasi Governance, Manajemen Risiko dan Kepatuhan** **Integration of Governance, Risk Management and Compliance**	
5.3.1.	Direksi memberikan dalam governance, mendukung dan kepatuhan (GRC) yang terintegrasi, dengan mencegah dan tanggung jawab yang jelas, untuk mengelola dan mengawasi departemen/unit kepatuhan. *The Board of Directors established an integrated system of governance, risk management, and compliance (GRC) by addressing clear responsibilities in an integrated manner and with high integrity to ensure business operations can achieve its objectives.*	Perusahaan telah memiliki pedoman sebagai acuan dalam penerapan governance, risk and compliance (GRC) di anak perusahaan, agar anak perusahaan dapat mengoptimalkan efektivitas, efisiensi, pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan yang memenuhi prinsip GCG untuk mendukung visi, misi dan aktivitas bisnis Induk perusahaan. *The Company has established guidelines as a reference in the implementation of governance, risk and compliance (GRC) within the Company's so that the implementation of GRC will improve the effectiveness, efficiency, growth and sustainability of the Company that meets the principles of GCG in accordance with the vision, mission and business activities of the parent company.*
5.3.2.	Direksi memastikan bahwa segala yang berkewenangan mengidentifikasi dan mengelola risiko dalam batas toleransi yang ditetapkan untuk mencapai tujuan perusahaan. *The Board of Directors ensures that the parties in charge of the company's activities does not consistently carry out practices that have the potential to cause conflicts of interest.*	Tanggung jawab dan tata aktivitas dari Risk Management dan Compliance. *The compliance function is under the oversight of the Risk Management and Compliance.*
5.4.	**Audit Internal** **Internal Audit**	
5.4.1.	Direksi memastikan adanya fungsi audit internal yang efektif dan independen, serta melakukan kajian fungsi audit internal secara berkala, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko, pengendalian internal, dan governance perusahaan. *The Board of Commissioners through the Audit Committee monitors and reviews that the internal audit function is effective and independent and that the internal audit function reviews the organization to achieve its objectives by bringing a systematic and disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, internal control, and governance processes.*	Dewan Komisaris memberikan/tidak Tugas Pengawasan Dewan Komisaris kepada KDT dan Tim melalui dengan rutinnya rapatnya secara berkala dan berkala yang pada pelaksanaan pelaporan dan tindaklanjut Direksi kepadanya. *The Board of Commissioners holds the Board of Commissioners Supervisory Meetings for this purpose Team carried to conduct of the work plans evaluation and control issues and work discussion and follow-up by the Board of Commissioners.*

Pedoman Guidelines	Penjelasan Explanation
6.1. Kebijakan Pengungkapan **Disclosure Policy**	
6.1.1. Ringkasan mengenai kebijakan atau prosedur pengungkapan dan transparansi yang ditetapkan perusahaan termasuk dan tidak terbatas pada jenis informasi material dan mekanisme pengungkapannya. The Corporation has disclosure and transparency policies and procedures that ensure the disclosure of material information and safeguard sensitive information and corporate confidentiality.	Ringkasan mengenai kebijakan atau prosedur pengungkapan dan transparansi yang ditetapkan perusahaan termasuk dan tidak terbatas pada jenis informasi material dan mekanisme pengungkapannya. The Company prepares guidelines for engaging shareholders, and our company disclosures to a wide, timely and responsible manner in a way in compliance with applicable laws and regulations, which can maintain the credibility of the Company. This policy regulates the shareholders' participation and security of information, data and documents of the Company.
6.1.2. Cara pengungkapan untuk memastikan bahwa informasi material yang relevan diterima oleh pemangku kepentingan secara tepat waktu dan setara. The right of shareholders to obtain relevant, accurate, and timely information and to receive equal information as the shareholders must be fulfilled.	Sistem manajemen informasi yang memungkinkan pengungkapan informasi material yang relevan secara tepat waktu dan setara. The Board of Directors provides equal treatment to shareholders in providing information to shareholders in a regular and timely basis. The Company delivers information, quarterly management reports and annual management reports, all this done online and timely in majority, in accordance with relevant shareholders.
6.2. Laporan Keuangan dan Keberlanjutan **Financial Statements and Sustainability Report**	
6.2.1. Tinjauan atas pengungkapan, antara lain, prinsip-prinsip untuk memastikan bahwa laporan keuangan interim yang telah disusun atau diaudit sesuai dengan standar yang relevan telah disusun, dan pernyataan bahwa informasi yang tepat telah diungkapkan. The Corporation discloses quarterly financial reports to ensure that interim financial statements are prepared or reviewed by qualified accountants in accordance with relevant standards, and provide investors with appropriate information to make proper investment decisions.	Pernyataan telah mengungkapkan, antara lain, prinsip-prinsip untuk memastikan bahwa laporan keuangan interim yang telah disusun atau diaudit sesuai dengan standar yang relevan telah disusun, dan pernyataan bahwa informasi yang tepat telah diungkapkan. The Company has disclosed systems and procedures to ensure that interim financial statements are prepared or reviewed by qualified accountants in accordance with relevant standards, and provide investors with appropriate information to make proper investment decisions.
6.2.2. Komite Audit memberikan laporan audit dan/atau laporan yang direkomendasikan oleh komite audit kepada dewan. Together, in terminal, memberikan penjelasan, penyajian, bentuk dan, jika perlu, pertimbangan atas rekomendasi audit eksternal. The Audit Committee reviews the quality of audit of financial statements conducted by the external auditors. This includes recommending the appointment, engagement and dismissal, dismissal and remuneration of the external auditor.	1. Dewan komisaris secara tidak memberikan/tidak laporan yang harus dan/atau jangka audit/ standar keuangan dengan KAP/AUAP. 2. Dewan komisaris memberikan saran rekomendasi penunjukan auditor eksternal. 3. The Board of Commissioners routinely holds supervisory meetings and coordinates the audit program of Financial Statements with the external BPK. 4. The Board of Commissioners issues a letter of recommendation for the appointment of an external auditor.
6.2.3. Laporan keberlanjutan harus disajikan dan disampaikan dengan dasar-dasar dikuasai sesuai peraturan perlakuan keberlanjutan material atau keberlanjutan. Sustainability report is not to be prepared and disclosed accurately and in accordance with relevant or international sustainability reporting frameworks.	Dewan telah menyusun sustainability report. The Board of Directors has prepared a sustainability report.
6.2.4. Laporan mencerminkan dampak dari strategi dan tujuan yang mencerminkan kinerja masa lalu dalam konteks dan menggambarkan risiko, peluang, dan prospek kinerja di masa depan, sehingga memberikan pemangku kepentingan dan pemangku kepentingan lainnya laporan strategis laporan dan kemajuannya dalam mencapainya dan yang berkelanjutan. The Corporation publishes an integrated annual report that puts financial performance into context and describes the risks, opportunities and future prospects of the corporation, thereby helping shareholders and stakeholders understand the strategic aspirations of the corporation and the progress in meeting corporate objectives.	Pernyataan mencerminkan laporan tahunan tersebut ke yang menggambarkan risiko, peluang, dan strategi dan prospektif ke depan. The Company publishes an integrated annual report that describes the Company's financial performance, risks, opportunities and future strategic goals.

[illegible]	[illegible]
7.3.	**[illegible]**
7.3.1.	[illegible]
7.3.2.	[illegible]
7.3.3.	[illegible]

Prinsip 7: Perlindungan terhadap Hak-Hak Pemegang Saham
Principle 7: Protection of Shareholders' Rights

[illegible]	[illegible]
7.4.	**[illegible]**
7.4.1.	[illegible]
7.4.2.	[illegible]

	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan Explanation
7.1.3	Corporate ownership data for all providers using and utilizing electric energy/infrastructure, that have direct business relationship with the Corporation, and/or indirectly through other third parties, both in the form of individuals and corporations, including the ultimate beneficial owners, in order to ensure that the Corporation's business activities are not misused for the purpose of money laundering, terrorism financing, and other illegal activities. The Corporation has a data and procedures regarding beneficial ownership, which is in accordance with the applicable laws and regulations in order to ensure that the Corporation's business activities are not misused for the purpose of money laundering, terrorism financing, and other illegal activities.	Terbuka untuk seluruh pemasok/penyedia yang memiliki hubungan bisnis dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pihak ketiga lainnya, termasuk pemilik manfaat akhir, baik perorangan maupun badan hukum, untuk memastikan bahwa kegiatan usaha Perseroan tidak disalahgunakan untuk tujuan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kegiatan ilegal lainnya. Perseroan memiliki data dan prosedur yang mengatur mengenai pemilik manfaat akhir, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk memastikan bahwa kegiatan usaha Perseroan tidak disalahgunakan untuk tujuan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kegiatan ilegal lainnya.
7.2	Perlakuan Adil Terhadap Pemegang Saham Fair Treatment towards Shareholders	
7.2.1	Corporate ownership data for all providers using and utilizing electric energy/infrastructure, that have direct business relationship with the Corporation, and/or indirectly through other third parties, both in the form of individuals and corporations, including the ultimate beneficial owners, in order to ensure that the Corporation's business activities are not misused for the purpose of money laundering, terrorism financing, and other illegal activities. The Corporation has a data and procedures regarding beneficial ownership, which is in accordance with the applicable laws and regulations in order to ensure that the Corporation's business activities are not misused for the purpose of money laundering, terrorism financing, and other illegal activities.	Perseroan memiliki struktur pemegang saham yang ETI (Perseroan) dengan kepemilikan saham sebesar 80,65% dan ITA (Publik) dengan kepemilikan saham sebesar 19,35%. Dalam memberikan pelibatan yang cukup dan memadai, ETI dan ITA, Direksi Perseroan telah memberikan informasi kepada Pemegang Saham. The Company has a shareholder structure, namely, PT ETI (Company) with share ownership of 80.65% and ITA (Public) with share ownership of 19.35%. The Board of Directors provides adequate involvement, attention, and information to Shareholders.
7.2.2	Corporate ownership data for all providers using and utilizing electric energy/infrastructure, that have direct business relationship with the Corporation, and/or indirectly through other third parties, both in the form of individuals and corporations, including the ultimate beneficial owners, in order to ensure that the Corporation's business activities are not misused for the purpose of money laundering, terrorism financing, and other illegal activities. The Corporation has a data and procedures regarding beneficial ownership, which is in accordance with the applicable laws and regulations in order to ensure that the Corporation's business activities are not misused for the purpose of money laundering, terrorism financing, and other illegal activities.	Perseroan telah memiliki dasar mengenai pengelolaan konflik kepentingan. The Company has rules regarding the management of conflicts of interest.
7.2.3	Corporate ownership data for all providers using and utilizing electric energy/infrastructure, that have direct business relationship with the Corporation, and/or indirectly through other third parties, both in the form of individuals and corporations, including the ultimate beneficial owners, in order to ensure that the Corporation's business activities are not misused for the purpose of money laundering, terrorism financing, and other illegal activities. The Corporation has a data and procedures regarding beneficial ownership, which is in accordance with the applicable laws and regulations in order to ensure that the Corporation's business activities are not misused for the purpose of money laundering, terrorism financing, and other illegal activities.	Perseroan telah memiliki dasar mengenai pengelolaan konflik kepentingan. Selain Perseroan, Direksi dan dasar transaksi mengandung Pihak Terafiliasi, dimana Direksi dan dasar transaksi Direksi dan Dewan Komisaris berkepentingan untuk tidak melakukan pengambilan keputusan jika terjadi transaksi tersebut yang mengandung benturan kepentingan. The Company has rules regarding the management of conflicts of interest. Every year, the Board of Directors and Board of Commissioners sign an integrity Pact, in which it is stipulated that the Board of Directors and Board of Commissioners are committed not to making decisions and not conducting transactions that contain conflicts of interest.
7.3	Hak Pemegang Saham General Meeting of Shareholders	
7.3.1	Corporate ownership data for all providers using and utilizing electric energy/infrastructure, that have direct business relationship with the Corporation, and/or indirectly through other third parties, both in the form of individuals and corporations, including the ultimate beneficial owners, in order to ensure that the Corporation's business activities are not misused for the purpose of money laundering, terrorism financing, and other illegal activities. The Corporation has a data and procedures regarding beneficial ownership, which is in accordance with the applicable laws and regulations in order to ensure that the Corporation's business activities are not misused for the purpose of money laundering, terrorism financing, and other illegal activities.	Dalam ringkasan Dasar telah diatasnya tahun Dalam untuk melakukan pemenggil ini. Dapat rincian Pemegang Dalam dalam jangka waktu yang cukup (2 pengadakan) hari sebelum tanggal Rapat. Dalam pemegang Dalam dijadikan. Dalam panggilan RUPS disampaikan tempat, waktu, kempat, dan mata acara rapat, dimana pemberitahuan tersebut telah yang akan dibicarakan dalam RUPS tersebut di bahar Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS hingga tanggal RUPS dilakukan. Dalam pemberitahuan mata) RUPS kepada pemegang Saham, termasuk tempat, waktu yang cukup bagi Pemegang Saham untuk mempelajari mengenai baik agenda rapat. Keputusan hukum mengenakan Perseroan Terbuka diantara undangan rapat dan sebanyak informasi RUPS tidak wajib mengadakan mata) dan pendahuluan. hanya diagendakan dan pelaksanaan RUPS yang dicantumkan oleh pemegang saham.

	Rekomendasi Recommendation	Realisasi Fulfillment
	The Corporation conducts the GMS invitation with the agenda and materials of the GMS completed and ready to publish not earlier than 28 days before the GMS to provide sufficient time and materials for shareholders or proxies to study the meeting agenda. The meeting invitation and RUPS Information are disclosed through electronic means such as through the corporation's website.	In the Notice of Convocation, it is stated that the Board of Directors shall set an invitation to the General Meeting of Shareholders no later than 14 (fourteen) days before the date of the General Meeting of Shareholders. The invitation to the GMS shall include the date, time, place, and agenda of the meeting, along with a confirmation of who is entitled to be present at the GMS, an explanation of the Company's offer from the date of the invitation to the GMS until the date of the GMS, in particular, the GMS materials must be submitted to the Shareholders, or their proxies sufficient time for the Shareholders to properly study the meeting agenda. The Corporation is still a Public Company where the meeting invitation and GMS information are not required to be disclosed through the Company's website, only a summary of the information of the GMS is included on the Company's website.
T.3.2.	Corporate mendukung penggunaan mata dan provider yang memfasilitasi pemegang saham aktif berpartisipasi dan memberikan suara secara elektronik (eASY.RUPS). The Corporation has and discloses rules and procedures that facilitate shareholders in participating and voting effectively at the GMS.	Perusahaan telah menyiapkan mata dan provider pengelola Rapat dalam penyelenggaraan Rapat (Rapat 21, 22, 23 dan 24). The Company has prepared rules and procedures regarding the General Meeting of Shareholders in the Articles of Association (Articles 21, 22, 23, and 24).
T.3.3.	Perseroan telah menyediakan dalam Mata Acara/dalam pemanggilan RUPS untuk Dewan Air Dewan komisaris. Shareholders can participate effectively in determining the appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners.	Pemegang Saham memberikan Usulan dan Dewan Komisaris melalui Nominasi (RUPS) secara Dewan telah disiapkan proses penilaian dan calon-calon Dewan Komisaris. Shareholders determine the Board of Directors and Board of Commissioners through a Circular Letter Nomination who is interested to become a the candidates for the Board of Directors and Commissioners.
P.3.1.	Corporate memastikan independensi dan akuntabilitas auditor eksternal eATUPS. The Corporation ensures the independence and accountability of the external auditor of the GMS.	RUPS menyetujui Kantor Akuntan Pemegang Saham mengenai verifikasi independen penyajian Kantor Akuntan Publik sebagai auditor yang akan menyusun laporan keuangan perusahan, laporan evaluasi kinerja, dan laporan lapangan. The GMS authorized the equity Shareholders to determine the appointment of a Public Accounting Firm as the auditor who will audit the Company's financial statements, prepare work evaluation reports and conduct field reports.
T.3.5.	Perseroan telah menyediakan saran dan mekanisme untuk pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan pendapat pada saat RUPS secara langsung dan/atau secara tertulis sebelum RUPS. Shareholders can propose to the Board of Directors and Board of Commissioners the agenda of the GMS, ask questions and express opinions in the GMS, both directly and in writing before the GMS.	Sepanjang telah memenuhi Persyaratan Tertentu telah yang tersedia di Perseroan telah disediakan sarana dan mekanisme yang telah disediakan untuk pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan pendapat pada saat RUPS secara langsung dan/atau secara tertulis sebelum RUPS yang ditentukan pada waktu penyelenggaraan. The Corporation is still a Public Company where only the 2 shareholders with the majority shareholder in PT PLN Nusantara with a share ownership percentage of 99.99% and PT PLN with a share ownership percentage of 0.01%. All results of the shareholders' consultations are not required to be disclosed through the Company's website, only a summary of the implementation of the GMS is included on the Company's website.

Pilihan & Pencapaian Kepemimpinan Lainnya Awards & Other Achievements	
Keterangan Description	Pencapaian Fulfillment
E.1. Keterlibatan Pemangku Kepentingan Kunci (Stakeholder Engagement) Key Stakeholder Engagement	
E.1.1. Sekretaris Perusahaan memiliki kewajiban dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan strategi komunikasi, hubungan masyarakat, media dan stakeholder Perusahaan The Corporate Secretary is responsible for planning, implementing, developing and evaluating the management of the Company's communication strategy, public relations, media and stakeholders	Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan kewajiban dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan strategi komunikasi, hubungan masyarakat, media dan stakeholder Perusahaan The Corporate Secretary has carried out its obligations in planning, implementing, developing and evaluating the management of the Company's communication strategy, public relations, media and stakeholders
E.2. Integrasi Aspek Keberlanjutan dalam Model Bisnis Integration of Sustainability in Business Models	
E.2.1. Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi bertanggung jawab, sekurang-kurangnya dalam satu tahun buku, untuk mengadakan Rapat Gabungan dengan Direksi, membahas dan mengevaluasi kebijakan Perusahaan, termasuk antara lain alokasi sumber daya dan keberlanjutan usaha The Board of Commissioners together with the Board of Directors is responsible, at least once in one financial year, for holding a Joint Meeting with the Board of Directors to discuss and evaluate the Company's policies, including the allocation of resources and business sustainability	Dewan Komisaris melaksanakan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi The Board of Commissioners held a Joint Meeting with the Board of Directors
E.3. Perlindungan terhadap Pelanggan (Konsumen) Protection of Stakeholders	
E.3.1. Direksi memastikan dan mengungkapkan bahwa upaya Perusahaan untuk memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan, termasuk hak-hak yang berkaitan dengan pelanggan, telah dilaksanakan The Board of Directors ensures and discloses that the organization's commitment to the quality of its products, as well as environmentally responsible practices throughout the organization, and ensures that appropriate policies and procedures are implemented to respect and comply with the rights of stakeholders	Perusahaan telah melaksanakan dan telah mengungkapkan upaya Perusahaan untuk memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan, termasuk hak-hak yang berkaitan dengan pelanggan The Company has implemented and disclosed its efforts to pay attention to the interests of stakeholders, including rights relating to customers
E.3.2. Direksi mendorong karyawan terlibat untuk meningkatkan pengembangan perusahaan dan mengelola risiko kerjanya The Board of Directors encourages employees to work for the long-term interests of the corporation and proactively manage risks	Setiap Anak Perusahaan melaksanakan untuk terlibat dan mendorong karyawan dengan perwakilan dengan wajib untuk bekerja mengambil inisiatif terbaik guna kebaikan bersama, bersama sama bekerjakan dan berkembang, serta wajib mengevaluasi diri dan mengelola berbagai peluang yang terjadi. Every Company that exists is committed to growing and developing together with the Company, with the obligation to take initiatives, collaborate, work together, care, communicate, and continuously, as well as quickly adjust and respond to changes that occur.

Struktur Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Structure

Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) merupakan rangkaian proses, peraturan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengelolaan, pengendalian dan pengarahan berjalannya korporasi hubungan antara para pemangku kepentingan (stakeholder) yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Struktur tata kelola Perusahaan sangat erat kaitannya dengan bagaimana sumber daya, proses hubungan dengan stakeholders serta pencapaian tujuan Perusahaan dapat berjalan dengan baik. Struktur tata kelola yang memadai baik dari segi organ maupun kebijakan dapat mendukung kinerja Perusahaan dan pengelolaan bisnis berkelanjutan. Perusahaan secara berkala melakukan evaluasi dan pengembangan struktur tata kelola sesuai dengan kebutuhan Perusahaan dan regulasi, dengan kebutuhan pencapaian serta best practices yang ada sehingga mampu mendukung transformasi dalam menghadapi perubahan lingkungan dan proyeksi bisnis Perusahaan.

Corporate Governance is a series of processes, behaviors, policies, rules and institutions that influence the management, control and direction of the corporation including the relationship between the stakeholders involved and the objectives of managing the Company. The corporate governance structure is closely related to how the behavior or processes of relationships with stakeholders as well as the achievement of the Company's objectives can run well. An adequate governance structure both in terms of organs and policies can support the Company's performance and sustainable business management. The Company periodically evaluates and develops the governance structure in accordance with the needs of the Company and in line with the provisions of legislation and best practices that continue to develop so as to be able to support transformation in facing environmental changes and the Company's business needs.

Organ Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Organs

Struktur tata kelola Perusahaan secara institusi atau organ mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perusahaan. Organ tata kelola Perusahaan terdiri dari organ utama dan organ pendukung. Organ utama tata kelola Perusahaan dibentuk oleh organ pendukung dalam melaksanakan fungsi yang dijalankan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen serta kewajaran dan kesetaraan.

The Company's governance structure by institution or organ refers to the Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and the Company's Articles of Association. The organs of corporate governance consist of main organs and supporting organs. The main organ of corporate governance is operated by supporting organs in carrying out the functions based on the principles of transparency, accountability, responsibility, independence as well as fairness and equality.

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Structure of Corporate Governance Organs

Transparency | Accountability | **Responsibility** | Independency | **Fairness**

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi merupakan organ utama yang menentukan pengelolaan, pengendalian dan pengarahan kebijakan. Direksi sebagai pelaksana fungsi pengelolaan Perusahaan dibantu oleh organ di bawah Direksi yang terdiri dari Sekretaris Perusahaan, Satuan Pengawasan Internal, Satuan Manajemen Risiko dan Kepatuhan serta Unit Kerja Lainnya sebagai organ pendukung tata kelola Perusahaan. Dewan Komisaris juga memberikan organ pendukung yang terdiri dari Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan, Komite Nominasi dan Remunerasi.

The General Meeting of Shareholders (GMS), Board of Commissioners and Board of Directors are the main organs that determine the management, control and direction of the corporation. The Board of Directors as the executor of the Company's management function is assisted by organs under the Board of Directors consisting of the Corporate Secretary, Internal Audit Unit, Risk Management and Compliance Unit and Other Work Units as supporting organs of corporate governance. The Board of Commissioners also establishes supporting organs consisting of the Secretary of the Board of Commissioners, Audit Committee, Risk Management and Compliance Committee, Nomination and Remuneration Committee.

Kebijakan Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Policy

Organ tata kelola Perusahaan dalam melakukan pengelolaan, pengendalian dan pengawasan korporat perlu dilengkapi dengan kebijakan dan aturan (*policy/rules*) yang menjadi acuan dalam berperilaku dan melaksanakan proses bisnis sehingga dapat memastikan efektifitas pencapaian tujuan Perusahaan. Perusahaan menyusun kebijakan sebagai pedoman aturan yang menjadi pedoman bagi organ tata kelola Perusahaan dalam melaksanakan implementasi GCG sesuai dengan peraturan perundang-undangan, *best practice* serta nilai-nilai budaya Perusahaan. Pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan untuk fungsi dalam tata kelola Perusahaan berdasarkan pendekatan tiga pilar utama yaitu Objective, Risk and Control (ORC). Setiap fungsi didorong untuk dapat mengelola risiko dan memiliki kontrol atas organisasi yang bertanggung jawabnya proses di dalam Perusahaan sesuai dengan dinamika usaha dan regulasi yang berlaku.

The corporate governance organs in conducting management, control and directing the corporation are required to be equipped with policies and rules (*policy/rules*) that serve as a reference in behaving/performing organizational processes or activities to ensure the effectiveness of achieving the Company's objectives. The Company prepares policies as a set of rules that serve as guidelines for the corporate governance organs in supporting the implementation of GCG in accordance with laws and regulations, best practices and the Company's cultural values. The implementation of policies applied by each function in the corporate governance is based on the three main pillars approach, namely Objective, Risk and Control (ORC). Each function is encouraged to be able to manage risks and have control over the organization that oversees the tasks and processes within the Company in accordance with business dynamics and applicable regulations.

Perusahaan melakukan pembaruan secara berkala dan memutakhirkan kebijakan yang ada apabila diperlukan serta menyusun kebijakan pendukung lainnya untuk mengakomodir kebutuhan dan pengembangan Perusahaan, peraturan perundang-undangan serta *best practices* penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Kebijakan tata kelola yang telah dimiliki Perusahaan antara lain:

1. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (CG Code)
2. Pedoman/Perilaku (*Code of Conduct*)
3. Pedoman Tatakelama Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*)
4. Pedoman Tatakelama Kerja Dewan Komisaris (*Board of Commissioner Manual*)
5. Pedoman Tatakelama Kerja Direksi (*Board of Director Manual*)
6. Pedoman Tatakelola Governance (Tata Kelola Komunikasi Risiko)
7. Kebijakan Pengungkapan Informasi (*Disclosure Information*)
8. *Audit Internal Charter*
9. *Charter Komite*
10. Pedoman Kebijakan Perusahaan
11. Tata Nilai Perusahaan
12. Pedoman/Penerapan Governance, Risk, Compliance (GRC)
13. Pedoman terkait Kebijakan Anti Penyuapan
14. Pedoman terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
15. Pedoman terkait bantuan kedermawan
16. Program Pengendalian Gratifikasi
17. Pedoman penegakan disiplin dan penanganan pelanggaran (Whistleblowing System/WBS)

The Company conducts periodic revision and updates existing policies if necessary as well as prepares other supporting policies to accommodate the needs and development of the Company, laws and regulations as well as best practices for the implementation of good corporate governance. The governance policies that have been owned by the Company include:

1. Corporate Governance Code (CG Code)
2. Code of Conduct
3. Board Manual
4. Board of Commissioners Manual
5. Board of Directors Manual
6. Governance Guidelines (Risk Communication Governance)
7. Information Disclosure Policy
8. Internal Audit Charter
9. Committee Charter
10. Company Policy Guidelines
11. Company's Code of Values
12. Guidelines for the Implementation of Governance, Risk, Compliance (GRC)
13. Guidelines related to Anti-Bribery Policy
14. Guidelines related to the State Official Wealth Report (LHKPN)
15. Guidelines related to conflict of interest
16. Gratification Control Program
17. Guidelines for discipline enforcement and handling violations (Whistleblowing System/WBS)

10. Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Pelestarian Lingkungan (K3L);
11. Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
12. Berbagai kebijakan dan prosedur Perusahaan yang ketersediaannya diungkapkan dan disampaikan secara berkala/insidentil, serta dievaluasi sesuai dengan perubahan-perubahan yang terkini dan terkini.

10. Occupational Health and Safety as well as Environmental Conservation (OHSE) Policy;
11. Goods and Services Procurement Policy; and
12. Various policies and procedures of the Company that is continuously completed and refined as well as adjusted to the latest applicable regulations/regulations.

Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ perseroan yang memiliki kewenangan tertinggi dalam memutuskan kebijakan strategis sesuai hak-hal dan yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi. Sebagai organ utama tata kelola Perusahaan, Pengambilan keputusan oleh RUPS dapat dilakukan dalam forum pertemuan secara fisik atau melalui surat keputusan yang ditetapkan secara sirkuler. RUPS secara khusus memiliki kewenangan eksklusif yang tidak dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris atau Direksi, seperti penetapan perubahan Anggaran Dasar, mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris, menyetujui atau menolak rencana kerja Perusahaan, menetapkan penggunaan laba perusahaan, menyetujui laporan tahunan, dan menunjuk akuntan publik, serta menetapkan jumlah dan jenis kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi.

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the ownership organ that has the highest authority in determining strategic decisions and other matters that are not committed to the Board of Commissioners or the Board of Directors. As the main organ of corporate governance, decision-making by the GMS can be conducted in a physical meeting forum or through a decree determined circularly. The GMS specifically has the authority to, among others, ratify amendments to the Articles of Association, appoint and dismiss the Board of Directors and Board of Commissioners, approve or reject the Company's work plan, determine the utilization of the Company's profit allocation, evaluate the performance of the Board of Commissioners and Board of Directors, provide approval for the annual report, and appoint a public accountant, as well as determine the amount and type of compensation of the Board of Commissioners and Board of Directors.

Pemegang Saham Utama dan Pengendali
Majority and Controlling Shareholders

Pemegang Saham Perusahaan sebagian besar dimiliki oleh PT PLN (Persero) dengan kepemilikan saham sebesar 80,65 %. Sementara 19,35% kepemilikan saham Perusahaan dimiliki oleh Dayanan Pendidikan dan Masyarakat. PT PLN (Persero), Komposisi kepemilikan saham tersebut merupakan PT PLN (Persero) sebagai Pemegang Saham utama dan pengendali Perusahaan. Direktur utama PT PLN (Persero) merupakan representasi pemegang saham utama dan pengendali. Secara mana hubungan dengan anak perusahaan berada di bawah Direktur Perencanaan PT PLN (Persero) melalui Divisi Manajemen Portofolio.

Pengambilan keputusan oleh Pemegang Saham sepenuhnya dilaksanakan pada keseimbangan Perusahaan dengan mengedepankan prinsip kesetaraan dan kewajaran serta aspek kehati-hatian. Berdasarkan hal tersebut, Pemegang Saham Pengendali bertanggung jawab untuk:

The Company's shareholders are mostly owned by PT PLN (Persero) with 80.65% share ownership. While 19.35% of the Company's share ownership is owned by the Education and Welfare Foundation of PT PLN (Persero). This composition of share ownership means PT PLN (Persero) as the major and controlling shareholder of the Company. The President Director of PT PLN (Persero) is the representation of the major and controlling shareholders. Technically, the relationship with subsidiaries is under the Director of Planning of PT PLN (Persero) through the Portfolio Management Division.

Decision making by Shareholders is fully based on the interests of the Company by prioritizing the principle of fairness and equality as well as is cautionary aspects. Based on this matter, the Controlling Shareholders are responsible for:

3. Memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan para pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memberikan akses informasi yang benar, akurat dan relevan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Menyediakan akses dan hubungan antara pemegang saham dengan Direksi dan Dewan Komisaris.

1. Taking into account the interests of minority shareholders and other stakeholders in accordance with the Articles of Association as well as applicable laws and regulations.
2. Disclosing to the authorized parties information on the Controlling Shareholders and/or the Ultimate Shareholders in the event that there are allegations of violations of the provisions of the Articles of Association and/or applicable laws and regulations, or in the event that it is requested by the authorized institution in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.
3. Giving fair code accountability and relationship between companies and its capital.

Ketentuan Penyelenggaraan RUPS

Provisions for Holding the GMS

Penyelenggaraan RUPS mengacu pada Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan sebagaimana diatur dalam *Corporate Governance Code* (CG Code) Dapat Untuk Pemegang Saham Perusahaan merupakan representasi menjadi Grup PLN dalam mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan fungsi pengelolaan dan fungsi pengawasan atas entitas yang berwenang di dalamnya. dimana RUPS Perusahaan terdiri dari RUPS Tahunan serta RUPS Luar Biasa.

The Holding of the GMS refers to the Company's Articles of Association and the provisions as described in the Corporate Governance Code (CG Code). The Company's General Meeting of Shareholders is a managerial representation of the PLN Group in being accountable for the entire implementation of the management and supervisory functions of the entities under its umbrella, where the Company's GMS consists of the Annual GMS and Extraordinary GMS.

RUPS Tahunan diselenggarakan terkait penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Laporan Tahunan Perusahaan. RUPS tentang Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah tahun anggaran berjalan. RUPS tentang Penetapan Laporan Tahunan diadakan paling lambat delapan bulan (satu) setelah tahun buku yang bersangkutan.

The Annual GMS is held in relation to the approval of the Company's Annual Budget and Operational Plan (RKAP) and the Company's Annual Report. The GMS on the Approval of the Annual Budget and Operational Plan is held no later than 30 (thirty) days after the current fiscal year. The GMS on the Approval of the Annual Report is held no later than (one or 8 (six) months after the closing of the relevant fiscal year.

RUPS Luar Biasa (RUPSLB) diselenggarakan di luar waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, dapat diadakan setiap saat, jika dianggap perlu oleh Direksi berdasarkan Dewan Komisaris atau atau Pemegang Saham. Direksi wajib menyelenggarakan RUPSLB sesuai permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permintaan RUPS diterima. Dalam hal Direksi tidak menyelenggarakan RUPSLB maka Dewan Komisaris/ Pemegang Saham yang memerlukannya wajib permintaan berhak untuk menanggil sendiri RUPS atas biaya Perusahaan, setelah mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perusahaan.

Extraordinary GMS (EGMS) is held subject for schedules stipulated in the Articles of Association, can be held at any time, if deemed necessary by the Board of Directors and/or Board of Commissioners and/or Shareholders. The Board of Directors must hold the EGMS in accordance with a written request from the Board of Commissioners or Shareholders within a period of no later than 30 (thirty) days from the date the request for the EGMS is received. In the event that the Board of Directors does not hold the EGMS, the Board of Commissioners/Shareholders who sent the request letter are entitled to summon the EGMS themselves at the Company's expense, after obtaining permission from the Chairman of the District Court whose jurisdiction covers the Company's domicile.

Penyelenggaran RUPS dilakukan dengan surat tercatat dengan memperhatikan tanggal, waktu, tempat dan tata cara kerja direksi pembentukan kehtua, kuorum yang akan dilaksanakan dalam RUPS tersebut di kantor Perseroan pada tanggal dilakukan penyelenggaran RUPS sampai dengan tanggal RUPS dilakukan tangka waktu penyelenggaran RUPS dilakukan paling sekurang-kurangnya 14 hari sebelum RUPS. Satu hal, RUPS harus dilaksanakan dalam bentuk rapat RUPS yang memuat sekurang-kurangnya waktu, agenda, peserta, pimpinan yang berkenaan dalam RUPS dan kepulauan RUPS. Dalam RUPS tersebut, wajib dihadirkan oleh rekut RUPS dan paling sedikit 1 (satu) Pemegang Saham yang mewakili dan dan dan peserta RUPS, serta harus tersebut telah disetujui agenda rapat RUPS dibuat dengan Ketentuan

The invitation to the GMS is conducted by registered letter by stating the date, time, place and procedure of the meeting along with a confirmation that the materials to be discussed in the GMS are available at the Company's office from the date of the invitation to the GMS until the date of the GMS. The period of invitation to the GMS is no later than 14 days before the GMS. In addition, the GMS must be documented in the form of GMS minutes containing at least the time, agenda, participants, opinions developed in the GMS and GMS resolutions. The minutes of the GMS must be signed by the chairman of the GMS and minimum 1 (one) shareholder appointed here and by the participants of the GMS. The signature is not required in the minutes of the GMS are made by Notarial Deed.

Penyelenggaraan RUPS Tahun 2022

Holding GMS in 2022

Perusahaan sepanjang tahun 2022, telah melaksanakan RUPS Tahunan tentang Pengesahan (RUA) Tahun 2021 tanggal 29 Januari 2022 dan (LKP), Tahunan tentang Pertanggung Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2021 pelaksanaan 29 Juni 2022 dengan afiliasi oleh rapat gabungan sahan diantaka buana/mall pemegang saham yang sebutnya menjadi 0.000.000.000 saham, bertempat di PT PLN (Persero) serta melalui video conference. Pelaksanaan RUPS dilaksanakan secara mandiri tanpa menggunakan jasa independen dalam penghitungan suara.

Throughout 2022, the Company has carried out the Annual GMS on the Ratification of the (RUA) 2021 on January 29, 2022 and the Annual GMS on the Approval of the Annual Report and Ratification of the Financial Statements for the 2021 Financial Year on June 29, 2022, attended by all shareholders whose ownership/representation of shareholders representing a total of 0.000.000.000 shares, located at PT PLN (Persero) and via video conference. The implementation of the GMS was carried out independently without using an independent party in the vote count.

Hasil Penyelenggaraan RUPS RKAP Tahun 2022

Results of the GMS of 2022 (RKAP)

Penanggalan Surat No. 2A000F972 tanggal 7 Januari 2021	Invitation Letter No. 2A000F972 dated January 7, 2021
Mulai Acara Sesuai dalam Akta Notaris Nomor 20 tanggal 23 Februari 2021, Berita Acara Pernyataan Keputusan Rapat dalam Pemegang Saham PT Pembangkitan Jawa Bali Tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2022 tanggal 26 Januari 2021.	**Minutes of Meeting** Contained in Notarial Deed Number 20 dated February 23, 2021, Minutes of the Resolution of the General Meeting of Shareholders of PT Pembangkitan Jawa Bali Regarding the Ratification of the Company's Annual Budget and Operational Plan (RKAP) for 2022 dated January 26, 2021
Agenda Rapat 1: Pembagian dan Pengesahan Deviden bagi dan Anggaran Tahun Buku 2021	**Meeting Agenda 1:** Approval and Distribution of the Annual Budget and Operational Plan for the 2021 Financial Year
Keputusan: RUPS menyetujui dan mengesahkan Deviden bagi dan anggaran Perusahaan Tahun 2021. **Tindak Lanjut:** Disetujui RUPS (RUP 2021 Nomor 001/RUPS-JCB/2021	**Resolution:** The GMS approved and Ratified the Company's Annual Budget and Operational Plan for 2021 **Follow up:** Minutes of the GMS of the 2021 (RUP Number 001/RUPS-JCB/2021
Agenda Rapat 2: Persetujuan dan Pengesahan Indeks Hargainan Key Performance Indicator tahun 2021	**Meeting Agenda 2:** Approval and Ratification of Management Cards and Key Performance Indicator for 2021
Keputusan: RUPS menyetujui dan mengesahkan Kay Performance Indicators (KPI) Perusahan Tahun 2021. **Tindak Lanjut:** Disetujui (RUPS) No.07 2021 Nomor 001/RUPS-JCB/2021	**Resolution:** The GMS approved and Ratified the Company's Key Performance Indicators (KPI) for 2021 **Follow up:** Minutes of the GMS of the 2021 (RUP) Number 001/RUPS-JCB/2021

Hasil Penyelenggaraan RUPS Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2021

Results of the GMS on Approval of the Annual Report for the 2021 Financial Year

Penyelenggaran:	Institution:
Surat No. DA0094972 tanggal 6 Juni 2022	Letter No. DA0094972 dated June 6, 2022

Dasha Arara	Minutes of Meeting
Akta Notaris Nomor 31 Dasha Arara RUPS Tahunan Tahun Buku 2021, tanggal 29 Juli 2022	Notarial Deed Number 31 Minutes of the Annual GMS for the 2021 Financial Year dated June 29, 2022

Agenda Rapat 1:	Meeting Agenda 1:
Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 termasuk Laporan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2021 serta Pemberian Pembebasan Tanggung jawab Sepenuhnya (Volledig Acquit et de Charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas Pengelolaan dan Pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2021;	Approval and Ratification of the Company's Annual Report for the 2021 Financial Year, including the Board of Commissioners Supervisory Report for 2021, and the Provision of a Full Responsibility Release Certainty Acquit et de Charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners for the Management and Supervision that have been carried out during the 2021 Financial Year;

Keputusan:	Resolution:
1. RUPS menyetujui dan menerima Laporan Tahunan mengenai Kegiatan dan Jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2021 yang terdiri atas : Laporan Keuangan, Laporan Dewan Direksi dan Laporan Kegiatan;	1. The GMS approved and accepted the Annual Report on the Company's Condition and Operations during the 2021 Financial Year consisting of Financial Report, Performance Evaluation Report and Commissioners Report;
2. RUPS menyetujui dan menerima Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2021;	2. The GMS approved and accepted the Report on the Implementation of the Supervisory Duties of the Board of Commissioners during the 2021 Financing Year;
3. RUPS mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021, yang memuat Laporan Posisi Keuangan (Consolidasi), Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian, Laporan Arus Kas Konsolidasian dan Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian beserta penjelasannya, tersebut diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC Indonesia) dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material/ mengandung dimensi Stare decisis No.B-0682/LI.03/04/2022 tanggal 28 Maret 2022;	3. The GMS ratified the Company's Financial Statements for the 2021 Financial Year comprising the Consolidated Statements of Financial Position, Consolidated Statements of Comprehensive Income, Consolidated Statements of Cash Flows and Consolidated Statements of Changes in Equity and their explanations, and have been audited by the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC Indonesia) with the opinion of "fair in all material respects" as referred to in report No.B-0682/LI.03/04/2022 dated March 31, 2022;
4. RUPS memberikan pembebasan sepenuhnya (volledig Acquit et de Charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan sesuai dengan tanggung jawab dan prudent Asset Siding Hearing masing-masing yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tercermin dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC Indonesia). Pengesahan dan Pemberian tanggung jawab tersebut tidak merupakan tanggung jawab tuduh terhadap Direksi dan atau Dewan Komisaris apabila Laporan yang digunakan tersebut terbukti merupakan keterikatan dan investor nutuh yang berlaku dimana kemudian hari terbukti adanya tindakan yang merugikan Perseroan.	4. The GMS grants full release (Volledig Acquit et de Charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for management and supervision in accordance with the respective duty and actions in their respective fields that have been carried out during the 2021 Financial Year, as long as these actions do not conflict with applicable laws and regulations and are reflected in the Financial Statements that have been audited by the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC Indonesia). The ratification and release of responsibility does not release the legal responsibility of the Board of Directors and/or Board of Commissioners if the disclosed Report is proven to include inaccurate legal provisions and procedures and/or if turns out that in the future there is evidence of actions that violate and/or harm the Company;
Tindak Lanjut:	Follow-up:
Direksi RUPS Nomor [illegible]	Minutes of the GMS of the [illegible]

Agenda Rapat 2:	Meeting Agenda 2:
Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2021;	Determination of the Use of Net Profit for the 2021 Financial Year;

Keputusan:	Resolution:
RUPS memberi kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2021;	The GMS granted authority to the majority Shareholders to determine the Use of Net Profit for the 2021 Financial Year;
Tindak Lanjut:	Follow-up:
1. Surat Direksi Utama PT PLN (Persero) kepada Pemegang Saham Mayoritas Perseroan Nomor: 123B/HKM.03.02/DIR/08/2022-B tanggal 8 September 2022 Perihal Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Tahun 2021, Penyerahan 2022 dan Tantiem 2021 Direct Dewan Komisaris;	1. Letter from the President Director of PT PLN (Persero) as the Company's Majority Shareholder Number: 123B/HKM.03.02/DIR/08/2022-B dated September 8, 2022 regarding the Determination of the Use of 2021 Net Profit, 2022 Remuneration and 2021 Tantiem of the Board of Commissioners;
2. Surat Nomor 2121/D00 tanggal 19 Oktober 2022 perihal Tindak Lanjut Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2021	2. Letter Number 2121/D00 dated October 19, 2022 regarding Follow-up on the Determination of the Use of the Company's Net Profit for the 2021 Financial Year

Agenda Rapat 2:
Penetapan Tantiem Tahun Buku 2021 dan Remunerasi Tahun Buku 2021 bagi Direksi dan Komisaris, serta Bonus bagi Karyawan Tahun Buku 2021.

Meeting Agenda 2:
Determination of Tantiem for the 2021 Financial Year and Remuneration for the 2021 Financial Year for the Board of Directors and Commissioners, and Bonus for Employees for the 2021 Financial Year.

Keputusan:
RUPS memberi kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Tantiem Tahun Buku 2021 dan Remunerasi Tahun Buku 2021 bagi Direksi dan Dewan Komisaris serta Bonus bagi Karyawan untuk Tahun Buku 2021.

Tindak Lanjut:
1. Surat Direktur Utama PT PLN (Persero) selaku Pemegang Saham Mayoritas Perseroan Nomor: 021/DIR/PHUT/0321000000/2022 tanggal 8 September 2022 Perihal Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun 2021, Remunerasi 2021 dan Tantiem 2021 Direksi/Dewan Komisaris.
2. Surat Direktur SDM PT PLN Nomor: 013/DSDM/03.01/0321000000/2022 tanggal 21 Juli 2022 perihal Pembayaran Penghasilan Non-Gaji Periode Bulan Juli Tahun 2022.

Resolution:
The EGMS granted authority to the majority Shareholder to determine Tantiem for the 2021 Financial Year and Remuneration for the 2021 Financial Year for the Board of Director and Board of Commissioners as well as Bonus for Employees for the 2021 Financial Year.

Follow-up:
1. Letter from the President Director of PT PLN (Persero) as the Company's majority Shareholder Number: 021/DIR/PHUT/0321000000/2022 dated September 8, 2022 Regarding the Determination of the Use of 2021 Net Profit, 2021 Remuneration and 2021 Tantiem of Directors/Board of Commissioners.
2. Letter from the Director of Human Resources at PT PLN Number: 013/DSDM/03.01/0321000000/2022 dated July 21, 2022 regarding Payment of Non-Routine Income for the Month of July 2022.

Agenda Rapat 3:
Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2022.

Meeting Agenda 3:
Determination of the Public Accountant Firm to Audit the Company's Report for the 2022 Financial Year.

Keputusan:
RUPS memberi kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Penunjuk Kantor Akuntan Publik sebagai auditor yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan untuk Tahun Buku 2022.

Tindak Lanjut:
Surat SVP Akuntansi PT PLN (Persero) Nomor: 402/DAN/02.09/0321000000/2022 Tanggal 12 Agustus 2022 Perihal Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan Tahun 2022.

Resolution:
The EGMS granted authority to the majority Shareholder to determine the Appointment of a Public Accounting Firm as the auditor that will audit the Company's Financial Statements, Performance Evaluation Report and Compliance Report for the 2022 Financial Year.

Follow-up:
Letter of SVP of Accounting of PT PLN (Persero) Number: 402/DAN/02.09/0321000000/2022 Dated August 12, 2022 Regarding the Implementation of Audit for the 2022 Financial Statements.

91,21% Tahunan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk memperlengapgunjawabkan pelaksanaan tugasnya baik secara kolegial maupun individu. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Penelaahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2021 adalah sebagai berikut:

The Annual GMS was attended by all members of the Board of Commissioners and Board of Directors to account for the implementation of their duties both collegially and individually. Members of the Board of Commissioners and Board of Directors who attended the Approval of the Annual Report for the 2021 Financial Year are as follows:

Rapat-rapat Dewan Komisaris dan Direksi dalam RUPS

Attendance of the Board of Commissioners and Board of Directors in the GMS

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
Edwing Hidayat	Darmawan Prasodjo
Komang Purnata	Yusuf Ali
Dimas Prasetyo	Rachmanto Indarto
Hendra Ayadhyadi	Iwan Supriyana
Bagus Purnomo	Evi Mulyani
	Kadarsyah Ali

Keterangan:
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang tidak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan adalah [illegible]

Notes:
Members of the Board of Commissioners and Board of Directors who were not present in the Annual General Meeting of Shareholders are [illegible]

Pemegang Saham memberikan beberapa keputusan secara sirkuler terkait hal-hal yang memerlukan persetujuan Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Keputusan Pemegang Saham secara sirkuler sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut:

The Shareholders issued several circular decisions related to matters requiring Shareholders' approval in accordance with the provisions of the Articles of Association. Circular decisions of Shareholders throughout 2022 are as follows:

Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler Tahun 2022
Circular Shareholder Decisions in 2022

No	Tanggal Date	Perihal Subject		Status Realisasi Realization Status
1	14 April 2022 April 14, 2022	Persetujuan Turut Serta dalam Program Konversi PLTD ke Pembangkit Berbasis EBT melalui Skema Revolving Partner	Approval of Participation in the EBT Conversion Program to ASE-based Power Plant through the Revolving Partner Scheme	Telah direalisasikan Has been realized
2	11 Mei 2022 May 11, 2022	Persetujuan Pembelian Tambahan Modal Disetor PT Pembangkitan Jawa Bali pada PT Metadata Listrik Dari Penggabungan PT Prima Power Yuasa Indonesia Dalam PT Metadata Daimler	Approval of the Provision of Additional Paid-up Capital of PT Pembangkitan Jawa Bali to PT Metadata Listrik by the Merger of PT Prima Power Yuasa Indonesia to PT Metadata Daimler	Telah direalisasikan Has been realized
3	8 Juli 2022 July 8, 2022	Persetujuan usulan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Arab Penyahan	Approval of the proposals of Members of Board of Directors and Members of Commissioners of Constitution	Telah direalisasikan Has been realized
4	21 September 2022 September 21, 2022	Persetujuan Re-branding dan Perubahan Logo, Struktur Organisasi dan Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan	Approval of the Re-branding and Logo Change, Organizational Structure and Appointment of Members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners	Telah direalisasikan Has been realized
5	21 Oktober 2022 October 21, 2022	Persetujuan Penetapan Penghasilan Tahun 2022 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan	Approval of the Determination of Income in 2022 to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company	Telah direalisasikan Has been realized
6	10 November 2022 November 10, 2022	Persetujuan Penugasan Revisi dari DIPA PLTD Jayapura 2x17 MW dan PLTD Sabang/Iran 2x30 MW Awam menjadi pembangkit EBT1, 2, 3 - dst/nya	Approval of the Assignment of Revision of DIPA PLTD Jayapura 2x17 MW and PLTD Sabang/Iran 2x30 MW Awam to become EBT1, 2, 3 - dst/nya	Telah direalisasikan Has been realized
7	14 Desember 2022 December 14, 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan	Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of the Company	Telah direalisasikan Has been realized
8	20 Desember 2022 December 20, 2022	Persetujuan Penugasan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Listrik Surya (PLTS) Tenggong Sukses/Barang Sakti	Approval of Assignment of Development of Solar Power Plant (SPP)	Telah direalisasikan Has been realized
9	30 Desember 2022 December 30, 2022	Tindak Lanjut Rekomendasi Holding dan Subholding PLN Mana Tahap Legal Entity	Follow-up on the Recommendation of PLN Holding and Subholding in Legal Entity Stage Period/Stage	Telah direalisasikan Has been realized

Perusahaan telah menindaklanjuti seluruh Keputusan serta arahan Pemegang Saham tahun buku 2022, baik yang ditandai melalui Keputusan RUPS, RUMS, RUPS Penetapan Laporan Tahunan maupun Keputusan Pemegang Saham secara sirkuler.

The Company has followed up on all Decisions and directions of the Shareholders for the 2022 fiscal year, both those provided through the GMS resolution or the AGOM, GMS Approval of the Annual Report and circular Shareholder Decisions.

Realisasi Keputusan Pemegang Saham Tahun 2021
Realization of Shareholder Decisions in 2021

Perusahaan telah memastikan seluruh Keputusan serta arahan Pemegang Saham tahun buku 2021, diantaranya terkait pengelolaan dan rencana pengembangan Perusahaan sepanjang tahun 2021. Keputusan tersebut ditandai tak melalui keputusan RUPS, RKAT RUPS Perseroan Laporan Tahunan meutuh Keputusan Pemegang Saham secara efektif. Tidak terdapat Keputusan/Pemegang Saham tahun lalu, 2021 yang direalisasikan pada tahun 2022.

The Company has followed-up on all decisions and directions of the Shareholders for the 2021 financial year, including those related to the management and development plans of the Company throughout 2021. The decisions were made either through the GMS resolution of the AGOM GMS, Approval of the Annual Board of Directors' Shareholder Decisions. There are no Shareholder Decisions for the 2021 financial year that were realized in 2022.

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Perusahaan memastikan bahwa pengambilan keputusan yang berdampak strategis bagi Emiten, kredibilitas dan keberlangsungan Perusahaan telah melalui mekanisme check and balances. Hal tersebut tidak terlepas dari peran Dewan Komisaris sebagai organ yang efektif, efisien, untuk menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi sehingga mampu menciptakan nilai yang berkelanjutan untuk kepentingan terbaik pemegang saham Perusahaan dan pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan. Dewan Komisaris merupakan majelis, dimana kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

The Company ensures that decision-making that has a strategic impact on the partnerships, credibility and sustainability of the Company has gone through a check and balances mechanism. This is inseparable from the role of the Board of Commissioners as an organ mandated to carry out supervisory functions and provide advice to the Board of Directors so as to be able to create sustainable value for the long-term best interests of the Company and its shareholders by taking into account the interests of stakeholders. The Board of Commissioners is an assembly, where the position of each member of the Board of Commissioners including the President Commissioner is equal. Each member of the Board of Commissioners cannot act individually, but based on the decision of the Board of Commissioners.

Susunan Dewan Komisaris
Composition of the Board of Commissioners

Dewan Komisaris beranggotakan 6 (enam) orang yang terdiri dari 2 orang Komisaris Independen dan 4 orang Komisaris. Sebagai organ pengawasan, Susunan Dewan Komisaris ditetapkan oleh Pemegang Saham melalui keputusan RUPS. Anggota Dewan Komisaris yang menjabat telah melalui proses pencalonan dan seleksi serta ditetapkan sesuai uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) oleh PT PLN (Persero) selaku Pemegang Saham. Susunan Dewan Komisaris Perusahaan periode Januari sampai dengan Desember 2021 adalah sebagai berikut:

The Board of Commissioners consists of 6 (six) people, consisting of 2 Independent Commissioners and 4 Commissioners. As a supervisory organ, the Composition of the Board of Commissioners is determined by the Shareholders through a GMS resolution. Members of the Board of Commissioners who served have gone through the screening and selection process as well as passed the fit and proper test by PT PLN (Persero) as the Shareholder. The composition of the Company's Board of Commissioners for the period January to December 2021 is as follows:

Susunan Dewan Komisaris Tahun 2022

Composition of the Board of Commissioners in 2022

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	
Darmawan Prasodjo	Komisaris Utama/ Presiden Komisaris	Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT PLN Tanggal 31 Oktober 2019.	Sirkuler RUPS Resolution on the Dismissal and Appointment of PT PLN (Persero) as Commissioners Members Dated October 31, 2019.
Yusuf Hamdani	Komisaris Utama/ Presiden Komisaris	Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT PLN Tanggal 31 September 2020.	Sirkuler RUPS Resolution on the Dismissal and Appointment of PT PLN (Persero) as Commissioners Member Dated September 30, 2020.
Edgar Panjaitan	Komisaris (Independen)/ Commissioner (Independent)	Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT PLN Tanggal 30 Desember 2021.	Sirkuler RUPS Resolution on the Appointment of PT PLN (Persero) Board of Commissioners Members Dated December 30, 2021.
Edit Erlenia Widdiana	Komisaris (Independen)/ Commissioner (Independent)	Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT PLN Tanggal 30 Desember 2021.	Sirkuler RUPS Resolution on the Appointment of PT PLN (Persero) Board of Commissioners Members Dated December 30, 2021.
Herbert H. Haratua	Komisaris/ Commissioner	Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT PLN Tanggal 11 Maret 2019 (s. Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT PLN Tanggal 13 November 2019).	Sirkuler RUPS Resolution on the Dismissal and Appointment of PT PLN (Persero) Board of Commissioners Members Dated March 11, 2019. (Sirkuler RUPS Resolution on the Dismissal and Appointment of PT PLN (Persero) Board of Commissioners Members Dated November 13, 2019).
Wahyuddin Bagenda	Komisaris/ Commissioner	Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris PT PLN Tanggal 23 April 2021.	Sirkuler RUPS Resolution on the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners of PT PLN (Persero) dated 23 April 2021.
Hendra Iswahyudi	Komisaris/ Commissioner	Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT PLN Tanggal 13 Desember 2017 (s. Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT PLN Tanggal 13 November 2019).	Sirkuler RUPS Resolution on the Dismissal and Appointment of PT PLN (Persero) Board of Commissioners Members Dated December 13, 2017. (Sirkuler RUPS Resolution of the Dismissal and Appointment of PT PLN (Persero) Board of Commissioners Members Dated November 13, 2019).
Kamaludin	Komisaris/ Commissioner	Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT PLN tanggal 14 Desember 2021.	Sirkuler RUPS Resolution on the Dismissal and Appointment of PT PLN (Persero) Board of Commissioners Members Dated December 14, 2021.

Keterangan:

1. Sejak tanggal 13 September 2022, mengundurkan diri dari jabatan Komisaris Utama/Presiden Komisaris/Wakil Komisaris Utama/Wakil Presiden Komisaris dan Anggota Komite Audit Perusahaan.
2. Sejak tanggal 14 Desember 2022, mengundurkan diri dari jabatan Komisaris/Anggota Komite Audit, yang mengakibatkan berakhirnya masa jabatan sebagai Komisaris.

Description:

1. Since September 13, 2022, resigned from the position of Commissioner/Vice President Commissioner/Vice Chairman Commissioner and Member of the Company's Audit Committee.
2. Since December 14, 2022, resigned from the position of Commissioner/Member of the Audit Committee, which ended the term of office as Commissioner.

Komposisi Komisaris Independen
Composition of Independent Commissioners

Penetapan Komisaris Independen mengacu pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 Tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2012 Tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada BUMN. Kriteria Komisaris Independen sebagaimana dijelaskan dalam Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris (Board Manual) sebagai berikut:

1. Berasal dari luar Perusahaan;
2. Tidak memiliki saham langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan;
3. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perusahaan, Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Utama Perusahaan;
4. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

Anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham dan memenuhi kriteria Komisaris Independen, namun tidak definitif dinyatakan sebagai Komisaris Independen berjumlah 3 (tiga) orang komisaris atau 50% dari 6 (enam) orang anggota Dewan Komisaris per 31 Desember 2013 yaitu Sdr. Ir.Ir. Erwaring Wardana, Sdr. Bagus Purnomo, dan Sdr. Ir.Ir. Nandy.

Determination of Independent Commissioners refers to Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Regulation of the Minister of SOEs No. PER-01/MBU/2011 Dated August 1, 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs as last amended through Regulation of the Minister of SOEs No. PER-09/MBU/2012 Dated July 6, 2012 concerning Amendments to Regulation of the Minister of SOEs No. PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs. The criteria for Independent Commissioners as described in the Work Procedures of the Board of Directors, Board of Commissioners (Board Manual), are as follows:

1. Comes from outside the Company;
2. Does not have direct or indirect shares in the Company;
3. Does not have any affiliation with the Company, Commissioners, Directors or Major Shareholders of the Company;
4. Does not have a direct or indirect business relationship related to the Company's business activities.

Members of the Board of Commissioners who are not affiliated with shareholders and meet the criteria for Independent Commissioners, but are not definitively declared as Independent Commissioners, are 3 (three) commissioners or 50% of the 6 (six) members of the Board of Commissioners as of December 31, 2013, namely Ir. Ir. Erwaring Wardana and Mr. Bagus Purnomo and Mr. Nandy.

Pernyataan Independensi dan Potensi Benturan Kepentingan
Declaration of Independence and Potential Conflict of Interests

Anggota Dewan Komisaris Perusahaan secara terikat membuat Pakta Integritas dan menyampaikan kepada Perusahaan terkait kepemilikan saham pribadi dan keluarga di Perusahaan dan perusahaan lainnya. Setiap Anggota Dewan Komisaris Perusahaan telah menandatangani Pakta Integritas sebagai bentuk pernyataan untuk bersikap independen dan bebas terhadap kepentingan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dengan memperhatikan beberapa:

1. Tidak memiliki konflik kepentingan (potensi) terhadap dalam transaksi yang memiliki konflik kepentingan dengan PT Pembangkitan Jawa-Bali dan/atau anak perusahaannya yang terkonsolidasi dan terafiliasi;
2. Tidak merangkap jabatan lainnya dalam jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang merugikan perusahaan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PJB.

Members of the Company's Board of Commissioners personally make an integrity Pact and submit to the Company related to personal and family share ownership in the Company and other companies. Each Member of the Company's Board of Commissioners has signed an Integrity Pact as a form of statement to act independently and free of conflict of interest in carrying out their functions and duties by stating that:

1. Does not have a conflict of interest (potential) in transactions that have a conflict of interest with PT Pembangkitan Jawa Bali and/or its consolidated and affiliated subsidiaries;
2. Does not hold concurrent positions in other positions that may cause conflicts of interest that are detrimental to the Company and are prohibited in the laws and regulations applicable to PJB (JV).

3. tidak memiliki hubungan kekerabatan sedarah vertikal dengan direksi lainnya, baik termasuk garis lurus maupun garis kesamping satu hubungan termenda dengan anggota Direksi lainnya maupun dengan anggota Dewan Komisaris PLN

3. Does not have a blood family relationship up to the second degree, either in a straight line or sideways line or a marital relationship with other members of the Board of Directors or members of the Board of Commissioners of PLN; and

Penandatanganan Pakta Integritas Dewan Komisaris

Signing of the Integrity Pact of the Board of Commissioners

Nama Name	Tanggal Penandatanganan Date of Signing
Darmawan Prasodjo	16 Agustus 2022 August 16, 2022
Evi Harvanti	5 November 2021 November 5, 2021
Ridwan Purwoto	15 Agustus 2022 August 15, 2022
Erlan Kaerna Wardana	15 Agustus 2022 August 15, 2022
Doddy P. Sukamto	29 Agustus 2022 August 29, 2022
Rudiantara	15 Agustus 2022 August 15, 2022
Hendra Kwanhadi	15 Agustus 2022 August 15, 2022
Vacancy*	-

Keterangan:
1. SURAT Nomor: Sesgab/ [illegible] tanggal 12 September 2022 tentang Pemberhentian dengan hormat dan Pengangkatan sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen PT PLN Nusantara Power
2. SURAT Nomor: Sesgab/ [illegible] tanggal 12 September 2022 tentang Pemberhentian dengan hormat dan Pengangkatan sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen PT PLN Nusantara Power

Remarks:
1. Decree [illegible] dated September 12, 2022, regarding Appointment and Termination with Respect to the Position of Commissioner as well as Appointment and Termination with Respect to the Position of Commissioner
2. Decree [illegible] dated September 12, 2022, regarding Termination with Respect to Serving Position as Commissioner as well as Appointment and Termination with Respect to Serving as Commissioner

Pedoman Kerja Dewan Komisaris

Board of Commissioners Manual

Dewan Komisaris telah menetapkan pedoman kerja yang merupakan pada Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pedoman kerja Dewan Komisaris ditetapkan oleh Komisaris Utama pada tanggal 31 Desember 2012 dalam bentuk Piagam Kerja Dewan Komisaris. Piagam Kerja Dewan Komisaris kemudian disempurnakan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 013.K/DK/2021/1 tanggal 31 Desember 2013 menjadi pedoman kerja yang kini dikenal dengan Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris atau Board of Commissioner Manual (BoC Manual). Hingga saat ini, BoC Manual merupakan pedoman lebih lanjut dari Board Manual yang berlaku bagi dan pelaksanaan kerja organ Dewan Komisaris. Board Manual disusun pada tahun 2010, dan terakhir kali disempurnakan serta ditetapkan melalui kesepakatan bersama antara Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 31 Desember 2014. Dewan Komisaris secara berkala melakukan review terhadap pedoman kerja Dewan Komisaris dan jika diperlukan, serta melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan Dewan Komisaris dan perkembangan Perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The Board of Commissioners determined work guidelines that refer to the Articles of Association as well as the prevailing laws and regulations. The Board of Commissioners work guidelines were determined by the President Commissioner on December 31, 2013 in the form of the Board of Commissioners Work Charter. The Board of Commissioners Work Charter was then updated based on the Board of Commissioners' Decree No. 013.K/DK/2013 dated December 31, 2013 into a work guideline which is currently known as the Board of Commissioners Work Procedure or Board of Commissioners Manual (BoC Manual). The content of the BoC Manual is a further elaboration of the Board Manual which is technical in nature from the implementation of work of the Board of Commissioners organ. The Board Manual was prepared in 2010 and was last updated and stipulated through a joint agreement between the Board of Directors and the Board of Commissioners on December 31, 2014. The Board of Commissioners periodically reviews the Board of Commissioners' manual and if deemed necessary, updates are made according to the needs of the Board of Commissioners and the development of the Company as well as applicable laws and regulations.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

Dewan Komisaris menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan diuraikan lebih jelas dalam Board Manual serta SoC Manual. Tugas pengawasan dan pemberian nasihat yang dijalankan Dewan Komisaris bertujuan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Direksi sesuai dengan tujuan Perusahaan dan prinsip Pemegang Saham. Pengambilan keputusan Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris sehingga tidak merupakan wewenang dan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan operasional kecuali hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Komisaris Perusahaan meliputi:

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan.
2. Menelaah dan menindaklanjuti serta memberitahukan Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disusunkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.
3. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan mengacu pasal Dewan Komisaris ini menandatangani RJPP dan RKAP.
4. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan.
5. Melaporkan dengan segera kepada Rapat Umum Pemegang Saham apabila terjadi angka merugikan kinerja Perusahaan.
6. Menelaah dan memberikan laporan bulanan dan laporan lainnya yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tersebut.
7. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan apabila diminta.
8. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.
9. Melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan saham/obligasi beserta keluarganya pada Perusahaan tersebut dan Perusahaan lain.
10. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang bersangkutan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
11. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

The Board of Commissioners carries out its duties and responsibilities as stipulated in the Articles of Association and described more clearly in the Board Manual and SoC Manual. The supervisory and advisory functions carried out by the Board of Commissioners aim to ensure the effectiveness of the implementation of policies and decision-making processes executed by the Board of Directors in accordance with the Company's objectives and the direction of the Shareholders. Decision-making by the Board of Commissioners is part of the Board of Commissioners' supervisory duties, so it does not negate the authority and responsibility of the Board of Directors for the implementation of management. The Board of Commissioners is not involved in decision-making related to operational activities except for other matters stipulated in the Articles of Association and applicable laws and regulations. The main duties and responsibilities of the Company's Board of Commissioners include:

1. Providing advice to the Board of Directors in carrying out the Company management.
2. Examining, reviewing and signing the Company's Long-Term Plan and the Company's Annual Budget and Operational Plan prepared by the Board of Directors, according to the provisions of these Articles of Association.
3. Providing opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding the Company's Long-Term Plan and the Company's Annual Budget and Operational Plan regarding the clauses for the Board of Commissioners to sign the LRPP and ABOP.
4. Following the development of the Company's activities, providing opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding any issues deemed important for the management of the Company.
5. Reporting immediately to the General Meeting of Shareholders if there are conditions of declining Company performance.
6. Examining and reviewing periodic reports and annual reports prepared by the Board of Directors and signing the annual report.
7. Providing explanations, opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding the Annual Report if requested.
8. Making minutes of the Board of Commissioners' meeting and keeping a copy.
9. Reporting to the Company regarding his/her and/or his/her family's shareholdings in the Company and other companies.
10. Providing a report on the supervisory duties that have been conducted during the past fiscal year to the General Meeting of Shareholders.
11. Carrying out other obligations in the context of supervisory and advisory duties as long as it does not conflict with laws and regulations, articles of association, and/or resolutions of the General Meeting of Shareholders.

Pembagian Tugas Anggota Dewan Komisaris

Duties Division of the Board of Commissioners Members

Pada prinsipnya Dewan Komisaris sebagai majelis melaksanakan fungsi pengawasan secara kolegial dan tidak dapat bertindak sendiri-sendiri kecuali Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan menyangkut fungsi pengawasan. Sebagai upaya maksimalisasi efektivitas fungsi pengawasan, Dewan Komisaris melakukan masing-masing anggota Dewan Komisaris untuk secara khusus melakukan pengawasan dan pengelolaan Perusahaan pada bidang-bidang tertentu.

In principle, the Board of Commissioners as a panel carries out the supervisory function collegially and cannot act individually representing the Board of Commissioners in making decisions regarding the supervisory function. In an effort to encourage the effectiveness of the supervisory function, the Board of Commissioners determines each member of the Board of Commissioners to specifically supervise the management of the Company in certain matters.

Pembagian Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

Division of Supervisory Duties of the Board of Commissioners

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Tugas Pengawasan *Supervisory Duties*	
Darmawan Junaidi	Komisaris Utama *President Commissioner*	1. Koordinator atas semua tugas dan kewajiban Dewan Komisaris *Coordinator of all duties and obligations of the Board of Commissioners*	1. Coordinator of all duties and obligations of the Board of Commissioners *Coordinator of all duties and obligations of the Board of Commissioners*
Rio Haryadi	Komisaris Utama *President Commissioner*	1. Koordinator atas semua tugas dan kewajiban Dewan Komisaris *Coordinator of all duties and obligations of the Board of Commissioners*	1. Coordinator of all duties and obligations of the Board of Commissioners *Coordinator of all duties and obligations of the Board of Commissioners*
Jaenal S. Hidayat	Komisaris *Commissioner*	1. Pengawasan dalam bidang Manajemen Risiko dan Kepatuhan *Supervision in the Risk Management and Compliance duties* 2. Pengawasan dalam bidang investasi dan pengembangan usaha *Supervision in the investment and business development duties*	1. Supervision in the Risk Management and Compliance duties *Supervision in the Risk Management and Compliance duties* 2. Supervision in the investment and business development duties *Supervision in the investment and business development duties*
Handri Hushendi	Komisaris *Commissioner*	1. Pengawasan dalam bidang SDM dan Organisasi *Supervision in the HR and Organization duties* 2. Pengawasan dalam bidang K3L *Supervision in safety, health and K3L*	1. Supervision in the HR and Organization duties *Supervision in the HR and Organization duties* 2. Supervision in safety, health and K3L *Supervision in safety, health and K3L*
Kiswoyo Pandoyo	Komisaris *Commissioner*	1. Pengawasan dalam bidang Manajemen Risiko dan Kepatuhan *Supervision in the Risk Management and Compliance duties* 2. Pengawasan dalam bidang Keselamatan, Kesehatan Kerja (K3) *Supervision in the Occupational Health and Safety (OHS) duties* 3. Pengawasan dalam bidang Keandalan dan Keselamatan Pembangkit *Supervision in the Power Plant Equipment Health and Safety duties*	1. Supervision in the Risk Management and Compliance duties *Supervision in the Risk Management and Compliance duties* 2. Supervision in the Occupational Health and Safety (OHS) duties *Supervision in the Occupational Health and Safety (OHS) duties* 3. Supervision in the Power Plant Equipment Health and Safety duties *Supervision in the Power Plant Equipment Health and Safety duties*
Bagus Pradekto	Komisaris Independen/ *Commissioner Independent*	1. Pengawasan dalam bidang Operasi dan Pemeliharaan *Supervision in the Operation and Maintenance duties* 2. Pengawasan dalam bidang Keuangan, Keselamatan Kerja (K3) *Supervision in the Occupational Health and Safety (OHS) duties* 3. Pengawasan dalam bidang SDM dan Organisasi *Supervision in the Human Resources and Organization duties*	1. Supervision in the Operation and Maintenance duties *Supervision in the Operation and Maintenance duties* 2. Supervision in the Occupational Health and Safety (OHS) duties *Supervision in the Occupational Health and Safety (OHS) duties* 3. Supervision in the Human Resources and Organization duties *Supervision in the Human Resources and Organization duties*
Dwi Hirianto Soedarto	Komisaris Independen/ *Commissioner Independent*	1. Pengawasan dalam bidang investasi dan pengembangan usaha *Supervision in the investment and business development duties* 2. Pengawasan dalam bidang Teknologi Informasi *Supervision in the Information Technology duties* 3. Pengawasan dalam bidang Stakeholder Management *Supervision in the Stakeholder Management duties*	1. Supervision in the investment and business development duties *Supervision in the investment and business development duties* 2. Supervision in the Information Technology duties *Supervision in the Information Technology duties* 3. Supervision in the Stakeholder Management duties *Supervision in the Stakeholder Management duties*
Wanedi	Komisaris *Commissioner*	1. Pengawasan dalam bidang Manajemen Risiko dan Kepatuhan *Supervision in the Risk Management and Compliance duties* 2. Pengawasan dalam bidang Keselamatan, Kesehatan Kerja (K3) *Supervision in the Occupational Health and Safety (OHS) duties* 3. Pengawasan dalam bidang Keandalan dan Keselamatan Pembangkit *Supervision in the Power Plant Equipment Health and Safety duties*	1. Supervision in the Risk Management and Compliance duties *Supervision in the Risk Management and Compliance duties* 2. Supervision in the Occupational Health and Safety (OHS) duties *Supervision in the Occupational Health and Safety (OHS) duties* 3. Supervision in the Power Plant Equipment Health and Safety duties *Supervision in the Power Plant Equipment Health and Safety duties*

Keterangan:

1. SURAT Keluar tanggal 13 September 2021 mengundurkan diri dari jabatan Direktur Utama PLN dan mengangkat Darmawan Junaidi sebagai Direktur Utama PLN
2. SURAT Keluar tanggal 14 Desember 2021 mengundurkan diri dari jabatan Komisaris PLN dan mengangkat Rio Haryadi sebagai Komisaris PLN

Description:

1. Letter dated September 13, 2021 resigned from the Director of PLN and appointed Darmawan Junaidi as the President Director of PLN
2. Letter dated December 14, 2021 resigned from the Commissioner of PLN and appointed Rio Haryadi as the Commissioner of PLN

Dewan Komisaris menempatkan anggota Dewan Komisaris sebagai ketua dan wakil ketua pada komite di bawah organ Dewan Komisaris yang telah dibentuk dengan mempertimbangkan pengalaman, kompetensi dan keahlian sesuai dengan fungsi masing-masing komite tersebut. Susunan anggota Dewan Komisaris yang ditugaskan pada komite di bawah organ Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

The Board of Commissioners assigns the Board of Commissioners members as chairman and vice chairman to the committees under the Board of Commissioners organ that have been established by considering experience, competence and expertise in accordance with the functions of each committee. The composition of members of the Board of Commissioners assigned to committees under the Board of Commissioners organ is as follows:

Susunan Anggota Dewan Komisaris pada Komite Dewan Komisaris

Composition of the Board of Commissioners Members on the Board of Commissioners Committees

Komite Committee	Ketua Chairman
Komite Audit Audit Committee	Handra Deddy Hasan
Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan Risk Management and Compliance Committee	Komang Pandia
Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee	Jimmy M. Hutabarat

Sehubungan dengan adanya perubahan komposisi Dewan Komisaris maka, Susunan anggota Dewan Komisaris yang ditugaskan pada komite di bawah organ Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

In connection with the changes in the composition of the Board of Commissioners, the composition of the Board of Commissioners members assigned to committees under the Board of Commissioners organ is as follows:

Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris pada Komite Dewan Komisaris

Changes in the Composition of the Board of Commissioners Members on the Board of Commissioners Committees

Komite Committee	Ketua Chairman	Wakil Ketua Vice Chairman
Komite Audit Audit Committee	Handra Deddy Hasan	-
Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan Risk Management and Compliance Committee	Jimmy M. Hutabarat	Edin Grazia Mangasi
Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee	Komang Pandia	Wagus Purwadhi

Pelaksanaan Fungsi Dewan Komisaris

Implementation of the Board of Commissioners Functions

Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat atas kegiatan pengelolaan Perusahaan, mencakup aspek operasional dan keuangan serta aspek lainnya yang terkait dengan kelangsungan bisnis Perusahaan. Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris sepanjang tahun 2023 secara garis besar meliputi:

1. Aspek Korporat
   a. Berperan sesuai fungsinya pada penyiapan dan penandatanganan RUPS tahunan (dan RUPS Penetapan RKAP dan RUPS Pertanggungjawaban Tahunan (LKT);
   b. Memberikan laporan pelaksanaan pengawasan tahun 2022 yang disampaikan kepada Pemegang Saham;
   c. Ikutan dalam penyusunan RJPP dan RKAP 2023;
   d. Memberikan pelaksanaan GCG dan WBK serta kebutuhan lainnya;
   e. Penandatanganan dalam penyusunan Tata Kelola Bisnis, Etika Korporat, Kode Etikm, Code&Ryan, Agenda Korporat dan lain-lain;
   f. Pembaharuan Pedoman Manajemen Risiko sesuai dengan KEP. 01.00/0.2018;
   g. Pembaharuan Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual).

2. Bisnis dan Operasi – Pemeliharaan
   a. Produksi/penjualan KWH dan penyelesaian Biaya Pokok Produksi;
   b. Analisa market share Perusahaan di Sistem Kelistrikan Jawa Bali;
   c. Energy mix dan security of supply energi primer;
   d. Program dan realisasi pemeliharaan unit pembangkit;
   e. Bisnis O&M lain yang dilaksanakan oleh Perusahaan maupun Anak Perusahaan;
   f. Bisnis lain di luar O&M belum/sedang/akan dilaksanakan beserta kompetensi unggul yang dimiliki;
   g. Aspek K3L atas seluruh unit pembangkit untuk mencegah Zero Accident dan bebas PROPER.

3. Pengembangan Usaha dan Pengelolaan Anak Perusahaan
   a. Arahan dalam mendistribusikan penugasan yang diterima dari Pemegang Saham, termasuk dalam penyiapan SDM dan contoh-nya lainnya;
   b. Evaluasi dan rekomendasi atas pelaksanaan program kemitraan BPP termasuk pemilihan partner/mitra bisnis.

The Board of Commissioners has carried out its duties and responsibilities to supervise and provide advice on the Company's management activities including operational and financial aspects as well as other aspects related to the Company's business continuity. The implementation of the Board of Commissioners' functions throughout 2023 broadly includes:

1. Corporate Aspect
   a. Playing a role in accordance with its function in the preparation and organization of the annual GMS, namely the GMS for the RKAP Approval and the Annual Accountability GMS (LKT);
   b. Providing a report on the implementation of supervision in 2022 which was reported to the Shareholders;
   c. Involved in the preparation of the 2023 RJPP and RKAP;
   d. Monitoring the implementation of GCG and WBK as well as the needs for revision;
   e. Advising in the preparation of Commercial Governance, Corporate Risk, Business Risk, Compliance, Corporate Agenda and others;
   f. Updating the Risk Management Guidelines in accordance with KEP. 01.00/0.2018;
   g. Updating of the Board of Commissioners and Board of Directors Work Procedures (Board Manual).

2. Commerce and Operation – Maintenance
   a. Production/sale of KWH and control of Cost of Production;
   b. Analysis of the Company's market share in the Java Bali Electricity System;
   c. Energy mix and security of primary energy supply;
   d. Program and realization of power plant unit maintenance;
   e. O&M business other implemented by the Company and its subsidiaries;
   f. Other businesses outside of electricity O&M with superior competencies;
   g. OHSE aspects of all power plant units to maintain Zero Accident and PROPER level.

3. Business Development and Subsidiary Development
   a. Direction in following up on assignments received from Shareholders, including in the preparation of human resources and other examples;
   b. Evaluation and recommendations on the implementation of the IPP partnership program including the selection of partners/business partners.

c. Evaluasi atas pembentukan Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi dan wakil-wakil lainnya.
d. Pengawasan dan pemeriksaan atas kewajiban seluruh tenant penyewa.
e. Mendorong dan mendampingi Direksi dan Management dalam pengembangan usaha di bidang energi baru terbarukan.

4. SDM dan Organisasi
a. Pemilihan Direksi & Komisaris pada Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi.
b. Penyusunan organisasi dan pembagian tugas.
c. Evaluasi dan analisa atas Efektivitas Organisasi.
d. Review atas proses bisnis seluruh fungsi dengan mengacu pada standar APQC (American Productivity Quality Center) dan kesesuaiannya dengan teknologi informasi melalui penyusunan Enterprise Architecture.
e. Review atas kebijakan seperti K3, Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Lingkungan.
f. Review Talent Mobility untuk memastikan adaptasi lebih cepat terhadap perubahan menyelaraskan dengan cara mendapatkan dan memindahkan kompetensi utama Talent antar proyek atau lintas bisnis saat diperlukan.

5. Audit
a. Review rencana kerja SPI serta pelaksanaannya, termasuk evaluasi temuan-temuan penting.
b. Memantau pelaksanaan Risk Based Audit dan memberikan arahan dalam pelaksanaan Three Line of Defenses.
c. Memantau kebijakan dan pelaksanaan COSO Internal Control (Dua Triwulan Report).
d. Evaluasi hasil audit eksternal (KAP dan auditor eksternal lainnya).
e. Monitoring hotline serta pelaporannya dan analisa WBTS.
f. Monitoring pelaksanaan Whistle Blowing System (WBS) serta revisi terhadap pedomannya.
g. Memberikan masukan mengenai penghimpun Piagam Audit Intern SPI Perusahaan.

c. Evaluation of the establishment of Subsidiaries and Affiliated Companies and their vice-deputies.
d. Monitoring and advising on the progress of all assignment tenants.
e. Encouraging and assisting the Board of Directors and Management in business development in the new and renewable energy sector.

4. HR and Organization
a. Election of the Board of Directors & Commissioners of Subsidiaries and Affiliated Companies.
b. Preparation of organization and division of duties.
c. Evaluation and analysis of Organizational Effectiveness.
d. Review of business processes of all functions by referring to APQC (American Productivity Quality Center) standards and their alignment with information technology through the preparation of Enterprise Architecture.
e. Review of the OHSE (Occupational Health and Safety and Environment) aspect policy.
f. Review of Talent Mobility to ensure faster adaptation to transformation changes by assessing and moving Talent's key competencies across projects or across businesses when needed.

5. Audit
a. Reviewing the WU work plan and its implementation, including evaluation of important findings.
b. Monitoring the implementation of Risk Based Audit and providing direction in the implementation of Three Line of Defenses.
c. Monitoring the policy and implementation of COSO (Internal Control Over Financial Report).
d. Evaluation of external audit results (KAP and other external auditors).
e. Monitoring the follow-up of GWC resolutions and directions.
f. Monitoring the implementation of the Whistle Blowing System (WBS) and revision of its guidelines.
g. Providing input regarding the updating of the Internal Audit Charter of the Company's WU.

Kunjungan Kerja Dewan Komisaris

Work Visit by the Board of Commissioners

Dewan Komisaris secara rutin melakukan kunjungan ke Unit Pembangkit maupun Anak Perusahaan guna mendapat informasi secara langsung mengenai operasional Unit/Anak Perusahaan tersebut. Sepanjang tahun 2021, Dewan Komisaris telah melakukan kunjungan sebagai berikut:

The Board of Commissioners regularly conducts work visits to the Power Plant Units and Subsidiaries to obtain direct information regarding the Unit's/Subsidiary's operations. Throughout 2021, the Board of Commissioners has made the following visits:

Kunjungan Kerja Dewan Komisaris

Work Visits of the Board of Commissioners

No.	Lokasi Location	Waktu Time
1	PLTU Indramayu (Indramayu 2)	19 Januari 2021 January 19, 2021
2	PLTG Cirata (Cirata GPP)	11 Februari 2021 February 11, 2021
3	Kantor Pusat PT PLN Nusantara Power, Surabaya PT PLN Nusantara Power Head Office, Surabaya	11 Maret 2021 March 11, 2021
4	PLTU Paiton dan Jajar (Paiton and Jajar 2)	24 Maret 2021 March 24, 2021
5	PLTU Rembang (Rembang 2)	7 April 2021 April 7, 2021
6	Kantor Pusat PT PLN Nusantara Power, Surabaya PT PLN Nusantara Power Head Office, Surabaya	16 April 2021 April 16, 2021
7	PLTG Cirata (Cirata GPP)	13 Mei 2021 May 13, 2021
8	PLTU Indramayu (Indramayu 2)	13 Mei 2021 May 13, 2021
9	PLTU Cilacap (Cilacap 2)	20 Mei 2021 May 20, 2021
10	Bandung	8 Juni 2021 June 8, 2021
11	PLTG Cirata (Cirata GPP)	15 Juni 2021 June 15, 2021
12	Bandung	16 Juni 2021 June 16, 2021
13	Bandung	18 Juni 2021 June 18, 2021
14	PLTGU Grati (Grati CCGP)	28 Juni 2021 June 28, 2021
15	Kantor Pusat PT PLN Nusantara Power, Surabaya PT PLN Nusantara Power Headquarter, Surabaya	30 Juni 2021 June 30, 2021
16	Bandung	17 Juli 2021 July 17, 2021
17	Bandung	31 Juli 2021 July 31, 2021
18	PLTA Bakaru (Bakaru Hydro)	30 Agustus 2021 August 30, 2021
19	Kantor Pusat PT PLN Nusantara Power, Surabaya PT PLN Nusantara Power Headquarter, Surabaya	1 Oktober 2021 October 1, 2021
20	PLTGU Muara Tawar (Muara Tawar CCGP)	18 November 2021 November 18, 2021
21	PLTG Cirata (Cirata GPP)	1 Desember 2021 December 1, 2021

Persetujuan dan Rekomendasi Dewan Komisaris

Approval and Recommendation by the Board of Commissioners

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Dewan Komisaris memiliki wewenang memberikan persetujuan dan rekomendasi kepada Direksi terkait kegiatan pengelolaan Perusahaan dalam rangka fungsi pengawasan. Persetujuan dan rekomendasi diberikan baik melalui keputusan rapat Dewan Komisaris dan Direksi yang terlibat dalam Rapat Anggota dengan surat keputusan Dewan Komisaris. Persetujuan dan rekomendasi yang diberikan Dewan Komisaris sepanjang tahun 2022 meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Rekomendasi Dalam atas Usul (RI) pada AV (RIS)-PLN(C), Surat Dewan Komisaris nomor: DK0102/0/0 tanggal 17 Januari 2022
2. Tanggapan Dalam pada RUPS (RUP) Tahun 2021, Surat Dewan Komisaris nomor DK-R/0/0/0 tanggal 25 Januari 2022
3. Tanggapan Tertulis Dalam atas Penyampaian Usulan (RUP) Tahun 2021, Surat Dewan Komisaris nomor: DK0/0/0/0 tanggal 25 Januari 2022
4. Tanggapan Tertulis Dalam atas Penyampaian Usulan Penempatan Wakil (R) pada AV (RIS)(R), Surat Dewan Komisaris nomor:DK0/0/0/0 tanggal 27 Januari 2022
5. Rekomendasi / Persetujuan (R) ATTA dengan (R)a dalam 5 tahun, Surat Dewan Komisaris nomor: DK0/0/0/2 tanggal 14 (dua) 2022
6. Rekomendasi / Persetujuan (R) ATTO dengan (R)ak rampai dengan 5 Tahun (Kurang dari 5 Tahun), Surat Dewan Komisaris nomor DK0/0/0/2 tanggal 04 Februari 2022
7. Pertimbangan Persetujuan atas Usulan Remunerasi Direksi dan Dalam Tahun 2022, Tantiem Direksi dan Dalam serta Bonus Karyawan 2021, Surat Dewan Komisaris nomor DK0/0/0/0 tanggal 10 Mei 2022.
8. Tanggapan Dalam pada RUPS (LP) Tahun Buku 2021, Surat Dewan Komisaris nomor DK0/0/0/0 tanggal Juni 0/0/2.
9. Tanggapan Dalam atas Rencana Penghapusbukuan Lahan PT (R)i Dalam Rangka Pembangunan Fasilitas Khusus (FLS) Nusapang Cinda, Surat Dewan Komisaris nomor: DK0/0/0/0 tanggal 10 Juni 2022
10. Pertimbangan Dalam atas Penempatan Usulan Penempatan Wakil PT (R)i pada Anak Perusahaan (P) (R)i, Surat Dewan Komisaris nomor:0/0/0/0/0/0 tanggal 27 Juni 2022
11. Rekomendasi Dalam atas Penyampaian Usulan Penempatan Wakil PT (R)i pada Perusahaan Afiliasi P) (R)i, Surat Dewan Komisaris nomor:0/0/0/0/0/0 tanggal 02 Agustus 2022.

According to the provisions in the Articles of Association, the Board of Commissioners has the authority to provide approval and recommendations to the Board of Directors related to the Company's management activities in the scope of the supervisory function. Approval and recommendations are provided either through the decision of the Board of Commissioners and Board of Directors' Meeting as stated in the Minutes of the Meeting or by a decree of the Board of Commissioners. The approvals and recommendations provided by the Board of Commissioners throughout 2022 include the following matters:

1. The Board of Commissioners' recommendation of (R)i Representative in AV (R)i(C)-PLN(C), Letter of the Board of Commissioners number:0/0/0/0/0/0 dated January 17, 2022
2. The Board of Commissioners' Response to the GMS of the 2021 AGM(R) Letter of the Board of Commissioners number:DK-R/0/0/0/0 dated January 25, 2022
3. The Board of Commissioners' Written Response to the Submission of the 2021 AGM(R) Proposal, Letter of the Board of Commissioners number:0/0/0/0/0/0 dated January 25, 2022
4. The Board of Commissioners' Written Response to the Submission of the Proposal for Placement of (R)i Representative in AV (R)i(R), Letter of the Board of Commissioners number:DK0/0/0/0/0/0 dated January 27, 2022
5. Recommendation/Approval of (R)i (C)(T)i with Value above 5 years, Letter of the Board of Commissioners number:DK0/0/0/0/2 dated February 14, 2022
6. Recommendation/Approval of (R)i (C)(T)i with Value up to 5 Years (Less than 5 Years), Letter of the Board of Commissioners number:DK0/0/0/0/2 dated February 04, 2022
7. Request for Approval of the Proposed Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners in 2021, Tantiem of the Board of Directors and Board of Commissioners as well as Employee Bonus in 2021, Letter of the Board of Commissioners number:DK0/0/0/0/0/0 dated May 10, 2022.
8. The Board of Commissioners' Response to the GMS of (LP) for the 2021 Financial Year, Letter of the Board of Commissioners number:DK0/0/0/0/0/0 dated June 0/0/2.
9. The Board of Commissioners' response to PT (R)i's Land Write-off Plan in the Context of Cinda Floating SPV Goods Facilities Development, Letter of the Board of Commissioners number:DK0/0/0/0/0/0 dated June 10, 2022
10. The Board of Commissioners' Approval on the Submission of Proposal for Placement of (R)i (R)i Representatives in (R)i (R)i Subsidiary, Letter of the Board of Commissioners number:DK0/0/0/0/0/0 dated June 27, 2022
11. The Board of Commissioners' Recommendation on the Submission of Proposed Placement of (R)i (R)i Representative in (R)i (R)i Affiliated Company, Letter of the Board of Commissioners number:DK0/0/0/0/0/0 dated August 02, 2022

12. Rekomendasi Dalam atas Persampaian Usulan Penetapan Wakil PT INE pada RP PT INE (PT INE) Surat Direksi Komisaris nomor 0800/2022/00 tanggal 30 Agustus 2022.

13. Tanggapan Dalam Terhadap Pertanyaan Persetujuan / Rekomendasi Usulan Pelampauan Anggaran Investasi Pengembangan Usaha INDIP ONE PRO 2022, Surat Direksi Komisaris nomor 0800/2565 tanggal 27 Oktober 2022.

14. Tanggapan Tertulis Dalam atas Penyampaian Usulan RKAP Tahun 2023, Surat Direksi Komisaris nomor 0800/2625 tanggal 28 Oktober 2022.

15. Tanggapan Tertulis Usulan PT PNI atas Tindak Lanjut Pembentukan Holding & Subholding PT PLN (Persero) tahap Legal End State, Surat Direksi Komisaris nomor 0800/2844 tanggal 12 Desember 2022.

16. Tanggapan Tertulis atas Perubahan Kegiatan Usaha pada Pasal 3 ayat 2 AD PT PNI Terkait Penggunaan Perantara Dalam Rangka Holding & Subholding, Surat Direksi Komisaris nomor 0800/2833 tanggal 23 Desember 2022.

11. The Board of Commissioners' Recommendation on the Submission of Proposed Placement of PT PNI Representatives as AP (PT PNI (PT NR), Letter of the Board of Commissioners number 0800/2439 dated August 30, 2022.

12. The Board of Commissioners' Response to Request for Approval/Recommendation on Proposed Overexpenditure of PNI's 2022 AIEP "Business Development Investment Budget", Letter of the Board of Commissioners number 0800/2565 dated October 27, 2022.

13. The Board of Commissioners' Written Response to the Submission of the 2023 AIEP Proposal, Letter of the Board of Commissioners number 0800/2625 dated October 28, 2022.

14. The Board of Commissioners' Written Response of PT PNI's Initiative on on the Establishment of Holding & Subholding of PT PLN (Persero) w/ Legal End State Stage, Letter of the Board of Commissioners number 0800/2844 dated December 12, 2022.

15. Written Response to Changes in Business Activities Article 3 paragraph 2 of PT PNI AD Related to Licensing Administration in the Context of Holding & Subholding, Letter of the Board of Commissioners number 0800/2833 dated December 23, 2022.

Rapat Dewan Komisaris

Board of Commissioners Meetings

Sebagaimana diatur dalam GoC manual dan Board Manual, Rapat Dewan Komisaris baik Rapat internal maupun Rapat Pengawasan masing-masing diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan. Selain itu, anggota Dewan Komisaris juga dapat mengadakan Rapat Komisaris yang dihadiri oleh Direksi. Rapat konsultasi merupakan Rapat Direksi yang dihadiri oleh Dewan Komisaris untuk membahas berbagai aspek operasional dan pengelolaan keuangan Perusahaan.

Rencana rapat Dewan Komisaris disusun sebelum tahun berjalan baik rapat internal Dewan Komisaris maupun Rapat Pengawasan masing-masing minimal 1 kali setiap bulan. Agenda rapat Internal Dewan Komisaris secara umum meliputi hindar tetap rapat sebelumnya dan tugas Dewan Komisaris, laporan manajemen dan kinerja, dan rapatan hindar Dewan Komisaris. Sementara agenda rapat pengawasan secara umum meliputi laporan manajemen dan kinerja, tindak lanjut rapat sebelumnya serta progres proyek dan penugasan. Materi yang akan dibahas dalam rapat pengawasan biasanya terlebih dahulu dibaji dalam Rapat Internal Dewan Komisaris (RD) maupun Rapat Komite berdasarkan laporan-laporan yang disiapkan oleh Manajemen.

Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat internal sebanyak 13 kali dengan agenda secara umum serta rapat pengawasan sebanyak 12 kali sepanjang tahun 2022, dengan agenda dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris sebagai berikut:

As stipulated in the GoC manual and Board Manual, Board of Commissioners' Meetings, both Internal Meetings and Supervisory Meetings, are held at least 1 (one) time a month. In addition, members of the Board of Commissioners may also attend Consultation Meetings held by the Board of Directors. Consultation Meeting is a meeting of the Board of Directors attended by the Board of Commissioners to discuss various aspects of the Company's operational and financial management.

The Board of Commissioners' meeting plan is prepared prior to the current year, both Internal meetings of the Board of Commissioners and Supervisory Meetings, each at least once a month. The agenda for internal meetings of the Board of Commissioners generally includes follow-up to previous meetings and duties of the Board of Commissioners, management and performance reports, and Board of Commissioners' Committee reports. While the supervisory meeting agenda generally includes management and performance reports, follow-up to previous meetings as well as project and assignment progress. The material that will be discussed in the supervisory/consultation meeting is first reviewed in the Internal Meeting of the Board of Commissioners (RD) and Committee Meetings based on reports made by Management.

The Board of Commissioners has held 13 internal meetings with a general agenda and 12 supervisory meetings throughout 2022, with the agenda and attendance rate of the Board of Commissioners as follows:

Rapat Internal Dewan Komisaris Tahun 2022
Internal Meeting of the Board of Commissioners in 2022

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda
1.	28 Januari 2022 January 28, 2022	1. Arahan Dewan Komisaris 2. Evaluasi Kegiatan Bulan Januari 2022 oleh Sekretaris 3. Laporan Kegiatan Komite Audit 4. Laporan Kegiatan Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan 5. Laporan Kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi 1. Direction from the Board of Commissioners 2. Evaluation of Activities in January 2022 by the Secretary of the Board of Commissioners 3. Activity Report by the Audit Committee 4. Activity Report by the Risk Management and Compliance Committee 5. Activity Report by the Nomination and Remuneration Committee
2.	23 Februari 2022 February 23, 2022	1. Arahan Dewan Komisaris 2. Evaluasi Kegiatan Bulan Februari 2022 oleh Sekretaris 3. Laporan Kegiatan Komite Audit 4. Laporan Kegiatan Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan 5. Laporan Kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi 1. Direction from the Board of Commissioners 2. Evaluation of Activities in February 2022 by the Secretary of the Board of Commissioners 3. Activity Report by the Audit Committee 4. Activity Report by the Risk Management and Compliance Committee 5. Activity Report by the Nomination and Remuneration Committee
3.	22 Maret 2022 March 22, 2022	1. Arahan Dewan Komisaris 2. Evaluasi Kegiatan Bulan Maret 2022 oleh Sekretaris 3. Laporan Kegiatan Komite Audit 4. Laporan Kegiatan Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan 5. Laporan Kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi 1. Direction from the Board of Commissioners 2. Evaluation of Activities in March 2022 by the Secretary of the Board of Commissioners 3. Activity Report by the Audit Committee 4. Activity Report by the Risk Management and Compliance Committee 5. Activity Report by the Nomination and Remuneration Committee
4.	26 April 2022 April 26, 2022	1. Arahan Dewan Komisaris 2. Evaluasi Kegiatan Bulan Maret – April 2022 oleh Sekretaris 3. Laporan Kegiatan Komite Audit 4. Laporan Kegiatan Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan 5. Laporan Kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi 1. Direction from the Board of Commissioners 2. Evaluation of Activities in March–April 2022 by the Secretary of the Board of Commissioners 3. Activity Report by the Audit Committee 4. Activity Report by the Risk Management and Compliance Committee 5. Activity Report by the Nomination and Remuneration Committee
5.	24 Mei 2022 May 24, 2022	1. Arahan Dewan Komisaris 2. Evaluasi Kegiatan Bulan April – Mei 2022 oleh Sekretaris 3. Laporan Kegiatan Komite Audit 4. Laporan Kegiatan Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan 5. Laporan Kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi 1. Direction from the Board of Commissioners 2. Evaluation of Activities in April–May 2022 by the Secretary of the Board of Commissioners 3. Activity Report by the Audit Committee 4. Activity Report by the Risk Management and Compliance Committee 5. Activity Report by the Nomination and Remuneration Committee
6.	21 Juni 2022 June 21, 2022	1. Arahan Dewan Komisaris 2. Evaluasi Kegiatan Bulan Mei – Juni 2022 oleh Sekretaris 3. Laporan Kegiatan Komite Audit 4. Laporan Kegiatan Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan 5. Laporan Kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi 1. Direction from the Board of Commissioners 2. Evaluation of Activities in May–June 2022 by the Secretary of the Board of Commissioners 3. Activity Report by the Audit Committee 4. Activity Report by the Risk Management and Compliance Committee 5. Activity Report by the Nomination and Remuneration Committee

No.	Tanggal Date	Agenda	
7.	22 Juli 2022 July 22, 2022	1. Undian Dewan Komisaris 2. Evaluasi Kegiatan Juni 2022 – Juli 2022 dan Sebaliknya 3. Laporan Kegiatan Komite Audit 4. Laporan Kegiatan Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan 5. Laporan Kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi 6. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Semester I Tahun 2022.	1. Election from the Board of Commissioners 2. Evaluation of Activities in June-July 2022 by the Secretary of the Board of Commissioners 3. Activity Report by the Audit Committee 4. Activity Report by the Risk Management and Compliance Committee 5. Activity Report by the Nomination and Remuneration Committee 6. Supervisory Report of the Board of Commissioners for the First Semester of 2022
8.	19 Agustus 2022 August 19, 2022	1. Undian Dewan Komisaris 2. Evaluasi Kegiatan Juni 22 – Agustus 2022 dan Sebaliknya 3. Laporan Kegiatan Komite Audit 4. Laporan Kegiatan Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan 5. Laporan Kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi	1. Election from the Board of Commissioners 2. Evaluation of Activities in July-August 2022 by the Secretary of the Board of Commissioners 3. Activity Report by the Audit Committee 4. Activity Report by the Risk Management and Compliance Committee 5. Activity Report by the Nomination and Remuneration Committee
9.	5 Oktober 2022 October 5, 2022	1. Undian Dewan Komisaris 2. Rapat Joint Pengawasan Sekretariat Dewan Komisaris dan Ladies Comp.	1. Election from the Board of Commissioners 2. Presentation related to the Management of the Board of Commissioners Secretariat and Ladies Comp.
10.	20 Oktober 2022 October 20, 2022	1. Undian Dewan Komisaris 2. Presentasi Sekretaris 3. Presentasi Komite Audit 4. Presentasi Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan 5. Presentasi Komite Nominasi dan Remunerasi	1. Election from the Board of Commissioners 2. Presentation by the Secretary of the Board of Commissioners 3. Presentation by the Audit Committee 4. Presentation by the Risk Management and Compliance Committee 5. Presentation by the Nomination and Remuneration Committee
11.	30 November 2022 November 30, 2022	1. Undian Dewan Komisaris 2. Presentasi Sekretaris 3. Laporan Kegiatan Komite Audit 4. Laporan Kegiatan Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan 5. Laporan Kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi	1. Election from the Board of Commissioners 2. Presentation by the Secretary of the Board of Commissioners 3. Activity Report by the Audit Committee 4. Activity Report by the Risk Management and Compliance Committee 5. Activity Report by the Nomination and Remuneration Committee
12.	12 Desember 2022 December 12, 2022	1. Penggajian dan Bonana Ala Komponen Leading Sustainability	1. Response to the Sustainability Investing Corporate Action Plan
13.	19 Desember 2022 December 20, 2022	1. Evaluasi Kegiatan Bulan Desember 2022 dan Sebaliknya 2. Laporan Kegiatan Komite Audit 3. Laporan Kegiatan Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan 4. Laporan Kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi	1. Evaluation of Activities in December 2022 by the Secretary of the Board of Commissioners 2. Activity Report by the Audit Committee 3. Activity Report by the Risk Management and Compliance Committee 4. Activity Report by the Nomination and Remuneration Committee

Rapat Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2022

Supervisory Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors in 2022

No.	Tanggal Tanggal	Agenda Agenda	
1	27 Januari 2022 January 27, 2022	1. Pengantar Dewan Komisaris 2. Revisi RJPD RKAP PT PIE 3. Laporan Kinerja Tahun 2021 Unaudited 4. Progres Proyek Pengembangan Usaha 5. Simulasi RJPD RKAP 2022	1. Introduction to the Board of Commissioners 2. GHG Plan of PT PIE RJPD 3. Unaudited 2021 Performance Report 4. Progress of Business Development Project 5. Simulation of the GHG in the 2022 RKAP
2	24 Februari 2022 February 24, 2022	1. Pengantar Dewan Komisaris 2. Pelaporan K3 3. Laporan Kinerja Bulan Januari 2022 4. Laporan Progres Pengembangan Proyek	1. Introduction to the Board of Commissioners 2. OHS Reporting 3. Performance Report for January 2022 4. Project Development Progress Report
3	22 Maret 2022 March 22, 2022	1. Pengantar Dewan Komisaris 2. Pelaporan K3 3. Laporan Kinerja Bulan Februari 2022 4. Laporan hasil Audit BAP	1. Introduction to the Board of Commissioners 2. OHS Reporting 3. Performance Report for February 2022 4. Report on the results of the BAP Audit
4	27 April 2022 April 27, 2022	1. Pengantar Dewan Komisaris 2. Pelaporan K3 3. Laporan Kinerja Bulan Maret 2022 4. Pemaparan RJPD LJT	1. Introduction to the Board of Commissioners 2. OHS Reporting 3. Performance Report for March 2022 4. Presentation of the LJT OHS
5	18 Mei 2022 May 18, 2022	1. Pengantar Dewan Komisaris 2. Pelaporan K3 3. Laporan Kinerja Bulan April 2022 4. Update Progress Proyek 5. Pemaparan RJPD LJT	1. Introduction to the Board of Commissioners 2. OHS Reporting 3. Performance Report for April 2022 4. Update of Project Progress 5. Presentation of the LJT OHS
6	22 Juni 2022 June 22, 2022	1. Pengantar Dewan Komisaris 2. Pelaporan K3 3. Laporan Kinerja Bulan Mei 2022 4. Pemaparan RJPD LJT	1. Introduction to the Board of Commissioners 2. OHS Reporting 3. Performance Report for May 2022 4. Presentation of the LJT OHS
7	22 Juli 2022 July 22, 2022	1. Pengantar Dewan Komisaris 2. Pelaporan K3 3. Laporan Kinerja Bulan Juni 2022 4. Proses Pengembangan Usaha	1. Introduction to the Board of Commissioners 2. OHS Reporting 3. Performance Report for June 2022 4. Business Development Process
8	26 Agustus 2022 August 26, 2022	1. Pengantar Dewan Komisaris 2. Pelaporan K3 3. Laporan Kinerja Bulan Juli 2022 4. Proses Pengembangan Usaha	1. Introduction to the Board of Commissioners 2. OHS Reporting 3. Performance Report for July 2022 4. Business Development Process
9	7 Oktober 2022 October 7, 2022	1. Pengantar Dewan Komisaris 2. Executive Summary 3. Pelaporan K3L 4. Perubahan Struktur Organisasi 5. Update Progress Rencana Holding & Subholding	1. Introduction to the Board of Commissioners 2. Executive Summary 3. OHSE Reporting 4. Change in Organizational Structure 5. Update on Holding & Subholding Realtime Progress
10	27 Oktober 2022 October 27, 2022	1. Pengantar Dewan Komisaris 2. Executive Summary 3. Laporan K3L 4. Pemaparan Draft Usulan RKAP 2023	1. Introduction to the Board of Commissioners 2. Executive Summary 3. OHSE Report 4. Discussion on the Draft Proposal of the 2023 RKAP
11	1 Desember 2022 December 1, 2022	1. Pengantar Dewan Komisaris 2. Executive Summary a. Laporan K3L b. Laporan Kinerja Korporat 3. Penyampaian Progres Transformasi Program Holding dan Subholding	1. Introduction to the Board of Commissioners 2. Executive Summary a. OHSE Report b. Corporate Performance Report 3. Submission of Holding and Subholding Corporate Transformation Program

No.	Tanggal/ Tempat	Agenda	
13	08 Desember 2022 Denpasar, ID, [illegible]	1. Pengantar dari Dewan Komisaris 2. Executive Summary a. Laporan K3L b. Laporan Kinerja Keuangan	1. Introduction by the Board of Commissioners 2. Executive Summary a. OHSE Report b. Financial Performance Report

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Tahun 2022
Frequency and Attendance Rate of the Board of Commissioners in Meetings in 2022

Nama Name	Rapat Internal Internal Meeting		Rapat Pengawasan Supervisory Meeting		Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders	
	Frekuensi Rapat Meeting Frequency	Tingkat Kehadiran Attendance Rate	Frekuensi Rapat Meeting Frequency	Tingkat Kehadiran Attendance Rate	Frekuensi Rapat Meeting Frequency	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Darmawan Prasodjo	11	100%	11	100%	2	100%
Evy Haryadi	1	100%	1	100%	-	-
Dimas P. Hadipura	11	84.61%	11	100%	2	100%
Dendik Kusirawati	10	76.92%	11	91.67%	2	100%
Komang Purnaya	11	100%	11	100%	2	100%
Wagus Purnama	11	100%	11	100%	2	100%
Arie Rinaldo Waroma	11	84.61%	11	100%	2	100%
Bernady	0	0%	0	0%	-	-

Keterangan:
1. [illegible] tanggal 14 September 2022, [illegible] dengan [illegible]
[illegible]
2. [illegible] tanggal 14 Januari 2022, [illegible] dengan [illegible]
[illegible]

Description:
1. [illegible] dated September 14, 2022, [illegible]
[illegible]
2. [illegible] dated January 14, 2022, [illegible]
[illegible]

Program Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris
Competency Development Program for the Board of Commissioners

Dewan Komisaris mengikuti program pengembangan untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi yang relevan dengan bisnis Perusahaan dalam rangka mendukung tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sesuai dengan Pedoman Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris (*Board of Commissioner Manual*) dan *Board Manual*. Selama tahun 2022 anggota Dewan Komisaris telah mengikuti kegiatan program pengembangan kompetensi sebagaimana telah diuraikan pada uraian terkait Pendidikan dan Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Kepala SPI.

The Board of Commissioners participates in development programs to improve knowledge and competencies relevant to the Company's business in order to support the duties and responsibilities of the Board of Commissioners in accordance with the Board of Commissioners Manual and the Board Manual. During 2022, members of the Board of Commissioners have participated in competency development program activities as has been described in the description related to Education and Training of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Head of SPI.

Program Pengenalan Bagi Dewan Komisaris Baru

Induction Program for New Board of Commissioners

Perusahaan melaksanakan program pengenalan (Program Induksi) bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat sebagaimana diatur dalam Pedoman Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris (Board of Commissioner Manual) dan Board Manual. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab dalam Sekretaris Dewan Komisaris dalam pelaksana program pengenalan. Materi program pengenalan meliputi:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG di Perusahaan.
2. Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, ruang lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetisi, risiko dan berbagai masalah strategis lainnya sesuai dengan RJPP Perusahaan.
3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan audit eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit.
4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris.

Program pengenalan Perusahaan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Perusahaan/Anak Perusahaan dan pengikutsertaan dalam program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perusahaan. Selama program tersebut dilaksanakan. Pada tahun 2022, telah dilaksanakan program pengenalan bagi Komisaris baru sebagai berikut:

The Company carries out an introduction program (Induction Program) for newly appointed members of the Board of Commissioners as stipulated in the Board of Commissioners Manual and the Board Manual. The Corporate Secretary coordinated with the Secretary of the Board of Commissioners in implementing the induction program. The induction program materials include:

1. Implementation of the GCG principles in the Company.
2. An overview of the Company relating to its purpose, nature and scope of activities, financial and operating performance, strategy, short-term and long-term business plans, competitive position, risks and various other strategic issues in accordance with the Company's RJPP.
3. Information relating to delegated authority, internal audit and external audit, internal control systems and policies, including the Audit Committee.
4. Information regarding the duties and responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners.

The Company includes programs carried out in the form of presentations, meetings, visits to the Company/Subsidiaries and other relevant programs deemed appropriate to the Company. During the program is carried out. In 2022, the induction program for new Commissioners has been carried out as follows:

Program Induksi Anggota Dewan Komisaris Baru Tahun 2022

Induction Program for New Members of the Board of Commissioners in 2022

No.	Tanggal Date	Agenda	Anggota Dewan Komisaris The Board of Commissioners Members
1	18 Februari 2022 18 February 2022	1. Kebijakan Penerapan GCG 2. Pengenalan Perusahaan serta Proses Bisnis Operasi dan Pemeliharaan 1. GCG Implementation Policy 2. Introduction to Power Plant as well as Operation and Maintenance Business Process	1. Darmawan Prasodjo 2. Chief Erwin Widiastono 3. Bagus Purnomo
2	7 Oktober 2022 October 7, 2022	Program Kaji Ulang Hasil Penilaian Subholding Review Program regarding Holding and Subholding	Evy Haryadi

Penilaian Kinerja Komite-Komite Di Bawah Dewan Komisaris

Performance Assessment of Committees Under the Board of Commissioners

Dewan Komisaris melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas masing-masing komite secara berkala pada setiap akhir periode tahun buku sebagai bentuk pelaksanaan atas rekomendasi penilaian atas kinerja komite di bawah Dewan Komisaris sesuai dengan Pedoman Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris (Board of Commissioner Manual) dan Board Manual. Penilaian kinerja komite di bawah Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan Dewan Komisaris berupa pencapaian target-target rencana kerja tahunan komite. Uraian lebih lanjut mengenai penilaian kinerja komite di bawah Dewan Komisaris dapat dilihat pada bagian Komite Audit, Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan, serta Komite Nominasi dan Remunerasi.

The Board of Commissioners evaluates the implementation of duties of each committee periodically at the end of each fiscal year period as a form of implementation of the mechanism for assessing the performance of committees under the Board of Commissioners in accordance with the Board of Commissioners Manual and the Board Manual. The performance assessment of committees under the Board of Commissioners is conducted based on criteria determined by the Board of Commissioners in the form of achieving the targets of the committee's annual work plan. Further description on the performance assessment of committees under the Board of Commissioners can be seen in the Audit Committee, Risk Management and Compliance Committee, as well as Nomination and Remuneration Committee sections.

Penilaian Kinerja Direksi oleh Dewan Komisaris

Performance Assessment of the Board of Directors by the Board of Commissioners

Sebagai bagian dari fungsi Pengawasan, Dewan Komisaris bersama komite Dewan Komisaris melakukan evaluasi atas kinerja Direksi sesuai dengan Pedoman Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris (Board of Commissioner Manual) dan Board Manual. Penilaian kinerja Direksi dilakukan secara berkala berdasarkan laporan manajemen bulanan maupun triwulanan dan kriteria pencapaian atas Key Performance Indicator (KPI) baik bersifat maupun kuantitatif pada setiap akhir periode tahun buku. Uraian lebih lanjut mengenai penilaian kinerja Direksi dapat dilihat pada bagian Direksi.

As part of the Supervisory function, the Board of Commissioners together with the Board of Commissioners committee evaluates the performance of the Board of Directors in accordance with the Board of Commissioners Manual and the Board Manual. The performance assessment of the Board of Directors is conducted periodically based on monthly and quarterly management reports and the criteria for achieving the Key Performance Indicator (KPI) both adequately and individually at the end of each financial year period. Further description on the performance assessment of the Board of Directors can be seen in the Board of Directors section.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Performance Assessment of the Board of Commissioners

Dewan Komisaris melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas pengawasan yang dijalankan Dewan Komisaris berdasarkan Laporan Tugas Pengawasan, penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good Corporate Governance) serta pencapaian realisasi Key Performance Indicators (KPI) Dewan Komisaris. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara mandiri (self-assessment) pada setiap akhir periode tahun buku berdasarkan pelaksanaan evaluasi atas kinerja komite Dewan Komisaris dengan mempertahankan keberlanjutan Anggaran Dasar, Board Manual dan Pedoman Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris (Board of Commissioner Manual). Kinerja Dewan Komisaris berdasarkan Penugasan KPI tahun 2022 adalah sebagai berikut:

The Board of Commissioners evaluates the implementation of supervisory duties carried out by the Board of Commissioners based on the Supervisory Task Report, the implementation of good corporate governance (good of the Board of Commissioners and the achievement of the realization of Key Performance Indicators (KPI) of the Board of Commissioners. The performance assessment of the Board of Commissioners is conducted independently (self-assessment) at the end of each fiscal year period in conjunction with the evaluation of the performance of the Board of Commissioners committee by taking into account the provisions of the Articles of Association, Board Manual and Board of Commissioners Manual. The performance of the Board of Commissioners based on KPI Achievement in 2022 is as follows:

Realisasi Key Performance Indicators Dewan Komisaris 2022

Realization of Board of Commissioners Key Performance Indicators in 2022

No.	Indikator Kinerja Kunci Key Performance Indicators	Bobot Weight	Nilai Capaian Achievement Value
1.	Review dan Rekomendasi Rencana Perusahaan Review and Recommendation of Company Plan	8	7
2.	Review dan Tanggapan atas Kinerja Perusahaan Review and Response to Company Performance	20	20
3.	Review Tindak Lanjut Hasil Rapat Audit dan Laporannya Review of follow-up of internal/external audit results/findings	7	7
4.	Memberi tanggapan serta rekomendasi atas Rencana Bisnis dan Anggaran Perusahaan yang ditetapkan Direksi Providing written recommendations/responses/suggestions related to the Company's strategic plans that require the approval of the Board of Commissioners	20	20
5.	Menyampaikan progres kerja dari RKT Dewan Komisaris Tahun 2022 Submitting work progress and RKT of the Board of Commissioners in 2022	8	8
6.	Menyampaikan pembuatan/usulan Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham RUPS Submitting opinions/suggestions of the Board of Commissioners to the Shareholders/GMS	5	6
7.	Menyampaikan Laporan Tentang Tugas pengawasan Dewan Komisaris Submitting a Report on the supervisory duties of the Board of Commissioners	8	7
8.	Rapat Dewan Komisaris/Board of Commissioners' Meeting	20	20
9.	Rapat Komite/Committee Review	5	6
10.	Pengawasan dan Pemberian Rekomendasi atas Inisiatif Strategis/Strategic Improvement	5	5
11.	Pengelolaan GCG/GCG Management	5	5
	Nilai Kinerja/Performance Score	**100**	**95**

Penilaian atas aspek Dewan Komisaris terhadap organ pendukung Dewan Komisaris terkait pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik juga dilakukan secara berkala baik oleh pihak independen maupun secara mandiri (self-assessment) secara bergantian setiap tahun. Hal tersebut merupakan bagian dari penilaian tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan kriteria penilaian sesuai dengan ketentuan dalam yang diatur dalam Surat Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No.16/S.MBU/2011. Hasil penilaian penerapan tata kelola perusahaan yang baik tahun 2022 dilakukan oleh pihak independen yaitu Perhimpunan SPKFI Pimpinan Jawa Timur, dimana pada aspek Dewan Komisaris memperoleh skor 31,25 dari skor maksimal 35 atau setara dengan 95,83% dengan kategori Sangat Baik.

Assessment of aspects of the Board of Commissioners including supporting organs of the Board of Commissioners related to the implementation of good corporate governance is also conducted periodically by both independent parties and self-assessment alternately every year. This is part of the assessment of good corporate governance based on assessment criteria in accordance with the provisions of provisions stipulated in the Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs No.16/S.MBU/2011. The results of the assessment of the implementation of good corporate governance in 2022 were conducted by an independent party, namely the SPKFI Representative of East Java Province, where the Board of Commissioners aspect achieved a score of 31.25 out of a maximum score of 35 or equivalent to 95.83% in the Very Good category.

Direksi
Board of Directors

Peran Direksi sangat penting dalam memastikan keberhasilan transformasi Perusahaan sebagai Subholding PT PLN (Persero) menjadi perusahaan energi yang berbasis teknologi, inovasi dan berorientasi pada masa depan. Sebagai upaya mewujudkan hal tersebut, Direksi menjalankan perannya dengan tanggung jawabnya untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan kepentingan berbagai pangku pangku kepentingan dan pemegang saham serta para pemangku kepentingan. Direksi secara aktif memimpin jalannya tugas pengelolaan Perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan asas tata kelola yang baik. Sehingga Perusahaan menjadi entitas bisnis yang berdaya saing dan berfokus ke industri jangka panjang, berdaya dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis, berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan, serta berkembang dalam bertahan dan bertumbuh. Setiap anggota Direksi menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, berfokus secara normal, hati-hati dan memperhitungkan berbagai aspek penting yang relevan serta menggunakan kewenang, sumber daya yang dimiliki.

The role of the Board of Directors is crucial in ensuring the successful transformation of the Company as a Subholding of PT PLN (Persero) into a technology-based, innovative and future-oriented energy company. In an effort to realize it, the Board of Directors carries out its roles and responsibilities to create sustainable value by considering the long-term best interests of the corporation and shareholders as well as stakeholders. The Board of Directors collectively leads the management of the Company in accordance with the Company's Articles of Association and laws and regulations as well as taking into account the principles of good governance. So that the Company becomes a competitive business entity that focuses on long-term performance, is ethical and responsible in carrying out business, contributes positively to society and the environment, and has the ability to survive and grow. Each member of the Board of Directors carries out his/her duties in good faith and with full responsibility, while carefully, cautiously and considering various important relevant aspects and using his/her authority and resources.

Susunan Direksi
Composition of the Board of Directors

Direksi Perusahaan beranggotakan 6 (enam) orang sesuai dengan ketentuannya berdasarkan struktur organisasi Perusahaan yang mempunyai pada kepatuhan 31.8%. Susunan Direksi sebagai organ yang menjalankan fungsi pengelolaan Perusahaan ditetapkan oleh Pemegang Saham melalui keputusan RUPS. Anggota Direksi yang menjabat telah melalui proses pengelolaan dan validasi serta ditetapkan lulus uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) oleh PT PLN (Persero) selaku Pemegang Saham. Susunan Direksi Perusahaan periode tahun/ sampai dengan Desember 2022 adalah sebagai berikut:

The Company's Board of Directors consists of 6 (six) persons in accordance with the composition based on the Company's organizational structure which refers to the GMS resolution. The composition of the Board of Directors as an organ that carries out the management function of the Company is determined by the Shareholders through the GMS resolution. Members of the Board of Directors who served have gone through the screening and selection process and passed the fit and proper test by PT PLN (Persero) as the Shareholder. The composition of the Company's Board of Directors for the period January to December 2022 is as follows:

Susunan Direksi Tahun 2022
Composition of the Board of Directors in 2022

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Darmawan Prasodjo	Direktur Utama President Director	Keputusan RUPS Sirkuler tanggal 18 Februari 2021 Pengangkatan Anggota Direksi PT PLN tanggal 18 Februari 2021	Circular GMS Resolution on the Appointment of Members of the Board of Directors of PT PLN dated February 18, 2021
Suroso Isnandar	Direktur Utama President Director	Keputusan RUPS Sirkuler tanggal 30 September 2022 Pengangkatan Anggota Direksi PT PLN tanggal 30 September 2022	Circular GMS Resolution on the Appointment of Members of the Board of Directors of PT PLN dated September 30, 2022

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Ir. Yusuf Ididi, A.	Direktur Eksekutif Pembangkit Jawa Bali Director of Java Bali Power Plant Operations	Keputusan RUPS Sirkuler tertanggal Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris PT XXX Tanggal 23 April 2021	Circular (CIR) Resolution on the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners of PT XXX dated April 23, 2021
Nadirmanto Indarto	Direktur Eksekutif Pembangkit Jawa Bali Director of Java Bali Power Plant Operations	Keputusan RUPS Sirkuler tertanggal Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi tanggal 15 Juli 2020 jo. Keputusan RUPS Sirkuler tertanggal Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi tanggal 12 November 2020	Circular (CIR) Resolution on the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors dated July 15, 2020 jo. Circular (CIR) Resolution on the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors dated November 12, 2020
Iwan Purwanto	Direktur Pengembangan dan Niaga Director of Development and Commerce	Keputusan RUPS Sirkuler tertanggal Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi tanggal 12 Juni 2020 jo. Keputusan RUPS Sirkuler tertanggal Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi tanggal 12 November 2020	Circular (CIR) Resolution on the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors dated June 12, 2020 jo. Circular (CIR) Resolution on the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors dated November 12, 2020
Zulkifli Zaini	Direktur Keuangan Director of Finance	Keputusan RUPS Sirkuler tertanggal Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi tanggal 12 Juni 2020 jo. Keputusan RUPS Sirkuler tertanggal Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi tanggal 12 November 2020	Circular (CIR) Resolution on the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors dated June 12, 2020 jo. Circular (CIR) Resolution on the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors dated November 12, 2020
Suryadarma Ali	Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi Director of Human Capital Management and Administration	Keputusan RUPS Sirkuler tertanggal Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi tanggal 12 Juni 2020 jo. Keputusan RUPS Sirkuler tertanggal Pemberhentian dan Pengangkatan anggota Direksi tanggal 12 November 2020	Circular (CIR) Resolution on the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors dated June 12, 2020 jo. Circular (CIR) Resolution on the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors dated November 12, 2020
Muhamad Rasi	Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga Director of Business Development and Commerce	Keputusan RUPS Sirkuler tertanggal Pengangkatan Anggota Direksi PT XXX tanggal 23 September 2021	Circular (CIR) Resolution on the Appointment of Members of the Board of Directors of PT XXX dated September 23, 2021
Darmawan	Direktur Keuangan Director of Finance	Keputusan RUPS Sirkuler tertanggal Pengangkatan Anggota Direksi PT XXX tanggal 23 September 2021	Circular (CIR) Resolution on the Appointment of Members of the Board of Directors of PT XXX dated September 23, 2021

Keterangan:

1. RUPS Sirkuler tanggal 23 September 2021 sebelumnya telah diubah terakhir kali oleh Surat Keputusan sebagai Direksi. Status mengenai hal tersebut dapat Anda pertanyakan sebagai Direksi Utama.
2. RUPS Sirkuler tanggal 23 September 2021 sebelumnya telah diubah terakhir kali oleh Surat Keputusan sebagai Direksi Pengembangan dan Niaga, dan telah mengalami perubahan dan Pemberhentian sebagai Direksi Pengembangan Bisnis dan Niaga.
3. RUPS Sirkuler tanggal 23 September 2021 sebelumnya telah diubah terakhir kali oleh Surat Keputusan sebagai Direksi Keuangan, dan telah mengalami perubahan dan Pemberhentian sebagai Direksi Keuangan.

Description:

1. Circular (CIR) dated September 23, 2021 was previously amended for the last time by Decision Letter as Director(s). Status in relation to such amendment can be questioned by You as Director(s).
2. Circular (CIR) dated September 23, 2021 was previously amended for the last time by Decision Letter as Director(s) of Development and Commerce, and has undergone amendment and Termination of Director(s) of Development and Commerce.
3. Circular (CIR) dated September 23, 2021 was previously amended for the last time by Decision Letter as Director(s) of Finance, and has undergone amendment and Termination of Director(s) of Finance.

Pernyataan Independensi dan Potensi Benturan Kepentingan

Declaration of Independence and Potential Conflict of Interest

Anggota Direksi Perusahaan selain berhak membuat Pelta Integritas dan menyampaikan kepada Perusahaan terkait kepemilikan saham pribadi dan keluarga di Perusahaan dan perusahaan lainnya. Setiap Anggota Direksi Perusahaan telah menandatangani Pakta Integritas sebagai bentuk pernyataan untuk bersikap independen dan bebas berbenturan kepentingan dalam menjalankan tugas dan kegiatan dengan menyatakan bahwa:

1. Akan melaksanakan tugas dan wewenang secara profesional, independen, serta mengambil keputusan dalam kondisi mandiri, bebas bersikap di bawah tekanan direksi, bebas dari pengaruh maupun intervensi dari pihak manapun termasuk bebas terhadap pada intervensi dari partai politik, kelompok maupun golongan tertentu (independency).
2. Akan melaksanakan tugas dan wewenang serta mengambil keputusan dengan mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan lainnya oleh karenanya tidak akan menyalahgunakan kewenangan (ability), baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk kepentingan pihak manapun termasuk namun tidak terbatas pada kepentingan pribadi, partai politik, kelompok maupun golongan tertentu (duty care and loyalty).
3. Akan melaksanakan tugas dan wewenang serta mengambil keputusan, tanpa ada kepentingan pribadi atau tujuan untuk melakukan tindakan untuk memberi dan menerima maupun mengusahakan pihak-pihak yang terkait atau pihak yang berafiliasi (partai politik, kelompok maupun golongan tertentu (conflict of interest).
4. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta dalam mengambil keputusan, tidak akan meminta, tidak akan menawarkan/tidak menjanjikan untuk memberikannya hadiah, uang, suap, angpao, gratifikasi apapun bentuknya untuk tindakan lainnya yang bukan merupakan hak secara sah dan secara hukum dari pihak manapun.
5. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta dalam mengambil keputusan, tidak akan melakukan pelanggaran hukum, korupsi dan kecurangan (fraud) baik yang secara langsung maupun tidak langsung.
6. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta dalam mengambil keputusan, tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan terjadinya kerugian dalam pembelian harga (pembelian), pemborosan dan kebocoran keuangan perusahaan.
7. Akan melaksanakan tugas dan wewenang serta mengambil keputusan dengan pertimbangan/penugasan yang sudah tertulis berdasarkan kebenaran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (duty abiding the laws).

Members of the Company's Board of Directors periodically make an Integrity Pact and submit to the Company related to personal and family share ownership in the Company and other companies. Each Member of the Company's Board of Directors has signed an Integrity Pact as a form of statement to act independently and free of conflict of interest in carrying out their functions and duties by stating that:

1. Will carry out duties and authorities as well as tasks, decision-making and take decisions in an independent state, not under pressure under the from influences or intervention from any party including not limited to intervention from political parties, groups or certain groups (independency).
2. Will carry out duties and authorities as well as make decisions by prioritizing the interests of the Company above other interests and therefore will not abuse the authority of the position, either directly or indirectly, for the benefit of any party including but not limited to the interests of individuals, political parties, groups or certain groups (duty care and loyalty).
3. Will carry out duties and authorities as well as make decisions without any personal interest or purpose to do something for personal benefit, as well as to benefit related parties or affiliated parties (political parties, groups or certain groups (conflict of interest).
4. In carrying out its duties and authorities as well as in making decisions, will not request, will not offer/not promise to give/ receive gifts, bribes, bribes, briefcases, any gratuities and/or other forms of compensation that are not legally and legally entitled from any party.
5. In carrying out its duties and authorities as well as in making decisions will not commit violations, corruption and fraud (fraud) either directly or indirectly.
6. In carrying out its duties and authorities as well as in making decisions, will not take actions that result in irregularities in the determination of purchase prices, waste and leakage of company finances.
7. Will carry out duties and authorities as well as make decisions with sufficient understanding/assignment of various related provisions and regulations (prudent person rule), as well as comply with and implement all provisions and applicable laws and regulations (duty abiding the laws).

Penandatanganan Pakta Integritas Dewan Komisaris
Signing of the Integrity Pact of the Board of Commissioners

Nama Name	Tanggal Penandatanganan Date of Signing
[illegible]	Pernyataan telah ditandatangani pada 25 Agustus 2022 Statement has been signed on August 25, 2022
[illegible]	Pernyataan telah ditandatangani pada 3 November 2022 Statement has been signed on November 3, 2022
[illegible]	Pernyataan telah ditandatangani pada 3 November 2022 Statement has been signed on November 3, 2022
[illegible]	Pernyataan telah ditandatangani pada 3 November 2022 Statement has been signed on November 3, 2022
[illegible]	Pernyataan telah ditandatangani pada 11 Agustus 2022 Statement has been signed on August 11, 2022
[illegible]	Pernyataan telah ditandatangani pada 16 Agustus 2022 Statement has been signed on August 16, 2022
[illegible]	Pernyataan telah ditandatangani pada 3 November 2022 Statement has been signed on November 3, 2022
[illegible]	Pernyataan telah ditandatangani pada 10 November 2022 Statement has been signed on November 10, 2022
[illegible]	Pernyataan telah ditandatangani pada 3 November 2022 Statement has been signed on November 3, 2022

Keterangan:
1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]

Description:
1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]

Pedoman Kerja Direksi
Board of Directors Manual

Direksi telah menetapkan pedoman kerja yang mengacu pada Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pedoman kerja Direksi disusun sejak tahun 2013 dalam bentuk Tata Laksana Kerja Direksi. Tata Laksana Kerja Direksi atau Board of Directors Manual (DoD Manual) kemudian ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor [illegible] tanggal 30 Desember 2013. Hadirnya DoD Manual merupakan penjabaran lebih lanjut dari Board Manual yang berisikan hal-hal dan pelaksanaan kerja anggota Direksi. Board Manual disusun pada tahun 2010 dan terakhir kali disosialisasikan serta ditetapkan melalui keputusan bersama antara Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 25 November 2016. Direksi secara berkala melakukan review terhadap pedoman kerja Direksi dan jika diperlukan perlu dilakukan penyesuaian sesuai kebutuhan Direksi dan pengembangan Perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The Board of Directors has determined work guidelines that refer to the Articles of Association and prevailing laws and regulations. The work guidelines of the Board of Directors were prepared since 2013 in the form of the Board of Directors Manual. The Board of Directors Manual (BoD Manual) was then established based on the Decree of the Board of Directors Number [illegible] dated December 30, 2013. The existence of the BoD Manual is a further elaboration of the Board Manual, which is technical in nature from the implementation of the work of the Board of Directors' organ. The Board Manual was prepared in 2010 and was last updated and socialized through a joint agreement between the Board of Directors and Board of Commissioners on November 25, 2016. The Board of Directors periodically reviews the Board of Directors' manual and if deemed necessary, updates are made according to the needs of the Board of Directors and the development of the Company as well as applicable laws and regulations.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Duties and Responsibilities of the Board of Directors

Direksi mempunyai tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan diuraikan lebih jelas dalam Board Manual serta SoD Manual. Fungsi pengelolaan Perusahaan yang dijalankan Direksi bertujuan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan proses bisnis Perusahaan sesuai dengan tujuan Perusahaan dan arahan Pemegang Saham dengan memperhatikan inovasi dan teknologi secara efektif serta komitmen untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tujuan Perusahaan dituangkan dalam Visi dan Misi Perusahaan yang dijabarkan dalam rencana dan strategi dalam bentuk Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahunan yang disusun Direksi atas persetujuan Pemegang Saham. Tugas dan tanggung jawab Direksi secara umum meliputi:

1. Mengurus/kelola dan mengelola kelola/usaha/usaha usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
2. Menyusun, serta melihatnya, Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS;
3. Melaksanakan persetujuan kepada RUPS mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
4. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi;
5. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perusahaan, serta dokumen keuangan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan;
6. Mengusul Laporan Keuangan bersama dengan Standar Akuntansi Keuangan dan memberikan kepada Akuntan Publik untuk diaudit;
7. Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan;
8. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan;
9. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disetujui oleh RUPS kepada Menteri yang bertanggung jawab dan Ketua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Memutakhirkan Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perusahaan dan dokumen Perusahaan lainnya.

The Board of Directors carries out its duties and responsibilities as stipulated in the Articles of Association and described more clearly in the Board Manual and SoD Manual. The management function of the Company carried out by the Board of Directors aims to ensure the effectiveness of the implementation of the Company's policies and business processes in accordance with the Company's objectives and the attention of the Shareholders by utilizing innovation and technology effectively and fulfilling social and environmental responsibilities. The Company's objectives are outlined in the Company's Vision and Mission, which are elaborated into plans and strategies in the form of the Company's Long Term Plan (RJPP) and the Annual Budget and Operational Plan (RKAP) prepared by the Board of Directors with the approval of the Shareholders. The duties and responsibilities of the Board of Directors generally include:

1. Directing to and ensuring the implementation of the Company's business and activities in accordance with its purposes and objectives and business activities;
2. Preparing, in due time, the Company's Long Term Plan, the Company's Annual Budget and Operational Plan, and any amendments thereto and submitting them to the Board of Commissioners and Shareholders to obtain the GMS ratification;
3. Providing explanation to the GMS regarding the Company's Long Term Plan and the Company's Annual Budget and Operational Plan;
4. Preparing the Register of Shareholders, Special Register, Minutes of GMS, and Minutes of Board of Directors Meeting;
5. Preparing the Annual Report as a form of accountability for the management of the Company as well as the Company's financial documents as referred to in the Law on Company Documents;
6. Proposing the Financial Statements based on Financial Accounting Standards and submitting them to the Public Accountant to be audited;
7. Submitting the Annual Report including the Financial Statements to the GMS to be approved and ratified;
8. Providing explanation to the GMS regarding the Annual Report;
9. Submitting the Balance Sheet and Income Statement that has been ratified by the GMS to the Minister in charge of Law and Human Rights in accordance with the provisions of laws and regulations;
10. Maintaining the Register of Shareholders, Special Register, Minutes of GMS, Minutes of Board of Commissioners Meeting and Minutes of Board of Directors Meeting, Annual Report, Company's financial documents, and other Company's documents.

11. Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris, dan Risalah Rapat Direksi, Laporan tahunan dan dokumen keuangan Perusahaan serta dokumen Perusahaan lainnya
12. Menyusun rencana dan anggaran tahunan dengan memperhatikan keseimbangan dan kewajaran antara prinsip pengendalian intern terutama fungsi pengurusan pendapatan, pengeluaran dan pengawasan.
13. Memberikan laporan berkala mengenai rencana dan realisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya sebagai saat diminta oleh Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham.
14. Menyelenggarakan organisasi Perusahaan sehingga dengan pembagian tugas yang jelas.
15. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta Anggota Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham.
16. Menyelenggarakan konsultasi-konsultasi lainnya secara dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh RUPS, berdasarkan peraturan perundang-undangan.
17. Keeping of the Company's domicile, Register of Shareholders, Special Registers, Minutes of GMS, Minutes of Board of Commissioners' Meeting, and Minutes of Board of Directors' Meeting, Annual Report, Company's financial documents and other Company's documents.
18. Preparing an accounting system in accordance with Financial Accounting Standards and based on the principles of internal control, especially the functions of management, recording, storage, and supervision.
19. Providing periodic reports according to the manner and time in accordance with applicable provisions, as well as other reports whenever requested by the Board of Commissioners and/or Shareholders.
20. Preparing the Company's organizational structure complete with duties and duties.
21. Providing explanations on all matters asked or requested by Members of the Board of Commissioners and Shareholders.
22. Carrying out other obligations in accordance with the provisions stipulated in the Articles of Association and those stipulated by the GMS based on laws and regulations

Pembagian Tugas Anggota Direksi

Division of Duties of Members of the Board of Directors

Direksi menjalankan pola kepemimpinannya dengan melakukan pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi berdasarkan memperhatikan jabatan anggota Direksi yang tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan struktur organisasi Perusahaan. Pembagian tugas Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi, maka hal tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. Direksi Perusahaan juga menetapkan pembagian tugas melalui Keputusan Direksi Nomor: 026.K/010/DIR/2022 tanggal 21 September 2022. Pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi ditetapkan sebagai berikut:

The Board of Directors carries out the leadership role by dividing the management duties and authorities among members of the Board of Directors based on the consideration of the positions of members of the Board of Directors whose duties and responsibilities are in accordance with the Company's organizational structure. The division of duties of the Board of Directors is determined based on the GMS resolution as stated in the Law on Limited Liability Companies. In the event that the GMS does not stipulate the division of duties and authority of members of the Board of Directors, it shall be determined by decision of the Board of Directors. The Company's Board of Directors also stipulates the division of duties through Decision of the Board of Directors Number 026.K/010/DIR/2022 dated September 21, 2022. The division of duties and responsibilities of each member of the Board of Directors is stipulated as follows:

Pembagian Tugas Anggota Direksi
Division of Duties of Members of the Board of Directors

Jabatan Position	Tugas Pengawasan Duties and Responsibilities
Direktur Utama President Director	1. Menentukan arah, kebijakan dan strategi jangka panjang dan jangka pendek Perusahaan serta menjaga agar pengelolaan Perusahaan berjalan sesuai dengan arah, kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan. 2. Memimpin, mengarahkan, mengendalikan, mengevaluasi, mengembangkan dan mempertanggungjawabkan tugas Perusahaan dan unit kerja agar seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan visi, misi, asumsi kunci, strategi, kebijakan dan program kerja yang ditetapkan. 3. Menjalankan seluruh tindakan kreatif dan inovatif Perusahaan, serta melaksanakan pengelolaan perusahaan berbasis Teknologi. 4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas operasional di bidang pelaksanaan audit internal dan sekretariat dan pengelolaan Satuan, serta memastikan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi serta proses manajemen risiko. 5. Memastikan bahwa Perusahaan dikelola sesuai dengan kaidah good governance dan best practice sebagaimana yang telah (Good Corporate Governance). 6. Memastikan bahwa Perusahaan telah berkembang dan memberikan hal tambah bagi para pemegang saham. 7. Melaksanakan fungsi corporate leader untuk memastikan engagement seluruh anggota Perusahaan sebagai sebagai inspirasi dan motivator yang mengarahkan semua aktivitas dan Perusahaan mencapai tujuan visi, misi dan nilai-nilai Perusahaan.	1. Ensuring the direction, policies and long-term and short-term strategies of the Company and maintaining the management of the Company in accordance with the direction, policies and strategies that have been set. 2. Planning, coordinating, directing, controlling, supervising and evaluating duties of the Company and Work Units, so that all activities run in accordance with the vision, mission, business assumptions, strategic policies and work programs set. 3. Rolling out creative initiatives of the Company as well as ensuring the improvement of the Company's competitive ability. 4. Coordinating the implementation of operational duties in the field of internal audit and secretariat, management of Work Units, and ensuring compliance with laws and regulations as well as risk management processes. 5. Ensuring that the Company is managed in accordance with business principles and good corporate governance. 6. Ensuring that the Company continues to grow and provide added value to shareholders. 7. Carrying out the corporate leader function to ensure the engagement of all members of the Company as well as an inspirer and motivator who directs all Company resources to achieve the Company's vision, mission and goals.
Direktur Operasi Pembangkit Jawa Director of Java Power Plant Operations	1. Menetapkan pengelolaan unit Pembangkit untuk menjaga sustainability integrity pengelolaan dan kinerja Unit Pembangkit. 2. Menetapkan bahwa Unit Pembangkit mampu mencapai standar kinerja operasional yang ditetapkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) maupun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan menjaga keandalan Unit Pembangkit guna menjamin sustainability dan mendukung pertumbuhan Perusahaan. 3. Memastikan pengendalian terhadap kinerja Unit Pembangkit termasuk kinerja outage Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL). 4. Memastikan pemeliharaan dan pengendalian operasi dan pemeliharaan agar tingkat ketersediaan unit, efisiensi, mutu dan keandalan selalu sesuai dunia dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan, untuk mencapai target/out yang ditetapkan. 5. Memastikan pengelolaan operasi dan pemeliharaan mengacu pada kaidah best practices untuk memastikan peningkatan performance pembangkit secara berkelanjutan sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan. 6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan sistem telekomunikasi dengan pendekatan risiko dengan memperhatikan kondisi internal dan kesiapan/kesiagaan pasar, sebagai untuk menjamin kelancaran operasi Unit Pembangkit.	1. Ensuring the management of the Power Plant Unit to maintain sustainability, integrity of the management and performance of the Power Plant Unit. 2. Ensuring that the Generating Unit is able to achieve the operational performance target set out in the Company's Long Term Plan (RJPP) and the Company's Annual Budget and Expenditure Plan (RKAP) and maintain the health of the Power Plant Unit to ensure sustainability and support the Company's growth. 3. Ensuring periodic control of Power Plant Unit performance including the performance of Power Purchase Agreement (PPA) contracts. 4. Ensuring the planning and control of operations and maintenance so that the level of unit readiness, efficiency, quality and reliability is always in line with the industry standard but always to obtain considering safety aspects, to obtain the established targets. 5. Ensuring the management of operations and maintenance refers to the best practices principles to ensure the continuous improvement of power plant performance in accordance with the predetermined targets. 6. Ensuring the availability and control of primary energy with short and long term outlook, risk-based telecommunications system and market readiness/alertness, as well as ensuring the smooth operation of the Power Plant Unit.

Jabatan Position	Tugas Pengawasan Duties and Responsibilities
	7. Melaksanakan perencanaan, analisa dan evaluasi pemeliharaan pabrik pembangkit dengan menerapkan outage management system secara optimal. 8. Melaksanakan pengendalian sistem operasi dan pembagian beban pembangkit, serta pengendalian anggaran dan biaya jasa pemeliharaan baik O&M dan AMC. 9. Melaksanakan pengelolaan teknologi pembangkit dan pengembangannya untuk menjawab tantangan Perusahaan dalam pengelolaan pembangkit dan mendapatkan keunggulan kompetitif (competitive advantage) secara berkelanjutan. 10. Mengevaluasi dan mengembangkan kebijakan-kebijakan dalam Divisi dan Seksi di bawah Direksi/di Bawah Direksi Pekerjaan Anda.	7. Ensuring the planning, analysis and evaluation of maintenance schedule implementation by implementing the outage management system optimally. 8. Ensuring control of the electricity operation and trading system, as well as control of budgets and service costs for the management of O&M and AMC services. 9. Ensuring the development of power plant technology and its assessment to meet the Company's challenges in power plant management and maintain long-term competitive advantage in a sustainable manner. 10. Evaluating and developing policies within the Divisions and Units under the Directorate or Director.
Direktur Operasi Pembangkit Eks-Tanah Director of Non-Power Plant Operations	1. Melaksanakan pengelolaan Unit Pembangkit untuk menjaga sustainabilitas melalui pengelolaan dan kinerja Unit Pembangkit. 2. Memastikan bahwa Unit Pembangkit mampu memberikan kinerja operasional yang diharapkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) maupun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan menjaga kesehatan Unit Pembangkit guna menjamin sustainability dan mendukung pertumbuhan Perusahaan. 3. Memastikan pengelolaan portofolio kinerja Unit Pembangkit termasuk Utang lumbas Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL). 4. Memastikan perencanaan dan pengelolaan operasi dan pemeliharaan agar tingkat keandalan unit, efisiensi, mutu dan keandalan sistem secara dunia dengan tetap memperhatikan aspek komersial untuk menghasilkan harga jual yang kompetitif. 5. Memastikan pengelolaan operasi dan pemeliharaan mengacu pada tolok ukur prestasi untuk mendukung peningkatan performance pembangkit secara berkelanjutan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. 6. Memastikan perencanaan dan pengendalian energi primer baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan memperhatikan kontrol material dan ketersediaannya sesuai dengan kebutuhan operasi Unit Pembangkit. 7. Memastikan perencanaan, analisa dan evaluasi pemeliharaan pabrik pembangkit dengan menerapkan outage management system secara optimal. 8. Memastikan pengendalian sistem operasi dan pembagian beban pembangkit, serta pengendalian anggaran dan biaya jasa pemeliharaan baik O&M dan AMC. 9. Mengevaluasi dan mengembangkan kebijakan-kebijakan dalam Divisi dan Seksi di bawah Direksi/di Bawah Direksi Pekerjaan Anda.	1. Ensuring the management of the Power Plant Units to maintain sustainability through the management and performance of the Power Plant Units. 2. Ensuring that the Power Plant Unit is capable of achieving the operational performance targets set out in the Company's Long Term Plan (RJPP) and the Company's Annual Budget and Operational Plan (RKAP) and maintain the soundness of the Power Plant Unit to ensure sustainability and support the Company's growth. 3. Ensuring portfolio control of Power Plant Unit performance including the performance of Power Purchase Agreement (PPA) contracts. 4. Ensuring the planning and control of operations and maintenance to maintain the level of unit readiness, efficiency, quality and reliability in world-class while taking into account commercial aspects to obtain competitive selling prices. 5. Ensuring the management of operations and maintenance refers to the best practices as a guide to encourage the continuous improvement of power plant performance in accordance with the predetermined performance targets. 6. Ensuring the planning and control of primary energy both short and long term by taking into account material conditions and material needs/availability, as well as to ensure the smooth operation of the Power Plant Unit. 7. Ensuring the planning, analysis and evaluation of maintenance of plant outage management by implementing the outage management system optimally. 8. Ensuring control of the electricity operation and trading system, as well as control of budgets and service costs for O&M and AMC services. 9. Evaluating and developing policies within the Divisions and Units under the Directorate or Director.

Jabatan Position	Tugas Pengelolaan Duties and Responsibilities	
Direktur Pengembangan dan Niaga Director of Development and Commerce	1. Memastikan pengelolaan dan pengembangan Strategi Bisnis dan Pemasaran untuk mendukung pengembangan bisnis perusahaan. 2. Memastikan terselenggaranya pengelolaan dan pengembangan aset, termasuk pengelolaan aset yang dikecualikan dalam KIPI maupun IMAP serta memastikan sustainability dan kepatuhan perusahaan. 3. Memastikan pengelolaan kegiatan pengembangan bisnis baik pengembangan aset, pengembangan usaha, pengelolaan HPS dengan prinsip-prinsip kehati-hatian dan kecukupan pengembangan secara profesional, dalam rangka mendukung sustainability perusahaan dan Perusahaan. 4. Memastikan pelaksanaan penyusunan kontrak, kontrak baru dapat memenuhi syarat dan ketentuan, terselenggaranya fungsi serta memenuhi sinergi kewenangan Perusahaan. 5. Memastikan pengelolaan dan pengendalian proses kegiatan supply chain dan purchasing management, agar dapat mendukung ketersediaan bahan bakar perusahaan. 6. Memastikan pelaksanaan kegiatan komisioning dan PHO pembangkit berjalan sesuai dengan standar kualitas, on time, on cost dan on scope. 7. Mengevaluasi dan mengembangkan kebijakan-kebijakan dalam Divisi di bawah Direktorat Pengembangan Bisnis dan Niaga.	1. Ensuring the management and development of business and marketing strategies to support the Company's business development. 2. Ensuring that the assets are managed well and can be developed in addition to ensuring the projects in the KIPP and IMAP and support sustainability and ensure the growth of the Company. 3. Ensuring the management of business development activities (both asset development, business development, and business development) with a professional development plan and design assessment principles, in order to support the sustainability of the Company's growth. 4. Ensuring the implementation of business contracts preparation can meet the requirements (with terms/duty, commercials) and aspects and meet the Company's financial performance. 5. Ensuring the management and control of the process in supply chain activities and purchasing management, in order to support the smooth running of the Company's business processes. 6. Ensuring the management of commission activities and electric power generators (PHO) and to demonstrate on run on time, on cost and on scope. 7. Evaluating and developing policies in the Division under the Directorate of Business Development and Commerce.
Direktur Keuangan Director of Finance	1. Memastikan terselenggaranya anggaran perusahaan disesuaikan dengan sinergi dan program perusahaan, yang tercantum dalam KIPP maupun IMAP. 2. Mengelola perencanaan dan pendanaan perusahaan Perusahaan. 3. Memastikan pengelolaan keuangan perusahaan secara optimal guna mendapat likuiditas dalam mendukung kegiatan perusahaan. 4. Memastikan pengelolaan kegiatan akuntansi perusahaan sesuai kaidah akuntansi yang berlaku. 5. Melakukan monitoring terhadap pengelolaan keuangan Anak Perusahaan dan Perusahaan afiliasi, untuk memastikan integrasi dengan kebijakan pengelolaan keuangan Perusahaan. 6. Memastikan pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi kebijakan dan strategi dalam pengelolaan perusahaan sumber pendanaan termasuk identifikasi penyedia dan rekomendasi sumber pinjaman yang baik dan optimal. 7. Memastikan terlaksananya kegiatan manajemen risiko dan kepatuhan sesuai dengan strategi Perusahaan dalam rangka memastikan dan mengelimasi dampak finansial atau non finansial. 8. Memastikan pengelolaan bisnis proses, manajemen risiko dan teknologi informasi Perusahaan mendukung pencapaian kinerja operasional aset, dan pengembangan Perusahaan serta mengelola pengembangan sistem manajemen anak Perusahaan dalam mengelola risiko dan tata kelola. 9. Mengevaluasi dan mengembangkan kebijakan-kebijakan dalam Divisi dan sebagai di bawah Direktorat Keuangan.	1. Ensuring that the Company's budget management is conducted optimally in accordance with the Company's strategies and programs, as stipulated in the KIPP and IMAP. 2. Managing the planning and implementation of the Company's funding. 3. Ensuring optimal management of the Company's finances to ensure liquidity in supporting the Company's activities. 4. Ensuring the management of the Company's accounting activities in accordance with applicable accounting principles. 5. Monitoring the financial management of subsidiaries and affiliated Companies, to ensure integration with the Company's financial management policies. 6. Ensuring the planning, implementation and evaluation of policies and strategies in managing the acquisition of funding sources including identification of providers and undertaking of good and optimal loan sources. 7. Ensuring the implementation of risk management and compliance activities in accordance with the Company's strategy, in order to eliminate and eliminate financial or non-financial impacts. 8. Ensuring the management of the Company's business processes, risk management and information technology supports the achievement of assets' operational performance and Company development and ensures the development of the Company's asset management system is managed according to good governance. 9. Evaluating and developing policies in the Divisions and which under the Directorate of Finance.

Jabatan Position	Tugas Pengawasan Duties and Responsibilities
Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi Director of Human Capital Management and Administration	1. Memastikan pengelolaan human capital dan organisasi (Evaluasi Jabatan dan Kompetensi Jabatan yang Efektif) telah sesuai dengan SKEP masing-masing dan mendukung sustainability dan pertumbuhan Perusahaan. 2. Memastikan pengelolaan human capital dan pengembangan organisasi untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas. 3. Memastikan pengelolaan administrasi karyawan dan pengelolaan fasilitas dan kesekretariatan karyawan sesuai tepat. 4. Memastikan pengelolaan dan pengembangan human capital di internal Perusahaan, Anak Perusahaan dan kebersamaan di Perusahaan afiliasi, untuk mendukung pertumbuhan bisnis Perusahaan. 5. Memastikan pengelolaan pengembangan talenta untuk menjamin ketersediaan dan kesiapan human capital sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 6. Memastikan pengelolaan manajemen perubahan dan budaya perusahaan secara efektif untuk menciptakan lingkungan organisasi yang dinamis dan mampu menjawab tantangan perubahan. 7. Memastikan pengelolaan sistem manajemen human capital untuk membuang kebutuhan dan kesiapan sistem informasi human capital. 8. Memastikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi anggaran biaya fasilitas dan administrasi. 9. Memastikan pengelolaan pengembangan human capital melalui program pendidikan yang selaras dengan kebutuhan Perusahaan. 10. Memastikan terpenuhinya kebutuhan Perusahaan untuk fasilitas kerja, fasilitas umum, kebersihan/taman, pemeliharaan gedung.	1. Ensuring the management of human capital and organization is conducted optimally and achieves the targets set in RKAP and ASEP as well as supporting the sustainability and growth of the Company. 2. Ensuring human capital management and organizational development to enhance motivation and productivity. 3. Ensuring the management of employee administration and the management of employee welfare facilities in an orderly manner. 4. Ensuring the management and readiness of human capital within the Company, Subsidiaries and presence in Affiliated Companies to support the Company's business development. 5. Ensuring the management of talent development to ensure the availability and readiness of human capital in line with Company needs. 6. Ensuring effective management of change management and corporate culture to create a dynamic organizational environment capable of responding to competitive challenges. 7. Ensuring the management of the Human Capital application system to support the dynamism and accuracy of the Human Capital Information System database. 8. Ensuring the preparation, control over, and evaluation of facility and administrative cost budgets. 9. Ensuring the management of human capital development through learning programs that are aligned with the needs of the Company. 10. Ensuring the fulfillment of the Company's needs related to work facilities, office facilities, amenities, building maintenance.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Directors

Direksi memastikan bahwa visi dan misi, sasaran, strategi, dan rencana tindak lanjut perusahaan sejalan dengan pencapaian target RKAP dan ASEP serta mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan Perusahaan, dengan memperhatikan inovasi dan teknologi untuk meningkatkan daya saing, melaksanakan perbaikan dan kegiatan pemangku kepentingan, memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan serta mendapatkan nilai yang berkelanjutan. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dijabarkan sesuai dengan tujuan Perusahaan yang telah ditetapkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), dan secara tahunan dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Key Performance Indicators (KPI). RKAP dan KPI tahun 2022 telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Pemegang Saham dalam RUPS tanggal 30 Januari 2022. Direksi telah melakukan inisiatif agar pencapaian target RKAP dan KPI di tahun 2022 sebagai berikut:

The Board of Directors ensures that the Corporation's mission, vision, goals, targets, strategies and annual and medium-term plans are consistent with long-term objectives, by effectively utilizing innovation and technology to enhance competitiveness, respond to stakeholder concerns and expectations, fulfill social and environmental responsibilities and create sustainable value. The implementation of duties and responsibilities of the Board of Directors is carried out in accordance with the Company's objectives set out in the Company's Long-Term Plan (LTP), and annually set out in the form of the Company's Annual Budget and Operational Plan (RKAP) and Key Performance Indicators (KPIs). The 2022 RKAP and KPIs were approved by the Board of Commissioners and Shareholders at the GMS dated January 30, 2022. The Board of Directors has undertaken initiatives to achieve the RKAP and KPI targets in 2022 as follows:

Inisiatif Upaya Pemenuhan Target RKAP dan KPI di tahun 2022
Initiatives to Achieve RKAP and KPI Targets in 2022

Aspek Aspect	Program Kerja Work Program	
Nilai Ekonomi Bisnis Business Economic Value	1. Memastikan Capaian Angka Equivalent Availability Factor (EAF) Pembangkit Jawa Bali 2. Monitoring Efisiensi Biaya Pemeliharaan Pembangkit 3. Memastikan Capaian Angka Equivalent Forced Outage Rate (EFOR) Jawa Bali 4. Mengatur Target Specific Fuel Consumption (SFC) 5. Monitoring COMTEK	1. Ensuring the Achievement of Equivalent Availability Factor (EAF) of Java Bali Power Plants 2. Monitoring the Efficiency of Power Plant Care of Supply 3. Ensuring the Achievement of Equivalent Forced Outage Rate (EFOR) at Java Bali 4. Managing Specific Fuel Consumption (SFC) Rate 5. Monitoring COMTEK
Proses Model Bisnis Business Model Innovation	1. Mengakselerasi Sinergi Antar Anak Perusahaan Lain Untuk Pemberian Sinergi Unit PLN 2. Mengatur Maturity Level EBH 3. Meningkatkan Pemberdayaan Aset PLN Group 4. Mengoptimalkan Sisa Masa Kontrak	1. Optimizing Synergy between Other Subsidiaries (excluding PLN Unit Synergy) 2. Managing EBH Maturity Level 3. Increasing Revenue outside PLN Group 4. Implementing contract re-firing
Kepemimpinan Teknologi Technology Leadership	1. Mengimplementasikan Digital Power Plant 2. Mengimplementasikan Program Making Digital Talent	1. Implementing Digital Power Plant 2. Implementing Making Digital Talent Program
Pengembangan Investasi Investment Development	1. Monitoring Realisasi MCPS Data 2. Memastikan Target Power unit (Aquisi - Divestasi)	1. Monitoring Realization of SJE Data/SAP 2. Ensuring the Unit's Power Level (Acquisition - Divestment)
Pengembangan Talenta Talent Development	1. Mengatur % Perempuan dalam nominated talent 2. Mengatur % Milenial (<40 tahun) dalam nominated talent	1. Measuring the % of Women in nominated talent 2. Measuring the % of Millennials (<40 years old) in nominated talent
Proses Kepatuhan Compliance Aspect	1. Memastikan Kesesuaian Internal agency dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Memastikan Kesesuaian Penyampaian Laporan dan Akurasi data Emisi	1. Complying with Environmental Safety and Environmental Management 2. Ensuring the Accuracy of Report Submission and Reliable emission data accuracy

Sepanjang tahun 2022, Direksi juga telah mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengelolaan Perusahaan berdasarkan aspek dan program kerja Direksi sebanyak 13 keputusan.

Throughout 2022, the Board of Directors has also issued 13 decisions related to the implementation of duties and responsibilities in managing the Company based on the aspects and work programs of the Board of Directors.

Rapat Direksi
Board of Directors Meeting

Sebagaimana diatur dalam SoE manual dan Board Manual, Rapat Direksi dilakukan setiap kali dianggap perlu, namun sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) bulan. Rapat Direksi dapat dilakukan di luar jadwal rutin jika dianggap perlu serta berlaku secara per-tindakan, dengan agenda hal-hal yang memerlukan pengambilan keputusan. Dalam pelaksanaannya, Direksi mengupayakan agar Rapat diselenggarakan minimal satu kali dalam satu triwulan (setiap kali Sabtu).

As stipulated in the SoE manual and Board Manual, Board of Directors Meetings are held whenever deemed necessary, but at least once in 1 (one) month. Board of Directors Meetings may be held outside the regular schedule, if deemed necessary and of an immediate and strategic nature, with an agenda of matters requiring decision-making. In the implementation, the Board of Directors strives for the Meeting to be held at least once a week (every Thursday).

Rencana rapat Direksi disusun sebelum tahun berjalan yang memuat*e* agenda rutin dan agenda non rutin (ad-hoc). Agenda rutin terdiri dari Laporan Kondisi Pasar, Proses Pengadaan dan Laporan Manajemen. Agenda non rutin (ad-hoc) adalah hal-hal diluar agenda rutin yang perlu dibahas sebagai laporan kepada Direksi maupun memutuskan persetujuan Direksi atau pendelegasian atau eksternal/keputusan Dewan Komisaris (ad-hoc) PLN.

The Board of Directors meeting plan is prepared prior to the current year, which discusses routine agenda and non-routine agenda (ad-hoc). Routine agenda consists of the Market Condition Report, Company Position and Management Report. Non-routine agenda (ad-hoc) are matters outside the routine agenda that need to be discussed as a agent to the Board of Directors or require approval of the Board of Directors or discussion of the direct/indirect/external the Board of Commissioners and/or GMS.

Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya secara kolegial berkat tunjuk pengambilan Perusahaan melalui mekanisme Rapat Internal Direksi. Selain itu, dalam rangka pengawasan kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan tunjuk pengambilan Perusahaan telah seluruh dilakukan melalui Rapat Pengawasan Dewan Komisaris yang dihadiri oleh Direksi. Direksi juga dapat mengadakan Rapat Konsultasi dengan mengundang Dewan Komisaris. Direksi telah melaksanakan 28 kali Rapat Internal Direksi selama tahun 2022, dengan agenda dan tingkat kehadiran Direksi adalah sebagai berikut:

The Board of Directors is carried out duties and responsibilities as well as collegial decision making limited to the Company's management function through the mechanism of the Internal Meeting of the Board of Directors. In addition, in order to report to the Board of Commissioners on the implementation of the Company's management function, one of which is conducted through the Board of Commissioners' Supervisory Meeting attended by the Board of Directors. The Board of Directors may also hold Consultation Meetings by inviting the Board of Commissioners. The Board of Directors conducted 28 Internal Meetings of the Board of Directors during 2022, with the agenda and attendance level of the Board of Directors as follows:

Rapat Internal Direksi Tahun 2022
Internal Meeting of the Board of Directors in 2022

No.	Waktu Pelaksanaan Time of Implementation	Agenda	
1.	14 Januari 2022 January 14, 2022	1. Penyelesaian Laporan Assessment 2021 Tahun 2021 2. Persiapan Rapat Kerja Tahun 2022	1. Submission of 2021 Assessment Report for 2021 2. Preparation for the 2022 Work Meeting
2.	20 Januari 2022 January 20, 2022	1. Pemaparan Arahan Direksi RJB dalam RUPS Akhir Tahun Perusahaan 2. KPI Anak Perusahaan 2022	1. Discussion of Directors of RJB's Board of Directors in the GMS of Subsidiaries' ARGM 2. KPI of Subsidiaries in 2022
3.	27 Januari 2022 February 27, 2022	1. Penyampaian Progres Audit Laporan Keuangan RJB Group Tahun 2021 2. Laporan Implementasi dan Evaluasi RJB Bisnis tahun 2021	1. Submission of Audit Progress of RJB Group's Financial Statements for 2021 2. RJB Implementation and Evaluation Report for January 2021
4.	23 Februari 2022 February 23, 2022	1. Laporan Kinerja Januari 2022 & Indeks Bisnis RJB 2. Laporan Progres Proyek Pengembangan usaha	1. Performance Report for January 2022 & RJB Bisnis Index 2. Progress Report of Business Development Project
5.	27 Maret 2022 March 27, 2022	1. Laporan Kinerja Bulan Februari 2. Laporan Implementasi RJB Bisnis Februari 3. Laporan Progres Proyek Pengembangan usaha 4. Laporan Progres Audit	1. Performance Report for February 2. RJB Implementation Report for February 3. Progress Report of Business Development Project 4. Audit Progress Report
6.	5 April 2022 April 5, 2022	Laporan Progres Penagihan PIS untuk Program Outstanding PJTL	PIS Financing Progress Report for PJTL Outstanding Program
7.	12 April 2022 April 12, 2022	Konsultasi terkait Proyek Power Quality	Consultation related to Power Quality Project
8.	26 April 2022 April 26, 2022	Penjajakan Kerjasama dengan TNB AC untuk Pengajaran Pengembangan Pasang PLTN di ESAS Membership Pasca	Preparation of Cooperation with the Army to the Assignment of UPP Potential Development in Membership Membership Pasca
9.	30 Mei 2022 May 30, 2022	Laporan Progres Penagihan Transfer Holding & Sub Holding	Progress Report on Preparation of Holding & Sub Holding Transition

No.	Waktu Pelaksanaan Date of Implementation	Agenda
10.	23 Mei 2022 May 23, 2022	1. Permohonan Persetujuan Investasi Pekerjaan Revitalisasi PLTG Gedung Putih 2. Permohonan Persetujuan Penggunaan Private EBT
11.	6 Juni 2022 June 6, 2022	Persetujuan RUPS LPT Tahun 2020.
12.	10 Juni 2022 June 10, 2022	Konsolidasi Internal dan persiapan Holdingisasi
13.	24 Juni 2022 June 24, 2022	Konsultasi RTM Tanah Laut
14.	27 Juni 2022 June 27, 2022	Konsultasi terkait Hasil Heuwer Group Discussion (HGD) Inisiatif Subsidiasi Unggul Quick Win Transformasi Konektivitas PLN Group Inisiatif Cluster Engineering (Inisiatif A-10) dan Inisiatif Cluster Komunikasi (Inisiatif A-09).
15.	15 Juli 2022 July 15, 2022	1. Laporan Kegiatan Akuisisi PLTGU Sengkang 2. Permohonan Persetujuan Pembangunan PLTS Sumbawa IPP. 3. Laporan Kegiatan Pengadaan Gedung IKL. 4. Laporan Pengembalian Integrasi Blocks AS-PPN & ASC-PLNB.
16.	28 Juli 2022 July 28, 2022	1. Laporan Progress Kegiatan. 2. Paparan RKPP PT PNSE 2023 – 2026.
17.	18 Agustus 2022 August 18, 2022	1. Laporan Kegiatan PIR Oktober 2022. 2. Laporan Kegiatan RKAP/BJ. 3. Konsultasi Rencana Aksi/c Saham PT Nawakara Indonesia (anak PT Nawakara Daerah).
18.	19 Agustus 2022 August 19, 2022	Pemaparan Hasil Keuangan Kerangan RKAP 2023.
19.	22 Agustus 2022 August 22, 2022	Laporan Progres Persiapan Transisi Holding & Sub Holding
20.	24 Agustus 2022 August 24, 2022	1. Revisi Pengembangan PLTU Pelan 1 x 1 dalam Mendukung Transisi Energi Bersih. 2. Laporan Pelaksanaan Rapat Direksi mengenai Pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran dan Penilaian Kinerja Organisasi sebagai Dampak Holdingisasi.
21.	28 September 2022 September 28, 2022	1. Laporan Rencana Pengembangan Proyek PLTS Kapasitas 100 MW 2. Laporan Progres dan Rencana 1 & 2 3. Laporan Progres dan Rencana PIR Connect
22.	18 Oktober 2022 October 18, 2022	Laporan Rencana Pengembangan Proyek PLTS Kapasitas 100 MW.
23.	21 Oktober 2022 October 21, 2022	1. Laporan Update Aksi/on Direksi/Program Nasional 2. Profil Aksi Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi (Profile) 3. Konsultasi Direksi/ RPS Wilayah Germindo 4. Laporan Update Pencapaian HSE Nasional
24.	25 Oktober 2022 October 25, 2022	Usulan RKAP 2023.

No.	Waktu Pelaksanaan Time of Implementation	Agenda	
35.	11 November 2022 November 11, 2022	1. Konsolidasi Internal Direksi (Rapat Terbatas) 2. Progres Rakorsus Jaminan dan Gearing Ratio 3. Progres Proyek RCTC Tanjung Enim 4. Konsolidasi Strategi PPA	1. Consolidation of Internal Board of Directors (Limited Meeting) 2. Monitoring and Special Coordination Progress 3. Progress of Private Placing SDP Project 4. PPP Strategy Consolidation
36.	30 November 2022 November 30, 2022	Persetujuan Tindak Lanjut Pemenuhan Holding dan Sub Holding Area Lapal Unit Nias	Approval of Follow-up to the Establishment of Holding and Sub Holding during Lapal Unit Nias
37.	11 Desember 2022 December 11, 2022	1. Persetujuan Usulan RKAP 2023 2. Laporan Progres Proyek Penugasan / Pengembangan Usaha: a. PCPTN I Pelalawan b. PCTC Cilacap c. Rencana Gearing dan Dividen d. Add On Nusa Tawar e. PCTC Kalimantan f. EPC / Additional Demand 3. Persetujuan Ha Dies Direksi / Dewan Komisaris	1. Approval of the proposed RKAP 2023 2. Progress Report of Project Assignment/Business Development: a. PCPTN I Pelalawan b. PCTC Cilacap c. Gearing and Dividend Plan d. Add On Nusa Tawar e. Kalimantan PCTC f. EPC / Additional Demand 3. Approval of Board of Directors / Board of Commissioners Facilities
38.	28 Desember 2022 December 28, 2022	Persetujuan Rencana Pemindahan Kelapan Hasa Thamrin Pasha Lapal Unit Nias	Discussion of the Plan for Issuance of Transition Permit Policy from Lapal Unit Nias

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Direksi dalam Rapat Tahun 2022

Frequency and Attendance Rate of the Board of Directors in Meetings in 2022

Nama Name	Rapat Internal Internal Meeting		Rapat Pengawasan Supervisory Meeting		Rapat Umum Pemegang Saham General meeting of Shareholders	
	Frekuensi Rapat Meeting Frequency	Tingkat Kehadiran Attendance Rate	Frekuensi Rapat Meeting Frequency	Tingkat Kehadiran Attendance Rate	Frekuensi Rapat Meeting Frequency	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Darmawan Prasodjo	20	100%	6	100%	1	100%
Rudy Firmansyah*	8	100%	2	75%	-	-
Ir. Yusuf Ishak, M.	20	100%	12	100%	1	100%
Bakhtiar Ahmad Sabri	17	88%	11	100%	1	100%
Iwan Agung	20	100%	6	100%	1	100%
Evy Haryadi	20	100%	6	100%	1	100%
Suryanto Aji	20	88%	11	100%	1	100%
Muhamad Reza*	8	100%	4	100%	-	-
Dwi Hartanto*	8	100%	4	100%	-	-

Keterangan:
1. RUPS Sirkuler tanggal 25 September 2022 memberhentikan dengan hormat Sdr. Darmawan Prasodjo sebagai Direktur Utama merangkap Ketua Komite Pemantau Risiko sebagai Direktur Utama.
2. RUPS Sirkuler tanggal 25 September 2022 memberhentikan dengan hormat Sdr. Iwan Agung sebagai Direktur Pengembangan Usaha Anak dan Portofolio merangkap Ketua Komite Pemantau Risiko sebagai Direktur Pengembangan Usaha Anak dan Portofolio.
3. RUPS Sirkuler tanggal 25 September 2022 memberhentikan dengan hormat Sdr. Evy Haryadi sebagai Direktur Keuangan merangkap Anggota Komite Pemantau Risiko sebagai Direktur Keuangan.

Information:
1. Circular GMS dated September 25, 2022, respectfully dismissed Mr. Darmawan Prasodjo as Director of Main Office as well as Chairman of the Risk Monitoring Committee as Director of Main Office.
2. Circular GMS dated September 25, 2022, respectfully dismissed Mr. Iwan Agung as Director of Business Development and Portfolio as well as Chairman of the Risk Monitoring Committee as Director of Business Development and Portfolio.
3. Circular GMS dated September 25, 2022, respectfully dismissed Mr. Evy Haryadi as Director of Finance as well as Member of the Risk Monitoring Committee as Director of Finance.

Program Pengembangan Kompetensi Direksi

Competency Development Program of the Board of Directors

Dalam mengikuti program pengembangan untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi yang relevan dengan bisnis Perusahaan dalam rangka mendukung tugas dan tanggung jawab Direksi sesuai dengan Pedoman Tata Laksana Kerja Dewan Direksi (*Board of Directors Manual*) dan *Board Manual* Selama tahun 2022, anggota Direksi telah mengikuti kegiatan program pengembangan kompetensi sebagaimana telah diberikan pada uraian terkait Pendidikan dan Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Kepala SPI.

The Board of Directors participates in development programs to improve knowledge and competencies relevant to the Company's business in order to support the duties and responsibilities of the Board of Directors in accordance with the Board of Directors Manual and the Board Manual. During 2022, members of the Board of Directors have participated in competency development program activities as has been described in the description related to Education and Training of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Head of IAU.

Program Pengenalan Direksi

Induction Program for the Board of Directors

Perusahaan melaksanakan program pengenalan (Program Induksi) bagi anggota Direksi yang baru menjabat sebagaimana diatur dalam Pedoman Tata Laksana Kerja Direksi (*Board of Directors Manual*) dan *Board Manual*. Sekretaris Perusahaan sebagai pelaksana Program Pengenalan bagi Direksi yang baru diangkat, mempersiapkan materi program pengenalan yang meliputi:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG di Perusahaan;
2. Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan berbagai masalah strategis lainnya;
3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang diklasifikasikan audit internal dan audit eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit;
4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris.

The Company serves out an induction Program for newly appointed members of the Board of Directors as stipulated in the Board of Directors Manual and the Board Manual. The Corporate Secretary as the executor of the Induction Program for newly appointed Directors, prepares the induction program materials which include:

1. Implementation of the GCG principles in the Company;
2. An overview of the Company relating to its purpose, nature and scope of activities, financial and operating performance, strategy, short-term and long-term business plans, competitive position, risks and various other strategic issues in accordance with the Company's RKAP;
3. Information relating to delegated authority, internal audit and external audit, internal control systems and policies, including the Audit Committee;
4. Information regarding the duties and responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners.

Program pengenalan Perusahaan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Perusahaan/ Anak Perusahaan dan pemberian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perusahaan dimana program tersebut dilaksanakan. Pada tahun 2022, telah dilaksanakan program pengenalan bagi Direksi yang baru diangkat sebagai berikut:

The Company induction program can be in the form of presentations, meetings, visits to the Company/Subsidiaries and documentation or other programs deemed appropriate to the Company where the program is carried out. In 2022, an induction program for newly appointed Directors has been implemented as follows:

Program Induksi Anggota Direksi Baru Tahun 2022
Induction Program for New Members of the Board of Directors in 2022

No.	Tanggal Date	Agenda	Anggota Direksi Dalam Kegiatan Members of the Board of Directors/Board of Commissioners
1	08 Februari 2022 February 10, 2022	1. Kebijakan Perangkat GRC (Governance, Risk and Compliance) 2. Pengenalan Bentangan serta Proses Bisnis Operasi dan Pemeliharaan 3. GRC (Governance, Risk and Compliance) Implementation Policy 4. Introduction to Power Plant as well as Operation and Maintenance Business Process	1. Zhelang Tridoloh 2. Iwan Setiawan Wahjudiro 3. Bagus Pamitra
2	28 September 2022 September 30, 2022	Program Kerja pertai Hooling dan Soh Hooling Work Program regarding Hooling and Soh Hooling	1. Aziz Firmansyah 2. Muhamad Reva 3. Dwi Hartono
3	12 Oktober 2022 October 13, 2022	Classroom Exposure	1. Aziz Firmansyah 2. Muhamad Reva 3. Dwi Hartono
4	27 Oktober 2022 October 27, 2022	Program Kerja pertai Hooling dan Soh Hooling Work Program regarding Hooling and Soh Hooling	Aziz Firmansyah
5	28 Oktober 2022 October 30, 2022	Kerjasama dengan Pertamina Hulu Energi (PHE) Company Long Term Plan (LTP)	1. Aziz Firmansyah 2. Muhamad Reva 3. Dwi Hartono
6	4 November 2022 November 4, 2022	Program Proyek GBT Program of the GBT Project	1. Aziz Firmansyah 2. Dwi Hartono
7	10 November 2022 November 10, 2022	1. Kebijakan penerapan GRC (Governance, Risk, and Compliance) 2. Kebijakan Perdir (DIR.0001) (v.DIR.0010) tentang Bahasan Kewenangan Pengambilan Keputusan di Lingkungan PT PLN 1. GRC (Governance, Risk, and Compliance) implementation policy 2. Policy or Regulation of the Board of Directors (DIR.0001) in conjunction with DIR.0010 on the Limitation of Decision Making Authority within PT PLN	1. Aziz Firmansyah 2. Muhamad Reva 3. Dwi Hartono
8	14 November 2022 November 14, 2022	Overview Coaching Overview Coaching	1. Aziz Firmansyah 2. Muhamad Reva 3. Dwi Hartono

Penilaian Kinerja Komite-Komite dan Unit Kerja atau Organ Pendukung Tata Kelola dan Pengendalian Internal di Bawah Direksi
Performance Assessment of Committees and Work Units or Supporting Organs for Governance and Internal Control under the Board of Directors

Sampai dengan akhir tahun 2022, belum terdapat komite di bawah Direksi dengan mempertimbangkan skala bisnis dan struktur organisasi Perusahaan saat ini yang dipandang telah memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas Direksi. Oleh karena itu, belum terdapat penilaian atas kinerja komite dibawah Direksi sepanjang tahun 2022.

Until the end of 2022, there was no committee under the Board of Directors considering the scale of business and the current organizational structure of the Company which was deemed adequate to support the implementation of duties of the Board of Directors. Therefore, there is no assessment of the performance of committees under the Board of Directors throughout 2022.

Perusahaan telah memiliki organ pendukung untuk tata kelola Perusahaan dan pengendalian internal yaitu Sekretaris Perusahaan, Satuan Pengawasan Internal, Satuan Pengelola Risiko, dan Satuan Manajemen Risiko dan Kepatuhan. Direktur Utama secara berkala melakukan penilaian kinerja Sekretaris Perusahaan, Satuan Pengawasan Internal dan Satuan Hukum, Risiko, dan Kepatuhan berdasarkan parameter kriteria Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas. Pelaksanaan tugas organ pendukung tersebut tercermin dalam Key Performance Indicator (KPI) yang disepakati sebagai acuan dan ukuran pencapaian target pelaksanaan tugas. Dalam hal penilaian dan pelaksanaan GCG atas organ pendukung tata kelola dan pengendalian internal juga menjadi bagian dalam penilaian penerapan GCG Perusahaan sejalan dengan keputusan Surat Keputusan Sekretaris Menteri (S-KPM) No 180/MBU/2012.

The Company has had supporting organs for corporate governance and internal control, namely the Corporate Secretary, Internal Audit Unit, Legal Services Unit, and Risk Management and Compliance Unit. The President Director periodically assesses the performance of the Corporate Secretary, Internal Audit Unit as well as the Legal, Risk and Compliance Unit based on the parameters of the Completeness and Duties Implementation criteria. The implementation of duties of these supporting organs is reflected in the Key Performance Indicator (KPI) agreed upon as a reference and measure of the achievement of duty implementation in the supporting organs of governance and internal control is also part of the assessment of GCG implementation of the Company in the aspect of the Board of Directors based on the Decree of the Secretary of the Minister or SOEs No. S-KPM-180/MBU/2012.

Penilaian Kinerja Direksi

Performance Assessment of the Board of Directors

Direksi melakukan evaluasi secara mandiri (self-assessment) baik individu maupun kolegial atas realisasi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta capaian target-target KPI sebagai bagian dari agenda yang akan disampaikan dalam pembahasan Laporan Perusahaan dengan Dewan Komisaris dalam Rapat Pengawasan. Evaluasi tersebut dilaksanakan setiap akhir dan pada akhir periode tahun buku dengan mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar dan Board Manual. Direksi juga menyampaikan laporan manajemen yang memuat realisasi program kerja berdasarkan RKAP serta menyampaikan indikasi capaian KPI korporat dan evaluasi masing-masing Direksi secara triwulanan dan tahunan. Dewan Komisaris melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi secara kolegial dan individu berdasarkan laporan manajemen dan realisasi Key Performance Indicators (KPI) sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pengawasan. Hal ini merupakan penilaian terhadap kinerja Direksi berdasarkan Laporan Keuangan, Laporan realisasi RKAP (Management), capaian Tahunan dan Realisasi Key Performance Indicators (KPI) serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Pengaturan kebijakan Kinerja Direksi akan tidak akan mengakibatkan hak kerja kolegial dan seluruh anggota Direksi berakhir dan penyusunan KPI Korporat tahun 2022 sebagai berikut:

The Board of Directors conducts self-assessment both individually and collegially on the realization of the Company's Annual Budget and Operations Plan (RKAP) as well as the achievement of KPI targets as part of the report that will be submitted in the discussion of the Company's performance with the Board of Commissioners in the Supervisory Meeting. The evaluation is carried out every month and at the end of the financial year period with due observance of the provisions of the Articles of Association and the Board Manual. The Board of Directors also submits a management report containing the outcomes of the work program based on the RKAP and submits the realization of KPI at the corporate level and each of the Board of Directors on a quarterly and annual basis. The Board of Commissioners assesses the performance of the Board of Directors collegially and individually based on the management report and the realization of Key Performance Indicators (KPI) as part of the implementation of supervisory duties. This KPI assesses the performance of the Board of Directors based on the Financial Report, RKAP (Management) realization report, Annual Report and Key Performance Indicators (KPI) realization as well as the implementation of good corporate governance. The improvement of the scores of the Board of Directors' performance by the GMS, which is the result of the collegial work of all members of the Board of Directors, is reflected in the achievement of the Corporate KPIs in 2022 as follows:

Realisasi Key Performance Indicators Direksi 2022

Realization of the Board of Directors' Key Performance Indicators in 2022

No.	Indikator Kinerja Kunci Key Performance Indicators	Bobot Weight	Nilai Capaian Achievement Value
1.	Nilai Investasi Utama Key investment value	40	37.27
2.	Kinerja Finansial Financial performance	30	22.84
3.	Kepemimpinan Teknologi Technology Leadership	10	12.00
4.	Pengembangan Investasi Investment Development	10	9.07
5.	Pengembangan Talenta Talent Development	10	12.00
6.	Aspek Perusahaan Corporate Aspect	Max (-10) Max (+5)	0.00
	Nilai Kinerja Performance Value	**100**	**93.38**

Penilaian aspek Direksi termasuk aspek pendukung tata kelola dan pengendalian internal. Bukti pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik juga dilakukan secara formal oleh oleh pihak independen maupun secara mandiri (self-assessment) secara bergantian setiap tahun. Hal tersebut merupakan bagian dari penilaian tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan acuan yang diatur dalam Surat Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. SK-S-MBU-0132. Hasil penilaian penerapan tata kelola perusahaan yang baik tahun 2022 dilakukan oleh pihak independen yaitu Perwakilan DPKP Provinsi Jawa Timur, dimana pada aspek Direksi mencapai skor 33.0 dari skor maksimal 33.00 atau setara dengan 99.98 % dengan kategori Sangat Baik.

Assessment of the Board of Directors aspect, including the supporting aspects of governance and internal control related to the implementation of good corporate governance, is also conducted periodically by both independent parties and self-assessment alternately every year. This is part of the assessment of good corporate governance based on assessment criteria in accordance with the terms of reference stipulated in the Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs No. SK-S-MBU-0132. The results of the assessment of good corporate governance implementation in 2022 were conducted by an independent party, namely the DPKP Representative of East Java Province, where the Board of Directors aspect achieved a score of 33.0 out of a maximum score of 33.00 or equivalent to 99.98% in the Very Good category.

Hubungan Afiliasi, Kepemilikan Saham Serta Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi

Affiliation, Share Ownership and Work Relationship of the Board of Commissioners and Board of Directors

Dewan Komisaris dan Direksi sebagai organ utama tata kelola Perusahaan harus mampu bersikap independen dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan. Hubungan antara Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan kerja untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan fungsi pengelolaan Perusahaan. Dewan Komisaris dan Direksi memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dalam pelaksanaan tugas dan wewenang saling-bawannya untuk memastikan tujuan meningkatkan nilai dan mengamankan aset strategis Perusahaan dalam pembangunan secara berkelanjutan, serta tetap mempertahankan keseimbangan kepentingan stakeholder dengan kegiatan Perusahaan.

The Board of Commissioners and Board of Directors as the main organs of corporate governance must be able to act independently and avoid any form of conflict of interest. The relationship between the Board of Commissioners and Board of Directors is a work relationship to carry out the supervisory and management functions of the Company. The Board of Commissioners and Board of Directors ensure that every decision taken in the implementation of duties and authorities is as much as possible to achieve goals, increase value, and carry out the Company's strategic role in sustainable development, as well as continuing to take into account the balance of stakeholder interests with the Company's activities.

Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris

Affiliation of Members of the Board of Commissioners

Anggota Dewan Komisaris harus mampu menjalankan fungsi pengawasan secara independen dan bebas benturan kepentingan semata-mata demi mencapai misi Perusahaan dan pemangku kepentingan dalam jangka panjang khususnya dalam hal terdapat hubungan afiliasi. Hubungan afiliasi yang dimaksud mencakup hubungan keluarga dan ikatan antara anggota Dewan Komisaris dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi serta anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali Perusahaan. Hubungan afiliasi anggota Dewan Komisaris yang menjabat sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Members of the Board of Commissioners must be able to carry out supervisory functions independently and free of conflicts of interest solely for the sake of maintaining the value of the Company and stakeholders in the long term, especially in the event that there is an affiliation. Affiliation includes family and financial relationships between members of the Board of Commissioners with fellow members of the Board of Commissioners, members of the Board of Commissioners with members of the Board of Directors as well as members of the Board of Commissioners with Major and/or Controlling Shareholders of the Company. Affiliations of members of the Board of Commissioners who served throughout 2022 are as follows:

Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris

Affiliation of Members of the Board of Commissioners

Nama/Jabatan *Name/Position*	Afiliasi *Affiliation*	Hubungan Keluarga Dengan *Family Relationship with*			Hubungan Kerjasama Dengan *Partnership Relationship with*		
		Dewan Komisaris *Board of Commissioners*	Direksi *Board of Directors*	Pemegang Saham *Shareholders*	Dewan Komisaris *Board of Commissioners*	Direksi *Board of Directors*	Pemegang Saham *Shareholders*
Tedjang Sakrum	Komisaris Utama *President Commissioner*	Tidak *No*	Tidak *No*	Tidak *No*	Tidak *No*	Tidak *No*	Tidak *No*
Eko Heryadi	Komisaris Utama *President Commissioner*	Tidak *No*	Tidak *No*	Tidak *No*	Tidak *No*	Tidak *No*	Tidak *No*
Wawang Purnomo	Komisaris *Commissioner*	Tidak *No*	Tidak *No*	Tidak *No*	Tidak *No*	Tidak *No*	Tidak *No*

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keluarga Dengan Family Relationship With			Hubungan Kepengurusan Dengan Directorial Relationship With		
		Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Shareholders	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Shareholders
Dadi Amanu Wiratama	Komisaris Independen Commissioner (Independent)	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Bagus Fuadhi	Komisaris Independen Commissioner (Independent)	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Jonas P. Hutagaol	Komisaris Commissioner	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Handri Handrasti	Komisaris Commissioner	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Dasrin	Komisaris Commissioner	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No

Keterangan:
1. RUPS Tahunan tanggal 31 Agustus 2022 mengangkat kembali dengan periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal RUPS Tahunan tersebut ditutup dan mengangkat dan mengangkat Dadi Amanu Wiratama sebagai Komisaris Utama.
2. RUPS Tahunan tanggal 14 September 2022 mengangkat kembali dengan periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal RUPS Tahunan tersebut ditutup dan mengangkat dan mengangkat Dasrin sebagai Komisaris.

Description:
1. Annual GMS dated September 31, 2022 reappointed by term of 4 (four) years as from the date of the Annual GMS and appointed Dadi Amanu Wiratama as President Commissioner.
2. Annual GMS dated September 14, 2022 reappointed by term of 4 (four) years as from the date of the Annual GMS and appointed Dasrin as Commissioner.

Selain itu, seluruh anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang menjabat sepanjang tahun 2022 tidak memiliki hubungan afiliasi di perusahaan lain yang dibentuk sesuai dengan ketentuan internal Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

In addition, all members of the Company's Board of Commissioners who served throughout 2022 had no affiliation in other companies that were established in accordance with the Company's internal provisions and applicable laws and regulations.

Hubungan Afiliasi Anggota Direksi
Affiliation of Members of the Board of Directors

Anggota Direksi harus mampu menjalankan tugas pengelolaan Perusahaan secara independen dan bebas konflik kepentingan demi kepentingan dan nilai Perusahaan dan pemangku kepentingan dalam jangka panjang. Khususnya dalam hal terdapat hubungan afiliasi. Hubungan afiliasi yang dimaksud meliputi hubungan kerja/usaha antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dengan sesama anggota Direksi serta anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali. Perusahaan Hubungan afiliasi anggota Direksi yang menjabat sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Members of the Board of Directors must be able to carry out the management function of the Company independently and free of conflicts of interest solely for the sake of maintaining the value of the Company and stakeholders in the long term, especially in the event that there is an affiliation. Affiliation includes family and financial relationships between members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and fellow members of the Board of Directors as well as members of the Board of Directors and Major and/or Controlling Shareholders of the Company. Affiliations of members of the Board of Directors who served throughout 2022 are as follows:

Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris
Affiliation of Members of the Board of Directors

Direksi/ Direktors	Jabatan/ Position	Hubungan Keluarga Dengan/ Family Relationship With			Hubungan Keuangan Dengan/ Financial Relationship With		
		Dewan Komisaris/ Board of Commissioners	Direksi/ Board of Directors	Pemegang Saham/ Shareholders	Dewan Komisaris/ Board of Commissioners	Direksi/ Board of Directors	Pemegang Saham/ Shareholders
[illegible]	[illegible]	Tidak/ No	Tidak/ No	Tidak/ No	Tidak/ No	Tidak/ No	Tidak/ No
[illegible]	[illegible]	Tidak/ No	Tidak/ No	Tidak/ No	Tidak/ No	Tidak/ No	Tidak/ No
[illegible]	[illegible]	Tidak/ No	Tidak/ No	Tidak/ No	Tidak/ No	Tidak/ No	Tidak/ No
[illegible]	[illegible]	Tidak/ No	Tidak/ No	Tidak/ No	Tidak/ No	Tidak/ No	Tidak/ No
[illegible]	[illegible]	Tidak/ No	Tidak/ No	Tidak/ No	Tidak/ No	Tidak/ No	Tidak/ No
[illegible]	[illegible]	Tidak/ No	Tidak/ No	Tidak/ No	Tidak/ No	Tidak/ No	Tidak/ No
[illegible]	[illegible]	Tidak/ No	Tidak/ No	Tidak/ No	Tidak/ No	Tidak/ No	Tidak/ No
[illegible]	[illegible]	Tidak/ No	Tidak/ No	Tidak/ No	Tidak/ No	Tidak/ No	Tidak/ No

Keterangan:
1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]

Description:
1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]

Dalam kurun waktu anggota Direksi Perusahaan yang menjabat sepanjang tahun 2023 tidak memiliki hubungan afiliasi di perusahaan lain yang dilarang sesuai dengan ketentuan internal Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

In addition, all members of the Company's Board of Directors who served throughout 2023 had no affiliation in other companies that were prohibited in accordance with the Company's internal provisions and applicable laws and regulations.

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Beserta Keluarga

Share Ownership of Members of the Board of Commissioners and Members of the Board of Directors and Their Families

Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi secara berkala melaporkan kepemilikan saham/opsi baik atas nama pribadi maupun keluarga pada Perseroan dan/atau perusahaan lainnya untuk dicatat dalam Daftar Khusus. Kepemilikan saham Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi yang menjabat sepanjang tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Members of the Board of Commissioners and Members of the Board of Directors periodically report their share ownership both in their personal and family names in the Company and/or other companies to be recorded in the Special Register. The share ownership of Members of the Board of Commissioners and Members of the Board of Directors who served throughout 2021 is as follows:

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Beserta Keluarga

Share Ownership of Members of the Board of Commissioners and Their Families

Nama/Jabatan Name/Position	Keterangan Description	Kepemilikan Saham Oleh Pribadi Pada Personal Share Ownership in		Kepemilikan Saham Oleh Keluarga Pada Family Share Ownership in	
		Perseroan Company	Perusahaan Lain Other Companies	Perseroan Company	Perusahaan Lain Other Companies
Zadeng Hidayat	Komisaris Utama President Commissioner	-	-	-	-
Evi Haryati	Komisaris Utama President Commissioner	-	-	-	-
Kamaruddin	Komisaris Commissioner	-	-	-	-
Edin Basrie Wardana	Komisaris (Independen) Commissioner (Independent)	-	-	-	-
Bagus Pulunggono	Komisaris (Independen) Commissioner (Independent)	-	-	-	-
Gilarso P. Sukapto	Komisaris Commissioner	-	-	-	-
Vandita Kusumgul	Komisaris Commissioner	-	-	-	-
Kurniadi	Komisaris Commissioner	-	-	-	-

Keterangan:
1. Profil Zadeng Hidayat sebagai Komisaris Utama sebelumnya sebagai Komisaris Independen sejak 30 September 2020 berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-361/MBU/09/2020 tanggal 30 September 2020.
2. Profil Evi Haryati sebagai Komisaris Utama sebelumnya sebagai Komisaris Independen sejak 22 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-559/MBU/12/2020 tanggal 22 Desember 2020.

Description:
1. Zadeng Hidayat's profile as President Commissioner previously as Independent Commissioner since September 30, 2020 based on Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number SK-361/MBU/09/2020 dated September 30, 2020.
2. Evi Haryati's profile as President Commissioner previously as Independent Commissioner since December 22, 2020 based on Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number SK-559/MBU/12/2020 dated December 22, 2020.

Kepemilikan Saham Anggota Direksi Beserta Keluarga

Share Ownership of Members of the Board of Directors and their Families

Uraian / Description	Nama / Position	Kepemilikan Saham Oleh Pribadi Yang Bersangkutan / Personal Share Ownership In		Kepemilikan Saham Oleh Keluarga Yang Bersangkutan / Family Share Ownership In	
		Perusahaan / Company	Perusahaan Lain / Other Companies	Perusahaan / Company	Perusahaan Lain / Other Companies
Darmawan Prasodjo	Direktur Utama / President Director	-	√	-	√
Evy Haryadi*	Direktur Utama / President Director	-	√	-	-
M. Yusuf Ansyari	Direktur Energi Primer / Primary Energy Director	-	-	-	-
Nicke Widyawati	Direktur Energi Primer / Primary Energy Director	-	-	-	-
Amir Rosidin	Direktur Pengembangan Usaha / Business Development Director	-	-	-	-
Muhamad Ikhsan Asaad	Direktur Pengembangan Bisnis / Business Development Director	-	-	-	-
Evy Haryadi*	Direktur Keuangan / Finance Director	-	-	-	-
Djoko Rahardjo Abumanan	Direktur Keuangan / Finance Director	-	-	-	-
Amir Rosidin	Direktur Manajemen Human Capital / Human Capital Management Director	-	-	-	-

Keterangan:
1. Sejak tanggal 31 September 2022, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 0001.K/DIR/2022 tanggal 30 September 2022 tentang Perubahan Susunan Direksi PT PLN Nusantara Power.
2. Sejak tanggal 31 September 2022, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 0002.K/DIR/2022 tanggal 30 September 2022 tentang Perubahan Susunan Direksi PT PLN Nusantara Power.
3. Sejak tanggal 31 September 2022, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 0003.K/DIR/2022 tanggal 30 September 2022 tentang Perubahan Susunan Direksi PT PLN Nusantara Power.

Description:
1. Since 30th September 22, 2022, according to Decision Letter of Directors No. 0001.K/DIR/2022 dated 30th September 2022 regarding Changes in the Composition of PT PLN Nusantara Power.
2. Since 30th September 22, 2022, according to Decision Letter of Directors No. 0002.K/DIR/2022 dated 30th September 2022 regarding Changes in the Composition of PT PLN Nusantara Power.
3. Since 30th September 22, 2022, according to Decision Letter of Directors No. 0003.K/DIR/2022 dated 30th September 2022 regarding Changes in the Composition of PT PLN Nusantara Power.

Hubungan Kerja Dewan Komisaris Dengan Direksi

Work Relationship between the Board of Commissioners and Board of Directors

Hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi merupakan implementasi atas tata kelola Perusahaan yang mengacu pada Singapore Code dan Corporate Governance Code sebagai payung kebijakan atas pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik di lingkungan Perusahaan. Sebagai organ utama tata kelola perusahaan, Dewan Komisaris dan Direksi menjalankan hubungan kerja secara checks and balances serta bertanggung jawab kepada para pemegang saham. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan Perusahaan yang dijalankan Direksi serta memberikan rekomendasi dalam rangka memastikan bahwa kebijakan atas pengelolaan Perusahaan yang disetujui Direksi semata-mata demi kepentingan jangka panjang Perusahaan. Direksi menyampaikan laporan tahunan atas kegiatan dan capaian program kerja yang telah ditetapkan serta mengusulkannya kepada dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris dalam rangka pengambilan keputusan strategis. Corporate Governance Code mengatakan bahwa prinsip-prinsip Hubungan Kerja Direksi Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut :

1. Dewan Komisaris menghormati tugas dan wewenang Direksi dalam mengelola Perusahaan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan.
2. Direksi menghormati tugas dan wewenang Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat terhadap kebijakan pengelolaan Perusahaan sesuai dengan Anggaran Anggaran Dasar.
3. Setiap hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris merupakan hubungan yang tercatat formal kelembagaan, dalam arti corporate dilakukan oleh suatu mekanisme baku atau semacam demi yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Sarana komunikasi/alat baku yang digunakan dalam hubungan kerja Direksi Dewan Komisaris selain menggunakan surat-menyurat secara manfaat juga menggunakan Tata Laksana Surat dan Kearsipan berdasarkan Office Automation yang berlaku di Perusahaan dan atau menggunakan email.
5. Semua hubungan kerja yang bersifat informal dapat dilakukan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, namun tidak dapat digunakan sebagai kebijakan formal, sebelum melalui mekanisme atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan.
6. Dewan Komisaris berhak memperoleh informasi Perusahaan secara tepat waktu, lengkap, akurat dan akurat.

7. Direksi bertanggung jawab atas penyampaian informasi Perusahaan kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu, lengkap, akurat dan akurat.

The work relationship between the Board of Commissioners and Board of Directors is an implementation of the corporate governance that refers to the Articles of Association and Corporate Governance Code as an umbrella policy for the implementation of good corporate governance within the Company. As the main organ of corporate governance, the Board of Commissioners and Board of Directors carry out a work relationship in checks and balances and oversight for the administration of the Company's business. The Board of Commissioners supervises the implementation of the Company's management duties carried out by the Board of Directors and provides recommendations in order to ensure that decisions on the management of the Company taken by the Board of Directors are solely for the long-term interests of the Company. The Board of Directors reports periodically on the activities and achievements of the work programs that have been determined and considers the decisions and recommendations of the Board of Commissioners in every strategic decision making. The Corporate Governance Code explains that the principles of the Work Relationship between the Board of Commissioners and Board of Directors are as follows:

1. The Board of Commissioners respects the duties and authorities of the Board of Directors in managing the Company as has been regulated in the laws and regulations and the Company's Articles of Association.
2. The Board of Directors respects the duties and authority of the Board of Commissioners to supervise and provide advice on the Company's management policy in accordance with the provisions of the Articles of Association.
3. Every work relationship between the Board of Directors and Board of Commissioners is a formal institutional relationship, in the sense that it is always based on a standard mechanism or correspondence that can be accounted for.
4. The standard correspondence facilities used in the work relationship of the Board of Directors with Board of Commissioners in addition to using hardcopy correspondence also use the Management of Letters and Archives based on Office Automation applicable in the Company and/or via email.
5. Any informal work relationship can be conducted by each member of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, but cannot be used as a formal policy before going through a mechanism or correspondence that can be accounted for.
6. The Board of Commissioners has the right to obtain Company information in a timely, complete, reasonable and accurate manner.
7. The Board of Directors is responsible for the submission of Company information to the Board of Commissioners in a timely, complete, reasonable and accurate manner.

Ketentuan terkait hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi diuraikan lebih lanjut pada Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (Board Manual) yang terakhir telah ditetapkan pada tanggal 15 November 2016. Board Manual mengatakan tahapan aktivitas secara lebih detail, sistematis, mudah dipahami, dan dapat dijalankan dengan konsisten. Substansi hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi yang diatur dalam Board Manual meliputi aspek diantaranya:

1. Tata Laksana Kerja Terkait Jabatan;
2. Tata Laksana Kerja Terkait Tata Kepemimpinan;
3. Tatalaksana Kerja Terkait Pelaksanaan dan Pengawasan Operasional Perusahaan;
4. Alur Kerja Kewenangan Direksi yang Memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris dan Kewenangan Direksi yang Memerlukan Persetujuan RUPS Sebelum Mendapatkan Tanggapan Tertulis Dari Dewan Komisaris;
5. Tata Tertib Rapat Direksi dan Dewan Komisaris (Rapat Pengawasan dan Rapat Konsultasi).

Provisions related to the work relationship between the Board of Commissioners and Board of Directors are further elaborated in the Board of Directors and Board of Commissioners' Work Procedures (Board Manual) which was last determined on November 15, 2016. The Board Manual explains the stages of activity in a structured, systematic, easy to understand manner, and can be carried out consistently. The provisions of the work relationship between the Board of Commissioners and Board of Directors regulated in the Board Manual cover aspects, among others:

1. Work Procedures Related to Positions;
2. Work Procedures Related to the Line of Authority;
3. Work Procedures Related to the Implementation and Supervision of Company Operations;
4. Workflow of the Authorities of the Board of Directors that Require the Approval of the Board of Commissioners and the Authorities of the Board of Directors that Require GMS Approval After Obtaining a Written Response from the Board of Commissioners;
5. Meeting Rules of the Board of Directors and Board of Commissioners (Supervisory Meeting and Consultative Meeting).

Keputusan atau Kewenangan Direksi yang Memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris

Decision or Authority of the Board of Directors that Requires the Approval of the Board of Commissioners

Keputusan-keputusan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris untuk:

1. Menggunakan aktiva tetap untuk penyertaan (modal jangka panjang) (jangka dengan 1 tahun) tahun);
2. Mengadakan transaksi, kontrak, perjanjian, kesepakatan dan / atau keterikatan dengan pihak ketiga / pihak lain dengan ketentuan ketentuan, kecuali, kontrak atau kegiatan tersebut nilai per transaksinya maksimal 2% (dua persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari ekuitas Perusahaan yang telah diaudit tahun buku terakhir. Pembatasan tersebut dikecualikan hanya mengenai tahun anggaran, pelaksanaan kerjasama konsolidasi/anggota dimaksud;
3. Memberikan atau memberikan persetujuan jangka menengah panjang (lebih dari 1 (satu) tahun), berupa pinjaman (utang atau piutang) yang diberikan kepada anak perusahaan dengan ketentuan/persetujuan kepada anak perusahaan dikecualikan kepada Dewan Komisaris. Selain itu Pinjaman kepada anak perusahaan, termasuk pinjaman jangka pendek, dilaporkan kepada Dewan Komisaris melalui Laporan Manajemen Triwulanan;
4. Menghapusbukan dan/pemindahan piutang macet dan penyebaran kurang mati;
5. Melepaskan aktiva tetap berupa dengan untuk ekonomis yang lama berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun.

The following actions in the Board of Directors must obtain prior written approval from the Board of Commissioners for:

1. Pledging property, plant and equipment for short-term credit withdrawal (up to 1 (one) year);
2. Entering into transactions, contracts, agreements, agreements and/or engagements with business entities/other parties with the provisions that the work, cooperation, contract or activity value per transaction exceeds 2% (two percent) up to 10% (ten percent) of the Company's equity that has been audited in the last fiscal year. The restriction is provided without regard to the period of implementation of the cooperation/consolidation/activity concerned;
3. Providing or granting medium/long term loans (more than 1 (one) year), except bank guarantee or normalized) granted to subsidiaries with the provisions that loans to subsidiaries are reported to the Board of Commissioners. All Loans to subsidiaries, including short-term loans, are reported to the Board of Commissioners through the Quarterly Management Report;
4. Writing off bad debts and doubt inventory;
5. Disposing of movable property, plant and equipment with an economic life generally applicable in the industry of up to 5 (five) years.

5. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) level di bawah Direksi, tidak termasuk penganglatan pejabatnya.
7. Melakukan perubahan pos anggaran maupun penyesuaian dalam Rencana Biaya dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang telah ditetapkan.
8. Pengajuan calon Perusahaan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan yang tidak memenuhi kriteria tertentu sebelum kepada Pemegang Saham.

5. Determining the organizational structure of 1 (one) level below the Board of Directors, excluding the appointment of its officers.
7. Making changes to budget items and appropriations in the Company's Annual Budget and Operational Plan (RKAP) that have been determined.
8. Proposing Company representatives to become candidates for members of the Board of Directors and Board of Commissioners in joint ventures and/or subsidiaries that do not meet the criteria of significant contribution to the Company under laws, strategic, value.

Untuk keputusan atau kewenangan Direksi yang memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris mengacu kepada Anggaran Dasar Perusahaan sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Permohonan Persetujuan / Rekomendasi Usulan Rancangan Anggaran Investasi Pengembangan Usaha (RIAP 2023) – 4 Oktober 2022.
2. Usulan Pengangkatan Kepala Satuan Pengawasan Internal – 8 Desember 2022.

Related to the decisions or authority of the Board of Directors that require the Approval of the Board of Commissioners referring to the Company's Articles of Association throughout 2022 are as follows:

1. Request for Approval/Recommendation on Proposed Revised/Update of Business Development Investment Budget of the 2022 (2022 RIAP) – October 4, 2022.
2. Proposed Appointment of Head of Internal Audit Unit – December 8, 2022.

Keputusan atau Kewenangan Direksi yang Memerlukan Persetujuan RUPS Setelah Mendapatkan Tanggapan Tertulis dari Dewan Komisaris

Keputusan atau Kewenangan Direksi yang Memerlukan Persetujuan RUPS Setelah Mendapatkan Decision or Authority of the Board of Directors that Requires GMS Approval After Obtaining Written Response from the Board of Commissioners

Direksi hanya dapat melakukan perbuatan-perbuatan setelah mendapat tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan persetujuan tertulis RUPS untuk tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Menggadaikan aktiva tetap untuk jaminan kredit pada memperpanjang lebih dari 1 (satu) tahun).
2. Melakukan penyertaan modal pada perusahaan lain, termasuk penambahan modal pada hasil Perusahaan tersebut penyertaan patungan.
3. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan.
4. Melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan.
5. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan.
6. Mengikat Perusahaan sebagai penjamin (borg) atau avalis dan jaminan lainnya (Corporate Guarantee dan sejenisnya), kecuali untuk penerbitan Standby Letter of Credit/SBLC, Letter of Credit/LC yang timbul karena transaksi bisnis telah mengacu pada Ketentuan ayat 8 huruf b Pasal 11 Anggaran Dasar Perusahaan.

The Board of Directors may only conduct actions after obtaining written feedback from the Board of Commissioners and written approval from the GMS for the following actions:

1. Pledging property, plant and equipment for medium/long-term credit withdrawals (more than 1 (one) year).
2. Investing capital in other companies, including additional capital to subsidiaries and/or joint ventures.
3. Establishing subsidiaries and/or joint ventures.
4. Disposing of capital investment in subsidiaries and/or joint ventures.
5. Conducting merger, consolidation, acquisition, separation and dissolution of subsidiaries and/or joint ventures.
6. Binding the Company as a guarantor (borg or avalis) and other guarantees (Corporate Guarantee and the like), except for the issuance of Standby Letter of Credit/SBLC, Letter of Credit/LC arising due to business transactions with refers to the provisions of paragraph 8 letter b Article 11 of the Company's Articles of Association.

1. Mengadakan hubungan, kontrak, perjanjian, kesepakatan dan atau kerjasama dengan badan usaha/pihak lain dengan ketentuan sebagian kerjasama, kontrak atau bagian tersebut nilai per transaksinya melebihi kewenangan Dewan Komisaris sebagaimana ditetapkan pada Pasal 11 ayat (3) huruf b Anggaran Dasar Perusahaan atau diterbukan lain oleh Anggaran Dasar deviasi (%)/(R);
8. Tidak meneglah/ajuj (tuding macet yang telah dihapusbukukan;
9. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap Perusahaan kecuali aktiva tetap tersebut dengan umur ekonomis yang telah berlaku dalam industri pada umumnya semua dengan 5 (lima) tahun;
10. Melakukan aksi profit organisasi Perusahaan;
11. Menetapkan dan merubah logo Perusahaan;
12. Melakukan tindakan-tindakan selaingannya ditetapkan pada ayat 8 Pasal 11 Anggaran Dasar Perusahaan, yang telah ditetapkan dalam RKAP, termasuk melakukan perubahan RKAP, berubah untuk perubahan dan anggaran maupun perumbahannya wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris;
13. Membentuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan yang berdampak bagi Perusahaan;
14. Melakukan Daya Perusahaan yang diantar tidak ada satu untuk kegiatan yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan;
15. Menguasakan wakil Perusahaan untuk menjadi salah anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan atau anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perusahaan dan/atau bernilai strategis.

Terkait transaksi atau kewenangan Direksi yang memerlukan persetujuan RUPS adalah mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris mengacu kepada Anggaran Dasar Perusahaan sebagaimana tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Usulan Penempatan Wakil Perusahaan pada Anak Perusahaan - 12 Januari 2021;
2. Pemberitahuan Penambahan Penugasan Non Operasi Pelaksana Kegiatan Pembangkit dan Pengelolaan Aset pleant Management Contract PLTG Sebalang (2x17 MW) dan PLTG Belangkut (1x30 MW) untuk Pabrik Tromolasi PT. AMERAY di Halmahera Timur - 29 September 2021;
3. Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Akta Komposisi Pemegang Saham dalam Rangka Pembentukan Holding Subholding PT PLN (Persero) Sehat Legal Final Shate - 6 Desember 2021;
4. Entering into transactions, contracts, agreements, agreements and/or cooperation with business entities/other parties with the provisions that the work, cooperation, contract or activity value per transaction exceeds the authority of the Board of Commissioners as referred to in Article 11 paragraph (3) letter b of the Company's Articles of Association or is determined otherwise by the Articles of Association and/or (GR);
5. Not collecting bad debts that have been written off;
6. Releasing and writing off the Company's property, plant and equipment, except for movable property, plant and equipment with an economic life commonly applicable in the industry in general of up to 5 (five) years;
7. Determining the Company's organizational structure;
8. Determining and changing the Company's logo;
9. Conducting actions as referred to in paragraph 8 of Article 11 of the Company's Articles of Association, which have not been stipulated in the RKAP, including making changes in the RKAP, except for changes in budget items and their utilization must obtain approval from the Board of Commissioners;
10. Establishing foundations, organizations and/or associations either directly or indirectly related to the Company that have an impact on the Company;
11. Delegating Powers to the Company's employees for the activities of foundations, organizations and/or associations both directly and indirectly related to the Company;
12. Delegating Company representatives to become candidates for members of the Board of Directors and Board of Commissioners in joint ventures and/or subsidiaries that provide significant contributions to the Company and/or have strategic value.

Related to the decision on authority of the Board of Directors that requires GMS approval after obtaining a written response from the Board of Commissioners referring to the Company's Articles of Association throughout 2021 are as follows:

1. Proposal for Placement of Company Representatives in Subsidiary - January 12, 2021;
2. Request for Issuance of Assignment of Executive Work Plan, Power Plant and Asset Management Contract for Westerning (2x17 (2x17 MW) and Belangkut (1x30 (1x30 MW) for PT AMERAY Tromolasi Plant in East Halmahera - September 29, 2021;
3. Application for Amendments to the Articles of Association and Corporate Actions in Connection with the Establishment of PT PLN (Persero) Subholding Holding in Legal Final State Stage - December 6, 2021;

Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Policy on the Composition Diversity of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dapat memberikan pandangan yang lebih luas dan komprehensif terkait dengan efektivitas pengambilan keputusan dan strategi pengembangan Perusahaan sehingga menghasilkan keputusan yang lebih efektif untuk memberikan nilai Perusahaan secara berkelanjutan. Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dipilih dan ditetapkan sedemikian rupa sehingga komposisi Dewan Komisaris sebagai pelaksana fungsi pengawasan dan komposisi Direksi sebagai pelaksana fungsi pengelolaan sebisik beragam serta masing-masing telah dan para Direksi dan Komisaris yang memiliki kemitraan, pengalaman, pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan untuk mendukung peran pengelolaan Direksi dan peran pengawasan Dewan Komisaris. Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dan Profil Direksi.

The composition diversity of the Board of Commissioners and Board of Directors can provide a broader and more comprehensive perspective related to the company's decision-making and the Company's development strategy, thus resulting in more effective decisions to create the Company's value in a sustainable manner. Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors are selected and determined in such a way so that the composition of the Board of Commissioners as the executor of the supervisory functions and the composition of the Board of Directors as the executor of the management functions are diverse and each consists of directors and commissioners who have the commitments, knowledge, ability, experience and expertise needed to carry out the management role of the Board of Directors and the supervisory role of the Board of Commissioners. The composition diversity of the Board of Commissioners and Board of Directors can be seen in the Board of Commissioners Profile and Board of Directors Profile sections.

Kebijakan keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi secara tertulis mengacu pada Anggaran Dasar ketentuan Perhimpunan Saham dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai bentuk implementasi atas kebijakan tersebut Perusahaan melalui Perhimpunan Saham Dewan Komisaris dan Direksi telah menandatangani Kontrak Manajemen yang didalamnya memuat KPI terkait komposisi Perempuan dalam nominated talent dan milenial (<32 tahun) dalam nominated talent. Sehubungan adanya Perhimpunan Saham dalam RUPS bahwa Perusahaan harus memperhatikan dan melaksanakan target-target komposisi talent perempuan dan talent milenial mengacu pada petunjuk teknis kinerja talenta dari PLN kepada Anak Perusahaan. Perusahaan telah melakukan beberapa upaya dalam rangka memenuhi target tersebut diantaranya:

1. Melakukan pemetaan talenta mengacu pada pedoman konten manajemen yang ditetapkan oleh PT PLN (Persero) selaku Pemegang Saham.
2. Menyampaikan data talenta kepada PT PLN (Persero) dengan jumlah nominasi talenta 28,15% dari total PT PLN dan jumlah nominasi talenta.
3. Implementasi program pengembangan nominasi talenta yang antara lain melalui kompetensi dalam mendukung program strategis internal antara lain excellent stakeholder management, business ecosystem, global leadership training, leadership community dan coaching cross networking & collaboration.
4. Melakukan evaluasi talenta secara periodik mengacu pada petunjuk teknis terkait manajemen talenta sebagai bagian penyiapan suksi Perusahaan.

The written policy on the composition diversity of the Board of Commissioners and Board of Directors refers to the Articles of Association, the provisions of the Shareholders and the prevailing laws and regulations. As a form of implementation of this policy, the Company through the Shareholders' General of Commissioners and Board of Directors has signed a Management Contract which contains KPIs related to the percentage of females in nominated talent and millennial (<32 years old) in nominated talent. As directed by the Shareholders in the GMS, the Company is required to take into account and carry out targets for the composition of women talent and millennial talent, referring to the technical guidelines for talent performance from PLN to its Subsidiaries. The Company has made several efforts in order to meet these targets, including:

1. Conducting talent mapping referring to the management content guidelines provided by PT PLN (Persero) as the Shareholder.
2. Submitting talent data to PT PLN (Persero) with the number of female talents of 28.15% and millennials of 71.43% from the number of nominated talents.
3. Implementation of various talent development programs that are aligned with competency needs in supporting corporate strategic programs, including excellent stakeholder management, business ecosystem, leadership training, leadership community and coaching cross networking & collaboration.
4. Conducting periodic implementation assessments referring to the Board of Directors' regulations related to succession management as part of the preparation of the Company's cadres.

Nominasi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Nomination and Remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners

Sumber daya manusia merupakan aspek kritis faktor penting untuk menjaga keberlangsungan bisnis. Perusahaan memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai di lingkungan PLN Nusantara Power salah satunya dengan menjalankan fungsi nominasi. Setiap individu di lingkungan Perusahaan memiliki kesempatan yang sama untuk mendudukii jabatan dalam struktur organisasi Perusahaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan juga memberikan imbalan atau penghargaan atas pelaksanaan tanggung jawab dan kontribusinya dalam menjalankan dan mengendalikan Perusahaan melalui kebijakan Remunerasi. Sebagian anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT PLN (Persero), ketentuan Nominasi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris secara khusus mengacu pada Peraturan Menteri BUMN dan kebijakan internal PT PLN (Persero) sebagai pemegang saham utama dan pengendali.

Human resources is one of the key factors to maintain business continuity. The Company ensures the availability of adequate human resources within PLN Nusantara Power, including by running the nomination function. Every individual within the Company has an equal opportunity to occupy a position in the Company's organizational structure based on the provisions of the applicable laws and regulations. The Company also provides rewards or awards for carrying out their responsibilities and contribution in running and directed by the Company through the Remuneration policy. As a subsidiary of a State-Owned Enterprises (SOE), namely PT PLN (Persero), provisions for the Nomination and Remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners specifically refers to the Minister of SOE regulations and PT PLN (Persero) policy as the majority and controlling shareholder.

Nominasi Direksi dan Dewan Komisaris

Nomination of the Board of Directors and the Board of Commissioners

Nominasi Direksi dan Dewan Komisaris PLN Nusantara Power merupakan pada Peraturan Menteri BUMN Nomor Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/08/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2011 Tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara. Sukses Oleh karenakan bagian dari penerapan fungsi nominasi di tingkat manajerial tertinggi dalam rangka mempersiapkan organisasi untuk melanjutkan tonggak kepemimpinan Perusahaan. Proses pemilihan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dilakukan melalui serangkaian proses yaitu, penjaringan, pemilihan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris serta penetapan. Dalam Calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan/kriteria perusahaan melarat dan persyaratan lain yang telah ditetapkan.

Nomination for PLN Nusantara Power's Board of Directors and the Board of Commissioners refers to SOE Minister Regulation No. PER- 10/MBU/08/2020 concerning Amendment of the SOE Minister Regulation No. PER-03/MBU/2011 concerning Guidelines for the Appointment of Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the Subsidiaries of State-Owned Enterprises. Successor policy for the Board of Directors is part of the implementation of the nomination function at the highest managerial level in order to prepare organization to continue the Company's leadership milestones. Candidate appointment for the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners is conducted through a series of processes, namely selection, evaluation and determination of candidates for the Board of Directors and the Board of Commissioners. Prospective candidates for the Board of Directors and Board of Commissioners are required to fulfill the established formal requirements, material requirements and other requirements.

Mekanisme Nominasi (Lanjut)
Nomination Mechanism for The Board of Directors

Pembentukan Tim Evaluasi
Evaluation Team Establishment

Penunjang Kantor melaksanakan Tim Evaluasi untuk :
- Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap Calon Direksi
- Melaporkan hasil evaluasi dan penilaian secara independen kepada Direksi & BOD Penunjang Kantor agar memberikan pertimbangan
- Menyusun tata cara evaluasi yang meliputi diantaranya alat Direksi & BOD Penunjang Kantor agar memberikan alat Direksi & BOD Penunjang Kantor dapat memberikan alat dan
- Melakukan tugas BOD/ lain diantaranya

Tim Independen melakukan Evaluation Team for the following:
- Checking and assessing the prospective Board of Directors
- Determining the fit and proper of the evaluation to be determined by the Main Council Enterprises Board of Directors Shareholders in order to obtain the approval
- Preparing evaluation results determined by SOE Board of Directors Shareholders to be determined at the Board of Commissioners under Ministry of State Owned Enterprises of Indonesia, if necessary

Proses Pencalonan
Election Process

- Tim Evaluasi melakukan evaluasi dan menyampaikan hasil Calon Direksi dan kandidat kepada
- Tim Evaluasi melakukan proses musyawarah internal, dan pengambilan keputusan yang dilakukan (PT), dokumen lain, dan informasi yang diperoleh untuk menyusun Calon Direksi Calon yang telah melakukan proses di proses yang telah melalui tahapan tersebut.
- Tim Evaluasi menyampaikan Calon Direksi Calon yang telah lulus Direksi & BOD Penunjang Kantor untuk menyusun pertanggungjawaban
- Tim Evaluasi Team receives the recommendations and relevant information concerning the prospective Board of Directors from various sources
- Tim Evaluasi Team conducts selection based on deliberation, administrative criteria and requirements (PT), other documents, and other information obtained by polite the candidates to the long and well, all stated & What participants in Candidates
- Tim Evaluasi Team submits the Prospective Candidate and long form to the State Owned Enterprises Board of Directors Shareholders for approval

Proses Penetapan
Determination Process

- Direksi & BOD Penunjang Kantor menetapkan evaluasi calon dan hasil Penilaian untuk rekomendasi. 3 orang Calon Direksi ini yaitu untuk diproses ditugaskan Direksi Kandidat
- Direksi & BOD Penunjang Kantor menugaskan Corsec Division untuk dilanjutkan dalam RUPS Luar Biasanya menyusun ditugaskan Direksi Kandidat
- Kandidat Penunjang Kantor untuk dalam RUPS ringkas di luar RUPS menetapkan calon Direksi kepada sebagai ditugaskan Direksi Kandidat.
- The Board of Directors or SOE Shareholders conducts a final evaluation of the candidates recommended by determine 1 (one) candidate for the position of member of the Board of Directors of the Company.
- The Board of Directors of the SOE Shareholder proposes 1 candidate for the Board of Directors to be determined at the EGM of the Subsidiary to become a member of the Company's Board of Directors.
- Shareholders' resolution took at the EGM and made the EGM approved the election candidate as members of the Company's Board of Directors

Proses Penilaian
Assessment Process

- Tim Evaluasi dapat menyusun jadwal dan waktu undangan Kandidat untuk melakukan Penilaian yang dipersiapkan.
- Tim Evaluasi melakukan penilaian kepada 3 (tiga) calon untuk Direksi Calon Direksi yang memiliki pengalaman dalam Calon Direksi Calon yang telah yang akan diusulkan oleh Direksi & BOD Penunjang Kantor untuk melaporkan Calon calon Direksi yang akan diusulkan Direksi & BOD Penunjang Kantor untuk melaporkan Calon Direksi
- Tim Evaluasi menyampaikan Calon Calon Direksi dan kepada Direksi & BOD Penunjang Kantor untuk informasi Calon Direksi kepada
- The Evaluation Team may appoint experts as Professional consultants to take the Assessment Proceedings
- The Evaluation Team evaluates the CV and interviews of prospective Board of Directors' whose names are listed in the long list approved by the State Owned Enterprises Board of Directors Shareholders to select the best candidates to be proposed to the State Owned Enterprises Board of Directors Shareholders or the Nomination Board of Directors.
- The Evaluation Team submits Candidate and shortlist to the State Owned Enterprises Board of Directors Shareholders to determine the appointed Board of Directors

Mekanisme Nominasi Komisaris
The Board of Commissioners Nomination Mechanism

Pembentukan Tim Evaluasi
Evaluation Team Establishment

Pemegang Saham menominasikan Tim Evaluasi untuk:
- Melakukan penjaringan dan penilaian terhadap Calon Komisaris
- Menetapkan hasil evaluasi atas penilaian untuk ditindaklanjuti kepada Direksi (Untuk Pemegang Saham yang merupakan BUMN)
- Menyampaikan hasil evaluasi atas yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris Pemegang Saham yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris (Untuk Pemegang Saham selain Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan)

The Nomination established Evaluation Team for the following:
- Starting and executing the prospective Board of Commissioners
- Determining the final result of the evaluation to be delivered to the State Owned Enterprises' Board of Directors (for shareholders is state enterprises)
- Preparing evaluation result determined by GSS Board of Directors' Nominations to be delivered to the Board of Commissioners (public Ministry of State Owned Enterprises of Indonesia, if necessary)

Proses Penjaringan
Election Process

- Tim Evaluasi menerima usulan dari evaluasi terhadap Calon Komisaris dari berbagai sumber
- Tim Evaluasi melakukan media/pemeriksaan terkait dan pelaksanaan administrasi yang diterbitkan (CV, dokumen lain dan referensi yang diperlukan untuk menyusun Daftar Calon Calon yang telah memenuhi kriteria) dan Calon Calon Lainnya Sesuai yang tersedia
- Tim Evaluasi menyusunkan Daftar Calon Calon yang telah lengkap (Untuk BUMN) Pemegang Saham untuk mempersiapkan penyelenggaraan
- Tim Evaluasi Team evaluasi dan melakukan evaluasi untuk informasi yang diperlukan Board of Commissioners from various sources
- Tim Evaluasi Team memberi evaluasi dokumen dan dilakukan untuk dan kepadanya (CV, akta dokumen dan other information collected to select the candidates in the long list with at least 2 times prospective Candidates of the Board of Commissioners
- Tim Evaluasi Team submits the Prospective Candidate Long Song List to the State Owned Enterprises' Board of Directors (Shareholders for approval)

Proses Penetapan
Determination Process

- Dewan BUMN Pemegang Saham melakukan evaluasi atas dan hasil Penilaian untuk kemudian ( ) untuk Calon Komisaris sesuai untuk anggota yang dipilih anggota Rapat Komisaris
- Dewan BUMN Pemegang Saham menyetujui Calon Komisaris untuk Melakukan dalam RUPS Anak Perusahaan menyusun anggota Dewan Komisaris Perseroan
- Keputusan Pemegang Saham baik di dalam RUPS Anggota di luar RUPS anggotanya ( ) dan Komisaris sesuai sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan

State Owned Enterprises Board of Directors' Shareholders consents the final evaluation of the assessment results to determine ( ) and Candidates to assign the Board of Commissioners position

- State Owned Enterprises Board of Directors' Shareholders recommends the Candidates to be determined in the GMS of Subsidiaries to become the Company's Board of Commissioners member
- Shareholders decisions, both in the GMS, and outside the GMS, adhering to considerations by the Board of Directors to be granted as the Company's Board of Directors members

Proses Penilaian
Assessment Process

- Tim Evaluasi melakukan penilaian terhadap CV dan kelayakan bakal Calon Komisaris yang memenuhi persyaratan dalam Daftar Calon Calon yang telah disetujui oleh Dewan BUMN Pemegang Saham untuk selanjutnya dilakukan penilaian yang lebih mendalam kepada Calon Calon (BUMN) Pemegang Saham sebagai Calon Dewan
- Tim Evaluasi menyusunkan Daftar Calon Calon dan kelayakan Dewan BUMN Pemegang Saham untuk menetapkan Calon Dewan tersebut
- The Evaluation Team evaluates the CV and feasibility of prospective Board of Commissioners' person nominees for selection in the long list approved by the State Owned Enterprises' Board of Directors (Shareholders) to be selected from candidates to be proposed by the State Owned Enterprises' Board of Directors' (Shareholders), as the Prospective Board of Commissioners
- The Evaluation Team submits Candidates' List and Feasibility of the State Owned Enterprises' Board of Directors (Shareholders) to determine the elected Board of Commissioners

Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners

Kebijakan remunerasi dan pemberian fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris merupakan bentuk apresiasi dan kompensasi yang diberikan Perusahaan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab terkait tugas pengelolaan dan pengawasan Perusahaan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PT PLN (Persero) sebagai pemegang saham utama dan pengendali yang mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-11/MBU/12/2019 yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/08/2020, Nomor PER-02/MBU/08/2021, Nomor PER-13/MBU/08/2021, Nomor PER-19/MBU/09/2021, Nomor PER-13/MBU/11/2021 dan Nomor PER-13/MBU/09/2021. Perusahaan secara internal telah menetapkan kebijakan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi melalui Keputusan Bersama antara Direksi PT Pembangkitan Jawa Bali dan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali Nomor 004.K/011.KEB/2017 dan 011.A/DK-PJBI/2017 tentang Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT PJBI dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.

The Company provides remuneration policy and provision of other facilities for the Board of Directors and the Board of Commissioners as the appreciation and compensation for the implementation of duties and responsibilities related to the Company management and supervisory functions carried out in line with the provisions of PT PLN (Persero) as the main and controlling shareholder referring to Regulation of SOE Minister No. PER-11/MBU/12/2019 which was amended several times by Regulation of SOE Minister No. PER-03/MBU/08/2020, No. PER-02/MBU/08/2021, No. PER-19/MBU/09/2021, No. PER-13/MBU/11/2021 and No. PER-13/MBU/09/2021. The Company has internally established the remuneration policy for the Board of Commissioners and the Board of Directors through Joint Decree between the Board of Directors and the Board of Commissioners of PT Pembangkitan Jawa Bali No. 004.K/011.KEB/2017 and 011.A/DK-PJBI/2017 concerning Determination of Income for PT PJBI's Board of Directors and Board of Commissioners considering the provisions of the Company's Articles of Association.

Struktur Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Remuneration Structure for the Board of Commissioners and the Board of Directors

Struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama antara Direktur dan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali Nomor 004.K/011.KEB/2017 dan 011.A/DK-PJBI/2017 tentang Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT PJBI, terdiri dari komponen remunerasi berupa Gaji/Honorarium, Tunjangan, Fasilitas, dan Insentif Kinerja. Komponen remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris PT PJBI secara rinci dijabarkan sebagai berikut:

Remuneration Structure for the Company's Board of Directors and Board of Commissioners as stipulated in the Joint Decree between PT Pembangkitan Jawa Bali's Board of Directors and Board of Commissioners No. 004.K/011.KEB/2017 and 011.A/DK-PJBI/2017 concerning the Determination of Income for PT PJBI's Board of Directors and Board of Commissioners, consisting of remuneration components in the form of Salary/Honorarium, Benefits, Facilities and Performance Incentives. Remuneration components for the Company's Board of Commissioners and Board of Directors are detailed as follows:

Struktur Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Remuneration Structure for the Board of Directors and the Board of Commissioners

Komponen Remunerasi Remuneration Component	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
Gaji/Honorarium Salary/Honorarium	Honorarium Komisaris Utama ditetapkan sebesar 60% (enam puluh lima persen) dari Gaji Direksi Utama. Honorarium Komisaris ditetapkan sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari Honorarium Komisaris Utama. The President Commissioner's salary is set at 60% (sixty five percent) of the President Director's Salary. The Commissioners' salary is stipulated at 55% (fifty five percent) of the President Commissioner's salary.	Gaji Direksi Utama ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh Pemegang Saham. Gaji Direktur yang lain ditetapkan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari Gaji Direksi Utama. The President Director's salary is calculated by using internal guidelines determined by the Shareholders. The salary of other Directors is set at 95% (eighty five percent) of the President Director's Salary.

Komponen Remunerasi Remuneration Component	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
Tunjangan Cuti Tahunan dan Cuti Besar Annual and Grand Leave Benefits	Tidak diberikan Not granted	Tidak diberikan Not granted
Tunjangan Hari Raya Religious Holiday Allowance	Tunjangan hari raya diberikan sebesar 1 (satu) kali take home pay Holiday allowance is provided at once net salaries	Diberikan sebesar 1 (satu) kali THP Provided as 1 salary
Fasilitas/Tunjangan Perumahan Family Housing Benefits	-	1 (satu) Rumah dinas atau biaya perlengkapan rumah tangga, atau pengalihannya ditanggung sesuai hukum yang berlaku Perusahaan 1 (one) housing facility unit or appropriate homeware, utilities, and security equipment are granted entirely by the Company
Tunjangan Transportasi Transportation Allowances	Tunjangan transportasi diberikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Honorarium masing-masing anggota Dewan Komisaris. Transportation allowance is provided 20% (twenty percent) of the Salary of the Board of Commissioners member respectively	-
Asuransi Purna Jabatan Retirement Insurance	Asuransi mengacu asuransi purna jabatan anggota Direksi mutatis mutandis berlaku bagi penetapan asuransi purna jabatan anggota Dewan Komisaris. The provisions regarding retirement insurance for the Board of Directors members mutatis mutandis applied to the determination of retirement insurance for the Board of Commissioners members	Asuransi purna jabatan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Direksi yang berusia pensiun 2. Tidak diberikan untuk anggota Direksi yang berakhir jabatan PT PLN (Persero) atau jabatan Anak Perusahaan PT PLN (Persero) 3. Premi yang ditanggung oleh perusahaan yang sebesar 20% (dua puluh) dari penerimaan Gaji (gaji pokok dan tunjangan tetap) 4. Pembayaran premi, iuran atau tidak ada yang terakhir untuk asuransi purna jabatan sudah termasuk di dalamnya premi untuk asuransi kesehatan dan kematian. Retirement insurance is provided with the following conditions: 1. Date of the Board of Directors 2. Not provided for the Board of Directors member with PT PLN (Persero) or PT PLN (Persero) Subsidiaries employee status 3. The premium provided by the Company is an equal 20% (twenty five percent) of the Salary (1 one year) 4. Premiums, contributions, or other latest, support for the retirement insurance include the premiums for life insurance.
Fasilitas Kendaraan Vehicle Facility	-	Anggota Direksi hanya berhak atas 1 (satu) fasilitas kendaraan dari perusahaan. Fasilitas kendaraan termasuk di dalamnya biaya pemeliharaan dan operasional diberikan dengan memperhatikan kondisi keuangan perusahaan. The Board of Directors members are only entitled 1 (one) vehicle facility from the Company. Vehicle facility including maintenance and operational costs are provided by considering financial condition of the Company.
Fasilitas Kesehatan Healthcare Facilities	Diberikan mengacu fasilitas kesehatan anggota Direksi, mutatis mutandis berlaku bagi fasilitas kesehatan anggota Dewan Komisaris. Provision regarding health facilities for the Board of Directors members, mutatis mutandis apply to health facilities for the Board of Commissioners members	Fasilitas kesehatan diberikan berupa: a) Rawat jalan dan opname b) rawat inap dan opname c) medical check up Healthcare facilities are provided as follows: a) Outpatient care and treatment b) Inpatient care and treatment c) medical check up

Komponen Remunerasi Remuneration Component	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
Fasilitas Bantuan Hukum Legal Service Facilities	Fasilitas bantuan hukum diberikan apabila terjadi tuntutan hukum terhadap anggota Dewan Komisaris yang bukan merupakan tindakan kesengajaan atau kelalaian yang nyata.	Fasilitas bantuan hukum diberikan apabila terjadi tuntutan hukum terhadap anggota Direksi yang bukan merupakan tindakan kesengajaan atau kelalaian yang nyata.
Tunjangan Hari Raya Holiday Allowance	1 kali gaji per tahun 1 time salary per year	1 kali gaji per tahun 1 time salary per year
Tunjangan Perumahan Housing Allowance	20% dari gaji per bulan 20% of salary per month	20% dari gaji per bulan 20% of salary per month
Tunjangan Transportasi Transportation Allowance	10% dari gaji per bulan 10% of salary per month	10% dari gaji per bulan 10% of salary per month
Tunjangan Pengobatan Medical Allowance	10% dari gaji per bulan 10% of salary per month	10% dari gaji per bulan 10% of salary per month
Tunjangan Asuransi Insurance Allowance	10% dari gaji per bulan 10% of salary per month	10% dari gaji per bulan 10% of salary per month
Tunjangan Pensiun Pension Allowance	10% dari gaji per bulan 10% of salary per month	10% dari gaji per bulan 10% of salary per month
Tunjangan Kinerja Performance Incentive	Tantiem ditetapkan oleh Pemegang Saham dengan komposisi tertentu Tantiem is determined by the Shareholders with a certain composition	Tantiem ditetapkan oleh Pemegang Saham dengan komposisi tertentu Tantiem is determined by the Shareholders with a certain composition

Prosedur Penetapan Usulan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris
Proposal Procedure in Determining Remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors

Direksi dan Dewan Komisaris dapat melakukan kajian dan pengusulan remunerasi secara berkala setiap tahun untuk memperoleh persetujuan Pemegang Saham melalui RUPS sesuai dengan kebijakan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip kelaikan-kelaian, asas dan dapat dipertanggungjawabkan. Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris diusulkan melalui beberapa tahap termasuk di level pengawasan untuk dibuat dan memperoleh rekomendasi dari organ pengawasan yang menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi sebagai perwakilan Pemegang Saham sampai keputusan ditetapkan dalam RUPS. Penetapan Penghasilan berupa gaji/honorarium dan tantiem akan ditetapkan oleh Pemegang Saham dan disampaikan melalui surat penetapan tersendiri berdasarkan keputusan RUPS. Sedangkan untuk tunjangan dan fasilitas diberikan berdasarkan keberhasilan PT PLN (Persero) sesuai pencapaian pemegang saham mayoritas yang mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/07/2016, Nomor PER-07/MBU/08/2017, Nomor PER-09/MBU/08/2018 dan Nomor PER-11/MBU/11/2019 dan Nomor PER-13/MBU/12/2020 dan Nomor PER-19/MBU/05/2021 sebagai turunan dari Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, Mekanisme penetapan usulan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

The Board of Directors and Board of Commissioners may periodically review and propose remuneration each year to obtain the determination of Shareholders through the GMS in accordance with the applicable policies by taking into account the principles of prudence, fairness and accountability. The remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners is proposed through several stages including at the supervisory level to be reviewed and obtain recommendations from the supervisory organ that carries out the nomination and remuneration functions as the Shareholders representative until it is determined in the GMS. Determination of income in the form of salary/honorarium and tantiem will be conducted by the Shareholders and submitted through a separate determination letter based on the GMS decision. Meanwhile allowances and facilities are provided based on PT PLN (Persero) as the majority shareholder referring to the Minister of SOEs Regulation No. PER-02/MBU/07/2016, No. PER-07/MBU/08/2017, No. PER-09/MBU/08/2018 and No. PER-11/MBU/11/2019 and No. PER-13/MBU/12/2020 and No. PER-19/MBU/05/2021 as a version to the Minister of SOEs Regulation No. PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining Income of the Board of Directors, Board of Commissioners and Supervisory Board of State- Owned Enterprises. The mechanism for determining the proposed remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners is as follows:

Mekanisme Penetapan Usulan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Mechanism for Determining Remuneration Proposal for the Board of Directors and Board of Commissioners

Usulan Remunerasi oleh Direksi

Remuneration Proposal by the Board of Directors

Pembahasan dengan Komite Nominasi dan Remunerasi

Discussion with the Nomination and Remuneration Committee

Pembahasan dan Persetujuan oleh Dewan Komisaris

Discussion and Approval with the Board of Commissioners

Penyampaian Usulan

Proposal Submission

Penelitian dan Penetapan Remunerasi

Approval and Determination of Remuneration

Jumlah Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Total Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners

Dalam menentukan komponen remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan mempertimbangkan indikator penetapan remunerasi yang mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/2013 tentang pedoman penetapan penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN. Indikator penetapan remunerasi tersebut menjadi dasar pembahasan usulan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi antara lain:

The amount of each component of remuneration for the Company's Board of Commissioners and Board of Directors takes into account the indicators for determining remuneration which refers to the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-08/MBU/2013 concerning guidelines for determining income of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of SOEs. Indicators for determining remuneration are the basis for the formulation of the proposed remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors, among others:

1. Faktor ekonomi
2. Faktor kompleksitas usaha
3. Tingkat inflasi
4. Kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan
5. Faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan untuk tahun 2022 ditetapkan oleh Pemegang saham melalui Surat Keputusan Pemegang Saham Wajoffice Perusahaan No. SK-[illegible] tanggal 8 September 2022 Perihal Penetapan Penggunaan Laba Ditahan Tahun 2021, Penetapan Remunerasi 2022 dan Tantiem 2021 Direksi/Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali. Rincian remunerasi untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi adalah sebagai berikut:

1. Economic trade factor
2. Business complexity factor
3. Inflation Rate
4. Financial conditions and capabilities of the Company
5. Other relevant factors, and must not conflict with laws and regulations

Remuneration for the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for 2022 was determined by Shareholders through the Decree of the Company's Majority Shareholders No. SK-[illegible] dated September 8, 2022 regarding the Determination of the Use of Net Profit in 2021, Determination of the 2022 Remuneration, and the 2021 Tantiem of the Board of Directors/Board of Commissioners of PT Pembangkitan Jawa Bali. Details of remunerations for each member of the Board of Commissioners and member of the Board of Directors are as follows:

Remunerasi Dewan Komisaris

Remuneration for the Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	Imbalan Berbasis Waktu Time-Based Remuneration			Tunjangan Tetap Lain Other Fixed Allowances (Rp)	Honorarium atau Tunjangan 2022 Honorarium and Allowances in 2022 (Rp)	Tantiem 2021 2021 Tantiem (Rp)
		Gaji Per Bulan Salary Per Month (Rp)	Tunjangan Transportasi Per Bulan Transport Allowance per Month (Rp)	Total (Rp)			
[illegible]	Komisaris Utama President Commissioner	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Komisaris Utama President Commissioner	-	-	-	-	-	-
[illegible]	Komisaris Commissioner	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Komisaris Commissioner	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Komisaris Commissioner	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Komisaris (Independen) Commissioner (Independent)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-
[illegible]	Komisaris (Independen) Commissioner (Independent)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-
[illegible]	Komisaris Commissioner	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-

Keterangan:
1. Mulai Jabatan tanggal 14 September 2022 berdasarkan dengan Surat Dari Anthing Manajer Anggota Bersama di Jakarta untuk mengangkat dan Memberikan Anggota Komisaris Jakarta
2. Mulai Jabatan tanggal 13 Desember 2022 berdasarkan dengan Surat RUP Pemegang Perseroan sebagai Komisaris pada tanggalnya dan Memberikan Anggota Komisaris

Remarks:
1. Service term from September 14, 2022 according to Letter from Anthing Manajer as Board of Commissioners as well as signature and deliberation RUP. Agus Manajer as Member of Commissioners
2. Service Effectiveness December 13, 2022, according to Letter from RUP. Company Member as Commissioner as well as appointed and Commissioner RUP. Member of Commissioners

Remunerasi Direksi

Remuneration for the Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Remunerasi Bulanan Monthly Remuneration			[illegible] (Rp)	[illegible] 2023 (Rp)	Tantiem (Rp)
		[illegible] (Rp)	Tunjangan Transport [illegible] (Rp)	Total (Rp)			
[illegible]	Direktur Utama President Director	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Direktur Utama President Director	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-
[illegible]	Direktur Operasi Pembangkit [illegible] Director of [illegible] Plant Operation	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Direktur Pengembangan dan Niaga Director of Development and Commerce	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga Director of Business Development and Commerce	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-
[illegible]	Direktur Keuangan Director of Finance	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Direktur Keuangan Director of Finance	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-
[illegible]	Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi Director of Human Capital Management and Administration	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Direktur Operasi Pembangkit [illegible] Director of [illegible] Plant Operation	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Bonus Non Kinerja dan Opsi Saham Direksi dan Dewan Komisaris

Non-Performance Bonuses and Stock Options for the Board of Directors and Board of Commissioners

Sampai dengan akhir tahun 2022, belum terdapat kebijakan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan yang meliputi bonus non kinerja dan opsi saham. Sehingga Perusahaan tidak memberikan bonus non kinerja dan opsi saham kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

As of the end of 2022, there was no remuneration policy for the Company's Board of Directors and Board of Commissioners that includes non-performance bonuses and stock options. So that the Company did not provide non-performance bonuses and stock options to each member of the Board of Commissioners and Board of Directors.

Sekretaris Dewan Komisaris

The Board of Commissioners Secretary

Dewan Komisaris membentuk Sekretariat Dewan Komisaris yang dipimpin oleh seorang sekretaris Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perusahaan dan diberhentikan oleh Sekretariat Dewan Komisaris. Sekretariat Dewan Komisaris melaksanakan kegiatan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya serta melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan. Sekretaris Dewan Komisaris dan staf Sekretariat Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

The Board of Commissioners established the Board of Commissioners Secretariat chaired by the Board of Commissioners secretary from outside of the Company and supported by the staff of the Board of Commissioners Secretariat. The Board of Commissioners Secretariat carried out activities to support the Board of Commissioners in running supervisory duties and providing advice to the Board of Directors in carrying out the Company management activities. The Board of Commissioners Secretariat and the Board of Commissioners Secretariat staff are appointed and dismissed by the Board of Commissioners.

Sekretaris Dewan Komisaris harus memiliki pengetahuan yang memadai terkait fungsi pengawasan Perusahaan yang dijalankan organ Dewan Komisaris dan memahami sistem pengelolaan dan pembinaan Perusahaan. Tugas kesekretariatan serta memiliki integritas yang baik dan mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik.

The Board of Commissioners Secretary is required to have knowledge related to the Company's supervisory functions carried out by the Board of Commissioners organs and understands the Company management and guidance system, secretarial functions and to have good integrity as well as be able to communicate and coordinate well.

Profil Sekretaris Dewan Komisaris
Profile of the Board of Commissioners Secretary

Kuncoro Saroyokusumo

Warga Negara Indonesia, 41 tahun, berdomisili di Tangerang.

Menjabat sebagai Sekretaris Dewan Komisaris sejak tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 007/DK/PLN/2022 tanggal 1 November 2022.

Pendidikan

Menyelesaikan pendidikan S1 Listrik dari Institut Teknologi Bandung tahun 1997, dan S2 Energi Kelistrikan dari Institut Teknologi Bandung dan Internationale Darmstadt University of Applied Sciences pada tahun 2015.

Riwayat Pekerjaan

Bergabung kem sejak tahun 2006 di PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Selau pernah menjabat sebagai Manager Unit Pelaksana Pengatur dan Pengatur Beban Sistem Kelistr pada PT PLN (Persero) UIK) Kalimantan (2010), Manager Unit Pelaksana Transmisi Kelistr dan Kebara pada PT PLN (Persero) UIKI Kalimantan (2010-2011), Manager Unit Pelaksana Pengatur Beban Kelistrikan pada PT PLN (Persero) UIK) Kalimantan (2011-2013), Manager Pelaksanaan Sistem Kelistrikan pada PT PLN (Persero) UIK) Kalimantan (2013), Vice President Asisstant Direksi pada PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2015-Sekarang).

Indonesian Citizen, 41 years old, domiciled in Tangerang.

Have served as the Board of Commissioners Secretary since 2022 based on the Board of Commissioners Decree No. 007/DK/PLN/2022 of November 1, 2022.

Education

Completed a Bachelor's Degree education in Electricity from Bandung Institute of Technology in 1997, and Master's Degree in Electricity from Bandung Institute of Technology, and Applied Sciences from Darmstadt University in 2015.

Career History

Started his career in 2006 at PT PLN (Persero) South and Central Kalimantan Area. He served as Manager of the Implementation Unit for Distribution and Control of the Load Kalimantan System Load at PT PLN (Persero) UIK) Kalimantan (2010), Manager of the East and North Kalimantan Transmission Implementing Unit at PT PLN (Persero) UIK) Kalimantan (2010-2011), Manager of the Regulatory Implementing Unit of Kalimantan Border at PT PLN (Persero) UIK) Kalimantan (2011-2013), Manager of Electrical System Planning at PT PLN (Persero) UIK) Kalimantan (2013), Vice President Assistant Director at PT PLN (Persero) Headquarters (2015-Present).

Pedoman Kerja dan Tugas Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris
Board Manual, Duties, and Responsibilities of the Board of Commissioners Secretary

Sebagai organ pendukung Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris berpedoman pada Corporate Governance Code, Board Manual dan Board of Commissioner Manual (BoC Manual) dalam menjalankan tugasnya. Dewan Komisaris melaksanakan tugas pengawasan. Fungsi pengawasan Dewan Komisaris, Corporate Governance Code, Board Manual dan Board of Commissioner Manual (BoC Manual) menjadikan ketentuan mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris yang menjadi dasar dari tugas dan tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris. Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris secara khusus dalam mendukung Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan dan implementasi GCG adalah sebagai berikut:

As a supporting organ of the Board of Commissioners, the Board of Commissioners Secretary is guided by the Corporate Governance Code, Board Manual and the Board of Commissioners Manual (BOC Manual) in leading the Board of Commissioners Secretariat to carry out their duty to support the Board of Commissioners supervisory functions. Corporate Governance Code, Board Manual and Board of Commissioners Manual (BOC Manual) outlines provisions regarding the implementation of the supervisory functions of the Board of Commissioners as the basis of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners Secretary. The Board of Commissioners Secretary has duties and responsibilities specifically in supporting the Board of Commissioners in running supervisory functions and GCG implementations, including:

1. Memimpin dan melaksanakan kegiatan di bidang kesekretariatan dalam lingkungan Dewan Komisaris yang meliputi kegiatan rapat-rapat yang diadakan Dewan Komisaris;
2. Mengorganisasikan penyediaan informasi yang dibutuhkan Dewan Komisaris dan Komite-Komite Dewan Komisaris, seperti monitoring, analisa, kajian hasil kajian/audit/rekomendasi dan arahan Dewan Komisaris, laporan berkala dari Direksi (Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan, Laporan Tahunan, Laporan Hasil Pemeriksaan SPI) serta laporan/informasi lainnya mengenai pengelolaan Perseroan yang dilaksanakan oleh Direksi;
3. Menyusun dan memfotokopi laporan dan dokumen yang menjadi kewajiban Dewan Komisaris, antara lain Laporan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris dan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris;
4. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris, penyiapan dan pengiriman undangan, penyampaian materi rapat serta pencatatan masalah rapat, serta tugas-tugas lain yang terkait;
5. Mengorganisasikan dan memfasilitasi kegiatan Komite Komisaris;
6. Mengumpulkan data-data bisnis yang berasal dari Komite-Komite Dewan Komisaris untuk kepentingan Dewan Komisaris;
7. Menyusun dan mengadministrasikan risalah rapat dan dokumen Dewan Komisaris lainnya serta mengirimkan hasil-hasil tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
8. Menetapkan prosedur tertentu kelancaran kerja Dewan Komisaris;
9. Menjadi penghubung Dewan dengan Dewan Komisaris dengan pihak lain;
10. Dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, biaya, aset, serta sumber daya lainnya milik Perseroan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya, berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris dan wajib melaporkan secara tertulis hasil penugasan tersebut;
11. Sekretaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan tugasnya.

1. Leading and organizing corporate secretarial activities within the Board of Commissioners with the details of the duties further regulated by the Board of Commissioners;
2. Coordinating the provision of information needed by the Board of Commissioners and the Committees of the Board of Commissioners, such as monitoring, follow-up on the discussion/recommendations and directions of the Board of Commissioners, periodic reports from the Board of Directors (Monthly Reports, Quarterly Reports, Annual Reports, IAU Examination Results Reports) and other reports/information regarding the Company management carried out by the Board of Directors;
3. Drafting and binding obligation reports and documents of the Board of Commissioners, including reports on the Supervisory Results by the Board of Commissioners as well as the Work Plan and Budget for the Board of Commissioners;
4. Organizing the Board of Commissioners meetings, preparing and sending invitations, delivering meeting materials, and making minutes of meetings as well as other related tasks;
5. Coordinating and facilitating the activities of the Board of Commissioners Committees;
6. Collecting technical data from the Board of Commissioners Committees for the Board of Commissioners needs;
7. Preparing and administering minutes of meetings and other Board of Commissioners documents and sending the meeting resolution to the interested parties;
8. Establishing technical procedures for working visits by the Board of Commissioners;
9. Serving as liaison officer for the Board of Commissioners with other parties;
10. Being able to access records or information concerning employees, funds, assets and other Company resources related to the implementation of their duties based on written assignment letters from the Board of Commissioners and is obliged to report in writing of the assignment results;
11. The Secretary and Secretariat Staff of the Board of Commissioners are required to maintain the confidentiality of the Company's documents, data, and information, both from internal parties and external parties and are only used for the benefits of their duties.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Komisaris

Duty Implementation by the Board of Commissioners Secretary

Sekretaris Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dalam mendampingi fungsi kesekretariatan dalam lingkup organ pengawasan serta memberikan informasi, data, kajian dan laporan kepada Dewan Komisaris sepanjang tahun 2021, secara umum meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan administrasi kesekretariatan di lingkungan Dewan Komisaris.
2. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham, Direksi maupun pihak-pihak terkait lainnya.
3. Menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dan komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan:
   a) Monitoring hasil-hasil keputusan, rekomendasi dan arahan Dewan Komisaris;
   b) Dukungan/bantuan yang bersifat administrasi mengenai kegiatan Direksi dalam mengelola Perusahaan;
   c) Dukungan administrasi serta monitoring terkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Dewan Komisaris sehubungan dengan kegiatan pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi.
4. Mengumpulkan data-data teknis yang berasal dari komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris dan berupa info Dewan Komisaris untuk kepentingan Dewan Komisaris.
5. Sekretariat Dewan Komisaris melakukan tugas administrasi dan penyimpanan dokumen berupa:
   a) Sekretaris Dewan Komisaris mempunyai fasilitas penyimpanan dokumen Dewan Komisaris yang disediakan oleh Perusahaan.
   b) Sekretaris Dewan Komisaris mengadministrasikan surat keluar dan surat masuk ke Dewan Komisaris dan dokumen lainnya dengan tertib.
6. Berdasarkan persyaratan tertulis dari Dewan Komisaris, Sekretariat Dewan Komisaris dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik Perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

The Board of Commissioner Secretary carried out the duties in the implementation of secretarial function in the scope of supervisory organ as well as provided information, review and reports to the Board of Commissioners throughout 2021, generally include the following:

1. Carried out secretarial administrative activities within the Board of Commissioners.
2. Held meetings of the Board of Commissioners and meetings between the Board of Commissioners and Shareholders, the Board of Directors as well as other related parties.
3. Provided data/information needed by the Board of Commissioners and other committees within the Board of Commissioners related to the following:
   a) Monitored the follow-up to the results of decision, recommendation and directions by the Board of Commissioners;
   b) Administrative support/assistance regarding coordination to the Board of Directors in managing the Company;
   c) Administrative support and monitoring related to matters that must obtain approval or recommendations from the Board of Commissioners related to the Company management activities implemented by the Board of Directors.
4. Collected technical data from the committees within the Board of Commissioners and experts of the Board of Commissioners for the Board of Commissioners.
5. The Board of Commissioners Secretariat performed administration tasks and documents storing in the form of the following:
   a) The Board of Commissioners Secretary has a Board of Commissioners document storing facility provided by the Company.
   b) The Board of Commissioners Secretary administrated the outgoing and incoming letters to the Board of Commissioners and other documents in an orderly manner.
6. Based on the written delegation from the Board of Commissioners, the Board of Commissioners Secretariat was able to access relevant information regarding employees, funds, assets, and other resources of the Company related to their duties.

Penilaian Kinerja Sekretaris Dewan Komisaris
Performance Assessment of the Board of Commissioners Secretary

Dewan Komisaris melakukan evaluasi atas kinerja Sekretaris Dewan Komisaris sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas Sekretariat Dewan Komisaris. Khususnya terkait fungsi pengawasan dalam mendukung pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. Penilaian kinerja Sekretaris Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan realisasi atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris dalam mendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris serta indikator lain yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris. Pelaksanaan tugas Sekretaris Dewan Komisaris dievaluasi secara internal dalam lingkup organ Dewan Komisaris secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

The Board of Commissioners evaluates performance of the Board of Commissioners Secretary as a part of the effort in improving the quality of the Board of Commissioners Secretary. Duty implementation especially related to the of supervisory duties in supporting GCG implementation. Performance assessment of the Board of Commissioners is carried out based on the realization of duties implementation of the responsibilities of the Board of Commissioners Secretary in supporting the Board of Commissioners supervisory functions as well as other established indicators by the Board of Commissioners. Duties implementation by the Board of Commissioners is periodically evaluated internally with within the Board of Commissioners organ at least 1 (one) time a year.

Remunerasi Sekretaris Dewan Komisaris
Remuneration for the Board of Commissioners Secretary

Penghasilan sekretaris Dewan Komisaris dan staf Sekretariat Dewan Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan. Komponen penghasilan Sekretaris Dewan Komisaris paling sedikit terdiri dari honorarium, fasilitas dan tunjangan. Sedangkan dari jenis penghasilan staf Sekretariat Dewan Komisaris ditetapkan dengan ketentuan total penghasilan setahun tidak lebih besar dari penghasilan Organ Pendukung Dewan Komisaris lainnya.

Income for the Board of Commissioners Secretary and the Board of Commissioners Secretariat staff are determined by the Board of Commissioners while considering the Company's abilities. The Components of the Board of Commissioners Secretary income at least consist of honorarium, facilities and allowances. The amount and type of income of the Board of Commissioners Secretariat Staff is determined with the provision of the total annual income is not greater than the income of other Supporting Organs of the Board of Commissioners.

Komite Audit
Audit Committee

Komite Audit merupakan salah satu organ pendukung fungsi Pengawasan yang dibentuk Dewan Komisaris dalam tata kelola Perusahaan. Dewan Komisaris membentuk Komite Audit dengan tugas untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, khususnya terkait oversight (pengawasan) atas kualitas dan integritas pelaporan keuangan Perusahaan serta efektivitas sistem pengendalian internal. Komite Audit bekerja secara profesional, independen dan objektif dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan serta pemberian usulnya kepada Dewan serta memastikan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan-temuan yang berhubungan dengan audit dan pengendalian internal Perusahaan.

Audit Committee is one of the supporting organ of the supervisory function carried out by the Board of Commissioners in the Company's governance. The Board of Commissioners established the Audit Committee with the main task of assisting duties and responsibilities implementation by the Board of Commissioners, specifically related to oversight over the quality and integrity of the Company's financial statements and the effectiveness of the internal control system. Audit Committee works professionally, independently, and objectively in carrying out supervisory duties and functions and providing advice to the Board of Commissioners as well as monitoring and ensuring the running of activities related to audit and internal control in the Company.

Dasar pembentukan Komite Audit mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-16/MBU/12/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

The basis for the establishment of the Audit Committee refers to Law Number 19 of 2003 Law Number 40 of 2007 and Regulation of the Ministry of SOEs Number PER-12/MBU/2012 dated August 24, 2012, Regulation of the Ministry of SOEs Number PER-09/MBU/07/2015 concerning Amendments to Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-12/MBU/2012 concerning the Supporting Organ of the Board of Commissioners/ Supervisory Board of State-Owned Enterprises and Regulation of the Minister of SOEs Number PER-16/MBU/12/2019 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Ministry of State-Owned Enterprises Number PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organs of the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises.

Susunan, Periode dan Masa Jabatan Komite Audit

Composition, Period and Term of Office of the Audit Committee

Komite Audit diketuai oleh seorang Ketua yang merupakan anggota Dewan Komisaris dan dibantu oleh Sekretaris merangkap anggota serta sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota.

The Audit Committee is led by a Chairman who is a member of the Board of Commissioners and assisted by a Secretary concurrently members and at least 2 (two) members.

Anggota Komite Audit ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang merangkap sebagai anggota Komite Audit sama dengan masa jabatan pertumbuhannya sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Sedangkan masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Members of the Audit Committee are determined based on the Board of Commissioners' Decision with the term of office for a member of the Board of Commissioners who concurrently serves as a member of the Audit Committee the same as the term of office of their appointment as a member of the Board of Commissioners determined by the General Meeting of Shareholders. Meanwhile, the term of office for members of the Audit Committee who are not a members of the Board of Commissioners is 3 (three) years and can be extended for 1 (one) term of office without prejudice to the right of the Board of Commissioners to dismiss at any time.

Susunan keanggotaan Komite Audit mengalami beberapa kali perubahan karena berdasarkan keputusan Dewan Komisaris yang periode sebelumnya telah habis. Susunan Komite Audit ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali Nomor 313.K/DIR/WDT/2021, tanggal 31 Desember 2021, tentang Pemberhentian Komite Audit Pada Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali sebagai berikut:

The composition of the Audit Committee membership has changed several times due to changes in the composition of the Board of Commissioners whose term has ended. The composition of the Audit Committee is determined based on the Decisions of the Board of Commissioners of PT Pembangkitan Jawa Bali Number 313.K/DIR/WDT/2021, dated December 31, 2021, concerning the Establishment of the Audit Committee of the Board of Commissioners of PT Pembangkitan Jawa Bali as follows:

Susunan Komite Audit 1 Januari – 31 Juni 2022

Composition of the Audit Committee on January 1 – June 31 2022

Nama Name	Jabatan Position	Kualifikasi Expertise	Periode Jabatan Term of Office	Masa Jabatan Tenure
Farida Iranfuadi	Ketua (Komisaris) Chairman (Commissioner)	Teknik Fisika, Perencanaan dan KEBIJAKAN PUBLIK, Ekonomi Engineering Physics, Planning and Public Policy, Economic	Periode First	Oktober 2021 – Desember 2021 October 2021 – December 2021
Edward Hermas	Wakil Ketua (Pihak Independen) Vice Chairman (Independent Party)	Akuntansi, Keuangan, Anggaran dan Pajak Accounting, Finance, Budget and Tax	Periode Third	Januari 2020 – Desember 2021 January 2021 – December 2022

Nama Name	Jabatan Position	Keahlian Expertise	Periode Jabatan Term of Office	Masa Jabatan Tenure
Sigit Pitoyo Purnomo	Sekretaris merangkap anggota (Pihak Independen) Secretary and member (Independent Party)	Manajemen Strategik, Internal Auditing dan Enterprise Risk Strategic Management, Internal Auditing, and Enterprise Risk	Ketua Second	Oktober 2017 - Juli 2022 October 2017 - July 2022
Andri Sudar Sucma	Anggota (Pihak Independen) Member (Independent Party)	Hukum/Kepatuhan, Internal Auditing dan Enterprise Risk Legal/Compliance, Internal Auditing and Enterprise Risk	Ketua Second	Oktober 2017 - Desember 2022 October 2017 - December 2022

Susunan Komite Audit ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa-Bali Nomor 001.K/DK/WIB/2022, tanggal 27 Juni 2022, tentang Susunan Keanggotaan Komite Audit Pada Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa-Bali sebagai berikut:

The Composition of the Audit Committee is determined based on the Decision of PT Pembangkitan Jawa Bali's Board of Commissioners No. 001.K/DK/WIB/2022, dated June 27, 2022 concerning the Composition of the Audit Committee Membership on PT Pembangkitan Jawa Bali's Board of Commissioners as follows:

Susunan Komite Audit Juni — 31 Desember 2022
Composition of the Audit Committee on June - December 31, 2022

Nama Name	Jabatan Position	Keahlian Expertise	Periode Jabatan Term of Office	Masa Jabatan Tenure
Hendra Iswahyudi	Ketua (Komisaris) Chairman (Commissioner)	Teknik Fisika, Perencanaan dan Kebijakan Publik, Ekonomi Engineering Physics, Planning and Public Policy, Economics	Kedua Ever	Oktober 2015 – Desember 2022 October 2015 - December 2022
Edward Pahrivan	Sekretaris merangkap anggota (Pihak Independen) Secretary and member (Independent Party)	Akuntansi, Keuangan, Anggaran dan Pajak Accounting, Finance, Budget, and Tax	Kedua Ever	Januari 2023 - Desember 2022 January 2023 - December 2022
Andri Sudar Sucma	Anggota (Pihak Independen) Member (Independent Party)	Hukum/Kepatuhan, Internal Auditing dan Enterprise Risk Legal/Compliance, Internal Auditing, and Enterprise Risk	Ketua Second	Oktober 2017 - Desember 2022 October 2017 - December 2022

Profil Anggota Komite Audit
Profile of the Audit Committee Member

Hendra Iswahyudi
Ketua Komite Audit
Chairman of the Audit Committee

Profil lebih lanjut dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.

The profile can be seen in the Profile of the Board of Commissioners section.

Edward Fahrical

Sekretaris Komite Audit
Secretary of the Audit Committee

Warga Negara Indonesia, 57 tahun, berdomisili di Bandung.

Dasar Pengangkatan
Diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali Nomor 005.K/DK-PJB/2021

Lingkup Jabatan
Tidak memiliki lingkup jabatan yang bertentangan dengan ketentuan internal Perusahaan dan peraturan serta perundangan yang berlaku.

Pendidikan
Menyelesaikan pendidikan S1 Akuntansi - Universitas Islam Indonesia tahun 1990 dan Magister Manajemen Bisnis - Universitas Diponegoro tahun 2000. Selain itu, pendidikan non-formal yang pernah diikuti untuk mendapatkan sertifikasi diantaranya Corporate Finance (2015), Merger & Acquisition Managing Subsidiaries (2016) dan Executive Education I (2018).

Riwayat Pekerjaan
Pernah menjadi sebagai VP Pengendalian Asuransi PT PLN (Persero), Manajer Keuangan PLN UID Jawa Barat, Manajer Keuangan PLN Wilayah NTB dan Bisnis Dist. Keuangan PLN Bekasi.

Indonesian Citizen, 57 years old, domiciled in Bandung.

Basis of Appointment
Appointed based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Pembangkitan Jawa Bali No. 005.K/DK-PJB/2021

Concurrent Position
Does not have concurrent position that conflict with the Company's internal provisions as well as applicable laws and regulations.

Education
He completed his Bachelor of Accounting - Islamic University of Indonesia in 1990 and Master of Business Management - Diponegoro University in 2000. In addition, non-formal education that has been attended to obtain certification includes Corporate Finance (2015), Merger & Acquisition Managing Subsidiaries (2016) and Executive Education I (2018).

Career History
He had a career as PLN Accounting Development of PT PLN (Persero), Financial Manager at PLN UID West Java, Finance Manager at PLN NTB Area and the Head of Finance Division of PLN Bekasi.

Andar Sudar Sukma

Anggota Komite Audit
Member of the Audit Committee

Warga Negara Indonesia, 53 tahun, berdomisili di Jakarta.

Dasar Pengangkatan
Diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali Nomor 009.K/DK-PJB/2017 tanggal 4 Oktober 2017 dan diteskan kembali berakhir pada berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali Nomor 005.K/DK-PJB/2022 tanggal 27 Juni 2022.

Lingkup Jabatan
Tidak memiliki lingkup jabatan yang bertentangan dengan ketentuan internal Perusahaan dan peraturan serta perundangan yang berlaku.

Pendidikan
Menyelesaikan pendidikan S1 Hukum dari Universitas Sebelas Maret tahun 2003, dan S2 (Magister Hukum) Hukum Ekonomi (Doni) dari Universitas Indonesia tahun 2010.

Selain itu, pendidikan non-formal yang pernah diikuti untuk mendapatkan sertifikasi diantaranya Certified Fraud Examiner (CFE) (2013), sertifikasi Certified Risk Management Professional (CRMP) (2016), Certified Governance Professional (CGP)

Indonesian Citizen, 53 years old, domiciled in Jakarta.

Basis of Appointment
Appointed based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Pembangkitan Jawa Bali No. 009.K/DK-PJB/2017 dated October 4, 2017 and reappointed for the last time based on the Decree of PT Pembangkitan Jawa Bali's Board of Commissioners Number 005.K/DK-PJB/2022 dated June 27, 2022.

Concurrent Position
Does not have concurrent position that conflict with the Company's internal provisions as well as applicable laws and regulations.

Education
He completed his Bachelor of Laws from the University of Indonesia in 2003 and Master of Laws in Business Economic Law from the University of Indonesia in 2010.

In addition, non-formal education that has been attended to obtain certification includes Certified Fraud Examiner (CFE) (2013), Certified Risk Management Professional (CRMP) candidate (2016), Certified Governance Professional (CGP)

(2013), dan Certified in Committee Audit Practice (CACP) (2016); Certified Team Leader Audit ISO 27001 (2020); serta telah memiliki Sertifikat untuk melaksanakan Public Advocate (2016).

Riwayat Pekerjaan

Pernah bekerja sebagai Good Corporate Governance (GCG) Associate Consultant Sofyan Djalil & Partner (2004-2005), Executive Compliance PT Prudential Life Assurance (Life Insurance) (2005-2008), Resident Auditor dan Auditor Internal untuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2008-2013), Manager Assurance Refleksi Divisi PT Ernst & Young Indonesia (Persero) (2014-2015), Legal Health Legal untuk PT Transjakarta (2015-2018), Associate Director PT Sinergi Daya Prima (EBE Consulting) (2018-2019) dan Komite Manajemen Risiko & Kepatuhan PT Pembangkitan Jawa Bali (2018-2020).

(2013), and Certified in Committee Audit Practice (CACP) (2016); ISO 27001 Audit Team Leader Certification (2021) and has a license to carry out the Advocate Profession (2016).

Career History

He had a career as Good Corporate Governance (GCG) Associate Consultant of Sofyan Djalil & Partner (2004-2005), Executive Compliance of PT Prudential Life Assurance (Life Insurance) (2005-2008), Resident Auditor and Internal Auditor for PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2008-2013), Business Engagement Legal Manager of PT Ernst & Young Indonesia (Persero) (2014-2015), Legal Health Legal for PT Transjakarta (2015-2018), Associate Director at PT Sinergi Daya Prima (EBE Consulting) (2018-2019) and Risk Management & Compliance Committee of PT Pembangkitan Jawa Bali (2018-2020).

Independensi Komite Audit

Audit Committee Independence

Dewan Komisaris menyatakan bahwa Komite Audit dapat bertindak independen namun tetap untuk kepentingan Perusahaan, terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan kepentingan Perusahaan. Anggota Komite Audit telah memenuhi kriteria independensi sebagai berikut:

The Board of Commissioners ensures that the Audit Committee can act independently solely for the interests of the Company, regardless of the influence of various parties who have interests that may conflict with the interests of the Company. Members of the Audit Committee have met the following independence criteria:

Independensi Komite Audit
Audit Committee Independence

Kriteria Independensi Independence Criteria		Handra Arnaldi	Edward Pakpahan	Andan Sudan Sukma
Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, atau other lain yang memberikan jasa audit dan non-audit atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir	Not an insider in a public accounting firm, legal consulting firm, or other parties providing audit and non-audit services or other consulting services to the Company within the last 6 (six) months	√	√	√
Tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung di Perusahaan	Does not have any direct or indirect shares in the Company	√	√	√
Bukan orang yang bertanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan Perusahaan dalam waktu enam bulan terakhir	Not a person who has the authority and responsibility to plan, lead, and/or control the Company within the last six months	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris namun dengan radius, baik berupa garis lurus maupun ke samping atau hubungan semenda.	Does not have a blood family relationship with members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners up to the second degree, either in a straight line or sideways or a marital relationship.	√	√	√

Kriteria Independensi Independency Criteria		Hendra Soni/Ketua	Edward Pahlevi	Ester Sudiar Sabina
Tidak mempunyai hubungan usaha langsung dan tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan; dan	Does not have direct and indirect business relationships related to the Company's business activities; and	√	√	√
Tidak sedang berada dalam hubungan yang sejatinya mempengaruhi dan atau dapat mempengaruhi kemandirian dalam bertindak.	Not being in an institutional relationship with the Company.	√	√	√

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Duties and Responsibilities of the Audit Committee

Komite Audit dalam menjalankan fungsi pengawasan Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab dimana dalam pelaksanaannya berhubungan dengan pihak-pihak terkait yang mana masing-masing memiliki tanggung jawab yang jelas pada semua kegiatan termasuk Direksi dan seluruh jajaran manajemen, terutama terkait dengan pemantapan audit internal dan efektivitas pengendalian intern, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Tanggung jawab ini diskoreker kepada fungsi dan tugas pokok sebagaimana diatur di dalam Piagam Komite. Tugas pokok Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Membuat program/rencana kerja tahunan yang harus sesuai kegiatan, pihak dan penggunaan sumber daya.
2. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Dewan Komisaris mengenai tugasan Komite Audit.
3. Menyampaikan dengan segera temuan hasil pemeriksaan Auditor Eksternal maupun internal yang potensial dan signifikan.
4. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai tindak lanjut hasil pemeriksaan Auditor, terutama temuan potensial dan signifikan yang belum ditindaklanjuti secara tuntas.
5. Menelaah Laporan Keuangan Perusahaan dan informasi Keuangan lainnya yang akan disampaikan kepada pemegang saham.
6. Memberikan saran dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai hal-hal yang terkait dengan tugas Dewan Komisaris antara lain melakukan rekomendasikan internal audit charter, rencana dan inisiatifnya kegiatan SPI, kecukupan SDM SPI serta struktur organisasi SPI.

7. Mengusulkan kepada Dewan Komisaris agar Direksi memutuskan kepada SPI untuk melaksanakan pemeriksaan tertentu/pemeriksaan khusus.

The Audit Committee in supporting the supervisory function of the Board of Commissioners has duties and responsibilities where in the implementation, related to the related parties who each have their responsibilities in all activities including the Board of Commissioners and all levels of management, especially related to the implementation of internal audit and the effectiveness internal control including the adequacy of the financial reporting process. The Audit Committee is responsible to the Board of Commissioners. This responsibility is based on the main functions and duties as stipulated in the Committee Charter. The main duties of the Audit Committee are as follows:

1. Making an annual work program/plan containing activity plans, schedules and the use of resources.
2. Submitting reports regularly to the Board of Commissioners regarding the Audit Committee activities.
3. Conveying immediately the potential and significant findings of internal or external auditor examination results.
4. Providing inputs to the Board of Commissioners regarding the follow-up of Auditor's examination results, especially potential and significant findings that have not been followed-up thoroughly.
5. Reviewing the Company's Financial Statement and other Financial Information to be submitted to the shareholders.
6. Providing advices and recommendations to the Board of Commissioners regarding matters related to the Board of Commissioners duties, among others, conducting internal evaluation of internal audit charter, performance and effectiveness of SPI activities, adequacy of SPI's HR, and SPI's organizational structure.
7. Proposing to the Board of Commissioners so as the Board of Directors assigns the SPI to carry out certain examinations/special examinations.

g. Menyampaikan usulan kepada Dewan Komisaris dalam proses pemunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit laporan keuangan;

h. Menyampaikan usulan kepada Dewan Komisaris untuk memastikan tersedia dukungan dalam ruang lingkup pemeriksaan, dalam pelaksanaan PKAT; dan

i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.

g. Submitting proposals to the Board of Commissioners in the appointing process of a Public Accounting Firm that will audit the Financial Statements;

h. Submitting proposals to the Board of Commissioners to include strategic matters in the scope of the audit, in the preparation of the AIA; and

i. Maintaining the confidentiality of documents, data and information of the Company.

Pedoman Kerja Komite Audit

Audit Committee Work Guidelines

Pedoman kerja Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris dalam bentuk Piagam Komite Audit pada tanggal 31 Desember 2018. Piagam Komite Audit memuat ketentuan antara lain Hubungan dan Tugas Fungsi dan Tugas Pokok dan Tanggung Jawab, Wewenang, Organisasi dan Keanggotaan, Penilaian Kinerja Anggota Komite, Pelaksanaan Rapat dan Kode Etik. Piagam Komite Audit dikaji secara berkala dan apabila diperlukan perlu dapat dilakukan pemutakhiran guna menyesuaikan kesesuaian muatannya dengan dinamika organisasi perusahaan serta undang-undang yang berlaku dan best practices.

The work guidelines of the Audit Committee are determined by the Board of Commissioners in the form of the Audit Committee Charter on December 31, 2018. The Audit Committee Charter contains provisions including: Purpose and Objectives, Main Functions and Duties and Responsibilities, Authority, Organization and Membership, Performance Assessment of Committee Members, Meetings, and Code of Conduct. The Audit Committee Charter is periodically reviewed and if deemed necessary can be updated to ensure the suitability of the contents with the dynamics of the organization, applicable laws and regulations, and best practices.

Rencana Program Kerja Komite Audit

Work Program Plan of the Audit Committee

Program kerja Komite Audit disusun setiap tahun untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris. Program kerja Komite Audit tahun 2022 adalah sebagai berikut :

The Audit Committee annually prepares a work program to encourage the effectiveness of the implementation of duties and responsibilities of the Audit Committee in supporting the implementation of the supervisory duties of the Board of Commissioners. The work program of the Audit Committee in 2022 were:

1. Kegiatan rutin yang terdiri dari :
   a. Kegiatan Internal Komite Audit yang meliputi :
      1) Evaluasi Laporan Manajemen dan Kinerja Korporasi;
      2) Penyiapan usulan Dewan Komisaris kepada Rapat Komite Audit;
      3) Pelaksanaan monitoring KPI Dewan Komisaris dan monitoring jabatan Dewan Komisaris serta Pemegang Saham sesuai RUPS;
      4) Penyiapan dan penandatanganan Laporan Kinerja Komite Audit.
   b. Kegiatan Koordinasi Komite Audit dengan Satuan Pengawasan Intern (SPI), meliputi :
      1) Review dan Evaluasi Program Kerja Audit Tahunan (PKAT);
      2) Pembahasan bersama mengenai Hasil Audit SPI dan Hasil Audit Eksternal.

1. Routine activities consisting of:
   a. Internal activities of the Audit Committee, including:
      1) Evaluation of Management Reports and Corporate Performance;
      2) Preparation of the Board of Commissioners' letter according to the Audit Committee's duties;
      3) Monitoring the KPI of the Board of Commissioners and attendance of the Board of Commissioners and the shareholders according to the GMS;
      4) Preparation and Submission of the Audit Committee Performance Reports.
   b. Audit Committee Coordination Activities with Internal Audit Unit (SPI), including:
      1) Review and evaluation of the Annual Audit Work Program (AAWP);
      2) Periodic discussions concerning the results of the IAU audit result and external audit result.

h) Supervisi terhadap pelaksanaan Risk Based Audit (RBA), evaluasi pengendalian internal korporat, implementasi Quality Assurance Review, dan fungsi QA atas Audit.

i) Koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik (KAP), SPI PT PLN (Persero) dan auditor eksternal lainnya.

3. Kegiatan Khusus/Non Rutin yang terdiri dari :
   a. Review dan penyiapan atau perubahan Piagam Komite Audit.
   b. Review dan Evaluasi atas program korporat tahun 2021 di bidang Akuntansi dan keuangan.
   c. Review dan Evaluasi atas kuprosper operasional korporat tahun 2021 di bidang Equivalent Availability Factor (EAF) Pembangkit Existing serta dampak penerapan cost switching pada pembangkit existing.
   d. Review dan Evaluasi mengenai penerapan Three Line of Defence di Perusahaan.
   e. Evaluasi atas rencana korporat untuk melaksanakan Internal Control for Financial Reporting (ICoFR).
   f. Kunjungan lapangan ke pembangkit-pembangkit milik dan yang dikelola oleh Perusahaan.
   g. Koordinasi dengan Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris lainnya.

3. Supervision of the Risk-Based Audit (RBA) implementation, evaluation of corporate internal control, the implementation of the Quality Assurance Review, and the QA function outside the audit.

4. Coordination with the Public Accountant Firm (KAP), SPI of PT PLN (Persero), and other external auditors.

3. Special/Non-Routine Activities consisting of:
   a. Review and update of the Audit Committee Charter document.
   b. Review and evaluation of the Corporate Program in 2021 in the field of Accounting and Finance.
   c. Review and evaluation of corporate operational result progress in 2021 in the field of Equivalent Availability Factor (EAF) of Existing Steam Plant, as well as the impacts of cost switching implementation on the existing power plant.
   d. Review and evaluation regarding the implementation of Three Line of Defense in the Company.
   e. Evaluation of corporate plans to implement Internal Control for Financial Reporting (ICoFR).
   f. Field visits to power plants owned and managed by the Company.
   g. Coordination with the Secretary of the Board of Commissioners and the Board of Commissioners' Committee.

3. Competency Development Program of the Audit Committee

Pelaksanaan Tugas Komite Audit

Duty Implementation of the Audit Committee

Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan rencana program kerja Komite Audit tahun 2021. Rencana program kerja tersebut direalisasikan diantaranya dengan melakukan telaah, memberikan masukan atau rekomendasi, menghadiri rapat-rapat dengan Dewan Komisaris, Direksi, SPI dan pertemuan lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas Komite Audit serta melakukan kunjungan kerja bersama Dewan Komisaris. Komite Audit menyampaikan evaluasi program kerja secara triwulanan kepada Dewan Komisaris.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit telah direalisasikan berdasarkan rencana program kerja tahun 2022 yang telah disetujui dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris. Komite Audit melaporkan realisasi program kerja secara triwulanan kepada Dewan Komisaris. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit diantaranya melakukan telaah, memberikan masukan atau rekomendasi, menghadiri rapat-rapat dengan Dewan Komisaris, Direksi, satuan pengawasan intern dan pertemuan lain serta melakukan kunjungan kerja bersama Dewan Komisaris.

The Audit Committee has carried out the duties and responsibilities based on the 2021 Audit Committee work program plan. The work program plan is realized among others by conducting reviews, providing inputs or recommendations, attending meetings with the Board of Commissioners, Board of Directors, SPU, and other meetings related to the implementation duties of the Audit Committee as well as conducting working visits with the Board of Commissioners. The Audit Committee reports the evaluation of the work program quarterly to the Board of Commissioners.

The implementation of duties and responsibilities of the Audit Committee has been realized based on the 2022 work program plan which has been determined to support the implementation of supervisory duties of the Board of Commissioners. The Audit Committee reports the realization of the work program on a quarterly basis to the Board of Commissioners. Activities conducted in the context of carrying out duties and responsibilities of the Audit Committee include conducting reviews, providing input or recommendations, attending meetings with the Board of Commissioners, Board of Directors, all levels of management

Secara umum, Komite Audit telah melakukan pengawasan dan pendampingan serta memberikan masukan sepanjang tahun 2022 antara lain untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Pembahasan evaluasi Tindak Lanjut Aspek RUPS dan Dewan Komisaris PLN EP.
2. Pemutakhiran Laporan Komite Audit Triwulan IV Tahun 2021
3. Kick Off Meeting GCG PLN Group dengan BPKP
4. Pembahasan Laporan Kerja Satuan Pengawasan Internal (SKAI) Triwulan IV Tahun 2021 serta Triwulan I, II dan III Tahun 2022
5. Kunjungan Kerja bersama Dewan Komisaris ke beberapa pembangkit antara lain PLTU Indramayu, PLTU Ulubelu, PLTA Cirata, PLTU Cilacap, PLTU Muara Karang, dan PLTU Muara Tawar.
6. Mengikuti Webinar mengenai pengadaan pelanggaran korupsi.
7. Focus Group Discussion (FGD) Assessment GCG Aspek B Dewan Komisaris bersama BPKP.
8. Penyelesaian Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Semester II Tahun 2021.
9. Pembahasan Pemutakhiran Governance Pembangkit, Modernisasi 21 GW yang dilaksanakan Pre-evaluasi
10. Pembahasan Overhaul Pembangkit
11. Pembahasan Internal Control Over Financial Report (ICoFR)
12. Pembahasan KPI Individu Direksi
13. Evaluasi Kinerja KAP tahun buku 2021
14. Sharing Knowledge Komite Audit dengan PJBI
15. Pembahasan Kinerja Keuangan Perusahaan tahun 2021
16. Diskusi Tiga Lini Of Defense artikel dan penerapannya di PLTU Sanggau Ruwa Jaya
17. Pembahasan TKDN Proyek PLTU Cirata
18. Pembahasan Corporate Charter
19. Pembahasan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) 2022 dengan Satuan Pengawasan Internal (SPI)
20. Pembahasan RKAP tahun 2023
21. Assessment GCG tahun buku 2022.
22. Mengikuti kegiatan yang dimotori oleh komite lainnya.

and other meetings as well as conducting working visits with the Board of Commissioners. In general, the Audit Committee has supervised and assisted as well as provided input throughout 2022, among others, for the following matters:

1. Discussion on the follow-up evaluation of the GMS and the Board of Commissioners' WLAN Guidance.
2. Completion of the 2021 Quarter IV Audit Committee Report.
3. Kick Off Meeting on GCG PLN Group with BPKP.
4. Discussion on the Work Report of the Internal Audit Unit (SKAI) for the fourth quarter of 2021 and for the first, second and third quarters of 2022.
5. Working visits with the Board of Commissioners to several power plants including Indramayu CFPP, Ulubelu CFPP, Cirata HEPP, Cilacap CFPP, Muara Karang CFPP and Muara Tawar CFPP.
6. Participated in a Webinar on strengthening corruption prevention.
7. Focus Group Discussion (FGD) GCG Assessment Aspect B of the Board of Commissioners with BPKP.
8. Completion of the Supervisory Report of the Board of Commissioners for Semester II of 2021.
9. Discussion of Power Plant Operational Issues, especially 21 GW, Issued by the Company.
10. Discussion of Power Plant Overhaul.
11. Discussion of Internal Control over Financial Report (ICoFR).
12. Discussion of the Board of Directors' Individual KPIs.
13. KAP Performance Evaluation for the 2021 financial year.
14. Knowledge Sharing of the Audit Committee with PJBI.
15. Discussion of the Company's Financial Performance in 2022.
16. Discussion of the Three Lines of Defense, including its application at Sanggau Ruwa Jaya CFPP.
17. Discussion of the TKDN of Cirata IVP Project.
18. Discussion of Corporate Charter.
19. Discussion of the 2022 Annual Audit Work Program (AAWP) with the Internal Audit Unit (SKAI).
20. Discussion of the 2023 RKAP.
21. GCG Assessment for the 2022 fiscal year.
22. Participated in activities embodied by other committees.

Rapat Komite Audit
Audit Committee Meeting

Pasgan Komite Audit mengatur bahwa Komite Audit mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu bulan untuk menyelenggarakan Program Komite Audit. Selain itu, BoC Manual juga mengatakan bahwa Komite Audit wajib melakukan pertemuan rutin dengan Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun serta melakukan pertemuan dengan fungsi terkait lainnya fungsi kegiatan dari Internal Audit dalam rangka membahas pertemuannya dan aktivitas Perusahaan baik secara berkala maupun insidentil/ad hoc apabila diperlukan. Komite Audit telah melaksanakan rapat sepanjang tahun 2022 sebanyak 20 (dua puluh) kali.

The Audit Committee Charter mandates that the Audit Committee holds meetings periodically at least 1 (one) a month to complete the Audit Committee Program. In addition, the BoC Manual also explains that the Audit Committee is required to hold regular meetings with the Board of Commissioners at least 1 (one) a month and hold meetings with related functions, especially the financial and internal audit function in the context of discussing the Company's developments and activities both periodically and at any time if necessary. The Audit Committee has held 20 (twenty) meetings throughout 2022.

Rapat Komite Audit
Audit Committee Meeting

No.	Tanggal Date	Agenda
1	13 Januari 2022 January 13, 2022	Rencana Pelaksanaan Anggaran Dewan Tenaga Kepengawasan Gaji/Upah Dewan Komisaris Planned Implementation of the Allocation of Remuneration Concerning the Authorities of the Board of Commissioners in Holding DP Salaries
2	7 Februari 2022 February 7, 2022	Progres Audit Laporan Keuangan oleh KAP PwC Audit Progress of the Financial Statements by PwC KAP
3	7 Februari 2022 February 7, 2022	LKJPP TW IV tahun 2021 GCG/KJI Q4 2021
4	11 Februari 2022 February 11, 2022	Pembahasan Perbaikan Penyajian Triliun Lanjut Antara dan Reasonable KUPS (PLAN) 2021 Preliminary Discussion of Failure as Increasing at the 2022 GHG Emissions and Reasonableness (PLAN)
5	11 Maret 2022 March 11, 2022	Diskusi terkait digitalisasi Proyek Pipeline or progress Dashboard Pencatatan Discussion related to digitizing the Power Plant project progress at the Company Dashboard
6	11 April 2022 April 11, 2022	Last Meeting Audit Laporan Keuangan, Realisasi dan Kinerja 2021 oleh KAP PwC Last meeting Audit of the 2021 Financial Statements, Compliance and Performance Report by the PwC KAP
7	19 April 2022 April 19, 2022	Diskusi KPI Divisi dan KPI Individu Direksi Discussion of the Board of Director's KPIs and Individual KPIs
8	12 April 2022 April 12, 2022	Progres Triliun aksi aviasi RUPS Follow up Progress on the GMS Meetings
9	11 Mei 2022 May 11, 2022	1. Rapat Dalam KAP PwC untuk Tahun Buku 2021 2. Rapat LKJPP TW I tahun 2022 1. PwC KAP Executive Meeting for the 2021 Fiscal Year 2. 4th QPR Meeting in Q1 2022
10	7 Juni 2022 June 7, 2022	1. Rapat Hingga 3 Lapis Pemimpin 2022/2023 2. Pertanyaan Model 3 (3) dari hasil audit SPI untuk unit kerja UBJOM TI, Awal Awal 3. Mitigation & Validation Work Meeting Dec (1Q4, 2022 4. Discussion of the 3 line model from the results of the BoC audit for the TI Java Area (SUBJOM) work unit
11	13 Juli 2022 July 13, 2022	Diskusi mengenai Realisasi Anti Penyalahgunaan 2022 Discussion regarding Realization of the Consumer's Assets in 2022
12	8 Juli 2022 July 8, 2022	Pembahasan Aspirasi KUPS dan Aspirasi Dewan Komisaris Discussion of the Direction of the KUPS and the Board of Commissioners
13	11 Agustus 2022 August 11, 2022	Diskusi mengenai Pencapaian Anggaran Discussion on the Beyond KPI Achievement
14	18 Agustus 2022 August 18, 2022	Pembahasan Laporan Kinerja SPI (LKJPP) TW Empat 2021 Discussion of the SPI Performance Report (PLANT) Q4 of 2022
15	19 September 2022 September 19, 2022	Kick Off Meeting Audit Laporan Keuangan Tahun 2022 oleh KAP PwC Kick Off Meeting of Audit for the 2022 Financial Statements by PwC KAP
16	13 Oktober 2022 October 13, 2022	Diskusi mengenai Review dan Evaluasi Pengadaan PT PNP Discussion regarding Procurement Review and Evaluation at PT PNP
17	26 Oktober 2022 October 26, 2022	Pembahasan Laporan Kinerja SPI TW III 2022 dan Laporan WBS Semester I 2022 Discussion of the 3rd Q1 2022 Performance Report and WBS Report in Semester I of 2022
18	23 November 2022 November 23, 2022	Pembahasan Program Kerja Audit Tahun untuk tahun 2023 Discussion of the Year Audit Work Programs for 2023
19	13 Desember 2022 December 13, 2022	Pembahasan Tindak Lanjut Antara KUPS dan Dalam Discussion on the Follow-up to the Direction of the KUPS and the Board of Commissioners
20	28 Desember 2022 December 28, 2022	Pembahasan Progres Akuisisi dalam rangka FSRI Discussion of Accounting Progress in the context of FSRI

Frekuensi Rapat Internal dan Tingkat Kehadiran Anggota Komite Audit
Frequency of Internal Meetings and Attendance of the Audit Committee Members

Nama Name	Jabatan Position	Frekuensi Rapat Meetings Frequency	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
[illegible]	[illegible]	20	18	90 %
[illegible]	[illegible]	20	19	95%
[illegible]	[illegible]	20	18	90%
[illegible]	[illegible]	20	19	95%

[illegible]

Program Pengembangan Kompetensi Komite Audit
Competency Development Program of the Audit Committee

[illegible]

[illegible]

Penilaian Kinerja Komite Audit
Audit Committee Performance Assessment

[illegible]

[illegible]

Tabel Evaluasi Kinerja Komite Audit
Table of the Audit Committee Performance Evaluation

No.	Kriteria Penilaian Assessment Criteria	Bobot nilai Percentage
1	[illegible]	0,30
2	[illegible]	0,20
3	[illegible]	0,50

No.	Kriteria Penilaian Assessment Criteria	Nilai maks Maximum
4	Presentasi pada Rapat Internal Dewan Komisaris (RDI) Presentation at the Internal Meeting of the Board of Commissioners (RDI)	0,20
5	Kehadiran pada RDI, RDB, RKN, Meetings (RDI, RDB, RKN)	0,10
6	Penyajian Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Presentation of the Supervisory Report of the Board of Commissioners	0,20
Nilai Rata-Rata Average Score		**0,80**

Hasil evaluasi atas kinerja Komite Audit yang telah dilakukan selanjutnya digunakan untuk menyusun langkah-langkah yang dipandang dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Audit dalam mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

The evaluation results on the performance of the Audit Committee that have been conducted are then used to compile the necessary measures in the context of improvement and development as well as increasing the effectiveness of the implementation of duties of the Audit Committee in supporting the implementation of duties of the Board of Commissioners.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Nomination and Remuneration Committee

Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan salah satu organ pendukung fungsi Pengawasan yang dibentuk Dewan Komisaris dalam tata kelola Perusahaan. Dewan Komisaris membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dengan tugas pokok membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, khususnya terkait pengawasan atas efektivitas pelaksanaan pengelolaan SDM dan Organisasi dan kebijakan remunerasi. Komite Nominasi dan Remunerasi melaksanakan kajian dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas hal-hal yang berhubungan dengan sistem pengelolaan talenta, sistem penilaian kinerja, nominasi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris perusahaan anak, kebijakan remunerasi serta lingkungan.

The Nomination and Remuneration Committee is one of the supporting organs of the Supervisory function carried out by the Board of Commissioners in corporate governance. The Board of Commissioners establishes the Nomination and Remuneration Committee with the main duties of assisting the implementation of duties and responsibilities of the Board of Commissioners specifically related to supervising the effectiveness of the implementation of HR and Organization management and remuneration policies. The Nomination and Remuneration Committee reviews and provides input to the Board of Commissioners on matters relating to the talent management system, performance assessment system, nomination for members of the Board of Directors or members of the Board of Commissioners of subsidiaries, remuneration policies and the environment.

Dasar pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2003 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 dan Peraturan Menteri (PER) Nomor PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012, Peraturan Menteri (PER) Nomor PER-03/MBU/08/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri (PER) Nomor PER-10/MBU/10/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

The basis for establishing the Nomination and Remuneration Committee refers to Law Number 32 of 2003 Law Number 40 of 2007 and Regulation of the Minister of (SOE) Number PER-12/MBU/2012 dated August 24, 2012, Regulation of the Minister of SOEs Number PER-03/MBU/08/2021 concerning Amendments to Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organ of the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises and Regulation of the Minister of SOEs Number PER-10/MBU/10/2017 concerning Second Amendment to Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organ of the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises.

Susunan, Periode dan Masa Jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi

Composition, Period and Term of Office of the Nomination and Remuneration Committee

Komite Nominasi dan Remunerasi dipimpin oleh seorang Ketua yang merupakan anggota Dewan Komisaris dan dibantu oleh Sekretaris merangkap anggota. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang merangkap sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sama dengan masa jabatan pencalonannya sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Sedangkan masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 1 (satu) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

The Nomination and Remuneration Committee is led by a Chairman who is a member of the Board of Commissioners and assisted by a Secretary who is concurrently a member. Members of the Nomination and Remuneration Committee are determined based on the Decision of the Board of Commissioners with the term of office of members of the Board of Commissioners and concurrently serve as members of the Nomination and Remuneration Committee equal to the term of office of their appointment as members of the Board of Commissioners determined by the General Meeting of Shareholders. Meanwhile, the term of office for members of the Nomination and Remuneration Committee who are not members of the Board of Commissioners is 3 (three) years and can be extended 1 (one) time for 1 (one) year, without reducing the rights of the Board of Commissioners to dismiss them at any time.

Susunan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi mengalami perubahan, karena terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris yang jangka waktunya telah habis. Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali Nomor DIR.KEP/PBEJ/0321 tanggal 31 Desember 2021 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi pada Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali. Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

The composition of the Nomination and Remuneration Committee membership has changed due to the change in composition of the Board of Commissioners whose terms of office expired. The composition of the Nomination and Remuneration Committee is determined based on the Decision of the Board of Commissioners of PT Pembangkitan Jawa Bali Number DIR.KEP/PBEJ/0321 dated December 31, 2021 concerning the Establishment of the Nomination and Remuneration Committee on the Board of Commissioners of PT Pembangkitan Jawa Bali. The composition of the Nomination and Remuneration Committee in 2022 is as follows:

Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Januari – Desember 2022

Composition of the Nomination and Remuneration Committee in January – December 2022

Nama Name	Jabatan Position	Keahlian Expertise	Periode Jabatan Term of Office	Masa Jabatan Term of Office
Evelyang Pertiwa	Ketua (Komisaris) Chairman (Commissioner)	Manajemen Risiko, Operasi & Pemeliharaan Pembangkitan	Periode 1 (1)	1 Januari - 31 Desember 2022 January 1 - December 31, 2022
Regas Purnama	Wakil Ketua (Komisaris) Vice Chairman (Commissioner)	Human Capital Management, Operasi dan Pemeliharaan Ketenagalistrikan	Periode 1 (1)	1 Januari - 31 Desember 2022 January 1 - December 31, 2022
Diamond Dana	Sekretaris merangkap anggota (Pihak Independen) Secretary and Member (Independent Party)	Human Capital Management, Corporate Culture	Periode 1 (1)	1 Januari - 31 Desember 2022 January 1 - December 31, 2022
[illegible]	Anggota (Pihak Independen) Member (Independent Party)	Regulasi dan Manajemen Biaya Pengadaan Tenaga Listrik, Tarif Tenaga Listrik	Periode 1 (1)	1 Januari - 31 Desember 2022 January 1 - December 31, 2022

Dengan adanya perubahan susunan Dewan Komisaris, per 14 Desember 2022 susunan Komite Nominasi dan Remunerasi menjadi sebagai berikut:

With the change in the composition of the Board of Commissioners, as of December 14, 2022 the composition of the Nomination and Remuneration Committee is as follows:

Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi 14 – 31 Desember 2022

Composition of the Nomination and Remuneration Committee as December 14-31, 2022

Nama Name	Jabatan Position	Keahlian Expertise	Periode Jabatan Term of Office	Masa Jabatan Term of Office
Bagus Purnomo	Ketua Merangkap Anggota (Komisaris) Vice Chairman (Commissioner)	Human Capital Management, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Organisasi Human Capital Management, Occupational Health and Safety, Organization	Sesuai Time	1 Januari – 31 Desember 2022 January 1 – December 31, 2022
Chairudin Zaini	Sekretaris merangkap anggota (Pihak Independen) Secretary and member (Independent Party)	Human Capital, Manajemen Kesehatan dan Keselatan Kerja, Corporate Culture Human Capital, Occupational Health and Safety Management, Corporate Culture	Sesuai Time	1 Januari – 31 Desember 2022 January 1 – December 31, 2022
Sri Nurwiyanto	Anggota (Pihak Independen) Member (Independent Party)	Wakyat dan Manajemen Risiko Kesyadaan Tenaga Listrik, Tarif Tenaga Listrik Electricity Supply Business Regulation and Management, Electricity Tariffs	Sesuai Time	1 Januari – 31 Desember 2022 January 1 – December 31, 2022

Profil Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Profile of Nomination and Remuneration Committee Members

Bagus Purnomo

Wakil Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi

Vice Chairman of Nomination and Remuneration Committee

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris

The profile can be seen in the Profile of the Board of Commissioners section

Chaerudin Dersa

Komisaris dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Commissioner and Member of the Nomination and Remuneration Committee

Pelayar Negara Indonesia, 40 tahun, berdomisili di Depok.

Dasar Pengangkatan

Diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali Nomor 015.K/DIR/PBJB/2021, tanggal 23 September 2021 dan ditetapkan berdasar keputusan luar biasa Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali Nomor 015.K/DIR/PBJB/2021 tanggal 23 Desember 2021.

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan yang berbenturan dengan ketentuan internal, Perundangan dan peraturan lain yang berlaku.

Pendidikan

Menyelesaikan pendidikan D3 Teknik Sipil dan Institut Teknologi Bandung (ITB) tahun 1983 dan S2 Manajemen Keuangan dari UPH Jakarta tahun 2005.

Salah satu pendidikan non-formal yang pernah diikuti untuk mendapatkan sertifikasi diantaranya Certified Quality Management Systems Assessment (2007), Hasil-hasil Belajar Kriteria (2013), Spesialisasi of ISO/IEC 17021-1: 2015 - ISO/IEC 17021-1 : 2015 dan ISO 9001:2015 (2016), Implementasi Manajemen Risiko Berbasis SNI ISO 31000:2018 (2019) dan Capacity Building Pendamping SNI ISO/IEC 17025:2017 (2021).

Riwayat Pekerjaan

Pernah menjadi Manajer Proyek dan Ahli Hidrologi dan Kepala Pemasaran (1984-1998), Konsultan Manajer Sertifikasi Sistem Mutu (1998-2007), Manajer Bidang Pengembangan Usaha PT PLN (2007-2016), Manajer Senior Bidang Pelayanan dan Manajemen Pelayanan Jasa Direksi di PT PLN (2016-2019), Tenaga Ahli Jaga Kinerja Audit ISO 9001 & 14001 LRK (ISO (1998-2016), Dewan Tetap Tenaga STT PLN (2018-2021), Instruktur PLN Pusdiklat (2000-Sekarang), Auditor SNI Award (2015-Sekarang), Auditor KAN SNI 17021 (2013-Sekarang), Anggota Governing Board IJP PLN Pusdiklat (2014-2016), Auditor Halaqah Syariah(KPK) (2015-Sekarang) dan Komisaris ISO 9001 (2019-Sekarang), Ketua Komite Pengelola Kelembagaan/Lembaga Sertifikasi Profesi LSP Sertifikasi PT PLN (Persero) Kuasi Sertifikasi (2018 - sekarang).

Indonesian citizen, 59 years old, domiciled in Depok.

Basis of Appointment

Appointed based on Decree of the Board of Commissioners of PT Pembangkitan Jawa Bali Number 015.K/DIR/PBJB/2021, dated September 23, 2021, and reappointed by Extraordinary Meeting of Decree of the Board of Commissioners of PT Pembangkitan Jawa Bali Number 015.K/DIR/PBJB/2021 dated December 23, 2021.

Concurrent Position

Does not have concurrent positions that conflict with the Company's internal provisions as well as the prevailing laws and regulations.

Education

He completed his Bachelor of Civil Engineering from Bandung Institute of Technology (ITB) in 1983 and Master of Financial Management from UPH Jakarta in 2005.

In addition, non-formal education that has been attended to obtain certifications includes Quality Management Systems Assessment Certification (2007), Hasil-hasil Belajar Criteria (2013), Specialization of ISO/IEC 17021-1: 2015 - ISO 9001:2015 (2016), Implementation of Risk Management Based on SNI ISO 31000:2018 (2019) and Capacity Building for Understanding of SNI ISO/IEC 17025:2017 (2021).

Career History

He has a career as an Assistant Hydrologist, Survey Coast and Head of Metering Section (1984-1998), Assistant Manager of Quality System Certification (1998-2007), Manager of PT PLN's Business Development Division (2007-2016), Senior Manager of Corporate Culture and Change Management at the Directorate of Human Resources of PT PLN (2016-2019). In addition, he was also a ISO 9001 & 14001 Auditor at LRK (ISO (1998-2016), Non-permanent Lecturer at STT PLN (2018-2021), PLN Pusdiklat Instructor (2000-Present), SNI Award Auditor (2015-Present), KAN ISO 17021 Auditor (2013-Present), Member of the Governing Board of IJP PLN Pusdiklat (2014-2016), Halaqah Syariah Auditor(KPK) (2015-Present) and ISO 9001 Consultant (2019-Present), Chairman of the Institutional Safety Committee of the Professional Certification Institute for LPK Certification of PT PLN (Persero) Certification Partner (2018 - present).

Eri Nurcahyanto

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Member of the Nomination and Remuneration Committee

Warga Negara Indonesia, 59 tahun, berdomisili di Jakarta Selatan.

Dasar Pengangkatan

Diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali Nomor [illegible] tanggal 22 Desember 2021.

Tanggung Jawab

Tidak memiliki rangkap jabatan yang berhubungan dengan larangan rangkap jabatan dan peraturan serta ketentuan yang berlaku.

Pendidikan

Menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Elektro dari Universitas Diponegoro (UNDIP) tahun 2003 dan lulusan Teknik Tenaga Listrik dan Energi dari Universitas Indonesia tahun 2009.

Selain itu, pendidikan non-formal yang pernah diikuti untuk mendapatkan sertifikasi diantaranya Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tahun 2009.

Riwayat Pekerjaan

Memulai karir di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sejak tahun 2005 sebagai [illegible]. Pada tahun 2013-2017 pernah menduduki sebagai Kepala Seksi Pengawasan Usaha Tenaga Listrik. Tahun 2015-2018 sebagai Kepala Seksi Energi Hal dan Biaya Jaringan Tenaga Listrik. Tahun 2018-2021 sebagai Kepala Subdirektorat/Koordinator Kelompok Kerja Tenaga Tenaga Listrik. Pada tahun 2021 mendapatkan penugasan sebagai Senior Researcher on Energi di Asia Pacific Energy Research Centre (APERC), Jepan. Saja tahun 2022 hingga saat ini sebagai Koordinator Kelompok Kerja Tarif dan Subsidi Listrik.

Indonesian citizen, 48 years old, domiciled in South Jakarta.

Basis of Appointment

Appointed based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Pembangkitan Jawa Bali Number [illegible] dated December 22, 2021.

Concurrent Position

Does not have concurrent positions that conflict with the Company's internal provisions as well as the prevailing laws and regulations.

Education

He completed his Bachelor of Electrical Engineering from Diponegoro University (UNDIP) in 2003 and Master of Electric Power and Energy Engineering from the University of Indonesia in 2009.

In addition, non-formal education that has been attended to obtain certification includes Government Goods and Services Procurement Certification in 2009.

Career History

He started his career in the Directorate General of Electricity, Ministry of Energy and Mineral Resources since 2005 until present. In 2013-2017, he served as Senior Head of Electricity Business Supervision, as Section Head of Selling Price and Electricity Network Rental. In 2015-2018, and as Head of Subdirectorate/ Coordinator of Electricity Price Planning Group. In 2018-2021. In 2021, he was assigned as Senior Researcher on Energy at the Asia Pacific Energy Research Center (APERC), Japan. Since 2022 until now as Coordinator of the Electricity Tariff and Subsidy Working Group.

Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Independence of the Nomination and Remuneration Committee

Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite Nominasi dan Remunerasi dapat bertindak independen semata-mata untuk kepentingan Perusahaan, terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan kepentingan Perusahaan. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi telah memenuhi kriteria independensi sebagai berikut:

The Board of Commissioners ensures that the Nomination and Remuneration Committee can act independently solely for the interests of the Company, regardless of the influence of various parties who have interests that may conflict with the interests of the Company. Members of the Nomination and Remuneration Committee have met the following independence criteria:

Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi
Independence of the Nomination and Remuneration Committee

Kriteria Independensi Independence Criteria		Segar Perubhy	Chairunisa Dewie	Siti Maesyaroh
Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit dan non audit atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam kurun 6 (enam) bulan terakhir.	Has no matter of a public accounting firm, legal consulting firm, or other parties providing audit and non-audit services or other consulting services to the Company within the last 6 (six) months.	√	√	√
Tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung di Perusahaan.	Does not have shares either directly or indirectly in the Company.	√	√	√
Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan/atau mengendalikan Perusahaan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan.	Has a person who has the authority and responsibility to plan, lead, and/or control the Company within the last six months.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga (sedarah dan semenda) dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (sampai dengan kedua, baik secara garis lurus maupun ke samping) dan hubungan pekerjaan.	Does not have a close family relationship with members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners up to the second degree, either in a straight line or sideways, or a marital relationship.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan usaha langsung dan tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan. dan	Do not have direct and indirect business relationships related to the Company's business activities; and	√	√	√
Tidak sedang berada dalam institusi yang kegiatan usahanya memberikan jasa kepada Perusahaan.	Not serving in an institution whose business activities provide services to the Company.	√	√	√

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi
Duties and Responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee

Komite Nominasi dan Remunerasi dalam menjalankan tugas pengawasan Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab dimana dalam pelaksanaannya, berhubungan dengan pihak-pihak terkait yang masing-masing memiliki tanggung jawab yang jelas, pada ranah kegiatan tersendiri. Direksi dan seluruh jajaran manajemen, berulang kali dengan sistem pengelolaan talenta, sistem penilaian kinerja dan kebijakan remunerasi. Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Tanggung jawab ini dilakukan kepada fungsi dan tugas untuk independensi dalam di dalam Piagam Komite. Tugas pokok Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Melakukan review secara berkala atas Sistem Pengelolaan Talenta (Talent Management System) perusahaan serta memberikan dan usulannya atas pelaksanaannya.
2. Melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur Penghadiahkan talenta (Talent Classification) yang dilakukan oleh Direksi.
3. Melakukan usulan dan kajian atas Talenta yang diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris (Calon/list Talenta), untuk menghasilkan daftar Talenta yang akan direkomendasikan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS (Nominasi/ Talent).

The Nomination and Remuneration Committee in supporting the supervisory function of the Board of Commissioners has duties and responsibilities which in its implementation relate to the related parties who each have their responsibilities in all activities including the Board of Directors and all levels of management, especially related to the talent management system, performance assessment system and remuneration policy. The Nomination and Remuneration Committee is responsible to the Board of Commissioners. The responsibility is based on the main functions and duties as regulated in the Committee Charter. The main duties of the Nomination and Remuneration Committee are as follows:

1. Conducting periodic reviews of the Company's Talent Management System as well as monitoring and evaluating its implementation.
2. Evaluating the Talent Classification system and procedures conducted by the Board of Directors.
3. Validating and submitting the Talent proposed by the Board of Directors to the Board of Commissioners (Selected Talents), to produce a list of Talent then will be nominated by the Board of Commissioners to the GMS (Nominated Talent).

4. Melakukan evaluasi terhadap Calon Wakil Perseroan yang akan diusulkan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris perusahaan anak, sebelum disetujui rapatnya (RUPS);
5. Melakukan evaluasi atas usulan Key Performance Indicators individu anggota Direksi;
6. Menyiapkan usulan sistem evaluasi kinerja individu bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
7. Menyiapkan usulan program pengembangan bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
8. Melakukan evaluasi dan tahapan rekomendasi bagi pejabat yang membutuhkan persetujuan tanggapan dari Dewan Komisaris;
9. Melakukan evaluasi atas usulan Direksi mengenai struktur organisasi perusahaan;
10. Melakukan analisa, memberi masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas kebijakan, pedoman, struktur dan sistem SDM dan Organisasi Perusahaan;
11. Melakukan analisa memberi masukan kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan SDM dan Organisasi yang dilakukan oleh Perusahaan;
12. Bersama komite lainnya mereka dan memberi masukan sesuai dengan bidang komite kepada Dewan Komisaris atas:
    a. Pelaksanaan Anggaran Dasar dan Board Manual Perusahaan;
    b. Rencana Kerja Jangka Panjang (RJPP);
    c. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
    d. Laporan Tahunan, Triwulanan dan Laporan Khusus lainnya;
    e. Good Corporate Governance (GCG);
    f. Key Performance Indicator (KPI) Perusahaan;
13. Memperbaiki, mengevaluasi dan memberikan masukan terhadap Laporan Manajemen, Kinerja SDM dan Organisasi dan Laporan K3L yang disusun oleh Direksi;
14. Melakukan analisa, memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas usulan-usulan Direksi dalam:
    a. Program Pengembangan SDM dan Organisasi yang mendukung Human Capital Readiness (HCR) dan Organizational Capital Readiness (OCR);
    b. Nominasi pejabat satu tingkat di bawah Direksi;
15. Melakukan analisa, memberi masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas kebijakan, strategi dan pelaksanaan pengelolaan K3 (Lingkungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja) perusahaan;
16. Melakukan analisa, memberi masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas kebijakan, strategi dan pelaksanaan pengelolaan budaya perusahaan, hubungan industrial serta pelaksanaan reward and punishment pegawai.

4. Evaluating the Company's Representative Candidate who will be proposed as members of the Board of Directors or members of the Board of Commissioners of subsidiaries, before being submitted to the GMS;
5. Evaluating the proposal of individual Key Performance Indicators of members of the Board of Directors;
6. Preparing proposals of individual performance evaluation system for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
7. Preparing proposals of development programs for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
8. Evaluating and analyzing policies for employees who require approval/response from the Board of Commissioners;
9. Evaluating the Board of Directors' proposal regarding the Company's organizational structure;
10. Analyzing, providing input and recommendations to the Board of Commissioners on the policies, guidelines, strategies and systems of the Company's HR and Organization;
11. Analyzing, providing input to the Board of Commissioners on the implementation of HR and Organization management activities conducted by the Company;
12. Together with other committees, reviewing and providing input in accordance with the committee's field to the Board of Commissioners:
    a. Implementation of the Company's Articles of Association and Board Manual;
    b. Company's Long Term Plan (RJPP);
    c. Annual Budget and Operational Plan (RKAP);
    d. Annual, Quarterly and monthly Performance Reports;
    e. Good Corporate Governance (GCG);
    f. Key Performance Indicators (KPI) of the Company;
13. Studying, evaluating and providing input on the Management Report, HR and Organizational Performance and QHSE Report prepared by the Board of Directors;
14. Analyzing, providing input and recommendations to the Board of Commissioners on the proposals of the Board of Directors in:
    a. HR and Organizational Development Programs that support Human Capital Readiness (HCR) and Organizational Capital Readiness (OCR);
    b. Nomination of officers one level below the Board of Directors;
15. Analyzing, providing input and recommendations to the Board of Commissioners on policies, strategies and implementation of the Company's OHSE (Occupational Health and Safety Environment) management;
16. Analyzing, providing input and recommendations to the Board of Commissioners on policies, strategies and implementation of corporate culture management, industrial relations as well as the implementation of employee reward and punishment.

j. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Komite Nominasi dan Remunerasi, mendokumentasikan rapat-rapat komite, membuat risalah rapat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas-tugas komite secara berkala kepada Dewan Komisaris.

k. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian, memastikan seluruhnya dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sesuai lingkup tugas dan tanggung jawab Komite Dewan Komisaris.

l. Menjaga kerahasiaan data serta informasi perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Dewan Komisaris.

j. Preparing the Nomination and Remuneration Committee's activity plan and budget, carrying out committee meetings, preparing minutes of meetings and submitting reports on the implementation of committee duties reports to the Board of Commissioners.

k. Identifying matters that require attention, ensuring their completion and carrying out other duties assigned by the Board of Commissioners in accordance with the scope of duties and obligations of the Committee of the Board of Commissioners.

l. Maintaining the confidentiality of company data and information in accordance with the applicable provisions of the Board of Commissioners.

Pedoman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Work Guidelines of the Nomination and Remuneration Committee

Komite Nominasi dan Remunerasi sebelumnya menggunakan pedoman administrasi Komite SDM dan Organisasi. Dalam pelaksanaan tugasnya berpedoman pada Piagam Komite SDM dan Organisasi yang telah diterbitkan Dewan Komisaris pada tahun 2018. Piagam Komite SDM dan Organisasi mengatur beberapa hal terkait antara lain Maksud dan Tujuan, Fungsi dan Tugas Pokok, Tanggung Jawab dan Wewenang, Organisasi dan Keanggotaan, Key Performance Indicator dan Penilaian Kinerja Komite, Hubungannya Kerja dan Kode Etik. Pedoman yang Komite Nominasi dan Remunerasi (Baru) secara berkala dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan pemutakhiran guna memastikan kesesuaian materinya dengan dinamika organisasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan best practices.

The Nomination and Remuneration Committee previously used the administration of the HR and Organization Committee. In carrying out its duties, the Nomination and Remuneration Committee is guided by the HR and Organization Committee Charter that has been determined by the Board of Commissioners in 2018. The HR and Organization Committee Charter regulates several matters related to, among others, Purposes and Objectives, Functions and Main Duties, Responsibilities and Authority, Organization and Membership, Key Performance Indicators and Committee Performance Assessment, Working Relationship and Code of Conduct. The work guidelines of the Nomination and Remuneration Committee are reviewed regularly and if deemed necessary, updates can be conducted to ensure the suitability of its content with organizational dynamics, applicable laws and regulations as well as best practices.

Rencana Program Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Work Program Plan of the Nomination and Remuneration Committee

Program kerja Komite Nominasi dan Remunerasi disusun setiap tahun untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris. Program kerja Komite Nominasi dan Remunerasi tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Internal Komite Nominasi dan Remunerasi :
   a. Evaluasi Laporan Manajemen Bulanan, Triwulanan dan Tahunan.
   b. Evaluasi pencapaian target Program Strategi SDM dan Organisasi.
   c. Evaluasi pencapaian Target Zero Accident, K3L dan Proper.

The Nomination and Remuneration Committee work program is prepared annually to encourage the effective implementation of duties and responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee in supporting the implementation of the supervisory tasks of the Board of Commissioners. The work program of the Nomination and Remuneration Committee in 2022 is as follows:

1. Internal Activities of the Nomination and Remuneration Committee:
   a. Evaluation of Monthly, Quarterly and Annual Management Reports.
   b. Evaluation of the achievement of the HR and Organization Strategic Program targets.
   c. Evaluation of the achievement of Zero Accident, K3L and Proper Targets.

f. Evaluasi pemenuhan Target HCR dan GCR;
e. Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola IT dan Manajemen Dokumen;
f. Menyusun Laporan Kegiatan Komite SDM dan Organisasi;

g. Menyiapkan dan memantau Program Kerja Komite SDM dan Organisasi;
h. Mengevaluasi dan memberikan masukan kepada Dewan terhadap usulan Direksi dalam RA pengembangan Organisasi, Nominasi dan Remunerasi Perusahaan;

i. Berpartisipasi Aktif dalam Rapat Internal Dewan (RID) untuk membahas bahan rapat pengawasan dengan Direksi;
j. Memberikan masukan (apabila diminta) kepada Dewan Komisaris dalam rapat pengawasan dengan Direksi.

2. Kegiatan bersama Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan

a. Melaksanakan rapat berjenjang antar Komite dan Sekretaris Dewan Komisaris;
b. Melaksanakan evaluasi Laporan Kinerja dan Laporan Manajemen;
c. Evaluasi atas usulan RKAP 2023 dan Usulan revisi RKAP 2023;
d. Evaluasi atas Kinerja Anak Perusahaan/ Perusahaan Afiliasi;

e. Evaluasi atas IT Governance dan Evaluasi TLD (Three Lines of Defense);
f. Memonitor/ajukan usulan Dewan Komisaris terkait tunjuk pengawasan dan pemberian wewenang;
g. Menyusun dokumen pendukung terkait dengan assesmen GCG;
h. Menyusun draft tanggapan Dewan Komisaris atas RKAP dan LPT;
i. Menyusun draft tanggapan / rekomendasi Dewan Komisaris atas surat Direksi;
j. Pembahasan permasalahan korporat dengan jajaran manajemen sesuai permintaan Dewan Komisaris / Direksi.

d. Evaluation of the achievement of HCR and GCR Targets;
e. Monitoring and Evaluation of IT Governance and Document Management;
f. Preparing the HR and Organization Committee Activity Report;

g. Preparing and monitoring the Work Program of the HR and Organization Committee;
h. Evaluating and providing input to the Board of Commissioners on the Board of Directors' proposal in terms of the development of the Company's Organization, Nomination and Remuneration;

i. Actively participating in the Board of Commissioners' Internal Meeting (RID), to discuss materials for the supervisory meeting with the Board of Directors;
j. Providing input (if requested) to the Board of Commissioners in supervisory meetings with the Board of Directors.

2. Activities with the Secretary of the Board of Commissioners, Audit Committee, Risk Management and Compliance Committee

a. Conducting weekly meetings between Committees and the Secretary of the Board of Commissioners;
b. Evaluating the Performance Report and Management Report;
c. Evaluation of the proposed 2023 RKAP and the Proposed revision of the 2023 RKAP;
d. Evaluation of the Performance of Subsidiaries/Affiliate Companies;
e. Evaluation of IT Governance and TLD (Three Lines of Defense);
f. Following up on the decisions of the Board of Commissioners related to the supervisory and advisory functions;
g. Preparing the supporting documents related to GCG assessment;
h. Preparing a draft of the Board of Commissioners' response to the RKAP and LPT;
i. Preparing a draft of the Board of Commissioners' response/ recommendation on the Board of Directors' letter;
j. Discussing corporate issues with management as requested by the Board of Commissioners/Board of Directors.

Pelaksanaan Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi

Duties Implementation of the Nomination and Remuneration Committee

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi telah direalisasikan berdasarkan rencana program kerja tahun 2022 yang telah disetujukan dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris. Komite Nominasi dan Remunerasi melaporkan realisasi program kerja secara triwulanan kepada Dewan Komisaris. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi diantaranya melaksanakan telaah, memberikan masukan atau rekomendasi, menghadiri rapat-rapat dengan Dewan Komisaris, Direksi, maupun jajaran manajemen.

The implementation of duties and responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee has been realized based on the 2022 work program plan that has been determined in supporting the implementation of the supervisory duties of the Board of Commissioners. The Nomination and Remuneration Committee reports the realization of the work program quarterly to the Board of Commissioners. Activities conducted in the context of carrying out duties and responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee include conducting reviews, providing input or recommendations, attending meetings with the Board

bersama yang mencakup sistem pengelolaan talenta, sistem penilaian kinerja, kebijakan remunerasi dan pertemuan lain serta melakukan kunjungan kerja bersama Dewan Komisaris. Secara umum, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan pengawasan dan pendampingan serta memberikan masukan sepanjang tahun 2022 antara lain untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Evaluasi Laporan Kinerja setiap bulan dan Laporan Manajemen Triwulanan tahun 2022.
2. Pembahasan usulan wakil Perusahaan pada Anak Perusahaan.
3. Pembahasan pelaksanaan Program Bidang SDM dan Organisasi termasuk mengevaluasi pencapaian targetnya.
4. Evaluasi pencapaian target Zero Accident terkait implementasi K3L dan Repowering Fungsi K3L dan Persiapan PROPER.
5. Evaluasi pencapaian target DCR dan HCR.
6. Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola TI terkait IT Master Plan, Enterprise Architecture (EA) Perusahaan (MS – 2.0) dan Pengembangan Teknologi Informasi.
7. Pembahasan usulan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.
8. Menyampaikan Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi secara Triwulanan sepanjang tahun 2022.
9. Menyiapkan Program Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi tahun 2023.
10. Berpartisipasi Aktif dalam Rapat Internal Dewan Komisaris 2022.
11. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dalam rapat pengawasan dengan Direksi.
12. Mengikuti rapat Komite Audit, Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan, Sekretaris Dewan Komisaris.
13. Mengikuti rapat antar Komite dan Sekretaris Dewan Komisaris.
14. Mengikuti kunjungan kerja lapangan dengan Dewan Komisaris.

of Commissioners, Board of Directors, all levels of management, especially those handling the talent management system, performance assessment system, remuneration policy and other meetings as well as conducting work visits with the Board of Commissioners. In general, the Nomination and Remuneration Committee has conducted supervision and assistance as well as provided input throughout 2022, among others, for the following matters:

1. Evaluation of monthly Performance Reports and Quarterly Management Reports in 2022.
2. Discussion of the Company's proposed representatives to the Subsidiary.
3. Discussion of the implementation of the HR and Organization Division Program including evaluating the achievement of its targets.
4. Evaluation of Zero Accident target achievement related to OHSE Implementation, OHSE Function Repowering and PROPER Preparation.
5. Evaluation of DCR and HCR target achievement.
6. Monitoring and Evaluation of IT Governance related to IT Master Plan, Company Enterprise Architecture (EA) (MS – 2.0) and Information Technology Development.
7. Discussion of the proposed Remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors.
8. Submitting the Nomination and Remuneration Committee Report on a Quarterly Basis throughout 2022.
9. Preparing the Nomination and Remuneration Committee Work Program for 2023.
10. Actively participating in the Internal Meeting of the Board of Commissioners 2022.
11. Providing input to the Board of Commissioners in supervisory meetings with the Board of Directors.
12. Attending meetings of the Audit Committee, the Risk Management and Compliance Committee, Secretary of the Board of Commissioners.
13. Attending meetings between Committees and the Secretary of the Board of Commissioners.
14. Participating in field work visits with the Board of Commissioners.

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Nomination and Remuneration Committee Meeting

Piagam Komite mengatur bahwa Komite Nominasi dan Remunerasi mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu bulan untuk menyelesaikan Program Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi. Selain itu, BMC Manual juga menjelaskan bahwa Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan pertemuan rutin dengan Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan serta melakukan pertemuan dengan fungsi terkait mengenai pelaksanaan nominasi dan remunerasi di

The Committee Charter regulates that the Nomination and Remuneration Committee holds regular meetings at least 1 (one) time a month to complete the Nomination and Remuneration Committee Work Program. In addition, the Board of Commissioners Manual also explains that the Nomination and Remuneration Committee is required to conduct regular meetings with the Board of Commissioners at least 1 (one) time a month and conduct meetings with related functions regarding the implementation of

Perusahaan dalam rangka membahas pencalonan dan aktivitas Perusahaan baik secara berkala maupun sewaktu-waktu apabila dipandang perlu. Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan rapat sebanyak lima (5) kali sepanjang tahun 2022 sebanyak 30 (tiga puluh delapan) kali.

nomination and remuneration in the Company in order to discuss the development and activities of the Company, both periodically and at any time if necessary. The Nomination and Remuneration Committee has carried out 30 (thirty-eight) meetings throughout 2022.

Agenda Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi
Meeting Agenda of the Nomination and Remuneration Committee

No.	Tanggal Date	Agenda
1	7 Januari 2022 January 7, 2022	Arbasi Anggota Komite Baru Induction of New Committee Members
2	11 Januari 2022 January 11, 2022	Talent Mobility
3	14 Januari 2022 January 14, 2022	Rapat Koordinasi Lingkungan PCR Cluster Environmental Communication Event in Cross-Unit
4	11 Februari 2022 February 11, 2022	Finalisasi Hasil Komentasi Lingkungan PKTS Cluster Finalization of Cross-Unit Environmental Communication Ideas
5	11 Februari 2022 February 11, 2022	Mitigasi Kecelakaan Fire Mitigation
6	14 Maret 2022 March 14, 2022	Remunerasi 2022 Remuneration 2022
7	18 Maret 2022 March 18, 2022	Pengembangan ICT dan Mapping SDM Komisaris ICT Development and Commissioner HR Mapping
8	31 Maret 2022 March 31, 2022	Integrated Management System (IMS)
9	30 Maret 2022 March 30, 2022	Remunerasi Komite Remuneration for Committee
10	4 April 2022 April 4, 2022	Perisapan Proper 2022 Proper Preparation 2022
11	12 April 2022 April 12, 2022	Mapping SDM Komisaris Composition HR Mapping
12	19 April 2022 April 19, 2022	Pemaparan Proper Bintik Business Process Mapping
13	22 April 2022 April 22, 2022	Global Heboh
14	10 Mei 2022 May 10, 2022	Incidence Rate Academy dan Kesiapan Pengajar Bersama IRR Academy Simulation and Emergency Response Training
15	13 Mei 2022 May 13, 2022	Rapat Kemarmasi Remuneration Private Meeting
16	6 Juni 2022 June 6, 2022	Pengolahan FABA Fabric Processing
17	10 Juni 2022 June 10, 2022	EAS Crisis EAS Crisis
18	15 Juni 2022 June 15, 2022	Commissions Commissions
19	5 Juli 2022 July 5, 2022	Organisasi Proper Project Organization
20	11 Juli 2022 July 11, 2022	Top GRC Award
21	12 Juli 2022 July 12, 2022	Khusus KSI, PKTS, Indonesia Q-GC performance of Indonesia CSHP
22	13 Juli 2022 July 13, 2022	Sosialisasi GMAP SMAP Sosialisasi
23	15 Juli 2022 July 15, 2022	Pengelolaan Aset Archive Management
24	19 Juli 2022 July 19, 2022	Sosialisasi Sosialisasi
25	22 Juli 2022 July 22, 2022	Digitalisasi Area Archive Digitization
26	5 Agustus 2022 August 5, 2022	KHI Cluster KHI Cluster
27	9 Agustus 2022 August 9, 2022	PILAR
28	15 Agustus 2022 August 15, 2022	Digitalisasi Area Archive Digitization
29	18 Agustus 2022 August 30, 2022	Progres Persiapan Proper Proper Preparation Progress

No.	Tanggal Date	Agenda
30	22 Agustus 2022 August 22, 2022	Workshop [illegible]
31	7 September 2022 September 7, 2022	Talent Mobility dan Career Path Jalam Proteksi Talent Mobility and Career Path for Protection System
32	13 September 2022 September 13, 2022	Program [illegible]
33	27 Oktober 2022 October 27, 2022	Proses [illegible]
34	2 November 2022 November 2, 2022	Pengelolaan SDM dan Organisasi Human Capital and Organization Management
35	8 November 2022 November 8, 2022	Program Migrasi SAP dan [illegible] SAP Migration Program and [illegible]
36	6 Desember 2022 December 6, 2022	Hasil [illegible] dan Payroll Result [illegible] and Payroll
37	7 Desember 2022 December 7, 2022	Tanggapan Dewan Pengawas Board of Commissioners' Response
38	22 Desember 2022 December 22, 2022	[illegible] dan [illegible]

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Frequency of Meetings and Attendance of Members of the Nomination and Remuneration Committee

Nama Name	Jabatan Position	Frekuensi Rapat Frequency of Meeting	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Agung Pamitra	Ketua Chairman	38	38	100%
Bagus Pamitra	Wakil Ketua Vice Chairman	38	38	100%
Chandra Dewa	Sekretaris (Pihak Independen) Secretary (Independent Party)	38	38	100%
[illegible]	Anggota (Pihak Independen) Member (Independent Party)	38	38	100%

Keterangan:
1. Ibu [illegible] tanggal 22 September 2022 [illegible]
Ibu [illegible] September 22, 2022 [illegible]

Information:
1. [illegible] December 22, 2022 [illegible]

Program Pengembangan Kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Competency Development Program of the Nomination and Remuneration Committee

Pengembangan kompetensi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilaksanakan dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi. Program pengembangan kompetensi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sepanjang tahun 2022 diuraikan pada bagian Pendidikan dan Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Sekretaris Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unsur GCG.

Competency development of the Nomination and Remuneration Committee Members is carried out in order to encourage the effectiveness of duties implementation of the Nomination and Remuneration Committee. The competency development program of the Nomination and Remuneration Committee Members throughout 2022 is described in the Education and Training section of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Head of GCG.

Penilaian Kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Performance Assessment of the Nomination and Remuneration Committee

Kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi dievaluasi secara berkala baik *self assessment* maupun oleh Dewan Komisaris dalam agenda rapat evaluasi internal Dewan Komisaris dan organ Dewan Komisaris untuk memastikan dan mendorong efektivitas pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi. Penilaian kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan berdasarkan kriteria berupa pencapaian target-target atau realisasi Rencana Kerja Tahunan Komite Nominasi dan Remunerasi dengan indikator penilaian yang meliputi:

1. Kehadiran waktu agenda kegiatan Dewan Komisaris
2. Kualitas pekerjaan
3. Kontribusi pada kegiatan Dewan Komisaris
4. Pemaparan pada Rapat Internal Dewan Komisaris (RID)
5. Pelaksanaan rapat (RID, RKAT, RKAP)
6. Penyusunan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris

Berikut adalah hasil penilaian kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi pada tahun 2021:

Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan evaluasi melalui *self assessment* secara berkala atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang telah dijalankan. Selain itu, Dewan Komisaris juga melakukan evaluasi atas kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi dalam agenda rapat evaluasi internal Dewan Komisaris dan organ Dewan Komisaris untuk memastikan dan mendorong efektivitas pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi. Penilaian kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan berdasarkan kriteria dan realisasi rencana kerja Komite Nominasi dan Remunerasi yang telah ditetapkan. Berikut adalah kriteria dan hasil penilaian tahun 2021 atas kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi:

The performance of the Nomination and Remuneration Committee is regularly evaluated, both by self-assessment and by the Board of Commissioners in the agenda of the internal evaluation meeting of the Board of Commissioners and organs of the Board of Commissioners to ensure and encourage the effective implementation of duties of the Nomination and Remuneration Committee. The performance assessment of the Nomination and Remuneration Committee is conducted based on criteria in the form of targets achievement or the realization of the Annual Work Plan of the Nomination and Remuneration Committee with assessment indicators including:

1. Timeliness of the Board of Commissioners' activity agenda
2. Quality of work
3. Contribution to the activities of the Board of Commissioners
4. Presentation at the Internal Meeting of the Board of Commissioners (RID)
5. Implementation of meetings (RID, RKAT, RKAP)
6. Preparation of the Board of Commissioners' Supervisory Report

The following are the results of performance assessment of the Nomination and Remuneration Committee in 2021:

The Nomination and Remuneration Committee conducts periodic independent evaluation (self-assessment) on the implementation of duties and responsibilities that have been carried out. In addition, the Board of Commissioners also evaluates the performance of the Nomination and Remuneration Committee in the agenda of the internal evaluation meeting of the Board of Commissioners and organs of the Board of Commissioners to ensure and encourage the effective implementation of duties of the Nomination and Remuneration Committee. The performance assessment of the Nomination and Remuneration Committee is conducted based on the criteria and realization of the Nomination and Remuneration Committee work plan that has been determined. The following are the criteria and results of the 2021 assessment of the Nomination and Remuneration Committee's performance:

Tabel Evaluasi Kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Table of Performance Evaluation of the Nomination and Remuneration Committee

No.	Kriteria Penilaian Criteria Penilaian	Nilai Nilai
1	Kehadiran waktu agenda kegiatan Dewan Komisaris Timeliness of the agenda for the activities of the Board of Commissioners	5,00
2	Kualitas pekerjaan Quality of work	5,00
3	Kontribusi pada kegiatan Dewan Komisaris Contribution to the activities of the Board of Commissioners	5,00

No.	Kriteria Penilaian Criteria for Assessment	Nilai rata Average
4	Pelaporan pada Rapat Umum Dewan Komisaris (RDS) Presentation at the General Meeting of the Board of Commissioners (RMS)	3,75
5	Melaksanakan tugas lain dari RDS atau Ketua Dewan Komisaris Other duties as assigned by the BOC or Chairman of the Board of Commissioners	3,75
6	Menyiapkan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Preparation of the Supervisory Report of the Board of Commissioners	3,50
Rata-Rata Skor Average Score		**3,50**

Hasil evaluasi atas kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi yang telah dilaksanakan selanjutnya digunakan untuk menyusun langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi dalam mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

The results of evaluating the performance of the Nomination and Remuneration Committee that has been conducted are then used to formulate the necessary measures in order to improve and develop and as a means to the effective implementation of duties of the Nomination and Remuneration Committee in supporting the implementation of duties of the Board of Commissioners.

Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan
Risk Management and Compliance Committee

Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan merupakan organ pendukung fungsi Pengawasan yang dijalankan Dewan Komisaris dalam tata kelola Perusahaan. Dewan Komisaris membentuk Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan dengan tugas pokok membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, khususnya terkait pengawasan kebijakan dan strategi Perusahaan dari sisi risiko maupun kepatuhan. Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan melakukan kaji dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas pendapat terhadap hasil kajian risiko dan kepatuhan pada kegiatan perencanaan, operasional dan investasi Perusahaan serta kegiatan evaluasi atas penerapan kebijakan Risk Management di Perusahaan.

The Risk Management and Compliance Committee is a supporting organ of the Supervisory function carried out by the Board of Commissioners in corporate governance. The Board of Commissioners established the Risk Management and Compliance Committee with the main duty to assist the implementation of duties and responsibilities of the Board of Commissioners, particularly related to the supervision of the Company's policies and strategies in terms of risk and compliance. The Risk Management and Compliance Committee reviews and provides input to the Board of Commissioners on the assessment of the results of risk and compliance studies on the Company's planning, operational and investment activities as well as evaluation activities on the implementation of Enterprise Risk Management in the Company.

Dasar pelaksanaan Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tanggal 14 Agustus 2012. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-11/MBU/12/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

The basis of establishment of the Risk Management and Compliance Committee refers to Law No. 19 of 2003, Law No. 40 of 2007 and Regulation of the Minister of SOEs No. PER-12/MBU/2012 dated August 14, 2012. Regulation of the Minister of SOEs No. PER-09/MBU/07/2021 concerning Amendments to Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organs of the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises, and Regulation of the Minister of SOEs No. PER-11/MBU/12/2021 concerning Second Amendment to Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organs of the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises.

Susunan, Periode dan Masa Jabatan Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Composition, Tenure and Term of Office of the Risk Management and Compliance Committee

Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan diketuai oleh seorang Ketua yang merupakan anggota Dewan Komisaris dan dibantu oleh Sekretaris merangkap anggota serta sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota.

Anggota Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang merangkap sebagai anggota Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan sama dengan masa jabatan pengurusannya sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Sedangkan masa jabatan anggota Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Susunan keanggotaan Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan tidak mengalami perubahan pada tahun 2022. Susunan Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali Nomor: 0154/DKP/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang pembentukan Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan pada Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali sebagai berikut:

The Risk Management and Compliance Committee is led by a Chairman who is a member of the Board of Commissioners and assisted by a Secretary who concurrently a member as well as at least 2 (two) members.

Members of the Risk Management and Compliance Committee are determined based on the Decision of the Board of Commissioners with the term of office of members of the Board of Commissioners who concurrently serve as members of the Risk Management and Compliance Committee is the same as the term of office of their appointment as members of the Board of Commissioners determined by the General Meeting of Shareholders. Meanwhile, the term of office for members of the Risk Management and Compliance Committee who are not members of the Board of Commissioners is 3 (three) years and can be extended for 1 (one) term of office without prejudice to the right of the Board of Commissioners to dismiss them at any time.

The composition of the Risk Management and Compliance Committee membership did not change in 2022. The composition of the Risk Management and Compliance Committee is determined based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Pembangkitan Jawa Bali Number: 0154/DKP/XII/2021 dated December 31, 2021 concerning the establishment of the Risk Management and Compliance Committee of the Board of Commissioners of PT Pembangkitan Jawa Bali as follows:

Composition of the Risk Management and Compliance Committee in January – December, 2022
Composition of the Risk Management and Compliance Committee in January – December, 2022

Name Name	Jabatan Position	Kualifikasi Qualification	Periode Jabatan Tenure	Masa Jabatan Term of Office
Evvert P. Hutajulu	Ketua (Komisaris) Chairman (Commissioner)	Keuangan, Akuntansi Manajemen Risiko, Investasi Safety, Electricity, Market Analysis, and Investment	Aktif Active	1 Januari 2022 – 31 Desember 2022 January 1, 2022 – December 31, 2022
Erlan Rekana Handaka	Wakil Ketua (Komisaris) Vice Chairman (Commissioner)	Stakeholder Management, Risk Management	Aktif Active	1 Januari 2022 – 31 Desember 2022 January 1, 2022 – December 31, 2022
Bambang Dwiyanto	Sekretaris merangkap anggota (Pihak Independen) Secretary and member (Independent Party)	Distance Accounting and Cost Accounting, Capital Budgeting, Corporate Finance, Organization Management, Process Facilitation dan Risk Management	Aktif Active	1 Januari 2022 – 31 Desember 2022 January 1, 2022 – December 31, 2022
Capt. (AL) Amo	Anggota (Pihak Independen) Member (Independent Party)	Wisyen Management, External Management	Aktif Active	1 Januari 2022 – 31 Desember 2022 January 1, 2022 – December 31, 2022

Profil Anggota Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan
Profile of Risk Management and Compliance Committee Members

Evvert P. Hutajulu

Ketua Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan
Chairman of the Risk Management and Compliance Committee

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.

The profile can be seen in the Profile of the Board of Commissioners section.

Erlan Krisna Wardana

Wakil Ketua Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan
Vice Chairman of the Risk Management and Compliance Committee

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.

The profile can be seen in the Profile of the Board of Commissioners section.

Bambang Istianto

Ketua Komite Pemantau Risiko dan Kepatuhan

Secretary of the Risk Management and Compliance Committee

Warga Negara Indonesia. 66 tahun, berdomisili di Jakarta.

Dasar Penggangkatan
Berdasarkan Keputusan Sirkuler Rapat Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali Nomor 0000.K/010/2017 tanggal 14 Juli 2017 dan Keputusan Pemegang Saham di luar Sirkuler Rapat Sirkuler Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali Nomor SK.KOM.PKB.0101 tanggal 01 Desember 2021.

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi yang berhubungan dengan Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham pengendali.

Pendidikan
Menyelesaikan pendidikan Magister Manajemen Keuangan dari Perbanas dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (1997 Gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Padjadjaran, Bandung tahun 2000.

Selain itu, sertifikasi non-formal yang pernah diikuti untuk mendapatkan sertifikasi Komponen Sertifikasi Certified Risk Management Professional (2005) (2010), Fasilitator Governance Risk & Compliance (GRC) (2016), Fasilitator Manajemen Kinerja Program melalui Monitoring & Evaluasi (2018), Sharing session "Peran GRC dalam Pengawasan Kebijakan dan Pengawasan Terpadu (2020), Developing Risk Based APP (2020), Best Practices on Risk Aggregation (2021) dan Risk Beyond 2021, Konferensi Nasional Manajemen Risiko Tahun 2022 dan Sertifikasi Certified Risk Management Professional (CRMP) (2021).

Riwayat Pekerjaan
Mulai berkarir sebagai staf keuangan dan administrasi PT Studio Elektrik (6 tahun), Jabatan-jabatan konsultan keuangan dan lainnya (1988), Manajer Administrasi, Keuangan dan Akuntansi PT ISI Indraja (2000), Manajer Keuangan PT Cahaya Paku (2003), Manajer Keuangan di PT Kelola Daya Sarana (2003), Konsultasi dan Tenaga Ahli pada PT Nafchal Pratama (2010 - sekarang) dan Anggota Komite Manajemen Risiko & Kepatuhan Dewan Komisaris pada PT Pembangkitan Jawa Bali (2016-2018), Sekretaris Komite Manajemen Risiko & Kepatuhan Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali (2018-sekarang)

Indonesian citizen. 66 years old, domiciled in Jakarta.

Basis of Appointment
Appointed based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Pembangkitan Jawa Bali Number 0000.K/010/2017 dated July 14, 2017 and reappointed for the last time based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Pembangkitan Jawa Bali Number SK.KOM.PKB.0101 dated December 01, 2021.

Concurrent Position
Does not have concurrent positions that conflict with the Company's interests in accordance with the applicable laws and regulations.

Education
He graduated as an Associate Expert in Finance and Banking Management from 1997 Gandung College of Economics in 2000 and Bachelor in Economics from Padjadjaran University Bandung in 2000.

In addition, non-formal education that has been attended to obtain certification includes the Certified Risk Management Professional (2005) (2010), Governance Risk & Compliance (GRC) Training (2016), Training on Improving Program Performance through Monitoring & Evaluation (2018), Sharing session "The Role of GRC in Realizing Integrated Policies and Supervision (2020), Developing Risk Based APP (2020), Best Practices on Risk Aggregation (2021) and Risk Beyond 2021, National Risk Management Conference 2022 and Certified Risk Management Professional (CRMP) Certification (2021).

Career History
Started his career as a financial and administration staff of PT Studio Elektrik (6) a management and engineering consulting company (2000), Administration, Finance and Accounting Manager of PT ISI Indraja (2000), Finance Manager at PT Cahaya Paku (2003), Finance Manager at PT Kelola Daya Sarana (2003), Consultant and Expert at PT Nafchal Pratama (2010 - present) and Member of the Risk Management & Compliance Committee at the Board of Commissioners at PT Pembangkitan Jawa Bali (2016 - 2018), Secretary of the Risk Management & Compliance Committee at the Board of Commissioners of PT Pembangkitan Jawa Bali (2018-present).

Gigih Udi Atmo

Anggota Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Member of the Risk Management and Compliance Committee

Warga Negara Indonesia. Ia lahir di Jakarta pada tahun 1966 dan berdomisili di Jakarta.

Dasar Pengangkatan

Diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali Nomor KEP.DEKOM/082/2021 tanggal 10 Desember 2021.

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan yang berhubungan dengan kegiatan material Perusahaan dan pembuatan serta tanda tangan yang berlaku.

Pendidikan

Menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Elektro dari universitas Gadjah Mada tahun 2013 dan Master of Engineering Project Management dari University of Melbourne tahun 2008.

Selain itu, pendidikan non-formal yang pernah diikuti untuk mendapatkan sertifikasi diantaranya *Python Programming for Data Science* dari Asia Pacific Energy Research (2020) dan SCADA *Data Centre Programming and Configuration* dari ALSTOM Grid dan SIEMENS AMERIKA (2005).

Riwayat Pekerjaan

Pernah bekerja sebagai Komisaris Manajer di Asian Transmission and Distribution Indonesia (2003–2006), Visiting Researcher, Asia Pacific Energy Research Centre, Japan (2017–2019), Anggota dari the National Task Force for Reliability Operation of National Electric Power System, Kementerian ESDM (2008-2011), Inspektur Kebangsaan dari Arti Muda, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM (2011 – 2012).

Indonesian citizen. He was born and domiciled in Jakarta.

Basis of Appointment

Appointed based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Pembangkitan Jawa Bali Number KEP.DEKOM/082/2021 dated December 10, 2021.

Concurrent Position

Does not have concurrent positions that conflict with the Company's material operations and the applicable laws and regulations.

Education

Graduated with a Bachelor of Electrical Engineering from Gadjah Mada University in 2013 and Master of Engineering Project Management from the University of Melbourne in 2008.

In addition, non-formal education that has been attended to obtain certification includes *Python Programming for Data Science* from Asia Pacific Energy Research (2020) and SCADA Data Center Programming and Configuration from ALSTOM Grid and SIEMENS AMERICA (2005).

Career History

He had a career as Commercial Manager at Asian Transmission and Distribution Indonesia (2003–2006), Visiting Researcher, Asia Pacific Energy Research Center, Japan (2017–2019), Member of the National Task Force for Reliability Operation of National Electric Power System, Ministry of ESDM (2008–2011), Associate Expert of Electricity Inspector, Directorate General of Electricity Ministry of ESDM (2011–2012).

Independensi Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Independence of the Risk Management and Compliance Committee

Dewan Komisaris menyatakan bahwa Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan dapat bertindak independen semata-mata untuk kepentingan Perusahaan, bebas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan kepentingan Perusahaan. Anggota Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan telah memenuhi kriteria independensi sebagai berikut:

The Board of Commissioners ensures that the Risk Management and Compliance Committee can act independently solely for the interests of the Company, regardless of the influence of various parties who have interests that may conflict with the interests of the Company. Members of the Risk Management and Compliance Committee have met the following independence criteria:

Independensi Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan
Independence in the Risk Management and Compliance Committee

Kriteria Independensi Independence Criteria		Ismail P. Hasibuan	Iwan Kresna Wardana	Dwintoro Indrajaya	Cipti Ida Hidia
Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit dan non-audit atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir Not an insider of a public accounting firm, legal consulting firm, or other parties providing audit and non-audit services or other consulting services to the Company within the last 6 (six) months		√	√	√	√
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung di Perusahaan Does not have shares either directly or indirectly in the Company		√	√	√	√
Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan dan mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu enam bulan terakhir Not a person who has the authority and responsibility to plan, lead, and or control the Company within the last six months		√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga (sedarah dan semenda sampai dengan derajat kedua) dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya Does not have a blood family relationship with members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners up to the second degree, either in a straight line or collateral or in a family relationship		√	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha langsung dan tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan, dan Do not have direct and indirect business relationships related to the Company's business activities; and		√	√	√	√
Tidak sedang berada dalam hubungan yang kegiatan usahanya memberikan jasa kepada Perusahaan Not being in an institution whose business activities provide services to the Company		√	√	√	√

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan
Duties and Responsibilities of the Risk Management and Compliance Committee

Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan dalam membantu fungsi pengawasan Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab utama dalam pelaksanaannya, berhubungan dengan pihak-pihak terkait yang masing-masing memiliki tanggung jawab yang jelas pada semua tingkatan termasuk Direksi dan seluruh jajaran manajemen, terutama terkait dengan fungsi manajemen risiko dan kepatuhan. Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Tanggung jawab ini diberikan kepada fungsi dan tugas pokok sebagaimana diatur di dalam Piagam Komite. Tugas pokok Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan adalah sebagai berikut:

The Risk Management and Compliance Committee in supporting the supervisory function of the Board of Commissioners has duties and responsibilities which in its implementation relate to related parties who each have their responsibilities in all activities including the Board of Directors and all levels of management, especially related to risk management and compliance functions. The Risk Management and Compliance Committee is responsible to the Board of Commissioners. The responsibility is based on the main functions and duties as regulated in the Committee Charter. The main duties of the Risk Management and Compliance Committee are as follows:

1. Memberi saran dan masukan terhadap kebijakan dan strategi Perusahaan kepada Dewan Komisaris, baik dari sisi risiko maupun kepatuhan.
2. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas pendapat terhadap hasil kajian analisa risiko dari kepatuhan pada:
   a. Kegiatan Perencanaan Perusahaan;
   b. Kegiatan Operasional Perusahaan;
   c. Kegiatan Investasi Perusahaan;
   d. Kegiatan evaluasi atas penerapan Enterprise Risk Management di Perusahaan;
   e. Ringkat Kepatuhan Perusahaan dalam menyampaikan laporan berkala kepada Dewan Komisaris.
3. Menyampaikan laporan berkala kepada Dewan Komisaris mengenai kegiatan komite.
4. Memantau dan meiliat bahwa semua kegiatan Perusahaan yang ada di dalam SMR dan ISMS telah mengandung pendekatan Enterprise Risk Management sehubungan terhadap risiko Perusahaan.
5. Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan saran kepada Direksi mengenai berbagai hal yang dapat meningkatkan kelancaran dan efektivitas proses manajemen risiko.
6. Melakukan pembahasan terhadap alas laporan strategis yang memerlukan persetujuan atau tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris terkait aspek kepatuhan dan manajemen risiko.
7. Melakukan penelaahan lapangan untuk memastikan apakah pengendalian risiko dan penerapan aspek kepatuhan telah dilaksanakan secara dan efektif.
8. Melakukan pembahasan terhadap pelaporan fungsi manajemen risiko dan kepatuhan dan rekomendasinya kepada Dewan Komisaris; dan
9. Bertindak sebagai early warning system dengan memberikan kajian berupa saran dan rekomendasi terkait pelaksanaan manajemen risiko dan kepatuhan kepada Dewan Komisaris.

1. Assessing and providing input on the Company's policies and strategies to the Board of Commissioners, both in terms of risk and compliance.
2. Providing input to the Board of Commissioners on the assessment of the results of the risk and compliance analysis study:
   a. Company Planning Activities;
   b. Company Operational Activities;
   c. Company Investment Activities;
   d. Evaluation activities on the implementation of Enterprise Risk Management in the Company;
   e. Compliance level of the Company in submitting periodic reports to the Board of Commissioners.
3. Submitting periodic reports to the Board of Commissioners regarding the Committee's activities.
4. Monitoring and assessing that all Company activities in the RKAP and ISMS have considered an Enterprise Risk Management approach to various Company risks.
5. Assisting the Board of Commissioners in providing advice to the Board of Directors on various matters that can improve the smoothness and effectiveness of the risk management process.
6. Reviewing strategic corporate actions that require approval or written responses from the Board of Commissioners related to compliance and risk management aspects.
7. Conducting field reviews to ensure that risk control and compliance aspect implementation have been carried out appropriately and effectively.
8. Assessing the implementation of risk management and compliance functions and reporting to the Board of Commissioners; and
9. Acting as an early warning system by providing studies in the form of suggestions and recommendations related to the implementation of risk management and compliance to the Board of Commissioners.

Pedoman Kerja Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Work Guidelines of the Risk Management and Compliance Committee

Pedoman kerja Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan ditetapkan oleh Dewan Komisaris dalam bentuk Piagam Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan pada tahun 2016. Piagam Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan mengatur beberapa hal terkait antara lain Maksud dan Tujuan, Fungsi dan Tugas Pokok, Tanggung Jawab dan Wewenang, Organisasi dan Keanggotaan, Key Performance Indicator dan Penilaian kinerja Komite, Mekanisme Kerja dan Kode Etik. Piagam Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan dikaji secara berkala dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan perubahannya guna menyesuaikan kebutuhan maupun dengan ketentuan regulasi/peraturan perundang-undangan yang berlaku dan best practices.

The work guideline of the Risk Management and Compliance Committee were determined by the Board of Commissioners in the form of the Risk Management and Compliance Committee Charter in 2016. The Risk Management and Compliance Committee Charter regulates several matters related to, among others, Purpose and Objectives, Functions and Main Duties, Responsibilities and Authority, Organization and Membership, Key Performance Indicator and Committee Performance Assessment, Work Mechanisms and Code of Conduct. The Risk Management and Compliance Committee Charter is reviewed periodically and if deemed necessary, it can be updated to ensure the suitability of its content with organizational dynamics, prevailing laws and regulations and best practices.

Rencana Program Kerja Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Work Program Plan of the Risk Management and Compliance Committee

Program kerja Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan disusun sebagai bahan untuk monitoring efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris. Program kerja Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan rutin yang terdiri dari :
   a. Kegiatan koordinasi Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan dengan manajemen yang meliputi :
      1) Review RBPP
      2) Menyiapkan bahan pertemuan Dewan dengan Pemegang Saham.
      3) Evaluasi RKAP 2021
      4) Penyusunan RKAP 2023
   b. Monitoring dan Evaluasi Laporan Manajemen Berkala.
   c. Koordinasi Internal Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan.
   d. Kondisi non berkala Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan dengan manajemen.
   e. Evaluasi Pelaksanaan Risiko di Korporat
   f. Rapat bersama dengan Komite lain
2. Kegiatan Khususnya Rutin yang terdiri dari :
   a. Review kebijakan, strategi dan implementasi Pengawasan IT PLN
   b. Review strategi portofolio terkait Diversifikasi Subsidiaries RBPP dan Corporate Charter
   c. Monitoring dan Review Implementasi Tindak Lanjut Hasil Audit IT.
   d. Monitoring dan Review Pengendalian Internal (COSO 1994, COSO ERM, INTOSAI, Three Lines of Defense)
   e. Monitoring dan Review Kebijakan Strategi Security of Supply
   f. Review Enterprise Architecture
   g. Monitoring dan Review implementasi Corporate Agenda
   h. Monitoring dan Review Implementasi Corporate Transformasi
3. Program Pengembangan Kompetensi Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan.

The work program of the Risk Management and Compliance Committee is prepared annually to encourage the effective implementation of duties and responsibilities of the Risk Management and Compliance Committee in supporting the implementation of the supervisory duties of the Board of Commissioners. The work program of the Risk Management and Compliance Committee in 2022 is as follows:

1. Routine activities consisting of:
   a. Coordination activities of the Risk Management and Compliance Committee with management which includes:
      1) RKAP Review
      2) Preparing materials for the Board of Commissioners' meeting with the Shareholders.
      3) Evaluation of the 2021 RKAP
      4) Preparation of the 2023 RKAP
   b. Monitoring and evaluation of periodic Management Reports.
   c. Internal coordination of the Risk Management and Compliance Committee.
   d. Periodic consultation of the Risk Management and Compliance Committee with management.
   e. Preparation Evaluation of Risk Mitigation in the Corporation
   f. Joint meetings with other Committees
2. Specialities Routine Activities consisting of:
   a. Reviewing policy, strategy and implementation of IT PLN Assignment
   b. Reviewing portfolio strategies related to Diversification Subsidiaries RBPP and Corporate Charter
   c. Monitoring and Reviewing the implementation of follow-up of IT Audit Results
   d. Monitoring and Reviewing Internal Control (COSO 1994, COSO ERM, INTOSAI, Three Lines of Defense)
   e. Monitoring and Reviewing Strategic Security of Supply Policy
   f. Reviewing Enterprise Architecture
   g. Monitoring and Reviewing the Implementation of Corporate Agenda
   h. Monitoring and Reviewing the Implementation of Corporate Transformation
3. Competency Development Program for the Risk Management and Compliance Committee.

Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan telah direalisasikan berdasarkan rencana program kerja tahun 2022 yang telah ditetapkan dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris. Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan melaporkan realisasi program kerja secara berkala kepada Dewan Komisaris. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan diantaranya melakukan telaah, memberikan rekomendasi, menghadiri rapat-rapat dengan Dewan Komisaris, Direksi, serta pejabat manajemen terkait/lainnya yang mencangkup manajemen risiko dan pertemuan lain serta melakukan kunjungan kerja bersama Dewan Komisaris, Direksi serta, Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan telah melakukan pengawasan dan pembinaan serta memberikan masukan sepanjang tahun 2022 antara lain untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Evaluasi pelaksanaan RKAT 2022;
2. Proses penyusunan draft RKAT 2023;
3. Pelaksanaan enterprise risk management di level korporat;
4. Pengawasan kebijakan pengelolaan Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi;
5. Pengawasan pelaksanaan pengendalian internal dengan menggunakan pendekatan Three line of Defense;
6. Pemberian rekomendasi dan persetujuan terhadap Operasi Korporasi atau Aksi Korporasi tertentu yang dilakukan oleh Direksi;
7. Pemberian informasi mengenai pengelolaan UMKM dan Unit Pendanginan;
8. Proses investasi dan/atau pengembangan usaha korporat;
9. Proses bisnis internal strategis yang tidak terbatas kepada sistem pengembangan usaha, pengadaan, UMKM dan lain-lain;
10. Pendampingan pelaksanaan proses transformasi korporat Holding dan Sub Holding.

The implementation of duties and responsibilities of the Risk Management and Compliance Committee has been realized based on the 2022 work program plan that has been determined in supporting the implementation of the Board of Commissioners' supervisory duties. The Risk Management and Compliance Committee reports the realization of the work program quarterly to the Board of Commissioners. Activities conducted in order to carry out the duties and responsibilities of the Risk Management and Compliance Committee include conducting reviews, providing input or recommendations, attending meetings with the Board of Commissioners, Board of Directors, or board of management, especially those handling risk management and other meetings as well as conducting work visits with the Board of Commissioners. In general, the Risk Management and Compliance Committee has conducted supervision and assistance as well as provided input throughout 2022, among others, for the following matters:

1. Evaluation of the implementation of the 2022 RKAP;
2. Preparation process of the 2023 RKAP draft;
3. Implementation of enterprise risk management at the corporate level;
4. Supervision of management policies of Subsidiaries and Affiliated Companies;
5. Supervision of the implementation of internal control by using the Three lines of Defense approach;
6. Proposal for recommendations and written approval from the Board of Commissioners for corporate actions taken by the Board of Directors;
7. Updating information regarding the management of UMKMs and the Power Plant Unit;
8. Investment policies and/or corporate business development;
9. Internal business processes including but not limited to the forms of business development, procurement, UMKMs and others;
10. Assistance in the implementation of the corporate transformation process of Holding and Subholding.

Rapat Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Meetings of the Risk Management and Compliance Committee

Pagam Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan mengatur bahwa Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu bulan untuk membahas Program Kerja Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan. Selain itu, GoC Manual juga mengatakan bahwa Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan wajib melakukan pertemuan rutin dengan Dewan Komisaris sekurang-kurangnya

The Risk Management and Compliance Committee Charter stipulates that the Risk Management and Compliance Committee shall hold regular meetings at least 1 (one) time a month to discuss the Work Program of the Risk Management and Compliance Committee. In addition, the GoC Manual also explains that the Risk Management and Compliance Committee must conduct regular meetings with the Board of Commissioners at least 1 (one) time

[illegible] kali dalam sebulan serta melakukan pertemuan berkelanjutan terkait tindakan mengenai pelaksanaan manajemen risiko dan kepatuhan di Perusahaan dalam rangka memastikan pelembagaan dan aktivitas Perusahaan baik secara berkala maupun sewaktu-waktu apabila diperlukan. Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan telah melaksanakan rapat sepanjang tahun 2022 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali.

a month and conduct meetings with related functions, especially regarding the implementation of risk management and compliance in the Company, in order to discuss the development and activities of the Company, both periodically and at any time if necessary. The Risk Management and Compliance Committee has conducted 27 (twenty-seven) meetings throughout 2022.

Agenda Rapat Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan
Meeting Agenda of the Risk Management and Compliance Committee

No.	Tanggal Date	Agenda
1.	12 Januari 2022 January 12, 2022	Pembahasan IT Helpdesk Level Discussion of IT Helpdesk Level
2.	18 Januari 2022 January 18, 2022	Pembahasan Risk Profile TW IV 2021 Discussion of Risk Profile for the fourth quarter of 2021
3.	4 Februari 2022 February 4, 2022	Progress Penugasan Proyek EPT Progress of EPC Project Assignment
4.	11 Februari 2022 February 11, 2022	Inisiasi Shell Decarbonization Approach Initiation of Shell's Decarbonization Approach
5.	23 Februari 2022 February 23, 2022	Mitigasi dan Program Kerja Peningkatan Kinerja Paten 1,2 Mitigation and Work Program for Performance Improvement of Patent 1,2
6.	1 Maret 2022 March 1, 2022	Pembahasan agenda: Project monitoring di Perusahaan (PMPG) Discussion of the Project monitoring application in the Company (PMPG)
7.	15 Maret 2022 March 15, 2022	Pengenalan ISO dan Mapping SEMI Standard ISO, Assessment, and Mapping of Coordination / Liaison Relevance
8.	18 Maret 2022 March 18, 2022	Pembahasan TKDN PLTS Cirata Discussion of TKDN for Cirata SPP
9.	05 April 2022 April 5, 2022	Pembahasan metode pengendalian EPT pada pembangkit existing dan AMC yang dikelola oleh Perusahaan Discussion of EPC control methods in existing power plants and AMC managed by the Company
10.	14 April 2022 April 14, 2022	Pembahasan hasil kajian area operasi PLTA Cirata Discussion of the results of the Cirata HPP operation system study
11.	19 Mei 2022 May 19, 2022	Pembahasan Helpdesk Manajemen Risiko korporat tahun 2022 Discussion of Corporate Risk Management Guidelines in 2022
12.	23 Mei 2022 May 23, 2022	Pembahasan Progress Proyek PLTS Cirata Discussion of Cirata SPP Project Progress
13.	10 Juni 2022 May 10, 2022	Overview Sistem Proteksi Pembangkit dengan lingkup optimalisasi EPDR Overview of Power Plant Protection System in the context of EPDR optimization
14.	17 Juni 2022 May 17, 2022	- Pembahasan Penerapan Teknologi DTLR di pembangkit yang dikelola oleh Perusahaan - Pembahasan teknologi produksi abu aktivasi – Discussion of DTLR Technology implementation in power plants managed by the Company – Discussion of ash activation production technology
15.	18 Juli 2022 July 18, 2022	Pembahasan IT Helpdesk Plan Discussion of IT Helpdesk Plan
16.	29 Juli 2022 July 29, 2022	Benchmark Upacara HAN Benchmark of HAN Ceremony
17.	3 Agustus 2022 August 3, 2022	Pembahasan Kinerja SIMPA Discussion of SIMPA performance
18.	19 Agustus 2022 August 19, 2022	HSE Event Proaktif HSE on Proaktif HSE system
19.	23 Agustus 2022 August 30, 2022	Risk Profile Semester I Risk Profile Semester I
20.	30 Agustus 2022 August 30, 2022	Benchmark Pengadaan Area PT KAI Benchmark of PT KAI Area Procurement

No.	Tanggal Date	Agenda
01	7 September 2021 September 7, 2021	Review Penggunaan Biomass 100% di Unit Kalsel 1,2 Plan to use 100% Biomass in Kalsel 1,2 G1
02	10 September 2021 September 10, 2021	Rekonsiliasi AKI 2020 (Pembelian Gasbung RE + PLTGU Sengkang) AKI 2020 Reconciliation (Purchase of RE Gasbung + Sengkang CCPP)
03	18 Oktober 2021 October 18, 2021	- Rekonsiliasi AKI 2020 (Pembelian Gasbung RE + PLTGU Sengkang) - Pembahasan draft RKAP 2021 - AKI 2020 Reconciliation (Purchase of RE Gasbung + Sengkang CCPP) - Discussion of the 2021 RKAP draft
04	15 November 2021 November 15, 2021	Evaluasi Proses Assessment Unit Pembangkit yang Disiapkan ke PNP Evaluation of the Assessment Process of Power Plant Units Transferred to PNP
05	17 November 2021 November 17, 2021	Pembahasan Perubahan AKI 2020 – Pembelian PLTGU Sengkang Discussion of Changes in AKI 2020 – Purchase of Sengkang CCPP
06	1 Desember 2020 December 1, 2021	Finalisasi AKI Komponen 1 G1 Finalization of 1 G1 Concrete Kalsel
07	29 Desember 2021 December 29, 2021	Pembahasan Perubahan Biaya Engkus Unit 1 + 2 G1 Discussion of Changes in Electricity Kalsel 1 + 2 G1

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Frequency of Internal Meetings and Attendance Rate of the Risk Management and Compliance Committee Members

Nama Name	Jabatan Position	Frekuensi Rapat Frequency of Meeting	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Ismail P. Fulaqos	Ketua Chairman	27	27	100%
Edo Erlecia Valdania	Wakil Ketua Vice Chairman	27	27	100%
Bambang Joerdi	Sekretaris (Pihak Independen) Secretary (Independent Party)	27	27	100%
Digit Udi Wiraa	Anggota (Pihak Independen) Member (Independent Party)	27	27	100%

Program Pengembangan Kompetensi Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Competency Development Program of the Risk Management and Compliance Committee

Pengembangan kompetensi Anggota Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan dilaksanakan dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan. Program pengembangan kompetensi Anggota Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan sepanjang tahun 2022 diantaranya pada bagian Pendidikan dan Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Kepala SPI.

The competency development of the Risk Management and Compliance Committee Members is carried out in order to encourage the effectiveness of the implementation of duties of the Risk Management and Compliance Committee. The competency development program of the Risk Management and Compliance Committee Members throughout 2022 is described in the section on Education and Training on the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Head of IAU.

Penilaian Kinerja Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Performance Assessment of the Risk Management and Compliance Committee

Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan melakukan evaluasi mandiri (self assessment) secara berkala atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang telah dijalankan. Selain itu, Dewan Komisaris juga melakukan evaluasi atas kinerja Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan dalam agenda rapat evaluasi internal Dewan Komisaris dan organ Dewan Komisaris untuk memastikan dan mendorong efektivitas pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan. Penilaian kinerja Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan dilakukan berdasarkan kriteria dan realisasi rencana kerja Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang telah ditetapkan. Berikut adalah kriteria dan hasil penilaian tahun 2022 atas kinerja Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan.

The Risk Management and Compliance Committee conducts periodic self-assessment on the implementation of its duties and responsibilities. In addition, the Board of Commissioners also evaluates the performance of the Risk Management and Compliance Committee in the agenda of the internal evaluation meeting of the Board of Commissioners and organs of the Board of Commissioners to ensure and encourage the effective implementation of duties of the Risk Management and Compliance Committee. The performance assessment of the Risk Management and Compliance Committee is conducted based on the criteria and realization of the work plan of the Risk Management and Compliance Committee that has been determined. The following are the criteria and results of the 2022 assessment of the Risk Management and Compliance Committee's performance.

Tabel Evaluasi Kinerja Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Table of Performance Evaluation of the Risk Management and Compliance Committee

No.	Kriteria Penilaian Assessment Criteria	Data-nilai Weight
1	Ketepatan waktu agenda (agenda) Dewan Komisaris Timeliness of the agenda for the activities of the Board of Commissioners	0,05
2	Kualitas (alat) dan Quality of work	0,25
3	Kontribusi pada kegiatan Dewan Komisaris Contribution to the activities of the Board of Commissioners	0,25
4	Presentasi pada Rapat Internal Dewan Komisaris (RD) Presentation at the Internal Meeting of the Board of Commissioners (RD)	0,10
5	Kehadiran rapat (RD, KDD, RKK) Meetings (RD, KDD, RKK)	0,10
6	Penyajian Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Presentation of the Supervisory Report of the Board of Commissioners	0,05
Nilai-Rata-Rata Average Score		**0,85**

Hasil evaluasi atas kinerja Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang telah dilakukan sebelumnya digunakan untuk merumuskan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka perbaikan dan pengembangan serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan dalam mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

The evaluation results on the performance of the Risk Management and Compliance Committee that have been conducted are then used to formulate the necessary measures in order to improve and develop as well as increase the effectiveness of the implementation of duties of the Risk Management and Compliance Committee in supporting the implementation of duties of the Board of Commissioners.

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Perusahaan menetapkan Sekretaris Perusahaan sebagai pejabat satu level di bawah Direksi yang membidangi organ Sekretariat Perusahaan. Pembentukan dan pelaksanaan fungsi Sekretaris Perusahaan mengacu pada Undang-undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan PER-09/MBU/2012 dan Anggaran Dasar Perusahaan.

Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketiadaan konflik dasi memiliki keterkaitan dengan promosi dan mutasi yang berlaku di lingkungan Perusahaan.

The Company determines the Corporate Secretary as an official one level below the Board of Directors who leads the Corporate Secretariat organ. The establishment and implementation of the Corporate Secretary function refer to Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises, Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, as has been amended by PER-09/MBU/2012 and the Company's Articles of Association.

The Corporate Secretary is appointed and dismissed by the President Director based on the Company's internal mechanism with the approval of the Board of Commissioners in accordance with the provisions of laws and regulations as well as human resource policies related to promotions and transfers that apply within the Company.

Profil Sekretaris Perusahaan
Profile of Corporate Secretary

Zubaidah

Warga Negara Indonesia, 55 tahun, dan berdomisili di Surabaya.

Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan sejak 2021 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. [illegible] tanggal 26 April 2021.

Pendidikan

Menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Komunikasi Ilmu Teknik Lainnya pada Universitas Padjadjaran (1988).

Riwayat Pekerjaan

Pernah menduduki posisi [illegible] (2007 - 2010), Senior Manajer Komunikasi Internal & Administrasi PT PLN (Persero) Distribusi Bali pada tahun (2010-2017), Manajer Area PLN Sumedang pada tahun (2013-2016) dan Manajer Area PLN Surabaya pada tahun (2016-2021).

Indonesian citizen, 55 years old, and domiciled in Surabaya.

She served as Corporate secretary since 2021, through the Board of Directors' Decree of PT PLN No. [illegible] dated April 26, 2021.

Education

Graduated with a Bachelor of Communication (Other Non-Engineering), from Padjadjaran University (1983).

Work History

She served as VP of CSR at PT PLN (Persero) (2007 - 2010), Senior Manager of Legal & Administrative Communication of PT PLN (Persero) Bali Distribution in 2010-2017, Area Manager at PLN Sumedang in 2013-2016 and Area Manager of PLN Surabaya in 2016-2021.

Kedudukan dan Struktur Organ Sekretariat Perusahaan

Position and Structure of Corporate Secretariat Organ

Sebagai sebuah organ, Sekretariat Perusahaan merupakan organ pendukung Direksi dalam struktur organ tata kelola Perusahaan yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Struktur Organ Sekretariat Perusahaan ditetapkan berdasarkan Peraturan Direksi Nomor: 0019.PER/DIR/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Pembangkitan Jawa-Bali serta Peraturan Direksi Nomor 0022.PER/DIR/2022 tentang Revisi Peraturan Direksi Susunan Organisasi dan Tugas Serupa Kerja Sekretariat Perusahaan. Sekretaris Perusahaan membawahi dua bidang, yaitu Bidang Hubungan Internal dan Bidang Stakeholder Management.

As an organ, the Corporate Secretariat is a supporting organ of the Board of Directors in the structure of the corporate governance organ that is responsible to the President Director. The structure of the Corporate Secretariat Organ is determined based on the Board of Directors Regulation No. 0019.PER/DIR/2022 concerning the Organization and Work Procedures of PT Pembangkitan Jawa Bali and the Board of Directors Regulation No. 0022.PER/DIR/2022 concerning Regulations for Evaluation of Organizational Composition and Manpower Formation of the Corporate Secretariat. The Corporate Secretary supervises two departments, namely the Internal Relations Department and Stakeholder Management Department.

Struktur Organ Sekretariat Perusahaan

Structure of the Corporate Secretariat Organ

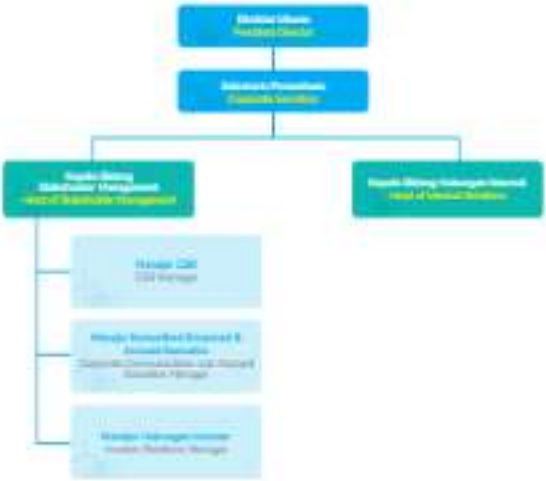

Pedoman Kerja Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary Work Guidelines

Lingkup tanggung jawab dan garis koordinasi dalam pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan mengacu pada Peraturan Direksi Nomor 0018/PER/DIR/0321 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Pembangkitan Jawa-Bali serta Peraturan Direksi Nomor 0031/PER/DIR/2022 tentang Peraturan Pelaksana Susunan Organisasi dan Formasi Tenaga Kerja Sekretariat Perusahaan. Sebagai organ pendukung Direksi dalam tata kelola Perusahaan, Sekretaris Perusahaan juga berpedoman pada Corporate Governance Code. Sekretaris Perusahaan secara khusus telah dibekang dengan Corporate Secretary Manual sebagai pedoman kerja yang mengatur kebijakan turunan atas Corporate Governance Code terkait fungsi Sekretaris Perusahaan.

The scope of responsibilities and coordination lines in the implementation of duties of the Corporate Secretary refer to the Board of Directors Regulation No. 0018/PER/DIR/0321 concerning the Organization and Work Procedures of PT Pembangkitan Jawa-Bali and Board of Directors Regulation No. 0031/PER/DIR/2022 concerning Regulations for Executors of Organizational Composition and Manpower Formation of the Corporate Secretariat. As a supporting organ of the Board of Directors in corporate governance, the Corporate Secretary is also guided by the Corporate Governance Code. The Corporate Secretary has been specifically supported by the Corporate Secretary Manual as a work guideline which is derivative policy of the Corporate Governance Code related to the Corporate Secretary function.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan
Duties and Responsibilities of the Corporate Secretary

Peraturan Direksi Nomor 0018/PER/DIR/0321 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Pembangkitan Jawa-Bali serta Peraturan Direksi Nomor 0031/PER/DIR/2022 tentang Peraturan Pelaksana Susunan Organisasi dan Formasi Tenaga Kerja Sekretariat Perusahaan dan Corporate Secretary Manual diantaranya mengatur tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan mengevaluasi kebijakan strategis dan operasional pada Sekretariat Perusahaan.
2. Menyelenggarakan strategi pengelolaan monitoring dan evaluasi tata kelola Perusahaan, laporan Perusahaan, pedoman dan program korporat, pembuatan internal dan eksternal, pendokumentasian kegiatan strategis Perusahaan serta pemilihan kegiatan award yang diikuti Perusahaan.
3. Menyelenggarakan strategi pengelolaan pemenuhan pemenuhan dan asesmen GCG.
4. Menyelenggarakan strategi pengelolaan, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan administrasi Direksi dan Dewan Komisaris antara lain: mutasi kepemimpinan, rumah tangga, fasilitas, protokoler dan program pengembangan.
5. Menyelenggarakan strategi pengelolaan monitoring dan evaluasi kebijakan kepemimpinan Kantor Pusat/Induk.
6. Menyelenggarakan strategi pengelolaan pengembangan, pengelolaan dan evaluasi kebijakan strategi komunikasi internal dan eksternal, penyediaan informasi publik dan corporate branding serta pembinaan ke seluruh Unit Kerja dalam kegiatan komunikasi Perusahaan.

The Board of Directors Regulation No. 0018/PER/DIR/0321 concerning the Organization and Work Procedures of PT Pembangkitan Jawa-Bali and the Board of Directors Regulation No. 0031/PER/DIR/2022 concerning Regulations for Executors of Organizational Composition and Manpower Formation of the Corporate Secretariat and Corporate Secretary Manual, among others, regulate the duties and responsibilities of the Corporate Secretary as follows:

1. Developing and evaluating strategic and operational policies in the Corporate Secretariat.
2. Ensuring the management strategy, monitor/operationalization of corporate governance, Company's reports, corporate guidelines and programs, internal and external protocols, documentation of the Company's strategic activities and selection of award activities participated by the Company.
3. Ensuring the strategy of managing guidance, fulfillment and assessment of GCG.
4. Ensuring the management strategy, monitor/operationalization of the implementation of the Board of Directors and Board of Commissioners administration, including secretarial, consumption, facilities, protocol and development programs.
5. Ensuring the management strategy, monitoring and evaluation of secretarial policy of the Superintendence Office.
6. Ensuring the strategy of managing development, control and evaluation of internal and external communication strategy policies, provision of public information and corporate branding, as well as guidance to all Work Units in the Company's communication activities.

7. Memastikan strategi pengelolaan stakeholder management, pengelolaan jalurnya krisis komunikasi, serta menjalankan fungsi mediator dalam penyelarasan masalah yang dihadapi Perusahaan.
8. Memastikan strategi pengelolaan pelaksanaan dan pelaporan Environment, Social and Governance (ESG) pada aspek sosial dan governance.
9. Mengkoordinasikan pelaksanaan strategis dan operasional pada Divisi SKUL Secretary and protocol dan Divisi Corporate Communication and CSR.
10. Memastikan dukungan resources terhadap pengembangan bisnis kepada fungsi yang mengelola pengembangan bisnis.
11. Memastikan implementasi budaya Perusahaan, Kepatuhan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Kesehatan dan Lingkungan (K3LL) serta sistem manajemen yang diterapkan perusahaan sesuai visi dan misi Perusahaan.
12. Memastikan pelaksanaan identifikasi dan mitigasi risiko Sekretariat Perusahaan.
13. Memastikan pengelolaan dan pengendalian program kerja, anggaran dan monitoring realisasi program kerja pada Sekretariat Perusahaan.

7. Ensuring the strategy of managing stakeholder management, controlling potential communication crises, and carrying out the mediator function in resolving issues faced by the Company.
8. Ensuring the strategy of managing the implementation and reporting of Environment, Social and Governance (ESG) in the social and governance issues.
9. Coordinating the strategic and operational implementation in the SKUL Secretary and protocol Department as well as the Corporate Communication and CSR Department.
10. Ensuring resources support towards business development to the function that manages business development.
11. Ensuring the implementation of the Company's culture, Compliance, Occupational Health and Safety, Security and Environment (K3LL) as well as the management system implemented by the Company in accordance with the Company's vision and mission.
12. Ensuring the implementation of risk identification and mitigation of the Corporate Secretariat.
13. Ensuring the management and control of work programs, budgets and monitoring the realization of work programs in the Corporate Secretariat.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2022

Duties Implementation of the Corporate Secretary in 2022

Pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan disampaikan kepada Direksi melalui Laporan Sekretaris Perusahaan yang merangkum realisasi atas pelaksanaan program kerja masing-masing bidang dalam Sekretariat Perusahaan. Pelaksanaan fungsi Sekretaris Perusahaan sepanjang tahun 2022 meliputi:

1. Bidang Hubungan Internal
   a. Pelaksanaan Rapat Direksi, yang selama 2022 telah terselenggara sebanyak 51 kali.
   b. Koordinasi pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris-Direksi (Konsultasi dan Pengawasan), yang selama 2022 telah terselenggara sebanyak 12 kali.
   c. Koordinasi pelaksanaan RUPS Tahunan Perusahaan yang selama 2022 terlaksana sebanyak 2 kali, yaitu RUPS Penyetujuan RKAP 2022 pada 04 Januari 2022 dan RUPS Penetapan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2021 pada tanggal 29 Juni 2022.
   d. Melaksanakan GCG mengenai pembinaan scope dalam Good Corporate seperti Standar Etika Perusahaan, Ide Nilai Perusahaan, Code Nilai, UPDPK, Kebijakan Anti Fraud Disclosure Appendingan, ISO 37001 Anti Penyuapan, Compliance dan Whistle Blowing System.

The implementation of duties of the Corporate Secretary is submitted to the Board of Directors through the Corporate Secretary Report which includes the realization of the implementation of work programs of each department in the Corporate Secretariat. The implementation of the Corporate Secretary function throughout 2022 includes the following:

1. Internal Relations Department
   a. Carried out 51 Meetings of the Board of Directors Meeting during 2022.
   b. Coordination of the implementation of the Board of Commissioners Board of Directors Meeting (Consultation and Supervision), which has been held 12 times during 2022.
   c. Coordination of the implementation of the Company's Annual GMS which was carried out twice during 2022, namely the GMS for Ratification of the 2022 RKAP on January 04, 2022 and the GMS for Approval of the Annual Report and Ratification of the Financial Statements for the 2021 Financial Year on June 29, 2022.
   d. GCG socialization regarding scope development in Good Corporate such as Corporate Ethics Standards, Corporate Values, Codification, UPDPK, Anti-Fraud Policy, Conflict of Interest, ISO 37001 Anti-Bribery, Compliance and Whistle Blowing System.

e. Evaluasi dan monitoring pelaksanaan GCG dengan melakukan Assessment GCG periode tahun 2021 oleh pihak independen melalui penunjukan penerbitan Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2022 tanggal 6 Juni 2022.

f. Melakukan monitoring atas tindak lanjut kepatuhan RUPS tahun 2020 dan 2021.

g. Menyelenggarakan Rapat Umum tahun 2021 dalam 2 tahap yaitu Pra Rapat Kerja pada tanggal 5–7 Januari 2022 dan Rapat Kerja pada tanggal 10–11 Januari 2022.

h. Melaksanakan Induksi Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2022 sebanyak 8 kali pertemuan.

i. Hasil Wadahan Performansi Dialogue (PWTD) sebanyak 13 kali.

2. Sistem Pengelolaan Perusahaan

a. Menerbitkan Laporan Kinerja Bulanan yang selama 2021 terbit sebanyak 11 (sebelas) kali.

b. Menyusun Laporan Manajemen Pertanggungjawaban yang diterbitkan dan disampaikan kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris. Laporan tersebut terdiri atas:
1) Laporan Manajemen Tahunan Unaudited tahun 2021;
2) Laporan Manajemen Tahunan Audited tahun 2021;
3) Laporan Manajemen Triwulan I tahun 2022;
4) Laporan Manajemen Triwulan II tahun 2022;
5) Laporan Manajemen Triwulan III tahun 2022.

c. Menyusun Laporan Tahunan 2021 (Annual Report dan Sustainability Aspect) yang telah didistribusikan kepada stakeholder Perusahaan serta telah diunggah di website Perusahaan.

d. Memberikan jawaban atas dan informasi kepada para pihak yang berkepentingan dengan Perusahaan yaitu Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi serta pihak ketiga lainnya.

e. Menyusun Corporate Presentation Tahun 2021 untuk setiap triwulan.

f. Menyusun buku Statistik Perusahaan tahun 2022.

g. Melakukan koordinasi pelaksanaan benchmark tahun 2022 dari eksternal sebanyak 7 kali.

h. Media Relation - Press Release & Press Conference.

i. Monitoring Media Event Cetak dan Online.

j. Sponsorship sebagai pelaksana kegiatan pemerintah dan atau sebagai bentuk partisipasi Perusahaan kepada stakeholders agar terciptanya hubungan yang baik di antara kedua belah pihak. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut terdiri atas lima kategori, yaitu: Olahraga, Sosial, Seni dan budaya, Agama serta Pendidikan.

k. Melaksanakan fungsi komunikasi eksternal dengan memanfaatkan media sosial Perusahaan, yang terdiri atas akun Facebook, Twitter, Instagram dan Youtube.

l. Media Internal Korporat terdapat Video Company Profile, TV Plasma (Video Profil dan Mengelola majalah info PLN yang merupakan majalah korporat Perusahaan.

a. Evaluated and monitored GCG implementation by conducting GCG Assessment for the 2021 period by an independent party based on the appointment of the Decree of the Ministry of State-Owned Enterprises Secretariat No. SK-16/S.MBU/2022 dated June 6, 2022.

b. Monitored the follow-up of RUPS resolutions in 2020 and 2021.

c. Organized the 2021 GMS Meeting in 2 stages, namely the Pre-Work Meeting on January 5–7, 2022 and the Work Meeting on January 10–11, 2022.

d. Held 8 meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors induction during 2022.

e. Held 13 programs of Work Witnessing Performance Dialogue (PWTD).

3. Stakeholder Management Department

a. Issued Monthly Performance Reports, which were published 11 (eleven) times during 2021.

b. Drafted the Company Management Report which was published and submitted to the Shareholders and Board of Commissioners. The report consisted of:
1) Unaudited 2021 Annual Management Report;
2) Audited 2021 Annual Management Report;
3) Management Report for the First Quarter of 2022;
4) Management Report for the Second Quarter of 2022;
5) Management Report for the Third Quarter of 2022.

c. Drafted the 2021 Annual Report (Annual Report and Sustainability Report) which has been distributed to the Company's stakeholders and has been uploaded on the Company's website.

d. Provided data and information services to the parties with an interest in the Company, namely Shareholders, Board of Commissioners, Board of Directors and other third parties.

e. Prepared Corporate Presentation Year 2022 for each quarter.

f. Finalized the 2022 Company Statistics book.

g. Conducted 7 times coordination of the implementation of the 2022 benchmark from external.

h. Media Relation Press Release & Press Conference.

i. Print and Online Homepage Media Monitoring.

j. Acted as the executor of sponsorship and advertising activities as a form of the Company's participation to stakeholders in order to create a good relationship between the two parties. The implementation of these activities consists of five categories, namely: Sports, Social, Art and Culture, Religion as well as Education.

k. Carried out external public relations function by utilizing the Company's social media, which consists of Facebook, Twitter, Instagram and Youtube accounts.

l. Corporate information Media including Company Profile Video, Plasma TV, E-Book, Portal, and Managing PLN info magazine, which is the Company's corporate magazine.

m. Pengelolaan Website sebagai sarana untuk memberikan informasi kepada stakeholder mengenai perusahaan.
n. Koordinator Kegiatan Perusahaan, seperti: Coffee Morning, Rapat tahunan/ semester, Tahun 2022 Safari Ramadhan Tahun 2022, RUPS Perusahaan Tahun 2022, dan Pelaksanaan Idulfitri.
o. Koordinator CSR Perusahaan, Perusahaan melaksanakan program CSR di 16 unit kerja. Aktivitas CSR tersebut dikelompokkan dalam 3 tipologi kelompok yaitu Empowerment, Capacity Building, Infrastruktur serta Santunan Sosial dan Kejadian Luar Biasa (KLB).
p. Mengukur tingkat kesuksesan program CSR dengan mengukur indeks kepuasan pada masyarakat.

m. Website Management as a forum to provide information to stakeholders regarding the Company.
n. Coordinator of Company Activities, such as: Coffee Morning, 2022 Work Meeting/Coordination, 2022 Ramadan Safari, 2022 Company Anniversary, and Idulfitri Implementation.
o. Coordinator of Corporate CSR, the Company carried out CSR programs in 16 work units. The CSR activities are classified into 3 typology groups, namely Empowerment, Capacity Building, Infrastructure, as well as Social Assistance and Extraordinary Events (KLB).
p. Measured the success level of CSR programs by measuring the satisfaction index in the community.

Program Pengembangan Kompetensi Personel Sekretaris Perusahaan

Competency Development Program for Corporate Secretary Personnel

Program pengembangan kompetensi Sekretaris Perusahaan sepanjang tahun 2022 dapat dilihat pada uraian terkait Pendidikan dan Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Kepala SPI. Selain itu, Staf pada Unit Sekretaris Perusahaan juga mengikuti program pengembangan kompetensi sepanjang tahun 2022 sebagai berikut :

Competency development programs of the Corporate Secretary throughout 2022 is available in the description related to Education and Training of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Head of Internal Audit Unit. In addition, staff in the Corporate Secretary Department also participated in competency development programs throughout 2022 as follows:

Program Pengembangan Kompetensi Personel Sekretaris Perusahaan

Competency Development Program for Corporate Secretary Personnel

No.	Jabatan Position	Nama Sertifikasi/Pelatihan Name of Certification/Training	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation	Penyelenggara Organizer
1.	Kepala Bidang Hubungan Internal Head of Internal Relations Department	Certified GRC Professional (cGRCP)	18 – 21 April 2022 April 18 – 21, 2022	DCGI
2.	Assistant Officer Hubungan Internal Assistant Officer of Internal Relations	ISO 37301 Compliance Management	10 Mei 2022 May 10, 2022	INI
3.	Assistant Officer Hubungan Internal Assistant Officer of Internal Relations	Pelatihan Desain Infografis Infographic Design Training	24 Agustus 2022 August 24, 2022	INI
4.	Assistant Officer Hubungan Internal Assistant Officer of Internal Relations	Focus Area Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi Subsidiary and Associated Company Focus	20 Oktober 2022 October 20, 2022	INI
5.	Assistant Officer Hubungan Internal Assistant Officer of Internal Relations	Penyusunan Sustainability Report Preparation of Sustainability Report	3 November 2022 November 3, 2022	INI
6.	Assistant Officer Hubungan Internal Assistant Officer of Internal Relations	Open Broadcaster Software	14 Desember 2022 December 14, 2022	INI
7.	Assistant Officer Hubungan Internal (1 orang) Assistant Officer of Internal Relations (1 person)	Effective Communication & Negotiation Skill (Good Leader Good Communication)	31 Maret – 1 April 2022 March 31 – April 1, 2022	Bale Carnegie
8.	Assistant Officer Hubungan Internal (1 orang) Assistant Officer of Internal Relations (1 person)	ISO 37301 Compliance Management	10 Mei 2022 May 10, 2022	INI Academy

No.	Jabatan Position	Nama Sertifikasi/Pelatihan Name of Certification/Training	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation	Penyelenggara Organizer
9	Assistant Officer Hubungan Investor (1 orang) Assistant Officer of Investor Relations (1 person)	ISO 37301 Kompetensi Anti Suap ISO 37301 Anti-Bribery Management	06 Juli 2022 July 6, 2022	PLN Academy
10	Assistant Officer Hubungan Investor (1 orang) Assistant Officer of Investor Relations (1 person)	Coaching untuk women talent	30 - 31 Agustus 2022 August 30-31, 2022	Dale Carnegie
11	Assistant Officer Hubungan Investor (1 orang) Assistant Officer of Investor Relations (1 person)	Building Digital Mindset	30 Agustus 2022 August 30, 2022	PLN Academy
12	Assistant Officer Hubungan Investor (1 orang) Assistant Officer of Investor Relations (1 person)	Pelatihan Dasar Infografis Infographic Design Training	24 Agustus 2022 August 24, 2022	PLN Academy Kantor Cilegon
13	- Manajer Hubungan Investor (1 orang) - Assistant Officer Hubungan Investor (2 orang) - Investor Relations Manager (1 person) - Investor Relations Assistant Officer (2 people)	Penyusunan Sustainability Report Preparation of Sustainability Report	7-9 November 2022 November 7-9, 2022	NCSD
14	Manajer Hubungan Investor (1 orang) Investor Relations Manager (1 person)	Pemaparan Workshop Strengthening Integrated Communication Strategy Learning Workshop on Strengthening Integrated Communication Strategy	7 November 2022 November 7, 2022	PLN Academy
15	Assistant Officer Hubungan Investor (1 orang) Investor Relations Assistant Officer (1 person)	Networking & Relationship	16 November 2022 November 16, 2022	PLN Academy
16	Manajer Hubungan Investor (1 orang) Investor Relations Manager (1 person)	Workshop Outlook Ide Generation	21-22 Desember 2022 2022	PLN Academy
17	Asst. Officer Corporate Communication	Media Sosial dan Media Korporat Social Media and Corporate Media	2 Agustus 2022 August 2, 2022	PLN Academy
18	Asst. Officer Corporate Communication	Building Digital Mindset	30 Agustus 2022 August 30, 2022	PLN Academy
19	Asst. Officer Corporate Communication	Pelatihan Dasar Infografis Basic Infographic Training	24 Agustus 2022 August 24, 2022	PLN Academy
20	Asst. Officer Corporate Communication	Pelatihan Networking & Relationship Networking & Relationship Training	11 November 2022 November 11, 2022	PLN Academy
21	Asst. Officer Corporate Communication	Dasar Grafologi Software	14 Desember 2022 December 14, 2022	PLN Academy Pusat Jakarta
22	Manager Corporate Communication	Marketing and Sales Skill	27 Desember 2022 December 27, 2022	PLN Academy Jakarta
23	Asst. Officer Corporate Communication	Junior Wizard On Investment Batch 1	30-31 Juni 2022 June 30-31, 2022	Prospera
24	Asst. CSR Officer & Junior CSR Officer	ISO 26000	1 Desember 2022 December 1, 2022	Unnu Investment Indonesia
25	Asst. CSR Officer & Junior CSR Officer	Sosialisasi SAKD Socialization SAKD	Juni 2022 June 2022	Universitas Trisakti Trisakti University
26	Manager CSR	Sertifikasi QEHS QEHS Certification	1-4 November 2022 November 1-4, 2022	QEHS Indonesia
27	Asst. CSR Officer & Junior CSR Officer	Stakeholder Management	24-25 Agustus 2022 August 24-25, 2022	PLN

Evaluasi Kinerja Sekretaris Perusahaan

Evaluation of Corporate Secretary Performance

Pencapaian target pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan dievaluasi berdasarkan indikator yang disusun dalam bentuk Key Performance Indicator dan laporan pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan oleh Direktur Utama. Evaluasi kinerja Sekretaris Perusahaan dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun. Sekretaris Perusahaan tahun 2022 telah mencapai target sebesar 100,00% dari Key Performance Indicator telah ditetapkan.

The achievement of duties implementation targets of the Corporate Secretary is evaluated based on indicators prepared in the form of Key Performance Indicators and reports on the implementation of duties of the Corporate Secretary to the President Director. The evaluation of the Corporate Secretary's performance is conducted 2 (two) times a year. In 2022, the Corporate Secretary achieved the target of 100.00% of the established Key Performance Indicators.

Audit Internal

Internal Audit

Pengawasan Internal Perusahaan oleh Direksi telah dibantu dengan fungsi Audit Internal sebagai perangkat penting dalam sistem pengendalian internal. Direksi menetapkan Satuan Pengawasan Internal (SPI) sebagai pelaksana fungsi Audit Internal yang bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan audit (assurance) dan konsultasi secara independen dan objektif. SPI menerapkan pendekatan audit berbasis risiko pada proses bisnis serta kepatuhan atas kebijakan internal Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berorientasi pada peningkatan nilai strategis Perusahaan secara berkelanjutan. Satuan Pengawasan Internal dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pengawasan Internal (KSPI) dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

The Company's internal supervision by the Board of Directors has been supported by the Internal Audit function as an important tool in the internal control system. The Board of Directors determines the Internal Audit Unit (IAU) as the executor of the internal audit function which is tasked and responsible for carrying out audits (assurance) and consultations independently and objectively. The IAU applies a risk-based audit approach to business processes as well as compliance with the Company's internal policies and applicable laws and regulations with an orientation towards increasing the Company's strategic value in a sustainable manner. The Internal Audit Unit is led by a Head of Internal Audit Unit (HIU) and responsible directly to the President Director.

Profil Kepala Satuan Pengawasan Internal
Profile of the Head of Internal Audit Unit

R. Efin Fabrianteza

Warga Negara Indonesia, 53 tahun.

Menjabat sebagai SVP1 sejak tahun 2015 sesuai Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 0.135-K/HK.00/DIR/2015 tanggal 27 Juli 2015 dan pernah menjabat Dewan Komisaris Direktur Utama No. 0.0775-K/DIR/2016 tanggal 15 April 2016, 0.0725-K/DIR/2017 tanggal 06 Januari 2017 dan No. 0.2024-K/DIR/2017 tanggal 10 November 2017.

Pendidikan
Menyelesaikan pendidikan S1 Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Jatim tahun 1988.

Sertifikasi yang dimiliki dan pernah/ audit yang telah dilalui bersertifikat adalah Qualified Internal Auditor (QIA).

Riwayat Pekerjaan
Pernah menjabat sebagai Auditor SPI III (2007-2011), Auditor SPI I/II (2011-2015), Ketua Tenaga Pengembangan Akuntansi Sub Direktorat Akuntansi I/II (2008-2010), Ketua Pengembangan Akuntansi Sub Direktorat Akuntansi I/II (2010-2011) dan Senior Manajer Akuntansi Sub Direktorat Akuntansi I/II (2011-2015).

Indonesian citizen, 53 years old.

He has served as the Head of Internal Audit Unit since 2015 in accordance with the Decree of the Board of Directors of PT PLN No. 0.135-K/HK.00/DIR/2015 dated July 27, 2015 and received through President Director Decree No. 0.0775-K/DIR/2016 dated April 15, 2016, 0.0725-K/DIR/2017 dated February 06, 2017 and No. 0.2024-K/DIR/2017 dated November 10, 2017.

Education
Completed his education as a Bachelor of Economics from the Faculty of Economics, Brawijaya University in 1988.

Certifications owned and audit training that has been followed include Qualified Internal Auditor (QIA).

Work History
Has served as Auditor at SPI III (2007-2011), Auditor of Acc. I/II (2011-2015), Accounts Manager of Accounting Development at I/II Accounting Sub Directorate (2008-2010), Manager of Accounting Development at I/II Accounting Sub Directorate (2010-2011) and Senior Manager of Accounting of I/II Accounting Sub Directorate (2011-2015).

Pemberhentian Kepala SPI merupakan pada kebijakan sumber daya insannya terkait dengan promosi dan mutasi yang berlaku di lingkungan Perusahaan serta ketentuan Piagam Pengawasan Internal. Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama melalui usul kepada/usan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

The dismissal of the Head of IAU refers to the human resources policy related to promotions and mutations that apply within the Company as well as the provisions of the Internal Supervision Charter. The Head of IAU is appointed and dismissed by the President Director through a decree of the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners.

Struktur Organ dan Kedudukan Satuan Pengawasan Internal
Organ Structure and Position of Internal Audit Unit

Struktur Organ Satuan Pengawasan Internal ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 0.17-K/DIR/2019 tentang Peraturan Prosedur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tenaga Kerja SPI dan 0.11-K/DIR/2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata SPI dimana secara struktural SPI berada di bawah Direktur Utama. SPI secara fungsional memiliki akses komunikasi langsung kepada Komite Audit untuk berkoordinasi dan menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan dan hasil audit.

The Organ Structure of the Internal Audit Unit is determined based on the Decree of the Board of Directors No. 0.17-K/DIR/2019 concerning Regulations for Executive of the Organizational Structure and Workforce Formation of SPI and 0.11-K/DIR/2017 concerning the Organizational Structure and Workforce Formation of IAU, where structurally the IAU is under the President Director. Functionally, the IAU has direct communication access to the Audit Committee to coordinate and submit information relating to the implementation and results of audits.

Pedoman Kerja Satuan Pengawasan Internal

Work Guidelines for Internal Audit Unit

Satuan Pengawasan Internal dilengkapi dengan pedoman kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Pedoman tersebut disesuaikan dengan struktur organisasi dan kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan. Pedoman kerja SPI antara lain:

1. Internationals Professional Practices Framework Tahun 2017 (IPPF):

   IPPF adalah kerangka kerja konseptual yang mengatur pedoman wajib praktik audits internal yang dikeluarkan oleh institute of Internal Auditor. Pedoman dalam IPPF meliputi Pedoman Wajib (Mandatory Guidance) dan Pedoman yang Disarankan (Strongly Recommended Guidance).

2. Piagam Pengawasan Internal Tahun 2020:

   Piagam Pengawasan Internal merupakan pedoman umum pelaksanaan pengawasan internal. Piagam/aan yang ditandatangani oleh SPI. Piagam Pengawasan internal disahkan oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama terakhir kali pada tanggal 11 September 2020 yang ditandatangani dan. Piagam Pengawasan Internal dievaluasi secara periodik untuk memastikan kecukupan muatan kebutuhan sesuai dengan perkembangan organisasi dan kebutuhan yang berlaku. Piagam Pengawasan Internal secara umum telah muatan ketentuan yang mencakup struktur, tugas, tanggung jawab dan wewenang serta lingkup pelaksanaan standar pelaksanaan tugas audit internal, kode etik dan program quality assurance komunikasi, pelaporan dan pertanggungjawaban Satuan Pengawasan Internal.

The Internal Audit Unit is equipped with work guidelines as a reference in the implementation of its duties and responsibilities. The guidelines are adjusted to the organizational structure and complexity of the Company's business activities. The SKI work guidelines include:

1. International Professional Practices Framework 2017 (IPPF):

   The IPPF is a conceptual framework that regulates the official guidelines for the practice of internal auditors issued by the Institute of Internal Auditors. The guidelines in the IPPF include Mandatory Guidance and Strongly Recommended Guidance.

2. Internal Audit Charter 2020:

   The Internal Audit Charter is a general guideline for the implementation of the Company's internal audit carried out by the SKI. The Internal Audit Charter was approved by the President Commissioner and President Director for the last time on September 11, 2020, signed and. The Internal Audit Charter is evaluated periodically to determine the adequacy of the provisions contain in accordance with organizational developments and applicable provisions. The Internal Audit Charter has generally contained provisions covering structure, duties, responsibilities, and authorities as well as scope of work standards for the implementation of internal audit duties, code of ethics and quality assurance programs communications, reporting and accountability of the Internal Audit Unit.

3. Standar Profesi Satuan Pengawasan Internal ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.[illegible] tanggal [illegible] tentang Piagam Satuan Pengawasan Internal yang mengatur tentang kode etik, standar perilaku, standar profesi, standar atribut dan auditor.
4. Pedoman Umum Satuan Pengawasan Internal yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.[illegible] yang merupakan pedoman umum untuk pelaksanaan penugasan audit internal yang meliputi kegiatan assurance dan consulting, sehingga pelaksanaan penugasan dapat berjalan dengan efektif dan terselenggarakan dengan kode etik dan standar profesi audit internal yang berlaku.
5. Pedoman Teknis Audit Internal Berbasis Risiko yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. [illegible] yang merupakan pedoman teknis bagi SPI dalam melakukan setiap tahapan proses audit dimulai dari penyusunan audit tahunan, penerbitan penugasan, pelaksanaan penugasan, menyajikan hasil penugasan, pemantauan tindakan perbaikan dan evaluasi penugasan audit dengan suatu mempertimbangkan risiko pada setiap tahapan tersebut.
6. Pedoman Pengembangan Audit Program yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.[illegible] yang merupakan pedoman teknis bagi SPI untuk menyusun audit program yang berisikan tahapan/langkah prosedur analisis atau langkah-langkah pengumpulan dan pengujian bukti-bukti audit.
7. Profesional Standards of the Internal Audit Unit are determined based on the Decree of the Board of Directors No.[illegible] [illegible], This standard regulates the code of ethics, standards of behavior, professional standards, attribute standards of auditors.
8. General Guidelines for the Internal Audit Unit determined based on the Decree of the Board of Directors No.[illegible] [illegible] which is a general guide for the implementation of internal audit assignments covering assurance and consulting activities, so that the implementation of assignments can run effectively and consistently in accordance with the applicable code of ethics and professional standards of internal audit.
9. Risk-Based Internal Audit Technical Guidelines determined based on the Decree of the Board of Directors No. [illegible] [illegible] which is a technical guideline for the IAU in conducting each stage of the audit process starting from annual audit planning, assignment planning, assignment implementation, communication of assignment results, monitoring of corrective actions and evaluation of audit assignments by always considering the risks at each stage.
10. Audit Program Development Guidelines determined based on the Decree of the Board of Directors No.[illegible] [illegible] which is a technical guideline for the IAU to develop an audit program that contains a set of analytical procedures or steps for collecting and testing audit evidence.

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Pengawasan Internal

Duties and Responsibilities of the Internal Audit Unit

Satuan Pengawasan Internal melaksanakan fungsi assurance dan konsultasi yang dilakukan pada Standar Profesi Internal Auditor dalam rangka memberikan keyakinan dan integritas informasi, kepatuhan terhadap peraturan, ketentuan, kebijakan dan prosedur yang ditetapkan, pengamanan terhadap aset, pemanfaatan sumber daya secara efisien dan ekonomis, pelaksanaan kegiatan operasional program sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Tugas dan tanggung jawab SPI dalam melaksanakan fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memastikan penyusunan, evaluasi, pengembangan kebijakan dan prosedur satuan pengawasan internal.
2. Memastikan kecukupan struktur dengan prinsip saling yang sehat dan kecukupan SDM internal pelaksanaan audit dan menjadi counterpart dari auditor eksternal. [GRI 404-3]
3. Memberikan rekomendasi perbaikan pengelolaan pelaporan berdasarkan hasil audit yang dilakukan dan melakukan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi.

The Internal Audit Unit carries out assurance and consulting functions based on the Internal Auditor Professional Standards in order to ensure the reliability and integrity of information, compliance with agreed regulations, provisions, policies and procedures, protection of assets, efficient and economical use of resources, implementation of operational programs in accordance with established objectives and targets. The duties and responsibilities of the IAU in carrying out the function are as follows:

1. Ensuring the preparation, evaluation, development of policies and procedures of the internal audit unit.
2. Ensuring that the Company is managed with sound commercial principles and based on GCG through the implementation of audits and being a counterpart to external auditors [GRI 404-3]
3. Providing recommendations for improvement of company management based on the results of audits conducted and monitoring the follow-up of recommendations.

4. Melakukan kegiatan pelaporan kepada *external auditor* pihak regulator/ internal manajemen Perusahaan.
Berdasarkan SK No.0017/ESDM/2013/EK3 tentang Pedoman Hitalkarya Pemasaran Manajemen Risiko Terintegrasi dalam menjalankan peran sebagai Model Tiga Lini (*Three-Lines Model*) dalam melakukan kegiatan pengendalian internal melalui: *validateness audit* berdasarkan hasil input dari Lini 1 (Fisk Owner) dan Lini 2 (Fungsi Manajemen Risiko/Fisk Unit dan Fungsi Kepatuhan) sehingga pengendalian internal perusahaan berjalan dengan optimal.
5. Melakukan penyempurnaan secara berkelanjutan atas kebijakan, pedoman, dan prosedur Pengawasan Internal serta pemeriksaan apabila Audit Management System (AMS) untuk mendukung maksimalnya kerja Satuan Pengawasan Internal.
6. Memberikan fungsi pembinaan, supervisi, pengendalian, dan koordinasi terhadap program-program pengawasan, baik di Kantor Pusat maupun seluruh Unit Kerja Perusahaan.
7. Melakukan pelanggan eksternal & internal perusahaan, Mitra UIKK/APJK dan memenuhi kebutuhan perusahaan dan pemegang saham, melalui dukungan terhadap implementasi Budaya Perusahaan (AKHLAK) dan Sistem Manajemen yang diterapkan perusahaan (SIT, GCG, PSI IMS, Kriteria dasinga (MBCI, Maturity Level Nasional Dasar) sesuai dengan Visi & Misi Perusahaan.
8. Bertanggungjawab penuh atas penerapan program kerja anggaran dan monitoring realisasi program kerja dan anggaran pada Satuan Pengawasan Internal secara prudent dengan mempertimbangkan kaizen kebutuhan dan risiko.
9. Melakukan identifikasi risiko dan mitigasi risiko terkait program-program yang menjadi kewenangan fungsi Satuan Pengawasan Internal.
10. Mengusulkan dan mempertimbangkan sebelum-sebelum internal di Satuan Pengawasan Internal.

4. Conducting reporting activities to external auditors/regulators/ internal management of the Company.
Based on Decree No.0017/ESDM/2013/EK3 concerning Regulations for Execution of the Implementation of Integrated Risk Management in carrying out the role of the Three-Lines Model in conducting internal control activities through the implementation of audits based on the results of input from Line 1 (Risk Owner) and Line 2 (Risk Management Function/ Risk Unit and Compliance Function) so that the Company's internal control runs optimally.
5. Conducting continuous improvement of internal Audit policies, guidelines and procedures as well as utilization of the Audit Management System (AMS) application to support the work mechanism of the Internal Audit Unit.
6. Carrying out the functions of guidance, supervision, control, and coordination of supervision programs, both at the Head Office and all Company's Work Units.
7. Serving Company's external & internal customers, Partners UIKK/APJK and meeting the needs of the Company and shareholders, through supporting the implementation of Corporate Culture (AKHLAK) and Management Systems implemented by the Company (SIT, GCG, PSI IMS, Dasinga Criteria, CMMI, Business Process Maturity Level) in line with the Company's Vision & Mission.
8. Fully responsible for planning work programs, budgets and monitoring the realization of work programs and budgets in the Internal Audit Unit in a prudent manner by considering feasibility and risk studies.
9. Identifying risks and mitigating risks related to programs under the authority of the Internal Audit Unit function.
10. Evaluating and developing internal policies in the Internal Audit Unit.

Formasi dan Kualifikasi Auditor Satuan Pengawasan Internal

Formation and Qualifications of Internal Audit Unit Auditors

Formasi auditor SPI sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan fungsi internal audit yang dibutuhkan dan sesuai beban kerja. SPI telah didukung dengan auditor yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai dengan kualifikasi dan sertifikasi sebagai berikut:

The IAU auditor formation is in accordance with the needs for the implementation of the internal audit function resulting from the workload analysis. The IAU has been supported by auditors who have adequate knowledge and expertise with the following qualifications and certifications:

Formasi dan Kualifikasi Auditor Satuan Pengawasan Internal
Formation and Qualifications of Internal Audit Unit Auditors

No.	Nama Name	Jabatan Position	Kualifikasi Pendidikan Qualification
1	R. Dito Darmawan	Kepala Satuan Pengawasan Internal Head of Internal Audit Unit	• S1 Ekonomi • Bachelor of Economics
2	Sulistyo Utomo	Kepala Auditor 1 Head of Auditor 1	• S2 Fisika • S2 Sistem Manajemen • Program Profesi Insinyur • Bachelor of Physics • Master of Management • Professional Engineer Program
3	Muhamad Yosmi	Kepala Auditor 2 Head of Auditor 2	• S1 Teknik Industri • S2 Master of Business Administration • Bachelor of Industrial Engineering • Master of Business Administration
4	Heru Anwar	Kepala Auditor 3 Head of Auditor 3	• S2 Ekonomi Akuntansi • S2 Ekonomi Syariah • Bachelor of Accounting Economics • Master of Sharia Economics
5	Mochammad Agustian	Kepala Sidang Komisaris	QA, Counterpart & Reporting Head of Commissioners' Meeting Division, QA, Counterpart & Reporting	• S2 Teknik Elektro • S2 Manajemen Teknik • S2 Teknik Elektro • Bachelor of Electrical Engineering • Master of Engineering Management • Master of Electrical Engineering
6	Sugito	Senior Specialis I Komisaris Senior Specialist I Consulting	• S2 Hukum • Bachelor of Engineering
7	Hotmaynor Sylvian	Senior Specialis I Auditor 2 Senior Specialist I of Auditor 2	• S2 Akuntan • S2 Manajemen Keuangan • Bachelor of Accounting • Master of Financial Management
8	Agus Priya Kusuma	Senior Specialis II Auditor 2 Senior Specialist II of Auditor 2	• S2 Teknik Industri • Bachelor of Industrial Engineering
9	Ali Umar Dalfi	Senior Specialis II Auditor 2 Senior Specialist II of Auditor 2	• S2 Informatika • Bachelor of Information
10	Ahmad Faja Widia	Senior Specialis II Auditor 2 Senior Specialist II of Auditor 2	• S2 Elektro • S2 Magister Manajemen Teknik • Bachelor of Electrical • Master of Engineering Management
11	Rio Kartika	Senior Specialis II Auditor 2 Senior Specialist II of Auditor 2	• S2 Hukum • Bachelor of Law
12	Suherman	Analyst Auditor 1	• S1 Elektro • Bachelor of Electrical
13	Budi Firmansa	Analyst Auditor 1	• S2 Ekonomi Manajemen • S2 Magister Akuntansi • Bachelor of Management Economics • Master of Accounting
14	Linda Mery T	Analyst Auditor 1	• S2 Akuntansi • S2 Magister Manajemen • S1 Manajemen • Master of Management
15	Ahmad Qadita Dzmi	Analyst Auditor 1	• S1 Teknik Industri • S2 Sidang Manajemen • Bachelor of Industrial Engineering • Master of Management

No.	Nama Name	Jabatan Position	Kualifikasi Pendidikan Qualification/Pendidikan
16	Thierry Widjaja Lasmini	Assistant Analyst Auditor 1	• S1 Elektro • Bachelor of Electrical
17	Rina Nagaradjasi	Assistant Analyst Auditor 1	• S1 Teknik Kimia • S2 Teknik Mesin • Bachelor of Chemical Engineering • Master of Mechanical Engineering
18	Achmad Haikal Wiyata	Assistant Analyst Auditor 1	• S1 Teknik Elektro • Bachelor of Electrical Engineering
19	Habibie Mirza	Assistant Analyst Auditor 1	• S1 Teknik Elektro • Bachelor of Electrical Engineering
20	Firdaus Khalida Siti	Assistant Analyst Auditor 1	• S1 Hukum • Bachelor of Law
21	Sandi Mahawardan	Assistant Analyst Auditor 1	• D4 Teknik Elektronika • Diploma of Electronic Engineering
22	Ines Fitriandini	Assistant Analyst Auditor 1	• S1 Teknik Elektro • Bachelor of Electrical Engineering
23	Achmad Yanda I	Assistant Analyst Auditor 1	• S1 Teknik Industri • Bachelor of Industrial Engineering
24	Lamtiur Adaubari Hutasoit	Assistant Analyst Auditor 1	• S1 Manajemen • Bachelor of Management
25	Wisnu Pawa Ika	Assistant Analyst Auditor 1	• S1 Manajemen • S2 Magister Manajemen Teknologi • Bachelor of Management • Master of Technology Management
26	Dino Geri Hamsah	Assistant Analyst Auditor 1	• S1 Teknik Elektro • Bachelor of Electrical Engineering
27	Hanna Elvira Aulya	Assistant Analyst Auditor 1	• S1 Teknik Elektro • Bachelor of Electrical Engineering
28	Wahu Aafia Hermawa	Analyst Methodology & QA	• S1 Manajemen • S2 Magister Manajemen • Bachelor of Management • Master of Management
29	Wina Sonya Sofhandita	Assistant Analyst Methodology & QA	• S1 Teknik Industri • Bachelor of Industrial Engineering
30	Andry Aryanto	Assistant Analyst Methodology & QA	• S1 Teknik Industri • Bachelor of Industrial Engineering
31	Carla Sani Virnanda	Assistant Analyst Counterpart & Reporting	• S1 Akuntansi • Bachelor of Accounting
32	Rachmadita Arjani Kurniahpi	Assistant Analyst Counterpart & Reporting	• S1 Manajemen • Bachelor of Management
33	Alya Hukom Hutsehmad	Assistant Analyst Counterpart & Reporting	• S1 Teknik Fisika • Bachelor of Physics Engineering
34	Tri Wuryanti	Analyst Konsolidasi	• S1 Sihat Hukum • S2 Magister Manajemen • Bachelor of Law Science • Master of Management
35	Sabrina Mikrati	Senior Specialist & Konsultasi	• S1 Akuntansi • Bachelor of Accounting

Sertifikasi Auditor Satuan Pengawasan Internal
Certification of Internal Audit Unit Auditors

Sertifikasi Profesi Professional Certification	Jumlah Auditor Total Auditor
Qualified Internal Auditor (QIA) Manajerial / Managerial Qualified Internal Auditor (QIA)	23
Qualified Internal Auditor (QIA) Lanjutan / Advanced Qualified Internal Auditor (QIA)	8
Qualified Internal Auditor (QIA) Dasar / Basic Qualified Internal Auditor (QIA)	4
Certified Risk Management Officer (CRMO)	1
Certified Fraud Examiner (CFE)	1

Pelaksanaan Kegiatan Satuan Pengawasan Internal
Implementation of Internal Audit Unit Activities

Satuan Pengawasan Internal menyusun Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) dengan mengacu pada sasaran-sasaran strategis (Strategic Map) Perusahaan menggunakan pendekatan Risk Based Internal Audit (RBIA). Sesuai dengan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) Satuan Pengawasan Internal tahun 2022, program-program utama Satuan Pengawasan Internal mencakup kegiatan sebagai berikut:

1. Audit Internal dengan objek audit Unit Pembangkitan (UP), Unit Maintenance Repair Overhaul (UMRO), Unit Jasa Jasa Operation and Maintenance (UJJOM), Divisi Bidang/ Satuan Kerja Kantor Pusat dan Anak Perusahaan
2. Penugasan audit dengan tujuan tertentu dan audit tematik
3. Pelaksanaan koordinasi dengan Komite Audit dan counterpart auditor eksternal
4. Peran sebagai consultant dan catalyst
5. Monitoring tindak lanjut hasil audit
6. Pengadaan outsourcing SPI dengan Stakeholders
7. Pengadaan Tata Kelola SPI
8. Peningkatan kapabilitas dan kapasitas personil SPI

The Internal Audit Unit prepares the Annual Audit Work Program (PKAT) by referring to the Company's strategic targets (Strategic Map) using the Risk Based Internal Audit (RBIA) approach. In accordance with the 2022 Annual Audit Work Program (PKAT) of the Internal Audit Unit, the main programs of the Internal Audit Unit include the following activities:

1. Internal Audit with audit objects of the Generating Unit (UP), Maintenance Repair Overhaul Unit (UMRO), Operation and Maintenance Services Business Unit (UJJOM), Head Office Divisions/Business Work Units and Subsidiaries
2. Audit assignments with certain objectives and thematic audits
3. Coordination with the Audit Committee and counterpart external auditors
4. Role as consultant and catalyst
5. Monitoring the follow-up of audit results
6. Strengthening the IAU networking with Stakeholders
7. Strengthening the IAU Governance
8. Increasing the capability and capacity of the IAU personnel

SPI telah melaksanakan program kerja utama sepanjang tahun 2022 berdasarkan Rencana Kerja SPI tersebut yang meliputi kegiatan sebagai berikut:

The IAU has realized the main work program throughout 2022 based on the IAU Work Plan which includes the following activities:

1. Pelaksanaan Audit Internal
Audit rutin, audit dengan tujuan tertentu dan audit tematik telah dilaksanakan sepanjang tahun 2022 pada beberapa objek audit sebagai berikut:

1. Internal Audit Implementation
Routine audits, audits with certain objectives and thematic audits have been carried out throughout 2022 on several audit objects as follows:

Pelaksanaan Audit Internal Tahun 2022
Implementation of Internal Audit in 2022

No.	Objek Audit Audit Object	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation
Triwulan I Quarter I		
1	Unit Pembangkitan Gresik Gresik Generation Unit	3 – 21 Januari 2022 January 3 – 21, 2022
2	Unit Pembangkitan Paiton Paiton Generation Unit	3 – 21 Januari 2022 January 3 – 21, 2022
3	Unit Pembangkitan Muara Tawar Muara Tawar Generation Unit	3 – 20 Januari 2022 January 3 – 20, 2022
4	Unit Pembangkitan Muara Karang Muara Karang Generation Unit	10 Januari – 18 Februari 2022 January 10 – February 18, 2022
5	Unit Bisnis Jasa Operasi dan Pemeliharaan (OMU) PLTU Paiton Operation and Maintenance (O&M) Services Business Unit of Paiton CFPP	31 Januari – 25 Februari 2022 January 31 – February 25, 2022
6	Unit Bisnis Jasa Operasi dan Pemeliharaan (O&M) PLTU Pelabuhan Ratu Operation and Maintenance (O&M) Services Business Unit of Pelabuhan Ratu CFPP	31 Januari – 25 Februari 2022 January 31 – February 25, 2022
7	Unit Bisnis Jasa Operasi dan Pemeliharaan (O&M) PLTU Tanjung Awar-Awar Operation and Maintenance (O&M) Services Business Unit of Tanjung Awar-Awar CFPP	28 Februari – 18 Maret 2022 February 28 – March 18, 2022
Triwulan II Quarter II		
8	Unit Bisnis Jasa Operasi dan Pemeliharaan (O&M) PLTU Indramayu Operation and Maintenance (O&M) Services Business Unit of Indramayu CFPP	28 Februari – 18 Maret 2022 February 28 – March 18, 2022
9	Unit Pemeliharaan Mesin & Elektrikal (UPMB) Mechanical & Electrical Maintenance Unit	28 Februari – 25 Maret 2022 February 28 – March 25, 2022
10	Unit Bisnis Jasa Operasi dan Pemeliharaan (O&M) PLTU Rembang Operation and Maintenance (O&M) Services Business Unit of Rembang CFPP	28 Maret – 20 April 2022 March 28 – April 20, 2022
11	Unit Pembangkitan Indramayu Indramayu Generation Unit	28 Maret – 20 April 2022 March 28 – April 20, 2022
12	Unit Pembangkitan Cilacap Cilacap Generation Unit	28 Maret – 20 April 2022 March 28 – April 20, 2022
13	Unit Bisnis Jasa Operasi dan Pemeliharaan (O&M) PLTU Pulang Pisau Operation and Maintenance (O&M) Services Business Unit of Pulang Pisau CFPP	17 Mei – 8 Juni 2022 May 17 – June 8, 2022
14	Unit Bisnis Jasa Operasi dan Pemeliharaan (O&M) PLTU Kaltim Teluk Operation and Maintenance (O&M) Services Business Unit of Kaltim Teluk CFPP	17 Mei – 8 Juni 2022 May 17 – June 8, 2022
15	Unit Bisnis Jasa Operasi dan Pemeliharaan (O&M) PLTU Ayer Operation & Maintenance Service Business Unit of Ayer CFPP	17 Mei – 8 Juni 2022 May 17 – June 8, 2022
Triwulan III Quarter III		
16	Sekam Manajemen Risiko dan Sepatuhan Risk management and Compliance Unit	4 – 22 Juli 2022 July 4 – 22, 2022
17	Unit Bisnis Jasa Operasi dan Pemeliharaan (O&M) PLTU Tanjung Operation and Maintenance (O&M) Services Business Unit of Tanjung CFPP	4 – 22 Juli 2022 July 4 – 22, 2022
18	PNP Academy	11 – 29 Juli 2022
19	Direktorat Operasi II Directorate of Operation II	23 Agustus – 13 September 2022 August 23 – September 13, 2022
20	Direktorat Pengembangan dan Niaga Directorate of Development and Commerce	23 Agustus – 13 September 2022 August 23 – September 13, 2022

No.	Objek Audit Audit Object	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation
11	Satuan Pemeliharaan dan Transformasi Digital Corporate Planning and Transformation Unit	23 Agustus - 22 September 2022 August 23 - September 23, 2022
12	Direktur Operasi 2 Directorate of Operations 2	19 September - 7 Oktober 2022 September 19 - October 7, 2022
13	Direktur Keuangan Directorate of Finance	19 September - 7 Oktober 2022 September 19 - October 7, 2022
14	PT Sarulla Operations	19 September - 7 Oktober 2022 September 19 - October 7, 2022
Triwulan IV Quarter IV		
15	Satuan Terminasi dan Inkoring Termination and Inkoring Unit	27 Oktober - 4 November 2022 October 27 - November 4, 2022
16	PT PJB Investasi	27 Oktober - 4 November 2022 October 27 - November 4, 2022
17	PT Prima Layanan Nasional	27 Oktober - 4 November 2022 October 27 - November 4, 2022
18	PT PJB Services	14 November - 2 Desember 2022 November 14 - December 2, 2022
19	Direktorat Sumber Daya Manusia dan Administrasi Directorate of Human Capital and Administration	14 November - 2 Desember 2022 November 14 - December 2, 2022
20	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	21 November - 9 Desember 2022 November 21 - December 9, 2022

2. Pelaksanaan Koordinasi Dengan Komite Audit dan Counterpart External Auditor

Pelaksanaan koordinasi dengan Komite Audit mengacu pada Piagam Audit Internal yang menjelaskan bahwa Laporan Kegiatan Satuan Pengawasan Internal (LKSPI) disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit setiap triwulan sebagai bahan untuk evaluasi dan tindak lanjut. Koordinasi dengan Komite Audit secara rutin dilakukan yang membahas kegiatan pemantauan laporan atas pelaksanaan tugas SPI dan rencana kerja berupa Model Tiga Lini (Three-Lines Model) dengan rincian sebanyak 6 (enam) kali rapat sebagai berikut:

a. Tanggal 7 Februari 2022, Satuan Pengawasan Internal dan Komite Audit telah menyelenggarakan Rapat Pembahasan Laporan Kegiatan Satuan Pengawasan Internal (LKSPI) Triwulan IV tahun 2021.

b. Tanggal 30 Maret 2022, Satuan Pengawasan Internal dan Komite Audit telah menyelenggarakan rapat rutin Model Tiga Lini (Three-Lines Model) untuk bahasan hasil audit Direktorat Niaga tahun 2021.

c. Tanggal 22 April 2022, Satuan Pengawasan Internal dan Komite Audit telah menyelenggarakan Rapat Pembahasan Laporan Kegiatan Satuan Pengawasan Internal (LKSPI) Triwulan I tahun 2022.

2. Implementation of Coordination with the Audit Committee and Counterpart External Auditor

The implementation of coordination with the Audit Committee refers to the Internal Audit Charter which explains that the Internal Audit Unit Activity Report (LKSPI) is submitted to the Board of Commissioners through the Audit Committee every quarter as material for evaluation and follow-up. Coordination with the Audit Committee is routinely conducted which includes the discussion of monitoring reports on the implementation of the PKPU duties and reviewing the implementation of the Three-Lines Model with the calculation of 6 (six) meetings as follows:

a. Dated February 7, 2022, the Internal Audit Unit and the Audit Committee have held a Meeting to Discuss the Internal Audit Unit Activity Report (LKSPI) for the Fourth Quarter of 2021.

b. Dated March 30, 2022, the Internal Audit Unit and Audit Committee have held a Three-Lines Model review meeting for the Audit findings of the Directorate of Commerce in 2021.

c. Dated April 22, 2022, the Internal Audit Unit and the Audit Committee have held a Meeting to Discuss the Internal Audit Unit Activity Report (LKSPI) for the First Quarter of 2022.

d. Tanggal 7 Juni 2022, Satuan Pengawasan Internal dan Komite Audit telah menyelenggarakan rapat rutin Pada Tiga Unit (Pelabuhan Ende) untuk membahas hasil audit LKBDM Tanjung Awan-Awan 2022

e. Tanggal 10 Agustus 2022, Satuan Pengawasan Internal dan Komite Audit telah menyelenggarakan Rapat Pembahasan Laporan Kegiatan Satuan Pengawasan Internal (LKSPI) triwulan II tahun 2022

f. Tanggal 29 Oktober 2022, Satuan Pengawasan Internal dan Komite Audit telah menyelenggarakan Rapat Pembahasan Laporan Kegiatan Satuan Pengawasan Internal (LKSPI) triwulan III tahun 2022

d. Dated June 7, 2022, the Internal Audit Unit and Audit Committee have held a Three-Units Pilot review meeting for the audit findings of LKBDM Tanjung Awan-Awan 2022

e. Dated August 10, 2022, the Internal Audit Unit and the Audit Committee have held a Meeting to Discuss the Internal Audit Unit Activity Report (LKSPI) for the Second Quarter of 2022

f. Dated October 29, 2022, the Internal Audit Unit and the Audit Committee have held a Meeting to Discuss the Internal Audit Unit Activity Report (LKSPI) for the Third Quarter of 2022

SPI juga melakukan tunjut Countervailing terhadap auditor eksternal sepanjang tahun 2022, dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan opening meeting pada tanggal 19 September 2022 dengan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (KAP PwC) terkait kegiatan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal, Evaluasi Kinerja Perseroan (Tingkat Kesehatan) dan Key Performance Indicator (KPI) serta juga ekspektasi akuntan lainnya untuk periode Tahun Buku 2022

b. Dalam Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melakukan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pemberian Subsidi Listrik Tahun Anggaran 2021 pada PT PLN (Persero), Anak Perusahaan, dan Instansi terkait lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Bangkulu, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Bali, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

c. Dalam Pengawasan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melakukan pemeriksaan pendahuluan atas kepatuhan pengelolaan pembayaran dan biaya penyediaan tenaga listrik tahun 2020 sampai dengan Semester I 2021 pada PT PLN (Persero), anak perusahaan, dan instansi terkait lainnya di DKI Jakarta

d. Dalam Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan Reviu Atas Peningkatan Penggunaan produk Dalam Negeri (P3DN) Dalam Rangka Dukung Bahan Indonesia (DBI) Pada PT Pembangkitan Jawa Bali.

e. Dalam Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan Penilaian Tingkat Maturitas Penerapan Manajemen Risiko Pada PT Pembangkitan Jawa Bali Tahun Buku 2021.

The SPI also executed Countervailing toward to external auditors throughout 2022, with the following activities:

a. Implementation of an opening meeting on September 19, 2022 with Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (KAP PwC) related to the audit activity of the Company's Consolidated Financial Statements, Financial Statements and Implementation of the Kemitraan and Bina Lingkungan Program (PKBL), Compliance with Laws and regulations and Internal Control, Evaluation of the Company's Performance (Soundness Level) and Key Performance Indicators (KPIs) as well as other stakeholders' expectations necessary for the 2021 Financial Year period.

b. The Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI) conducted an Audit with Certain Objectives on Electricity Supply Business Activities and Electricity Subsidy Calculation for the 2021 Fiscal Year of PT PLN (Persero), Subsidiaries, and Other Related Agencies in DKI Jakarta, West Java, Central Java, Yogyakarta, East Java, North Sumatra, Riau, Riau Islands, South Sumatra, Jambi, Bengkulu, South Kalimantan, South Sulawesi, North Sulawesi, Southeast Sulawesi, Central Sulawesi, Gorontalo, Bali, West Nusa Tenggara, Maluku, North Maluku, Papua and West Papua.

c. The Finance Supervisory Agency of the Republic of Indonesia (BPK RI) conducted a preliminary examination of compliance with the management of revenue and expenses for providing electricity from 2020 to the First Semester of 2021 at PT PLN (Persero), subsidiaries, and other related agencies in DKI Jakarta.

d. The Finance and Development Supervisory Agency (BPKP) conducted a Review of the Increased Use of Domestic Products (P3DN) in the Context of Proudly Made in Indonesia (DBI) at PT Pembangkitan Jawa Bali.

e. The Finance and Development Supervisory Agency (BPKP) conducted an Assessment of the Maturity Level of Risk Management Implementation at PT Pembangkitan Jawa Bali for the 2021 Financial Year.

f. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan Evaluasi atas Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Percepatan Konversi Gas Rumah Kaca Tahun 2021 sampai dengan Triwulan I Tahun 2022

g. Satuan Pengawasan Intern PT PLN (Persero) melakukan audit atas subsidi listrik Tahun Anggaran 2021

f. The Finance and Development Supervisory Agency (BPKP) conducted an Evaluation of the Development of New Renewable Energy and Reduction of Greenhouse Gas Emissions from 2021 to the First Quarter of 2022

g. The Internal Audit Unit of PT PLN (Persero) conducted an audit of accurately subsidies for the 2021 fiscal year.

3. Peran Sebagai Konsultan dan Katalis

Peran Satuan Pengawasan Internal sebagai Konsultan dan Katalis dilakukan melalui pemberian saran dan masukan kepada Unit Pembangkitan Pemeliharaan/Sub Coordinate/Cabang/Subcabang Pelaksanaan untuk optimalisasi pelaksanaan fungsi operasional khususnya terkait dengan pencapaian kinerja dan optimalisasi sumber daya.

3. Role as Consultant and Catalyst

The role of the Internal Audit Unit as a Consultant and Catalyst is conducted through providing advice and input to the Generation Unit/Maintenance Unit/Sub Coordinate/Agency/Subsidiary for the optimization of the implementation of operational tasks, especially related to performance achievement and optimization of resources.

4. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit

Satuan Pengawasan Internal melakukan monitoring atas tindak lanjut hasil audit dan dilaporkan secara berkala kepada Direksi dan Komite Audit. Rekapitulasi atas pemantauan tindak lanjut hasil audit tahun 2021 adalah sebagai berikut:

4. Monitoring Follow-up of Audit Results

The Internal Audit Unit monitors the follow-up of audit results and it is reported regularly to the Board of Directors and the Audit Committee. A recapitulation of the monitoring of follow-up on audit results in 2021 is as follows:

Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Audit Signifikan

Recapitulation of Follow-up on Significant Audit Results

Tahun Year	Status Awal Initial Status		Status Akhir Final Status		Penyelesaian Penyelesaian Percentage of Completion	
	Temuan Findings	Deskripsi Description	Temuan Findings	Deskripsi Description	Temuan Findings	Deskripsi Description
2018	88	230	0	0	100%	100%
2019	89	233	0	0	100%	100%
2020	71	108	0	0	100%	100%
2021	73	139	0	0	100%	100%
2022	61	111	0	0	100%	100%

Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Audit Tujuan Tertentu

Recapitulation of the Follow-up on Significant Audit Results

Tahun Year	Status Awal Initial Status		Status Akhir Final Status		Penyelesaian Penyelesaian Percentage of Completion	
	Temuan Findings	Deskripsi Description	Temuan Findings	Deskripsi Description	Temuan Findings	Deskripsi Description
2022	5	12	1	2	80%	84%

Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Audit Eksternal Tahun 2022

Recapitulation of the Follow-up on External Audit Results in 2022

No.	Auditor Eksternal External Auditor	Temuan Findings	Selesai Solved	Proses Process	Persentase Penyelesaian Percentage of Completion
1	BPK RI	-	-	-	-
2	SKK Migas	3	3	0	100%
3	KAP	-	-	-	-
4	Bea Cukai	2	2	0	100%
5	SPI PLN	-	-	-	-

5. Program Pengembangan Auditor Satuan Pengawasan Internal

Program pengembangan auditor dilaksanakan untuk peningkatan mutu dan kompetensi auditor dalam menunjang pelaksanaan tugas SPI. Auditor SPI mengikuti diklat bersanding untuk memperoleh sertifikat Qualified Internal Auditor (QIA) atau sertifikat kompetensi lainnya, seminar dan lokakarya internal audit sepanjang tahun 2022 sebagai berikut:

5. Auditor Development Program of the Internal Audit Unit

The auditor development program is carried out to improve the quality and competence of auditors in supporting the implementation of the IAU's duties. The IAU auditors participated in broad training to obtain Qualified Internal Auditor (QIA) certificates or other competency certificates, seminars and internal audit workshops throughout 2022 as follows:

Program Pengembangan Auditor Satuan Pengawasan Internal

Auditor Development Program of the Internal Audit Unit

No.	Pelatihan Training	Jumlah Auditor Number of Auditors	Tanggal Date
Triwulan I (Quarter I)			
1	Lead Auditor ISO 37001	3	10-14 Januari 2022 (January 10-14, 2022)
2	QIA Tingkat Dasar (Basic Level QIA)	6	7-18 Februari 2022 (February 7-18, 2022)
3	Lead Auditor ISO 31000	3	28-30 Februari 2022 (February 28-30, 2022)
4	Pengadaan Barang dan Jasa (Goods and Services Procurement)	3	1-31 Maret 2022 (March 1-31, 2022)
5	Sertifikasi MES (Mesin JAFT General Certification)	2	14-25 Maret 2022 (March 14-25, 2022)
6	Audit Interna & Fraktorik (Internal & Forensic Audit)	1	7-8 Maret 2022 (March 7-8, 2022)
7	Internal Control (Internal Report)	12	21 Maret 2022 (March 21, 2022)
8	Lead Auditor ISO 37001	3	28 Maret-8 April 2022 (March 28-April 8, 2022)
9	QIA Tingkat Lanjutan (Advanced Level QIA)	3	7-30 Maret 2022 (March 7-30, 2022)
Triwulan II (Quarter II)			
10	Internal Control (Financial Report)	1	11 April 2022 (April 11, 2022)
11	ISO 37001 Compliance Management	3	4-8 April 2022 (April 4-8, 2022)
12	Pelaksanaan Pengadaan (Procurement Implementation)	6	18-28 April 2022 (April 18-28, 2022)
13	QIA Tingkat Menengah (Intermediate Level QIA)	3	6-14 Juni 2022 (June 6-14, 2022)
14	QIA Tingkat Lanjutan (Advanced Level QIA)	3	6-17 Juni 2022 (June 6-17, 2022)
15	QIA Tingkat Dasar (Basic Level QIA)	3	6-17 Juni 2022 (June 6-17, 2022)

No.	Pelatihan Training	Jumlah Auditor Number of Auditors	Tanggal Date
16	Data Analytics	1	6-11 Mei 2022 May 6-11, 2022
17	ISO 20000-1:2018 Service Management	2	9-12 Mei 2022 May 9-12, 2022
18	Konferensi Auditor Internal, Wisuda Certified Professional Maret 2022 2022 Internal Auditor Conference, Professional Certification Graduation and PEQA National Conference 2022	3	23-25 Mei 2022 May 23-25, 2022
Triwulan II Quarter II			
19	ISO 37001 Management Anti Suap ISO 37001 Anti-Bribery Management	4	4-8 Juli 2022 July 4-8, 2022
20	Effective Communication & Negotiation Skill	1	18-19 Juli 2022 July 18-19, 2022
21	Risiko Hasil & Kesalahannya Expected Result & Outcome	5	25-29 Juli 2022 July 25-29, 2022
22	QM Tingkat Dasar Basic Level QM	1	22 Agustus - 2 September 2022 August 22-September 2, 2022
23	QM Tingkat Lanjutan Advanced Level QM	7	1-17 Agustus 2022 August 1-17, 2022
24	QM Tingkat Mahapelatih Magang Level QM	2	5-11 September 2022 September 5-11, 2022
25	ISO 27001 Whistleblowing System	2	5-6 September 2022 September 5-6, 2022
26	Pembekalan Certified Fraud Examiner Certified Fraud Examiner Briefing	3	19-23 September 2022 September 19-23, 2022
27	Manajemen Risiko Risk Management	6	30 September 2022 September 30, 2022
28	CRC Summit - Webinar	2	5 September 2022 September 5, 2022
Triwulan IV Quarter IV			
29	Lead Auditor ISO 9001:2015	4	3-7 Oktober 2022 October 3-7, 2022
30	Seminar Nasional Internal Audit National Seminar on Internal Audit	3	13-14 Oktober 2022 October 13-14, 2022
31	Feasibility Study	1	10-11 Oktober 2022 October 10-11, 2022
32	Stakeholder Management	2	24-25 Oktober 2022 October 24-25, 2022
33	Lead Auditor ISO 45001	3	17-21 Oktober 2022 October 17-21, 2022
34	QM Tingkat Dasar Basic Level QM	1	7-18 November 2022 November 7-18, 2022
35	QM Tingkat Lanjutan Advanced Level QM	4	7-18 November 2022 November 7-18, 2022
36	QM Tingkat Mahapelatih Mangang Level QM	7	21-30 November 2022 November 21-30, 2022
37	Webinar Anti Fraud Conference	2	1-2 Desember 2022 December 1-2, 2022
38	Seminar ISO 37301 Compliance	2	12-13 Desember 2022 December 12-13, 2022
39	Audit Management System 2.0	1	30 November-2 Desember 2022 November 30-December 2, 2022
40	ESG Review Course	2	21 November-2 Desember 2022 November 21-December 2, 2022
41	Sosialisasi SMAP/ISO 37001 Anti-Bribery	3	19-23 Desember 2022 December 19-23, 2022
42	Business Development	2	5-7 Desember 2022 November 5-7, 2022
43	Marketing Skills	1	10-11 November 2022 November 10-11, 2022

Quality Assurance Review Audit Internal

Quality Assurance Review of Internal Audit

International Professional Practices Framework (IPPF) menjadi salah satu acuan bagian Pengawasan Internal dalam pelaksanaan fungsi audit internal Perusahaan. IPPF Standar 1300 mengatur bahwa pelaksanaan Quality Assurance Review Internal terhadap program jaminan kualitas dan peningkatan fungsi audit internal secara keseluruhan harus dilakukan setiap tahun melalui self assessment, sedangkan secara eksternal harus dilakukan setiap 5 (lima) tahun oleh assesor yang independen.

Quality Assurance Review oleh assesor independen telah dilaksanakan pada tahun 2018. PT SAI ditunjuk dan ditetapkan untuk melaksanakan Quality Assurance Review berdasarkan Surat Perintah Kerja dari Kepala Biro Umum dan Pelembagaan Nomor: 021.SPK/DEKOM/KUM/2018 tanggal 14 Oktober 2018. Pada tahun 2022, SAI melaksanakan Quality Assurance Review secara self assessment yang dievaluasi pada tanggal 12 Desember 2022. Hasil observasi dan evaluasi atas 4 (empat) aspek dari praktik-praktik audit internal, yaitu: aspek tata kelola, manajemen audit internal, pengalaman staf auditor dan pelaksanaan aktivitas audit internal berdasarkan standar IPPF 2017 menunjukan bahwa secara keseluruhan SPI PJB telah memenuhi Standar dan Kode Etik The Institute of Internal Auditors (IIA IPPF 2017).

The International Professional Practices Framework (IPPF) is one of the references for the Internal Audit Unit in the implementation of the Company's internal audit function. The IPPF Standard 1300 regulates that the implementation of Internal Quality Assurance Review of the quality assurance program and improvement of the overall internal audit function must be conducted annually through self-assessment, while externally it must be conducted every 5 (five) years by an independent assessor.

Quality Assurance Review by an independent assessor has been carried out in 2018. PT SAI was appointed and determined to carry out the Quality Assurance Review based on a Work Order from the Head of General and Institutional Affairs Bureau: 021.SPK/DEKOM/KUM/2018 dated October 14, 2018. In 2022, the SAI carried out a Quality Assurance Review by self-assessment which was completed on December 12, 2022. The results of observation and evaluation of 4 (four) aspects of internal audit practices, namely, aspects of governance, internal audit management, management of auditor staff and implementation of internal audit activities based on the IPPF 2017 standard show that overall PJB SPU has met the Standards and Code of Ethics of the Institute of Internal Auditors (IIA IPPF 2017).

Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System

Sistem Pengendalian Internal merupakan serangkaian proses, kebijakan, dan prosedur yang menyeluruh, saling berkaitan dan berkesinambungan pada setiap kegiatan dan tingkatan baik individu maupun kelompok mulai dari pimpinan dan seluruh pegawai dalam rangka memastikan tercapainya tujuan Perusahaan. Sistem Pengendalian Internal sebagai sebuah proses yang integral melibatkan seluruh jenjang organisasi Perusahaan dan dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai kecukupan sistem keuangan, efisiensi dan efektivitas kegiatan operasi, kepatuhan terhadap hukum dan regulasi serta pengamanan aset Perusahaan.

The Internal Control System is a series of processes, policies and procedures that are comprehensive, interrelated and continuous in every action and activity of both individuals and groups, starting from the leaders and all employees in order to ensure the achievement of the Company's objectives. The Internal Control System as an integral process involves all levels of the Company's organization and is designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial statements, efficiency and effectiveness of operations, compliance with laws and regulations as well as ensuring the Company's assets.

Kerangka Kerja Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System Framework

Internal Control-Integrated Framework yang diterbitkan COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) menjadi salah satu acuan dalam penyusunan kebijakan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan. Kebijakan Sistem Pengendalian Internal ditetapkan dalam Peraturan Direksi PT Pembangkitan Jawa – Bali No.0030.P/010/KEP/2012 tentang Pedoman Kebijakan Audit Internal PT Pembangkitan Jawa Bali dan Peraturan Direksi PT Pembangkitan Jawa – Bali No.0008.P/010/KEP/2012 tentang Pedoman Pelaksana Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi PT Pembangkitan Jawa – Bali. Kerangka kerja Sistem Pengendalian Internal Perusahaan mengacu kepada kebijakan yang ditetapkan Perusahaan dengan mengadopsi prinsip-prinsip Internal Control-Integrated Framework serta Manajemen Risiko Terintegrasi – Three Lines Model.

The Internal Control-Integrated Framework determined by COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) is one of the references in the preparation of the Company's Internal Control System policy. The Internal Control System policy is stipulated in the Regulation of the Board of Directors of PT Pembangkitan Jawa – Bali No.0030.P/010/KEP/2012 concerning Guidelines for Internal Audit Execution of PT Pembangkitan Jawa – Bali, and Regulation of the Board of Directors of PT Pembangkitan Jawa – Bali No.0008.P/010/KEP/2012 concerning Executive Regulation of Integrated Risk Management Implementation of PT Pembangkitan Jawa – Bali. The framework of the Company's Internal Control System refers to the policies determined by the Company by adopting the principles of the Internal Control-Integrated Framework and Integrated Risk Management – Three Lines Model.

Internal Control-Integrated Framework

Prinsip-prinsip Internal Control-Integrated Framework yang mencakup lima komponen penunjang pengendalian internal yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan (monitoring). Sistem Pengendalian Internal Perusahaan sejalan dan komprehensif dengan kelima komponen tersebut dalam penerapannya. Lingkungan pengendalian dibangun dengan membentuk sikap dan kesadaran akan pentingnya pengendalian internal. Pengelolaan risiko dilakukan dengan mengidentifikasi, menganalisa & evaluasi risiko serta menentukan langkah penanggulangan risiko usaha yang relevan. Perusahaan menetapkan pemisahan tugas dan tanggung jawab untuk kegiatan tertentu, penggunaan otorisasi wewenang tepat untuk memastikan aset, kegiatan serta pembukuan dan penggunaan dokumen dari catatan yang memadai.

The promotion of the Internal Control-Integrated Framework which includes five supporting components of internal control including the control environment, risk assessment, control procedures, information and communication as well as monitoring. The Company's Internal Control System is in line with and takes into account these five components in its implementation. The control environment is established by building attitudes and awareness of the importance of internal control. Risk management is applied by identifying, analyzing & evaluating, assessing and determining relevant business risk management steps. The Company removes the division of duties and responsibilities for certain activities, appropriate use of authority to conduct an activity, as well as the creation and use of adequate documents and records. Related to information and communication, PLN has provided media such as

Terkait informasi dan komunikasi, PLN telah menyediakan media diantaranya melalui Digital Kerja, Digital Koordinasi, surat/disposisi, email, website Perusahaan, intranet, portal dan media lainnya. Pemantauan dilakukan secara berkala melalui performance check oleh Direktur Pemilihan Talenta, Audit Internal oleh Satuan Pengawasan Internal dan Fungsi Quality Assurance Audit Internal serta Audit oleh eksternal (BPK, KAP/Konsultan dan KAP).

through Pilot Meeting, Coordination Meeting, socialization, email, company website, intranet, portal and other media. Monitoring is carried out periodically through performance checks by the Technical Development Director, Internal Audit by the Internal Audit Unit and Internal Audit Quality Assurance Function as well as Audit by external (BPK, KAP/Consultant and KAP).

Three Lines Model

Kerangka kerja sistem pengendalian Three Lines Model membagi peran dan tanggung jawab menjadi 3 (tiga) lapis dalam organisasi yang mid Sebagai:

1. Lini 1 (First Liner): melaksanakan Pengelolaan Risiko pada area tanggung jawabnya.
2. Lini 2 (Lurga: Manajerial Risiko/Risk Unit dan fungsi kepatuhan) bersama dengan unit kerja lainnya melaksanakan evaluasi RCP dan melakukan pada area pada di Lini 1 dalam melaksanakan dan meningkatkan efektivitas pengelolaan Risiko yang dilaksanakan.
3. Lini 3 (Fungsi Audit Internal): melaksanakan pemeriksaan dan verifikasi atas kecukupan (cukup) dan efektif (cukup) terhadap Risiko yang ditangkurang di Lini 1.

The Three Lines Model Lemos system framework divides roles and responsibilities into 3 (three) layers in the organizational working:

1. Line 1 (First Liners): carrying out Risk Management in their area of responsibility.
2. Line 2 (Risk Management Function/Risk Unit and compliance function) carrying out the RCP mechanism and supporting the parties in Line 1 together with other work units in carrying out and improving the effectiveness of the Risk management.
3. Line 3 (Internal Audit Function): carrying out checks and verifications on the adequacy of controls and follow-ups on Risks occurring in Line 1.

Pembagian peran, tugas dan tanggung jawab Model Tiga Lini mengacu pada proses bisnis dalam BIS 3.0 yang diterapkan saat ini dan tidak terbatas pada:

a. Lini 1

1. Melaksanakan sistem pengendalian internal sesuai dengan rancang bangun kriteria yang disusun oleh Lini 2.
2. Memastikan adanya lingkungan pengendalian (control environment) yang kondusif dalam menjalankan proses bisnis.
3. Menerapkan kebijakan manajemen risiko, yaitu memastikan identifikasi seluruh risiko, kecukupan mitigasi risiko dan memantau efektivitas tindak lanjutnya.

b. Lini 2

1. Memastikan efektivitas rancang bangun sistem pengendalian internal yang dilaksanakan oleh Lini 1.
2. Memviu rancang bangun sistem pengendalian internal secara periodik sesuai kebutuhan mempertimbangkan usulan Lini 1 dan rekomendasi Lini 3.
3. Melaksanakan fungsi pembinaan (supervisi) pengendalian risiko/risk, koordinasi dan evaluasi atas proses dan hasil kepada Lini 1.
4. Mendidik, mengarahkan, dan memantau pelaksanaan manajemen risiko sesuai Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Perusahaan.

The division of roles, duties and responsibilities of the Three Line Model refers to the business processes in the current BIS 3.0 and is not limited to:

a. Line 1

1. Carrying out the internal control system in accordance with the design criteria prepared by Line 2.
2. Ensuring a conducive control environment in carrying out business processes.
3. Implementing risk management policies, namely ensuring the identification of all risks, the adequacy of risk mitigation and monitoring the effectiveness of follow-up.

b. Line 2

1. Ensuring the effectiveness of the internal control system design carried out by Line 1.
2. Reviewing the design of the internal control system periodically as needed considering Line 1 proposals and Line 3 recommendations.
3. Conducting fostering (supervision) control risk/risk, coordination and evaluation of processes and results to Line 1.
4. Fostering, directing, and monitoring the implementation of risk management in accordance with the Risk Management Implementation Policy within the Company.

c. Unit 3

1. Melakukan audit berbasis risiko untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh Unit 1 dan Unit 2 telah berjalan efektif.
2. Memberikan rekomendasi untuk memastikan adanya peningkatan kualitas secara berkesinambungan (continuous improvement) terhadap proses bisnis perusahaan.
3. Melakukan konsultasi dan pendampingan kepada Unit Unit 1 dan Unit 2 guna penyempurnaan sistem pengendalian internal berdasarkan hasil audit.

c. Unit 3

1. Conducting risk-based audits to ensure that the internal control system carried out by Unit 1 and Unit 2 has been effective.
2. Providing recommendations to ensure continuous improvement of the Company's business processes.
3. Consulting and assisting Unit Unit 1 and Unit 2 in order to improve the internal control system based on the audit results.

Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Operasional

Implementation of the Operational Internal Control System

Sistem Pengendalian Internal pada aspek operasional salah satunya bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas efektivitas dan efisiensi kegiatan fisik pengelolaan Perusahaan dalam rangka mencapai tujuan, terlaksanakannya efektivitas dan kecukupan sistem pengendalian internal, dan terlaksana sesuai aturan perusahaan. Pengendalian internal diterapkan sampai dengan level unit dan individu dengan memastikan aktivitas operasional yang dijalankan sesuai dengan job desk dan program kerja termasuk sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Setiap unit dan individu melakukan aktivitas operasional sesuai dengan prosedur dan program kerja termasuk sasaran kinerja yang telah ditetapkan, mengevaluasi risiko dan melakukan upaya mitigasi di level unit masing-masing serta memastikan pelaksanaannya berjalan secara optimal berdasarkan ketersediaan sumber daya dan hasil yang diraih.

Sistem Pengendalian Internal Operasional adalah salah satunya bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas efektivitas dan efisiensi kegiatan fisik pengelolaan Perusahaan dalam rangka mencapai tujuan, terlaksanakannya efektivitas dan kecukupan sistem pengendalian internal, dan terlaksana sesuai aturan perusahaan. Pengendalian internal diterapkan sampai dengan level unit dan individu dengan memastikan aktivitas operasional yang dijalankan sesuai dengan job desk dan program kerja termasuk sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Setiap unit dan individu melakukan aktivitas operasional sesuai dengan prosedur dan program kerja termasuk sasaran kinerja yang telah ditetapkan, mengevaluasi risiko dan melakukan upaya mitigasi di level unit masing-masing serta memastikan pelaksanaannya berjalan secara optimal berdasarkan ketersediaan sumber daya dan hasil yang diraih.

SPI melakukan audit pada unit dalam rangka memastikan aktivitas operasional berjalan sesuai dengan tujuan Perusahaan dan prosedur yang telah ditetapkan. Satuan Manajemen Risiko dan Kepatuhan melakukan update profil risiko dan monitoring atas upaya mitigasi yang dilakukan pada aktivitas operasional Perusahaan. Direksi menerima laporan pelaksanaan tugas dari setiap unit termasuk Satuan Pengawasan Internal dan Satuan Manajemen Risiko dan Kepatuhan dan melalui rapat dan laporan tertulis. Selain itu Satuan Manajemen Risiko dan Kepatuhan serta SPI secara khusus menyampaikan laporan berbeda kepada Dewan Komisaris serta berkomunikasi dengan Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko. Berdasarkan laporan yang diterima dari setiap unit, Direksi memberikan laporan berbeda melalui laporan manajemen dan membahas kinerja operasional melalui rapat Direksi dan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris juga secara rutin melakukan kunjungan ke unit-unit bisnis untuk memastikan kegiatan operasional berjalan dengan baik.

The Internal Audit Unit (IAU) conducts audits on units in order to ensure that operational activities run in accordance with the Company's objectives and predetermined procedures. The Risk Management and Compliance Unit updates the risk profile and monitors the mitigation efforts carried out in the Company's operational activities. The Board of Directors receives reports on the implementation of duties from each unit, including the Internal Audit Unit and the Risk Management and Compliance Unit through meetings and written reports. In addition, the Risk Management and Compliance Unit as well as the IAU specifically submit periodic reports to the Board of Commissioners and coordinate with the Audit Committee and Risk Management Committee. Based on the reports received from each unit, the Board of Directors provides written reports through management reports and discusses operational performance through the Board of Directors and Board of Commissioners meetings. The Board of Commissioners also regularly conducts visits to business units to ensure operational activities are running well.

Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Keuangan
Implementation of the Financial Internal Control System

Pengendalian internal atas aspek keuangan salah satunya melalui Internal Control over Financial Reporting (ICoFR) yang pelaksanaannya berada di bawah pengawasan pengelola Perusahaan serta unit kerja terkait. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan efektivitas dan pelaksanaan atas pengendalian internal dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai terhadap keandalan pelaporan keuangan, keamanannya informasi, dan terlaksanya asset-asset perusahaan. Implementasi dan pengembangan ICoFR memiliki 3 (tiga) tahapan proses yang terdiri dari penyusunan pedoman dan rancangan pengendalian, pengujian dan pemutakhiran rancangan pengendalian serta pelaksanaan penyusunan pernyataan berjalannya. Laporan ICoFR akan digunakan sebagai salah satu bentuk komitmen manajemen untuk memastikan integritas penyajian laporan keuangan Perusahaan yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai auditor eksternal yang ditunjuk oleh PT PLN (Persero).

One of the internal controls over financial reports is through Internal Control over Financial Reporting (ICoFR), the implementation of which is under the supervision of the Company's leaders and related work units. This is conducted to ensure the effectiveness and implementation of internal controls in order to provide adequate assurance of the reliability of financial reporting, the trustworthiness of information, and the protection of the Company's assets. The implementation and development of ICoFR has 3 (three) stages of the process consisting of the preparation of guidelines and control design, testing and updating of control design as well as the implementation of the preparation of forward statements. The ICoFR report will be used as a form of management commitment to ensure the integrity of the presentation of the Company's financial statements prepared by Work Unit Accounting Firm (KAP) as an external auditor appointed by PT PLN (Persero).

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan
Compliance with Laws and Regulations

Kepatuhan terhadap hukum, peraturan dan kontrak yang berlaku bagi Perusahaan merupakan tanggung jawab Direksi yang dalam pemenuhannya dibantukan kepada unit-unit terkait. Sebagai upaya dalam memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material, maka Perusahaan menunjuk auditor eksternal untuk melakukan pengujian terhadap kepatuhan Perusahaan atas peraturan-peraturan terkait. Hasil pengujian tersebut menunjukan bahwa Perusahaan memenuhi dalam semua hal yang material.

Compliance with laws, regulations and contracts applicable to the Company is the responsibility of the Board of Directors, which in its application is passed down to the relevant units. In an effort to obtain reasonable assurance that the financial statements are free from material misstatement, the Company appointed an external auditor to test the Company's compliance with certain articles of laws, regulations and contracts. The results of these tests show that the Company complies in all material respects.

Kecukupan Sistem Pengendalian Internal
Adequacy of the Internal Control System

Penerapan sistem pengendalian internal dievaluasi melalui pengumpulan dan review dokumen, survei personel, interview dan observasi serta review audits oleh auditor internal maupun eksternal sesuai jadwal audit yang berlaku untuk memastikan kecukupan atas pelaksanaannya. Satuan Pengawasan Internal (SPI) melakukan audit pada lingkup aktivitas area objek yang ditetapkan dalam Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) serta objek lain sebagai penugasan khusus dari pimpinan Perusahaan. Sedangkan secara eksternal, audit dilaksanakan oleh Auditor Eksternal, yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

The implementation of the internal control system is evaluated by document collection and review, interviews, perception surveys, interviews and observations as well as external reviews by internal and external auditors in accordance with applicable audit schedules to ensure the adequacy of its implementation. The Internal Audit Unit (SPI) conducts audits at the activity level on objects determined in the Annual Audit Work Program (PKAT) and other objects as special assignments from the Company's leaders. While on an external basis, audits are conducted by External Auditors, namely the Public Accounting Firm (KAP), the Finance and Development Supervisory Agency (BPKP) and the Audit Board (BPK).

Perusahaan juga melakukan asesmen pengendalian internal berdasarkan COSO 2013 sebagai evaluasi penerapan sistem pengendalian internal berdasarkan prinsip-prinsip Internal Control-Integrated Framework terhadap seluruh elemen pengendalian. Asesmen pengendalian internal tahun 2021 dilakukan secara terpusat dengan mengambil sampling pada Unit Pembangkitan Gresik, Unit Pembangkitan Bawtan, Unit Maintenance Depan & Overhaul (UMDO), UIKOM Ketapan dan Distribusi Kantor Pusat. Berdasarkan survei penilaian melalui kuesioner dan wawancara diperoleh hasil bahwa pengendalian internal di PLN NP secara umum sudah ada (present) dan berfungsi (functing). Selain itu, hasil audit berdasarkan Laporan Auditor independen atas kepatuhan pengendalian internal tahun Buku 2021 menunjukan bahwa Perusahaan memadai, dalam semua hal yang material. Hasil hasil tersebut Direksi dan Dewan Komisaris menyatakan bahwa sistem pengendalian internal Perusahaan dipandang cukup memadai.

The Company also conducts an internal control assessment based on COSO 2013 as an evaluation of the implementation of the internal control system based on the principles of the Internal Control-Integrated Framework on all control elements. The internal control assessment in 2021 was conducted centrally by sampling the Gresik Generating Unit, Bawtan Generating Unit, Maintenance Depan & Overhaul Unit (UMDO), Ketapan UIKOM and Distribution at Head Office. Based on a perception survey through questionnaires and interviews, the results show that internal control in PLN NP is generally present and functioning. In addition, there are recommendations related to the principles of internal control elements in order to be able to improve the implementation.

Direksi membuat pernyataan bahwa Direksi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dan penerapannya di dalam Perusahaan. Selain itu, Hasil audit berdasarkan Laporan Auditor independen atas kepatuhan pengendalian internal tahun Buku 2021 menunjukan bahwa Perusahaan memadai, dalam semua hal yang material. Hasil hasil tersebut Direksi dan Dewan Komisaris menyatakan bahwa sistem pengendalian internal Perusahaan dipandang cukup memadai.

The Board of Directors makes a statement that it is responsible for the internal control system and its implementation within the Company. In addition, the audit results based on the Independent Auditor's Report on internal control compliance for the 2021 financial year showed that the Company complied, in all material respects. Based on these results, the Board of Directors and Board of Commissioners stated that the Company's internal control system is considered adequate.

Auditor Eksternal
External Auditor

Audit laporan keuangan tahunan dilaksanakan dapat memberikan informasi yang akurat dan kejelasan yang memadai mengenai akuntabilitas pelaporan keuangan dan kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Perusahaan melakukan audit laporan keuangan tahunan sebagai bagian dari sistem pengendalian pada tingkat entitas yang dilakukan oleh auditor eksternal sebagai pihak independen.

Audits of annual financial statements are expected to provide accurate information and reasonable assurance regarding financial reporting accountability and conformity with generally accepted accounting principles and compliance with laws and regulations. The Company conducts annual financial statement audits as part of the control system at the entity level carried by external auditors as independent parties.

Penunjukan auditor eksternal untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan mempertimbangkan kebutuhan bukan pembatasan jasa audit umum atas laporan keuangan dan suatu entitas. Audit tersebut dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang 5 Februari 2008 tentang Praktik Akuntan Publik pada pasal 11.

The appointment of an external auditor to conduct an audit of financial statements takes into account the provisions related to the provision of general audit services for the financial statements of an entity. The audit is conducted by a Public Accounting Firm (KAP) for a maximum of 6 (six) consecutive financial years as regulated in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 20 of 2015 dated February 5, 2008 concerning Public Accountant Practices in article 11.

RUPS memberi kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai auditor yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan untuk tahun buku 2022 sebagaimana Keputusan Hasil Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun buku 2022 tanggal 07 Juni 2023. Dewan Komisaris menetapkan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagai auditor eksternal Perusahaan tahun buku 2022 sesuai dengan keputusan Pemegang Saham mayoritas berdasarkan surat 402/DIR/III/2023/00000/00000/00000 pada tanggal 31 Agustus 2022 perihal Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan Tahun 2022. Tahun buku 2022 merupakan periode penugasan yang ketiga bagi akuntan publik dan KAP tersebutkan, Wibisana, Rintis & Rekan dalam lima tahun terakhir.

The GMS grants authority to the majority shareholders to determine the appointment of a Public Accounting Firm as the auditor who will audit the Company's Financial Statements, Performance Evaluation Report and Compliance Report for the 2022 fiscal year at the conclusion of the General Meeting of Shareholders (GMS) for the 2022 fiscal year dated June 07, 2023. The Board of Commissioners determined KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners as the Company's external auditor for the 2022 fiscal year in accordance with the decision of the majority Shareholders based on letter 402/DIR/III/2023/00000/00000/00000 on August 31, 2023 regarding the Implementation of the Audit of Financial Statements for the 2022 fiscal year. The 2022 financial year is the third assignment period for public accountants and KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners in the last five years.

Jasa, Biaya dan Opini Audit

Audit Services, Fees and Opinions

Akuntan publik dan KAP tersebutkan, Wibisana, Rintis & Rekan tidak memberikan jasa lain selain audit Laporan Keuangan Konsolidasian, Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Kemitraan UMK, Tugas/tahan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal, Evaluasi Kinerja Perusahaan (Tingkat Kesehatan) dan Key Performance Indicator (KPI) serta jasa sebelumnya akuntan lainnya untuk periode Tahun Buku 2022. Perusahaan selama 5 (lima) tahun terakhir secara konsisten mampu mempertahankan predikat opini audit yang menyatakan bahwa laporan keuangan Perusahaan telah disajikan secara "Wajar Tanpa Pengecualian" dalam semua hal yang material berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Public accountants and KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners do not provide other services other than auditing the Consolidated Financial Statements, Financial Statements and Implementation of the MSE Funding Program, Compliance with Laws and Regulations and Internal Control, Evaluation of the Company's Performance (Soundness Level) and Key Performance Indicator (KPI) as well as other accountants' assignment services for the 2022 Financial Year period. For the last 5 (five) years, the Company is consistently able to maintain the title of audit opinion stating that the Company's financial statements have been presented in an "Unqualified" manner in all materials aspects based on generally accepted accounting principles in Indonesia.

Audit Laporan Keuangan Perusahaan

Audit of Company's Financial Statements

Tahun Buku Fiscal Year	Akuntan Accountant	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Jasa yang Diberikan Service Provided	Jasa Lain Other Services	Biaya Audit Audit Fee (Rp)	Opini Audit Audit Opinion
2022	Yanto Kurniawan	Tanudiredja Wibisana, Rintis & Rekan Tanudiredja Wibisana, Rintis & Partners	Laporan Keuangan Konsolidasi Consolidated Financial Statements	• Laporan Evaluasi Kinerja • Laporan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal • Report on Performance Evaluation • Report on Compliance with Laws and Regulations and Internal Control	4.030.000.000	Wajar Tanpa Pengecualian Unqualified
2021	Yanto Kurniawan	Tanudiredja Wibisana, Rintis & Rekan Tanudiredja Wibisana, Rintis & Partners	Laporan Keuangan Konsolidasi Consolidated Financial Statements	• Laporan Evaluasi Kinerja • Laporan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal • Report on Performance Evaluation • Report on Compliance with Laws and Regulations and Internal Control	4.072.224.000	Wajar Tanpa Pengecualian Unqualified

Tahun Buku Fiscal Year	Klasifikasi Classification	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Jenis yang Diberikan Service Provided	Hasil Lain Other Opinions	Biaya Audit Audit Fee (Rp)	Opini Audit Audit Opinion
2022	Yanto Kelanasari	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners	Laporan Keuangan Konsolidasi Consolidated Financial Statements	• Laporan Eksposi Khusus • Laporan Kepatuhan (ari'adlah) Berdasar Peraturan Pemerintah pengganti dan Pengendalian Internal • Report on Performance Evaluation • Report on Compliance with Laws and Regulations and Internal Control	3.333.250.000	Wajar Tanpa Pengecualian Unqualified
2021	Dedy Sukirnadi	Aria, Anadi dan Rekan Aria, Anadi, Haryo & Partners	Laporan Keuangan Konsolidasi Consolidated Financial Statements	• Laporan Eksposi Khusus • Laporan Kepatuhan (ari'adlah) Berdasar Peraturan Pemerintah pengganti dan Pengendalian Internal • Report on Performance Evaluation • Report on Compliance with Laws and Regulations and Internal Control	3.307.000.000	Wajar Tanpa Pengecualian Unqualified
2020	Dadan Ayatullah	Aria, Anadi dan Rekan Aria, Anadi, Haryo & Partners	Laporan Keuangan Konsolidasi Consolidated Financial Statements	• Laporan Eksposi Khusus • Laporan Kepatuhan (ari'adlah) Berdasar Peraturan Pemerintah pengganti dan Pengendalian Internal • Report on Performance Evaluation • Report on Compliance with Laws and Regulations and Internal Control	3.200.000.000	Wajar Tanpa Pengecualian Unqualified

Audit Eksternal Lainnya

Other External Audits

Selain general audit, pelaksanaan audit eksternal juga dilakukan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan dan permintaan dari Pemegang Saham. Audit eksternal lainnya yang dilakukan sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melakukan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pembangun Subsidi Listrik Tahun Anggaran 2021 pada PT PLN (Persero), Anak Perusahaan, dan Instansi terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Bali, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat melalui Surat Tugas No.ST-1581/D/2021 tanggal 7 Januari 2022. Audit dilaksanakan 02 hari kerja sejak tanggal surat tugas.

b. Badan Pengawasan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) berdasarkan surat tugas (SPK II No. 32/S/XX.XXX/I/2022 tanggal 11 Juli 2022 perihal pemeriksaan pendahuluan atas Inventarisasi pengelolaan Piutangdan dan Biaya penyediaan tenaga listrik Tahun 2020 sampai dengan Semester I 2022 pada PT PLN (Persero), anak perusahaan, dan instansi terkait lainnya di DKI Jakarta melalui surat dari PT PLN (Persero) No.

In addition to general audits, the implementation of external audits is also conducted in accordance with the needs of the Company and requests from Shareholders. Other external audits conducted throughout 2022 were as follows:

a. The Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI) conducted an Audit with Specific Purposes on Electricity Supply Business Activities and Electricity Subsidy Calculation for the 2021 Fiscal Year at PT PLN (Persero), Subsidiaries, and Other Related Agencies in DKI Jakarta, West Java, Central Java, Yogyakarta, East Java, North Sumatra, Riau, Riau Islands, South Sumatra, Jambi, Bengkulu, South Kalimantan, South Sulawesi, North Sulawesi, Southeast Sulawesi, Central Sulawesi, Gorontalo, Bali, West Nusa Tenggara, Maluku, North Maluku, Papua and West Papua through Assignment Letter No. SR-1581/D/2021 dated January 7, 2021. The audit was carried out 02 days from the date of the assignment letter.

b. The Finance Supervisory Agency of the Republic of Indonesia (BPK RI) based on (BPK RI's assignment letter No. S-32/S/XX.XXX/I/2022 dated July 11, 2022 regarding preliminary examination of compliance with the management of Receivables and Expenses for the provision of electricity in 2020 until the First Semester of 2022 at PT PLN (Persero), subsidiaries and other related agencies in DKI Jakarta through a letter from

111/SRVR/01/2019/1000/2021 tanggal 2 September 2021 perihal Pemeriksaan Data Pemeriksaan Pendahuluan atas Kepatuhan Pengelolaan Pemberantasan dan Biaya Pengelolaan Tenaga Listrik Tahun 2021 semester dengan Semester I Tahun 2021;

c. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST-0030PW/12/2022 tanggal 10 Mei 2022 akan melakukan Reviu Atas Penyelesaian Penggunaan produk Dalam Negeri (P3DN) Dalam Rangka Bisnis Indonesia (EBI) Pada PT Pembangkitan Jawa Bali;

d. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST-0030PW/12/2022 tanggal 8 Agustus 2021 akan melakukan Penilaian Tingkat Maturitas Penerapan Manajemen Risiko Pada PT Pembangkitan Jawa Bali Tahun Buku 2021;

e. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berdasarkan Surat BPKP No. S-598/D4/04/2022 tanggal 9 Februari 2022 perihal Evaluasi atas Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2021 sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 dengan Surat Tugas BPKP No.ST-0330/D4/02/2022 melalui surat PT PLN (Persero) Nomor: 111/DIR/01/2022/0000/0000/2021 tanggal 10 September 2021 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan (3) Pada BPKP akan Monitoring Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2021.

PT PLN (Persero) No. 111/DIR/01/2022/0000/0000/2022 dated September 2, 2022 regarding Request for Preliminary Examination Data on Compliance with the Management of Revenues and Expenses for the Provision of Electricity in 2021 until the First Semester of 2021;

c. The Finance and Development Supervisory Agency (BPKP) based on Assignment Letter Number: ST-0030PW/12/2022 dated May 10, 2022 will conduct a Review of the Implementation of Domestic Products (P3DN) in the Context of Industry Roads in Indonesia (EBI) at PT Pembangkitan Jawa Bali;

d. The Finance and Development Supervisory Agency (BPKP) based on Assignment Letter Number: ST-0030PW/12/2021 dated August 8, 2021 will conduct a Maturity Level Assessment of Risk Management Implementation at PT Pembangkitan Jawa Bali for the 2021 Financial Year;

e. The Finance and Development Supervisory Agency (BPKP) based on BPKP Letter No. S-598/D4/04/2022 dated February 9, 2022 regarding Evaluation of the Development of New Renewable Energy and Reduction of Greenhouse Gas Emissions in 2021 until the First Quarter of 2022 with BPKP Assignment Letter No. ST-0330/D4/02/2022 through PT PLN (Persero) letter Number: 111/DIR/01/2021/0000/0000/2021 dated September 10, 2021 regarding Notification of BPKP Examination (3) at Institutions on Monitoring the Development of New Renewable Energy and Reduction of Greenhouse Gas Emissions in 2021.

Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Audit Eksternal

Evaluation of the Effectiveness of External Audit Implementation

Dewan Komisaris melalui Komite Audit melakukan pengawasan atas pelaksanaan audit eksternal. Elemen utama Satuan Pengawasan Internal dan unit terkait lainnya melakukan fungsi counterparting atas pelaksanaan audit eksternal dan memastikan pemenuhan dokumen dan data yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan audit eksternal. Komite Audit melakukan pengawasan dan koordinasi selama pelaksanaan proses audit eksternal, melalui pertemuan secara rutin dengan Kantor Akuntan Publik dan Auditor Internal untuk memberikan progress pelaksanaan dan temuan atas pemeriksaan yang dilakukan serta melakukan evaluasi atas kualitas proses audit. Komite Audit berkoordinasi dengan Satuan Pengawasan Internal untuk melakukan telaah atas efektivitas pelaksanaan audit eksternal, serta memastikan bahwa seluruh temuan dapat ditindaklanjuti dan memberikan nilai tambah bagi Perusahaan.

The Board of Commissioners through the Audit Committee supervises the implementation of external audits. The Board of Directors assisted by the Internal Audit Unit and other related units, conducts counterparting functions for the implementation of external audits and ensures the fulfillment of documents and data required in supporting the implementation of external audits. The Audit Committee conducts supervision and coordination during the implementation of the external audit process through regular meetings with the Public Accounting Firm and other Auditors to discuss the progress of the implementation and findings of the audit conducted as well as to evaluate the quality of the audit process. The Audit Committee coordinates with the Internal Audit Unit to review the effectiveness of the external audit implementation and ensure that all findings can be followed-up, and provide added value to the Company.

Manajemen Risiko
Risk Management

Keberlanjutan Perusahaan sangat bergantung dengan bagaimana Perusahaan mampu mengelola risiko yang dihadapi baik secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan kegiatan bisnis yang dijalankan. Oleh karena itu, manajemen risiko masuk sebagai salah satu elemen sistem pengendalian internal. Manajemen risiko dibentuk untuk dapat mengidentifikasi peluang dan ancaman yang memengaruhi kegiatan usaha Perusahaan secara efektif serta mengalokasikan dan menggunakan sumber daya untuk mengelola risiko yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Perusahaan demi memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Perusahaan secara berkala melakukan seluruh risiko untuk menghasilkan risiko utama secara dengan visi appetite dalam menyusun profil risiko berkesesuaian asuransi batasan dan strategic objective jangka panjang Perusahaan. Profil risiko dikaji secara komprehensif oleh Direksi sebagai risk owner utama dan dikomunikasikan kepada Dewan Komisaris.

The Company sustainability is significantly dependent on how the Company is able to manage the risks faced both directly and indirectly related to the business activities carried out. Therefore, risk management is included as one of the elements of the internal control system. Risk management is designed to be able to effectively identify opportunities and threats that affect the Company's business activities as well as efforts and use resources to manage the risks faced in order to support the achievement of the Company's objectives to provide added value to stakeholders, both short and long term. The Company periodically reviews all risks to generate key risks in accordance with the risk appetite in preparing a risk profile based on the Company's annual targets and long-term strategic objectives. The risk profile is comprehensively reviewed by the Board of Directors as the main risk owner and communicated to the Board of Commissioners.

Kebijakan Manajemen Risiko
Risk Management Policy

Kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan disusun dengan mengacu pada standar ISO 31000:2018 *Risk management – Guidelines* yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PLN Nomor : 0016.K/DIR/1999/0410 dan Nomor : 008.K/DIR-PRK/2018 tentang Penyusun Manajemen Risiko di Lingkungan PT Pembangkitan Jawa Bali tanggal 27 Juli 2018 sebagai pemutakhiran atas Keputusan Direksi No. 1.0193/010/DIR/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan PT Pembangkitan Jawa Bali. Selain itu, Perusahaan juga menetapkan Peraturan Direksi Nomor 0010/PD/DIR/2021 tentang Penerapan Governance, Risk Management and Compliance (GRC) di Lingkungan PT PJB dan Keputusan Direksi Nomor 0016.K/010/DIR/2021 tentang penetapan *Risk Appetite Statement* (RAS) untuk mendukung implementasi manajemen risiko. Kebijakan Manajemen Risiko ditinjau secara berkala sesuai dengan kebijakan, best practice serta skala organisasi dan bisnis yang dijalankan Perusahaan.

The Company's Risk Management Policy was prepared by referring to the ISO 31000:2018 standard *Risk management – Guidelines* which was determined through the Joint Decree of the Board of Directors and Board of Commissioners of PLN No. 0016.K/DIR/1999/0410 and No. 008.K/DIR-PRK/2018 concerning the Implementation of Risk Management within PT Pembangkitan Jawa Bali dated July 27, 2018 as an update to the Decree of Directors Decree No. 1.0193/010/DIR/2014 concerning the Implementation of Risk Management within PT Pembangkitan Jawa Bali. In addition, the Company also determines the Board of Directors Regulation No. 0010/PD/DIR/2021 concerning the Implementation of Governance, Risk Management and Compliance (GRC) within PT PJB and the Board of Directors Decree No. 0016.K/010/DIR/2021 concerning the Determination of Risk Appetite Statement (RAS) to support the implementation of risk management. The Risk Management Policy is reviewed periodically in accordance with policies, best practices and the scale of the organization and business run by the Company.

Sistem Manajemen Risiko
Risk Management System

Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memperkirakan, dan memantau risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Perusahaan. Manajemen Risiko merupakan pengawasan aktif oleh Direksi dan pengawasan oleh Dewan Komisaris terhadap kebijakan dan standar prosedur Manajemen Risiko dan penetapan strategi Risiko serta kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pemeliharaan, evaluasi, dan pelaporan yang didukung dengan sistem informasi Manajemen Risiko. Sistem Manajemen Risiko dikenang sebagai kerangka kerja dalam pengelolaan risiko dengan mekanisme yang mencontohkan siklus Plan (to Check, Act (PDCA). Kerangka kerja Manajemen Risiko bersifat terstruktur, terintegrasi dengan perkalian berkesinambungan.

Risk Management is a structured set of procedures and methodologies used to identify, measure, track and monitor risks arising from all of the Company's business activities. Risk Management includes active management by the Board of Directors and supervision by the Board of Commissioners, the adequacy of Risk Management policies and standard procedures and the determination of Risk strategies as well as the adequacy of identification, measurement, treatment, monitoring, evaluation and reporting processes supported by the Risk Management information system. The Risk Management System is designed as a framework in risk management with a mechanism that reflects the Plan (to Check, Act (PDCA) cycle. The Risk Management Framework is dynamic, structured, integrated with continuous improvement.

Kerangka Kerja Manajemen Risiko
Risk Management Framework

Kerangka Kerja Manajemen Risiko menjadi acuan dalam mengintegrasikan pengelolaan risiko kepada pemangku kepentingan sehingga Perusahaan mampu meningkatkan manajemen risiko secara efektif. Proses manajemen risiko dilakukan oleh Risk Owner yang dibantu oleh Risk Officer masing-masing Unit Kerja yang difasilitasi oleh Satuan Manajemen Risiko dan Kepatuhan. Identifikasi dan penilaian risiko di lingkungan Perusahaan menggunakan pendekatan Enterprise Risk Management berbasis ISO 31000:2018. Pengelolaan risiko juga dilakukan secara terpadu dengan sistem manajemen aset PAS 55 – ISO 55000. Beberapa tahap assessment risiko untuk aset pembangkit seperti Risk Evaluation and Prioritization (REAP), Failure Mode Effect Analysis (FMEA), Root Cause Failure Analysis (RCFA), dan Life Cycle Cost (LCC) yang digunakan sebagai bahan pertimbangan investasi.

The Risk Management Framework serves as a reference in integrating risk management to the overall management so that the Company is able to implement risk management effectively. The risk management process is conducted by the Risk Owner assisted by the Risk Officer of each Work Unit facilitated by the Risk Management and Compliance Unit. Identification and assessment of risks within the Company uses the Enterprise Risk Management approach based on ISO 31000:2018. Risk management of generating assets is conducted in line with the PAS55 55 – ISO 55000 asset management system. Several risk assessment techniques for generating assets such as Risk Evaluation and Prioritization (REAP), Failure Mode Effect Analysis (FMEA), Root Cause Failure Analysis (RCFA), and Life Cycle Cost (LCC) are used as investment consideration materials.

Struktur dan Tanggung Jawab Manajemen Risiko

Structure and Responsibilities of Risk Management

Pengelolaan risiko Perusahaan merupakan sistematika terintegrasi yang melibatkan setiap jenjang organisasi dalam Perusahaan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Perusahaan secara khusus membentuk fungsi pengelolaan risiko yang dijalankan oleh Satuan Manajemen Risiko dan Kepatuhan. Satuan Manajemen Risiko dan Kepatuhan melalui Bidang Risiko berkoordinasi dengan setiap jenjang organisasi mulai dari unit kerja sebagai pemilik risiko hingga dengan Dewan Komisaris termasuk Komite sebagai pelaksanaan fungsi Pengawasan serta berkoordinasi dengan Divisi Manajemen Risiko Strategis PT PLN (Persero) sebagai Divisi Pairing untuk implementasi Manajemen Risiko dalam pembuatan keputusan di setiap proses bisnis kritikal Perusahaan. Tanggung jawab pengelola risiko Perusahaan mengacu pada Peraturan Direksi Nomor 0008.P/DIR/2019/2021 tentang Peraturan Pelaksana Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi PT Pembangkitan Jawa-Bali sebagai berikut:

The Company's risk management is an integrated mechanism that involves every level of organization in the Company in accordance with their respective responsibilities. The Company specifically establishes the risk management function carried out by the Risk Management and Compliance Unit. The Risk Management and Compliance Unit coordinates with every level of the organization starting from the work unit as the risk owner to the Board of Commissioners including the Committee as the implementation of the Supervisory function and coordinates with the Strategic Risk Management Division of PT PLN (Persero) as the Pairing Division for the implementation of Risk Management in decision making in every critical business process of the Company. The responsibilities of the Company's risk managers refer to the Board of Directors Regulation Number 0008.P/DIR/2019/2021 concerning Regulations for Executors of the Implementation of Integrated Risk Management of PT Pembangkitan Jawa-Bali as follows:

Struktur dan Tanggung Jawab dalam Manajemen Risiko

Structure and Responsibilities in Risk Management

Pengelola Management	Tugas & Tanggung Jawab Duties & Responsibilities
Dewan Komisaris Board of Commissioners	Peran dan wewenangan Dewan Komisaris sesuai dengan Guard Rail dan Anggaran Dasar Perusahaan.
	The role and authorities of the Board of Commissioners are in accordance with the Guard Rails and the Company's Articles of Association.

Pengelola Management	Tugas & Tanggung Jawab Duties & Responsibilities
Direksi Board of Directors	• Penanggung Jawab Risiko Utama Perusahaan (EUR) untuk melaksanakan pengawasan perusahaan termasuk di dalamnya melaksanakan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi meliputi aktivitas pengelolaan Risiko perusahaan mulai dari penyusunan strategi hingga pada evaluasinya dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran perusahaan • Menetapkan kebijakan dan arahan strategis penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi. • Memimpin penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dan menciptakan komitmen untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi serta menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam pengelolaan Risiko perusahaan di seluruhnya melingkupinya. • Memberangkan dan mengevaluasi budaya Risiko perusahaan. • Menetapkan, mengelola, dan memantau Risiko Utama yang dihadapi perusahaan dalam pencapaian sasaran strategis perusahaan. • Mengambil keputusan pengelolaan Risiko sesuai kewenangan yang berlaku di lingkungan perusahaan.	• Under of the mandate of the General Meeting of Shareholders (GMS) is carry out the management of the Company including to carry out the implementation of Integrated Risk Management and corporate risk management activities starting from strategic planning to its evaluation in order to achieve the Company's targets. • Establishing policies and strategic directives for the implementation of Integrated Risk Management. • Leading the implementation of Integrated Risk Management and providing commitment to support the implementation of Integrated Risk Management as well as providing the resources needed to consider Risk management in their respective directorates. • Understanding and strengthening the Company's risk culture. • Determining, managing, and monitoring the main Risks faced by the Company in achieving the Company's strategic targets. • Making Risk management decisions in accordance with the risks at authority level apply within the Company.
Satuan kerja Manajemen Risiko Risk Management Work Unit	• Sebagai penanggung jawab penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi perusahaan sesuai dengan lingkup kerja dan tata kelola Risiko, termasuk dalam pengembangannya. • Sebagai pendamping dan Dewan/Direksi dan Komisaris sesuai mekanisme pendelegasian wewenang terhadap kebijakan Risiko, meliputi tindak lanjut Risiko perusahaan. • Sebagai pemberi masukan terhadap perhatian Risiko sesuai tindak lanjut Risiko yang disarankan oleh Risk Leader dan Risk Champion di Satuan Kerja Unit. • Melaksanakan pendampingan efektif kerja untuk memastikan Direksi dapat ini mengkoordinasikan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi perusahaan untuk direksi Direktur Pengelola Manajemen Risiko (DPMR). • Menyusunkan rancangan arahan strategis penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi perusahaan sesuai tata kelola Risiko perusahaan untuk direksi Direktur Pengelola Manajemen Risiko (DPMR). • Melaksanakan kebijakan dan strategi penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, termasuk di dalamnya kriteria Risiko perusahaan untuk direksi Direktur Pengelola Manajemen Risiko (DPMR). • Mengelolakan rancangan target, sasaran efektivitas penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi meliputi profil pengelolaan Risiko yang dijalankan perusahaan. • Melaksanakan evaluasi terhadap capaian kinerja pengelolaan Risiko secara berkala, serta pengembangan berkelanjutan Manajemen Risiko Terintegrasi. • Memiliki informasi dari para pihak internal Perusahaan untuk kebutuhan penyusunan rujuan Risiko, termasuk laporan Risiko Risiko, dan efektivitas pengelolaan Risiko Perusahaan untuk disampaikan kepada Direktur Pengelola Manajemen Risiko (DPMR) serta informasi lain yang dibutuhkan Direksi Pengelola Manajemen Risiko (DPMR) dalam melaksanakan penelitian.	• Serving as the person in charge of implementing the Company's Integrated Risk Management in accordance with the framework design and risk governance, during and its development efforts. • Serving as a companion and Director/Boardcommissioner and Approval in accordance with the mechanism of delegating authority to the Company's Risk environment and Risk Exposures. • Serving as provider of input to the Risk assessment and risk issues as carried out by the Risk Leaders and Risk Champion in the Work Units/Units. • Proposing the establishment of a work entity to assist the Board of Directors in terms of coordinating the implementation of the Company's Integrated Risk Management to be approved by the Subordinate Director of Risk Management (DPMR). • Proposing the formulation of strategic directives for the implementation of the Company's Integrated Risk Management, and policies risk governance to be approved by the Supervisory Director of Risk Management (DPMR). • Proposing policies and strategies for the implementation of Integrated Risk Management, including the Company's Risk criteria to be approved by the Supervisory Director of Risk Management (DPMR). • Providing the formulation of performance ranges for the effectiveness of the implementation of Integrated Risk Management and Risk management practices carried out by the Company. • Evaluating the achievement of risk management performance on a regular basis, as well as the continuous development of Integrated Risk Management. • Requesting information from the Company's internal parties for the needs of preparing Risk duties, including Risk Profile issues, and the effectiveness of the Company's Risk management to be reported to the Supervisory Director of Risk Management (DPMR) and other information needed by the Supervisory Director of Risk Management (DPMR) in carrying out its tasks.

Pengelola Management	Tugas & Tanggung Jawab Duties & Responsibilities	
	• Memonitor program perbaikan kepatuhan internal di bidang manajemen Risiko, termasuk di dalamnya kesadaran dan budaya Risiko dalam menjalankan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi serta tingkat kedewasaan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, sesuai kebutuhan perusahaan bersama fungsi yang terkait.	• Monitoring internal capability improvement programs in the field of Risk Management, including the awareness and culture in terms of the implementation of Integrated Risk Management as well as the maturity level of Integrated Risk Management implementation, according to the needs of the Company with the relevant work functions.
Satuan Pengawas Internal Internal Audit Unit	• Dewan/ organ/ entitas kerja yang dibentuk Direksi untuk membantu Direksi melaksanakan perannya secara memadai yang ditentukan Dalam Lingkup Kerja Tahunan (PLRT), khususnya dalam hal pelaksanaan fungsi audit internal Perusahaan. • Sebagai reviewer sekaligus independent consultive provider terhadap pelaksanaan penerapan manajemen Risiko (sebagai dan sesuai) pengawasan Risiko perusahaan). • Mengelola audit sesuai dengan lingkup pelaksanaan rencana audit internal tahunan. • Melakukan interview dan Satuan Kerja Manajemen Risiko dan fungsi Pengawasan Risiko di Satuan Kerja/Unit serta audit/ assurance terkait dengan risiko. • Melaksanakan tugas audit internal, menyusunan laporan hasil audit internal, dan melaporkannya kepada Direktur Utama dan komite audit). • Memonitor audit/ee untuk melaksanakan usaha tindakan perbaikan dan rekomendasi pengelolaan berdasarkan hasil audit.	• Serving as a work entity established by the Board of Directors to assist the Board of Directors in carrying out its role in accordance with the mandate provided by the General Meeting of Shareholders (GMS), especially in carrying out the Company's internal audit function. • Serving as reviewer as well as independent consultive provider for the implementation of integrated risk management and corporate risk management practices). • Managing the audit/ underway in order to complete the annual internal audit plan. • Requesting information from the Risk Management Work Unit and Risk Management function in the Work Unit/Unit as well as the auditee in order to carry out its role. • Carrying out internal audit functions, formulating internal audit reports, and reporting them to the President Director and audit committee. • Requesting auditees to carry out proposed corrective actions or development recommendations based on audit results.
Risk owner	• Bertugas melakukan dan approver atas: – Penilaian dan review untuk Kajian Risiko dalam proses pengambilan keputusan strategis. – Penilaian dan review untuk Profil Risiko pada unit kerjanya. – Penilaian dan review atas Risiko Operasional pada satuan kerjanya; dan – Pelaporan Risiko kepada atasan dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. • Memiliki laporan penilaian Risiko dan review untuk Risiko, seperti informasi terkait semua dan Risk Champion pada unit kerjanya. • Risk Leader Satuan Kerja/unit dapat meminta pendampingan dari Satuan Kerja Manajemen Risiko atau fungsi Manajemen Risiko Satuan Kerja/Unit dalam melaksanakan asumsi/assistance. • Mengelola kebutuhan pengelolaan Risiko pada unit sesuai dengan batasan kewenangan yang berlaku.	• Serving as reviewer and approver of the following: – Assessment and follow-up of the Studies in a strategic decision-making processes. – Assessment and follow-up of Risk Profile in its work unit. – Assessment and follow-up of Operational Risk in its work unit; and – Risk Reporting to superiors and the Risk Management Work Unit. • Requesting risk assessment and risk follow-up reports along with other related information from the Risk Champion in his/her work unit. • The Risk Leader at the Work Unit/Unit may request assistance from the Risk Management Work Unit and Risk Management function in the Work Unit/Unit in carrying out its accountability. • Meeting the management decisions in accordance with applicable authority limits.
Risk Champion	• Bertindak sebagai Reviewer atas: – penilaian dan review untuk Kajian Risiko dalam proses pengambilan keputusan strategis; – penilaian dan review untuk profil Risiko pada unit kerjanya; dan – pelaporan Risiko kepada Risk Leader. • Memiliki informasi dari unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka menyusun laporannya. • Melaksanakan penilaian Risiko dan review untuk Risiko serta melaporkannya kepada Risk Leader. • Risk Champion Satuan Kerja/unit dapat meminta pendampingan dari Satuan Kerja Manajemen Risiko atau fungsi Manajemen Risiko Satuan Kerja/Unit dalam melaksanakan asumsi/assistance. • Mengelola kebutuhan pengelolaan Risiko pada unit sesuai dengan batasan kewenangan yang berlaku.	• Taking role as a reviewer of the following: – assessment and follow-up of the studies in a strategic decision-making processes; – assessment and follow-up on Risk profiles in their work units; and – risk reporting to the Risk Leader. • Requesting information from the work unit under his/her responsibility in order to carry out his/her role. • Carrying out the assessment and Risk follow-up and for escalating reports to the Risk Leader. • The Risk Champion of the Work Unit/Unit may request assistance from the Risk Management Work Unit to the Risk Management function of the Work Unit/Unit in carrying out its accountability. • Meeting the management decisions in the work unit in accordance with applicable authority limits.

Pengelola Management	Tugas & Tanggung Jawab Duties & Responsibilities
Seluruh Karyawan Employee Employee	• Menyiapkan dan menerapkan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi serta mengimplementasikan proses Manajemen Risiko Terintegrasi dalam melaksanakan pekerjaan. • Mendokumentasikan proses-proses yang ada di bidang/unitnya, kewenangannya, pembatasannya yang telah berjalan, dan Risiko yang melekatinya berjalan Sesama pengendaliannya, serta melakukan Control Self Assessment (CSA) secara periodik sesuai ketentuan. • Memberikan tanggapan untuk perbaikan kebijakan dan implementasi Manajemen Risiko Terintegrasi. • Mengkomunikasikan Risiko yang terkait dengan unit/bidang yang menjadi tanggung jawabnya kepada atasannya.	• Studying and understanding the integrated Risk Management policy and implementing the integrated Risk Management system in conducting work. • Documenting existing business processes in the work scope of authority, issues that have occurred, and Risks that have the potential to occur during work implementation, as well as conducting Control Self Assessment (CSA) periodically in accordance with the provisions. • Providing input for the improvement of integrated Risk Management policies and implementation. • Informing the Risks associated with the activities under his/her responsibility to his/her superiors.

Fungsi Pelaksanaan Program Manajemen Risiko

Function of Risk Management Program Implementation

Program Manajemen Risiko dijalankan oleh Satuan Manajemen Risiko dan Kepatuhan berdasarkan Peraturan Direksi Nomor [illegible] tanggal 21 September 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Pembangkitan Jawa-Bali Satuan Manajemen Risiko dan Kepatuhan secara struktural melaporkan pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

The Risk Management Program is carried out by the Risk Management and Compliance Unit based on the Decree of the Board of Directors Number [illegible] dated September 21, 2022 concerning Organization and Work Procedures of PT Pembangkitan Jawa-Bali. The Risk Management and Compliance Unit structurally reports the implementation of its duties and is directly responsible to the President Director.

Struktur Organisasi Satuan Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Organizational Structure of the Risk Management and Compliance Unit

Bidang Risiko telah didukung oleh tenaga profesional yang memiliki keahlian dan kompetensi terkait manajemen risiko dengan sertifikasi profesi sebagai berikut:

The Risk Department has been supported by professionals who have expertise and competence related to risk management with the following professional certifications:

Sertifikasi Profesi Personel Bidang Risk Management
Professional Certification of Risk Management Personnel

Sertifikasi Profesi Professional Certification	Jumlah Auditor Total Auditor
Integrated Risk Management Associate Professional (IRMAP)	4
Certified Risk Management Professional (CRMP)	1
Governance Risk and Compliance Professional (GRCP)	3
Business Continuity Management Certified Professional (BCMCP)	4

Laporan Realisasi Program Kerja Manajemen Risiko
Report on the Realization of Risk Management Work Program

Perusahaan menerapkan Kebijakan Manajemen Risiko melalui program kerja yang dijalankan oleh Bidang Risiko. Realisasi program kerja terkait penerapan manajemen risiko sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut:

The Company implements the Risk Management Policy through a work program run by the Risk Division. The realization of work programs related to the implementation of risk management throughout 2022 is as follows:

Realisasi Program Kerja Manajemen Risiko
Realization of Risk Management Work Programs

No.	Program Kerja Work Program	Realisasi Realization
1	Kegiatan Assessment Manajemen Risiko kepada Divisi/Bidang/Kantor Induk dan Unit Risk Management Assessment Activities to Head Offices and Unit Divisions	Kegiatan ini diampu dalam bentuk sharing knowledge manajemen risiko (Clean Talk) dengan mengundang narasumber yang kompeten dalam bidangnya. Pada tahun 2022 telah dilakukan sebanyak 11 kegiatan Clean Talk.	This activity is arranged in the form of risk management knowledge sharing (Clean Talk) by inviting competent resource persons in their fields. In 2022, 11 Clean Talk activities have been conducted.
2	Pengembangan Sistem Manajemen Risiko Berbasis Risiko Development of Risk-Based Performance Management System	Sudah dilakukan pengembangan berkas untuk KBI dan penyusunan pedoman Manajemen Kinerja Berbasis Risiko.	KBI working papers have been created and guidelines on Risk-Based Performance Management have been prepared.
3	Melanjutkan implementasi manajemen Risiko dalam Kontrak Kinerja Divisi/Bidang Kantor Induk. Including Risk Management's implementation in the Head Office Division/Department Performance Contract.	Pencapaian implementasi manajemen Risiko dibuktikan dengan Maturity Level (ML) PLN MP Semester 2 2022 yang ditawarkan oleh PT PLN (Persero) sebesar 4,15. Hal tersebut didukung dengan upaya meningkatkan pengadopsian manajemen risiko yang meningkat serta partisipasi budaya dan kesadaran akan pentingnya pengelolaan manajemen risiko perusahaan, maka mulai tahun 2023 telah ditunjuk Maturity Level Implementasi Manajemen Risiko pada Kontrak Kinerja Divisi/Bidang & Kantor Induk.	The achievement of this management implementation is measured by the Maturity Level of PLN MP 2022 Semester 2 (2022) assessed by PT PLN (Persero) at 4.15. This is supported by efforts to increase integrated risk management as well as increase culture and awareness of the importance of managing corporate risk management. As starting in 2023, the Maturity Level of this management implementation has been stated in the Performance Contract of each Division/Department & the Head Office.
4	Penyusunan Profil Risiko Korporat Tahun 2023. Preparation of the 2023 Corporate Risk Profile.	Pada tahun 2022 target Kontrak Kinerja di semester 1 sebesar 77,5% dan semester 2 tahun 2022 sebesar 79%, dengan beberapa parameter perhitungan tercapainya dalam melakukan review dan update risiko setiap bulan, risiko assessment hingga Divisi/Bidang & KP yang ada semester 1 tahun 2022, semua tercapai sesuai target.	In 2022, the Performance Contract target in semester 1 was 77.5% and semester 2 of 2022 was 79%, with additional parameters assessing calculations is calculating the review and update every month. The results of the risk assessment of the Division or Head Office for the first semester of 2022, all achieved according to the target.

No.	Program Kerja Work Program	Realisasi Realization
1	Pelaksanaan materi Self Learning (Pengisian Risiko & Video Risk Awareness) Preparation of Risk Management Self-Learning Material & Risk Awareness Video	Tindak risiko tahun 2022 telah diidentifikasi oleh Risiko PLN EPI.	The process of inputting self learning videos has been completed and uploaded to PLN Epi.
2	Review dan Update Dokumen Penilaian Risiko. Review and Update of Risk Management Documents	Sebagai implementasi pelaksanaan GRC dalam pengambilan keputusan strategis oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris yaitu Dokumen Manajemen Risiko dan Evaluasi Kepatuhan (DMREK)/Risk Profile. Dokumen Kajian Risiko ini dibuat dan sebagai proses monitoring dimana dan disetujui oleh BOD dan BPT), serta ditindaklanjuti tiga quarter ke SPI. Sampai dengan Triwulan IV 2022 telah dilakukan review dan update untuk 11 biaya utama risiko kajian Risiko.	As an implementation of GRC strategic decision-making by the Board of Directors/ requires a Risk Management and Compliance Evaluation (DMREK)/ Risk Assessment Document. This Risk Assessment document is made as the continuous process monitored and reviewed by BOD and BPT), as well as requested to audit quarter to SPI. Up to the fourth quarter of 2022, 11 pcs/ or one Risk Assessments have been reviewed/and updated.

Selain itu untuk perbaikan berkesinambungan manajemen risiko PLN NP telah menyusun roadmap manajemen risiko beserta rencana kerja tindak lanjut analisis gap tingkat kematangan risiko bisnis proses perbaikan yang telah direalisasi. Sesuai dengan rencana kerja pada triwulan IV telah dilangsungkan integrasi manajemen risiko kedalam suatu sistem berupa Pengembangan Aplikasi Manajemen Risiko (pengintegrasian dengan aplikasi PRIME), yang implementasikan Manajemen Risiko berbasis Risiko dengan Menyusun KRI dashbag KPI melakukan tindak lanjut OFI (Opportunity for Improvement), atau rencana maturity level (RML PLN NP semester 1 tahun 2022 untuk mencapai target maturity level (ML) yang ke ML Hasil serta pembahasan pelaksanaan Risk Competition.

Furthermore, for continuous improvement of risk management, PLN NP prepared a risk management roadmap along with a follow-up work plan to analyze the gap in risk maturity level along with an approved implementation plan in accordance with the work plan in the fourth quarter, risk management integration has been built into a system in the form of Risk Management Application Development (integration with the PRIME application), implementing Risk-based Performance Management by compiling KRIs in each KPI, following up on OFI (Opportunity for Improvement), are the assessment of PLN NP's RML maturity level in semester 1 of 2022 to achieve the RML maturity level target, participating in the GRC Award event as well as discussing the implementation of Risk Competition.

Sistem Informasi Manajemen Risiko

Risk Management Information System

Manajemen Risiko Perusahaan telah didukung dengan sistem informasi berupa aplikasi manajemen risiko terintegrasi yang diberi nama I-CARE (Integrated - Compliance, Risk Management Effective and Efficient Operation). I-CARE dirancang untuk dapat mempermudah dalam pengaksesan, pengambilan dan pengolahan data sehingga proses pengambilan keputusan didukung dengan data data yang akurat. I-CARE telah digunakan secara konsisten dalam pencatatan (identifikasi), analisa terevaluasi risiko di lingkungan Perusahaan. I-CARE dapat diakses oleh seluruh unit dan bidang di kantor pusat. Adapun fasilitas pada I-CARE satu miliar risiko yang ada di Perusahaan baik Kantor Pusat maupun Unit Kerja yang terdiri dari Penetapan Objek Identifikasi Risiko serta dengan penentuan Program Mitigasi Risiko (Action Plan).

The Company's Risk Management has been supported by an information system in the form of an integrated risk management application called I-CARE (Integrated - Compliance, Risk Management Effective and Efficient Operation). I-CARE is designed to be able to facilitate the operation, retrieval and processing of data so that the decision-making process is supported by accurate data. I-CARE has been used consistently in recording (identification), analysis and evaluation within the Company. I-CARE can be accessed by all units and departments at the head office. The facilities of I-CARE in the risks in the Company, both Head Office and Work Units, which consists of Scope Determination, Risk Identification up to the determination of the Risk Mitigation Program (Action Plan), Loss Event, Risk and Underwriter Survey.

Loss Event, Risk and Underwriter Survey, Risk Evaluation and Prioritization (RSAP), Business Continuity Management System (BCMS), Sales No. 21/2018 juga mengimplementasikan Risiko untuk penyusunan efektivitas program mitigasi risiko, sehingga aspetis diperlukan, bidang atau divisi sebagai risk owner bisa melakukan penyesuaian program mitigasi apabila dirasa program tersebut kurang efektif. Hal tersebut dilakukan dapat mendorong tercapainya sasaran Perusahaan.

Risk Evaluation and Prioritization (RSAP), Business Continuity Management System (BCMS). In addition, I-CARE also implements tools for measuring the effectiveness of risk mitigation programs, so that if necessary, the department or division as the risk owner can adjust the mitigation program if the program is considered less effective. This is important to be able to encourage the achievement of the Company's targets.

Profil dan Mitigasi Risiko

Risk Profile and Mitigation

Penyusunan Profil Risiko Korporat tahun 2021 menghasilkan 13 risiko utama yang berdampak/akan dapat menghambat pencapaian sasaran di tahun 2022. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan dengan Profil Risiko tahun 2021 yang berjumlah 15 hal ini dikarenakan beberapa risiko sudah bisa terkendali dan masuk dalam risk appetite sehingga tidak dimunculkan lagi serta ada penggabungan beberapa risiko yang sama. Profil Risiko tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Perusahaan telah merilisasi upaya pengelolaan risiko korporat tahun 2022 sebagai berikut mitigasi sebagai berikut:

The preparation of the 2021 Corporate Risk Profile resulted in 13 key risks identified as being able to hinder the achievement of targets in 2022. This number is less than the 2021 Risk Profile which was 15 this is due to several risks that can be controlled and are included in the risk appetite so that they are no longer raised, and there is a merger of several similar risks. The Risk Profile is an integral part of the Company's Annual Budget and Operational Plan (ABEK). The Company has prepared corporate risk management efforts in 2022 as mitigation measures as follows:

Profil dan Mitigasi Risiko Tahun 2022

Risk Profile and Mitigation in 2022

No.	Risiko dan Mitigasi Risk and Mitigation	
1	**Risiko:** Terjadi kecelakaan kerja dan ke-selamatan.	**Risk:** Occurrence of occupational accidents and health emergencies.
	Mitigasi: 1) Implementasi sistem K3 di seluruh unit kerja PLN NP. 2) Pengawasan, monitoring pelaksanaan program pencegahan covid-19. 3) Membuat kurikulum dan memberikan knowledge sharing kepada mitra kerja/kontraktor. 4) Implementasi CoVid secara full cycle. 5) Optimalisasi penggunaan aplikasi K3 terkait fitur baru dan enrichment penggunaannya. 6) Evaluasi dan Pengukuran Implementasi Crisis Response/Corporate. 7) Program SHE di Unit PLN NP. 8) Pelaksanaan sertifikasi system ke-selamatan Kantor Pusat. 9) Pengadaan Auditor K3 dan Infrastruktur K3.	**Mitigation:** 1) Carrying out socialization for PLN NP workforce. 2) Strengthening the monitoring of the Covid-19 prevention program implementation. 3) Creating curriculum and providing knowledge sharing to cooperation/contractors. 4) Full cycle implementation of CoVid. 5) Optimizing the use of OHS applications related to new features and enrichment of use. 6) Evaluation and Strengthening the Implementation of Corporate Crisis Response. 7) OHSMS program in PLN NP Unit. 8) Certifying the occupancy system in the Head Office. 9) Strengthening OHS Auditors and OHS Infrastructure.
2	**Risiko:** Pengembangan Kinerja Beyond Power dan Power Solution tidak sesuai.	**Risk:** The development of the Beyond Power and Power Solution businesses was ineffective.
	Mitigasi: 1) Pengembangan dan komersialisasi digitalisasi pemangkit. 2) Pengembangan bisnis di PLN NP Group. 3) Pemformasi pengelolaan aset Old Pembangkit. 4) Optimasi bisnis NPIS PLN NP Group. 5) Pengembangan bisnis dengan mengoptimalkan aset.	**Mitigation:** 1) Carrying out socialization for PLN NP workforce. 2) Strengthening the monitoring of the Covid-19 prevention program implementation. 3) Creating curriculum and providing knowledge sharing to cooperation/contractors. 4) Full cycle implementation of CoVid. 5) Optimizing the use of OHS applications related to new features and enrichment of use.

No.	Risiko dan Mitigasi Risks and Mitigation	
	9) Pengembangan bisnis baru konsultasi teknik, engineering dan komersialisasi Hasil. 7) Pengembangan bisnis aset management (O&M). 8) Monetisasi Intangible Knowledge Perusahaan. 9) Integrasi marketing PLN NP Group dan optimalisasi penggunaan digitalisasi dalam hal ini. 10) Updating strategi dan road map pengembangan bisnis. 11) Menyusun sistem dan prosedur/tata kelola pengembangan bisnis. 12) Melaksanakan pelatihan organisasi dan SDM dan integrasi sistem PLN NP Group untuk bisnis eksisting power	9) Business development of engineering consulting services, engineering and commercialization of Nusan. 7) Asset management (O&M business development). 8) Monetization of the Company's Intangible Knowledge. 9) Integration of PLN NP Group marketing and optimization of the use of marketing digitalization. 10) Updating business development strategy and road map. 11) Developing business process/procedures/governance for business development. 12) Preparation of business process for the implementation of many organization and integration of PLN NP Group systems for the exploitation business.
2	**Risiko:** Pengembangan bisnis IUT tidak efektif	**Risk:** IBD business development was ineffective
	Mitigasi 1) Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder kunci secara rutin. 2) Pemahaman persetujuan Pembangunan Pembangkit 300% owner PLN NP. 3) Pembangunan pembangkit dengan kepemilikan PP mayoritas dan minoritas. 4) Melakukan pengembangan model bisnis dalam pengembangan bisnis IBT dan pembangunan pembangkit, partnership, strategi M&A. 5) Menyusun proposal proyek kompetitif TETTS ke PLN dengan model bisnis yang kompetitif & komprehensif yang memadai dibandingkan kepada Stakeholder untuk mendapatkan Proyek. 6) Pengembangan bisnis dan produk rooftop solar PV dengan model bisnis yang kompetitif. 7) Menyusun kajian, terkait pembagian kewenangan untuk pengelolaan IUT pembangkitan dan non pembangkitan. 8) Melakukan pemenuhan kebutuhan pengembangan IUT. 9) Implementasi stakeholder management. 10) Integrasi marketing PLN NP Group dan optimalisasi penggunaan digitalisasi marketing. 11) Benchmark kebutuhan sistem dan karakteristik gudang.	**Mitigation** 1) Increased coordination with key stakeholders on a routine basis. 2) Request for approval of Third Construction 100% owned by PLN NP. 3) Construction of power plants with majority and minority PP interests. 4) Conducting business model expansion in the development of non-generation IBD business (building, partnership, HP scheme). 5) Preparing PLN's TETTS development project proposal with a competitive & comprehensive business model which is then submitted to Stakeholders to obtain the Project. 6) Development of rooftop solar PV business and products with competitive business models. 7) Preparation of work tasks and functions related to the division of authority for the management of IBD generation and non-generation. 8) Fulfilling resources for execution of IUKE development. 9) Implementation of stakeholder management. 10) Integration of PLN NP Group marketing and optimization of the use of marketing digitalization. 11) Benchmark factory technology to utilize, manufacturers.
3	**Risiko:** Implementasi strategi transformasi tidak efektif dalam meningkatkan market shareberdampak	**Risk:** The implementation of the transformation strategy was not effective in increasing market shareRevenue.
	Mitigasi 1) Pembangunan pembangkit dengan kepemilikan PP mayoritas dan minoritas. 2) Cofiring untuk Unit Kerja PLN NP. 3) Optimasi Pola Operasi Pembangkitan. 4) Melakukan kajian sistem ketenagalistrikan serta alternatif solusi. 5) Implementasi pemanfaatan digitalisasi pembangkit maksimal meningkatkan efisiensi pembangkit. 6) Melaksanakan Pelatihan untuk Melakukan Review Hasil Existing terhadap Kemajuannya dengan ITS. 7) Pengembangan Captive Power Unit. 8) Meningkatkan integrated Marketing produk PLN NP Group yang lebih agresif. 9) Optimasi Inventory Level dan Strategic Goals. 10) Program Pelaksanaan SDM di PLN NP Group untuk mendukung revenue Go To Market. 11) Melaksanakan proses bisnis kesekretaran strategi BBPP dengan KPI Korporat. 12) Menyusun/menetapkan Quick Win serta kebutuhan pengawasan terhadap pelaksanaannya.	**Mitigation** 1) Construction of power plants with majority and minority PP interests. 2) Cofiring for PLN NP Work Units. 3) Optimization of Generation Operation Pattern. 4) Conducting electricity system studies and alternative solutions. 5) Implementation of commercialization of power plant digitalization through improving power plant efficiency. 6) Preparation of Guidelines for Reviewing Existing Review towards their Complexity with ITS. 7) Development of Captive Power Unit. 8) Increased integrated marketing of PLN NP Group products that are more aggressive. 9) Optimization of Inventory Level and Strategic Goals. 10) HR Optimization Program in PLN NP Group to support Go To Market target. 11) Preparation of business process for BBPP strategy alignment with Corporate KPIs. 12) Preparing/determining Quick Win and overseeing its implementation.

No.	Risiko dan Mitigasi Risk and Mitigation
	12) Hambatan di building power (terdapat wajtra eksisting terkait pelaksanaan) (impact strategis RIPP dan terindikasi KSPP) 13) Hambatan lahan eksisting terkait BTF
	12) Existing Buildings (certain wajtra existing impacting related to the implementation of RIPP strategic initiatives and supporting KSPPs) 13) Constructing a study on the acquisition of BTF Assets
3.	**Risiko:** Ketidakmerataan pasokan energi primer
	Mitigasi: 1) Komunikasi dan koordinasi untuk melakukan harmonisasi pelayanan pemasokan stock DF di PLN disesuaikan dengan kebutuhan PLN NP 2) Penyediaan moda transportasi lainnya dengan common batubara 3) Pelaksanaan pengadaan batubara multi sumber 4) Koordinasi dengan PLN untuk pasokan gas di Unit Pembangkit PLN NP 5) Pengadaan jasa angkutan BBM dengan multi moda pola 6) Pengadaan jasa pembuang pelumpuran batubara (jasa conveyor, jasa Dredging dengan Kapal Jasa Sewa-awaran) 7) Peningkatan kompetensi SDM dalam mengelola energi Primer melalui TBS Academy 8) Pengadaan DDHSA berbasis CHP melalui chain selama masa pandemi
	Mitigation: 1) Communication and coordination to conduct harmonization of DF stock provision policies in PLN is adjusted to the needs of PLN NP 2) Adding Alternative transportation mode in coal control 3) Increasing multi-source coal procurement 4) Coordination with PLN for gas supply in PLN NP Generating Unit 5) Procurement of coal transportation services with multi-supply points 6) Procurement of coal cleaning support services (conveyor services, Loading and Unloading Company services, Water Leasing services) 7) Increasing the competence of human resources in managing Primary Energy through TBS Academy 8) Strengthening DDHSA warehouse systems through chain during the pandemic
4.	**Risiko:** Kelistrikan sistem pembangkit yang dikelola Perusahaan
	Mitigasi: 1) Implementasi digitalisasi pembangkit 2) Penguatan kompetensi SDM 3) Mengoperasikan pekerjaan kelistrikan 4) Melakukan kelistrikan anggaran untuk pelaksanaan pemeliharaan 5) Pemenuhan material cadang (Strategis Pairing dan optimalisasi penggunaan material persediaan) 6) Menyusun pola kompetensi aset management 7) Melaksanakan Review Implementasi Aset Management 8) Menjalin komunikasi dan stakeholder management yang aktif baik dengan Asset Owner (PLN Induk/Wilayah) dan PLN Regional Kantor Pusat misalnya terkait AI untuk unit pembangkit jasa O&M Luar Jawa 9) Penguatan Assessmen/ke Kepala Pelaksana pembangkit mulai 2 dari 3 yang memenuhi misalnya awal yang (Dedicated untuk mempuja O&M sendiri) 10) Mengelola rekomendasi hasil assessment kondisi peralatan pembangkit untuk unit pembangkit jasa O&M Luar Jawa. 11) Melakukan pengawasan terhadap BHS kendaraan sesuai management kendaraan untuk memperkecil downtime BHS Unit. 12) Optimalisasi biaya dengan melakukan repair peralatan pembangkit di UBOH sendiri melakukan di Workshop MKD 13) Pemeliharaan perawatan Alat Alat Pembangkit TTP11 dan PLTGU MYC. 14) Pengadaan Tambah Stockpile untuk membuang 6 (dua) di stockpile eksisten (ada) 15) Pengadaan Alternatif Coal Handling Facility.
	Mitigation: 1) Implementation of plant digitization 2) Strengthening HR competencies 3) Securing work supply 4) Ensuring budget availability for the implementation of maintenance 5) Fulfillment of spare materials (Strategic Pairing and optimization of the use of inventory materials) 6) Developing asset management competency areas 7) Conducting Asset Management Implementation Review 8) Establishing better communication and stakeholder management with Asset Owner (PLN Subsidiaries) and PLN Regional Headquarters especially related to AI for O&M service generating units Outside Java 9) Strengthening the implementation of Assets 2 and 3 generation (good ones that meet the capacity) were required to achieve O&M consistency 10) Managing recommendations on the results of the condition assessment of generating equipment for O&M service generating units Outside Java 11) Supervising the BHS equipment related to vehicle management to minimize the execution of BHS units 12) Cost optimization by repairing generating equipment at UBOH's own and repairing at the MKD Workshop 13) Repair the overhaul of Asset Transfer of TTP11 Plants and MYC PLTGU. 14) Procurement of Stockpile facility to support 6 (two) stockpile existing (exist) 15) Strengthening the Reliability of Coal Handling Facility

No.	Risiko dan Mitigasi Risks and Mitigation	
7	**Risiko:** Eksekusi Tata Kelola Perusahaan berbasi Digital Sheelahmasion tidak optimal.	**Risk:** The execution of Corporate Governance invested by Digital Transformation was not optimal.
	Mitigasi: 1) Penyusunan dan assessment roadmap digital transformasi. 2) Penyusunan & review proses bisnis berbasi teknologi digital. 3) Penguatan digital mindset berpacu pada roadmap digital transformasi. 4) Pelaksanaan pembelajaran yang berkaitan dengan pengembangan pengelolaan Bisnis mindset & Digital mindset. 5) Implementasi Digital Equipment Specification. 6) Add-ons/Update TI berjenis. 7) Pengadaan Perluasan Antara Comm. (KAC) mendukung Zero Trust Architecture. 8) Prioritisasi program digitas transformasi 2022 sesuai ketersediaan anggaran. 9) Pendampingan dan unit dalam pengisian dan optimasi perubahan teknis di modul CORE. 10) Pembentukan PIC khusus tiap-tiap unit & pihak terkait dan pembentukan tim CORE.	**Mitigation:** 1) Preparation and assessment of digital transformation roadmap. 2) Preparation & review of digital-based business process. 3) Strengthening the digital mindset of employees according to the digital transformation roadmap. 4) Implementation of learning related to the development of strengthening Business mindset & Digital mindset. 5) Implementation of Digital Equipment Specification. 6) Add-ons of or Update IT services. 7) Procurement of Network Access Comm. (KAC) supporting Zero Trust Architecture. 8) Prioritisation of the 2022 digital transformation program according to budget availability. 9) Assistance to personnel units on filling and optimization technical changes in the CORE module. 10) Establishment of a special PIC for each unit or the related units and an establishment team CORE.
8	**Risiko:** Keterlambatan dan perubahan kondisional proyek berpengaruh terhadap terdapatnya pada kewajibanmampuan dalam pembayaran kewajiban perusahaan.	**Risk:** The schedule delays and conditional changes of the electricity project have an impact on the liabilities to pay the Company's obligations.
	Mitigasi: 1) Melakukan stakeholder management untuk koordinasi dan update informasi terkait penugasan proyek kepastian status proyek dan optimasi terkait anggaran yang disebabkan PLN NP. 2) Melakukan koordinasi dengan PLN terkait kondisi PLN NP dan apa upaya perbaikannya untuk menurunkan potensi dikenakan denda keterlambatan commissioning. 3) Melakukan PEBT, PBI PLN atas penyesuaian pembayaran SKL dan bunga sudah termasuk dalamkan pada pembayaran komponen A untuk proyek non IPP dan pengembalian investasi untuk proyek yang melakukan komponen A. 4) Mengembangkan/mengupdate strategi program proyek dengan melakukan upaya hasil evaluasi dan monitoring serta efisiensi biaya anggaran dan investasi serta mengevaluasi kebijakan bagi Perusahaan. 5) Penyusunan review term & evaluasi proyek untuk mengantisipasi penundaan jadwal proyek. 6) Kriteria Pengembangan apakah PMHE untuk didegradasi dengan status [illegible]. 7) Melakukan sebelumnya TEA dan komunikasi dengan manajemen pemerintah evaluasi "Dasar bersedia bagi "TEA untuk kelayakan commissioning kepada instansi terkait. 8) Melakukan review/pengkajian proyek baru di bawah interface proyek apakah terdapat proyek yang mengalami penundaan jadwal COD.	**Mitigation:** 1) Conducting stakeholder management to coordinate and update information related to project assignments, clarity of project status and optimization related to the budget developed by PLN NP. 2) Coordinating with PLN related to the condition of PLN NP and the work-in-home options to reduce the potential for late payment penalties. 3) Reviewing PEBT, PBI PLN on the disbursement of SKL and interest payments included in the payment clause A component of non-IPP projects and return on investment for projects that apply component A. 4) Developing/updating project program strategies by referring to the results of review evaluation and monitoring, the efficiency of budgets and investment conditions as well as assessing their impact on the Company. 5) Preparation of project review terms & evaluation to anticipate the changes in project schedule. 6) Criteria of PMHE application Development, is it degraded with [illegible] status. 7) Carrying out the previous TEA and communication with the management government evaluation "Basic to be ready for the commissioning application to the relevant agencies. 8) Reviewing/processing new projects in the project interface if there are projects that have delayed COD schedules.

No.	Risiko dan Mitigasi Risk and Mitigation
9	**Risiko:** Terhambatnya eksekusi implementasi cofiring **Mitigasi:** 1) Melakukan kerjasama pengembangan/uji pengadaan biomassa 2) Pembuatan skenario dalam untuk mendukung implementasi cofiring di pabrik 3) Melakukan uji dicetrik by untuk mengetahui dampak cofiring 4) Pemasukan dan review usulan proses dari tahapan cofiring 5) Penguatan organisasi pengelola biomassa 6) Persiapan Pembinaan untuk mencapai target cofiring 7) Evaluasi implementasi cofiring	**Risk:** Hindered continuity of cofiring implementation **Mitigation:** 1) Conducting/signing memorandum related to biomass procurement 2) Making simulations/ studies to support the implementation of cofiring in Pabrik 3) Conducting dry/wet test to know the impact of cofiring 4) Preparation and review of business process proposals related to cofiring 5) Strengthening the biomass management organization 6) Cofiring preparation to meet the cofiring target 7) Evaluation of cofiring implementation
10	**Risiko:** Ketidakpatuhan terhadap regulasi lingkungan yang semakin ketat **Mitigasi:** 1) Pemenuhan regulasi lingkungan 2) Kelebangan: CEMs memori dan CO2 secara online sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku 3) Perencanaan dan Pengadaan peralatan dan suku cadang untuk PLTU Batubara 4) Perencanaan alternatif pemenuhan NSA untuk PLTU batubara secara internal maupun eksternal 5) Perencanaan pembangunan WWTP dan pengurusan izin pembuangan untuk UBEM Luar Jawa 6) Development WWTP dan STP 7) Melakukan pelaksanaan cofiring dengan memastikan bahwa kegiatan tersebut tercantum di dalam dokumen lingkungan. 8) Penyusunan SME untuk menghitung berbasis pasar dan pajak carbon 9) Mengelola kompetensi SDM terkaitan dengan pengelolaan lingkungan.	**Risk:** Non-compliance with increasingly strict environmental regulations **Mitigation:** 1) Implement environmental regulations 2) Online installation of memory and CO2 CEMs in accordance with applicable laws and regulations 3) Planning and procurement of raw supply and for Coal-Fired Power Plant 4) Planning for alternative utilization of NSA for Coal-fired power plants internally and externally 5) Planning for landfill construction and processing of landfill permit for Outer Java (UBEM) 6) Development of WWTP and STP 7) Supporting the implementation of cofiring by ensuring that the activity is included in the environmental document 8) Preparation of SME for market-based mechanism and carbon tax 9) Strengthening HR competencies related to environmental management
11	**Risiko:** Kontribusi ARPS kepada optimasi mendukung Grand PLN NP Group. **Mitigasi:** 1) Penyusunan Rekomendasi untuk Mekanisme Review ARPS terhadap Kebijakannya yang ada di PLN 2) Melakukan kajian dan usulan kontribusi atau investasi PLN NP di NP melalui asset review 3) Menyusun kajian opsi pendekatan lain yang dapat digunakan untuk investasi di PLN NP Group. 4) Mengembangkan AP untuk dapat menjadi proyek strategis baru sehingga bisa memperkuat perpusatan modal. 5) Mendorong pemanfaatan idle asset di AP agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin 6) Mengevaluasi proses perhitungan proses distribusi marine komersial ARPS. 7) Inisiasi pengembangan aplikasi PPPRE untuk AP lainnya 8) Meningkatkan kompetensi karyawan ARPS PLN NP 9) Implementasi stakeholder management 10) Melakukan proses alignment NPP AP secara dengan pendekatan bisnis baru sesuai di Pasal 3 Grand PLN NP	**Risk:** ARPS's contribution has not been optimal in supporting PLN NP Group's business **Mitigation:** 1) Preparation of Guidelines for reviewing ARPS towards its Guidelines exist in PLN 2) Conducting evaluation and submission study on PLN NP's investment in NP through asset review 3) Preparing a study of other funding options that can be used for investment in PLN NP Group. 4) Directing AP to be able to explore new conduct projects so as to accelerate capital turnover 5) Encouraging the utilization of idle assets in AP so that they can be utilized as much as possible 6) Supervising the process of improving ARPS's business processes and commercial schemes 7) Initiating PPPRE application development for other APs 8) Improving the competency of ARPS PLN NP employees 9) Implementation of stakeholder management 10) Conducting NPP AP alignment process in the with the target in new business di suite to New S Curve di PLN NP

No.	Risiko dan Mitigasi Risk and Mitigation	
12	**Risiko:** Organisasi dan human capital kurang mendukung dalam eksekusi program strategis korporat.	Risk: Organization and human capital were less supportive in the execution of corporate strategic programs.
	Mitigasi: 1) Pengadaan kompetensi SDM untuk mendukung pengembangan core (beyond bisnis) serta pengadaan talenta terdidik & Digital mindset 2) Optimalisasi integrasi Resources PLN NP Group untuk meningkatkan competitiveness dan kompetensi SDM PLN NP Group 3) Penyesuaian organisasi dengan strategi korporat termasuk organisasi pengelolaan integrated marketing dan sales dan struktur pendukung EV bisnis baru. 4) Optimasi organisasi dan human capital pada unit yang mengalami perubahan OE 5) Melakukan evaluasi organisasi berkala 6) Menghitung/ukur program strategis perusahaan ke individu (to do list) 7) Melakukan pemetaan/plan dan pengembangan karyawan berdasarkan kompetensi yang dimiliki karyawan. 8) Peningkatan kualitas dan kuantitas pembinaan pemberikaryaan 9) Koordinasi dengan vendor sertifikasi untuk dapat menggunakan sistem road show ke Unit. 10) Workshop pengecekan RUPK.	Mitigation: 1) Strengthening HR competencies to support beyond core business development and strengthening Business mindset & Digital mindset 2) Optimizing the integration of PLN NP Group Resources to increase the competitiveness and competence of PLN NP Group SDM 3) Organizational adjustments with corporate strategies including integrated marketing and sales management organizations and supporting structures for new business lines. 4) Optimization of organization and human capital in units that experienced a change in OE 5) Conducting regular organization evaluation. 6) Calculating the Company's strategic programs to individuals (to do list) 7) Mapping and developing employees based on their skill competencies. 8) Improving facilities and infrastructure to support learning. 9) Coordination with certification vendors to be able to use the roadshow system to the Unit. 10) RUPK Management workshop.
13	**Risiko:** Perpanjangan Izin Usaha	Risk: Business Entity Extension
	Mitigasi: 1) Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat regulasi 2) Melakukan koordinasi pembuatan legal mapping 3) Pengembangan aplikasi EDMS 4) Melakukan gap analysis dan assessment ISO 37301: 2021 Sistem Manajemen Kepatuhan 5) Pembuatan aplikasi monitoring (online) perangkat dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi monitoring progress dalam pengembangan usaha 6) Menyusun mekanisme/regulasi internal pengembangan usaha 7) Pengurusan kompetensi SDM berkaitan dengan Regulasi Perizinan Ketenagalistrikan, Sustainable SSHA/HSE/K3LH, dan ISO 37301 Sistem Manajemen Anti Suap 8) Pengembangan aplikasi CMS.	Mitigation: 1) Collaborating with regulators/ministries. 2) Initiating the making of legal mapping 3) EDMS application development. 4) Conducting gap analysis and assessment of ISO 37301: 2021 Compliance Management System. 5) Creation of (online) control monitoring applications and optimization of the use of application for monitoring the progress of business development projects. 6) Preparing a checklist of internal regulations for business development. 7) Strengthening HR competencies related to Electricity Licensing Regulations, SSHA/HSE/K3LH Assessment, and ISO 37301 Anti-Bribery Management System. 8) CMS application development.

Penilaian risiko tahun 2022 menggambarkan level dari masing-masing risiko utama korporat dimana terdapat *Inherent Risk*, *Actual Risk* dan *Target Risk*. *Inherent Risk* adalah tingkat risiko awal dimana pemilik risiko tidak itu terdapat pengendalian maupun tindakan mitigasi maupun belum dilaksanakan. *Actual Risk* adalah tingkat risiko yang terdinggal saat dilaporkan ini. *Target risk* adalah target tingkat risiko yang diharapkan oleh Perusahaan mampu. Selain Risiko adalah seluruh tindakan pemilukan risiko telah dilakukan pada akhir masa pemantauan risiko.

The 2022 risk mapping illustrates the level of each key corporate risk where there is *Inherent Risk*, *Actual Risk* and *Target Risk*. *Inherent Risk* is the initial risk level where risk treatment both control measurement and risk mitigation measurement have not been implemented. *Actual Risk* is the level of risk still behind when reported and *Target Risk* is the risk level target expected by the Company referring to Risk Appetite after all risk treatment measurement have been conducted at the end of the risk monitoring period.

Peta Risiko Tahun 2022
Risk Map in 2022

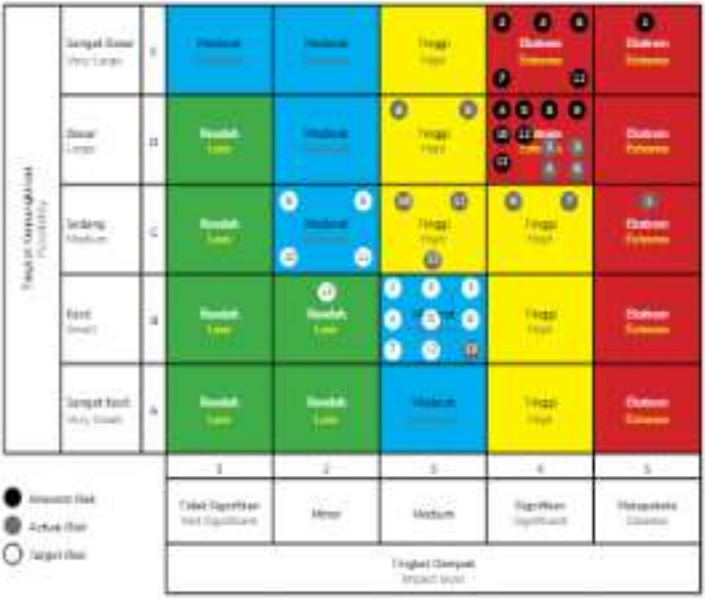

Program Pengembangan Kompetensi Bidang Risiko
Risk Competency Development Program

Program pengembangan kompetensi merupakan salah satu upaya dalam mendorong efektivitas penerapan manajemen risiko Perusahaan. Program pengembangan kompetensi dilakukan baik secara public training yang diselenggarakan oleh lembaga profesional maupun in house training yang bekerjasama dengan narasumber berpengalaman di dalam Manajemen Risiko. Program pengembangan kompetensi terkait manajemen risiko tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Competency development program is one of the efforts in encouraging the effectiveness of the Company's risk management implementation. Competency development programs are conducted both in the form of public training organized by professional institutions and in-house training in collaboration with experienced resource persons in Risk Management. Competency development programs related to risk management in 2022 are as follows:

Program Pengembangan Kompetensi Manajemen Risiko
Risk Management Competency Development Program

No.	Program Pengembangan Development Program	Jumlah Peserta (Number of Participant)	Tanggal Date
1	Pelatihan & Sertifikasi QRMA – Batch 1 QRMA Training & Certification – Batch 1	33	10-20 Oktober 2021 October 10-20, 2021
2	Pelatihan & Sertifikasi QRMA – Batch 2 QRMA Training & Certification – Batch 2	30	25-29 Oktober 2021 October 25-29, 2021
3	Pelatihan & Sertifikasi QRMA – Batch 3 QRMA Training & Certification – Batch 3	32	01-05 November 2021 November 1-4, 2021
4	Pelatihan & Sertifikasi QRMA – ORMAF - Batch 4 QRMA – ORMAF Training & Certification – Batch 4	30	08-12 November 2021 November 8-11, 2021
5	Pelatihan & Sertifikasi QRMA – Batch 5 QRMA Training & Certification – Batch 5	32	15-19 November 2021 November 15-18, 2021
6	Pelatihan & Sertifikasi QRMA – Batch 6 QRMA Training & Certification – Batch 6	30	15-19 November 2021 November 15-18, 2021
7	Pelatihan & Sertifikasi QRMA – Batch 7 QRMA Training & Certification – Batch 7	27	06-09 Desember 2021 December 6-9, 2021
8	Recertified ERMP(PEBOK2) - Batch 1 ERMP(PEBOK2) Recertification – Batch 1	7	11 - 22 November 2021 November 11-11, 2021
9	Recertified ERMP(PEBOK2) - Batch 2 ERMP(PEBOK2) Recertification – Batch 2	8	11 - 16 November 2021 November 11-16, 2021
10	Recertified ERMP(PEBOK2) - Batch 3 ERMP(PEBOK2) Recertification – Batch 3	9	18 – 23 November 2021 November 18-18, 2021
11	Recertified ERMP(PEBOK2) - Batch 4 ERMP(PEBOK2) Recertification – Batch 4	10	13-23 Desember 2021 December 13-13, 2021
12	KOHCP	11	13-30 Mei 2021 May 13-30, 2021
13	Manajemen Risiko ISO 31000: 2018 Risk Management	28	17 April 2021 April 17, 2021

Kegiatan *Awareness* Manajemen Risiko
Risk Management Awareness Activities

Kegiatan awareness dikemas dalam Program Clear Talk yang merupakan kegiatan sharing knowledge manajemen risiko dengan menyandang narasumber yang kompeten dalam bidangnya. Pada tahun 2022 telah dilakukan Clear Talk dan sosialisasi sebagai berikut

Awareness activities are presented in the Clear Talk Program, which is a risk management knowledge sharing activity by inviting competent resource persons in their fields. In 2022, Clear Talk and socialization have been conducted as follows:

No.	Kegiatan Activity	Tanggal Date
1	Clear Talk dengan tema "Pengelolaan Manajemen Risiko untuk Insiasi I-CARE". Clear Talk with the theme "Link Risk Management through I-CARE"	20 Januari 2022 January 20, 2022
2	Clear Talk dengan tema "Dari Proaktif dan Manajemen Kinerja Berisiko Bidak" Clear Talk with the theme "New Practice of Risk-based Performance Management"	23 Februari 2022 February 23, 2022
3	Clear Talk dengan tema "Sosialisasi Peran Manajemen Risiko Terintegrasi" Clear Talk with the theme "Socialization of the Role of Integrated Risk Management"	22 Maret 2022 March 22, 2022

No.	Kegiatan Activity	Tanggal Date
4	Case Talk dengan tema "Program Hilirisasi Pada Rintis Kerjasama dengan Ajuk 2022" Case Talk with the theme "Downstreaming Partner Kingdom Program and Ajuk 2022"	30 Mei 2022 May 30, 2022
5	Case Talk dengan tema "Transisi Energi dan Isu Retirement PLTU Batubara" Case Talk with the theme "Energy Transition and Early Retirement of Coal-Fired Power Plant"	30 Juni 2022 June 30, 2022
6	Workshop Penyusunan Key Risk Indicator Sebagai Implementasi Sistem Manajemen Kinerja Berbasis Risiko Workshop on Key Risk Indicator Preparation as an Implementation of the Risk Based Performance Management System	26-27 Juli 2022 July 26-27, 2022
7	Case Talk dengan tema Visi Insight 2023 & Transformasi Digital Generasi After" Case Talk with the theme "Vision Insight 2023 & General After Digital Transformation"	16 Agustus 2022 August 16, 2022
8	Case Talk dengan tema "Success Story Membangun area Transaksi Market (Case Telekomunikasi No.1 di Indonesia)". Case Talk with the theme "Success Story Membangun Achieve No.1 Telecommunication Market Share in Indonesia)	29 September 2022 September 29, 2022
9	Program Hilirisasi Profil Risiko Korporat sampai dengan Oktober 2022 (Risiko No. 1,5,6,7,10) Corporate Risk Profile Mitigation Program until October 2022 (Risk No. 1, 5, 6, 7, 10)	31 Oktober 2022 October 31, 2022
10	Program Hilirisasi Profil Risiko Korporat sampai dengan Oktober 2022 (Risiko No. 1,5,6,8) Corporate Risk Profile Mitigation Program until October 2022 (Risk No. 1, 5, 6, 8)	8 November 2022 November 8, 2022
11	Sosialisasi Risk Awareness Tahun 2022 Socialization of Risk Awareness Year 2022	13 September 2022 September 13, 2022

Evaluasi Kinerja Manajemen Risiko

Risk Management Performance Evaluation

Kinerja pengelolaan risiko dievaluasi secara berkala untuk dapat meliha kondisi kematangan sistem manajemen risiko Perusahaan. Evaluasi dilakukan dengan metode *Assessment Maturity Level ERM* dan *Risk Survey*.

Assessment Maturity Level ERM PLN NP semester 1 tahun 2022 berdasarkan kriteria PLN, diperoleh hasil dengan nilai sebesar 4,15 di atas target semester 1 sebesar 3,7. *Assessment Maturity Level* ERM pada unit yang dikelola PLN NP dilakukan satu semester sekali oleh asesor yang ditunjuk oleh Bidang Kinerja Korporat. Pencapaian maturity level ERM baik anak perusahaan maupun unit dilaksanakan disetiap tahun 2022. Namun disetiap setiap triwulan unit tetap melakukan self-assessment maturity level ERM untuk memastikan proses ERM di unit tetap berjalan sesuai yang direncanakan.

The Company evaluates risk management performance periodically in order to be able to view the adequacy of the Company's risk management system. The evaluation is conducted using the ERM Maturity Level Assessment and Risk Survey methods.

Assessment on ERM Maturity Level of PLN NP in semester 1 of 2022 based on PLN criteria, obtained results with a valuation value of 4.15 above the semester 2 target of 3.7. The ERM Maturity Level Assessment in units managed by PLN NP is carried out once a semester by an assessor appointed by the Corporate Performance Department. The ERM Maturity level assessment for both subsidiaries and units was carried out at the end of 2022. However, every quarter, the unit still conducts a self-assessment of the ERM maturity level to ensure that the ERM process in the unit continues to run according to plan.

Hasil Assessment Maturity Level ERM Unit

Assessment Result of ERM Maturity Level of Unit

No.	Unit Peningkatan Enhancement Unit	Target Semester II Tahun 2022 Target for Semester II of 2022	Realisasi sd Triwulan IV 2022 Realization up to Quarter IV of 2022	Pencapaian Achievement (%)
1	UP Bekasi Bekasi (L)	3.60	3.65	101%
2	UP Dieng Dieng (L)	3.60	3.68	101%
3	UP Muara Karang Muara Karang (L)	3.60	3.61	100%
4	UP Muara Tawar Muara Tawar (L)	3.60	3.65	101%
5	UP Cirata Cirata (L)	3.60	3.63	101%
6	UP Bratas Bratas (L)	3.60	3.60	100%
7	UP Indonesia Kamojang (L)	3.55	3.55	100%
8	UP Perak Perak (L)	3.55	3.56	100%
9	UP Semarang Semarang (L)	3.55	3.57	101%
10	UP Tanjung Awar-Awar Tanjung Awar-Awar (L)	3.55	3.56	100%
11	UP Asam Asam (L)	3.60	3.58	99%
12	UP Bakrie Teluk Sirih Bakrie Teluk Sirih (L)	3.30	3.30	100%
13	UP Pulang Pisau Pulang Pisau (L)	3.30	3.27	100%
14	UP Tenayan Tenayan (L)	3.30	3.30	100%
15	PIC Academy	3.25	3.25	100%
16	UHBP	3.55	3.56	100%

Hasil assessment maturity level ERM menunjukkan bahwa tingkat kematangan sistem manajemen risiko Perusahaan:

1. Budaya sadar risiko cukup terbukti pada risk owner hal ini disertai dengan usaha ditakukannya pengelolaan risiko.
2. Manajemen risiko telah menjadi dasar dalam pengambilan keputusan.
3. Manajemen risiko telah menjadi bagian dari seluruh proses bisnis Perusahaan.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut Direksi dan Dewan Komisaris menyimpulkan bahwa sistem manajemen risiko Perusahaan telah cukup memadai. Namun demikian, Direksi dan Dewan Komisaris terus mendorong peningkatan pengelolaan risiko Perusahaan melalui pengawasan oleh Direksi dan pengawasan oleh Dewan Komisaris, memastikan kecukupan kebijakan dan standar prosedur Manajemen Risiko dan penetapan strategi risiko berdasarkan kebijakan yang terkait, memastikan kecukupan implementasi mencakup proses komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, identifikasi, pengukuran, perlakuan, pemantauan, pelaporan, serta sistem informasi Manajemen Risiko di Perusahaan.

The results of the ERM maturity level assessment indicate the following from the maturity level of the Company's risk management system:

1. Risk awareness culture is quite inherent in risk owners, this is indicated by efforts to manage risk.
2. Risk management has become the basis in decision making.
3. Risk management has become part of the Company's entire business process.

Based on the evaluation results, the Board of Directors and Board of Commissioners consider that the Company's risk management system is adequate. However, the Board of Directors and Board of Commissioners continue to encourage the improvement of the Company's risk management through active management by the Board of Directors and supervision by the Board of Commissioners, ensuring the adequacy of risk management policies and standard procedures and the determination of risk strategies based on applicable provisions, ensuring the adequacy of implementation including communication and consultation processes, context determination, identification, measurement, treatment, recording, monitoring, and Risk Management information systems in the Company.

Standar Etika Perusahaan
Code of Conduct

Standar perilaku atau yang diharapkan oleh Perusahaan dari seluruh insan Perusahaan sebagai perilaku bekerja berdasar dokumen/aturan dalam bentuk Code of Conduct (COC). COC mengidentifikasikan standar perilaku yang harus dipatuhi (perintah) dan dihindari (larangan). Pembuatan COC bertujuan untuk memberikan pedoman yang harus dipatuhi dari insan Perusahaan dan menjadi tolakan untuk menilai apakah seorang insan Perusahaan telah memenuhi atau melakukan penyimpangan. Perilaku yang bertanggung jawab dan menjunjung tinggi norma-norma sosial dipatuhi dapat menjaga keberlangsungan bisnis Perusahaan dan memberikan pengaruh positif maupun manfaat yang dirasakan baik bagi Perusahaan maupun bagi pemangku kepentingan lainnya. Pemenuhan COC dalam jangka panjang secara konsisten diharapkan akan mendorong perbaikan kinerja Perusahaan dan meningkatkan citra Perusahaan.

Code of Conduct (COC) merupakan salah satu infrastruktur untuk menyukseskan Good Corporate Governance di Perusahaan. Perusahaan telah menetapkan Standar Etika Perusahaan pada tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa-Bali Nomor 001.K/021.DIR/2013 dan 004.K/DK/PBJ/2013 tentang Standar Etika Perusahaan (Code of Conduct) PT Pembangkitan Jawa-Bali. Standar Etika Perusahaan secara berkala dievaluasi dan apabila dipandang perlu, dapat dilakukan pemutakhiran dalam menjaga relevansinya terhadap kondisi bisnis, lingkungan dan sosial Perusahaan yang terus berkembang.

The standards of ethical behavior expected by the Company from all Company personnel as corporate business actors are documented in the form of a Code of Conduct (COC). The COC identifies standards of behavior that must be obeyed (commands) and avoided (prohibitions). The preparation of the COC aims to provide guidelines that must be adhered to by the Company's personnel and become a criteria for assessing whether the Company's personnel have complied or deviated. Responsible behavior and upholding social norms are believed to maintain the sustainability of the Company's business and support the range of benefits perceived both for the Company and for other stakeholders. Consistent implementation of the COC in the long term is expected to encourage improvements in the Company's performance and enhance the Company's image.

Code of Conduct (COC) is one of the infrastructures to realize Good Corporate Governance in the Company. The Company has established the Code of Conduct in 2013 based on the Joint Decree of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Pembangkitan Jawa-Bali Number 001.K/021.DIR/2013 and 004.K/DK/PBJ/2013 concerning the Code of Conduct of PT Pembangkitan Jawa-Bali. The Code of Conduct is periodically evaluated and if deemed necessary can be updated in maintaining its relevance to the Company's evolving business, environmental and social conditions.

Budaya Perusahaan
Corporate Culture

Budaya Perusahaan (Core Values) adalah "the way we do things around here" yang merupakan nilai, anggapan, asumsi, sikap, dan norma perilaku yang telah melandasi kemudian berevolusi dalam wujud perwujudan, sikap dan tindakan, sehingga menjadi identitas perusahaan. Sebagai BUMN, Perusahaan turut mengimplementasikan AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) sebagai core values di lingkungan Perusahaan yang selaras dengan transformasi Human Capital di BUMN dan transformasi PT PLN (Persero). AKHLAK sebagai core values di lingkungan Perusahaan, menjadi panduan insan Perusahaan dalam berinteraksi dan berperilaku dalam rangka mewujudkan Visi Perusahaan. Perusahaan telah mencanangkan core values AKHLAK sebagai Budaya Perusahaan yang telah kami

Corporate Culture (Core Values) is "the way we do things around here", which are values, perceptions, presumptions, attitudes, and norms of behavior that have been institutionalized and then manifested in the form of appearance, attitudes, and actions that becoming the Company's identity. In addition, the Company also implements AKHLAK (Trustworthy, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, Collaborative) as core values within the Company, which is in line with the transformation in Human Capital in SOEs and the transformation of PT PLN (Persero). AKHLAK as core values within the Company, serves as a guide for the Company's personnel in acting and behaving in order to realize the Company's Vision. The Company has officialized AKHLAK core values as a Corporate Culture consisting of:

Core Values AKHLAK
AKHLAK Core Values

Nilai Utama Core Values	Definisi Definition	Perilaku Pemula Behavior Guidelines	
Amanah Trustworthy	Memegang teguh kepercayaan yang diberikan Upholding the trust given	1. Fokus pada pencapaian dan komitmen 2. Bertanggung jawab dan konsisten 3. Berpegang teguh kepada nilai-nilai dan etika	1. Fulfilling promises and commitments 2. Be responsible for duties, decisions and actions taken 3. Adhering to moral and ethical values
Kompeten Competent	Terus belajar dan meningkatkan kapabilitas Continuing to learn and develop capabilities	1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah 2. Membantu orang lain belajar 3. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik	1. Improving personal competence to meet ever-changing challenges 2. Helping others learn 3. Completing duties with the highest quality
Harmonis Harmonious	Saling peduli dan menghargai perbedaan Caring for each other and respecting differences	1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya 2. Suka menolong orang lain 3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif	1. Respecting everyone regardless of their background 2. Likes to help others 3. Building a conducive work environment
Loyal Loyal	Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara Dedicated and prioritizing the interests of the Nation and State	1. Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan Negara 2. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar 3. Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan norma dan etika	1. Maintaining the good name of fellow employees, leaders, SOEs, and the State 2. Willing to sacrifice to achieve a greater goal 3. Complying with the leadership as long as it does not conflict with the law and ethics
Adaptif Adaptive	Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan Continuously innovate and be enthusiastic in energizing or facing change	1. Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik 2. Terus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi 3. Bertindak proaktif	1. Adapting quickly to be better 2. Constantly making improvements following technological developments 3. Acting proactively
Kolaboratif Collaborative	Membangun kerja sama yang sinergis Building synergistic cooperation	1. Membuka kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi 2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah 3. Menggabungkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama	1. Providing opportunities to various parties to contribute 2. Open in cooperating to generate added value 3. Mobilizing the utilization of various resources for a common goal

Internalisasi Budaya Perusahaan
Corporate Culture Internalization

Perusahaan telah merancang Roadmap Budaya Perusahaan dalam mengimplementasikan Core Values AKHLAK sebagai upaya penguatan budaya perusahaan. Tahapan implementasi penguatan budaya perusahaan difokuskan dengan membangkitkan awareness, meningkatkan pemahaman dan kemudian mendorong keterlibatan insan Perusahaan (engagement), sehingga pada akhirnya semua karyawan Perusahaan diharapkan memiliki komitmen penuh dalam mewujudkan visi Perusahaan (commitment/involvement).

The Company has developed a Corporate Culture Roadmap in internalizing the AKHLAK Core Values as an effort to strengthen corporate culture. The implementation stages of strengthening corporate culture are started by raising awareness, building understanding, and then encouraging the involvement of the Company's people (engagement), so that in the end all employees of the Company are expected to have full commitment in realizing the Company's vision (commitment/involvement).

Peta Jalan Budaya Implementasi Core Values AKHLAK Tahun 2020-2024

Cultural Roadmap for the Implementation of AKHLAK Core Values in 2020-2024

Mengimplementasikan budaya perusahaan memerlukan 5 (lima) aspek sebagaimana Roadmap Implementasi Budaya Perusahaan dalam rangka membangun budaya Perusahaan yang berkelanjutan yaitu:

Implementation of corporate culture includes strengthening 5 (five) aspects as the Roadmap for Implementation of Corporate Culture in order to build a sustainable corporate culture, namely:

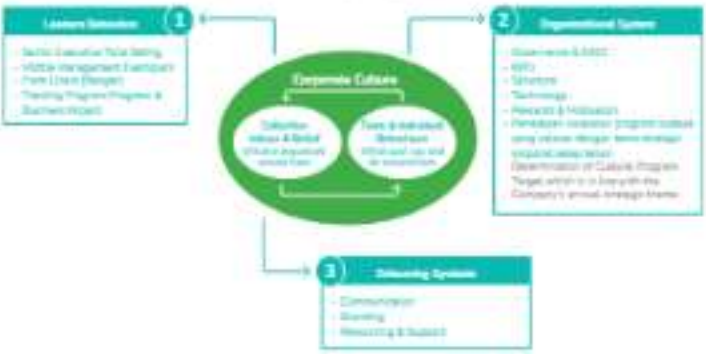

High Level Roadmap Budaya Perusahaan 2020-2024 memasuki periode Milestone 2 tahun 2021-2022. Tema penguatan budaya dan key message Milestone 2 tahun 2021-2022 adalah *Drive Synergy, Perform Operational Excellence*. Selaras ini, sebagaipa meningkatkan semua subordinasi pengaruh budaya harus dapat dicapai dengan energi seluruh stakeholder Perusahaan, termasuk Tenaga Alih Daya. Sebagaimana periode Milestone 1 Tahun 2020, *Critical Few Behavior* (CFB) atau perilaku prioritas dari AKHLAK/*Context* menjadi driver mencapai objektif transformasi budaya (DPC Culture, Collaboration & Performance Culture, dan Service Culture). Terdapat 1 tambahan CFB sesion 4 CFB yang sudah ada pada Milestone 1 pada implementasi Milestone 2. CFB tersebut adalah "Menyelesaikan tugas dengan kualitas hasilan" dari value KOMPETEN. Dalam hal ini, PLNus harus mampu menyelesaikan tugas sesuai batasan waktu/ditr ditugaskan, pemberi tugas. Beberapa contoh perilaku ini misalnya: Membuat skala prioritas dalam bekerja; Melaksanakan pemeriksaan berkala setiap proses dan hasil pekerjaan agar sesuai dengan prosedur dan standar kualitas yang sudah ditetapkan; Menyelesaikan pekerjaan secara efektif dan efisien sesuai dengan standar SLA yang telah ditentukan; Mau bertanya informasi untuk memahami dan memberikan nilai tambah dalam memenuhi kebutuhan perusahaan, dll. Secara detail, CFB AKHLAK di Milestone 2 adalah sebagai berikut:

The 2020-2024 High Level Roadmap for Corporate Culture enters the Milestone 2 period in 2021-2022. The theme of cultural strengthening and the key message of Milestone 2 in 2021-2022 is *Drive Synergy, Perform Operational Excellence*. This theme also reminds us that the success of cultural strengthening will only be achieved with the synergy of all Company stakeholders, including Outsourced Workers. As in the 2020 Milestone 1 period, Critical Few Behavior (CFB) or priority behavior from AKHLAK is again becoming a driver towards cultural transformation objectives (DPC Culture, Collaboration & Performance Culture, and Service Culture). There is 1 additional CFB in addition to the 4 CFBs that have been promoted in Milestone 1 in the implementation of Milestone 2. The CFB is "Completing duties with the best quality" from the COMPETENT value. In this case, PLNers are required to be able to complete duties in a quality manner exceeding the expectations of the assignor. Several examples of this behavior include: Making a priority scale of work; Re-checking every process and work result to be in accordance with established procedures and quality standards; Completing work effectively and efficiently in accordance with predetermined SLA standards; Actively digging for information to understand and provide added value in meeting the needs of the Company, etc. In detail, CFB AKHLAK in Milestone 2 is as follows:

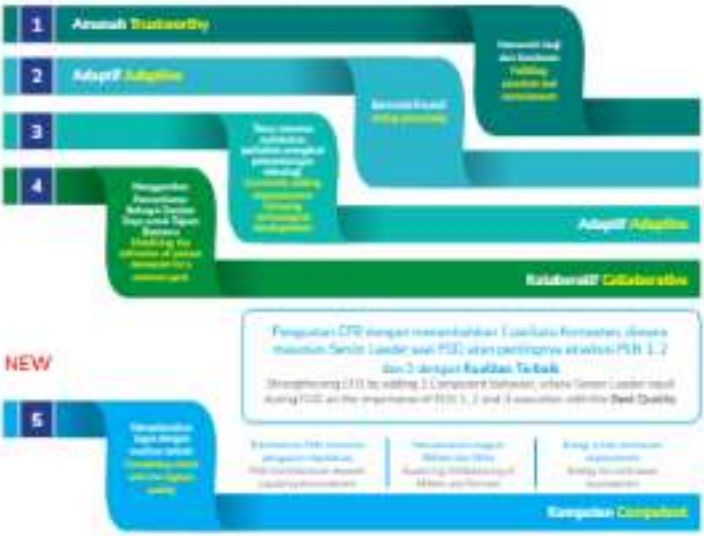

Membangun budaya memerlukan konsistensi program dan komitmen seluruh stakeholder mengawal program menjadi kunci. Beberapa pengaplikasian dilakukan pada Program Budaya PLN 1,2,3 di Perusahaan pada implementasi Milestone 2 tersebut sebagaimana digambarkan sebagai berikut.

Building a culture requires program consistency and the commitment of all stakeholders to execute the program is the key. Several achievements were conducted in the PLN 1,2,3 Culture Program in the Company during the implementation of Milestone 2, as described below.

Penguatan Implementasi Budaya PLN 123 Milestone 2
Strengthening the Culture Implementation of PLN 123 Milestone 2

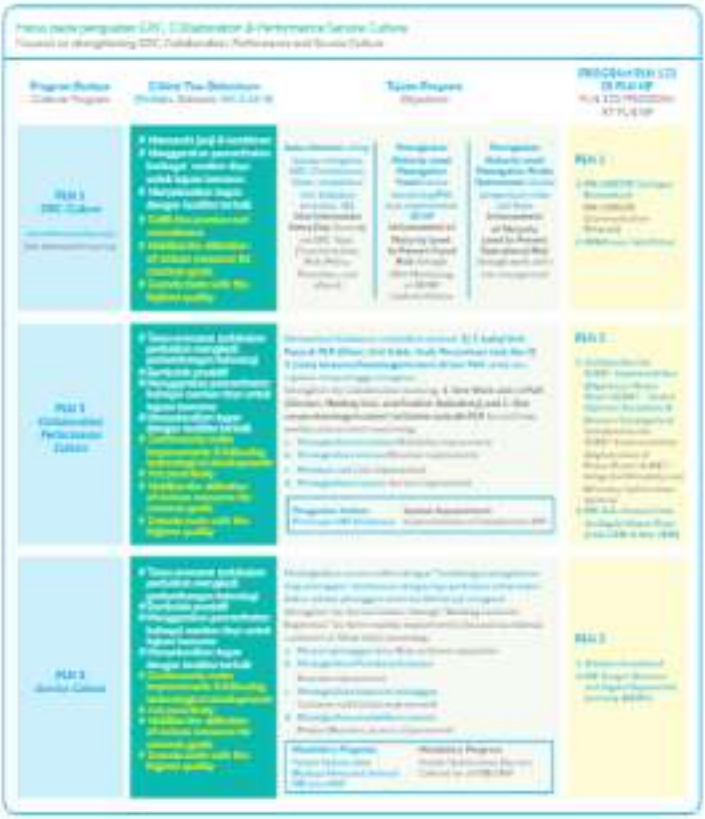

Pokok Muatan Standar Etika Perusahaan

Core Contents of the Code of Conduct

Standar Etika Perusahaan secara fundamental mengatur mengenai standar etika perilaku dan sikap dalam membangun hubungan dengan para pemangku kepentingan termasuk karyawan, pelanggan, rekanan, kompetitor, mitra kerja, pemerintah, dan masyarakat. Muatan Standar Etika Perusahaan disederhanakan dengan akronim "PERMENUNGI" atau penjabaran deskripsi beberapa perilaku yang berkaitan dengan sikap pengelolaan Perusahaan yang harus dipatuhi oleh seluruh Insan Perusahaan. Penjelasan mengenai cakupan muatan yang diatur dalam Standar Etika Perusahaan adalah sebagai berikut:

The Code of Conduct fundamentally regulates regarding ethical standards of behavior and business in building relationships with stakeholders including employees, customers, associates, competitors, partners, government, and society. The content of the Code of Conduct is simplified with the acronym "PERMENUNGI" for the explanation of several principles relating to the ethical management of the Company, that must be obeyed by all Company personnel. An explanation regarding the scope of content regulated in the Code of Conduct is as follows:

Pokok Muatan Standar Etika Perusahaan

Core Contents of the Code of Conduct

Cakupan Muatan Scope	Penjelasan Explanation
Kegiatan Politik dan Sosial Perusahaan Political and Social Activities of the Company	Perusahaan mempersilahkan siap pekerja sebagai pribadi untuk sesuai dengan cara dan **integrity** dan perilaku utama etis. Dan namun itu, Perusahaan tidak memberikan bantuan dana ke partai politik, politisi, maupun calon pejabat tersebut. Selain itu, di tidak lainnya Perusahaan mendorong hak sepenuhnya sebagai warga negara untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik. Perusahaan juga berkomitmen untuk mengembangkan pengembangan kemandirian masyarakatsekitarnya di sekitar pusat kegiatan usaha. Pengembangan dan pemberdayaan tersebut diutamakan dalam bidang ekonomi serta budaya dan kearifan lokal, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Insan Perusahaan yang berwenang dilarang untuk melakukan kontribusi dan bantuan subjektif dalam memberikan program CSR sepert memberikan program CSR di wilayah tempat asal Insan Perusahaan tersebut, hal ini dilakukan agar sesuai dengan tata nilai **integrity** dan perilaku utama **amanah**	The Company supports a neutral stance towards political parties in accordance with the values of integrity and behaving professionally. Therefore, the Company does not provide financial assistance to any political party, politician, or candidate for official. However, this does not mean that the Company prohibits its employees' rights as citizens to participate in political activities. The Company is also committed to contributing community development and empowerment, especially around the center of operations activity. Such development and empowerment is prioritized in the sectors of socio-cultural economy and religion, education, health, and environment. Authorized Company personnel are prohibited from discriminating and being subjective in carrying out CSR programs such as providing CSR programs in the area where the Company personnel come from. This is based on the values of **integrity** and the core value of **trustworthiness**.
Etika Berkomitmen Perusahaan Work ethics of Company Personnel	Setiap Insan Perusahaan berkomitmen untuk sumber dan berkembang bersama dengan Perusahaan. Staf-tenaga itu, Direksi dan/atau untuk menjaga komitmen Insan Perusahaan terhadap pengembangan diri Insan Perusahaan serta Perusahaan secara berkelanjutan. Komitmen yang dimaksud yaitu : 1. Komitmen pengembangan diri 2. Komitmen pengelola Kompetensi perusahaan 3. Komitmen anti diskriminasi	Every personnel of the Company is committed to growing and developing together with the Company. Therefore, rules are designed to maintain the commitment of Company Personnel towards the self-development of Company Personnel and the Company as a whole. The commitments referred to are: 1. Commitment to self-development 2. Commitment to progress & development of the Company 3. Commitment to anti-discrimination

Cakupan Hukum Scope	Penjelasan Explanation
Hak Kekayaan Intelektual, Hak Kekayaan Intelektual dan Pengelolaan Media Sosial Information Protection, Intellectual Property Rights and Social Media	Sesuai dengan satu nilai **Integrity** dengan perilaku utama **jujur** dan **amanah**, setiap Insan Perusahaan berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan sesuai kualifikasinya. Pengungkapan informasi kepada Publik dan Stakeholder lainnya harus dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi informasi, kepentingan Perusahaan, dan ketentuan lain yang berlaku dengan penuh tanggung jawab dengan yang berlaku. Perusahaan tidak membenarkan adanya orang perorang informasi dari orang dalam (insider trading) dan Perusahaan akan melakukan tindakan hukum terhadap pelaku insider trading sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan selama itu seluruh Insan Perusahaan dilarang melakukan jualan perjualan informasi dari orang dalam. Perusahaan menghargai hak kekayaan intelektual (HAKI) pihak lain, dan karena itu Insan Perusahaan dilarang untuk menggunakan HAKI milik pihak lain tanpa izin dan prosedur yang sudah diatur. Lisensi dapat mengakibatkan Perusahaan menanggung gugatan hukum. Di sisi lain, Perusahaan dan seluruh Insan Perusahaan juga wajib melindungi HAKI milik Perusahaan karena HAKI adalah merupakan aset yang sangat berharga untuk Perusahaan. Media sosial yang mengatasnamakan Perusahaan hanya boleh dikelola oleh pihak yang diberi hak oleh Perusahaan. Unit dan bagian lain dilarang melakukan kegiatan media sosial serupa yang mengatasnamakan Perusahaan. Insan Perusahaan dilarang menyunggah pernyataan di media sosial yang mengatasnamakan Perusahaan, kecuali pihak pengelola telah mendapatkan izin Perusahaan. Perusahaan mengontrol kebebasan Insan Perusahaan untuk menyampaikan informasi dalam bentuk Insan maupun konten di dalam media sosial pribadi Insan Perusahaan selama konten yang disunggah bukan hal yang merugikan perusahaan.	In accordance with the integrity value with the core behavior of honesty and trustworthiness, every Company personnel is obliged to maintaining the confidentiality of the Company's information according to its classification. Disclosure of information to the Public and other Stakeholders must be conducted by taking into account the classification of information, the interests of the Company, and the needs of interested parties in accordance with applicable regulation. The Company does not tolerate the practice of selling information from insiders (insider trading) and the Company will take legal action against insider trading actors in accordance with applicable laws. Therefore all Company personnel are prohibited to practice the sale of insider information. The Company respects the Intellectual Property Rights (IPR) of other parties, therefore Company personnel are prohibited to use IPR belonging to other parties without permission and procedures that have been regulated. Due to the fact that it can cause the Company to be sued. On the other hand, the Company and all Company personnel are also obliged to protect its IPR due to the fact that IPR is a very valuable intangible asset for the Company. Social media on behalf of the Company may only be managed by parties authorized by the Company. Other units and departments are prohibited from creating their own social media on behalf of the Company. Company personnel are prohibited from uploading statements on social media on behalf of the Company, except if they are given permission by the Company. The Company regulates the freedom of Company personnel to convey their thoughts in oral or written form in the Company's personal social media, as long as the uploaded content is not detrimental to the Company.
Benturan Kepentingan Conflict of Interest	Aturan mengenai benturan kepentingan dibuat sesuai dengan satu nilai **integritas** dan perilaku utama kita, **jujur** dan **amanah**. Benturan kepentingan terjadi apabila Insan Perusahaan: 1. Terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan perusahaan pesaing atau dengan Mitra Usaha Perusahaan. 2. Bekerja di perusahaan pesaing atau dengan Mitra Usaha Perusahaan. 3. Mempunyai hubungan keluarga langsung dengan pemilik atau pengelola perusahaan Mitra Usaha Perusahaan. Apabila terjadi benturan kepentingan tersebut maka Insan Perusahaan harus mengungkapkan hal dan proses pengambilan keputusan secara tertulis kepada	Rules regarding conflict of interest are made in accordance with the values of **integrity** and the core behaviors of **honesty** and **trustworthiness**. Conflict of interest occurs when Company personnel: 1. Directly or indirectly involved in the management of competing companies or with the Company's Business Partners. 2. Working in a competing company or with the Company's Business Partners. 3. Having a direct family relationship with the owner or decision maker at the Company's Business Partner. In the event of a conflict of interest, Company personnel must resign from the decision-making process in accordance with applicable provisions.

Cerapan Utama Scope	Penjelasan Explanation
Perlindungan **A**set Perusahaan Protection of Company Assets	Insan/Pekerja adalah sumber daya yang efektif dan penggerak dari digunakan untuk pencapaian tujuan Perusahaan. Sebuah dengan kita nilai **Integrity** dan perilaku utama **etis**. Ancaman/ pelanggaran perilaku yang merugikan untuk kelangsungan Perusahaan dan kesejahteraan Aset Perusahaan. Asset are resources owned by the Company and used to achieve the Company's objectives. In accordance with the values of **integrity** and **ethical** core behavior, a code of conduct is established which aims to maintain the integrity and safety of the Company's assets.
Negosiasi dengan Stakeholder	Setiap insan Perusahaan wajib untuk menjaga hubungan baik dengan rekan di Stakeholder Perusahaan sesuai dengan nilai-nilai Perusahaan. Hubungan dalam, hubungan ini diatur dalam bentuk kewajiban dan tanggung yang harus dipenuhi oleh seluruh insan Perusahaan. Every Company personnel is obliged to maintaining good relations with an Company Stakeholders in accordance with the Company's values. This guidelines in this relationship are regulated in the form of obligations and commitments that must be fulfilled by all Company Personnel.
Cratifikasi Gratification	Setiap insan Perusahaan senantiasa menjaga aturan tentang Gratifikasi sesuai dengan peraturan dan nilai-nilai utama Perusahaan, yaitu **integrity** dengan perilaku utama **etis**, jujur dan amanah yang berlaku untuk mencegah kita pelanggar yang rentan dan berlaku di Perusahaan. Every Company Personnel always complies with the rules related to Gratification as a reflection of one of the Company's values, namely **integrity** with the core behavior of **ethical**, **honest** and **trustworthy** which aims to create a healthy and clean competitive climate in the Company. Setiap insan Perusahaan wajib mengetahui pemberitahuan aturan terkini mengenai Gratifikasi dan memahami aturan yang berlaku tersebut. Aturan-aturan tersebut harus disosialisasikan ke seluruh insan Perusahaan untuk menghindari terjadinya Gratifikasi di lingkungan Perusahaan. Every Company Personnel is required to know the development of the latest rules regarding Gratification and actively with the applicable rules. These rules must be socialized to all Company personnel to avoid the occurrence of Gratification within the Company.
Kepatuhan terhadap K3, serta Pelestarian Lingkungan Concern for OHS, and Environmental Preservation	Komitmen Perusahaan terhadap pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta pelestarian lingkungan tercermin dari visi **profesional** dengan perilaku utama **menjunjung tinggi keselamatan dan lingkungan** yang aman di dalam lokasi kerja Perusahaan. Aktivitas di Perusahaan senantiasa berlaku keselamatan dan kelestarian lingkungan. The Company's commitment to the importance of Occupational Health and Safety (OHS) and environmental preservation is reflected in the professional values with the core behavior of upholding safety and the environment in the Company's values. Activities in the Company are oriented towards safety and environmental harmony. Perusahaan berkomitmen untuk meningkatkan kepedulian dan kesadaran risiko-risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta pelestarian lingkungan hidup terhadap seluruh insan Perusahaan. The Company is committed to increasing awareness and building the values of Occupational Health and Safety as well as environmental preservation to all Company personnel.
I-**T**egritas Proses dan Data Pelaporan Keuangan Integrity of Financial Reporting Process and Data	Seluruh transaksi bisnis Perusahaan harus dipastikan dalam bentuk laporan keuangan. Hal ini tentunya dan nilai integrity dengan perilaku utama **jujur** dan nilai **profesional** dengan perilaku utama **bertanggung jawab**. Perusahaan wajib membuat laporan keuangan secara teliti dan akurat untuk kepentingan integritas dan kejujuran Perusahaan. Semua proses pencatatan disusun dengan ketentuan bahwa seluruh bentuk transaksi, aktivitas, telah sesuai dan dicatat/dilaporkan secara benar/nyata. All business transactions of the Company must be described in the form of financial statements. This is connected to the integrity value with **honest** core behavior and professional value with **responsible** core behavior. The Company is obliged to make precise and accurate financial statements to support the Company's integrity and reputation. All recording processes are made by ensuring that all that are complete, accurate, timely and traceable proof of transactions.

Pemberlakuan Standar Etika Bagi Seluruh Level Organisasi

Enforcement of Ethical Standards for All Organizational Levels

Standar Etika Perusahaan berlaku bagi Direksi dan Dewan Komisaris beserta seluruh karyawan yang mempunyai hubungan kerja (langsung/tak langsung) dengan Perusahaan termasuk anak perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa-Bali Nomor 001.K/010/DIR/2018 dan 003.K/DK/PBJB/2018 tentang Standar Etika Perusahaan (Code of Conduct) PT Pembangkitan Jawa-Bali. Seluruh insan Perusahaan wajib mengacu dan berpedoman pada Standar Etika Perusahaan (Code of Conduct). Direksi, Dewan Komisaris, dan seluruh karyawan wajib menandatangani Surat Pernyataan Kepatuhan terhadap Standar Etika Perusahaan secara berkala setiap tahun. Selain itu, Standar Etika Perusahaan dijadikannya sebagai salah satu target kinerja anak di dalam aspek TATI merupakan bagian dari upaya pemberlakuan Standar Etika Perusahaan bagi seluruh level organisasi.

The Code of Conduct applies to the Board of Directors and Board of Commissioners as well as all employees who have a direct working relationship (with permanent and contract employees as stipulated in the Joint Decree of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Pembangkitan Jawa-Bali Number 001.K/010/DIR/2018 and 003.K/DK/PBJB/2018 concerning the Code of Conduct of PT Pembangkitan Jawa-Bali. All Company personnel must refer to and be guided by the Company's Ethical Standard (Code of Conduct). The Board of Directors, Board of Commissioners, and all employees are required to sign a Statement of Compliance with the Code of Conduct periodically every year. In addition, the use of the Code of Conduct as one of the unit performance targets in the 2018 aspect is part of the effort to enforce the Code of Conduct for all organizational levels.

Sosialisasi Standar Etika Perusahaan

Outreach Program for the Code of Conduct

Standar Etika Perusahaan disosialisasikan dan disosialisasikan kepada seluruh karyawan, dan level manajemen senior, top management sebagai bagian dari lingkup internalisasi Budaya Perusahaan. Pelaksanaan sosialisasi Standar Etika Perusahaan dilakukan melalui saluran-saluran di seluruh Unit Kerja Perusahaan, meliputi KKD, Tatap muka/face to face, email, website internet, visual management, dan forum internal. Perusahaan juga menyusun ringkasan Code of Conduct dalam bentuk Buku saku yang dapat mempermudah pemahaman pelaksanaannya sebagai bagian sehari-hari. Sosialisasi juga diberikan bagi karyawan baru pada saat pembekalan Code of Conduct Budaya Perusahaan dan inte-nde GCG yang dilakukan oleh the GCG.

The Code of Conduct is communicated and socialized to all employees, from the operational level to the top management as part of the internalization stage of the Corporate Culture. The implementation of the socialization of the Code of Conduct is carried out through media channels in all Work Units of the Company, including KKD, Talk face-to-face socialization, email, website, intranet, management visuals, and internal forums. The Company also compiled a summary of the Code of Conduct in the form of a pocket book that can facilitate understanding of its application in daily activities. Socialization is also provided for new employees during the debriefing of the Code of Conduct Corporate Culture and GCG values conducted by the GCG team.

Kegiatan sosialisasi Standar Etika Perusahaan merupakan upaya Perusahaan untuk memberikan pemahaman dan meminimalisir kesalahan seluruh insan Perusahaan untuk mematuhi dan menerapkan Standar Etika Perusahaan di setiap kegiatan usaha Perusahaan yang sejalan dengan Budaya Perusahaan. Guna memastikan sosialisasi terlaksana secara efektif, Perusahaan melakukan evaluasi dan pengukuran terhadap proses pelaksanaan dan hasil/output mengenai pemahaman karyawan terhadap Standar Etika Perusahaan.

The completion of the Code of Conduct is the Company's effort to provide understanding and encourage the consent of all Company personnel to comply with and implement the Code of Conduct in every business activity of the Company which is in line with the Corporate Culture. In order to ensure that the socialization is carried out effectively, the Company evaluates and measures the implementation process and results/output regarding employee understanding of the Code of Conduct.

Sanksi Pelanggaran Standar Etika Perusahaan

Sanctions for Violation of the Code of Conduct

Sanksi atas pelanggaran Standar Etika Perusahaan diberikan berdasarkan mekanisme internal Perusahaan yang mengacu pada Peraturan Direksi PT Pembangkitan Jawa Bali No.0006.P/DIR/2021 tentang Peraturan Disiplin Karyawan PT Pembangkitan Jawa Bali. Sanksi disiplin diberikan untuk memberikan efek jera dan memperbaiki sikap/perilaku pelanggar serta untuk mencegah terjadinya risiko fraud yang dapat merugikan Perusahaan.

Sanctions for violations of the Code of Conduct are given based on the Company's internal mechanism which refers to the Regulation of the Board of Directors of PT Pembangkitan Jawa-Bali No.0006.P/DIR/2021 concerning Disciplinary Regulations for Employees of PT Pembangkitan Jawa-Bali. Disciplinary sanctions are conducted to provide a deterrent effect and improve (attitude) the impact of fraud risks that can affect the Company's performance and image.

Sanksi Disiplin Standar Etika Perusahaan

Disciplinary Sanctions on the Code of Conduct

Jenis Hukuman Type of Penalty	Sanksi Sanction		
	Pokok Main		Tambahan Additional
Disiplin Ringan Light Discipline	1. Peringatan tertulis yang berlaku selama 3 (tiga) bulan; atau 2. Peringatan tertulis yang berlaku selama 6 (enam) bulan	1. A written warning valid for 3 (three) months; or 2. A written warning valid for 6 (six) months	-
Disiplin Sedang Moderate Discipline	1. Peringatan tertulis 1 yang berlaku selama 6 (enam) bulan dengan Kriteria Tidak Naik Penyesuaian (SPP); 2. Peringatan tertulis 2 yang berlaku selama 6 (enam) bulan dengan: a. Penskorsan Tunjangan Pokok (TP) sebesar 75%; dan b. Kriteria Tidak Naik Penyesuaian (SPP); 3. Peringatan tertulis 3 (ketiga) yang berlaku selama 6 (enam) bulan dengan Kriteria Tidak Naik Penyesuaian (SPP); 4. Peringatan tertulis 4 (ketiga) yang berlaku selama 6 (enam) bulan dengan Kriteria Tidak Naik Penyesuaian (SPP); 5. Peringatan tertulis 5 (kelima) yang berlaku selama 6 (enam) bulan dengan: a. Penskorsan Tunjangan Pokok (TP) sebesar 100%; b. Kriteria Tidak Naik Penyesuaian (SPP); dan c. Penurunan 1 grade.	1. Written warning 1 valid for 6 (six) months with the Criteria of Yearly Salary Adjustment (SPP); 2. Written warning 2 valid for 6 (six) months with: a. Deduction of Position Allowance (TP) by 75%; and b. Yearly Salary Adjustment (SPP) criteria; 3. The last 3 written warnings valid for 6 (six) months with the Criteria of Yearly Salary Adjustment (SPP); 4. The last 4 written warnings valid for 6 (six) months with the Criteria of Yearly Salary Adjustment (SPP); 5. The last 5 written warning valid for 6 (six) months with: a. Deduction of Position Allowance (TP) by 100%; b. Yearly Salary Salary Adjustment (SPP) criteria; and c. 1-grade demotion.	1. Demotion; 2. Tunjangan Hari Raya (THR) Claim for Compensation (THR).
Disiplin Berat Severe Discipline	Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	Termination of Employment (TOE)	Tunjangan Hari Raya (THR) Claim for Compensation (THR).

Penegakan Standar Etika Perusahaan

Enforcement of the Code of Conduct

Untuk berlangsungnya untuk memastikan bahwa Standar Etika Perusahaan ini dikomunikasikan, dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh Insan Perusahaan. Perusahaan berkomitmen memiliki tegas untuk pelanggaran secara dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bentuk penegakan disiplin terhadap Standar Etika Perusahaan. Perusahaan secara berkala melakukan evaluasi dan penerapan Standar Etika Perusahaan secara dengan mekanisme internalisasi Sistem Perusahaan.

Perusahaan menyediakan fasilitas pengaduan atas pelanggaran dalam mendukung penegakan Standar Etika Perusahaan. Terdapat dua saluran pengaduan yang disediakan yaitu melalui laporan kepada atasan langsung dan melalui mekanisme Whistleblowing System (WBS) untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di Perusahaan. Setiap karyawan Perusahaan didorong berusaha aktif dan wajib melaporkan apabila terdapat indikasi tindakan yang dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran terhadap Standar Etika Perusahaan. Insan Perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran disanksi oleh Tim/Komersi Pelanggaran Disiplin Karyawan, dan yang kemungkinan dijatuhi sanksi secara pro. dan tindakan pelanggaran tersebarkan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

Selama tahun 2022, terdapat 3 (tiga) pelanggaran disiplin di Perusahaan. Kualitas penerapan dan penegakan Standar Etika Perusahaan selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

The Board of Directors is responsible for ensuring that the Code of Conduct is communicated, understood and carried out by all Company personnel. The Company is committed to ruling firm action against any violations in accordance with the stipulated provisions as a form of disciplinary enforcement of the Code of Conduct. The Company periodically evaluates the implementation of the Code of Conduct in accordance with the Corporate Culture Internalization mechanism.

The Company provides a complaint facility for violations in supporting the enforcement of the Code of Conduct. There are two complaint channels provided, namely through reports to direct superiors and the Whistleblowing System (WBS) mechanism to be followed up in accordance with the provisions of applicable regulations in the Company. Every employee of the Company is encouraged to play an active role and is obliged to report if there are indications of actions that can be categorized as violations of the Code of Conduct. Company personnel who are proven to have committed a violation are examined by the Employee Discipline Violation Examination Team, and the person concerned is sentenced according to the type and set of violation based on the applicable provisions in the Company.

During 2022, there were 3 (five) disciplinary violations in the Company. The quality of implementation and enforcement of the Code of Conduct for the latest five years is as the following chart:

> Penegakan Pelanggaran Standar Etika Perusahaan Tahun 2018-2022

Enforcement of Violations of the Code of Conduct in 2018-2022

Bentuk pelanggaran dan sanksi atas pelanggaran Code of Conduct yang telah dikenakan Perusahaan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

The forms of violations and sanctions for violations of the Code of Conduct that have been issued by the Company in 2022 are as follows:

Bentuk Pelanggaran dan Jenis Sanksi Pelanggaran Standar Etika
Violations and Types of Sanctions for Violations of the Code of Conduct

Bentuk Pelanggaran Violation	Jumlah Karyawan Terkena Sanksi Disiplin Number of Employees Affected by Disciplinary Sanctions	Jenis Sanksi Type of Sanction	Hukuman Penalty	
Fundamental (Kesusilan) Fundamental (Trait)	1	Ditolak Sedang - Pertugasan Terluar 1 Tingkat Moderate Discipline - Last Written Warning 1	Berlaku pada : a. Pembatalan Tunjangan Hasil (PT) 100% b. Kriteria Tawaran Dengan Perlu Penyesuaian (DPP) dan c. Penurunan 1 Grade Serta kemudian : Berupa Tuntutan Ganti Rugi (TGR) berupa barang	Principal sanctions: a. Deduction of Position Allowance (PA) by 100% b. Talent Strategy Needs Adjustment (DPP) Criteria; and c. 1 Grade Demotion Additional sanctions in the form of Claims for Compensation (TGR), in the form of goods
Fundamental (Perbuatan/perilaku tercela dan merugikan atau dengan mengikut sertakan) Fundamental (Deviation and Deceptive Behavior and Participation with Malicious Use)	2	Ditolak Sedang - Peringatan Tertulis 1 Moderate Discipline - Written Warning 1	Berupa Peringatan tertulis 1 yang berlaku selama 6 (enam) bulan dengan Kriteria Tawaran Perlu Penyesuaian (DPP), dan Serta kemudian : Berupa Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	In the form of Written warning 1 valid for 6 (six) months with the Criteria of Talent Needs Adjustment (DPP), and Additional sanctions in the form of Claims for Compensation (TGR)
Fundamental (Merugikan atau Fundamental (Deceptive Participation)	1	Ditolak Sedang - Pertugasan Terluar 1 Moderate Discipline - Written Warning 1	Berupa Peringatan tertulis 1 yang berlaku selama 6 (enam) bulan dengan Kriteria Tawaran Perlu Penyesuaian (DPP)	In the form of Written warning 1 valid for 6 (six) months with the Criteria of Talent Needs Adjustment (DPP)

Evaluasi Implementasi Standar Etika Perusahaan
Evaluation of the Implementation of the Code of Conduct

Perusahaan melaksanakan evaluasi strategi sosialisasi dan kegiatan lainnya dalam rangka meningkatkan kesadaran terhadap penerapan Standar Etika Perusahaan dan perangkat pendukung lainnya serta monitoring kualitas penerapan dan penegakan Standar Etika Perusahaan agar mencapai sasaran tata kelola berkelanjutan. Standar Etika Perusahaan sebagai pedoman yang bersifat dinamis, akan secara berkala dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa implementasi senantiasa selaras dengan perkembangan Perusahaan dengan tetap mempertahankan nilai-nilai yang ada pada Budaya Perusahaan.

The Company evaluates socialization strategies and activities in order to increase awareness towards the implementation of the Code of Conduct and other supporting tools as well as to encourage the quality of the implementation and enforcement of the Code of Conduct in order to achieve sustainable governance targets. The Code of Conduct as a dynamic guideline, is reviewed periodically and continuously to ensure that its content is always relevant to the development of the Company while taking into account the values that exist in the Corporate Culture.

Kebijakan Anti Korupsi
Anti-Corruption Policy

Kebijakan anti korupsi merupakan bagian dari implementasi Standar Etika Perusahaan yang telah diselaraskan dalam upaya mendukung Good Corporate Governance di Perusahaan yang tujuan utamanya adalah memberikan nilai tambah dan menjaga keberlanjutan. Kebijakan anti korupsi dijalankan melalui Program PIB Bersih tersebut, ISO 37001:2016 tentang Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), Pengendalian Gratifikasi, Kebijakan Anti Fraud dan memenuhi ketentuan dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Implementasi kebijakan anti korupsi sangat penting untuk meminimalisir ada nya fraud dan permasalahan hukum yang dapat mempengaruhi reputasi dalam pengelolaan Perusahaan serta menjaga asset Perusahaan dimata konsumen, mitra bisnis ataupun Pemegang Saham.

The anti-corruption policy is part of the implementation of the Code of Conduct which is integral in the effort to build Good Corporate Governance in the Company whose main objective is to provide added value and maintain sustainability. The anti-corruption policy is carried out through the PIB Bersih Program including ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (SMAP), Gratification Control, Anti-Fraud Policy and compliance with the State Official Wealth Report (LHKPN). The implementation of anti-corruption policies is very important to minimize the risk of fraud and legal issues that can cause disturbances in the management of the Company and maintain the Company's reputation in the eyes of consumers, business partners or Shareholders.

Program PIB Bersih
PIB Bersih Program

Program PIB Bersih merupakan salah satu upaya Perusahaan dalam mewujudkan kegiatan bisnis yang anggul, langgun, berkelanjutan dan bebas dari segala bentuk penyimpangan dan kecurangan termasuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), memenuhi prinsip-prinsip Good corporate Governance dan meningkatkan budaya perusahaan (corporate culture) serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Pelaksanaan PIB Bersih melibatkan semua sigan Perusahaan, karyawan, asyarat, dan pemangku kepentingan. Perusahaan telah melakukan deklarasi "PIB Bersih" yang diikuti oleh seluruh karyawan serta mitra kerja melalui kegiatan Supplier Gathering pada tanggal 9 Mei 2019 di Kantor Pusat.

Pelaksanaan Program PIB Bersih berpacu pada Pedoman PIB Bersih yang ditetapkan Direksi melalui Keputusan Direksi No. 001.K/DIR/2019/2014. Penyusunan Pedoman PIB Bersih turut memperhatikan kesesuaian terhadap peraturan/perundang-undangan yang berlaku, serta kondisi lingkungan dan kegiatan bisnis yang dijalankan Perusahaan. Pedoman PIB Bersih disosialisasikan kepada seluruh insan Perusahaan melalui media sekaligus informasi yang dimiliki Perusahaan. Pada tahun 2022, telah dilakukan sosialisasi PIB Bersih kepada karyawan di Unit yang juga dilaksanakan melalui agenda coffee morning/meeting rutin serta dalam kegiatan Supplier Gathering Unit.

PIB Bersih Program is one of the Company's efforts in creating a clean, resilient, togethertrusmess industry (clean from all forms of irregularities and fraud including Corruption, Collusion and Nepotism), fulfilling the principles of Good corporate Governance and improving corporate culture as well as supporting sustainable development. The implementation of PIB Bersih involves all organs of the Company, employees, officials and stakeholders. The Company has made a declaration of " PIB Bersih" which was participated by all employees and partners through Supplier Gathering activities on May 9, 2019 at the Head Office.

The implementation of the PIB Bersih Program refers to the PIB Bersih Guidelines determined by the Board of Directors through the Decree of the Board of Directors No. 001.K/DIR/2019/2014. The preparation of PIB Bersih Guidelines also takes into account compliance with applicable laws/regulations, as well as environmental conditions and business activities carried out by the Company. PIB Bersih Guidelines are socialized to all Company personnel through the Company's information channel media. In 2022, Clean 100 has been socialized to employees in the Unit which was routinely carried out through the coffee morning/meeting routine as well as in the Supplier Gathering Unit activities.

Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

Anti-Bribery Management System (ABMS)

Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 merupakan standar yang menjadi panduan untuk organisasi publik, swasta dan nirlaba yang diakui oleh standar internasional sebagai perangkat peraturan yang efektif untuk mencegah penyuapan yang memenuhi peraturan hukum anti penyuapan dan prosedur yang wajar dan proporsional yang berlaku untuk Perusahaan.

Perusahaan berkomitmen untuk menciptakan kondisi perusahaan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme melalui penerapan budaya Perusahaan No Bribery, No Kickback, No Gift, No Luxurious Hospitality yang didukung kerangka kerja pengendalian yang efektif untuk mendeteksi dan meminimalisir praktik penyuapan.

Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan mengacu pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
3. Surat Gubernur BI/APS Nomor 5/170/KEP/2003 pada tanggal 17 Februari 2003 mewajibkan semua BUMN wajib melakukan sertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan dini
4. Peraturan Direksi terkait Kebijakan Manajemen Anti Fraud di Lingkungan PT PLN Nusantara Power (PLN NP).

Perusahaan telah mengimplementasikan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dalam proses bisnis pada industri ketenagalistrikan dengan memastikan kebijakan yang mendukung penerapannya antara lain Pedoman pengendalian gratifikasi, Pedoman Lelang, Pengelola Pengadaan Penanggung Pedoman Dukungan Perusahaan, Kebijakan dan Pedoman Manajemen Risiko, implementasi Integrated Management System (IMS) 2.0. Perusahaan akan berkomitmen untuk selalu melakukan perbaikan berkelanjutan guna peningkatan implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

The Anti-Bribery Management System (ISO 37001:2016) is a standard that serves as a guide for public, private and non-profit organizations that is recognized nationally or internationally as an adequate instrument to prevent the occurrence of bribery (adequate procedures) consist and reasonable bribery that may occur within the Company.

The Company is committed to creating corporate conditions that are free of corruption, collusion and nepotism through the implementation of the No Bribery, No Kickback, No Gift, No Luxurious Hospitality corporate culture supported by an effective control framework to detect and minimize bribery practices.

Implementation of the Anti-Bribery Management System refers to:

1. Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 1999 concerning State Organizations that is Clean and Free from Corruption, Collusion and Nepotism;
2. Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering;
3. Letter of the Ministry of SOEs Number S-170/MBU/02/2003 on February 17, 2003 stating that all SOEs are required to conduct ISO 37001 Anti-Bribery Management System certifications and
4. Board of Directors Regulation related to Anti-Fraud Management Policy within PT PLN Nusantara Power (PLN NP).

The Company has implemented ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (ABMS) in business processes in the electricity industry by issuing policies that support its implementation, including Guidelines for qualification control, Lelang Guidelines, Management of Violation Complaints, Corporate Culture Guidelines, Risk Management Policies and Guidelines, Implementation of the Integrated Management System (IMS) 2.0. The Company will be committed to always make continuous improvements in order to improve the implementation of the Anti-Bribery Management System.

Pengendalian Gratifikasi

Gratification Control

Pengendalian gratifikasi merupakan upaya dalam rangka komitmen Perusahaan terhadap penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) sebagai perwujudan dari implementasi AKHLAK dan peningkatan budaya integritas. Sesuai nilai Perusahaan tersebut, untuk menerima pemberian dalam bentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung dari pihak tertentu, entah berhubungan dengan hubungan kedinasan

Penerapan Pengendalian Gratifikasi mengacu pada Surat Keputusan Direksi No. 001.K/010/DIR/2019 dan diselaraskan dengan Surat Edaran Direksi Nomor 0006/010/DIR/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelaporan dan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Pembangkitan Jawa-Bali. Kebijakan Pengendalian Gratifikasi tersebut diperbaharui dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Direksi dan Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa-Bali Nomor 001.K/010/DIR/2017 dan Nomor 013.K/DK-PJB/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program dan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Pembangkitan Jawa-Bali sebagai bentuk dukungan Dewan Komisaris terhadap program pengendalian gratifikasi. Peraturan SKB tersebut juga menjadi dasar pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Perusahaan.

Kegiatan pengendalian gratifikasi yang telah dilaksanakan Perusahaan, diantaranya Unit Pengendalian Gratifikasi secara berkala kepada Direksi. Kegiatan pengendalian gratifikasi yang dilaksanakan sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan Laporan Penolakan, Penerimaan dan Pemberian Gratifikasi oleh karyawan PLN NP.
2. Penyampaian Laporan Kegiatan UPG Tahun 2021 dan 2022.
3. Penyampaian Himbauan Internalisasi Program Pengadaan Gratifikasi.
4. Partisipasi pada E-Learning Bimbingan Teknis Pengendalian Gratifikasi.
5. Partisipasi UPG dalam Bimbingan Teknis Teknis Implementasi Program Pengendalian Gratifikasi.
6. Koordinasi Persiapan dan Pelaksanaan Survei Assessment Integritas Tahun 2022.
7. Pemberitahuan Larangan Pemberian Parcel/Bingkisan atau hadiah lainnya dalam Hari Raya Keagamaan.
8. Diseminasi Media Sosialisasi Unsur Anti Gratifikasi.
9. Sosialisasi Pengadaan Gratifikasi oleh Admin UPG Unit kepada Karyawan PLN NP.
10. Bimbingan Teknis Aplikasi Compliance Online System (COS) dan Pengelolaan Gratifikasi.
11. Pemberitahuan Larangan Pemberian Parcel/Bingkisan atau hadiah lainnya dalam perayaan Hari Natal dan Tahun Baru 2023.

Gratification control is an effort in maintaining the Company's commitment to the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles as an elaboration of the implementation of AKHLAK and the enhancement of Integrity Culture. All Company personnel are prohibited from receiving parcels and/or gifts in any form, either directly or indirectly, from partners and/or other third parties related to official relations.

The implementation of Gratification Control refers to the Decree of the Board of Directors No. 001.K/010/DIR/2019 and is synchronized with the Circular Letter of the Board of Directors No. 0006/010/DIR/2018 concerning Guidelines for the Implementation of Gratification Reporting and Control within PT Pembangkitan Jawa-Bali. The Gratification Control Policy was updated with a Joint Decree (SKB) of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Pembangkitan Jawa-Bali Number 001.K/010/DIR/2017 and Number 013.K/DK-PJB/2017 concerning Guidelines for the Implementation of Gratification Reporting and Control within PT Pembangkitan Jawa-Bali as a form of support from the Board of Commissioners for the gratification control program. The issuance of this Joint Decree is also the basis for the establishment of the Gratification Control Unit (UPG) in the Company.

Gratification control activities that have been implemented by the Company are reported to the Gratification Control Unit periodically to the Board of Directors. The gratification control activities carried out throughout 2022 are as follows:

1. Management of Rejection, Acceptance and Provision of Gratification Reports by PLN NP employees.
2. Submission of UPG Activity Reports for 2021 and 2022.
3. Submission of the Appeal for Internalization of the Gratification Prevention Program.
4. Participation in E-Learning Technical Guidance on Gratification Control.
5. UPG Participation in Technical Guidance related to the Implementation of the Gratification Control Program.
6. Coordination of Preparation and Implementation of the Integrity Awareness Survey in 2022.
7. Notification of Prohibition of Receiving Parcels/Gifts or other gifts in Religious Holidays.
8. Dissemination of Anti-Gratification Message Socialization Media.
9. Socialization of Gratification Procurement by UPG Unit Admin to PLN NP employees.
10. Technical Guidance on Compliance Online System (COS) Application and Gratification Management.
11. Notification of Prohibition of Receiving Parcels/Gifts or other gifts in commemoration of Christmas Day and New Year 2023.

Unit Pengendalian Gratifikasi telah menerima laporan gratifikasi dari seluruh unit dan anak Perusahaan sepanjang tahun 2022 sebanyak 95 laporan. Laporan tersebut berisi dari 33 Laporan Penelaahan Gratifikasi, 29 Laporan Penerimaan dan 25 Laporan Penolakan Gratifikasi.

The Gratification Control Unit has received 95 gratification reports from all units and subsidiaries throughout 2022. The reports consisted of 33 Gratification Expertise Reports, 29 Acceptance Reports and 25 Gratification Rejection Reports.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

State Official Wealth Report (LHKPN)

LHKPN merupakan laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya dari harta kekayaan wajib LHKPN. Perusahaan menetapkan kebijakan LHKPN melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Direksi dan Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa-Bali Nomor 004.K/021/UMS/2017 tentang Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan PT Pembangkitan Jawa-Bali. Kebijakan LHKPN tersebut mengacu pada:

1. Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
2. Format SUWN No. PDN-SDMUM/0032 Tahun 1971 tentang Perubahan Atas Peraturan Prosedur Dalam Usaha Milik Negara Nomor PER-010/MBU/07/2018 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Usaha Milik Negara;
3. Peraturan Direksi PT PLN Nomor 0574/DIR/2017 tentang Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan PT PLN (Persero).

LHKPN is a report in printed form and/or other forms on the description and details of information regarding assets, personal data, including income, expenditures and other data on the mandatory wealth of LHKPN. The Company determines the LHKPN policy through a Joint Decree (SKB) between the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Pembangkitan Jawa-Bali Number 004.K/021/UMS/2017 concerning Guidelines for the State Official Wealth Report (LHKPN) within PT Pembangkitan Jawa-Bali. The LHKPN policy refers to:

1. KPK Regulation Number 1 of 2020 concerning Amendments to KPK Regulation Number 7 of 2019 concerning Procedures for Registration of Announcements and Examination of State Official Wealth (LHKPN);
2. Regulation of the Minister of SOE's No. PER-10/MBU/08/2021 of 2021 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-03/MBU/07/2018 concerning Reporting the State Official Wealth within the Ministry of State-Owned Enterprises;
3. Regulation of the Board of Directors of PT PLN Number 0574/DIR/2017 concerning Guidelines for the State Official Wealth Report (LHKPN) within PT PLN (Persero).

Tugas Pengelola LHKPN diatur dalam Surat Keputusan Bersama Nomor 004.K/021/UMS/2017 tentang Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan PT Pembangkitan Jawa-Bali. Tugas Pengelola LHKPN di lingkungan PLN sebagai Admin Instansi yang memunyai wewenang khusus terhadap pengelolaan LHKPN yaitu Bidang Hukum Legal dan Kepatuhan pada Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan. Tugas Pengelola LHKPN di Anak Perusahaan sebagai Admin Unit yaitu LHKPN yang memunyai wewenang khusus terhadap pengelolaan LHKPN yaitu Bidang Kepatuhan Kantor Pusat (SS) Bidang kepatuhan kantor pusat berkoordinasi dengan Tugas Kepatuhan unit dan anak perusahaan dan perusahaan asosiasi (AHPH) untuk memberikan kebijakan pelaksanaan pengelolaan LHKPN di masing-masing Unit.

The LHKPN Management function is regulated in a Joint Decree Number 004.K/021/UMS/2017 concerning Guidelines for the State Official Wealth Report (LHKPN) within PT Pembangkitan Jawa-Bali. The LHKPN Management function within PLN as an institutional Admin that has special authority over LHKPN management, namely the Legal and Compliance Risk Department in the Risk Management and Compliance Division. The LHKPN Management function within the Company as an e-LHKPN Unit Admin that has special authority over LHKPN management, namely the Compliance Department at the Head Office. The head office compliance department coordinates with the Compliance function of subs, subsidiaries and associated companies (AHPH) to assist the smooth implementation of LHKPN reporting in each unit.

Koefisien Wajib Lapor LHKPN sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan LHKPN berdasarkan Surat Keputusan Bersama Nomor 05/KB/02/MENPAN/2017 pasal 3 adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris Perusahaan;
2. Direksi Perusahaan;
3. Wakil Direksi/atau yang disetarakan sebagai Direksi atau Komisaris di Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi;
4. Karyawan Perusahaan pada jenjang jabatan strukturasi yang meliputi Manajemen Atas, Manajemen Menengah, Manajemen Dasar dan/atau Supervisi Atas;
5. Karyawan Perusahaan pada jenjang jabatan fungsional yang meliputi Fungsional 1, Fungsional 2, dan Fungsional 3; dan
6. Pejabat Pengadaan Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Pengadaan.

Biro Kepatuhan secara berkala melakukan monitoring untuk mengetahui perubahan jumlah Wajib LHKPN dibandingkan jumlah Wajib LHKPN Perusahaan mengalami perpindahan yang dinamis pada hal pentingnya. Sampai dengan akhir bulan 2022, terdapat 800 wajib LHKPN dengan rincian sebagai berikut:

The LHKPN Obligatory Reporting Officials as stipulated in the LHKPN policy based on the Joint Decree Number 05/KB/02/MENPAN/2017 article 3 are as follows:

1. Board of Commissioners of the Company;
2. Board of Directors of the Company;
3. Representatives of the Company who are assigned as the Board of Directors or Commissioners in Subsidiaries and Affiliated Companies;
4. Employees of the Company at the structural position level which includes Upper Management, Middle Management, Basic Management and Upper Supervisor;
5. Employees of the Company at the functional position level which includes Functional 1, Functional 2, and Functional 3; and
6. Procurement Planning Officer and Procurement Implementing Officer.

The Compliance Department periodically conducts monitoring to find out changes in the number of LHKPN Obligatory due to the number of Company LHKPN Obligatory experiencing dynamic movements in each period. Until the end of 2022, there were 800 LHKPN Obligatory with the following details:

No.	Jenjang Jabatan Position Level	Jumlah Total
1	Direksi dan Komisaris/BOD/BOC*The Board of Directors and the Board of Commissioners of PLN NP	18
2	Manajemen Atas/Upper Management	10
3	Manajemen Menengah/Middle Management	82
4	Manajemen Dasar/Basic Management	331
5	Supervisi Atas/Upper Supervisor	327
6	Supervisi Dasar/Basic Supervisor	10
7	Fungsional 2/Functional 2	21
8	Fungsional 3/Functional 3	117
9	Fungsional 4/Functional 4	12
Jumlah/Total		800

Kepatuhan Perusahaan terhadap pelaporan LHKPN dimonitor oleh Sekretaris Kepatuhan yang melalui e-filing. Penyampaian LHKPN Tahun 2022 kepada KPK telah dilakukan secara tepat waktu oleh 300 Wajib LHKPN melalui e-filing baik awal maupun telah mencapai 100% dari total Wajib LHKPN.

The Company's compliance with LHKPN reporting is monitored by the Compliance Department through e-filing. Submission of the 2022 LHKPN to the KPK has been conducted in a timely manner by 300 LHKPN Obligators through e-filing both early or has reached 100% of the total LHKPN Obligators.

Kebijakan Anti *Fraud*
Anti-Fraud Policy

Perusahaan berkomitmen dalam menjalankan setiap proses bisnis secara benar, transparan dan akuntabel dengan meningkat kepuh penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) di lingkungan kerja Perusahaan. Perusahaan telah melakukan ratifikasi peraturan kebijakan Anti Fraud PT PLN (Persero) yang diatur dalam Surat Keputusan Bersama antara Direksi dan Dewan Komisaris PT ITB Nomor 001.K/021/DIR/2020 dan Nomor 003.K/DK-PKS/2020 tentang Kebijakan Anti Fraud di Lingkungan PT ITB. Dengan diberlakukannya Kebijakan Anti Fraud, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas implementasi Standar Etika Perusahaan.

The Company is committed to carrying out every business process in a clean, transparent and accountable manner by upholding the implementation of the principles of Good Corporate Governance (GCG) within the Company. The Company has ratified PT PLN (Persero) Anti-Fraud policy regulations stipulated in the Joint Decree between the Board of Directors and Board of Commissioners of PT ITB Number 001.K/021/DIR/2020 and Number 003.K/DK-PKS/2020 concerning Anti-Fraud Policy within PT ITB. With the determination of this Anti-Fraud Policy, it is expected to be able to encourage the effectiveness in the implementation of the Code of Conduct.

Benturan Kepentingan

Conflict of Interest

Perusahaan mechatikan bahwa setiap keputusan dan/atau tindakan yang ambil dalam menjalankan bisnis Perusahaan dilakukan semata-mata demi kepentingan dan kelangsungan Perusahaan. Oleh karena itu, Perusahaan mendefinisikan benturan terkait benturan kepentingan. Benturan kepentingan merupakan situasi dimana terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomi Perusahaan dengan kepentingan ekonomi pribadi/golongan. Insan Perusahaan sehingga dapat mempengaruhi kinerja Perusahaan dan merimbulkan kerugian Perusahaan.

The Company ensures that every decision-maker action taken in carrying out the Company's business is conducted solely for the interest and sustainability of the Company. Therefore, the Company determines the processes related to conflict of interest. Conflict of interest is a situation where there is a difference between the economic interests of the Company and the economic interests of the Company's personnel/group of personnel/or parties that can affect the Company's performance and cause losses to the Company.

Perusahaan telah memerlikan kebijakan terkait benturan kepentingan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi PT PJB Nomor: 004.K/010/DIR/2020 dan 004.K/DIR/DEK/2020 tentang Pengelolaan Benturan Kepentingan di Lingkungan PT PJB.

The Company has issued a policy related to conflict of interest outlined in the Joint Decree between the Board of Directors and Board of Commissioners of PT PJB Number: 004.K/010/DIR/2020 and 004.K/DIR/DEK/2020 concerning Management of Conflict of Interest within PT PJB.

Pencegahan terdapat benturan kepentingan di Perusahaan juga dilakukan dengan penyampaian Pakta Integritas setiap tahun oleh insan Perusahaan yang berisikan pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan dan akan menjaga/menangani benturan kepentingan sehingga tidak merimbulkan kerugian bagi Perusahaan.

Prevention of conflicts of interest in the Company is also conducted by submitting an Integrity Pact every year by Company personnel, which contains a statement that there is no conflict of interest and will prevent/handle conflicts of interest so as not to cause losses to the Company.

Dalam hal, seluruh Direksi dan Dewan Komisaris yang mempunyai harus menandatangani Pakta Integritas yang disampaikan secara berkala setiap tahun. Selain dengan penyelesaian tersebut, Dewan Komisaris dan Direksi harus mengindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun tidak terkecuali oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan dari segala pengaruh atau tekanan sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus menghindari melakukan/ciptakan kepentingan ekonomi Perusahaan diatas kepentingan ekonomi pribadi atau keluarga, maupun pihak lainnya. Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi yang memiliki potensi benturan kepentingan tidak diperkenankan ikut serta dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan Perusahaan.

In addition, all serving Board of Directors and Board of Commissioners are required to sign an Integrity Pact which is renewed annually. In line with this statement, the Board of Commissioners and Board of Directors must avoid domination by any party, not be influenced by certain interests, free from conflict of interest and from any influence or pressure, so that decision making can be carried out objectively. Members of the Board of Commissioners and Board of Directors in carrying out their duties and obligations, must always prioritize the economic interests of the Company over the economic interests of their personal or family, or other parties. Members of the Board of Commissioners and Members of the Board of Directors who have a potential conflict of interest are not allowed to participate in the discussion and decision-making process of the Company.

Whistleblowing System

Sistem pelaporan pelanggaran atau Whistleblowing System (WBS) merupakan perangkat pendukung implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam rangka penegakan Standar Etika Perusahaan. Penerapan sistem pelaporan pelanggaran menjadi bagian dari upaya Perusahaan dalam pengelolaan risiko khususnya terkait risiko pelanggaran etika bisnis.

The Whistleblowing System (WBS) is a supporting tool for the implementation of Good Corporate Governance in the context of upholding the Code of Conduct. The implementation of the whistleblowing system is part of the Company's efforts in risk management, especially related to the risk of violations of business ethics.

Pedoman penerapan Whistleblowing System (WBS) telah ditetapkan pada tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Direksi (SKD) antara Direksi dan Dewan Komisaris Nomor: 004.K/057/DIR/2020 dan Nomor: 907.K/DIR.HRD/2020 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) sebagai penyempurna atas Keputusan Direksi Nomor 065.K/DIR/2017. Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) mengkomunikasikan kepada pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal melalui media komunikasi resmi (website, media elektronik, dll) serta forum tatap muka (Townhall Group Discussion, Supplier Gathering, Customer Gathering, dll).

Guidelines for the implementation of the Whistleblowing System (WBS) have been determined in 2020 based on the Joint Decree (SKD) between the Board of Directors and Board of Commissioners Number: 004.K/057/DIR/2020 and Number: 907.K/DIR.HRD/2020 concerning the Whistleblowing System as an update to the Decree of the Board of Directors Number 065.K/DIR/2017. The Whistleblowing System policy is socialized to both internal and external stakeholders through official communication media (website, electronic media, etc.), as well as face-to-face forums (Townhall Group Discussion, Supplier Gathering, Customer Gathering, etc.).

Pengelola Pelaporan Pengaduan Pelanggaran

Whistleblowing Manager

Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran mengatur bahwa WBS dikelola oleh Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran. Pelanggaran lebih lanjut atas laporan pelanggaran khususnya yang dilakukan oleh Karyawan dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pelanggaran (Employee Fact Finding Team/EFFT).

1. Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran
   a. Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran dibentuk dengan Keputusan Direksi yang beranggotakan fungsi pengawasan internal, fungsi hukum dan fungsi kepatuhan.
   b. Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran bertugas untuk mengelola pelaporan/pengaduan pelanggaran, antara lain:
      1) Menerima pelaporan pelanggaran;
      2) Melakukan verifikasi;
      3) Menganalisa dan menyiapkan laporan pelanggaran untuk kemudahan pihak berkenaan dalam mengelola lebih lanjut;
      4) Bertanggung jawab atas pelaksanaan program perlindungan Pelapor sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Perusahaan, terutama aspek kerahasiaan dan jaminan keamanan Pelapor. Untuk kepentingan ini anggota Komite Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran mendapat akses terhadap bantuan hukum, keuangan dan operasional jika diperlukan.

   Dalam menjalankan tugas Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran dapat meminta bantuan kepada fungsi lain sesuai objek pelaporan pelanggaran jika diperlukan.

The Whistleblowing System Policy regulates that the WBS is managed by the Whistleblowing Management Committee. Further handling of violation reports especially those committed by Employees is conducted by the Employee Discipline Violation Inspection Team (EFFT).

1. Whistleblowing Management Committee
   a. The Whistleblowing Management Committee was established by the Board of Directors' Decree with members from the internal control function, legal function and compliance function.
   b. The Whistleblowing Management Committee is tasked with managing reporting/complaints of violations, among others:
      1) Receiving reports of violations;
      2) Verifying;
      3) Analyzing and preparing reports of violations to decide violations further investigation is necessary;
      4) Responsible for the implementation of the Whistleblower protection program in accordance with the policies that have been determined by the Company, especially the aspects of confidentiality and security guarantees of the Whistleblower. For this purpose, members of the Whistleblowing Management Committee receive access to legal, financial and operational assistance if needed.

   In carrying out its duties, the Whistleblowing Management Committee may request assistance from other departments/ functions in accordance with the object of whistleblowing if necessary.

c. Anggota Komite Pengarah Pimpinan Pelanggaran juga mendapatkan akses pelaporan langsung kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

2. Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Karyawan (TPDK)
   a. TPDK bertugas untuk menindaklanjuti penerimaan pelaporan dengan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap substansi pelanggaran yang dilakukan oleh Karyawan. Dalam melakukan tugasnya, TPDK berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang Perakuan Disiplin Karyawan Perusahaan.
   b. Dalam hal pemeriksaan terbukti adanya pelanggaran, maka TPDK memberikan rekomendasi sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Yang Berwenang Memberikan Sanksi (PYBMS). Jika Terlapor adalah Karyawan Kantor Pusat, maka PYBMS adalah Direktur SDHC dan Administrasi. Jika Terlapor adalah Karyawan Unit, maka PYBMS adalah Pimpinan Unit.

c. Members of the Whistleblowing Management Committee also receive direct reporting access to the President Director and the Board of Commissioners.

2. Employee Disciplinary Violation Inspection Team (TPDK)
   a. The TPDK has the function to follow up the receipt of reports by conducting further inspection of the violations/substance committed by Employees. In conducting its duties, the TPDK is guided by the provisions governing the Company's Employee Disciplinary Regulations.
   b. In the event that the inspection process that there is a violation, the TPDK provides recommendations for sanctions against the violations committed to be decided by the Authorized Officer to Give Sanctions (PYBMS). If the Reported Party is a Head Office Employee, the PYBMS is the Director of SDHC and Administration. If the Reported Party is a Unit Employee, the PYBMS is the Unit Leader.

Sarana dan Proses Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran
Facilities and Follow-up Process for Whistleblowing

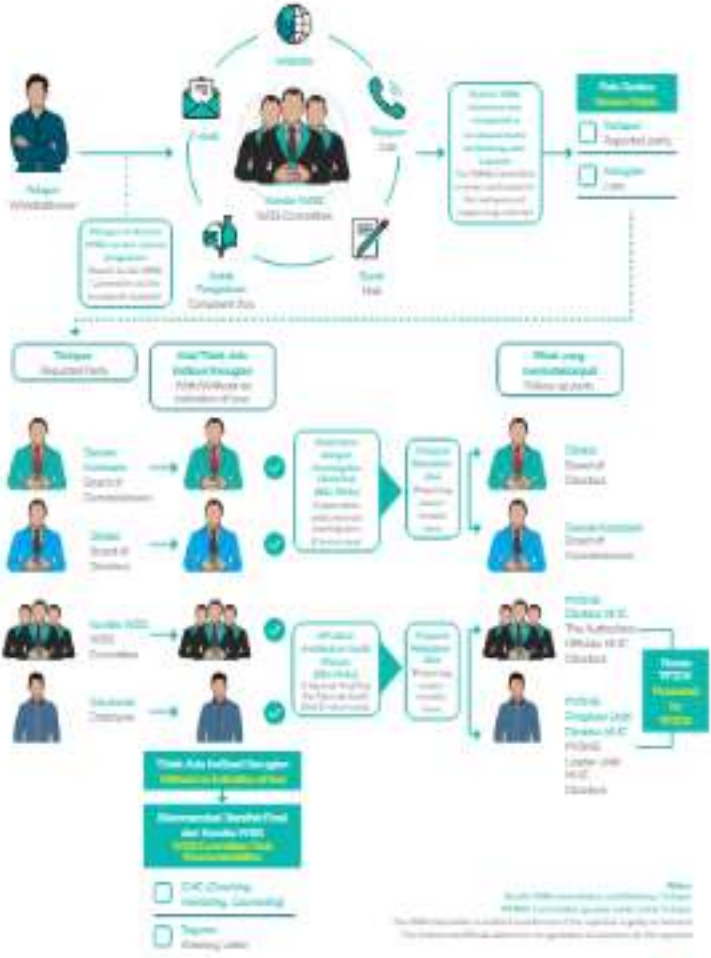

Sarana Pelaporan Pelanggaran

Means of Whistleblowing

1. Perusahaan wajib menerima laporan pelanggaran dari pihak internal maupun eksternal, baik dari Pelapor yang mencantumkan identitas maupun yang tidak (anonim). Semua laporan yang diterima wajib diproses lebih lanjut sepanjang dapat memberikan bukti-bukti kuat, dapat ditelusuri/ditindaklanjuti serta tidak mengarah kepada fitnah.
2. Pelaporan pelanggaran wajib disampaikan secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dan disertai bukti pendukung yang berkaitan dengan pelanggaran, sekurang-kurangnya:
   a. Pelanggaran yang dilaporkan;
   b. Pihak yang terlibat/Terlapor;
   c. Waktu terjadinya pelanggaran;
   d. Tempat terjadinya pelanggaran;
   e. Bagaimana kejadiannya.
3. Saluran yang tersedia untuk melaporkan pelanggaran adalah:
   a. Surat menyurat dengan alamat:
      Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran
      PT PLN Nusantara Power
      Jalan Kembang Baru No.11 Surabaya 60235 Indonesia
   b. Kotak Pengaduan:
      1). Gedung PT PLN Nusantara Power Kantor Pusat;
      2). Gedung Kekomitmenan seluruh Unit Kerja
   c. Website dengan alamat: https://www.plnnusantarapower.co.id/wbs/
   d. Email dengan alamat: pengaduan@plnnusantarapower.co.id;
   e. Telepon/SMS/WhatsApp dengan nomor 081133888168.
   Laporan pelaporan di Unit Kerja dikelola oleh Unit Kerja dan diteruskan secara periodik ke Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran.
4. Untuk memfasilitasi proses komunikasi dan konfirmasi dapat dilakukan dengan cara:
   a. Tatap muka langsung;
   b. Telepon langsung;
   c. Email langsung;
   d. Surat menyurat/kotak pos langsung;
   e. Sarana komunikasi lainnya.

1. The Company is required to receive violation reports from internal and external parties, both those identified/known (who include their identity and those who do not anonymous). All reports received must be processed further as long as they can provide strong evidence, can be accounted for and do not lead to defamation.
2. Violation reporting must be submitted in a clear and accountable manner and accompanied by supporting evidence relating to the violations, including:
   a. Reported violations;
   b. The party involved/reported party;
   c. Time of occurrence of the violation;
   d. The place where the violation occurred;
   e. How the violation occurred.
3. Channels available to report violations are:
   a. Correspondence with address:
      Whistleblowing Management Committee
      PT PLN Nusantara Power
      Jalan Kembang Baru No.11 Surabaya 60235 Indonesia
   b. Complaint Box:
      1). PT PLN Nusantara Power Head Office Building;
      2). Implementation Building at all Work Units
   c. Website with the address https://www.plnnusantarapower.co.id/wbs/
   d. Email with the address pengaduan@plnnusantarapower.co.id;
   e. Phone/SMS/WhatsApp with the number 081133888168.
   The reporting channel in the Work Unit is managed by the Work Unit and communicated periodically to the Whistleblowing Management Committee.
4. To facilitate the communication and clarification process, it can be conducted by:
   a. Face-to-face visits;
   b. Telephone; another
   c. Email; and/or
   d. Correspondence/mail box; and/or
   e. Other means of communication.

Proses Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran
Follow-up Process of Whistleblowing

1. Laporan pelanggaran ditujukan ke Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran melalui saluran pelaporan yang tersedia.
2. Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran melaksanakan verifikasi untuk selanjutnya memutuskan perlu tidaknya dilakukan investigasi lebih lanjut atas laporan pengaduan pelanggaran dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari.
3. Apabila hasil verifikasi menyatakan bahwa laporan pelanggaran tidak benar, tidak sesuai fakta, dan tidak ada bukti pemulaan yang cukup, maka tidak akan diproses lebih lanjut. Apabila hasil verifikasi menyatakan adanya indikasi pelanggaran (sesuai fakta) yang disertai bukti pemulaan yang cukup, maka pengaduan dapat diproses ke tahap investigasi.

4. Dalam proses verifikasi dan penentuan tindak lanjut, Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran mengklasifikasikan Terlapor sebagai berikut:
   a) Jika Terlapor adalah Karyawan
      1) Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran melakukan verifikasi, mengambil inisiatif bukti serta usulan rekomendasi kepada FYDAS untuk proses lebih lanjut. Usulan rekomendasi dapat berupa pemberikan lebih lanjut oleh FYDAS jika jenis pelanggaran memiliki indikasi fraud.
      2) Jika tidak ada indikasi fraud maka usulan rekomendasi dapat berupa Coaching Mentoring Counseling (CMC) dan teguran kepada Terlapor yang bersangkutan.
      3) Apabila berdasarkan pertimbangan jenis pelanggaran bersifat kompleks, unik dan memerlukan analisa lebih mendalam, maka Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran dapat meminta kepada Direksi untuk menugaskan SPI melakukan audit khusus terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh FYDAS sesuai ketentuan yang berlaku.
   b) Jika Terlapor adalah Direksi
      1) Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran melakukan verifikasi, mengambil inisiatif bukti serta usulan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk proses lebih lanjut.
      2) Dewan Komisaris melakukan proses lebih lanjut terhadap pengaduan pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi, termasuk melakukan pula koordinasi dengan Investigasi Eksternal. Hasil proses lebih lanjut ini disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham.

4. Violation reports are addressed to the Whistleblowing Management Committee through the available reporting channels.
5. The Whistleblowing Management Committee conducts verification to further decide whether or not further investigation of the whistleblowing report is necessary within 30 (thirty) days and can be extended for a maximum of 30 (thirty) days.

6. If the verification results show that the violation report is not true, not in accordance with the facts and there is insufficient preliminary evidence, it will not be processed further. If the verification results show that there are indications of violations (according to the facts) accompanied by sufficient preliminary evidence, the complaint can be processed to the investigation stage.

7. In the process of verification and determination of follow-up, the Whistleblowing Management Committee classifies the Reported Party as follows:
   a) If the Reported Party is an Employee
      1) The Whistleblowing Management Committee conducts verification, reports case summaries and proposed recommendations to the FYDAS for further processing. Proposed recommendations can be in the form of further inspection by the FYDAS if the type of violation has indications of fraud.
      2) If there is no indication of fraud, the proposed recommendation can be in the form of Coaching Mentoring Counseling (CMC) and a warning to the employee concerned.
      3) If based on the consideration of the type of violation is complex, complicated, and requires a more in-depth analysis of evidence, the Whistleblowing Management Committee may request the Board of Directors to assign the SPI to conduct a special audit first before further inspection by the FYDAS in accordance with applicable provisions.
   b) If the Reported Party is the Board of Directors
      1) The Whistleblowing Management Committee conducts verification, reports case summaries and proposed recommendations to the Board of Commissioners for further processing.
      2) The Board of Commissioners conducts further processing of the whistleblowing conducted by the Board of Directors (including deciding whether or not to cooperate with External Investigators). The results of this further process are reported by the Board of Commissioners to the Shareholders.

c) Jika Terlapor adalah Dewan Komisaris

1) Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran melakukan verifikasi, melaporkan laporan kasus serta usulan rekomendasi kepada Direksi untuk proses lebih lanjut.

2) Direksi melakukan proses lebih lanjut terhadap pelaporan pelanggaran yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, termasuk memutuskan pihak lainnya bekerjasama dengan investigator eksternal. Hasil proses lebih lanjut akan disampaikan oleh Direksi kepada Pemegang Saham.

d) Jika Terlapor adalah Organ Pendukung Dewan Komisaris

1) Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran melakukan verifikasi, melaporkan laporan kasus serta usulan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk proses lebih lanjut.

2) Dewan Komisaris melakukan proses lebih lanjut terhadap pelaporan pelanggaran yang dilakukan oleh Organ Pendukung Dewan Komisaris, termasuk memutuskan pihak lainnya bekerjasama dengan investigator Eksternal.

e) Jika Terlapor adalah Anggota komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran.

Apabila yang dilaporkan melakukan pelanggaran adalah Anggota Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran maka yang bersangkutan harus diberhentikan untuk sementara waktu menunggu hasil verifikasi dan investigasi. Apabila tidak terbukti maka yang bersangkutan akan diaktifkan kembali, namun apabila terbukti maka Direksi dapat melakukan penggantian keanggotaan Komite.

f. Apabila hasil investigasi terbukti adanya pelanggaran yang mengarah ke tindak pidana, maka dapat ditindaklanjuti dengan proses hukum yang berlaku kepada lembaga penegak hukum dengan Direksi atau Pejabat Lain yang diberi kuasa oleh Pemegang Saham sebagai Pejabat Pemberi Perkara.

c) If the Reported Party is the Board of Commissioners

1) The Whistleblowing Management Committee conducts verification, reports case summaries and proposed recommendations to the Board of Directors for further processing.

2) The Board of Directors conducts a further process of the whistleblowing conducted by the Board of Commissioners including deciding whether or not to cooperate with External Investigators. The results of this further process are reported by the Board of Directors to the Shareholders.

d) If the Reported Party is a Supporting Organ of the Board of Commissioners

1) The Whistleblowing Management Committee conducts verification, reports case summaries and proposed recommendations to the Board of Commissioners for further processing.

2) The Board of Commissioners conducts further processing of the whistleblowing conducted by the Supporting Organ of the Board of Commissioners, including deciding whether or not to cooperate with External Investigators.

e) If the Reported Party is a Member of the Whistleblowing Management Committee.

If the person reported to have committed a violation is a Member of the Whistleblowing Management Committee, then the person concerned must be temporarily deactivated until the results of verification and investigation. If not proven then the person concerned will be reactivated. However, if proven, the Board of Directors may replace the Committee membership.

f. If the results of the investigation prove that there is a violation that leads to a criminal offense, it can be followed-up with the applicable legal process to law enforcement agencies with the Board of Directors or Other Officials authorized by the Shareholders or the Case Handover Officer.

Perlindungan Terhadap Pelapor
Whistleblower Protection

Semua laporan pelanggaran akan dijamin kerahasiaan dan kesimpanannya oleh Perusahaan. Pengelolaan kerahasiaan identitas Pelapor dilakukan dengan standar tertinggi, sehingga dapat dijaga kerahasiaannya secara permanen, kecuali dalam hal proses hukum memerlukan dibukanya identitas Pelapor sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Confidentiality and security of all violation reports will be guaranteed by the Company. The confidentiality management of the Whistleblower's identity is conducted with maximum standards, so that the confidentiality can be maintained permanently, except in the event that the legal process requires the disclosure of the Whistleblower's identity in accordance with applicable legal provisions.

Perusahaan berkomitmen untuk melindungi Pelapor pelanggaran yang beritikad baik sebagai upaya untuk mendorong terjadinya pengelolaan pengaduan dan menjamin keamanan Pelapor maupun keluarganya. Perusahaan akan patuh terhadap segala peraturan perundangan yang terkait serta best practices yang berlaku dalam penyelenggaraannya WBS.

1. Jika Pelapor adalah pihak internal Perusahaan, maka akan mendapatkan perlindungan standar dari Perusahaan terhadap perlakuan yang merugikan seperti:
   a. Pemutusan yang tidak adil;
   b. Penurunan jabatan atau pangkat;
   c. Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuk;
   d. Ancaman-ancaman dalam bentuk lainnya.
2. Jika Pelapor adalah pihak eksternal Perusahaan, maka akan mendapatkan perlindungan standar dari Perusahaan terhadap perlakuan yang merugikan atau tindakan balasan dari Terlapor atau Organisasi seperti:
   a. Diskriminasi dalam kerjasama usaha;
   b. Diskriminasi dalam pemberian pelayanan.
3. Jika Pelapor adalah Justice Collaborator, maka akan mendapatkan perlindungan standar dari Perusahaan terhadap perlakuan yang merugikan atas laporan yang disampaikan. Apabila dalam proses investigasi Pelapor terbukti ikut bersalah dalam pelanggaran yang dilaporkan, maka keterlibatannya dapat dijadikan pertimbangan yang meringankan terhadap sanksi yang akan dijatuhkan sesuai PKB dan/atau PDBS.
4. Selain perlindungan di atas, untuk Pelapor yang beritikad baik, Perusahaan juga akan memberikan perlindungan hukum (jika diperlukan) sebagaimana diatur pada pasal 1 dan pasal 10 Undang-Undang No.31 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan pasal 13 Peraturan Pemerintah No.61 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Penegakan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:
   a. Perlindungan dari tuntutan pidana dan/atau perdata;
   b. Perlindungan atas keamanan pribadi, termasuk keluarga Pelapor dan properti milik dan/atau mereka;
   c. Perlindungan terhadap harta Pelapor;
   d. Pelaksanaan dan pemanasan identitas Pelapor dirahasiakan;
   e. Pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan Terlapor pada setiap tingkat pemeriksaan perkara dalam hal pelanggaran tersebut masuk pada lingkup pengadilan.

Dan diperlukan, Pelapor juga dapat meminta bantuan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagaimana diatur pada pasal 1, pasal 10 dan pasal 28 ayat (3) Undang-Undang No.31 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

The Company is committed to protecting Whistleblowers who act in good faith as an effort to encourage the occurrence of whistleblowing and ensure the safety of the Whistleblowers and his/her family. The Company will comply with all relevant laws and regulations as well as best practices applicable in the implementation of the WBS.

1. If the Whistleblower is an internal party of the Company, he/she will receive standard protection from the Company against adverse treatment such as:
   a. Unfair dismissal;
   b. Demotion or position or rank;
   c. Harassment or discrimination in all forms;
   d. Adverse remarks in the personnel file record.
2. If the Whistleblower is an external party of the Company, he/she will receive standard protection from the Company against adverse treatment or retaliation from the Reported Party or an Organization such as:
   a. Discrimination in business cooperation;
   b. Discrimination in the provision of services.
3. If the Whistleblower is a Justice Collaborator, he/she will receive standard protection from the Company against adverse treatment of the report submitted. If in the investigation process the Whistleblower is proven to be guilty of the reported violation, his/her testimony can be used as a lightened consideration for the sanction recommended by the TTPDR or the PKB/PDBS.
4. In addition to the above protection, for Whistleblowers who act in good faith, the Company will also provide legal protection (if needed) as stipulated in article 1 and article 10 of Law No. 31 of 2014 concerning Amendments to Law No. 13 of 2006 concerning Witness and Victim Protection and article 13 of Government Regulation No. 61 of 2010 concerning Procedures for Implementing Community Participation and Awarding in the Prevention and Eradication of Corruption, namely:
   a. Protection from criminal and/or civil claims;
   b. Protection of personal security, and/or the Whistleblower's family from physical and/or mental threats;
   c. Protection of the Whistleblower's property;
   d. Confidentiality and disguise the identity of the Whistleblower; and/or
   e. Providing information without meeting face to face with the Reported Party at every level of case inspection in the event that the violation is included in a court dispute.

If necessary, the Whistleblower can also request assistance from the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) as stipulated in Article 1, Article 10 and Article 28 paragraph (3) of Law No. 31 of 2014 concerning Amendments to Law No. 13 of 2006 concerning Witness and Victim Protection.

Pengaduan dan Penanganan Pelaporan
Complaints and Reporting Handling

Pengaduan yang masuk melalui WBS sepanjang tahun 2022 berjumlah 3 (tiga) pengaduan. Pengaduan yang masuk ke tahap tindak lanjut berdasarkan hasil verifikasi sebanyak 3 (tiga) laporan pelanggaran. Penanganan pengaduan yang masuk ke tahap tindak lanjut adalah sebagai berikut:

Complaints received through the WBS throughout 2022 were 3 (three) complaints. Complaints that entered the follow-up stage based on the verification results were 3 (three) violation reports. The handling of reports that enter the follow-up stage is as follows:

Penanganan Pelaporan Tahap Tindak Lanjut
Handling of Follow-up Stage Reporting

No.	Kategori Pelapor Category of Whistleblowers	Kategori Laporan Pelanggaran Category of Violation Report	Tindak Lanjut Pengaduan Complaint Follow-up	Status Tindak Lanjut Follow-up Status
1	Anonim Anonymous	Pelanggaran SOP Pelaksanaan terkadang terlalu lama dan pengadaan barang dan jasa, pemberian reimbursi dan remunerasi Violations of the Company's SOPs mainly related to procurement of goods and services, provision of benefits and remuneration	Bahwa WBS telah melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor dan Pihak Terkait. The WBS Committee has confirmed and clarified to the Whistleblower, Reported Party and Related Parties.	Selesai Completed
2	Anonim Anonymous	Pelanggaran SOP Pelaksanaan terkadang terlalu lama dan pengadaan barang dan jasa, pemberian reimbursi dan remunerasi Violations of the Company's SOPs mainly related to the procurement of goods and services, provision of benefits and remuneration	Bahwa WBS telah melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor dan Pihak Terkait. The WBS Committee has confirmed and clarified to the Whistleblower, Reported Party and Related Parties.	On progress tindak lanjut On progress follow-up
3	Anonim Anonymous	Pelayanan Menegah Turun Unlawful Acts	Bahwa WBS telah melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor dan Pihak Terkait. The WBS Committee has confirmed and clarified to the Whistleblower, Reported Party and Related Parties.	On progress tindak lanjut On progress follow-up

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan *Whistleblowing System*
Monitoring and Evaluation of the *Whistleblowing System* Implementation

Pelaporan Whistleblowing System dimonitoring secara berkala dalam rangka memastikan efektivitas kebijakan Whistleblowing System berdasarkan laporan berkala yang disusun oleh Komite Pengelola Pelanggaran. Laporan berkala pelaksanaan Whistleblowing System disampaikan setiap semester kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris untuk dievaluasi sebagai bentuk akuntabilitas Whistleblowing System mencakup hasil penerimaan laporan pelanggaran dan tindak lanjut dari pelaporan tersebut serta pelaksanaan rencana kerja dan program sosialisasi WBS oleh Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran.

The implementation of the Whistleblowing System is monitored periodically in order to ensure the effectiveness of the Whistleblowing System policy based on periodic reports prepared by the Whistleblowing Management Committee. Periodic reports on the implementation of the Whistleblowing System are submitted every semester to the President Director and the Board of Commissioners to be evaluated as a form of accountability for the Whistleblowing System, including the results of receiving violation reports and follow-up on those reports as well as the implementation of work plans and WBS socialization programs by the Whistleblowing Management Committee.

Perkara Hukum dan Sanksi yang Dikenakan Kepada Perusahaan

Legal Cases and Sanctions Imposed on the Company

Perusahaan mengantisipasi dan memastikan agar tidak terjadi gugatan atau perkara hukum yang berdampak pada citra atau kinerja Perusahaan dan Grup PLN (Persero) secara Konsolidasian. Perkara hukum tersebut meliputi gugatan perkara hukum litigasi dan non-litigasi yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, serta anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perusahaan atas ketentuan regulator yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang dijalankan Perusahaan terus ditingkatkan guna menghindari adanya sanksi yang dikenakan kepada Perusahaan. Perusahaan senantiasa melakukan monitoring dan membuat laporan kasus hukum litigasi dan non-litigasi yang dihadapi Perusahaan secara berkala setiap triwulan.

The Company anticipates and ensures that there are no lawsuits or legal cases that have an impact on the image or results of the Company and PLN (Persero) Group on a Consolidated basis. Such legal cases include litigation and non-litigation legal cases being faced by the Company, its subsidiaries, as well as members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors. Compliance with regulatory provisions relating to the business activities carried out by the Company continues to be improved in order to avoid sanctions given to the Company. The Company continuously monitors and makes reports on litigation and non-litigation legal cases faced by the Company periodically every quarter.

Perkara Hukum

Legal Cases

Permasalahan hukum dapat timbul terkait dengan proses pengadaan yang ada di Perusahaan, dalam adanya pengaduan perdata dan sebagai akibat dari adanya dugaan tindak pidana yang terkait dengan proses bisnis Perusahaan. Selama tahun 2022, kasus hukum yang dihadapi Perusahaan adalah sebagai berikut:

Legal issues may arise related to the Company's licensing process, due to civil disputes and as a result of alleged criminal offenses related to the Company's business processes. During 2022, the legal cases faced by the Company were as follows:

Jumlah Perkara Hukum Perusahaan
Number of Company Legal Cases

Jenis Perkara Type of Case	Total	Jumlah Telah Memperoleh Putusan Hukum Tetap Total Number of Cases that Have Obtained Permanent Legal Force	Proses Penyelesaian Settlement Process
Perkara Perdata Administrasi Civil Administration Cases	2	0/2	2
Kasus Korupsi Corruption Cases	-	-	-
Kasus Hubungan Industrial Industrial Relations Cases	-	-	-
Kasus Lain-lain Other Cases	-	-	-

Penyelesaian Perkara Hukum Perusahaan
Settlement of Company Legal Cases

Pihak Pihak Parties	Pokok Perkara Subject Matter of Case	Status Perkara Case Status	Dampak Keuangan Financial Effect	Pengaruh Terhadap Perusahaan Effect/Impact on Company
Gugatan Perbuatan Melawan Hukum No. 21/Pdt.G/2019/PN.Unh Penggugat: 1. Ir. Donald Hansaring, MA Tergugat: 1. Sudirwan Surentio 2. PT PLN (Persero) cq PT PLN UP	Ketua Lembaga Ombudsman (DLH) Ir. Donald Hansaring, MA (Penggugat) mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Cilacap atas nilai sebesar 11.318 m³ yang telah dipanen dan dijual PLN dan PT SGI oleh Direksi yang telah Turut sebagai para pihak UP Nusa Tawur dalam sebagai milik yang kemungkinan kembali ke Desa. Terhadap dalam tersebut, PT PLN (Persero) telah mendistribusikan bantuan sebesar 20% dari investigasi dan bantuan oleh Kuasa Pengguna (KPA) dan Bupati ke Sumatera ("Tergugat I") dengan nomor 402.3/8 yang memutuskan telah terindikasi dengan adil PT PLN UP Nusa Tawur. Pada 9 2021 Ir. Donald Hansaring, et al. ("Plaintiffs") filed a civil lawsuit at the Cilacap District Court No. 11/Pdt.G/ whose that has been ruled by PLN and PT PLN Nusa Tawur Generating Unit or a geographical Nusa Tawur PLN, which was recognized as the relevant property located in Desa. Through the case, PT PLN (Persero) has acquired together with SPPB and effective a right to Dolar (nCB) Certificate from Sudirwan Surentio ("Defendant 1") with HGB Number 222 which that the land is managed by PT PLN Nusa Tawur. It is	Pada Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim memutuskan Gugatan Penggugat (Ombudsman Penggugat) mengajukan Banding kepada Pengadilan Tinggi, atas Banding dengan nilai Banding Tingkat Banding memutuskan Banding tersebut. Putusannya Penggugat mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung dengan Putusan memutuskan pembatalan Kasasi Penggugat. Status perkara saat ini Penggugat telah mengajukan upaya Kasasi Peninjauan Kembali dan menunggunya putusan. On the Court of First Instance, the Panel of judges rejected the Plaintiff's Lawsuit. They the Plaintiff filed an Appeal to the State and High Court with the result that the Appeal Level Panel of judges rejected the Appeal. Furthermore, the Plaintiff filed a Cassation to the Supreme Court with the Decision rejecting the Plaintiff's Cassation application. The latest status of the case is that the Plaintiff has filed a Judicial Review and is waiting for the results of the decision.	Hingga saat ini belum ada dampak keuangan karena perkara ini masih dalam proses pemeriksaan pada tingkat Pengadilan Negeri dan Tinggi. Dan Banding Kondisi (PK) serta saat ini telah terkualifikasi dengan Tuntutan Pengadilan sebanyak sebagai dengan sebanyak pada PN. Management has carried out the entire series of 2019 provisions. In the Cyta Lawsuit, Canadian Appeal and Judicial Review PTC and is currently conferring to coordinate with the and Court Registrar and the Arbitration Arbitrator.	Agaba Gugatan Penggugat Warga, atas PT PLN (Persero) Kasa Interbank Gold sebagai kepala Para Penggugat sesuai Rp 10.836.355.300,- dapat telah Rp sebuah dengan atau Rp sebuah sesuai pas rupiah. If the Plaintiff's claim is accepted, PT PLN (Persero) must pay compensation to the Plaintiffs amounting to Rp 10,836,355,300,- (Ten thousand eight hundred thirty-six million rupiah).

Pihak Pihak Parties	Posisi Perkara Duduk Perkara	Amar Putusan Court Order	Upaya Hukum Management Effort	Pengaruh Kasus Terhadap Perusahaan Affected Case Company
Sugatan Verhaplan Hamurat Hakan No. 11 Pan 2.0023 Ma 2022 Penggugat: 1. Otoritas PT HB Tergugat: 1. Komisaris PT HB 2. PT PLN (UP Pelabuhan) Intervensi Tergugat: Lian No. 3.1 Ma 2022/PDN/2022 Turut HB: 1. Direksi PT Direksi di PT HB Referensi: 1. Commissioner of PT HB 2. PT PLN (UP Pelabuhan 2.1)	Sidang PT HB merupakan salah satu perusahaan yang dibina proses Pengadaan. Direksi 12.000 Tol. UP Pelabuhan. Pada saat saat dilakukan sebagai pemenang tahap terdapat surat dari Komisaris PT HB yang menyatakan pembatalan sebelum Direksi PT HB dan pengadaan. Air PT HB dan proses tahap. Setelah dilakukan konfirmasi kepada PT HB dan dalam tenderisasi surat tersebut. Berdasarkan Pada Pengadaan PLN pada PT HB dijadikan surat adalah mesin 33 Bulan Setelah tahap dilakukan PLN (L.3 PT HB sebagaimana Dalam tersebut adanya dalil dan pelaksanaan sebelum dan Intervensi dari diperkenankan surat adalah tersebut Dalam PT HB mengajukan gugatan kepada Kejaksaan PT HB dan PT PLN UP Pelabuhan. Dalam PT HB ini sesuai dengan Gugatan 12.000 Tol Pelabuhan Intervensi. Untuk hal ini dikarenakan di dalam sidang di tol tersebut, dalam hal tahap Komisaris PT HB dan Direksi PT HB yang merupakan dalam PT HB dan pengadaan di PT HB hasil dari sebelum pemenang PT HB dan dalam di dalam PT HB dan dalam surat tersebut. Berdasarkan Pada Pengadaan PLN pada PT HB dijadikan surat adalah mesin 33 Bulan Setelah tahap dilakukan PLN (L.3 PT HB sebagaimana Dalam tersebut adanya dalil dan pelaksanaan sebelum dan Intervensi dari diperkenankan surat adalah tersebut Dalam PT HB mengajukan gugatan kepada Kejaksaan PT HB dan PT PLN UP Pelabuhan.	Pada Pengadaan Tergugat Direksi, Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat. Intervensi PT HB mengajukan Banding kepada Pengadilan Tinggi atas Putusan dengan hasil Majelis Hakim Tingkat Banding mengabulkan Banding dan membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama. Selanjutnya Penggugat/tergugat Asosiasi Apapun Hakim/ah Agung dan mengajukan kasasi Apapun tingkat tinggi. Pada Saat ini Hakim Agung telah memutuskan bahwa gugatan PT HB ditolak dan Hakim Agung telah mengabulkan gugatan Penggugat. Hakim Agung telah memutuskan bahwa Direksi PT HB dan Direksi PT HB dan Direksi PT HB dan

Perkara Penting yang sedang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi yang Sedang Menjabat

Important Cases Currently Faced by the Board of Commissioners and Board of Directors

Sepanjang tahun 2022, tidak terdapat permasalahan hukum yang dihadapi oleh Dewan Komisaris maupun Direksi Perusahaan yang sedang menjabat baik perdata maupun pidana.

Throughout 2022, there were no legal issues faced by the Company's incumbent Board of Commissioners or Board of Directors, either civil or criminal.

Perkara Hukum Anak Perusahaan

Legal Cases of Subsidiaries

Sepanjang tahun 2022, Tidak terdapat permasalahan hukum yang dihadapi oleh Anak Perusahaan Perusahaan baik perdata maupun pidana.

Throughout 2022, there were no legal issues faced by the Company's subsidiaries, either civil or criminal.

Sanksi Kepada Perusahaan, Anggota Dewan Komisaris, dan Anggota Direksi oleh Otoritas Terkait

Sanctions to the Company, Members of the Board of Commissioners and Members of the Board of Directors by Related Authorities

Selama tahun 2022, tidak terdapat sanksi administratif yang diberikan kepada Perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi oleh Otoritas Terkait.

During 2022, there were no administrative sanctions imposed on the Company, members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors by the Related Authorities.

Selain itu, tidak terdapat kasus ketidakpatuhan terhadap hukum, aturan dan peraturan yang berkaitan dengan transaksi pihak berelasi yang signifikan atau material serta keputusan bersalah dari pengadilan pajak tertinggi terkait masalah perpajakan apapun dalam kaitannya dengan.

In addition, there were no cases of non-compliance with laws, rules and regulations relating to significant or material related party transactions as well as guilty decisions from the highest tax court related to any tax issues in the last three years.

Pengadaan Barang dan Jasa
Procurement of Goods and Services

Aktivitas pengadaan barang dan jasa di lingkungan Perusahaan dilakukan pada konsep Value for Money atau Nilai Beli yang Sepadan. Konsep tersebut merupakan kombinasi optimum dari 6 (enam) *rights* (*right* kualitas, kuantitas, waktu, tempat, tujuan serta ekonomi), dan harga yang memenuhi kebutuhan dari pengguna, dan tidak selalu merupakan opsi harga awal paling murah (*lowest initial price option*), tetapi merupakan pengembalian tertinggi (*best return*) dari investasi yang menguntungkan bisnis sustainan yang sudah ditentukan.

Procurement activities of goods and services within the Company are based on the concept of Value for Money. The concept is an optimum combination of 6 (six) rights (right quality, quantity, time, place, socio-economic purposes, and price) that meet the needs of users, and is not always the lowest initial price option, but is the highest return (best return) on investment considering predetermined evaluation criteria.

Konsep Value for Money diimplementasikan kedalam kebijakan pengadaan Perusahaan sebagai landasan dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan antara lain melalui Peraturan Direksi Nomor [redacted] tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa dan Peraturan Direksi Nomor [redacted] tentang Kewenangan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

The concept of Value for Money is implemented into the Company's procurement policy as the basis for goods and services procurement activities implemented, among others, through Board of Directors Regulation Number [redacted] concerning Guidelines for Procurement of Goods and Services, and Board of Directors Regulation Number [redacted] concerning Authority for the Implementation of Goods and Services Procurement.

Pelaksana Fungsi Pengadaan Barang dan Jasa
Executor of Goods and Services Procurement Function

Pelaksana fungsi pengadaan barang dan jasa diatur dalam Peraturan Direksi Nomor [redacted] tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa dan Peraturan Direksi Nomor [redacted] tentang Kewenangan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dimana fungsi pengadaan Kantor Pusat dilaksanakan oleh Pusat yang dituju Direksi sedangkan untuk Unit dituju oleh Pengelola Unit. Selain itu terdapat Value for Money Committee yang bertugas melakukan review dan rekomendasi atas strategi Pengadaan Barang/Jasa yang disajikan oleh fungsi Perencanaan Pengadaan untuk memastikan strategi pengadaan telah memenuhi prinsip value for money serta melakukan review dan rekomendasi atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh fungsi Pelaksana Pengadaan untuk memastikan pelaksana pengadaan telah memenuhi prinsip value for money dan ketentuannya dilakukan pemeriksaan (Recipient Kontrak). Pada Kantor Pusat Value for Money Committee dilaksanakan melalui Rapat Direksi untuk pengadaan yang memerlukan persetujuan Direksi dan Rapat Manajemen Satuan Supply Chain Management untuk pengadaan yang menjadi kewenangan Satuan Supply Chain Management. Sedangkan di Unit fungsi Value for Money Committee dilaksanakan melalui Rapat Manajemen Unit.

The executor of the goods and service procurement function is regulated in Board of Directors Regulation Number [redacted] concerning Guidelines for Procurement of Goods and Services, and Board of Directors Regulation Number [redacted] concerning Authority for the Implementation of Goods and Services Procurement where the procurement function at the Head Office is carried out by an Official appointed by the Board of Directors, while for the Unit it is appointed by the Unit Leader. In addition, there is a Value for Money Committee which is tasked with reviewing and recommending the Goods/Services Procurement strategy prepared by the Procurement Planning function to ensure that the procurement strategy has met the principles of value for money and conduct reviewing and recommending the implementation of Goods/Services Procurement conducted by the Procurement Executor (Contract Recipient) to ensure that the procurement executor has met the principle of value for money and subsequently the signing of the Agreement/Contract. At the Head Office, the Value for Money Committee is carried out through the Board of Directors Meeting for procurements that require the approval of the Board of Directors, and the Management Meeting of the Supply Chain Management Unit for procurements that are under the authority of the Supply Chain Management Unit. While in the Unit, the Value for Money Committee function is carried out through the Unit Management Meeting.

Metode Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa

Selection Method of Goods and Services Provider

Metode pemilihan tergantung pada nilai pengadaan, jenis kritikalitas, kondisi pasar dan pengetahuan atas pasar. Secara umum, metode pemilihan penyedia barang dan jasa adalah sebagai berikut:

1. Pelelangan Terbatas
   (Dilakukan dengan mengundang Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar dalam Daftar Penyedia Terseleksi (DPT). Pelelangan Terbatas dapat berupa pelelangan internasional, nasional, dan lokal. Pelelangan Terbatas dengan DPT merupakan strategi utama Pengadaan Barang/Jasa)
2. Pelelangan Terbuka
   (Dilakukan dengan cara mengundang Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi syarat luas guna memberi kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi kualifikasi melalui proses prakualifikasi (kecuali pascakualifikasi), untuk mengikuti pelelangan.
3. Pengecualian dari Kompetisi
   a. Penunjukan Langsung : dilakukan secara langsung dengan menunjuk satu Penyedia Barang/Jasa, berdasarkan Riset Pasar, Due Diligence atau dan DPT)
   b. Pengadaan Langsung : Pengadaan Barang/Jasa yang ada di pasaran untuk memenuhi kebutuhan operasional yang dijelaskan bahwa kerja tersebut merupakan hasil persaingan di pasar, berkesetaraan nadi harga dan kondisi kadi dengan nilai maksimal 100 juta.
   c. Penunjukan Langsung dengan Metode Open Book (Dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan harga yang kompetitif tanpa melalui proses Pelelangan Terbatas/ Pelelangan Terbuka, dengan tetap menjaga kualitas/mutu dan memenuhi ketepatan waktu pengadaan di lingkungan Perusahaan)

The selection method depends on the value of the procurement, the level of criticality, market conditions and knowledge of the market. In general, the methods of ordering goods and services providers are as follows:

1. Limited Auction
   Limited Auction is conducted by inviting Goods/Services Providers registered in the Selected Provider List (DPT). Limited Auction can be in the form of international, national, and local auctions. Limited Auction with DPT is the main strategy for Procurement of Goods/Services.
2. Open Auction
   An open auction is conducted by inviting Goods/Services Providers, which is widely announced in order to provide opportunities for Goods/Services Providers who meet the qualifications through a pre-qualification or post-qualification process to participate in the auction.
3. Exemption from Competition
   a. Direct Appointment: direct appointment is conducted by appointing one Goods/Services Provider, based on Market Research, Due Diligence or DPT)
   b. Direct Procurement: Procurement of Goods/Services available in the market to meet operational needs, which is believed that the price is the result of competition in the market, simple technology and small risk with a maximum value of 100 million
   c. Direct Appointment with Open Book Method: It is conducted with the aim of obtaining competitive prices without going through the Limited Auction/Open Auction process, while maintaining quality and meeting the timeliness of procurement within the Company.

Metode Penawaran

Bidding Method

1. Request for Quotation (RFQ)
   RFQ digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang berkaitan dengan Rutin, dengan spesifikasi yang mudah dikenal di pasar.
2. Initation to Bid (ITB)
   ITB dapat digunakan untuk Pengadaan Barang/ Jasa yang termasuk kategori Leverage atau Critical/Bottleneck di mana spesifikasi, kualitas dan kuantitasnya dapat dibuat secara jelas dan lengkap, serta persyaratan pemenang ditekankan berdasarkan penawaran biaya terendah, sepanjang semua kualitas, kuantitas, waktu, tempat, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), telah memenuhi persyaratan.

1. Request for Quotation (RFQ)
   RFQ is used for the Procurement of Goods/Services that are included in the Routine category, with specifications that are easily found in the market.
2. Initation to Bid (ITB)
   ITB can be used for Procurement of Goods/Services that are included in the Leverage or Critical/Bottleneck category, where the specifications, quality and quantity can be made clearly and completely, as well as the appointment of winners is conducted based on the lowest cost bid, as long as the quality, quantity, time, place, Local Content Level (TKDN), have met the requirements.

3. Request for Proposals (RFP)
RFP digunakan untuk Pengadaan Barang dan Jasa yang termasuk kategori Strategis (seperti OTC) atau pekerjaan/solusi atau kebutuhan yang memerlukan inovasi serta keahlian tertentu.

3. Request for Proposals (RFP)
RFP is used for Procurement of Goods and Services that are included in the Strategic category (such as OTC), or consultancy services or work that requires innovation and specific expertise.

Pengadaan Khusus
Special Procurement

Pengadaan Khusus merupakan strategi pengadaan dengan perjanjian/kontrak yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh pihak lain untuk kemudahan operasional pengadaan. Kegiatan pengadaan yang termasuk dalam kategori pengadaan khusus adalah sebagai berikut:

1. Pengadaan Gas Bumi/LNG/CNG
2. Pengadaan Batubara
3. Sewa Pemanen/Sewa Sisi
4. Sewa Guna Usaha

Sewa Guna Usaha terdiri dari:

a. Financial Lease
Merupakan Sewa Guna (Lessee) pada akhir masa Perjanjian Kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna dari pihak yang menyewa gunakan (Lessor) berdasarkan nilai sisa (residual value) yang disepakati bersama.

b. Operating Lease
Adalah objek sewa guna usaha yang disewakan sendiri oleh Lessor namun kepemilikan objek sewa guna usaha tidak berubah kepada Lessee.

5. Alih Daya
6. Pengadaan Jasa Konsultan Perorangan
7. Pengadaan Asuransi
8. Pengadaan pada Pemborongan Rekayasa Engineering dan Re-Engineering

Special Procurements are procurements of strategic and specific contracts that have been predetermined by other parties to facilitate procurement operations. Procurement activities that are included in the special procurement category are as follows:

4. Natural Gas/LNG/CNG Procurement
5. Coal Procurement
6. Lease/Hire Purchase
8. Lease

Lease consists of:

a. Financial Lease
The Lessee at the end of the Agreement/Contract period has the option right to purchase the leased object from the Lessor based on the agreed residual value.

b. Operating Lease
Operating lease is a leased object that is operated by the Lessor; however, the ownership of the leased object is not transferred to the Lessee.

5. Outsourcing
6. Procurement of Individual Consulting Services
7. Procurement of Insurance
8. Procurement of Process Engineering and Re-Engineering Plant works

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
Implementation of Goods and Services Procurement

Pelaksanaan pengadaan berprinsip dengan prinsip "level playing field" dimana semua calon penyedia mendapatkan informasi yang sama pada saat yang sama, sehingga mereka mempunyai waktu yang sama untuk mempersiapkan Penawaran. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa terbagi atas beberapa tahapan yaitu:

The implementation of procurement is designed with the principle of "level playing field" where all competitors are given the same information, at the same time, so that they have the same time to prepare an offer. The implementation of the procurement of goods and services is divided into several stages, namely:

Proses Pelaksanaan Pengadaan
Procurement Implementation Process

Transparansi dan Akuntabilitas Proses Pengadaan

Transparency and Accountability of Procurement Process

Perusahaan berupaya menciptakan good procurement practice dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu, beberapa upaya yang dilakukan Perusahaan diantaranya:

1. Pemanfaatan Media Pengumuman Pengadaan berbasis Web
   Pengumuman Pengadaan Barang/Pekerjaan disebarluaskan luas Lainnya waktu dilakukan secara terbuka untuk umum yang dapat diakses secara luas antara lain melalui website Perusahaan.

2. Penerapan Hak Sanggah
   Peserta kualifikasi yang keberatan atas penetapan pemenang dapat mengajukan sanggahan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal pengumuman hasil kualifikasi dengan memberikan jaminan

The Company strives to realize good procurement practices by maintaining and improving accountability and transparency in the goods and services procurement process. Therefore, several efforts conducted by the Company include:

1. Utilization of Web-based Procurement Announcement Media
   Announcement of Procurement of Goods/Construction Works/ Other Services is proposed to be disseminated openly to the public which can be widely accessed, among others, through the Company's website.

2. Implementation of Objection Period
   Qualification participants who object to the determination of the winner may submit a written objection no later than 3 (three) working days after the date of announcement of the qualification result, by providing a objection guarantee of

sampai sebesar 2‰ (dua permille) dari nilai total HPS atau sebagai tingginya sebesar Rp10.000.000.00 (Sepuluh juta Rupiah). Ganggaran hanya diajukan terhadap sebesar pembayaran pelaksanaan pemadur kualifikasi yang diatur dalam Dokumen Kualifikasi Pelelangan Pekerjaan bersangkutan. KKK dan atau pelanggaran prosedur yang lainnya. Masa sanggah hasil prakualifikasi diberikan 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi dan tanggapan atas sanggahan diberikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya sanggahan dari peserta prakualifikasi. Surat sanggahan ditujukan kepada Pejabat yang berwenang menetapkan pemenang (Ketua Kelti-Kelti terjadinya penyimpangan) dengan tembusan kepada Kepala Satuan Pengawasan Internal (SPI).

3. Menyediakan Media Pengaduan Pengadaan melalui Sistem WBS

Whistleblowing System dapat digunakan sebagai sarana pengaduan atas pelanggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Direksi dan Dewan Komisaris Nomor: 001.K/DIR/2020/2020 dan Nomor: 001.K/DK/2020/2020 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) di Perusahaan Jawa-Bali.

2% (two thousandths) of the total HPS value or a maximum of Rp10,000,000.00 (fifty million Rupiah). The discharge shall only be submitted against any irregularities in the implementation of the qualification procedure regulated in the Qualification Document of the relevant Job Auction, KKK, and/ or violation of fair competition. The objection period of the pre-qualification result is provided 3 (three) working days after the announcement of the qualification result and the answer to the objection is provided no later than 7 (seven) working days after the receipt of the objection from the pre-qualification participant. The discharge letter is submitted to the (Pejabat authorized to determine the winner along with evidence of irregularities, with a copy to the Head of the Internal Audit Unit (SPI).

3. Providing Procurement Complaint Media through the WBS Committee

The Whistleblowing System can be used as a means of complaints on violations in the procurement process of goods and services in accordance with the Joint Decree (SKB) between the Board of Directors and Board of Commissioners Number: 001.K/DIR/2020/2020 and Number: 001.K/DK/2020/2020 concerning the Whistleblowing System at PT Pembangkitan Jawa-Bali.

Informasi dan Data Perusahaan

Company Information and Data

Informasi dan data Perusahaan merupakan salah satu aset penting Perusahaan yang harus dikelola dengan baik. Perusahaan memastikan ketersediaan dan kemudahan akses informasi bagi semua stakeholders termasuk karyawan Perusahaan serta mengaga informasi-informasi yang bersifat rahasia dengan mempertimbangkan kepentingan Perusahaan dalam jangka panjang. Perusahaan menetapkan Sekretaris Perusahaan sebagai pejabat alur arti kerja sesuai dengan tugas wewenang dan tanggung jawabnya untuk memastikan ketersediaan akses informasi dan data Perusahaan bagi stakeholders khususnya yang bersifat publik.

The Company's information and data is one of the Company's important assets that must be managed properly. The Company ensures the availability and ease of access to information for every stakeholder including the Company's employees and maintains confidential information by considering the Company's interests in the long term. The Company establishes the Corporate Secretary as an official in work unit in accordance with the duties, authorities and responsibilities to ensure the availability of access to the Company's information and data for stakeholders, especially those that are public.

Kebijakan Pengelolaan Informasi dan Data Perusahaan

Policy on Management of Company Information and Data

Perusahaan menetapkan kebijakan pengelolaan informasi dan data perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: [redacted] tanggal 4 Desember 2013 dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang Perusahaan. Kebijakan tersebut mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Klasifikasi Informasi;
2. Pengungkapan informasi meliputi prinsip dasar pengungkapan informasi, pengelola, jaru lasara, dan akses terhadap pengungkapan informasi;
3. Mekanisme pemberian informasi, baik internal dan eksternal (publik);
4. Pengamanan informasi, meliputi tugas dan tanggung jawab keamanan informasi, pengendali dan administrasi informasi, data dan dokumen Perusahaan, tanggung jawab pihak lain atau informasi sangat rahasia dan informasi rahasia, rumah hubungan dengan komunitas investasi dan media.
5. Sanksi;
6. Ketentuan lainnya.

The Company determines the policy of managing company information and data based on the Decree of the Board of Directors Number: [redacted] dated December 4, 2013 by taking into account the long-term interests of the Company. This policy regulates the following matters:

1. Information Classification;
2. Information Disclosure, includes the basic principles of information disclosure, managers, spokespersons and access to information disclosure;
3. Mechanisms for providing information, both internal and external (public);
4. Information Security, including duties and responsibilities for information security, control and administration of information, data and documents of the Company, responsibility of other parties for highly confidential and confidential information, rumors relations with the investment community and the media.
5. Sanctions;
6. Technical guidelines.

Perjanjian informasi Perusahaan juga mencantumkan standar etika dalam pengungkapan informasi dan data kepada pihak-pihak yang berkepentingan guna menjaga aset informasi Perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap Insan Perusahaan tidak diijinkan untuk membocorkan, memberitahukan atau menyebarluaskan informasi mengenai Perusahaan yang dianggap sebagai rahasia kepada siapapun (kecuali kepada pihak yang berhak mengetahui tentang hal tersebut);
2. Insan Perusahaan tidak diijinkan untuk memberikan data dan informasi yang dengannya dikenal Perusahaan kepada pihak lain baik yang menyangkut keuangan, teknologi, kebangkrutan dan data lainnya yang diyakini dan dianggap akan dapat merugikan Perusahaan kecuali diberikan dan oleh peraturan perundang-undangan berlaku, atau diberikan oleh lembaga yang berwenang.

The Company's information management also takes into account ethical standards in the disclosure of information and data to the interested parties in order to maintain the Company's information assets with the following provisions:

1. Each Company Employee is not permitted to discuss, divulge or disseminate information regarding the Company that is considered confidential to anyone (except colleagues who need to know/be aware of it);
2. Company personnel are not permitted to provide data and information classified as the Company's confidential to other parties, both concerning financial, technological, personnel and other data that are believed and considered to be detrimental to the Company, unless otherwise determined by laws and regulations and/or required by authorized institutions.

3. Insan Perusahaan yang tidak bekerja lagi di Perusahaan wajib untuk tetap menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama yang bersangkutan bekerja di Perusahaan, dan tidak diperkenankan mengambil, duplikasi, memusnahkan informasi rahasia Perusahaan kepada siapapun kecuali distribusi dan hak akses sesuai perundang-undangan berlaku, kepentingan oleh Lembaga yang berwenang.

3. Company personnel who no longer work in the Company are required to maintain the confidentiality of information obtained during their employment in the Company, and are not allowed to take and/or disseminate confidential information of the Company to anyone, unless otherwise stipulated by laws and regulations and/or required by the authorized institutions.

Perusahaan mengklasifikasikan informasi dan data Perusahaan dengan mempertahankan kepentingan jangka panjang Perusahaan sebagaimana ditetapkan pada Surat Keputusan Direksi Nomor: 112.K/010/DIR/2010 tanggal 4 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

1. **Informasi Sangat Rahasia**
   Informasi yang sifatnya tidak dapat diungkapkan kepada pihak manapun, kecuali kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi dan pihak lain yang ditetapkan oleh Direktur Utama.
2. **Informasi Rahasia**
   Informasi yang karena sifatnya hanya dapat diungkapkan kepada pihak internal Perusahaan yang memiliki kewenangan.
3. **Informasi Terbatas**
   Informasi yang harus dijaukan untuk kepentingan Perusahaan dan tidak untuk diungkapkan kepada publik.
4. **Informasi Biasa**
   Informasi yang tidak termasuk ke dalam kategori sangat rahasia, rahasia dan terbatas yang tidak mempunyakan dampak negatif kepada Perusahaan apabila diungkapkan kepada publik.

The Company classifies the Company's information and data by taking into account the long-term interests of the Company, as stipulated in the Decree of the Board of Directors Number: 112.K/010/DIR/2010 dated December 4, 2010 as follows:

1. **Highly Confidential Information**
   Information that cannot be disclosed to any party except to the Shareholders, Board of Commissioners, Board of Directors and other parties approved by the President Director.
2. **Confidential Information**
   Information which due to its nature can only be disclosed to authorized internal parties of the Company.
3. **Limited Information**
   Information that is only intended for the interests of the Company and not to be disclosed to the public.
4. **Ordinary Information**
   Information that does not include the highly confidential, confidential and limited categories that will not have a negative impact on the Company if disclosed to the public.

Akses Informasi bagi Internal Perusahaan

Access to Information for Internal Company

Perusahaan memastikan akses informasi dan data yang memadai bagi Internal Perusahaan dalam mendukung kegiatan operasional Perusahaan sesuai dengan wewenang dan kebutuhan yang diatur dalam Kebijakan Pengelolaan Informasi Perusahaan. Informasi dan data dengan klasifikasi informasi terbatas dan Informasi Biasa Akses dapat diakses oleh internal Perusahaan melalui:

1. MyPower, yang merupakan aplikasi smartphone yang dapat digunakan untuk mengakses informasi Perusahaan. Aplikasi ini berisikan informasi antara lain agenda korporat, publikasi korporat, area kepegawaian (gaji, absensi, pengajuan cuti, dan informasi pelatihan), portal khusus karyawan, dan link menuju aplikasi korporat.
2. Intranet, Office Automation (OA), dan Email Gateway (Email Blast). Pengelolaan isi dan update dari intranet dan OA dilakukan bersama antara Sekretaris Perusahaan dan Divisi Information Technology and Digital serta pihak terkait. Email gateway berisi informasi terkait kepatuhan pekerjaan dan Perusahaan atau sharing knowledge mengenai hal-hal yang

The Company ensures adequate access to information and data for the Company's internal in supporting the Company's operational activities in accordance with the authority and provisions regulated in the Company's Information Management Policy. Information and data with the classification of Limited Information and Ordinary Information can be accessed by the Company's internal through:

1. MyPower, which is a smartphone application that can be used to access information of the Company. This application contains information such as corporate agenda, corporate publications, employment area (salary, attendance, official travel, and training information), contents of all employees, and links to corporate applications.
2. Intranet, Office Automation (OA), and Email Gate Management of the content and updates of the Intranet and OA is conducted jointly between the Corporate Secretary and the Information Technology and Digital Division as well as related parties. Emails Gate contains information related to work and Company, inside or knowledge sharing on managerial matters, does not

bersifat menyajikan, tidak mengandung unsur SARA dan politik, serta tidak ditentukan untuk kepentingan pribadi, khususnya yang dapat menimbulkan konvensi di lingkungan internal maupun eksternal Perusahaan.

3. Info ITE, merupakan media internal yang berfungsi sebagai sarana informasi, edukasi dan sosialisasi kebijakan manajemen untuk seluruh karyawan. Perusahaan telah menerbitkan majalah internal perusahaan sebanyak 12 (sebelas) edisi sepanjang tahun 2022 dan dapat diakses melalui https://www.plnnusantarapower.co.id/info-ite/.
4. Komunikasi secara formal dapat melalui forum rapat baik Direksi di unit (satu) maupun rapat gabungan (weekly meeting), rapat bulanan, rapat kerja, updasi bandara, pesan Direksi, dan pertemuan manajemen dengan Serikat Pekerja Sedangkan secara informal komunikasi dilakukan melalui Sisil Talk, Plant Walkdown, Briefing dan Safari Ramadhan dan kegiatan lainnya.

common racial and political elements, as well as not being used for personal interests, especially those that can cause unrest within the internal and external of the Company.

3. Info ITE is an internal media that functions as a means of information, education and socialization of management policies for all employees. The Company has published 12 (two) editions of the Company's internal magazine throughout 2022 and can be accessed through https://www.plnnusantarapower.co.id/info-ite/.
4. Formal communications can be through the forum or special daily meetings in the Unit, weekly meetings, monthly meetings, work meetings, flag ceremonies, Board of Directors messages, and management meetings with the Labor Union. Meanwhile, informal communication is conducted through Sisil Talk, Plant Walkdown, Briefing and Safari Ramadhan and other activities.

Akses Informasi bagi Publik

Access to Information for the Public

Informasi terutama data dengan klasifikasi informasi Open dapat diakses oleh Publik secara luas. Perusahaan menyediakan beberapa media informasi dan komunikasi untuk memenuhi kebutuhan tentang pemenuhan ketersediaan akses dengan pelayanan prinsip-prinsip baik kepada perusahaan yang baik. Informasi dan data tersebut dapat diperoleh melalui:

1. Website, yang dapat diakses melalui situs www.plnnusantarapower.co.id dan disajikan secara bilingual yaitu dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Informasi yang dapat diakses melalui Website IPJL INI diantaranya profil, kegiatan operasional, kinerja Perusahaan, pemilihan di lingkungan Perusahaan, biaya kerja, media, arti uang, kita PSE, soft copy data Perusahaan (Annual Report, Sustainability Report, Buku Statistik, Laporan Keuangan), pengumuman pelanggan dan beberapa informasi lain yang bisa diakses dengan mudah oleh publik. Selain itu, Perusahaan telah mengembangkan platform layanan "PJB Access" yang menyatu pada website Perusahaan, kemudian PJB Access diharapkan dapat memperluas jangkauan Perusahaan terhadap pasar karena memudahkan pelaku bisnis dan memberikan akses kepada khalayak luas untuk mengakses beragam layanan terbaik dari PLN NP.
2. Surat elektronik (email) melalui alamat email info@plnnusantarapower.co.id sebagai sarana komunikasi elektronik yang efektif dan Sistem Informasi Teknologi and Digital. Fungsi Kehumasan bertugas memonitor, mengidentifikasi email yang masuk untuk selanjutnya memberikan respon yang tepat.

information and data with the classification of Open's information can be accessed by the Public at large. The Company provides several information and communication media to fulfill the provisions or disclosure requirements in accordance with the implementation of good corporate governance principles. The information and data can be obtained through:

1. Website, which can be accessed through the site www.plnnusantarapower.co.id and presented bilingually, namely in Indonesian and English. Information that can be accessed through PLN NP Website includes profile, operational activities, Company performance, events within the Company, media news releases, PSE info soft copy Company data (soft copy (Annual Report, Sustainability Report, Statistical Book, Financial Statements), vendor announcement and several other information that can be easily accessed by the public. In addition, the Company has developed a service platform "PJB Access" which is integrated on the Company's website. The presence of PJB Access is expected to be able to support the Company's reach to the market due to facilitating business actors and providing access to a wide audience to express a variety of the best services from PLN NP.
2. Electronic mail (email) through the email address info@plnnusantarapower.co.id as a means of electronic communication managed by the Information Technology and Digital Division. The Corporate Communications function is in charge of monitoring, identifying incoming emails and subsequently providing adequate responses.

3. Media Elektronik Interaktif antara lain berupa Kiosk, (1) profile, LCD TV di kantor pusat & unit dan small. Kiosk merupakan media informasi interaktif yang dapat dimanfaatkan oleh tamu PJB untuk mengakses company profile dan penyampaian tentang PLN NP. Media informasi berupa (1) profile dan display LCD TV tersedia di kantor pusat & unit yang menyediakan company profile, informasi tentang berkait PLN NP dalam bentuk foto dan video dan informasi lain yang perlu diketahui oleh karyawan dan tamu Perusahaan)
4. Events, partisipasi acara/pameran/event-event dilaksanakan maupun yang terkait dengan promosi, publikasi, dan kegiatan lainnya yang berkaitan nasional, atau event/ pameran/ events kedaerahan yang memiliki kebutuhan anak dengan sebuah stand, atau kegiatan atau rencana pengembangan Perusahaan dimana dapat, atau yang bersifat career exploration dengan kebutuhan (EBITDA NP)
5. Sponsorship & Non Non-Media, partisipasi sponsor maupun iklan pada kegiatan atau materi-materi tertentu dipasarkan antaranimal maupun untuk kegiatan atau materi cetakan yang memiliki ruang lingkup promosi, publikasi dan kegiatan kegiatan yang bermitra nasional, atau kegiatan yang bersifat edukasi bagi berbagai pihak;
6. Media Massa (cetak dan elektronik), bahan promosi maupunnya pihak internal PLN NP dengan media cetak ataupun media elektronik harus didampingi oleh perwakilan dari Sekretaris Perusahaan (Kantor Pusat), atau bidang Umum (Unit Pembangkitan UP), Unit Pelaksana Pembangkitan (UPK), Unit pelaksana Pengelolaan pembangkitan (UPHB), Unit Maintenance Repair and Overhaul (UPHB), Unit PJB Academy, Unit Pelaksana Proyek dan Unit lain)
7. Media Sosial berupa Facebook (@kinosenterapower), Instagram (@kinosenterapower), twitter (@pln_npt dan Youtube (PJBTV Media);

Selain itu, informasi tentang Perusahaan dapat juga diperoleh pada Sekretaris Perusahaan yang terdekat di

3. Interactive Electronic Media such as Kiosk, (1) profile, LCD TV at head office & unit and small. Kiosk is an interactive information media that can be utilized by PJB guests to access company profile and PLN NP's action announcement. Information media in the form of (1) profile and LCD TV displays are available at the head office & units that show the Company profile, the latest information related to PLN NP in the form of photos and videos and other information that needs to be known by employees and guests of the Company.
4. Events, participation in events/exhibitions/events is aimed to host the support promotion, publication and scope of activities on a national scale, or regional events/exhibitions/events that are closely related to the operating area, or the Company's future development activities in place or venue aspect in accordance with the needs of PLN NP's Human Resources
5. Sponsorship & Non-Media Advertising, sponsorship or advertising participation in certain activities or printed materials is carried out much as possible for activities or printed materials that have the scope of promotion, publication and coverage of activities on a national scale, or activities that are educational for many parties
6. Mass Media (print and electronic), Every interview process of PLN NP internal parties with print or electronic media is required to be accompanied by representatives from the Corporate Secretary (Head Office), or the General Owners (Generation Unit (UP), Generation Executive Unit (UPK), Generation Control Executive Unit (UPHB), Maintenance Repair and Overhaul Unit (UPHB), PJB Academy Unit, Project Executive Unit and other Units);
7. Social Media in the form of Facebook (@kinosenterapower), Instagram (@kinosenterapower), twitter (@pln_npt and Youtube (PJBTV Media);

In addition, information on the Company can also be obtained from the Corporate Secretary at

PT PLN Nusantara Power

Kantor Pusat Head Office
Jl. Ketintang, Dia.o No.11,
Surabaya 60231
Indonesia
(62-31) 8283180 (Hunting)
(62-31) 8283183

Kantor Jakarta Jakarta Office
Gd. Office Park Lt. 2 AGECC
Jl. TB. Simatupang No. 1A, Jakarta Selatan
DKI Jakarta, Indonesia

Publikasi dan Pemberitaan Perusahaan
Company Publications and News

Perusahaan secara rutin melakukan publikasi dan melakukan monitoring atas pemberitaan terkait Perusahaan baik yang dilakukan melalui media informasi Perusahaan maupun oleh media eksternal. Publikasi melalui media informasi Perusahaan diantaranya berupa Laporan Tahunan (Annual Report), Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report), Info PJB sebanyak 12 (dua belas) edisi serta 54 press release. Sementara itu, pemberitaan oleh media eksternal, sampai Perusahaan sepanjang tahun 2022 terdapat sebanyak 140 media online dan 62 media cetak.

The Company is always publishes and monitors news related to the Company, both through the Company's information media and by external media. Publications through the Company's information media include the Annual Report, Sustainability Report, Info PJB as many as 12 (one) editions and 54 press releases. Meanwhile, coverage by external media related to the Company throughout 2022 was 140 online media and 62 print media.

Pertemuan dengan *Stakeholders*
Meeting with Stakeholders

Pertemuan dengan stakeholders menjadi salah satu sarana dalam menyalurkan informasi dan data Perusahaan melalui komunikasi dua arah antara Perusahaan dengan stakeholders. Pertemuan tersebut dilakukan baik secara fisik maupun virtual dalam forum atau even tertentu yang melibatkan stakeholders Perusahaan. Sepanjang tahun 2022, Perusahaan telah melakukan beberapa pertemuan dengan para stakeholder sebagai berikut:

Meeting with stakeholders is one of the means to access the Company's information and data through two-way communication between the Company and stakeholders. The meetings are conducted both physically and virtually in certain forums or events involving the Company's stakeholders. Throughout 2022, the Company has conducted several meetings with stakeholders as follows:

Pertemuan dengan Stakeholders Tahun 2022
Table and Graphic Title

Deskripsi Description	Deskripsi Description	Deskripsi Description
Pemegang Saham Shareholders	Rapat Kerja RKAP RKAP Work Meeting	1 kali/time
	Forum PBNT "Energizing The New Power" PBNT Forum "Energizing The New Power"	1 kali/time
Karyawan Employees	JEDI, Dik (Coffee Morning)	2 kali/times
	Kunjungan Gubernur Jawa Barat Visit of the Governor of West Java	12 kali/times
	Serikat Pekerja Labor Union	2 kali/times
Pelanggan Customers	Customer Gathering	1 kali/time Blanko pusat dan unit masing-masing 1 head office and Unit, respectively
Pemasok Suppliers	Supplier Gathering	1 kali/time Blanko pusat dan unit masing-masing 1 head office and Unit, respectively
Media Massa Mass media	Media Gathering	1 kali/time

Tanggung Jawab Perusahaan

Corporate Social Responsibility

Strategi Keberlanjutan
Sustainability Strategy

PLN NP berkomitmen untuk menerapkan strategi keberlanjutan dalam setiap lini bisnis Perusahaan dengan menerapkan pembangunan berkelanjutan dengan berorientasi pada tujuan berkelanjutan/TPB (sustainable development goals/SDGs). Perusahaan juga berkomitmen dalam menciptakan dan berbagi nilai-nilai dengan pemangku kepentingan dan terus berupaya meminimalkan dampak lingkungan. Dalam melaksanakan strategi berkelanjutan, PLN NP telah merancang berbagai kebijakan strategis terkait keberlanjutan dan terus dievaluasi secara berkala untuk mengikuti perkembangan kondisi lingkungan dan bisnis PLN NP.

PLN NP is committed to aligning sustainability strategy in each core businesses the Company by implementing sustainable development oriented towards sustainable goals/SDGs. The Company is also committed to creating and sharing values with the stakeholders and continuously working to minimize environmental impact. In its commitment to the sustainability strategy, PLN NP already designed various strategic policies related to sustainability and periodically based evaluating it in order to keep abreast of the environmental and business condition development in PLN NP.

Menjawab Tantangan dan Menangkap Peluang Keberlanjutan
Responding to Challenges and Seizing Sustainability Opportunities

PLN NP mengidentifikasi berbagai peluang dan tantangan keberlanjutan di dalam dunia kelistrikan global maupun Indonesia yaitu perubahan iklim, dorongan penggunaan energi bersih, dekarbonisasi, desentralisasi dan digitalisasi dalam pembangunan pembangkit ke depan. Selain itu, keamanan pasokan energi primer, ketidakpastian teknologi EBT, pandemi Covid-19, regulasi lingkungan, konflik SDM Perusahaan juga menjadi tantangan yang dihadapi Perusahaan. Dan adanya dengan hal tersebut, lingkungan bisnis di sektor ketenagalistrikan harus mengalami berbagai perubahan baik dari segi pasar dan pelanggan, tren dan dinamika teknologi, isu-isu investasi yang semakin hangat serta hal-hal lain yang mempengaruhi Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk menjawab tantan dan tantangan tersebut, PLN NP telah merancangkan arah pengembangan dan langkah yang akan diambil dengan mengoptimalkan core competency dan inovasi. Arah pengembangan PLN NP adalah sebagai berikut:

PLN NP faces many sustainability opportunities and challenges in the electricity sector globally and domestically, i.e., climate change, the push to use clean energy, decarbonization, decentralization, and digitalization in the construction of power plants in the future. In addition, the Company also faces various challenges, including the security of the primary energy supply, the NRE technology development, the Covid-19 pandemic, environmental regulations, and the Company's HR. Simultaneously, the business environment in the electricity sector experiences various changes that affect the Company directly and indirectly, such as the market and competitors, technological trends and issues, a better investment climate, etc. To respond to these conditions and challenges, PLN NP has determined the direction of development and measures to be taken by optimizing its core competency and innovation. PLN NP's development direction is as follows:

Arah Pengembangan PLN NP
PLN NP's Development Direction

Landasan Lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Scope of Social and Environmental Responsibility

PLN INP harus mendukung upaya peningkatan kinerja dari berbagai aspek, yaitu aspek lingkungan, sosial dan ekonomi, upaya ini bertujuan agar dapat memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan yaitu karyawan, pelanggan, vendor dan masyarakat. Keseluruhan strategi keberlanjutan ini dituangkan oleh PLN INP dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang telah ditetapkan oleh PLN INP sesuai dengan Standar Etika Perusahaan (Code of Conduct) yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris No.001.K/DIR/2019 dan 005.K/DIR/INP/2019 serta Keputusan Direksi No.KR.LK/0.3/0013/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial

PLN INP continues to support efforts to improve performance from various aspects, namely environmental, social and economic aspects. This effort aims to provide benefits to stakeholders, namely employees, customers, vendors and the community. This decreased sustainability strategy is formulated by PLN INP in the form of corporate social responsibility that has been implemented by PLN INP in accordance with the Corporate Ethics Standards (Code of Conduct) stipulated in the Joint Decree of the Board of Directors and the Board of Commissioners No.001.K/DIR/INP/2019 and 005.K/DIR/INP/2019 and Decree of the Board of Directors No.KR.LK/0.3/0013/2012 concerning Guidelines for the

dan Lingkungan (TJSL). Strategi dan kebijakan yang mengatur pelaksanaan program tanggung jawab sosial oleh PLN NP senantiasa diselaraskan dengan mengacu pada Undang-Undang No. 40 tentang Perseroan Terbatas pasal 74 Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan, Peraturan Pemerintah No.47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan.

implementation of Social and Environmental Responsibility (TJSL). Strategies and policies governing the implementation of social responsibility programs by PLN NP are consistently being refined with reference to Law No. 40 on Limited Liability Companies article 74 Social and Environmental Responsibility, Government Regulation No.47 of 2012 on Corporate Social and Environmental Responsibility.

Visi Misi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Vision and Mission on Social and Environmental Responsibility

Visi TJSL PLN NP
Vision of PLN NP CSR

Menjadi Perusahaan Energi yang memiliki kinerja tinggi dalam pengelolaan dampak lingkungan, sosial, ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara harapan pemangku kepentingan dan tujuan perusahaan untuk menjadi "most trusted and preferred company".

To become an Energy Company that performs excellently in managing environmental, social, and economic impacts by considering the balance between stakeholders' expectations and the Company's goal to become the "most trusted and preferred company".

Misi TJSL PLN NP
Mission of PLN NP CSR

- Meningkatkan reputasi perusahaan melalui peningkatan kinerja lingkungan, sosial, dan ekonomi dengan program-program CSR yang lebih berkualitas dan akuntabel.
- Meningkatkan efektivitas pengelolaan program yang tersistur dan terukur.
- Meningkatkan dukungan terhadap operasi PLN NP melalui peningkatan penerimaan para pemangku kepentingan terhadap eksistensi PLN NP sebagai bagian dari masyarakat (corporate citizenship).
- Meningkatkan komitmen keberlanjutan terhadap pelestarian dan pengembangan masyarakat melalui pelibatan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan program-program CSR secara dini dan utuh.
- Meningkatkan kualitas hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingan melalui strategi komunikasi yang sesuai sehingga tercipta citra CSR yang kokoh, sesuai dengan tujuan perusahaan dan harapan para pemangku kepentingan.

- Improving the Company's reputation through environmental, social, and economic performance improvement through CSR programs that are more qualified and accountable.
- Improving the orientation of program management with the measurable impacts.
- Increasing support for PLN NP operations by improving the stakeholders' acceptance in PLN Nusantara Power existence as part of the corporate citizenship.
- Increasing the awareness of commitment to sustainability and community welfare through the involvement of the stakeholders in the management of inclusive and unique CSR programs.
- Improving the quality of corporate relationships with stakeholders through well-established communication strategies which promote a solid CSR frame aligned with the Company goals and the stakeholders' expectations.

Roadmap dan Strategi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Social and Environmental Responsibility Roadmap and Strategy

Dalam pelaksanaannya, PLN NP telah memiliki roadmap TJSL yang senantiasa disesuaikan untuk mendukung strategi korporat dalam menjaga kelangsungan bisnisnya, serta berkontribusi dalam pemenuhan sasaran pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Dalam implementasinya, CSR PT PLN NP mengedepankan kaidah Good Corporate Governance (GCG) yang dituangkan dalam Rencana Strategis atau roadmap CSR 2020-2024 guna mendukung grand strategi perusahaan dalam bisnis energi berkelanjutan.

In its implementation, PLN NP has a TJSL roadmap that consistently being refined to support corporate strategies in maintaining business continuity, as well as contributing to the fulfillment of Sustainable Development Goals (SDGs) by the government. In its implementation, PT PLN NP's CSR emphasizes the principles of Good Corporate Governance (GCG) as outlined in the 2020-2024 CSR Strategic Plan or roadmap to support the Company's grand strategy in the sustainable energy business.

Rencana Strategis TJSL PLN Nusantara Power Tahun 2020 - 2024

PLN Nusantara Power CSR Strategic Plan 2020 – 2024

2018

- Ekstensifikasi dan kerja sama/pemahaman
- Implementasi ISO 20121
- Workshop and market sellers' understanding
- ISO 2 Kajian Implementation

2019

- GAP Analysis
- Membangun komitmen manajemen CSR berbasis ISO 20000
- Pelatihan Pedoman Integrasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
- Blue Print CSR Berbasis ISO 20000
- GAP Analysis
- Buat Komitmen implementasi CSR berbasis ISO 20000
- Sosialisasi ISO 20000 Dan Tone Down

2020

Holistic CSR

- Pembentukan Komite CSR
- Menyusun Strategi Kebijakan yang komprehensif
- Establishment CSR Committee
- Developed a comprehensive Sustainability Strategy

2021

Transformasi

Transformation

- Melaksanakan transformasi PLN Power Sleeve Generations menyiapkan visi dan misi menuju bisnis berkelanjutan
- Melaksanakan program PLN Empower untuk menyiapkan Sustainable Energy
- Melaksanakan Sustainable Finance
- Pengukuran dampak menggunakan SROI
- Transformation of PLN Power Sleeve Generations to create the Vision and Mission towards a sustainable business
- PLN Empower program to create Sustainable Energy
- Implementation of Sustainable Finance
- Impact measurement using SROI

2022

Empower

- Program PLN Empower menyiapkan Share Value (CSV) bagi bisnis dan masyarakat yang berupa (OSD) dan Index Kepuasan Masyarakat
- PLN Empower program creates measurable Share Value (CSV) for business and society (OSD) and Community Satisfaction Index)

2023

Sustainable Impact Creation

- Melaksanakan Program CSR yang berdampak berkelanjutan berbasis power sleeve dengan energi baru dan terbarukan
- Implementasi PLN Peduli
- Created a CSR Program that presents sustainable impact through a production process with clean and sustainable energy
- Implementation of PLN Tone

2024

Sustainable Business Energy

- Mewujudkan bisnis berkelanjutan
- Menjadi Perusahaan terkemuka Se-Asia Tenggara dan Menjadi pilihan nomor 1 sebanggan untuk value energi
- Realized a sustainable business
- To be a leading company in Southeast Asia and to be the number 1 choice of customers for energy solutions

Realisasi Program
Program Realization

Program Kinerja Keberlanjutan PLN NP telah dimasukkan dalam RKAP setiap tahunnya. Anggaran tersebut dialokasikan oleh PLN NP kepada berbagai program strategi keberlanjutan diantaranya yaitu:

1. Program peningkatan kinerja anggaran dan kinerja operasi
2. Program anti korupsi
3. Program efisiensi energi
4. Pelayanan 43 kepada Pemangku Kepentingan
5. Penanganan Pengaduan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
6. Penelitian dan Pengembangan Pembangkit
7. Evaluasi, Pengelolaan SDM dan Penanganan Pengaduan Karyawan
8. Pengelolaan dan Pengendalian Emisi
9. Pengelolaan Limbah
10. Keanekaragaman Hayati
11. Program Pipa Bandara
12. Program Kampung Hijau dan
13. Dll.

Realisasi biaya program tanggung jawab sosial PLN NP tahun 2022 sebesar Rp40,70 meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp20,18 miliar.

PLN NP Sustainability Performance Program has been included in the annual RKAP. The budget is allocated by PLN NP into various sustainability strategy programs, including:

1. Financial and operating performance improvement program;
2. Anti-corruption program;
3. Energy efficiency program;
4. 43% production to Stakeholders;
5. Handling of Occupational Safety and Health Complaints;
6. Power Plant Research and Development;
7. Evaluation of HR Management and Handling of Employee Complaints;
8. Managing and Controlling Emissions;
9. Waste Management;
10. Biodiversity;
11. Improvised Investment Program;
12. Mangrove Village Program;
13. Etc.

PLN NP social responsibility program cost for 2022 was Rp40.70 an increase compared to 2021 which was Rp20.18 billion.

Anggaran dan Realisasi Biaya CSR Tahun 2022 (dalam jutaan)
Budget and Realization of CSR Costs for 2022 (in millions)

No.	Tipologi Typology	RKAP 2022 2022 RKAP	Realisasi 2022 2022 Realization	Persentase terhadap RKAP RKAP Achievement
1	Improvement	10.075	10.000	98%
2	Capacity Building	10.750	10.111	94%
3	Infrastruktur Infrastructure	9.878	9.000	91%
4	Others	4.113	8.218	151%
5	43.00	4.300	3.411	79%
Total		**41.730**	**40.784**	**97%**

Kinerja Keberlanjutan Aspek Ekonomi

Sustainability Performance of Economic Aspect

PLN NP terus berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan perekonomian di Indonesia dengan menyediakan energi listrik berkualitas tinggi, andal dan ramah lingkungan. Kontribusi ini berkontribusi memberikan dampak positif bagi upaya Indonesia untuk mengambil bagian pada rantai pasok global di tengah momentum transisi energi saat ini. Transformasi yang dilakukan PLN NP pada tahun 2022 menjadi subholding dari PT PLN (Persero) memantapkan visi-misi Perusahaan untuk menjadi Perusahaan pembangkit listrik terbesar se-Asia Tenggara, hal ini juga menjadi komitmen bagi Perusahaan untuk mengupayakan transformasinya di bidang pembangkitan.

PLN NP continues to be committed to encouraging economic development in Indonesia by providing high-quality, reliable and environmentally friendly electrical energy. This commitment contributes to a positive impact on Indonesia's efforts to take part in the global supply chain in the middle of the current energy transition momentum. The transformation of PLN NP in 2022 into a subholding of PT PLN (Persero) solidifies the Company's goal to become the largest power plant Company in Southeast Asia. This is also a momentum for the Company to emphasize its competence in the field of electric power generation.

Ikhtisar Capaian Kinerja Ekonomi

Highlights of Economic Performance Achievements

Pada tahun 2022 pencapaian kinerja ekonomi dapat dilihat pada aspek realisasi produksi tenaga listrik yang berhasil melebihi target RKAP yaitu sebesar 57.064.313 MWh dari 56.278.818 MWh (tercapai 112,78%) dimana dari total produksi tersebut, kontribusi produksi pembangkit IUJ berhasil melebihi target (RKAP yaitu sebesar 13.000,84 GWh dari 2.297,22 GWh (tercapai 130,48%). Adanya jumlah produksi listrik yang melebihi target tersebut, memberikan dampak positif pada penjualan tenaga listrik yang juga melebihi target RKAP yaitu sebesar 56.370.852 MWh dari 14.600.000 MWh (tercapai 111,63%). Didukung dengan kinerja keuangan, dimana realisasi laba bersih berhasil melebihi target RKAP yaitu sebesar Rp8.283.148 juta dari Rp4.057.850 juta (tercapai 161,39%).

In 2022, the achievement of economic performance can be seen in the aspect of the realization of electricity production which managed to exceed the RKAP target of 57,064,313 MWh from 56,278,818 MWh (achieved 112.78%), where from the total production, the contribution of IUJ power plant production managed to exceed the RKAP target of 13,000.84 GWh from 2,297.22 GWh (achieved 130.48%). The amount of electricity production that exceeded the target, had a positive impact on electricity sales which also exceeded the RKAP target of 56,370,852 MWh from 14,600,000 MWh (achieved 111.63%). Likewise with financial performance, where the realization of net profit managed to exceed the RKAP target of IDR 8,283,148 million from IDR 4,057,850 million (achieved 161.39%).

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Ekonomi
Highlights of Economic Performance Achievements

Perbandingan Target dan Kinerja Operasional dan Keuangan

Comparison of Operational and Financial Targets and Performance

Indikator	2022		Persentase (%)	2021		Persentase (%)	2020		Persentase (%)
	Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Produksi Tenaga Listrik (GWh)	19.379,83	17.864,21	111,79%	18.487,50	20.646,62	108,38%	19.000,00	17.615,26	80,08%
Penjualan Listrik (GWh)	14.888,39	16.179,48	111,91%	16.729,00	19.648,14	117,91%	16.000,12	17.117,04	83,07%
Pendapatan Usaha (Rp Juta)	19.309.000	17.261.200	89,84%	18.778.721	19.906.124	99,69%	19.534.603	18.416.219	85,22%
Laba Tahun Berjalan (Rp Juta)	4.807.853	4.383.546	163,34%	3.207.546	5.829.186	181,45%	4.802.092	7.703.613	113,1%

Perbandingan Target dan Kinerja Keuangan Berkelanjutan
Comparison of Sustainable Finance Targets and Performance

Indikator / Indicator	2022		Pencapaian / Achievement	2021		Pencapaian / Achievement	2020		Pencapaian / Achievement
	Target	Realisasi / Realization		Target	Realisasi / Realization		Target	Realisasi / Realization	
Produksi Pembangkit EBT (GWh) / NRE Power Plant Production (GWh)	7.597,31	5.140,04	176,48%	3.711,50	2.494,51	135,83%	3.700,09	2.997,82	83,88%
Produksi Pembangkit Hidro (GWh) / Hydro Power Plant Production (GWh)	2.256,80	3.677,84	130,38%	3.211,50	3.580,24	117,13%	3.700,08	2.460,63	82,52%
Produksi Pembangkit Biomassa (GWh) / Biomass Power Plant Production (GWh)	46,61	100,00	191,78%	-	83,00	-	-	8,79	-

Mengoptimalkan Perolehan dan Pendistribusian Nilai Ekonomi
Optimizing the Acquisition and Distribution of Economic Value

Dalam melakukan perhitungan perolehan dan pendistribusian nilai ekonomi kepada pemangku kepentingan, PLN NP menggunakan ketentuan perhitungan sesuai dengan pedoman GRI Standards dengan menggunakan informasi dalam laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit.

In calculating the acquisition and distribution of economic value to stakeholders, PLN NP uses the calculation provisions in accordance with the GRI Standards guidelines by using information in the audited consolidated financial statements.

Pada tahun 2022, PLN NP berhasil menciptakan kinerja ekonomi positif yang tercatat dari jumlah nilai ekonomi langsung yang dihasilkan sebesar Rp10.170.010 juta. Dari perolehan pendapatan tersebut, PLN NP mendistribusikan kepada pemangku kepentingan Perusahaan sebesar Rp10.011.114 juta untuk kepentingan belanja usaha, pemenuhan biaya karyawanan, pembayaran pajak kepada Negara, pembagian dividen kepada pemegang saham dan pengeluaran untuk program Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan.

In 2022, PLN NP successful in creating positive economic performance, as seen from the total direct economic value generated of Rp10.170.010 million. From this revenue, PLN NP distributed Rp10.011.114 million to the Company's stakeholders for the benefit of business expenses, fulfillment of personnel expenses, tax payments to the State, dividend distribution to shareholders and expenditures for the Company's Corporate Social Responsibility (CSR) program.

Nilai Ekonomi PLN NP
Economic Value of PLN NP

Nilai Ekonomi Economic Value	Tahun Year		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Nilai Ekonomi Langsung Yang Dihasilkan Direct Economic Value Generated	22.904.428	37.566.971	38.676.910
Pendapatan penjualan tenaga listrik Revenue from sales of electricity	21.078.470	34.041.555	35.025.470
Pendapatan usaha lain-lain (bersih dari pendapatan kompensasi dari aktivitas) Other operating revenue (operation and maintenance, socialization and others)	4.957.706	4.661.750	5.510.734
Penghasilan keuangan Finance income	126.658	180.000	182.317
Keuntungan (kerugian) dari mata uang asing (bersih) Gains (losses) on foreign exchange – net	8.612	0.664	-4.205
Bagian laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama Share in net profit of associates and joint ventures	1.852.557	1.680.351	1.854.851
Penghasilan lain-lain Other income	-	-	311.837
Nilai Ekonomi yang Didistribusikan Economic Value Distributed	**20.703.181**	**34.197.487**	**29.651.550**
Beban usaha* Operating expenses*	20.228.664	33.310.030	28.760.838
Biaya kesejahteraan Personnel expenses	1.637.698	1.799.453	1.811.388
Beban lain-lain Other expenses	338.700	375.700	-
Pembayaran pajak kepada Negara Tax payment to the State	707.826	1.130.000	1.259.588
Peninggalan dividen kepada pemegang saham Dividend distribution to shareholders	8.608.332	7.001.308	8.828.833
Pengeluaran untuk Program CSR Expenditures for CSR Program	38.638	35.150	40.700
Nilai Ekonomi Yang Ditahan Economic Value Retained	**2.801.047**	**-3.030.516**	**930.440**

Catatan:
* Beban usaha di luar Biaya Kesejahteraan
Notes:
** Operating Expenses excluding Personnel Expenses

Kontribusi Kepada Negara
Contribution to the State

PLN NP sebagai Perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN yaitu PT PLN (Persero), dua fungsinya sebagai agent of value creator dan agent of development yang dilaksanakan melalui kontribusi berbentuk kunjungan bagi Negara. Untuk itu, kontribusi PLN NP kepada Negara terwujud dalam kepatuhan pemenuhan kewajiban Perusahaan sebagai Wajib Pajak melalui pembayaran pajak dan dividen. Jumlah seluruh pajak tahun 2022 sebesar Rp2.126,00 miliar, meningkat 0,18% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp2.126,00 miliar. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh jumlah pembelian material dan penggunaan jasa dari pihak ketiga.

PLN NP as a company whose shares are mostly owned by BUMN, PT PLN (Persero), plays a role as an agent of value creator and agent of development which is expected to contribute profits to the State. For this reason PLN NP's contribution to the State is realized in compliance with the fulfillment of the Company's obligations as a taxpayer through tax and dividend payments. The amount of tax payments in 2022 was Rp2,126.00 billion, increased by 0.18% compared to 2021 of Rp2,126.00 billion. The increase was mainly influenced by the amount of material purchases and the use of services from third parties.

Sebagai pemotong pajak, Perusahaan secara aktif berperan serta dalam melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan atas pajak-pajak seperti PPh Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi dan sewa bangunan; PPh Pasal 22 atas penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi dan PPh Pasal 23 atas penghasilan yang diterima wajib pajak badan.

As a tax withholder, the Company actively participates in withholding, paying and reporting on taxes such as Income Tax Article 4 paragraph 2 on construction services and building leases; Income Tax Article 22 on income received by individual taxpayers and Income Tax Article 23 on income received by corporate taxpayers.

Kontribusi Pajak PLN MP kepada Negara (Rp Miliar)
PLN MP Tax Contribution to the State (Rp Billion)

Jenis Pajak Type of Tax	2020	2021	2022
PPh Pasal 21 Income Tax Article 21	118.860,03	177.731,16	140.054,73
PPh Pasal 23 Income Tax Article 23	9.013,00	56.751,79	55.580,41
PPh Pasal 4 ayat 2 Income Tax Article 4 paragraph 2	51.308,76	51.681,69	12.882,22
PPh Pasal 15 Income Tax Article 15	90,30	930,99	0,00
PPh Pasal 22 Income Tax Article 22	51.837,91	63.084,27	70.631,65
PPh Pasal 26 Income Tax Article 26	51.837,91	63,19	37,86
PBB Land and Building Tax	8.707,70	18.806,65	29.645,46
PPN Pertukaran Hasil GRT	414.713,00	708.134,13	909.459,00
Jumlah Setoran Pajak Total Tax Payment	**707.319,03**	**1.115.693,13**	**1.220.390,30**

Selain pembayaran pajak kepada Negara, adapun kontribusi dari PLN MP terhadap Negara secara tidak langsung melalui peningkatan ROE/BV yaitu PLN MP telah memperoleh dividen kepada PT PLN (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (52,94%) pada tahun 2021. Berdasarkan surat PLN tanggal 6 September 2022, pembagian dividen untuk tahun buku 2021 diterbitkan sebesar Rp1,810 miliar.

In addition to tax payments to the State, another contribution of PLN MP to the State indirectly through an increase in the State Budget is that PLN MP has contributed dividends to PT PLN (Persero), which is a State-Owned Enterprise (SOHE) in 2021. Based on PLN's letter dated September 6, 2022, the dividend distribution for the 2021 financial year was set at Rp1,810 billion.

Kinerja Keberlanjutan Aspek Lingkungan

Sustainability Performance in Environmental Aspect

PLN NP berkomitmen untuk terus memberikan nilai yang positif lingkungan dan menjalankan tanggung jawab Perusahaan atas segala lingkungan sekaligus dukungan atas upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup dan memberikan nilai tambah bagi stakeholders. Komitmen PLN NP untuk tetap menjaga dan mematuhi berbagai aspek kebijakan lingkungan hidup telah dituangkan dalam Keputusan Direksi No.01140/010/DIR/2020 tentang Kebijakan Sistem Manajemen PT Pembangkitan Jawa-Bali. Kebijakan ini mengacu pada peraturan yang berlaku diantaranya PP. 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta ISO 14001 tentang Sistem Manajemen Lingkungan. Kebijakan tersebut mengatur penggunaan sumber daya energi dan sumber daya alam dalam kegiatan operasional dan pemeliharaan unit pembangkit PLN NP secara efisien. Untuk itu, PLN NP berupaya untuk mengefektifkan operasional Perusahaan yang ramah lingkungan dan meminimalkan dampak negatif bagi lingkungan dengan menerapkannya prinsip 3R (reduce, reuse, dan recycle).

PLN NP is committed to continuing to build an environmentally friendly business and carrying out corporate responsibility for environmental aspects as support in efforts to preserve the environment and provide added value to stakeholders. PLN NP's commitment to maintain and sustain while preserving the environment has been outlined in the Decision of the Board of Directors No.01140/010/DIR/2020 concerning the Management System Policy of PT Pembangkitan Jawa-Bali. This policy refers to applicable regulations including PP 22 of 2021 concerning Environmental Protection and Management as well as ISO 14001 concerning Environmental Management Systems. The policy regulates the efficient use of energy resources and natural resources in the operational and maintenance activities of PLN NP's power plant units. Therefore, PLN NP strives to practice environmentally friendly Company operations and minimize negative impacts on the environment by maximizing the 3R principle (reduce, reuse, and recycle).

Manajemen PLN NP secara berkala meninjau kebijakan pengelolaan lingkungan hidup secara berkala untuk menjamin kesesuaian kebijakan dengan peraturan yang berlaku dan efektivitas penerapan program. Kebijakan yang berlaku saat ini merupakan penyempurnaan dari kebijakan sebelumnya yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi 0019.K/010/2018/21 Tentang Kebijakan Sistem Manajemen Terintegrasi. Kesungguhan PLN NP dalam pelaksanaan program tanggung jawab sosial terhadap lingkungan merupakan wujud kontribusi dalam memelihara kualitas lingkungan hidup di sekitar area operasional Perusahaan.

The management of PLN NP always reviews the environmental management policy periodically to review policy conformity with applicable regulations and effectiveness of program implementation. The current policy is a refinement of the previous policy stipulated in the Decree of the Board of Directors 0019.K/010/2018/21 concerning the Integrated Management System Policy. PLN NP's commitment in implementing the environmental social responsibility program is a form of contribution in maintaining the quality of the environment around the Company's operational area.

Kegiatan Tanggung Jawab Lingkungan

Environmental Responsibility Activities

Dalam setiap aktivitas bisnisnya, PLN NP selalu berupaya memperhatikan aspek lingkungan hidup melalui berbagai kegiatan di tahun 2022 sebagai berikut:

In every business activity, PLN NP always strives to take into account environmental aspects through various activities in 2022 as follows:

Program Kepatuhan Pengelolaan Lingkungan

Environmental Management Compliance Program

Program kepatuhan terhadap pengelolaan lingkungan merupakan kegiatan pendampingan dan pemeriksaan secara rutin untuk memastikan kepatuhan PLN NP terhadap pengelolaan lingkungan tersebut.

The Compliance Program for environmental management is a routine monitoring and monitoring activity to ensure PLN NP's compliance with environmental management through

Program Kepatuhan Pengelolaan Lingkungan
Environmental Management Compliance Program

No.	Program Kegiatan Activity Program	Realisasi Kegiatan Activity Realization	
1.	Pengelolaan dan Pengendalian Emisi Managing and Controlling Emissions	• Inventarisasi Emisi Gas Buang • Pengurangan Emisi • Emisi Bahan Perusak Ozon	• Exhaust Gas Emission Inventory • Emission Reduction • Ozone Depleting Substance Emissions
2.	Pengelolaan Air dan Limbah Managing Water and Effluent	• Pengelolaan Domestik Tersier • Pengelolaan/Penerbitan Air • Penggunaan Air • Pemasangan Air Limbah	• Water-related Waste Management • Water Application/Withdrawal • Water Use • Wastewater Discharge
3.	Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Limbah Improving Waste Management and Handling	• Pengelolaan Domestik Tersier Limbah • Pengelolaan Limbah (Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) • Pengelolaan Limbah Non B3	• Waste-related Hazard Management • Toxic and Hazardous (B3) Waste Management • Non-Toxic and Hazardous Waste Management
4.	Menjaga Kelestarian Hayati dan Ekosistem Lahan Managing Biodiversity and Land Restoration	• Konservasi (subsidi kayu, biji, bambu, mangrove dll) • Pemasukan Benih Bagung Hutan • Program pemanfaatan Bantuan Hibah Air Sentang Mudik Pohatan • dll	• Conservation of cocoa, coffee, bamboo, mangrove cultivation, dll • Civil Forest Contribution • Spring Water preservation program at Sentang Mudik Operator • etc

Penggunaan Energi Ramah Lingkungan
Use of Eco-friendly Energy

PLN NP telah melakukan upaya untuk menghemat energi yang memiliki dampak positif bagi alam dan lingkungan hidup, antara lain dengan melakukan penggunaan energi yang ramah lingkungan demi meminimalkan dampak negatif akibat polusi udara ke dan tanah.

Dalam pelaksanaan kegiatannya, PLN NP selain menggunakan energi primer yaitu Bahan Bakar Minyak, Diesel, Batubara dan Gas/LNG/CNG untuk produksi listrik. Beberapa inisiatif program efisiensi energi yang dilakukan pada pembangkit dalam proses produksi listrik antara lain:

- Modifikasi line cooling dari sealing CWP
- Modifikasi line bantuanan dikembalikan menjadi perairan CWP
- Pemanfaatan ulang air limbah WWTP untuk pembasahan Unit
- Pemanfaatan Waste Water Untuk Wash Down Coal Handling Facility
- Upgrade drain-drain valve/ pompa sealing
- Pemanfaatan kombasi air buangan cooling HSD pump
- Melakukan rangkai flow ngoni 2*100 cubic ke height 08
- Pemanfaatan Dry Fog Dust Suppression Conveyor 4A
- Program Cofiring Biomass
- Tray Oil Burner System

PLN NP has made efforts to develop concepts that support nature conservation and are environmentally friendly. One of these is realized through the use of environmentally friendly energy to minimize negative impacts due to air, water and soil pollution.

In carrying out its activities, PLN NP always uses primary energy, namely Fuel Oil, Diesel, Coal, and Gas/LPG/CNG for electricity production. Several initiatives of energy efficiency programs implemented at the power plant in the electricity production process include:

- CWP cooling and sealing line modification
- Modification of backwash line added to CWP cooling
- WWTP wastewater reutilization for Unit cleaning
- Utilization of Waste Water for Wash Down Coal Handling Facility
- Drain valve upgrade pump/ sealing
- Re-utilization of HSD pump cooling water outlet
- Rangkai flow 2x100 cubic meter flow ke UP. tank
- Addition of Dry Fog Dust Suppression Conveyor 4A
- Biomass Cofiring Program
- Tray Oil Burner System

- Fracfection
- Optimising Coal to Air Ratio in Boiler
- Digital Power Plant Boiler Efficiency Tuning to reduce Unburnt Carbon
- Fuel switching to LRC Coal
- Modified Vent Air Intake Valve Disk II
- Online Cleaning Compressor
- Pembangkit Hijau Gas

- Fracfection
- Optimising Coal to Air Ratio in Boiler
- Digital Power Plant Boiler Efficiency Tuning to reduce Unburnt Carbon
- Fuel switching to LRC Coal
- Modified Vent Air Intake Valve Disk II
- Online Cleaning Compressor
- Pembangkit Gas Pipeline

Komitmen dalam penerapan inisiatif efisiensi terhadap energi primer PLN NP untuk pembangkit yang menggunakan biomassa sebagai campuran bahan bakar pembangkit. Jumlah konsumsi energi primer tahun 2022 yaitu 213.022.483,82 Gigajoule menurun dari tahun 2021 sebesar 250.894.001,58 Gigajoule, yang dirinci dalam tabel berikut.

Commitment to implementing efficiency initiatives, especially primary energy for PLN NP, is shown by the use of biomass as a mixture of power plant fuels. Total primary energy consumption in 2022 was 213,022,483.82 Gigajoules, decreased from 2021 of 250,894,001.58 Gigajoules, which is detailed in the following table.

Konsumsi Energi Primer Tahun 2020-2022 (Gigajoule)
Primary Energy Consumption in 2020-2022 (Gigajoule)

Jumlah Energi Primer Total Power Energy	2022	2021	2020
Energi Fosil Fossil Energy			
HSD	305,183.00	1,785,158.04	559,883.45
MFO	462,470.87	1,747,209.09	886,423.61
Batubara Coal	213,377,895.20	132,181,738.00	83,414,675.00
Gas	88,788,884.76	112,863,261.73	108,875,747.13
Energi Terbarukan Renewable Energy			
Air Air	33,890,713.57	8,370,219.32	8,267,493.83
Biomassa Biomass	5,810,544.82	2,186,414.04	
Total	**213,022,483.82**	**250,894,001.58**	**204,330,483.87**

Green Power Plant

Dalam pelaksanaan kegiatannya PLN NP berkomitmen untuk menerapkan teknologi pembangkitan yang ramah lingkungan dan mendorong pengembangan program green power plant. PLN NP berhasil mengelola Green Power Plant Cirata yang meliputi agrihomestri dengan ikan keramba budidaya dan budidaya sebagai bagian dari upaya PLN NP dalam melakukan keseimbangan masyarakat Gedung Dan Centre/Centre yang menjadi pusat kontrol dan monitoring Sendangan Cirata Pembangkit Listrik Tenaga Air dengan underground powerhouse terbesar di dunia dan Pembangkit atau Pembangkit Listrik Tenaga Surya dengan kapasitas 1 MW sebagai pembangkit riset di pulau Jawa.

In the implementation of its activities, PLN NP is committed to implementing environmentally friendly electric power generator technology and encouraging the development of green power plant programs. PLN NP successfully manages the Cirata Green Power Plant, which includes agrihomestry with variants of cultured plants and fruits as part of PLN NP's efforts to protect biodiversity, the Dan Control Center Building, which is the control and monitoring center for the Cirata Dam, a Hydro Power Plant with the largest underground powerhouse in the world, and a 1 MW Photovoltaic or Solar Power Plant as a research plant on the island of

Seiring dengan pertumbuhan energi baru terbarukan di dunia dan kepedulian terhadap produksi listrik melalui energi hijau, PLN NP juga melaksanakan kerjasama dengan Masdar Energy dari Uni Emirat Arab. Melalui kerjasama ini, PLN NP bersama dengan Masdar akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung pertama di Indonesia dan terbesar di Asia Tenggara yaitu PLTS Terapung Cirata 145 MW.

PLN NP terus melakukan inovasi-inovasi yang memberikan nilai. Perusahaan menjadi yang terdepan dalam bisnis pembangkitan serta siap untuk berkontribusi kepada sektor ketenagalistrikan di Indonesia. Beberapa inovasi yang telah dilakukan oleh PLN NP pada tahun 2022 diantaranya Implementasi Co Firing Berkelanjutan, Pengembangan Teknologi Amonia Co-Firing, A-DEOT (Advanced Boiler Optimization and Tuning), dan Implementasi Digital Power Plant.

Along with the development of new and renewable energy in the world and concern for electricity production through green energy, PLN NP was collaboration with Masdar Energy from the United Arab Emirates. Through this collaboration, PLN NP together with Masdar will build the first Floating Solar Power Plant (SPP) in Indonesia and the largest in Southeast Asia, namely the 145 MW Cirata Floating SPP.

PLN NP continues to produce innovations that strengthen the Company's position to be the leading in the electric power generation business as well as a form of contribution to the electricity sector in Indonesia. PLN NP produced several innovations in 2022, including the Implementation of Sustainable Co-Firing, Development of Ammonia Co-Firing Technology, A-DEOT (Advanced Boiler Optimization and Tuning), and Implementation of Digital Power Plant.

Sistem Pengolahan Limbah
Waste Treatment System

Untuk ikut menjaga lingkungan kerja yang bersih dan sehat, diperlukan suatu pengelolaan limbah padat/sampah serta limbah B3 secara terpadu dan terintegrasi sehingga tidak menimbulkan dampak negatif seperti bau, penyakit, kotor, dan dampak buruk lainnya. PLN NP juga melaksanakan pengelolaan limbah cair dan padat baik yang termasuk Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) maupun Non B3 sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

In order to realize a clean and healthy work environment, it is necessary to manage solid waste/garbage and B3 waste in an integrated manner so as not to cause negative impacts such as odor, disease, dirty, and other adverse impacts. PLN NP also carries out liquid and solid waste management both including Toxic and Hazardous Materials (B3) and Non-B3 in accordance with applicable procedures and provisions.

Limbah Cair
Liquid Waste

PLN NP melakukan pengelolaan air limbah sebelum dibuang ke badan air baik itu laut maupun sungai untuk memenuhi baku mutu parameter sesuai aktivitas operasional pembangkit. PLN NP juga memiliki unit instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di setiap unit pembangkitan. Secara umum, IPAL terdiri dari proses fisik (sedimentasi & oil separator), kimia (penambahan koagulan dan flokulan), serta filtrasi (media pasir). Setiap metode ini digunakan untuk menghilangkan parameter kontaminan agar tidak melebihi baku mutu yang dipersyaratkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 tahun 2019 seperti pH, TSS, minyak dan lemak, sisa klor, dan sebagainya. Selain itu, PLN NP melakukan pengukuran kualitas air limbah di unit eksisting dan unit F 10-1 sebagai bentuk

PLN NP conducts wastewater management before being discharged into water bodies, both sea and river, to prevent potential pollution due to operational activities of the power plant. PLN NP owns has a wastewater treatment plant (WWTP) unit in each generation unit. In general, WWTP consists of physical (sedimentation & oil separator), chemical (coagulant and flocculant addition), and filtration (sand media) processes. These three methods are used to control contaminant parameters so that they do not exceed the quality standards required by the Regulation of the Minister of Environment No. 5 of 2019 such as pH, TSS, oil and fats, residual chlorine, and others. In addition, PLN NP conducts wastewater quality measurements in the existing unit and F 10-1 unit as follows:

Unit Existing

Existing Unit

Tabel Kualitas Air Limbah Proses/WWTP

Parameter	Satuan	Baku Mutu*	Grade		Failed		Muara Kanang		Muara Taweur	
			Max	Min	Max	Min*	Max	Min	Max	Min
pH	-	6 - 9	7.77	7.28	8.35	7.36	8.49	7.99	8.55	7.31
TSS	mg/l	100	9.0	2.0	10.0	1.0	26.0	3.0	27.0	3.5
Minyak dan Lemak	mg/l	20	3.4	3.4	3.4	3.4	3.0	0.54	3.0	3.0
Cr Total	mg/l	0.5	0.06	0.04	0.11	0.04	0.5	0.03	0.10	0.02
Tembaga (Cu)	mg/l	0.5	0.103	0.103	0.11	0.11	0.04	0.01	0.01	0.01
Besi (Fe Tot)	mg/l	1	0.34	0.04	0.08	0.34	0.3	0.01	0.01	0.01
Seng (Zn Tot)	mg/l	1	0.04	0.11	1.03	0.27	1.0	0.01	1.1	0.1
Phosphate (PO4)	mg/l	1	0.19	0.10	0.14	0.06	0.00	0.00	0.2	0.04

Tabel Kualitas Air Limbah Bahang/ Air Laut Pendingin

Parameter	Satuan	Baku Mutu*	Grade		Failed		Muara Kanang		Muara Taweur	
			Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min
Suhu Temperature	°C	40	35.4	32.2	37.5	32.6	35.8	31.6	30.1	30.8
Chlorin	mg/l	0.5	0.09	0.04	0.11	0.04	0.5	0.00	0.19	0.02

Kualitas Air Limbah dan Air Limbah Bahang (Air Laut Pendingin) masih dibawah ambang batas

The quality of Wastewater and Heat Wastewater (Cooling Seawater) is still below the threshold

Unit PTP-1

Unit PTP-1

Tabel Kualitas Air Limbah Proses/WWTP

Parameter	Satuan	Baku Mutu*	Indonesia		Bontang		Tg. Awang-awang		Pelton B		Pelton	
			Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min
pH	-	6 - 9	7.80	7.73	8.15	8.1	-	-	-	-	-	-
TSS	mg/l	100	17	11	7	3	-	-	-	-	-	-
Minyak dan Lemak	mg/l	10	0.37	0.37	3.4	3.4	-	-	-	-	-	-
Chlorine (Cl2)	mg/l	0.5	0.059	0.059	0.11	0.11	-	-	-	-	-	-

Parameter	Satuan / Unit	Baku Mutu / Quality Standard	Indramayu		Bambang		Tg. Awar-awar		Pelton 8		Paiton	
			Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min
[illegible]	mg/L	1	0.013	0.013	0.07	0.03	-	-	-	-	-	-
Tembaga (Cu) / Copper (Cu)	mg/L	2	0.8	0.48	1.31	1.02	-	-	-	-	-	-
[illegible]	mg/L	1	0.01	0.008	0.74	0.26	-	-	-	-	-	-
Seng (Zn) / [illegible]	mg/L	10	0.003	0.003	4	0	-	-	-	-	-	-
Fenol/Phenol (PO)	mg/L	10	0.03	0.13	1.38	0.17	1.38	0.17	0.3	0.03	0.8	0.1

* Pelton 3, Tanjung Awar-Awar & Paiton, tidak memiliki kewajiban sampaian pada titik outlet WWTP (di Unit Pembangkit Limbah Cair ke Laut & Pembiakan yang ditimbulkan tidak dikompensasikan dalam titik Unit Pembangkit Limbah Cair ke Laut yang terkait, unit yang bersangkutan
* Pelton 3, Tanjung Awar-Awar & Paiton, do not have compliance obligations at the WWTP outlet point (waste in Center of Particle Discharge of Liquid Waste to the Sea
# The parameter mentioned is not required in the Decree of Permit for Discharge of Liquid Waste to the Sea owned by the UBJ Government

Tabel Kualitas Air Limbah Bahang/ Air Laut Pendingin (Kep.Men.LH. No. 08 4544/menlh/ Sekjen/ PKL 1/7/2013, Kep.Men.LHK No. 08 2844/menlhk/ Sekjen/ PKL.1/8/2017, Kep.Men.LHK No. SK.213/ Menlhk/ Sekjen/ PKL.1/9/2018, Kep.Men.LHK No. SK.443/ Menlhk/ Sekjen/ PKL.1/9/2019, Kep.Men.LHK No. SK.328/ Menlhk/ Sekjen/ PKL.1/7/2021)

Table of Heat Wastewater/Cooling Seawater Quality (Kep.Men.LHK. No. 08 4544/menlhk/Sekjen/PKL.1/7/2013, Kep.Men.LHK No. SK.2844/Menlhk/Sekjen/PKL.1/8/2017, Kep.Men.LHK No. SK.213/Menlhk/Sekjen/PKL.1/9/2018, Kep.Men.LHK No. SK.443/Menlhk/Sekjen/PKL.1/9/2019, Kep.Men.LHK No. SK.328/Menlhk/Sekjen/PKL.1/7/2021)

Parameter	Satuan / Unit	Baku Mutu / Quality Standard	Indramayu		Bambang		Tg. Awar-awar		Pelton 8		Paiton	
			Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min
Suhu/Temperature	°C	40	35	25	35.6	33.7	37.2	31.1	34.8	32.9	33.8	30
Chlorin	mg/L	0.5	0.3	0.06	0.125	0.03	0.08	0.08	0.17	0.1	0.3	0.17

Limbah B3

Hazardous and Toxic Waste

PLN NP dalam melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan regulasi yang berlaku saat ini diantaranya Permen LHK No. 6 tahun 2021 tentang pengelolaan limbah B3. Limbah B3 yang dihasilkan dari operasional pembangkit, maka limbah B3 tersebut disimpan di TPS B3 yang berizin atau terintegrasi di dalam dokumen lingkungan selama masa simpan yang diperbolehkan. Selanjutnya limbah B3 tersebut dikirimkan ke pihak ketiga yang memiliki izin pengelolaan limbah B3 (pengumpul/pemanfaat/pengolah). PLN NP juga bekerja sama dengan transporter yang memiliki perizinan lengkap dari KLHK dan Kemenhub.

PLN NP in managing Hazardous and Toxic waste in accordance with current regulations, including the Regulation of the Minister of Environment and Forestry No. 6 of 2021 concerning the management of Hazardous and Toxic waste. The Hazardous and Toxic waste generated from the operations of the power plant the Hazardous and Toxic waste is stored in a licensed (Hazardous and Toxic Landfill) or integrated in the environmental document for the allowed shelf life. Furthermore, the Hazardous and Toxic waste is handed over to a third party that has a Hazardous and Toxic waste management license (collector/transporter/processor). PLN NP also cooperates with transporters who have complete licenses from the Ministry of Environment and Forestry and the Ministry of Transportation.

Limbah Non-B3

Non Hazardous and Toxic Waste

PLN NP dalam melakukan pengelolaan limbah Non-B3 satu merekomendasikan 24 agar sampah yang berasal di TPA (landsa PLN NP melakukan pemanfaatan limbah organik menjadi berupa maupun briket, sedangkan sampah limbah anorganik seperti kantong kemasan (botol minuman sekali pakai, plastik, dan limbah non-B3 lainnya dikelola di bank sampah binaan di sekitar lokasi pembangkit. Sisa limbah yang tidak dapat dimanfaatkan kembali, diserahkan ke TPA.

PLN NP is conducting Non-Hazardous and Toxic waste management is maximizing the 3Rs so that the waste that ends up in the landfill decreases. PLN NP utilizes organic waste into compost or briquettes, while some inorganic waste such as cardboard boxes, disposable drink bottles (plastic), and other Non-Hazardous and Toxic waste is managed in waste banks built around the power plant site. The remaining waste that cannot be reutilized is handed over to the landfill.

FABA dikategorikan menjadi Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non-B3), sesuai Peraturan Pemerintah (PP) 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kegiatan Pemanfaatan FABA merupakan salah satu bentuk pengelolaan limbah Non B3 yang dilakukan oleh (*by*) pihak penghasil limbah (PLTU). Pemanfaatan FABA yang dilakukan oleh PLTU merupakan kegiatan tambahan (*beyond compliance*) yang dilakukan oleh pihak perusahaan dalam mengelola lingkungan up bottom back. Total pemanfaatan FABA tahun 2022 sebesar 811.895,31 Ton atau 123,67% dari total FABA yang dihasilkan serta meningkat sebesar 102,16% dari total FABA yang dimanfaatkan tahun sebelumnya. Dalam upaya untuk meningkatkan kegiatan Pemanfaatan FABA di Lantai, dilakukan Pemanfaatan FABA sebagai Bahan Baku Substitusi Produk Bahan Pozzolan, Stabilisasi (*subgrade atau sub base*), Bata Ringan, Paving/Conblock, Pemadat Air Asam Tambang, Emak Water dan Fujuk.

FABA is categorized as Non-Hazardous and Toxic Waste (Non-Hazardous and Toxic Waste) according to Government Regulation (PP) 22 of 2021 concerning the Implementation of Environmental Protection and Management. FABA Utilization activities are a form of Non-B3 waste management conducted by waste generating companies (Client). The utilization of FABA conducted by (Client) is an additional activity (beyond compliance) carried out by the Company in managing a bottom environment. Total FABA utilization in 2022 was 811,895.31 tons or 123.67% of the total FABA produced and increased by 102.16% from the total FABA utilized in the previous year. In an effort to reduce FABA Recycling activities in Landfills, FABA Utilization is conducted as a Substitute Raw Material for Concrete Pavement Products, Stabilizer (subgrade or sub-base), Lightweight Brick, Paving/Block, Reclamation for Acid Mine Drainage, Road Water and Fortification.

Berikut adalah berbagai macam inovasi yang dilakukan perusahaan dalam pengelolaan limbah (we B3 maupun non-B3):

The following are various innovations made by the Company in managing both Hazardous and Toxic Waste and Non-Hazardous and Toxic waste:

Unit Pembangkit *Generation Unit*	Inovasi *Innovation*	Deskripsi *Description*
Limbah B-2 Hazardous and Toxic Waste		
UP Indramayu *Indramayu PLU*	Program Perubahan Sistem Bertahi Pengelolaan Slag dengan Sistem Autoclave *Periodic System Change Program of Slag Replacement with Autoclave's System*	Sistem Autoclave yang diakukan mempertungkan kondisi slag seperti (ke cara cepat jenuh, maka akan berubah ke bentuk kerangan (ke kubik) untuk alat tertutup vanis. Dalam ke (Sistem)tungkan waste, periode waktu akan akan dilakukan (*waktu tertuka*).
UP Pelton 9 *Pelton 9PLU*	Pemanfaatan Limbah Sebagai Tempat Pengembang Ekosistem *Addition of Landfills as Coal Ecosystem Place*	Program pemanfaatan limbah sebagai rumah yang mampu ekosistem berbagai dikembangkan di area Coal Handling. Sebagai dilakukan program mulai, budaya coba baik dan (*season*. Coal Tanah akan ekonomi terlihat dan tanaman pada proses ini nadi) embuat *subgrade* (*earth*) akan dengan warna rata dan ditanbakan ke Coal. Hasil untuk dibawa kembali/*recycle* lainnya di area Coal.

Unit Pembangkit Generation Unit	Inovasi Innovation	Deskripsi Description	
UP Rembang Rembang SU	Kopling Komponen Oil Sintetis (KOOPIKSI) (TR) Synthetic Oil Component Coupling (TR) [illegible]	[illegible]	[illegible]
UP Muara Karang Muara Karang SU	Perubahan Metode Pembersihan Pipa Heat Exchanger Menggunakan Specific Tools untuk Mengurangi Pemakaian Kemasan Bekas B3 Changes in Heat Exchanger Pipe Cleaning Method Using Specific Tools to Reduce the Use of Used B3 Packaging	[illegible]	[illegible]
UP Tanjung Awar-Awar Tanjung Awar-Awar SU	Green Used Bag for Preventive Maintenance	[illegible]	[illegible]
UP Cilacap Cilacap SU	Reuse Minyak Pelumas Hasil Filtrasi Reuse of Lubricating Oil from Filtration Results	[illegible]	[illegible]
UP Gresik Gresik SU	Program Pengurangan Biaya [illegible] Portable Blower Heater pada HRSG (CTP) [illegible] Portable Blower Heater on HRSG (CTP)	[illegible]	[illegible]

Link Pembangkit	Inovasi	Deskripsi
UP Muara Tawar Muara Tawar GU	EXHIBITS (Condition Based Asset Management) untuk Cooling Tower Inovasi ini merupakan salah satu program yang diaksanakan pada unit proses Water Treatment Plant dan termasuk ke dalam Secondary Layer (CA). Inovasi ini menghasilkan dokumen audit berupa Value Chain Optimization (apa produksi, komponen, dan supplier terbaru inovasi/ rekreasi program EXHIBITS) pertama Water Treatment Plant sebagai unit proses yang paling penting dalam kegiatan produksi hasil water untuk pengoperasian pembangkit dapat berjalan sehingga mengurangi terjadinya derating, kegagalan gaya, start cepat unit pembangkit	This innovation is one of the programs implemented in the Water Treatment Plant process unit and is included in the UCA family (secondary). This innovation resulted in a positive impact in the form of Value Chain Optimization for producers, consumers, and suppliers on the implementation of the EXHIBITS program can maintain the performance of the Water Treatment Plant as the most important process unit in the production of feed water for power plant operations so as to avoid derating or failing to start the power plant unit.
UP Priok 1-2 Priok 1-2 Inc.	Penggunaan Lateks Berbasis Hidrokarbon Hasil Penggunaan AS volatile Treatment Coupling Reduction of Hydrazine Packaging Water Through the Use of AS Volatile Coupling Treatment	Innovation in addition to reducing the packaging waste through the use of an volatile coupling treatment, the use of hydrazine as a reducing agent in boiler feed water is reduced due to achieving the performance of the steam of which the CO2 operates. This treatment can accelerate the boiler conditioning process for the production process, could reduce CO2 gas 6 to production and reduce the use of IST used packaging waste from reducing the use of hydrazine.

Lanjutan Ide-ide Terdaftar Registered Ide-ideproduct and Tools' Works

UP Indramayu Indramayu GU	Pemanfaatan ULEA sebagai Geotextile di Kawasan Wisata Berbasis Masyarakat Utilization of HMM as Geotextile in Community-Based Tourism Area	Pemasangan : Terkejut dan Kolus Beton dengan Material HMM maksimal 300 mm Pantai Pantaing	Installation : Terkejut and Concrete Cube with HMM Material of 300 mm for Pantaing Beach.
UP Pelabuhan Pelabuhan GU	Budidaya Anggrek Bulan dengan Pemanfaatan FABA sebagai Media Tanam Moon Orchid Cultivation by Utilizing FABA as Planting Media	Hasil pemasaran laut anggrek dengan memanfaatkan fly ash sebagai bahan dengan persentase 80% dan pemanfaatan anggrek bulan pada saat ini dengan penggunaan energi pun sebesar 20% dengan pada dasarnya FABA mengandung tanaman semua unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman	The results of making orchid pots by utilizing fly ash are quite bonds with the composition of cement replaced with a percentage of 80% and the growth of moon orchids is also quite good with the replacement of chemicals by better ash. even if FABA contains nutrients known as the nutrients needed by plants
UP Semarang Tambaklorok GU	Pembangunan Gedung Mobile Pecahan Solar Mudah Bisa Bolong Construction of Solar Mudah Bisa Bolong School Building in Bolong Village	Pembangunan Gedung Pondok Pecahan Solar Mudah Bisa bolong menggunakan FABA sebagai bahan beton pengganti, pasiran, paving bekas dan sebagai lahan	Construction of the Solar Mudah Bisa Bolong School Building in Bolong Village using FABA as a base material for casting, plastering, tiling and land stabilization.
UP Tanjung Awar-Awar Tanjung Awar-Awar GU	Produksi Paving (ABA (FLY) - Tanjung Awar-Awar FABA Paving Production of Tanjung Awar-Awar (TTP	Dapat 2021 hingga 2022 (FLY) Tanjung Awar-Awar telah memproduksi Paving Block di mana komposisi utama campuran yang adalah FABA sebesar 60%.	From 2021 to 2022 Tanjung Awar-Awar CFPP routinely produces Paving Blocks where the main composition of the paving mixture is FABA as 60%.
UP Priok 1-2 Priok 1-2 Inc.	Bekas Nuklah Tidak Layak Pakai Unmarketable Excess Renovation	Kegiatan sedasi rumah di daerah a Lapangan bekerjasama dengan memanfaatkan sisahan material FABA untuk pembangunan rumah sehingga dapat meringankan biaya warga untuk membeli bahan bahan yang layak.	Clean renovation activities even if the power plant area by utilizing FABA materials for house construction so as to increase the welfare of poor people in Jakarta's housing.

Unit Pembangkit Generation Unit	Inovasi Innovation	Deskripsi Description	
Limbah Non B3 Non-Hazardous and Toxic Waste			
UP Indramayu Indramayu PLTU	Pemanfaatan Gergaji Kayu menjadi Pupuk Organik Utilization of Saw Dust into Organic Fertilizer	Ide tersebut dari program inovasi di sekitar perusahaan yang bisa memanfaatkan limbah non B3 organik, dengan pemberdayaan pupuk non organik berkurang, meningkatkan kualitas unsur hara tanah, tanaman dan mempercepat proses tanah	The added value of this innovation program is the change in behavior and the benefits obtained, namely reducing the use of organic non B3 waste, reducing the purchase of external non organic fertilizers, increasing the quality of nutrients for plants and increasing soil structure.
UP Paiton 9 Paiton 9 PLTU	Program Pemanfaatan Abu Sebagai Campuran Ayu Hadan Sebagai Media Tumbuhnya Hot Tanaman Kehang Program of Utilization of Used Iron Water Waste Element as Coral Plant Transplant Media	Implementasi pemanfaatan abu sebagai salah satu bahan baku media transplantasi karang dengan harapan dapat mengurangi limbah non B3 dan biaya, dengan biaya, meningkatkan biodiversitas terumbu karang dan dan biaya, dengan dan terapkan sebagai media tumbuh, meningkat dan sehingga dapat masyarakat.	The implementation of the utilization of used iron as media elements as coral, can transplant media and also benefits, namely reducing the use of non-B3 solid waste of used iron, saving costs, increasing the biodiversity of coral reefs and reef fish, increasing fisheries's fish catches, and increasing empowerment.
UP Bandung Bandung SLC	COAL2OIL (Covalen without oxidation) CHA di area Laboratorium PLTU Bandung COAL2OIL (The output of CHA processing green in the Laboratorium area of Bandung CFPP)	Pemanfaatan limbah organik (sampah) sebagai bahan yang dipakai untuk pakan ternak yang ditambahkan dengan campuran produksi CHA yang dihasilkan sendiri dari limbah dapur PLTU Bandung sehingga menciptakan pakan ternak ternak pet yang dapat bahan baku sehingga menemukan untuk pakan ternak cempe mudah lainnya.	Utilization of organic waste (plant) as an ingredient used by fermented animal feed with a mixture of ash produced CHA production from Bandung CFPP. Animal waste so as to create fermented animal feed that can be durable up to six to nine months and the dry season.
UP Muara Karang Muara Karang GU	Pemberdayaan Kondensor dengan Penyerap Gelombang Radar untuk Menggerti Pelelasan Plastik Solar Condenser Cleaning with Change in Reducing Radar to Replace Plastic Solar Usage	Penggunaan alat bubuk yang lebih efektif, efisien dan ramah lingkungan karena dapat digunakan secara berulang dan dengan hasil pembersihan kondensor lebih bersih dibandingkan metode sebelumnya. Dengan metode yang digunakan tersebut dapat menghasilkan penurunan limbah padat non B3 sehingga tidak memerlukan limbah padat non B3.	The use of a more effective, efficient and environmentally friendly brush so that it can be used repeatedly with the results of cleaning the condenser cleaner than the previous method. With materials that are used repeatedly, it results in a decrease in non-B3 solid waste, so that it does not cause non-B3 solid waste.
UP Tanjung Awar-Awar Tanjung Awar-Awar GU	Pemanfaatan Drum dan Tiba dan Drum Gantungan Sebagai Cerobong Sebagai Tempat Pasir Hasar Tanah pada Integrated Cooling System CSP Desa Utilization of Drums and Iron Pipe Drain Suspension Used Chimney as Annex Yard Place in the Integrated Cooling System of CSP Village	Program pemanfaatan drum dan pipa drain gantungan menjadi limbah pasir hasar/ tanah ini langsung pemanfaat komponen yang mampu menjadi produk sharing sehingga proses yang dihasilkan pemanfaatan satu limbah pasir hasar/ tanah ini dapat dimanfaatkan oleh beberapa bersama. Kawasan Masyarakat (Pokhtas) Sekarra	The program to utilize middleman drums and drain pipes into annex field containers is manifest as a component change that can become product sharing in the form of products produced by this company, namely annex field containers that can be utilized by a group, noted the Sekarra Community Group (Pokhtas)
UP Cilacap Cilacap GU	Pemanfaatan limbah jaga jagan untuk pembakar kabla dusting Utilization of fixed pipe waste for cable dusting burner	Program pemanfaatan limbah jaga jagan untuk pembakar kabla dusting/ sedimentasi pada pembakar kompresor sehingga masuk udara kedalam elektrik/ mendapat dihara kedapat modifikasi dari pembakar boom menjadi jagan dengan menambahkan limbah kapasitas B3.	The program of utilizing waste metal pipes for cable dusting burners has an impact on compressor changes due to the manifold criteria of mechanical/ng efficiency when there is a modification from combustion media to utilizing Non-B3 waste waste.

Unit Pembangkit	Inovasi	Deskripsi
UP Suralaya	Inovasi Modernisasi PAT (Diesel Air Tidak dengan Metode PAC	Dengan metode PAC ini dapat meningkatkan kemasan chemical PAT sehingga dapat menyimpan cadangan cukup PAT. Sebelumnya dilakukan hanya 1PE yang waktu tidak lebih sekali akan mengenai. Metode ini TIPS Limbah Hari ini. Sebelum inovasi ini dilakukan, pencatatan rugi-rugi terjadi pada inovasi PAT yaitu terjadi penurunan dari 1500 liter/ menjadi 950 liter per jam.
UP Muara Tawar Muara Tawar Eco	PLN KACA (Pengolahan Kaca Karam Untuk Tanah Baik dan Bagus)	Inovasi ini berdampak pada peningkatan sistem Underpass saluran dan optimalisasi yang menghasilkan limbah kaca dengan cara mengolahnya kaca menjadi bahan baku.
UP Pelabuhan 1-2 Pelabuhan 1-2 Eco	Pemanfaatan Limbah Biohazard sebagai Bahan Tambahan Eksplosif	Pemanfaatan limbah biohazard sebagai bahan tambahan eksplosif untuk pembakaran termasuk dari menyerahkan sebagai material utama pendukung kuat eksplosif pada waktu tertentu sebagai eksplosif yang memiliki nilai. Sehingga program ini juga bermanfaat untuk mendukung 3 (tiga) di waktu tertentu.

Pemantauan Kualitas Lingkungan
Environmental Quality Control

PLN NP melaksanakan kegiatan pemantauan kualitas lingkungan berupa pengelolaan emisi udara dan emisi gas rumah kaca sebagai upaya untuk memelihara kualitas udara di sekitar area operasional Perusahaan.

PLN NP carries out environmental quality control activities in the form of air emissions and greenhouse gas emissions management as an effort to maintain air quality around the Company's operational areas.

Pengelolaan Emisi Udara
Air Emissions Management

Emisi udara dikelola oleh PLN NP dengan menggunakan alat pengendali seperti electronic precipitator (ESP). Alat ini digunakan bersama untuk mengontrol partikulat yang dihasilkan dari pembakaran batubara. Beberapa pembangkit PLN NP juga menggunakan bahan bakar gas yang termasuk bahan bakar ramah lingkungan. PLN NP juga melakukan pengukuran emisi gas buang yang dihasilkan dari kegiatan operasional. Emisi gas buang untuk seluruh PLTU/PLTGU berupa dari gas cerobong PLTU. Sedangkan unit standby maupun Unit Biasa saja Operation & Maintenance (O&M) PLTU diukur secara berkala. Hasil pengukuran emisi gas buang tersebut menunjukkan bahwa emisi gas buang berada di bawah ambang batas sebagaimana ditentukan dalam baku mutu.

All emissions are managed by PLN NP by using control devices such as electronic precipitators (ESPs). These devices are used primarily to control particulates generated from coal combustion. Several of PLN NP's power plants also use gas fuel, which is an environmentally friendly fuel. PLN NP also measures exhaust emissions resulting from operational activities. Exhaust gas emissions for all oil and gas (CCPP/GCCTP) and coal (CFPB) both working units and the CFP-C Operation & Maintenance Services Business Unit (CMSBU), are measured regularly. The results of the measurement of exhaust gas emissions there that exhaust gas emissions are below the threshold as detailed in the following table:

Unit Existing

Existing Unit

Tabel Emisi Gas Buang PLTU/PLTGU Minyak dan Gas – Unit Eksisting

Parameter	Satuan	Baku Mutu* (Sesuai Dasar Hukum*)	Hasil Pengukuran (Contoh: 12/4/21)		Hasil Kalibrasi (Contoh: 12/4/21)		Hasil Uji Emisi (Contoh: 12/4/21)	
			Max	Min	Max	Min	Max	Min
SO2	mg/Nm3	550	143.4	143.4	11	5	35	2
NO2	mg/Nm3	400	134.3	134.3	141	85	198	161
Total particulate Total particulate	mg/Nm3	30	5.26	5.26	10	5	13.5	5.6

Tabel Emisi Gas Buang PLTU Batubara – Unit Eksisting

Parameter	Satuan (Unit)	Baku Mutu* (Sesuai Dasar Hukum*)	Hasil Pengukuran (Contoh: 12/4/21)		Hasil Kalibrasi (Contoh: 12/4/21)	
			Max	Min	Max	Min
SO2	mg/Nm3	550	45	17	172	171
NO2	mg/Nm3	550	400	116	147	147
Total particulate Total particulate	mg/Nm3	100	20	2	50.1	50.0
Merkuri (Hg) Merkuri (Hg)	mg/Nm3	0.05	0.01	0.01	0.008	0.008

Semua hasil pemantauan merkuri (Hg) pada Unit 1 & 2 di bawah baku mutu (0,05) mengacu pada PLTU.
No control results meet the specific standard limits in each CCPP unit and CFPP unit.

Unit FTP-1

Unit FTP-1

Tabel Emisi Gas Buang PLTU Batubara (Per.Men.LH.6 No.P.15/ 2019)

Parameter	Satuan (Unit)	Baku Mutu* (Sesuai Dasar Hukum*)	Kalibrasi		Pemantauan		% Over-load		Kalibrasi		Pemantauan	
			Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min
SO2	mg/Nm3	550	117.7	105.09	22	7	324.05	324.05	8	8	14	14
NO2	mg/Nm3	550	330.8	300.76	117	40	372.76	372.76	108	108	131	131
Total particulate Total particulate	mg/Nm3	100	35.73	33.55	10	10	77.35	77.35	11.5	11.5	8.87	8.87
Merkuri (Hg) Merkuri (Hg)	mg/Nm3	0.05	0.003	0.003	0.011	0.011	0.003	0.003	0.011	0.011	0.011	0.011

PLN NP juga mengukur kualitas udara ambien dan kebisingan untuk unit existing dan UBJOM FTP-1. Hasil pengukuran tersebut menunjukkan bahwa kualitas udara ambien dan kebisingan unit existing dan UBJOM FTP-1 berada di bawah ambang batas. Oleh PLN NP melakukan beberapa upaya untuk mengendalikan kebisingan baik terhadap pekerja ini pekerja serta sebaran kebisingannya melalui pemindahan kompresor sebagai pendam kebisingan kompresor dan penggunaan alat pelindung diri di area kompresor. Hingga hasil pengukuran kualitas udara ambien dan kebisingan unit existing dan unit FTP-1 ditunjukkan dalam tabel berikut. Udara ambien di sekitar pembangkit menunjukkan hasil memenuhi standar. Ini menunjukkan PLN NP telah berhasil mengelola kualitas udara emisi yang keluar dari cerobong dengan cara menggunakan alat pengendali partikulat ESP serta pengendalian kualitas bahan bakar yang digunakan.

PLN NP also measures ambient air and noise quality for the existing unit and FTP-1 UBJOM. The measurement results show that the ambient air and noise quality of the existing unit and FTP-1 UBJOM are below the threshold. The PLN NP unit made several efforts to control noise both on exposure to workers and noise distribution through the addition of plants as compressor noise absorbers and the use of personal protection equipment in the compressor area. Details of the ambient air and noise quality measurement results of the existing unit and FTP-1 unit are shown in the following table. Ambient air around the power plant shows results that meet the standard. This shows that PLN NP has successfully managed the air emissions quality coming out of the chimney by using ESP particulate control equipment and controlling the quality of the fuel used.

Unit Existing

Existing Unit

Tabel Kualitas Udara Ambient Dan Kebisingan (SK.Gub. Jawa Timur No. 10 / 2000, SK.Gub. DKI No. 551 / 2001, dan PP. RI. No. 41 / 1999, dan Kep.Men LH No.48/11/1996)

Table of Ambient Air and Noise Quality (SK.Gub. East Java No. 10/2000, SK.Gub. DKI No. 551/2001, and PP. RI. No. 41/1999, and Kep.Men LH No.48/11/1996)

Parameter	Satuan Unit	Baku Mutu / Quality Stan-dard*	Gresik		Pelton		Muara Karang		Muara Tawar	
			Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min
SO2	µg/Nm³	365	39.9	8.05	42.9	39.8	38.8	38.4	31.8	31.8
NO2	g/Nm³	150	8.5	8.5	39.8	39.8	34.8	33.8	9.8	8.5
Debu Dust	µg/Nm³	230	51.9	8.00	168.8	51.8	1210.8	87.6	88.8	84.5
Kebisingan Noise	dBA	70-70	51.2	48.8	72.4	47.3	81	56	85.5	54.1

Unit FTP-1

Unit FTP-1

Tabel Kualitas Udara Ambient dan Kebisingan (SK.Gub. Jawa Timur No. 10/2000 tentang Baku Mutu Ambient dan Emisi Sumber Tidak Bergerak)

Table of Ambient Air and Noise Quality (SK.Gub. East Java No. 10/2000 concerning Ambient and Emissions Quality Standards of Unmovable Sources)

Parameter	Satuan Unit	Baku mutu* Quality Stan-dard*	Pasiran		Pelton		Ki. Kanal-Kanal	
			Max	Min	Max	Min	Max	Min
SO2	µg/Nm³	181	19	13.9	16.2	17.1	64.33	15.07
NO2	g/Nm³	97.5	72.8	8.5	8.5	8.5	28.17	13.78
Debu Dust	µg/Nm³	230	8.047	0.0082	43.2	17.1	8.39	8.15
Kebisingan Noise	dBA	70-80	60.5	45.4	58.6	47.4	65.8	43.8

Tabel Kualitas Udara Ambient dan Kebisingan untuk PLTU Indonesia (Peraturan Pemerintah No. 41/1999 tentang Baku Mutu Kualitas Udara Ambient Nasional)

Table of Ambient Air and Noise Quality for Indonesia's (1999 Government Regulation No. 41/1999 concerning National Ambient Air Quality Standards)

Parameter	Satuan	Baku Mutu	TL Awal-Awal	
			Max	Min
SO2	µg/Nm3	365	70,56	14,55
NO2	µg/Nm3	150	76,79	13,62
Debu (Dust)	µg/Nm3	230	121,00	33,59
Kebisingan (Noise)	dBA	55,00	63,2	46,2

Tabel Kualitas Udara Ambient dan Kebisingan untuk PLTU Rembang (SK Gub. Jateng No. 08/2021 tentang Baku Mutu Udara Ambien di Provinsi Jawa Tengah)

Table of Ambient Air and Noise Quality for Rembang (1999 SK Gub. Central Java No. 08/2021 concerning Ambient Air Quality Standard in Central Java Province)

Parameter	Satuan	Baku Mutu	TL Awal-Awal	
			Max	Min
SO2	µg/Nm3	365	74,1	70,1
NO2	µg/Nm3	150	87,1	70,1
Debu (Dust)	µg/Nm3	230	72,1	59,9
Kebisingan (Noise)	dBA	55,00	54,5	51

Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca

Greenhouse Gas Emissions Reduction

Perusahaan mendukung upaya pemerintah dalam program mitigasi emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Hal ini tercermin melalui upaya dan inisiatif PLN NP terkait pengurangan emisi kegiatan operasi dengan melakukan penghematan energi dan menjalankan program pemerintah pintar yang mampu menyerap CO2 di dalam maupun di luar wilayah operasi PLN NP. Sama seperti listrik, ketersediaan EBT sebagai sumber energi tidak terbatasi sumber terbatas, tidak itu. Perusahaan berupaya menggunakan sumber energi tersebut secara optimal, antara lain, dengan berupaya melakukan upaya efisiensi atau penghematan.

The Company supports the government's efforts in the Greenhouse Gas (GHG) emission mitigation program. This is reflected through PLN NP's efforts and initiatives related to reducing emissions from operating activities by saving energy and realizing low planting programs that can absorb CO2 inside and outside PLN NP's operating areas. Just like electricity, the availability of fuel as renewable energy source is increasingly limited. Therefore, the Company seeks to use this energy source wisely, among others, by striving to make efficiency or savings efforts.

Program penguranga emisi melalui Carbon Offset atau dikenal juga sebagai pembelian kredit karbon guna mengurangi pernahan pelepasan emisi dari pembakaran bahan bakar fosil. Carbon offset di lingkungan perusahaan pertama kali berhasil dilakukan antara lembaran PLTU Paiton dengan PT.PJ. Operasi dengan kapasitas 1300 Ton CO2. Kredit karbon yang dipergunakan berasal dari mekanisme sukarela VCS (Verified Carbon Standard) yang diverifikasi oleh pihak internasional Southpole, Inc.

The Company conducts carbon offset program through Carbon Offset or also known as the purchase of carbon credits to reduce the spending of emission releases from burning fossil fuels. Carbon offset within the company was first successfully carried out between the collaboration of PLTU Paiton and PT.PJ. Operation with the amount of 1300 tons of CO2. The carbon credits traded come from a voluntary VCS (Verified Carbon Standard) mechanism verified by the international party, Southpole, Inc.

Perusahaan juga melakukan pengendalian terhadap emisi bahan perusak ozon (BPO) yang menjadi salah satu sumber perubahan iklim. BPO adalah senyawa kimia yang terdeteksi dapat bereaksi dengan molekul ozon di lapisan stratosfer. BPO biasa terdapat di mesin pendingin ruangan (AC), kulkas, dan tabung pemadam api. Penggunaan BPO akan menyebabkan terjadinya penipisan lapisan ozon yang mengakibatkan terjadinya dampak lingkungan, ketersediaan sumber air bersih, terjadinya rantai makanan di laut, menurunnya hasil produksi pertanian dan sebagainya. Oleh karena dampak buruk akibat penggunaan BPO sangat besar, PLN NP mendukung penuh kebijakan pemerintah untuk mengurangi penggunaan BPO. Langkah konkret yang dilakukan Perusahaan adalah menggunakan AC dengan refrigerant (zat pendingin) yang ramah lingkungan. Inisiatif ini yang sama berkaitan untuk penggunaan AFAH (Alat Pemadam Api Ringan), yaitu menggunakan zat pemadam non-Halon. Dengan demikian, Perusahaan ikut andil dalam upaya untuk mencegah penipisan lapisan ozon di stratosfer yang memicu pemanasan global dan potensial menimbulkan masalah bagi kulit dan pernafasan.

Pemantauan terhadap emisi gas rumah kaca juga dilakukan melalui pengukuran komposisi emisi gas rumah kaca secara berkala sebagaimana dituangkan dalam tabel berikut.

The company also manages ozone-depleting substances (ODS) emissions, which are one of the sources of climate change. ODSs are chemical compounds that can potentially react with ozone molecules in the stratosphere. ODSs are commonly found in air conditioners, refrigerators, and fire extinguishers. The use of ODSs will cause depletion of the ozone layer which results in environmental degradation, habitat loss, water scarcity, damage to the marine food chain, decreased agricultural production and so on. Because the adverse impact of ODS utilization is very large, PLN NP fully supports government policies to tighten the use of ODSs. A concrete step taken by the Company is to use air conditioners with environmentally friendly refrigerants. The same policy applies to the use of AFAH (Light Fire Extinguisher), which uses non-Halon extinguishing agent. Thus, the Company contributes its efforts to prevent the depletion of the ozone layer in the atmosphere which triggers global warming and potentially causes problems for the world and its inhabitants.

Monitoring of greenhouse gas emissions is also carried out through periodic measurements of the composition of greenhouse gas emissions as described in the following table.

Tabel Emisi Gas Rumah Kaca PLN NP Tahun 2020-2022
Table of Greenhouse Gas Emissions of PLN NP in 2020-2022

Deskripsi Description	Satuan Unit	2020	2021	2022
Pekan	Ton CO2	4.623.730,80	5.957.835,77	6.644.032,30
Muara Enim	Ton CO2	2.520.395,94	3.134.446,63	3.383.000,98
Cilacap	Ton CO2	1.703.673,81	1.845.280,14	2.270.330,84
Muara Tawar	Ton CO2	1.503.032,70	1.887.930,6	1.730.167,47
Indramayu	Ton CO2	3.970.052,40	5.059.874,64	6.133.975,88
Rembang	Ton CO2	4.240.930,26	5.432.679,77	6.698.775,95
Pekan 9	Ton CO2	4.395.790,83	4.310.196,91	4.185.884,63
Pacitan	Ton CO2	1.731.690,90	1.147.990,84	1.071.795,89
TI Awan Asap	Ton CO2	4.571.170,03	4.603.170,74	4.980.375,86
Total	**Ton CO2**	**34.680.736,15**	**36.580.078,04**	**39.222.171,27**

Unit Existing

Existing Unit

Tabel Komposisi Emisi Gas Rumah Kaca
Table of Greenhouse Gas Emissions Composition

Emisi Gas Rumah Kaca Greenhouse Gas Emissions	Pabon (Ton)	Muara Karang (Ton)	Semarang (Ton)	Priuk Tanker (Ton)
CO_2	4.824.683,83	2.350.880,36	2.274.740,24	1.238.737,07
SO_2	79,18	54,78	68,0	30,1
N_2O	73,97	5,51	4,84	3,65

Unit PTP-1

Unit PTP-1

Tabel Komposisi Emisi Gas Rumah Kaca
Table of Greenhouse Gas Emissions Composition

Emisi Gas Rumah Kaca Greenhouse Gas Emissions	Indramayu (Ton)	Tambaklorok (Ton)	TL Awar-Awar (Ton)	Pabon II (Ton)	Pacitan (Ton)
CO_2	4.824.683,83	2.350.880,36	2.350.880,36	2.274.740,24	1.238.737,07
SO_2	79,18	54,78	54,78	68,0	30,1
N_2O	73,97	5,51	5,51	4,84	3,65

Keanekaragaman Hayati
Biodiversity

PLN NP melaksanakan penanaman pohon di seluruh unit pembangkit sebagai salah satu program Green and Clean Power Plant. Program ini merupakan wujud peran PLN NP untuk menjaga emisi karbondioksida yang berasal dari proses produksi listrik. Penanaman pohon dapat menyerap proses produksi listrik oleh emisi dan secara sama karbondioksida dapat berkurang. Berikut adalah daftar program penanaman pohon selama tahun 2021:

PLN NP carries out tree planting in all generation units as one of the Green and Clean Power Plant programs. This program is a form of PLN NP's role to overcome carbon dioxide emissions from the electricity production process. Tree planting can make the economy, production process with and impact due to the carbon dioxide that can be absorbed. The following is a list of tree planting programs during 2021:

Program Penanaman Pohon Tahun 2022
Tree Planting Program in 2022

Deskripsi			
UP Indramayu	1.717	11.098	8.900
UP Pelabuhan Ratu	1.000	3.000	4.000
UP Rembang	6.015	345	1.319
UP Muara Karang	1.321	0	25.932
UP Tanjung Awar-Awar	585	455	4.500
UP Labuan	112.000	1.500	44.000
UP Gresik	9.674	4.500	4.500
UP Muara Tawar	2.500	0	1.800
UP Pelabuhan Ratu	10.819	4.500	10.700
Jumlah Penanaman Pohon	**145.344**	**24.387**	**130.434**

Selain menanam pohon mangrove, PLN NP juga membangun rumah kaca (rumah burung hantu) sebagai tempat perlindungan burung hantu dan juga membangun penangkaran burung hantu sebanyak 165 buah dengan jumlah burung hantu kurang lebih mencapai 300 ekor yang menempati rumah.

In addition to planting mangrove trees, PLN NP also built a rabuha (owl house) as an owl sanctuary and also built owl breeding as many as 165 pieces with the number of owls already reaching 300 owls occupying the owl house.

Menangani Pengaduan Lingkungan
Handling Environmental Complaints

PLN NP menilai bahwa pengaduan adalah bentuk kepedulian masyarakat luas dan pengguna jasa demi terlaksana Perusahaan Kelestarian. PLN NP dalam mewujudkan lingkungan sekitar area operasional baik dan sehat telah melakukan Upaya pengaduan perusahaan terhadap lingkungan secara konsisten. PLN NP menyediakan fasilitas pengaduan terkait lingkungan sebagai upaya antisipasi untuk terciptanya menciptakan lingkungan yang sehat. Mekanisme pengaduan tersebut dapat disampaikan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya melalui *Whistleblowing System* (WBS) yang bisa diakses pada website PLN NP atau melalui kontak kantor Perusahaan PLN NP sebagai berikut:

PLN NP considers that complaints are a form of concern from the wider community and service users for the Company's progress. PLN NP's commitment in creating a good and healthy environment around the operational area has encouraged consistent environmental service company management efforts. PLN NP provides a complaint facility related to the environment as an anticipation effort to develop create a sustainable environment. The corporate complaint mechanism can be submitted by the public and other stakeholders through the Whistleblowing System (WBS) which can be accessed on the PLN NP website or through the contact of the Corporate Secretary of PLN NP as follows:

pengaduan@plnnusantarapower.co.id

www.plnnusantarapower.co.id/wbs

1. Lobby Utama PT PLN NP Kantor Pusat
2. Lobby Gedung Administrasi Seluruh Unit PLN NP
1. Main Lobby of PT PLN NP Head Office
2. Administration Building Lobby of All PLN NP Units

Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran
Whistleblower Management Committee

PT PLN Nusantara Power
Jl. Kebintang Baru No. 11
Surabaya, Jawa Timur 60231
Indonesia

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

PT PLN Nusantara Power
Kantor Pusat Head Office
Jl. Kebintang Baru No. 11
Surabaya, Jawa Timur 60231

Kantor Jakarta
Jakarta Office

18 Office Park Lt. 2 Ariobo
Jl. TB Simatupang No. 18
Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Indonesia

031-9283180

031-9283180

Melalui pengelolaan lingkungan yang baik sepanjang tahun 2022 PLN NP tidak menerima pengaduan terkait lingkungan dari masyarakat sekitar maupun pemangku kepentingan lainnya, sehingga PLN NP tidak mendapatkan denda atau sanksi non-moneter atas pelanggaran terhadap undang-undang dan peraturan terkait lingkungan.

Through good environmental management, during 2022 PLN NP did not receive any environmental complaints from the surrounding community or other stakeholders, so PLN NP did not receive any fines or non-monetary sanctions for non-compliance with the environmental laws and regulations.

Biaya Kegiatan Pengelolaan Lingkungan
Environmental Management Activity Costs

Anggaran Biaya untuk kegiatan pengelolaan lingkungan PLN NP tahun 2022 baik di unit eksisting dan unit [illegible] sebesar Rp78,14 miliar naik dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp78,02 miliar

Budget for PLN NP environmental management activities in 2022 both in the existing unit and the [illegible] unit was Rp 78.14 billion, an increase compared to 2021 which was Rp 78.02 billion

Tabel Anggaran Kegiatan Pengelolaan Lingkungan PLN NP Tahun 2019-2022 (Rp Ribu)
Table of PLN NP Environmental Management Activities Budget in 2020-2022 (Rp Thousand)

Deskripsi Description	2020	2021	2022
UP Cirebt (Unit 3) (L)	10.975.375	12.307.100	8.840.870
UP Muara Karang (Power Energy) (L)	10.335.613	8.750.350	9.283.000
UP Muara Tawar (Muara Tawar) (L)	10.358.623	10.308.779	9.897.737
UP Pelabuhan (Pelabuhan) (L)	14.636.889	16.451.081	15.235.534
UP Cilacap (Cilacap) (L)	9.736.375	11.182.577	7.827.850
UP Bolaang (Bolaang) (L)	1.375.888	1.178.386	1.160.700
UBOH PLTU Indramayu (PLTU Indramayu) (L)	3.666.888	3.883.188	3.888.250
UBOH PLTU Bantaeng (PLTU Bantaeng) (L)	3.830.853	3.321.888	4.162.888
UBOH PLTU Jeneponto (PLTU Jeneponto) (L)	3.870.888	3.625.286	3.530.350
UBOH PLTU Pelabuhan Ratu (PLTU Pelabuhan Ratu) (L)	2.995.818	2.961.689	2.777.500
UBOH PLTU Rembang (PLTU Rembang) (L)	2.868.370	2.868.580	2.488.675
Jumlah Total	**73.183.717**	**78.821.048**	**70.143.381**

PLN NP menyediakan anggaran tersebut sebesar Rp70,37 miliar untuk kegiatan lainnya seperti sosial terkait lingkungan selama tahun 2022

PLN NP realized this budget at Rp70.37 billion for social environmental activities related to the environment during 2022.

Tabel Realisasi Biaya Kegiatan Pengelolaan Lingkungan PLN NP Tahun 2019-2022 (Rp Ribu)
Table of Cost Realization of PLN NP Environmental Management Activities in 2020-2022 (Rp Thousand)

Deskripsi Description	2020	2021	2022
UP Cirebt (Unit 3) (L)	8.977.573	13.687.887	8.897.530
UP Muara Karang (Power Energy) (L)	10.950.373	11.698.330	11.130.700
UP Muara Tawar (Muara Tawar) (L)	10.830.803	14.007.751	8.897.888
UP Pelabuhan (Pelabuhan) (L)	14.493.997	17.245.230	16.187.006
UP Cilacap (Cilacap) (L)	8.830.908	7.958.349	6.814.735
UP Bolaang (Bolaang) (L)	1.688.983	1.481.430	1.350.849
UBOH PLTU Indramayu (PLTU Indramayu) (L)	3.888.869	3.883.888	1.778.500

Deskripsi *Description*	2020	2021	2022
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Jumlah/ *Total*	**74.788.741**	**80.700.844**	**75.072.183**

Penghargaan dan Sertifikasi Di Bidang Lingkungan yang Dimiliki
Awards and Certifications in the Environmental Sector

PLN NP telah menerapkan sistem manajemen lingkungan secara terpadu dan terintegrasi dengan sistem manajemen yang lain serta terus berupaya melaksanakan upaya-upaya perbaikan berkesinambungan untuk mencapai visi misi PLN NP. Dengan komitmen PLN NP tersebut, PLN NP dan Anak Perusahaan mendapatkan beberapa sertifikasi antara lain ISO 14001:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan, ISO 50001:2011 tentang Sistem Manajemen Energi, dan ISO 45001:2018 tentang Sistem Manajemen Aset. PLN NP juga memberikan karyawan dengan jaminan sertifikasi terkait lingkungan diantaranya penanggung jawab Pengendalian dan Pencemaran Air (PPPA), penanggung jawab Pengendalian dan Pencemaran Udara (PPPU), operator Pengendalian dan Pencemaran Air (PPA), operator Pengendalian dan Pencemaran Udara (PPU), dan Pengendalian Limbah B3 (PLB3).

PLN NP has implemented the integrated environmental management system and is integrated with other management systems as well as consistently carrying out continuous improvement efforts to achieve PLN NP's vision and mission. With PLN NP's commitment, PLN NP and its subsidiaries received several certifications including ISO 14001:2015 on Environmental Management System, ISO 50001:2011 on Energy Management System, and ISO 55001:2014 on Asset Management System. PLN NP also provides employees with various certifications related to the environment including the person in charge of Water Pollution and Control (PPPA), person in charge of Air Pollution and Control (PPPU), Water Pollution and Control operator (PPA), Air Pollution and Control operator (PPU), and B3 Waste Control (PLB3).

Selama Tahun 2022, PLN NP berhasil mendapatkan penghargaan dibidang lingkungan yaitu:

During 2022, PLN NP managed to get awards in the environmental sector, namely:

20 April 2022
April, 2022

PLN berhasil mendapatkan penghargaan Platinum di Anugerah [illegible] yang diselenggarakan oleh Kementerian [illegible] atas kategori:
- [illegible]
- [illegible]

PLN was the 2022 Corporate Governance Transparency (TTG) award recipient by Majalah Info Investor and Bank Mutiara, namely:
- [illegible]
- [illegible]

Penghargaan Tertinggi Emas Kategori 2022
Penghargaan Tertinggi Emas Kategori 2022

27 Oktober 2022

[illegible]

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

[illegible]

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

27 Oktober 2022

[illegible]

- [illegible]
- [illegible]

[illegible]

- [illegible]
- [illegible]

29 Desember 2022

PLN NUSANTARA POWER RAIH 5 PENGHARGAAN PROPER

PLN NUSANTARA POWER RAIH 5 PENGHARGAAN PROPER Emas Tahun 2022

PLN NP Achieves 5 Gold PROPER Awards in 2022

Kinerja Sosial
Social Performance

Kinerja Sosial Aspek Ketenagakerjaan
Employment and OHS Commitment and Policy

Komitmen dan Kebijakan Ketenagakerjaan dan K3
Employment and OHS Commitment and Policy

Sumber Daya Manusia merupakan aset utama bagi PLN NP dalam pencapaian indikator kinerja dan keberlanjutan Perusahaan. Karena itu, Perusahaan selalu berupaya untuk memenuhi hak-hak karyawan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Human Resources are the main asset for PLN NP in achieving the Company's performance indicators and sustainability. Therefore, the Company always strives to fulfill employee rights in accordance with the provisions of applicable laws and regulations.

Pelaksanaan inisiatif keberlanjutan aspek ketenagakerjaan diantaranya mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain aspek ketenagakerjaan, Perusahaan juga memperhatikan aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) bagi karyawan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

The implementation of sustainability initiatives in the employment aspect refers to the Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 2003 concerning Manpower. In addition to the employment aspect, the Company also prioritizes the Occupational Health and Safety (K3) aspect for employees as stipulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1970 concerning Occupational Safety, Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 2009 concerning Electricity, and Government Regulation No. 50 of 2012 concerning the Implementation of Occupational Health and Safety Management System.

Perusahaan berkomitmen untuk mengelola Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi karyawan maupun pihak lain yang berkontribusi di lingkungan PT PLN NP melalui penerapan SMK3 sesuai SOC 810012030 dan PP 50 Tahun 2012, dengan target tingkat kecelakaan nihil atau zero accident. Komitmen tersebut juga tertuang dalam Kebijakan Sistem Manajemen Terintegrasi PT PLN NP, Safety Golden Rules, dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Oleh karena itu, Manajemen PLN NP dukungan sebagai Tim Perunding dan Tim Perunding dalam penyusunan dan kesepakatan PKB. PKB yang berlaku saat ini yaitu PKB antara PLN NP dengan Serikat Pekerja PKB 2021-2024 Nomor 111 PKB 0001.A/011/ DIR/2021 dan Nomor SP PKB 0013/SP-SPKEE/2021 telah didaftarkan ke Kementerian Ketenagakerjaan dengan Nomor B.P. 898.08/1830/2021 tanggal 31 Januari 2021.

The Company is committed to ensuring Occupational Health and Safety for employees and other parties who are active within PT PLN NP through the implementation of OHSMS, in accordance with SOC 810012030 and PP 50 of 2012, with a target of zero accident rate. This commitment is also contained in the Integrated Management System Policy of PT PLN NP, Safety Golden Rules, and Collective Labor Agreement (CLA). Therefore, PLN Nusantara Power Management took part as a Negotiating Team and Formulation Team in the CLA preparation and agreement of the CLA. The current applicable CLA is between PLN NP and the PKB Workers Union 2021-2024 No. 111 PKB 0001.A/011/DIR/2021 and SP PKB No. 0013/SP-SPKEE/2021 has been registered with the Ministry of Manpower with REF No. B.P. 898.08/1830/2021 dated January 31, 2021.

Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Ketenagakerjaan
Employment Social Responsibility Activities

Selama Tahun 2021 PLN NP telah melakukan inisiatif keberlanjutan aspek ketenagakerjaan meliputi sebagai berikut:

During 2021, PLN NP carried out sustainability initiatives in the employment aspect, including:

Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Kompetensi Karyawan

Employees Education, Training, and Competency Development

Dalam kontribusinya terhadap upaya keberlanjutan lingkungan berkelanjutan, PLN NP melakukan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan knowledge, skill, dan ability yang berfokus untuk meningkatkan kompetensi, performance, dan sikap mental karyawan PLN NP melalui PIK Academy. Program yang dilaksanakan berbeda-beda sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan tiap karyawan. Program PIK Academy melibatkan Direktur Utama sebagai Dean dan anggota Direksi sebagai Vice Dean serta Kepala Divisi, General Manager dan Kepala Sekolah sebagai learning steering committee. Pengelola PIK Academy sejumlah 13 karyawan telah memenuhi standar internasional yang dibuktikan dengan sertifikat Corporate Learning Technologist untuk mengelola learning process dan sudah tersertifikasi internasional. Selain itu, PIK Academy juga sudah tersertifikasi ISO 21001:2018 dari British Standard Institution (BSI) yang merupakan standar yang diakui secara internasional untuk dapat menyediakan layanan pembelajaran yang bermutu dan efektif bagi peserta/ns layanan Pendidikan.

In its commitment to sustainability initiatives towards environment, PLN NP conducts education and training programs to improve knowledge, skills, and attitudes that aim to improve the competence, performance, and mental attitude of PLN NP employees through PIK Academy. The programs implemented are different according to the competencies needed by each employee. PIK Academy program involves President Director as Dean and members of the Board of Directors as Vice Dean as well as Head of Division, General Manager and Head of Unit as learning steering committee. 13 employees managing PIK Academy have met international standards as evidenced by the Corporate Learning Technologist certificate to manage international standard learning processes and certified internationally. PIK Academy has also received ISO 21001:2018 standards from the British Standard Institution (BSI), which is an international recognized standard for being able to provide quality and effective learning services for education service recipients.

Kegiatan Pendidikan, pelatihan dan pengembangan pegawai yang telah dilaksanakan selama tahun 2021 yaitu:

- Pelatihan Teknis dan Non-Teknis
- Sertifikasi Teknis dan Non-teknis
- Workshop Teknis dan Non-Teknis
- Program Purna
- Soft Leadership
- PIK Class
- PKD

PLN NP held the following education, training, and employee development activities during 2021:

- Technical and Non-Technical Training
- Technical and Non-Technical Certification
- Technical and Non-Technical Workshops
- Full Program
- Soft Leadership
- PIK Class
- PKD

Penghargaan Produktivitas Karyawan

Employee Productivity Award

Dalam rangka memberikan evaluasi kinerja kepada karyawan, serta untuk meningkatkan produktivitas karyawan, kinerja, kompetensi, kreativitas serta digital mindset maka PLN NP memberikan penghargaan bagi karyawan yang produktif di lingkungan Perusahaan. Pemberian penghargaan ini diberikan berdasarkan absensi, perilaku disiplin, tingkat produktivitas maupun prestasi yang diraih oleh karyawan. Adapun pemberian yang diberikan oleh PLN NP kepada karyawan yang produktif berupa dengan bentuk yang telah ditetapkan yaitu, dalam bentuk hadiah atau sertifikat.

In order to provide performance evaluation to employees, as well as to increase employee productivity, performance, competence, creativity, and digital mindset, PLN NP provides awards for productive employees within the Company. This award is provided based on attendance, disciplinary behavior, productivity levels, as well as the employees achievements. PLN NP grants awards to productive employees following the predetermined criteria in the form of gifts or certificates.

Pemberian Kesejahteraan
Welfare Support

Dalam rangka meningkatkan motivasi kinerja agar semakin berkembang untuk berprestasi dapat memberikan kemitraan terbaik bagi Perusahaan serta untuk menarik calon karyawan potensial, dan mempertahankan karyawan kompeten sekaligus meningkatkan kesejahteraan karyawan, PLN NP menerapkan sistem remunerasi yang adalah dan kompetitif dengan industri sejenis. Komponen yang diberikan kepada karyawan PLN NP dibagi menjadi 2 yaitu penghargaan ekstrinsik (kompensasi dan manfaat karyawan) dan penghargaan intrinsik (program maupun kebijakan bersifat jangka).

- Kompensasi Tetap (Pay for Person)
- Kompensasi tidak tetap
  - Kompensasi jangka Pendek terdiri atas:
    a) Pay for Position
    b) Pay for Performance
    c) Insentif Kinerja/Bonus
    d) THR
    e) Tunjangan Cuti Tahunan
  - Kompensasi jangka Panjang terdiri atas:
    a) Tunjangan Cuti Besar
    b) Penghargaan Kesetiaan Kerja (emaskan)
    c) Bantuan Ganti Rugi/Pelatihan Luar Biasa
    d) Jaminan Sosial, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
    e) Penghargaan Pensiun
- Manfaat Karyawan
- Penghargaan Intrinsik

Sebagai bentuk PLN NP melaksanakan pemberian remunerasi. Gaji sebuah karyawan baik wanita maupun laki-laki telah sesuai dengan ketentuan pemberian upah yang ditetapkan Pemerintah. Selain itu, PLN NP juga memberikan insentif atau bonus berdasarkan kinerja karyawan serta tunjangan cuti tahunan maupun cuti besar dan penghargaan kesetiaan kerja (emaskan) sebagai bentuk apresiasi sehingga karyawan dapat senantiasa meningkatkan produktivitas dan loyalitasnya. PLN NP juga menyediakan Bantuan Ganti Rugi yaitu bantuan yang diberikan oleh Perusahaan kepada karyawan yang mengalami musibah akibat pekerjaan Luar biasa atau kondisi kesehatan kerja.

In order to increase performance motivation in order to be more challenged to excel and make the best contribution to the Company and to attract potential candidates, and retain competent employees, while improving employee welfare, PLN NP implements a remuneration system that is equal and competitive with similar industries. Remuneration provided to PLN NP employees is divided into 2, namely extrinsic rewards (compensation and employee benefits) and intrinsic rewards (programs or other facilities including).

- Fixed Compensation (Pay for Person)
- Non-Fixed Compensation
  - Short-Term Compensation consists of:
    a) Pay for Position
    b) Pay for Performance
    c) Performance Incentive/Bonus
    d) Religious Allowance (THR)
    e) Annual Leave Allowance
  - Long-Term Compensation consists of:
    a) Major Leave Allowance
    b) Work Loyalty Award (per 5 years)
    c) Compensation Assistance/Extraordinary Injuries
    d) Social Security, Work Accident Insurance and Life Insurance
    e) Retirement Award
- Employee Benefits
- Intrinsic Rewards

Annually, PLN NP adjusts the remuneration. Salaries for all employees, both female and male, are in accordance with the wage provisions set by the Government. Moreover, PLN NP also provides incentives or bonuses based on employee performance as well as annual and major leave allowances and work loyalty awards (per 5 years) as a form of appreciation so that employees can always increase their productivity and loyalty. PLN NP also provides Compensation Assistance, which is assistance provided by the Company to Employees who experience disasters due to extraordinary events or due to work accidents.

Program Pensiun
Retirement Program

Karyawan yang mencapai batas usia pensiun yaitu 56 Tahun mendapatkan manfaat pensiun dari PLN NP. Beberapa program jaminan sosial dan hari tua yang diberikan oleh PLN NP antara lain:

- Program Manfaat Pasti
  Program ini dikelola oleh pihak Dana Pensiun PLN (Pensiun) atau DP-PLN dengan pendanaan yang dipenuhi DP-PLN berasal dari iuran Peserta sebesar 5% s. Penghasilan Dasar Pensiun (PDP) dan iuran Pemberi Kerja sebesar 18,24% s. PDP. Hal ini dalam dan sesuai dengan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor Nomor 0310.K/DIR/2022 tanggal 30 Mei 2022.
- Program Iuran Pasti
  Program ini dikelola oleh pihak Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) untuk karyawan dengan iuran Peserta sebesar 5% s. Pay for Pension (PF) serta iuran Pemberi Kerja sebesar 9% s. PF.

PLN NP juga menyediakan bekan sebuah karyawan pada program (BTL) Kemanggalyan berupa program bernama Hari Tua (HT), bernama Kesehatan Kerja (bernama Kematian, bernama Kehilangan Feberpan dan Jaminan Pensiun (JP) serta turut memberikan pendampingan masa pensiun melalui program Masa Persiapan Pensiun (MPP). Demikianlah dan kelangsanya mendapatkan bantuan (amal) Pensiun sehubahan sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 0310.K/DIR/2013/2017 tentang Bantuan Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan Yang Tidak Berhenti Bekerja (Pensiunan) di PLN NP.

Employees who reach the retirement age limit of 56 years receive pension benefits from PLN NP. Several social security and retirement programs implemented by PLN NP include:

- Defined Benefit Pension Plan
  This program is managed by the PLN Pension Fund (Pension) or DP-PLN with funding obtained by DP-PLN originating from Participants' contributions of 5% s. Basic Retirement Income (PDP) and Employer contributions of 18.24% s. PDP. This is stipulated and according to PT PLN (Persero)'s Board of Directors Decree on the Decision of the PT PLN (Persero) Pension Fund No. 0310.K/DIR/2022 May 30, 2022.
- Defined Contribution Program
  This program is managed by the Financial institution Pension Fund (DPLK) for employees with Participant contributions of 5% s. Pay for Pension (PF) and Employer contributions of 9% s. PF.

PLN NP also enrolls all employees in the Employment (BTL) program in the form of Old Age Security (HT) programs, Work Accident Benefits, Death Benefits, Job Loss Benefits and Retirement Benefits (JP) and also provides retirement assistance through the Retirement Preparation Period (MPP) program. Permanent and their families receive health care assistance following the Board of Directors Decree No. 0310.K/DIR/2013/2017 concerning Health Care Assistance for the Retired Employees at PLN NP.

Bidang Kesehatan Kerja, Keselamatan Kerja dan Keamanan
Occupational Health, Safety, and Security

Pengembangan penerapan K3 dalam Perusahaan adalah sebuah kewajiban. Hal ini dilakukan untuk meminimalisasi risiko terjadinya kecelakaan di tempat kerja, memberikan hak keselamatan terhadap tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan, dan melindungi aset tenaga kerja yang sehat serta produktif.

The development of OHS implementation in the Company is an obligation. This is aimed at minimizing the risk of accidents in the workplace, providing safety rights for workers in conducting work, and creating a healthy and productive workforce.

Selama tahun 2022, PLN NP telah melakukan berbagai program pengembangan SMK3 yaitu sebagai berikut:

During 2022, PLN Nusantara Power has conducted various OHSMS development programs, as follows:

Program Pengembangan Sistem Manajemen K3
OHS Management System Development Program

Perluasan ISO 45001:2018 untuk mengintegrasikan K3 kepada seluruh karyawan PLN Nusantara Power agar tidak pekerja lain (kontraktor) untuk menjaga kerja aman dan kesehatan kerja.

The implementation of the ISO 45001 in 2022 by internal OHS to be PLN Nusantara Power employees to achieve zero (0) ensuring workplace conditions are safe from Work Accidents.

Monitoring dan evaluasi implementasi OHSMS melalui program Kaizen (P&C), Sertifikasi OHSMS, assessment sistem kinerja manajemen K3, Pengendalian aktivitas kerja kritis seperti IC (Ketinggian, Kerja Panas, Kerja Listrik, dll) dengan Permit Work (Work Permit), Pengendalian Kontraktor, Pelatihan Kompetensi K3 dan Audit Internal.

Monitoring and evaluation of OHSMS implementation through P&C (Kaizen) program, OHSMS certification, assessment on K3 management performance system, control of critical work activities such as IC (Confined Space, Hot Work, Electrical Work, etc.) with Permit Work, Contractor Control, Competency Training of K3 and Internal Audit.

Perluasan Ekspor ISO 45001:2018 untuk mengintegrasikan K3 kepada seluruh karyawan PLN Nusantara Power agar tidak pekerja lain (kontraktor) untuk menjaga kerja aman dan kesehatan kerja.

Implementation of Integrated Online with Other System in the Workplace of Operations to evaluate the compliance of OHS implementation and OHS policies.

Pengadaan Tim Tim Siaga PT PLN NP melalui Refresh Training termasuk BASARNAS, Prosedur dan tim tanggap K3 untuk Asesmen Asesmen (TB) Anggota mampu melakukan dan melaporkan K3 PLN NP.

Strengthening PT PLN NP's Tim Siaga Team through Refreshment Training with BASARNAS, OHS training and evaluation according to guidelines/ standards at PLN Academy, safety drills in OHS working and certification tests in PLN NP.

Standardisasi Rekomendasi Tanggap Darurat Kebakaran di PLTU Bakauheni

Standardization of Coal STPP Site Emergency Response Guidelines

Digitalisasi proses bisnis K3 untuk mengakomodasi fungsi monitoring dan evaluasi K3, meliputi implementasi SMK3 (IA, MRT) Plus, CSMS, Cybersafe

Digitalization of business processes in OHS to accommodate the monitoring and evaluation functions of OHS, including the implementation of SMK3 (IA, MRT) Plus, CSMS, Cybersafe

Implementasi Contractor Safety Management System (CSMS) PT PLN Nusantara Power

Implementation of Contractor Safety Management System (CSMS) at PT PLN Nusantara Power

Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Kerja Kontraktor
Implementation of the Contractor Work Safety Management System

PLN NP mendorong penerapan K3 tidak hanya bagi karyawan, tetapi juga rekanan/mitra kerja yang bekerja di lingkungan Perusahaan. Sistem manajemen keselamatan kerja kontraktor atau Contractor Safety Management System (CSMS) diterapkan oleh PLN NP secara ketat bagi para rekanan/mitra kerja untuk memenuhi aspek K3 dalam pelaksanaan pekerjaan di lingkungan Perusahaan. Rekanan/mitra kerja yang melakukan kolang pekerjaan di lingkungan PLN NP atau Anak Perusahaan wajib melakukan pendaftaran dan prakualifikasi CSMS secara online. Implementasi CSMS secara full cycle dapat diakses di https://sms.plnnusantarapower.co.id/. Penerapan CSMS menjadi salah satu wujud sinergi antara PLN NP dengan stakeholder dalam mewujudkan budaya K3 zero accident untuk nihil kecelakaan pada rekanan juga dapat tercapai.

PLN NP encourages the implementation of OHS not only for employees, but also partners who work within the Company. The Contractor Safety Management System (CSMS) is strictly implemented by PLN NP for partners to ensure OHS aspects in the implementation of work within the Company. Nonetheless partners who take part in job auctions within PLN NP or its subsidiaries are required to register and prequalify for CSMS online. Full cycle CSMS implementation can be accessed at https://sms.plnnusantarapower.co.id/. CSMS implementation is manifestation of synergy between PLN NP and the stakeholders in realizing a comprehensive OHS culture so that zero accidents in partners can also be achieved.

Kesetaraan Gender dan Kesempatan Kerja
Gender Equality and Job Opportunities

PLN NP berupaya menerapkan prinsip kesetaraan dan anti diskriminasi yakni dengan melakukan pengelolaan karyawan tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, pendidikan, dan latar belakang. Perusahaan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang khususnya karyawan PLN NP terkait rekruitmen, program pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, pengembangan karir, remunerasi dan kesejahteraan serta memberikan perlakuan yang sama dengan pemberian remunerasi dan kesejahteraan kepada karyawan tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, agama, dan faktor keragaman lainnya.

PLN NP strives to apply the principles of equality and anti-discrimination by managing employees without discriminating against gender, education, and background. The Company provides equal opportunities for everyone, especially PLN NP employees related to recruitment, competency development programs, performance assessment, career development, to the provision of remuneration and welfare to employees regardless of differences in gender, religion, and other diversity factors.

Selama tahun 2022, tidak terdapat laporan mengenai insiden diskriminasi terkait ras, warna kulit, gender, agama, opini politik, asal usul sosial dan segala bentuk diskriminasi lainnya yang melibatkan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal yang terkait Perusahaan.

During 2022, there were no reported incidents of discrimination related to race, color, gender, religion, political opinion, social origin and any other form of discrimination involving internal and external stakeholders related to the Company.

Digitalisasi Proses Bisnis K3
Digitization of OHS Business Process

Pada Tahun 2022 PLN NP melakukan digitalisasi proses bisnis K3 untuk mempermudah fungsi monitoring dan evaluasi K3 terkait, program:

- Migrasi data SDM untuk SIMPEL pasca Restrukturisasi Organisasi
- Monitoring LK3 2.0 untuk kebutuhan kontraktor/alat di eksternal PLN NP

In 2022, PLN NP digitized the OHS business process to optimize the OHS monitoring and evaluation function through the following programs:

- SDM data Migration for SIMPEL after Organizational Restructuring
- LK3 2.0 Monitoring for contractor/tool needs in PLN NP

Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan
Grievance Mechanism for Employment Issues

Termasuk pengaduan akibat muncul terkait ketenagakerjaan dari masyarakat luar dan pelanggan dapat membantu PLN NP dalam meningkatkan kapasitas SDM. Oleh karena itu, PLN NP telah menyediakan saluran pengaduan terkait masalah ketenagakerjaan. Mekanisme pengaduan bagi karyawan yang ditempatkan di lingkungan PLN NP sebagai berikut:

Complaints as input related to employment from the wider community and customers certainly can help PLN NP in developing HR capacity. Therefore, PLN NP has provided a complaint channel related to employment issues. The complaint mechanism for employees applied within PLN NP is as follows:

Tata Cara Tingkatan Penyelesaian Keluhan dan Pengaduan
Procedure for Levels of Complaint and Grievance Settlement

Selama tahun 2022, PLN NP tidak menerima pengaduan dari karyawan mengenai masalah ketenagakerjaan. Kondisi ini menunjukkan kepuasan karyawan terhadap penerapan pengelolaan SDM di PLN NP.

PLN NP received no complaints from employees regarding employment issues in 2022. The condition reflects the employee satisfaction with the implementation of HR management at PLN NP.

Tingkat Keterikatan dan Kepuasan Karyawan
Employee Engagement and Satisfaction Index

Aspek yang berperan penting dalam pencapaian kinerja karyawan diantaranya keterikatan dan kepuasan karyawan. PLN NP melaksanakan survei kepuasan karyawan setiap tahun sebagai salah satu media untuk menilai efektivitas program pengelolaan SDM dari sudut pandang karyawan. Aspek-aspek yang mempengaruhi keterikatan dan kepuasan karyawan PLN NP yang diukur dalam survei tersebut diantaranya:

1) Company Policy
2) Work Conditions
3) Overall Organization Culture
4) Direct supervision
5) Leadership & Supervision
6) Career Management
7) Compensation & Benefits
8) Teamwork & Relationship
9) Opportunities for Training & Development
10) Performance Management
11) Recognition
12) Meaningful Work
13) Diversity & Inclusion

Aspects that play an important role in achieving employee performance include employee engagement and satisfaction. PLN NP carries out an employee satisfaction survey every year as one of the media to assess the effectiveness of HR management programs from the employee's point of view. Aspects that affect PLN NP's employee engagement and satisfaction measured in the survey include:

1) Company Policy
2) Work Conditions
3) Overall Organization Culture
4) Direct supervision
5) Leadership & Supervision
6) Career Management
7) Compensation & Benefits
8) Teamwork & Relationship
9) Opportunities for Training & Development
10) Performance Management
11) Recognition
12) Meaningful Work
13) Diversity & Inclusion

Hasil survey kepuasan karyawan tahun 2022 yaitu Engagement Index sebesar 84,88% dan satisfaction index sebesar 81,23%.

The results of the 2022 employee satisfaction survey are the Engagement Index of 84.88% and the satisfaction index of 81.23%.

Penghargaan dan Sertifikasi di Aspek Ketenagakerjaan
Awards and Certifications in the Employment Aspects

Penghargaan dan no #Mata yang telah diterbitkan PLN NP terkait Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja selama tahun 2022 adalah:

PLN NP won awards and certifications regarding Employment, Occupational Health and Safety during 2022, including:

12 Januari 2022
January 12, 2022

4 Penghargaan Program K3 COVID-19
Penghargaan Program Perlindungan dan Penanggulangan COVID-19 di Tempat Kerja dan Gedung lebih untuk:
- 28 Bintang (Platinum)
- 1.283 Piala 4 (Platinum)
- 1.883 Piala (Gold)
- 1.883 Piagam Anak Anak (Gold)

4 COVID-19 K3 Program Awards
COVID-19 Prevention and Countermeasure Program Awards for Workplaces and Big Buildings for:
- Stars (28 Platinum)
- Plaques (1,283 Platinum)
- Plaques (1,883 Gold)
- Certificates (1,883 Gold)

12 Januari 2022
January 12, 2022

5 Penghargaan Pengelola K3 – Zero Accident
Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Tanpa Kecelakaan

1. UP Tanjung Awar-awar 11.267.887 jam kerja tanpa kecelakaan kerja nihil (November 2019 – 31 Oktober 2021)
2. UP Paiton sebanyak 16.713.803 jam kerja Pengelolaan kecelakaan kerja nihil (tanggal 12 November 2019 s/d 31 Oktober 2021)
3. UP Paiton Kombinasi 11.772.893 jam kerja Orang kerja kecelakaan kerja nihil (tanggal 31 Oktober 2019 s/d 31 Oktober 2021)
4. ZEOH Paiton sebanyak 34.138.261 jam kerja Orang kerja kecelakaan kerja nihil (tanggal 4 November 2017 s/d 31 Oktober 2021)
5. ZEOH Tanjung Awar-awar sebanyak 8.111.317 jam kerja orang kerja kecelakaan kerja nihil (tanggal 1 Juli 2019 s/d 31 Oktober 2021)

5 K3 Program Awards – Zero Accident
Zero Accident Occupational Safety and Health (OHS) Award

1. Awards for 11,267,887 worked & hours without work accident since November 1, 2019 – October 31, 2021
2. Paiton 16,713,803 man-hours work without work accident from November 12, 2019 to October 31, 2021
3. Paiton K3 (by – 11,772,893 man-hours without work accident from October 31, 2019 to October 31, 2021
4. PAITON ZEOH for 34,138,261 man-hours without work accident from November 1, 2017 to October 31, 2021
5. Tanjung Awar-Awar ZEOH for 8,111,317 man-hours without work accident from June 1, 2019 to October 31, 2021

13 Mei 2022

[illegible]

[illegible]

[illegible]

20 Oktober 2022

[illegible]

[illegible]

Biaya yang Dikeluarkan terkait Kegiatan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Costs Incurred related to Employment, Occupational Health and Safety (OHS) Activities

Biaya yang dianggarkan oleh Perusahaan untuk kegiatan yang terkait dengan tanggung jawab terhadap Ketenagakerjaan tahun 2022 adalah sebesar Rp. 69.1,02 Triliun dengan realisasi sebesar Rp. 1,48 triliun (91,28%) namun dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp. 3.700 Miliar. Biaya yang dikeluarkan meliputi gaji dan tunjangan lainnya dan insentif karyawan; imbalan kerja; pendidikan dan pelatihan; tunjangan kesehatan; serta biaya kesejahteraan lainnya.

The Company set budget for activities related to responsibility for Employment in 2022 of Rp.1,02 billion, with a realization of Rp1,48 trillion (91,28%), a decrease compared to 2021 which was Rp3,700 billion. Expenses incurred include salaries and benefits; employee bonuses and incentives; employee benefits; education and training; health benefits; as well as other personnel costs.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Corporate Social Responsibility Related to Social and Community Development

Komitmen dan Kebijakan

Commitment and Policies

PLN NP fokus berkomitmen dalam mendukung pembangunan masyarakat berkelanjutan. Partisipasi dan kepuasan masyarakat luas tentunya telah memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan serta kesuksesan usaha Perusahaan. Karena itu, PLN NP melakukan upaya dengan berbagai program tanggung jawab sosial agar memberikan timbal balik yang positif bagi pembangunan masyarakat.

PLN NP focus to commitment to support the sustainable community development. The participation and trust from the wider community certainly bring positive contribution to the business growth and journey of the Company. Therefore, PLN NP makes efforts with various social responsibility programs in order to provide positive reciprocity for community development.

[illegible]

[illegible]

Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Kemasyarakatan
Social Responsibility Activities

[illegible]

[illegible]

Program Pijar Berdaya
Pijar Berdaya Program

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

pengembangan potensi yang ada di sekitar kampung Hijau produktif yang telah memiliki kemampuan aplikasi program kemitraan secara lebih menyeluruh di berbagai bidangnya. Terdapat tiga pilar utama untuk pengusaan Community Center yaitu Pilar Lingkungan, Pilar Hukum, Pilar Sanitasi. Total bank sampah yang ada di tiga desa adalah 10 bank sampah dengan 333 bank nasabahnya. Program Bank Sampah juga telah disosialisasikan ke Kelurahan Cilintang. Sudah dilakukan usaha dalam pengembangan unit usaha bank sampah, bekerjasama dengan UMI via aplikasi unit usaha bank sampah sebagai payment point agen PPI. Sudah ada 2 unit usaha yang berjalan berupa mengisi agen PPI satu bank sampah: Bidaarta dan bank sampah ITT (17 PPI 10 Desa Sidoluhur).

Tujuan dari program ini adalah :

- Menciptakan lingkungan hidup yang bijak dan bersih dari program Pilar Bersinya di Desa Kramatinggil, Desa Sidoluhur, dan Desa Purbasembon
- Timbul kesadaran Masyarakat dalam memilah sampah
- Masyarakat mampu memanfaatkan sampah menjadi ekonomi yang bernilai ekonomi
- Mengembangkan unit usaha untuk bank sampah
- Digitalisasi Bank Sampah
- Desa Mendukung Disminasi ke Desa lain

b) Bank Sampah

Sebelum program bank sampah datang (terbaik) dan tiba diterapkan di desa-desa Ring 1 seperti desa pembina, PT PJB UP Lontek berbuat membuat program untuk membantu meminimalisir permasalahan yang ada, disebabkannya adalah sosial, pengembangan, dan lingkungan sehat dengan membuat program didesain desa banyak sosial. Program ini juga diaktualisasi di Desa Kramatinggil, perusahaan membiayakan beberapa jenis lebih terarahnya untuk penghijauan. Adapun jenis lebih terarahnya yang ditanam yaitu, jenis mangga, durian, jambu, mahoni, tanjung, buah biri, buah jatuh, rambi, dan terarahnya lebih keluarga (TOGA). Terarahnya terhebat dibagikan ke setiap ITT dan dibangkan dapat dibeli menjadi produk bernilai ekonomi. Hasil program penghijauan ini dikelolakan setiap ITT memiliki terarahnya anggotan, untuk memupuk hal tersebut perusahaan memberikan terarahan khusus ke 3 ITT sebagai ITT percontohan yaitu, ITT1, ITT2, dan ITT3. Dengan adanya ITT percontohan ini, diharapkan motivasinya ITT lainnya untuk melakukan penghijauan. Program Bank sampah dan dukungan kembangkan dengan kampung hijau produktif yang merupakan integrasi program di Desa Kramatinggil, yang berkualitas PT PJB UP Lontek melakukan integrasi program kampung hijau produktif menjadi Hijau Berdaya.

productive green village area that already can apply its previous programs more thoroughly in various fields/places. There are three main pillars for strengthening the Community Center, namely, the Environmental Pillar, the Sanitation Pillar, and the Sanitation Pillar. Total waste banks in the three villages are 10 waste banks with 333 environmental cadres. The Waste Bank Program has also been socialized in Kelurahan Village. Efforts have been made in developing the waste bank business unit, in collaboration with UMI to make the waste bank business unit a payment point agent PPI. There are already 2 business units that have participated in joining agent PPI, namely the Bidaarta Waste Bank and PT (17 PPI 10 Desa Sidoluhur) Village Waste Bank.

The program is purposed to the following:

- To create a green and clean living environment from the Pilar Bersinya program in Kramatinggil Village, Sidoluhur Village, and Purbasembon Village
- To raise public awareness in sorting waste
- To assist the community to reuse waste into crafts that have economic value
- To develop a business unit for a waste bank
- To digitize the Waste Banks
- To conduct Dissemination to Other Villages

b) Plant Data

After the success of the waste bank program which has been implemented in other Ring 1 villages (previous villages), PLN NPs Lontek (U) created a program to help minimize the existing issues, including social, development, and a healthy environment, by making a dedicated village with one of (applicable) program. The program is also recommended in Kramatinggil Village. The Company distributes several types of plant seeds for reforestation. The types of plants mostly given were citrus, mango, soursop, guava, jamblon fruit, star fruit, figs, olives, snacks, and family medicinal plants (TOGA). The plants are distributed to each Neighborhood Association (RT) and are expected to be processed into products with economic value in this reforestation program. It is expected that each RT has superior plants to achieve this. The Company provides special plants for 3 Neighborhood Associations (RT01, RT02, and RT03). These are expected to be able to motivate other Neighborhood Associations to do reforestation. The Waste Bank and Company program is integrated with the productive green village which is an integration program in Kramatinggil Village, which then PT. NPs Lontek (U) corporate Kampung Hijau Produktif program into Hijau Berdaya.

Tujuan dari program ini adalah:

- Menciptakan lingkungan hidup yang hijau dan bersih dari program Pijar Sterilisasi di Desa Kramatbinggil, Desa Sidorukun, dan Desa Purbapendhen.
- Masyarakat mampu memanfaatkan hasil tanaman yang ada untuk memenuhi kebutuhan dari hasil tanaman.
- Terciptanya pasar produksi berhasil pemasaran hasil olahan produk panen Bank Tanaman yang memberikan dampak ekonomi dari program Pijar Sterilisasi di Desa Kramatbinggil, Desa Sidorukun, dan Desa Purbapendhen.
- Menjadi Pusat Nursery pembibitan bagi segala jenis tanaman yang ada di Desa Kramatbinggil, Desa Sidorukun, dan Desa Purbapendhen.
- Menciptakan organic market center sebagai wadah untuk memasarkan produk bank tanaman.
- Mengadakan kegiatan cooking class sebagai inovasi dalam mengelola produk unggulan yang dihasilkan.
- Digitalisasi Bank Tanaman
- Penyelenggarakan event bank tanaman baru "Batu".
- Bank tanaman memberikan nilai jasa dalam pengolahan jamuhu untuk kesehatan.
- Produk Bank Tanaman diadakan sebagai rekomendasi pemberikan imun sebelum kegiatan vaksinasi.

The program is proposed to the following:

- To create a green and fine clean living environment from Pijar Sterilisasi program in Kramatbinggil Village, Sidorukun Village, and Purbapendhen Village.
- To assist the community to take advantage of existing plant products to meet the needs of crop products.
- To create a production market related to the marketing of processed products harvested by the Plant Bank has an economic impact on Pijar Sterilisasi program in Kramatbinggil Village, Sidorukun Village, and Purbapendhen Village.
- To become a center for nursery nurseries for all types of plants in Kramatbinggil Village, Sidorukun Village, and Purbapendhen Village.
- To create an organic market center as a place to market plant bank products.
- Holding cooking class activities as an innovation in managing the superior products produced.
- To digitize the Plant Banks.
- To organize a "new" exciting plant bank event.
- To show the plant bank in awarding the herbal medicine rate in providing herbal medicine for your needs.
- For Plant Bank products to be used as immune-boosting drinks after vaccination activities.

c) Pelitahsa dan Café Jamu

Program Pelitahsa dan Cafe Jamu merupakan inovasi program dengan memberikan jasa kesehatan tradisional (Pijat Refleksi). Pelitahsa dapat menjadi alternatif pada saat pandemi untuk Masyarakat yang takut berobat ke rumah sakit atau dokter. Pada saat pelaksanaan vaksinasi covid-19 banyak Masyarakat yang gagal vaksinasi akibat tidak lolos screening, observasinya misalnya tensinhasi (tek darah rendah atau darah tinggi). Berdasarkan latar belakang tersebut maka pada saat pelaksanaan vaksinasi covid-19 di PT PJB UP Gresik didirikanlah pada kesehatan pelitahsa. Di pada kesehatan pelitahsa peserta vaksinasi yang tidak lolos assessment kesehatan dilayani dan diberikan jamu tradisi, yang dapat membantu memulihkan atau menurunkan tensi peserta, sehingga peserta dapat lolos screening dan dapat melaksanakan vaksinasi covid-19. Tujuan program ini adalah membantu meningkatkan angka keberhasilan vaksinasi di kecamatan Gresik.

c) Pelitahsa and CAFE Jamu

The Pelitahsa and Cafe Jamu programs are program innovations by opening a traditional health pulp (Foot Reflex). Pelitahsa can be an alternative during a pandemic for people who are afraid to go to a hospital or doctor. During the Covid-19 vaccination scheme, some people failed to get vaccinated since they did not pass the screening, due to health problems, either low blood or high blood pressure. With this background, during the COVID-19 vaccination at PLN NP's Gresik UJ, the Pelitahsa Health Post was then established. At the pelitahsa health post, vaccination participants who did not pass the health assessment are treated and given herbal medicine, which can help raise or lower the participant's tension, therefore, those participants could pass screening and obtain the covid-19 vaccination. The program purposes to help increase the success rate of vaccination in Gresik sub-district.

Program Kampung Mang Jasri

Mas Jasri Village Program

Sampukan sampah yang menggunung di sekitar pesisir Muara Angke menjadi permasalahan utama yang kemunculannya sudah tidak bisa lagi terelakkan. Sampah tersebut berasal dari berbagai area yang mencemari hingga menjadi dataran dengan ketebalan mencapai 1,5 meter. Gunungan sampah tersebut menyebabkan rusaknya ekosistem hutan mangrove. Hilangnya habitat bagi satwa liar, terbatasnya area dapat menjadi sumber penyakit bagi masyarakat sekitar. KORAN sebagai komunitas lokal sekitar Muara Angke tidak ingin melihat lingkungannya semakin buruk. Maka dari itu, KORAN bersama PT PJB UP Muara Karang berkeinginan untuk melakukan kontrol kawasan pesisir Muara Angke dengan melakukan rehabilitasi lahan yang parah sampah menjadi kawasan hutan mangrove yang asri. Pemberdayaan dilakukan dengan memanfaatkan daratan sampah sebagai lahan subur untuk menanam bibit mangrove. Dari kegiatan ini tercatat komunitas di sekitar mangrove menjadi sehat secara fungsional pengembangan yang telah dilakukan antara lain pemasangan alat penyaring sampah, pembuatan tembok silvofishery, pengolahan produk olahan mangrove, serta produksi batik berbahan mangrove.

The accumulated garbage piles at the Muara Angke coastal area are a major issue that may no longer be resolved. The garbage comes from the sea and landscape to accumulate reaching a land with a thickness of up to 1.5 meters. The mountain of garbage causes damage to the mangrove forest ecosystem, loss of habitat for wildlife, the waste can also be a source of disease for the surrounding community. KORAN, as the local community of Muara Angke wishes the environment will not get worse. Therefore, KORAN together with PLN NP's Muara Karang GU are committed to preserving the Muara Angke coastal area by rehabilitating land full of garbage into a beautiful mangrove forest area. The planting is leveraging garbage land as fertile land for planting mangrove seedlings. Eventually, it was successful in growing mangroves into large trees. The Company carries out development activities, including planting and routine maintenance, making mouthfeel panels, processing mangrove processed products, and producing batik made from mangroves.

Tujuan dari program adalah :

- Menjadikan lahan sampah menjadi kawasan hutan mangrove
- Menciptakan habitat yang nyaman bagi satwa liar yang hidup di kawasan hutan mangrove
- Menjaga ekosistem untuk air laut dan abrasi pantai
- Menambah pendapatan masyarakat lewat program (melalui volunteery dan Mangrovier (produk olahan mangrove)
- Meningkatkan kapasitas dan pengetahuan komunitas serta masyarakat Muara Angke
- Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat Muara Angke yang lebih luas lagi

The program is proposed to the following:

- Rehabilitating the garbage piles into a mangrove forest area
- Creating a comfortable habitat for wildlife living in mangrove forest areas
- Preventing the sea water intrusion and coastal abrasion
- Increasing community income through volunteery and Mangrovier (mangrove processed products) programs
- Increasing the capacity and knowledge of the community and the people of Muara Angke
- Increasing active participation from the wider Muara Angke community

Program Sanggar Ceria: Cerita Tari Betawi

Sanggar Ceria Program: Betawi Dance Stories

Pemberdayaan masyarakat tidak hanya meliputi aspek ekonomi dan lingkungan saja, aspek sosial dan budaya pun dapat turut andil dalam membangun kesadaran masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam aspek sosial dan budaya dapat dilakukan melalui pelestarian budaya daerah. Di Jakarta Utara sangat kental dengan budaya betawi khususnya sosial lestari—kenalnya PT PJB UP Muara Karang sebagai salah satu perusahaan yang berdomisili di Jakarta Utara memiliki komitmen untuk berupaya

Community empowerment does not only cover economic and environmental aspects, but also social and cultural aspects to contribute to building the community capabilities. Community empowerment in social and cultural aspects can be implemented through the preservation of regional culture. North Jakarta has a highly Betawi culture, especially through the dances. PLN NP's Muara Karang GU, a company located in North Jakarta, has a passion in preserving the Betawi Culture. Therefore, PLN NP's

Melestarikan budaya lokal. Oleh karenanya, PT PLN UP Muara Karang bekerjasama dengan Yayasan Pesanti Nagari Sangsaya untuk menyalurkan semangat ini kepada masyarakat Muara Angke, khususnya bagi generasi muda yaitu anak-anak usia dini program pelatihan materi tradisional secara gratis yang diberi nama Sanggar Usia Dulito Tari Bakaul. Harapannya kegiatan positif dan produktif bagi anak-anak yang ada di wilayah Muara Angke juga menjadi salah satu cara Sedekang terciptanya program ini. Melalui Sanggar Tari Usia, diharapkan dapat menjadi wadah asimasi dan belajar yang positif bagi anak-anak, selain itu, mereka juga dapat lebih cepat mengenal dan mencintai budayanya, sehingga budaya lokal tetap lestari dan tidak ditinggalkan. Memberikan wadah bagi anak-anak untuk mengekspresikan diri.

Muara Karang GU, in collaboration with Pesanti Nagari Foundation wants to transmit this spirit to the people of Muara Angke, especially to the younger generation and children through free training for traditional dance named Sanggar Usia Dulito Tari Bakaul (Usia Dulito Tari Bakaul Dance Studio). The benefit sought for this program include the lack of positive and productive activities for children in the Muara Angke area. Sanggar Tari Usia is expected to become a positive place for children to play, learn, and also get to know and love their culture more so that local culture remains sustainable and not forgotten. It also provides a place for children to express themselves.

Adapun tujuan program:

- Memperkenalkan kesenian budaya lokasi pada anak-anak Muara Angke
- Melestarikan budaya lokal khususnya Tari Bakaul kepada anak-anak Muara Angke
- Memberikan wadah bagi anak-anak Muara Angke untuk berekspresi
- Meningkatkan kepercayaan diri dan kreatifitas anak-anak Muara Angke
- Menciptakan generasi yang cinta akan budayanya sendiri

The program is purposed to the following:

- To introduce the knowledge of classic culture to the children in Muara Angke
- To preserve local culture, especially Bakaul Dance for children in Muara Angke
- To provide a platform to express for children in Muara Angke
- To increase the self-confidence and creativity of children in Muara Angke
- To create a cultural aware generation

Program Batik Khas Desa Sengguruh Kab. Malang
Batik Jagadjowo Khas Blitar

Typical Batik Program from Sengguruh Village, Malang Regency and Jagadjowo Typical Batik from Blitar

Peningkatan ekonomi masyarakat di sekitaran menjadi fokus perhatian dari pemerintah maupun perusahaan yang ada di sekitar. Diperlukan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Selain desa perlu melakukan monitoring terhadap industri kerajinan yang ada di desa sebagai salah satu cara pengembangan sumber daya ekonomi masyarakat desa. pengembangan komunal dalam bidang seperti pertanian, kerajinan batik dan sebagainya. Dalam bidang kerajinan batik, perlu ditumbuhkan dan dikembangkan, selain untuk meningkatkan pendapatan program batik juga untuk melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Sasaran program adalah kelompok Batik Jong desa Sengguruh Kec. Kepanjen Kabupaten Malang, dan Organisasi Batik Jagadjowo di Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar.

Improving the community economy in rural areas is the focus of attention from the government and the surrounding companies. Community empowerment is required to improve the quality of community life. Village officials are also required to monitor the handicraft industry in the village as a way of developing the economic resources of the village community, including development in fields such as agriculture, batik, and so on in the context of batik, it is necessary to develop and preserve to increase the income of batik craftsmen and to preserve the existing culture in Indonesia. The target of the program is the Batik Jong group in Sengguruh village, Kepanjen District, Malang Regency, and Jagadjowo Batik Organization in Kanigoro District, Blitar Regency.

Tujuan program ini adalah :

- Melestarikan seni tradisi tradisional
- Meningkatkan penghasilan tambahan untuk membantu perekonomian masyarakat sekitar
- Membantu mewujudkan program pemerintah untuk membuat produk-produk lokal
- Membantu mewujudkan program pemerintah untuk mengamankan batik ini mancanegara

The program is purposed for the following:

- To preserve Batik as a traditional art
- To generate additional income to help the local community's economy
- To help realize the government's program to purchase local products
- To help realize the government's program to campaign for Batik abroad

Sepanjang tahun 2022, pelaksanaan bagaikan yang dilakukan diantaranya penandatanganan MoU untuk pelatihan membatik bagi masyarakat di desa Senggreman Kec. Kejayaan, Kab. Malang dan pembangunan sarana dan prasarana Batik Jagadjoyo di Lodoso, Kabupaten Biber berupa :

- Bantuan 2 (dua) lungka Kompor Gas
- Bantuan 10 (sepuluh) set Kompor Minyak
- Bantuan 2 (dua) unit Mesin Lurik
- Bantuan 20 unit Canting
- Bantuan 100 yard Kain Katun

In 2022, the activities held include the MoU signing concerning Batik training for the community in Senggreman Village, Kejayaan District, Malang Regency, and construction of facilities and infrastructure for Batik Jagadjoyo in Lodoso, Biber Regency, in the form of the following:

- Assistance with 2 (two) Gas Stoves
- Assistance with 10 (ten) sets of Oil Stoves
- Assistance with 2 (two) Lurik Mesin
- Assistance with 20 units of Canting
- Assistance with 100 yards of Cotton Fabric

Biaya Yang Dikeluarkan

Budget Cost

PLN Nusantara Power mengeluarkan biaya untuk program tanggung jawab sosial terhadap pengembangan sosial dan kemasyarakatan sebesar Rp40,76 Miliar yang meliputi bidang pendidikan kesehatan, ekonomi, sosial budaya dan keagamaan serta lingkungan dengan rincian yang dikelompokkan berdasarkan tipologi sebagai berikut:

PLN NP incurred the cost of Rp40.76 billion for corporate social responsibility programs in social and community development covering the aspect of education, health, economy, social culture, and religion, as well as the environment with more detailed information based on the following typology:

Anggaran dan Realisasi Biaya CSR Tahun 2022 (dalam jutaan)

Budget and Realization of CSR Costs in 2022 (in millions)

No	Tipologi Typology	RKAP 2022 2022 RKAP	Realisasi 2022 2022 Realization	Persentase terhadap RKAP RKAP Achievement
1	Pengembangan	16.875	16.808	95%
2	Capacity Building	10.750	10.721	64%
3	Infrastruktur Infrastructure	13.092	13.085	99%
4	Charity	3.123	3.219	121%
5	Bina Lingkungan Environment Care	4.300	3.411	79%
Total		**41.730**	**45.704**	**109%**

Penghargaan
Awards

Pada tahun 2022 PLN NP mendapatkan penghargaan dan apresiasi atas program-program CSR yang berhasil dilaksanakan secara berkesinambungan antara lain:

1) PROPER 2022

PLN NP meraih 21 penghargaan Program Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Lima PROPER emas berhasil diraih oleh UP Poso, UP Gresik dan UBJOM Tembagu, UBJOM Tidore, dan UBJOM Indramayu. PROPER Hijau diberikan pada UP Muara Karang, UP Muara Tawar, UP Cilacap, dan UBJOM Tanjung Awar-Awar. Sedangkan 10x untuk UP Bandan (PLTA Sulewi), UP Bandan (PLTA Wilagi), UBJOM Timbaan, UBJOM Bangka, UBJOM Belitung, UBJOM Tidore, UBJOM Aceh, UBJOM Paiton, UBJOM, UBJOM Antareng, UBJOM Bolok, UBJOM Tembalahan dan UBJOM Nii Tanasa.

2) Indonesia CSR Awards 2022

PLN NP berhasil meraih gelar The Best SDGs Program Implementation - 2022 Responsible Consumption & Production Score : 91.00 (Platinum Award) Very Excellent dan PT PEMBANGKITAN JAWA BALI (PJB) 2nd The Best Company for Environmental Social Governance (ESG) Score : 91.24 (Platinum Award) Very Excellent. Ajang CSR Indonesia Awards 2022 yang digelar untuk ke-13 kalinya oleh Majalah CSR Indonesia dan Majalah Communications. Kategori dengan Kanal Rupa (bidang sosial) merupakan penghargaan untuk program Pengusahaan Pinkis Dorsona bagi masyarakat sehingga bisa bangkit dan berbangung kembali.

3) RDA 2022

Melalui program-program CSR yang dilakukan secara berkesinambung, PLN NP berhasil mendapatkan apresiasi di bidang CSR pada tahun (2021), yang diselenggarakan oleh Indonesian Sustainable Development Goals Awards (ISDA), tahun 2022 yang bertempat di Hotel The Rith Carlton, Jakarta. Secara total terdapat 12 program CSR, 2 penghargaan individu untuk sosial here dan CSR serta meraih penghargaan dari 9 unit yang mengikuti penjurian yaitu UP Paiton, UP Muara Tawar, UBJOM Tanjung Awar-awar, UBJOM Tembaang, UP Cilacap, UBJOM Pulang Pisau, UP Muara Karang, Bandar Pusat dan UBJOM Timoran dengan berhasil meraih penghargaan 7 Kategori Gold, 2 Kategori silver, 1 Kategori CSR terbaik, dan 1 Kategori Local Heroes terbaik.

In 2022, PLN NP received awards and appreciation for CSR programs that were successfully implemented continuously, including:

1) PROPER 2022

PLN NP won 21 awards from the 2022 Corporate Performance Program in Environmental Management (PROPER) organized by the Ministry of Environment and Forestry (KLHK). Five gold PROPERs were achieved by Poso (UP), Gresik (UP) and Tembaang (UBJOM), Paiton (PMU) and Indramayu (UBJOM). Green PROPER was earned on Muara Karang (UP), Muara Tawar (UP), Cilacap (UP), and Tanjung Awar-Awar (UBJOM). While Blue PROPER for Bandan (UP) (Sulewi HPP), Bandan (UP) (Wilagi HPP), Timbaan (UBJOM), Bangka (UBJOM), Belitung (UBJOM), Tidore (UBJOM), Aceh (UBJOM), Paiton (UBJOM), Antareng (UBJOM), Bolok (UBJOM), Tembalahan (UBJOM), and Nii Tanasa (UBJOM).

2) Indonesia CSR Awards 2022

PLN NP won the title of The Best SDGs Program Implementation - 2022 Responsible Consumption & Production Score : 91.00 (Platinum Award) Very Excellent and PT PEMBANGKITAN JAWA BALI (PJB) 2nd The Best Company for Environmental Social Governance (ESG) with Score: 91.24 (Platinum Award) Very Excellent. CSR Indonesia Awards 2022 held for the 13th time by CSR Indonesia Magazine and Majalah Communications. The Dengan Kanal Rupa category (social field) is an award for the Disaster Risk Reduction program for the community so that they can get up and be revived.

3) RDA 2022

PLN NP once again received appreciation in the field of CSR on Friday (2021) awarded by the Indonesian Sustainable Development Goals Awards (ISDA) in 2022 at The Rith Carlton Hotel, Jakarta.

There are 12 CSR programs in total, 2 individual awards for local here and CSR and won awards from 9 units that participated in the judging, namely Paiton (U), Muara Tawar (U), Tanjung Awar-Awar, Tembaang (UBJOM), Cilacap (U), Pulang Pisau (UBJOM), Muara Karang (U), Head Office and Timoran (UBJOM) by winning 7 Gold categories, 2 silver categories, 1 best CSR category, and 1 best Local Heroes category.

4) AREA (Asia Responsible Enterprise Award)

PLN NP melalui UBJOM Pembangkitan Bengkulu dengan program Wanita Berdaya Seni berhasil meraih gelar juara di ajang Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2021. Penghargaan ini bertujuan untuk memberikan pengakuan kepada para perusahaan yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, sekaligus upaya meningkatkan status ekonomi masyarakat di seluruh Asia.

4) AREA (Asia Responsible Enterprise Award)

PLN NP through Pembangkitan Bengkulu UBJOM with the "Wanita Berdaya Seni" program won the title at the Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2021. This awards conferred to help promote competitiveness and sustainable entrepreneurship development, as an effort to lift the economic status of communities throughout Asia.

5) TOP CSR Awards 2021

Penghargaan untuk PLN NP diberikan dari dari unit UBJOM Tanjung Jati dengan meraih penghargaan Gilang 5 Perolehan ini didasarkan bukti kerja berdasarkan satu program kebaikan memberikan seluruh lingkup CSR di UBJOM tersebut. TOP CSR Awards 2021 berbasis kriteriakan ISO 26000 (Good Corporate Governance (GCG), dan Strategi Bisnis dan para karakter pemenang.

5) TOP CSR Awards 2021

The award for PLN NP was obtained from the Tanjung Jati (UBJOM) unit by achieving a 5-Star award. This assessment is not only based on one program but includes all CSR activities in the core. TOP CSR Awards 2021 is based on the provisions of ISO 26000 (Good Corporate Governance (GCG), and Business Strategy of the winning candidates.

6) Indonesia CSR dan TJSL Award (ICA)

Penghargaan ini diberikan oleh PLN NP pada Penghargaan di bidang sosial melalui penghargaan 4th ICA in Power Generation Company Sector Industry 2021 yang diprosesikannya oleh CSR Kantor Pusat.

6) Indonesia CSR dan TJSL Award (ICA)

This award obtained by PLN NP is an award in social field through the 4th ICA in Power Generation Company Sector Industry 2021 award presented by CSR Head Office.

7) Penghargaan Walikota Palembang:

PLN NP melalui UBJOM Sonayan mendapatkan apresiasi dari Walikota Palembang atas kontribusi program CSR mengenai kepedulian perusahaan terhadap lingkungan dan pemberdayaan kepada masyarakat. Apresiasi ini didapat dari Pembangunan Program Taman Bunga Cikura.

7) Palembang Mayor's Award

PLN NP through Sonayan (UBJOM) received appreciation from the Mayor of Palembang for the contribution of CSR programs regarding the Company's concern for the environment and empowerment to the community. This appreciation was obtained from the implementation of the Cikura Flower Park Program.

8) YSB CSR Awards

Awarding yang diselenggarakan oleh PLN NP untuk seluruh Unit-Unit pembangkitnya, dilaksanakan dalam bentuk nominasikan PLN PT PEI dan sebagai bentuk pengukuran serta apresiasi dalam pelaksanaan Program tanggung CSR Unit PLN NP. Ini merupakan tahun pertama diselenggarakannya awarding ini. Unit yang berhasil memenangkan awarding ini diantaranya UBJOM Sonayan melalui program Taman Wisata Bunga Cikura sebagai juara 3, UP Muara Tawar melalui Program Ekosistem Lunga Jingkom sebagai juara 2, dan UJBOM Pantan melalui Program Pala untuk Masyarakat sebagai Pemenang juara 1.

8) YSB CSR Awards

Awarding organized by PLN NP for all of its power plant units, held in enhancing the anniversary of PLN NP and as the measurement and appreciation in the implementation of CSR Continuous Program as PLN NP Unit. This is the first year of the awarding. Units that successfully won the awarding include Sonayan (UNBJ) through the Cikura Flower Tourism Park program as 3rd place, Muara Tawar (UP) through the Highcon River Ecosystem Program as 2nd place, and Pantan (UBJOM) through the Pala Program for the Community as 1st place winner.

SUSTAINABILITY CSO PLN AWARDS 2022 SUBHOLDING

Sustainability CSO PLN Award 2022 adalah ajang penghargaan untuk program TJSL yang Sustainable milik Unit induk PLN dan Subholding PLN. Penghargaan ini bertujuan untuk mendukung dan memberikan masukan praktis dalam meningkatkan Program TJSL yang lebih baik dan Sustainable, yang selaras dengan program strategis korporat PLN berbasis inovasi. 1 Penghargaan dari 9 UMK yang mengikuti tahapan seleksinya. Diantaranya yaitu UP Pekan meraih Juara 3 kategori SME Development dan Juara 1 Kategori Local Hero, UP Bantas Juara 3 kategori Sosial, ULDJM Pontas Juara 2 Kategori Lingkungan, dan ULDJM Pembang Juara 2 kategori Pendidikan.

SUSTAINABILITY CSO PLN AWARDS 2022 SUBHOLDING

Sustainability CSO PLN Award 2022 is an award event for sustainable CSR programs owned by PLN Parent Unit and PLN Subholding. This award purposes to motivate and add insight to the participants in creating a better and sustainable CSR Program, which is in line with the corporate strategic program. PLN NP won 5 awards from 4 units that participated in the selection stage. Yabisa CU won the 3rd place in SME Development category and the 1st place in Local Hero category, Bantas CU won the 3rd place in Sosial category, Pontas ULDJM won the 2nd place in Environment category, and Pembang ULDJM won the 2nd place in Education category.

Manfaat Program Tanggung Jawab Sosial dan Pengembangan Masyarakat

Positive Impacts of Corporate Social Responsibility on Community Development

Nilai positif yang dapat bernisi oleh para kelompok binaan dalam program pemberdayaan, antara lain:

1. Dapat meningkatkan usaha ekonomi kecil di area.
2. Dapat meningkatkan image mitra binaan.
3. Dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat golongan ekonomi kecil menengah beserta keluarganya.
4. Dapat menjadi kelompok binaan secara berkelanjutan hingga usaha masyarakat yang menjadi mitra binaan dapat mandiri.

Positive values that can be taken by the beneficiary group in the distribution of the partnership program, include the following:

1. Able to improve small economic enterprises in the area.
2. Able to improve the image of the beneficiary partners.
3. Able to improve the quality/standard of living of the small and medium economic group and their families.
4. Able to be a foster group continuously so that the community businesses that become foster partners can be independent.

Sedangkan nilai positif yang dapat diambil oleh PLN NP sebagai perusahaan antara lain:

1. Masyarakat sekitar tempat usaha dibangun menjadi partner usaha dengan produksi PLN NP bagian lingkungan sekitar dibangun masyarakat juga positif dengan keberadaan PLN NP sehingga keberadaan PLN NP memiliki nilai tambah bagi masyarakat sekitar.
2. Dapat meningkatkan pelayanan Perusahaan.
3. Dapat meningkatkan image Perusahaan.

Meanwhile, positive values that can be taken by PLN NP as a company include the following:

1. Local communities are expected to become business partners with PLN NP's own for the surrounding environment. It is expected that the community is also aware of the PLN NP existence so that PLN NP has added values for the surrounding community.
2. Able to improve the Company's services.
3. Able to improve the Company's reputation.

Serta nilai positif yang dapat diambil oleh pemerintah, antara lain:

1. Mengurangi pengangguran dengan penciptaan lapangan kerja.
2. Ikut menggerakkan roda ekonomi sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah setempat.
3. Memberdayakan koperasi.
4. Multiplier efek lainnya.

Additionally, positive values that can be taken by the government include the following:

1. Reducing unemployment by creating jobs.
2. Participating in driving the local wheel to improve the local economy.
3. Promoting cooperatives.
4. Multiplier other effects.

Kinerja Sosial Aspek Pelanggan
Social Performance on the Customers Aspect

Komitmen dan Kebijakan Terhadap Pelanggan
Commitment and Policies on Customers

Perusahaan memiliki komitmen tinggi untuk menjalankan tanggung jawab kepada Pelanggan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Perusahaan meyakini bahwa kepuasan Pelanggan merupakan elemen penting bagi keberlanjutan usaha PLN NP. Dengan kepuasan maksimal yang diberikan Pelanggan, maka dapat meningkatkan loyalitas Pelanggan. Di era digital yang begitu kuat saat ini, kepuasan Pelanggan semakin menciptakan nilai pentingnya.

The Company is highly committed to its responsibilities to customers by complying with the Company policies. The Company believes that customer satisfaction is an important element for business sustainability of PLN NP. While optimal satisfaction for the customers is way increase the customers' loyalty, in current powerful digital era, customer satisfaction is increasingly to be important.

PLN NP mengupayakan sejumlah kebijakan dalam memberikan layanan terbaik kepada pelanggan di antaranya:

- Aturan tentang Sistem Tenaga Listrik (Grid Code) tahun 2030 yang mencakup aturan mengenai manajemen jaringan, perencanaan, operasi, pemeliharaan dan pelaksanaan aspek transaksi tenaga listrik, pengaduan, dan kebutuhan data;
- Aturan Distribusi Pembangkitan 2030 yang mengatur kemudahan transaksi jaringan tenaga listrik, mengenai ancillary services
- Prosedur Tetap Evaluasi Kondisi Pembangkit dan Indeks Kinerja Pembangkit tahun 2017 yang mengatur status kondisi pembangkit, batu cara komunikasi operasi, dan perhitungan kinerja pembangkit;
- Pedoman Operasi Baku Komunikasi Pengoperasian Tenaga Listrik tahun 2018.

PLN NP implements several provisions in providing the best services to the customers including:

- 2030 Java-Madura-Bali Electric Power System Network Regulation covers network management, operation, planning, and implementation of operations, withdrawal, and metering;
- Generation Transaction Regulations 2030 which regulates the communication of purchasing and selling the electricity transactions, regulating ancillary services
- Fixed Procedures for Evaluation on Power Plant Conditions and Power Plant Performance Index 2017 which regulates the status of generator conditions, procedures for operating communications, and calculation of power plant performance;
- Electric Power Management Communication Standard Operating Guidelines Inc 2018.

Sebagai salah satu upaya dalam mendukung komitmen terhadap Pelanggan, PLN NP telah menetapkan Standar pelayanan berupa indikator operasi dan energi (mis& serta jasa Operation & Maintenance (O&M) dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) dan Kontrak Perjanjian Jasa O&M antara PLN NP dengan PT PLN (Persero) sebagai pelanggan tunggal. Faktor-faktor yang menjadi indikator tingkat kualitas layanan pun disebkan target KPI korporat setiap tahun, sehingga pencapaian indikator tersebut dipantau secara berkala oleh Manajemen PLN NP. Indikator tersebut antara lain Equivalent Availability Factor (EAF) sebagai indikator faktor kesiapan pembangkit untuk beroperasi, Scheduled Outage Factor (SOF) sebagai indikator ketepatan jadwal pemeliharaan dan Efisiensi Thermal Pembangkit.

As an effort to support the commitment to Customers, PLN NP has formulated service Standards in the form of operations readiness and reliability as well as Operation & Maintenance (O&M) services regulated in the Power Purchase Agreement (PPA) and O&M Service Agreement Contract between PLN NP and PT PLN (Persero) as the sole customer. Factors that become indicators of service quality levels are also used as Corporate KPI targets every year, so that the achievement of these indicators is monitored regularly by PLN NP Management. These indicators are among others Equivalent Availability Factor (EAF) as an indicator of the readiness factor of power plants to operate, Scheduled Outage Factor (SOF) as an indicator of the accuracy of maintenance schedules and Thermal Power Plant Efficiency.

Realisasi Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Aspek Pelanggan
Realization of Corporate Social Responsibility Activities on Customers

Peningkatan Layanan Pelanggan
Customer Service Improvement

PLN INP memandang pentingnya Pelanggan merupakan suatu kewajiban, hal ini sejalan dengan sebagai proses bisnis yang dijalankan oleh Perusahaan selalu memperhatikan kewajaran sesuai prosedur Standar Pelayanan PLN INP, hal ini merupakan komitmen Perusahaan untuk terus meningkatkan mutu dan layanan sebagai bentuk tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap Pelanggan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan Perusahaan dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada Pelanggan yaitu:

1. Memberikan kemudahan layanan bagi Pelanggan untuk memperoleh informasi terkait produk, layanan, dan operasional bisnis Perusahaan di Call Center website, dan media sosial Perusahaan
2. Melakukan survei kepuasan Pelanggan
3. Menangani keluhan serta pendapat Pelanggan untuk terus meningkatkan proses dan kualitas pelayanan.
4. Mengevaluasi rangkaian proses bisnis dan pelayanan kamnya sehingga dapat memberikan pelayanan yang benar dan optimal
5. Memberi kesempatan dalam pemutakhiran data sehingga dapat meningkatkan kepuasan Pelanggan.

PLN INP considers Customer protection as mandatory in line with every business process carried out by the Company, that always paying attention to the suitability of the PLN INP Service Standard procedure across this is the Company's commitment to continuously improving quality and services as the Company's social responsibility towards the Customers. The steps taken by the Company to improve service to customers are as follows:

1. Providing services facilities for Customers to obtain information related to the Company's products, services, and business operations at the Call Center website, and social media of the Company.
2. Conducting customer satisfaction surveys.
3. Handling customer complaints and opinions to continuously improve processes and service quality.
4. Evaluating a series of business processes and other work to provide smooth and optimal services.
5. Providing flexibility in the settlement of claims to increase the customer's satisfaction.

Survei Kepuasan Pelanggan
Customer Satisfaction Survey

Setiap tahunnya, PLN INP terus berkomitmen untuk melaksanakan survei kepuasan terhadap pelanggan. Survei tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi area-area yang menjadi prioritas untuk ditindaklanjuti perbaikan serta itu untuk mengukur kepuasan Pelanggan, dan sebagai media untuk mempelajari kesan dan masukan dari kebutuhan Pelanggan.

Each year, PLN INP continues to be committed to conducting customer satisfaction surveys. The survey aims to identify issues that are prioritized for improvement, in addition to measuring customer satisfaction, and as a medium to obtain suggestions and input from customer needs.

Hasil Penilaian Pelanggan PLN INP
PLN INP Customer Assessment Results

Nilai Kepuasan, Kelekatpelanggan dan Keterlibatan Pelanggan PT PLN INP
PT PLN INP Customer Satisfaction, Closeness, and Engagement Index

No.	Tipologi Category	Nilai (%) Value (%)		
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
A	Nilai Kepuasan Pelanggan Customer Satisfaction Value	85.94	87.85	88.85
B	Nilai Keterlibatanpelanggan Customer Closeness Value	14.07	11.81	14.60
C	Nilai Keterlibatan Pelanggan Customer Engagement Value	83.93	85.85	86.60

Akses Informasi Layanan dan Pengaduan Pelanggan

Access to Services Information and Customers Complaints

Guna mendukung jaminan kepuasan pelanggan, Perusahaan menyediakan saluran pusat informasi dan layanan pengaduan terkait terhadap pelanggan. Hal ini diwujudkan melalui pembentukan Aplikasi MACO (Management Complaint) sebagai wujud komitmen Perusahaan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan jasa. Aplikasi MACO (Management Complaint) adalah sebuah pengembangan komunikasi antara pengguna jasa dengan Perusahaan yang akan memenuhi kebutuhan pemberian informasi terkait layanan Perusahaan (inquiry), saran, apresiasi, serta penanganan terhadap dan pengguna jasa (complaint handling).

To support the guarantee of customers satisfaction, the Company provides information center facilities and complaint services related to the customers complaints. This is realized through the establishment of MACO (Management Complaint) Application as the Company's commitment to providing the best services to service users. MACO (Management Complaint) Application is a communication channel/bridge between service users and the Company that can fulfill the needs of information requests related to the Company's services (inquiry), suggestions, appreciation, and handling complaints from service users (complaint handling).

Tujuan pembentukan Aplikasi MACO (Management Complaint) secara khusus ini adalah untuk:

a. Memenuhi permintaan informasi layanan yang akurat dan cepat bagi pengguna jasa, misalnya informasi seputar keterlambatan kapal, tarif, dll.
b. Menerima setiap saran dan apresiasi yang disampaikan oleh pengguna jasa dan melaporkannya kepada Unit/Cabang terkait agar dapat dijadikan sebagai acuan perbaikan pelayanan di masa mendatang.
c. Menerima dan meneruskan keluhan dari pengguna jasa dan melaporkannya kepada Unit/Cabang terkait untuk segera ditindaklanjuti.
d. Menyusun dan mendata permintaan informasi, saran, apresiasi, dan keluhan dari pengguna jasa dan melaporkannya kepada Management Perusahaan sebagai proses evaluasi kinerja, dan
e. Meningkatkan kepercayaan pengguna jasa terhadap Perusahaan melalui penyediaan informasi yang lengkap dan akurat serta memberikan tanggapan cepat atas keluhan yang disampaikan.

More detailed information on the purpose of establishing MACO (Management Complaint) is as follows:

a. Fulfilling requests for accurate and fast service information for service users, for example regarding ship departure schedules, fares, etc.,
b. Receiving every suggestion and appreciation submitted by service users and report it to the relevant Division/ Branch so that it can be used as a reference for service improvement in the future.
c. Receiving and responding to complaints from service users and reporting them to the relevant Division/Directorate for immediate follow-up.
d. Making notes and recording requests for information, suggestions, appreciation, and complaints from service users and reporting them to the Company Management as a performance evaluation process, and
e. Increasing the trust of service users in the Company by providing complete and accurate information as well as providing quick responses to complaints submitted.

Untuk menyalurkan pengaduan melalui Aplikasi MACO (Management Complaint) kepada pengguna jasa di seluruh Indonesia, Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan melalui beberapa saluran berikut:

- Situs resmi: macs.pln.co.id/langgan-s.id.id
- Telepon: 021-8300330 ext. 312
- Fax: 021-2500330
- Surat: Jl. Rotinbing Baru No. 31 Surabaya, Jawa Timur Indonesia 60231

To receive the result of MACO (Management Complaint) media for users all over Indonesia, Customers can submit complaints through the following channels:

- Official website: www.pln.co.id/langgan-s.id.id
- Phone: 021-8300330 ext. 312
- Fax: 021-2500330
- Mail: Jl. Rotinbing Baru No. 31 Surabaya, East Java, Indonesia 60231

Seluruh pengaduan akan ditindaklanjuti oleh Unit/ Unit. Pengaduan atau keluhan yang masuk akan diklasifikasikan berdasarkan dimensi kepuasan pelanggan untuk setiap produk sebagaimana ditetapkan dalam PBI 301 PN.00.2.3 Mengelola Keluhan Pelanggan. Kebijakan pengaduan pelanggan dan tindak lanjutnya dijelaskan dalam matrik berikut.

All complaints will be followed up by the Unit/ Division/ Incoming complaints or reports are then grouped based on the customers satisfaction dimensions for each product as stipulated in PBI 301 PN.00.2.3 Managing Customer Complaints. The customers complaint mechanism and its follow-up are described in the following criteria.

Mekanisme Pengaduan Pelanggan
Customer Complaint Mechanism

Sampai dengan tahun 2021 pengaduan pelanggan oleh PLN NP melalui aplikasi MAGI berjumlah 123 laporan dan seluruhnya pelanggan telah ditindaklanjuti. Hal ini menunjukkan komitmen tinggi PLN NP dalam melindungi hak pelanggan untuk didengar pendapat dan keluhannya sehingga layanan yang diberikan dapat sesuai dengan berbisik pelanggan.

As of 2021, the complaints received by PLN NP through the MAGI application are 123 reports and all customer complaints have been followed up. This indicates PLN NP's high commitment to protecting the customers rights to have their opinions and complaints heard so that the services obtained can be following the contract agreement.

Perlindungan Privasi Pelanggan
Customer Privacy Protection

PLN NP berkomitmen menjaga kerahasiaan informasi yang disampaikan oleh pelanggan termasuk menjaga nama baik pelanggan sebagaimana yang diatur dalam Code of Conduct. Informasi berupa keluhan pelanggan yang disampaikan melalui GRAMS (Sistem Manajemen Complaint) dikelola secara profesional oleh PLN NP, sehingga hanya pihak terkait yang memiliki akses terhadap informasi tersebut guna memfasilitasinya dan menyelesaikan keluhan tersebut. Penggunaan teknologi dalam pengelolaan keluhan pelanggan diharapkan dapat mengga assessment pelanggan sehingga kualitas layanan PLN NP dapat terus ditingkatkan.

PLN NP is committed to ensuring the confidentiality of information submitted by the customers including maintaining the customers' identities as regulated in the Code of Conduct. Information in the form of customer complaints submitted through GRAMS (Complaint Management System) is managed professionally by PLN NP. Therefore, there are only relevant parties that are granted to access the information to follow up and resolve the complaints. The use of technology in the management of customer complaints is expected to maintain customer trust so that the quality of PLN NP services can continue to be developed.

Pengembangan dan Inovasi Produk Berkelanjutan
Sustainable Product Development and Innovation

Dalam kaitannya terhadap kepuasan pelanggan, PLN NP terus melakukan pengembangan dan inovasi terhadap produknya. Pengembangan dan inovasi produk berkelanjutan serta pengembangan pelayanan pelanggan yang dilakukan PLN NP pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

In the commitment to customer satisfaction, PLN NP continues to develop and innovate its products. Continuous product development and innovation as well as customer service development carried out by PLN NP in 2021 are as follows:

3. Implementasi Co-firing Berkelanjutan

Cofiring berkelanjutan telah diujicoba di 32 unit pembangkit PLN NP dan telah diimplementasikan di 16 unit pembangkit. Sampai dengan tahun 2021 PLN NP telah memproduksi MWH Green, sebesar 318,337 GWh dengan pemanfaatan biomassa sebanyak 280.830,86 Ton.

3. Sustainable Co-Firing Implementation

Sustainable cofiring has been tested in 32 PLN NP power plant units and has been commercialized in 16 power plant units. Until 2021, PLN NP already produced 318,337 GWh of Green MWh with the utilization of 280,830.86 tons of biomass.

4. A-BOST (Advance Boiler Optimization and Tuning)

Program yang mengintegrasikan 3 skenario, yaitu: A-BOST Analyze, Power Tools, Expert Combustion Tool dan Modelling sebagai Strategi Peningkatan Performa Operasi Boiler Untuk Mendukung Transformasi Low PLN. Implementasi program ini dapat menurunkan konsumsi batu bara, sehingga mendukung emisi karbon yang dibuang ke atmosfer sehingga HF CO_2 diturunkan menjadi berkurang dan lebih ramah lingkungan (Environmentally Save).

4. A-BOST (Advance Boiler Optimization and Tuning)

A program that integrates 3 scenarios, namely: A-BOST Analyze, Power Tools, Expert Combustion Tool, and Modelling as a Strategy to Improve Coal Efficiency to Support PLN's Coal Transformation. The implementation of this program can reduce coal consumption, thereby reducing carbon emissions released into the atmosphere so that HF CO_2 equivalent is reduced and more environmentally friendly (Environmentally Save).

5. Sootblower Optimization System (SBS)

SBS adalah aplikasi berbasis web yang memungkinkan soot blower pada boiler PLTU beroperasi secara otomatis dan sesuai target. Sistem ini memanfaatkan machine learning yang mampu mengidentifikasi akumulasi pembentukan slagging-fouling pada boiler berdasarkan algoritma : rule clause serta dynamic threshold yang dihasilkan dari parameter parametric operasi yang dikalibrasi oleh slagging maupun fouling. Hasil implementasi Sootblower Optimization System ini dapat meningkatkan efisiensi boiler (% η) sebesar 0,76 % sehingga penurunan Heat Rate 24,5 kCal/kWh dan empat bangan tahun 2022, sistem ini telah diterapkan pada 8 Unit Pembangkit PLN NP.

5. Sootblower Optimization System (SBS)

SBS is a web-based application that allows soot blowers in coal boilers to operate automatically and on target. This system utilizes Machine Learning which is able to recognize the accumulation of soot formation (slagging-fouling) in boilers based on algorithms : rule clauses and dynamic thresholds determined from changes in operating parameters caused by slagging and fouling. The results of the implementation of the Sootblower Optimization System can increase the efficiency of the CFB boiler by 0.76% equivalent to a decrease in Heat Rate of 24.5 kCal/kWh and until 2022, this system had been applied to 8 PLN NP Power Plant Units.

6. Pemeliharaan Vendor Group (JASA)

Pemeliharaan yang dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya PLN NP baik SDM, bahan maupun workshop bersinergi dengan JASA. Pada tahun 2021, pemeliharaan mandiri ini telah dilakukan di 5 unit PLN NP dan berhasil melakukan efisiensi biaya pemeliharaan sebesar 24 miliar.

6. JASA (Synergy Self-Maintenance)

Maintenance is carried out by optimizing PLN NP's internal resources, both human resources, tools and workshops, in synergy with JASA. In 2021, this independent maintenance was carried out in 5 PLN NP power plant units and succeeded in reducing maintenance costs by 24 billion.

Dampak atas Kegiatan Perusahaan terhadap Pelanggan

Impacts of the Company Activities on Customers

Semua gerak laman kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh PLN NP terkait pelanggan selama tahun 2021, memudahkan terdukung dampak positif bagi Perusahaan diantaranya sebagai berikut:

Generally, PLN NP's activities on customers in 2021 resulted in positive impacts for the Company, including the following:

1. Kesanggupan dalam realisasi komitmen PLN NP dalam menindaklanjuti suara pelanggan yang didapat dalam hasil Survei Kepuasan Pelanggan tahun 2022.
2. Meningkatkan sinergi dengan Pelanggan PLN NP.
3. Menjalankan hubungan dan komunikasi dengan Pelanggan PLN NP.
4. Adanya saran dan diskusi bersama untuk perbaikan kedepan.
5. Mengetahui Nilai Kepuasan, Ketidakpuasan, dan Keterlibatan Pelanggan selama periode 2022.
6. Mendapat masukan (feedback) untuk perbaikan di tahun 2023.
7. Memecahkan masalah terkait keluhan pelanggan yang masuk.
8. Mendapat solusi dan kesepakatan bersama untuk perbaikan kedepan dalam hal hubungan pelanggan.

1. The customers are able to see PLN NP's commitment to following up on the customer voices obtained in the results of the 2022 Customer Satisfaction Survey.
2. Increased synergy with PLN NP Customers.
3. Maintained relationships and communication with PLN NP Customers.
4. Suggestions and joint discussions for future improvements.
5. Found out the Value of Customer Satisfaction, Dissatisfaction, and Engagement during the 2022 period.
6. Feedback for improvement in 2023.
7. Problem solving related to incoming customer complaints.
8. Solutions and mutual agreements for future improvements in customer relations.

Biaya Pelaksanaan Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pelanggan
Budget Cost of Corporate Social Responsibility on Customers

Selama tahun 2022 PLN NP mengeluarkan biaya sebesar Rp 1,20 Miliar untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap Pelanggan yaitu untuk pelaksanaan kegiatan survei kepuasan pelanggan PLN NP dan Anak Perusahaan, Forum Komunikasi Pelanggan (Untuk Djarum dan Kusyungan Pelanggan

During 2022 PLN NP incurred costs of IDR1.20 billion for the implementation of Corporate Social Responsibility towards the Customers, namely for the implementation of PLN NP and Subsidiaries customer satisfaction survey activities, Customers Communication Forums (Operation Discussions and Customer Visits).

Laporan Keberlanjutan
Sustainability Report

PLN NP telah menyusun Laporan Keberlanjutan (*sustainability reporting*) yang memuat informasi terkait dengan pengelolaan dan kinerja aspek keberkelanjutan termasuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan PLN NP dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*SDGs*). Pedoman penyusunan Laporan ini mengacu pada peraturan dan standar pelaporan keberlanjutan sebagai berikut:

- GRI Standards, dimana PLN NP telah melaporkan sesuai (*in accordance*) dengan GRI Standards untuk periode 1 Januari 2022 – 31 Desember 2022, dan menyertakan Pengungkapan Sektor Listrik Listrik (*Electric Utilities Sector Disclosures*);
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/ POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik; serta
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (SEOJK) Nomor 16/SEOJK.04/2021 Tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Untuk informasi lebih lengkap terkait Laporan Keberlanjutan dapat dilihat dalam buku tersendiri dari Buku Laporan Tahunan ini.

PLN NP drafted the Sustainability Report which contains information related to the management and performance of sustainability aspects including the implementation of PLN Nusantara Power's social and environmental responsibilities in supporting the achievement of sustainable development goals. The guidelines for preparing this Report refer to the following sustainability reporting regulations and standards:

- GRI Standards, in which PLN NP has reported in accordance with the GRI Standards for the period of 1 January 2022 – 31 December 2022, and included the Electric Utilities Sector Disclosures;
- Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 51/ POJK.03/2017 on the Application of Sustainable Finance to Financial Services Institutions, Issuer, and Public Listed Companies; and
- Circular Letter of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia (SEOJK) No. 16/SEOJK.04/2021 on the Form and Content of Annual Report of Issuer or Public Companies.

Further information regarding the Sustainability Report is available separately from this Annual Report Book.

Laporan Keuangan Audit 2022

Audited Financial Statement 2022

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/formerly
PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

31 DESEMBER 2022 DAN 2021/
31 DECEMBER 2022 AND 2021

PLN
Nusantara Power

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG
BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT REGARDING

TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2022 DAN 2021

RESPONSIBILITY FOR THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS AT 31 DECEMBER 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS THEN ENDED

PT PLN NUSANTARA POWER (DAHULU/FORMERLY PT INDONESIA KEPPEL BAYAN BULU) DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Kami yang bertanda tangan di bawah ini/We, the undersigned:

Nama/Name	Yuddy Hermansyah	Nama/Name
Alamat Kantor/Office Address	Jl. Ir. H. Juanda Blok A2, No. 11, Bandung	Alamat Kantor/Office Address
Alamat Domisili/Residential Address	Jl. Ir. H. Juanda Blok A2, No. 11, Bandung, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Cibeunying Kaler	Alamat Domisili/Residential Address
Telepon/Telephone	(22) 4203 46	Telepon/Telephone
Jabatan/Position	Direktur Utama/President Director	Jabatan/Position
Nama/Name	Dwi Hartono	Nama/Name
Alamat Kantor/Office Address	Jl. Ir. H. Juanda Blok A2, No. 11, Bandung	Alamat Kantor/Office Address
Alamat Domisili/Residential Address	Jl. Ir. H. Juanda, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung	Alamat Domisili/Residential Address
Telepon/Telephone	(22) 4203 46	Telepon/Telephone
Jabatan/Position	Direktur Keuangan/Finance Director	Jabatan/Position

menyatakan bahwa/declare that:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT PLN Nusantara Power (dahulu/formerly PT Indonesia Kepper Bayan Bulu) dan entitas anaknya (Grup);
1. Responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT PLN Nusantara Power (formerly PT Indonesia Kepper Bayan Bulu) and its subsidiaries (the Group);
2. Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
2. The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian telah dimuat secara lengkap dan benar;
3. a. All information has been fully and correctly disclosed in the consolidated financial statements;
b. Laporan keuangan konsolidasian Grup tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak mengungkapkan informasi atau fakta material;
b. The Group's consolidated financial statements do not contain false material information or facts, and do not omit material information or facts; and
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Grup.
4. The Board of Directors is responsible for the Group's internal control system.

Atas nama dan mewakili Direksi,
For and on behalf of the Board of Directors,

Bandung, 28 April 2023

Yuddy Hermansyah
Direktur Utama/President Director

Dwi Hartono
Direktur Keuangan/Finance Director

pwc

LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
TO THE SHAREHOLDERS OF

PT PLN NUSANTARA POWER (DAHULU/FORMERLY PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT PLN Nusantara Power (dahulu PT Pembangkitan Jawa-Bali) dan entitas anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Dasar opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung jawab auditor atas audit laporan keuangan konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang kami peroleh cukup dan tepat untuk dijadikan dasar untuk opini audit kami.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang manajemen anggap perlu untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT PLN Nusantara Power (formerly PT Pembangkitan Jawa-Bali) and its subsidiaries (the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as at 31 December 2022, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at 31 December 2022, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements paragraph of our report. We are required to be independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Tanggung jawab auditor atas audit laporan keuangan konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan tingkat keyakinan yang tinggi, tetapi bukan merupakan jaminan bahwa audit yang dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia akan selalu mendeteksi salah saji material yang ada. Salah saji dapat timbul dari kecurangan atau kesalahan dan dianggap material jika, secara individual atau agregat, dapat diperkirakan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil berdasarkan laporan keuangan konsolidasian.

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan

pwc

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungannya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan dasar akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki niat untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melakukannya.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola melanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Reasonable assurance merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan sesuai dengan Standar Audit (SA) di atas selalu mendeteksi kesalahan penyajian material jika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diharapkan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Auditors' responsibilities for the audit of the consolidated financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

Sebagai bagian dari audit berdasarkan Standar Audit, kami menggunakan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dari laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, merancang dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak mendeteksi salah penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, penyajian salah, atau penyalahgunaan pengendalian internal.
- Mengevaluasi apakah kebijakan akuntansi yang digunakan dan estimasi yang dibuat oleh manajemen dan pengungkapan terkait adalah wajar.

- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan keadaan, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifan pengendalian internal Grup.

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.

pwc

- Mengevaluasi apakah laporan keuangan konsolidasi telah disusun dan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- Memperoleh bukti audi yang cukup dan tepat mengenai informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis di dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasi. Kami bertanggung jawab atas arah, supervisi dan kinerja audit grup. Kami tetap bertanggung jawab atas opini audit kami.

Kami berkomunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan dari audit serta temuan audit yang penting, termasuk setiap kelemahan signifikan dalam pengendalian internal yang kami identifikasi selama audit kami.

- Evaluates the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Concludes on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasi mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan cara yang mencapai penyajian wajar.
- Evaluates the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

- Memperoleh bukti audi yang cukup dan tepat mengenai informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis di dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasi. Kami bertanggung jawab atas arah, supervisi dan kinerja audit grup. Kami tetap bertanggung jawab atas opini audit kami.
- Obtains sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Jakarta,
4 April 2023

Yanto, S.E., Ak., M.Ak., CPA

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/formerly PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 1/1 Schedule

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali nilai nominal dan data saham)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, except for par value and share data)

	Catatan/ Notes	2022	2021	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	6	6.936.788	7.313.966	Cash and cash equivalents
Deposito berjangka	7	191.399	201.112	Time deposits
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	8	321.400	304.376	Restricted cash in banks and time deposits
Piutang usaha	9	33.333.304	21.401.975	Trade receivables
Piutang lain-lain - bagian lancar		217.916	167.188	Other receivables - current portion
Piutang kepada ventura bersama - bagian lancar	10	67.788	124.338	Receivables from joint ventures - current portion
Persediaan	11	1.901.392	1.693.846	Inventories
Pajak dibayar di muka - bagian lancar	30a	701.402	722.157	Prepaid taxes - current portion
Biaya dibayar di muka dan uang muka		121.388	193.238	Prepaid expenses and advances
Jumlah aset lancar		44.841.776	32.916.200	Total current assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Aset tetap	12	113.231.383	104.121.366	Property, plant and equipment
Properti investasi	13	1.277.121	1.401.288	Investment properties
Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama	14	14.114.216	12.982.648	Investments in associates and joint ventures
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	8	27.227	-	Restricted cash in banks and time deposits
Aset pajak tangguhan - bersih	30d	74.268	47.776	Deferred tax assets - net
Piutang kepada ventura bersama - bagian tidak lancar	10	736.066	883.200	Receivables from joint ventures - non-current portion
Piutang lain-lain - bagian tidak lancar		27.798	44.238	Other receivables - non-current portion
Pajak dibayar di muka - bagian tidak lancar	30a	146.174	721.316	Prepaid taxes - non-current portion
Aset tidak lancar lain	15	720.646	734.614	Other non-current assets
Jumlah aset tidak lancar		111.356.911	120.751.643	Total non-current assets
JUMLAH ASET		171.672.688	173.111.843	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/formerly PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 1/2 Schedule

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali nilai nominal dan data saham)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, except for par value and share data)

	Catatan/ Notes	2022	2021	
EKUITAS DAN LIABILITAS				EQUITY AND LIABILITIES
LIABILITAS				LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang usaha	16	2.227.813	2.291.362	Trade payables
Utang lain-lain	17	760.058	887.200	Other payables
Utang pajak lainnya	33c	121.884	136.151	Other taxes payable
Utang pajak penghasilan badan		60.034	18.399	Corporate income tax payable
Bagian masih harus ditagih		38.038	9.791	Accrued expenses
Pinjaman dari pemegang saham - bagian jangka pendek	21	291.280	330.876	Loans from a shareholder - short-term portion
Liabilitas sewa		18.217	20.751	Lease liabilities
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	18	768.588	730.183	Short-term employee benefits liabilities
Jumlah liabilitas jangka pendek		3.158.712	3.417.927	Total current liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas pajak penggunaan - bersih	33d	1.331.734	1.373.816	Deferred tax liabilities - net
Pinjaman dari pemegang saham - bagian jangka panjang	21	2.376.230	2.783.334	Loans from a shareholder - long-term portion
Liabilitas sewa		32.334	38.271	Lease liabilities
Liabilitas imbalan kerja	18	3.197.871	3.682.331	Employee benefits liabilities
Jumlah liabilitas jangka panjang		6.738.169	7.877.752	Total non-current liabilities
JUMLAH LIABILITAS		10.007.881	11.695.353	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal saham - nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham				Capital stock - par value of Rp500 (full amount) per share
Modal dasar - 24.000 juta saham				Authorized - 24,000 million shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 9.000 juta saham	19	9.000.000	9.000.000	Subscribed and fully paid-up - 9,000 million shares
Tambahan modal disetor	20	3.680.939	3.642.300	Additional paid-in capital
Selisih transaksi dengan kepentingan nonpengendali		(40.732)	(40.732)	Difference in transaction with noncontrolling interest
Saldo laba				Retained earnings
Ditentukan penggunaannya		1.128.879	1.128.879	Appropriated
Tidak ditentukan penggunaannya		30.830.389	30.090.799	Unappropriated
Penghasilan komprehensif lain		(10.016.531)	(10.276.272)	Other comprehensive income
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada:				Equity attributable to:
Pemilik entitas induk		145.279.913	140.634.390	Owners of the parent
Kepentingan nonpengendali	22	276.579	258.749	Noncontrolling interest
JUMLAH EKUITAS		145.556.688	140.893.139	TOTAL EQUITY
JUMLAH EKUITAS DAN LIABILITAS		155.564.569	152.588.492	TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

PT PLN NUSANTARA POWER (sebelumnya/formerly PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 2/I/ Schedule

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2022	2021	
PENDAPATAN USAHA				REVENUE
Pendapatan energi listrik	33	31.683.074	31.341.274	Sales of electricity
Pendapatan usaha lainnya	34	3.916.731	3.966.739	Other operating revenue
Jumlah pendapatan usaha		37.599.805	35.308.013	Total revenue
BEBAN USAHA				OPERATING EXPENSES
Bahan bakar dan pelumas	35	(11.691.074)	(10.671.809)	Fuel and lubricants
Pemeliharaan	37	(3.280.074)	(3.126.941)	Maintenance
Penyusutan	12	(3.255.383)	(3.250.110)	Depreciation
Kepegawaian	36	(1.471.384)	(1.790.420)	Employee costs
Pembelian tenaga listrik	38	(774.434)	(553.477)	Purchased electricity
Lainnya	39	(1.149.767)	(804.352)	Others
Jumlah beban usaha		(25.271.497)	(20.197.113)	Total operating expenses
LABA USAHA		12.328.308	15.110.900	OPERATING INCOME
Pendapatan keuangan		183.617	182.613	Finance income
Rangkir/(kerugian) lain nilai wang asing - bersih		(1.233)	2.611	Gain/(loss) on foreign exchange - net
Bagian laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama	11	2.434.231	2.949.211	Share in net profit of associates and joint ventures
Pendapatan (beban) lainnya - bersih		249.467	(73.736)	Other income/(expenses) - net
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		9.995.350	7.160.249	PROFIT BEFORE INCOME TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	40c	(1.245.287)	(1.271.461)	INCOME TAX EXPENSE
LABA TAHUN BERJALAN		8.750.063	5.888.788	PROFIT FOR THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/formerly PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 2/2 Schedule

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2022	2021	
LABA TAHUN BERJALAN		6,350,741	5,660,166	PROFIT FOR THE YEAR
Penghasilan (kerugian) komprehensif lain tahun berjalan:				Other comprehensive income/(loss) for the year:
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that may be reclassified subsequently to profit or loss:
Bagian penghasilan (kerugian) komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama	11	868,884	(1,844)	Share in other comprehensive income/(loss) from associates and JV (net of tax)
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will not be reclassified to profit or loss:
Revaluasi aset tetap	12	(7,034)	(2,194,221)	Revaluation of property, plant and equipment
Pengukuran kembali atas program manfaat pasti	19	641,034	192,615	Remeasurement of defined benefit plans
Variabel pasti penghasilan wajar	30d	149,213	882,582	Related income tax benefits
		809,093	(1,999,821)	
Penghasilan (kerugian) komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak		809,753	(2,001,665)	Other comprehensive income/(loss) for the year (net of tax)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		7,160,494	3,658,501	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
Laba tahun berjalan diatribusikan kepada:				Profit for the year attributable to:
Pemilik entitas induk		6,316,477	5,613,033	Owners of the parent
Kepentingan nonpengendali		33,264	47,133	Non-controlling interests
LABA TAHUN BERJALAN		6,350,741	5,660,166	PROFIT FOR THE YEAR
Jumlah penghasilan komprehensif berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				Total comprehensive income for the year attributable to:
Pemilik entitas induk		6,882,103	3,691,133	Owners of the parent
Kepentingan nonpengendali		68,783	(32,631)	Non-controlling interests
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		7,160,494	3,658,502	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT PLN (PERSERO) dan ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Angka-angka dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PLN (PERSERO) and SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

| | Catatan/ Notes | Saldo per 1 Januari 2021 | Penyesuaian atas penerapan PSAK 71 dan PSAK 73 | Saldo per 1 Januari 2021 setelah penyesuaian | Laba komprehensif tahun berjalan | Penyesuaian atas penerapan PSAK 71 dan PSAK 73 | Penyesuaian atas penerapan ISAK 35 | Penyesuaian atas penerapan ISAK 37 | Penyesuaian atas penerapan ISAK 38 | Penyesuaian atas penerapan ISAK 39 | Penyesuaian atas penerapan ISAK 40 | Penyesuaian atas penerapan ISAK 41 | Penyesuaian atas penerapan ISAK 42 | Penyesuaian atas penerapan ISAK

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/formerly PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 4/1 Schedule

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)
	2022	2021	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	11,208,227	10,410,160	Cash receipts from customers
Pembayaran kas kepada pemasok, karyawan dan lainnya	(7,342,873)	(7,330,270)	Cash paid to suppliers, employees and others
Penerimaan bunga	115,041	108,417	Interest received
Pembayaran surat ketetapan pajak kurang bayar	-	(160,772)	Payments of tax assessment letter for underpayment
Penerimaan pengembalian atas surat ketetapan pajak kurang bayar	120,163	-	Receipts of refund tax assessment letter for underpayment
Penerimaan restitusi pajak penghasilan badan	224,088	127,810	Cash receipts for corporate income tax refund
Penerimaan restitusi Pajak Pertambahan Nilai	124,794	291,287	Cash receipts for Value Added Taxes refund
Pembayaran pajak penghasilan badan dan pajak penghasilan final	(159,033)	(338,112)	Payments of corporate income tax and Pre Income tax
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	3,287,609	4,110,520	Net cash provided by operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penerimaan dividen dari entitas asosiasi dan ventura bersama	168,833	227,168	Dividends received from associates and joint ventures
Penyertaan investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama	(362,388)	(62,388)	Additions of investments in associates and joint ventures
Penambahan piutang kepada ventura bersama	-	(8,400)	Additions of receivables from joint ventures
Penerimaan atas piutang kepada ventura bersama	24,750	-	Receipts of receivables from joint ventures
Perolehan aset tetap	(1,181,088)	(1,188,833)	Purchase of property, plant and equipment
Perolehan aset takberwujud	(43,304)	-	Purchase of intangible assets
Penarikan deposito berjangka	50,000	224,073	Withdrawal of time deposits
Penempatan deposito berjangka	(241,180)	-	Placement of time deposits
Penarikan rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	873	13,737	Withdrawal of restricted cash in banks and time deposits
Penempatan rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	(133,033)	(16,433)	Placement of restricted cash in banks and time deposits
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(1,698,758)	(819,109)	Net cash used in investing activities

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 4/2 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	2022	2021	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan pinjaman dari pemegang saham	355,940	331,467	Proceeds of loans from a shareholder
Pembayaran pinjaman dari pemegang saham	(355,933)	(334,297)	Payments of loans from a shareholder
Pembayaran penambahan kepemilikan pada entitas anak dari kepentingan non-pengendali	(11,154)	-	Payments of additional ownership in a subsidiary from non-controlling interest
Penerimaan atas divestasi entitas anak	5,722	-	Receipts for divestment of a subsidiary
Pembayaran liabilitas sewa	(54,548)	(57,201)	Payments of lease liabilities
Pembayaran dividen oleh entitas anak kepada kepentingan non-pengendali	(779)	(3,671)	Payments of dividends by subsidiaries to non-controlling interests
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	(60,280)	(137,502)	Net cash used in financing activities
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	1,515,945	3,621,352	NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	7,340,956	3,911,113	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	97,248	11,922	Effect of changes in foreign currency
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	8,954,139	7,340,956	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR

Lihat Catatan 31 untuk penyajian informasi arus kas Grup.

Refer to note 31 for the presentation of the Group's cash flow information.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/formerly PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 01 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

PT PLN Nusantara Power (dahulu PT Pembangkitan Jawa-Bali) ("Perusahaan") didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Notaris No. 16 tanggal 3 Oktober 1995 dari Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-13468.HT.01.01.Th.95 tanggal 3 Oktober 1995 serta diumumkan dalam Berita Negara No. 9299 tanggal 10 November 1998, Tambahan No. 90.

Anggaran Dasar Perusahaan terakhir diubah berdasarkan Akta Notaris No. 70 tanggal 30 Desember 2022, dari Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta, untuk mengubah nama Perusahaan yang semula bernama PT Pembangkitan Jawa-Bali menjadi PT PLN Nusantara Power. Akta perubahan ini telah diterima dan dicatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-0000005.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 1 Januari 2023.

Perusahaan berdomisili di Surabaya dengan satuan-satuan usaha yang berlokasi di Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Jl. Ketintang Baru No. 11, Surabaya.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah untuk menyelenggarakan usaha ketenagalistrikan berdasarkan prinsip industri dan niaga yang sehat yang mencakup aktivitas-aktivitas sebagai berikut:

a. Pembangkitan tenaga listrik;
b. Konstruksi bangunan elektrikal;
c. Pemasangan peralatan ketenagalistrikan;
d. Pemeliharaan dan/atau pengoperasian peralatan ketenagalistrikan; dan
e. Pelaksanaan dan/atau kegiatan usaha penduking dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan termasuk memberikan penugasan kepada entitas anaknya.

Perusahaan tergabung dalam kelompok usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

1. GENERAL

a. Establishment and general information

PT PLN Nusantara Power (previously PT Pembangkitan Jawa-Bali) (the «Company») was established in Jakarta based on Notarial Deed No. 16 dated 3 October 1995 of Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notary in Jakarta. The deed of establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. C2-13468.HT.01.01.Th.95 dated 3 October 1995 and was published in State Gazette No. 9299 dated 10 November 1998, Supplement No. 90.

The Articles of Association of the Company were recently amended by Notarial Deed No. 70 dated 30 December 2022, of Muhammad Hanafi, S.H., Notary in Jakarta, to change the Company's name from PT Pembangkitan Jawa-Bali to PT PLN Nusantara Power. This change was received and recorded by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree Letter No. AHU-0000005.AH.01.02.TAHUN 2023 dated 1 January 2023.

The Company is domiciled in Surabaya with business units located in Java, Kalimantan, and Sumatera. The Company's head office is located in Jl. Ketintang Baru No. 11, Surabaya.

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of its activities is to engage in the electric power industry business based on the principles of competitive industry and commerce, consisting of the following activities:

a. Power plants;
b. Electrical buildings construction;
c. Installation of electrical equipments;
d. Maintenance and/or operation of electrical equipments; and
e. Sales and/or other supporting business activities in order to optimise the available resources of the Company, including delegating assignments to its subsidiaries.

The Company is one of the group of companies owned by Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/formerly PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, jumlah karyawan tetap Perusahaan dan entitas anaknya (secara kolektif disebut sebagai "Grup") masing-masing sebanyak 10.050 karyawan (tidak diaudit) dan 9.857 karyawan (tidak diaudit).

b. Pembentukan struktur subholding

Berdasarkan Surat Kepulauan Menteri Badan Usaha Milik Negara ("SLMN") Republik Indonesia No. S-658/MBU/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 perihal Persetujuan Pembentukan Holding dan Subholding PLN Wave/Tahap Lagi Grid-Base serta Restrukturisasi dan Pengalihan Hara yang dituangkan dalam Akta Notaris No. 70 tanggal 30 Desember 2022 dari Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, PLN membentuk empat subholding yang terdiri dari:

1. Dua subholding di bidang pembangkitan tenaga listrik, yaitu PLN Nusantara Power ("PNP") (sebelumnya Pembangkitan Jawa Bali) dan PT Indonesia Power atau disebut PLN Indonesia Power ("PIP"), nama merek yang digunakan;
2. Satu subholding di bidang penyediaan dan logistik energi primer, yaitu PT PLN Energi Primer Indonesia ("EPI") (sebelumnya PLN Batubara); dan
3. Satu subholding untuk kegiatan usaha di luar pembangkitan, transmisi, dan distribusi ketenagalistrikan (Beyond kWh), yaitu bernama Indonesia Comnet Plus ("ICON+").

Sebagai tindak lanjut pembentukan subholding PLN tersebut sesuai dengan Akta Notaris No. 70 tanggal 30 Desember 2022, dari Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan tentang Persetujuan atas Pemisahan Kegiatan Usaha Pembangkitan Listrik PLN kepada Perusahaan, yang menyatakan bahwa sebagian aset dan liabilitas kegiatan usaha pembangkitan tenaga listrik PLN akan beralih secara hukum menjadi hak serta kewajiban dan Perusahaan yang menerima pemisahan sejak tanggal efektif pemisahan di 1 Januari 2023.

1. GENERAL (continued)

a. *Establishment and general information (continued)*

As at 31 December 2022 and 2021, the Company and its subsidiaries (collectively referred to as the "Group") had a total permanent number of employees of 10,050 (unaudited) and 9,857 (unaudited), respectively.

b. *Establishment of subholding structures*

Based on Decision Letter of the Minister of State-Owned Enterprise ("SOE") of the Republic of Indonesia No. S-658/MBU/12/2022 dated 30 December 2022, regarding the Approval for The Establishment of Holding and Subholding of PLN for the Legal Grid-Base Period/Stage as well as the Restructuring and Transfer of Assets as stated in the Notarial Deed No. 70, dated 30 December 2022, of Muhammad Hanafi, S.H., Notary in South Jakarta, PLN established four subholdings, consisting of:

1. *Two subholdings in the power generation sector, namely PLN Nusantara Power ("PNP") (formerly Pembangkitan Jawa Bali) and PT Indonesia Power or namely PLN Indonesia Power ("PIP"), the branding name used;*
2. *One subholding in the primary energy procurement and logistics sector, namely PT PLN Energi Primer Indonesia ("EPI") (formerly PLN Batubara); and*
3. *One subholding for business activities outside of power generation, transmission, and distribution (Beyond kWh), namely Indonesia Comnet Plus ("ICON+").*

As a follow-up to the establishment of the PLN subholding in accordance with Notarial Deed No. 70 dated 30 December 2022, from Muhammad Hanafi, S.H., Notary in South Jakarta regarding Approval of Separation of PLN's Power Generation Business Activities to the Company, it was stated that several assets and liabilities of PLN's power generation business activities will legally be transferred to assume the rights and obligations of the Company that received the separation from the effective date of the separation on 1 January 2023.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/formerly PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/3 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

a. Susunan pengurus dan informasi lain

Susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

2022		2021	
Komisaris Utama	Edy Hariyadi*)	Dekan Kabiyat	Presiden Commissioner
Komisaris	Kamaldi**)	Komang Purnama	Commissioner
	Jansen D. Simanjuntak	Jansen D. Simanjuntak	
	Nandika Anurogo	Nandika Anurogo	
	Sisti Kresna Nurdahlia	Sisti Kresna Nurdahlia*)	
	Bagus Purohito	Bagus Purohito	

*) Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler tanggal 23 Desember 2021
**) Berdasarkan Akta Notaris No. 12 tanggal 14 Oktober 2022, dari Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta.
***) Berdasarkan Akta Notaris No. 3 tanggal 1 Januari 2022, dari Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta.

*) Based on decision of the shareholders at the Circular General Shareholders Meeting of the Company dated 23 December 2021
**) Based on Notarial Deed No. 12 dated 14 October 2022, of Muhammad Hanafi, S.H., Notary in Jakarta.
***) Based on Notarial Deed No. 3 dated 1 January 2022, of Muhammad Hanafi, S.H., Notary in Jakarta.

Susunan Dewan Direksi pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's Board of Directors as at 31 December 2022 and 2021 was as follows:

2022		2021	
Direktur Utama	Fadi Pinemanyan***)	Bang Harus Hadiyan***)	President Director
Direktur Sumber Daya Manusia dan Administrasi	Kanjanan Ui	Kanjanan Ui	Director of Human Resources and Administration
Direktur Pengembangan dan Niaga	Muhamad Rasit***)	Ivan Purnama*)	Director of Development and Commerce
Direktur Keuangan	Sisi Kresna***)	B. Bayan Insani	Director of Finance
Direktur Operasi Pembangkit Jasa	M. Yusuf Hanafi A.	M. Yusuf Hanafi A.***)	Director of Operation Jasa Power Plant
Direktur Operasi Pembangkit Sendiana	Rachmansa Indana	Rachmansa Indana	Director of Operation Opa Power Plant

*) Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler tanggal 23 Januari 2021.
**) Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler tanggal 16 Februari 2021.
***) Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler tanggal 23 Juli 2021.
****) Berdasarkan Akta Notaris No. 12 tanggal 14 Oktober 2022, dari Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta.

*) Based on decision of the shareholders at the Circular General Shareholders Meeting of the Company dated 23 January 2021.
**) Based on decision of the shareholders at the Circular General Shareholders Meeting of the Company dated 16 February 2021.
***) Based on decision of the shareholders at the Circular General Shareholders Meeting of the Company dated 23 July 2021.
****) Based on Notarial Deed No. 12 dated 14 October 2022, of Muhammad Hanafi, S.H., Notary in Jakarta.

Susunan Komite Audit pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's Audit Committee as at 31 December 2022 and 2021 was as follows:

2022*)		2021	
Ketua	Kamaldi	Nandika Anurogo*)	Chairman
Sekretaris Anggota	Edward Rahmat	Sigit Djoko Purbowo	Secretary/Members
Anggota	Lindi Hakimah	Jindar Sudar Sukma	Members

*) Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 010.K/DIR/PLN/2021
**) Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 022.K/DIR/PLN/2022

*) Based on Decision of the Board of Commissioners No. 010.K/DIR/PLN/2021
**) Based on Decision of the Board of Commissioners No. 022.K/DIR/PLN/2022

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("PSAK") BARU, REVISI, AMANDEMEN DAN PENYESUAIAN TAHUNAN

Penerapan dari amandemen dan penyesuaian tahunan tersebut standar akuntansi, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2022 tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Grup dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang diakui/dan di laporan keuangan konsolidasian pada tahun berjalan:

- Amandemen PSAK No. 22, 'Kombinasi Bisnis - Referensi ke Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan'
- Amandemen PSAK No. 57, 'Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi - Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak'
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 69, 'Agrikultur'
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 71, 'Instrumen Keuangan'
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 73, 'Sewa'

Sehubungan dengan amandemen PSAK No. 71, No. 55, No. 69, No. 62 dan No. 73, Grup saat ini memiliki piutang kepada ventura bersama (Catatan 10) dan pinjaman dari pemegang saham (Catatan 31) yang mengacu pada Dolar Amerika Serikat *London Interbank Offered Rate* ("LIBOR") dan berlaku hingga lebih dari tahun 2022. Pada tanggal 31 Desember 2022, suku bunga acuan alternatif belum ditentukan.

Standar baru, amandemen, dan revisi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2022 adalah sebagai berikut:

- PSAK No. 74, "Kontrak Asuransi"
- Amandemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan - Klasifikasi Kewajiban Lancar atau Tidak Lancar"
- Amandemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan - Pengungkapan Kebijakan Akuntansi"
- Amandemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan - Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan"
- Amandemen PSAK No. 16, "Aset Tetap - Hasil sebelum Penggunaan yang Dimaksudkan"

2. *NEW, REVISIONS, AMENDMENTS AND ANNUAL IMPROVEMENTS STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARD ("SFAS")*

The adoption of the following amendments and annual improvements to accounting standards which are effective from 1 January 2022 did not result in substantial changes to the Group's accounting policies and had no material effect on the amounts reported in the consolidated financial statements for the current year:

- *Amendment to SFAS No. 22, 'Business Combinations - References to the Conceptual Framework for Financial Reporting'*
- *Amendment to SFAS No. 57, 'Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets - Onerous Contracts - Cost of Fulfilling a Contract'*
- *Annual Improvement to SFAS No. 69, 'Agriculture'*
- *Annual Improvement to SFAS No. 71, 'Financial Instruments'*
- *Annual Improvement to SFAS No. 73, 'Leases'*

With respect to the amendments to SFAS No. 71, No. 55, No. 69, No. 62 and No. 73, the Group currently has receivables from joint ventures (Note 10) and loans from a shareholder (Note 31) which refer to United States Dollars London Interbank Offered Rate ("LIBOR") and extend beyond 2022. As at 31 December 2022, the alternative benchmark has not yet been determined.

The new standard, amendments, and revisions issued but not yet effective for the financial year beginning 1 January 2022 are as follows:

- *SFAS No. 74, 'Insurance Contracts'*
- *Amendment to SFAS No. 1, 'Presentation of Financial Statements - Classification of Liabilities as Current or Non-Current'*
- *Amendment to SFAS No. 1, 'Presentation of Financial Statements - Disclosure of Accounting Policies'*
- *Amendment to SFAS No. 1, 'Presentation of Financial Statements - Long-term Liabilities with Covenants'*
- *Amendment to SFAS No. 16, 'Property, Plant and Equipment - Proceeds before Intended Use'*

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/formerly PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 6/6 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("PSAK") BARU, REVISI, AMANDEMEN DAN PENYESUAIAN TAHUNAN (lanjutan)

Standar baru, amandemen dan revisi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2022 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

- Amandemen PSAK No. 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan - Definisi Estimasi Akuntansi"
- Amandemen PSAK No. 46, "Pajak Penghasilan - Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal"
- Amandemen PSAK No. 73, "Sewa - Liabilitas Sewa Pada Transaksi Jual dan Sewa-balik"
- Amandemen PSAK No. 74, "Kontrak Asuransi" tentang Penerapan Awal PSAK No. 74 dan PSAK No. 71 - Informasi Komparatif"
- Revisi PSAK No. 101, "Penyajian Laporan Keuangan Syariah"
- Revisi PSAK No. 107, "Akuntansi Ijarah"
- Revisi PSAK No. 109, "Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah"

Standar baru, amandemen, dan revisi di atas berlaku efektif mulai 1 Januari 2023, kecuali untuk Amandemen PSAK No. 1 "Penyajian Laporan Keuangan - Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan", Amandemen PSAK No. 73, Revisi PSAK No. 101 dan Revisi PSAK No. 109 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2024, dan PSAK No. 74 dan Amandemen PSAK No. 74 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2023, tetapi penerapan dini diperkenankan.

Pada tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, Grup sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru, amandemen dan revisi pada laporan keuangan konsolidasian Grup.

2. *NEW, REVISIONS, AMENDMENTS AND ANNUAL IMPROVEMENTS STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARD ("SFAS") (continued)*

The new standard, amendments and revisions issued but not yet effective for the fiscal year beginning 1 January 2022 are as follows: (continued)

- *Amendment to SFAS No. 25, "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors - Definition of Accounting Estimates"*
- *Amendment to SFAS No. 46, "Income Tax - Deferred Taxes related to Assets and Liabilities Arising from a Single Transaction"*
- *Amendment to SFAS No. 73, "Leases - Lease Liability in a Sale and Leaseback Transaction"*
- *Amendment to SFAS No. 74, "Insurance Contract regarding Initial Application of SFAS No. 74 and SFAS No. 71 - Comparative Information"*
- *Revision to SFAS No. 101, "Presentation of Sharia Financial Statements"*
- *Revision to SFAS No. 107, "Ijarah Accounting"*
- *Revision to SFAS No. 109, "Zakat, Infaq and Sedekah Accounting"*

The above new standard, amendments and revisions are effective beginning 1 January 2023, except for Amendment to SFAS No. 1 "Presentation of Financial Statements - Long-term Liabilities with Covenants", Amendment to SFAS No. 73, Revision to SFAS No. 101 and Revision to SFAS No. 109 which are effective beginning 1 January 2024, and SFAS No. 74 and Amendment to SFAS No. 74 which are effective beginning 1 January 2023, but early adoption is permitted.

As at the completion date of these consolidated financial statements, the Group is evaluating the potential impact of these new standards, amendments and revisions to the Group's consolidated financial statements.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/formerly PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 6/6 Schedule/s

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember/ 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 December 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi penting yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup. Kebijakan ini telah diaplikasikan secara konsisten terhadap semua tahun yang disajikan, kecuali dinyatakan lain.

a. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan ("SAK")

Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun berdasarkan Penyataan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

b. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian adalah dasar akrual. Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha dan dengan penyusunan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan penyusunan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia memerlukan penggunaan estimasi dan asumsi akuntansi penting tertentu. Penyusunan laporan keuangan juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area-area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi, atau area dimana asumsi dan estimasi yang berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan dalam Catatan 4.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

Presented below are the significant accounting policies adopted in preparing the consolidated financial statements of the Group. These policies have been consistently applied to all of the years presented, unless otherwise stated.

a. *Compliance with the Financial Accounting Standards ("FAS")*

The Group's consolidated financial statements have been prepared in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards.

b. *Basis of preparation of the consolidated financial statements*

The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, are prepared on the accrual basis of accounting. The preparation and presentation of the consolidated financial statements are based on a going concern assumption and the measurement basis is historical cost, except for certain accounts that have been measured on the basis described in the related accounting policies.

The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates and assumptions. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Group's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements are disclosed in Note 4.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/formerly PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 07/Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember/December 2022 DAN/AND 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Prinsip-prinsip konsolidasian

i.1. Konsolidasi

Entitas anak merupakan semua entitas (termasuk entitas terstruktur), dimana Grup memiliki pengendalian. Grup mengendalikan suatu entitas ketika Grup memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan suatu entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas entitas tersebut.

Entitas anak dikonsolidasi sejak tanggal pengendalian beralih kepada Grup dan tidak lagi dikonsolidasi sejak tanggal hilangnya pengendalian.

Saldo, transaksi, penghasilan dan beban intra kelompok usaha dieliminasi. Keuntungan dan kerugian hasil dari transaksi intra kelompok usaha yang aset dalam aset juga dieliminasi. Kebijakan akuntansi entitas anak telah diubah sebelumnya untuk memastikan konsistensi penerapan kebijakan oleh Grup.

i.2. Akuisisi

Grup menerapkan metode akuisisi untuk mencatat setiap kombinasi bisnis. Imbalan yang diberikan untuk mengakuisisi entitas anak adalah nilai wajar seluruh aset yang diberikan, liabilitas yang diakui dan ekuitas pengakuisisi kepada pemilik sebelumnya dari entitas yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup. Imbalan yang diberikan termasuk nilai wajar setiap aset dan liabilitas yang dihasilkan dari suatu kesepakatan imbalan kontinjensi. Aset teridentifikasi, liabilitas dan liabilitas kontinjensi yang diambil alih, yang dipercaya dalam kombinasi bisnis diukur pada awalnya sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Principles of consolidation

i.1. Consolidation

Subsidiaries are all entities (including structured entities) over which the Group has control. The Group controls an entity when the Group is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the entity.

Subsidiaries are consolidated from the date on which control is transferred to the Group and are de-consolidated from the date on which that control ceases.

Intragroup balances, transactions, income and expenses are eliminated. Profits and losses resulting from intragroup transactions that are recognised in assets are also eliminated. The accounting policies of subsidiaries have been amended where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.

i.2. Acquisition

The Group applies the acquisition method to account for business combinations. The consideration transferred for the acquisition of a subsidiary is the fair value of the assets transferred, the liabilities incurred to the former owners of the acquired entity and the equity interests issued by the Group. The consideration transferred is the fair value of any asset or liability resulting from a contingent consideration arrangement. Identifiable assets acquired, liabilities and contingent liabilities assumed in a business combination are measured initially at their fair values as at the acquisition date.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/formerly PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/B Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

d.2. Akuisisi (lanjutan)

Grup mengakui kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisisi, dan sebesar nilai wajar atau sebesar bagian proporsional kepentingan non-pengendali atas aset neto teridentifikasi pihak yang diakuisisi. Kepentingan non-pengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Biaya terkait akuisisi dibebankan pada saat terjadinya.

Jika kombinasi bisnis dilaksanakan secara bertahap, Grup akan mengukur kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki pada pihak yang diakuisisi sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan, jika ada, dalam laba rugi. Imbalan kontinjensi yang masih harus dialihkan oleh Grup diakui sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi. Perubahan selanjutnya atas nilai wajar imbalan kontinjensi yang diakui sebagai aset atau liabilitas dan diakui dalam laba rugi. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali dan penyelesaian selanjutnya dicatat dalam ekuitas.

Selisih lebih antara imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan non-pengendali dalam pihak yang diakuisisi, dan nilai wajar pada tanggal akuisisi dari kepemilikan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak yang diakuisisi, dibandingkan dengan nilai wajar bagian Grup atas aset bersih teridentifikasi yang diakuisisi, dicatat sebagai goodwill. Jika jumlah tersebut lebih kecil dari nilai wajar atas aset bersih teridentifikasi entitas anak yang diakuisisi dan pengukuran atas seluruh jumlah tersebut telah selesai, dalam hal pemberian dengan diskon, selisih tersebut diakui secara langsung dalam laba rugi.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Principles of consolidation (continued)

d.2. Acquisition (continued)

The Group recognises any non-controlling interest in the acquiree on an acquisition-by-acquisition basis, either at fair value or at the non-controlling interest's proportionate share of the acquiree's identifiable net assets. Non-controlling interests are reported as equity in the consolidated statements of financial position, separate from the owners of the parent entity.

Acquisition-related costs are expensed as incurred.

If the business combination is achieved in stages, the Group will remeasure its previously held equity interest in the acquiree at its fair value at its acquisition date and recognise the resulting gain or loss, if any, in profit or loss. Any contingent consideration to be transferred by the Group is recognised at its fair value as at the acquisition date. Subsequent changes to the fair value of the contingent consideration that is deemed to be an asset or a liability are recognised in profit or loss. A contingent consideration that is classified as equity is not remeasured, and its subsequent settlement is accounted for within equity.

The excess of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interests in the acquiree and the acquisition-date fair value of any previous equity interest in the acquiree over the fair value of the Group's share of the identifiable net assets acquired is recorded as goodwill. If those amounts are less than the fair value of the net identifiable assets of the subsidiary acquired and the measurement of all amounts has been reviewed, in the case of a bargain purchase, the difference is recognised directly in profit or loss.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/formerly PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/3 Schedule

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

i. Perubahan kepemilikan atas entitas anak tanpa kehilangan pengendalian

Transaksi dengan kepentingan non-pengendali yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian diakui sebagai transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dibayarkan dan bagiannya atas jumlah tercatat aset neto yang diperoleh dicatat dalam ekuitas. Keuntungan atau kerugian atas pelepasan kepada kepentingan non-pengendali juga dicatat pada ekuitas.

ii. Pelepasan entitas anak

Ketika Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak, Grup menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap goodwill) dan liabilitas entitas anak pada nilai tercatatnya ketika pengendalian hilang. Jumlah yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain juga direklasifikasi ke laba rugi atau dialihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh PSAK lain.

Setiap investasi pada entitas anak tersebut diakui sebesar nilai wajarnya. Setiap perbedaan antara nilai tercatat atas investasi pada tanggal hilangnya pengendalian dan nilai wajarnya diakui dalam laba rugi.

iii. Akuntansi atas entitas asosiasi dan ventura bersama

Entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana Grup mempunyai pengaruh signifikan, tetapi tidak mengendalikan, dan biasanya Grup memiliki 20% atau lebih hak suara, tetapi tidak melebihi 50% hak suara. Investasi pada entitas asosiasi dicatat pada laporan keuangan konsolidasian menggunakan metode ekuitas dikurangi kerugian penurunan nilai, jika ada.

Ventura bersama merupakan pengaturan bersama antara beberapa pihak yang mewajibkan kesepakatan pengendalian bersama yang memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Ventura bersama ini menggunakan metode ekuitas dikurangi kerugian penurunan nilai, jika ada.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Principles of consolidation (continued)

i. Changes in ownership interest in subsidiaries without loss of control

Transactions with non-controlling interests that do not result in a loss of control are accounted for as equity transactions. The difference between the fair value of any consideration paid and the relevant share acquired of the carrying amount of net assets of the subsidiary is recorded in equity. Gains or losses on disposals to non-controlling interests are also recorded in equity.

ii. Disposal of subsidiaries

When the Group loses control of a subsidiary, the Group derecognizes the assets (including any goodwill) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts as at the date on which control is lost. Amounts previously recognised in other comprehensive income are also reclassified to profit or loss or transferred directly to retained earnings if required under other SFAS.

Any investment retained in the former subsidiary is recognized at its fair value. The difference between the carrying amount of the investment retained at the date when the control is lost and its fair value is recognised in profit or loss.

iii. Accounting for associates and joint ventures

An associate is an entity over which the Group has significant influence, but not control, generally accompanied by a shareholding giving rise to voting rights of 20% or greater but not exceeding 50%. Investments in an associate are accounted for in the consolidated financial statements using the equity method less impairment losses, if any.

A joint venture is a joint arrangement in which the parties that share joint control have rights to the net assets of the arrangement. Joint ventures are accounted for using the equity method less impairment losses, if any.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/formerly PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/16 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

c. Principles of consolidation (continued)

iv. Akuntasi atas entitas asosiasi dan ventura bersama (lanjutan)

iv. Accounting for associates and joint ventures (continued)

- Akuisisi

Investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan dihitung berdasarkan nilai wajar aset yang diserahkan, instrumen ekuitas yang diterbitkan atau liabilitas yang timbul atau diambil alih pada tanggal akuisisi, ditambah biaya yang berhubungan langsung dengan akuisisi.

Goodwill pada akuisisi entitas asosiasi atau ventura bersama merupakan selisih lebih yang terlebih dengan biaya perolehan investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama dengan bagian Grup atas nilai wajar neto aset teridentifikasi dari entitas asosiasi atau ventura bersama dan disajikan dalam jumlah tercatat investasi.

- Acquisitions

Investment in an associate or a joint venture is initially recognised at cost. The cost of an acquisition is measured at the fair value of the assets transferred, equity instruments issued or liabilities incurred or assumed as at the date of exchange, plus costs directly attributable to the acquisition.

Goodwill on the acquisition of an associate or a joint venture represents the excess of the cost of the acquisition of the associate or joint venture over the Group's share of the fair value of the identifiable net assets of the associate or joint venture and is included in the carrying amount of the investment.

- Metode ekuitas

Dalam menerapkan metode ekuitas, bagian Grup atas laba rugi entitas asosiasi atau ventura bersama setelah penyesuaian untuk kebijakan akuntansi yang berbeda dengan laba rugi dari bagian Grup atas penghasilan komprehensif lain setelah tanggal perolehan untuk penghasilan komprehensif lain.

Perubahan dan penerimaan distribusi dari entitas asosiasi atau ventura bersama setelah tanggal perolehan disesuaikan terhadap nilai tercatat investasi.

Jika bagian Grup atas rugi entitas asosiasi atau ventura bersama sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi atau ventura bersama, termasuk piutang tidak tercatat lainnya pastinya, maka Grup menghentikan pengakuan bagiannya atas rugi lebih lanjut, kecuali Grup memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atau telah melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi atau ventura bersama.

- Equity method of accounting

In applying the equity method of accounting the Group's share of its associate's or joint venture's post-acquisition profit or loss is recognised in profit or loss and its share of post-acquisition other comprehensive income is recognised in other comprehensive income.

These post-acquisition movements and distributions received from an associate or a joint venture are adjusted against the carrying amount of the investment.

When the Group's share of the losses of an associate or a joint venture equals or exceeds its interest in the associate or joint venture, including any other unsecured non-current receivables, the Group does not recognise further losses, unless it has obligations to make or has made payments on behalf of the associate or joint venture.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/formerly PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/11 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

iv. Akuntansi atas entitas asosiasi dan ventura bersama (lanjutan)

- Metode ekuitas (lanjutan)

Keuntungan yang belum direalisasi atas transaksi antara Grup dengan entitas asosiasi atau ventura bersama dieliminasi sebesar bagian Grup dalam entitas asosiasi atau ventura bersama tersebut. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti penurunan nilai aset yang ditransfer. Kebijakan akuntansi entitas asosiasi atau ventura bersama akan disesuaikan, apabila diperlukan, agar konsisten dengan kebijakan akuntansi Grup.

Dividen yang akan diterima dari entitas asosiasi atau ventura bersama diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menentukan apakah terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai atas investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama. Jika bukti tersebut ada, maka Grup menghitung besarnya penurunan nilai sebagai selisih antara jumlah yang terpulihkan dan nilai tercatat atas investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama dan mengakui selisih tersebut pada laba rugi.

- Pelepasan

Investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama dihentikan pengakuannya apabila Grup tidak lagi memiliki pengaruh signifikan dan Grup mengukur investasi yang tersisa sebesar nilai wajar. Selisih antara jumlah tercatat investasi yang tersisa pada tanggal hilangnya pengaruh signifikan dan nilai wajarnya diakui dalam laba rugi.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Principles of consolidation (continued)

iv. Accounting for associates and joint ventures (continued)

- Equity method of accounting (continued)

Unrealised gains on transactions between the Group and its associate or joint venture are eliminated to the extent of the Group's interest in the associate or joint venture. Unrealised losses are also eliminated unless the transaction provides evidence of impairment of the asset being transferred. The accounting policies of the associate or joint venture have been changed where necessary to ensure consistency with the accounting policies adopted by the Group.

Dividend receivables from an associate or a joint venture are recognised as reductions in the carrying amount of the investment.

At each reporting date, the Group determines whether there is any objective evidence that the investment in an associate or joint venture is impaired. If any such evidence exists, the Group calculates the amount of the impairment as the difference between the recoverable amount of the associate or the joint venture and its carrying amount and recognises the amount in profit or loss.

- Disposals

An investment in an associate or a joint venture is derecognised when the Group loses significant influence and any retained equity interest in the entity is remeasured at its fair value. The difference between the carrying amount of the retained interest at the date when significant influence is lost and its fair value is recognised in profit or loss.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

iv. Akuntansi atas entitas asosiasi dan ventura bersama (lanjutan)

- Pelepasan (lanjutan)

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari pelepasan sebagian atau entas yang timbul pada investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama dimana pengaruh signifikan masih dipertahankan diakui dalam laba rugi dan hanya suatu bagian proporsional atas jumlah yang telah diakui sebelumnya pada penghasilan komprehensif lain yang direklasifikasi ke laba rugi.

d. Pengalaman mata uang asing

i. Mata uang fungsional dan penyajian

Akun-akun yang disajikan dalam laporan keuangan setiap entitas anggota Grup diukur menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas tersebut beroperasi ("mata uang fungsional"). Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah Indonesia ("Rp"), yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan penyajian Grup.

ii. Transaksi dan saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan menjadi mata uang fungsional menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal pelaporan, setiap aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing menggunakan kurs yang berlaku pada akhir tahun pelaporan diakui dalam laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, kurs konversi yang digunakan Grup untuk mata uang Dolar Amerika Serikat ("AS$") adalah masing-masing Rp15.853 dan Rp14.253.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Principles of consolidation (continued)

iv. Accounting for associates and joint ventures (continued)

- Disposals (continued)

Gains and losses arising from the partial disposal or dilution of an investment in an associate and joint venture in which significant influence is retained are recognised in profit or loss, and only a proportionate share of the amount previously recognised in other comprehensive income is reclassified to profit or loss, where appropriate.

d. Foreign currency transactions

i. Functional and presentation currency

Items included in the financial statements of each of the Group's entities are measured using the currency of the primary economic environment in which the relevant entity operates (the "functional currency"). The consolidated financial statements are presented in Indonesian Rupiah ("Rp"), which is the Company's functional currency and the Group's presentation currency.

ii. Transactions and balances

Foreign currency transactions are translated into the functional currency using the exchange rates prevailing as at the date of the transactions. As at the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currency are adjusted to reflect the prevailing exchange rates at such a date. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at year-end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognised in profit or loss.

The conversion rates used by the Group on 31 December 2022 and 2021 for United States Dollar ("US$") are Rp15,853 and Rp14,253, respectively.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/formerly PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 9/1/ Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Transaksi dengan pihak berelasi

Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sesuai yang didefinisikan oleh PSAK No. 7, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi" sebagai berikut:

(a) Orang atau anggota keluarga terdekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   (i) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   (ii) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   (iii) Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

(b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   (i) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
   (ii) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
   (iii) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
   (iv) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
   (v) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
   (vi) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
   (vii) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Transactions with related parties

The Group has transactions with related parties as defined under SFAS No. 7, "Related Party Disclosures" as follows:

(a) A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:
   (i) Has control or joint control over the reporting entity;
   (ii) Has significant influence over the reporting entity; or
   (iii) Is member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity;

(b) An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions apply:
   (i) The entity and the reporting entity are members of the same group (which means their each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);
   (ii) One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);
   (iii) Both entities are joint ventures of the same third party;
   (iv) One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
   (v) The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of the employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;
   (vi) The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);
   (vii) A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).

PT PLN BUSANTARA POWER (dahulu/formerly PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/14 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 Desember 2022 dan 2021 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)	NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2022 AND 2021 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh Pemerintah. Pemerintah mengacu kepada instansi Pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah termasuk entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan yang relevan.

f. Aset keuangan

i. Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran

Grup mengklasifikasikan aset keuangan dalam kategori berikut ini:
- aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi; dan
- aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

Klasifikasi tersebut tergantung pada model bisnis Grup untuk mengelola aset keuangan dan persyaratan kontraktual arus kas apakah penerimaan arus kasnya semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Grup menentukan klasifikasi aset keuangan pada pengakuan awal.

ii. Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Klasifikasi ini berlaku untuk instrumen utang yang dikelola dalam model bisnis "dimiliki untuk mendapatkan arus kas" dan memiliki arus kas yang memenuhi kriteria "semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga".

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Transactions with related parties (continued)

A Government related entity is an entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by the Government. Government refers to Government agencies and similar bodies whether local, national or international.

Government-related entities include entities that are controlled or significantly influenced by the Ministry of Finance or Local Governments being the shareholders of the entity or an entity controlled by the Government of the Republic of Indonesia, represented by the Ministry of SOE as shareholder's representative.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes.

f. Financial assets

i. Classification, recognition and measurement

The Group classifies its financial assets into the following categories:
- financial assets measured at amortised cost; and
- financial assets measured at fair value either through profit or loss ("FVTPL") or through other comprehensive income ("FVOCI").

The classification depends on the Group's business model and the contractual terms of the cash flows when determining whether their cash flows are solely payments of principal and interest ("SPPI").

The Group determines the classification of its financial assets at initial recognition.

ii. Financial assets measured at amortised cost

This classification applies to debt instruments which are held under a 'hold to collect' business model and which have cash flows that meet the SPPI criteria.

PT PLN (PERSERO) (dahulu/formerly PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO))
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/15 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Aset keuangan (lanjutan)

i. Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran (lanjutan)

(i) Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

Pada pengakuan awal, piutang usaha yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan, diakui sebesar harga transaksi. Aset keuangan lainnya awalnya diakui sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi yang terkait. Aset keuangan ini selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan atau kerugian pada penghentian atau modifikasi aset keuangan yang diukur yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada laba rugi.

(ii) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan berikut. Dalam semua kasus, biaya transaksi dibebankan pada laba rugi.

- Instrumen utang yang tidak memiliki kriteria biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Keuntungan atau kerugian nilai wajar selanjutnya akan diakui pada laba rugi.

- Investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan atau dimana pilihan penghasilan komprehensif lain tidak berlaku. Keuntungan atau kerugian nilai wajar dan penghasilan dividen lainnya diakui pada laba rugi.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Financial assets (continued)

i. Classification, recognition and measurement (continued)

(i) Financial assets measured at amortised cost (continued)

At initial recognition, trade receivables that do not have a significant financing component are recognised at their transaction price. Other financial assets are initially recognised at fair value plus related transaction costs. They are subsequently measured at amortised cost using the effective interest method. Any gains or losses on derecognition or modification of a financial asset held at amortised cost are recognised in profit or loss.

(ii) Financial assets measured at FVTPL

The classification applies to the following financial assets. In all cases, transaction costs are immediately expensed in profit or loss.

- Debt instruments that do not meet the criteria of amortised cost or FVOCI. Subsequent fair value gains or losses are recognised in profit or loss.

- Equity investments that are held for trading or where FVOCI election has not been applied. All fair value gains or losses and related dividend income are recognised in profit or loss.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/formerly PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/ 5 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Aset keuangan (lanjutan)

f. Financial assets (continued)

i. Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran (lanjutan)

i. Classification, recognition and measurement (continued)

(i). Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

(i). Financial assets measured at FVTPL

- Derivatif yang belum merupakan instrumen lindung nilai. Keuntungan atau kerugian nilai wajar selanjutnya diakui pada laba rugi.

- Derivatives that are not designated as a hedging instrument. All subsequent fair value gains or losses are recognised in profit or loss.

- Aset keuangan dengan derivatif melekat dipertimbangkan secara keseluruhan saat menentukan apakah arus kasnya semata-mata merupakan pembayaran pokok dan bunga.

- Financial assets with embedded derivatives are considered in their entirety when determining whether their cash flows are SPPI.

(ii). Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

(ii). Financial assets measured at FVOCI

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan berikut ini:

This classification applies to the following financial assets:

- Instrumen utang yang dikelola dengan model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual dan di mana arus kasnya memenuhi kriteria "semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga".

- Debt instruments that are held under a business model where they are held for collection of contractual cash flows and sale for sale ("collect and sell") and which have cash flows that meet the SPPI criteria.

Perubahan nilai wajar aset keuangan ini diakui pada penghasilan komprehensif lain, kecuali pengakuan keuntungan atau kerugian penurunan nilai, pendapatan bunga (termasuk biaya transaksi menggunakan metode suku bunga efektif), keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian dan keuntungan dan kerugian dari selisih kurs diakui pada laba rugi. Ketika aset keuangan dihentikan, keuntungan atau kerugian nilai wajar kumulatif yang sebelumnya diakui pada penghasilan komprehensif lain direklasifikasi pada laba rugi.

All movements in the fair value of these financial assets are taken through other comprehensive income, except for the recognition of impairment gains or losses, interest revenue (including transaction costs by applying the effective interest method), gains or losses arising on derecognition and foreign exchange gains and losses that are recognised in profit or loss. When the financial asset is derecognised, the cumulative fair value gains or losses previously recognised in other comprehensive income are reclassified to profit or loss.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/formerly PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5 / *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Aset keuangan (lanjutan)

f. Financial assets (continued)

i. Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran (lanjutan)

i. Classification, recognition and measurement (continued)

(iii) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

(iii) Financial assets measured at FVOCI

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan berikut ini:

This classification applies to the following financial assets:

- Investasi ekuitas di mana Grup telah memilih (jika dapat diterapkan) untuk menyajikan keuntungan dan kerugian nilai wajar dari revaluasi pada penghasilan komprehensif lain.

- Equity investments where the Group has irrevocably elected (if applicable) to present fair value gains and losses on revaluation in other comprehensive income.

Pilihan dapat diterapkan pada investasi individu, namun, tidak berlaku pada investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan. Keuntungan atau kerugian nilai wajar dari revaluasi investasi ekuitas, termasuk komponen selisih kurs, diakui pada penghasilan komprehensif lain. Ketika investasi ekuitas dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian nilai wajar yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi pada laba rugi. Dividen diakui dalam laba rugi ketika hak untuk menerima pembayaran telah ditetapkan.

The election can be made for each individual investment, however, it is not applicable to equity investments held for trading. Fair value gains or losses on the revaluation of such equity investments, including any foreign exchange components, are recognised in other comprehensive income. When the equity investment is derecognised, there is no reclassification of fair value gains or losses previously recognised in other comprehensive income to profit or loss. Dividends are recognised in profit or loss when the right to receive payment is established.

Grup mereklasifikasi investasi utang jika dan hanya jika model bisnis untuk mengelola aset tersebut berubah.

The Group reclassifies debt investments if, and only if, the business model for managing those assets changes.

ii. Penghentian pengakuan

Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak untuk menerima arus kas dari investasi tersebut telah jatuh tempo atau telah ditransfer dan Grup telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset.

ii. Derecognition

Financial assets are derecognised when the rights to receive the cash flows from the investments have expired or have been transferred and the Group has transferred substantially all risks and rewards of ownership.

iii. Saling hapus antar instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan dikompensasikan dan jumlah neonya disajikan pada laporan posisi keuangan konsolidasian ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

iii. Offsetting financial instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amounts are reported in the consolidated statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously.

2. PENGUKURAN ARUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Aset keuangan (lanjutan)

iv. Penurunan nilai aset keuangan

Pada setiap tahun pelaporan, Grup menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Grup menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Grup membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat tahun pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta keterjadian informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Grup menerapkan pendekatan umum dalam mengakui kerugian kredit ekspektasian untuk aset keuangan. Kerugian kredit ekspektasian diakui dalam dua tahap. Untuk eksposur kredit yang belum ada peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal. Kerugian kredit ekspektasian disediakan untuk kerugian kredit yang diakibatkan dari peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam 12 bulan ke depan (kerugian kredit ekspektasian 12 bulan). Untuk eksposur kredit yang telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian diperlukan untuk kerugian kredit yang diperkirakan selama sisa umur eksposur, terlepas dari waktu default (kerugian kredit ekspektasian seumur hidup).

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Financial assets (continued)

iv. Impairment of financial assets

At each reporting date, the Group assesses whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Group uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses. To make that assessment, the Group compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and considers reasonable and supportable information, which is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

The Group applies a general approach to calculating the expected credit losses ("ECL") for financial assets. ECLs are recognised in two stages. For credit exposures for which there has not been a significant increase in the credit risk since initial recognition, ECLs are provided for credit losses that result from default events that are possible within the next 12-months (a 12-month ECL). For those credit exposures for which there has been a significant increase in the credit risk since initial recognition, a loss allowance is required for the credit losses that are expected over the remaining life of the exposure, irrespective of the timing of the default (a lifetime ECL).

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/formerly PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/19 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas termasuk kas, kas di bank, dan deposito berangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

Laporan arus kas konsolidasian disusun menggunakan metode langsung dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

h. Piutang usaha

Piutang usaha adalah jumlah tertunggi dari pelanggan atas listrik atau jasa yang diberikan dalam kegiatan usaha biasa. Piutang non-usaha merupakan jumlah tertunggi yang timbul dari transaksi di luar kegiatan usaha biasa. Jika piutang diperkirakan tertagih dalam satu tahun atau kurang, piutang tersebut diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang tersebut disajikan sebagai aset tidak lancar pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Piutang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan kemudian diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Jika efek pendiskontoan signifikan, dikurangi dengan cadangan kerugian.

Kerugian penurunan nilai piutang disajikan sebagai bagian dari beban usaha pada laba rugi. Jumlah yang selanjutnya dapat dipulihkan kembali atas piutang yang sebelumnya telah dihapusbukukan, dikreditkan terhadap item beris yang sama.

Lihat Catatan 4 untuk informasi lebih lanjut mengenai kebijakan penentuan jumlah cadangan kerugian piutang Grup.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash on hand, cash in banks and time deposits with maturity periods of three months or less at the time of placement that are not used as collateral or are not restricted.

The consolidated statements of cash flows have been prepared using the direct method by classifying the cash flows on the basis of operating, investing and financing activities.

h. Trade receivables

Trade receivables are amounts due from customers for electricity sold or services performed in the ordinary course of business. Non-trade receivables are amounts arising from transactions outside of the ordinary course of business. If the collection of the receivables is expected within one year or less, they are classified as current assets. If not, they are presented as non-current assets in the consolidated statements of financial position.

Trade receivables are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method, if the impact of discounting is significant, less any loss allowance.

Impairment losses on receivables are presented as part of operating expenses in profit or loss. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against the same line item.

See note 4 for further information regarding the policy on the determination of the amount for the loss allowance on the Group's receivables.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Persediaan

Persediaan suku cadang, bahan bakar, minyak pelumas, perlengkapan dan bahan pendukung dinilai dengan harga perolehan (neto) dengan provisi persediaan usang dan bergerak lambat. Harga perolehan ditentukan dengan metode rata-rata bergerak. Provisi persediaan usang dan bergerak lambat ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan pada masa mendatang. Bahan pendukung kegiatan pemeliharaan disisir sebagai beban pemeliharaan pada periode digunakan.

j. Biaya dibayar dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama periode manfaat dengan menggunakan metode garis lurus.

k. Aset tetap

Grup mengevaluasi fakta dan keadaan untuk masing-masing jenis tanah dan hak atas tanah dalam menentukan akuntansi untuk masing-masing tanah dan hak atas tanah tersebut sehingga dapat merepresentasikan dengan tepat suatu kejadian atau transaksi ekonomi yang mendasarinya. Jika tanah dan hak atas tanah tersebut tidak mengalihkan pengendalian atas aset pendasar kepada Grup, transaksi mengalihkan hak untuk menggunakan aset pendasar, Grup menerapkan perlakuan akuntansi atas transaksi tersebut sebagai sewa berdasarkan PSAK No. 73, "Sewa". Jika tanah dan hak atas tanah secara substansi merupakan pembelian tanah, maka Grup menerapkan PSAK No. 16, "Aset tetap" pada tanah dan hak atas tanah dalam sebesar harga perolehan dan bisa digunakan.

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga pembelanannya dan setiap biaya yang dapat didistribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai maksi manajemen.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

i. Inventories

Spare parts, fuel, lubricants, coals and supplies are valued at cost less a provision for obsolete and slow-moving inventory. Cost is determined based on the moving average method. A provision for obsolete and slow-moving inventory is determined on the basis of estimated future usage. Supplies of maintenance materials are charged to maintenance costs in the period in which they are used.

j. Prepaid expenses

Prepaid expenses are amortised over the periods benefited using the straight-line method.

k. Property, plant and equipment

The Group analyses the facts and circumstances for each type of land and land rights in determining the accounting for each of these land and land rights so that it can accurately represents an underlying economic event or transaction. If the land and land rights do not transfer control of the underlying assets to the Group, but give the rights to use the underlying assets, the Group applies the accounting treatment of these transactions as leases under SFAS No. 73, "Leases". If the land and land rights are substantially similar to land purchases, the Group applies SFAS No. 16, "Property, plant and equipment" under which land and land rights are recognised at cost and not depreciated.

Property, plant and equipment are initially recognised at cost, which comprises the purchase price and any cost directly attributable to bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/formerly PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/21 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 December 2022 and 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Aset tetap (lanjutan)

Apabila relevan, biaya perolehan juga dapat mencakup estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kemajuan tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama tahun tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama tahun tersebut).

Setelah pengakuan awal, kelas-kelas aset berikut ini yang diukur menggunakan metode revaluasi:

- Tanah dan hak atas tanah
- Bangunan untuk, waduk dan prasarana,
- Instalasi dan mesin pembangkit,
- Peralatan/jaringan transmisi,
- Peralatan/jaringan distribusi,
- Peralatan/jaringan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik dan
- Material cadang utama.

Kelas aset di atas disajikan sebesar nilai wajar dikurangi penyusutan dan penurunan nilai. Tanah dan hak atas tanah tidak disusutkan. Penilaian tersebut atas aset tersebut dilakukan oleh pihak independen eksternal yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"). Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan nilai tercatatnya. Aset yang tidak mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan wajib direvaluasi paling kurang setiap 3 (tiga) tahun. Akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi dieliminasi terhadap nilai tercatat bruto aset, dan nilai neraca disajikan kembali sebesar nilai revaluasi aset tetap.

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi aset tetap yang menggunakan model revaluasi dikreditkan pada surplus revaluasi aset sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain. Penurunan yang menghapus nilai tercatat sebelumnya atas aset yang serta dikreditkan tersebut surplus revaluasi aset sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain termasuk aset yang dikreditkan ke laba rugi digunakan dalam bentuk, penurunan tersebut dikreditkan pada laba rugi.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Property, plant and equipment (continued)

When applicable, the cost may also comprise the initial estimate of the costs of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located, the obligation for which an entity incurs either when the item is acquired or as a consequence of having used the item during a particular year for purposes other than to produce inventories during that year.

After initial recognition, the following classes of assets are measured using the revaluation method:

- Land and land rights,
- Buildings, reservoirs and infrastructure,
- Installations and power plants,
- Transmission equipment,
- Distribution equipment,
- Telecommunications and data processing equipment used for electricity supply, and
- Major spare parts.

The classes of asset above are shown at fair value, less subsequent depreciation and impairment losses. Land and land rights are not depreciated. The valuation of those assets is performed by external independent valuers that are registered with the Financial Services Authority ("OJK"). The valuations are performed with sufficient regularity to ensure that the fair value of a revalued asset does not differ materially from its carrying amount. Assets that do not change significantly in fair value must be revaluated at least every 3 (three) years. Any accumulated depreciation at the date of revaluation is eliminated against the gross carrying amount of the asset and the net amount is restated to the revalued amount of the property, plant and equipment.

Increases in the carrying amount arising on revaluation of property, plant and equipment that use a revaluation model are credited to 'asset revaluation surplus' as part of other comprehensive income. Decreases that offset previous increases of the same asset are decited against 'asset revaluation surplus' as part of other comprehensive income including the assets that are reclassified to assets not used in operations; all other decreases are charged to profit or loss.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/formerly PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 6/Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember/December 2022 dan/and 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Aset tetap (lanjutan)

Aset tetap, dikecualikan tanah, dinyatakan sebesar estimasi nilai sisa dengan menggunakan metode garis lurus selama masa manfaatnya sebagai berikut:

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Property, plant and equipment (continued)

Property, plant and equipment are depreciated to their residual values using the straight-line method over their expected useful lives as follows:

	Tahun/ Years	
Bangunan umum, waduk dan prasarana	10 - 50	Buildings, reservoirs and infrastructure
Instalasi dan mesin pembangkit	12 - 40	Installation and power plants
Peralatan transmisi dan distribusi	40	Transmissions and distribution equipment
Peralatan pengolahan data dan telekomunikasi	10	Telecommunications and data processing equipment
Peralatan umum	4	General equipment
Kendaraan bermotor	5	Motor vehicles
Material cadang utama	20 - 40	Major spare parts

Masa manfaat ekonomis, nilai sisa dan metode penyusutan aset tetap ditelaah, jika diperlukan, setidaknya disesuaikan, pada setiap akhir tahun buku. Dampak dari setiap revisi diakui dalam laba rugi, ketika perubahan terjadi.

The useful lives, residual values and depreciation methods of property, plant and equipment are reviewed and adjusted if appropriate, at the end of each financial year. The effects of any revisions are recognised in profit or loss, when the changes arise.

Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat diuntikan adalah nilai tercatat aset lebih besar daripada estimasi jumlah yang dapat diuntikan (Catatan 3.m).

An asset's carrying amount is written down immediately to its recoverable amount if the asset's carrying amount is greater than its estimated recoverable amount (Note 3.m).

Beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi sebelumnya yang timbul untuk menambah, menggantikan, memperbaiki aset tetap diakui sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

The costs of repairs and maintenance are charged to profit or loss as incurred. Subsequent costs that are incurred in order to add, replace part of, or service an item of property, plant and equipment are recognised as assets if and only if it is probable that the future economic benefits that are associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably.

Aset tetap yang tidak digunakan lagi atau dijual, nilai tercatatnya dikeluarkan dari kelompok aset tetap. Keuntungan atau kerugian dari penghapusan aset tetap tersebut diakui dalam laba rugi.

For property, plant and equipment that can no longer be utilized or sold, the carrying amounts are eliminated from the group of property, plant and equipment. The resulting gains or losses on disposals of property, plant and equipment are recognised in profit or loss.

Jika aset yang direvaluasi dijual, jumlah yang diakui di dalam ekuitas dipindahkan ke saldo laba.

When revalued assets are sold, the amounts included in equity are transferred to retained earnings.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/formerly PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 6/Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Aset tetap (lanjutan)

Aset tidak digunakan dalam operasi terdiri dari aset tetap yang akan dilepaskan dan aset tetap yang sedang disewakan. Aset tetap ini disusutkan dengan metode garis lurus dan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset tetap.

Aset dalam pembangunan merupakan biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan pembangunan aset tetap. Aset dalam pembangunan dinyatakan sebesar biaya perolehan, termasuk biaya pinjaman selama masa pembangunan dan pinjaman yang digunakan untuk pembangunan, beban penyusutan aset tetap yang digunakan dalam pelaksanaan pembangunan dan biaya pengujian ketika aset dapat berfungsi setelah dikurangi penjualan listrik ketika masa uji coba. Aset dalam pembangunan akan diklasifikasi ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat aktivasi dan siap digunakan. Penyusutan dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan tujuan yang dimaksud manajemen.

l. Properti investasi

Properti investasi adalah properti (tanah dan hak atas tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Properti investasi diakui sebagai aset jika, dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas, dan biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Property, plant and equipment (continued)

Assets not used in operations consist of property, plant and equipment that will be disposed of and property, plant and equipment that will be retained. These assets are depreciated using the straight-line method and based on the economic useful lives of the property, plant and equipment.

Construction in progress represents the costs directly attributable to the construction of property, plant and equipment. Construction in progress is stated at cost, which includes borrowing costs during construction on debts incurred to finance the construction, the depreciation of property, plant and equipment used in the construction and the cost of testing whether the asset is functioning properly after deducting sales of electricity during the commissioning period. Construction in progress is transferred to the respective property, plant and equipment account when completed and ready for use. Depreciation is charged from the date on which the assets are ready for use in the manner intended by management.

l. Investment properties

Investment properties are properties (land and land rights or a building or part of a building or both) held by the owner or the lessee under a finance lease to earn rentals or for capital appreciation or both, rather than for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes; or sale in the daily business activities.

Investment property is recognised as an asset when, and only when it is probable that the future economic benefits that are associated with the investment property will flow to the entity, and the cost of the investment property can be measured reliably.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/formerly PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/24 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

l. Properti investasi (lanjutan)

l. Investment properties (continued)

Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan, meliputi harga pembelian dan setiap pengeluaran yang sejak didistribusikan secara langsung (biaya jasa hukum, jasa pengalihan properti, dan biaya transaksi lain). Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut.

An investment property shall be measured initially at its cost, comprising its purchase price and any directly attributable expenditure (professional fees for legal services, property transfer taxes and other transaction costs). Transaction costs are included in the initial measurement.

Setelah pengakuan awal, Grup memilih menggunakan model nilai wajar dan mengukur seluruh properti investasi berdasarkan nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar properti investasi diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya.

After initial recognition, the Group chooses to use the fair value model and measure all of its investment properties at fair value. Any gain or loss arising from a change in the fair value of investment property is recognised in profit or loss for the period in which it arises.

Penentuan nilai wajar investasi didasarkan pada penilaian oleh penilai independen yang memenuhi kualifikasi profesional yang telah diakui dan relevan serta memiliki pengalaman terkini di lokasi dan kategori properti investasi yang sama. Penilaian ini membentuk dasar untuk nilai tercatat pada laporan keuangan konsolidasian.

The fair value of investment property is based on an annual valuation by an independent valuer who holds a recognised and relevant professional qualification and has recent experience in the location and category of the investment property being valued. These valuations form the basis for the carrying amounts in the consolidated financial statements.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan (pada tanggal penerima mendapatkan kontrol) atau, ketika tidak diperoleh lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari pelepasannya. Selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset diakui dalam laba rugi pada tahun terjadinya penghentian atau pelepasan. Dalam menentukan nilai pertimbangan dari pelepasan properti investasi, Grup mempertimbangkan dampak dari variabel pertimbangan, adanya komponen pembiayaan yang signifikan, dan pertimbangan yang ke pembeli (*the acts*).

Investment properties are derecognised either when they have been disposed of (i.e., at the date the recipient obtains control) or when they are permanently withdrawn from use and no future economic benefit is expected from their disposal. The difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset is recognised in profit or loss in the year of derecognition. In determining the amount of consideration from the derecognition of investment property, the Group considers the effects of variable consideration, existence of a significant financing component, non-cash consideration, and consideration payable to the buyer (*if any*).

Pengalihan dilakukan ke (atau dari) properti investasi hanya ketika adanya perubahan penggunaan. Untuk pengalihan dari properti investasi menjadi properti yang ditempati pemilik, biaya yang dianggap untuk akuntansi selanjutnya adalah nilai wajar pada tanggal perubahan penggunaan tersebut. Jika properti yang ditempati pemilik menjadi properti investasi, Grup mengakui properti tersebut sesuai dengan kebijakan yang tercantum pada aset tetap sampai tanggal perubahan penggunaan.

Transfers are made to (or from) investment property only when there is a change in use. For a transfer from investment property to owner-occupied property, the deemed cost for subsequent accounting is the fair value at the date of change in use. If owner-occupied property becomes an investment property, the Group accounts for such property in accordance with the policy stated under property, plant and equipment up to the date of change in use.

PT PLN (PERSERO) (dahulu/formerly PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO))
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/25 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Penurunan nilai aset non-keuangan

Aset yang memiliki masa manfaat yang tidak terbatas, misalnya goodwill, tidak diamortisasi namun wajib penurunan nilainya setiap tahun atau lebih sering apabila terdapat peristiwa atau perubahan pada kondisi yang mengindikasikan kemungkinan penurunan nilai. Aset yang diamortisasi wajib ketika terdapat indikasi bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan. Penurunan nilai diakui jika nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan. Jumlah terpulihkan adalah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai aset. Dalam menentukan penurunan nilai, aset dikelompokkan pada tingkat yang paling rendah dimana terdapat arus kas yang dapat diidentifikasi. Aset non-keuangan selain goodwill yang mengalami penurunan nilai wajib setiap tanggal pelaporan untuk mempertimbangkan apakah terdapat kemungkinan pemulihan penurunan nilai.

Pembalikan rugi penurunan nilai untuk aset selain goodwill, diakui jika dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengakuan penurunan nilai terakhir kali diakuikan. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi. Pembalikan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset melebihi biaya perolehan disusutkan sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pembalikan diakuikan. Rugi penurunan nilai yang diakui atas goodwill tidak dapat dipulihkan.

n. Utang usaha

Utang usaha adalah kewajiban untuk membayar barang atau jasa yang telah diterima dalam kegiatan usaha normal dari pemasok. Utang usaha diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek apabila pembayarannya jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang setelah tanggal pelaporan. Jika tidak, utang usaha tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Utang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Impairment of non-financial assets

Assets that have an indefinite useful life, for example goodwill, are not subject to amortization but are tested annually for impairment, or more frequently if events or changes in circumstances indicate that they might be impaired. Assets that are subject to amortization are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognized for the amount by which the asset's carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's fair value less costs of disposal and its value-in-use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels for which there are separately identifiable cash flows (cash-generating units). Non-financial assets other than goodwill that suffer impairment are reviewed for a possible reversal of the impairment at each reporting date.

Reversal of impairment losses for assets other than goodwill would be recognized, if and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment test was carried out. Reversal an impairment losses will be immediately recognized in profit or loss. The reversal should not result in the carrying amount of an asset exceeding what the depreciated cost would have been had the impairment not been recognized at the date of which the impairment was reversed. Impairment losses relating to goodwill would not be reversed.

n. Trade payables

Trade payables are obligations to pay for goods or services that have been acquired in the ordinary course of business from suppliers. Trade payables are classified as current liabilities if payment is due within one year of the reporting date. If not, they are presented as non-current liabilities.

Trade payables are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

n. Sewa

Grup sebagai penyewa

Ketika Grup bertindak sebagai penyewa, Grup akan mengklasifikasi masing-masing kewajiban baik sewa operasi atau sewa pembiayaan.

Untuk mengklasifikasi masing-masing sewa, Grup membuat penilaian secara keseluruhan atas apakah sewa mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Jika penilaian membuktikan hal tersebut, maka sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan, jika tidak, maka diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Pembayaran sewa dari sewa operasi diakui Grup bersih sebagai beban sewa dengan dasar garis lurus selama masa sewa. Biaya langsung awal yang terjadi saat mendapatkan sewa operasi ditambahkan pada nilai tercatat aset pendasar dan diakui sebagai beban selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Aset tetap yang digunakan disimpulkan di laporan posisi keuangan berdasarkan sifatnya.

Grup sebagai penyewa

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan, atau mengandung, sewa dibuat berdasarkan substansi perjanjian itu sendiri dan penilaian apakah pemenuhan atas perjanjian tergantung dari penggunaan aset tertentu atau aset, dan apakah perjanjian memberikan hak untuk menggunakan aset.

Grup menyewa aset tetap tertentu yang kontrak sewanya dibuat untuk periode tetap dari 1 hingga 3 tahun tetapi mungkin memiliki opsi alternatif. Kontrak dapat berisi komponen sewa dan non-sewa berdasarkan harga relatif yang berdiri sendiri.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Leases

The Group as a lessee

When the Group acts as a lessee, it will classify each of its leases as either an operating lease or a finance lease.

To classify each lease, the Group makes an overall assessment of whether the lease transfers substantially all of the risks and rewards incidental to the ownership of the underlying asset. If this is the case, then the lease is classified as a finance lease. If not, then it is classified as an operating lease.

Lease income from operating leases where the Group is a lessor is recognised in income on a straight-line basis over the lease term. Initial direct costs incurred in obtaining an operating lease are added to the carrying amount of the underlying asset and recognised as an expense over the lease term on the same basis as lease income. The respective leased assets are included in the statement of financial statements based on their nature.

The Group as a lessee

Determination of whether an arrangement is or contains a lease is made based on the substance of the arrangement and an assessment of whether the fulfilment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets, and the arrangement conveys a right to use the asset.

The Group leases certain property, plant and equipment, for which the rental contracts are typically made for fixed periods of 1 to 3 years but they may have extension options. Contracts may contain both lease and non-lease components based on their relative standalone prices.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/formerly PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ANAK-ANAK PERUSAHAAN/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 9/27 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Sewa diakui sebagai aset hak pakai dan liabilitas sewa pada tanggal di mana aset sewaan tersedia untuk digunakan oleh Grup.

Aset dan liabilitas yang timbul dari sewa pada awalnya diukur dengan basis nilai kini. Liabilitas sewa termasuk nilai bersih sekarang dari pembayaran sewa berikut:
- pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi), dikurangi piutang insentif sewa;
- pembayaran sewa variabel yang ditentukan pada indeks atau tingkat, pada awalnya diukur menggunakan indeks atau tingkat pada tanggal mulai;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa berdasarkan jaminan nilai residu;
- harga pelaksanaan dari opsi pembelian jika penyewa cukup yakin untuk menggunakan opsi tersebut; dan
- pembayaran penalti karena penghentian sewa sewa kecuali jika Grup cukup pasti untuk tidak menghentikan lebih awal.

Pembayaran sewa yang harus dilakukan berdasarkan opsi perpanjangan tersebut juga termasuk dalam pengukuran liabilitas.

Pembayaran sewa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika tarif tidak dapat segera ditentukan, maka hal tersebut secara umum terjadi pada sewa dalam Grup, suku bunga pinjaman inkremental penyewa digunakan, yaitu tarif yang harus dibayar oleh penyewa untuk meminjam dana yang diperlukan untuk memperoleh aset dengan nilai yang sama dengan aset hak guna dalam lingkungan ekonomi serupa dengan syarat dan ketentuan yang serupa.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Leases (continued)

The Group as a lessee (continued)

Leases are recognised as a right-of-use asset and a corresponding liability at the date on which the leased asset is available for use by the Group.

Assets and liabilities arising from a lease are initially measured on a present value basis. Lease liabilities include the net present value of the following lease payments:
- fixed payments (including in-substance fixed payments), less any lease incentives receivable;
- variable lease payments that are based on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;
- amounts expected to be payable by the lessee under residual value guarantees;
- the exercise price of a purchase option if the lessee is reasonably certain to exercise that option; and
- penalty payments for early termination of a lease unless the Group is reasonably certain not to terminate early.

Lease payments to be made under reasonably certain extension options are also included in the measurement of the liability.

The lease payments are discounted using the interest rate implicit in the lease. If the rate cannot be readily determined, which is generally the case for leases in the Group, the lessee's incremental borrowing rate is used, being the rate that the individual lessee would have to pay to borrow the funds necessary to obtain an asset of similar value to the right-of-use asset in a similar economic environment with similar terms, security and conditions.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Untuk menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Grup:

- jika memungkinkan, menggunakan pembiayaan pihak ketiga terkini yang diterima oleh penyewa individu sebagai titik awal, disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kondisi pembiayan sejak pembiayan pihak ketiga diterima;
- menggunakan pendekatan bottom-up yang dimulai dengan suku bunga bebas risiko yang disesuaikan dengan risiko kredit untuk sewa yang dimiliki oleh Grup, yang tidak memiliki pembiayan pihak ketiga terkini; dan
- membuat penyesuaian spesifik untuk sewa, misalnya jangka waktu, mata uang dan keamanan.

Grup diharapkan pada potensi kenaikan di masa depan dalam pembayaran sewa variabel berdasarkan indeks atau tarif, yang tidak termasuk dalam liabilitas sewa sampai diberlakukan. Ketika penyesuaian pembayaran sewa berdasarkan indeks atau suku bunga mulai berlaku, liabilitas sewa dinilai kembali dan disesuaikan dengan aset hak guna.

Pembayaran sewa dialokasikan antara biaya pokok dan keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laporan laba rugi selama masa sewa sehingga menghasilkan suku bunga periodik yang konstan atas sisa saldo liabilitas untuk setiap tahun.

Aset hak guna diukur pada biaya perolehan yang terdiri dari hal-hal berikut ini:

- jumlah pengukuran awal liabilitas sewa;
- pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal dimulainya dikurangi insentif sewa yang diterima;
- biaya langsung awal; dan
- biaya restorasi.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Leases (continued)

The Group as a lessee (continued)

To determine the incremental borrowing rate, the Group:

- where possible, uses recent third-party financing received by the individual lessee as a starting point, adjusted to reflect changes in financing conditions since third party financing was received;
- uses a build-up approach that starts with a risk-free interest rate adjusted for credit risk for leases held by the Group, which does not have recent third-party financing; and
- makes adjustments specific to the lease, e.g. term, currency and security.

The Group is exposed to potential future increases in variable lease payments based on an index or rate, which are not included in the lease liability until they take effect. When adjustments to lease payments based on an index or rate take effect, the lease liability is reassessed and adjusted against the right-of-use asset.

Lease payments are allocated between principal and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each year.

Right-of-use assets are measured at cost comprising the following:

- the amount of the initial measurement of the lease liability;
- any lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received;
- any initial direct costs; and
- restoration costs.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/formerly PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 9/26 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Aset hak guna umumnya disusutkan sepanjang umur yang lebih pendek antara masa manfaat aset dan jangka waktu sewa menggunakan metode garis lurus. Jika Grup cukup yakin untuk menggunakan opsi pembelian, aset hak guna disusutkan selama masa manfaat aset yang mendasarinya.

Aset hak guna juga mengalami penurunan nilai (Catatan 2.m).

Pembayaran terkait dengan sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah diakui atas dasar garis lurus sebagai beban dalam laporan laba rugi. Sewa jangka pendek adalah sewa dengan masa sewa 12 bulan atau kurang. Aset bernilai rendah terdiri dari peralatan umum.

Grup menyajikan aset hak guna sebagai bagian dari "Aset tetap" di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Opsi perpanjangan dan terminasi

Opsi perpanjangan dan terminasi termasuk dalam sejumlah sewa properti dan peralatan di seluruh Grup. Ketentuan-ketentuan ini digunakan untuk memaksimalkan fleksibilitas operasional dalam hal pengelolaan kontrak. Mayoritas opsi perpanjangan dan terminasi yang dimiliki hanya dapat dieksekusikan oleh Grup dan bukan oleh pemberi sewa masing-masing.

Modifikasi sewa

Grup mencatat modifikasi sewa sebagai sewa tersendiri jika:

- modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih; dan
- imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang sesuai dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang sesuai pada harga tersendiri tersebut untuk mencerminkan keadaan kontrak tertentu.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Leases (continued)

The Group as a lessee (continued)

Right-of-use assets are generally depreciated over the shorter of the asset's useful life and the lease term on a straight-line basis. If the Group is reasonably certain to exercise a purchase option, the right-of-use asset is depreciated over the underlying asset's useful life.

The right-of-use assets are also subject to impairment (note 2.m).

Payments associated with short-term leases and leases of low-value assets are recognized on a straight-line basis as an expense in profit or loss. Short-term leases are leases with a lease term of 12 months or less. Low-value assets comprise general equipment.

The Group presents right-of-use assets as part of "Property, plant and equipment" in the consolidated statement of financial position.

Extension and termination options

Extension and termination options are included in a number of property and equipment leases across the Group. These terms are used to maximise operational flexibility in terms of managing contracts. The majority of the extension and termination options that are held are exercisable only by the Group and not by the respective lessor.

Lease modification

The Group accounts for a lease modification as a separate lease if both:

- the modification increases the scope of the lease by adding the right to use one or more underlying assets; and
- the consideration for the lease increases by an amount commensurate with the stand-alone price for the increase in scope and any appropriate adjustments to that stand-alone price to reflect the circumstances of the particular contract.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/formerly PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/36 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Sewa (lanjutan)

Modifikasi sewa (lanjutan)

Untuk modifikasi sewa yang tidak diakui sebagai sewa terpisah, pada tanggal efektif modifikasi sewa, Grup:

- mengalokasikan imbalan kontrak modifikasian;
- menentukan masa sewa dari sewa modifikasian; dan
- mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian. Tingkat diskonto revisian ditentukan sebagai suku bunga implisit dalam sewa untuk sisa masa sewa, jika dapat ditentukan, atau suku bunga pinjaman inkremental penyewa pada tanggal efektif modifikasi, jika suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat ditentukan.

Untuk modifikasi sewa yang tidak diakui sebagai sewa terpisah, penyewa melakukan penyesuaian terhadap liabilitas sewa dengan:

- menurunkan jumlah tercatat aset hak guna untuk mencerminkan penghentian parsial atau penuh sewa untuk modifikasi sewa yang menurunkan ruang lingkup sewa. Penyewa mengakui dalam laba rugi setiap keuntungan atau kerugian yang timbul sebagai penghentian parsial atau penuh sewa tersebut;
- membuat penyesuaian terkait dengan aset hak guna untuk seluruh modifikasi sewa lainnya.

b. Biaya pinjaman

Biaya bunga dan biaya pinjaman lainnya, seperti biaya provisi pinjaman baik yang secara langsung atau tidak langsung digunakan untuk pendanaan konstruksi aset kualifikasian, dikapitalisasi hingga aset tersebut secara substansial. Untuk biaya pinjaman yang dapat dialokasikan secara langsung pada aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi dihitung dari biaya pinjaman aktual yang terjadi selama periode berjalan, dikurangi penghasilan yang diperoleh dari investasi sementara atas dana hasil pinjaman tersebut. Untuk pinjaman yang tidak dapat dialokasikan secara langsung pada suatu aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi dihitung dengan menggunakan tingkat kapitalisasi terhadap jumlah yang dikeluarkan untuk mengakuisisi aset kualifikasian. Tingkat kapitalisasi dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang biaya pinjaman yang tidak sejalan dengan jumlah pinjaman yang terjadi selama tahun berjalan, selain pinjaman yang secara spesifik diambil untuk tujuan memperoleh suatu aset kualifikasian.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Leases (continued)

Lease modification (continued)

For a lease modification that is not accounted for as a separate lease, at the effective date of the lease modification, the Group:

- allocates the consideration in the modified contract;
- determines the lease term of the modified lease; and
- remeasures the lease liability by discounting the revised lease payments using a revised discount rate. The revised discount rate is determined as the interest rate implicit in the lease for the remainder of the lease term, if that rate can be readily determined, or the lessee's incremental borrowing rate at the effective date of the modification, if the interest rate implicit in the lease cannot be readily determined.

For a lease modification that is not accounted for as a separate lease, the lessee shall account for the remeasurement of the lease liability by:

- decreasing the carrying amount of the right-of-use asset to reflect the partial or full termination of the lease for lease modifications that decrease the scope of the lease. The lessee shall recognise in profit or loss any gain or loss relating to the partial or full termination of the lease;
- making a corresponding adjustment to the right-of-use asset for all other lease modifications.

b. Borrowing costs

Interest and other borrowing costs such as discount fees or costs either directly or indirectly used in financing the construction of a qualifying asset are capitalised up to the date when construction is complete. For borrowings that are directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalised is determined as the actual borrowing cost incurred during the period, less any income earned on the temporary investment of such borrowings. For borrowings that are not directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalised is determined by applying a capitalisation rate to the amount expended on the qualifying assets. The capitalisation rate is the weighted average of the total borrowing costs applicable to the total borrowings outstanding during the year, other than borrowings made specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/formerly PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/21 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

q. Pinjaman

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi, selisih antara penerimaan (dikurangi biaya transaksi) dan nilai pelunasan diakui pada laporan laba rugi selama periode pinjaman dengan menggunakan metode bunga efektif.

Biaya yang dibayar untuk memperoleh fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman sepanjang besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik. Dalam hal ini, biaya memperoleh pinjaman ditangguhkan sampai penarikan pinjaman terjadi. Sepanjang tidak terdapat bukti bahwa besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik, biaya memperoleh pinjaman diklasifikasi sebagai pembayaran di muka untuk jasa likuiditas dan diamortisasi selama periode fasilitas yang terkait.

Biaya pinjaman akan dihentikan pengakuannya dari laporan posisi keuangan ketika kewajiban yang tercipta pada bentuk dihentikan, atau sudah lebih berlaku. Selisih antara nilai tercatat dari liabilitas keuangan yang sudah berakhir atau dialihkan ke pihak lain dan imbalan yang dibayarkan, termasuk aset non-kas yang dialihkan atau liabilitas yang ditanggung, diakui dalam laba rugi sebagai pendapatan lainnya atau biaya keuangan.

Ketika liabilitas keuangan dinegosiasikan kembali dan entitas mengeluarkan instrumen ekuitas kepada kreditur untuk menyelesaikan seluruh atau sebagian liabilitas (debt for equity swap), keuntungan atau kerugian diakui dalam laporan laba rugi yang timbul sebesar selisih antara jumlah tercatat dan liabilitas keuangan.

Pinjaman diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek kecuali Grup memiliki hak tanpa syarat untuk menunda pembayaran liabilitas selama paling sedikit 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

q. Borrowings

Borrowings are recognised initially at fair value, net of transaction costs incurred. Borrowings are subsequently carried at amortised cost any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the redemption value is recognised in profit or loss over the period of the borrowings using the effective interest method.

Fees paid on the establishment of loan facilities are recognised as transaction costs of the loan to the extent that it is probable that some or all of the facility will be drawn down. In this case, the fee is deferred until the drawdown occurs. To the extent that there is no evidence that it is probable that some or all of the facility will be drawn down, the fee is capitalised as a pre-payment for liquidity services and amortised over the period of the facility to which it relates.

Borrowings are removed from the statement of financial position when the obligation specified in the contract is discharged, cancelled or expired. The difference between the carrying amount of a financial liability that has been extinguished or transferred to another party and the consideration paid, including any non-cash assets transferred or liabilities assumed, is recognised in profit or loss as other income or finance costs.

Where the terms of a financial liability are renegotiated and the entity issues equity instruments to a creditor to extinguish all or part of the liability (debt for equity swap), a gain or loss is recognised in profit or loss, which is measured as the difference between the carrying amount of the financial liability and the fair value of the equity instruments issued.

Loans are classified as current liabilities unless the Group has an unconditional right to defer payment of the liability for at least 12 months after the reporting date.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/formerly PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI UNIT BISNIS PEMBANGKITAN) DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Provisi

Provisi diakui ketika Grup memiliki kewajiban kini (baik berdasar hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Grup diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi diukur pada nilai kini dari estimasi terbaik manajemen atas pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir tahun pelaporan. Tingkat diskonto yang digunakan untuk menentukan nilai kini adalah tingkat sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar kini atas nilai waktu uang dan risiko yang terkait dengan liabilitas tersebut. Peningkatan provisi sehubungan dengan berlalunya waktu diakui sebagai beban keuangan.

Jika sebagian atau seluruh pengeluaran untuk menyelesaikan provisi diperkirakan akan pihak ketiga, maka penggantian itu diakui hanya pada saat untuk kepastian bahwa penggantian pasti akan diterima jika entitas menyelesaikan kewajiban. Penggantian tersebut diakui sebagai aset yang terpisah. Jumlah yang diakui sebagai penggantian tidak boleh melebihi nilai provisi.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Provisions

Provisions are recognised when the Group has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event and it is probable that the Group will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

The provision is measured at the present value of the management's best estimate of the expenditure required to settle the present obligation at the end of the reporting date. The discount rate used to determine the present value is a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the liabilities. The increase in the provision due to the passage of time is recognised as interest expense.

Where some or all of the expenditure required to settle a provision is expected to be reimbursed by another party, the reimbursement shall be recognised when, and only when, it is virtually certain that reimbursement will be received if the entity settles the obligation. The reimbursement shall be treated as a separate asset. The amount recognised for the reimbursement shall not exceed the amount of the provision.

b. Imbalan kerja

Imbalan pasca kerja

Skema pensiun diklasifikasikan sebagai program iuran pasti atau program manfaat pasti, tergantung pada substansi ekonomi dan syarat dari kondisi utama program tersebut. Program iuran pasti adalah program pensiun yang mewajibkan Grup membayar sejumlah iuran tertentu kepada entitas lainnya. Grup tidak memiliki kewajiban hukum atau konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika entitas tersebut tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar seluruh imbalan atas jasa yang diberikan pekerja pada tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya. Program manfaat pasti adalah program pensiun yang bukan merupakan program iuran pasti. Program manfaat pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima seorang pekerja pada saat pensiun, biasanya berdasarkan usia atau satu atau lebih faktor seperti usia, masa kerja, dan kompensasi.

b. Employee benefits

Post-employment benefits

Pension schemes are classified as either defined contribution plans or defined benefit plans, depending on the economic substance of the plan as derived from its principal terms and conditions. A defined contribution plan is a pension plan under which the Group pays fixed contributions into a separate entity. The Group has no legal or constructive obligations to pay further contributions if the fund does not hold sufficient assets to pay all employees the benefits relating to employee service in the current and prior years. A defined benefit plan is a pension plan that is not a defined contribution plan. Typically, defined benefit plans define an amount of pension benefit that an employee will receive upon retirement, which is usually dependent on one or more factors such as age, years of service and compensation.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/formerly PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
UNIT BISNIS PEMBANGKITAN) DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/21 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Imbalan kerja (lanjutan)

Imbalan pascakerja (lanjutan)

Grup harus menyediakan jumlah minimal imbalan pensiun sesuai dengan Peraturan Ketenagakerjaan atau Perjanjian Kerja Bersama ("PKB") atau Peraturan Perusahaan ("PP"), mana yang lebih tinggi. Karena Peraturan Ketenagakerjaan atau PKB menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya, program pensiun berdasarkan Peraturan Ketenagakerjaan atau PKB adalah program manfaat pasti.

Sehubungan dengan program manfaat pasti, liabilitas diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian sesuai dengan nilai kini kewajiban manfaat pasti pada akhir tahun pelaporan dikurang nilai wajar aset program. Kewajiban manfaat pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode Projected Unit Credit. Imbalan pascakerja terdiri dari imbalan pesangon dan penghargaan purna abdian.

Nilai kini kewajiban manfaat pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang estimasian dengan menggunakan tingkat bunga obligasi korporasi berkualitas tinggi dalam denominasi mata uang dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun. Apabila tidak terdapat pasar aktif untuk obligasi korporasi tersebut, digunakan bunga obligasi Pemerintah.

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian suatu program manfaat pasti diakui pada saat kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

Pengukuran kembali yang timbul dari penyesuaian pengalaman dan perubahan asumsi-asumsi aktuaria diakibatkan atau ditimbulkan pada akuisi dalam laporan penghasilan komprehensif lain pada tahun dimana biaya tersebut terjadi. Akumulasi biaya pengukuran kembali disajikan di saldo laba.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Employee benefits (continued)

Post-employment benefits (continued)

The Group is required to provide a minimum amount of pension benefit in accordance with Manpower Regulation or the Group's Collective Labour Agreement (the "CLA") or Company Regulation ("CR"), whichever is higher. Since the Manpower Regulation or the CLA sets the formula for determining the minimum amount of benefits, in substance pension plans under the Manpower Regulation or the CLA represent defined benefit plans.

The liability recognised in the consolidated statement of financial position with respect to the defined benefit pension plans is equivalent to the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting year less the fair value of the plan's assets. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the Projected Unit Credit method. Post-employment benefits consist of severance benefits and employment awards.

The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using the interest rates of high quality corporate bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid, and that have terms of maturity approximating the terms of the related pension obligations. When there is no deep market for such bonds, the market rates of government bonds are used.

Past service costs are recognised immediately in profit or loss. Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognised when the curtailment or settlement occurs.

Remeasurements arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to equity in the statement of other comprehensive income in the year in which they arise. The accumulated remeasurements balance is reported in retained earnings.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/formerly PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 9/34 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

a. Imbalan kerja (lanjutan)

Imbalan pascakerja (lanjutan)

Untuk program iuran pasti, Grup membayar iuran kepada dana pensiun yang dikelola oleh pihak ketiga, swasta, dengan dasar wajib, kontraktual dan sukarela. Grup tidak memiliki kewajiban membayar lebih lanjut jika iuran tersebut telah dibayarkan. Iuran tersebut diakui sebagai beban imbalan kerja pada saat terutang. Iuran dibayar dimuka diakui sebagai aset sepanjang pengembalian dana atau pengurangan pembayaran masa depan dimungkinkan.

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Grup memberikan imbalan pascakerja lainnya seperti uang cuti besar, tunjangan kesehatan cinta, bantuan kematian dan penghargaan kesetiaan kerja. Nilai imbalan yang diberikan didasari pada PKB.

Cuti besar diberikan kepada karyawan yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 tahun terus menerus. Tunjangan kesehatan cinta diberikan kepada karyawan yang mengalami kecelakaan dinas. Bantuan kematian diberikan kepada ahli waris dari karyawan yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja maupun bukan. Penghargaan kesetiaan kerja diberikan setiap periode tahun bagi pegawai yang telah bekerja selama 15 tahun terus menerus.

Perhitungan imbalan kerja jangka panjang dilakukan dengan menggunakan metode Projected Unit Credit. Jumlah yang diakui sebagai liabilitas imbalan kerja jangka panjang di laporan posisi keuangan konsolidasian merupakan nilai kini liabilitas imbalan kerja pasti.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Employee benefits (continued)

Post-employment benefits (continued)

For defined contribution plans, the Group pays contributions to public or private pension plans on a mandatory, contractual or voluntary basis. The Group has no further payment obligations once the contributions have been paid. The contributions are recognised as employee benefit expenses when they become due. Prepaid contributions are recognised as an asset to the extent that a cash refund or reduction in future payments is available.

Other long-term benefits

The Group provides other long-term employee benefits such as long leave allowance, disability benefit, death benefit and loyalty benefit. The benefits that are paid are based on the CLA.

Long leave allowance is given to employees who have worked for at least 6 years continuously. Disability benefit is provided to employees who have a work accident. Death benefit is provided to the heirs whether or not the employee passes away as a result of a work accident. Loyalty benefit is given every eight years for employees who have worked for 15 years continuously.

Long-term benefits are determined using the Projected Unit Credit method. The long-term employee benefits liabilities that are recognised in the consolidated statement of financial position represent the present value of the defined benefit obligation.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/formerly PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 9/35 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Imbalan kerja (lanjutan)

Pesangon pemutusan kontrak kerja

Pesangon pemutusan kontrak kerja dibayarkan ketika pekerja diberhentikan, atau ketika pekerja menerima penawaran pengunduran diri secara sukarela. Grup mengakui pesangon pemutusan kontrak kerja pada tanggal yang lebih dahulu dari: (i) ketika Grup tidak bisa lagi menghentikan penawaran pesangon, dan (ii) ketika Grup mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam lingkup PSAK No. 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi" dan melibatkan pembayaran pesangon pemutusan kontrak kerja. Dalam hal penawaran pengunduran diri secara sukarela, pesangon pemutusan kontrak kerja diukur berdasarkan ekspektasi jumlah karyawan yang menerima penawaran tersebut. Pesangon pemutusan kontrak kerja yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan didiskontokan ke nilai kini.

k. Modal saham

Saham biasa diklasifikasikan sebagai ekuitas. Biaya langsung yang berkaitan dengan penerbitan saham baru atau opsi disajikan sebagai pengurang ekuitas, setelah dikurang pajak, dari jumlah yang diterima.

u. Pembagian dividen

Pembagian dividen kepada pemegang saham Perusahaan diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian dalam periode ketika pembagian dividen telah diumumkan.

v. Pengakuan pendapatan dan beban

Pengakuan pendapatan

Pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 (lima) langkah penilaian sebagai berikut:

i. identifikasi kontrak dengan pelanggan;
ii. identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji(-janji) dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa (yang memiliki karakteristik berbeda) ke pelanggan.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Employee benefits (continued)

Termination benefits

Termination benefits are payable when employment is terminated by the Group before the normal retirement date, or when an employee accepts voluntary redundancy in exchange for certain benefits. The Group recognises termination benefits at the earlier of the following dates: (i) when the Group can no longer withdraw the offer of those benefits; and (ii) when the Group recognises costs for a restructuring that is within the scope of SFAS No. 57, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" that involve the payment of termination benefits. In the case of an offer made to encourage voluntary redundancy, the termination benefits are measured based on the number of employees who are expected to accept the offer. Benefits falling due more than 12 months after the reporting date are discounted to their present value.

k. Share capital

Ordinary shares are classified as equity. Incremental costs directly attributable to the issuance of new shares or options are shown in equity as a deduction, net of tax, from the proceeds.

u. Dividend distributions

Dividend distributions to the Company's shareholders are recognised as liabilities in the consolidated financial statements in the period when the dividends are declared.

v. Revenue and expense recognition

Revenue recognition

Revenue recognition has to fulfil 5 (five) steps of assessment as follows:

i. identify contract(s) with a customer;
ii. identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct;

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

v. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Pengakuan pendapatan (lanjutan)

Pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 (lima) tahap tahapan penilaian sebagai berikut: (lanjutan)

ii. Penentuan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Grup memulai estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak;

iii. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin; dan

iv. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu tertentu (umumnya jika) untuk menyerahkan barang ke pelanggan; atau
- Sepanjang waktu (umumnya jika) untuk menyerahkan jasa ke pelanggan. Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam sepanjang waktu, Grup memilih ukuran pengukuran yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

v. Revenue and expense recognition (continued)

Revenue recognition (continued)

Revenue recognition has to fulfil 5 (five) steps of assessment as follows: (continued)

ii. Determine the transaction price. The transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer. If the consideration that is promised in a contract includes a variable amount, the Group estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated amount of service level guarantee that will be paid during the contract period;

iii. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative standalone selling prices of each distinct good or service promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative standalone selling prices are estimated based on expected cost plus margin; and

iv. Recognize revenue when the performance obligation is satisfied by transferring the promised good or service to the customer (which is when the customer obtains control of that good or those services).

A performance obligation may be satisfied at the following:

- *A point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or*
- *Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Group selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognized as the performance obligation is satisfied.*

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/formerly PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 6.57 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

v. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Pengakuan pendapatan (lanjutan)

Dalam hal kontrak harga tetap, pelanggan membayar jumlah tetap berdasarkan jadwal pembayaran. Jika jasa yang diberikan oleh Grup melebihi pembayaran, maka aset kontrak diakui. Jika pembayaran melebihi jasa yang diberikan, kewajiban kontrak diakui.

Penjualan tenaga listrik

Pendapatan penjualan listrik diakui berdasarkan pemakaian energi listrik (kWh) yang ditagih kepada PLN dengan menggunakan formula tarif yang ditetapkan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik. Formula tarif mencakup perhitungan komponen harga kapasitas, harga tetap operasi dan pemeliharaan, harga bahan bakar, tingkat pasokan energi serta variabel lainnya.

Grup mengakui pendapatan atas kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dalam sebanyang waktu ketika listrik dikonsumsi oleh PLN.

Pendapatan jasa pemeliharaan dan operasi, pembangunan pembangkit tenaga listrik dan jasa lainnya

Grup mengakui pendapatan atas kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dalam sebanyang waktu hanya jika Grup dapat mengukur dengan andal atas penyelesaian kewajiban pelaksanaan. Dalam keadaan tertentu, Grup mungkin tidak dapat mengukur hasil atas kewajiban pelaksanaan secara wajar, tetapi Grup berekspektasi untuk memulihkan biaya yang timbul dalam memenuhi kewajiban pelaksanaan. Dalam keadaan tersebut, Grup mengakui pendapatan hanya sebatas biaya yang timbul sampai saat yang dapat mengukur hasil kewajiban pelaksanaan secara wajar.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

v. Revenue and expense recognition (continued)

Revenue recognition (continued)

In the case of fixed-price contracts, the customer pays a fixed amount based on a payment schedule. If the services rendered by the Group exceed the payment, a contract asset is recognised. If the payments exceed the services rendered, a contract liability is recognised.

Sales of electricity

Revenue from sales of electricity is recognised based on electricity usage (kWh) to PLN using the tariff formula stipulated in the power purchase agreements. The tariff formula includes the calculation of the capacity component, the fixed cost for operations and maintenance components, the fuel costs, power supply levels and other variables.

The Group recognises revenue for a performance obligation satisfied over time when electricity is consumed by PLN.

Rendering of services on maintenance and operation, power plant construction and other services

The Group recognises revenue for a performance obligation satisfied over time only if the Group can reasonably measure its progress towards the complete satisfaction of the performance obligation. In some circumstances, the Group may not be able to reasonably measure the outcome of a performance obligation, but the Group expects to recover the costs that have been incurred in satisfying the performance obligation. In those circumstances, the Group recognises revenue only to the extent of the costs that have been incurred until such a time that it can reasonably measure the outcome of the performance obligation.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

v. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Pengakuan pendapatan (lanjutan)

Pendapatan jasa pemeliharaan dan operasi, pembangunan pembangkit tenaga listrik dan jasa lainnya (lanjutan)

Pendapatan jasa diakui atas dasar penyerahan yang dilaksanakan dalam jangka waktu pada saat jasa tersebut diberikan kepada pelanggan.

Komponen pembiayaan

Grup tidak mengharapkan adanya kontrak di mana jangka waktu antara pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dan pembayaran oleh pelanggan melebihi satu tahun. Akibatnya, Grup tidak menyesuaikan harga transaksi apa pun dengan nilai waktu uang.

Pengakuan beban

Beban diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual.

w. Pajak penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laba rugi, kecuali jika pajak itu terkait dengan kejadian atau transaksi yang diakui di penghasilan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, beban pajak tersebut masing-masing diakui pada penghasilan komprehensif lain atau secara langsung diakui ke ekuitas.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

v. Revenue and expense recognition (continued)

Revenue recognition (continued)

Rendering of services on maintenance and operation, power plant construction and other services (continued)

Revenue from services is recognized on the basis of the work that is completed over time as the services are rendered to the customers.

Financing component

The Group does not expect to have any contracts where the period between the transfer of the promised goods or services to the customer and the payment by the customer exceeds one year. As a consequence, the Group does not adjust any of the transaction prices for the time value of money.

Expense recognition

Expenses are recognized as incurred on an accrual basis.

w. Income tax

Tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognized in profit or loss except to the extent that it relates to items recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax expense is recognized in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/formerly PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 3/16 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

w. Pajak penghasilan (lanjutan)

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan dan dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang diambil dalam Surat Pemberitahuan Tahunan sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi atas peraturan pajak yang berlaku. Jika perlu, manajemen menentukan provisi dibentuk berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar pada otoritas pajak.

Untuk penagakan yang menjadi subjek pajak penghasilan final, beban pajak diakui secara proporsional dengan jumlah penagakan akuntansi yang diakui dan disajikan dalam sebagai bagian dari akun beban operasional pada tahun berjalan dimana pajak tersebut telah memenuhi kriteria sebagai pajak penghasilan.

Pajak penghasilan tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan konsolidasian. Namun, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika timbul dari pengakuan awal goodwill atau pada aset pengakuan awal suatu aset atau liabilitas yang timbul dari transaksi aset, kombinasi bisnis yang pada saat transaksi tersebut tidak mempengaruhi laba rugi akuntansi maupun laba rugi kena pajak. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau yang secara substansial telah berlaku pada akhir tahun pelaporan dan diharapkan diterapkan jika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasikan atau liabilitas pajak tangguhan diselesaikan.

Aset pajak penghasilan tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat digunakan.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

w. Income tax (continued)

The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws that have been enacted as at the reporting date and computed using the prevailing tax rates. Management periodically evaluates the positions taken in Annual Tax Returns with respect to situations in which the applicable tax regulations are subject to interpretation. It establishes a provision where appropriate on the basis of the amounts expected to be paid to the tax authorities.

For income that is subject to final tax, tax expenses are recognised proportionally with the accounting revenue that is recognised and presented as part of the operating expenses account in the current year as such tax does not satisfy the criteria of income tax.

Deferred income tax is recognised using the liability method on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the consolidated financial statements. However, deferred tax liabilities are not recognised if they arise from the initial recognition of goodwill; deferred income tax is not accounted for if it arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction other than a business combination that at the time of the transaction affects neither accounting nor taxable profit or loss. Deferred income tax is determined using the tax rates that have been enacted or substantially enacted at the end of the reporting year and that are expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.

Deferred income tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilised.

PT PLN NUSANTARA POWER (sebelumnya/formerly PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI UNIT BISNIS ANAK/A SUBSIDIARIES

Lampiran 5/Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Pajak penghasilan (lanjutan)

Liabilitas dan aset pajak tangguhan tidak saling untuk pelaporan tergantung antara nilai tercatat dan dasar pengenaan pajak atas investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama dimana Grup dapat mengendalikan waktu pembalikan perbedaan tergantung dan kemungkinan besar perbedaan tersebut tidak akan dibalik di masa mendatang.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tergantung dapat saling hapus jika terdapat hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Income tax (continued)

Deferred tax liabilities and assets are not recognised for temporary differences between the carrying amount and tax bases of investments in associates and joint ventures where the Group is able to control the timing of the reversal of the temporary differences and it is probable that the differences will not be reversed in the foreseeable future.

Deferred income tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities.

4. PERTIMBANGAN AKUNTANSI PENTING DAN ESTIMASI AKUNTANSI SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi, pertimbangan dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal pelaporan, serta jumlah pendapatan dan beban selama tahun pelaporan. Estimasi, asumsi, dan pertimbangan tersebut dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lainnya, termasuk harapan peristiwa di masa datang yang dipercaya wajar berdasarkan kondisi yang ada.

Grup akan mengidentifikasi faktor berikut dimana operasinya pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan dan dimana hasil aktual dapat berbeda dari estimasi tersebut jika menggunakan asumsi dan kondisi yang berbeda dan dapat mempengaruhi secara material hasil keuangan atau posisi keuangan konsolidasian Grup yang dilaporkan dalam tahun mendatang.

4. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS AND ACCOUNTING ESTIMATES

The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires management to make estimates, judgements and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and the disclosure of contingent assets and liabilities at the reporting date and the reported amounts of revenue and expenses during the reporting year. Estimates, assumptions and judgements are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances.

The Group has identified the following matters under which significant judgements, estimates and assumptions are made and where actual results may differ from these estimates under different assumptions and conditions and may materially affect the consolidated financial results or financial position of the Group as reported in future years.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/formerly PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
UNIT BISNIS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/1 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. PERTIMBANGAN AKUNTANSI PENTING DAN ESTIMASI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)	4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES (continued)
Pertimbangan dalam penerapan kebijakan akuntansi	Judgements in applying accounting policies
Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang dijelaskan dalam Catatan 3, Grup telah menentukan hal-hal berikut yang memerlukan pertimbangan signifikan:	In the process of applying the accounting policies described in Note 3, the Group has identified the following matters under which significant judgements are made:
Kepentingan dalam pengaturan bersama	Interest in joint arrangements
Pertimbangan diperlukan untuk menentukan ketika Grup memiliki pengendalian bersama, yang memerlukan penilaian mengenai aktivitas yang relevan dan ketika keputusan yang berkaitan dengan aktivitas tersebut membutuhkan persetujuan dengan suara bulat. Grup menentukan bahwa aktivitas yang relevan untuk pengaturan bersama adalah aktivitas yang berkaitan dengan operasi dan pengambilan keputusan dalam pengaturan tersebut.	Judgement is required to determine when the Group has joint control, which requires an assessment of the relevant activities and when the decisions in relation to those activities require unanimous consent. The Group has determined that the relevant activities for its joint arrangements are those relating to the operating and capital decisions of the arrangement.
Pertimbangan juga diperlukan untuk mengklasifikasikan pengaturan bersama sebagai pengendalian bersama atau ventura bersama. Pengklasifikasian pengaturan tersebut mengharuskan Grup untuk menilai hak dan kewajiban yang timbul dari pengaturan tersebut. Secara khusus, Grup mempertimbangkan hal berikut ini:	Judgement is also required to classify a joint arrangement as either a joint operation or a joint venture. Classifying the arrangement requires the Group to assess its rights and obligations arising from the arrangement. Specifically, it considers the following:
• Struktur dari pengaturan bersama - apakah dikendalikan melalui kendaraan terpisah.	• The structure of the joint arrangement - whether it is structured through a separate vehicle.
• Ketika pengaturan tersebut distruktur melalui kendaraan terpisah, Grup juga mempertimbangkan hak dan kewajiban yang timbul dari:	• When the arrangement is structured through a separate vehicle, the Group also considers the rights and obligations arising from:
- bentuk legal dari kendaraan terpisah;	- the legal form of the separate vehicle;
- persyaratan dari perjanjian kontraktual; dan	- the terms of the contractual arrangement; and
- fakta dan kondisi lain (ketika relevan).	- other facts and circumstances (when relevant).
Penilaian ini yang membutuhkan pertimbangan yang signifikan. Kesimpulan yang berbeda mengenai pengendalian bersama dan apakah suatu pengaturan adalah sebuah operasi bersama atau ventura bersama, dapat memiliki dampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian.	This assessment often requires significant judgement. A different conclusion on joint control and also whether the arrangement is a joint operation or a joint venture, may materially impact the consolidated financial statements.
Grup memiliki pengaturan bersama yang terstruktur melalui ventura bersama. Struktur dan penyataan dari perjanjian kontraktual mengindikasikan bahwa Grup memiliki hak atas aset bersih dari pengaturan bersama tersebut. Grup menilai fakta dan kondisi lain yang berkaitan dengan pengaturan ini dan kesimpulan final dari penilaian yang dilakukan adalah pengaturan tersebut merupakan ventura bersama (Catatan 14).	The Group has joint arrangements which are structured through joint ventures. These structures and the terms of the contractual arrangements indicate that the Group has rights to the net assets of the arrangements. The Group also assessed the other facts and circumstances relating to these arrangements and concluded that conclusions were that the arrangements are joint ventures (Note 14).

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/formerly PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 8/42 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

6. PERTIMBANGAN AKUNTANSI PENTING, DAN ESTIMASI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Sumber ketidakpastian estimasi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi lainnya pada akhir tahun pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam tahun pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini:

Provisi atas kerugian kredit ekspektasian piutang usaha dan aset keuangan lainnya

Dalam menentukan kerugian kredit ekspektasian piutang, manajemen dituntukan untuk melakukan pertimbangan dalam menentukan apa yang dianggap sebagai peningkatan risiko kredit yang signifikan dan dalam membuat asumsi dan estimasi untuk memasukkan informasi yang relevan tentang peristiwa masa lalu, kondisi saat ini dan prakiraan kondisi ekonomi. Pertimbangan telah diterapkan dalam menentukan untuk dan sis pengetahuan awal piutang.

Tingkat penyisihan tertentu dievaluasi oleh manajemen berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kolektibilitas akun. Dalam kasus ini, Grup menggunakan penilaian berdasarkan fakta dan keadaan terbaik yang tersedia, termasuk hubungan dengan status kredit pelanggan berdasarkan laporan kredit pihak ketiga dan faktor pasar yang diketahui, untuk mencatat cadangan khusus untuk pelanggan terhadap jumlah yang jatuh tempo dalam jumlah yang diharapkan dapat diterima. Cadangan spesifik ini dievaluasi ulang dan disesuaikan tersedia informasi tambahan yang diterima mempengaruhi jumlah yang diestimasi.

6. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES (continued)

Sources of estimation uncertainty

The key assumptions concerning the future and the other key sources of estimation at the end of the reporting year, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year, are discussed below:

Provision for expected credit losses of trade receivables and other financial assets

In determining ECL, management is required to exercise judgement in defining what is considered to be a significant increase in credit risk and in making assumptions and estimates to incorporate relevant information about past events, current conditions and forecasts of economic conditions. Judgement has been applied in determining the criteria and point of initial recognition of receivables.

The level of a specific provision is evaluated by management on the basis of factors that affect the collectability of the accounts. In these cases, the Group uses judgement based on the best available facts and circumstances, including but not limited to with the customers credit status based on third-party credit reports and known market factors, to record specific reserves for customers against amounts due to amounts that it expects to collect. These specific reserves are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts estimated.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/formerly PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 3/41 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

6. PERTIMBANGAN AKUNTANSI PENTING, DAN ESTIMASI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Sumber ketidakpastian estimasi (lanjutan)

Taksiran masa manfaat ekonomi aset tetap

Masa manfaat setiap aset tetap Grup ditentukan berdasarkan periode kegunaan yang diharapkan dari aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset ditelaah secara periodik dan disesuaikan apabila ekspektasi berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas penggunaan aset, namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi di masa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan beban yang ditimbulkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Perubahan masa manfaat aset tetap dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang diakui dan nilai tercatat aset tetap.

Nilai wajar aset tetap dan properti investasi yang menggunakan model revaluasi

Dalam proses penilaian, manajemen, dengan bantuan penilai independen, menentukan data dan asumsi, menelaah metode penilaian serta berdiskusi dengan penilai. Pendekatan dan metode yang digunakan dalam melakukan revaluasi tergantung pada kelas aset. Walaupun data dan asumsi Grup dianggap layak dan wajar, namun perubahan signifikan pada data input atau asumsi yang digunakan dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap nilai aset yang menggunakan model revaluasi.

Rincian dari pendekatan dan data input signifikan yang digunakan dalam melakukan revaluasi aset tetap dan properti investasi diungkapkan masing-masing dalam Catatan 12 dan 13.

6. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES (continued)

Sources of estimation uncertainty (continued)

Estimated useful lives of property, plant and equipment

The useful life of each item of the Group's property, plant and equipment is estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

A change in the estimated useful life of any item of property, plant and equipment would affect the recorded depreciation expense and the carrying values of property, plant and equipment.

Fair value of property, plant and equipment and investment properties that use revaluation model

Management, with the assistance of an independent valuer, determines the data inputs and assumptions, assesses the valuation methods and holds discussions with the valuers as part of the valuation process. The approaches and methods used in the revaluation depend on the asset class. While it is believed that the Group's data and assumptions are reasonable and appropriate, significant changes in data inputs or significant changes in assumptions may materially affect the value of assets that use the revaluation model.

Details of the valuation approach and significant data inputs used in the revaluation of property, plant and equipment and investment properties are disclosed in notes 12 and 13, respectively.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/formerly PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran B/46 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. PENYIMPANGAN AKUNTANSI PENTING DAN ESTIMASI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Sumber ketidakpastian estimasi (lanjutan)

Imbalan pascakerja

Nilai kini kewajiban pensiun tergantung pada sejumlah faktor yang ditentukan berdasarkan basis aktuaria dengan menggunakan sejumlah asumsi. Asumsi yang digunakan dalam menentukan beban (pendapatan) bersih untuk pensiun termasuk tingkat diskonto, perubahan remunerasi masa depan, tingkat pengunduran karyawan, tingkat harapan hidup dan periode kerja yang diharapkan dari masa aktif karyawan. Setiap perubahan dalam asumsi-asumsi ini akan berdampak pada nilai tercatat atas kewajiban pensiun.

Grup menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada setiap akhir tahun. Tingkat suku bunga nilai yang digunakan untuk menentukan nilai kini dari estimasi arus kas keluar masa depan yang akan dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban pensiun. Dalam menentukan tingkat diskonto yang sesuai, Grup menggunakan tingkat suku bunga obligasi korporat berkualitas tinggi atau obligasi pemerintah, dengan pertimbangan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan memiliki waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo kewajiban pensiun yang bersangkutan.

Asumsi kunci kewajiban pensiun lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini.

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES (continued)

Sources of estimation uncertainty (continued)

Post-employment benefits

The present value of the pension obligation depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost/(income) for pensions include the discount rate, future remuneration changes, employee attrition rates, life expectancy and the expected remaining service periods of employees. Any changes in these assumptions will have an impact on the carrying amount of the pension obligation.

The Group determines the appropriate discount rate at the end of each year. This is the interest rate used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the related pension obligations. In determining the appropriate discount rate, the Group considers the interest rates of high quality corporate bonds (or government bonds, if there is no deep market for high quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension obligation.

Other key assumptions for pension obligations are based in part on current market conditions.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/formerly PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN SEBELAS ANAK PERUSAHAAN DAN ENTITAS ASOSIASI/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 8/45 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. PERTIMBANGAN AKUNTANSI PENTING DAN ESTIMASI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Sumber ketidakpastian estimasi (lanjutan)

Pajak penghasilan

Perhitungan beban pajak penghasilan Grup memerlukan pertimbangan dan asumsi dalam menentukan penggunaan beban tersebut selama proses pengestimasian. Semua pertimbangan dan estimasi yang dibuat manajemen dapat dipertanyakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sebagai akibatnya, terjadi ketidakpastian dalam penentuan pajak. Residu pada pajak yang diambil oleh Grup, melalui negosiasi dengan otoritas pajak yang relevan dapat berlangsung bertahun-tahun dan sangat sulit untuk memprediksi hasil akhirnya. Apabila terdapat perbedaan pemungan pajak dengan jumlah yang telah dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan pajak tangguhan dalam tahun dimana penentuan pajak tersebut dibuat.

Aset pajak tangguhan, termasuk yang timbul dari rugi pajak dan perbedaan temporer, diakui apabila terdapat lebih mungkin daripada tidak bahwa manfaat pajak dapat kembali, dimana hal ini tergantung pada terjadinya pembentukan laba kena pajak di masa depan. Asumsi atas pembentukan laba kena pajak sangat dipengaruhi oleh estimasi dan asumsi manajemen atas ingkat pertukaran dan biaya-biaya tertentu yang tertaksir kena ketidakpastian, sehingga ada kemungkinan perubahan estimasi dan asumsi tersebut akan mempunyai pengaruh laba kena pajak di masa mendatang.

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES (continued)

Sources of estimation uncertainty (continued)

Income taxes

The calculations of income tax expense for the Group require judgements and assumptions in determining the deductibility of certain expenses during the estimation process. All judgements and estimates made by management may be challenged by the Directorate General of Taxation. As a result, the ultimate tax determination becomes uncertain. The resolution of tax positions taken by the Group, through negotiations with the relevant tax authorities can take several years to complete and in some cases it is difficult to predict the ultimate outcome. Where the final outcome of these matters is different from the amounts initially recorded, such differences will have an impact on the income tax and deferred income tax provision in the year in which the determination is made.

Deferred tax assets, including those arising from tax losses carried forward and temporary differences, are recognised only where it is considered more likely than not that they will be recovered, which is dependent on the generation of sufficient future taxable profits. The assumptions about the generation of future taxable profits are heavily affected by the level of sales and the associated costs which are subject to risk and uncertainty and hence there is a possibility that changes in circumstances will alter the projected future taxable profits.

(Perusahaan Perseroan)
PT PLN (PERSERO) DAN ANAK PERUSAHAAN
Laporan Keuangan Konsolidasian
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Persero) PT PLN (PERSERO) AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/46 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

5. ENTITAS ANAK

Perusahaan memiliki saham entitas anak, baik langsung maupun tidak langsung sebagai berikut:

5. SUBSIDIARIES

The Company has ownership interests directly or indirectly in the following subsidiaries:

Nama Anak Perusahaan / Subsidiaries	Domisili / Domicile	Jenis Usaha / Nature of business	Persentase pemilikan dan hak suara / Percentage of ownership and voting rights		Tahun mulai beroperasi komersial / Year of commercial operations	Jumlah aset sebelum eliminasi / Total assets before eliminations	
			2022	2021		2022	2021
PT Pembangkitan Jawa-Bali Services ("PJBS") dan entitas anaknya / and its subsidiary	Surabaya	Jasa operasi dan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik dan pemanfaatan limbah batubara / Operation and maintenance of electric power generation plant / Coal ash and limestone utilization	99,99	99,99	2021	1.864.884	1.911.145
PT Cita Mineral Investindo ("CMI") [1]	Surabaya	Jasa Konsultasi / Consultancy	99,99	99,99	2008	771.089	748.888
PT Pembangkitan Jawa-Bali ("PJB") dan entitas anaknya / and its subsidiaries	Jakarta	Bidang pembangkitan tenaga listrik, dan operasi dan pemeliharaan serta pengelolaan dan / Engineering, procurement and construction, and operation and maintenance in the electricity sector	50,00	50,00	2004	1.912.145	1.827.222
PT Prima Power Suralaya ("PPS") [1]	Jakarta	Bidang pembangkitan tenaga listrik, dan operasi dan pemeliharaan serta pengelolaan dan / Engineering, procurement and construction, and operation and maintenance in the electricity sector	50,00	-	2016	332.241	-
PT Pembangkitan Jawa-Bali Investasi ("PJBI") [1]	Jakarta	Kegiatan usaha lainnya / Other business activities	-	99,99	2015	-	18.000
PT Energi Kompetensi Indonesia ("EKI")	Tangerang	Pertambangan, konstruksi, perdagangan dan pertanian / Trade, construction, mining and agriculture	70,97	70,97	2020	483.843	354.773
PT Pembangkitan Jawa-Bali Investasi ("PJBI") dan entitas anaknya / and its subsidiaries	Jakarta	Investasi dan pengelolaan investasi / Investment in electricity	100,00	100,00	2018	8.000.764	6.100.000
PT Pembangkitan Jawa-Bali Indonesia ("PJBI") dan entitas anaknya / and its subsidiaries	Jakarta	Pembangkitan listrik dan pengelolaan aset / Investment in electricity (geothermal)	100,00	100,00	2020	61.000	117.000
PT Pembangkitan Jawa-Bali Services ("PJBS") [1]	Jakarta	Pembangkitan dalam semua penyelesaian modal / Financing (equity participation)	100,00	100,00	2020	50.000	100.000
PT Pusat Listrik Tenaga Bayu Quarry ("PLTB")	Jakarta	Pembangkitan tenaga listrik dan gas, konstruksi, serta operasi dan pemeliharaan di bidang pengelolaan dan / Generation and provision of energy, engineering, supply and construction in the electricity power	51,00	51,00	2018	771.000	800.000

[1] Tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik / Not audited by Public Accounting Firm

Efektif pada tanggal 22 Desember 2021, sesuai dengan Akta Notaris No. 7 dari Dina Anggraini Hudaibah, S.H., M.Si., Notaris di Surabaya, Perusahaan mengadakan perjanjian jual beli saham untuk menjual saham PT Semesta Kompetensi Pembangkitan Tenaga Listrik ("SKP") ke Yayasan Kesejahteraan PT Pembangkitan Jawa-Bali ("YK PJB"), dimana Perusahaan menjual seluruh kepemilikan saham SKP atau setara dengan 60% kepemilikan atas SKP dengan nilai pengalihan sebesar Rp8.700. Nilai buku bersih SKP untuk porsi kepemilikan Perusahaan adalah sebesar Rp8.100. Keuntungan dari penjualan saham sebesar Rp1.837 disajikan sebagai bagian dari penghasilan (beban) lainnya - bersih dalam laporan laba rugi konsolidasian Grup.

Effective on 22 December 2021, in accordance with Notarial Deed No. 7 of Dina Anggraini Hudaibah, S.H., M.Si., Notary in Surabaya, the Company entered into a share sale and purchase agreement to sell shares of PT Semesta Kompetensi Pembangkitan Tenaga Listrik ("SKP") to Yayasan Kesejahteraan PT Pembangkitan Jawa-Bali ("YK PJB"), under which the Company sold all shares or equivalent to 60% ownership of SKP with a total transaction value of Rp8.700. The net book value of the Company's ownership portion in SKP was Rp8.100. The gain on sales of investment amounted to Rp1.837 is presented as part of other income/(expenses) - net in the Group's consolidated statements of profit or loss.

(*) PLN BUSANA IKA PORCH (dahulu/formerly (*) PORSAMUSIAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/47 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

5. ENTITAS ANAK (lanjutan)

Pada tahun 2021, PJB, entitas anak, melakukan penambahan penyertaan modal sebesar Rp88.200 sehingga nilai penyertaan pada PJB investasi menjadi Rp88.213.

Pada tahun 2021, Perusahaan melakukan penambahan penyertaan modal sebesar Rp101.092 sehingga nilai penyertaan pada PJB menjadi Rp8.038.048.

Berdasarkan Akta Notaris No. 38 tanggal 27 April 2022 dari Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan mengadakan perjanjian jual beli saham untuk membeli saham PJBS dari YK PJB, entitas Perusahaan memberi sebagian kepemilikan saham PJBS atau setara dengan 1% kepemilikan atas PJBS sebesar nilai pengalihan sebesar Rp11.184. Nilai buku bersih PJBS untuk porsi kepemilikan YK PJB adalah sebesar Rp8.812.

Pada tahun 2022, Perusahaan melakukan penambahan penyertaan modal sebesar Rp65.384 sehingga nilai penyertaan pada RE menjadi Rp110.708.

Pada tahun 2022, RE entitas anak melakukan akuisisi 51% dan divestasi RE dengan entitas sepengendali. Lihat Catatan 21 untuk informasi lebih rinci transaksi.

5. SUBSIDIARIES (continued)

In 2021, PJB, a subsidiary, made additional investments amounting to Rp88.200, therefore the investment amount in PJB investors changed to Rp88.013.

In 2021, the Company made additional investments amounting to Rp101.092, therefore, the carrying amount of investments in PJB amounting to Rp8.038.048.

Based on Notarial Deed No. 38 dated 27 April 2022 of Lenny Janis Ishak, S.H., Notary in Jakarta, the Company entered into a share sale and purchase agreement to purchase shares of PJBS to YK PJB, under which the Company purchased a part of shares or equivalent to 1% ownership of PJBS with a total transaction value of Rp11.184. The net book value of the YK PJB's ownership portion in PJBS was Rp8.812.

In 2022, the Company made additional investments amounting to Rp65.384, therefore the carrying amount of investments in RE amounting to Rp110.708.

In 2022, RE a subsidiary, acquired 200 and divested RED with an entity under common control. Refer to note 21 for information regarding the transaction value.

6. KAS DAN SETARA KAS

	2022	2021	
Kas	1.478	1.824	Cash on hand
Bank			Cash in banks
Pihak berelasi (Catatan 31)			Related parties (Note 31)
Bank Mandiri			Bank Mandiri
Rupiah	3.597.751	3.338.003	Rupiah
US$	97.255	149.823	US$
BRI			BRI
Rupiah	930.448	990.353	Rupiah
US$	469.001	303.855	US$
BNI			BNI
Rupiah	4.660.092	3.283.706	Rupiah
US$	39.891	76.141	US$
PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI")	10.000	7	PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI")
Sub-jumlah	9.804.418	8.381.488	Sub-total

6. CASH AND CASH EQUIVALENTS

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/formerly PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/Attachment 5

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

8. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

8. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

	2022	2021	
Bank (lanjutan)			Cash in banks (continued)
Pihak ketiga			Third parties
Bank Dalam Negeri			Bank Dalam Negeri
Rupiah	38.034	126.986	Rupiah
US$	125	116	US$
PT Bank Sulawesi Tbk ("Bank Sulawesi")			PT Bank Sulawesi Tbk ("Bank Sulawesi")
Rupiah	194	2.288	Rupiah
US$	-	2.536	US$
Lain-lain (masing-masing dibawah 5% dari jumlah)			Others (each below 5% of total)
Rupiah	-	125	Rupiah
US$	-	1	US$
Sub-jumlah	38.943	132.031	Sub-total
Jumlah bank	8.375.393	8.358.919	Total cash in banks
Deposito berjangka			Time deposits
Pihak berelasi (Catatan 31)			Related parties (Note 31)
Bank Mandiri	60.000	60.000	Bank Mandiri
IDR			IDR
Rupiah	136.000	136.000	Rupiah
US$	16.887	227.884	US$
EUR			EUR
Rupiah	76.284	50.000	Rupiah
US$	268.244	168.668	US$
Sub-jumlah	561.215	642.533	Sub-total
Pihak ketiga			Third parties
Bank Dalam Negeri	112	112	Bank Dalam Negeri
Jumlah deposito berjangka	561.327	642.645	Total time deposits
Jumlah	8.936.720	9.001.564	Total
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun			Interest rate per annum on time deposits
Rupiah	0,05% - 5,00%	0,05% - 3,60%	Rupiah
US$	0,05% - 1,75%	0,05% - 0,40%	US$
Jangka waktu	1 - 3 bulan/months	1 - 3 bulan/months	Maturity

Lihat Catatan 31 untuk informasi saldo dan transaksi-transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 31 for the balances and transactions with related parties.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/formerly PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
UNIT INDUK PEMBANGKITAN dan ANAK PERUSAHAAN/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

7. DEPOSITO BERJANGKA / 7. TIME DEPOSITS

	2022	2021	
Pihak berelasi (Catatan 31)			Related parties (Note 31)
Rupiah	380.000	380.000	Rupiah
AS$	37.431	-	US$
Rupiah	-	30.000	Rupiah
AS$	31.462	-	US$
Bank Mandiri			Bank Mandiri
Rupiah	133	133	Rupiah
AS$	143.213	-	US$
Jumlah, bersih	491.239	206.163	Total, net
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun			Interest rates per annum on time deposits
Rupiah	3,25% - 5,55%	3,25% - 3,50%	Rupiah
AS$	2,00% - 3,00%	-	US$
Jangka waktu	6 - 12 bulan/ months	6 - 12 bulan/ months	Maturity

Lihat Catatan 31 untuk informasi pihak dan transaksi-transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 31 for the balances and transactions with related parties.

8. KEHARUSAN BANK DAN DEPOSITO BERJANGKA (BIAYA) / PENGGUNAANNYA

8. RESTRICTED CASH IN BANKS AND TIME DEPOSITS

	2022	2021	
Jaminan bank garansi			Bank guarantees
Pihak berelasi (Catatan 31)			Related parties (Note 31)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")			PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")
AS$	112.283	-	US$
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")			PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")
Rupiah	10.000	10.000	Rupiah
AS$	161.784	145.782	US$
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")	1.127	511	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")
Pihak ketiga			Third party
PT Bank OCBC Nisp Tbk ("Bank OCBC Nisp")	43.626	44.910	PT Bank OCBC Nisp Tbk ("Bank OCBC Nisp")
Jumlah	328.831	206.279	Total
Dikurangi: bagian lancar	(301.460)	(206.279)	Less: current portion
Bagian tidak lancar	27.431	-	Non-current portion

Pada tanggal 19 Juli 2021, PJBI dan PJBC memberikan jaminan berupa Standby Letter of Credit ("SBLC") kepada Sumitomo Mitsui Banking Co. sebesar AS$6.597.775 atau setara dengan Rp100.433 (2021: Rp132.111) untuk proyek PLTS Cirata di Kabupaten Purwakarta.

As at 19 July 2021, PJBI and PJBC provided guarantee in form of Standby Letter of Credit ("SBLC") to Sumitomo Mitsui Banking Co. amounting to US$6,597,775 or equivalent to Rp100,433 (2021: Rp132,111) for PLTS Cirata project in Purwakarta Regency.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/formerly PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam Miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

8. KEPENTINGAN BANK DAN DEPOSITO BERJANGKA DIBATASKAN PENGGUNAANNYA (lanjutan)

8. RESTRICTED CASH IN BANKS AND TIME DEPOSITS (continued)

Pada tanggal 22 Desember 2022, PJB dan PJBC memberikan jaminan berupa Standby Letter of Credit ("SBLC") kepada Bank Mandiri sebesar US$7.000.000 atau setara dengan Rp112.000 untuk proyek PLTS Grasi di Kabupaten Purwakarta yang dilakukan oleh PT Pembangkitan Jawa Bali Master Solar Energy ("PJBSE").

As at 22 December 2022, PJB and PJBC provides guarantee in form of Standby Letter of Credit ("SBLC") to Bank Mandiri amounting to US$7,000,000 or equivalent to Rp112,000 for PLTS Grasi project in Purwakarta Regency which is developed by PT Pembangkitan Jawa Bali Master Solar Energy ("PJBSE").

Lihat Catatan 31 untuk informasi saldo dan transaksi-transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to note 31 for the balances and transactions with related parties.

9. PIUTANG USAHA

9. TRADE RECEIVABLES

	2022	2021	
Pihak berelasi (Catatan 31)	33.478.373	31.305.137	Related parties (note 31)
Pihak ketiga	131.219	69.845	Third parties
Subjumlah	33.609.592	31.374.975	Subtotal
Cadangan kerugian kredit ekspektasian	(98.338)	(23.697)	Allowance for expected credit losses
Jumlah, bersih	33.511.254	31.351.278	Total, net

Pergerakan cadangan kerugian kredit ekspektasian adalah sebagai berikut:

The movement of the allowance for expected credit losses is as follows:

	2022	2021	
Saldo awal tahun	23.697	23.697	Balance at beginning of year
Penambahan	72.641	-	Additions
Saldo akhir tahun	96.338	23.697	Balance at end of year

Berdasarkan kesepakatan antara Perusahaan dan PLN, piutang usaha Perusahaan diperhitungkan terhadap utang usaha untuk pembelian energi primer dan utang bunga atas pinjaman dari pemegang saham (Catatan 33a).

Based on the agreement between the Company and PLN, the trade receivables of the Company were offset with trade payables related to the purchase of primary energy and interest payable on loans from a shareholder (Note 33a).

Manajemen berpendapat bahwa cadangan atas kerugian kredit ekspektasian untuk piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 yang diakui cukup untuk menutupi risiko kerugian kredit dari piutang usaha.

Management is of the opinion that the established allowance for expected credit losses of trade receivables as at 31 December 2022 and 2021 is adequate to cover the credit loss risk of trade receivables.

Lihat Catatan 31 untuk informasi saldo dan transaksi-transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to note 31 for the balances and transactions with related parties.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/formerly PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/51 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

10. PIUTANG KEPADA VENTURA BERSAMA / 10. RECEIVABLES FROM JOINT VENTURES

	2022	2021	
SGPJB	813.424	808.435	SGPJB
PVSE	10.439	8.822	PVSE
Jumlah	823.863	816.257	Total
Dikurangi: bagian lancar	(87.765)	(13.459)	Less: current portion
Bagian tidak lancar	736.098	802.800	Non-current portion

Pada tanggal 30 November 2018, PJB, entitas anak, melakukan perjanjian pinjaman jangka panjang dengan SGPJB, dimana PJB memberikan pinjaman jangka panjang sebesar US$56.516.733 dengan suku bunga LIBOR 6 bulan + 4%. Pinjaman akan jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2033. Bunga akan jatuh tempo setiap tanggal 15 Januari dan 15 Juli. Selama tahun 2022, SGPJB melakukan pembayaran pinjaman sebesar AS$4.347.441 (setara dengan Rp64.720) (2021: AS$nihil). Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, saldo tersurang atas seluruh pinjaman ini adalah masing-masing sebesar AS$53.169.292 (setara dengan Rp812.424) dan AS$56.516.733 (setara dengan Rp808.435).

On 30 November 2018, PJB, a subsidiary, entered into a long-term loan with SGPJB, whereby PJB agreed to provide long-term loans to SGPJB amounting to US$56.516.733 with an interest rate of LIBOR 6 month + 4%. The agreement will mature on 15 December 2033. The interest will be due every 15 January and 15 July. During 2022, SGPJB made loan payment of US$4.347.441 (equivalent to Rp64.720) (2021: US$nil). As at 31 December 2022 and 2021, the total outstanding balances of the loans were US$53.169.292 (equivalent to Rp812.424) and US$56.516.733 (equivalent to Rp808.435), respectively.

Pada tanggal 30 Mei 2021, PJBC memberikan pinjaman jangka panjang sebesar AS$663.000 (setara dengan Rp10.429) (2021: AS$663.000 (setara dengan Rp9.622)) kepada PVSE dengan suku bunga tahunan sebesar 4,1%.

On 30 May 2021, PJBC granted a long-term loan to PVSE amounting to US$663.000 (equivalent to Rp10.429) (2021: US$663.000 (equivalent to Rp9.622)) with an annual interest rate of 4.1%.

Bunga pinjaman kepada SGPJB dan PVSE yang belum diterima masing-masing sebesar AS$22.335.459 (setara dengan Rp351.682) dan AS$545.213 (setara dengan Rp7.832) disajikan sebagai piutang lain-lain.

Unpaid interest on receivables from SGPJB and PVSE amounting to US$22.335.459 (equivalent to Rp351.682) and US$545.213 (equivalent to Rp7.832) were recorded as other receivables, respectively.

Berdasarkan penilaian penyisihan kerugian kredit ekspektasian, manajemen Grup berpendapat bahwa penyisihan atas kerugian kredit ekspektasian atas piutang kepada ventura bersama tidak material, sehingga penyisihan atas kerugian kredit ekspektasian dianggap tidak diperlukan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Based on the assessment of allowance for expected credit losses, the management of the Group is of the opinion that the provision for expected credit losses of receivables from joint ventures is not material; therefore, a provision for expected credit losses is considered not necessary as at 31 December 2022 and 2021.

Lihat Catatan 31 untuk informasi pihak dan transaksi-transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to note 31 for the balances and transactions with related parties.

11. PERSEDIAAN / 11. INVENTORIES

	2022	2021	
Bahan bakar dan pelumas	1.427.036	1.135.335	Coal, fuel and lubricants
Material pemeliharaan	397.888	347.840	Maintenance materials
Subjumlah	1.824.924	1.483.175	Subtotal
Cadangan penurunan nilai persediaan dan persediaan usang	(20.633)	(19.326)	Allowance for decline in value of inventories and inventory obsolescence
Jumlah, bersih	1.804.292	1.463.849	Total, net

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

11. PERSEDIAAN (lanjutan)

Pergerakan cadangan penurunan nilai persediaan dan persediaan usang adalah sebagai berikut:

	2022	2021	
Saldo awal tahun	19.228	17.042	Balance at beginning of year
Penambahan	1.788	3.617	Additions
Pembalikan	(184)	(1.431)	Reversal
Saldo akhir tahun	20.832	19.228	Balance at end of year

Manajemen berpendapat bahwa cadangan penurunan nilai persediaan dan persediaan usang yang dibentuk pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah cukup untuk menutup risiko kerugian penurunan nilai persediaan dan persediaan usang.

Jumlah persediaan persediaan yang diakui sebagai beban usaha dalam laporan laba rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, adalah masing-masing sebesar Rp3.787.858 dan Rp4.247.606.

11. INVENTORIES (continued)

The movement of the allowance for the decline in the value of inventories and inventory obsolescence is as follows:

Management is of the opinion that the allowance for decline in value of inventories and inventory obsolescence as at 31 December 2022 and 2021 is adequate to cover the possible losses on the decline in the value of inventories and inventory obsolescence.

The total amount of inventories used recognised as operating expenses in profit or loss for the years ended 31 December 2022 and 2021 amounted to Rp3.787.858 and Rp4.247.606, respectively.

12. ASET TETAP

12. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

	2022					
	1 Januari/January 2022	Penambah/Additions	Pengurangan/Deductions	Reklasifikasi/Reclassifications	31 Desember/December 2022	
Biaya perolehan/Acquisition cost						
Pemilikan langsung/Direct acquisitions						
Tanah dan bangunan/Land and buildings	11.020.809	-	-	-	11.020.809	Land and buildings
Bangunan untuk mesin dan peralatan/Buildings for machinery and equipment	7.886.182	183.551	-	7.183	8.077.972	Buildings, leasehold and machinery
Mesin dan mesin pembangkit/Machinery and power plants	47.991.243	167.732	-	3.284.373	51.438.348	Machinery and power plants
Perlengkapan kerama dan distribusi/Transmission and distribution equipment	4.267.473	3.900	-	11.913	4.283.286	Transmission and distribution equipment
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi/Data processing and telecommunication equipment	2.918	29	-	-	2.947	Data processing and telecommunication equipment
Perlengkapan umum/General equipment	1.247.302	41.202	-	27.470	1.315.974	General equipment
Kendaraan bermotor/Motor vehicles	93.121	6.211	-	(5.143)	94.189	Motor vehicles
Aset tetap yang utama/Assets held under finance lease	30.758	1.213	-	-	31.971	Assets held under finance lease
Subjumlah/Subtotal	72.537.776	403.847	-	3.325.846	76.267.469	Subtotal
Aset tetap yang disewakan/Assets held under finance lease						Assets held under finance lease
Bangunan/Buildings	6.172	9.900	(1.898)	-	17.174	Buildings
Mesin dan peralatan/Machinery and equipment	1.000	5.000	(1.000)	-	5.000	Machinery and equipment
Subjumlah/Subtotal	7.172	14.900	(2.898)	-	19.174	Subtotal
Akumulasi penyusutan/Accumulated depreciation						Accumulated depreciation
Pemilikan langsung/Direct acquisitions	8.271.243	1.227.382	(87.243)	(3.924.274)	3.417.888	Direct acquisitions
Aset tetap yang utama/Assets held under finance lease	1.803.133	-	-	(19.280)	1.783.853	Assets held under finance lease
Jumlah/Total	18.938.553	1.716.282	(91.139)	-	20.563.696	Total

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/formerly PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN SKUTAS ANANTARA AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 9(1) Schedule

DAFTAR ASET TETAP
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

12. ASET TETAP (lanjutan)

12. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (continued)

	2022					
	1 Januari/ January 2022	Penambah/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember/ December 2022	
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
PENGEMBANGAN						DEVELOPMENT
Bangunan sipil, rel dan prasarana	-	(30,87)	-	-	(30,87)	Buildings, railways and infrastructure
Mesin dan mesin pembangkit	-	(1,438.13)	-	(10)	(1,438.13)	Machinery and power plants
Peralatan jaringan transmisi dan distribusi	-	(15.31)	-	-	(15.31)	Transmission and distribution equipment
Peralatan pengolahan data dan telekomunikasi	-	(1.11)	-	-	(1.11)	Telecommunications and data processing equipment
Peralatan umum	(71,62)	(10,08)	-	(1,39)	(1,47,11)	General equipment
Kendaraan bermotor	(11,37)	(1,60)	-	(1,11)	(11,11)	Motor vehicles
Properti sewaan pihak	-	(0)	-	-	(0)	Rental properties
Subjumlah	(1,00,11)	(1,10,67)	-	(1,61)	(1,11,11)	Subtotal
Operasi pihak berelasi	0,11	0,01	(1,00)	-	(1,11)	Related parties
Peralatan umum	0,00	0,0	(0,1)	-	(0,0)	General equipment
Kendaraan bermotor	(0,00)	(0,01)	(0,00)	-	(0,0)	Motor vehicles
Subjumlah	(1,11)	(1,00)	(1,01)	-	(0,1)	Subtotal
Aset tetap dalam operasi	(11,1)	(0,00)	(0)	(0,00)	(0,1)	Assets not used in operations
Jumlah	(1,01,11)	(1,10,1)	(1,01)	-	(1,11,11)	Total
Penyisihan penurunan nilai	(11,10)	-	-	-	(11,10)	Provision for impairment losses
Jumlah tercatat	1,11,11,11				1,11,11,11	Net carrying value

	2021					
	1 Januari/ January 2021	Penambah/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember/ December 2021	
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
PENGEMBANGAN						DEVELOPMENT
Bangunan sipil, rel dan prasarana	(1,00,00)	-	-	(0,0)	(1,00,00)	Buildings, railways and infrastructure
Mesin dan mesin pembangkit	(1,00,11)	(0,11)	-	(1,11)	(1,00,11)	Machinery and power plants
Peralatan jaringan transmisi dan distribusi	(1,00,00)	(1,1)	-	(1,1,11)	(1,00,00)	Transmission and distribution equipment
Peralatan pengolahan data dan telekomunikasi	(1,11)	(0,11)	-	(0)	(1,11)	Telecommunications and data processing equipment
Peralatan umum	(1,11)	(1,11)	-	(1,11)	(1,11)	General equipment
Kendaraan bermotor	(1,11)	(1,11)	-	(1,11)	(1,11)	Motor vehicles
Properti sewaan pihak	(1,11)	-	-	(1,11)	(1,11)	Rental properties
Subjumlah	(1,00,00)	(1,1,1)	-	(1,11)	(1,1,1)	Subtotal
Operasi pihak berelasi	0,00	0,1	(0,00)	-	0,1	Related parties
Peralatan umum	0,01	0,0	(0,0)	-	0,0	General equipment
Kendaraan bermotor	(0,00)	(0,1)	(0,00)	-	(0,00)	Motor vehicles
Subjumlah	(0,1)	(0,1)	(0,00)	-	(0,1)	Subtotal
Aset tetap dalam pembangunan	(1,00,1)	(1,00,00)	-	(1,1,1)	(1,1,1)	Construction in progress
Aset tetap dalam operasi	(1,1,1)	(1,1)	-	(1,1)	(1,1,1)	Assets not used in operations
Jumlah	(1,1,1,1)	(1,1,1)	(1,1)	(1,1)	(1,1,1,1)	Total

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/formerly PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI UNIT BISNIS JASA/UBJ) DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/54 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember/December 2022 DAN/AND 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

12. Aset Tetap/ Property, Plant and Equipment

12. ASET TETAP/ PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (lanjutan/continued)

	2022						
Biaya perolehan/Cost							
Pemilikan langsung/Direct acquisition							
Bangunan, kantor dan prasarana/Buildings, offices and infrastructure	1,215,000	19,004	-	466	(121,111)	-	
Mesin dan mesin pembangkit/Machinery and power generator	2,827,111	270,123	-	(2,171)	(2,000,143)	-	
Perlengkapan operasi dan kantor/Operating and office equipment	64,611	14,023	-	(12)	(11,642)	-	
Perlengkapan pengeboran dan instalasi/Drilling and installation equipment	3,431	1,317	-	(72)	577	-	
Perlengkapan umum/General equipment	6,427	12,001	-	5,0	-	17,432	
Kendaraan bermotor/Motor vehicles	17,651	1,121	-	4,211	-	12,121	
Aset tetap dalam penyelesaian/Construction in progress	1,111	1,000	-	1,111	1,000	-	
Jumlah/Total	7,000,000	8,000,000	-	(4,000)	(2,000,000)	1,000,000	
Aset hak guna/Right of use assets							
Bangunan/Building	2,000	5,000	2,000	-	-	2,000	
Perlengkapan umum/General equipment	1,000	1,000	1,000	-	-	1,000	
Kendaraan bermotor/Motor vehicles	10,000	12,000	(1,000)	-	-	21,000	
Jumlah/Total	13,000	18,000	(1,000)	-	-	24,000	
Aset tak berwujud/Intangible assets							
Perangkat lunak/Software	10,000	11,000	-	2,000	(11,000)	12,000	Assets not under exploration
Jumlah/Total	3,000,000	4,000,000	(1,000)	(7,000)	(4,000,000)	1,000,000	Total
Penyisihan penurunan nilai/Allowance for impairment losses	(1,000)	-	-	-	(1,000)	(1,000)	Provision for impairment losses
Nilai buku/Net carrying value	20,000,000					20,000,000	Net carrying value

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation expense was allocated to the following:

	2022	2021	
Beban usaha	3,000,000	3,000,000	Operating expenses
Penghasilan (beban) lain-lain - bersih	22,000	110,000	Other income (expenses) - net
Jumlah	3,000,000	3,000,000	Total

Grup memiliki beberapa bidang tanah dengan hak atas tanah berupa Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan ("HGB"). Hak Pakai tidak mempunyai jangka waktu, sedangkan HGB akan jatuh tempo antara tahun 2023 sampai dengan 2044, tetapi dapat diperpanjang oleh Grup. Grup juga mempunyai beberapa bidang tanah yang sedang dalam proses pengalihan HGB dan penguasaan balik nama menjadi atas nama Grup.

The Group owns several pieces of land with Rights to Use and Building Use Rights ("HGB"). Rights to Use have no expiration date, while HGB will expire from 2023 to 2044, but they are renewable by the Group. The Group also has several pieces of land rights that are still in the extension process and in the process of transfer of certificates to the name of the Group.

Aset tetap, kecuali tanah dan bangunan pembangkit, diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan kerugian/risiko lainnya (termasuk mesin/mesin pembangkit) kepada PT Asuransi Jasa Indonesia ("Jasindo") dan PT Asuransi Parsel Lokal Nasional ("APLN"), dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar AS$2,5 miliar dan Rp7.540 (2021: AS$2,5 miliar dan Rp59.905) pada 31 Desember 2022. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut cukup untuk menutup kerugian aset.

The property, plant and equipment, except land and power plant buildings, has been insured against fire and other possible risks (including machinery breakdown) with PT Asuransi Jasa Indonesia ("Jasindo") and PT Asuransi Parsel Lokal Nasional ("APLN"), with the coverage amounting to US$2.5 billion and Rp7,540 (2021: US$2.5 billion and Rp59,905) at 31 December 2022. Management is of the opinion that the sum insured is adequate to cover the possible losses on the assets.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/formerly PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/55 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember/December 2022 DAN/AND 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

12. ASET TETAP (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, jumlah tercatat bruto aset tetap yang telah disusutkan penuh namun masih digunakan masing-masing sebesar Rp788.333 dan Rp648.080.

Pada tanggal 31 Desember 2021, Grup melakukan penilaian kembali atas nilai wajar aset tetap yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Ranggana, Hamid & Rekan (KJPP RHR) dalam laporan No. 0011/2.0013-03/PI/03/0009/1/III/2022 tanggal 30 Maret 2022, serta independen yang telah terdaftar di Kementerian Keuangan dengan nomor ijin usaha No. 2.09.0013 dan DJA.

Manajemen telah mengidentifikasi adanya perubahan signifikan yang mengharuskan dilakukannya penilaian untuk tahun 2022.

Tabel di bawah ini menganalisa aset tetap yang dicatat pada nilai wajar berdasarkan hierki nilai wajar sesuai dengan PSAK No. 68 berdasarkan nilainya tanggal 31 Desember 2021. Perbedaan tingkatan nilai wajar dijelaskan sebagai berikut:

12. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (continued)

As at 31 December 2022 and 2021, the gross carrying amount of property, plant and equipment that had been fully depreciated but was still in use amounted to Rp788.333 and Rp648.080 respectively.

On 31 December 2021, the Group performed a revaluation of the fair value of its property, plant and equipment which was performed by Kantor Jasa Penilai Publik Ranggana, Hamid & Rekan ("KJPP RHR") in report No. 0011/2.0013-03/PI/03/0009/1/III/2022 dated 30 March 2022, an independent valuer registered in the Ministry of Finance, with license permit No. 2.09.0013 and IDA.

Management did not identify any significant changes in circumstances which could require a revaluation exercise to be performed for 2022.

The table below analyses the fixed assets that have been recorded at fair value, based on the fair value hierarchy in SFAS No. 68 based on valuation as at 31 December 2021. The different levels of fair value are defined as follows:

Pengukuan nilai wajar 31 Desember 2021 menggunakan/
Fair value measurements as at 31 December 2021 using

	Tingkat 1/ *Level 1*	Tingkat 2/ *Level 2*	Tingkat 3/ *Level 3*	Jumlah/ *Total*	
Tanah dan hak atas tanah/ *Land and rights*	-	66.679	16.070.150	17.050.829	*Land and rights*
Bangunan untuk kabel dan peralatan/ *Buildings, cables and other equipment*	-	941.561	7.005.551	7.946.112	*Buildings, cables and other equipment*
Instalasi dan mesin pembangkit/ *Installation and power plants*	-	-	47.991.310	47.991.310	*Installation and power plants*
Perlengkapan transmisi dan penyaluran/ *Transmission and distribution equipment*	-	-	4.550.845	4.550.845	*Transmission and distribution equipment*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi/ *Telecommunications and data processing equipment*	-	-	3.927	3.927	*Telecommunications and data processing equipment*
Material cadang utama/ *Major spare parts*	-	-	30.784	30.784	*Major spare parts*
Jumlah/ *Total*	-	1.008.240	75.652.567	77.574.707	*Total*

- Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Level 1);
- Input selain harga yang kuotasian dari pasar yang diamatikan pada Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung (yaitu sebagai sebuah harga) atau secara tidak langsung (yaitu sebagai turunan dari harga) (Tingkat 2); dan
- Input untuk aset atau liabilitas yang tidak diobservasi pada data pasar yang dapat diobservasi (informasi yang tidak dapat diobservasi (Tingkat 3).

- *Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (Level 1);*
- *Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (that is, as prices) or indirectly (that is, derived from prices) (Level 2); and*
- *Inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (that is, unobservable inputs) (Level 3).*

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/formerly PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI) DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/30 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

12. ASET TETAP (lanjutan)

12. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (continued)

Tidak terdapat aset tetap yang bisa digolongkan ke dalam nilai wajar Tingkat 1.

There were no fixed assets which could be classified at Level 1 fair value.

Tidak terdapat transfer antara Tingkat 1 dan Tingkat 2 selama tahun berjalan.

There were no transfers between Levels 1 and 2 during the year.

Nilai wajar Tingkat 3 dari tanah dan hak atas tanah dihitung dengan menggunakan pendekatan pasar dan pendekatan pendapatan tergantung dari kondisi tertentu, sedangkan untuk bangunan umum, instalasi dan mesin pembangkitan serta gardu induk menggunakan pendekatan biaya. Input yang diperoleh dari pasar yaitu antara lain:

The Level 3 fair value of land and land rights is calculated using the market approach and income approach depends on certain circumstances, building, installation and power plant, and substation value is calculated using the cost approach. Data inputs were obtained from the market that consists of, among others, the following:

a. Harga jual atau harga sewa per meter persegi;
b. Tingkat hunian;
c. Tingkat pertumbuhan;
d. Tingkat diskonto dan kapitalisasi;
e. Biaya pembuatan baru per meter persegi;
f. Tingkat depresiasi;
g. Biaya operasional;
h. Keuntungan pengembang; dan
i. Indeks Kemahalan Konstruksi.

a. Sale or rental price per square metre;
b. Occupancy rate;
c. Growth rate;
d. Discount and capitalisation rate;
e. Replacement cost new per square metre;
f. Depreciation rate;
g. Operational expense;
h. Developer margin; and
i. Construction Cost Index.

Rekonsiliasi atas saldo awal terhadap saldo akhir dari pengukuran nilai wajar dengan menggunakan informasi signifikan yang tidak dapat diobservasi (Tingkat 3) adalah sebagai berikut:

Reconciliation of the beginning balances to the closing balances of the fair value measurements using significant unobservable inputs (Level 3) is as follows:

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Penyesuaian dilakukan berdasarkan ukuran, kapasitas, usia, lokasi, bentuk dan spesifikasi, hak atas tanah dan elemen perbandingan lainnya.

Adjustments were made based on size, capacity, age, location, shapes and specifications, land rights and other comparison elements.

Nilai wajar Tingkat 3 dihitung dengan menerapkan pendekatan pasar, pendekatan pendapatan, dan pendekatan biaya dengan menggunakan input yang tidak dapat diobservasi.

The Level 3 fair value is calculated through the market approach, income approach, and cost approach by using unobservable inputs.

Selain menggunakan input yang berasal dari pasar, KJPP RHR juga menggunakan input yang tidak dapat diobservasi dari pasar dan menggunakan asumsi khusus terkait dengan jenis aset yang tergolong sebagai properti khusus, seperti pembangkit listrik, jaringan transmisi dan distribusi, gardu induk dan lainnya.

Other than the data inputs observed from the market, KJPP RHR also used unobservable market data inputs and used special assumptions related to the assets classified as specialised property, such as power plants, transmission and distribution networks, substations and others.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/formerly PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI) DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/37 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

13. ASET TETAP (lanjutan)

13. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (continued)

Informasi mengenai pengukuran nilai wajar yang menggunakan informasi signifikan yang tidak dapat diobservasi (Level 3) adalah sebagai berikut:

Information about fair value measurements using significant unobservable inputs (Level 3) are as follows:

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/formerly PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 9/B/ Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

12. ASET TETAP (lanjutan)

Surplus revaluasi, disajikan sebagai bagian penghasilan komprehensif lain, telah dikreditkan pada penghasilan komprehensif lain dan disajikan sebagai surplus revaluasi aset tetap pada laporan perubahan ekuitas konsolidasian.

Selain yang menggunakan model revaluasi, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai wajar aset tetap dengan nilai tercatatnya.

Pergerakan surplus revaluasi aset tetap adalah sebagai berikut:

	2022	2021	
Saldo awal tahun	123,265,155	129,731,288	Balance at beginning of year
Revaluasi aset tetap	-	(5,141,588)	Revaluation of property, plant and equipment
Reklasifikasi surplus revaluasi ke saldo laba atas penghapusan aset tetap digunakan dalam operasi	(7,054)	(2,455)	Reclassification on revaluation surplus from disposals of assets not used in operations
Sub-jumlah	(7,054)	(5,144,043)	Sub-total
Manfaat pajak terkait	-	851,146	Related income tax benefit
Saldo akhir tahun	123,261,134	123,265,155	Balance at end of year

Jika Grup telah menerapkan model revaluasi, nilai tercatat bersih aset tetap pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp20.430.834 dan Rp18.853.043.

12. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (continued)

The revaluation surplus, net of applicable deferred income taxes, was credited to other comprehensive income and presented in property, plant and equipment revaluation surplus in the consolidated statements of changes in equity.

There is no significant difference between the fair value and the carrying value of the property, plant and equipment other than the assets that have applied the revaluation model.

The movements of property, plant and equipment revaluation surplus are as follows:

If the Group did not apply the revaluation model, the net carrying value of the property, plant and equipment as at 31 December 2022 and 2021 would have amounted to Rp20,430,834 and Rp18,853,043 respectively.

Aset dalam pembangunan

Akun ini merupakan biaya-biaya yang telah sehubungan dengan pembangunan dan renovasi pembangkit tenaga listrik, sebagai berikut:

Construction in progress

This account represents the costs that have been incurred in relation to the construction and renovation/repairs of power supply facilities, as follows:

	2022	2021	
Pembangkit tenaga listrik			Power plants
Tenaga gas uap ("PLTGU")	3,482,804	8,227,478	Steam gas power plant ("PLTGU")
Tenaga gas ("PLTG")	24,552	24,552	Gas power plant ("PLTG")
Tenaga air ("PLTA")	33,005	14,662	Hydro power plant ("PLTA")
Tenaga uap ("PLTU")	10,310	62,517	Steam power plant ("PLTU")
Tenaga surya ("PLTS")	-	24,438	Solar power plant ("PLTS")
Fungsi pendukung	91,282	13,218	Supporting function
Jumlah	3,613,953	8,377,268	Total

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/formerly PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 9/Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

12. ASET TETAP (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, jumlah tercatat aset dalam pembangunan Grup adalah sebagai berikut:

12. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (continued)

As at 31 December 2022 and 2021, the carrying amount of the Group's construction in progress was as follows:

Nama Proyek/Project Name	Nilai Tercatat/Carrying Amount 2022	2021
Proyek/Project add-on PLTGU Muara Tawar Blok 2, 3 dan 4	3.331.880	3.131.327
Lainnya/Others	356.109	276.016
Jumlah/Total	3.674.089	3.477.343

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, biaya pinjaman yang kapitalisasi ke aset dalam pembangunan masing-masing sebesar Rp66.333 dan Rp33.997.

As at 31 December 2022 and 2021, the borrowing costs that were capitalized to construction in progress were Rp66.333 and Rp33.997, respectively.

Aset tidak digunakan dalam operasi

Assets not used in operations

Aset tidak digunakan dalam operasi meliputi aset tetap yang yang sementara belum digunakan dalam operasi dan aset yang akan dijualkan.

Assets not used in operations comprised property, plant and equipment temporarily not in use in operations, and those to be rejected.

Berdasarkan penelaahan manajemen, tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap secara signifikan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Based on management's assessment, there were no events or changes in circumstances that may significantly impair the value of the property, plant and equipment as at 31 December 2022 and 2021.

13. PROPERTI INVESTASI

13. INVESTMENT PROPERTIES

	2022					
	Nilai awal/Beginning balance	Penambah/Additions	Pengurangan/Deductions	Reklasifikasi/Reclassifications	Nilai akhir/Ending balance	
Tanah/Land	1.000	-	-	-	1.000	Tanah/Land
	2021					
	Nilai awal/Beginning balance	Penambah/Additions	Pengurangan/Deductions	Reklasifikasi/Reclassifications	Nilai akhir/Ending balance	
Tanah/Land	1.000	-	-	-	1.000	Tanah/Land

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

13. PROPERTI INVESTASI (lanjutan)

Properti investasi merupakan tanah milik Perusahaan yang terletak di Paiton - Jawa Timur, Belawan - Jawa Barat, Pluit - Jakarta Utara, Cipeundeuy - Bandung Barat dan Asahan - Sumatera Utara dengan hak legal berupa HGB dengan jangka waktu dari 22 sampai 42 tahun, jatuh tempo pada 2022, yang diberikan kepada PT PJU (Persero), PT Paiton Energy, PT Jawa Power, PT Perkamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero), PT Anugerah Mega Energi, PT Perkamina Hulu Energi Ofwu, PT Nusantara Regas, PT Cipta Kerya Leasin, BUT Sinohydro Corporation Limited dan PT Bajradaya Sentranusa.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Perusahaan melakukan penilaian kembali atas nilai wajar properti investasi, yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Mulyadin Bambang Purwanto Rosan Usnadun dan Rekan dalam laporan No. 03172/2.0021-00/PI/11/0198/1/IV/2023 tanggal 30 Maret 2023 dan KJPP BHR dalam laporan No. 00113/2.0013-00/PI/05/0008/1/III/2023 tanggal 30 Maret 2023, penilai independen yang telah terdaftar di Kementerian Keuangan dan OJK.

Nilai wajar properti investasi diklasifikasikan sebagai Tingkat 3 dalam hierki nilai wajar.

Nilai wajar Tingkat 3 dari tanah dihitung dengan menggunakan pendekatan pasar dan pendekatan pendapatan. Input yang signifikan dari pendekatan pasar yaitu:

a. Harga jual atau harga sewa per meter persegi;
b. Tingkat hunian;
c. Tingkat pertumbuhan;
d. Tingkat diskonto;
e. Biaya operasional; dan
f. Keuntungan pengembang.

Penyesuaian dilakukan berdasarkan lokasi, bidang, bentuk dan spesifikasi, tanah dan sisa tanah dan elemen perbandingan lainnya.

Grup juga mencatat perubahan nilai wajar yang diakibat sebagai bagian dari penghasilan/(beban) komprehensif dalam laporan laba rugi konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Berdasarkan penilaian manajemen, tidak ada kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset investasi pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

13. INVESTMENT PROPERTIES (continued)

Investment properties pertain to pieces of land that are owned by the Company located in Paiton - East Java, Belawan - West Java, Pluit - North Jakarta, Cipeundeuy - West Bandung and Asahan - North Sumatera with HGB for periods between 22 to 42 years, which will be expired in 2022, which are leased to PT PJU (Persero), PT Paiton Energy, PT Jawa Power, PT Perkamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero), PT Anugerah Mega Energi, PT Perkamina Hulu Energi Ofwu, PT Nusantara Regas, PT Cipta Kerya Leasin, BUT Sinohydro Corporation Limited and PT Bajradaya Sentranusa.

As at 31 December 2022 and 2021, the Company performed a revaluation of the fair value of its investment properties which was performed by Kantor Jasa Penilai Publik Mulyadin Bambang Purwanto Rosan Usnadun and Partners in report No. 03172/2.0021-00/PI/11/0198/1/IV/2023 dated 30 March 2023 and KJPP BHR in report No. 00113/2.0013-00/PI/05/0008/1/III/2023 dated 30 March 2023, independent valuers registered with the Ministry of Finance and OJK.

The fair values of the investment properties are within Level 3 of the fair value hierarchy.

The Level 3 fair value of the land is calculated using the market approach and the income approach. Data inputs were obtained from the market approach that consists of:

a. Sale or rental price per square metre;
b. Occupancy rate;
c. Growth rate;
d. Discount rate;
e. Operational expense; and
f. Developer margin.

Adjustments were made based on size, location, shapes and specifications, land and land rights and other comparison elements.

The Group also recorded the changes in fair value were presented as part of other income/(expenses) - net in the consolidated statements of profit or loss for the years ended 31 December 2022 and 2021.

Based on management's assessment, there are no events or changes in circumstances that indicate any impairment in the value of the investment properties as at 31 December 2022 and 2021.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/formerly PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/61 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)	NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2022 AND 2021 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA / 14. INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURES

Rincian investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama adalah sebagai berikut:

Details of the investments in associates and joint ventures are as follows:

Nama entitas asosiasi dan ventura bersama/ Name of associates and joint ventures	Domisili/ Domicile	Jenis usaha/ Nature of business	Tahun operasi komersial/ Start of commercial operations	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership 2022	2021
Investasi pada entitas asosiasi/ Investments in associates					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	*)	[illegible]	[illegible]
Investasi pada ventura bersama/ Investments in joint ventures					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	*)	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	*)	[illegible]	[illegible]

*) [illegible]

Pergerakan investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama adalah sebagai berikut:

The movements in the investments in associates and joint ventures are as follows:

2022

	Jumlah tercatat 1 Januari/ Carrying amount 1 January 2022	Penambahan/ Additions	Dividen/ Dividends	Bagian atas laba/(rugi)/ Share of profit/(loss)	Bagian atas penghasilan komprehensif lain/ Share of other comprehensive income/(loss)	Jumlah tercatat 31 Desember/ Carrying amount 31 December 2022	
Entitas asosiasi							Associates
[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]
Sub-jumlah	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Subtotal
Ventura bersama							Joint ventures
[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Sub-jumlah	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Subtotal
Jumlah	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Total

2021

	Jumlah tercatat 1 Januari/ Carrying amount 1 January 2021	Penambahan/ Additions	Dividen/ Dividends	Bagian atas laba/(rugi)/ Share of profit/(loss)	Bagian atas penghasilan komprehensif lain/ Share of other comprehensive income/(loss)	Jumlah tercatat 31 Desember/ Carrying amount 31 December 2021	
Entitas asosiasi							Associates
[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]
Sub-jumlah	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	Subtotal

Lampiran 5/62 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan)

Pergerakan investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama adalah sebagai berikut: (lanjutan)

14. INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURES (continued)

The movements in the investments in associates and joint ventures are as follows: (continued)

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Sub-jumlah	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Sub-total
Jumlah	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Total

Seluruh entitas asosiasi dan ventura bersama dicatat oleh Grup dengan menggunakan metode ekuitas. Seluruh entitas adalah entitas tertutup dan tidak terdapat harga pasar yang dikutip yang tersedia untuk sahamnya.

All the associates and joint ventures are recorded by the Group using the equity method. They are private entities and there is no quoted market price available for their shares.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat pembatasan dan risiko signifikan yang terkait dengan investasi pada asosiasi dan ventura bersama.

As at 31 December 2022 and 2021, management believes that there is no significant restriction and risk regarding the investments in associates and joint ventures.

Berikut ini adalah ringkasan informasi keuangan entitas asosiasi dan ventura bersama pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas.

The following tables contain the summarised financial information for the associates and joint ventures as at 31 December 2022 and 2021, that have been accounted for using the equity method.

Entitas asosiasi

Associates

	31 Desember/December 2022				
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Total	
Kas dan setara kas	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Cash and cash equivalents
Aset lancar lainnya (tidak termasuk kas)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Other current assets (excluding cash)
Jumlah aset lancar	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Total current assets
Utang usaha	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Trade payables
Liabilitas lancar lainnya	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Other current liabilities
Jumlah liabilitas jangka pendek	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Total current liabilities
Aset tidak lancar	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Non-current assets
Liabilitas keuangan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Financial liabilities
Liabilitas lainnya	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Other liabilities
Jumlah liabilitas tidak lancar	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Total non-current liabilities
Aset bersih	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Net assets
% kepemilikan	[illegible]	[illegible]	[illegible]		% of ownership
Bagian Grup atas aset bersih asosiasi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	The Group's share of the net assets of associates
Penyesuaian metode ekuitas	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Adjustment of equity method
Jumlah tercatat	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Total carrying value

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/formerly PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI) DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/.. Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2022 AND 2021 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan) / INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURES (continued)

Entitas asosiasi (lanjutan) / Associates (continued)

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Total	
Pendapatan	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	Revenue
Beban pokok pendapatan	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	Cost of revenue
Depresiasi dan amortisasi	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	Depreciation and amortisation
Penghasilan keuangan	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	Finance income
Beban keuangan	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	Finance costs
Beban usaha	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Operating expenses
Penghasilan/(beban) lain-lain	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Other income/(expenses)
Beban/manfaat pajak penghasilan	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	Income tax
Laba tahun berjalan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Profit for the year
% kepemilikan	[illegible]	[illegible]	[illegible]		% ownership
Bagian Grup atas laba bersih	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	The Group's share in net profit
Penghasilan komprehensif lainnya	-	[illegible]	-	[illegible]	Other comprehensive income
Bagian Grup atas penghasilan komprehensif lain		[illegible]		[illegible]	The Group's share of other comprehensive income of associates
Dividen yang diterima	[illegible]			[illegible]	Dividends received from associates

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Total	
Kas dan setara kas	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Cash and cash equivalents
Aset lancar lainnya	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Other current assets
Jumlah aset lancar	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Total current assets
Utang usaha	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	Trade payables
Liabilitas lancar lainnya	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Other current liabilities
Jumlah liabilitas lancar	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Total current liabilities
Aset tidak lancar	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Non-current assets
Liabilitas keuangan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Financial liabilities
Liabilitas lainnya	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	Other liabilities
Jumlah liabilitas tidak lancar	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Total non-current liabilities
Aset bersih	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Net assets
% kepemilikan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	% ownership
Bagian Grup atas aset bersih	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	The Group's share of net assets
Penyesuaian metode ekuitas	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	Adjustment of equity method
Jumlah tercatat	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Total carrying value
Pendapatan	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	Revenue
Beban pokok pendapatan	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	Cost of revenue
Depresiasi dan amortisasi	[illegible]	-	-	[illegible]	Depreciation and amortisation
Penghasilan keuangan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Finance income
Beban keuangan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Finance costs
Beban usaha	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Operating expenses
Penghasilan/(beban) lain-lain	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Other income/(expenses)
Beban pajak penghasilan	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	Income tax expense
Laba tahun berjalan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Profit for the year
% kepemilikan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	% ownership
Bagian Grup atas laba bersih	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	The Group's share in net profit for the year of associates
Penghasilan komprehensif lainnya	-	-	-	-	Other comprehensive income
Bagian Grup atas penghasilan komprehensif lain					The Group's share of other comprehensive income of associates
Dividen yang diterima	[illegible]			[illegible]	Dividends received from associates

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/formerly PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/94 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)	NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2022 AND 2021 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan) / 14. INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURES (continued)

Ventura bersama / Joint ventures

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/formerly PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 9/65 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan)

14. INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURES (continued)

Ventura bersama (lanjutan)

Joint ventures (continued)

	31 Desember/December 2022							
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Investasi pada entitas diatas diperoleh terutama untuk tujuan potensi pertumbuhan jangka panjang, karena seluruh entitas tersebut bergerak dalam industri ketenagalistrikan yang sama dengan industri Grup. Manajemen meyakini bahwa tidak ada risiko penurunan nilai.

The investments in the above entities are held primarily for long-term growth potential, since these entities are engaged in the same electricity industry as the Group. Management believes that there are no indications of impairment.

15. ASET USAHA LANCAR LAIN

15. OTHER NON-CURRENT ASSETS

	2022	2021	
Biaya ditangguhkan	134.227	113.519	Deferred charges
Aset takberwujud			Intangible assets
Piranti lunak	3.008	3.033	Software
Biaya legal terkait perpanjangan hak atas tanah	83.203	48.838	Legal costs for renewal of land rights
Jumlah	220.346	164.834	Total

Amortisasi aset tak berwujud

Beban amortisasi aset takberwujud tahun 2022 dan 2021, masing-masing sebesar Rp27.595 dan Rp23.617 disajikan sebagai bagian dari pendapatan/(beban) lainnya - bersih dalam laporan laba rugi konsolidasian tahun berjalan.

Amortisation of intangible assets

Amortisation of intangible assets in 2022 and 2021, amounted to Rp27,595 and Rp23,617 respectively, and are presented as part of other income/(expense) - net in profit or loss during the years.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember/December 2022 dan/and 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

16. UTANG USAHA / 16. TRADE PAYABLES

Akun ini merupakan liabilities sehubungan dengan pembelian bahan bakar, barang dan jasa sebagai berikut:

This account represents the payables arising from purchases of fuel, goods and services as follows:

	2022	2021	
Pihak ketiga	1.824.267	1.719.716	Third parties
Pihak berelasi (Catatan 31)	472.806	1.341.566	Related parties (Note 31)
Jumlah	2.297.073	3.061.282	Total

Lihat Catatan 31 untuk informasi saldo dan transaksi-transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 31 for the balances and transactions with related parties.

17. UTANG LAIN-LAIN / 17. OTHER PAYABLES

Akun ini merupakan liabilities sehubungan dengan kegiatan diluar usaha sebagai berikut:

This account represents liabilities in connection with non-business activities as follows:

	2022	2021	
Pihak ketiga	455.791	881.802	Third parties
Pihak berelasi (Catatan 31)	299.254	25.347	Related parties (Note 31)
Jumlah	755.045	907.149	Total

Lihat Catatan 31 untuk informasi saldo dan transaksi-transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 31 for the balances and transactions with related parties.

18. LIABILITAS IMBALAN KERJA / 18. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES

	2022	2021	
Program pensiun manfaat pasti	23.611	64.611	Defined benefit pension program
Imbalan pascakerja lainnya	1.182.187	1.080.380	Other post-employment benefits
Imbalan pemeliharaan kesehatan	2.201.808	1.827.002	Health care benefits
Imbalan jangka panjang lainnya	69.695	116.579	Other long-term benefits
Jumlah	3.894.703	3.088.482	Total
Bagian jangka panjang	(3.487.071)	(2.928.330)	Non-current portion
Bagian jangka pendek	206.781	160.172	Current portion
Bonus dan insentif prestasi kerja	699.851	599.980	Bonus and performance incentives
Bagian jangka pendek	706.632	760.152	Current portion

	2022	2021	
Beban diakui di laba rugi (Catatan 28):			Expense recognised in profit or loss (Note 28):
Program pensiun manfaat pasti	5.000	12.000	Defined benefit pension program
Imbalan pascakerja lainnya	117.371	140.729	Other post-employment benefits
Imbalan pemeliharaan kesehatan	185.328	158.318	Health care benefits
Imbalan jangka panjang lainnya	(31.808)	27.694	Other long-term benefits
Jumlah	271.900	350.741	Total

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/formerly PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/67 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember/December 2022 dan/and 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

18. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

18. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

	2022	2021	
Pengukuran kembali program manfaat pasti (beban) di penghasilan komprehensif lain,			Remeasurement on defined benefit plan recognised in other comprehensive income/(loss)
Program pensiun manfaat pasti	35.587	8.467	Defined benefit pension program
Imbalan pascakerja lainnya	(46.277)	(3.031)	Other post-employment benefits
Imbalan pemeliharaan kesehatan	(894.408)	166.979	Health care benefits
Jumlah	(894.508)	172.415	Total

Liabilitas imbalan pascakerja karyawan

Program pensiun manfaat pasti

Grup menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti untuk semua karyawan tetap yang memenuhi syarat. Program pensiun ini memberikan imbalan berdasarkan penghasilan dasar pensiun dan masa kerja karyawan.

Dana pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun PLN ("DP-PLN"), pihak berelasi, yang akta pendirannya telah disetujui oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. KEP-284/KMK.17/1997 tanggal 13 Mei 1997.

DP-PLN telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. KEP-61/KB.1/2016 tanggal 11 Februari 2016 atas peningkatan manfaat pasti pensiun yang disediakan Grup dalam program dana pensiun.

Pendanaan DP-PLN berasal dari iuran karyawan dan pemberi kerja masing-masing sebesar 5,00% dan 17,77% dari penghasilan dasar pensiun.

Imbalan pascakerja lainnya

Selain dari program dana pensiun dan imbalan pemeliharaan kesehatan, Grup menyediakan imbalan pesangon dan penghargaan purna jabatan serta pendanaan bagi pegawai yang memenuhi syarat.

PJBS melakukan pendanaan dana pensiun yang dikelola oleh dana sebesar 4% dari penghasilan dasar.

UKP serta RJL memberikan imbalan pascakerja manfaat pasti serta pendanaan kepada karyawan yang memenuhi syarat sesuai dengan PP.

Entitas lainnya memberikan imbalan pascakerja kepada karyawan sesuai dengan PKB.

Post-employment benefit obligations

Defined benefit pension program

The Group has established a defined benefit pension program covering all of its eligible permanent employees. This plan provides benefits based on the basic pension income and the period of employment.

The pension plan is managed by Dana Pensiun PLN ("DP-PLN"), a related party, whose deed of establishment was approved by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. KEP-284/KMK.17/1997 dated 13 May 1997.

DP-PLN has obtained an approval from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. KEP-61/KB.1/2016 dated 11 February 2016 in relation to the increase in the defined pension benefits that are provided by the Group's pension plan.

DP-PLN is mainly funded by contributions from both the employees and the employer which are 5.00% and 17.77% from the basic pension income, respectively.

Other post-employment benefits

In addition to the pension plan and health care benefits, the Group also provides unfunded severance benefits and completion of employment awards for eligible employees.

PJBS provides a funded pension plan that is managed by local banks at 4% of the basic income.

UKP and RJL provided the unfunded post-employment benefits for their qualifying employees under the CR.

Other entities provided the post-employment benefits for the qualifying employees under the CLA.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/formerly PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran XIII/ Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

18. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Liabilitas imbalan pascakerja karyawan (lanjutan)

Imbalan pemeliharaan kesehatan

Selain program pensiun yang dikelola oleh DPPUN, Grup menyediakan imbalan program kesehatan tanpa pendanaan bagi pensiunan dan tanggungannya yang memenuhi persyaratan.

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Grup memberikan imbalan kerja jangka panjang lainnya berupa uang duka wafat, tunjangan kesehatan purna, bantuan kematian dan pemakaman dan manfaat penghargaan untuk bagi karyawan yang memenuhi persyaratan.

Perhitungan aktuaria atas program pensiun manfaat pasti, imbalan pascakerja lainnya, imbalan pemeliharaan kesehatan dan imbalan kerja jangka panjang lainnya untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, dihitung oleh konsultan aktuaria terdaftar, Kantor Konsultan Aktuaria (YMA) Tubagus Syafrial dan Aman Nanggasan dalam laporannya masing-masing tanggal 28 Maret 2023 dan 24 Maret 2022.

Asumsi aktuaria utama yang digunakan dalam perhitungan liabilitas imbalan kerja:

18. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Post-employment benefit obligations (continued)

Health care benefits

In addition to the pension plan managed by DPPUN, the Group also provides unfunded health care benefit plans for their pensioners and their eligible dependents.

Other long-term benefits

The Group provides other long-term employee benefits such as long service leave, work accident, death and funeral allowances and an eighty-year service awards for the qualifying employees.

The actuarial calculations of the defined benefit pension program, other post-employment benefits, health care benefits and other long-term benefits for the years ended 31 December 2022 and 2021 were calculated by a registered actuarial consulting firm, Kantor Konsultan Aktuaria (YMA) Tubagus Syafrial dan Aman Nanggasan based on its report dated 28 March 2023 and 24 March 2022, respectively.

The principal actuarial assumptions that have been used in the calculations of the employment benefits obligation:

Tabel mortalita	CSO-58	Mortality table
Usia pensiun normal	56 tahun/years old	Normal retirement age

Asumsi yang berhubungan dengan pengalaman mortalitas masa depan didasarkan keberadaan serah aktuaria menurut statistik yang telah diterbitkan dan pengalaman Grup. Asumsi mortalitas yang digunakan adalah tabel mortalita CSO-58 yang diterapkan dalam penghitungan liabilitas kerja jangka panjang yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pada tahun 2022, Grup melakukan studi untuk menilai tabel mortalitas mana yang paling sesuai dengan profil mortalitas pegawai dan pensiunan Grup. Dalam melakukan studi, Grup telah mempertimbangkan CSO-58, SAM-71, Ahli-48, GAM-83, TMI-2011 dan TMI-2019. Dari studi tersebut, Grup memutuskan bahwa tabel mortalitas yang paling sesuai dengan profil mortalitas pegawai dan pensiunan Grup adalah CSO-58.

The assumptions regarding the future mortality experience are based on actuarial advice in accordance with published statistics and experiences by the Group. The mortality assumptions that have been used are based on the CSO-58 mortality table which was applied when calculating the long-term benefits liability recognized within the consolidated statement of financial position.

In 2022, the Group conducted a study to determine which mortality tables best suited most of the Group's employees' and pensioners' mortality profile. In the study, the Group considered CSO-58, SAM-71, Ahli-48, SAM-83, TMI-2011 and TMI-2019. Based on the study, the Group decided that the mortality table that best suited the mortality profile of the Group's employees and pensioners was CSO-58.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/formerly PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran XIII/ Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam Juta Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

18. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Liabilitas imbalan pascakerja karyawan (lanjutan)

Program pensiun manfaat pasti

Jumlah yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian disajikan sebagai berikut:

	2022	2021	
Nilai kini kewajiban yang didanai	543.483	644.874	Present value of funded obligations
Nilai wajar aset program	(353.790)	(450.200)	Fair value of plan assets
Liabilitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian	23.671	94.671	Liability in the consolidated statements of financial position

Pergerakan liabilitas program pensiun manfaat pasti selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

	2022	2021	
Pada awal tahun	644.874	613.880	At beginning of the year
Dibebankan ke laba rugi:			Charged to profit or loss:
Biaya jasa kini	7.810	10.378	Current service cost
Biaya bunga	36.804	31.382	Interest expense
	44.614	41.761	
Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain:			Charged to other comprehensive income:
(Keuntungan)/kerugian dari penyesuaian atas pengalaman	(358)	448	(Gains)/losses from experience adjustments
(Keuntungan)/kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(3.882)	18.311	(Gains)/losses from changes in financial assumptions
Keuntungan aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi demografis	433	-	Gains from changes in demographic assumptions
Keuntungan aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi lainnya	27	-	Gains from changes in other assumptions
	(3.480)	18.737	
Pembayaran manfaat	(34.600)	(32.497)	Benefit payments
Pada akhir tahun	543.483	644.874	At end of the year

18. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Post-employment benefit obligations (continued)

Defined benefit pension program

The amounts recognised in the consolidated statements of financial position were determined as follows:

The movements in the defined benefit pension program obligations during the years were as follows:

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/formerly PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 51b/Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam Juta Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

18. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Liabilitas imbalan pascakerja karyawan (lanjutan)

Program pensiun manfaat pasti (lanjutan)

Pergerakan nilai wajar aset program selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

18. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Post-employment benefit obligations (continued)

Defined benefit pension program (continued)

The movements in the fair value of the plan assets during the years were as follows:

	2022	2021	
Pada awal tahun	460.203	443.491	At beginning of year
Imbalan hasil aset program	33.781	33.888	Return on plan assets
Iuran dari pemberi kerja	13.663	9.290	Contribution from employers
Iuran peserta	3.134	3.137	Contribution from employees
Keuntungan aktuarial yang timbul	33.482	33.334	Recognised actuarial gains
Pembayaran manfaat	(34.400)	(33.497)	Benefit payments
Pada akhir tahun	509.734	490.203	At end of the year

Aset program terdiri dari:

The plan assets comprise the following:

	2022		2021		
	Jumlah/ Total	%	Jumlah/ Total	%	
Instrumen utang	313.994	61.60	331.793	33.66	Debt instruments
Instrumen ekuitas	92.671	18.18	84.208	17.24	Equity instruments
Properti	60.266	11.81	59.207	12.08	Property
Kas dan setara kas	33.734	6.62	23.913	4.77	Cash and cash equivalents
Lain-lain	57.069	8.79	59.888	12.26	Others
Jumlah	509.734	100.00	490.203	100.00	Total

Asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

The principal actuarial assumptions used that were as follows:

	2022	2021	
Tingkat diskonto	7.17%	6.97%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji per tahun	8.00%	8.00%	Salary increase rate per annum

Sensitivitas dari liabilitas program pensiun manfaat pasti terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the defined benefits pension program obligations to changes in the weighted principal assumptions is as follows:

	Perubahan asumsi/ Change in assumption	Dampak atas liabilitas imbalan pasti/ Impact on defined benefit obligation: Kenaikan asumsi/ Increase in assumption	Penurunan asumsi/ Decrease in assumption	
Tingkat diskonto	1%	(13.331)	15.076	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	1%	14.742	(13.233)	Salary increase rate

PT PLN NUSANTARA POWER (formerly PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
DAN ANAK PERUSAHAAN
Lampiran 5/71 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam Juta Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

18. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Liabilitas imbalan pascakerja karyawan (lanjutan)

Imbalan pascakerja lainnya

Jumlah yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian disimulkan sebagai berikut:

	2022	2021	
Nilai kini kewajiban yang didanai	1.287.499	1.101.275	Present value of funded obligations
Nilai wajar aset program	(89.331)	(113.513)	Fair value of plan assets
Liabilitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian	1.198.167	1.087.762	Liability in the consolidated statements of financial position

Pergerakan liabilitas imbalan pascakerja lainnya selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

	2022	2021	
Pada awal tahun	1.101.275	1.086.126	At beginning of the year
Dibebankan ke laba rugi:			Charged to profit or loss:
Biaya jasa kini	71.379	75.887	Current service cost
Biaya bunga	85.936	80.747	Interest expense
Biaya jasa lalu	(56.080)	-	Past service cost
	101.235	156.634	
Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain:			Charged to other comprehensive income:
(Keuntungan)/kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(16.134)	33.004	(Gains)/losses from changes in financial assumptions
Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi demografik	3.459	-	Losses from changes in demographic assumptions
Kerugian/(keuntungan) aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi lainnya	807	(291)	Losses/(gains) from changes in other assumptions
Keuntungan dari penyesuaian atas pengalaman	(16.155)	(22.734)	Gains from experience adjustments
	(28.024)	9.980	
Pembayaran manfaat	(33.112)	(61.146)	Benefit payments
Pada akhir tahun	1.287.499	1.101.275	At end of the year

Pergerakan nilai wajar aset program selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

	2022	2021	
Pada awal tahun	122.515	96.093	At beginning of year
Imbalan hasil aset program	9.864	7.956	Return on plan assets
Iuran dari pemberi kerja	13.788	13.510	Contribution from employers
(Kerugian)/keuntungan aktuarial yang diakui	(13.201)	2.905	Recognised actuarial (losses)/gains
Pembayaran manfaat	(1.615)	-	Benefit payments
Pada akhir tahun	89.331	113.513	At end of the year

18. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Post-employment benefit obligations (continued)

Other post-employment benefits

The amounts recognised in the consolidated statements of financial position were determined as follows:

The movements of the other post-employment benefits obligations during the years were as follows:

The movements in the fair value of the plan assets during the years were as follows:

15. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

15. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Liabilitas imbalan pascakerja karyawan (lanjutan)

Post-employment benefit obligations (continued)

Imbalan pascakerja lainnya (lanjutan)

Other post-employment benefits (continued)

Asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

The principal actuarial assumptions used are as follows:

2022	2021	
Tingkat diskonto	7,13% - 7,48%	7,13% - 7,50%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji per tahun	1,00% - 7,13%	1,00% - 7,13%	Salary increase rate per annum

Sensitivitas dari liabilitas imbalan pascakerja lainnya terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the other post-employment benefits obligations to changes in the weighted principal assumptions is as follows:

		Dampak dari liabilitas / Impact on liabilities	
	Perubahan asumsi / Change in assumption	Kenaikan asumsi / Increase in assumption	Penurunan asumsi / Decrease in assumption
Tingkat diskonto	1%	(17.651)	19.200	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	1%	17.234	(16.033)	Salary increase rate

Imbalan pemeliharaan kesehatan

Health care benefits

Grup memiliki beberapa skema imbalan pemeliharaan kesehatan pascakerja. Metode akuntansi, asumsi dan frekuensi penilaian adalah sama dengan yang digunakan dalam skema pensiun manfaat pasti.

The Group has a number of post-employment health care benefit schemes. The accounting method, assumptions and frequency of the valuations are similar to those used for the defined benefit pension schemes.

Pergerakan liabilitas imbalan pemeliharaan kesehatan selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movements of the health care benefits obligations during the years were as follows:

2022	2021	
Pada awal tahun	1.607.002	1.559.411	At beginning of the year
Dibebankan ke laba rugi:			Charged to profit or loss:
Biaya jasa kini	48.002	50.801	Current service cost
Biaya bunga	116.208	124.815	Interest expense
	164.324	175.616	
Dibebankan ke pengasilan komprehensif lain:			Charged to other comprehensive income:
Kerugian/(keuntungan) aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	5.723	(326.264)	Losses/(gains) from changes in financial assumptions
Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi lainnya	(2.539)	(1.504)	Gains from changes in other assumptions
Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi demografis	617.248	-	Losses from changes in demographic assumptions
Kerugian dari penyesuaian atas pengalaman	33.035	208.779	Losses from experience adjustments
	654.469	(168.273)	
Pembayaran manfaat	(45.722)	(44.868)	Benefit payments
Pada akhir tahun	2.381.906	1.607.002	At end of the year

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/formerly PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/11 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

15. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

15. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Liabilitas imbalan pascakerja karyawan (lanjutan)

Post-employment benefit obligations (continued)

Imbalan pemutusan kesehatan (lanjutan)

Health care benefits (continued)

Asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

The principal actuarial assumptions used that were as follows:

2022	2021	
7,38%	7,60%	Tingkat diskonto / Discount rate
		Tingkat kenaikan biaya kesehatan di masa depan / Future health cost increase rate
5,33%	5,40%	

Sensitivitas dari liabilitas imbalan pemutusan kesehatan terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the health care benefits obligations to changes in the weighted principal assumptions is as follows:

		Dampak atas liabilitas imbalan kesehatan / Impact on health benefits liabilities		
	Perubahan asumsi / Changes in assumption	Kenaikan asumsi / Increase in assumption	Penurunan asumsi / Decrease in assumption	
Tingkat diskonto / Discount rate	1%	(27.771)	34.574	
Tingkat kenaikan biaya kesehatan di masa depan / Future health cost increase rate	1%	34.432	(28.631)	

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Other long-term employee benefits

Pergerakan liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movements of the other long-term employee benefits obligations during the years were as follows:

2022	2021	
118.870	104.788	Pada awal tahun / At beginning of the year
		Dibebankan ke laba rugi: / Charged to profit or loss:
(17.735)	25.246	Biaya jasa kini / Current service cost
5.102	8.815	Biaya bunga / Interest expense
		(Keuntungan)/kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan / (Gains)/losses from changes in financial assumptions
(1.905)	8.148	
		(Keuntungan)/kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi lainnya / (Gains)/losses from changes in other assumptions
(10)	17	
		Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi demografis / Losses from changes in demographic assumptions
215	-	
		Kerugian dari penyesuaian atas pengalaman / Gains from experience adjustments
(5.457)	(5.439)	
(22.830)	37.454	
(22.000)	(23.764)	Pembayaran manfaat / Benefit payments
93.040	118.870	Pada akhir tahun / At end of the year

Asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

The principal actuarial assumptions used that were as follows:

2022	2021	
6,28% - 6,85%	4,62% - 7,38%	Tingkat diskonto / Discount rate
1,12%	1,12%	Tingkat kenaikan gaji per tahun / Salary increase rate per annum

19. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

19. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan)

Other long-term employee benefits (continued)

Sensitivitas dari liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya terhadap perubahan asumsi aktuaria utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the other long-term employee benefits obligations to changes in the weighted principal assumptions were as follows:

		Dampak atas liabilitas imbalan kerja/Impact on liabilities		
	Perubahan asumsi/Change in assumption	Kenaikan asumsi/Increase in assumption	Penurunan asumsi/Decrease in assumption	
Tingkat diskonto	1%	(1.710)	1.917	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	1%	1.920	(1.701)	Salary increase rate

Grup terekspos dengan beberapa risiko melalui program pensiun manfaat pasti dan program kesehatan pascakerja. Risiko yang paling signifikan antara lain sebagai berikut:

The Group is exposed to a number of risks through its defined benefit pension program and post-employment medical plans. The most significant risks are as follows:

Volatilitas aset

Asset volatility

Liabilitas program dihitung menggunakan tingkat diskonto yang merujuk kepada Zero Coupon Bond dari Indonesia Government Securities Yield Curve (IGSYC). Jika imbal hasil aset program lebih rendah, maka akan menghasilkan defisit program.

The plan liabilities are calculated using a discount rate set with reference to Zero Coupon Bond from Indonesia Government Securities Yield Curve (IGSYC). If the plan assets underperform this yield, this will create a deficit.

Investasi didiversifikasi dengan baik, sehingga kinerja buruk satu investasi tidak akan memberikan dampak material bagi seluruh kelompok aset. Program berbasis aset investasi diampaikan pada instrumen utang, meangun Grup juga berinvestasi pada instrumen ekuitas, properti, kas dan setara kas dan lainnya. Grup meyakini bahwa instrumen utang memberikan imbal hasil yang paling baik dalam jangka panjang pada tingkatan risiko yang dapat diterima.

Investments are well-diversified, such that the failure of any single investment would not have a material impact on the overall level of assets. The largest proportion of assets is invested in debt instruments, although the Group also invests in equity instruments, property, cash and cash equivalents and others. The Group believes that debt instruments offer the best returns over the long term with an acceptable level of risk.

Harapan umur hidup

Life expectancy

Sebagian besar dari liabilitas program menyediakan manfaat seumur hidup, sehingga kenaikan harapan umur hidup akan mengakibatkan kenaikan liabilitas program.

The majority of the plans' obligations are to provide lifetime benefits, so the increase in life expectancy will result in an increase in the plans' liabilities.

Rata-rata durasi adalah masing-masing 10,31 tahun untuk program pensiun manfaat pasti, 10,65 - 28,35 tahun untuk imbalan pascakerja lainnya, 15,49 tahun untuk imbalan penghargaan kesetiaan dan 3,89 - 3,79 tahun untuk imbalan jangka panjang lainnya.

The weighted average durations are 10.31 years for defined benefit pension program, 10.65 - 28.35 years for other postemployment benefits, 15.49 years for tenure care benefits, and 3.89 - 3.79 years for other long-term benefits, respectively.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/formerly PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 57/I Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

19. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Manfaat untuk Iuran (lanjutan)

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari imbalan pascakerja dan imbalan lainnya jangka panjang lainnya yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

	Kurang dari 1 tahun/ Less than a year	Antara 1-2 tahun/ Between 1-2 years	Antara 2-5 tahun/ Between 2-5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	Jumlah/ Total	
Program pensiun manfaat pasti/ Defined benefit pension plan	82.311	88.687	114.865	2.123.967	2.413.819	
Imbalan pascakerja lainnya/ Other post-employment benefits	61.743	63.849	187.311	4.334.132	4.747.273	
Imbalan pemeliharaan kesehatan/ Health care benefits	83.439	87.405	249.267	5.382.912	5.803.751	
Imbalan kerja jangka panjang lainnya/ Other long-term benefits	19.211	13.901	30.467	82.791	146.434	
Jumlah/ Total	246.704	193.842	581.910	11.773.802	13.116.277	

Manajemen Grup berpendapat bahwa kebijakan imbalan pascakerja cukup untuk memenuhi semua imbalan yang harus dalam Peraturan Ketenagakerjaan atau PKB atau PP.

Pada tanggal 4 April 2022, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) menerbitkan siaran pers tentang 'Pengembalian Imbalan pada Periode Jasa (PSAK No. 24)' sebagai tanggapan terhadap International Financial Accounting Standard Interpretation Committee Agenda Decision 'International Accounting Standards 19 Employee Benefits – Attributing Benefit to Periods of Service' yang diterbitkan pada Mei 2021. Pada tanggal 31 Desember 2021, dampak perubahan perhitungan tersebut sebesar Rp41.306 (nilai material bagi Grup, oleh karena itu, dampak perubahan tersebut diakui secara keseluruhan dalam laporan keuangan konsolidasian tahun berjalan.

19. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Life scheduling (continued)

The expected maturity analysis of the undiscounted post-employment benefits and other long-term benefits is as follows:

The Group's management is of the opinion that the post-employment benefit obligation is adequate to cover all benefits provided for in the Manpower Regulation or CLA or CR.

On 4 April 2022, the Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (DSAK-IAI) published a press release regarding 'Attributing Benefit to Periods of Service (SFAS No. 24)' in response to the International Financial Accounting Standards Interpretation Committee Agenda Decision 'International Accounting Standard 19 Employee Benefits - Attributing Benefit to Periods of Service, published in May 2021. As at 31 December 2021, the impact of the changes of the calculation of Rp41,306 is not significant to the Group, therefore, the impact of changes is recorded in its entirety in the consolidated financial statements for the current year.

18. MODAL SAHAM

Pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

18. CAPITAL STOCK

The Company's shareholders as at 31 December 2022 and 2021 were as follows:

Pemegang saham	Jumlah saham/ Number of shares	Persentase pemilikan/ Percentage of ownership %	Jumlah modal disetor/ Total paid-up capital	Shareholder
PLN	3.999.999.999	100	3.999.999	PLN
Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero)	1	-	-	Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero)
Jumlah	4.000.000.000	100	4.000.000	Total

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/formerly PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 57b/Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

19. MODAL SAHAM (lanjutan)

Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Perusahaan diharuskan untuk membuat penyisihan cadangan wajib hingga sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Tidak ada batasan waktu untuk membentuk cadangan tersebut. Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Perusahaan belum membentuk cadangan umum sesuai dengan Undang-Undang tersebut.

Berdasarkan Akta Notaris No. 10 Tanggal 30 Desember 2022 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PLN Nusantara Power yang juga mengenai persetujuan dan Validasi hukum dari Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000008.AH.01.02.TAHUN 2022. Dengan pemberitahuan struktur autocolling (Catatan 1b) maka komposisi modal saham Perusahaan yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2023 adalah sebagai berikut:

19. CAPITAL STOCK (continued)

Under Indonesian Limited Company Law, the Company is required to establish a statutory reserve amounting to at least 20% of the Company's subscribed and paid-up capital. There is no time limit on the establishment of this reserve. As at 31 December 2022 and 2021, the Company had not yet established its general reserve in accordance with the Limited Liability Company Law.

Based on Notarial Deed No. 10 dated 30 December 2022 concerning Amendments to the Articles of Association of PT PLN Nusantara Power which obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-0000008.AH.01.02.TAHUN 2022. The impact of associating autocolling structures (Note 1b) on the composition of the Company's share capital effective on 1 January 2023 is as follows:

Pemegang saham	Jumlah saham/ Number of shares	Persentase partisipasi/ Percentage of ownership %	Jumlah modal disetor/ Total paid-up capital	Shareholders
PLN	999,310,467,488	100	49,965,523,374	PLN
Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero)	1	0	0	Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero)
Jumlah	999,310,467,489	100	49,965,523,374	Total

20. DIVIDEN DAN CADANGAN UMUM

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 23 Juni 2022, pemegang saham memberi kuasa kepada pemegang saham mayoritas untuk menetapkan saldo laba, cadangan umum dan tujuan serta dividen atas laba Perusahaan tahun 2021. Berdasarkan surat PLN tanggal 6 September 2022, pembagian dividen untuk tahun buku 2021 ditetapkan sebesar Rp8.810.033 atau Rp888 (nilai penuh) per lembar saham.

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 23 Juni 2021, pemegang saham memberi kuasa kepada pemegang saham mayoritas untuk menetapkan saldo laba, cadangan umum dan tujuan serta dividen atas laba Perusahaan tahun 2020. Berdasarkan surat PLN tanggal 31 Desember 2021, pembagian dividen untuk tahun buku 2020 ditetapkan sebesar Rp1.881.208 atau Rp1.277 (nilai penuh) per lembar saham.

Pada tahun 2022 dan 2021, pembayaran dividen kepada PLN dilakukan dengan pengurangan terhadap pokok utang dan piutang pemegang (Catatan 9 dan 31).

20. DIVIDENDS AND GENERAL RESERVE

Based on the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders dated 23 June 2022, the shareholders granted the authority to the majority shareholder to determine the Company's retained earnings appropriation of general reserves and dividends for the 2021 net income. Based on the letter from PLN dated 6 September 2022, the distribution of dividends for the year 2021 amounted to Rp8,810,033 or Rp888 (full amount) per share.

Based on the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders dated 23 June 2021, the shareholders granted the authority to the majority shareholder to determine the Company's retained earnings appropriation of general reserves and dividends for the 2020 net income. Based on the letter from PLN dated 31 December 2021, the distribution of dividends for the year 2020 amounted to Rp1,881,208 or Rp1,277 (full amount) per share.

In 2022 and 2021, the dividend payments to PLN were made through deduction of the trade receivables from related parties (Notes 9 and 31).

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/formerly PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 51/ Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

21. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Tambahan modal disetor berasal dari nilai pengalihan aset tetap termasuk dana rehabilitasi PLTU Gresik Unit 1 dan 2 (berdasarkan Surat Direktur Utama PLN No. 121/1533/DIR/IT/2001 tanggal 19 Maret 2001) dan material pemeliharaan sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2000 yang diterima dari PLN.

Berdasarkan Akta Notaris No. 101 tanggal 22 Juli 2022, dari Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta, PG menandatangani perjanjian jual beli saham dengan PT PLN Enjiniring ("PLNE") yang merupakan entitas sepengendali, untuk mengakuisisi 125.074.553 lembar saham biasa atau setara dengan 100% kepemilikan atas PIEC dengan mengalihkan 83.411.035 lembar saham biasa atau setara dengan 99,8% kepemilikan atas RIEC. Selisih sebesar Rp34.376 antara nilai pengalihan dan nilai buku bersih yang diterima diakui dalam akun ekuitas sebagai tambahan modal disetor.

21. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

Additional paid-in capital represents the considered property, plant and equipment, including the funds that were provided for the rehabilitation of Gresik PLTU Unit 1 and 2 (based on Letter No. 121/1533/DIR/IT/2001 dated 19 March 2001 from the President Director of PLN), and the maintenance materials from 1998 to 2000 that were received from PLN.

Based on Notarial Deed No. 101 dated 22 July 2022 of Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notary in Jakarta, PG entered into a share sale and purchase agreement with PT PLN Enjiniring ("PLNE") which is an entity under common control, to acquire 125,074,553 shares of common stock or equivalent to 100% ownership in PIEC by transferring 83,411,035 common shares or equivalent to 99.8% ownership in RIEC. The difference of Rp34,376 between the transfer value and the net book value received is recorded in the equity account as additional paid-in capital.

22. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI

22. NON-CONTROLLING INTERESTS

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/formerly PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
UNIT BISNIS ANAK PERUSAHAAN DAN ENTITAS ANAK

Lampiran 57b Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

23. PENJUALAN TENAGA LISTRIK

Akun ini merupakan penjualan tenaga listrik kepada PLN.

Lihat Catatan 31 untuk informasi saldo dan transaksi transaksi dengan pihak berelasi.

23. SALES OF ELECTRICITY

This account represents the sales of electricity to PLN.

Refer to note 31 for the balances and transactions with related parties.

24. PENDAPATAN USAHA LAINNYA

Akun ini merupakan pendapatan jasa pemeliharaan, konstruksi dan lainnya yang diperoleh dari pihak berelasi dan pihak ketiga, dengan rincian sebagai berikut:

24. OTHER OPERATING REVENUE

This account represents the operating revenues from maintenance services, constructions and others, which were obtained from related parties and third parties, with details as follows:

	2022	2021	
Jasa operasi dan pemeliharaan	4.359.714	4.197.387	Operation and maintenance services
Konstruksi	845.101	727.224	Constructions
Lainnya	614.909	181.988	Others
Jumlah	5.819.724	5.106.799	Total

Lihat Catatan 31 untuk informasi saldo dan transaksi transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to note 31 for the balances and transactions with related parties.

25. BEBAN BAHAN BAKAR DAN PELUMAS

25. FUEL AND LUBRICANTS EXPENSES

	2022	2021	
Bahan bakar minyak			Fuel oil
Solar High Speed Diesel (“HSD”)	106.207	1.145.457	High Speed Diesel (“HSD”)
Fuel Marine Oil (“MFO”)	111.113	412.620	Fuel Marine Oil (“MFO”)
Subjumlah	218.320	1.562.077	Sub-total
Bahan bakar non-minyak			Non-oil fuel
Gas alam	9.835.391	10.228.568	Natural gas
Batubara	2.338.606	3.409.639	Coal
Air	319.291	295.028	Water
Biomassa	82.214	-	Biomass
Bahan kimia dan bahan lainnya	36.595	33.533	Chemicals and other materials
Pajak air permukaan	28.274	17.203	Surface water tax
Subjumlah	11.632.729	13.983.947	Sub-total
Minyak pelumas	33.028	24.757	Lubricants
Jumlah	11.850.079	14.572.868	Total

Lihat Catatan 31 untuk informasi saldo dan transaksi transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to note 31 for the balances and transactions with related parties.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/formerly PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
UNIT BISNIS ANAK PERUSAHAAN/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/To Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

26. BEBAN PEMBELIAN TENAGA LISTRIK

Akun ini merupakan biaya pemakaian tenaga listrik dari auxiliary equipment mesin pembangkit.

Lihat Catatan 31 untuk informasi saldo dan transaksi-transaksi dengan pihak berelasi.

26. PURCHASED ELECTRICITY EXPENSES

This account represents the cost of using electricity from auxiliary equipment of generating machineries.

Refer to Note 31 for the balances and transactions with related parties.

27. BEBAN PEMELIHARAAN

Akun ini merupakan beban yang timbul dari pemakaian material pemeliharaan dan jasa borongan untuk keperluan pemeliharaan. Rinciannya adalah sebagai berikut:

27. MAINTENANCE EXPENSES

This account represents the maintenance materials used and the contracted services for maintenance purposes. The details are as follows:

2022	2021	
Jasa borongan	2.813.113	2.740.209	Contracted services
Pemakaian material pemeliharaan	1.389.281	1.386.272	Maintenance materials used
Jumlah	4.202.471	4.126.581	Total

Lihat Catatan 31 untuk informasi saldo dan transaksi-transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 31 for the balances and transactions with related parties.

28. BEBAN KEPEGAWAIAN

28. EMPLOYEE COSTS

2022	2021	
Gaji dan tunjangan	824.102	812.956	Salaries and allowances
Bonus dan insentif karyawan	418.144	448.046	Employee bonus and incentives
Imbalan kerja (Catatan 15)	271.200	260.105	Employee benefits (Note 15)
Tunjangan kesehatan	139.405	93.267	Medical allowances
Pendidikan dan pelatihan	77.350	34.373	Education and trainings
Lainnya	34.026	21.103	Others
Jumlah	1.811.389	1.799.450	Total

29. BEBAN USAHA LAIN-LAIN

29. OTHER OPERATING EXPENSES

2022	2021	
Beban konstruksi	732.557	595.759	Construction cost
Honorarium	106.303	83.126	Honorarium
Asuransi (Catatan 31)	83.834	84.003	Insurance (Note 31)
Perjalanan dinas	40.365	15.348	Business traveling
Pajak dan retribusi lainnya	31.513	28.130	Taxes and other retribution
Pajak final	28.871	28.489	Final tax
Sewa bangunan dan tanah	22.357	24.171	Building and land rental
Konsumsi	20.907	19.007	Meals consumption
Jasa profesional	17.149	17.381	Professional fees
Pos dan telekomunikasi	11.540	12.331	Postage and telecommunications
Listrik, gas dan air	11.671	11.479	Electricity, gas and water
Lainnya	77.380	80.561	Others
Jumlah	1.348.797	924.982	Total

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/formerly PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 9/30 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

30. PERPAJAKAN / 30. TAXATION

a. Pajak dibayar di muka / a. Prepaid taxes

	2022	2021	
Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan)			Corporate Income Taxes (CIT)
2022	180.248	-	2022
2021	288.319	288.319	2021
2020	19.555	260.045	2020
Pembayaran dimuka atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar	128.533	288.127	Prepayment of Tax Assessment Letter for Underpayment
PPN	324.132	609.316	VAT
Jumlah	940.945	1.507.405	Total
Dikurangi: bagian lancar	(521.465)	(758.187)	Less: current portion
Bagian tidak lancar	399.479	749.218	Non-current portion

b. Utang pajak lainnya / b. Other taxes payable

	2022	2021	
Pajak lainnya			Other income taxes
Pasal 21	33.191	18.917	Article 21
Pasal 23	9.253	11.565	Article 23
Pasal 25	8.894	8.780	Article 25
Pasal 4 (2)	53.851	35.534	Article 4 (2)
PPN	12.841	33.313	VAT
Lainnya	858	432	Others
Jumlah	121.888	108.139	Total

c. Beban pajak penghasilan / c. Income tax expense

	2022	2021	
Beban pajak kini			Current tax
Perusahaan			The Company
Tahun berjalan	-	-	Current year
Entitas anak			Subsidiaries
Tahun berjalan	121.291	65.700	Current year
Tahun sebelumnya (Catatan 30a)	-	5.638	Prior year (Note 30a)
Sub-jumlah	121.291	71.338	Sub-total

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/formerly PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 9.b/ Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

30. PERPAJAKAN (lanjutan)

30. TAXATION (continued)

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

c. Income tax expense (continued)

	2022	2021	
Beban (manfaat) pajak tangguhan			Deferred tax expense/(benefit)
Perusahaan	1,210,184	1,234,788	The Company
Entitas anak	(9,215)	5,150	Subsidiaries
Sub-jumlah	1,201,848	1,200,518	Sub-total
Beban pajak penghasilan konsolidasian	1,423,697	1,371,852	Consolidated income tax expense

Pajak atas laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian berbeda dengan jumlah teoritis yang timbul menggunakan rata-rata tertimbang tarif pajak yang berlaku atas laba masing-masing entitas anak yang dikonsolidasi sebagai berikut:

The tax on consolidated profit before income tax differs from the theoretical amount that would arise using the weighted average tax rate applicable to profits of the consolidated subsidiaries as follows:

	2022	2021	
Laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian	8,008,882	7,192,040	Consolidated profit before income tax
Beban pajak dengan tarif pajak yang berlaku 22%	1,761,445	1,582,249	Tax expense at prevailing tax rate of 22%
Penghasilan keuangan telah dikenakan pajak final	(21,595)	(41,482)	Finance income subject to final tax
Penghasilan lain-lain dalam eliminasi	(540,515)	(515,872)	Other non-deductible income
Rugi pajak tangguhan yang tidak diakui	223,702	221,950	Unrecognized deferred tax assets
Penyesuaian perubahan tarif pajak	-	25,011	Adjustments due to changes in tax rate
Beban pajak penghasilan konsolidasian	1,423,697	1,371,852	Consolidated income tax expense

Rugi pajak perusahaan yang dibawa ke depan yang masih dapat dikompensasikan dengan penghasilan kena pajak di masa depan untuk jangka waktu lima tahun dan periode di mana kerugian itu terjadi pada tanggal kedaluwarsa adalah sebagai berikut:

Tax losses carried-forward that can still be offset against future taxable income for a period of five years from the period in which the loss was incurred, with expiration dates as follows:

Tahun pajak / Fiscal year	Tanggal kedaluwarsa / Expiry year	Saldo / Balance
2021	2026	1,483,150
2022	2027	1,428,897
Jumlah/Total		2,912,047

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/formerly PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 59/Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

38. PERPAJAKAN (lanjutan)

38. TAXATION (continued)

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

c. Income tax expense (continued)

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan.

The taxable income resulting from the reconciliation will become the basis for filing the Annual Corporate Income Tax Return.

Pajak penghasilan sehubungan dengan penghasilan komprehensif lain selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The income tax relating to other comprehensive income during the year is as follows:

	2022			2021		
	Sebelum pajak/ Before tax	Manfaat (beban) pajak/ Tax benefit (expense)	Setelah pajak/ After tax	Sebelum pajak/ Before tax	Manfaat (beban) pajak/ Tax benefit (expense)	Setelah pajak/ After tax
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	28.208	(7.617)	20.591	(8.771)	2.632	(6.139)
Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama/Share of other comprehensive income of associates and joint ventures	(1.661)	-	(1.661)	(2.128.881)	468.354	(1.660.527)
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan/Exchange differences on translation of financial statements	30.869	-	30.869	2.469	-	2.469
Lainnya	57.416	(7.617)	49.799	(2.135.183)	470.986	(1.664.197)

d. Aset tangguhan

d. Deferred tax

Pergerakan pajak tangguhan Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

The movements in the Group's deferred tax for the years ended 31 December 2022 and 2021 are as follows:

	1 Januari 2022/ January 1, 2022	Manfaat (beban) pajak/ Tax benefit (expense)	Manfaat (beban) pajak yang dibebankan langsung ke penghasilan komprehensif lain/ Tax benefit (expense) charged to other comprehensive income	Manfaat (beban) pajak yang dibebankan langsung ke saldo laba/ Tax benefit (expense) charged to retained earnings	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Aset (liabilitas) pajak tangguhan:						Deferred tax assets (liabilities):
Penyisihan:						Provisions:
Liabilitas imbalan kerja	63.643	30.351	(3.717)	-	70.559	Employee benefit liabilities
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	62.139	3.331	-	-	65.470	Long-term employee benefit liabilities
Aset tetap	2.135	484	-	-	2.619	Fixed assets
Aset tetap - penilaian wajar	2.135	484	-	-	2.619	Fixed assets - fair value
Aset tetap - penyusutan dan pelunasan	2.758	440	-	-	3.198	Fixed assets - depreciation and amortization
Net	(1.161)	(88.777)	-	(88.453)	(178.391)	Property, plant and equipment
Rekonsiliasi	-	(53.187)	(3.717)	(88.453)	-	Reconciliation

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/formerly PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/61 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

33. PERPAJAKAN (lanjutan)

33. TAXATION (continued)

d. Pajak tangguhan (lanjutan)

d. Deferred tax (continued)

	31 Desember/December 2020	Dibebankan/(dikreditkan) ke laba rugi/Charged/(credited) to profit or loss	Dibebankan/(dikreditkan) ke penghasilan komprehensif lain/Charged/(credited) to other comprehensive income	Reklasifikasi/Reclassification	31 Desember/December 2021	
Aset/(liabilitas) pajak tangguhan (bersih)						Deferred tax asset/(liability) (net)
Aset pajak tangguhan						Deferred tax assets
Liabilitas imbalan kerja	1.737	2.142	1.571	-	11.121	Employee benefit liabilities
Liabilitas imbalan pasca kerja	11.833	(1.477)	-	-	11.833	Post-employment benefit liabilities
Aset tetap						Fixed assets
Penyusutan aset tetap	1.737	2.142	1.571	-	11.121	Depreciation of fixed assets
Aset tetap	11.833	(1.477)	-	-	11.833	Fixed assets
Aset tetap	1.737	2.142	1.571	-	11.121	Property, plant and equipment
Aset pajak tangguhan	1.737	2.142	1.571	-	11.121	Deferred tax assets
Aset/(liabilitas) pajak tangguhan (bersih)						Total of deferred tax assets/(liabilities) - net
Beban pajak tangguhan						Deferred tax expense

Aset/(liabilitas) pajak tangguhan (bersih)								Deferred tax asset/(liability) (net)
Aset pajak tangguhan								Deferred tax assets
Liabilitas imbalan kerja								Employee benefit liabilities
Liabilitas imbalan pasca kerja								Post-employment benefit liabilities
Aset tetap								Fixed assets
Penyusutan aset tetap								Depreciation of fixed assets
Aset tetap								Property, plant and equipment
Aset pajak tangguhan								Deferred tax assets
Aset/(liabilitas) pajak tangguhan (bersih)								Total of deferred tax assets/(liabilities) - net
Beban pajak tangguhan								Deferred tax expense

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

20. PERPAJAKAN (lanjutan)

20. TAXATION (continued)

d. Pajak tangguhan (lanjutan)

d. Deferred tax (continued)

Analisis liabilitas pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

The analysis of deferred tax liabilities is as follows:

	2022	2021	
Liabilitas pajak tangguhan yang akan diselesaikan dalam 12 bulan	126.393	125.024	Deferred tax liabilities to be settled within 12 months
Liabilitas pajak tangguhan yang akan diselesaikan setelah 12 bulan	(2.379.131)	(1.197.400)	Deferred tax liabilities to be settled after 12 months
Total	(2.252.738)	(1.072.376)	Total

Rugi pajak dapat dikompensasikan dengan laba pajak pada masa lima tahun mendatang sejak tanggal pajak terkait. Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Perusahaan tidak mengakui aset pajak tangguhan dari rugi pajak karena manajemen mempertimbangkan bahwa tanggal pajak tidak dapat dikompensasikan dengan laba pajak di masa mendatang.

The tax loss can be compensated against taxable income for a period of five years subsequent to the year in which the tax loss was incurred. As at 31 December 2022 and 2021, the Company does not recognise deferred tax assets from tax losses due to management believing that it is probable that future taxable profits will not be able to fully offset tax losses.

e. Surat ketetapan pajak

e. Tax assessment letters

Perusahaan

The Company

Jenis pajak/Tax type	Tahun pajak/ Fiscal year	2022	2021	Status
PPh 23/Income Tax art 23	2016	-	307.089	Permohonan kembali/Refund review
PPh 23/Income Tax art 23	2017	7.793	173.833	Permohonan kembali/Refund review
PPh 23/Income Tax art 23	2018	163.809	163.809	Banding/Appeal
PPh 23/Income Tax art 23	2019	184.772	184.772	Banding/Appeal
Jumlah		356.384	778.707	Total
Provisi		(143.109)	(340.040)	Provision
Jumlah, bersih		213.333	388.727	Total, net

Pada tahun 2022, Perusahaan telah menerima pengembalian atas kurang bayar PPh 23 tahun 2016 dan 2017 masing-masing sebesar Rp307.089 dan 143.109. Sisa pengembalian sebesar Rp21.946 dihapuskan dari provisi.

In 2022, the Company received a refund of underpayment income tax art 23 for 2016 and 2017 amounting to Rp307.089 and Rp143.109, respectively. Remaining balance amounting to Rp21.946 is written off against provision.

Pada tanggal 28 April 2022, Perusahaan menerima SKPLB atas PPN bulan Desember 2020 sebesar Rp686.964 yang telah diterima oleh Perusahaan pada Mei 2022.

On 28 April 2022, the Company received a SKPLB for its VAT of December 2020 amounting to Rp686.964 which was received by the Public in May 2022.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/formerly PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 6/Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

30. PERPAJAKAN (lanjutan)

a. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

PJBB

Pada tanggal 25 Januari 2023, PJBB menerima SKPLB atas PPN bulan Desember 2021 sebesar Rp39.091. Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini diterbitkan, PJBB belum menerima pengembalian lebih bayar dari Kantor Pajak.

Pada tanggal 21 Desember 2021, PJBB menerima SKPLB atas PPN bulan Desember 2020 sebesar Rp21.747 yang telah diterima PJBB pada bulan Mei 2021. Kelebihan bayar pajak tersebut telah diterima oleh PJBB pada tahun 2022.

Pada tanggal 20 Desember 2021, PJBB menerima SKPKB atas Pajak Penghasilan Badan tahun 2016 sebesar Rp5.620 yang telah diterima PJBB pada bulan Desember 2021. PJBB telah mengakui seluruh kekurangan pembayaran pajak tersebut sebagai bagian dari beban pajak penghasilan pada laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Pada tanggal 10 Mei 2021, PJBB menerima SKPLB atas PPN bulan Desember 2019 sebesar Rp100.878 yang telah diterima PJBB pada bulan Mei 2021. Kelebihan bayar pajak tersebut telah diterima oleh PJBB pada tahun 2021.

RE

Pada bulan 23 Mei, 12 Juli dan 19 September 2022, RE menerima SKPLB atas PPN bulan Mei 2020 sampai Maret 2021 sebesar Rp88.736. Kelebihan bayar pajak tersebut telah diterima oleh RE pada tahun 2022.

Pada bulan 3 Mei dan 7 Juni 2021, RE menerima SKPLB atas PPN bulan Januari 2016 sampai April 2020 sebesar Rp136.910. Kelebihan bayar pajak tersebut telah diterima oleh RE pada tahun 2021.

PJNSC

Pada bulan 29 Juni 2022, PJNSC menerima SKPLB atas PPN bulan Juli 2018 sampai Desember 2020 sebesar Rp70.510. Kelebihan bayar pajak tersebut telah diterima oleh PJNSC pada tahun 2022.

30. TAXATION (continued)

a. Tax assessment letters (continued)

PJBB

On 25 January 2023, PJBB received a SKPLB for its VAT of December 2021 amounting to Rp39,091. As at the completion date of these consolidated financial statements, PJBB has not received the refund of overpayment from Tax Office.

On 21 December 2021, PJBB received a SKPLB for its VAT of December 2020 amounting to Rp21,747 which was received by the PJBB in May 2021. These overpayment tax has been received by PJBB in 2022.

On 20 December 2021, PJBB received a SKPKB for its 2016 corporate income tax amounting to Rp5,620 which was received by PJBB in December 2021. PJBB has recognised all the underpayment tax as part of income tax expense in the statement of profit or loss for the year ended 31 December 2021.

On 10 May 2021, PJBB received a SKPLB for its VAT of December 2019 amounting to Rp100,878 which was received by the PJBB in May 2021. These overpayment tax has been received by PJBB in 2021.

RE

On 23 May, 12 July and 19 September 2022, RE received a SKPLB for its VAT of May 2020 until March 2021 amounting to Rp88,736. These overpayment tax has been received by RE in 2022.

On 3 May and 7 June 2021, RE received a SKPLB for its VAT of January 2016 until April 2020 amounting to Rp136,910. These overpayment tax has been received by RE in 2021.

PJNSC

On 29 June 2022, PJNSC received a SKPLB for its VAT of July 2018 until December 2020 amounting to Rp70,510. These overpayment tax has been received by PJNSC in 2022.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 December 2022 and 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

38. PERPAJAKAN (lanjutan)

a. Administrasi

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, perusahaan-perusahaan di dalam Grup yang berdomisili di Indonesia menghitung dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah pajak dalam batas waktu lima tahun sejak terutangnya pajak.

b. Tarif pajak

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("UU HPP") telah disahkan. UU HPP mengatapkan tarif pajak penghasilan badan bagi Wajib Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap dan tahun pajak 2022 tetap sebesar 22%.

38. TAXATION (continued)

a. Administration

Under the Taxation Laws of Indonesia, companies within the Group which are domiciled in Indonesia calculate and pay tax on the basis of self assessment. The Directorate General of Taxes ("DGT") may assess or amend taxes within the years of the time the tax becomes due.

b. Tax rate

On 29 October 2021, Law No. 7 Year 2021 on Harmonization of Tax Regulations (the "HPP Law") was issued. The HPP Law stipulates that the corporate income tax rate for Corporate Tax Payers and Permanent Establishments from fiscal year 2022 remains at 22%.

31. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Sifat hubungan berelasi

Berikut ini adalah daftar pihak berelasi yang memiliki transaksi dengan Grup:

31. THE BALANCE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Nature of related parties

Below is the list of the related parties that engage in transactions with the Group:

Pihak yang berelasi / Related parties	Sifat hubungan / Nature of relationship	Sifat transaksi / Nature of transaction
[illegible]	Pengendali akhir melalui Pemerintah Republik Indonesia / Ultimate controlling party through the Government of the Republic of Indonesia	Pembangkitan uap dan listrik / Steam and electricity generation
[illegible]	Pengendali akhir melalui Pemerintah Republik Indonesia / Ultimate controlling party through the Government of the Republic of Indonesia	Pembangkitan uap dan listrik / Steam and electricity generation
[illegible]	Pengendali akhir melalui Pemerintah Republik Indonesia / Ultimate controlling party through the Government of the Republic of Indonesia	Pembangkitan uap dan listrik / Steam and electricity generation
[illegible]	Pengendali akhir melalui Pemerintah Republik Indonesia / Ultimate controlling party through the Government of the Republic of Indonesia	Pembangkitan uap dan listrik / Steam and electricity generation
PT Perusahaan Pengelola [illegible]	Pengendali akhir melalui Pemerintah Republik Indonesia / Ultimate controlling party through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pemakaian bahan baku dan komponen pembantu / Purchase of raw and auxiliary materials
PT Perusahaan Gas Negara Tbk. ("PGN")	Pengendali akhir melalui Pemerintah Republik Indonesia / Ultimate controlling party through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pemakaian bahan bakar gas / Purchase of gas fuel

(*) PLN NUSANTARA POWER (dahulu/formerly (*) PERBANUSTIAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 9/37 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

31. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

31. THE BALANCE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Sifat hubungan berelasi (lanjutan)

Nature of related parties (continued)

Berikut ini adalah daftar pihak berelasi yang memiliki transaksi dengan Grup: (lanjutan)

Below is the list of the related parties that engage in transactions with the Group: (continued)

Pihak berelasi / Related parties	Sifat hubungan / Nature of relationship	Sifat transaksi / Nature of transaction
PT Indonesia Power (IP)	Pengendali utama/ Parent Perusahaan Republik Indonesia/ Ultimate Controlling Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian aset/ Purchase of assets
PT Supermarket Company of Indonesia Persero) ("SupFinal")	Pengendali utama/ Parent Perusahaan Republik Indonesia/ Ultimate Controlling Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pekerjaan teknik, survei dan pengukuran lainnya/ Engineering services, survey and land measurement
PT Indonesia Asset Management (Persero) (IAM)	Pengendali utama/ Parent Perusahaan Republik Indonesia/ Ultimate Controlling Government of the Republic of Indonesia	Jaminan hasrat dan modal pemerintah/ dan pelanggan nasional/ Insurance and risks to investment and power plant and infrastructure equipment
Perum Jasa Tirta I (Jasa Tirta I)	Pengendali utama/ Parent Perusahaan Republik Indonesia/ Ultimate Controlling Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian air/ Purchase of water
PT KJU (Persero)	Entitas induk perusahaan/ Controlling parent entity	Transaksi pembelian energi listrik/ Sales of electricity
Yayasan Pensiunan dan Kesejahteraan PT KJU (Persero)	Pengelola dana pensiun/ Pension fund manager	Pengelolaan dana/ Admin charge
KIE	Entitas asosiasi/ Entity under common control	Transaksi pembelian barang dan jasa/ Sales of goods and services
PT KJU Bayan (KJU Bayan)	Entitas asosiasi/ Entity under common control	Transaksi pembelian barang dan jasa/ Sales of goods and services
PT KJU Borneo (KJUBE)	Entitas asosiasi/ Entity under common control	Transaksi pembelian energi listrik/ Purchase of fuel
PT Nusantara Power (NP)	Entitas asosiasi/ Entity under common control	Transaksi pembelian barang dan jasa/ Purchase of goods and services
PT Indonesia Services Prima (ISP)	Entitas asosiasi/ Entity under common control	Transaksi pembelian barang dan jasa/ Purchase of goods and services
PJSB	Entitas asosiasi/ Entity under common control	Transaksi pembelian barang dan jasa/ Purchase of goods and services
PT KJU Tanjung (KJU Tanjung)	Entitas asosiasi/ Entity under common control	Transaksi pembelian barang dan jasa/ Purchase of goods and services
PT Energy Management Indonesia (Persero) (EMI)	Entitas asosiasi/ Entity under common control	Transaksi pembelian barang dan jasa/ Purchase of goods and services
PT Pembangkitan Jawa Tengah Investasi (PJBTI)	Entitas asosiasi/ Entity under common control	Transaksi pembelian barang dan jasa/ Purchase of goods and services
PT Pelayaran Bahtera Adiguna (BAE)	Entitas asosiasi/ Entity under common control	Jasa pengangkutan laut dan transportasi/ Sea transport services
Lainnya	Pihak berelasi lainnya/ Other related parties	Transaksi pengadaan dan pembangunan aset dan transaksi lain/ Acquisition and construction of power equipment
BPP	Entitas asosiasi/ Associate	Jasa konsultasi dan pemeliharaan/ Operation and maintenance services
PJBI	Entitas asosiasi/ Associate	Transaksi jasa operasi/ Project services
PJBSI	Entitas dikendalikan oleh entitas induk/ Entity under common control	Jasa konsultasi dan pemeliharaan/ Operation and maintenance services
JP	Entitas dikendalikan oleh entitas induk/ Entity under common control	Jasa konsultasi dan pemeliharaan/ Operation and maintenance services
KOPKA	Entitas dikendalikan oleh entitas induk/ Entity under common control	Pinjaman kepada karyawan anggota/ Asset transfer from joint venture
PKSB	Entitas dikendalikan oleh entitas induk/ Entity under common control	Pinjaman kepada karyawan anggota/ Asset transfer from joint venture

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/formerly PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 9/30 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

31. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

31. THE BALANCE AND TRANSACTIONS with RELATED PARTIES (continued)

Sifat hubungan berelasi (lanjutan)

Nature of related parties (continued)

Berikut ini adalah daftar pihak berelasi yang memiliki transaksi dengan Grup: (lanjutan)

Below is the list of the related parties that engage in transactions with the Group: (continued)

Pihak yang berelasi / Related parties	Sifat hubungan / Nature of relationship	Sifat transaksi / Nature of transactions
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi

The balances and transactions with related parties

	2022	2021	
Kas dan setara kas (Catatan 6)			Cash and cash equivalents (Note 6)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Bank Mandiri	[illegible]	[illegible]	Bank Mandiri
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Jumlah	[illegible]	[illegible]	Total
Deposito berjangka (Catatan 7)			Time deposits (Note 7)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Bank Mandiri	[illegible]	[illegible]	Bank Mandiri
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Jumlah	[illegible]	[illegible]	Total
Saldo kas di bank dan deposito berjangka (Catatan 6 dan 7)			Restricted cash in banks and time deposits (Note 6 and 7)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Bank Mandiri	[illegible]	[illegible]	Bank Mandiri
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Jumlah	[illegible]	[illegible]	Total
Piutang usaha (Catatan 8)			Trade receivables (Note 8)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Lainnya	[illegible]	[illegible]	Others
Jumlah	[illegible]	[illegible]	Total
Piutang lainnya			Other receivables
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Jumlah	[illegible]	[illegible]	Total

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/formerly PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran XXI/ Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

31. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

31. THE BALANCE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

The balances and transactions with related parties (continued)

	2022	2021	
Piutang lepasan sewa bersama (Catatan 10)			Receivables from joint ventures (Note 10)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Total	[illegible]	[illegible]	Total
Utang usaha (Catatan 15)			Trade payables (Note 15)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Total	[illegible]	[illegible]	Total
Utang lain-lain (Catatan 17)			Other payables (Note 17)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Total	[illegible]	[illegible]	Total
Pinjaman dari pemegang saham (Catatan 21k)			Loans from a shareholder (Note 21k)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pendapatan tenaga listrik (Catatan 32)			Sales of electricity (Note 32)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pendapatan usaha lainnya			Other operating revenue
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Total	[illegible]	[illegible]	Total
Pembelian tenaga listrik (Catatan 33)			Purchased electricity (Note 33)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Beban bahan bakar dan pelumas			Fuel and lubricants expenses
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Total	[illegible]	[illegible]	Total
Beban pemeliharaan			Maintenance expenses
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Total	[illegible]	[illegible]	Total
Beban usaha lainnya (Catatan 34)			Other operating expenses (Note 34)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Total	[illegible]	[illegible]	Total

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

31. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

31. THE NATURE OF THE RELATIONSHIPS AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

a. Pinjaman dari pemegang saham

Pada tanggal 20 Maret 2018, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman dengan PLN sebesar AS$500.000.000 dengan tingkat bunga tahunan LIBOR USD enam bulan ditambah margin 0,95%. Pinjaman ini digunakan untuk mendanai proyek add-on PLTGU Muara Tawar Blok 2, 3 dan 4. Jangka waktu perjanjian efektif sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan akan berakhir pada tanggal 9 Mei 2032.

Saldo pinjaman ini pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar masing-masing Rp2.887.080 (setara dengan AS$171.084.841) dan Rp3.417.200 (setara dengan AS$169.402.460), dengan porsi jangka pendek masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp291.080 dan Rp233.919.

a. Loans from a shareholder

On 20 March 2018, the Company entered into a loan agreement with PLN amounted to US$500,000,000 with an annual interest rate of LIBOR USD six-month with 0.95% margin. The loan will be used to fund the add-on projects of PLTGU Muara Tawar Block 2, 3 and 4. The terms of the agreement is effective since the loan is signed and will be expired on 9 May 2032.

The outstanding balances of this loan as at 31 December 2022 and 2021 amounted to Rp2,887,080 (equivalent to US$171,084,841) and Rp3,417,200 (equivalent to US$169,402,460), respectively. With the current portion as at 31 December 2022 and 2021 amounted to Rp291,080 and Rp233,919, respectively.

b. Kompensasi manajemen kunci

Jumlah kompensasi Dewan Komisaris Perusahaan untuk tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp15.977 dan Rp10.140.

Jumlah kompensasi Direksi Perusahaan untuk tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp35.035 dan Rp24.287.

Seluruh kompensasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan merupakan imbalan kerja jangka pendek.

b. Key management compensation

The total remuneration of the Company's Board of Commissioners in 2022 and 2021 amounted to Rp15,977 and Rp10,140, respectively.

The total remuneration of the Company's Directors in 2022 and 2021 amounted to Rp35,035 and Rp24,287, respectively.

All of the compensation to the Company's Boards of Commissioners and Directors are short-term employee benefits.

32. PERJANJIAN DAN KONTINJENSI

Pada tanggal 31 Desember 2022, Grup memiliki perikatan penting dan kontinjensi sebagai berikut:

32. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

As at 31 December 2022, the Group had significant commitments and contingencies as follows:

a. Perjanjian Pengadaan Bahan Bakar

a. Fuel Supply Agreements

i. Batubara

i. Coal

Pemasok/Supplier	Jangka Waktu Perjanjian/Agreement Term	Batasan Volume/Volume Limitation	Jumlah/Quantity	Periode/Period
PT PLN Batubara	5 (lima) tahun/years	Take or pay	Sesuai kebutuhan	Jan 2022 - Des 2026
PT Cahaya Energi Sejati	3 (tiga) tahun/years	Take or pay	5.400.000	Jan 2022 - Des 2024
PT Lahai Energi Jaya	3 (tiga) tahun/years	Take or pay	1.800.000	Jan 2022 - Des 2024
PT Bara Tabang	3 (tiga) tahun/years	Take or pay	1.800.000	Jan 2022 - Des 2024
PT Bukit Baiduri Energi (Indonesia)	3 (tiga) tahun/years	Take or pay	450.000	Jan 2022 - Des 2024
PT Anugrah Bara Kaltim	3 (tiga) tahun/years	Take or pay	90.000	Jan 2022 - Des 2024
PT Borneo Indo Bara	3 (tiga) tahun/years	Take or pay	180.000	Jan 2022 - Des 2024

* Belum ada kesepakatan/Not yet agreed

** Sesuai kuota DMO/As per DMO quota

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/formerly PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 9/1/ Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember/ 2022 dan/ 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

32. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

a. Perjanjian Pengadaan Bahan Bakar (lanjutan)

i. Batubara (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2021, Direktur Jenderal Minerai dan Batubara untuk dan atas nama Menteri ESDM menerbitkan surat No. B-1605/MB.050/B.B/2021 ("Surat B-1605") yang antara lain mengatur bahwa seluruh pemegang PKP2B, IUP, IUPK Operasi Produksi, IUPK Kelanjutan Operasi Perjanjian Operasi, dan pemegang ijin Pengangkutan dan Penjualan Batubara (a) dilarang melakukan penjualan batubara ke luar negeri sejak tanggal 1 sampai dengan 31 Januari 2022, (b) wajib memasok seluruh produksi batubarenya untuk memenuhi kebutuhan dalam untuk kepentingan umum sesuai kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri ("DMO") dan/atau penugasan dari Pemerintah kepada perusahaan tersebut, kontrak dengan PLN dan Independent Power Producer ("IPP"); dan (c) dalam hal sudah tersedia batubara di pelabuhan muat dan/atau telah dimuat di kapal, harus segera dikirim ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap ("PLTU") milik Grup PLN dan IPP yang pelaksanaannya agar segera disesuaikan dengan PLN. Dalam Surat B-1605 juga tercatat informasi bahwa terangan ekspor batubara akan dievaluasi dan dirinjau berdasarkan realisasi pasokan batubara untuk pembangkit listrik tenaga batubara PLN dan IPP.

Pada tanggal 19 Januari 2022, KESDM mengeluarkan Kejutusan Menteri No. 13.K/HK.02/MEM.B/2022 yang mengatur tentang pedoman pengenaan sanksi administrasi, larangan ekspor batubara, pengenaan denda dan pemberian dana kompensasi untuk memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri.

32. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

a. Fuel Supply Agreements (continued)

i. Coal (continued)

On 31 December 2021, the Director General of Mineral and Coal for and on behalf of Minister of ESDM issued letter No. B-1605/MB.050/B.B/2021 ("Letter B-1605") which, among others, stipulated that all holders of CCA/CCoW, IUP, IUPK Operation Production, IUPK for the Continuation of Contract/Agreement Operation, and holders of Coal Transportation and Sales Permit (a) are prohibited from selling coal overseas from 1 to 31 January 2022 (b) must supply all of its coal production to meet electricity needs for public interest in accordance with Domestic Market Obligation ("DMO") fulfilment and/or assignment from the Government to companies and/or contracts with PLN and Independent Power Producer ("IPP"); and (c) in the event that coal is already available at the loading port and/or has been loaded on a ship, it must immediately be sent to the Coal-Fired Steam Power Plant belonging to PLN Group and IPP, the implementation of which will be concluded with PLN. There is also information in Letter B-1605 that the prohibition of coal exports will be evaluated and reviewed based on the realization of coal supply for coal fired power plants of PLN and IPP.

On 19 January 2022, the MoEMR issued Ministerial Decree No. 13.K/HK.02/MEM.B/2022 which stipulates the guidelines for imposing administrative sanctions, prohibition of coal exports, imposing fines and providing compensation funds to fulfil domestic coal requirements.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/formerly PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 9(G) Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

32. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

a. Perjanjian Pengadaan Bahan Bakar (lanjutan)

i. Batubara (lanjutan)

Selama tahun 2022, harga dasar batubara di lampiran penyesuaian alokasi unit berkisar antara Rp603.836 (nilai penuh) sampai dengan Rp1.093.609 (nilai penuh) per ton, yang disesuaikan terhadap nilai kalor, kadar abu, sulfur ash Ash Fusion Temperature (AFT), Hardgrove Grindability Index (HGI) dan ukuran batubara.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 07 tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara, seluruh harga dasar tersebut diatas akan ditinjau secara periodik setiap 3 (tiga) bulanan untuk disesuaikan dengan nilai kalor Rupiah terhadap nilai yang ASS dan harga dasar bahan bakar minyak HSD untuk industri.

Sehubungan dengan perjanjian jual beli batubara, pemasok diwajibkan untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan.

32. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

a. Fuel Supply Agreements (continued)

i. Coal (continued)

In 2022, the applicable price of coal ranges from Rp603,836 (full amount) to Rp1,093,609 (full amount) per ton, which is adjusted against calorific value, ash content, sulphur, ash Ash Fusion Temperature (AFT), Hardgrove Grindability Index (HGI) and coal size.

Based on the Regulation of Minister of Energy and Mineral Resources of Indonesia No. 07 year 2017 regarding the Procedures of Coal and Metal Sales Pricing, the base prices in all contracts above will be reviewed quarterly to justify the price with the exchange rate from Rupiah to US$ and the HSD diesel price for industries.

In relation to the coal sales and purchase agreement, suppliers are obliged to submit their performance guarantees.

ii. Gas

Harga realisasi pembelian gas alam pada titik pengantaran di tahun 2022 berkisar antara AS$6,17 sampai dengan AS$12,59 dan Rp94.108 (nilai penuh) sampai dengan Rp213.925 (nilai penuh) per Million British Thermal Unit ("MMBTU")/Million Standard Cubic Feet ("MSCF").

The gas price purchase prices at the point of delivery range in 2022 from US$6.17 to US$12.59 and Rp94,108 (full amount) to Rp213,925 (full amount) per Million British Thermal Unit ("MMBTU")/Million Standard Cubic Feet ("MSCF").

(Y) PLN NUSANTARA POWER (dahulu/formerly Y) PERBANAKUSIAN JAWA-BALI
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 9/31 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER/31 DECEMBER 2022 DAN/AND 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

32. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

a. Perjanjian Pengadaan Bahan Bakar (lanjutan)

ii. Bahan Bakar Minyak ("BBM")

Perusahaan melalui PLN dan Pertamina mengadakan Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak No. 011/JUDIDIR/2001 tanggal 5 Oktober 2001. Perjanjian ini telah diadendum pada tanggal 16 Mei 2007, dimana PLN dan Pertamina menyepakati antara lain: (i) penyesuaian harga bahan bakar bulanan ditetapkan oleh Pertamina untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 April 2007 dan harga bahan bakar 105,8% dari Mid Oil Platts Singapore (MOPS) ditambah PPN untuk periode 1 Mei 2007 sampai dengan 31 Desember 2007, (ii) harga bahan bakar setelah tanggal 31 Desember 2007 akan ditetapkan oleh kedua belah pihak setiap tahun, (iii) jangka waktu pembayaran berikut pengenaan denda keterlambatan pembayaran sebesar tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia bulanan ditambah 1,25%, (iv) efektif mulai 1 Mei 2007, waktu uang yang belum dibayar atas pembelian bahan bakar sampai dengan 30 April 2007 dikenakan bunga sebesar tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia per tahun ditambah 1,25%, sampai diselesaikan dengan menerbitkan obligasi PLN yang berlaku tanggal 31 Agustus 2007, (v) uang kepada Pertamina, sehubungan obligasi yang akan diterbitkan maksimum sebesar Rp10 triliun (angka penuh), (vi) perjanjian ini berlaku untuk 5 tahun sejak tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, dan (vii) Sucofindo ditunjuk sebagai surveyor independen.

Perjanjian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan. Berdasarkan Addendum VIII tertanggal 5 Februari 2022, kesepakatan harga jual beli bahan bakar minyak (HSD dan MFO) sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2022 antara Pertamina dan Perusahaan adalah sebagai berikut:

a. Terhitung sejak 1 September 2021, seluruh tanggung jawab, hak dan kewajiban Pertamina berdasarkan perjanjian dialihkan kepada PT Pertamina Patra Niaga.

32. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

a. Fuel Supply Agreements (continued)

ii. Fuel

The Company through PLN and Pertamina entered into a Fuel Sell and Purchase Agreement No. 011/JUDIDIR/2001 dated 5 October 2001. This agreement has been amended on 16 May 2007, whereby (i) PLN and Pertamina agreed among others (i) the monthly fuel price to be used for the period from 1 January until 30 April 2007 was determined by Pertamina and, that the fuel price of 105.8% from Mid Oil Platts Singapore (MOPS) plus VAT was used for the period from 1 May 2007 until 31 December 2007, (ii) the fuel price subsequent to 31 December 2007 will be determined by both parties every year, (iii) the terms of payment and penalty charges on late payments with a rate of monthly Certificate of Bank Indonesia plus 1.25%, (iv) effective from 1 May 2007, the unpaid balances of payables for purchases of fuel until 30 April 2007 will bear interest at a rate per annum of Certificate of Bank Indonesia plus 1.25% until settled by the issuance of PLN Bonds, which is no later than 31 August 2007, (v) the maximum payables to Pertamina, including the bonds which will be issued amounting to Rp10 trillion (full amount), (vi) this agreement is valid for 5 years which is from 1 January 2007 until 31 December 2011, and (vii) that Sucofindo is assigned as an independent surveyor.

The agreement has been amended several times. Based on Amendment VIII dated 5 February 2022, the agreement on the sale and purchase price of fuel oil (HSD and MFO) from 1 January 2021 to 31 December 2022 between Pertamina and the Company is as follows:

a. As at 1 September 2021, all of Pertamina's responsibilities, rights and obligations under the agreement have been transferred to PT Pertamina Patra Niaga.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/formerly PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
DAN ANAK-ANAK PERUSAHAAN/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/34 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

33. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

a. Perjanjian Pengadaan Bahan Bakar (lanjutan)

i. Bahan Bakar Minyak ("BBM") (lanjutan)

b. Perubahan formulasi harga bahan bakar minyak yang berlaku sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

c. Penyerahan BBM pada tanggal 1 hingga akhir bulan, HSFO, Jakarta Interbank Spot Dollar ("JSDOR") dan Jakarta Interbank Offered Rate ("JIBOR") yang berlaku adalah rata-rata dari HSFO, rata-rata JSDOR dan rata-rata JIBOR selama 1 bulan, yang lebih awal tanggal 25 pada 2 bulan sebelumnya sampai dengan tanggal 24 pada 1 bulan sebelum bulan penyerahan BBM.

Perusahaan telah menyelesaikan pembelian HSD dan MFO selama tahun 2022 berdasarkan harga tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, sisanya utang usaha atas pembelian bahan bakar kepada Pertamina adalah masing-masing sebesar Rp24.488 dan Rp833.490.

b. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik ("PJBL")

Perusahaan memiliki sejumlah PJBL dengan PLN. Dalam perjanjian tersebut, PLN membayar pasokan tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan formula pembayaran. Pembayaran tersebut mencakup komponen biaya kapasitas energi operasional dan pemeliharaan yang tergantung pada tingkat pasokan energi serta variabel lain yang ditentukan dalam perjanjian.

33. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

a. Fuel Supply Agreements (continued)

i. Fuel (continued)

b. Changes in the formulation of fuel prices are effective from 1 January 2022 to 31 December 2022.

c. BBM delivery on the 1st to the end of the month, HSFO, Jakarta Interbank Spot Dollar ("JSDOR") and Jakarta Interbank Offered Rate ("JIBOR") that apply are the middle average of HSFO, JSDOR average and 1-month Jibor average, which are issued from the 25th of the previous 2 months to the 24th of the 1st month prior to the month of fuel delivery.

The Company has received purchases of HSD and MFO for the year 2022 based on those prices.

As at 31 December 2022 and 2021, the trade payables outstanding for purchases of fuel from Pertamina amounted to Rp24.488 and Rp833.490, respectively.

b. Power Purchase Agreements ("PPA")

The Company has various PPAs with PLN. Under these agreements, PLN will pay the Company for the supply of electricity at the amount determined based on the payment formula. Such a payment formula includes the cost of capacity energy, as well as operations and maintenance components which depends on the level of energy supplied and other variables as stipulated in the agreement.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/formerly PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/35 Schedule

LAPORAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

33. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

b. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik ("PJBL") (lanjutan)

Pada tanggal 30 Desember 2022, PLN dan Perusahaan telah menandatangani 20 amandemen dan pernyataan kembali PJBL yang terdiri dari: 5 Buku PJBL atas wilayah Jawa-Bali, 7 Buku PJBL atas wilayah Sumatera, 4 atas Buku PJBL atas wilayah Kalimantan, dan 4 Buku PJBL atas wilayah Sulawesi. Amandemen dan pernyataan kembali PJBL tersebut akan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2023 dengan periode kontrak dari tahun 2023 sampai dengan 2038.

c. Perjanjian Pengoperasian dan Pemeliharaan

Perusahaan memiliki beberapa Perjanjian Jasa Operasi dan Pemeliharaan sampai dengan 31 Mei 2025. Sebagai tindak lanjut pembentukan subholding yang disebutkan pada Catatan 2b, manajemen berkeyakinan bahwa Perjanjian Jasa Operasi dan Pemeliharaan akan diterminasi sejak 1 Januari 2023.

Selain itu, Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Jasa Operasi dan Pemeliharaan PLTU Sambelia (2x50 MW) tahap Supporting Based pada tanggal 29 November 2021. Masa penyelesaian kontrak sampai dengan 30 November 2022. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, kontrak masih dalam proses perpanjangan.

d. Pembelian barang modal

Pada tanggal 19 Desember 2017, Perusahaan telah menandatangani perjanjian novasi dengan PLN, Konsorsium Doosan Heavy Industries and Construction Co. Ltd. dan PT Hutama Karya (Persero) sehubungan dengan Perjanjian Kontrak No. 0128.PJ/DAN.02.01/DIR/2017, tanggal 29 Maret 2017 untuk proyek add on PLTGU Muara Tawar Blok 2, 3 dan 4. Perjanjian tersebut telah diubah pula Addendum II, pada tanggal 1 September 2021 terkait kerja tambah untuk pelaksan pemenangan.

Sehubungan dengan perjanjian diatas, Perusahaan memproleh fasilitas stand-by letter of credit dengan rincian sebagai berikut:

33. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

b. Power Purchase Agreements ("PPA") (continued)

On 30 December 2022, PLN and the Company have signed 20 amendments and restatements of the PPA consisting of: 5 books of PPA for the Java-Bali area, 7 books of PPA for the Sumatra area, 4 books of PPA for the Kalimantan area, and 4 books of PPA for the Sulawesi area. The amendments and restatements of these PPA will become effective on 1 January 2023 with a contract period from 2023 up to 2038.

c. Supply and Maintenance Agreements

The Company has several Operation and Maintenance Service Agreements up to 31 May 2025. As a follow-up to the establishment of subholding described in Note 2b, management believes that the Operation and Maintenance Service Agreement will be terminated from 1 January 2023.

In addition, the Company has entered into an Operation and Maintenance Service Agreements with PLTU Sambelia (2x50 MW) Supporting Based phase on 29 November 2021. The contract period is until 30 November 2022. Until the completion date of the consolidated financial statements, the contract is still in the process of extension.

d. Capital expenditures

On 19 December 2017, the Company signed a novation agreement with PLN, Consortium of Doosan Heavy Industries and Construction Co. Ltd. and PT Hutama Karya (Persero) which entered into an agreement with Trade Agreement No. 0128.PJ/DAN.02.01/DIR/ 2017, dated 29 March 2017 for the add on project of PLTGU Muara Tawar Block 2, 3 and 4. The latest amendment, Amendment II, dated 1 April 2022 related to additional work for going work.

In relation with the above agreements, the Company has stand-by letter of credit facilities with the following details:

Bank penerbit/ Issuing Bank	Penerima manfaat/ Beneficiary	Mata uang/ Currency	Jumlah/ Total
Inarah	Mitsubishi Corporation Ltd.	JPY	[illegible]
	Doosan Heavy Industries	JPY	[illegible]
	Doosan Heavy Industries	USD	[illegible]
	Doosan Heavy Industries	EUR	[illegible]

*) dalam jutaan Rupiah

*) In Rupiah amount

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/formerly PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI UNIT BISNIS ANAK/A UNIT OF SUBSIDIARIES

Lampiran 59b Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

32. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

a. Litigasi

Pada tahun 2019, Ronald Manurung dan rekan ("Penggugat") mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Cikarang atas tanah seluas 11.918 m2 yang telah digunakan oleh PLN dan PT PLN Unit Pembangkit Muara Tawar ("UPMT") dengan meminta pembayaran ganti rugi sebesar Rp32.026. Dari hasil persidangan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Cikarang, gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya. Pada tanggal 8 Mei 2022, Penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung namun Majelis Hakim menolak Kasasi tersebut. Pada tanggal 7 Oktober 2022, Penggugat mengajukan Peninjauan Kembali. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, perkara ini masih dalam proses Peninjauan Kembali oleh Penggugat pada Mahkamah Agung.

Pada tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, Grup memiliki dasar yang kuat dalam kasus ini karena keputusan pengadilan terakhir menguntungkan Grup, sehingga tidak ada provisi tercatat yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian ini.

32. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

a. Litigation

In 2019, Ronald Manurung and partners ("Plaintiff") filed claims for compensation in the Cikarang District Court over a land area of 11,918 sqm that has been used by PLN and PT PLN Unit Pembangkit Muara Tawar Unit ("UPMT") by asking for a compensation payment of Rp32,026. From the results of the Cikarang District Court, the Plaintiff's claim was rejected in its entirety. On 8 May 2022, the Plaintiff submitted an appeal to the Supreme Court but the Panel of Judges rejected the appeal. On 7 October 2022, the Plaintiff submitted a Judicial Review. As at the issuance date of the consolidated financial statements, this case is still in the process of Judicial Review by the plaintiff in the Supreme Court.

As at the completion date of these consolidated financial statements, the Group has strong grounds supporting the case as the recent court decisions were in favour of the Group, therefore no provision has been recorded in these consolidated financial statements.

33. RISIKO KUREN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL

a. Kategori dan kelas/kelas instrumen keuangan

Pada tanggal 31 Desember 2022, Grup mengklasifikasikan kas dan setara kas, deposito berjangka, piutang usaha, piutang lain-lain, restoring bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya dan piutang kepada ventura bersama sebesar Rp31.827.833 (2021: Rp30.242.012), sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

33. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT

a. Categories and classes of financial instruments

As at 31 December 2022, the Group classified its cash and cash equivalents, time deposits, trade receivables, other receivables, restricted cash in banks and time deposits and receivables from joint ventures amounting to Rp31,827,833 (2021: Rp30,242,012) as financial assets at amortised cost.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/formerly PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 9/Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

33. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL (lanjutan)

a. Kategori dan Kelas Instrumen keuangan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2022, Grup mengklasifikasikan utang usaha, utang lain-lain, beban masih harus dibayar, liabilitas sewa dan pinjaman dari pemegang saham sebesar Rp5.907.741 (2021: Rp5.297.372) sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Grup adalah untuk memastikan tersedia sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Grup beroperasi dengan kebijakan yang telah ditentukan oleh Dewan Direksi.

Dalam melaksanakan aktivitas manajemen risiko, Grup telah memiliki panduan dalam bentuk Pedoman Umum Manajemen Risiko. Pedoman ini mengatur keseimbangan antara fungsi operasional bisnis dengan pengelolaan risiko keuangan.

Risiko keuangan utama Grup adalah pada risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Manajemen melakukan dan mengkuantifikasi kebijakan untuk mengelola masing-masing risiko. Grup menerapkan kebijakan manajemen risiko yang bertujuan untuk meminimalisasi pengaruh dari ketidakpastian risiko keuangan terhadap kinerja keuangan Grup. Berikut ini ringkasan kebijakan dan pengelolaan manajemen risiko tersebut:

i. Manajemen risiko mata uang asing

Grup memiliki eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar yang timbul dari transaksi dengan pelanggan maupun pemasok yang dilakukan dalam mata uang asing, sehingga Grup terekspos terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing.

Kebijakan Grup untuk mengelola eksposur mata uang asing dalam batas yang wajar disetujui.

33. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT (continued)

a. Categories and classes of financial instruments (continued)

As at 31 December 2022, the Group classified its trade payables, other payables, accrued expenses, lease liabilities and loans from a shareholder amounting to Rp5,907,741 (2021: Rp5,297,372) as financial liabilities carried at amortised cost.

b. Financial risk management objectives and policies

The objectives and policies of the Group's financial risk management are to ensure that adequate financial resources are available for the operation and development of the business, while managing their exposure to market risks (including foreign currency risks and interest rate risks), credit risks and liquidity risks. The Group operates within defined policies approved by the Board of Directors.

In performing the risk management, the Group has established guidance in the form of a Risk Management General Manual. This manual provides guidance to manage the harmonization between the business's operational function and financial risk management.

The main financial risks of the Group are market risks (including foreign currency risks and interest rate risks), credit risks and liquidity risks. The management evaluates and establishes policies for managing each of these risks. The Group applies the financial risk management policies to minimize the impact of the financial risks unpredictability on the Group's financial performance. The summary of the financial risk management policies is as follows:

i. Foreign currency risk management

The Group has foreign currency exposures arising from transactions with customers and suppliers which are denominated in foreign exchange, therefore the Group is exposed to exchange rate fluctuations.

The Group's policy is to maintain foreign currency exposure within acceptable limits.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/formerly PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/38 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)	NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2022 AND 2021 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

33. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL (lanjutan)

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

i. Manajemen risiko mata uang asing (lanjutan)

Sensitivitas mata uang asing

Tabel di bawah ini menjelaskan risiko sensitivitas Grup untuk setiap 10% kenaikan dan penurunan Rupiah terhadap mata uang asing yang relevan. 10% kenaikan dan penurunan menggambarkan penilaian manajemen terhadap perubahan yang wajarnya pada nilai tukar setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini. Analisa sensitivitas ini hanya mencakup aset dan moneter asetnya pada dalam mata uang asing dan menyesuaikan translasi pada akhir tahun untuk 10% perubahan dalam nilai tukar mata uang asing.

33. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT (continued)

b. Financial risk management objectives and policies (continued)

i. Foreign currency risk management (continued)

Foreign currency sensitivity

The following table explains the details of the Group's sensitivity to a 10% increase and decrease in Rupiah against the relevant foreign currencies. 10% increase or decrease represents the management's assessment of the reasonably possible changes in foreign currency rates after considering the current economic conditions. The sensitivity analysis includes only after tax outstanding foreign denominated monetary items and adjusts their translation at the end of the year for a 10% change in foreign currency rates.

Dampak pada laba setelah pajak dalam mata uang/
Effect on profit after tax in mata uang

	2022		2021		
	+10%	-10%	+10%	-10%	
Aset keuangan					Financial assets
Kas dan setara kas	48,275	(48,275)	111,668	(111,668)	Cash and cash equivalents
Deposito berjangka	15,013	(15,013)	-	-	Time deposits
Piutang usaha dan aset keuangan lainnya	21,828	(21,828)	-	-	Receivables and other financial assets
Piutang lainnya	1,487	(1,487)	2,192	(2,192)	Other receivables
Piutang kepada ventura bersama	83,107	(83,107)	75,100	(75,100)	Receivables from joint ventures
Subjumlah	179,907	(179,907)	191,772	(191,772)	Subtotal
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Pinjaman dari pemegang saham	(106,110)	106,110	(180,210)	180,210	Loans from a shareholder
Utang usaha	(5,487)	5,487	(960)	960	Trade payables
Subjumlah	(111,197)	111,197	(181,170)	181,170	Subtotal
Jumlah	68,710	(68,710)	10,602	(10,602)	Total

ii. Manajemen risiko tingkat suku bunga

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, manajemen percaya risiko tingkat suku bunga adalah minimal dikarenakan Grup hanya terekspos risiko tingkat suku bunga terkait saldo kas di bank dan pinjaman dari pemegang saham.

ii. Interest rate risk management

As at 31 December 2022 and 2021, management believes that the exposure from interest rate risk is minimal because the Group is exposed interest rate risk only from cash in banks and loans from a shareholder.

PT PLN (PERSERO) (dahulu/formerly PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO))
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/35 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

33. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL (lanjutan)

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

a. Manajemen risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

Sensitivitas tingkat suku bunga

Analisis sensitivitas berikut telah ditentukan berdasarkan eksposur Grup terhadap tingkat suku bunga untuk aset instrumen keuangan tersiang sebelum pajak pada tanggal pelaporan. Analisis ini disusun dengan mengasumsikan jumlah aset dan liabilitas tersiang pada akhir periode pelaporan, tersiang sepanjang tahun. Analisis sensitivitas ini menggunakan asumsi kenaikan dan penurunan sebesar 50 basis poin ("bp") pada tingkat bunga yang relevan dengan variabel lain dianggap konstan. Kenaikan dan penurunan sebesar 50 bp merupakan penilaian manajemen atas kemungkinan perubahan yang rasional terhadap tingkat bunga sebelum mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini.

Pada tanggal 31 Desember 2022, jika tingkat suku bunga atas pinjaman dari pemegang saham 50 basis poin lebih tinggi/lebih rendah, dengan asumsi semua variabel lain konstan, laba sebelum pajak untuk tahun berjalan akan menjadi lebih rendah/tinggi sebesar Rp10.287 (2021: Rp8.411).

a. Management of interest rate risk (continued)

Interest rate sensitivity

The sensitivity analysis below has been determined based on the Group's exposure to interest rates for financial instruments after tax at the reporting date. The analysis has been prepared by assuming that the amounts of assets and liabilities that were outstanding at the end of the reporting period were outstanding for the whole year. The sensitivity analysis uses an assumption of a 50 basis point ("bp") increase and decrease in the relevant interest rates with all other variables being held constant. A 50 bp increase or decrease represents management's assessment of the reasonably possible changes in interest rates after considering the current economic conditions.

As at 31 December 2022, if interest rates on loans from a shareholder had been 50 basis points higher/lower with all other variables being held constant, the profit/loss profit for the year would have been Rp10.287 (2021: Rp8.411) lower/higher.

c. Manajemen risiko kredit

Pada tanggal 31 Desember 2022, total maksimum eksposur dari risiko kredit adalah Rp31.526.445 (2021: Rp30.840.208). Risiko kredit berasal dari kas di bank, deposito berjangka, piutang usaha, piutang lain-lain, rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya dan piutang kepada ventura bersama.

Semua rekening bank, deposito berjangka, dan rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya ditempatkan di bank lokal yang memiliki reputasi.

c. Credit risk management

As at 31 December 2022, the total maximum exposure from credit risk was Rp31.526.445 (2021: Rp30.840.208). Credit risk arises from cash in banks, time deposits, trade receivables, other receivables, restricted cash in banks and time deposits and receivables from joint ventures.

All of the cash in banks, time deposits and restricted cash in banks and time deposits are placed in reputable local banks.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

33. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL (lanjutan)

33. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT (continued)

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

b. Financial risk management objectives and policies (continued)

ii. Manajemen risiko kredit (lanjutan)

ii. Credit risk management (continued)

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, PLN mencatatkan kontribusi masing-masing sebesar 99,30% dan 99,24% dari seluruh nilai piutang usaha. Manajemen berkeyakinan bahwa risiko kredit terbatas karena risiko tersebut kredit dan PLN tercatat dimana Grup telah secara legal terikat dalam perjanjian dengan PLN untuk penjualan listrik dan jasa lainnya.

As at 31 December 2022 and 2021, PLN gave a contribution of 99.30% and 99.24% from the total trade receivables, respectively. Management believes that the credit risk is limited because the credit default of PLN is low since the Group has legally binding agreement with PLN for sales of electricity and other services transactions.

Aset keuangan tertentu, dinilai secara individu untuk penurunan nilai dan jika ditemukan terjadi penurunan nilai, rugi penurunan nilai harus dikenakan secara individu.

Certain financial assets are individually assessed for impairment and, if found to be impaired, have an impairment loss assigned to them on an individual basis.

Pada setiap akhir tahun pelaporan, Grup melakukan untuk menilai penyisihan ECL untuk semua piutang. Grup telah mencatat penambahan atas penyisihan kerugian kredit sebesar Rp32.641 pada tanggal 31 Desember 2022 (2021: Rp-nil). Tidak ada pergerakan lain dalam penyisihan kerugian kredit.

At the end of each reporting date, the Group is required to assess an allowance for ECLs for all receivables. The Group has recorded an addition of credit loss allowance amounting to Rp32,641 as of 31 December 2022 (2021: Rp-nil). There are no other movements within the credit loss allowance.

iv. Manajemen risiko likuiditas

iv. Liquidity risk management

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko bahwa Grup akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban terkait dengan liabilitas keuangan yang diselesaikan dengan penyerahan kas atau aset keuangan lainnya. Tanggung jawab utama manajemen risiko likuiditas terletak pada Direksi, yang telah membangun kerangka manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk pengelolaan manajemen likuiditas dan pendanaan Grup. Grup mengelola risiko likuiditas dengan menjaga kecukupan kas dan setaranya fasilitas pinjaman dengan terus menerus memantau perkiraan dan realisasi arus kas aktual dan mencocokkan profil jatuh tempo liabilitas keuangan.

Liquidity risk is defined as the risk that the Group will encounter difficulty in meeting its obligations associated with financial liabilities that are settled by delivering cash or other financial assets. The ultimate responsibility for liquidity risk management rest in the Directors, who have built an appropriate liquidity risk management framework for the management of the Group's funding and liquidity management requirements. The Group manages its liquidity risk by maintaining adequate cash and reserve borrowing facilities by continuously monitoring the forecast and actual cash flows and by matching the maturity profiles of financial liabilities and assets.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/formerly PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 9/101 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

33. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL (lanjutan)

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

c. Manajemen risiko likuiditas (lanjutan)

Tabel dibawah ini menganalisis liabilitas keuangan Grup pada tanggal pelaporan berdasarkan kelompok jatuh temponya dan atas periode hingga tanggal jatuh tempo kontraktual. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel ini adalah nilai arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto termasuk estimasi pembayaran bunga.

33. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT (continued)

b. Financial risk management objectives and policies (continued)

c. Liquidity risk management (continued)

The table below analyses the Group's financial liabilities at the reporting date into relevant maturity groupings based on the remaining period to the contractual maturity date. The amounts disclosed in the table represent contractual undiscounted cash flows including estimated interest payments.

2022

	Tidak lebih dari satu tahun / Not more than one year	Lebih dari satu tahun sampai dengan dua tahun / More than one year up to two years	Lebih dari dua tahun sampai dengan tiga tahun / More than two years up to three years	Lebih dari tiga tahun / More than three years	Jumlah / Total	
Utang usaha	1.327.515	-	-	-	1.327.515	Trade payables
Utang lain-lain	32.027	32.027	-	-	64.054	Other payables
Utang bunga	703.048	-	-	-	703.048	Interest payable
Sewa pembiayaan	20.339	-	-	-	20.339	Finance lease
Program pensiun dan imbalan pascakerja lainnya	187.734	168.957	154.833	1.180.241	1.691.765	Pension plan and other post-employment benefits
Jumlah	2.484.663	200.984	154.833	1.180.241	4.806.721	Total

2021

	Tidak lebih dari satu tahun / Not more than one year	Lebih dari satu tahun sampai dengan dua tahun / More than one year up to two years	Lebih dari dua tahun sampai dengan tiga tahun / More than two years up to three years	Lebih dari tiga tahun / More than three years	Jumlah / Total	
Utang usaha	2.181.348	-	-	-	2.181.348	Trade payables
Utang lain-lain	81.338	81.338	-	-	162.676	Other payables
Utang bunga	887.545	-	-	-	887.545	Interest payable
Sewa pembiayaan	21.797	-	-	-	21.797	Finance lease
Program pensiun dan imbalan pascakerja lainnya	180.373	172.733	165.383	1.313.373	1.831.862	Pension plan and other post-employment benefits
Jumlah	3.352.401	254.071	165.383	1.313.373	5.085.228	Total

(*) PLN NUSANTARA POWER (dahulu/formerly (*) PEMBANGKITAN JAWA-BALI UNIT BISNIS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/102 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

33. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL (lanjutan)

33. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT (continued)

c. Manajemen modal

Grup mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan kelangsungan usaha dan untuk memastikan pemenuhan batasan rasio keuangan modal. Struktur modal Grup terdiri atas ekuitas pemegang saham induk, yang terdiri dari modal saham, tambahan modal disetor dan saldo laba.

Dewan Direksi Grup secara berkala melakukan kajian struktur permodalan Grup. Sebagai bagian dari kajian ini, Dewan Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

Grup berusaha untuk meminimalkan biaya modal sehingga dapat memaksimalkan nilai Grup. Oleh karena itu, kebijakan Grup dalam menjaga pendanaan atau aset, mempertimbangkan risiko keuangan yang mungkin timbul di masa depan.

c. Capital management

The Group manages capital risk to ensure that it will be able to continue as a going concern and to ensure compliance with the covenants of the capital adequacy ratio. The Group's capital structure consists of equity shareholders that consist of capital stock, additional paid-in capital and retained earnings.

The Board of Directors of the Group periodically reviews the Group's capital structure. As part of this review, the Board of Directors considers the cost of capital and related risks.

The Group aims to minimize the cost of capital, in order to maximize its value. Therefore, the Group's policy in seeking the funding (that will always take into account the financial risks that may arise in the future.

d. Estimasi nilai wajar

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan mendekati nilai wajarnya sebagai berikut:

1. Kas dan setara kas, deposito berjangka, rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya, piutang usaha dan piutang lain-lain merupakan aset keuangan jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, sehingga nilai tercatat aset keuangan tersebut kurang lebih telah mencerminkan nilai wajarnya.

2. Nilai tercatat dari piutang ventura bersama mendekati nilai wajarnya karena merupakan bunga pinjaman mengambang yang pada awalnya diakui pada nilai wajar berdasarkan tingkat bunga pasar pada saat tanggal pengakuan awal.

3. Utang usaha, utang lain-lain, dan beban masih harus dibayar merupakan liabilitas jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sehingga nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut kurang lebih telah mencerminkan nilai wajarnya.

4. Pinjaman dari pemegang saham merupakan pinjaman yang memiliki suku bunga tertentu sehingga nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut telah mendekati nilai wajar.

d. Fair value estimation

As at 31 December 2022 and 2021, the carrying amounts of the financial assets and liabilities approximate their fair values as follows:

1. Cash and cash equivalents, time deposits, restricted cash in banks and time deposits, trade receivables and other receivables are due within 12 months, thus the carrying values of the financial assets approximate their fair values.

2. The carrying amount of the receivables from joint ventures approximates to fair value as they are floating interest receivables which were initially recognised at fair value based in market rates at the initial recognition date.

3. Trade payables, other payables and accrued expenses are due within 12 months, thus the carrying values of the financial liabilities approximate their fair values.

4. Loans from a shareholder comprises liabilities with floating interest rates where the carrying values of the financial liabilities approximate their fair values.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/formerly PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/Exhibit 5

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

33. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL (lanjutan)

a. Saling hapus aset dan liabilitas keuangan

Aset dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah neto/nya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian ketika Grup memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut, dan terdapat niat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Tabel berikut menyajikan instrumen keuangan yang diakui yang saling hapus pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

33. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT (continued)

a. Offsetting financial assets and liabilities

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the consolidated statements of financial position where the Group currently has a legally enforceable right to offset the recognised amounts, and there is an intention to settle on a net basis or realise the asset and settle the liability simultaneously.

The following table presents the recognised financial instruments that are offset as at 31 December 2022 and 2021.

31 Desember 2022						31 December 2022
Aset keuangan						Financial assets
Pihak ketiga	2.124.000	(20.112)	2.103.888	(11.217)	2.092.671	Third parties
Liabilitas						
Pihak ketiga	1.991.118	(20.112)	1.971.006	-	1.971.006	Financial liabilities
Pihak berelasi	80.000	-	80.000	(11.217)	68.783	Third parties
						Related parties
31 Desember 2021						31 December 2021
Aset keuangan						Financial assets
Pihak ketiga	3.341.341	(27.372)	3.313.969	(1.182)	3.312.787	Third parties
Liabilitas						
Pihak ketiga	3.348.338	(27.372)	3.320.966	-	3.320.966	Financial liabilities
Pihak berelasi	30.375	-	30.375	(1.182)	29.193	Third parties
						Related parties

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/formerly PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 2/Exhibit 2/Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam Juta Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

31. INFORMASI ARUS KAS

31. CASH FLOW INFORMATION

a. Transaksi non-kas

a. Non-cash transactions

Pengungkapan tersendiri atas aktivitas investasi dan pendanaan non-kas:

Supplementary disclosures of non-cash investing and financing activities:

	2022	2021	
Aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak mempengaruhi arus kas:			Non-cash investing and financing activities:
Saling hapus piutang usaha dengan utang usaha	(1.162.742)	(1.736.643)	Offsetting trade receivables with trade payables
Saling hapus piutang usaha dengan utang bunga	60.851	30.438	Offsetting trade receivables with interest payables
Pembayaran dividen dengan memperhitungkan piutang usaha	(1.811.033)	(1.941.388)	Dividend payments through trade receivables offset
Penambahan reklasifikasi kas dan setara kas/deposito berjangka dikelompokkan dengan reklasifikasi dari deposito berjangka	-	33.547	Placement of restricted cash in banks and time deposits through reclassification from time deposits
Penambahan reklasifikasi kas dan setara kas/deposito berjangka dikelompokkan dengan reklasifikasi dari deposito jangka panjang	-	(33.547)	Placement of restricted cash in banks and time deposits through reclassification from long-term time deposits
Penambahan aset tidak digunakan dalam operasi melalui reklasifikasi dari persediaan	-	13.237	Additions of assets not used in operations through reclassification from inventories
Penambahan aset tetap sewa pembiayaan	65.315	63.891	Additions of property, plant and equipment through lease liability
Penambahan aset tetap melalui utang usaha	701.917	581.847	Additions of property, plant and equipment through trade payables
Penambahan aset tetap melalui kapitalisasi biaya pinjaman	46.333	33.897	Additions of property, plant and equipment through capitalization of borrowing costs
Penambahan aset tetap melalui reklasifikasi dari properti investasi	-	731	Additions of property, plant and equipment through reclassification from investment property
Penambahan properti investasi yang berasal dari reklasifikasi aset tetap	-	1.132	Additions of investment property from reclassification of property, plant and equipment
Penambahan (pengurangan) nilai properti investasi melalui hasil revaluasi/nilai wajar	119.333	(83.311)	Additions/(deductions) of carrying amount of investment properties through revaluation of assets
Penyusutan nilai aset tetap melalui hasil revaluasi/nilai wajar	-	(3.149.283)	Deductions of value of assets through revaluation of property, plant and equipment
Dividen dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang belum diterima	-	3.843	Dividends from associates and joint ventures that have not been received

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/formerly PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 27/22 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

31. INFORMASI ARUS KAS (lanjutan)

b. Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan

Tabel di bawah ini merupakan rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

31. CASH FLOW INFORMATION (continued)

b. Reconciliation of liabilities arising from financing activities

The below tables set out the reconciliation of the liabilities arising from financing activities for the years ended 31 December 2022 and 2021 as follows:

32. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Pada tanggal 30 Maret 2023, Perusahaan menandatangani Perjanjian Pendahuluan Jual Beli dengan PT Bhagi Aenglang (Penjual) untuk pembelian PLTBU Aenglang (2 x 5 MW).

32. EVENT AFTER REPORTING PERIOD

On 30 March 2023, the Company entered into a Preliminary Sale Purchase Agreement with PT Bhagi Aenglang (Seller) to purchase the PLTBU Aenglang (2 x 5 MW).

33. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian merupakan tanggung jawab manajemen dan telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 4 April 2023.

33. MANAGEMENT'S RESPONSIBILITY AND APPROVAL OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The preparation and fair presentation of the consolidated financial statements were the responsibilities of the management and were approved by the Directors and authorised for issue on 4 April 2023.

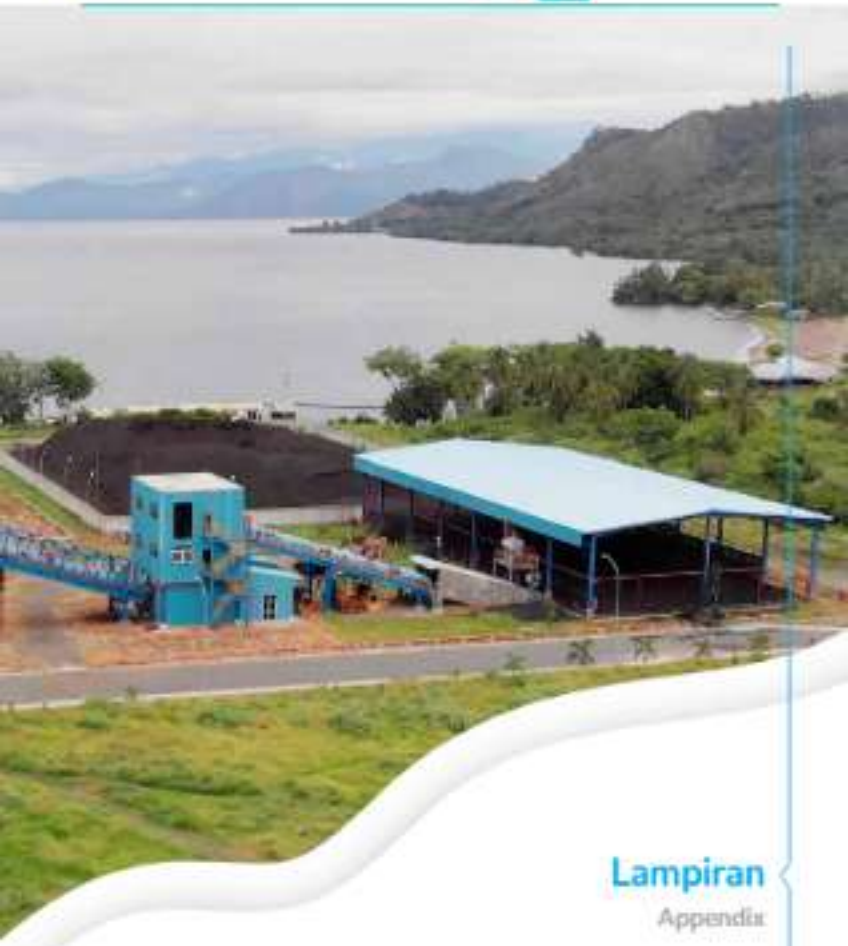

Lampiran
Appendix

Referensi SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten

Reference to SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021
regarding the Form and Content of the Issuer's Annual Report

Keterangan *Description*	Halaman *Page*
a. Ikhtisar Data Keuangan Penting *Key Financial Highlights*	
Ikhtisar data keuangan penting meliputi ikhtisar keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 5 (lima) tahun buku atau sejak mencatat usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut melakukan kegiatan usahanya kurang dari 5 (lima) tahun, paling sedikit memuat: 1) pendapatan/*revenue*; 2) laba bruto; 3) laba usaha; 4) jumlah laba rugi yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/*the owners of the parent entity*; 5) laba rugi per saham dasar; 6) jumlah laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/*the owners of the parent entity*; 7) laba rugi per saham; 8) jumlah aset; 9) jumlah liabilitas; 10) jumlah ekuitas; 11) rasio laba rugi terhadap jumlah aset; 12) rasio laba rugi terhadap ekuitas; 13) rasio laba rugi terhadap pendapatan/penjualan; 14) rasio lancar; 15) rasio liabilitas terhadap ekuitas; 16) rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan 17) informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten atau Perusahaan Publik dan jenis industrinya. *Key Financial Highlights provide financial information in comparative form for 5 (five) financial years, or since the commencement of business for the Issuer or Public Company if it has been in business for less than 5 (five) years, if it has only key financial highlights usually:* *1) revenue/sales;* *2) gross profit;* *3) profit (loss);* *4) total profit (loss) attributable to equity holders of the parent entity/owners of the parent entity;* *5) total comprehensive profit (loss);* *6) total comprehensive profit (loss) attributable to equity holders of the parent entity/owners of the parent entity;* *7) earnings (loss) per share;* *8) total assets;* *9) total liabilities;* *10) total equity;* *11) profit (loss) to total assets ratio;* *12) profit (loss) to equity ratio;* *13) profit (loss) to revenue ratio;* *14) current ratio;* *15) debt to equity ratio;* *16) debt to total assets ratio; and* *17) other information and financial ratios relevant to the issuer or Public Company and type of industry.*	44 - 47
b. Informasi Saham *Stock Information*	
Informasi harga saham paling sedikit memuat: 1) untuk yang telah dicatatkan pada bursa efek, memuat: a) jumlah saham yang diterbitkan; b) kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; c) tinggi rendah tertinggi dan rendah, dan penutupan berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; dan d) volume perdagangan pada bursa efek tempat saham dicatatkan. *Information about stock price, at least if the stock is listed on the exchange, at least:* *1) shares issued for which shares are listed on the stock exchange;* *a) number of outstanding shares;* *b) market capitalization based on the price in the stock exchange where the shares listed; and* *c) highest share price, lowest share price, closing share price at the Stock Exchange where the shares listed; and* *d) shares trading at the stock exchange where the shares listed.* *Information in number 1) is not required in the case the issuer is a public company whose shares is listed in the Stock Exchange.*	37

Keterangan Description	Halaman Page
3) dalam hal terjadi aksi korporasi yang mengakibatkan terjadinya perubahan ayat saham, seperti pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, penjatahan hak memesan saham (pre-emptive right), penawaran umum perdana saham, dan/atau saham selain saham biasa yang diterbitkan sehubungan dengan program kepemilikan saham oleh manajemen dan karyawan, maka jumlah saham yang dapat dibeli oleh setiap Direksi dan Dewan Komisaris dihitung berdasarkan rasio dari jumlah saham yang dimiliki oleh setiap Direksi dan Dewan Komisaris pada saat sebelum aksi korporasi dengan jumlah saham yang dimiliki oleh setiap Direksi dan Dewan Komisaris pada saat setelah aksi korporasi. a) lembar pelaksanaan dan kelipatannya; b) saham pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, pemesanan efek terlebih dahulu yang diterbitkan, dan penawaran hak memesan saham; c) pemesanan saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu; d) pemesanan efek yang dikonversikan (jika ada); dan e) harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi. In the event of corporate actions, including stock split, reverse stock, dividend bonus shares, and issuance of pre-emptive rights, then the total stock ownership by each Director and Commissioner after the corporate actions is calculated based on the ratio of the total stock ownership by each Director and Commissioner before the corporate actions with the total stock ownership by each Director and Commissioner before the corporate actions, which includes: a) units of implementation; b) stock split, reverse stock, dividend, bonus shares, and change in par value of shares; c) exercise of pre-emptive rights; d) the conversion of convertible securities (if any); and e) share price prior to and after corporate actions.	
4) dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan saham/efek yang/dengan cara (a) penjualan di bursa, pembelian kembali saham yang dilakukan oleh Perseroan, penawaran umum terbatas, penawaran umum perdana saham, penawaran umum berkelanjutan, dan/atau (b) pengalihan saham/efek yang/dengan cara (a) penjualan di bursa, pembelian kembali saham yang dilakukan oleh Perseroan, penawaran umum terbatas, penawaran umum perdana saham, penawaran umum berkelanjutan, dan/atau (c) pengalihan saham/efek yang/dengan cara lainnya, maka Direksi dan Dewan Komisaris wajib melaporkan kepemilikan saham/efek yang/dengan cara (a) penjualan di bursa, pembelian kembali saham yang dilakukan oleh Perseroan, penawaran umum terbatas, penawaran umum perdana saham, penawaran umum berkelanjutan, dan/atau (c) pengalihan saham/efek yang/dengan cara lainnya kepada Perseroan dan wajib mengumumkan kepemilikan saham/efek yang/dengan cara (a) penjualan di bursa, pembelian kembali saham yang dilakukan oleh Perseroan, penawaran umum terbatas, penawaran umum perdana saham, penawaran umum berkelanjutan, dan/atau (c) pengalihan saham/efek yang/dengan cara lainnya dalam Laporan Tahunan. In the event that the corporate action, including (a) stock buyback by the Company, limited public offering, initial public offering, and/or (b) transfer of shares/securities through (a) stock buyback by the Company, limited public offering, initial public offering, and/or (c) transfer of shares/securities through other means to the Company, the Board of Directors and Board of Commissioners are required to report the ownership of shares/securities through (a) stock buyback by the Company, limited public offering, initial public offering, and/or (c) transfer of shares/securities through other means in the Annual Report.	

c. Laporan Direksi The Board of Directors' Report

Laporan Direksi paling sedikit memuat paling sedikit mengenai: The Board of Directors' Report should at least contain the following items:	84 – 121
1. kondisi Emiten atau Perusahaan Publik, yang sedikit memuat: a. strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik; b. pemantau Direksi dalam pelaksanaan strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik; c. pencapaian yang diperoleh Emiten untuk melaksanakan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik; d. perbandingan antara hasil yang dicapai dengan rencana/target/visi Emiten atau Perusahaan Publik; dan e. kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik. the performance of the issuer or Public Company, should covering: a. strategy and strategic policies of the issuer or Public Company; b. Role of the Board of Directors in formulating strategy and strategic policies of the issuer or Public Company; c. Remedial carried out by the Board of Directors to oversee the implementation of the issuer's or Public Company's strategy; d. comparison between Achievements of results and targets of the issuer or Public Company; and e. challenges faced by the issuer or Public Company;	
2. pandangan terkait prospek usaha Emiten atau Perusahaan Public; dan description on business prospects of the issuer or Public Company; and	
3. penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik. implementation of governance by the issuer or Public Company.	

d. Laporan Dewan Komisaris The Board of Commissioners' Report

Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat antara lain mengenai: The Board of Commissioners' Report should at least contain the following items:	32 – 83
1. penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk pengawasan, dengan memberi arahan/penilaian dan pengembangan strategi Emiten atau Perusahaan Publik yang dilakukan oleh Direksi; assessment on the performance of the Board of Directors in managing the issuer or the Public Company, including the supervision, giving the Board of Directors advice or the formulation and implementation of the issuer's or Public Company's strategy by the Board of Directors;	
3. pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi; dan View on the business prospects of the issue or Public Company as established by the Board of Directors;	
3. pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik. View on the implementation of governance by the issue or Public Company.	

	Halaman Page
a. Profil Entitas atau Perusahaan Publik Profile of the Issuer or Public Company	
Profil Entitas atau Perusahaan Publik yang wajib dimuat pada antara lain: Profile of the Issuer or Public Company should cover, at least:	
1. nama Entitas atau Perusahaan Publik termasuk ajakan pendirian/perubahan/penggabungan, visi, misi, nilai perusahaan, dan tanggal efektif pendirian/ perubahan anggaran dasar terakhir; name of Issuer or Public Company, including timings of name changes, vision, mission, the date of change, and the effective date of the change of name during the financial year under review;	130-131
2. alamat, termasuk alamat Entitas atau Perusahaan Publik lainnya yang dianggap penting untuk mengetahui kegiatan yang mendukungnya, misalnya alamat kantor perwakilan, kantor cabang Entitas atau Perusahaan Publik, meliputi: a. nomor; b. nomor telepon; c. alamat surel (*website*); dan d. nomor atau surel; name of the Issuer or Public Company, including branch or representative offices, where public can have supplementary information of the Issuer or Public Company, which includes: a. address; b. telephone number; c. e-mail address; and d. website address;	131
3. riwayat singkat Entitas atau Perusahaan Publik; dan/History of the Issuer or Public Company	114-115
4. visi dan misi Entitas atau Perusahaan Publik serta budaya perusahaan yang telah disosialisasikan kepada seluruh pekerja pada tahun buku; entire statements of the Issuer or Public Company, including corporate culture and values;	131-132
5. kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan saat tahun buku, serta perubahan dari tahun buku sebelumnya dan hasil yang dicapai; scope of business according to the latest articles of association, business activities performed in the financial year, and types of products and/or services provided;	128-129
6. wilayah operasional Entitas atau Perusahaan Publik, wilayah operasional mengacu wilayah atau lokasi pelaksanaan kegiatan operasional atau pelayanan oleh kegiatan usaha utama perusahaan; operational area of the Issuer or Public Company, operational area is the area in which operational activities are taken place or the scope of the company's operational activities;	128-129
7. struktur organisasi Entitas atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit cukup dengan tingkat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi termasuk nama di bawah Direksi (jika ada) dan nama dari anak Direksi, termasuk uraiannya dengan nama dan jabatan; structure of organization of the Issuer or Public Company in chart, at least 1 (one) level below the Board of Directors including committees under the Board of Directors (if any) and those under the Board of Commissioners, with the names and titles;	134-136
8. tanda kewenangan termasuk sebutan lain, dalam hal ada, misalnya tanggal ditetapkannya yang berkaitan dengan pencapaian keuangan berkelanjutan; list of licenses, including other nomenclature, such as, where any, and information to be related to the implementation of sustainable finance;	205

Keterangan Description	Halaman Page
e. profil Direksi, yang wajib memuat:	140-151
1) nama dan usianya yang telah lengkap tujuh dan tanggung jawab;	129-136
2) riwayat hidup;	
3) alamat;	
4) nomor;	
5) kewenangannya;	
6) riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi;	
7) riwayat jabatan, meliputi informasi:	
(1) dalam hubungan penguasaan dengan anggota Direksi yang Direksi atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;	
(2) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite yang dibentuk untuk melaksanakan tugas Direksi atau Dewan Komisaris Publik. Dalam hal anggota Direksi telah memiliki rangkap jabatan, maka dijelaskan mengenai hal tersebut; dan	
(3) pengalaman kerja beserta periode waktu untuk tiap di dalam maupun di luar Direksi atau Perusahaan Publik;	
g. hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali dari kelompok maupun tidak mempunyai rumpun kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang berafiliasi. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Direksi atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; dan	
h. pernyataan kompetisi anggota Direksi dan dalam pelaksanaannya. Dalam hal tidak terdapat pelanggaran kompetisi anggota Direksi, maka dengan cara mengenai hal tersebut.	
The Board of Directors profile to work contains:	
a. name and position, including duration and responsibilities;	
b. brief photograph;	
c. age;	
d. citizenship;	
e. education background and/or certification;	
f. work history, including information on:	
(1) significant ties to shareholders of the Board of Directors in the said issuer or Public Company;	
(2) concurrent position, as member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, and/or member of committees to facilitate duties of an outside the issuer or Public Company, and/or the event that member of the Board of Directors do not have concurrent position, such matter shall be disclosed; and	
(3) working experience and period in and outside the issuer or Public Company;	
g. Affiliation with other members of the Board of Directors, Board of Commissioners, majority and controlling shareholders, either directly or indirectly up to individual owners, including name of affiliated parties. In the event that a member of the Board of Directors has no affiliation, the issuer or Public Company shall disclose that matter; and	
h. Changes in the composition of the members of the Board of Directors and the reasons for the changes, in the event that there is no change in the composition of the members of the Board of Directors, such matters shall be disclosed.	
(3) profil Dewan Komisaris, yang wajib memuat:	137-148
a. nama dan jabatan;	
b. usia;	
c. alamat;	
d. kewenangannya;	
e. riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi;	
f. riwayat jabatan, meliputi informasi:	
(1) dalam hubungan penguasaan dengan anggota Dewan Komisaris;	
(2) dalam hubungan penguasaan pemegang saham utama dan/atau pengendali dari kelompok maupun tidak mempunyai rumpun kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang berafiliasi. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Direksi atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut;	
(3) pengalaman kerja beserta periode waktu untuk tiap di dalam maupun di luar Direksi atau Perusahaan Publik;	
g. hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama dan pengendali dari kelompok maupun tidak mempunyai rumpun kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang berafiliasi. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Direksi atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut;	
h. pernyataan independensi komisaris independen dalam hubungannya independen telah memenuhi dalam ayat 2 dan/atau ayat 4;	
i. pendidikan anggota anggota Dewan Komisaris dan dalam pelaksanaannya. Dalam hal tidak terdapat pelanggaran anggota anggota Dewan Komisaris, maka dengan cara mengenai hal tersebut.	

[illegible] Description	[illegible] Page
The Board of Commissioners' profile, at least contains: a. name and position; b. term of office; c. age; d. citizenship; e. educational background and certification; f. work history, including information on: (1) legal basis for the appointment as member of the Board of Commissioners; (2) legal basis for the first appointment as member of the Board of Commissioners who is also an Independent Commissioner at the said Issuer or Public Company; (3) concurrent position as member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or member of committees, and other positions in an Issuer or Public Company, or in a non-Public Company, in the event that members of the Board of Commissioners do not have concurrent positions, such matter shall be disclosed; and (4) working experience and period in not outside the Issuer or Public Company; g. Affiliation with other members of the Board of Commissioners, majority and controlling shareholders, either directly or indirectly, up to individual parties, including name of affiliated parties, in the event that a member of the Board of Commissioners has no affiliation, the Issuer or Public Company shall disclose this matter; h. Statement of independence of the Independent Commissioner to the said entity's Independent Commissioner has been appointed more than 2 (two) periods; and i. Changes in the composition of the members of the Board of Commissioners and the reasons for the changes, in the event that there is no change in the composition of the members of the Board of Commissioners, such matter shall be disclosed.	
11. Uraian tugas dan tanggung jawab Direksi dan/atau anggota Direksi dan/atau Komisaris yang masih menjabat hingga akhir tahun buku, termasuk tanggal dan dasar pengangkatan. Uraian Direksi dan/atau Komisaris yang diberhentikan dalam tahun tersebut sebelum masa jabatannya berakhir, termasuk alasan pemberhentian yang ditetapkan oleh RUPS dan alasannya. In the event of changes in the membership composition of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners occurring subsequent to the end of the financial year and up to the deadline for submission of the Annual Report, membership composition of the Board of Directors and/or Board of Commissioners shall be presented both prior and after such changes.	137-138
12. Jumlah rapat yang diselenggarakan dan kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris dan Direksi serta rapat gabungan dengan Dewan Komisaris, disertai dengan dasar hukum penyelenggaraan rapat. The number of meetings held and attendance at meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors, as well as joint meetings with the Board of Commissioners, accompanied by the legal basis for the holding of the meetings.	151-155
13. Hal-hal penting lainnya dari pelaksanaan kepemilikan saham oleh dan dalam tahun buku, yang terdiri dari sebagai berikut: a. pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih, baik secara langsung maupun tidak langsung; dan b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal tidak ada anggota Direksi dan/atau tidak ada anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham, maka dicantumkan pernyataan hal tersebut; dan c. kepemilikan pemegang saham manajemen, yaitu kelompok pemegang saham yang ini yang memiliki jumlah paling dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik. Matters in the fiscal [illegible] during the fiscal year shares of shareholders and percentage of shareholding at the beginning and end of the financial year, containing information on: a. shareholders with a minimum of 5% (five percent) of shares of the Issuer or Public Company; b. members of the Board of Directors and Board of Commissioners that own shares of the Issuer or Public Company, in the event that all members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners do not own shares, such matter shall be disclosed; and c. public shareholders, that is, shareholders that each own less than 5% (five percent) of shares of the Issuer or Public Company. Disclosure of such information can be presented in tabular form.	270-272
14. pernyataan kepemilikan lebih langsung dan/atau tidak oleh Perusahaan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada tanggal dan akhir tahun buku termasuk informasi mengenai pemegang saham yang memiliki saham, antar pemegang saham yang sebagai kepemilikan lebih langsung, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam hal tidak ada anggota Direksi dan/atau tidak ada anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan lebih langsung atau tidak oleh Emiten atau Perusahaan Publik, maka dicantumkan pernyataan tersebut. Ownership of shares of indirect ownership of the shares of the Issuer or Public Company by members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the beginning and end of the financial year, including information on shareholders related to the shareholder register for the benefit of indirect ownership of members of the Board of Directors and Board of Commissioners in the event that no members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners do not have indirect ownership of shares, such matter shall be disclosed.	171

Keterangan Description	Halaman Page
33. Jumlah penyajang saham dan pemegang kepentingan non-aktif lainnya beserta kepemilikan (Modifikasi)	173
a. kepemilikan entitas induk b. kepemilikan entitas asing c. kepemilikan individu induk dan d. kepemilikan individu asing number of shareholders and non-voting rights of shareholding of the end of the financial year, classified by: a. ownership of bank institutions b. ownership of foreign institutions c. ownership of bank individuals, and d. ownership of foreign individuals	
34. informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali (Entitas atau Perusahaan Publik) yang langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik terakhir, yang dimiliki oleh dalam bentuk akhir/ atau lapis information on the majority and controlling shareholders of the issuer or Public Company, either directly or indirectly up to the ultimate beneficial owner, presented by a ownership diagram or chart	177
35. nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dengan Entitas atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas (jika ada), termasuk persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset dan tempat operasi entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama name of subsidiary entity, associated company or joint venture company in which the issuer or Public Company invested a joint control with the entity (if any), along with the percentage of shareholding, form of business, total assets, and operating areas of the subsidiary entity, associated company or joint venture company for subsidiary entities, include information on addition of such subsidiary entities	179-180
36. investasi pemilikan saham, projek usaha, aset tambah, dan hutang pemasam dari aset pemilikan tinggal dibelikan baku lain) cara baru) efek dimiliki saham (Entitas atau Perusahaan Publik disatakan) termasuk pemasukan saham (Perdi 108) penggabungan (efek) investor (hak), dalam saham, saham lain, perubahan (dia nominal saham, pelaksanaan efek termasuk pelaksanaan pemasukan efek penggabungan modal (jika ada) shareholdings of other listing, number of shares, par value, and the paid-in-capital at beginning of listing, at the end of the financial year, and value of listing (except when the issuer's of Public Company shares are listed, a listing does not mean stock), dividend issued shares, and change in par value of shares, secondary offer, rights or conversion of equity (if any)	183
38. informasi pencatatan efek kecuali saham, efek obligasi konversi dan efek-efek pada angka 36, yang belum lebih dahulu dicatat pada bursa efek, setiap mata uang mana efek tahun pencatatan tingkat satu kepada efek hasil tanggal jenis harga, nilai pencatatan dan peringkat efek (jika ada) information, as the listing of securities other than the ones as referred to in number 36, which have not yet been listed during the financial year, include number the name of the securities, year of issuance, interest / coupon of shares, maturity date, par value, and rating (if any)	186
39. informasi mengenai kantor akuntan publik (KAP) dan kantor akuntan publik (KAP) asosiasi, jaringan kantor akuntan publik (KAP) asosiasi a. nama dan alamat b. periode penugasan c. informasi jasa audit dan/atau non audit yang d. dibayar dan e. kewajaran atas audit dan/atau non audit lainnya f. standar yang mengatur pengendalian mutu atas audit lainnya g. dalam hal KAP asing (KAP) berasal dari negara lain dan/atau asosiasi, yang dibatasi KAP memberikan jasa non audit, maka dicantumkan nama dan alamat kantor akuntan dan Pengungkapan informasi penggunaan jasa KAP dan KAP lainnya yang berasosiasi/afiliasi atau dapat dinyatakan secara terpisah tidak information on the use of a Public Accountant (AP) and a Public Accounting firm (KAP) network group with their respective assessment/fee arrangements: a. name and address b. period of assignment c. information on audit and/or non-audit services provided d. audit and/or non-audit fees for each assignment given during the financial year, and e. in the event that the appointed AP, KAP and/or other professional entities/affiliates are only provide non-audit services, such information shall be disclosed, and Disclosure should be made in accordance with the following:	188
41. nama dan alamat lembaga dan/atau pihak pengguna jasa, waktu, nilai, dan KAP	202-204

Keterangan Description	Halaman Page
I. Analisis dan Pembahasan Manajemen Management Discussion and Analysis	
Analisis dan pembahasan manajemen mengacu kepada dan pembahasan manajemen tersebut harus dibaca bersama dengan laporan keuangan konsolidasi dan catatan atas laporan keuangan konsolidasi. Management discussion and analysis refers to and should be read together with the consolidated financial statements and notes to consolidated financial statements.	
1. Aset tetap a. Jumlah tercatat per kelompok aset dan dasar pengukuran yang digunakan b. Rekonsiliasi yang menunjukkan penambahan, pelepasan, dan penyusutan c. Penurunan nilai aset d. Pembatasan kepemilikan aset e. Komitmen pembelian aset Fixed assets a. Carrying amount per class of asset and the measurement bases used b. A reconciliation showing additions, disposals, depreciation c. Impairment of assets d. Restrictions on title e. Contractual commitments for the acquisition of property, plant and equipment	231-239
2. Properti investasi a. Jumlah tercatat b. Jumlah pendapatan sewa dan beban operasi c. Kewajiban kontraktual untuk pembelian, pembangunan atau pengembangan properti investasi d. Pembatasan kepemilikan e. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam menentukan nilai wajar properti investasi Investment property a. Carrying amount b. Rental income and operating expenses c. Contractual obligations to purchase, construct or develop investment property or for repairs, maintenance or enhancements d. Restrictions on title e. Significant methods and assumptions applied in determining the fair value of investment property	231-232
3. Kebijakan akuntansi yang dipilih dan perubahannya Selection of and changes in accounting policies	233-235
4. Estimasi dan pertimbangan akuntansi yang penting Significant accounting estimates and judgments	236
5. Aset tidak berwujud a. Jumlah tercatat per kelompok aset tidak berwujud dan metode amortisasi yang digunakan b. Rekonsiliasi yang menunjukkan penambahan, pelepasan, dan amortisasi c. Penurunan nilai aset tidak berwujud Intangible assets a. Carrying amount per class of intangible asset and the amortisation methods used b. A reconciliation showing additions, disposals, amortisation c. Impairment of intangible assets	231-235
6. Sewa a. Hak-hak yang diberikan b. Jumlah tercatat yang diberikan untuk masing-masing kelas aset c. Aset yang disewakan berdasarkan sewa operasi d. Jangka waktu sewa dan opsi perpanjangan Leases a. Rights granted b. Carrying amount granted for each class of asset c. Assets leased out under operating leases d. Lease terms and renewal options	232-233
7. Aset lain-lain a. Jenis investasi lainnya b. Jumlah investasi lainnya c. Aset investasi lainnya yang dijaminkan Other assets a. Types of other investments b. Amount of other investments c. Other investments pledged as collateral	231-235
8. Informasi lain yang material Material information	236
9. Aset yang dimiliki untuk dijual Assets held for sale	234-235

Keterangan Description	Halaman Page
10. perkembangan rencana tingkat/penyelesaian pada saat laporan harus dengan hasil yang berupa (antara), mengenai:	327-331
a. penyelesaian pekerjaan;	
b. nilai (rupiah);	
c. struktur modal (capital structure); atau	
d. hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik.	
10. progress between the beginning and ending of the period, and not the results achieved (estimates), concerning:	
a. construction;	
b. profit (loss);	
c. capital structure; or	
d. other matters deemed important by the Issuer or Public Company.	
11. Ringkasan cara-cara yang ada dalam Emiten atau Perusahaan Publik untuk:	327-331
a. pembelanjaan/pinjaman;	
b. nilai (rupiah);	
c. struktur modal (capital structure);	
d. kebijakan dividen; atau	
e. hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik.	
11. Summary of the ways in which the Issuer or Public Company:	
a. financing/loan;	
b. value (rupiah);	
c. capital structure; or	
d. dividend policy; or	
e. other matters deemed important by the Issuer or Public Company.	
12. Segala perubahan dalam kantung direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai tindak perubahan dan jangka waktu	331-332
including reasons of corporate action, structure of the Issuer or Public Company, at the very least in marketing strategy and market share	
12. Jumlah pengganti dividen tahunan 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit:	332-333
a. kebijakan dividen, antara lain cara/waktu/bentuk pembayaran setiap dividen yang dibagikan (sebelum atau tunai);	
b. tanggal pembayaran dividen dan dividen tanggal distribusi dividen tunai;	
c. jumlah dividen per saham dan dividen tunai; dan	
d. jumlah dividen per tahun yang dibayar.	
Penggantian informasi dapat dicakup dalam rentang tahun. Emiten atau Perusahaan Publik baru menyajikan dividen dalam 2 (dua) tahun terakhir, maka dicantumkan sesuai hal tersebut.	
Description of the dividend policy during the last 2 (two) financial years, at least covering:	
a. dividend policy, including information on the percentage of total dividend per distributed net profit;	
b. the payment date of cash dividend/cash dividend distribution;	
c. amount of dividend per share paid/cash dividend; and	
d. amount of dividend per year paid.	
Disclosure of information can be presented in tables from. In the event that the Issuer or Public Company does not distribute dividends in the last 2 (two) years, such matter shall be disclosed.	
13. Informasi penggunaan dana hasil penawaran umum, dengan sekurang-kurangnya:	352
a. dalam hal terdapat lebih dari satu penawaran umum, maka Emiten atau Perusahaan Publik harus menyajikan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku; dan	
b. dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK ini, maka Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyajikan informasi penggunaan dana hasil penawaran umum, serta Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyajikan informasi tersebut	
13. Information on the use of proceeds from public offering, at least the following:	
a. in the event that there is more than one public offering, the Issuer or Public Company shall present the realization of the use of proceeds from the public offering cumulatively up to the end of the financial year; and	
b. in the event that there are changes in the use of proceeds as stipulated in this Regulation of the Financial Services Authority, the Issuer or Public Company shall present information on the use of proceeds from the public offering, and the Issuer or Public Company shall disclose such changes in the use of proceeds	

Pokok Bahasan *Description*	Halaman *Page*
15. seluruh transaksi (jika ada), antara lain pengaruh transaksi, terjadinya, direksi, penggantian/pemberhentian anggota direksi, pembelian/penjualan saham, transaksi direksi, transaksi afiliasi, dan transaksi bersama kepentingan, yang telah ditelaah oleh Komite Audit, meliputi sekurang-kurangnya: *all transactions, including, among others, the occurrence of transactions, changes in the composition of the Board of Directors, share purchases and sales, transactions of the Board of Directors, affiliated transactions, and transactions with conflicts of interest, that have been reviewed by the Audit Committee, at least including:* a. tanggal, nilai, dan objek transaksi; *date, value, and object of the transaction;* b. nama pihak yang melakukan transaksi; *name of the transacting parties;* c. sifat hubungan afiliasi; dan *nature of affiliation; and* d. penjelasan mengenai kewajaran transaksi. *explanation regarding the fairness of the transaction.* e. pelaksanaan tindak lanjut atas; dan *implementation of follow-up actions on; and* f. aktivitas lain sehubungan dengan afiliasi, untuk mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d sampai dengan huruf e, Emiten atau Perusahaan Publik juga mengungkapkan informasi: *other activities in connection with affiliation, to disclose information as referred to in letter d to letter e, the Issuer or Public Company also discloses information:* (1) pelaksanaan Direksi terkait transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan transaksi afiliasi dilakukan secara wajar dan/atau telah mendapat persetujuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau sesuai dengan prinsip kewajaran; dan *the implementation of the Board of Directors regarding affiliated transactions has gone through adequate procedures to ensure that affiliated transactions are carried out fairly and/or have obtained approval as regulated in the applicable laws and regulations and/or in accordance with the arm's length principle; and* (2) pihak Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan pengawasan yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilakukan secara wajar dan/atau telah mendapat persetujuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau sesuai dengan prinsip kewajaran. *the Board of Commissioners and the audit committee have carried out adequate supervision to ensure that affiliated transactions are carried out fairly and/or have obtained approval as regulated in the applicable laws and regulations and/or in accordance with the arm's length principle.*	321-323
g. untuk transaksi afiliasi atau transaksi tertentu yang mengandung benturan, antara yang dijelaskan dalam angka 1 sampai dengan angka 14 di atas, yang mengandung benturan kepentingan, antara lain: *for affiliated transactions or certain transactions containing conflicts of interest, among others as explained in number 1 to number 14 above, which contain conflicts of interest, among others:* 1) jenis transaksi afiliasi atau transaksi tertentu yang mengandung benturan; *type of affiliated transaction or certain transaction containing conflicts of interest;* 2) nama pihak yang melakukan transaksi afiliasi atau transaksi tertentu yang mengandung benturan; *name of the party conducting the affiliated transaction or certain transaction containing conflicts of interest;* 3) sifat hubungan afiliasi dengan pihak yang melakukan transaksi afiliasi atau transaksi tertentu yang mengandung benturan; *nature of affiliation with the party conducting the affiliated transaction or certain transaction containing conflicts of interest;* 4) penjelasan mengenai kewajaran transaksi afiliasi atau transaksi tertentu yang mengandung benturan; dan *explanation regarding the fairness of the affiliated transaction or certain transaction containing conflicts of interest; and* 5) penjelasan mengenai prosedur penyelesaian transaksi afiliasi atau transaksi tertentu yang mengandung benturan. *explanation regarding the procedure for settling the affiliated transaction or certain transaction containing conflicts of interest.* Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi tertentu dilakukan oleh dan/atau antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, dijelaskan juga hubungan istimewa tersebut, termasuk pengungkapan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. *In the event that the affiliated transaction or certain transaction is carried out by and/or between parties that have special relationships, the special relationship is also explained, including the disclosure as regulated in the laws and regulations in the capital market sector.*	
h. untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi tertentu tersebut kepentingan yang memuaskan bagi pemegang saham independen, termasuk pemegang saham pengendali dan pemegang saham utama, dan pemegang saham yang memiliki hubungan istimewa dengan pemegang saham pengendali dan pemegang saham utama, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. *for the disclosure of affiliated transactions and/or certain transactions, the interests of independent shareholders, including controlling shareholders and major shareholders, and shareholders who have special relationships with controlling shareholders and major shareholders, as regulated in the laws and regulations in the capital market sector.*	
i. dalam hal terdapat transaksi afiliasi atau transaksi tertentu tersebut kepentingan, maka dengan jelas mengenai hal tersebut. *in the event that there is an affiliated transaction or certain transaction with conflicts of interest, it must clearly state regarding the matter.*	
material information (if any) among others concerning investment, expansion, divestment, merger/consolidation acquisition, restructuring, material debt/capital, transactions with related parties and transactions with conflicts of interest, that occurred during the year under review, at least including: a. *nominal and value, and object;* b. *name of the transacting parties;* c. *nature of affiliation (if any);* d. *description of the financial effect of the transaction; and* e. *compliance with relevant laws and regulations.* f. *in the event that there is an affiliation, quick but disclosing the information as mentioned in letter a to letter e, the Issuer or Public Company also discloses information that on:* (1) *a statement from the Board of Directors that the affiliated transaction has gone through adequate procedures to ensure that said transaction is carried out in accordance with generally accepted business practices, for example by with the arm's length principle; and* (2) *the role of the Board of Commissioners and the audit committee in carrying out adequate procedures to ensure that said transaction is carried out in accordance with generally accepted business practices, for example by with the arm's length principle.*	
g. *for affiliated or material transactions which are business activities which to become business scope and the normal or regularly repeatedly, public notification, and/or implementation of such affiliated deal;* *in the event that the said transaction have been disclosed in the annual financial statements, add reference to the disclosure in the said annual financial statements.*	
h. *for disclosure of affiliated transactions and/or transactions with conflicts of interest including that the implementation of such transaction that have been approved by independent shareholders, shareholders regarding the date of the GMS which approved the said transactions;*	
i. *in the event that there is an affiliated transaction and/or transaction with conflicts of interest transaction, must explain that matter.*	
16. penjelasan tentang perubahan peraturan perundang-undangan yang berdampak signifikan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan dampaknya bagi laba/rugi dan posisi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik; dan *changes in laws and regulations which have a significant effect on the Issuer or Public Company and impacts on the financial statements (if any); and*	270-320
17. pernyataan kelayakan usaha/going concern dan kemampuan membayar kepada kreditur (jika ada) *changes in the accounting policy (if any) and impact on the financial statements (if any)*	321-470

Isi/Lampiran Description	Halaman Page
g. Tata Kelola Entitas Induk/Perusahaan Publik Corporate Governance of the Issuer or Public Company	
Tata kelola Entitas Induk/Perusahaan Publik paling sedikit memuat aspek-aspek sebagai berikut. Corporate Governance of the Issuer or Public Company comprises at least:	
1. RUPS paling sedikit memuat: a. keputusan mengenai kebijakan RUPS pada tahun buku dan: 1) pada tahun sebelum tahun buku berjalan (1) kebijakan RUPS pada tahun buku dan: 1) pada tahun sebelum tahun buku yang bersangkutan pada tahun buku dan (2) kebijakan RUPS pada tahun buku dan: 1) pada tahun sebelum tahun buku yang bersangkutan berserta dasar pertimbangannya; b. alasan Entitas Induk/Perusahaan Publik menggunakan jasa kantor akuntan dalam penugasan RUPS untuk melakukan pemberian suara, bila dianggap/diperlukan oleh pihak tersebut. DAN, di bawah ini/berikut: a. informasi mengenai dan pelaksanaan RUPS tahun buku dan 1) pada tahun sebelum tahun buku berjalan (1) pelaksanaan RUPS tahun buku dan 1) pada tahun sebelum tahun buku yang bersangkutan (2) pelaksanaan RUPS tahun buku dan 1) pada tahun sebelum tahun buku yang bersangkutan berserta dasar pertimbangannya; b. alasan Entitas Induk/Perusahaan Publik menggunakan jasa kantor akuntan dalam penugasan RUPS untuk melakukan pemberian suara, bila dianggap/diperlukan oleh pihak tersebut.	435 – 451
2. Direksi, paling sedikit memuat: a. bagian dari tanggung jawab direksi yang tidak dilaksanakan oleh Direksi, alasan dan dampak dari tidak dilaksanakannya tanggung jawab tersebut terhadap kinerja Direksi dan/atau Entitas Induk/Perusahaan Publik tersebut; b. penjelasan dalam Rapat Direksi tersebut pada poin a yang dicatat dalam Risalah Rapat; c. kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan rapat terbatas anggota Direksi dalam rapat tersebut beserta jenis rapat tersebut dalam 1) RUPS, informasi kehadiran setiap anggota Direksi dalam rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, atau 1) RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel; d. pelatihan dan/atau pengembangan kompetensi anggota Direksi: (1) kebijakan pelatihan dan/atau pengembangan kompetensi anggota Direksi, dan biaya pelatihan untuk tiap anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada); dan (2) pelatihan dan/atau pengembangan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada). e. penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku paling sedikit memuat: 1) penerapan penilaian tersebut; dan 2) kriteria yang digunakan sebagai dasar penilaian yang antara lain kuantitatif dan kualitatif serta dasar hukum penilaian tersebut. f. dalam hal terdapat Direksi Perusahaan Terbuka telah memiliki komite yang membantu pelaksanaan tugas Direksi, maka dengan/atau sekurang-kurangnya hal tersebut: The Board of Directors in such a way: a. the duties not being fulfilled of each member of the Board of Directors, description of the duties not being fulfilled of such members of the Board of Directors and recommended to replace them; b. statement that the Board of Directors already has a balanced composition; c. policies and implementation of the frequency of meetings of the Board of Directors, meetings with the Board of Commissioners, and the board of directors of members of the Board of Directors in the meeting including attendance of the Board of Directors in the form of attendance of members of the Board of Directors, in the said meetings can be presented in the form; d. training and/or competency development for members of the Board of Directors: (1) policies on training and/or competency development for members of the Board of Directors, including an individual program for those appointed members in the year; and (2) training and/or competency development attended by members of the Board of Directors during the financial year in the year by the Board of Directors' assessment of the performance of the committees supporting the implementation of the Board of Directors' duties during the financial year, and at least: 1) performance appraisal is conducted; and 2) the criteria used such as performance assessment during the financial year, competencies and attendance at meetings; and e. in the event that the Issuer or Public Company does not have a committee supporting the implementation of the Board of Directors' duties, such matter is to be disclosed.	435 – 451

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

Keterangan Description	Halaman Page
f. Secara pengawas syariah Jagi Dalam atau Perusahaan Publik yang menyediakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar yang wajib memuat: a) nama; b) dasar hukum pengangkatan dalam pengawas syariah; c) periode jabatan dalam pengawas syariah; d) tugas dan tanggung jawab dalam pengawas syariah; dan e) frekuensi dan cara pendanaan rapat dan rincian lain pengawasan pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik. Sharia Supervisory Board for Issuers or Public Companies that conduct business activities in accordance with sharia principles in the articles of association, at least contains: a) name; b) legal basis of appointment; c) assignment period; d) duties and responsibilities; and e) frequency and procedure of providing advice and suggestion, as well as the implementation of sharia principles by the Issuer or Public Company in the capital market.	90%)
g. Comite audit paling sedikit memuat: a) nama dan identitas dalam kenggotaan komite; b) usia; c) kewarganegaraan; d) riwayat pendidikan; e) riwayat jabatan, meliputi informasi: (1) dalam hubungan kepemilikan dengan anggota komite; (2) dengan jabatan anak sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau atau anggota komite lain dalam hubungan yang sama; dan (3) pengalaman kerja dalam hal pernah melakukan hal di dalam ruangan di luar Emiten atau Perusahaan Publik; f) periode dan masa jabatan anggota komite audit; g) pernyataan independensi komite audit; h) potensi dan/atau pengalaman kompetensi yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu (dua) tahun; i) kehadiran dan pelaksanaan frekuensi rapat komite audit dan tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat tersebut; dan j) pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku tersebut yang disampaikan dalam pedoman atau program internal komite audit. The Audit Committee, at least consisting: a) name and position in the committee; b) age; c) citizenship; d) educational background; e) work history, including information on: (1) relationship of ownership with committee members; (2) relationship with the position of the Board of Commissioners, Board of Directors, or other committees with similar position; and (3) working experience in the past that was carried out outside the Issuer or Public Company; f) period and term of office of audit committee members; g) statement of independence of the Audit Committee; h) training and/or competency development attended during the financial year (2 years); i) attendance and implementation of the frequency of the audit committee meetings and the level of attendance of audit committees in the meetings; and j) the activities of the Audit Committee in the work plan, or assistance with the Audit Committee Charter.	92) – 93)

Keterangan Description	Halaman Page
7. Standar atau Kriteria untuk Dan Lingkup Tugas Komite Audit, yang sudah melewati	533 - 535
a. nama dan struktur dari komite audit;	
b. ruang lingkup;	
c. tata cara penunjukan;	
d. masa jabatan;	
e. anggota komite audit, yang terdiri dari:	
(1) dasar hukum pengadaan sebagai anggota komite;	
(2) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau bagi anggota komite non pihak luar, yaitu: dst	
(3) kompetensi bagi bahwa pendidikan sertifikat hak di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	
f. periode dan masa jabatan anggota komite;	
g. pemutusan hubungan kerja komite;	
h. pelatihan dan biaya pengadaan komunikasi yang telah dilakukan dalam tahun buku yang lalu;	
i. unsur bagian dan tanggung jawab;	
j. pemutusan bahwa telah memiliki pedoman atau program volunteer;	
k. kebijakan dan prosedur uji kelayakan pada dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat komite;	
l. waktu rangkaian pertemuan dan kegiatan yang telah dilakukan; dan	
m. laporan hal-hal lain dan apa bahwa yang ada dan dilaksanakan Emiten atau Perusahaan Publik sebagai tanggungjawab terhadap kelangsungan dan kesesuaian hasil kerja sampai dengan hasil dan tanggungjawab:	
(1) dapat tidak dilaksanakan sampai; dan	
(2) alih-alih yang melaksanakan tinggi sendiri dan menyerahkan.	
The committee and remuneration committee or function of the issue or Public Company, whose ownership:	
a. name and position in the committee;	
b. age;	
c. citizenship;	
d. educational background;	
e. work history, including information on:	
(1) legal basis of appointment as committee member;	
(2) concurrent positions, as a member of the Board of Commissioners, Board of Board of Directors, or the committee, and other position of any; and	
(3) working as personal and period in and outside the issuer or Public Company;	
f. period and term of office of each member of the Committee;	
g. statement of independence of the Committee;	
h. training and/or education is development attended during the financial year (if any);	
i. description of duties and responsibilities;	
j. statement that the Committee already has committee charter;	
k. policies and implementation of the frequency of the Committee meetings and the level of attendance of each member in the meetings; and	
l. brief description of the implementation of activities during the financial year; and	
m. in the event that an independent and remuneration committee is established, the issuer or Public Company is sufficient to disclose the information as referred to in letter a to letter l, and disclose:	
(1) reasons for not establishing the Committee; and	
(2) the party carrying out the nomination and remuneration functions;	

Keterangan Description	Halaman Page
h. Komite lain yang dimiliki, antara lain Perusahaan Publik sebutkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika ada), demikian juga komite yang dimiliki oleh Anak Perusahaan dan Entitas Asosiasi yang memiliki aset strategis a) nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; b) nama; c) kewarganegaraan; d) domisili pendidikan; e) riwayat jabatan, meliputi informasi: (1) dasar hukum pencalonan sebagai anggota komite; (2) lamanya jabatan, tidak sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan atau anggota komite lain dalam Grup (jika ada); dan (3) pengalaman kerja bersama periode sebelumnya baik di dalam maupun di luar Grup atau Perusahaan Publik; f) pendidikan dan/atau pelatihan anggota komite; g) pemahaman terhadap peraturan; h) pelatihan dan/atau pengembangan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan i) status hubungan dengan pemegang saham; j) pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam yang jelas; k) pelaporan dan pertanggungjawaban komite dan ringkasan kegiatan anggota komite dalam tahun buku; dan l) adanya ringkasan atau laporan kegiatan komite pada tahun buku. Other committees owned by Issuers or Public Companies in order to support the functions and duties of the Board of Directors or Board of Commissioners, including the functions and duties of the Board of Commissioners, this shall include: a) name and position in the committee; b) age; c) citizenship; d) educational background; e) work history, including information on: (1) legal basis of appointment as committee member; (2) concurrent position(s) as member of the Board of Commissioners, Board of Board of Directors, in the committee and other parties (if any); and (3) working experience both period in and outside the Issuer or Public Company; f) period and terms of office of each member of the Committee; g) description of independence of the Committee; h) training and/or competency development attended during the financial year (if any); i) description of duties and responsibilities; j) statement that the Committee already has committee charter; k) policies and implementation of the frequency of the committee meetings and the level of attendance at each meeting in the meetings; and l) brief description of the implementation of activities during the financial year; and	220 - 224
i. Sekretaris perusahaan, paling sedikit memuat: a) nama; b) domisili; c) riwayat jabatan, meliputi: (1) dasar hukum pencalonan sebagai sekretaris perusahaan; dan (2) pengalaman kerja sebelumnya sebagai ketua di dalam maupun di luar Grup atau Perusahaan Publik; d) riwayat pendidikan; e) pelatihan dan/atau pengembangan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; dan f) uraian singkat tugas dan tanggung jawab sekretaris perusahaan pada tahun buku. The Corporate Secretary, at a minimum is: a) name; b) domicile; c) work history, including information on: (1) legal basis of the appointment as the Corporate Secretary; and (2) working experience both period in and outside the Issuer or Public Company; d) educational background; e) training and/or competency development attended during the financial year; and f) brief description of the implementation of the Corporate Secretary's duties during the financial year.	104 - 106

Pelaporan Description	Halaman Page
13. Unit audit internal, paling sedikit memuat: a. nama kepala unit audit internal; b. riwayat jabatan, meliputi: (1) dasar hukum penunjukan sebagai kepala unit audit internal; dan (2) pengalaman kerja berkaitan pemeriksaan audit atau pengawasan di bidang keuangan dan Perusahaan Publik; c. kualifikasi, atau sertifikasi, sebagai profesi audit internal (jika ada); d. jumlah dan biaya pengadaan konsultan yang dibantu dalam tahun buku; e. struktur dan kedudukan unit audit internal; f. uraian tugas dan tanggung jawab; g. pernyataan bahwa kepala unit memiliki pedoman atau panduan prosedur unit audit internal; dan h. ulasan singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku termasuk kelayakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dengan Dewan Direksi dan/atau, dan/atau Komite audit. The internal Audit Unit, at least covering: a. name of Head of Internal Audit Unit; b. work history, including information on: (1) legal basis of the appointment as Head of the Internal Audit Unit; and (2) working experience and period in and outside the Issuer or Public Company; c. qualification or certification as internal auditor (if any); d. training duties completed or developed and attended during the financial year; e. structure and position of the Internal Audit Unit; f. description of duties and responsibilities; g. statement that the internal Audit Unit already has internal Audit Unit charter; and h. brief description on the implementation of duties of the Internal Audit Unit during the year under review including the actions and implementation status of frequency of meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or the Audit Committee.	551 - 555
11. Untuk mengacu kepada pengendalian internal internal control yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a. pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait; b. efisiensi atas efektivitas kinerja pengendalian internal; dan c. pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau kecukupan sistem pengendalian internal. Description on internal control system adopted by the Issuer or Public Company, at least covering: a. financial and operational control, and compliance with other prevailing laws and regulations; and b. review of the effectiveness of internal control system; c. statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the adequacy of the internal control system.	556 - 570
12. Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a. gambaran umum mengenai risiko-risiko yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik; b. jenis risiko dan cara pengelolaannya; c. kejadian atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; dan d. pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau Komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko. Risk management system implemented by the Issuer or Public Company, at least covering: a. general description of the risk management system of the Issuer or Public Company; b. risk type and management; c. review of the effectiveness of the risk management system implemented by the Issuer or Public Company; and d. statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners or the Audit Committee on the adequacy of the risk management system.	577 - 584
13. Perkara hukum yang dihadapi emiten yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Dewan dan anggota Dewan Komisaris yang aktif, paling sedikit memuat: a. jenis perkara; b. status penyelesaian perkara tersebut; dan c. pengaruhnya terhadap kondisi Emiten atau Perusahaan Publik. Legal issues with material impact faced by Issuers or Public Companies, subsidiaries, members of the Board of Directors and Board of Commissioners, if any, at least contain: a. substance of the case/claim; b. status of settlement of case/claim; and c. material impacts on the condition of the Issuer or Public Company.	623 - 630
14. informasi tentang kasus pelanggaran/sanksi yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, oleh Bursa, atau kewenangan dan otoritas lainnya pada tahun buku (jika ada). Information about violation/sanction imposed to the Issuer or Public Company, members of the Board of Commissioners and Board of Directors, by the Financial Services Authority and other authorities during the financial year (if any).	631

Keterangan Description	Halaman Page
13. Informasi mengenai kode etik Direksi atau Pernyataan Praktik lainnya.	626 - 627
a.	
b.	
c.	
Information on the code of conduct of the Board of Directors or Public Company Practice, including:	
a.	
b.	
c.	
14. Jumlah rangkap jabatan pemberian kompensasi yang terkait dengan kinerja jangka panjang, seperti opsi saham, program kepemilikan saham oleh karyawan atau program lainnya.	362
Number of concurrent positions, granting of compensation related to long-term performance, such as stock options, employee stock ownership program, or other programs.	
15. Jumlah rangkap jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang ketentuannya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.	482 - 483
Number of concurrent positions of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners as regulated in the applicable laws and regulations.	
16. Jumlah rangkap jabatan pimpinan unit pengawas (whistleblowing system) di Direksi atau Pejabat di bawah Direksi, yang mencakup:	630 - 631
a.	
b.	
c.	
d.	
e.	
Number of concurrent positions of the head of the internal audit unit in the Board of Directors or officials under the Board of Directors, including:	
a.	
b.	
c.	
d.	
e.	
17. Jumlah rangkap jabatan pimpinan unit pengawas (whistleblowing system) di Direksi atau Pejabat di bawah Direksi, yang mencakup:	631 - 632
a.	
b.	
c.	
d.	
e.	
Number of concurrent positions of the head of the internal audit unit in the Board of Directors or officials under the Board of Directors, including:	
a.	
b.	
c.	
d.	
e.	

	Halaman Page
19. Uraian mengenai kebijakan anti korupsi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a. pengertian dan jenis-jenis yang dikategori dalam mengelola praktik korupsi, kecurangan, maupun kecurangan, dan tindakan lain yang merugikan Emiten atau Perusahaan Publik; dan b. penerapan manajemen anti korupsi kepada karyawan Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disclosure dapat diberikan. A description of the anti-corruption policy of the issuer or Public Company, at least containing: a. programs and procedures implemented in dealing with corrupt practices, misbehavior, fraud, failures, and/or gratuities in the issuer or Public Company; and b. anti-corruption training/socialization to employees of the issuer or Public Company. In the event that the issuer or Public Company does not have an anti-corruption policy, the disclosure for point/paragraph such matters shall be made/given.	300 - 311
20. Kebijakan atau pedoman internal Perusahaan Terkendali Emiten yang mewajibkan alat investasi dimiliki atau Perusahaan Publik, meliputi: a. pemenuhan manajemen rekomendasi yang telah ditindaklanjuti; dan/atau b. pedoman atau referensi lain yang telah ditindaklanjuti, dan/atau bisnis dan alternatif pelaksanaannya [jika ada] Pengungkapan informasi dapat dilaporkan dalam bentuk tabel. Implementation of the Guidelines for Corporate Governance of Public Companies for issuers including equity-based securities or by Public Companies, including: a. a statement regarding recommendations that have been implemented; and/or b. description of recommendations that have not been implemented, along with the reasons and alternative implementations (if any). Disclosure of information may be presented in tabular form.	312 - 313
V. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik **Social and Environmental Responsibility of Issuers or Public Companies**	
1. informasi yang diungkapkan dalam laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan mengacu Laporan keberlanjutan (sustainability Report), sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 3/POJK.04/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a. pendahuluan strategi keberlanjutan; b. aktivitas utama berkelanjutan terkaitan sosial dan lingkungan hidup; c. profil singkat Emiten atau Perusahaan Publik; d. penjelasan Direksi; e. visi misi keberlanjutan; f. tata kelola keberlanjutan; g. sumber daya manusia; h. interaksi dengan dan pengembangan pihak eksternal; i. tanggung jawab terhadap konsumen; j. tanggung jawab terhadap lingkungan hidup; dan k. tanggung jawab terhadap sosial dan kemasyarakatan. The information disclosed in the report on environmental responsibility (referred to as Sustainability Report) as referred to in the Financial Services Authority Regulation Number 51/POJK.03/2017 on Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies, at a minimum includes: a. explanation of the sustainability strategy; b. main activities of sustainability aspects (economic, social, and environmental); c. profile of the issuer or Public Company; d. explanation of the Board of Directors; e. sustainability governance; f. sustainability performance; g. human resources; h. engagement and development of external parties; i. responsibility to consumers; j. responsibility to the environment; and k. responsibility to social and community.	223-227 Laporan Keberlanjutan / Sustainability Report
2. Laporan keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 1) harus disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Laporan Keberlanjutan bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direksi ini dan dengan ini. The Sustainability Report as referred to in number 1) shall be prepared in accordance with the Financial Services Authority Regulation on the Preparation of Sustainability Reports for Issuers and Public Companies as contained in Appendix I which is an integral part of this Circular Letter of the Board of Directors.	227 Laporan Keberlanjutan / Sustainability Report

Keterangan Description	Halaman Page
6. Informasi Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) pada angka 1) dapat:	626-627
a) disediakan pada bagian lain dari penjelasan dalam bagian tersebut atau dalam lampiran, seperti penjelasan Direksi terkait Laporan Keberlanjutan disajikan dalam bagian terkait Laporan Direksi; dan/atau	Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report)
b) merupakan bagian dari dokumen tersendiri yang disediakan bersama dengan Laporan Tahunan, seperti Formulir Bentuk Pertanyaan Kepada Perusahaan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.	
Information in the Sustainability Report in number 1) can:	
a) be provided in other relevant sections within the Annual Report, such as the Board of Directors' explanation regarding the Sustainability Report is disclosed in the section related to the Board of Directors' Report; and/or	
b) be in other documents separate from the Annual Report and provided together with the Annual Report, such as the Questionnaire Guidelines for the Preparation of Sustainability Reports for Issuers and Public Companies as stated in Appendix I which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter, such as the profile of the issuer or Public Company.	
7. Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) sebagaimana dimaksud pada angka 1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan namun dapat disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan.	626-627
The Sustainability Report as referred to in number 1) is an inseparable part of the Annual Report but can be presented separately from the Annual Report.	Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report)
8. Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, informasi yang disampaikan dalam Laporan Keberlanjutan disebutkan pada:	626-627
a) ikhtisar keuangan penting (important financial highlights) pada angka 1); dan	Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report)
b) Laporan Direksi Perihal Tanggung Jawab atas Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.	
In the event that the Sustainability Report is presented separately from the Annual Report, the information disclosed in the Sustainability Report such:	
a) number of key information is referred to in number 1); and	
b) the preparation in accordance with the Financial Statements for the Preparation of a Sustainability Report for Issuers and Public Companies as stated in Appendix I which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter.	
9. Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, entitas dapat tidak mengungkapkan kembali informasi sebagaimana dimaksud pada angka 2) sepanjang informasi tersebut telah diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan.	627
In the event that the Sustainability Report is presented separately from the Annual Report, the Issuer and Environmental, Social and Governance (ESG) information as mentioned in number 2) does not need to be disclosed in the Sustainability Report which is presented separately from the Annual Report.	Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report)
10. Penyimpangan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) yang disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan harus diungkapkan termasuk alasan penyimpangan Laporan Tahunan.	627
The separate Sustainability Report must be submitted together with the Annual Report.	Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report)
J. Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit *Audited Annual Financial Statements*	
Laporan keuangan tahunan yang diaudit dalam Laporan Tahunan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Laporan keuangan tahunan diterbitkannya pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan dan laporan keuangan konsolidasi dalam aspek material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas anak dan entitas asosiasi yang diinvestasikan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, dan laporan keuangan yang telah diaudit harus disampaikan dalam bahasa Indonesia.	628-817
Financial Statements in the Annual Report should be prepared in accordance with the Indonesian Accounting Standards in Indonesia and have been audited by a public accountant registered in the Financial Services Authority. The opinion and conclusion include an accountability statement for the financial statements as stipulated in the Financial Services Authority Regulations on the responsibility of the Board of Directors in the Annual Report, as stipulated in the Capital Market rules governing the periodic reports of securities issuers in the and Directors in a Securities Company.	
K. Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan *Statement of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners regarding Responsibility for the Annual Report*	
Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan disusun sesuai dengan format surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.	123 - 125
Statement of members of the Board of Directors and Board of Commissioners regarding the responsibility for the Annual Report is prepared according to the format as attached in the Appendix I, which is an integral part of this Circular Letter of the Financial Services Authority.	

DRIVING **ENERGY TRANSITION** TO DELIVERING **VALUE CREATION EXCELLENCES**

Mendorong Percepatan Transisi Energi untuk Memberikan Value Creation Terbaik

PLN Nusantara Power

Kantor Pusat (Head Office)
Jl. Ketintang Baru No. 33
Surabaya 60231
Jawa Timur, Indonesia

Kantor Jakarta (Jakarta Office)
GI Office Park Lt. 2 A&C21
Jl. TB Simatupang No. 38
DKI Jakarta, Indonesia

+62 31 8300 100
+62 31 8300 101
info@plnnusantarapower.co.id
www.plnnusantarapower.co.id